



ꦑꦸꦁꦫꦸꦤ꧀ ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂ ꦱꦸꦭꦮꦺꦱꦶ ꦱꦺꦭꦠꦤ
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

2024

RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NO 23 TAHUN 2023
TENTANG RKPD PROV.SULSEL
TAHUN 2024**





GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (Tiga) Tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah rencana keuangan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah bahwa RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai:
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah; dan
 - c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 8 (delapan) bab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III, tidak memproyeksikan alokasi transfer alokasi dana khusus sehingga apabila terdapat

ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD Tahun 2024 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada perubahan RKPD Tahun 2024.

- (5) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab IV.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan acuan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja setiap program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana

Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 27 Juni 2023

Plh. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

A. DARMAWAN BINTANG

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN,

A. DARMAWAN BINTANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan I – 1

1.1. Latar Belakang I – 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I – 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen I – 8

1.4. Maksud dan Tujuan..... I – 9

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD I – 10

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah II – 1

2.1. Kondisi Gambaran Umum II – 1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi..... II – 1

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan..... II – 1

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana..... II – 6

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah II – 9

2.1.1.4. Kondisi Demografi..... II – 16

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II – 18

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II – 18

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi..... II – 18

2.2.1.2. Laju Infansi II – 25

2.2.1.3. PDRB Perkapita II – 25

2.2.1.4. Indeks Gini..... II – 26

2.2.1.5. Indeks Wiliamson II – 29

2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan II – 29

2.2.1.7. Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB..... II – 35

2.2.1.8. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB II – 36

2.2.1.9. Produksi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB II – 36

2.2.1.10. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB II – 37

2.2.1.11. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB II – 37

2.2.1.12. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB II – 38

2.2.1.13. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap Terhadap PDRB Sektor Industri II – 38

2.2.1.14. Pertumbuhan PDRB Industri..... II – 38

2.2.1.15. Sektor Industri Pengolahan Non Migas.. II – 39

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial II – 39

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia..... II – 39

2.2.2.2. Indeks Pendidikan II – 47

2.2.2.3. Angka Melek Huruf..... II – 48

2.2.2.4. Indeks Kesehatan..... II – 50

2.2.2.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II – 51
2.2.2.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..	II – 54
2.2.2.7.	Rasio Penduduk Yang Bekerja.....	II – 57
2.2.2.8.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja.....	II – 59
2.2.2.9.	Indeks Pelayanan Publik.....	II – 59
2.2.2.10.	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	II – 60
2.2.2.11.	Indeks Pemberdayaan Gender)IDG)	II – 61
2.2.2.12.	Indeks Reformasi Birokrasi	II – 64
2.2.2.13.	Nilai SAKIP Provinsi	II – 65
2.2.2.14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II – 65
2.2.2.15.	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	II – 66
2.2.3.	Seni Budaya dan Olah Raga	II – 67
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II – 68
2.3.1.	Pelayanan Urusan Wajib Dasar.....	II – 68
2.3.1.1.	Pendidikan	II – 68
2.3.1.2.	Kesehatan	II – 81
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..	II – 92
2.3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II – 99
2.3.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II – 110
2.3.1.6.	Sosial.....	II – 116
2.3.2.	Palayanan Urusan Wajib Non Dasar	II – 118
2.3.2.1.	Ketenagakerjaan	II – 118
2.3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II – 122
2.3.2.3.	Pangan.....	II – 126
2.3.2.4.	Pertanahan	II – 128
2.3.2.5.	Lingkungan Hidup	II – 130
2.3.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II – 133
2.3.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	II – 144
2.3.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II – 147
2.3.2.9.	Perhubungan.....	II – 149
2.3.2.10.	Komunikasi dan Informatika	II – 153
2.3.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah....	II – 155
2.3.2.12.	Penanaman Modal dan Investasi.....	II – 158
2.3.2.13.	Kepemudaaan dan Olah Raga	II – 161
2.3.2.14.	Statistik.....	II – 163
2.3.2.15.	Persandian.....	II – 164
2.3.2.16.	Kebudayaan	II – 164
2.3.2.17.	Perpustakaan.....	II – 166
2.3.2.18.	Kearsipan.....	II – 168

2.3.3.	Layanan Urusan Pilihan	II – 169
2.3.3.1.	Pariwisata	II – 169
2.3.3.2.	Pertanian.....	II – 173
2.3.3.3.	Peternakan	II – 176
2.3.3.4.	Kehutanan.....	II – 180
2.3.3.5.	Energi dan Sumber daya Mineral	II – 183
2.3.3.6.	Perdagangan	II – 187
2.3.3.7.	Perindustrian.....	II – 188
2.3.3.8.	Transmigrasi.....	II – 190
2.3.3.9.	Keluatan dan Perikanan	II – 191
2.3.4.	Penunjang Urusan	II – 198
2.3.4.1.	Sekretariat Daerah	II – 198
2.3.4.2.	Sekretariat Dewan	II – 204
2.3.4.3.	Perencanaan Pembangunan	II – 205
2.3.4.4.	Keuangan.....	II – 206
2.3.4.5.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II – 212
2.3.4.6.	Penelitian dan Pengembangan	II – 214
2.3.4.7.	Pengawasan	II – 215
2.3.4.8.	Pengelolaan Penghubung	II – 217
2.3.4.9.	Pemerintahan Umum	II – 218
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II – 219
2.4.1.	Indeks Layanan Infrastruktur.....	II – 219
2.4.2.	Produktivitas Total Daerah.....	II – 220
2.4.3.	Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Perkapita	II – 221
2.4.4.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita.....	II – 222
2.4.5.	Nilai Tukar Petani.....	II – 222
2.4.6.	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	II – 223
2.4.7.	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	II – 224
2.4.8.	Rasio Ketergantungan	II – 225
2.4.9.	Angka Kriminalitas.....	II – 226
2.5.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah	II – 227
2.5.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2022	II – 227
2.5.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 231
2.5.3.	Capaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II – 248
2.5.4.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II – 250

2.5.5. Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)	II – 319
2.6. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan.....	II – 345
2.7. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2022	II – 354
2.8. Permasalahan Pembangunan	II – 411
2.8.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II – 411
2.8.1.1. Tata Kelola Pemerintah Yang Belum Optimal	II – 411
2.8.1.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Belum Optimal.....	II – 412
2.8.1.3. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Belum Optimal.....	II – 412
2.8.1.4. Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah Belum Optimal.....	II – 413
2.8.1.5. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	II – 413
2.8.1.6. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran.	II – 413
2.8.1.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi masih dibawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	II – 414
2.8.1.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih Lebih Rendah dibanding Capaian Nasional.....	II – 414
2.8.1.9. Indeks Pembangunan Gender.....	II – 415
2.8.1.10. Menurunnya Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	II – 416
2.8.2. Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)	II – 417
2.8.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....	II – 417
2.8.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan dasar	II – 418
2.8.2.3. Urusan Pemerintah Pilihan	II – 420
2.8.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan	II – 422
2.9. Isu Strategis	II – 423
2.9.1. Isu Strategis Global.....	II – 423
2.9.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDG's)	II – 423
2.9.1.2. Konflik Rusia dan Ukraina	II – 424
2.9.1.3. Perubahan Iklim.....	II – 425
2.9.1.4. Krisis Energi Global	II – 425
2.9.1.5. Transformasi Digital.....	II – 426

2.9.2.	Isu Strategis Nasional.....	II – 427
2.9.2.1.	Standar Pelayanan Umum	II – 427
2.9.2.2.	Bonus Demografi	II – 428
2.9.2.3.	Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	II – 429
2.9.3.	Isu Strategis Daerah.....	II – 430
2.9.3.1.	Penguatan Peran Sebagai Lumbung Pangan Nasional.....	II – 430
2.9.3.2.	Memantapkan Peran Sebagai hub dan Pintu Gerbang Perdagangan Internasional di Kawasan Timur	II – 430
2.9.3.3.	Transformasi Perekonomian Wilayah Menjadi Basis Hilirisasi Komoditas Unggulan Wilayah.....	II – 431
2.9.3.4.	Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	II – 432
2.9.3.5.	Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Kegiatan Perekonomian.....	II – 433
2.10.	Inovasi Daerah	II – 433

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

	Keuangan Daerah.....	III – 1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.1.1.	Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah.....	III – 2
3.1.1.1.	Prospek Perekonomian Daerah	III – 2
3.1.1.2.	Tantangan Perekomian Global	III – 3
3.1.1.3.	Tantangan Perekomian Nasional	III – 4
3.1.1.4.	Tantangan Perekomian Daerah.....	III – 6
3.1.1.4.1.	Pertumbuhan Ekonomi.....	III – 6
3.1.1.4.2.	Inflansi.....	III – 9
3.1.1.4.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	III – 10
3.1.1.4.4.	Kemiskinan	III – 11
3.1.1.4.5.	Gini Rasio.....	III – 12
3.1.2.	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024.....	III – 13
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 15
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 16
3.2.2.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2021-2024.....	III – 18
3.2.3.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III – 20
3.2.3.1.	Belanja Operasi.....	III – 21
3.2.3.2.	Belanja Modal.....	III – 23
3.2.3.3.	Belanja Tidak Terduga.....	III – 23
3.2.3.4.	Belanja Trasfer.....	III – 24
3.2.4.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 28
3.2.5.	Pendanaan Pembangunan Lainnya	III – 30
3.2.5.1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	III – 30

3.2.5.2. Corporate Social Responsibility
(Program Kemitraaan dan Bina
Lingkungan (PKBL) dan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL)) III – 30

3.2.5.3. Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) III – 38

3.2.5.4. Pembiayaan Utang Daerah III – 39

BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun

2024 IV – 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV – 2

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 IV – 5

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV – 5

4.2.1.1. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan
Strategis Pembangunan Tema Pembangunan. IV – 5

4.2.1.2. Prioritas Nasional IV – 8

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2023 IV – 13

4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun
2024 IV – 22

4.2.3.1. Strategi Pembangunan Tahun 2024 IV – 22

4.2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 IV – 48

4.3. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan
Tahun 2024 IV – 58

4.3.1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024
dengan Sasaran RPD IV – 58

4.3.2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV – 88

4.4. Pokok – pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan IV – 107

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V – 1

5.1. Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan V – 4

5.1.1. Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya .. V – 7

5.1.2. Pembangunan Kawasan Bulukumba dan
Sekitarnya V – 9

5.1.3. Pembangunan Kawasan Watampone dan
Sekitarnya V – 10

5.1.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya ... V – 11

5.1.5. Pembangunan Kawasan Palopo dan Sekitarnya V – 12

5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan V – 13

5.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Wilayah Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun
2024 V – 14

5.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Bulukumba
dan Sekitarnya Tahun 2024 V – 15

5.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Watampone dan Sekitarnya Tahun 2024	V – 17
5.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Parepare dan Sekitarnya Tahun 2024	V – 18
5.2.5. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Palopo dan Sekitarnya Tahun 2024.....	V – 19
5.3. Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	V – 21
5.3.1. Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya	V – 22
5.3.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya	V – 23
5.3.3. Sasaran Pembangunan Kawasan Watampone dan Sekitarnya	V – 24
5.3.4. Sasaran Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya	V – 26
5.3.5. Sasaran Pembangunan Kawasan Palopo dan Sekitarnya	V – 27
BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	VI – 1
6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024.....	VI – 1
6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	VI – 2
6.3. Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	VI – 23
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VI – 1
7.1. Indikator Makro Pembangunan.....	VI – 1
7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI – 4
7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI – 5
7.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VI – 35
7.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	VI – 39
BAB VIII Penutup	VIII – 1
8.1. Kaidah Pelaksanaan.....	VIII – 1
8.2. Kesimpulan	VIII – 3

Daftar Tabel

Tabel II.1.	Data Luas Wilayah Adminstrasi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	II – 2
Tabel II.2.	Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan .	II – 3
Tabel II.3.	Kondisi Topografi Provinsi Sulawesi Selatan	II – 4
Tabel II.4.	Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 6
Tabel II.5.	Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 7
Tabel II.6.	Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 14
Tabel II.7.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 16
Tabel II.8.	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 17
Tabel II.9.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 18
Tabel II.10.	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 19
Tabel II.11.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 22
Tabel II.12.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022....	II – 22
Tabel II.13.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selata, Tahun 2018 – 2022.....	II – 23
Tabel II.14.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 23
Tabel II.15.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 24
Tabel II.16.	Perbandingan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	II – 25
Tabel II.17.	PDRB PerKapita Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Perkapita (ADHB) dan Nasional 2018 – 2022	II – 26
Tabel II.18.	Perekmbangan Indeks Gini Tahun 2010 – 2022	II – 27
Tabel II.19.	Indeks Wiliamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 29
Tabel II.20.	Tingkat Kemiskinan Tahun 2018 – 2022	II – 30
Tabel II.21.	Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018 – 2022	II – 32

Tabel II.22.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 32
Tabel II.23.	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2018 – 2022.	II – 33
Tabel II.24.	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2018 – 2022.	II – 33
Tabel II.25.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022.....	II – 36
Tabel II.26.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 36
Tabel II.27.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 36
Tabel II.28.	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 37
Tabel II.29.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 37
Tabel II.30.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 38
Tabel II.31.	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 38
Tabel II.32.	Pertumbuhan PDRB Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 39
Tabel II.33.	Sektor Industri Pengolahan Non Migas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 39
Tabel II.34.	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan dengan Nasional 2018-2022.....	II – 40
Tabel II.35.	Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 40
Tabel II.36.	Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 48
Tabel II.37.	Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun keatas Sulawesi Selatan dan Nasional, 2018 – 2022.....	II – 49
Tabel II.38.	Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 50
Tabel II.39.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 – 2022.....	II – 52
Tabel II.40.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 54
Tabel II.41.	Perbandingan Rasio penduduk bekerja (Periode Agustus) Di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	II – 58
Tabel II.42.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 59

Tabel II.43.	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 60
Tabel II.44.	Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 60
Tabel II.45.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018 – 2022	II – 61
Tabel II.46.	Indeks Reformasi Birokrasi	II – 65
Tabel II.47.	Nilai SAKIP Provinsi.....	II – 65
Tabel II.48.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II – 66
Tabel II.49.	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq) Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2022	II – 67
Tabel II.50.	Perkembangan Seni Budaya dan Olah raga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021	II – 67
Tabel II.51.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota jenjang SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021	II – 69
Tabel II.52.	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	II – 70
Tabel II.53.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022	II – 71
Tabel II.54.	Angka Anak Tidak Sekolah dan Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 72
Tabel II.55.	Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA dan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 76
Tabel II.56.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 64 Tahun Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 – 2022	II – 76
Tabel II.57.	Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 77
Tabel II.58.	Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 78
Tabel II.59.	Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 78
Tabel II.60.	Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 79
Tabel II.61.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 80
Tabel II.62.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 87
Tabel II.63.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 90

Tabel II.64.	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022....	II – 92
Tabel II.65.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 98
Tabel II.66.	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 104
Tabel II.67.	Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 105
Tabel II.68.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 109
Tabel II.69.	Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2020.....	II – 112
Tabel II.70.	Data Terdampak Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 113
Tabel II.71.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 115
Tabel II.72.	Capaian Kinerja Program Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 117
Tabel II.73.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 121
Tabel II.74.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 122
Tabel II.75.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 122
Tabel II.76.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 125
Tabel II.77.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 128
Tabel II.78.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 129
Tabel II.79.	Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 130
Tabel II.80.	Kapasitas dan Pengoperasian TPA Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 131
Tabel II.81.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 132

Tabel II.82.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 142
Tabel II.83.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 144
Tabel II.84.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 147
Tabel II.85.	Indikator Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 148
Tabel II.86.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II - 149
Tabel II.87.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 153
Tabel II.88.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 155
Tabel II.89.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 157
Tabel II.90.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 161
Tabel II.91.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 163
Tabel II.92.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 164
Tabel II.93.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 164
Tabel II.94.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 166
Tabel II.95.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 168
Tabel II.96.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Kerasipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 169
Tabel II.97.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 172

Tabel II.98.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 173
Tabel II.99.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Pertanaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 175
Tabel II.100.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 180
Tabel II.101.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 182
Tabel II.102.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 186
Tabel II.103.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 188
Tabel II.104.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 190
Tabel II.105.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 191
Tabel II.106.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 197
Tabel II.107.	Segmen Batas yang Terselesaikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 199
Tabel II.108.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 203
Tabel II.109.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 205
Tabel II.110.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 206
Tabel II.111.	Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 209
Tabel II.112.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 210
Tabel II.113.	IKM Pelayanan Pajak Kendaraan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 211
Tabel II.114.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II – 211

Tabel II.115.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 214
Tabel II.116.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 215
Tabel II.117.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Pengawasan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 216
Tabel II.118.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Pengelolaan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 217
Tabel II.119.	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Urusan Pemerintahan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 219
Tabel II.120.	Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021	II – 220
Tabel II.121.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 220
Tabel II.122.	Produktifitas Total Daerah Tahun 2018 – 2022	II – 221
Tabel II.123.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 221
Tabel II.124.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 221
Tabel II.125.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 222
Tabel II.126.	Nilai Tukar Petani (NTP) Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 – 2022	II – 223
Tabel II.127.	Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 223
Tabel II.128.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.....	II – 224
Tabel II.129.	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 224
Tabel II.130.	Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022	II – 225
Tabel II.131.	Angka Kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 226
Tabel II.132.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2022	II – 228
Tabel II.133.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022	II – 232
Tabel II.134.	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022	II – 248
Tabel II.135.	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022	II – 251

Tabel II.136.	Capaian Kinerja Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022.....	II – 320
Tabel II.137.	Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Berdasarkan 4 Pilar Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022	II – 353
Tabel II.138.	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD Tahun 2022.....	II – 356
Tabel II.139.	Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD Tahun 2022.....	II – 361
Tabel II.140.	Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022.....	II – 366
Tabel II.141.	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 373
Tabel II.142.	Capaian Sub Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 379
Tabel II.143.	Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2022.....	II – 383
Tabel II.144.	Review Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 386
Tabel II.145.	Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	II – 404
Tabel II.146.	Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	II – 408
Tabel II.147.	Daftar Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021	II – 434
Tabel III.1.	Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2022	III – 8
Tabel III.2.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019.....	III – 19
Tabel III.3.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-2025	III – 20
Tabel III.4.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021- 2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019	III – 26
Tabel III.5.	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021– 2025	III – 29
Tabel III.6.	Mitra Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Mendukung Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan.....	III – 30

Tabel IV.1.	Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026	IV – 3
Tabel IV.2.	Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024.....	IV – 14
Tabel IV.3.	Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV – 17
Tabel IV.4.	Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024.....	IV – 20
Tabel IV.5.	Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV – 34
Tabel IV.6.	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024.....	IV – 48
Tabel IV.7.	Penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024	IV – 49
Tabel IV.8.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan tahun 2024 dengan sasaran RPD Tahun 2024	IV – 59
Tabel IV.9.	Kegiatan Prioritas Pembangunan tahun 2024	IV – 62
Tabel IV.10.	Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV – 88
Tabel IV.11.	Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024..	IV – 90
Tabel IV.12.	Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2024	IV – 94
Tabel V.1.	Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2024....	V – 3
Tabel V.2.	Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Makassar dan sekitarnya Tahun 2022	V – 8
Tabel V.3.	Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten pada Kawasan Bulukumba dan sekitarnya Tahun 2022.....	V – 9
Tabel V.4.	Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten pada Kawasan Watampone dan sekitarnya Tahun 2022.....	V – 10
Tabel V.5.	Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Parepare dan sekitarnya Tahun 2022.....	V – 11
Tabel V.6.	Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo dan sekitarnya Tahun 2022	V – 12
Tabel V.7.	Indikator Makro Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	V – 21
Tabel V.8.	Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Pembangunan Makassar Tahun 2024	V – 22
Tabel V.9.	Sasaran Pembangunan Kabupaten Kawasan Pembangunan Bulukumba Tahun 2024	V – 24
Tabel V.10.	Sasaran Pembangunan Kabupaten Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2024.....	V – 25
Tabel V.11.	Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Kota Kawasan Pembangunan Parepare Tahun 2024.....	V – 26
Tabel V.12.	Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Kota Kawasan Pembangunan Palopo Tahun 2024.....	V – 28

Tabel VI.1.	Rincian Kerangka Pendanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan n Tahun 2024.....	VI – 1
Tabel VI.2.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024	VI – 4
Tabel VI.3.	Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Di sertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	VI – 24
Tabel VII.1.	Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023	VII – 2
Tabel VII.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama 2022, Perkiraan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	VII – 4
Tabel VII.3.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan.....	VII – 6
Tabel VII.4.	Penetapan Target Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Permendagri No 59 Tahun 2021) .	VII – 36

Daftar Grafik

Grafik II.1.	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 19
Grafik II.2.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022.....	II – 20
Grafik II.3.	Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 22
Grafik II.4.	Perbandingan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022	II – 26
Grafik II.5.	Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 27
Grafik II.6.	Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022.....	II – 28
Grafik II.7.	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 29
Grafik II.8.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 30
Grafik II.9.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022.....	II – 31
Grafik II.10.	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota	II – 31
Grafik II.11.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 34
Grafik II.12.	Pengelompokan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 35
Grafik II.13.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 40
Grafik II.14.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..	II – 41
Grafik II.15.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 42
Grafik II.16.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan RLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..	II – 42
Grafik II.17.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 43
Grafik II.18.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan HLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..	II – 44
Grafik II.19.	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 44
Grafik II.20.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..	II – 45
Grafik II.21.	Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 45
Grafik II.22.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 46

Grafik II.23.	Perbandingan IPM Regional Sulawesi Tahun 2022.....	II – 47
Grafik II.24.	Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022	II – 47
Grafik II.25.	Perkembangan Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 48
Grafik II.26.	Perkembangan Angka Melek Huruf Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 49
Grafik II.27.	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 50
Grafik II.28.	Perkembangan Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 51
Grafik II.29.	Dimensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20.....	II – 52
Grafik II.30.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 53
Grafik II.31.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..	II – 53
Grafik II.32.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 54
Grafik II.33.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..	II – 55
Grafik II.34.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..	II – 56
Grafik II.35.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022.....	II – 56
Grafik II.36.	Rasio Penduduk yang Bekerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 57
Grafik II.37.	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 57
Grafik II.38.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Rasio Penduduk Bekerja dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 58
Grafik II.39.	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Pelayanan Institusi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 61
Grafik II.40.	Perbandingan IPM Laki-laki dan IPM Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 62
Grafik II.41.	Dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 62
Grafik II.42.	Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 64
Grafik II.43.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 68
Grafik II.44.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 69

Grafik II.45.	Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 70
Grafik II.46.	Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 71
Grafik II.47.	Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 72
Grafik II.48.	Perkembangan Angka Anak Tidak Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 73
Grafik II.49.	Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 73
Grafik II.50.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Anak Usia 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Bersekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 74
Grafik II.51.	Angka Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 74
Grafik II.52.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Putus Sekolah (APtS) dan Angka Melanjutkan (AM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..	II – 75
Grafik II.53.	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan SMA/SMK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 77
Grafik II.54.	Pendidik Pada Jenjang SMA dan SMK yang Memiliki Ijazah $\geq$ S1 dan Bersertifikat Pendidik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 80
Grafik II.55.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 82
Grafik II.56.	Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 82
Grafik II.57.	Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 83
Grafik II.58.	Perbandingan Angka Stunting Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain Di Indonesia Tahun 2022	II – 84
Grafik II.59.	Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 84
Grafik II.60.	Perbandingan Prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasting) Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022	II – 85
Grafik II.61.	Perbandingan Prevalensi Balita Gizi Kurang (Underweight) Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022.....	II – 85
Grafik II.62.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasting) dan Gizi Kurang (Underweight) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 86
Grafik II.63.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 86
Grafik II.64.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..	II – 93

Grafik II.65.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Termasuk Aman dan Melalui Jaringan Perpipaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022	II – 94
Grafik II.66.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 95
Grafik II.67.	Kemantapan Jalan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 97
Grafik II.68.	Persentase Panjang Jalan Terisolir pada Ruas Jalan Provinsi yang Terakses Roda Empat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022	II – 98
Grafik II.69.	Perbandingan Capaian Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II – 100
Grafik II.70.	Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Berdasarkan Komponen Kelayakan di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 101
Grafik II.71.	Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..	II – 102
Grafik II.72.	Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 102
Grafik II.73.	Pengelompokan Rasio Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 103
Grafik II.74.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 103
Grafik II.75.	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 106
Grafik II.76.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 108
Grafik II.77.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 108
Grafik II.78.	Rumah Tangga yang masih BABs Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..	II – 109
Grafik II.79.	Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana	II – 111
Grafik II.80.	Peningkatan Kesempatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022	II – 119
Grafik II.81.	Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..	II – 119
Grafik II.82.	Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 120
Grafik II.83.	Sebaran Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 127
Grafik II.84.	Penduduk Ber-KTP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 134
Grafik II.85.	Penerbitan KTP-el Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 136
Grafik II.86.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..	II – 137
Grafik II.87.	Bayi Berakta Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 137

Grafik II.88.	Bayi Ber Akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 138
Grafik II.89.	Pasangan Ber Akte Nikah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 139
Grafik II.90.	Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 140
Grafik II.91.	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 141
Grafik II.92.	Akta Kematian yang Diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 141
Grafik II.93.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 143
Grafik II.94.	Jumlah Desa Status “Desa Mandiri” Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..	II – 145
Grafik II.95.	Jumlah Desa Status “Desa Tertinggal” Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..	II – 146
Grafik II.96.	Jumlah PKK dan Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022..	II – 146
Grafik II.97.	Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 148
Grafik II.98.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 150
Grafik II.99.	Perbandingan Nilai Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022....	II – 154
Grafik II.100.	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022.....	II – 156
Grafik II.101.	Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 156
Grafik II.102.	Jumlah UMKM yang Difasilitasi Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 157
Grafik II.103.	Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 159
Grafik II.104.	Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 159
Grafik II.105.	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 160
Grafik II.106.	Jumlah Gedung Olahraga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 162
Grafik II.107.	Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 162
Grafik II.108.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 167
Grafik II.109.	Jumlah Perpustakaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 167
Grafik II.110.	Peningkatan SDM Pengelola Arsip Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 169
Grafik II.111.	Jumlah Destinasi Wisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 170

Grafik II.112. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 171
Grafik II.113. Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022	II – 174
Grafik II.114. Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022	II – 176
Grafik II.115. Produksi Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 177
Grafik II.116. Populasi Ternak Besar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 177
Grafik II.117. Populasi Ternak Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022.....	II – 178
Grafik II.118. Populasi Ternak Unggas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022.....	II – 178
Grafik II.119. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 181
Grafik II.120. Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 183
Grafik II.121. Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 183
Grafik II.122. Rumah Tangga Pengguna Listrik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..	II – 184
Grafik II.123. Persentase Desa Berlistrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 184
Grafik II.124. Rumah Tangga Pengguna Gas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 186
Grafik II.125. Nilai Ekspor Perdagangan (US \$) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 188
Grafik II.126. Perkembangan Jumlah Industri Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 189
Grafik II.127. Jumlah Industri Kecil Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 189
Grafik II.128. Nilai Produksi Perikanan (Milyar Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 192
Grafik II.129. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 193
Grafik II.130. Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 194
Grafik II.131. Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 194
Grafik II.132. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 195
Grafik II.133. Nilai Hilirisasi dan Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022....	II – 196
Grafik II.134. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Melek Aksara Al-Qur'an Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 200

Grafik II.135. Realisasi Pendapatan pada UPT Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 210
Grafik II.136. Perbandingan NTP Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 223
Grafik II.137. Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	II – 226
Grafik II.138. Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	II – 352
Grafik II.139. Konsistensi Program Antar dokumen Tahun 2022	II – 360
Grafik III.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	III – 7
Grafik III.2. PDRB Perkapita Sulawesi Selatan, Capaian 2022, Perkiraan 2023 dan Target 2024	III – 9
Grafik III.3. Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024	III – 10
Grafik III.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024.....	III – 11
Grafik III.5. Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024....	III – 12
Grafik III.6. Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024.....	III – 13

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	I – 8
Gambar I.2.	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran.....	I – 9
Gambar II.1.	Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	II – 1
Gambar II.2.	Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan	II – 3
Gambar II.3.	Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 4
Gambar II.4.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan.....	II – 5
Gambar II.5.	Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	II – 10
Gambar III.1.	Kerangka Pikir dan Tema RKP Tahun 2024	III – 14
Gambar III.2.	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024.....	III – 14
Gambar III.3.	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	III – 15
Gambar V. 1.	Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi Tahun 2024	V – 3
Gambar V. 2.	Wilayah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan.....	V – 4
Gambar V. 3.	Arah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan.....	V – 7
Gambar V. 4.	Arah Pengembangan Kawasan Makassar dan sekitarnya, Tahun 2024	V – 15
Gambar V. 5.	Arah Pengembangan Kawasan Bulukumba Tahun dan sekitarnya 2024	V – 16
Gambar V. 6.	Arah Pengembangan Kawasan Watampone Tahun dan sekitarnya 2024	V – 18
Gambar V. 7.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kawasan Parepare dan sekitarnya Tahun 2024.....	V – 19
Gambar V. 8.	Arah Pengembangan Kawasan Palopo dan sekitarnya, Tahun 2024	V – 21

Daftar Diagram

Diagram II.1.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022	II – 20
Diagram II.2.	Perbandingan Indeks Gini Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022.....	II – 28
Diagram II.3.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dengan Regional Sulawesi Tahun 2022	II – 55
Diagram II.4.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 87
Diagram II.5.	Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 92
Diagram II.6.	Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 96
Diagram II.7.	Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 134
Diagram II.8.	Penerbitan KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 135
Diagram II.9.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 136
Diagram II.10.	Pasangan Ber Akte Nikah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 139
Diagram II.11.	Jumlah Desa Berdasarkan Status Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 145
Diagram II.12.	Jumlah Penumpang Angkutan Laut, Udara, dan Darat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	II – 151
Diagram II.13.	Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan (m3) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 181

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan serta politik sampai pada perkembangan adanya penyesuaian dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka harus mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas;
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta target akhir RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 akan fokus pada pencapaian target akhir Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang Dalam RPJMD dengan fokus pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,09%, Tingkat Kemiskinan 8,66% (September), Tingkat Pengangguran Terbuka 4,51, Gini Rasio 0,365, Indeks Pembangunan Manusia 72,24 dan PDRB Perkapita (ADHB) Rp 65,59 Juta. Selain memperhatikan capaian indikator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen RKPD 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka memenuhi indikator penilaian pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang sejalan dengan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, maka dokumen RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023 disusun berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang lebih dirinci diuraikan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kab/kota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara);
 24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321).
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
43. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
45. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

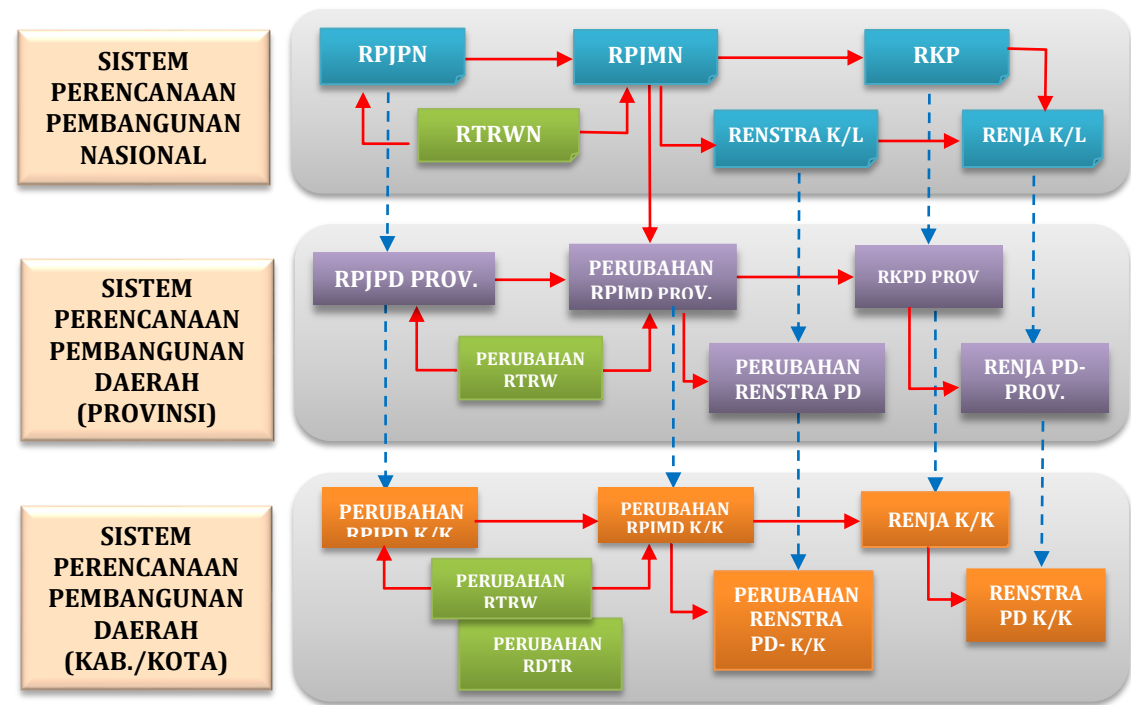
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026, Perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



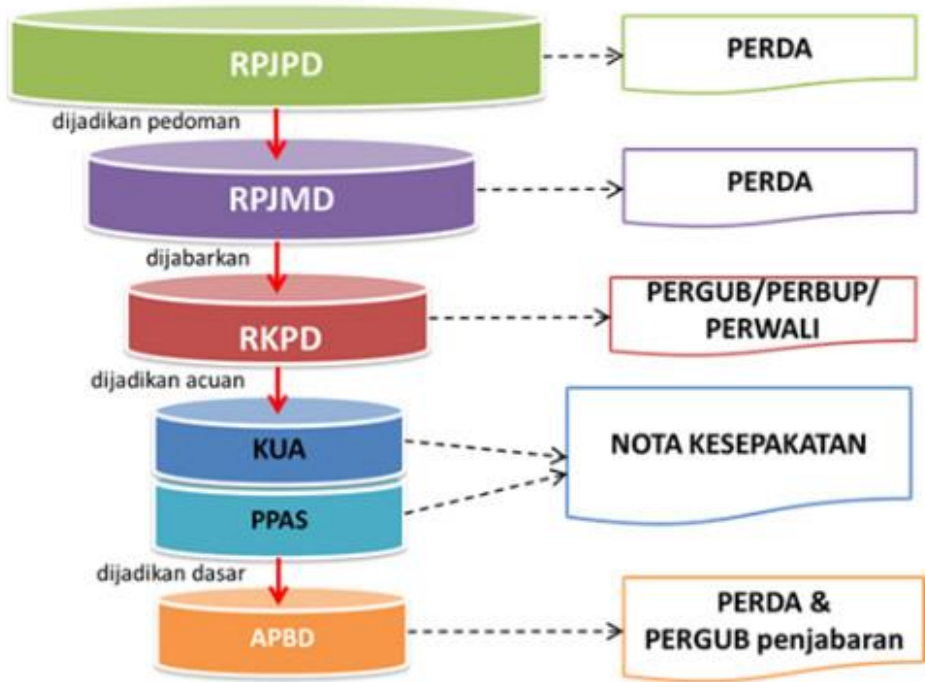
Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2024 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Gubenur dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Sulsel Tahun 2024-2026;
- 2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- 3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota tahun 2024; dan
- 4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

Adapun tujuan dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparansi, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian target dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD/RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD/RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD/RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; Bab ini memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan sasaran pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP; Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

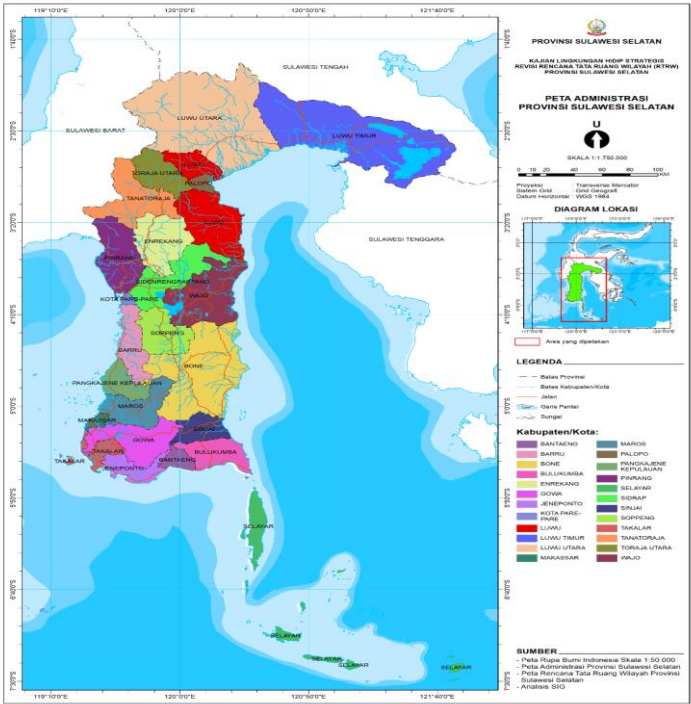
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah sekitar 45.704,16 Km² dan secara administratif terbagi 21 wilayah Kabupaten, dan 3 wilayah kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan wilayah terluas dengan luasan sebesar 7.518,71 Km² atau sebesar 16,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan Kota Parepare merupakan daerah dengan wilayah terkecil dengan luasan sebesar 89,69 Km² atau 0,19 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0°12' Lintang Selatan -8° Lintang Selatan dan 116°48' Bujur Timur – 122°36' Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar

Gambar II.1.
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Posisi geografis tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub distribusi barang dan jasa dari dan ke timur-barat Indonesia wilayah perdagangan dan jasa, karena posisi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, dan berfungsi sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yang menetapkan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45.330,55 Km² atau seluas 4.533.055 Hektar dengan jumlah penduduk sebesar 9.255.930 jiwa.

Tabel II.1.
Data Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Km ²	%	
1	Kepulauan Selayar	1.160,36	2,56	140.595
2	Bulukumba	1.175,53	2,59	455.184
3	Bantaeng	390,97	0,86	202.482
4	Jeneponto	796	1,76	416.345
5	Takalar	555,43	1,23	315.636
6	Gowa	1.813	4	774.043
7	Sinjai	865,24	1,91	267.343
8	Maros	1.442,95	3,18	389.580
9	Pangkajene Kepulauan	888,91	1,96	352.949
10	Barru	1.201,9	2,65	190.529
11	Bone	4.567,36	10,08	813.771
12	Soppeng	1.385,55	3,06	236.612
13	Wajo	2.608,71	5,75	400.118
14	Sidenreng Rappang	1.832,3	4,04	321.419
15	Pinrang	1.896,58	4,18	409.089
16	Enrekang	1.806,85	3,99	228.554
17	Luwu	2.902,07	6,4	373.656
18	Tana Toraja	2.043,62	4,51	270.984
19	Luwu Utara	7.422,42	16,37	330.600
20	Luwu Timur	6.745,92	14,88	306.082
21	Toraja Utara	1.289,13	2,84	255.743
22	Makassar	176,85	0,39	1.463.809
23	Pare Pare	89,67	0,2	155.380
24	Palopo	273,24	0,6	183.427
Sulawesi Selatan		45.330,55	100	9.255.930

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Kondisi topografi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki permukaan yang bervariasi. Provinsi Sulawesi Selatan membentang dari ketinggian antara 0-500 mdpl berupa dataran rendah, 500-1000 mdpl merupakan dataran tinggi dan ketinggian diatas 1000 mdpl merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan.

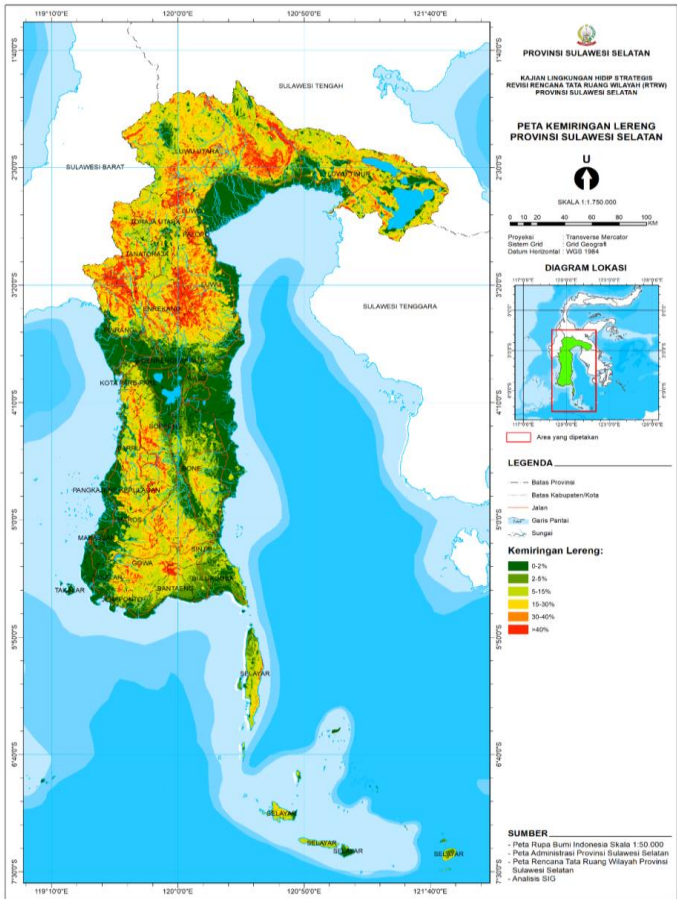
Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemiringan 0-2% menempati luasan terbesar, dimana Kabupaten Wajo mendominasi dalam tingkat kemiringan ini sebesar 203.225 Ha atau sekitar 15,27% dari total luasan dalam tingkat kemiringan 0-2% ini. Kemudian disusul tingkat kemiringan 15-30% dengan dominasi luasan berada di Kabupaten Luwu Utara sebesar 280.873 Ha atau sekitar 22,84% dari total luasan dalam tingkat kemiringan 15-30%. Selanjutnya tingkat kemiringan 5-15% didominasi oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 171.832 Ha atau 16,84%. Sementara tingkat kemiringan 30- 40% menempati luasan terkecil.

Tabel II.2.
Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kemiringan Lereng (%)	Luasan	
		Ha	%
1	0 – 2%	1.330.065,30	29,27
2	2 – 5%	406.193,15	8,94
3	5 – 15%	1.019.915,58	22,44
4	15 – 30%	1.229.223,73	27,05
5	30 -40%	264.084,14	5,81
6	> 40%	294.884,78	6,49
Sulawesi Selatan		4.554.366,68	100

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar II.2.
Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 –

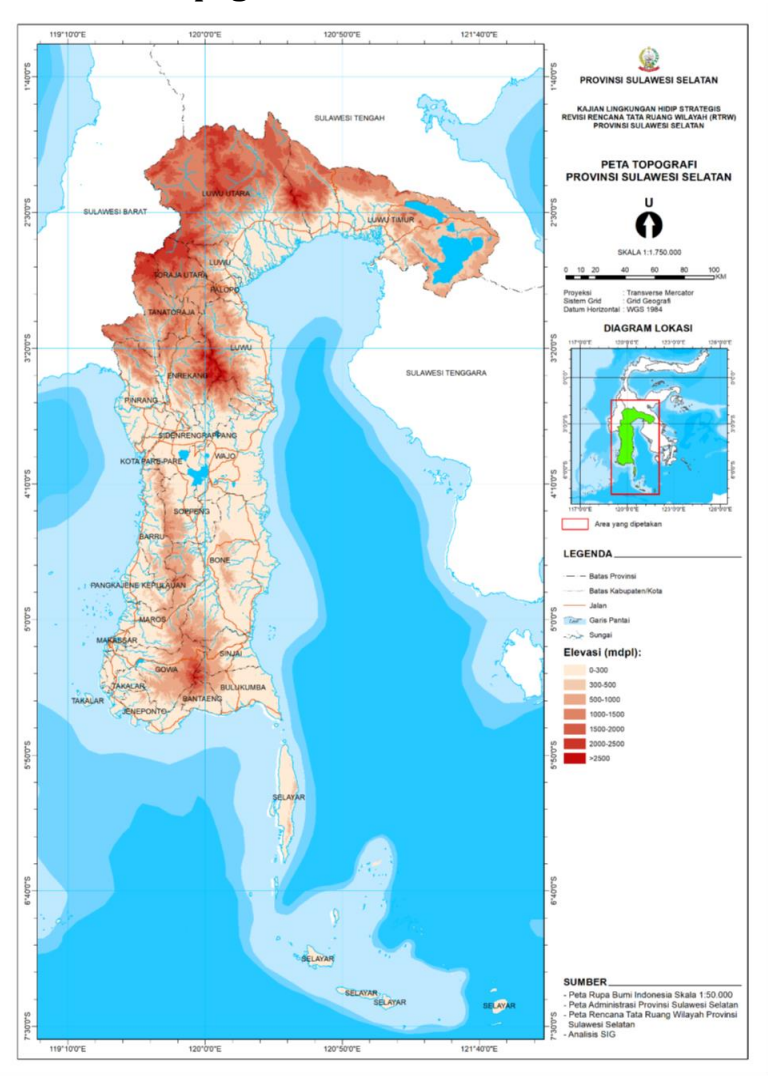
300 mdpl seluas 2.176.516,80 Ha atau sebesar 47,89 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan ketinggian lahan yang paling kecil luasan wilayahnya adalah wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl seluas 20.600,07 Ha atau sebesar 0,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel II.3.
Kondisi Topografi Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Elevasi (mdpl)	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	-300	2.176.516,80	47,89
2	300 – 500	521.673,90	11,48
3	500 – 1000	759.588,35	16,71
4	1000 -1500	574.747,71	12,65
5	1500 – 2000	355.551,01	7,82
6	2000 – 2500	135.688,83	2,99
7	> 2500	20.600,07	0,45
Sulawesi Selatan		4.554.366,68	100

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar II.3.
Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan

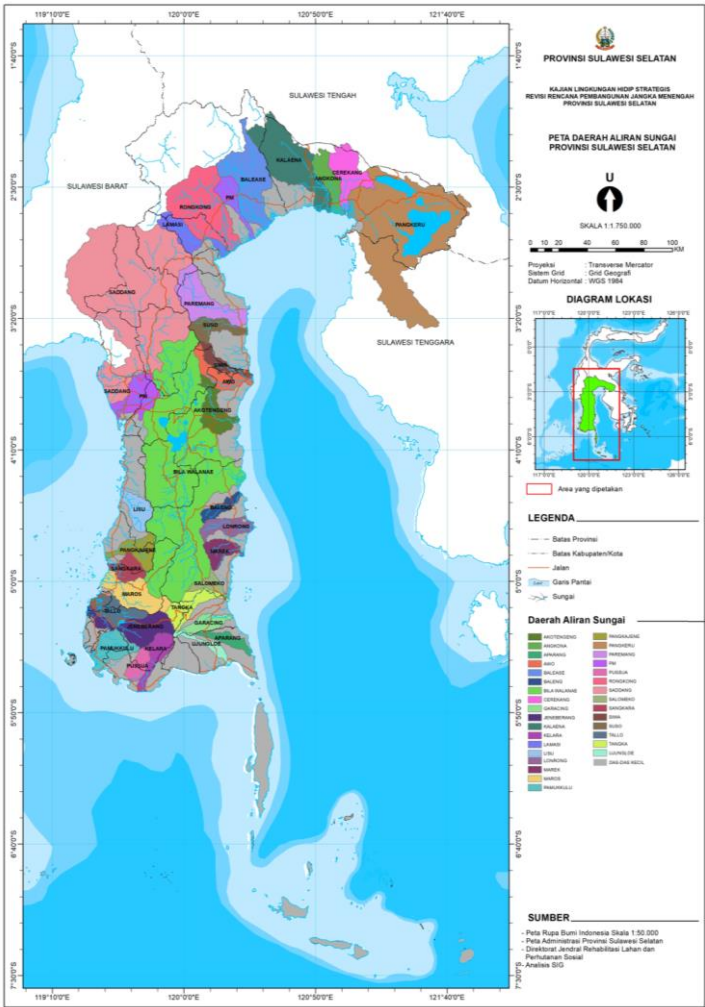


Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Kondisi hidrologi Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di wilayah ini. Kondisi hidrologi

permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 73 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di 24 Kabupaten/kota, diantara DAS tersebut terdapat 2 DAS prioritas dari 15 DAS prioritas nasional yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang. DAS Saddang merupakan DAS terbesar di Sulawesi Selatan dengan luasan sekitar 649.320 Ha yang melintasi 11 wilayah Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Parepare.

Gambar II.4.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan



Sumber : KLHS Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim,yaitu: Tipe Iklim A, Tipe iklim ini dinotasikan sebagai iklim sangat basah dengan curah hujan rata-rata pada iklim tipe A adalah 3500 – 4000 mm/tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Enrekang. Tipe iklim B, Tipe iklim ini dinyatakan sebagai iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/tahun. Wilayah yang memiliki karakteristik iklim basah antara lain, yaitu: Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan

Bantaeng. Tipe iklim C, Tipe ini merupakan tipe iklim agak basah, dengan dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam iklim C terdiri dari Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkajene Kepulauan, Enrekang, Maros, Makassar, Jeneponto, Sinjai, Gowa, Toraja Utara, Parepare, dan Kepulauan Selayar. Tipe iklim D, Tipe iklim ini memiliki curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam tipe iklim D meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Soppeng, Sinjai, Maros,Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkajene Kepulauan, dan Gowa. Tipe iklim E, Tipe iklim ini merupakan iklim kering yang memiliki curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/tahun. Tipe iklim E terdapat di Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Maros dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh gempa. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang melewatinya dan berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Kota Makassar menyebabkan daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022, jumlah kejadian bencana di Sulawesi Selatan sebanyak 862 kejadian yang terdiri dari: bencana angin kencang sejumlah 232 kejadian, kebakaran sejumlah 202 kejadian, gempa bumi sejumlah 135 kejadian, banjir sejumlah 104 kejadian, tanah longsor sejumlah 96 kejadian, puting beliung sejumlah 69 kejadian, abrasi sejumlah 10 kejadian, cuaca ekstrim sejumlah 8 kejadian, dan banjir bandang sejumlah 5 kejadian, dan gelombang pasang sejumlah 1 kejadian. Tingkat kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.
Kejadian Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian									
		Banjir	Gelombang Pasang	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Gempa Bumi	Kebakaran	Angin Kencang	Putting Beliung	Abrasi
1	Kepulauan Selayar	5	-	2	1	-	16	3	30	2	-
2	Bulukumba	2	1	1	-	-	1	7	8	6	1
3	Bantaeng	1	-	1	-	-	-	6	2	1	1
4	Jeneponto	3	-	2	-	-	-	4	1	8	-
5	Takalar	3	-	-	-	-	-	7	1	8	2
6	Gowa	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-
7	Sinjai	3	-	12	-	-	-	1	8	-	-
8	Maros	3	-	1	-	-	-	2	4	5	-
9	Pangkajene	2	-	2	-	-	2	10	27	3	-

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian									
		Banjir	Gelombang Pasang	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Gempa Bumi	Kebakaran	Angin Kencang	Putting Beliung	Abrasi
	dan Kepulauan										
10	Barru	3	-	5	-	1	2	10	6	1	3
11	Bone	3	-	7	-	1	7	34	20	15	-
12	Soppeng	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-
13	Wajo	9	-	-	-	-	-	11	26	1	1
14	Sidenreng Rappang	6	-	3	-	-	-	18	16	1	-
15	Pinrang	5	-	3	-	1	4	13	21	-	2
16	Enrekang	6	-	13	3	1	1	14	11	1	-
17	Luwu	15	-	6	-	-	1	-	4	3	-
18	Tana Toraja	-	-	17	-	1	-	9	10	6	-
19	Luwu Utara	24	-	1	-	-	6	14	8	2	-
20	Luwu Timur	3	-	3	-	3	90	8	5	-	-
21	Toraja Utara	-	-	8	-	-	3	5	4	3	-
22	Makassar	2	-	-	-	-	-	16	2	2	-
23	Parepare	2	-	3	-	-	2	2	15	-	-
24	Palopo	3	-	1	1	-	-	1	1	1	-
JUMLAH		104	1	96	5	8	135	202	232	69	10

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yakni angin kencang, kebakaran, dan gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Jika diamati pada distribusi peta rawan banjir dan longsor, dapat dilihat gambaran bahwa distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi pada daerah-daerah yang relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Tabel II.5.
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1	Kota Makassar	Banjir	Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo
		Cuaca Ekstrim	
		Tsunami	
2	Kota Parepare	Cuaca Ekstrim	Kel. Kampung Pisang, Kel. Ujung Lare, Kel. Lakessi, Kel. Kampung Baru, Kel. Watang Soreang, Kel. Ujung Bulu, Kel. Tiro Sompe, Kel. Mallusetasi, Kel. Cappa Galung, dan Kel. Ujung Sabbang.
		Longsor	
		Kebakaran	

No.	Kabupaten/ Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
3	Kota Palopo	Banjir	Kec. Telluwanua; Kec. Wara, Kec. Wara Selatan, Kec. Wara Barat, Kec. Wara Utara, Kec. Mungkajang, Kec. Sendana
		Longsor	
		Kebakaran	
		Kekeringan	
		Cuaca Ekstrim	
4	Barru	Longsor	Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Nepo
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
5	Soppeng	Cuaca Ekstrim	Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di Kecamatan Marioriawa;
		Gempa	
		Banjir	
		Longsor	
6	Wajo	Banjir	Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulu Kec. Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla
		Cuaca Ekstrim	
		Gempa	
7	Sidenreng Rappang	Banjir	Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang
		Cuaca Ekstrim	
		Gempa	
8	Enrekang	Longsor	Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja
		Cuaca Ekstrim	
		Banjir	
		Kebakaran	
9	Pinrang	Longsor	Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang
		Cuaca Ekstrim	
		Banjir	
		Gempa	
10	Toraja Utara	Longsor	Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
11	Tana Toraja	Longsor	Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
12	Luwu	Longsor	Kec. Latimojong, Kec. Larompong, Kec. Larompong Selatan, Kec. Bajo, Kec. Bajo Barat, Kec. Suli, Kec. Suli Barat, Kec. Bastem, Kec. Bupon, Kec. Bua, Kec. Walenrang Utata, Kec. Walenrang Barat, Kec. Belopa, Kec. Belopa Utara, Kec. Kamanre, Kec. Ponrang, Kec. Ponrang Selatan, Kec. Walenrang Timur, Kec. Lamasi Timur, Kec. Bassesangtempe, Kec. Bassesangtempe Utara
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Abrasi	
13	Luwu Utara	Banjir	Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta;
		Cuaca Ekstrim	
14	Luwu Timur	Kekeringan	Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula
		Banjir	
		Longsor	
		Gempa Bumi	
15	Gowa	Longsor	Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	

No.	Kabupaten/ Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
16	Takalar	Tsunami	Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Mangarabombang
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
17	Bantaeng	Longsor	Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
18	Bulukumba	Banjir	Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
19	Sinjai	Longsor	Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
20	Bone	Banjir	Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
21	Maros	Longsor	Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
22	Pangkajene dan Kepulauan	Banjir	Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
23	Jeneponto	Banjir	Kec. Bangkala, Kec. Bangkala Barat, Kec. Binamu, Kec. Arungkeke, Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kec. Kelara, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba
		Cuaca Ekstrim	
		Angin Putting Beliung	
		Kekeringan	
24	Kepulauan Selayar	Longsor	Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki
		Banjir	
		Tsunami	
		Kebakaran	

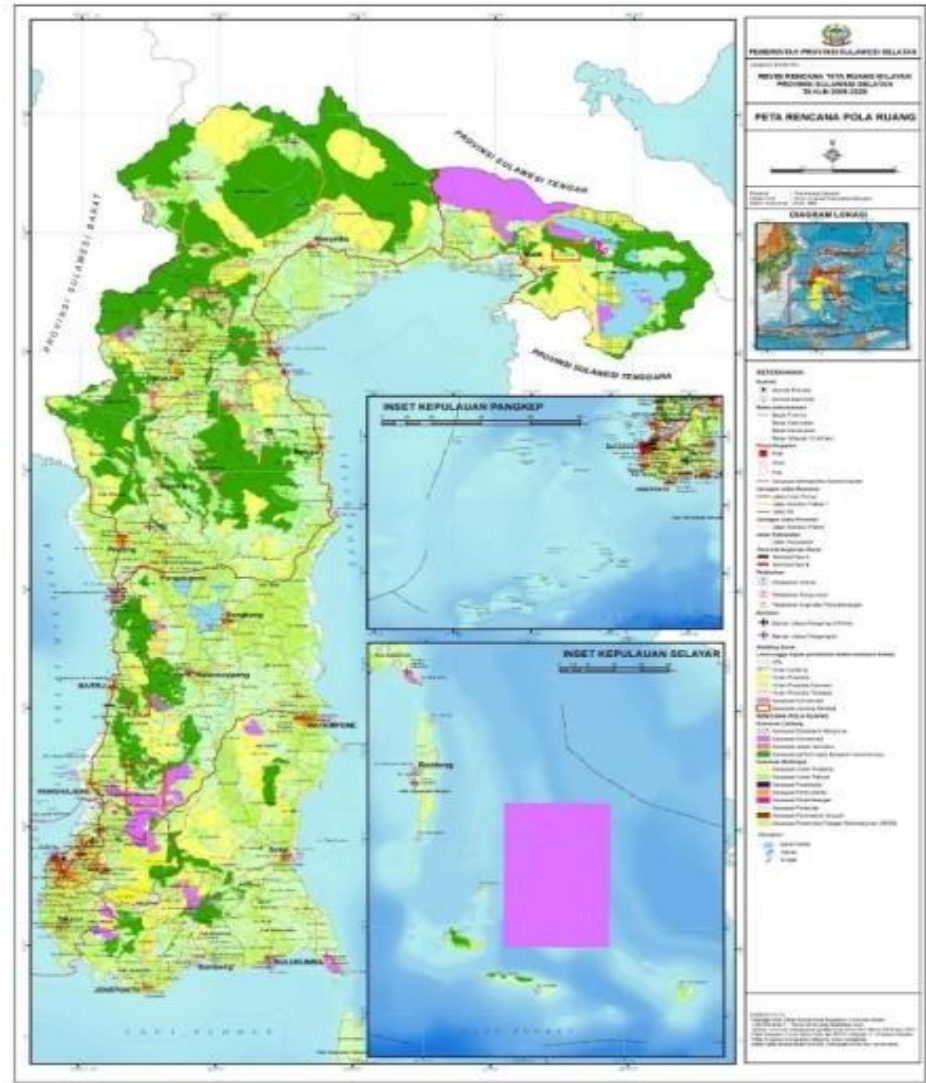
Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pendekatan pengembangan wilayah melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa serta Kota Makassar yang berada pada Pusat kegiatan Nasional (PKN); 2 Kabupaten dan 1 kota yang berada pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kabupaten Barru dan kabupaten Pangkep serta Kota Palopo; dan 5 Kabupaten yang berda pada Pusat Kegiatan Lokal yaitu Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Pinrang, Wajo, dan Soppeng. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW yang berada pada Kabupaten Bone dan Bulukumba, serta pengembangan PKL yang berada di Kabupaten Tana Toraja. Toraja Utara dan Sinjai. Sehingga melalui koridor pengembangan diharapkan terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Gambar II.5.
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. Pembagian pemanfaatan ruang dalam beberapa kawasan sebagaimana terbuat dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan komoditas kedelai yaitu di Kabupaten Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Bone, Soppeng, dan Wajo; dan lokasi pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan Kabupaten Maros.

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura di arahkan, sebagai berikut:

- bawang merah pada Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, dan Takalar;
- tanaman cabai pada Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan Takalar;
- tanaman jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan;
- perkebunan tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;
- perkebunan kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;
- perkebunan kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu Utara, Luwu, dan Bulukumba;
- komoditas perkebunan lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu Timur;
- komoditas perkebunan cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone dan Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba, Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan

komoditas peternakan sapi perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Untuk itu dalam RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan 594.367 Hektar yang tersebar seluruh wilayah kabupaten/kota, kecuali Kota Makassar yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan.

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa dan Teluk Bone. Sedangkan perikanan budidaya berupa budidaya laut dan budidaya payau tersebar di wilayah perairan kabupaten/kota yaitu Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Pangkep, Barru, Palopo, Luwu, Sinjai, Luwu Timur, Makassar, Luwu Utara, Pinrang, Selayar, Takalar, Wajo, Bone, dan Maros.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri yang meliputi Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang,

Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan.

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan kawasan wisata di laut. Arah pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang berada dalam kawasan strategis provinsi (KSP) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi a). Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros; b). Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; c). Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru; d). Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang; e). Kawasan agrowisata Bone-Wajo ; f). Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan g) Kawasan Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya. Sedangkan KSP untuk kepentingan sosial budaya khususnya kawasan wisata budaya dan agrowisata berada pada Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dan taman miniatur Sulawesi Selatan dan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 64). Pengembangan wisata laut di Provinsi Sulawesi Selatan tersebar pada kabupaten dan kota yang berada pada wilayah Perairan Selat Makassar, Teluk Pare-Pare, Laut Flores dan Teluk Bone dengan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk usaha wisata edukasi, usaha wisata dayung, usaha wisata selam, usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha wisata snorkeling, usaha wisata tontonan, usaha wisata berenang, dan usaha wisata alam perairan.

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan Kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terdiri atas: a. seluruh Wilayah Kota Makassar; b. seluruh Wilayah Kabupaten Takalar; c. sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) Wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu,

Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan d. sebagian Wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : a) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan; b) Kawasan Perkotaan Jeneponto Kabupaten Jeneponto; c) Kota Palopo; d) Kawasan Perkotaan Watampone Kabupaten Bone; e) Kawasan Perkotaan Bulukumba Kabupaten Bulukumba; f) Kawasan Perkotaan Barru Kabupaten Barru; dan g) Kota Pare Pare.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bantaeng sebagai ibu kota Kabupaten Bantaeng; b. Kawasan Perkotaan Enrekang sebagai ibu kota Kabupaten Enrekang; c. Kawasan Perkotaan Masamba sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Utara; d. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu; e. Kawasan Perkotaan Malili sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Timur; f. Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai ibu kota Kabupaten Pinrang; g. Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang; h. Kawasan Perkotaan Benteng sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar; i. Kawasan Perkotaan Sinjai sebagai ibu kota Kabupaten Sinjai; j. Kawasan Perkotaan Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten Soppeng; k. Kawasan Perkotaan Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tana Toraja; l. Kawasan Perkotaan Rantepao sebagai ibu kota Kabupaten Toraja Utara; m. Kawasan Perkotaan Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo; n. Kawasan Perkotaan Siwa Kabupaten Wajo; o. Kawasan Perkotaan Batusitanduk Kabupaten Luwu; dan p. Kawasan Perkotaan Palattae Kabupaten Bone.

Tabel II.6.
Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Perkotaan Benteng. Sektor unggulan agrion dustri dan perikanan
2	Bulukumba		Kawasan Perkotaan Bulukumba. Sektor unggulan Agroindustri, Pertanian, Pariwisata dan Perikanan	
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
4	Jeneponto		Kawasan Perkotaan Jeneponto. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	

No.	Kabupaten/ Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
7	Sinjai			Kawasan Sinjai. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
9	Pangkep		Kawasan Perkotaan Pangkejene. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pariwisata	
10	Barru		Kawasan Perkotaan Barru. Sektor unggulan Agroindustri, perikanan, pertanian dan perkebunan	
11	Bone		Kawasan Perkotaan Watampone. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pertanian	
12	Soppeng			Kawasan Perkotaan Watansoppeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
13	Wajo			Kawasan Perkotaan Sengkang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Siwa Sektor Unggulan
14	Sidrap			Kawasan Perkotaan Pangkajene. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
15	Pinrang			Kawasan Perkotaan Pinrang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
16	Enrekang			Kawasan Perkotaan Enrekang. Sektor unggulan pertanian dan perdagangan dan jasa
17	Luwu			Kawasan Perkotaan Batusitanduk. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Belopa Sektor Unggulan
18	Tana Toraja			Kawasan Perkotaan Makale. Sektor unggulan perdagangan dan jasa dan pariwisata

No.	Kabupaten/ Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
19	Luwu Utara			Kawasan Perkotaan Masamba. Sektor unggulan Agropolitan dan Agroindustri
20	Luwu Timur			Kawasan Perkotaan Malili. Sektor unggulan agroindustri
21	Toraja Utara			Kawasan Perkotaan Rantepao Sektor Unggulan Perdagangan dan Jasa
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
23	Pare Pare		Parepare. Sektor unggulan Agroindustri, Perdagangan dan Jasa	
24	Palopo		Palopo. Sektor unggulan Agroindustri, Perkebunan, Pertanian	

Sumber : RTRWN dan Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, dimana Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 sebesar 8.748.052 jiwa meningkat menjadi 9.225.747 jiwa pada Tahun 2022.

Tabel II.7.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kepulauan Selayar	133.315	134.286	137.071	137.974	139.145	0,86
2	Bulukumba	416.773	418.627	437.607	440.090	443.292	0,74
3	Bantaeng	186.525	187.472	196.716	197.886	199.399	0,78
4	Jeneponto	361.892	363.755	401.610	405.508	410.639	1,28
5	Takalar	293.136	295.078	300.853	302.695	305.077	0,80
6	Gowa	751.981	761.491	765.836	773.315	783.167	1,29
7	Sinjai	242.127	243.323	259.478	261.366	263.827	0,95
8	Maros	348.682	351.649	391.774	396.924	403.774	1,74
9	Pangkajene dan Kepulauan	331.979	334.597	345.775	348.230	351.426	0,93
10	Barru	173.357	173.965	184.452	185.525	186.910	0,76
11	Bone	751.323	753.694	801.775	806.750	813.188	0,81
12	Soppeng	228.153	228.686	235.167	235.574	236.049	0,21
13	Wajo	400.262	402.323	379.079	379.396	379.706	0,09

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
14	Sidenreng Rappang	296.684	298.842	319.990	323.194	327.416	1,32
15	Pinrang	374.460	376.784	403.994	407.371	411.795	1,10
16	Enrekang	205.254	206.881	225.172	227.520	230.622	1,38
17	Luwu	360.537	363.754	365.608	367.454	369.820	0,66
18	Tana Toraja	234.529	236.255	280.794	285.179	291.046	2,07
19	Luwu Utara	310.744	313.264	322.919	325.052	327.820	0,86
20	Luwu Timur	289.661	294.288	296.741	300.511	305.521	1,68
21	Toraja Utara	231.686	233.603	261.086	264.145	268.198	1,55
22	Makassar	1.503.664	1.521.091	1.423.877	1.427.619	1.432.189	0,33
23	Pare Pare	143.075	144.446	151.454	152.922	154.854	1,28
24	Palopo	178.253	181.395	184.681	187.331	190.867	1,90
Sulawesi Selatan		8.748.052	8.819.549	9.073.509	9.139.531	9.225.747	0,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,21 persen dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2022 mencapai 2.113.231 rumah tangga. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.8.
Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepulauan Selayar	33.713	34.050	34.196	34.490	34.752
2	Bulukumba	101.196	101.748	105.395	106.169	106.885
3	Bantaeng	45.808	46.057	48.114	48.485	48.838
4	Jeneponto	81.885	82.337	90.459	91.614	92.741
5	Takalar	68.368	69.013	69.259	69.810	70.333
6	Gowa	174.763	177.539	174.796	177.043	179.171
7	Sinjai	54.053	54.376	57.301	57.845	58.317
8	Maros	77.851	78.586	86.636	88.145	89.628
9	Pangkajene dan Kepulauan	74.390	75.025	76.965	77.678	78.354
10	Barru	41.273	41.440	43.724	44.054	44.373
11	Bone	170.461	171.296	180.185	181.639	182.982
12	Soppeng	56.938	56.994	58.879	59.001	59.090
13	Wajo	95.202	95.443	90.581	90.660	90.662
14	Sidenreng Rappang	70.576	71.248	75.141	76.131	77.101
15	Pinrang	87.152	87.742	93.409	94.434	95.391
16	Enrekang	45.823	46.172	50.164	50.853	51.538
17	Luwu	78.069	78.682	79.284	79.801	80.302
18	Tana Toraja	53.100	53.370	63.837	65.163	66.527
19	Luwu Utara	72.714	73.279	75.480	76.130	76.779
20	Luwu Timur	67.941	69.294	68.382	69.533	70.701
21	Toraja Utara	49.793	50.100	56.315	57.186	58.054

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga				
		2018	2019	2020	2021	2022
22	Makassar	341.460	345.653	322.223	323.275	324.310
23	Pare Pare	32.100	32.428	33.717	34.146	34.578
24	Palopo	39.444	40.303	40.257	41.023	41.824
Sulawesi Selatan		2.014.073	2.032.175	2.074.699	2.094.308	2.113.231

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai sebesar 98,73 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Tabel II.9.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2022			
		Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Kepulauan Selayar	69.362	71.519	140.881	96,98
2	Bulukumba	226.575	237.406	463.981	95,43
3	Bantaeng	101.746	104.448	206.194	97,41
4	Jeneponto	206.124	210.390	416.514	97,97
5	Takalar	156.184	163.532	319.716	95,51
6	Gowa	390.060	397.857	787.917	98,04
7	Sinjai	133.402	135.912	269.314	98,15
8	Maros	195.360	196.129	391.489	99,61
9	Pangkajene dan Kepulauan	173.201	179.897	353.098	96,28
10	Barru	94.251	97.644	191.895	96,52
11	Bone	397.186	416.920	814.106	95,27
12	Soppeng	115.860	124.389	240.249	93,14
13	Wajo	195.372	206.694	402.066	94,52
14	Sidenreng Rappang	158.642	162.973	321.615	97,34
15	Pinrang	202.875	208.517	411.392	97,29
16	Enrekang	116.254	112.462	228.716	103,37
17	Luwu	188.635	186.846	375.481	100,96
18	Tana Toraja	135.762	128.152	263.914	105,94
19	Luwu Utara	167.054	163.680	330.734	102,06
20	Luwu Timur	159.043	149.487	308.530	106,39
21	Toraja Utara	131.022	126.517	257.539	103,56
22	Makassar	727.938	736.463	1.464.401	98,84
23	Pare Pare	78.321	79.121	157.442	98,99
24	Palopo	91.793	91.768	183.561	100,03
Sulawesi Selatan		4.612.022	4.688.723	9.300.745	98,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami tren

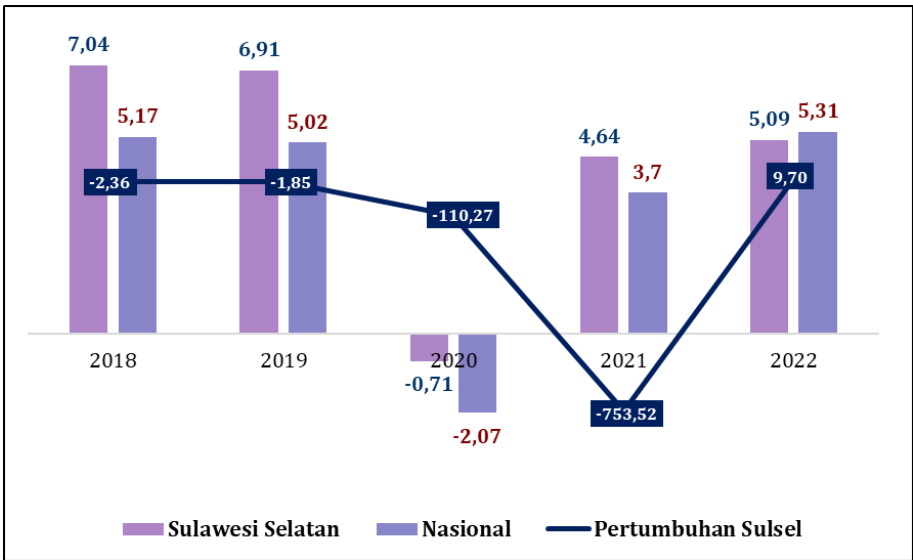
penurunan. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan mencapai 7,04 persen, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2020 yaitu sebesar -0,71 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah bagi Sulawesi Selatan. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,64 persen pada tahun 2021, mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,10-5,5 persen. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya pemulihan ekonomi secara signifikan dalam masa pandemic covid-19. Ekonomi Sulawesi Selatan Kumulatif selama tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan Positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen diikuti Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 17,74 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,69 persen; Jasa Perusahaan sebesar 14,16 persen. Dibandingkan dengan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan lebih baik sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

Tabel II.10.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	7,04	6,91	-0,71	4,64	5,09
Nasional	%	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

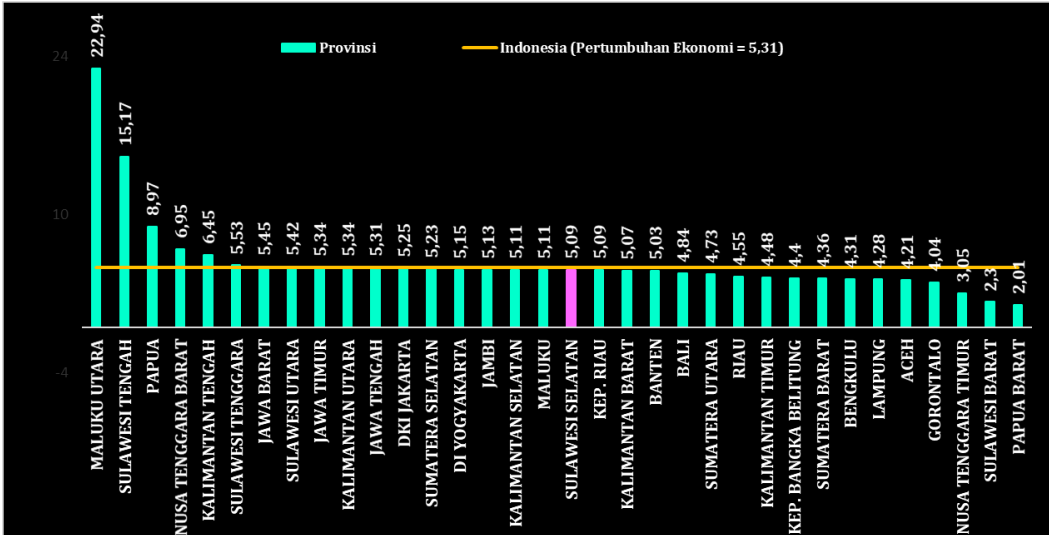
Grafik II. 1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan provinsi lain pada wilayah setaranya pada level menengah, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih lebih baik daripada Provinsi Kalimantan Barat, Banten, dan Bali. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

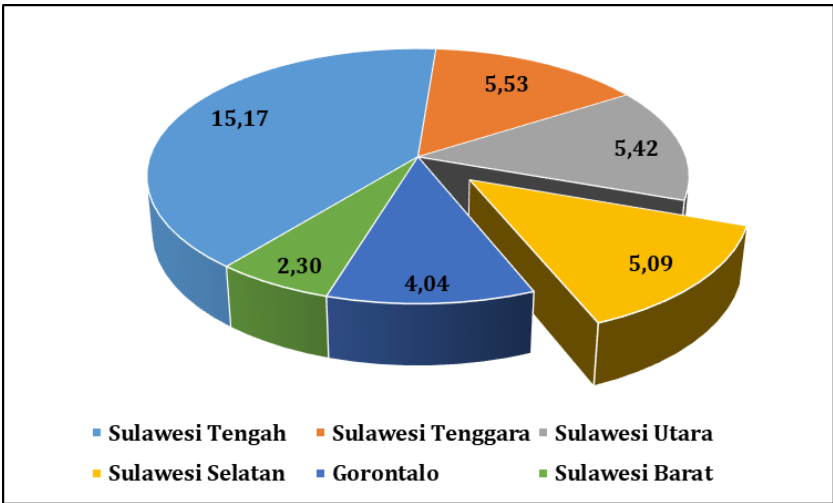
Grafik II. 2.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Sulawesi Selatan berkontribusi sebesar 3,16 persen terhadap perekonomian nasional tahun 2022. Sedangkan seluruh provinsi pada Regional Sulawesi memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 7,03 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,05 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi wilayah regional sulawesi tahun 2022 disajikan pada grafik berikut.

Diagram II.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2022 di Kabupaten Bantaeng sebesar 15,45 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,99 persen. Kota

Makassar berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 34,47 persen, sedangkan Kabupaten Kepulauan Selayar berkontribusi paling rendah sebesar 1,23 persen. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.11.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kep. Selayar	8,75	7,68	-1,78	4,02	3,67
2	Bulukumba	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81
3	Bantaeng	8,13	10,75	0,52	8,86	15,45
4	Jeneponto	6,29	5,47	0,16	5,4	3,81
5	Takalar	6,66	6,87	-0,61	5,05	4,64
6	Gowa	7,14	7,46	1,76	7,26	4,59
7	Sinjai	7,44	6,12	1,55	5,23	4,87
8	Maros	6,19	1,24	-10,87	1,36	9,13
9	Pangkep	4,76	6,41	-1,69	3,46	4,93
10	Barru	7,11	7,41	0,87	4,77	5,11
11	Bone	8,91	7,01	-0,25	5,53	5,23
12	Soppeng	8,11	7,69	2,19	6,15	6,18
13	Wajo	1,08	4,06	-1,17	6,77	2,38
14	Sidrap	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,86
15	Pinrang	6,91	6,53	0,44	5,04	4,52
16	Enrekang	3,26	5,43	1,25	6,36	3,71
17	Luwu	6,86	6,26	1,3	6,03	5,69
18	Tana Toraja	7,89	7,22	-0,28	5,19	5,12
19	Luwu Utara	8,39	7,11	-0,59	3,9	4,54
20	Luwu Timur	3,39	1,17	1,46	-1,39	1,99
21	Toraja Utara	8,07	7,56	0,17	4,05	5,27
22	Makassar	8,42	8,79	-1,27	4,47	5,4
23	Parepare	5,58	6,65	-0,08	4,41	5,93
24	Palopo	7,52	6,75	0,45	5,41	5,83
Sulawesi Selatan		7,04	6,91	-0,71	4,64	5,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Berdasarkan sektor lapangan usaha sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 berasal dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar 22,23 persen. Sektor lain yang juga cukup baik pertumbuhannya pada tahun 2022 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,74 persen. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

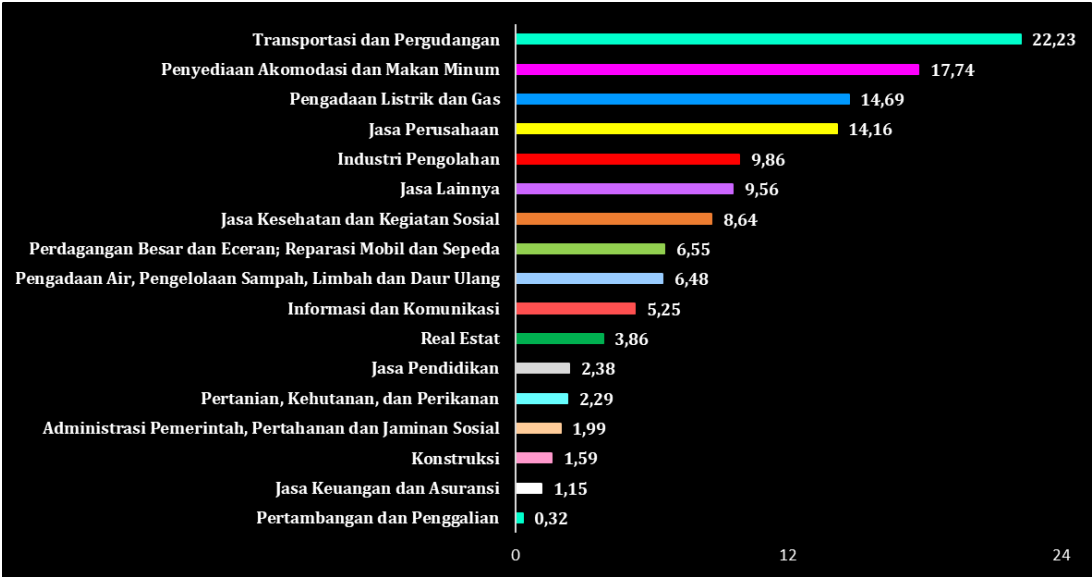
Tabel II.12.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,22	2,78	-0,71	6,4	2,29
b	Pertambangan dan Penggalian	1,11	2,68	0,54	-0,59	0,32
c	Industri Pengolahan	0,94	9,92	-4,57	3,02	9,86
d	Pengadaan Listrik dan Gas	7,26	6,21	2,59	10,87	14,69
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	5,49	1,73	6,61	4,07	6,48

Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Limbah dan Daur Ulang					
f	Konstruksi	8,55	8,92	1,56	4,14	1,59
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	11,53	9,04	-3,07	6,5	6,55
h	Transportasi dan Pergudangan	10,32	1,74	-21,46	5,17	22,23
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,71	6,42	-13,68	2,96	17,74
j	Informasi dan Komunikasi	11,99	10,99	10,84	6,39	5,25
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,67	4	2,43	1,14	1,15
l	Real Estat	4,63	5,42	3,79	2,58	3,86
m,n	Jasa Perusahaan	10,02	10,53	-10,05	6,23	14,16
o	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	9,96	9,98	-0,04	2,92	1,99
P	Jasa Pendidikan	9,77	6,93	5,73	3,67	2,38
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	8,05	10,06	7,77	8,64
r,s,t,u	Jasa Lainnya	13,13	9,73	-12,02	7,56	9,56
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,04	6,91	-0,71	4,64	5,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Grafik II. 3.
Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp.360,87 Triliun, nilai tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.71,97 Triliun, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,29 persen, setelah mengalami kontraksi sebesar -0,71 persen pada tahun 2020. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.13.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHK (Triliun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64,84	66,62	66,14	70,37	71,97
Pertambangan dan Galian	16,79	17,24	17,33	17,23	17,28
Industri Pengolahan	40,79	44,83	42,78	44,07	48,42
Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,31	0,32	0,35	0,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,36	0,37	0,39	0,41	0,44
Konstruksi	37,85	41,23	41,88	43,61	44,3
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47,13	51,38	49,8	53,04	56,5
Transportasi dan Pergudangan	11,78	11,98	9,41	9,9	12,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,61	4,91	4,24	4,36	5,13
Informasi dan Komunikasi	21,03	23,34	25,87	27,52	28,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,75	11,19	11,46	11,59	11,72
Real Estate	10,7	11,28	11,7	12,01	12,47
Jasa Perusahaan	1,36	1,51	1,36	1,44	1,64
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	13,11	14,42	14,42	14,84	15,13
Jasa Pendidikan	17,22	18,41	19,47	20,18	20,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	6,71	7,38	7,96	8,64
Jasa Lainnya	4,37	4,79	4,22	4,53	4,97
Total PDRB (ADHK)	309,20	330,51	328,15	343,40	360,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan nilai Rp. 605,14 Triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp. 59,91 Triliun dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan, kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.14.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	103,96	107,66	109,46	122,97	133,72
Pertambangan dan Galian	22,17	23,3	23,54	25,9	30,87
Industri Pengolahan	59,45	66,43	64,32	68,14	78,09
Pengadaan Listrik dan Gas	0,3	0,32	0,32	0,37	0,43
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,46	0,48	0,51	0,54	0,59
Konstruksi	62,57	71,16	72,42	78,56	84,72
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	66,44	74,62	72,98	79,49	88,6
Transportasi dan Pergudangan	19,76	21,21	15,48	16,74	24,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,53	7,13	6,30	6,56	7,99

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Informasi dan Komunikasi	22,78	25,49	28,31	30,3	32,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	17,28	18,43	18,91	19,79	21,68
Real Estate	17,14	18,41	19,21	19,75	21,12
Jasa Perusahaan	2,11	2,37	2,18	2,35	2,8
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	20,65	23,33	23,75	24,67	25,33
Jasa Pendidikan	24,43	26,54	28,24	29,21	30,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	10,16	11,64	12,8	14,04
Jasa Lainnya	6,51	7,29	6,48	7,07	8,05
Total Nilai PDRB	461,72	504,32	504,06	545,17	605,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,1 persen); Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,64 persen); Konstruksi (14 persen); serta Industri Pengolahan (12,9 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,64 persen. Persentase kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.15.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,77	21,35	21,72	22,55	22,1
Pertambangan dan Galian	4,86	4,62	4,67	4,75	5,1
Industri Pengolahan	13,02	13,17	12,76	12,5	12,9
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,1	0,1	0,1
Konstruksi	13,7	14,11	14,37	14,41	14
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,55	14,8	14,48	14,58	14,64
Transportasi dan Pergudangan	4,33	4,21	3,07	3,07	3,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,41	1,25	1,2	1,32
Informasi dan Komunikasi	4,99	5,05	5,62	5,56	5,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,78	3,65	3,75	3,63	3,58
Real Estate	3,75	3,65	3,81	3,62	3,49
Jasa Perusahaan	0,46	0,47	0,43	0,43	0,46
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,63	4,71	4,53	4,19
Jasa Pendidikan	5,35	5,26	5,6	5,36	5,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,36	2,02	2,31	2,35	2,32
Jasa Lainnya	0,96	1,45	1,29	1,3	1,33
Total Kontribusi PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, nainya harga barang dan jas tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi nasional sejak tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan, namun laju inflasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022. Pada Desember 2022, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasi year on year sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) sebesar 114,14 dari 5 kota IHK tercatat seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) mengalami inflasi year on year. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 6,66 persen sedangkan inflasi year on year terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 16,72 persen; kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 2,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,60 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain bensin, angkutan udara, telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, bawang merah, kue kering berminyak, tomat, dan sabun detergen bubuk/cair. Gambaran perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.16.
Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Laju Inflasi	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	3,50	2,35	2,04	2,40	5,77
Nasional	%	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 605,14 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 65,59 juta. Sejak tahun 2018 hingga 2019 PDRB perkapita ADHB menunjukkan peningkatan, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,64 persen dari tahun sebelumnya, namun tahun 2021 hingga 2022 kembali

mengalami peningkatan sebesar 9,96 persen. Kondisi ini seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi covid 19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 ini. Perbandingan PDRB Perkapita dan PDB Nasional tahun 2018 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

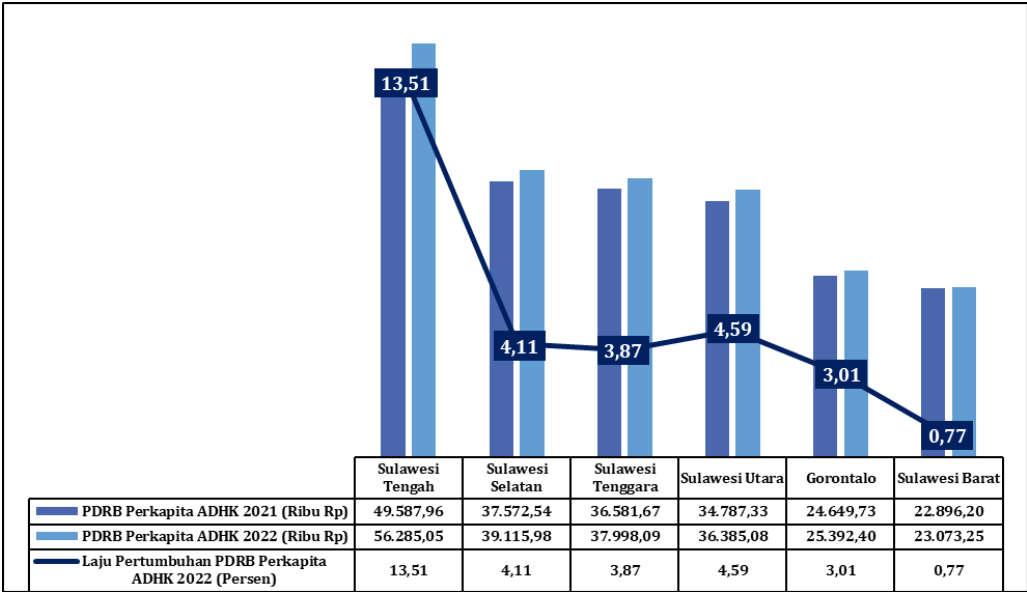
Tabel II.17.
PDRB PerKapita Provinsi Sulawesi Selatan dan
PDB Perkapita (ADHB) Nasional Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi						
PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	52,64	57,18	55,67	59,65	65,59
PDRB Perkapita (ADHK)	Juta	35,24	37,47	36,25	37,57	39,11
Nasional						
PDB Perkapita (ADHB)	Juta	55,99	59,32	57,29	62,26	71,03
PDB Perkapita (ADHK)	Juta	39,34	41,02	39,78	40,78	42,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

PDRB Perkapita (ADHK) Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi pada tahun 2022 menduduki peringkat kedua setelah Sulawesi Tengah. Capaian laju pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Sulawesi Selatan dan Regional Sulawesi tahun 2022 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 4.
Perbandingan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

2.2.1.4. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur dengan Indeks Gini. Sejak September 2019, Indeks Gini Sulawesi Selatan terus mengalami

penurunan hingga September 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Sulawesi Selatan. Indeks Gini pada periode September 2022 sebesar 0,365 menurun sebesar 0,412 poin dibanding Indeks Gini September 2021 serta mengalami persentase penurunan tertinggi selama periode 2019 hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Selatan. Jika dilihat berdasarkan daerah, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,378 lebih tinggi dibanding tingkat ketimpangan penduduk pedesaan sebesar 0,324. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

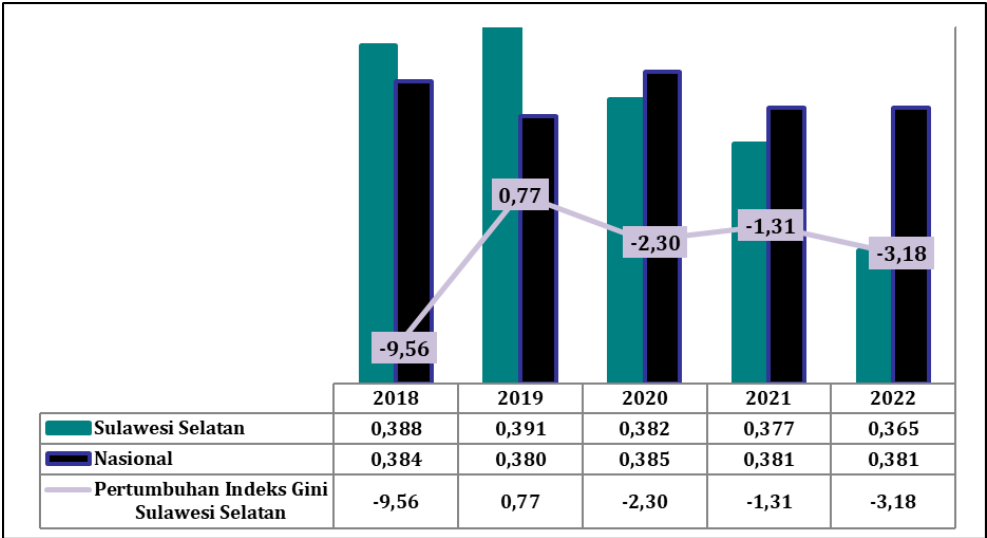
Tabel II.18.
Perkembangan Indeks Gini
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indeks Gini	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	Indeks	0,391	0,393	0,384	0,387	0,378
Perdesaan	Indeks	0,353	0,354	0,352	0,334	0,324
Perkotaan + Perdesaan	Indeks	0,388	0,391	0,382	0,377	0,365

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2019-2023

Mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2022 capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan lebih baik daripada Indeks Gini Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

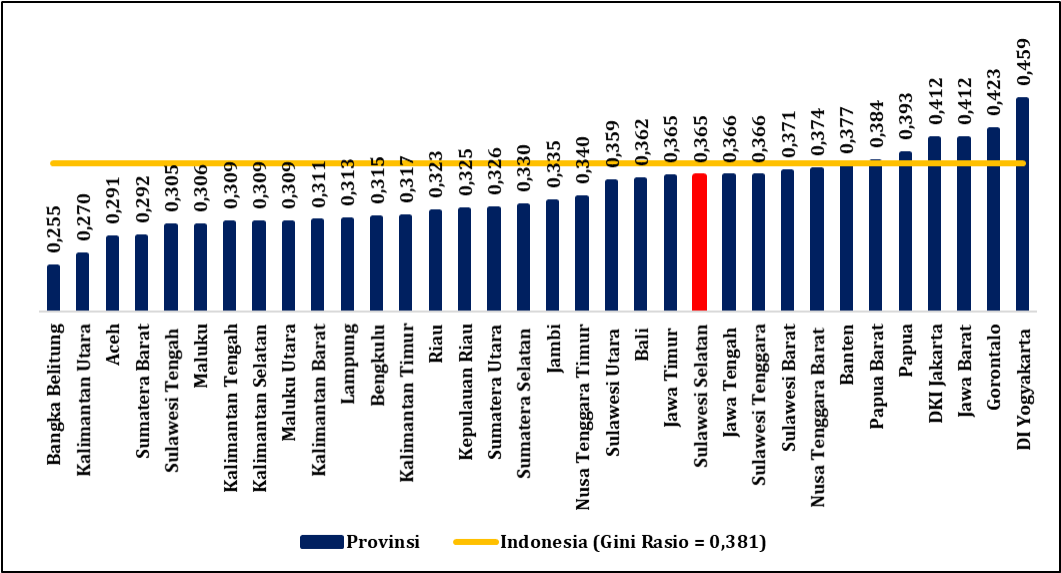
Grafik II. 5.
Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Puser Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan yang berada pada level rendah masih lebih baik dibandingkan 11 Provinsi lain pada wilayah setaranya yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB, Banten, Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan DI.Yogyakarta. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

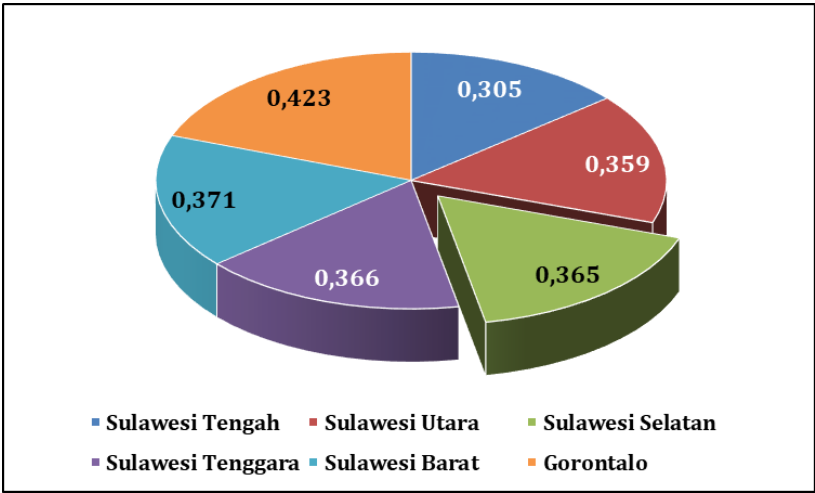
Grafik II. 6.
Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan
Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi, capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan masih lebih baik daripada Sulawesi Tenggara (0,366), Sulawesi Barat (0,371), dan Gorontalo (0,423). Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

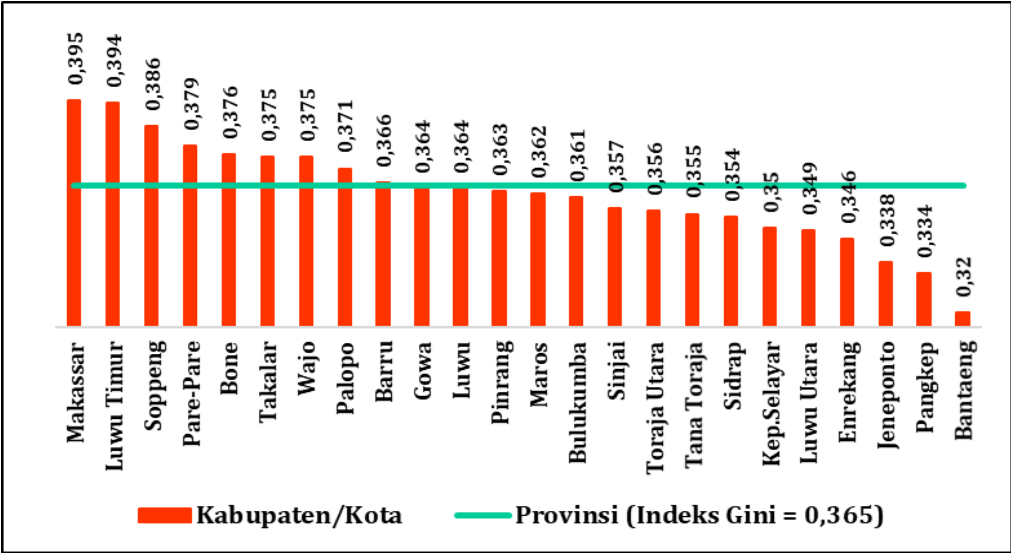
Diagram II. 2.
Perbandingan Indeks Gini Wilayah Regional Sulawesi
Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Takalar, Wajo, Barru, Gowa, dan Kota Palopo mengalami pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya yang menggambarkan terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 ketimpangan pendapatan tertinggi di Kota Makassar dengan capaian indeks sebesar 0,395 mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan sebesar -1,27 dari tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah dengan nilai indek ketimpangan terendah dengan capaian 0,320 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,75 dari tahun 2021. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 7.
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Badan Puser Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pendekatan yang digunakan mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nilai Indeks Williamson tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren penurunan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 0,567 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,01 poin. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan membuka akses wilayah terisolir di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu sektor pendorong yang dapat menurunkan Indeks Williamson, data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.19.
Indeks Williamson
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Williamson	Nilai	0,622	0,639	0,620	0,568	0,567

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 8,66 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,13 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 782,32 ribu orang, bertambah sebanyak 4,9 ribu orang terhadap Maret 2021 dan bertambah sebanyak 16,86 ribu orang terhadap September 2021. Tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan, namun berbeda dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan yang berfluktuasi pada periode September

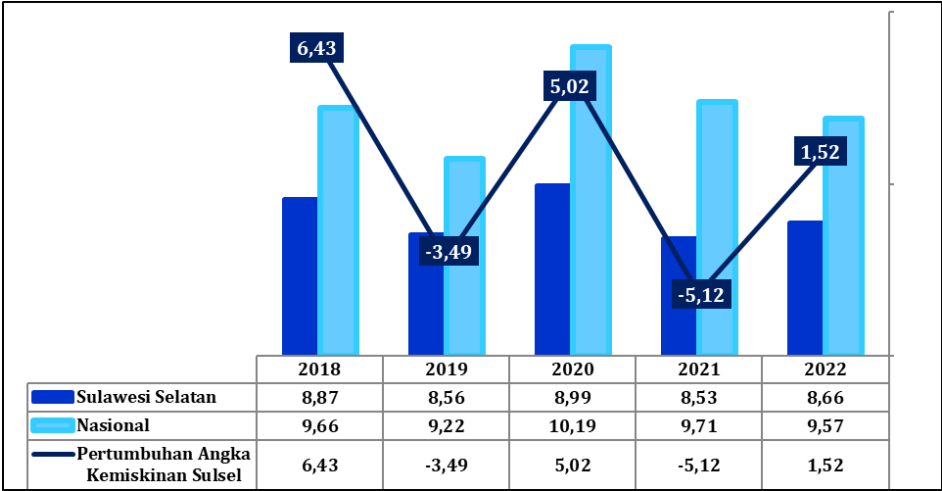
2018 hingga 2022, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Secara umum, pada periode September 2018 hingga September 2019, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar -3,49 poin, namun pada tahun 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Tahun 2021 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan kembali mengalami penurunan sebesar -5,12 poin seiring dengan pemulihan ekonomi, namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan sebesar 1,52 poin dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel II.20.
Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	8,87	8,56	8,99	8,53	8,66
Nasional	%	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57

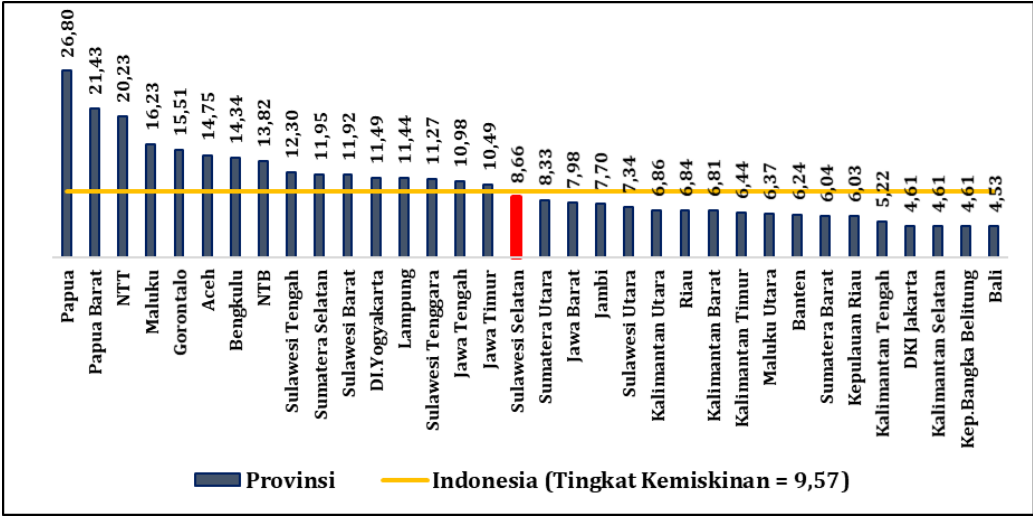
Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 8.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Puser Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 9.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022

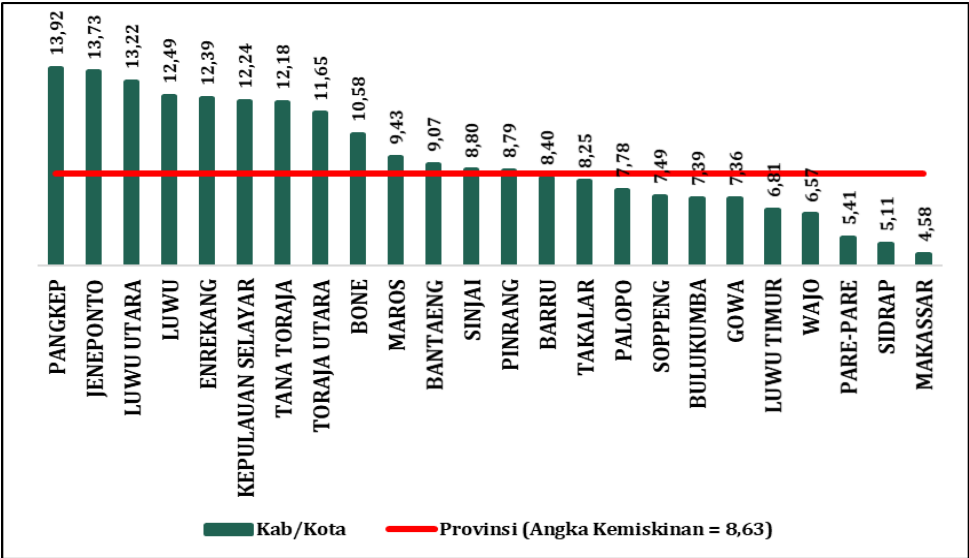


Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan periode September tahun 2022 jika dibandingkan dengan wilayah setaranya pada level menengah menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibanding 5 provinsi lainnya, namun lebih baik dibanding Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung dan DI.Yogyakarta.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tertinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 13,92 persen dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 47.530 jiwa mengalami penurunan sebesar -2,52 persen dari tahun 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah di Kota Makassar dengan jumlah penduduk miskin 71.830 jiwa mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -4,98 persen. Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 10.
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Periode Maret Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar Rp.422.952,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,80 persen. Sementara jika dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 10,01 persen. Perkembangan garis kemiskinan tahun 2018 hingga tahun 2022 yang merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel II.21.
Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	327.725	354.770	375.463	403.751	443.717
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	306.250	331.063	350.791	368.465	405.213
Perkotaan + Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	315.738	341.555	362.031	384.455	422.952
Garis Kemiskinan Nasional						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	425.770	458.380	475.477	502.730	552.349
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	392.154	428.515	437.902	464.474	513.170
Perkotaan + Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	410.670	440.538	458.947	486.168	535.547

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Tabel II.22.
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	91,13	91,44	91,01	91,47	91,34
Nasional	%	90,34	90,78	89,81	90,29	90,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode Maret 2022 hingga

September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 1,50 mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2022 sebesar 1,36. Berdasarkan wilayah, indeks kedalaman kemiskinan pada wilayah perdesaan sebesar 2,13 lebih tinggi dari pada perkotaan sebesar 0,76 pada September 2022. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23.
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	1,68	1,63	1,65	1,40	1,50
Perkotaan	0,56	0,81	0,81	0,63	0,76
Perdesaan	2,52	2,26	2,32	2,04	2,13
Nasional	1,63	1,50	1,75	1,67	1,56
Perkotaan	1,08	1,02	1,26	1,23	1,16
Perdesaan	2,32	2,11	2,39	2,25	2,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

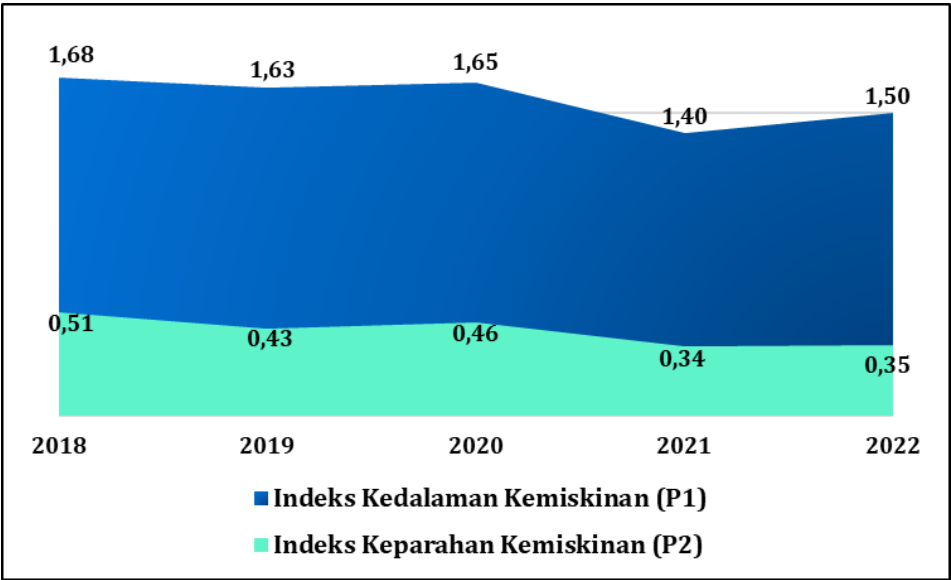
Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode Maret 2022 hingga September 2022 mengalami peningkatan dari 0,32 menjadi 0,35. Indeks keparahan kemiskinan pada wilayah perdesaan sebesar 0,52 lebih tinggi daripada wilayah perkotaan sebesar 0,16 pada tahun 2022. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.24.
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	0,51	0,43	0,46	0,34	0,35
Perkotaan	0,11	0,2	0,18	0,14	0,16
Perdesaan	0,82	0,62	0,68	0,5	0,52
Nasional	0,41	0,36	0,47	0,42	0,38
Perkotaan	0,25	0,23	0,31	0,29	0,26
Perdesaan	0,62	0,53	0,68	0,59	0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 11.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

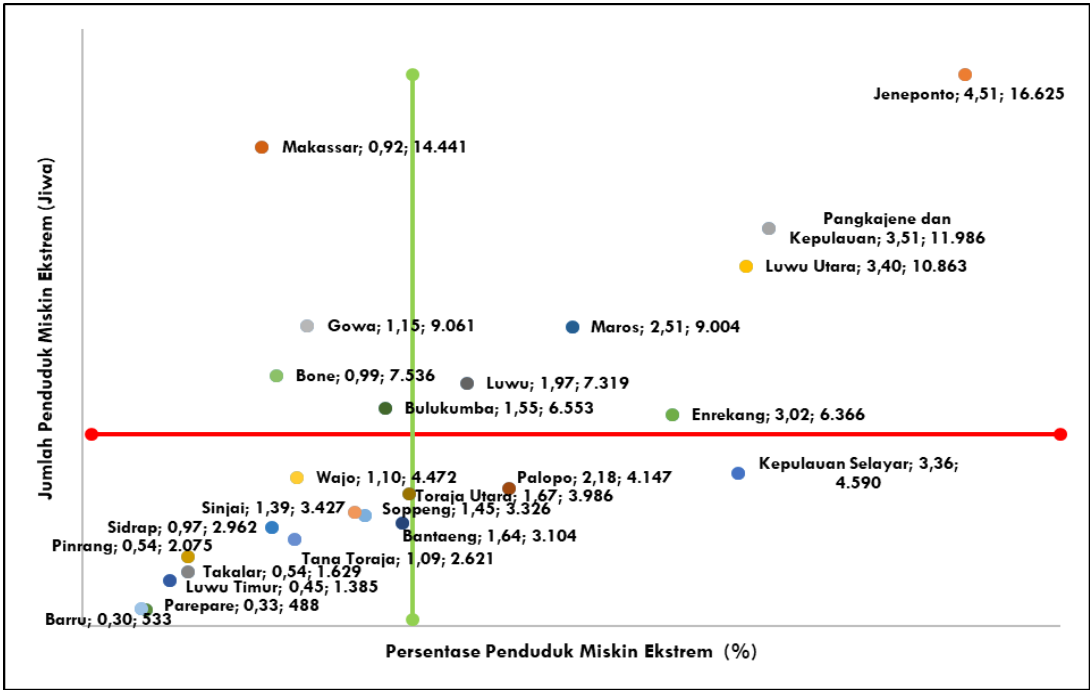


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Pada tahun 2018 hingga 2022 indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami tren fluktuasi, dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang merupakan capaian tertinggi selama 3 tahun terakhir. Namun indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh peningkatan laju inflasi yang menyebabkan kenaikan indeks harga kelompok pengeluaran, yang diantaranya makanan, minuman, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan kembali mengalami peningkatan yang menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin tinggi.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Berdasarkan data TNP2K persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten/kota di Sulawesi Selatan disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 12.
Pengelompokan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

2.2.1.7. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana pada tahun 2022 sebesar 22,1 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -1,99 persen. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya nilai PDRB dari sub sektor tanaman perkebunan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura dari tahun 2021 sebesar. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut. Capaian kontribusi sektor pertanian khususnya pada komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2022 kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB sebesar 5,91 mengalami penurunan sebesar -7,44 persen dari tahun 2021 kondisi ini dipengaruhi oleh gagal panen di beberapa lokasi di Provinsi Sulawesi selatan akibat bencana banjir pada sentra-sentra produksi pangan seperti Kabupaten Soppeng, Wajo dan Sidrap. Capaian kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,49 persen. Kontribusi jenis komoditas yang mengalami peningkatan yaitu komoditas kelapa sawit (96.747 ton), kelapa (73.985 ton), karet (3.829 ton), dan pala (607 ton). Sedangkan komoditas kopi (30.007 ton), kakao (89.242 ton), dan tebu (5.042 ton), jambu mete (9.508 ton), lada (5.236 ton), dan tembakau (1.118 ton) mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.25.
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	22,54	21,35	21,72	22,55	22,1
Kontribusi Sektor Pertanian (Tamanan Pangan) Terhadap PDRB	%	7,16	6,34	6,50	6,35	5,91
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	4,26	3,88	3,94	4,07	4,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.8. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Pencapaian tertinggi kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB periode tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,07 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dengan capaian 0,05 persen pada tahun 2022. Pada sektor kehutanan upaya yang ditempuh dengan mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan (ekowisata).

Tabel II.26.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,06	0,06	0,07	0,06	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.9. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,39 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB dari sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 19,35 persen dari tahun 2020 hingga 2022. Selain itu peningkatan kontribusi PDRB sub sektor pertambangan bijih logam tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 24,59 persen.

Tabel II.27.
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4,8	4,62	4,67	4,75	5,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.10. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Terkait dengan perikanan semakin banyak jumlah usaha perikanan dan nilai investasinya akan memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Selatan. Kedua faktor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan. Berikut ini dapat dilihat perkembangan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 tahun terakhir.

Tabel II.28.
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,40	8,44	8,53	9,41	9,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi selatan terus mengalami peningkatan sejak 2018. Kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 9,43 persen pada tahun 2022. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 417.705 ton dengan nilai produksi Rp. 12,176 Triliun. Salah satu sub sektor yang berpotensi besar untuk dioptimalkan adalah perikanan budidaya, utamanya tambak udang, ikan, rumput laut. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya sebesar 4.082.794 ton dengan nilai produksi Rp. 19,275 Triliun dengan produksi tertinggi yaitu rumput laut sebesar 3.787.798 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 10,750 Milyar.

2.2.1.11. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 persen dengan capaian 14,64 persen pada tahun 2022. Peningkatan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan sebesar 0,51 persen pada tahun 2022 mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Tabel II.29.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	14,38	14,80	14,48	14,58	14,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.12. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai 12,9 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sektor industri sendiri terdiri dari 16 jenis industri yang memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap capaian PDRB tahun 2022 dengan capaian tertinggi pada sub sektor industri makanan dan minuman dengan capaian 7,68 persen mengalami pertumbuhan sebesar 4,06 persen dari tahun 2021.

Tabel II.30.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12,87	13,17	12,76	12,49	12,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.13. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri di Sulawesi Selatan di Tahun 2021 mencapai 8,91 persen nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 9,3 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga berdampak terhadap keterbatasan dan tingginya harga bahan baku, pengurangan tenaga kerja dan pemasaran produk. Tahun 2022 kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 4,5 persen dari tahun 2021 dengan capaian 9,31 persen.

Tabel II.31.
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	%	6,79	7,35	7,35	8,91	9,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.14. Pertumbuhan PDRB Industri

Pertumbuhan PDRB sektor industri di Sulawesi Selatan kembali mengalami perbaikan pada tahun 2021, setelah sebelumnya berkontraksi sebesar 4,57 persen pada tahun 2020. Capaian pertumbuhan PDRB sektor industri tahun 2022 mencapai 9,86 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Perbaikan pertumbuhan PDRB sektor industri didorong oleh tiga sub sektor dengan tingkat pertumbuhan positif dan terbesar yang terdiri dari sub sektor industri logam dasar sebesar 136,32 persen sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki sebesar 32,41 persen.

Tabel II.32.
Pertumbuhan PDRB Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB Industri	%	0,94	9,92	-4,57	3,02	9,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.15. Sektor Industri Pengolahan Non Migas

Kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019, meskipun pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dari tahun sebelumnya. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.33.
Sektor Industri Pengolahan Non Migas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB	%	13,27	13,64	12,74	12,47	12,52
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	-0,82	0,37	-0,90	-0,27	1,26
Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	Juta Orang	0,11	0,12	0,07	0,10	0,11
Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Non Migas	USD Milyar	0,264	0,328	0,270	0,279	0,300
Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Rp.Triliun	1,45	1,54	1,21	1,65	3,21

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (SIPD)

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 72,82, meningkat 0,58 poin (0,80 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,24). Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

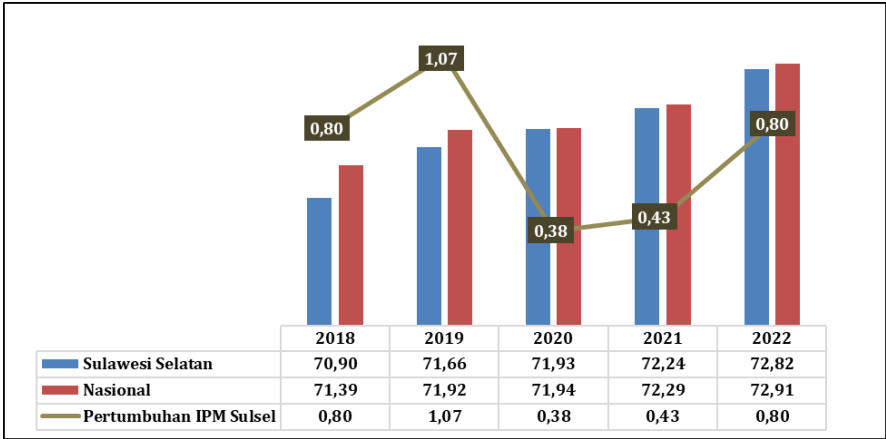
Tabel II.34.
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sulawesi Selatan dengan Nasional 2018-2022

Wilayah	Capaian					Rata-rata Pertumbuhan IPM
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sulawesi Selatan	70,9	71,66	71,93	72,24	72,82	0,48
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Meskipun berada dibawah rata-rata nasional, IPM Sulawesi Selatan selama 6 tahun terakhir berstatus tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan secara konsisten meningkat setiap tahunnya.

Grafik II. 13.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Adapun Capaian masing-masing dimensi pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.35.
Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,08	70,43	70,57	70,66	70,97
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,34	13,36	13,45	13,52	13,53
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,02	8,26	8,38	8,46	8,63
Pengeluaran Perkapita (ADHK)	Ribu Rupiah/org	10.814	11.118	11.079	11.184	11.430
IPM	Nilai	70.90	71.66	71.93	72,24	72,82

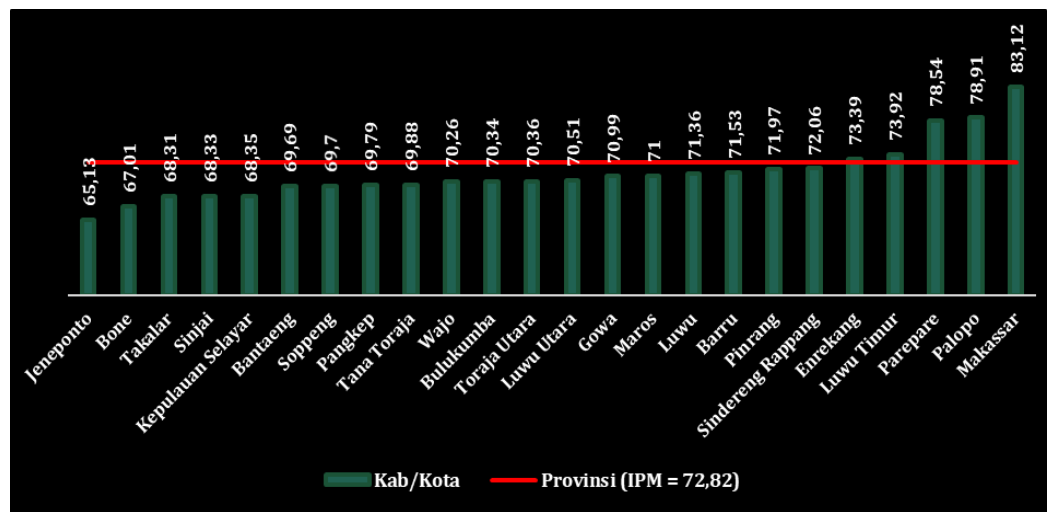
Sumber :Badan Pusat Statitik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM sebesar 0,79 persen, dengan 4 kabupaten yang memiliki pertumbuhan IPM paling tinggi adalah Bulukumba dan Soppeng sebesar 1,03 persen, Bantaeng sebesar 1,01 persen dan Gowa sebesar 1,00 persen. sedangkan Kabupaten

dengan pertumbuhan paling rendah adalah Kota Pare-pare sebesar 0,42 persen. Capaian IPM paling rendah saat ini adalah Kabupaten Jeneponto (65,13) dengan pertumbuhan sebesar 0,88 persen. Sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Makassar (83,12) dengan pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 0,56 persen dibandingkan capaian tahun lalu.

Kota Makassar merupakan satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80). Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar masih menjadi pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana Kota Makassar cukup memadai dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan sangat mudah dan terjangkau. Selama periode tahun 2021-2022 terdapat 3 kabupaten yang mengalami perubahan status dari pembangunan IPM sedang ke tinggi yaitu Bulukumba, Wajo, dan Toraja Utara. Sebagian besar status pembangunan manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berada pada kategori “tinggi” 14 Kabupaten/Kota, sedangkan yang berstatus “sedang” sejumlah 9 Kabupaten.

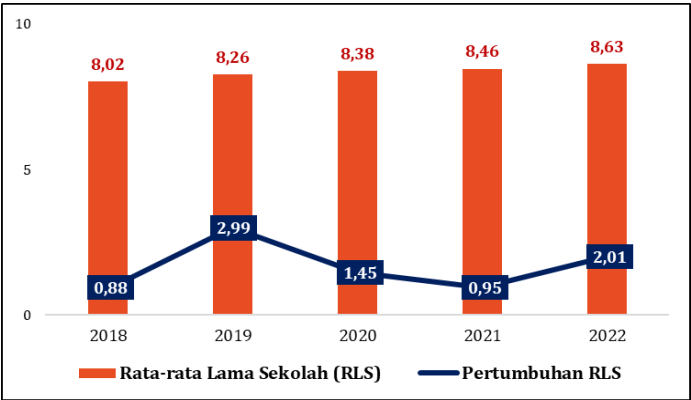
Grafik II. 14.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi/lama jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Pada tahun 2022 RLS Sulawesi Selatan sebesar 8,63 tahun tumbuh 2,01 persen dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan adalah selama 8,63 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 2.

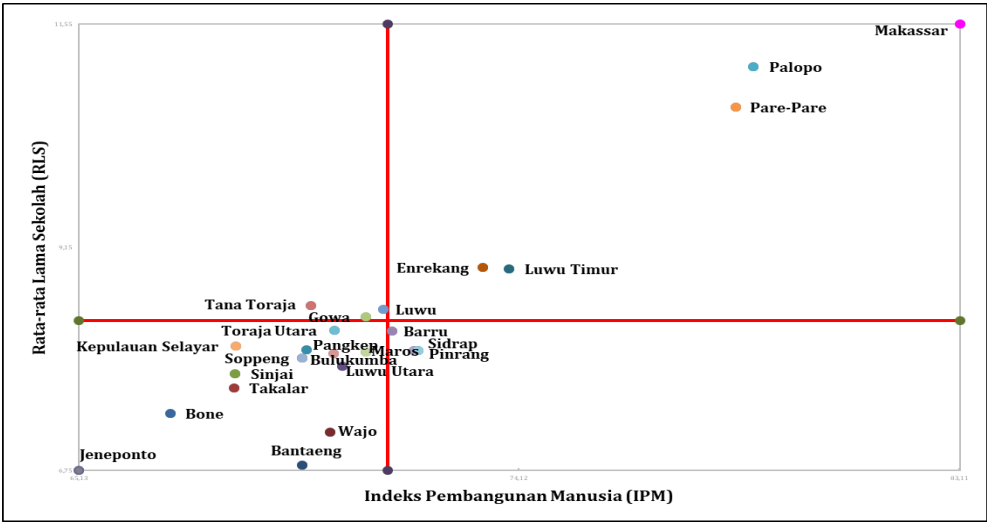
Grafik II. 15.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Pertumbuhan positif merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi Selatan yang lebih baik. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 2,01 persen, pertumbuhan paling tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas mengalami peningkatan sebesar 0,17 tahun, dari 8,46 tahun di tahun 2021 menjadi 8,63 tahun pada tahun 2022.

Grafik II. 16.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan RLS
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

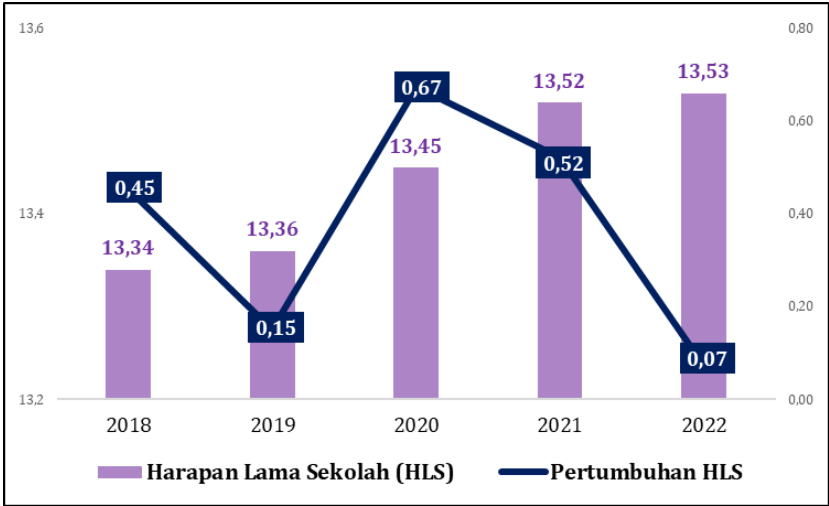


Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 11,55 tahun. Penduduk Makassar rata-rata dapat menempuh pendidikan hingga jenjang SMA kelas 2. Hal ini didukung oleh keberadaan Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan kota terbesar penduduknya di Indonesia bagian tengah dan timur sehingga fasilitas pendidikan dapat dikatakan sudah lebih maju. Kemudian diikuti oleh Kota Palopo (11,09 tahun) dan Kota Parepare (10,66 tahun). Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di ketiga kota ini rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA kelas 3. Sedangkan Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten dengan RLS terendah tahun 2022 di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 6,75 tahun atau setara dengan lulusan SD.

Dimensi pengetahuan Sulawesi Selatan di tahun 2022 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun pertumbuhannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Pada periode tahun 2018-2022 tren Harapan Lama Sekolah mengalami pertumbuhan positif namun dengan tren perlambatan pertumbuhan pada 2 tahun terakhir ini. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 0,07 persen atau mengalami pertumbuhan paling rendah sejak tahun 2018. Harapan Lama Sekolah (HLS) Sulawesi Selatan 2022 tumbuh sebesar 0,07 persen. Terdapat 7 kabupaten/kota yang pertumbuhan HLS nya lebih dari 1 persen juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Sinjai, Maros, Soppeng, Wajo, Enrekang, dan Luwu Timur. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

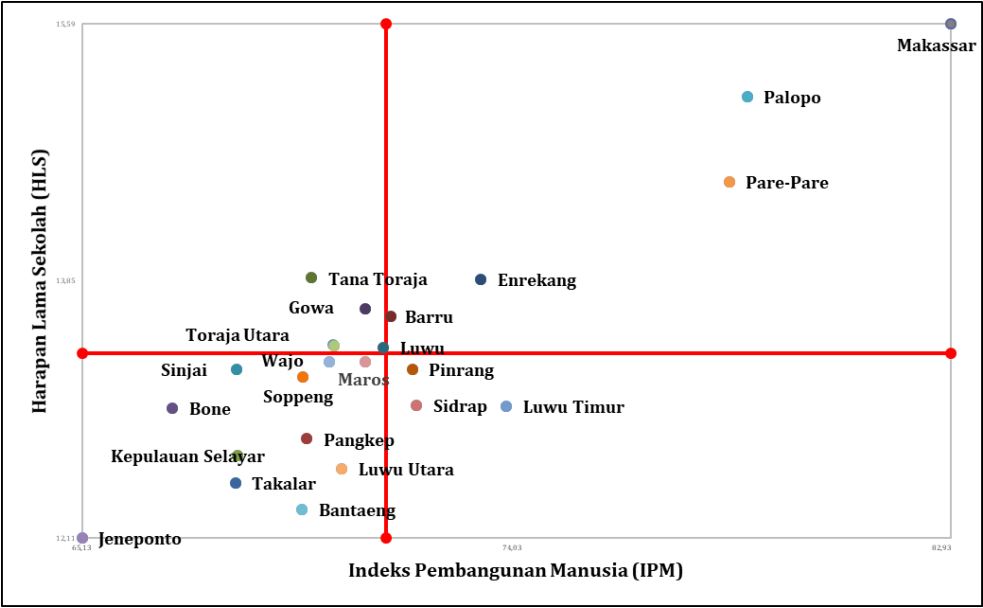
Grafik II. 17.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan hingga selama 13,53 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II. Jeneponto dan Bantaeng merupakan dua kabupaten dengan HLS terendah, masing-masing 12,11 tahun dan 12,30 tahun. Angka ini menunjukkan harapan bahwa penduduk umur 7 tahun ke atas akan dapat bersekolah hingga kelas 3 SMA. Sementara itu Kota Makassar, Palopo, dan Parepare memiliki angka HLS tertinggi di Sulawesi Selatan. Kota Makassar dengan HLS 15,59 tahun menggambarkan harapan penduduk berumur 7 tahun ke atas akan dapat menikmati pendidikan rata-rata hingga lulus diploma III.

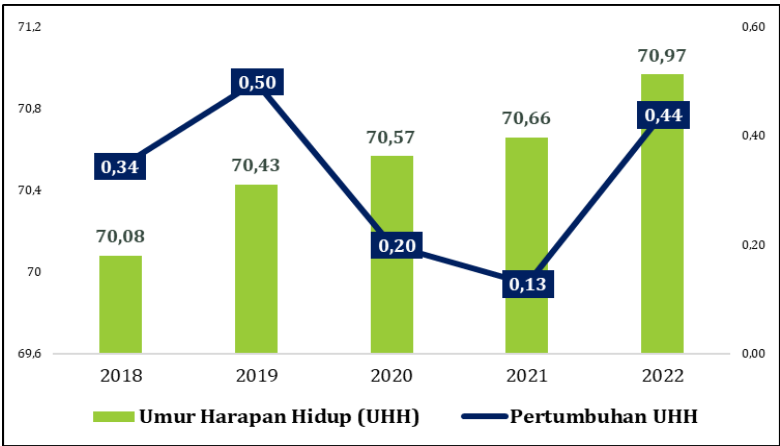
Grafik II. 18.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan HLS
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

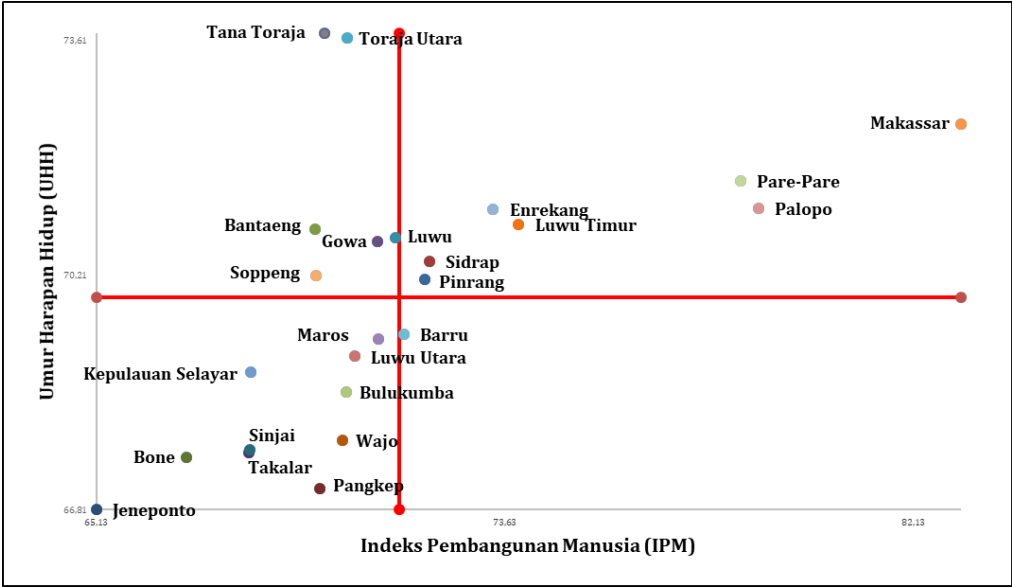
Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau Life Expectancy didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 70,97 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Grafik II. 19.
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

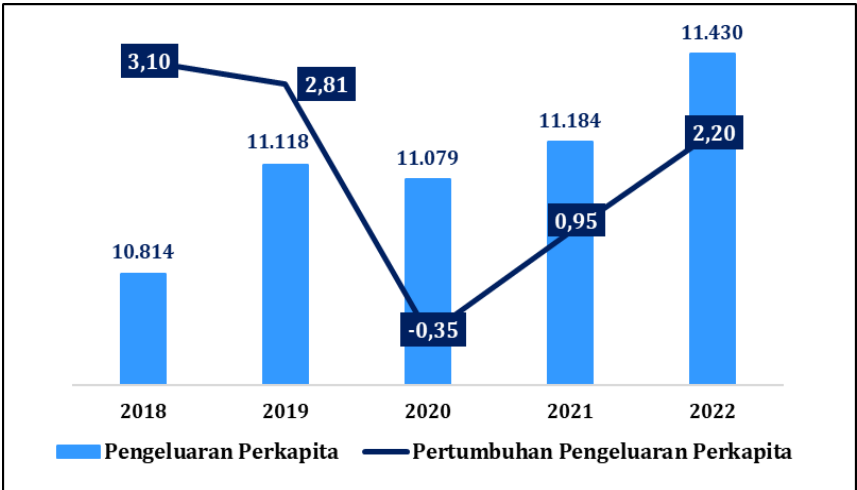
Grafik II. 20.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan UHH
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dalam konteks kewilayahan, ada 6 kabupaten/kota yang memiliki UHH lebih tinggi dari UHH Sulawesi Selatan dengan Umur Harapan Hidup tertinggi pada tahun 2022 adalah Tana Toraja (73,72 tahun) dan Toraja Utara (73,65 tahun). Berdasarkan teori ilmu demografi, disebutkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan memiliki umur yang lebih panjang dibanding mereka yang tinggal di wilayah dataran rendah. Selanjutnya Kabupaten Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan yang merupakan wilayah dataran rendah masih mencatatkan UHH terendah bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu dengan pencapaian UHH masing-masing sebesar 66,81 tahun dan 67,12 tahun. Hanya 6 kabupaten/ kota dengan pencapaian UHH di atas UHH Sulawesi Selatan yaitu Enrekang, Palopo, Parepare, Makassar, Toraja Utara , dan Tana Toraja. Sedangkan 18 kabupaten lainnya memiliki UHH dibawah UHH Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, Bone dan Takalar adalah 4 kabupaten dengan umur harapan hidup terendah di Sulawesi Selatan.

Grafik II. 21.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

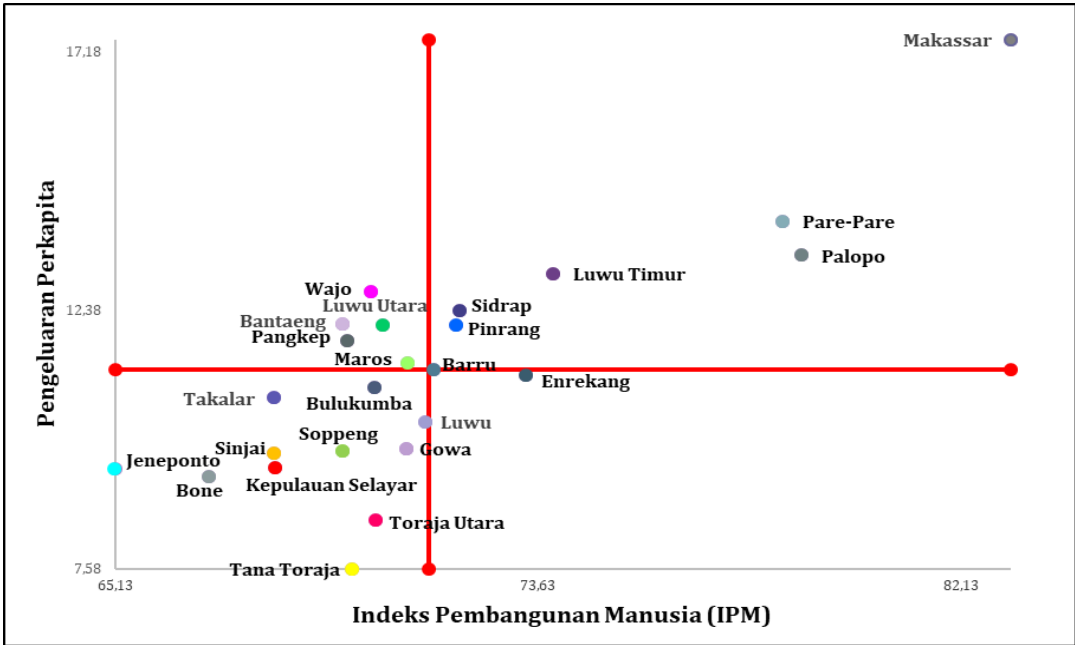


Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan mencapai Rp. 11,43 juta. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,20 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pengeluaran per kapita Sulawesi Selatan mulai kembali meningkat setelah di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,35 persen. Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan pertumbuhan dan tahun 2019 hingga 2020 mengalami pertumbuhan negatif, kemudian pada tahun 2020 hingga 2022 tren pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh positif sebesar 2,20 persen. Jika pada tahun 2018 pengeluaran per kapita penduduk sebesar 10,814 juta rupiah, maka pada tahun 2022 telah mencapai 11,430 juta rupiah.

Secara umum pengeluaran perkapita disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tren meningkat. Terdapat kesenjangan pengeluaran perkapita disesuaikan antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Daerah dengan pengeluaran perkapita disesuaikan terendah adalah Tana Toraja yaitu sebesar Rp 7,58 juta/kapita/tahun. Sementara itu Makassar memiliki pengeluaran perkapita disesuaikan terbesar yaitu mencapai Rp 17,41 juta/kapita/tahun. Pada tahun 2022, terdapat 10 kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran perkapita disesuaikan lebih tinggi dari nilai provinsi yaitu Pangkep, Pinrang, Luwu Utara, Bantaeng, Sidrap, Wajo, Luwu Timur, Palopo, Parepare, dan Makassar. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 22.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

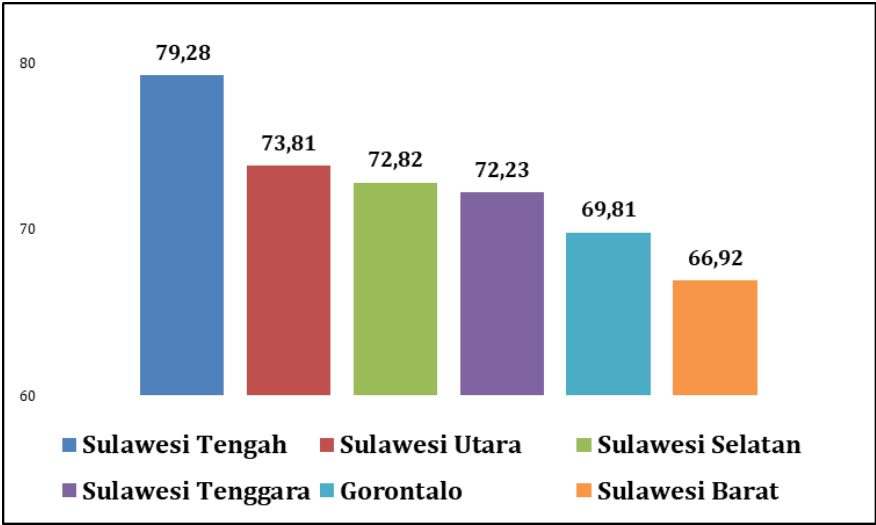


Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pulau Sulawesi secara administratif terbagi menjadi 6 Provinsi dengan Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian angka IPM paling tinggi dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya. Adapun Sulawesi Selatan berada di urutan ke 2, satu peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tenggara dan di

urutan selanjutnya ada provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

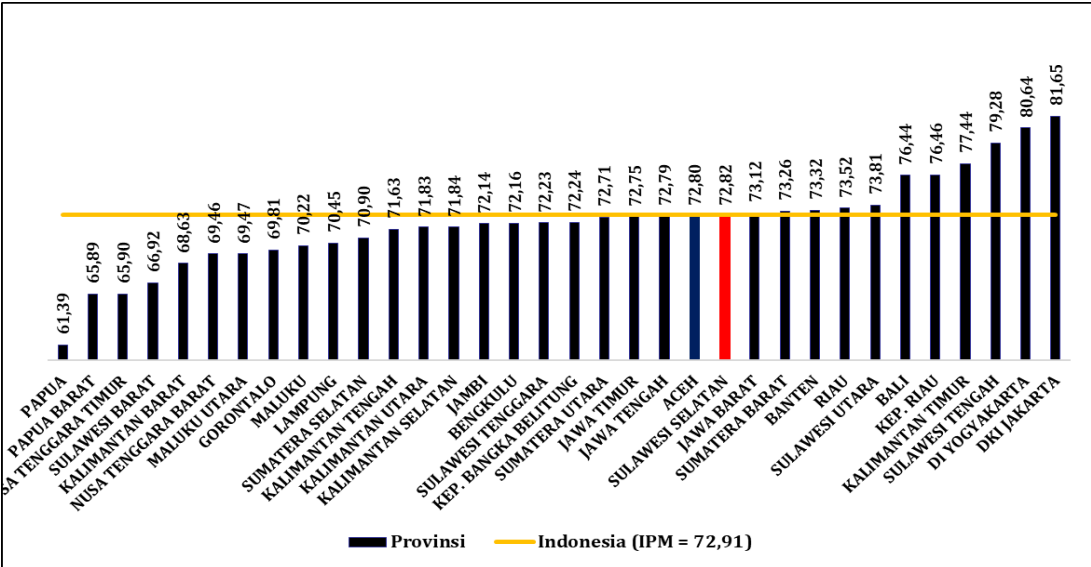
Grafik II. 23.
Perbandingan IPM Regional Sulawesi Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Masih terdapat ketimpangan pembangunan manusia di Pulau Sulawesi, terdapat 2 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “sedang” sementara 4 provinsi lainnya sudah berstatus “tinggi”, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah yang berubah statusnya menjadi tinggi pada tahun 2022 dengan capaian IPM sebesar 70,28.

Grafik II. 24.
Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2022 berada di urutan ke-11 dibandingkan 34 provinsi lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian wilayah setaranya pada level “menengah”, capaian IPM Sulawesi Selatan tertingi dimana masih terdapat 10 Provinsi lainnya dengan capaian IPM lebih rendah.

2.2.2.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata

Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS), merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

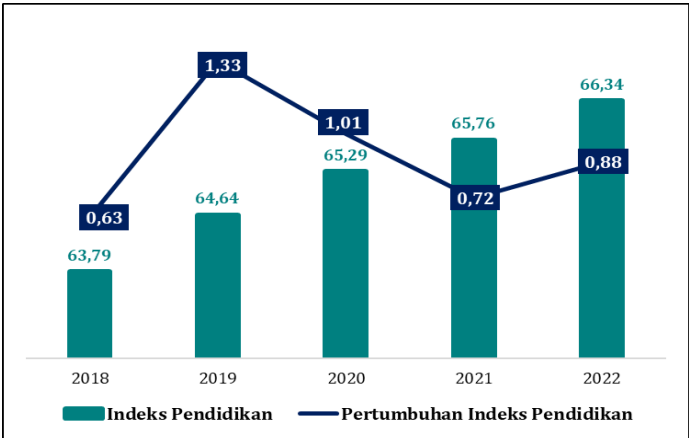
Tabel II.36.
Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pendidikan	Nilai	63,79	64,64	65,29	65,76	66,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Indeks pendidikan Provinsi Sulawesi selatan tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan. Tahun 2019 merupakan pertumbuhan tertinggi Indeks Pendidikan selama kurun waktu tersebut. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 25.
Perkembangan Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



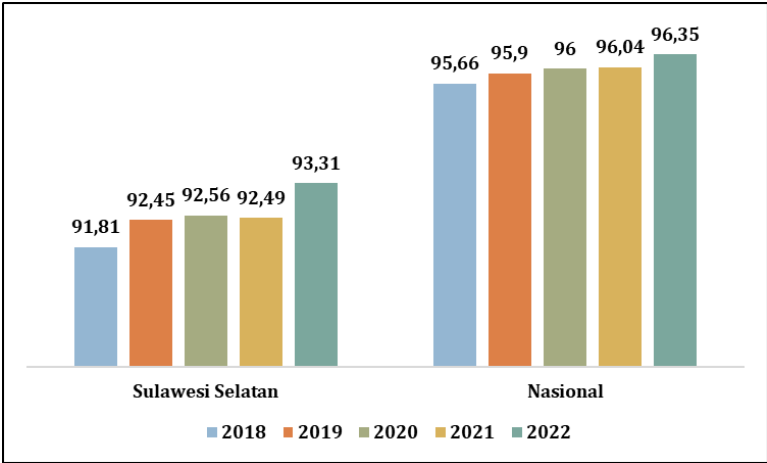
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.2.3. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan trend peningkatan namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,16 persen dengan nilai capaian sebesar 92,49 persen. Angka Melek Huruf di Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,89 poin dengan capaian

sebesar 93,31 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 6,69 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak dapat membaca dan menulis. Meskipun demikian tahun 2022 merupakan pertumbuhan angka melek huruf tertinggi pada periode tahun 2018 hingga 2022. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 26.
Perkembangan Angka Melek Huruf
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka melek huruf Sulawesi Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Sehingga peningkatan kemampuan baca tulis bagi masyarakat khususnya yang berusia 15 tahun keatas perlu mendapat perhatian mengingat penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

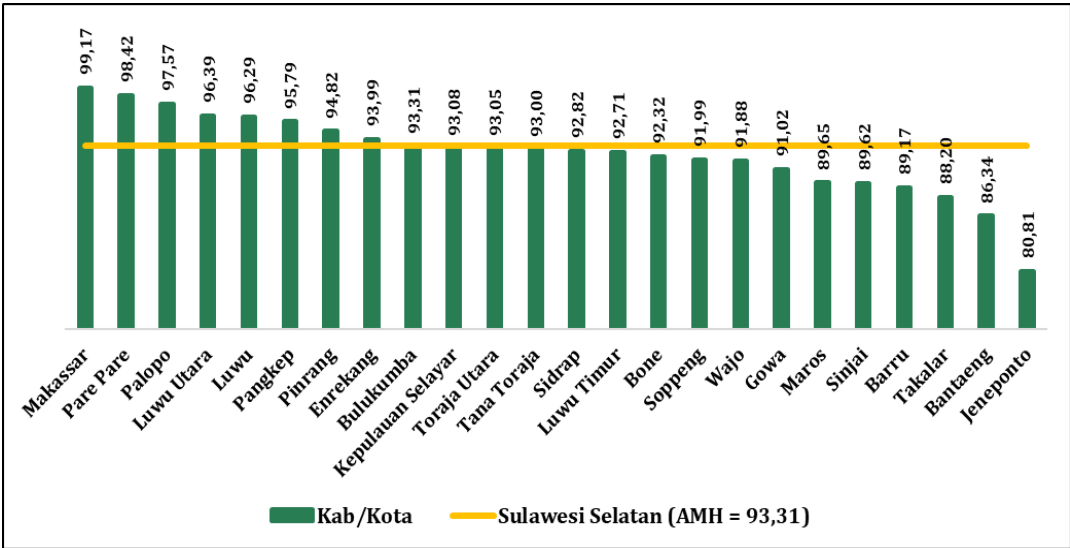
Tabel II.37.
Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Sulawesi Selatan dan Nasional, 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	91,81	92,45	92,56	92,49	93,31
Nasional	%	95,66	95,9	96	96,04	96,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Capaian terendah angka melek huruf pada tahun 2022 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 80,81 persen yang hanya mengalami peningkatan 0,25 poin dari tahun sebelumnya sedangkan capaian tertinggi di Kota Makassar sebesar 99,17 persen dengan peningkatan 0,94 poin dari tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 27.
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.4. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diukur menggunakan capaian umur harapan hidup dimana dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2018 hingga 2022 cenderung stabil pada kisaran 70 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020 saat tahun pertama terjadi pandemi covid19, umur harapan hidup di Sulawesi Selatan masih tetap tumbuh dari tahun sebelumnya namun tidak secepat pertumbuhan di tahun 2019 yang mencapai 0,50 persen. Kemudian 2 tahun setelah pandemi terjadi, tren pertumbuhan UHH Sulawesi Selatan Kembali mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.38.
Indeks Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

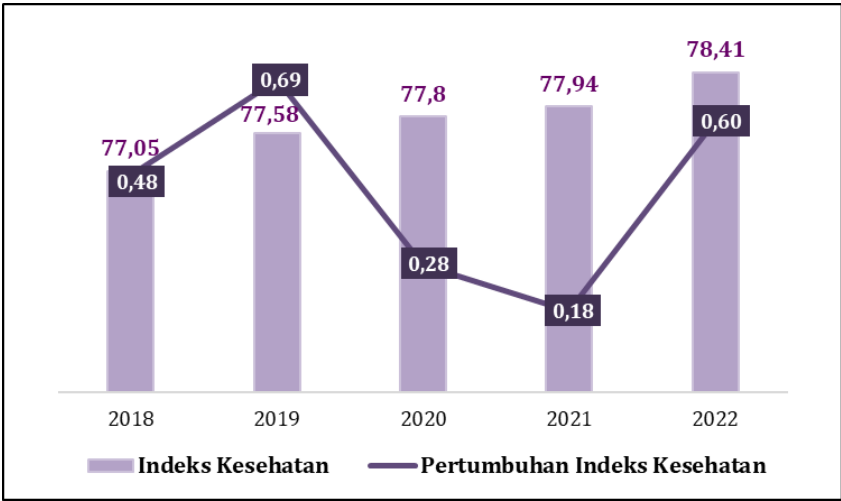
Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesehatan	Nilai	77,05	77,58	77,80	77,94	78,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Perkembangan UHH terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2022, UHH telah mencapai 70,97 yang diinterpretasikan bahwa anak lahir hidup di Sulawesi Selatan memiliki peluang hidup sampai 70,97 tahun. Pada tahun 2018 Umur Harapan Hidup saat lahir di Sulawesi Selatan adalah 70,08 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 70,97 tahun. Kondisi peningkatan UHH menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta

kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya UHH di Sulawesi Selatan. Gambaran peningkatan Indeks Kesehatan di Sulawesi Selatan selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 28.
Perkembangan Indeks Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Selatan. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 6.889.399 orang, naik sebanyak 71.799 orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 4.559.375 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 2.330.024 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 4.353.650 orang penduduk yang bekerja dan 205.725 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 146.593 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 193.217 orang, sementara pengangguran turun sebanyak 46.624 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

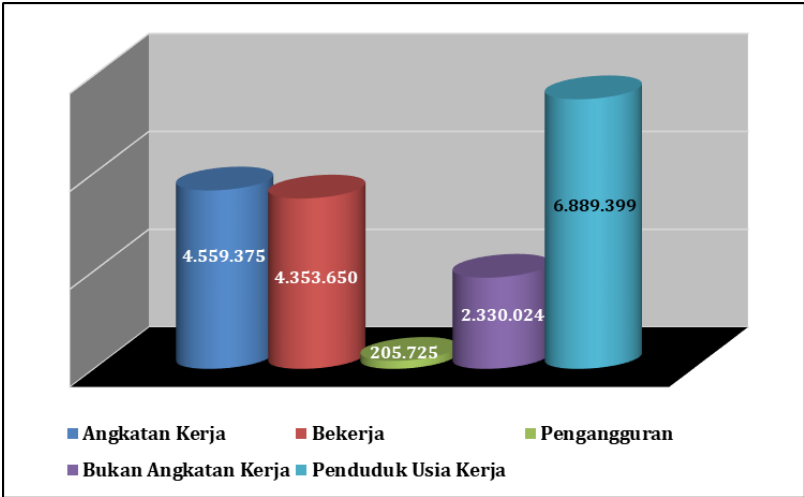
Tabel II.39.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Periode Agustus)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	Orang	3.988.029	4.030.400	4.280.000	4.412.782	4.559.375
Bekerja	Orang	3.774.924	3.830.096	4.010.000	4.160.433	4.353.650
Pengangguran	Orang	213.105	200.304	269.817	252.349	205.725
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.340.550	2.376.885	2.468.484	2.404.818	2.330.024
Penduduk Usia Kerja	Orang	6.328.579	6.407.285	6.744.921	6.817.600	6.889.399
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,02	62,90	63,40	64,73	66,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 4.559.375 orang, naik 146.593 orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2022 mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 66,18 persen, mengalami peningkatan 1,45 persen poin dibanding Agustus 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 4.353.650 orang, naik sebanyak 193.217 orang dari Agustus 2021. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 38,53 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,92 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,19 persen. Peningkatan TPAK disebabkan meningkatnya angkatan kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja sektor informal lebih tinggi daripada sektor formal dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor formal pada tahun 2022 sebesar 1.586.772 jiwa mengalami peningkatan sebesar 3,75 persen poin dari tahun 2021. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal pada tahun 2022 sebesar 2.766.878 jiwa mengalami peningkatan sebesar 5,16 persen poin dari tahun 2021.

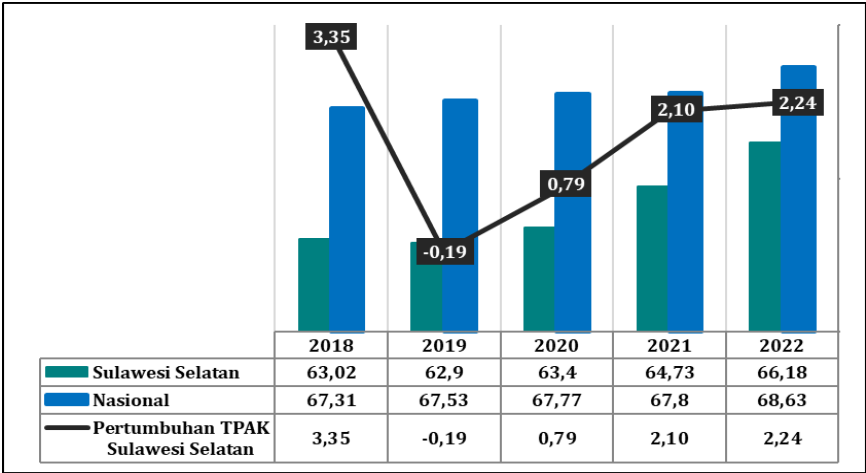
Grafik II. 29.
Dimensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Meskipun mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2022 namun TPAK Sulawesi Selatan masih berada dibawah TPAK Nasional.

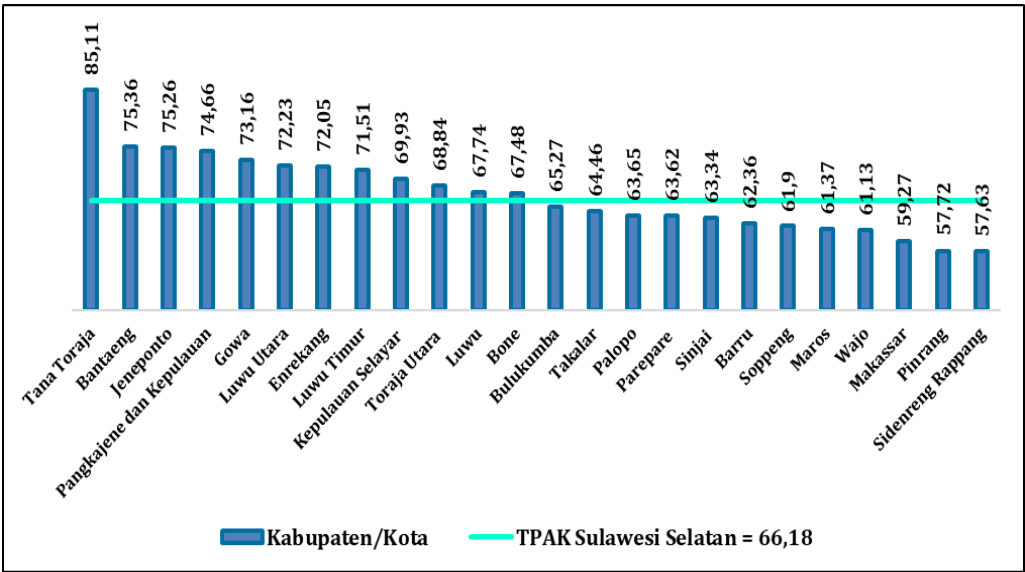
Grafik II. 30.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan, dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada tahun 2022 di Kabupaten Tana Toraja sebesar 85,11 persen dengan jumlah angkatan kerja sebesar 125.084 jiwa mengalami peningkatan sebesar 7,11 persen poin dari tahun 2021. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 57,63 persen dengan jumlah angkatan kerja 132.672 jiwa mengalami penurunan sebesar 1,08 persen poin dari tahun 2021.

Grafik II. 31.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Dalam tiga tahun terakhir, TPT periode Agustus Sulawesi Selatan terus menurun. Tercatat angka TPT Sulsel ditahun 2020 sebesar 6,31 persen, turun ditahun 2021 menjadi 5,72 persen kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin mencapai 4,51 persen pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,51 persen merupakan pencapaian pertumbuhan negatif tertinggi selama periode 2018 hingga 2022 yaitu sebesar -21,15 persen. Data perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

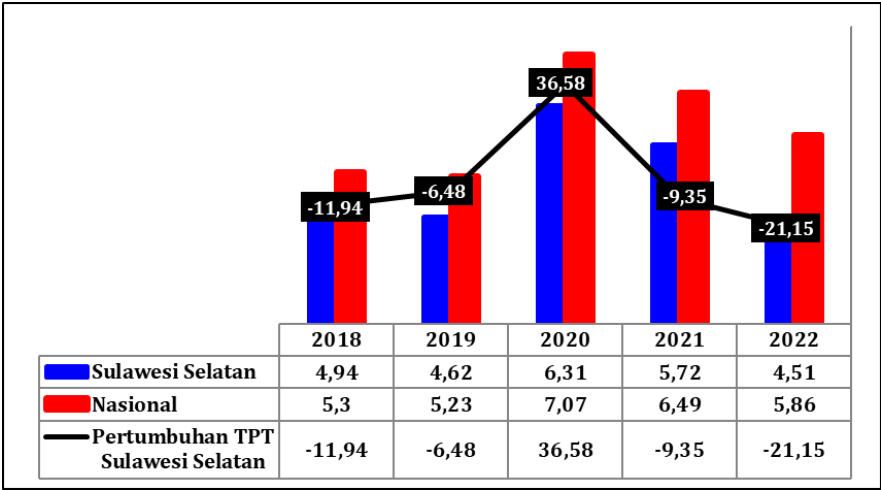
Tabel II.40.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51
Nasional	%	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Menggambarkan tren fluktuasi sejak tahun 2018 hingga 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional menunjukkan tren yang sama, namun capaian TPT Sulawesi Selatan masih berada dibawah capaian Nasional serta mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

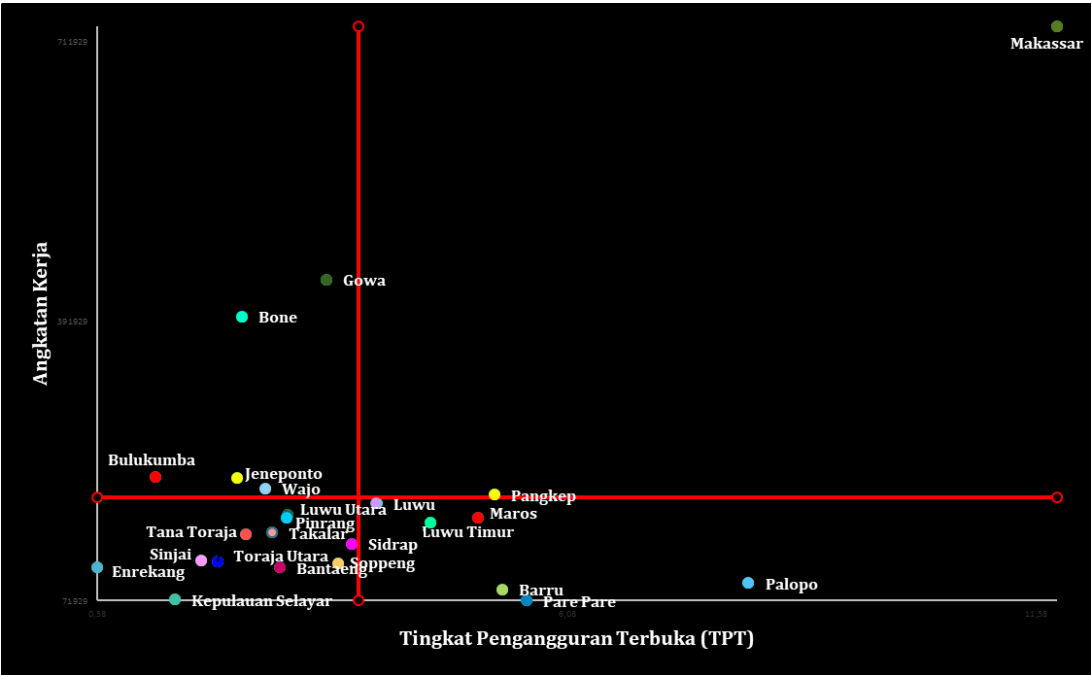
Grafik II. 32.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Jumlah pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -18,47 persen dengan jumlah 205.725 jiwa. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2022 tertinggi di Kota Makassar sejumlah 86.267 jiwa, sedangkan yang terendah di Kabupaten Enrekang sejumlah 461 jiwa.

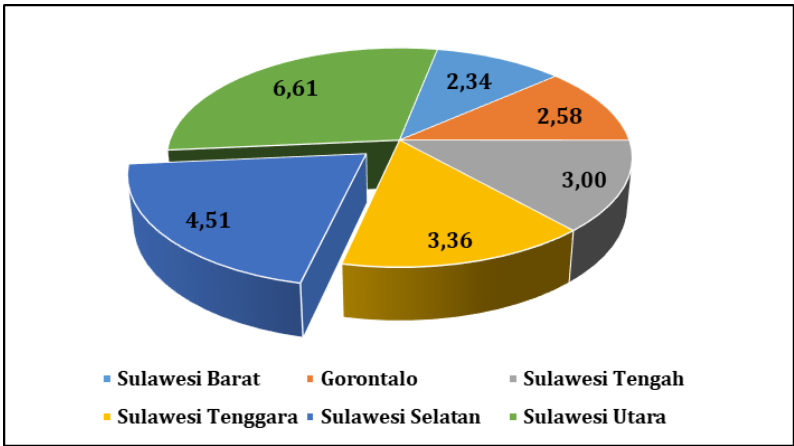
Grafik II. 33.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan wilayah regional sulawesi, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi daripada 4 provinsi lain pada regional sulawesi. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Diagram II.3.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dengan Regional Sulawesi Tahun 2022

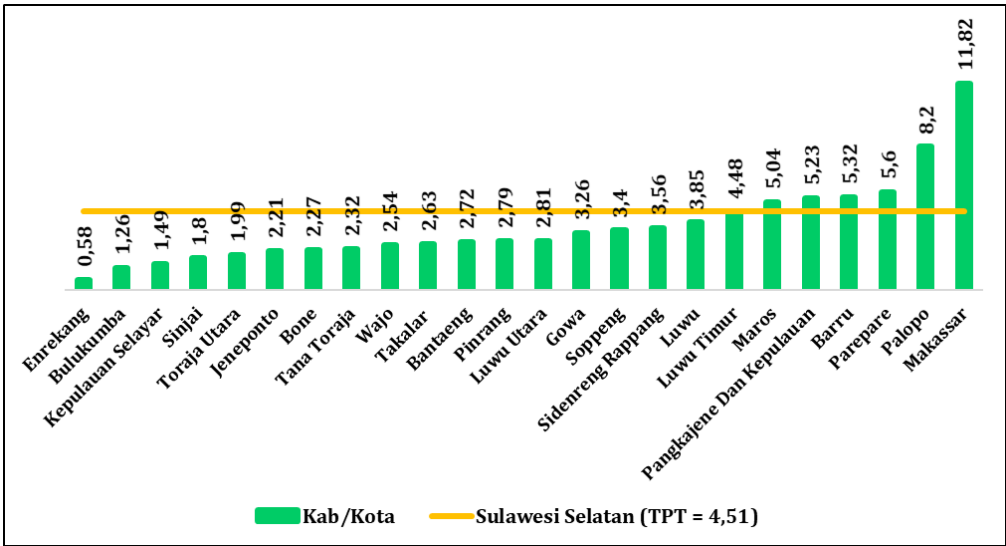


Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2022 masing-masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari Agustus 2021 dengan angka penurunan tertinggi di Kabupaten Bulukumba (-1,88), Bone (-

1,88), dan Sinjai (-1,81) dibanding Agustus 2021. Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan yang tertinggi di Kota Makassar sebesar 11,82 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Enrekang sebesar 0,58 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

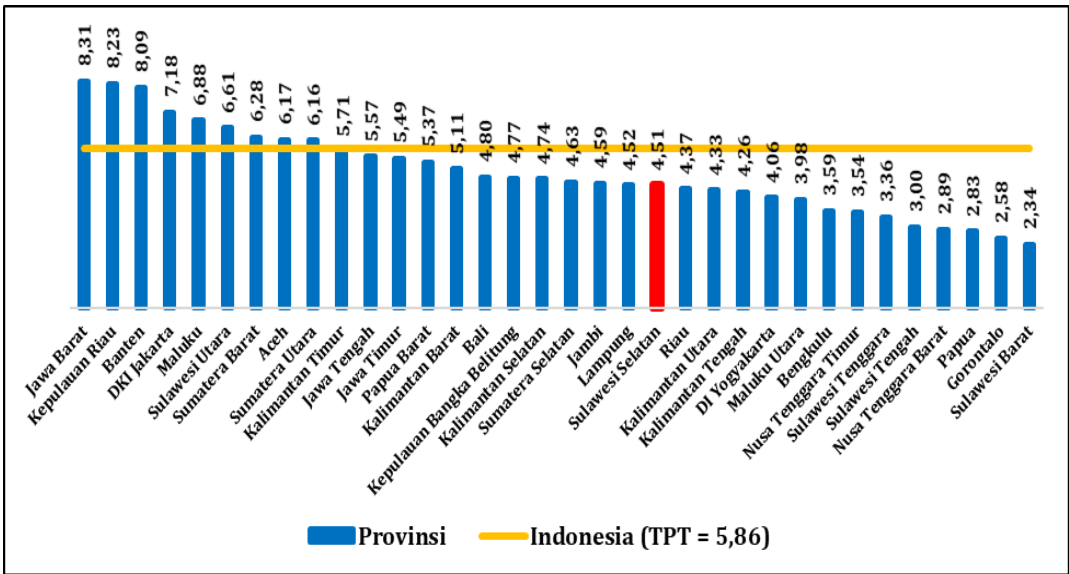
Grafik II. 34.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan Tingkat Penganguran Terbuka seluruh provinsi, capaian TPT Sulawesi Selatan berada pada peringkat kedua pada wilayah setaranya di level menengah yang menggambarkan dimana terdapat 9 provinsi lainnya yang menunjukkan capaian TPT lebih tinggi pada tahun 2022. Provinsi dengan capaian TPT tertinggi adalah Sulawesi Barat (2,34), sedangkan TPT dengan capaian terendah adalah Jawa Barat (8,31). Perbandingan TPT Sulawesi Selatan dengan wilayah setara dan provinsi lainnya tahun 2022 digambarkan pada grafik berikut.

Grafik II. 35.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia
Tahun 2022

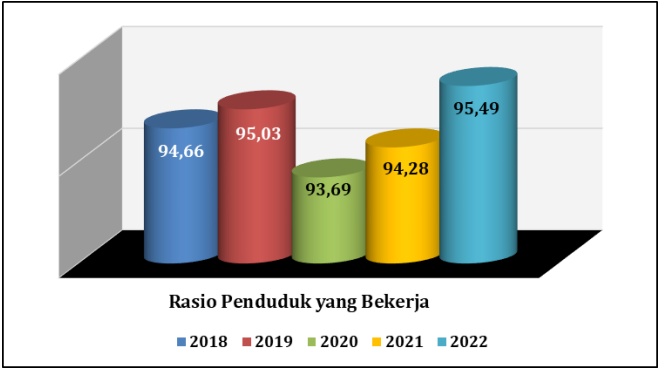


Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

2.2.2.7. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan mulai adanya peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebagai bentuk usaha pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid 19, kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan utama tertentu dari tahun 2020 ke tahun 2021. Lapangan kerja utama yang mengalami penurunan penyerapan jumlah tenaga kerja adalah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 2,4 persen, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan sebesar 19,24 persen, sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan sebesar 7,69 persen dan sektor real estate 14,33 persen.

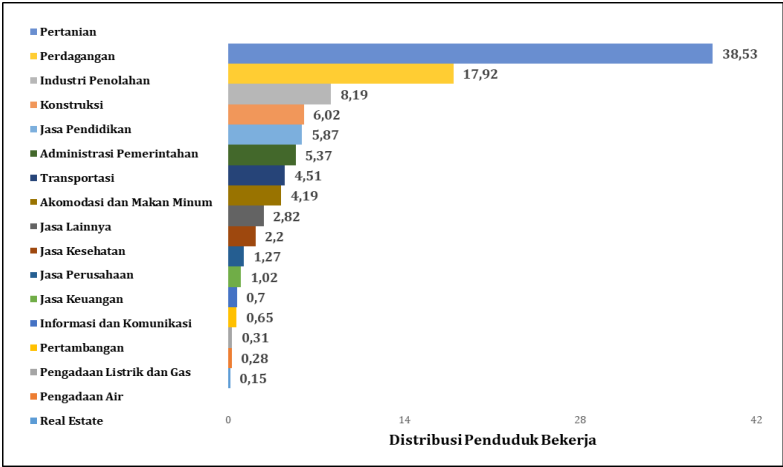
Grafik II. 36.
Rasio Penduduk yang Bekerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Dibandingkan Agustus 2021 Rasio Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tiga lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,01 persen poin); Pengangkutan dan Pergudangan (0,63 persen poin); dan Jasa Lainnya (0,44 persen poin).

Grafik II. 37.
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 38,53 persen; Perdagangan Besar Dan Eceran sebesar 17,92 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,19 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2021.

Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, rasio penduduk yang bekerja di Sulawesi Selatan berada diatas capaian Nasional pada tahun 2022. Data perbandingan rasio penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2018 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

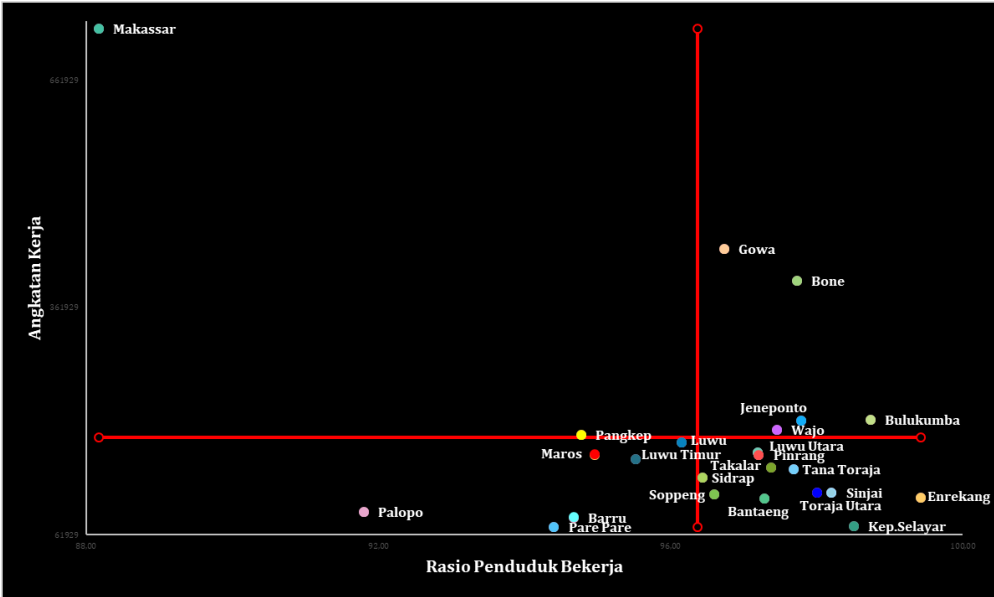
Tabel II.41.
Perbandingan Rasio Penduduk Bekerja (Periode Agustus)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	Perseratus Penduduk	94,66	95,03	93,69	94,28	95,49
Nasional	Perseratus Penduduk	94,66	94,72	93,69	95,06	94,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja di Sulawesi Selatan sebesar 4.353.650 jiwa sedangkan jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja sebesar 205.725 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja tertinggi di Kota Makassar sebesar 643.368 jiwa dan yang terendah di Kota Pare-Pare sejumlah 67.904 jiwa. Rasio penduduk yang bekerja terendah di Kota Makassar sebesar 88,18 persen dari 729.635 angkatan kerja, sedangkan rasio penduduk yang bekerja tertinggi di Kabupaten Enrekang sebesar 99,42 dari 110.369 angkatan kerja. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 38.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan
Rasio Penduduk Bekerja dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.8. **Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja**

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan bekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah merupakan jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri ditambah dengan jumlah pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja). Tahun 2022 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri sejumlah 994.371 jiwa dan tenaga kerja yang pekerja bebas keluarga sejumlah 738.968 jiwa, serta jumlah kesempatan kerja 4.353.650 jiwa dengan capaian 39,81 persen menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,67 poin dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.42.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan
Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	36,50	36,90	36,90	37,32	39,81

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.9. **Indeks Pelayanan Publik**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, nilai rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai IPP tersebut diperoleh melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada 2 Unit Pelayanan Publik (UPP), yaitu DPM-PTSP dengan nilai 4,44 (A-) dan Sistem Manunggal Satu Atap/ SAMSAT Provinsi dengan nilai 4,24 (A-). Kedua UPP telah menerapkan seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik yang meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, penyediaan Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta telah mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik. Namun, masih terdapat beberapa indikator terkait komitmen dan jaminan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. Capaian indeks pelayanan publik tahun 2018 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.43.
Indeks Pelayanan Publik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik	%	B-(3,49)	B(4)	B(4,02)	A-(4,10)	A-(4,34)

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun 2023

2.2.2.10. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerimaan pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Berdasarkan nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada 14 OPD/Unit Pelayanan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai indeks mengalami peningkatan sebesar 5,37 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 serta merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2018.

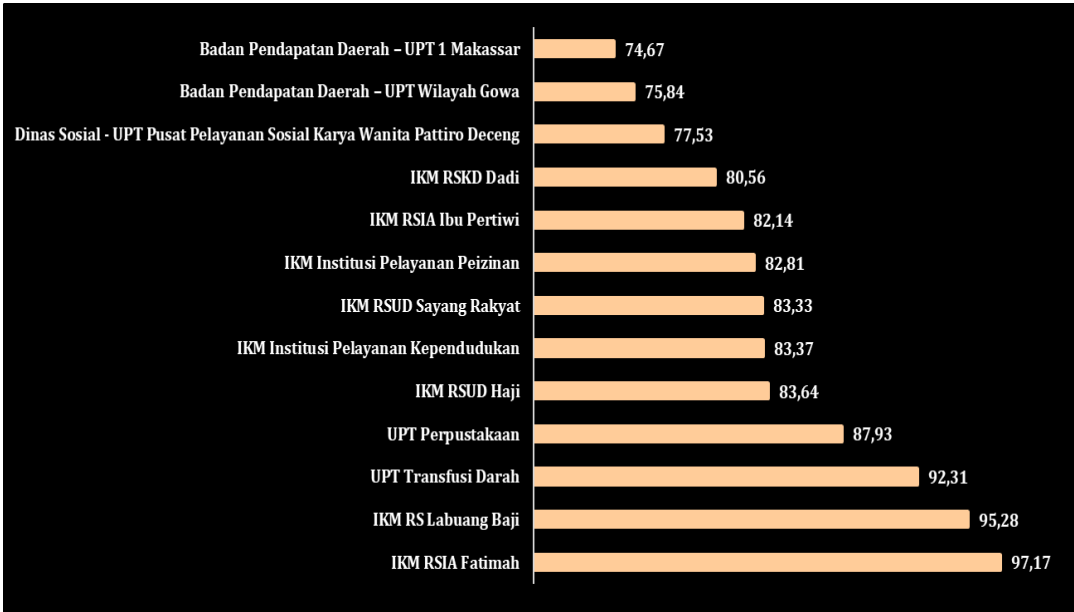
Tabel II.44.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	51,55	80,92	77,32	78,31 (B)	84,35 (B)

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Tahun 2023

Adapun indeks kepuasan masyarakat yang dicapai dari masing-masing institusi yang terdiri dari institusi perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan, pendapatan, sosial, perpustakaan menunjukkan rata-rata capaian dalam kelompok kategori B. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 39.
Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Pelayanan Institusi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Biro Organisasi, Dinas Dukcapil, Dinas PM dan PTSP, Tahun 2023

2.2.2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Metodologi perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan UNDP yang mencakup dimensi antara lain: a) Dimesi Umur Panjang dan Sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup pada saat lahir laki-laki dan perempuan; b) Dimensi Pengetahuan dengan indiktor Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki dan perempuan; c) Dimensi Kehidupan yang Layak dengan indikator Perkiraan Pendapatan laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren penurunan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki semakin tinggi. Namun pada tahun 2022 capaian Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 93,14 persen serta masih berada diatas capaian nasional. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.45.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	93,15	93,09	92,86	92,85	93,14
Nasional	%	90,99	91,07	91,07	91,27	91,63

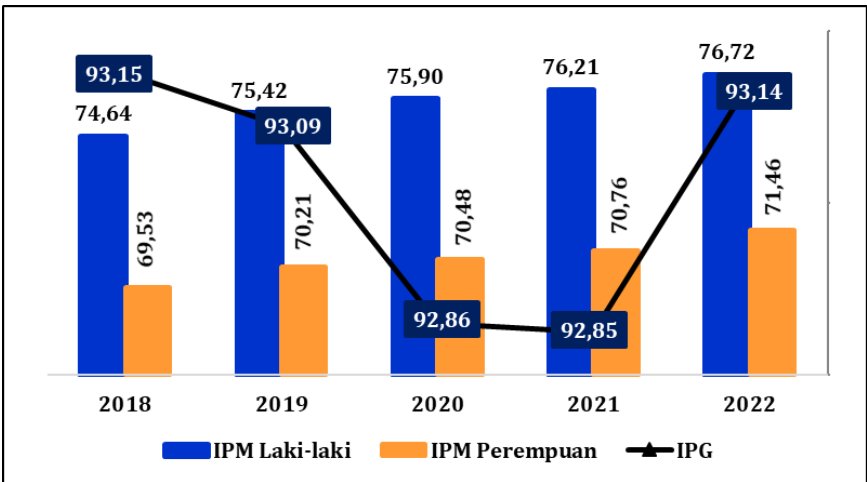
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Masih terdapatnya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Sulawesi Selatan

masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Fenomena penurunan IPG terjadi pada tahun 2019 hingga 2021 dimana dimana IPG Sulawesi Selatan turun sekitar 0,06 persen di tahun 2019, kemudian turun -0,25 persen di tahun 2020, dan -0,01 persen di tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,31 persen.

Tahun 2022 capaian IPG tertinggi di Kabupaten Sinjai dengan capaian 98,13 persen dimana perbandingan IPM Laki-Laki dan Perempuan paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya dengan rasio IPM sebesar 0,98. Sedangkan capaian IPG terendah di Kabupaten Takalar sebesar 87,66 persen dengan rasio IPM Laki-Laki dan Perempuan sebesar 0,88. Nilai indeks jika semakin mendekati angka 1, maka kesenjangan pembangunan manusia antara Laki-Laki dan Perempuan semakin kecil. Gambaran perbandingan IPM Laki-Laki dan Perempuan serta capaian IPG di Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut.

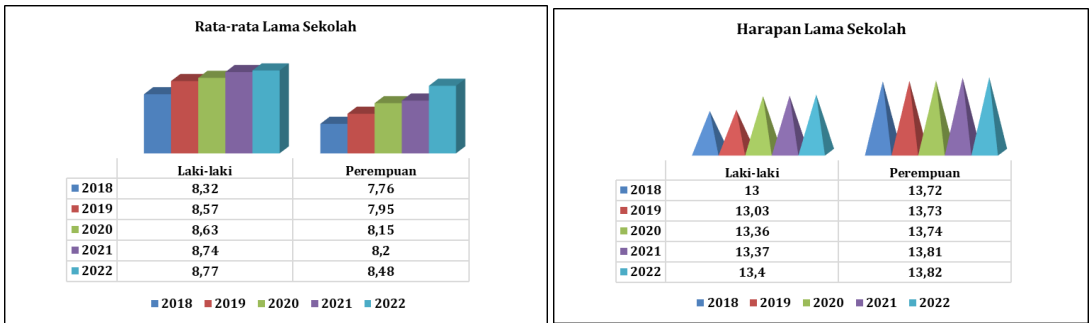
Grafik II. 40.
Perbandingan IPM Laki-laki dan IPM Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

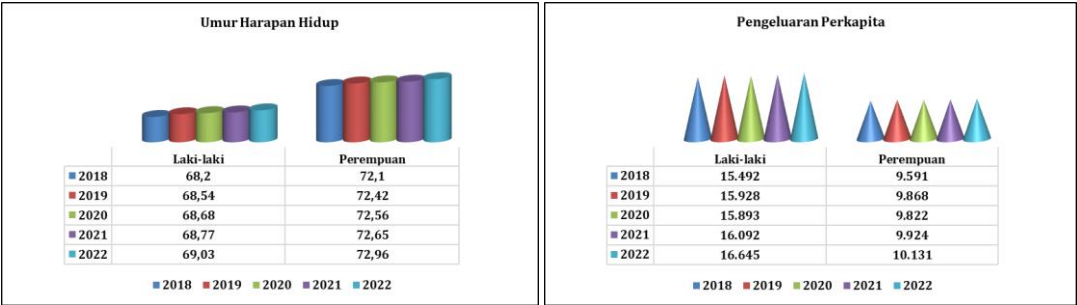


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Sejak tahun 2019 hingga 2021, pertumbuhan IPM laki-laki lebih cepat dibanding perempuan. Perkembangan dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 41.
Dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022





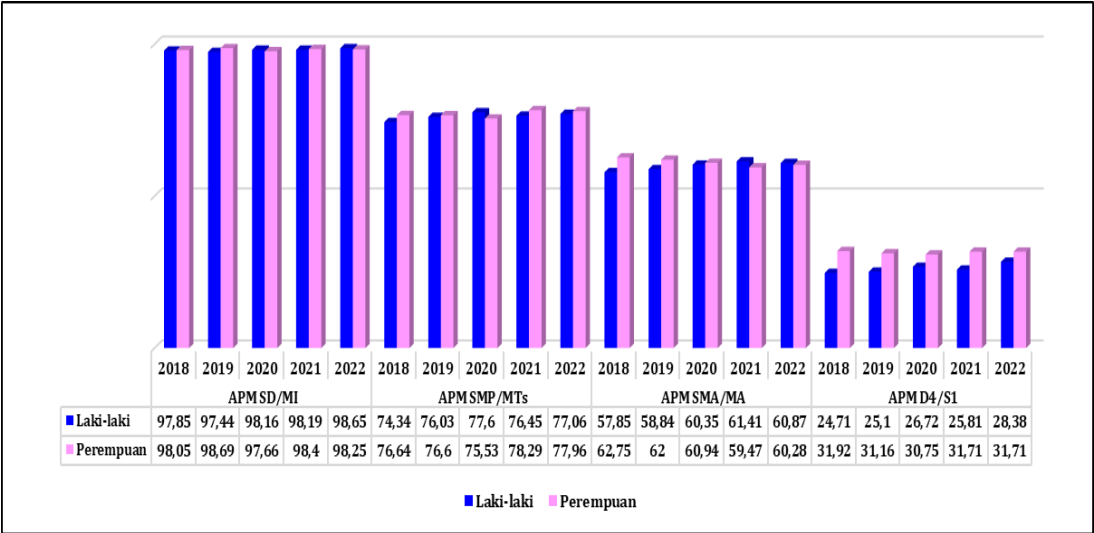
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Realita ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah tercatat dalam angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Secara rata-rata tahun 2022 laki-laki di Sulawesi Selatan sudah mampu mengenyam pendidikan hingga 8,77 tahun atau sekitar kelas 2-3 SMP, sementara perempuan masih sekitar 8,48 tahun. Meski demikian, secara rata-rata, dalam kurun 2018 hingga 2022 trend pertumbuhan RLS perempuan ternyata lebih cepat dibanding laki-laki. Peluang bersekolah anak perempuan sedikit lebih baik dibanding laki-laki. Pada tahun 2022, HLS perempuan tercatat 13,82 tahun, sementara laki-laki 13,4 tahun. Rendahnya peluang bersekolah laki-laki dibanding perempuan terkait fenomena diantaranya jumlah tenaga kerja anak laki-laki yang lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ekonomi memaksa pekerja anak untuk bekerja, yang berimbas pada anak putus sekolah.

Dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Beberapa studi ilmiah telah membuktikannya, mulai dari segi kromosom, hormonal hingga gaya hidup, perempuan cenderung lebih unggul. Hal inilah yang menyebabkan secara umum umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Pada tahun 2022 UHH perempuan di Sulawesi Selatan telah mencapai 72,96 tahun, sementara laki-laki mencapai 69,03 tahun yang menggambarkan bahwa perempuan hidup lebih lama dibanding laki-laki. Secara akumulasi UHH di Sulawesi Selatan tahun 2022 telah mencapai usia 70,97 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,44 persen. Peningkatan UHH yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan yang cenderung terus meningkat.

Ditinjau secara terpilah menurut gender dari tahun 2018 hingga 2022, pengeluaran perkapita yang disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Meski secara rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, namun kesenjangan PPP laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan masih cukup lebar. Tercatat di tahun 2022 pengeluaran perkapita disesuaikan laki-laki telah mencapai 16,645 juta rupiah, sementara perempuan sebesar 10,131 juta rupiah. Kondisi ini terkait fakta bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang memang lebih sedikit di banding laki-laki. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja. Dengan melihat kondisi ketenagakerjaan laki-laki dan perempuan, wajar apabila pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki.

Grafik II. 42.
Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Secara terpilah, APM perempuan untuk jenjang SD dan SMP tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Sedangkan pada jenjang SMA APM perempuan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 serta lebih rendah daripada APM laki-laki. Perlu perhatian pada APM perempuan jenjang SMA yang telah mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2022. Jika dibandingkan dengan laki-laki, maka APM perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pada jenjang SD dan SMP, sementara untuk jenjang SMA masih di bawah APM laki-laki. Melihat komposisi APM perempuan dan laki-laki tahun 2022, terjadi sedikit pergeseran APM secara gender. Meski demikian, secara umum perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang untuk melaksanakan pendidikan. Kesempatan sekolah sudah merata bagi siapapun di wilayah Sulawesi Selatan.

2.2.2.12. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2023, bahwa hasil evaluasi KemenPANRB untuk tahun 2022, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik, melalui perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi secara signifikan pada tahun 2022 sebesar 4,98 poin dibandingkan tahun 2021 atau merupakan capaian tertinggi Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2018 hingga 2022. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 66,16 (B) belum mencapai target sebesar 78,00 (BB).

Tabel II.46.
Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	%	B	B	B (60,07)	B (61,18)	66,16 (B)

Sumber : KemenPANRB, Tahun 2023

2.2.2.13. Nilai SAKIP Provinsi

Capaian nilai SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 2,04 poin dari nilai sebelumnya di tahun 2019. Kondisi ini memerlukan perbaikan yang signifikan untuk dapat mencapai target kriteria BB yang diharapkan pada tahun 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2023, capaian kinerja SAKIP pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,07 poin dari tahun 2021 atau menjadi capaian tertinggi nilai SAKIP dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel II.47.
Nilai SAKIP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (64,28)	B (65,06)	B (63,02)	B (65,01)	B (68,08)

Sumber: KemenPANRB, Tahun 2023

2.2.2.14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif, namun jika dikaji lebih lanjut fluktuasi nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan indikator yang pada tahun 2020 yaitu indikator indeks kualitas air laut (IKAL). Sehingga nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan dengan indikator pembangun Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan nilai, kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan nilai indeks kualitas air dan adanya penambahan 1 jenis indikator yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh peningkatan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas air laut.

Tabel II.48.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air	%	57,70	81,47	54,00	56,82	57,79
Indeks Kualitas Udara	%	88,67	88,69	88,73	89,13	90,35
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	60,41	61,14	63,56	55,40	55,46
Indeks Kualitas Air Laut	%	-	-	70,22	84,82	85,59
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,83	75,12	71,74	73,23	74,17

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2018-2023

2.2.2.15. Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Dukungan tersebut diwujudkan dengan penetapan PERGUB Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Gubernur ini antara lain mengatur pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK dan menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 2030.

Berdasarkan hasil kaji ulang Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD- GRK), target penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 3,5 juta ton CO² eq atau sebesar 5,6 persen terhadap nilai *Business as usual* (BAU). Berdasarkan data capaian indikator kinerja, potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat tercapai. Target penurunan emisi tahun 2022 adalah sebesar 1,198 juta ton CO₂ eq dengan realisasi penurunan emisi GRK sebesar 1,36 juta ton CO₂ eq. Tingkat capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2022 adalah 113,52 persen dengan jumlah kegiatan/aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan sebanyak 704 kegiatan.

Target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat tercapai setiap tahunnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten/kota. Sejak tahun 2020 kabupaten/kota secara aktif melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK yang yang dianggarkan melalui APBD masing-masing. Kegiatan yang telah dilaporkan melalui aplikasi AKSARA adalah yang dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya untuk semua sektor, yaitu; sektor hutan dan lahan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi, sektor energi dan sektor blue carbon. Provinsi

Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang aktif dan tepat waktu melaporkan aksi mitigasi ke aplikasi AKSARA, sehingga pada tahun 2021 berhasil menjadi salah satu provinsi terbaik pelaporan AKSARA selama 1 dekade (2010-2020).

Perkembangan kondisi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.49.
Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Potensi Penurunan emisi GRK	(Juta Ton CO2Eq)	0,84	0,89	0,96	1,13	1,36

Sumber: Pokja Pembangunan Rendah Karbon Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga

Ketersediaan gedung lembaga sanggar kesenian diprovinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Data menunjukkan setiap 100.000 penduduk terdapat 5 lembaga sanggar seni di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula halnya dengan jumlah gedung kesenian yang tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, kondisi ini disebabkan oleh titik berat pembangunan masih difokuskan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan dan perbaikan daya beli masyarakat. Data selengkapnya terkait dengan perkembangan seni budaya dan olah raga di Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.50.
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lembaga Sanggar Kesenian	Lembaga/10.000 penduduk	0,0452	0,0471	0,0468	0,0468	0,0468
Jumlah gedung kesenian	Unit/10.000 penduduk	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Jumlah Gedung Olah Raga	Unit/10.000 penduduk	0,0025	0,0026	0,0074	0,0074	0,0074

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaaan dan Olahraga, Tahun 2023

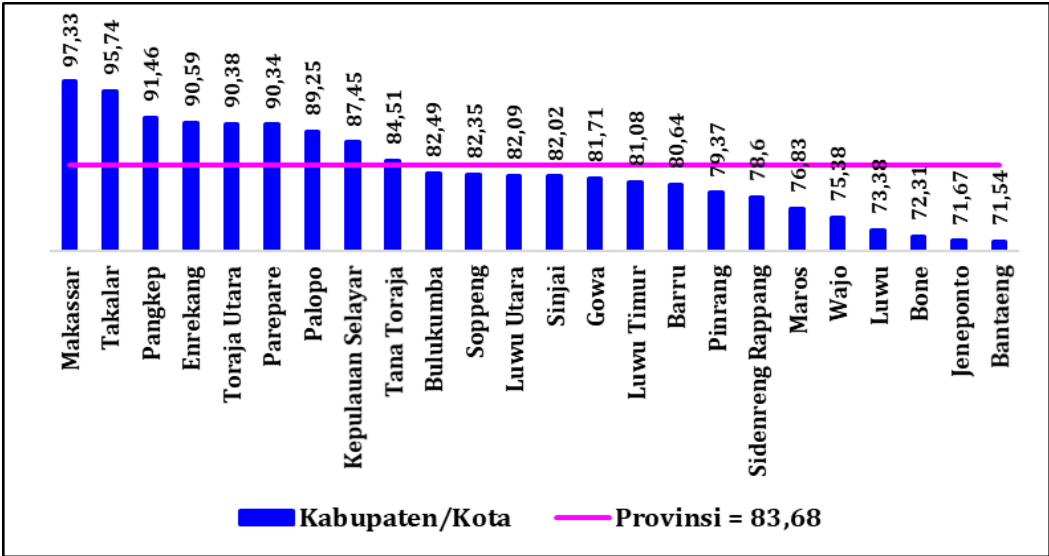
2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,89 persen capaian persentase jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2022 belum mencapai target nasional terkait pencapaian SPM Pendidikan sebesar 100 persen dengan capaian 83,68 persen atau sejumlah 478.899 penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dari total 478.899 penduduk usia 16-18 tahun.

Grafik II. 43.
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



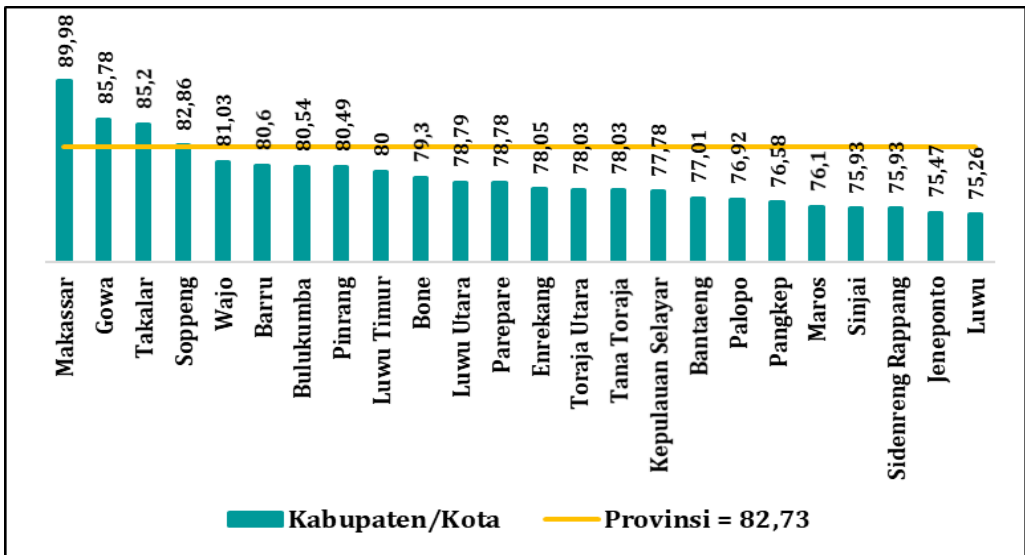
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemenuhan standar layanan minimal urusan pendidikan yaitu persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tertinggi di Kota Makassar sebesar 97,33 persen dari sejumlah 80.989 warga negara usia 16-18 tahun. Sedangkan persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar 71,45 persen dari sejumlah 8.375 warga negara usia 16-18 tahun.

Indikator kinerja pemenuhan standar layanan minimal urusan pendidikan terkait pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,34 persen dengan capaian 82,73 persen namun belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2022 sebesar 3.712 orang dari total 4.487 jumlah penduduk disabilitas usia 4-18 tahun. Persentase warga

negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus tertinggi di Kota Makassar sebesar 89,98 persen dari 1.347 warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas. Sedangkan persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus yang terendah di Kota Pare-Pare sebesar 77,78 persen dari sejumlah 117 warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 44.
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kinerja pembangunan pendidikan Sulawesi Selatan dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan antara lain angka partisipasi sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi sekolah diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Tahun 2018 hingga 2022 Angka Partisipasi Kasar tertinggi dicapai pada jenjang pendidikan SD/MI. Adapun jenjang dengan APK terendah adalah PAUD baik di Sulawesi Selatan maupun nasional.

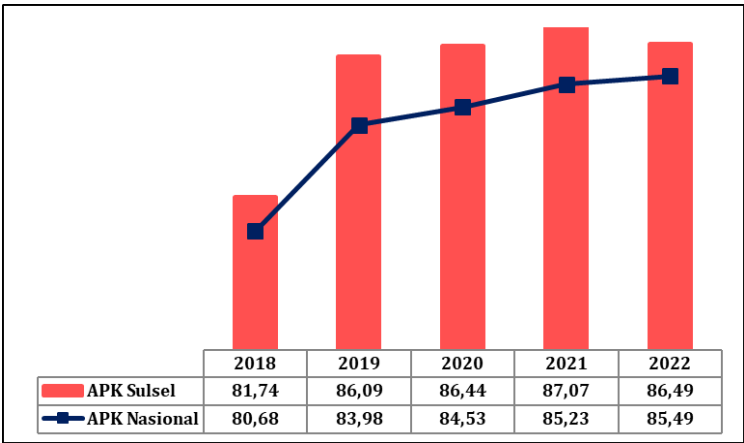
Tabel II.51.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan						
PAUD	%	32,16	29,74	31,79	29,41	30,56
SD/MI	%	110,28	108,46	106,99	106,85	106,71
SMP/MTs	%	86,97	84,22	86,97	86,82	86,19
SMA/SMK/MA	%	81,74	86,09	86,44	87,07	86,49
Nasional						
PAUD	%	37,92	36,93	37,52	35,59	35,28
SD/MI	%	108,61	107,46	106,32	106,2	106,27
SMP/MTs	%	91,52	90,57	92,06	92,8	92,11
SMA/SMK/MA	%	80,68	83,98	84,53	85,23	85,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Secara kewenangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,58 poin atau -0,66 persen dari tahun 2021. Namun demikian Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 masih diatas capaian nasional. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 45.
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM pada tiap jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan APM Nasional.

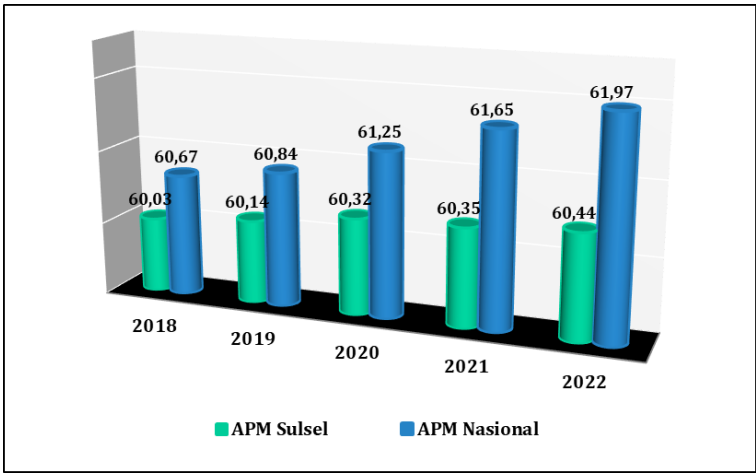
Tabel II.52.
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan						
SD Sederajat	%	98,03	98,06	97,98	98,26	98,41
SMP Sederajat	%	75,13	75,82	76,17	77,2	77,42
SM Sederajat	%	60,03	60,14	60,32	60,35	60,44
Nasional						
SD Sederajat	%	97,58	97,64	97,69	97,8	97,88
SMP Sederajat	%	78,84	79,4	80,12	80,59	80,89
SM Sederajat	%	60,67	60,84	61,25	61,65	61,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian APM pada jenjang pendidikan SD sederajat tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan serta berada diatas capaian nasional. Sedangkan capaian APM SMP dan SM sederajat pada tahun 2018 hingga 2022 meskipun mengalami peningkatan namun berada dibawah capaian nasional. Secara kewenangan capaian APM SM sederajat tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin atau 0,15 persen dari tahun 2021, namun masih berada dibawah capaian nasional.

Grafik II. 46.
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

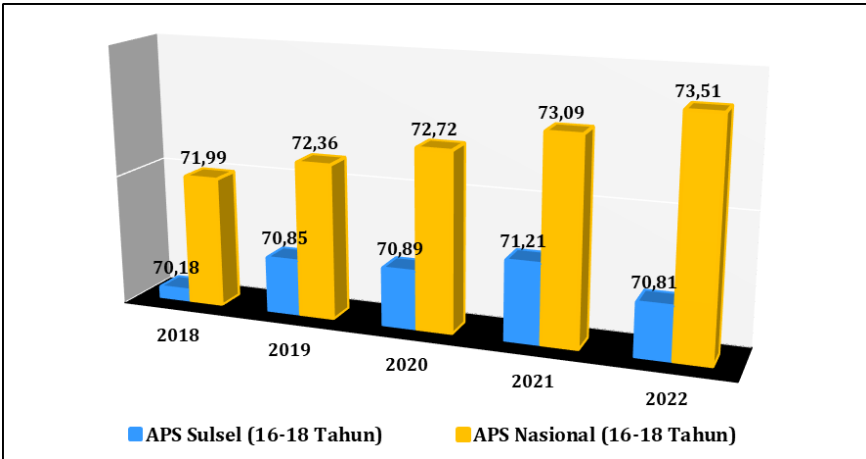
Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan pada setiap kelompok umur menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021.

Tabel II.53.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Jenjang Usia	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan						
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,25	99,23	99,25	99,29	99,43
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	93,13	93,22	93,34	93,55	93,2
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	70,18	70,85	70,89	71,21	70,81
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	33,72	34,44	34,51	35,08	35,07
Nasional						
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,22	99,24	99,26	99,19	99,1
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	95,36	95,51	95,74	95,99	95,92
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	71,99	72,36	72,72	73,09	73,51
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	24,4	25,21	25,56	26,01	25,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 47.
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tahun 2018 hingga 2022 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan masih lebih rendah dari capaian Nasional. Pada tahun 2022 Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia sekolah 16-18 tahun mengalami penurunan sebesar - 0,4 poin atau -0,56 persen dari capaian tahun 2021.

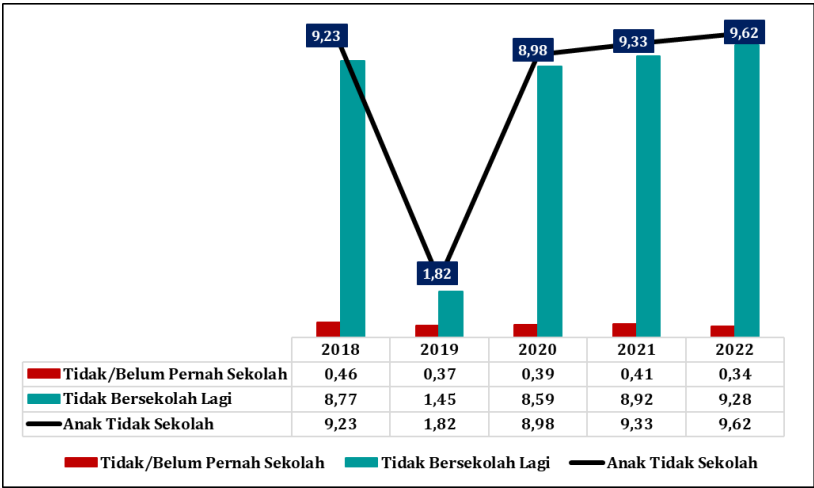
Dimensi angka partisipasi sekolah yaitu terdiri dari anak usia 7-18 tahun yang masih sekolah, tidak/belum pernah sekolah, dan tidak bersekolah lagi. Berdasarkan data Susenas tahun 2018 hingga 2022, persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah dan anak laki-laki usia 7-18 tahun lebih besar daripada anak perempuan usia 7-18 tahun. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.54.
Angka Anak Tidak Sekolah dan Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Jenis Kelamin	Satuan	Anak Tidak Sekolah (Usia 7-18 tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/Belum Pernah Sekolah						
Laki-laki	%	0,59	0,45	0,45	0,46	0,41
Perempuan	%	0,33	0,28	0,33	0,36	0,27
Tidak Bersekolah Lagi						
Laki-laki	%	10,08	1,71	9,11	9,67	9,71
Perempuan	%	7,41	1,18	8,06	8,15	8,83
Masih Bersekolah						
Laki-laki	%	89,34	97,84	90,44	89,87	89,88
Perempuan	%	92,26	98,53	91,6	91,49	90,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

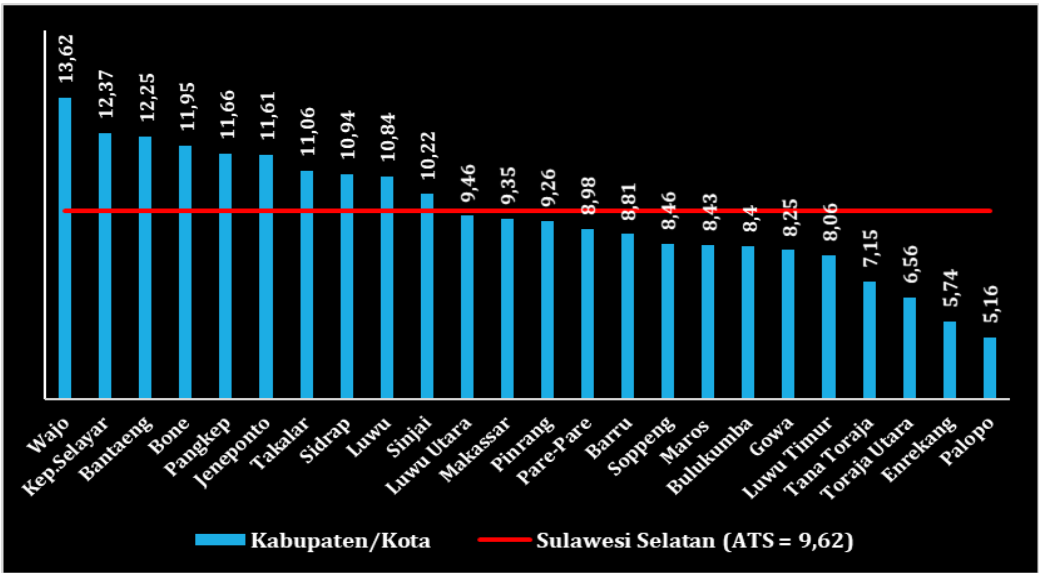
Grafik II. 48.
Perkembangan Angka Anak Tidak Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik diatas menggambarkan bahwa capaian angka anak tidak sekolah tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan dengan pertumbuhan 3,11 persen dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan capaian 9,62 persen. Pada tahun 2022 anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -0,32 persen dengan capaian 90,38 persen. Hal tersebut berarti 9,62 persen sisanya sedang tidak duduk di bangku sekolah (anak tidak sekolah). Jika dirinci menurut partisipasi sekolah, terdapat sebesar 0,34 persen anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan sebesar 9,28 persen anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi.

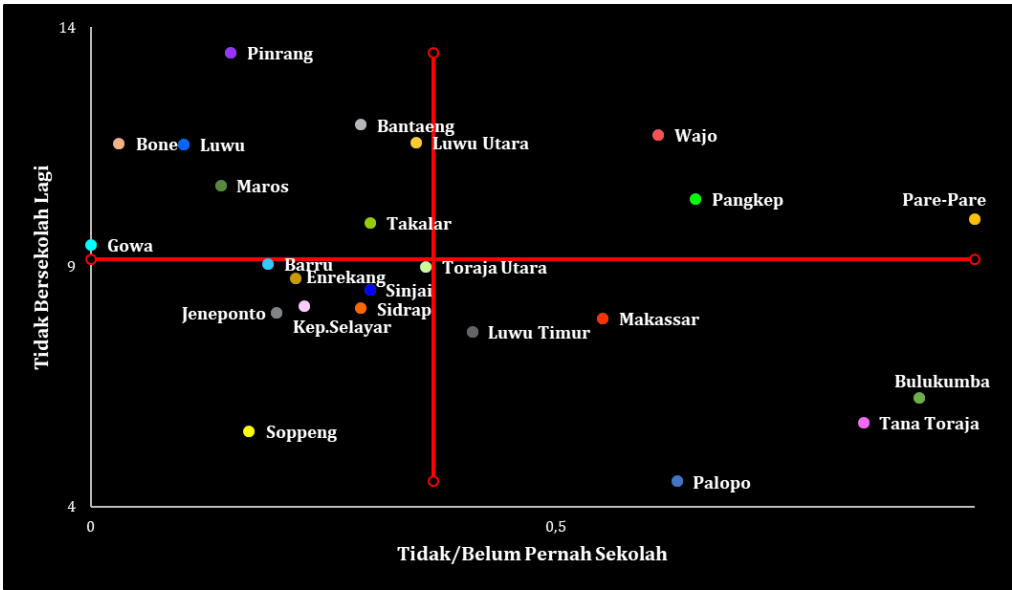
Grafik II. 49.
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2022 terdapat 10 kabupaten dengan capaian angka anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun yang berada diatas capaian provinsi yaitu Kabupaten Wajo, Kepulauan Selayar, Bantaeng, Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Takalar, Sidrap, Luwu, dan Sinjai.

Grafik II. 50.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Anak Usia 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Bersekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

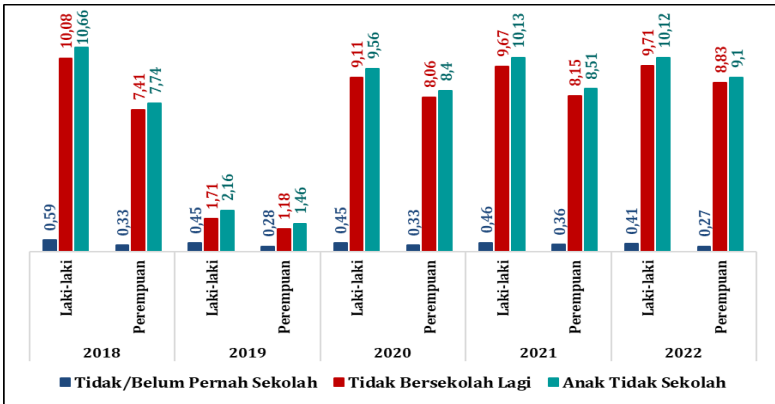


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Angka anak tidak sekolah tertinggi di Kabupaten Wajo mencapai 13,62 persen dengan rincian anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,61 persen, anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi sebesar 11,75 persen, dan anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah sebesar 87,63 persen. Sedangkan capaian anak tidak sekolah (ATS) terendah di Kota Palopo mencapai 5,16 persen dengan rincian anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,63 persen, anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi sebesar 4,52 persen, dan anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah sebesar 94,84 persen.

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi Kabupaten Pinrang adalah kabupaten yang tertinggi di Sulawesi Selatan dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2022. Sedangkan Kota Pare-Pare merupakan wilayah dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah tertinggi di Sulawesi Selatan.

Grafik II. 51.
Angka Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

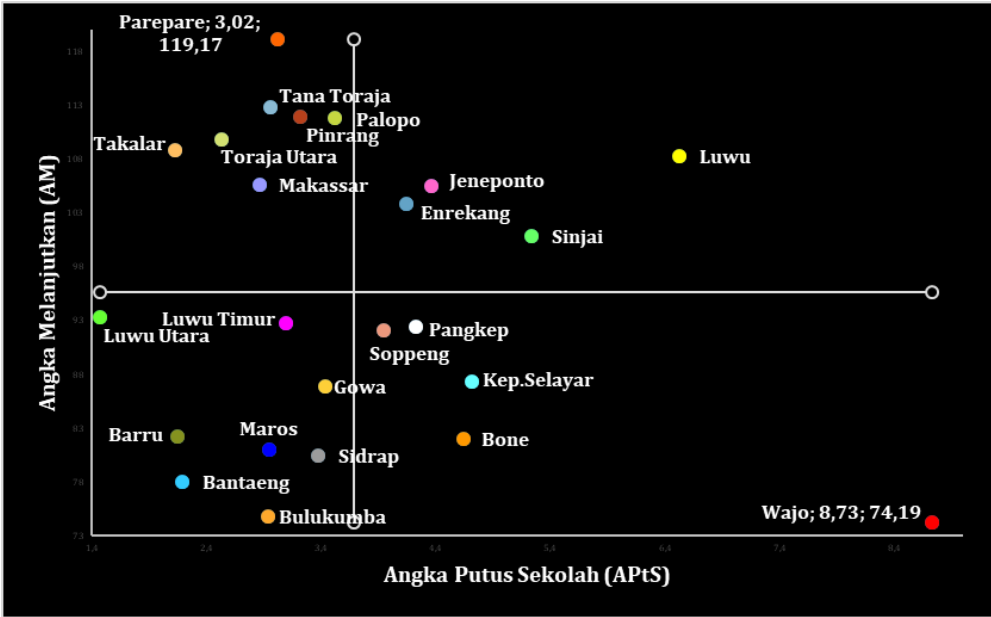


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Jika dipilah berdasarkan gender, tahun 2018 hingga 2022 angka anak tidak sekolah baik yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi untuk anak usia 7-18 tahun jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Capaian angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana pada tahun 2018 angka putus sekolah sebesar 1,10 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 0,71 persen. Angka ini menunjukkan adanya kondisi pemerataan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang semakin baik. Keberhasilan ini didukung adanya pendanaan dana BOS nasional yang setiap tahunnya meningkat dan adanya sebagian daerah menyediakan BOSDA. Pada tahun 2020 angka putus sekolah mengalami peningkatan menjadi 1,35 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,02 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 3,62 persen atau 15.315 jumlah siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah di Sulawesi Selatan tertinggi di Kabupaten Wajo sebesar 8,73 persen dengan jumlah siswa yang putus sekolah sebesar 1.193 dari 13.671 jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Sedangkan angka putus sekolah terendah di Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,47 persen dengan jumlah siswa yang putus sekolah sebesar 218 dari 14.844 jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

Grafik II. 52.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Putus Sekolah (APtS) dan
Angka Melanjutkan (AM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan yang mencapai 147.718 jumlah siswa baru SMA/SMK/MA dari 154.943 jumlah siswa SMP/MTs kelas III yang menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga tahun 2020 dimana salah satu penyebabnya adalah kondisi pandemic covid-19. Kondisi ini menunjukkan, menurunnya

kemampuan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/MA/SMK. Pada tahun 2022 angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tertinggi di Kota Pare-Pare sebesar 119,17 persen atau sejumlah 3.258 siswa baru dari 2.734 yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTs . Sedangkan angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terendah di Kabupaten Wajo sebesar 74,19 persen atau sejumlah 4.633 siswa baru dari 6.245 siswa yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTs.

Tabel II.55.
Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA dan
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Putus Sekolah	%	1,10	0,71	1,35	1,02	3,62
Angka Melanjutkan	%	98,99	97,20	92,07	93,82	95,34

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah. Angka melek huruf Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,85 persen dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 94,55 persen.

Tabel II.56.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-64 Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

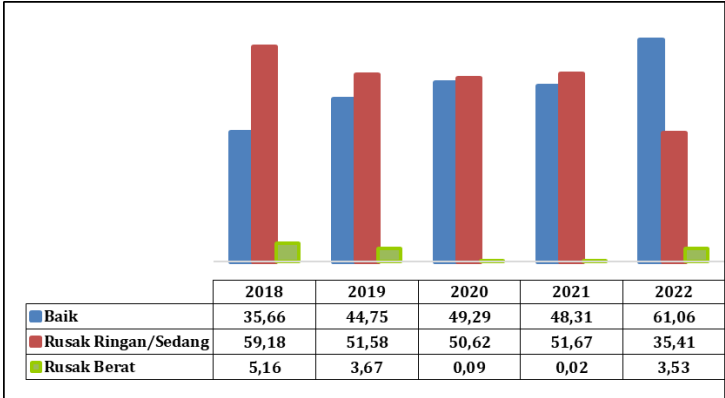
Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Banyaknya Penduduk Usia 15-64 Tahun yang Melek Huruf	Orang	5.281.145	5.404.659	5.523.289	5.598.898	5.675.232
Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	Orang	5.779.141	5.840.507	5.901.873	5.945.547	6.002.624
Angka Melek Huruf	%	91,38	92,54	93,58	94,16	94,55

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Hingga tahun 2022 jumlah bangunan gedung sekolah SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.042 unit mengalami peningkatan sejumlah 15 unit dari tahun 2021 dengan persentase bangunan dengan kondisi baik sejumlah 60,63 persen untuk gedung SMA dari total 609 unit dan 61,49 persen untuk gedung SMK dari 433 unit mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sedangkan persentase bangunan yang rusak ringan/sedang untuk gedung SMA sebesar 35,24 persen dan gedung SMK sebesar 35,58 persen

mengalami penurunan dari tahun 2021. Namun kondisi bangunan yang rusak berat mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 4,13 persen untuk gedung SMA dan 2,93 persen untuk gedung SMK. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rehabilitasi gedung sekolah yang meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang laboratorium biologi, ruang parktik, ruang perpustakaan, dan ruang serbaguna.

Grafik II. 53.
Kondisi Ruang Kelas Pendidikan SMA/SMK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah sekolah khusus bagi penyandang Disabilitas sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut untuk proporsi pada jenjang SMPLB masih sangat kurang, sedangkan bila dibandingkan usia sekolah pada tingkat tersebut belum sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Hingga tahun 2022 jumlah total SLB berjumlah 249 unit. Data jumlah sekolah khusus bagi penyandang disabilitas selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.57.
Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Jenis Sekolah	Satuan	Jumlah SLB				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	SDLB	Unit	1	1	84	87	93
2	SMPLB	Unit	1	0	84	85	86
3	SMLB	Unit	79	82	84	73	70
Total SLB		Unit	81	83	252	245	249

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Siswa penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan SDLB merupakan jumlah siswa terbanyak sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022 jumlah siswa penyandang disabilitas yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan SDLB hingga SMLB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mendorong motivasi bersekolah bagi penyandang disabilitas dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan memadai. Data siswa penyandang disabilitas berdasarkan jenjang pendidikannya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.58.
Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022

No.	Jenis Sekolah	Satuan	Jumlah Siswa				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	SDLB	Orang	3.102	2.970	2.821	2.501	2.555
2	SMPLB	Orang	1.037	1.014	1.023	1.033	1.253
3	SMLB	Orang	620	684	652	630	786
Total Siswa		Orang	4.759	4.668	6.141	4.164	4.594

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah siswa penyandang disabilitas berdasarkan kelompok umur di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 didominasi oleh siswa dengan usia 7–12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah untuk usia tersebut masih sangat dibutuhkan, mengingat bahwa data menunjukkan jumlah sekolah SDLB hanya sebanyak 93 unit pada tahun 2022. Untuk siswa penyandang disabilitas usia 16-18 tahun pada tahun 2022 sejumlah 512 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.59.
Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kelompok Umur	Satuan	Jumlah Siswa				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	< 7 Tahun	Orang	99	102	118	135	148
2	7 - 12 Tahun	Orang	1.820	1.816	1.796	1.801	2.407
3	13 - 15 Tahun	Orang	1.056	954	987	1.033	1.253
4	16 - 18 Tahun	Orang	885	913	876	630	512
5	> 18 Tahun	Orang	899	883	719	565	274
Total		Orang	4.759	4.668	4.496	4.164	4.594

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan jenis ketunaan, jumlah siswa terbanyak berdasarkan data tahun 2018-2022 adalah siswa tuna grahita dan tuna rungu. Khusus siswa tuna grahita pada tahun 2022 berjumlah 2.380 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Olehnya itu sarana prasarana khusus bagi penyandang tuna grahita dan tuna rungu dalam pelaksanaan pendidikan siswa disabilitas perlu menjadi perhatian.

Tabel II.60.
Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ketunaan	Satuan	Jumlah Siswa				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tuna Netra	Orang	53	213	221	101	205
2	Tuna Rungu	Orang	419	1.038	1.083	1.183	1.047
3	Tuna Grahita	Orang	107	2.099	2.525	2.279	2.380
4	Tuna Daksa	Orang	4	289	282	483	311
5	Autisme	Orang	-	28	379	114	651
6	Tuna Ganda	Orang	31	1.001	1.113	4	0

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

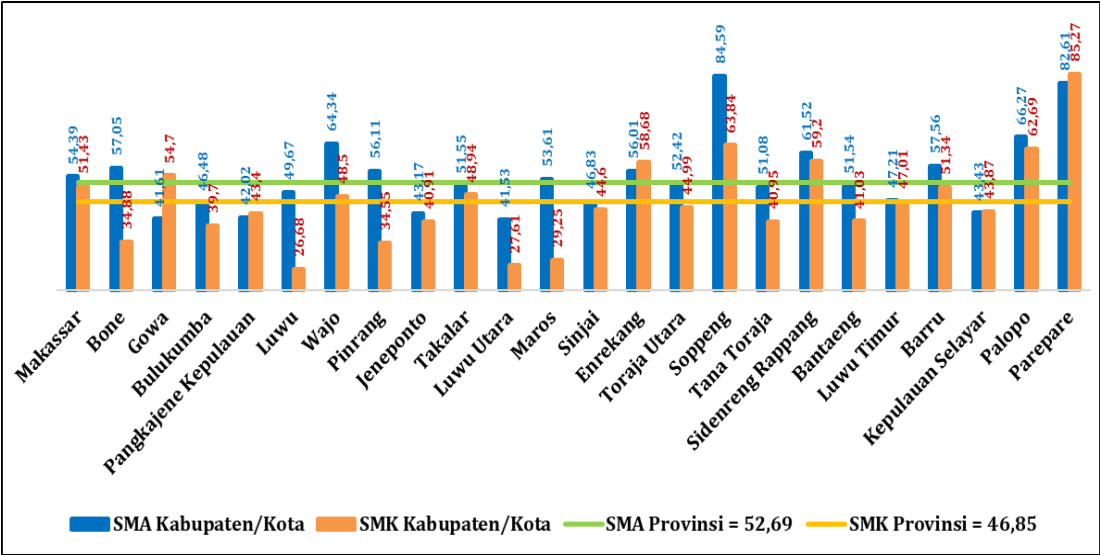
Tahun 2022 jumlah siswa yang bebas buta aksara Al-Qur'an yaitu 256.680 orang dari jumlah total siswa 277.044 orang atau sebesar 92,65 persen mengalami peningkatan dibanding dari tahun sebelumnya sebesar 23,5 persen. Capaian persentase siswa SMA/SMK yang bebas narkoba pada tahun 2022 sebesar 99,97 persen atau sejumlah 300.339 siswa SMA/SMK yang bebas narkoba dari total 300.441 siswa, mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 9,26 persen. Sedangkan jumlah SMA/SMK yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama yaitu 526 unit atau 73,46 persen pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian 80 persen.

Dari total 1.042 unit sekolah tingkat pendidikan menengah terdapat sejumlah 42 sekolah yang masuk kategori wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang tidak menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK karena keterbatasan dan jangkauan terhadap teknologi informasi yang tidak memadai. Salah satu contoh penerapan penyelenggaraan dan pelayanan Pendidikan berbasis TIK bagi sekolah yang masuk kategori 3T adalah tidak melaksanakan ujian nasional berbasis teknologi informasi. Capaian persentase pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK pada tahun 2022 sebesar 634 unit atau 86,26 persen mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra pada tahun 2022 sebesar 45,3 persen atau dengan sejumlah 674 satuan pendidikan (SMA/SMK).

Rasio guru terhadap Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Tahun 2022 yaitu 1 : 13 yang menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 13 murid. Jumlah murid SMA/SMK/MA pada tahun 2022 sebesar 422.190 orang, sedangkan jumlah guru jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 32.763 orang. Jumlah satuan pendidikan (SMA/SMK) yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan yaitu 674 dari 716 satuan pendidikan atau dengan capaian 94,13 persen. Pada tahun 2022 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV sebesar 24.614 guru dari total 24.823 guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA atau dengan capaian 99,16 persen. Jumlah guru SMA yang bersertifikat pada tahun 2022 sebesar 8.333 pendidik baik negeri atau swasta yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) serta Sertifikat

Pendidik dari total 15.814 guru SMA atau dengan capaian 52,69 persen mengalami penurunan dari tahun 2021. Sedangkan jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang bersertifikat baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) serta Sertifikat Pendidik pada tahun 2022 sebesar 4.864 dari total 10.381 pendidik atau dengan capaian 46,85 persen mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan capaian 52,24 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 54.
Pendidik Pada Jenjang SMA dan SMK yang Memiliki Ijazah ≥ S1 dan Bersertifikat Pendidik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pendidikan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.61.
Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Qur'an	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	75	92,65
Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba	%	Belum dilakukan pengukuran	90	91	91,5	99,97
Persentase warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	74,23	75,25	76,62	80,55	83,68
Persentase warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	80	80	81	80,84	82,73

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	50,05	80	73,46
Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	Belum dilakukan pengukuran	63	75	81	86,26
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Guru/Murid	1:15	1:14	1:13	1:13	1:13
Jumlah Murid SMA/MA/SMK	Orang	290.422	295.634	415.158	422.588	422.190
Jumlah Guru SMA/MA/SMK	Orang	20.015	20.469	31.216	33.191	32.763
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D-IV	%	98,63	98,69	98,84	94,83	99,16
Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	53,76	53,78	51,02	56,07	52,69
Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	42,41	45,6	44,25	52,24	46,85
Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	94,13
Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	48,25	45,3

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

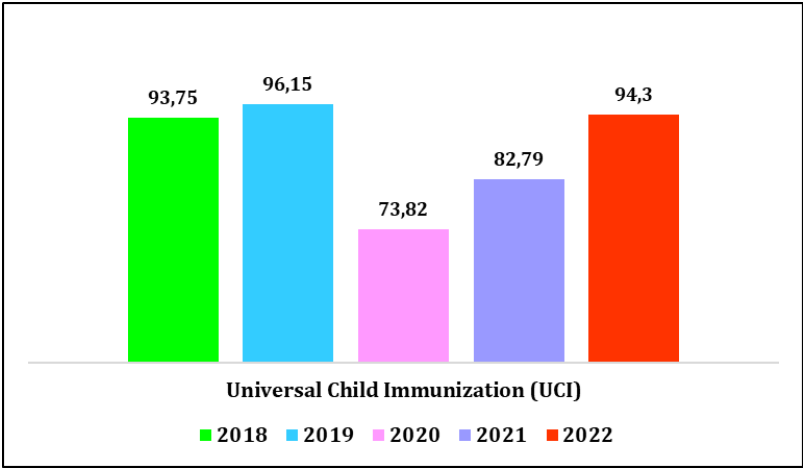
2.3.1.2 Kesehatan

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Imunisasi dasar pada bayi dilakukan pada saat bayi masih berusia kurang dari 12 bulan, dengan pemberian imunisasi meliputi BCG, DPT, Polio, Hepatitis, dan Campak. Bayi dikatakan mendapatkan imunisasi dasar lengkap terdiri dari BCG satu kali, DPT tiga kali, polio empat kali, hepatitis tiga kali dan campak satu kali. Untuk menilai status kelengkapan imunisasi dasar pada bayi dapat ditinjau dari cakupan imunisasi campak karena pemberian imunisasi campak merupakan imunisasi yang paling akhir diberikan setelah keempat imunisasi dasar pada bayi yang lain telah diberikan.

Tahun 2020 hingga 2022 cakupan desa/kelurahan UCI mengalami tren peningkatan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 94,3 persen dimana sejumlah 4 kabupaten/kota dengan capaian 100 persen desa/kelurahan UCI yaitu Kota Makassar (153 kelurahan) dan Parepare (22 kelurahan), serta Kabupaten Pinrang (109 desa/kel) dan Sinjai (80 desa/kel). Sedangkan capaian

terendah jumlah desa/kelurahan UCI adalah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 74 desa/kelurahan pemberian imunisasi dasar secara lengkap dari total 88 desa/kelurahan atau dengan capaian 84,1 persen.

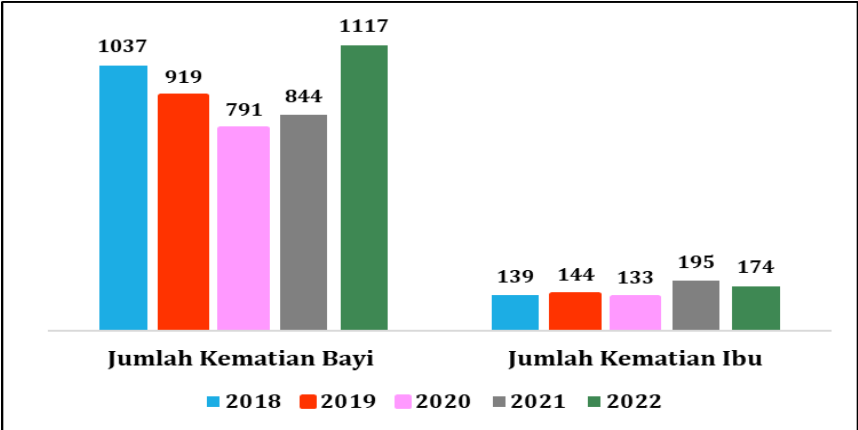
Grafik II. 55.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2023

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama angka kematian ibu. Pada tahun 2022 jumlah kematian ibu sebesar 174 jiwa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah kematian ibu tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 di Kota Makassar sebesar 21 kasus kematian mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 14 kasus. Kematian bayi adalah kematian anak kurang dari satu tahun. Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Jumlah kematian bayi tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dimana tahun 2022 mencapai 1.117 jiwa. Jumlah kematian bayi terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar 8 kasus kematian, sedangkan yang tertinggi di Kota Makassar sebesar 167 kasus kematian.

Grafik II. 56.
Jumlah Kematian Ibu dan Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

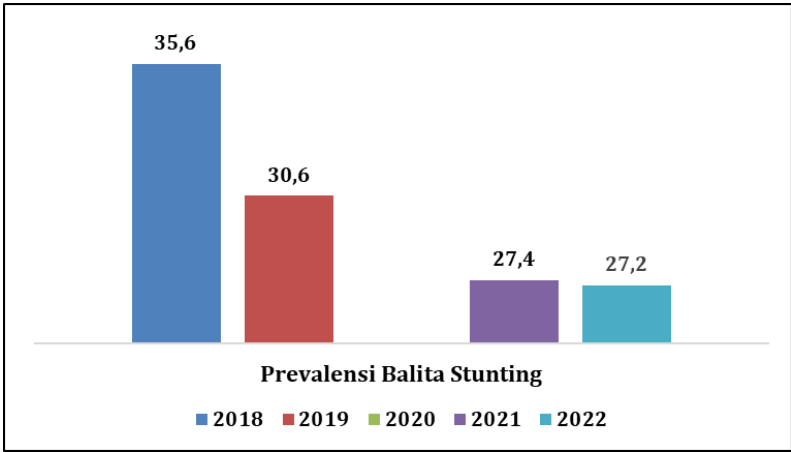


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2023

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi

sensitif. Prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020 tidak dilakukan survey terhadap capaian prevalensi balita stunting. Faktor pendorong yang mendukung penurunan stunting ini adalah tersedianya alokasi makanan tambahan ibu hamil KEK bersumber dana Penugasan/DAK Fisik dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bersumber dari dana Dekonsentrasi/Kemenkes RI, tersedianya alokasi makanan tambahan balita gizi kurang bersumber dari dana Penugasan/DAK Fisik serta adanya data balita gizi kurang by name by address sasaran PMT dari data aplikasi e-PPGBM (aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Beberapa faktor penghambat diantaranya alokasi distribusi di tingkat Puskesmas belum merata sehingga masih ada puskesmas yang kelebihan/kekurangan stok PMT, masih ada puskesmas yang terlambat mendistribusikan PMT ke sasaran serta masih ada puskesmas yang tidak mendistribusikan PMT ke sasaran sesuai kebutuhan anak dan ibu hamil dengan alasan pemerataan.

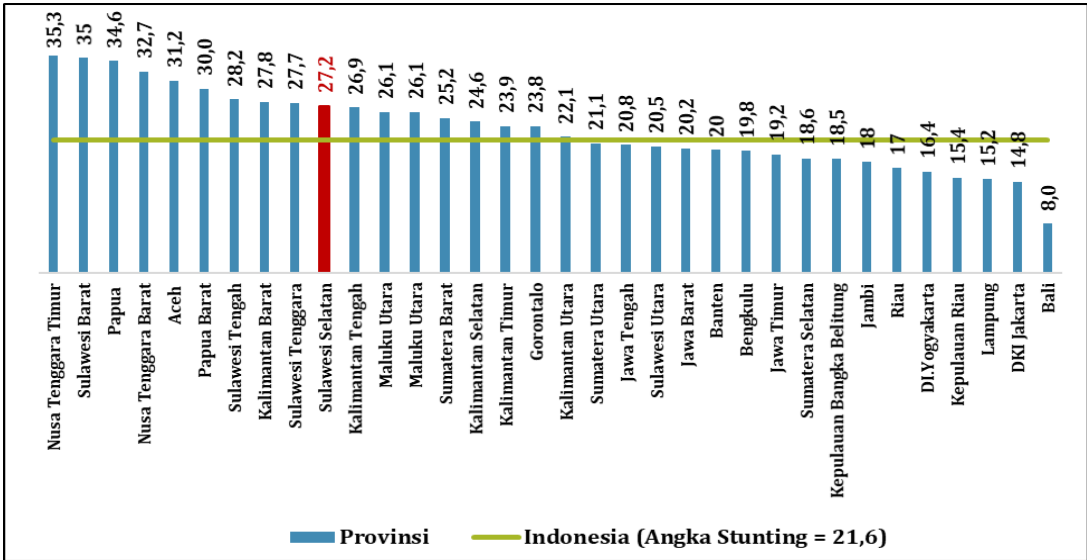
Grafik II. 57.
Prevalensi Balita Stunting
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Status gizi tingkat provinsi tahun 2022 menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan berada di peringkat 10 dengan angka stunting tertinggi diantara 34 provinsi. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

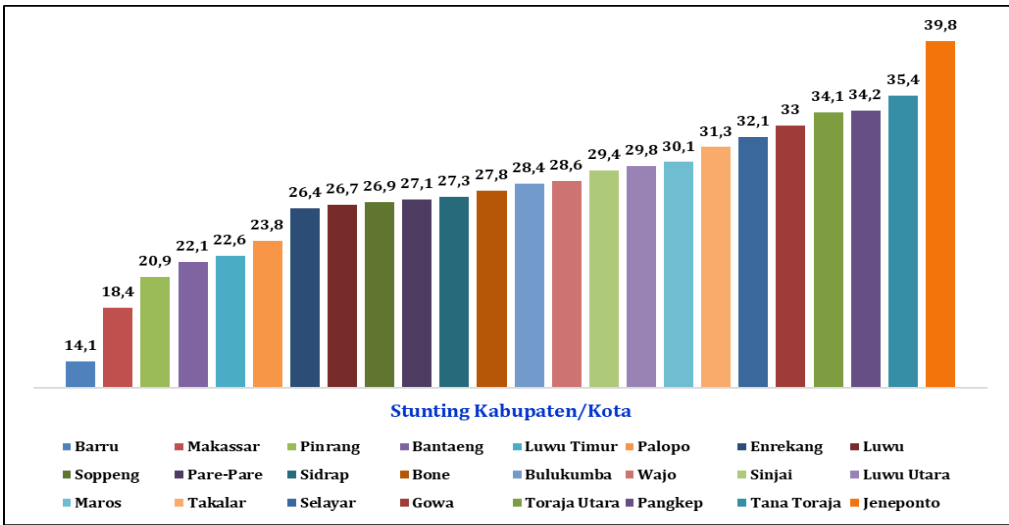
Grafik II. 58.
Perbandingan Angka Stunting Sulawesi Selatan dengan
Provinsi Lain Di Indonesia Tahun 2022



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2023

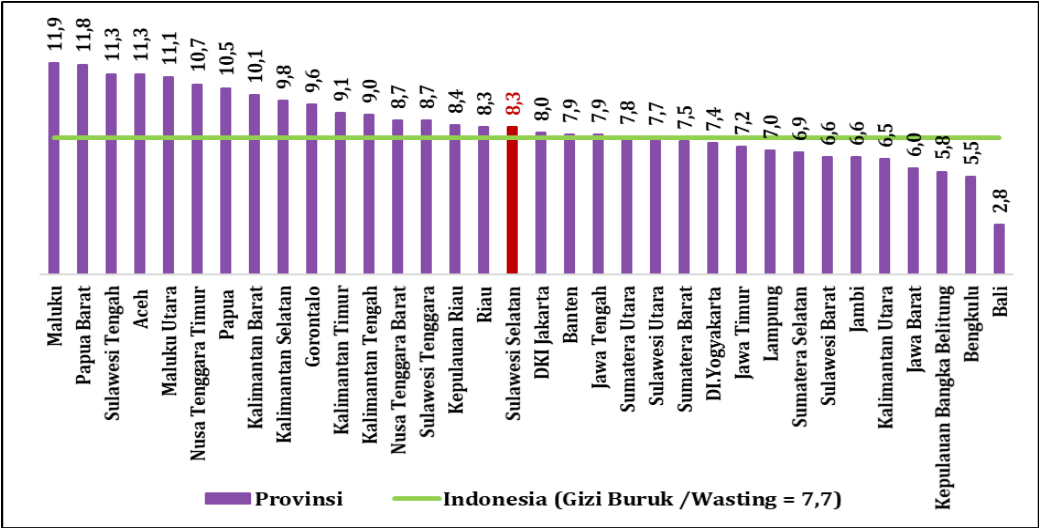
Berdasarkan data SSGI tahun 2022, angka stunting tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,07 persen dari tahun 2021. Sejumlah 11 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan angka stunting yaitu Luwu Utara (52,82), Wajo (26,55), Tana Toraja (21,23), Luwu (17,11), Kepulauan Selayar (15,88), Pare-Pare (9,27), Sidenreng Rappang (7,48), Soppeng (5,91), Jeneponto (5,01), Toraja Utara (4,6), Pangkajene dan Kepulauan (3,32) persen. Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan negatif dimana penurunan angka stunting tertinggi di Kabupaten Barru sebesar -46,59 persen.

Grafik II. 59.
Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2022

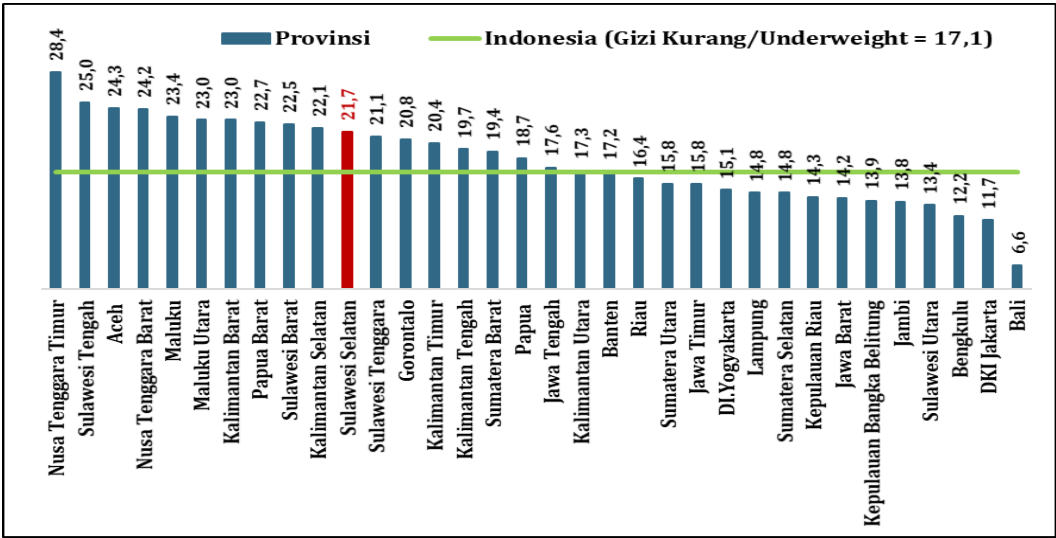
Grafik II. 60.
Perbandingan Prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasting)
Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2023

Gizi Buruk (Wasting) adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, pada tahun 2022 Sulawesi Selatan berada pada urutan ke-17 tertinggi dengan prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasted) dari 34 provinsi di Indonesia serta mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 33,87 persen.

Grafik II. 61.
Perbandingan Prevalensi Balita Gizi Kurang (Underweight)
Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022



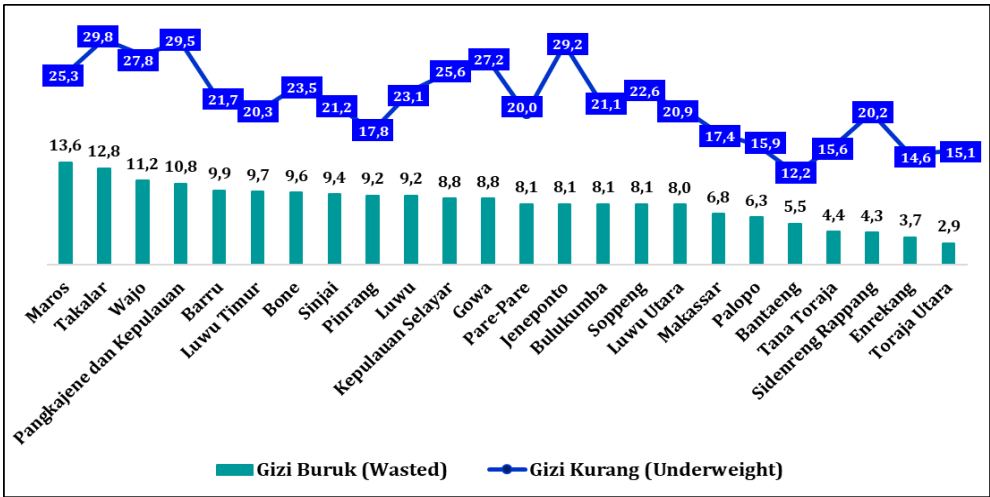
Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2023

Sedangkan Gizi Kurang (Underweight) adalah kondisi kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Status gizi anak dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi. Asupan energi

yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan negatif akibatnya berat badan lebih rendah dari normal atau ideal. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, pada tahun 2022 Sulawesi Selatan berada pada urutan ke-11 tertinggi dengan prevalensi Balita Gizi Kurang (Underweight) dari 34 provinsi di Indonesia serta mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 14,21 persen.

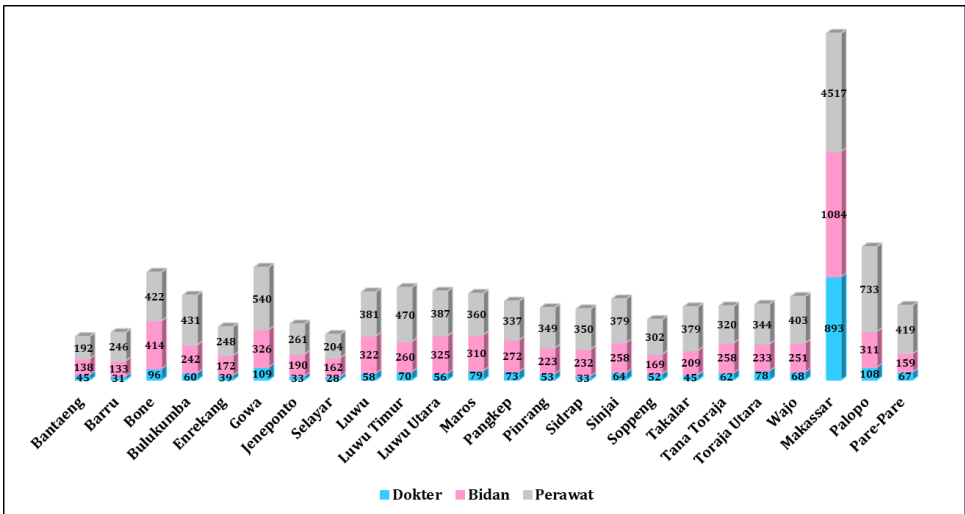
Angka balita gizi buruk (wasting) di Sulawesi Selatan tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Maros (13,6) mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 37,4 persen atau 3,7 poin. Sedangkan angka balita gizi buruk (wasting) terendah di Toraja Utara (2,9) mengalami peningkatan sebesar 38,1 persen atau 0,8 poin dari tahun 2021. Angka balita gizi kurang (underweight) di Sulawesi Selatan tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Takalar (29,8) mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,8 persen atau 2,4 poin. Sedangkan angka balita gizi kurang (underweight) terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar 12,2 tidak mengalami perubahan dari capaian tahun 2021. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 62.
Prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasting) dan Gizi Kurang (Underweight)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2023

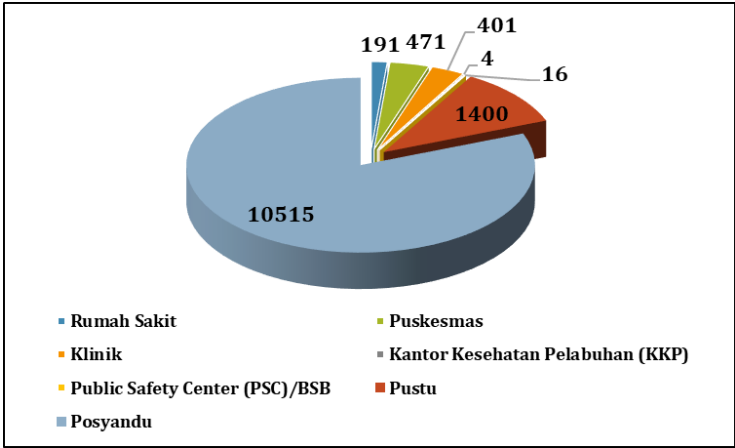
Grafik II. 63.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 terdiri dari Dokter sejumlah 2.300 orang, Perawat sejumlah 12.974 orang, dan Bidan sejumlah 6.653 orang. Jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2022 digambarkan pada diagram berikut ini.

Diagram II.4.
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Terkait pemenuhan standar pelayanan minimal yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak bencana, dimana pada tahun 2022 sejumlah 55.781 penduduk terdampak akibat bencana Kebakaran, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Banjir, Kecelakaan Transportasi, KLB dan Pohon Tumbang dengan jumlah wilayah terdampak sebanyak 93 wilayah dengan frekuensi 154 kejadian serta sejumlah 65 kejadian dengan resiko pengungsian dengan jumlah pengungsi sebanyak 16182 orang. Dilaporkan juga luka ringan 133 orang, luka berat 4 orang dan korban meninggal 21 orang. Pada tahun 2022 telah dilakukan pembentukan Disaster Medical Tim (DMT) yang beranggotakan masing-masing dari Rumah Sakit pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) dan Rumah Sakit TNI/Polri Sebanyak 12 Tim yang diharapkan menjadi tim siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana dan krisis kesehatan.

Tabel II.62.
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Jenis Kejadian Bencana	Frekuensi	Jumlah Pos Kesehatan	Penduduk Terdampak	Penduduk Terdampak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
1	Kebakaran	66	6	2.116	2.116
2	Angin Puting Beliung	38	9	2.911	2.911
3	Tanah Longsor	12	2	1.086	1.086
4	Banjir	33	48	49.577	49.577
5	Kecelakaan Transportasi	1	-	12	12
6	KLB	3	-	74	74
7	Pohon Tumbang	1	0	5	5
Total		154	65	55.781	55.781

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan pangan di Sulawesi Selatan yang dilaporkan sebanyak 83 kejadian yang terjadi di sejumlah 16 kabupaten/kota. Semua kejadian luar biasa penyakit menular dan keracunan pangan yang dilaporkan telah dilakukan penyelidikan kurang dari 24 jam. Namun masih diperlukan peningkatan kerjasama lintas program/sektor terkait dalam pelaksanaan investigasi KLB sehingga hasil penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan di lapangan lebih komprehensif.

Hingga tahun 2022 jumlah rumah sakit regional yang terbangun dan ditingkatkan sebanyak 2 unit yaitu Rumah Sakit Ainun Habibi Kota Pare-Pare dan Rumah Sakit La Mappapenning Kabupaten Bone. Progress pelaksanaan pembangunan rumah sakit di Kabupaten Bone yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah pekerjaan konstruksi dengan capaian 40,12 persen. Pembangunan rumah sakit ini didukung dengan penyediaan sumber daya kesehatan baik pengadaan alat kesehatan yang memadai dan bermutu, penempatan tenaga kesehatan berkompeten dan alokasi pembiayaan pengelolaan rumah sakit tersebut. Ditargetkan tahun 2023 rumah sakit regional di Kabupaten Bone sudah dapat beroperasi. Jumlah rumah sakit di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sejumlah 120 unit dengan persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 80 persen dan yang belum terakreditasi sebesar 20 persen. Rumah sakit yang masih belum terakreditasi disebabkan karena operasional kurang dari 2 tahun dimana dalam regulasi diatur bahwa rumah sakit wajib terakreditasi maksimal 2 tahun setelah operasional. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 sehingga rumah sakit diberi kelonggaran/relaksasi akreditasi sampai dengan tahun 2023.

Peningkatan anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diupayakan melalui program Aksi Stop Stunting yang sebelumnya disebut GAMMARA'NA (Gerakan Masyarakat Mencegah Stunting). Adapun bentuk intervensi langsung yang dilaksanakan pada tahun 2022 berupa pemberian paket intervensi gizi multivitamin untuk balita gizi kurang (kurus) sebanyak 25.072 baduta serta pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi gizi pada anak dimana sebanyak 240 orang tenaga pendamping gizi yang masing-masing sejumlah 10 orang ditempatkan pada 10 desa lokus di 24 kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 capaian pemenuhan kebutuhan darah sebesar 82 persen yang didukung oleh mitra donor dan kegiatan donor darah sukarela yang lebih banyak berkontribusi dari tahun sebelumnya, selain itu ketersediaan kantong darah dan reagen juga cukup untuk menghasilkan produk darah yang aman dan siap pakai bagi pasien yang membutuhkan. Pencapaian indikator persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai standar didukung oleh implementasi akreditasi pada semua pemberi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta baik di tingkat pelayanan kesehatan primer maupun rujukan yang merupakan salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan, manajemen institusi pelayanan kesehatan, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis yang wajib dipenuhi secara berkesinambungan bagi fasilitas pemberi pelayanan. Selanjutnya didukung juga dengan implementasi pengukuran kelayakan untuk pemberian izin operasional rumah sakit dan registrasi yang disesuaikan dengan kebijakan

dan SOP yang berlaku. Selain itu dilakukan peningkatan sumber daya baik transformasi kebijakan layanan kesehatan, pengalokasian anggaran untuk penyiapan sarana dan alat kesehatan yang bermutu dan sesuai standar dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam rangka upaya berkelanjutan memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan serta promosi kesehatan.

Tahun 2022 persentase jumlah rumah sakit yang memenuhi kelengkapan pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan >60 persen untuk rumah sakit pemerintah sebesar 70 persen dan rumah sakit swasta sebesar 83 persen, sedangkan untuk rumah sakit TNI/POLRI 100 persen kelengkapan SPA masih <60 persen. Namun perlu diperhatikan terkait kualitas data dari kelengkapan tersebut, apakah dalam melakukan update data rumah sakit sudah menyesuaikan dengan data yang terdapat pada Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan dokumen pengadaan alat kesehatan serta telah melakukan update data terkait gedung dan sarana di Rumah Sakit. Untuk itu setiap hasil entri atau update data ASPAK pihak Dinas Kesehatan wajib melakukan validasi data ASPAK sesuai langkah-langkah validasi untuk menjamin kualitas data ASPAK. Persentase pemenuhan rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk pada tahun 2022 mencapai 23,97 persen didukung dengan pemenuhan rasio tenaga kesehatan melalui bantuan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) yang mendukung ketersediaan data. Peningkatan rasio juga didukung perekrutan tenaga PPPK kabupaten dan perekrutan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang ada di fasyankes terutama pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, serta ditunjang dengan adanya penempatan Nakes Nusantara sehat di daerah terpencil. Cakupan pelatihan modul terakreditasi menjadi persyaratan pada aplikasi Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan (SIAPKEL) dimana semua pelatihan yang terakreditasi wajib memiliki modul sehingga target pencapaian terpenuhi. Capaian persentase kompetensi sumber daya manusia kesehatan sebesar 100 persen dimana masing-masing instansi maupun fasyankes yang memberikan pelayanan wajib memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan aturan Permenkes nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan, serta Permenpan RB terkait uraian tugas masing-masing pejabat fungsional kesehatan. Meningkatnya Kompetensi teknis SDM dari tahun sebelumnya karena setiap tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional untuk kenaikan jenjang jabatan wajib mengikuti uji kompetensi sesuai Permenkes nomor 18 tahun 2017 khususnya bagi 9 jenis tenaga kesehatan yaitu perawat, perawat gigi, radiografer, teknisi elektromedis, perekam medis, pembimbing kesehatan kerja, administrasi kesehatan, nutrisiois.

Pemenuhan sediaan farmasi didukung oleh pemenuhan 40 jenis obat sebagai parameter ketersediaan obat di puskesmas berdasarkan 10 besar pola penyakit. Selanjutnya didukung dengan tersedianya tenaga kefarmasian yang kompetensi di bidangnya serta pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar di Fasyankes. Capaian pemenuhan sediaan alat kesehatan dipengaruhi oleh : 1) Masih terbatasnya Alat Kesehatan Produk Dalam Negeri yang tayang di e-Catalog; 2) Banyaknya produk alkes dalam negeri yang tayang di e-catalog

namun tidak dilengkapi dengan nilai TKDN; 3) Terbatasnya kapasitas produksi beberapa penyedia Alkes Produk dalam negeri yang tayang di e-catalog sehingga berdampak pada keterlambatan pengiriman barang sesuai dengan batas akhir kontrak. Pemenuhan sediaan makanan dan minuman didukung melalui pengalokasian anggaran untuk melaksanakan pembinaan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) di 24 kabupaten/kota dengan peningkatan produksi sediaan makanan minuman yang beranekaragam jenis dan telah memenuhi standar. Capaian persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dilakukan dengan melakukan advokasi ke kabupaten/kota agar menerbitkan Kebijakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai yang diamanatkan dalam Inpres nomor 1 tahun 2017 akibat efek pandemi juga yang mendorong terbitnya Kebjiakan PHBS sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Selain itu didukung dengan pelaksanaan penggerakan masyarakat dalam mendukung terciptanya kluster germas minimal 3 kali setahun, dengan melibatkan lintas sektor Pendidikan, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Mitra Potensial.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kesehatan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.63.
Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	%	Belum dilakukan pengukuran	17	17	17	33,33
Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	70	85	82	75	80
Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	4,24	6,7	6,52	4,5	5,79
Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	12,13	12,79	11,95	12,1	9,66
Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	Rasio	29	27	18	23	23,97

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi	%	70	75	80	85	87
Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan	%	100	100	100	100	85
Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman	%	30	35	35	60	85
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%	29,16	45,83	62,5	66,7	87,5
Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah	%	78,85	78,85	79,00	68,19	82
Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	29,04	41,26	45,36	63,77	77,72
Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	81,43	90,38	90,38	91,49	90
Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	%	39,22	55,67	69,38	71,34	72
Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	13,09	13,85	21,05	22,37	90
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	81,43	90,38	90,38	91,49	93,02
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100	100
Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah memperoleh pendidikan kompetensi teknis	%	93,62	93,71	95,93	98,07	98,76
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100
Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	%	86,94	87,19	90,21	90,41	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya. Jaringan irigasi ada 2 (dua) yaitu:

- 1. Jaringan irigasi primer adalah membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir.
- 2. Jaringan irigasi sekunder adalah membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan sadap terakhir.

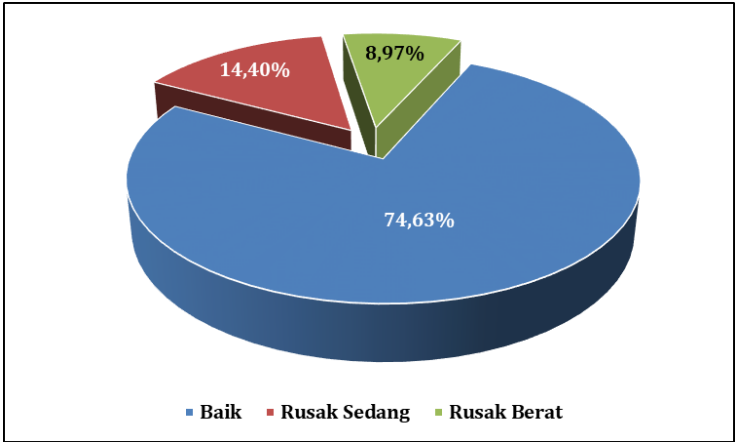
Capaian kinerja jaringan irigasi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.64.
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022

Kabupaten	Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun/Ditingkatkan/Direhabilitasi (Meter)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Maros	132,52	212	385	176	-
Pangkajene dan Kepulauan	752,99	379	1.293,33	-	-
Barru	916,85	760.122	700	4.024,21	-
Pinrang	1.168,17	852	2.371	13.649	-
Sidenreng Rappang	2.990,99	589,37	10.347	2.490,63	-
Toraja Utara	390,79	247	-	-	-
Luwu	3.833,87	4.061	2.218,5	7.236,72	130,4
Luwu Utara	328,82	2.787	2.272,5	8.100,3	2.349,5
Luwu Timur	4.354,71	3.934	-	-	1.000
Wajo	2.152,5	571	34.913,46	-	1.200
Soppeng	3.718,5	2.690	24.609,46	-	3.638,08
Bone	5.177,97	9.736,66	7.770	13.519,58	2.179,7
Sinjai	3.922,02	1.406,66	1.584,73	2.870,22	-
Bulukumba	776,84	589	231	4.571	-
Gowa	897,34	570	-	14.947	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Diagram II.5.
Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

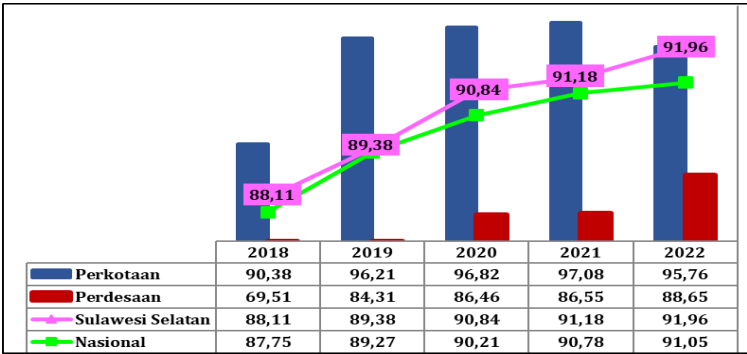


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada DI kewenangan Provinsi sebesar 473.650 meter dengan cakupan layanan irigasi sebesar 58.858 Ha. Jaringan irigasi kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 72,71 persen mengalami penurunan kondisi berdasarkan hasil pendataan tahun 2020 menjadi 72,70 persen. Pendataan Kembali dilakukan tahun 2021 berbasis e-paksi sebagaimana digunakan secara nasional dan tercatat bahwa jaringan irigasi kondisi baik hingga tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 76,00 persen atau sepanjang 359.974 meter. Pada tahun 2021 panjang jaringan irigasi baru mengalami peningkatan sebesar sebesar 28.300 meter sehingga panjang jaringan irigasi menjadi 501.950 meter dengan cakupan layanan irigasi sebesar 61.513 Ha. Tahun 2022 jaringan irigasi kondisi baik di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 76 persen pada tahun 2021 menjadi 76,13 persen atau 444.637 meter dari total panjang jaringan irigasi di sulawesi selatan sebesar 595.789 meter, sedangkan kondisi rusak sedang mengalami penurunan dngan capaian 14,4 persen atau 85.793 meter serta kondisi rusak berat mengalami penurunan dengan capaian 8,97 persen atau 53.442 meter. Tahun 2022 panjang saluran yang ditingkatkan sebesar 2.947 meter, panjang saluran yang direhabilitasi sebesar 15.416,21 meter, dan pembangunan Bendung dengan volume tampungan Bendung sebesar 3.532,73 m³ serta luas lahan yang dialiri sebesar 800 Ha dan pembangunan Reservoir dengan volume tampungan Reservoir sebesar 400 m³ dengan luas lahan yang dialiri sebesar 300 Ha. Tahun 2022 pembangunan Embung Pallae di Kabupaten Bone serta pembangunan Tanggul Sungaki Allu sepanjang 385 meter di Kabupaten Jeneponto.

Terkait pencapaian target cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai yang dilaksanakan melalui kegiatan normalisasi sungai pada tahun 2022 sepanjang 300 meter serta pembangunan Embung Pallae di Kabupaten Bone untuk tambahan debit air baku dengan kapasitas tampung 4.000 m³.

Grafik II. 64.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

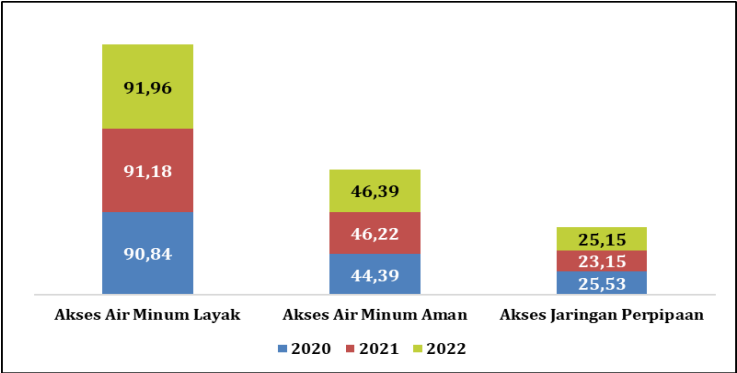


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Kebutuhan air minum curah merupakan kewenangan Pemerintah Privovinsi sebagaimana dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan

air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Grafik II. 65.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
Termasuk Aman dan Melalui Jaringan Perpipaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Capaian akses rumah tangga terhadap air minum layak Berdasarkan data BPS, capaian akses rumah tangga terhadap air minum layak di Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 91,96 persen termasuk 46,39 persen akses air minum aman. Sedangkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan pada tahun 2022 mencapai 25,15 persen. Hingga akhir periode RPJMD 2018-2023 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan capaian akses air minum layak sebesar 98,02 persen termasuk akses air minum aman sebesar 26,11 persen, serta capaian akses air minum layak melalui jaringan perpipaan sebesar 34,09 persen.

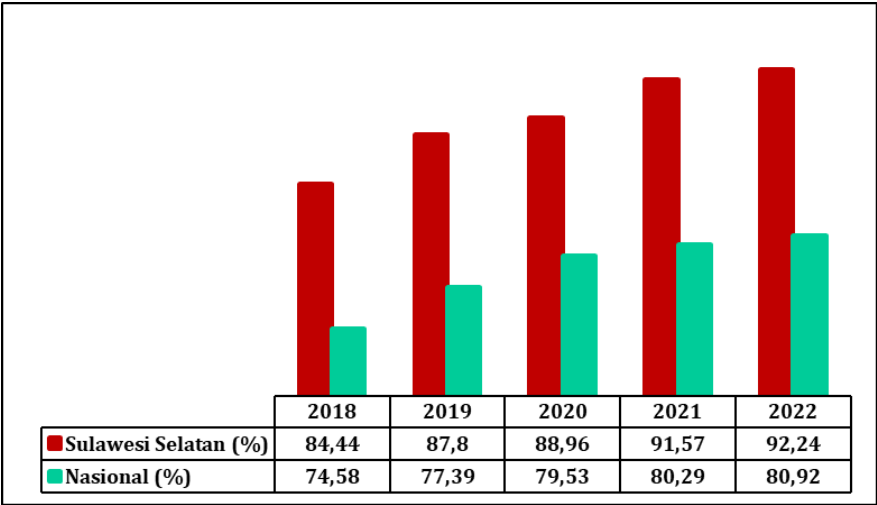
Dalam rangka peningkatan akses air minum layak bagi rumah tangga pelaksanaan pembangunan SPAM Regional Mamminasata dengan kapasitas 1.100 liter/detik yang merupakan proyek multiyears 2022-2026 dengan cakupan wilayah pelayanan yaitu Kota Makassar meliputi 2 kecamatan, Kabupaten Maros meliputi 6 kecamatan, Kabupaten Gowa meliputi 8 kecamatan, dan Kabupaten Takalar meliputi 2 kecamatan. Sumber air baku SPAM Regional Mamminasata berasal dari Waduk Bili-Bili dengan rincian IPA Tompobalang Gowa, IPA Palangga Gowa, IKK Bontomarannu Borongloe Gowa, IKK Patalassang Gowa, IPA Sombaopu Makassar. Total penerima manfaat ±80.000 sambungan rumah atau 400.000 jiwa dengan rincian kapasitas Kota Makassar 600 liter/detik melayani 48.000 SR, Kabupaten Gowa 200 liter/detik melayani 16.000 SR, Kabupaten Maros 130 liter/detik melayani 10.400 SR, dan Kabupaten Takalar 70 liter/detik melayani 5.600 SR.

Layanan penanganan persampahan saat ini masih merupakan tugas Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat belum adanya layanan TPA Regional yang menjadi kewajiban layanan Pemerintah Provinsi. Peningkatan peran aktif Pemerintah di 24 Kabupaten/Kota, peran masyarakat dan usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan serta mengoptimalkan penyebaran informasi melalui berbagai media dan pembinaan langsung kepada masyarakat dilakukan

setiap tahun. Pada tahun 2022 capaian akses penanganan sampah rumah tangga perkotaan mencapai 77 persen dan pengurangan sampah rumah tangga sebesar 23 persen. Hingga akhir periode RPJMD 2018-2023 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan capaian penanganan sampah di Sulawesi Selatan mencapai 80 persen serta capaian pengurangan sampah rumah tangga sebesar 20 persen.

Air limbah domestik adalah hasil buangan dari perumahan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Untuk saat ini, belum terdapat dan belum direncanakan untuk kebutuhan pemenuhan layanan regional dan seluruh layanan ALD masih di fokuskan pada penguatan layanan kabupaten/kota. Gambaran kondisi IPLT kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dimana sejumlah 8 kabupaten belum memiliki IPLT yaitu: Kabupaten Bone, Enrekang, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu, Pangkajene dan Kepulauan, Toraja Utara, dan Toraja Utara. Sejumlah 3 kabupaten yang IPLTnya belum berfungsi yaitu: Jeneponto, Luwu Timur, dan Takalar. Sejumlah 13 kabupaten/kota yang IPLTnya berfungsi yaitu: Kabupaten Bantaeng, Barru, Bulukumba, Maros (tidak optimal), Pinrang (overload), Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Wajo, Kota Makassar (overload), Palopo (tidak optimal), dan Parepare (tidak optimal).

Grafik II. 66.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



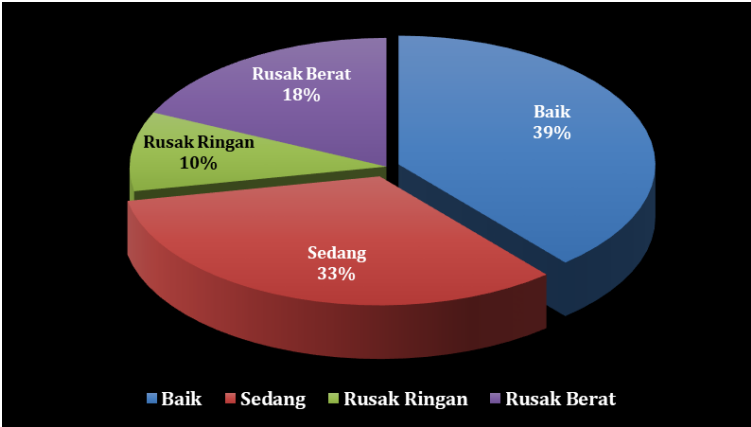
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Hingga akhir periode RPJMD 2018-2023 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan capaian akses sanitasi layak sebesar 92 persen termasuk akses sanitasi aman sebesar 7 persen. Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan strategi yang dilakukan

pemerintah provinsi dalam peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak dan aman di Sulawesi Selatan.

Salah satu yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah pengembangan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan Kawasan strategis. Pengembangan Kawasan tersebut diwujudkan pada penyediaan sarana dan prasarana pada Kawasan Strategis serta pengembangan Rest Area. Adapun Kawasan strategis sebagaimana tertuang pada Perda Tata Ruang adalah : (1) Kawasan pusat bisnis terpadu CPI di Mamminasata, (2) Kawasan Pendidikan Tinggi Mamminasata, (3) Kawasan Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya, (4) Kawasan Pengembangan Peternakan SERA (Seko-Rampi), (5) Kawasan Pengembangan Pertenakan SIPAENRE (Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang), (6) Kawasan Minapolitan pesisir pantai Pangkajene Kepulauan-Maros-Barru Kawasan Agropolitan Kabupaten Enrekang dan Sekitarnya, (7) Kawasan Agropolitan Bantaeng dan Bulukumba, (8) Taman Miniatur Sulawesi Selatan di Situs Kerajaan Gowa Benteng Sombaopu, (9) Kawasan wisata Budaya dan Agrowisata Toraja dan sekitarnya, (10) Kawasan Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa, (11) Kawasan Wisata Alam Lejja dan sekitarnya di Kabupaten Soppeng, (12) Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, (13) Kawasan Sungai Tello dan Sekitarnya, (14) Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya, (15) Kawasan Danau Matano-Towuti dan sekitarnya, (16) Kawasan Lompobattang dan sekitarnya, (17) Kawasan Geopark Maros Pangkep, serta (18) Pengembangan Rest Area sebagai pusat pertumbuhan baru di beberapa lokasi. Adapun lokasi yang dilakukan intervensi hingga tahun 2022 adalah Kawasan CPI, Kawasan Wisata Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Seko Rampi, Kawasan Toraja dan Sekitarnya, Kawasan Kebun raya Pucak, Kawasan Danau Tempe, serta Kawasan Geopark Maros Pangkep, serta telah dilaksanakan pembangunan di 4 kawasan yaitu pembanguna mesjid 99 Kubah dikawasan CPI, Pembangunan Farm Field dikawasan GOR Sudiang, Pembangunan Islamic Center di Kabupaten Bone dan pembangunan Rest Area di Kabupaten Jeneponto dan Sidrap.

Diagram II.6.
Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



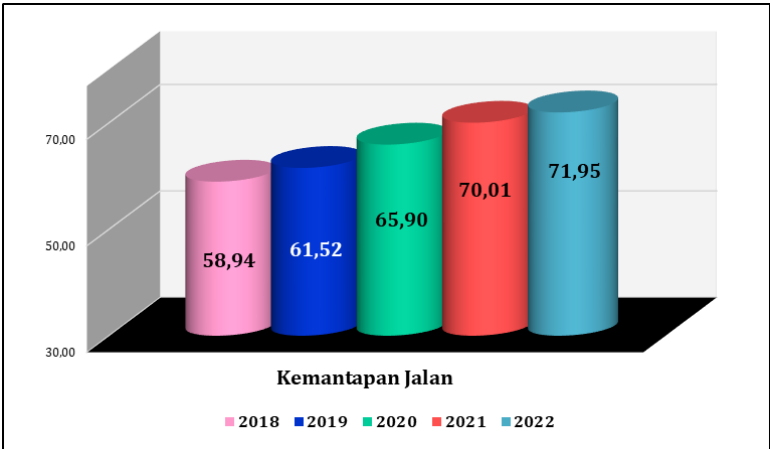
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dalam pembangunan transportasi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan berdasarkan SK tahun 2017 dengan jalan kewenangan Provinsi sepanjang 2.009,35 Km. Kondisi jalan

mantap tahun 2018 sebesar 58,94 persen meningkat cukup signifikan mencapai 71,95 persen atau sepanjang 1.445,63 km pada tahun 2022. Kondisi kemantapan jalan adalah akumulasi dari kondisi baik dan kondisi sedang dimana panjang jalan kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 778,97 km. Sedangkan panjang jalan kondisi sedang pada tahun 2022 sebesar 666,66 km. Panjang jalan kondisi rusak ringan pada tahun 2022 sebesar 200,06 km mengalami penurunan dari tahun 2021, namun panjang jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan sebesar 966 persen dari tahun 2021 dengan capaian 363,66 km pada tahun 2022.

Kondisi kemantapan jalan tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan rata-rata 3,25 persen, dimana pada tahun 2022 mencapai 71,95 persen. Hal ini didukung kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan kondisi rusak serta menjaga kondisi dan mencegah kerusakan jalan.

Grafik II. 67.
Kemantapan Jalan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Ruas jalan terisolir (belum tembus/jalan tanah) kewenangan Provinsi di tahun 2020 terdiri dari 14 ruas dengan panjang ruas 543,07 km diantaranya; (1) Tuppu – Pao – Pamulungan – Batas Kab. Tana Toraja, (2) Sabang – Tallang, (3) Tallang – Sae, (4) Sae – Bts. Sulbar, (5) Ussu – Nuha – Beteleme Batas Prov. Sulteng, (6) Latuppa – Bonglo – Salulimbong – Pantilang, (7) Passobbo – Matangli – Masuppu, (8) Masuppu - Batas Kab. Pinrang, (9) Takkalasi – Bainange – Lawo, (10) Palampang – Munte – Botolempangan, (11) Bua – Bts. Kab. Toraja Utara, (12) Bts. Kab. Luwu – Tedong Bonga, (13) Rantepao – Pangalla – Baruppu – Bts. Prov. Sulbar, (14) Rantepao – Sa’dan – Batusitanduk.

Tahun 2021 masih tersisa kebutuhan pembangunan jalan yang belum tembus sepanjang 138,29 km. Pembangunan jalan terisolir menjadi prioritas utama tahun 2021 yang telah mencapai 74,53 persen. Hingga tahun 2022 persentase panjang jalan terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat sebesar 76,03 persen atau 5,44 km, sehingga masih tersisa kebutuhan pembangunan jalan terisolir yang belum tembus sepanjang 130,17 km.

Grafik II. 68.
Persentase Panjang Jalan Terisolir pada Ruas Jalan Provinsi yang Terakses Roda Empat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli pada tahun 2022 sebesar 12,12 persen dengan jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sejumlah 200 orang dari jumlah tenaga ahli jasa konstruksi sejumlah 9.432 orang. Capaian rasio ketaatan pemanfaatan ruang mengalami peningkatan dari tahun 2021 dimana jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembangunan pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yg telah direncanakan dengan capaian 0,86 persen pada tahun 2022.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.65.
Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	%	69,16	70	72,7	76	76,13
Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	%	100	100	100	100	100
Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota)	%	100	100	100	100	100
Persentase warga negara yang memperoleh layanan	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)						
Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan Drainase Kab/Kota	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	16
Persentase Bangunan Pamerintah yang di Fasilitas	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	75,04	85	100
Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawas an	Belum dilakukan pengukuran	7	13	9	4
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	58,94	61,52	65,9	70,01	71,95
Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat	%	Belum dilakukan pengukuran	20,48	42,72	74,53	76,03
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Rasio	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	19,95	12,12
Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	Rasio	Belum dilakukan pengukuran	0,7	0,75	0,8	0,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

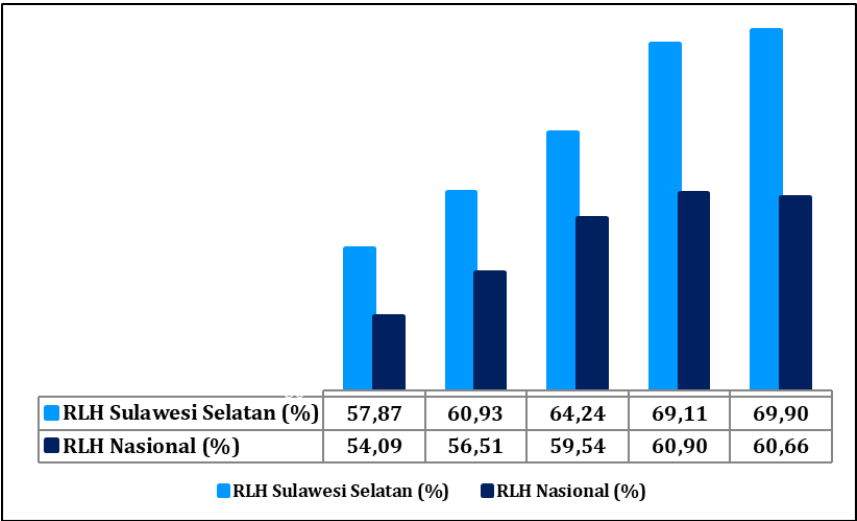
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada tahun 2020 pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanganan Bencana Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1707/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan penanganan bencana skala provinsi di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk bantuan logistik, penyediaan hunian sementara (Huntara) serta pembangunan rumah baru atau hunian tetap (Huntap). Adapun yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 50 unit rumah, serta 72 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Kementerian PUPR. Pada tahun yang sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan untuk penanganan banjir di Kabupaten Bantaeng yaitu pembangunan rumah layak huni sejumlah 69 unit.

Tahun 2021 telah tertangani warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni berupa terbangunnya 886 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi warga negara korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara. Pada akhir tahun 2021 terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Selayar sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan sejumlah 8 Milyar rupiah untuk pembangunan rumah/hunian tetap (Huntap) sejumlah 160 unit rumah bagi warga negara yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain pembangunan Huntap untuk korban bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 160 meter dan Jalan Lingkungan sepanjang 106 meter di Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan panjang jaringan air bersih 13.180 meter serta cakupan rumah tangga terlayani sebesar 1.577 rumah tangga.

Tahun 2022 telah terbangun sejumlah 44 unit rumah layak huni untuk korban bencana masing-masing 11 unit di Kabupaten Jeneponto, Luwu Utara, Soppeng, dan Wajo. Selain itu untuk mendukung penyediaan PSU untuk mendukung daerah rawan bencana, maka dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 575 meter di Kabupaten Pangkep, Maros, Barru, dan Kota Makassar, serta pembangunan 2 unit jaringan air bersih dengan kapasitas masing-masing sebesar 3.000 liter/hari yang melayani sejumlah 80 rumah tangga di Kabupaten Pangkep. Capaian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi hanya sebesar 30 persen disebabkan karena tidak terdapatnya program provinsi yang mengharuskan warga untuk direlokasi.

Grafik II. 69.
Perbandingan Capaian Rumah Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

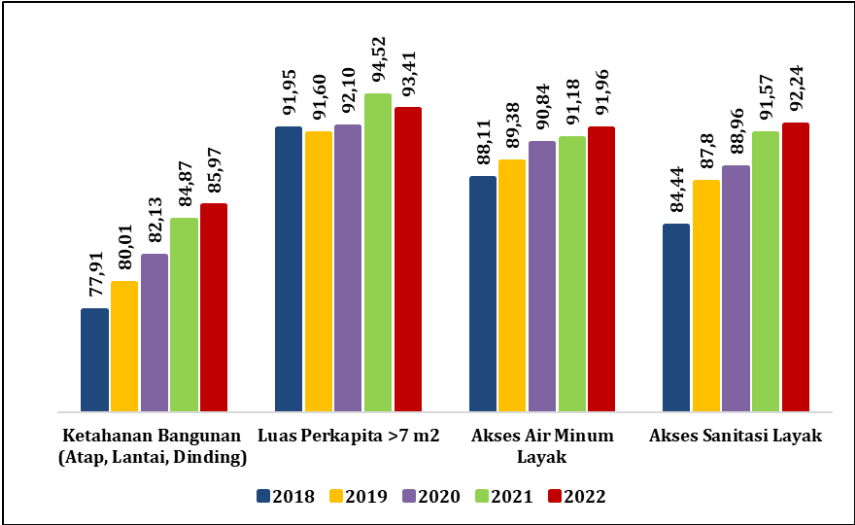


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian Akses Rumah Tangga terhadap Rumah Layak Huni (RLH) di Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan

capaian sebesar 69,9 persen pada tahun 2022. Capaian RLH Sulawesi Selatan tahun 2022 berada diatas capaian nasional sebesar 60,66 persen serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,14 persen.

Grafik II. 70.
Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak
Berdasarkan Komponen Kelayakan di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

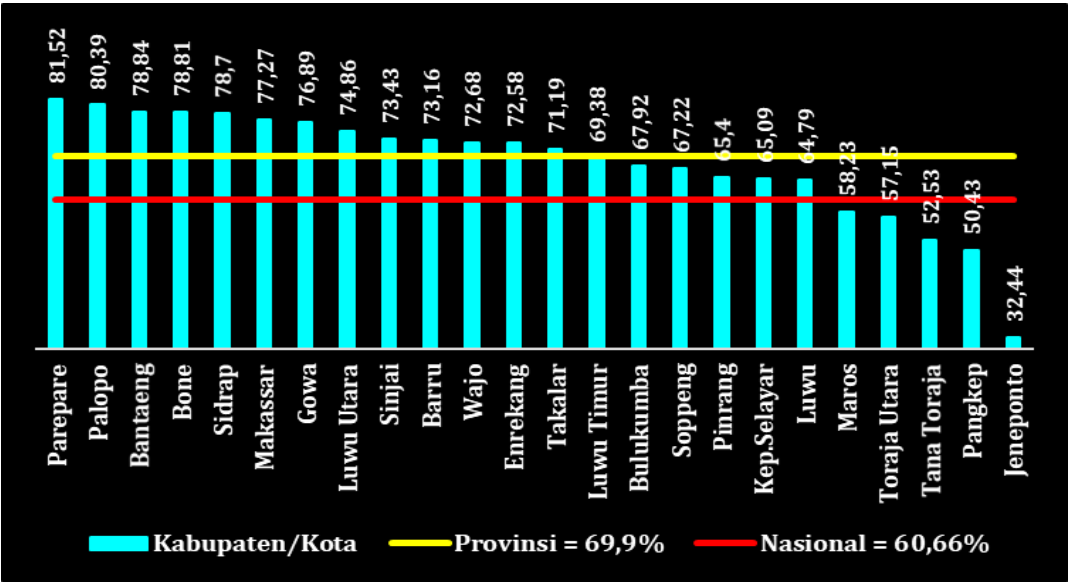


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Peningkatan akses RLH didukung oleh peningkatan masing-masing komponen kelayakan yang terdiri dari ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding), luas perkapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Salah satu komponen penentu rumah layak huni adalah ketahanan bangunan, yang dilihat dari bahan bangunan utama atap, dinding, dan lantai rumah terluas. Persentase rumah tangga di Sulawesi Selatan yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan di wilayah kota sebesar 91,02 persen lebih besar dibandingkan wilayah desa sebesar 82,35 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan atap berupa beton, genteng, kayu/sirap, atau seng sebesar 97,46 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu sebesar 88,75 persen. Sedangkan rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin, tegel, teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah sebesar 99,31 persen.

Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak pada tahun 2022 tertinggi di Kota Parepare dengan capaian 81,52 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Jeneponto dengan capaian 32,44 persen. Sejumlah 11 Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dibawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten Luwu Timur, Bulukumba, Soppeng, Pinrang, Kepulauan Selayar, Luwu, Maros, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, dan Jeneponto, serta sejumlah 5 Kabupaten yang berada dibawah capaian Nasional yaitu Kabupaten Maros, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, dan Jeneponto.

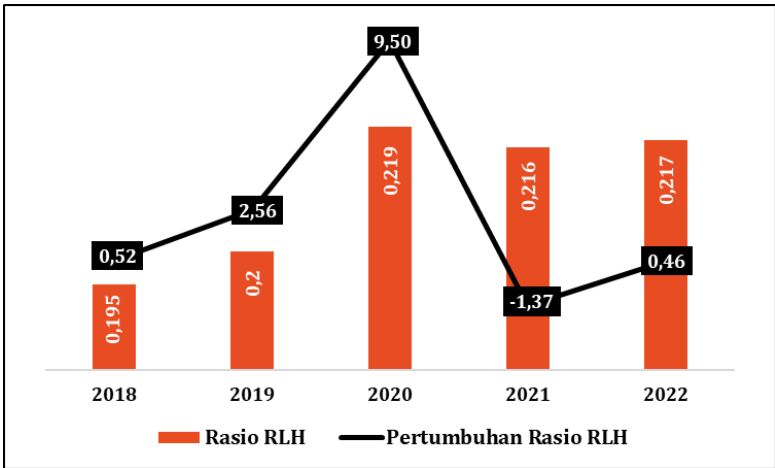
Grafik II. 71.
Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan antara rumah layak huni dan jumlah penduduk, mengalami tren fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,33 persen. Pertumbuhan rasio rumah layak huni tertinggi pada tahun 2020 sebesar 9,5 persen kemudian mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2021, namun kembali mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 0,46 persen. Tahun 2022 rasio rumah layak huni tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,238 dengan jumlah 33.541 unit rumah layak huni dari total 35.132 unit rumah. Sedangkan rasio rumah layak huni terendah di Kabupaten Maros sebesar 0,131 dengan jumlah 51.340 unit rumah layak huni dari total 86.998 unit rumah.

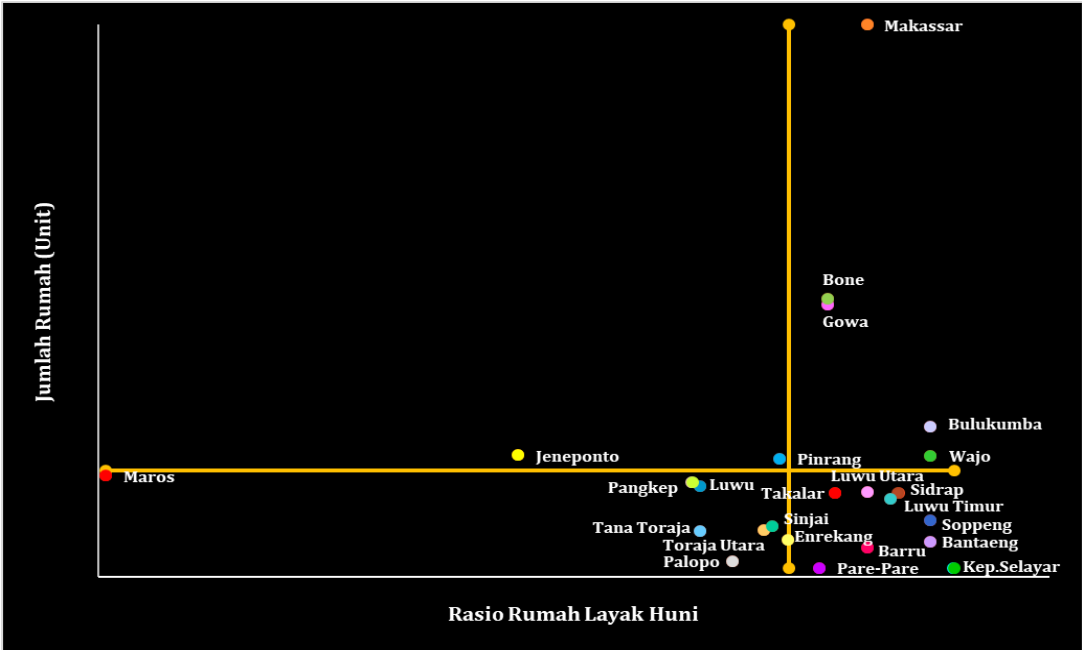
Grafik II. 72.
Rasio Rumah Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2023

Kabupaten/Kota dengan Rasio Rumah Layak Huni tetinggi pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 0,238 dari 35.132 unit rumah, sedangkan yang terendah di Kabupaten Maros dengan capaian 0,131 dari 86.998 unit rumah.

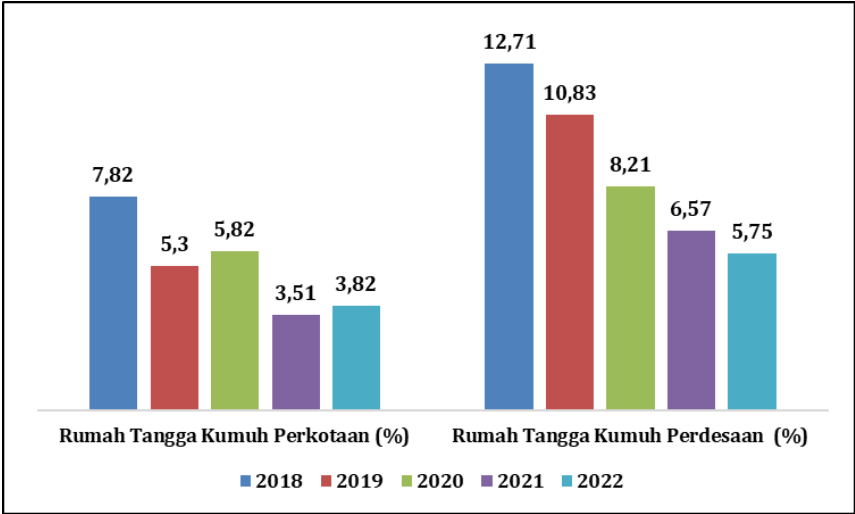
Grafik II. 73.
Pengelompokan Rasio Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha mendukung pencapaian penurunan luas Kawasan Kumuh pada tahun 2021 sebesar 18,03 persen atau 152,51 Ha kawasan kewenangan provinsi. Tahun 2021 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.757,4 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Enrekang, Pinrang, dan Soppeng; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 1.729,37 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Luwu Timur, Pinrang, dan Soppeng; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit di Kabupaten Bantaeng.

Grafik II. 74.
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tahun 2022 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.258 meter di Kabupaten Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, Sinjai, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.225 meter di Kabupaten Enrekang, Gowa, Soppeng, Wajo, Jeneponto, Takalar, Maros, Luwu Utara, Bantaeng, Kota Makassar; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit yang melayani 845 rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.

Capaian penurunan luas kawasan kumuh hingga tahun 2022 sebesar 25,39 persen dari 1.183,79 Ha total luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi. Persentase rumah tangga kumuh tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan serta dibawah capaian nasional. Berdasarkan data Susenas persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh pada tahun 2022 mencapai 4,58 persen mengalami penurunan sebesar 7,63 persen dari capaian tahun 2021. Persentase rumah tangga yang menpati rumah kumuh di wilayah perdesaan sebesar 5,75 persen lebih tinggi dari wilayah perkotaan sebesar 3,82 persen.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Sulawesi Selatan seluas 1.151,97 Ha yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.66.
Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Kawasan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Kecamatan
1	Bantaeng	14,04	1	1	1
2	Barru	23,5	2	2	2
3	Bone	36,96	3	5	2
4	Bulukumba	24,08	2	6	2
5	Enrekang	134,7	10	10	5
6	Gowa	10,01	1	1	1
7	Jeneponto	95,84	8	8	6
8	Kepulauan Selayar	93,05	8	8	7
9	Luwu	64,03	7	7	3
10	Luwu Timur	49,7	4	3	3
11	Luwu Utara	14	1	1	1
12	Maros	25,56	2	3	2
13	Pangkajene dan Kepulauan	23,15	2	2	2
14	Pinrang	10,99	1	1	1
15	Sidenreng Rappang	83,15	7	7	5
16	Sinjai	11,5	1	1	1
17	Soppeng	43,23	4	4	2
18	Takalar	22,41	2	2	2

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Kawasan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Kecamatan
19	Tana Toraja	62,94	5	5	1
20	Toraja Utara	12,28	1	1	1
21	Wajo	34,15	3	2	2
22	Makassar	52,27	5	13	5
23	Palopo	126,41	10	10	7
24	Pare-Pare	84,02	7	3	4
Sulawesi Selatan		1.151,97			

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

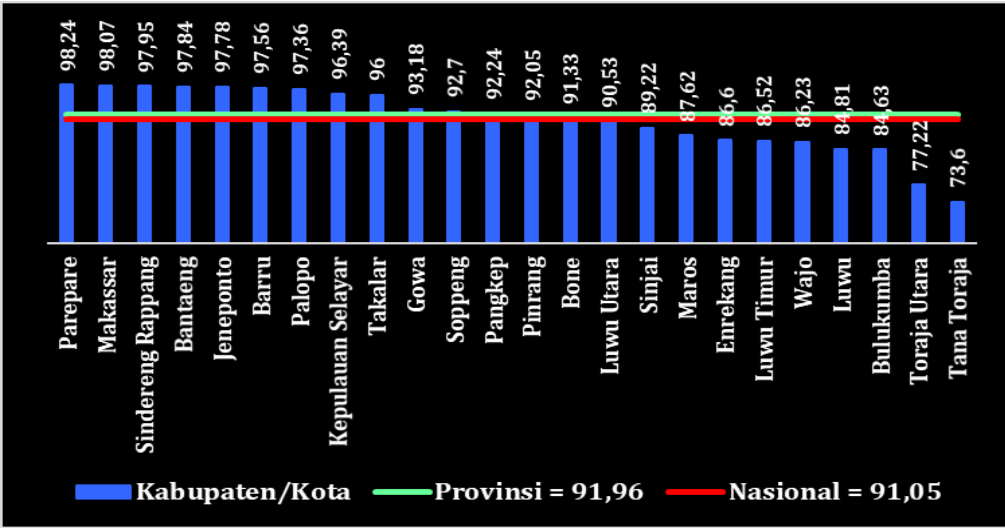
Capaian pengurangan kawasan kumuh kewenangan provinsi tahun 2020 hingga 2022 sebesar 300,52 Ha atau 25,39 persen dari total luas kawasan kumuh sebesar 1.183,79 Ha yang tersebar di 20 kabupaten/kota, 52 kecamatan, 91 kelurahan, 97 kawasan melalui pendanaan APBD Provinsi, Program KOTAKU, dan CSR. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.67.
Pengurangan Kawasan Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Realisasi Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha)			Tingkat Capaian	
			2020	2021	2022	Luas (Ha)	%
1	Bantaeng	45,8	-	24,16	3,54	27,7	2,34
2	Bone	67,61	-	12,34	4,03	16,35	1,38
3	Bulukumba	10,84	-	-	-	-	-
4	Enrekang	15,62	-	4,4	6,28	10,68	0,9
5	Gowa	213,78	10,11	7,56	5,95	23,62	1,99
6	Jeneponto	86,2	-	2,4	5,66	8,06	0,68
7	Kep.Selayar	146,18	-	-	-	-	-
8	Luwu	10,43	-	-	-	-	-
9	Luwu Timur	33,57	-	5,65	4,8	10,45	0,89
10	Luwu Utara	70,7	-	-	6,18	6,18	0,52
11	Maros	34,93	-	1,2	2,79	3,99	0,34
12	Pinrang	53,4	-	8,45	-	8,45	0,71
13	Sidrap	36,27	-	-	-	-	-
14	Sinjai	24,66	1,68	-	3,19	4,87	0,41
15	Soppeng	37,99	13,39	21,35	6,35	41,09	3,47
16	Takalar	25,16	-	23,66	7,19	30,85	2,61
17	Toraja Utara	37,98	-	19,44	-	19,44	1,64
18	Wajo	59,72	-	6,34	15,47	21,81	1,85
19	Makassar	77,92	51,35	-	2	53,35	4,51
20	Palopo	95,03	-	-	13,63	13,63	1,15
Total		1.183,79	76,53	136,93	87,06	300,52	25,39

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Grafik II. 75.
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

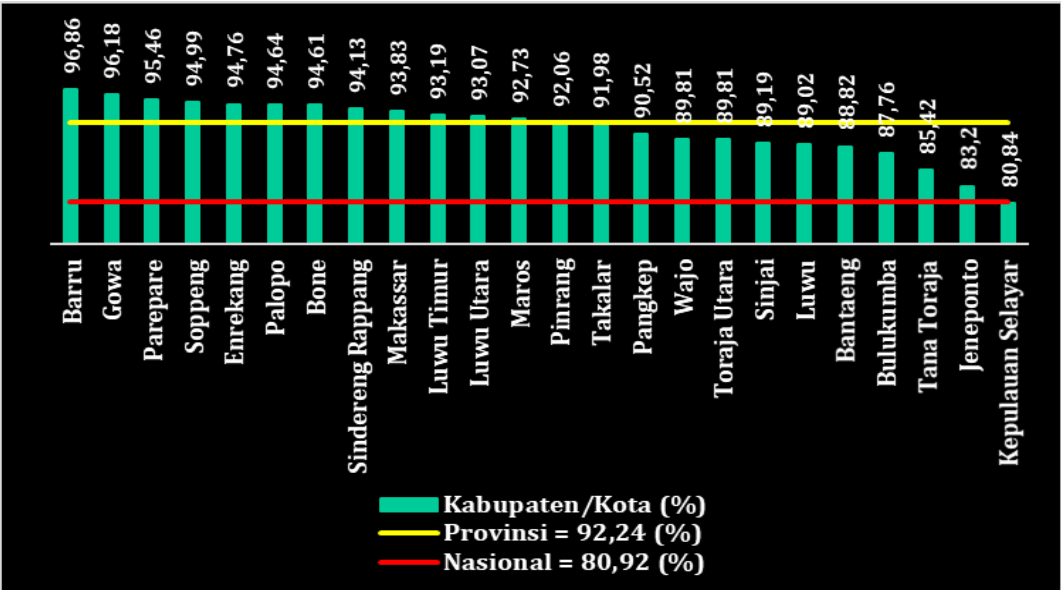
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 91,96 persen serta masih diatas capaian nasional. Sejumlah 11 kabupaten masih berada dibawah capaian provinsi serta 10 kabupaten masih berada di bawah capaian nasional. Tahun 2023 ditargetkan akses rumah tangga terhadap air minum layak di Sulawesi Selatan sebesar 98,02 persen serta ditargetkan dapat mencapai 100 persen pada tahun 2024.

Pemenuhan air minum layak/ARSINUM di kawasan pesisir dan kepulauan sejalan dengan amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun instalasi Air Siap Minum (ARSINUM) di Kawasan pesisir dan kepulauan yang dimulai sejak tahun 2019 sejumlah 1 unit di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar yang merupakan Bantuan Hibah dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 telah terbangun instalasi ARSINUM sejumlah 3 (tiga) unit di Pulau Samalona, Pulau Langkai, dan Pulau Lanjukang Kota Makassar. Masing-masing ARSINUM pada 4 lokasi terbangun memiliki kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan pelayanan 625 rumah tangga. Tahun 2021 telah dibangun prasarana Air Bersih pada 4 (empat) lokasi yaitu 1 titik di Kabupaten Bone dengan kapasitas produksi 9.000 liter/jam yang cakupan pelayanannya mampu melayani 600 rumah tangga, serta pembangunan prasarana air bersih pada 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Bulukumba masing-masing di Desa Jojolo Kecamatan Bulukumba, Desa Padang Kecamatan Gantara, dan Desa Matekko Kecamatan Gantara dengan kapasitas produksi masing-masing 3.000 liter/jam dengan cakupan layanan hingga 200 rumah tangga. Selain itu terdapat bantuan CSR untuk pembangunan instalasi ARSINUM dari PT.Sucofindo di Pulau Balang Datu Kabupaten Takalar sehingga pada tahun 2021 dengan cakupan layanan 625 rumah tangga.

Untuk mendukung fungsi hunian pada kawasan permukiman pada tahun 2021 telah dibangun PSU pada kawasan permukiman meliputi : a) Drainase Lingkungan sepanjang 3.576 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo; b) Jalan Lingkungan sepanjang 1.788 meter di Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Bulukumba, Tana Toraja, dan Kota Palopo. Pada tahun 2022 telah dibangun PSU kawasan permukiman yang meliputi: a) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.401 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Gowa, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.236 meter di Kabupaten Luwu, Bone, Toraja Utara, Takalar, dan Luwu Utara; c) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan permukiman berupa reservoir beton kapasitas 9.500 liter dengan panjang pipa distribusi 1.995 meter di Kabupaten Sinjai serta tandon kapasitas masing-masing 2.000 liter dengan total panjang pipa distribusi 4.427 meter di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bone, dan Kota Makassar; d) Pembangunan PSU lainnya berupa pembangunan toilet 2 unit di Kabupaten Enrekang dan Kota Makassar serta Rehabilitasi Masjid di Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pencapaian target program prioritas serta penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya, telah dibangun sejumlah 10 unit instalasi air siap minum (ARSINUM) dengan kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan layanan 625 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pinrang, Enrekang, Jeneponto, Bulukumba, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, dan Sinjai.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, capaian persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 92,24 persen serta jauh diatas capaian nasional. Sejumlah 12 kabupaten masih berada dibawah capaian provinsi serta persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Kepulauan Selayar berada dibawah capaian nasional. Persoalan akses sanitasi merupakan persoalan rumit karena kewenangan provinsi terhadap penyediaan akses sanitasi terbatas pada penyediaan infrastruktur skala regional. Sedangkan untuk penyediaan infrastruktur pengolahan air limbah pada kawasan permukiman menjadi kewenangan kabupaten/kota. Usulan masyarakat terhadap penyediaan akses sanitasi hanya terbatas pada pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan yang peruntukannya untuk mengatasi banjir atau genangan pada kawasan permukiman. Sehingga pemerintah provinsi hanya melakukan pembinaan pada kabupaten/kota dalam penyediaan SPAL baik skala perkotaan, skala kawasan, skala permukiman, dan individual dalam rangka meningkatkan akses sanitasi layak dan aman bagi rumah tangga. Tahun 2023 ditargetkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Sulawesi Selatan sebesar 92 persen serta ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun 2024. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

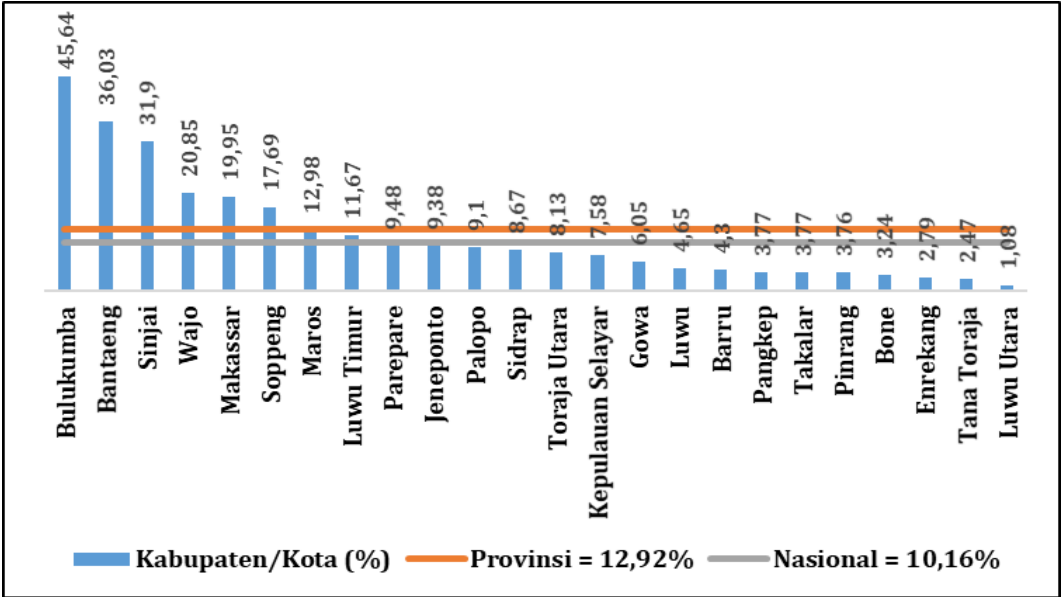
Grafik II. 76.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi di Kabupaten Barru dengan capaian 96,86 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 80,84 berada dibawah capaian Nasional. Sejumlah 12 kabupaten dengan akses sanitasi layak berada di bawah capaian Provinsi. Sedangkan rumah tangga dengan akses sanitasi aman terendah di Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,08 persen serta sejumlah 6 kabupaten/kota berada diatas capaian Provinsi. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 77.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

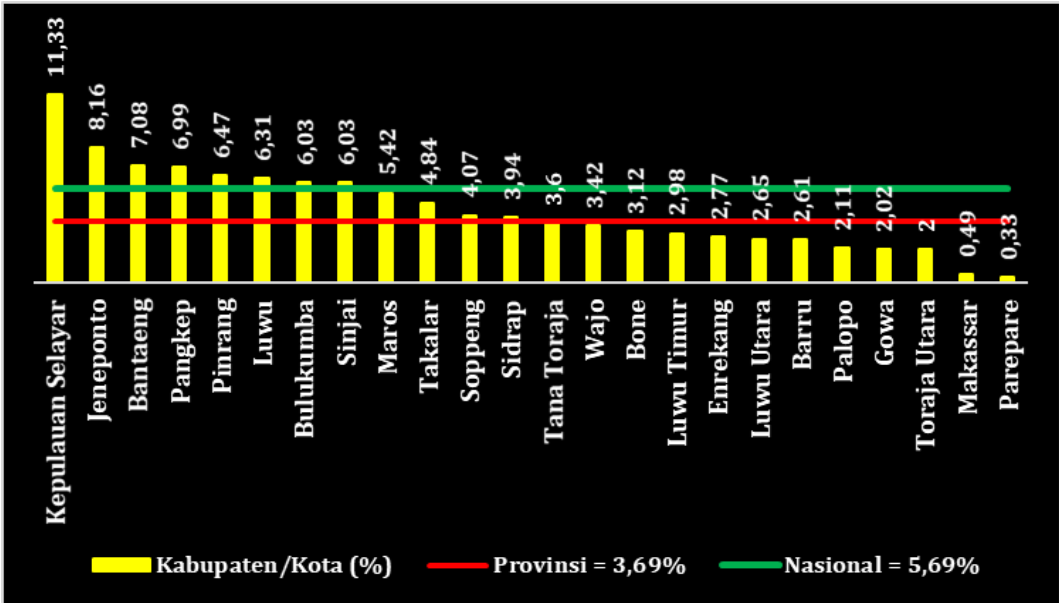


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 16,4 persen, persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 3,69 persen.

Persentase rumah tangga yang masih buang air besar sembarangan di tempat terbuka tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 11,33 persen. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dimana kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) sejumlah 23 kabupaten/kota. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 78.
Rumah Tangga yang masih BABs Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.68.
Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	30
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	20,16	52,7	6,67	18,03	25,39

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100	100
Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	84,41	89,77	93,79	93,98	97,36
Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	17,1	17,1	195,9	100
Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	7,15	57,14

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, Tahun 2023

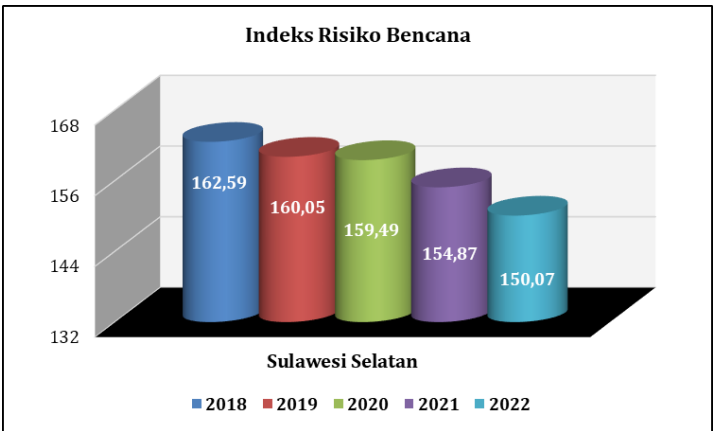
2.3.1.5 Kententraran, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dengan menetapkan target dan indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi. Pada tahun 2022 jumlah kasus penegakan perda pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 59 kasus yang terdiri dari Non Yustisi sebanyak 19 kasus dan Yustisi 40 kasus dari total 8 perda/perkada yang ditegakkan. Dalam pelaksanaan tersebut telah disediakan anggaran untuk memberikan layanan kepada warga negara akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. Namun dalam pelaksanaan kegiatan penegakan perda/perkada tidak pernah ada warga yang terkena dampak dari kegiatan tersebut dikarenakan pelaksanaan selalu berdasar SOP dan secara Humanis. Jumlah pengamanan dan penertiban yang terlaksana sejumlah 206 kegiatan yang terdiri dari pengamanan aset provinsi sejumlah 7 aset, pengamanan unjuk rasa 35 kasus, pengamanan objek vital sejumlah 9 objek, patroli rutin dan wilayah sejumlah 75 kasus, dan pelaksanaan deteksi dini sejumlah 80 kasus.

Program Penanggulangan Bencana didukung oleh penyusunan kajian risiko bencana provinsi, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana. Dengan luas wilayah Sulawesi Selatan sebesar 45.704,16 km² jumlah pos pelayanan bencana kebakaran yang harus tersedia sebanyak 265 pos, dimana pada tahun 2022 telah tersedia sebanyak 98 pos pelayanan di kabupaten/kota.

Sedangkan untuk evakuasi korban kebakaran dihitung dari waktu tanggap (Respon Time Rate) yaitu waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi tidak lebih 15 menit sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat. Pada tahun 2022 sejumlah 784 kejadian kebakaran terjadi dan yang tertangani sesuai kategori waktu tanggap sejumlah 726 kasus.

Grafik II. 79.
Indeks Risiko Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2019-2023

Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang bergunung-gunung dengan sarana prasarana jalan yang kurang baik. Secara umum faktor geologi dan kegempaan, wilayah Sulsel dilalui oleh Sesar Walanae melintang dari barat laut menuju tenggara. Ancaman bencana di Sulawesi Selatan antara lain: Gempa, Banjir, Tsunami, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Gelombang Pasang, Cuaca Ekstrem dan Abrasi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan nilai indeks dengan rata-rata penurunan sebesar 3,13 poin, namun IRB Sulawesi Selatan termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas. Capaian tahun 2022 nilai indeks risiko bencana Sulawesi Selatan sebesar 150,07 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 4,8 poin namun masih dalam kategori indeks risiko tinggi.

Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di suatu daerah atau kawasan. Metode yang digunakan dengan menggabungkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Tahun 2022 IRB Kabupaten/Kota mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana sejumlah 15 kabupaten dan 2 kota dengan tingkat risiko bencana tinggi di Sulawesi Selatan serta 6 kabupaten dan 1 kota dengan indeks risiko bencana sedang. Peningkatan indeks risiko bencana terjadi di Kabupaten Bantaeng sebesar 3,76 poin, Gowa sebesar 0,71 poin, dan Luwu sebesar 0,20 poin. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.69.
Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
1	Luwu	192,23	Tinggi	187,71	Tinggi	187,91	Tinggi
2	Palopo	211,20	Tinggi	198,94	Tinggi	186,68	Tinggi
3	Wajo	179,20	Tinggi	179,20	Tinggi	179,20	Tinggi
4	Luwu Timur	202,00	Tinggi	195,10	Tinggi	176,14	Tinggi
5	Bone	191,20	Tinggi	183,85	Tinggi	173,75	Tinggi
6	Pangkajene Kepulauan	168,40	Tinggi	168,40	Tinggi	168,40	Tinggi
7	Sinjai	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi
8	Bulukumba	163,20	Tinggi	163,20	Tinggi	163,20	Tinggi
9	Luwu Utara	185,25	Tinggi	169,57	Tinggi	155,01	Tinggi
10	Jeneponto	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi
11	Kepulauan Selayar	155,20	Tinggi	155,20	Tinggi	151,12	Tinggi
12	Tana Toraja	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi
13	Toraja Utara	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi
14	Barru	180,40	Tinggi	162,65	Tinggi	149,41	Tinggi
15	Maros	157,93	Tinggi	157,93	Tinggi	148,96	Tinggi
16	Pinrang	179,20	Tinggi	161,57	Tinggi	148,84	Tinggi
17	Pare-Pare	155,20	Tinggi	155,20	Tinggi	148,84	Tinggi
18	Enrekang	150,00	Tinggi	144,23	Tinggi	136,13	Sedang
19	Soppeng	131,20	Sedang	131,20	Sedang	131,20	Sedang
20	Takalar	135,04	Sedang	131,33	Sedang	128,38	Sedang
21	Kota Makassar	131,78	Sedang	127,18	Sedang	119,49	Sedang
22	Sidenreng Rappang	119,20	Sedang	119,20	Sedang	119,20	Sedang
23	Gowa	114,42	Sedang	106,27	Sedang	106,98	Sedang
24	Bantaeng	107,73	Sedang	102,20	Sedang	105,96	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021-2023

Pada Tahun 2022 dilaksanakan peningkatan kapasitas aparat sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang mana kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan, sosialisasi dan edukasi bencana di wilayah rawan bencana yaitu di Kabupaten Gowa dan Kota Pare-pare, serta pelaksanaan kegiatan workshop pengkajian dan perhitungan kerugian pasca bencana. Selain itu juga sebagai bentuk respon cepat dalam melakukan evakuasi tanggap darurat, dilaksanakan operasi darurat di wilayah yang tertimpa bencana yang mencakup 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani merupakan indikator kinerja pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan pada sub kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana dan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Jumlah total bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 adalah 862 kejadian dengan jenis bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Kencang, Puting Beliung, Kebakaran, Abrasi, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang, dan Gempa Bumi yang tersebar pada 24 kabupaten/kota yang disikapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelayanan respon cepat dan bantuan logistik pada 24 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 9.000 paket yang terdiri dari Logistik Pangan sebanyak 3.000 paket, Perlengkapan Bayi sebanyak 2.000 paket, Perlengkapan Keluarga sebanyak 2.000 paket dan Shelter Kit sebanyak 2.000 paket.

- b. Jenis sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia sejumlah 6 jenis, antara lain: mobil tangki air, mobil single cabin, perahu polythylene besar, perahu polythylene kecil, perlengkapan Tim Reaksi Cepat dan pelampung.
- c. Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan Pelatihan Manajemen Logistik Bencana dan Manajemen Posko Tanggap Darurat Bencana sebanyak 75 orang yang melibatkan aparatur BPBD dan OPD terkait dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Pada tahun 2022.

Tabel II.70.
Data Terdampak Bencana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
1	Kepulauan Selayar	Banjir	5	4	129
		Banjir Bandang	1	0	52
		Tanah Longsor	2	0	3
		Angin Kencang	30	34	178
		Putting Beliung	2	10	6
		Kebakaran	3	17	1
		Gempa Bumi	16	484	1.228
2	Sinjai	Banjir	3	1	1
		Tanah Longsor	12	14	8
		Angin Kencang	8	36	56
		Kebakaran	1	0	0
3	Bulukumba	Banjir	2	0	350
		Tanah Longsor	1	0	0
		Angin Kencang	8	18	18
		Putting Beliung	6	28	14
		Kebakaran	7	48	13
		Abrasi	1	1	1
		Gelombang Pasang	1	8	9
		Gempa Bumi	1	0	0
4	Bantaeng	Banjir	1	0	0
		Tanah Longsor	1	0	0
		Angin Kencang	2	0	14
		Putting Beliung	1	158	44
		Kebakaran	6	8	10
		Abrasi	1	0	0
5	Jeneponto	Banjir	3	8	32
		Tanah Longsor	2	7	5
		Angin Kencang	1	0	2
		Putting Beliung	8	59	67
		Kebakaran	4	15	16
6	Takalar	Banjir	3	0	1.746
		Angin Kencang	1	25	7
		Putting Beliung	8	61	138
		Kebakaran	7	25	11
		Abrasi	2	0	113
7	Gowa	Tanah Longsor	5	19	21
		Kebakaran	3	7	4
8	Makassar	Banjir	2	2.601	304

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
		Angin Kencang	2	11	4
		Putting Beliung	2	18	4
		Kebakaran	17	715	140
9	Maros	Banjir	3	40	13
		Tanah Longsor	1	18	2
		Angin Kencang	4	0	66
		Kebakaran	2	11	2
10	Pangkajene dan Kepulauan	Banjir	2	32	9
		Tanah Longsor	2	2	2
		Angin Kencang	27	22	19
		Putting Beliung	3	0	10
		Kebakaran	10	15	12
		Gempa Bumi	2	0	0
11	Barru	Banjir	3	24	209
		Angin Kencang	6	38	80
		Tanah Longsor	5	5	2
		Kebakaran	10	52	17
		Putting Beliung	1	0	11
		Abrasi	3	18	19
		Cuaca Ekstrim	1	6	3
		Gempa Bumi	2	0	0
12	Pare-Pare	Banjir	2	120	433
		Tanah Longsor	3	28	10
		Angin Kencang	15	0	7
		Kebakaran	2	12	2
		Gempa Bumi	2	0	0
13	Sidenreng Rappang	Banjir	6	19	4
		Tanah Longsor	3	879	212
		Angin Kencang	16	48	214
		Putting Beliung	1	0	23
		Kebakaran	18	68	20
14	Wajo	Banjir	9	25.564	8.956
		Angin Kencang	26	206	137
		Putting Beliung	1	0	60
		Kebakaran	11	14	18
		Abrasi	1	0	0
15	Pinrang	Banjir	4	0	0
		Tanah Longsor	3	0	20
		Angin Kencang	21	10	23
		Kebakaran	13	15	15
		Abrasi	2	0	177
		Cuaca Ekstrim	1	0	80
		Gempa Bumi	4	0	0
16	Soppeng	Banjir	1	20.085	5.322
		Angin Kencang	2	1	1
		Kebakaran	3	10	6
17	Bone	Banjir	3		
		Tanah Longsor	7	1	1
		Angin Kencang	20	6	33
		Putting Beliung	15	229	78
		Kebakaran	34	177	64
		Cuaca Ekstrim	1	0	18
		Gempa Bumi	7	0	0
18	Enrekang	Banjir	6	0	93
		Banjir Bandang	3	117	48
		Tanah Longsor	13	81	42
		Angin Kencang	11	23	10
		Putting Beliung	1	35	8
		Kebakaran	14	53	23

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
		Cuaca Ekstrim	1	0	0
		Gempa Bumi	1	0	0
19	Tana Toraja	Tanah Longsor	17	140	56
		Angin Kencang	10	23	12
		Putting Beliung	6	18	5
		Kebakaran	9	29	7
		Cuaca Ekstrim	1	0	1
20	Toraja Utara	Tanah Longsor	8	0	0
		Angin Kencang	4	0	1
		Putting Beliung	3	0	4
		Kebakaran	5	7	6
		Gempa Bumi	3	0	0
21	Luwu	Banjir	15	8	1.918
		Tanah Longsor	6	0	256
		Angin Kencang	4	0	32
		Putting Beliung	3	342	83
		Gempa Bumi	1	0	0
22	Palopo	Banjir	3	0	1.094
		Banjir Bandang	1	0	1.749
		Tanah Longsor	1	0	0
		Angin Kencang	1	0	0
		Putting Beliung	1	1	1
		Kebakaran	1	1	1
23	Luwu Utara	Banjir	24	14.050	3.805
		Tanah Longsor	1	0	17
		Angin Kencang	8	15	11
		Putting Beliung	2	14	4
		Kebakaran	14	51	14
		Gempa Bumi	6	0	0
24	Luwu Timur	Banjir	3	38	8
		Tanah Longsor	3	7	1
		Angin Kencang	5	100	93
		Kebakaran	8	113	18
		Cuaca Ekstrim	3	12	6
		Gempa Bumi	90	0	0
Jumlah Total			862	67.521	31.087

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.71.
Capaian Kinerja Program Urusan Kententraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)	%	80	89	100	100	100
Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	37	64,8
Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100	100	100	100
Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100	100	100	100
Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.1.6 Sosial

Standar pelayanan minimal urusan sosial mengamanatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis. Pada tahun 2022 populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 415.310 orang dan populasi yang terdaftar dalam program keluarga harapan, program bantuan bersyarat untuk pengentasan kemiskinan yang bersumber dari kemensos sebesar 364.414. Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan melampaui target dengan capaian 360 orang yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 60 Orang, LKS sebanyak 120 Orang, SLRT sebanyak 60 Orang dan TKSK sebanyak 120 orang. Jumlah Pemulangan orang terlantar sebanyak 174 orang dipulangkan ke daerah asal. Jumlah penyandang Disabilitas terlantar sebanyak 224 orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti seperti pangan dan sandang, serta pemberian alat bantu kepada disabilitas sebanyak 39 orang. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di UPT Dinas Sosial sebanyak 425 orang serta anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial LKSA sebanyak 1.551 orang. Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi di dalam panti Mappaksunggu Pare-Pare yaitu sebanyak 75 orang dan terealisasi sesuai target yang ditentukan. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial yang berada di 8 LKS Mitra Kerja Dinas Sosial sebanyak 1.222 orang. Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi dalam panti Mattirodeceng yaitu sebanyak 100 orang. Jumlah populasi PPKS sebanyak 415.310 orang dan yang mendapatkan bantuan jaminan social (PKH) sebanyak 365.669 orang. Jumlah orang tua tunggal yang mengajukan proses pengangkatan anak WNI yaitu sebanyak 38 orang.

Pada tahun 2022 jumlah korban bencana yang terdampak sebanyak 26.921 orang dan semua korban terdampak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2022. Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten

dengan jumlah korban bencana tertinggi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana provinsi sebesar 9.562 jiwa kemudian Kabupaten Pinrang sejumlah 5.350 jiwa, Kota Palopo sejumlah 3.937 jiwa, dan Kabupaten Wajo sejumlah 2.178 jiwa. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 2 TMP/MPN dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan sosial tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.72.
Capaian Kinerja Program Urusan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	%	100	100	100	100	100
Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	%	99,05	60,97	38,91	65	100
Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100	55,66	58
Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti (SPM)	%	8,21	20,83	35,12	100	100
Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM)	%	3,09	30,09	3,88	100	100
Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti (SPM)	%	11,3	11,35	100	100	100
Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti (SPM)	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	%	6,9	5,52	100	100	100
Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	62,4	50,4	75,45	88,04	3,6
Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	%	100	100	96,96	100	100
Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100	100	15,63	100	100
Persentase TMP yang dikelola	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

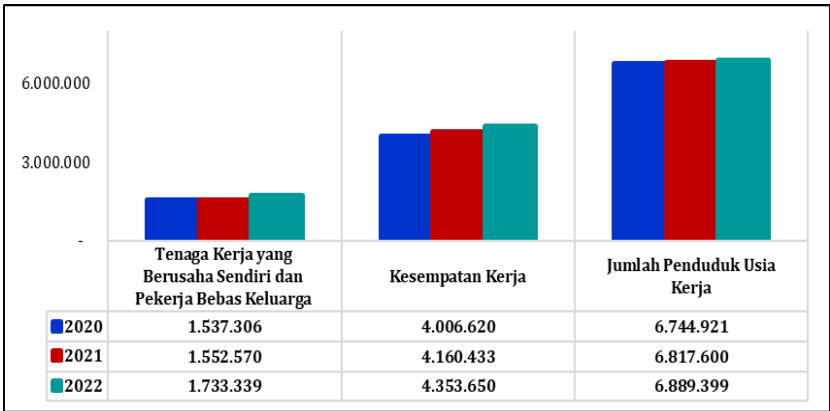
2.3.2.1. Ketenagakerjaan

Capaian persentase kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja makro sebesar 66,67 persen dimana sejumlah 16 kabupaten/kota yang masih aktif dan 7 kabupaten/kota yang telah habis masa berlakunya dan 1 Kabupaten tidak menyusun karena tidak tersedia anggaran. Dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan semua menyusun perencanaan tenaga kerja makro. Capaian perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro sebesar 12 persen dimana dari 25 perusahaan terdapat 3 perusahaan yang telah menyusun perencanaan tenaga kerja mikro. Capaian persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan sebesar 83,33 persen dimana jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 60 orang dan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 50 orang.

Jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga pada tahun 2022 mengalami peningkatan 1,24 persen poin dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1.733.339 orang. Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri pada tahun 2021 adalah sebesar 81,25 persen lebih tinggi 6,25 persen dari target 75,00 persen. Dari total 320 orang peserta pelatihan yang berbasis kewirausahaan yang telah mandiri sebanyak 212 orang, meliputi pelatihan kewirausahaan sebanyak 12 orang dan pelatihan kelompok usaha mandiri (KUM) sebanyak 200 orang dan sisanya sebanyak 60 orang baru mulai merintis usaha. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang

dilatih kewirausahaan sebanyak 20 orang dan seluruhnya telah mandiri berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh UPT BPK.

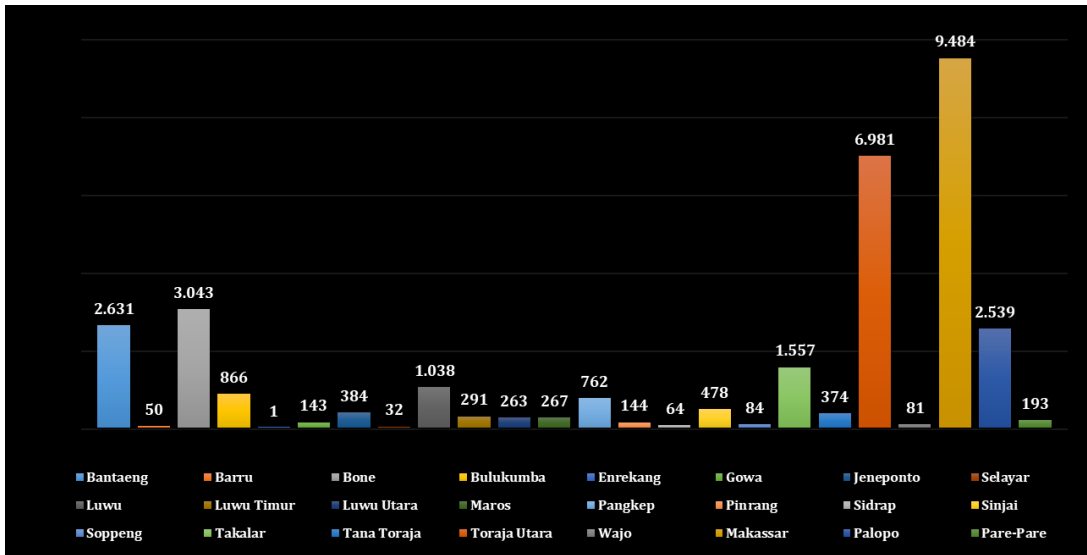
Grafik II. 80.
Peningkatan Kesempatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami peningkatan dari tahun 2020. Berdasarkan hasil monitoring di 24 kabupaten/kota jumlah pencari kerja sebanyak 311.117 orang dan yang ditempatkan sebanyak 17.424 orang yang terdiri dari AKAL (Antar Kerja Antar Luar) sebanyak 14.108 orang, AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) sebanyak 3.120 orang, Disabilitas sebanyak 19 orang dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebanyak 177 orang.

Grafik II. 81.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



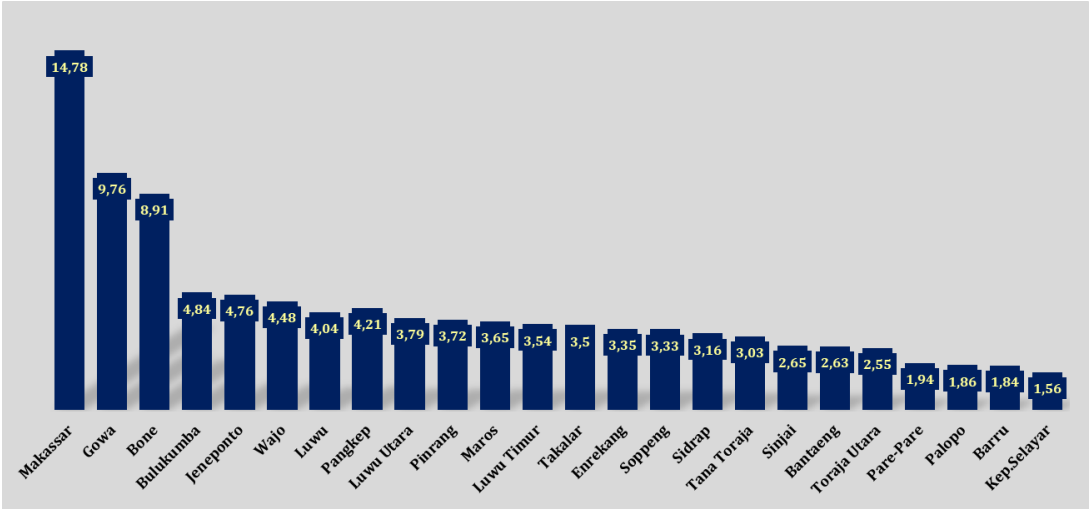
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2022 persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 9,49 persen. Dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 39.679 orang dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 31.650 orang yang terdiri dari AKAD/AKL sebanyak 26.306 orang, Disabilitas sebanyak 52 orang dan PMI sebanyak 5.292

orang. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 tertinggi di Kota Makassar sejumlah 9.484 orang, sedangkan yang terendah di Kabupaten Enrekang sejumlah 1 orang.

Persentase daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Persentase daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 sebesar 63,19 persen dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 6.889.399 orang dan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 4.889.399 orang mengalami peningkatan sebesar 2,61 persen dari tahun 2021. Daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 tertinggi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone. Sedangkan daya serap tenaga kerja terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, dan Kota Palopo.

Grafik II. 82.
Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan pada tahun 2021 adalah sebesar 60,98 persen melampaui 3,88 persen dari target 57,10 persen. Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama sebesar 60,98 persen yang diukur dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 41 kasus dan jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 25 kasus dan sisanya adalah anjuran. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 63,38 persen, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 9.592 perusahaan serta jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 15.133 perusahaan.

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek merupakan rasio antara jumlah pekerja/buruh yang mengikuti jamsostek dibagi dengan total jumlah pekerja, pada tahun 2021 persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah sebesar 47,12 persen lebih tinggi 0,52 persen dari target 46,60 persen. Berdasarkan data BPJS yang tercatat jumlah pekerja/buruh sebanyak 2.265.109 orang dan yang menjadi peserta jamsostek sebanyak 1.067.251 orang. Tahun 2022 persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi Program Jamsostek adalah sebesar 49,43 persen.

Jumlah pekerja yang mengikuti Program Jamsostek meliputi PU, BPU dan Jakon sebesar 1.168.024 orang dari proyeksi PU, BPU dan Jakon sebanyak 2.865.109 orang. Capaian persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan sebesar 20,93 persen. Jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 15.133 perusahaan dan jumlah perusahaan yang telah diperiksa sebanyak 3.167 perusahaan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.73.
Capaian Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	95,83	95,83	95,83	91,67	66,7
Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	10	12
Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	73	83,33
Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	81,25	100
Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	3,19	4,36	3,29	5,60	9,49
Persentase daya serap tenaga kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	20,87	61,58	63,19
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	60,98	63,38
Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	64,51	63,55	77,99	47,12	49,43
Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	62,59
Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi, dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 76,37 persen lebih rendah dari capaian nasional. Peningkatan capaian IDG pada tahun 2022 didukung oleh peningkatan dimensi keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 4,56 persen dari tahun sebelumnya dengan capaian 27,06. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh menurunnya capaian IDG dari dimensi pendapatan perempuan dan keterlibatan perempuan di parlemen. Dimana pada tahun 2020 pendapatan perempuan sebesar 32,55 persen menurun menjadi 32,51 persen pada tahun 2021, serta keterlibatan perempuan dalam parlemen mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 8,87 persen dengan capaian 25,88 persen pada tahun 2021.

Masih perlunya peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang, serta partisipasi dan pengambilan keputusan dari aspek ekonomi yang mempertimbangkan kesetaraan posisi pekerjaan dan pendapatan laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2022 capaian IDG tertinggi di Kota Palopo sebesar 79,1 persen sedangkan yang terendah di Luwu Utara dengan capaian 43,96 persen. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.74.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	69,14	76,01	76,32	74,76	76,37
Nasional	%	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Indeks Pemberdayaan Gender di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 terendah di Kabupaten Luwu Utara dengan nilai 43,96, sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Bantaeng dengan nilai 80,21. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.75.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Selayar	64,69	68,03	70,06	68,07	68,71
Bulukumba	66,78	69,89	68,22	67,10	70,32
Bantaeng	80,53	80,27	80,26	81,20	80,21
Jeneponto	72,37	68,04	68,24	68,68	68,94
Takalar	70,55	70,66	68,78	70,67	73,39
Gowa	61,06	78,31	77,97	79,71	78,35
Sinjai	70,24	72,48	73,46	73,59	73,78
Maros	65,48	69,93	72,43	72,38	71,63
Pangkep	56,20	57,03	59,44	59,94	64,12
Barru	69,24	63,41	63,96	63,98	65,24
Bone	63,16	58,55	56,86	57,55	59,09

Kabupaten/Kota	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Soppeng	73,75	71,45	71,15	70,54	71,07
Wajo	61,07	55,09	56,24	56,30	55,83
Sidenreng Rappang	52,71	56,80	56,86	56,39	56,71
Pinrang	61,73	67,92	68,11	68,43	65,12
Enrekang	59,36	58,28	60,32	56,51	62,98
Luwu	63,58	55,89	57,15	57,29	58,03
Tana Toraja	74,14	69,32	68,50	68,77	70,68
Luwu Utara	46,24	38,92	38,11	41,11	43,96
Luwu Timur	46,06	50,76	50,76	54,09	55,4
Toraja Utara	56,15	62,58	60,98	62,75	64,21
Kota Makassar	67,89	78,32	77,61	76,59	78,15
Kota Pare-Pare	66,62	73,86	74,06	70,86	71,21
Kota Palopo	74,87	77,53	77,47	73,10	79,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan. Sejak tahun 2017 hingga 2019 di Sulawesi Selatan hanya ada satu layanan yang terstandarisasi yakni UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk di Kabupaten/Kota memiliki layanan Perlindungan Perempuan berupa P2TP2A yang dikelola oleh Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah. Tahun 2020 beberapa Kabupaten/Kota telah membentuk UPT PPA sesuai dengan Edaran Mendagri dan hingga tahun 2021 terdapat 6 kabupaten/kota yang membentuk Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi. Pada tahun 2022 sejumlah 27 persen tersedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi, yaitu: Yayasan Kalla, Yasmib, Muslimat, Kohati HMI, BKOW, Perempuan Gereja/PWKI, Dharmayukti Karini, Jalasenastri dan PKK.

Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender baik dalam skala nasional maupun skala regional maupun di tingkat daerah. Keberhasilan Penerapan 7 Prasyarat PUG di daerah yang terdiri dari: a) Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penerapan PUG; b) Kebijakan daerah yang mendukung penerapan PUG, c) Kelembagaan Pokja PUG/Focal Point, d) Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia terkait kapasitas perencana/program/bidang teknis dalam memahami PUG melalui PPRG serta sumber daya anggaran terkait alokasi anggaran dalam memperkuat PUG, Data pilah, Alat Analisis, dan Partisipasi masyarakat, maka setiap daerah akan mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan beberapa kategori. Hingga tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai kategori tertinggi yaitu Mentor atau 7 Prasyarat PUG tersebut diatas telah berjalan dan salah satu wujud nyata penerapan PUG telah berhasil di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dimana sejak tahun 2020 hingga 2022 telah dilaksanakannya Musrenbang Perempuan serta masyarakat/lembaga masyarakat pemerhati perempuan telah diberi ruang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Layanan Perlindungan Perempuan selanjutnya disebut UPTD PPA yang berfungsi sebagai sebagai unit layanan teknis menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Hingga tahun 2022 Provinsi dan sejumlah 13 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bone, Luwu Utara, Wajo, Lutim, Sinjai, Enrekang, Takalar, Soppeng, Bulukumba, Barru, Maros, Gowa, Kota Makassar yang telah membentuk UPT. Namun dengan adanya keterbatasan sumberdaya di Kabupaten/Kota, maka untuk menstandarkan lembaga layanan sesuai dengan standar ISO belum dapat dilaksanakan.

PUSPAGA sebagai tempat pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera di Sulawesi Selatan. Layanan ini dikatakan terstandarisasi apabila telah memiliki antara lain: 1) Tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi; 2) Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak. Kabupaten/Kota yang telah menyediakan layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi adalah Kabupaten Maros, Gowa, Barru, Wajo, Bone, Sidrap, Luwu Utara, Kota Makassar dan Pare-Pare.

Menyediakan Data Gender dan Anak merupakan salah satu bagian dari tujuh prasyarat PUG dan juga sekaligus sebagai alat dalam Menyusun Gender Budget Statement. Penyediaan data gender dan anak tahun 2017 hingga 2018 kabupaten/kota belum menyediakan data secara terpilah hal ini dimana minimnya pembinaan ke kabupaten/kota terkait data pilah. Hingga tahun 2022 sejumlah 22 kabupaten/kota telah menyediakan data gender dan anak terupdate, sejumlah 16 kabupaten/kota telah menyediakan kelembagaan sistem data gender dan anak secara mandiri yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Maros, Pangkep, Bone, Soppeng, Sidrap, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Kota Pare-Pare, Palopo dan Makassar. Pengembangan kelembagaan penyediaan data terpilah gender dan anak sampai ke level Desa/Kelurahan dengan membentuk relawan SAPA dengan tugas dan fungsi melakukan pengumpulan dan analisa data terpilah gender dan anak. Sehingga mempermudah tim data/forum data OPD dalam menggunakan data terpilah dalam proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) merupakan komitmen dalam menghormati dan memenuhi hak anak dan merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA), serta untuk mengetahui sejauh mana daerah berkomitmen dalam pengarusutamaan Hak Anak, maka setiap tahunnya dilakukan evaluasi KLA dengan memperhatikan 5 Kluster. Hingga tahun 2022 sejumlah 21 kabupaten/kota atau sebesar 87,5 persen daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten Bone, Bantaeng, Sinjai, Sidrap, Luwu Utara, Maros, Bulukumba, Gowa, Soppeng, uwu Timur, Barru, Pangkep, Kep. Selayar, Jeneponto, Enrekang, Pinrang, Kota Makassar, Palopo dan Pare-Pare.

Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan selanjutnya disebut UPTD PPA yang berfungsi sebagai sebagai unit layanan teknis menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Hingga tahun 2022 Provinsi dan sejumlah 13 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bone, Luwu Utara, Wajo Luwu Timur, Sinjai, Enrekang, Takalar, Soppeng, Bulukumba, Barru, Maros, Gowa, dan Kota Makassar telah membentuk UPT. Namun dengan adanya keterbatasan sumberdaya di kabupaten/kota untuk menstandarkan Lembaga layanan sesuai dengan standar ISO belum dapat dilaksanakan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.76.
Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	%	65	0	54	58	25
Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	%	62,5	62,5	75	83,33	71
Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi	%	0	0	54	58	37,5
Persentase kab/kota yang menyediakan layanan peningkatan kualitas keluarga	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	91,67	91,67
Persentase Kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang terupdate	%	Belum dilakukan pengukuran	80	82	82,5	85
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	58,33	58,33	66,7	62,5	87,5
Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	8,3	12,5	16,6	58	58,3

Sumber : DP3A, Dalduk dan KB Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

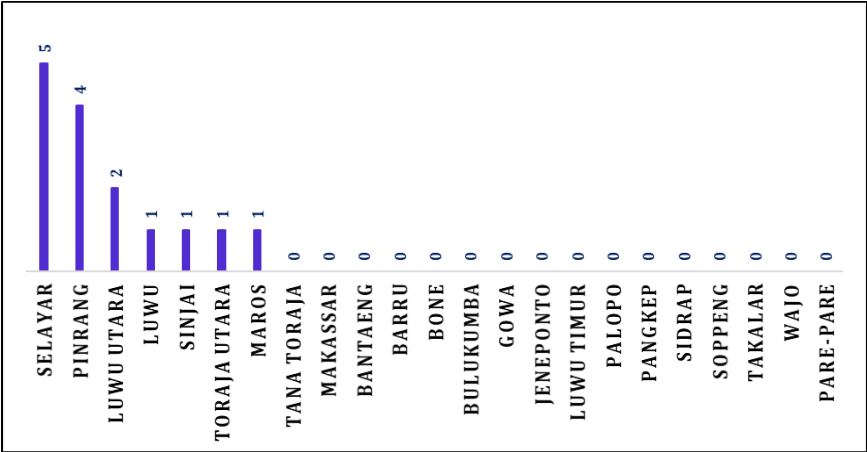
2.3.2.3. Pangan

Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun didukung oleh anggaran DAK Fisik Pertanian pemerintah pusat untuk kabupaten/kota (anggaran langsung ke kelompok tani) berupa pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat pada kelompok tani yang memenuhi syarat. Pada tahun 2021 dilaksanakan pembangunan lumbung pangan masyarakat sejumlah 25 lumbung sedangkan pada tahun 2022 jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun mengalami peningkatan dengan jumlah 58 lumbung.

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan mempunyai cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 140 ton yang dititip di Badan Urusan Logistik (Bulog). Ketersediaan beras di provinsi Sulawesi Selatan mampu memenuhi kebutuhan penduduk sehingga masuk dalam kategori aman. Faktor pendukung capaian ketersediaan pangan utama adalah bergantung pada produksi padi dan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Ketersediaan beras pada tahun 2021 mengalami surplus beras, situasi dimana tingkat ketersediaan pangan lebih besar daripada total kebutuhan. Komoditi jagung juga mengalami surplus. Begitu pula dengan ketersediaan jagung mencapai 61,83 persen melampaui target sebesar 9,04 persen. Berbeda dengan ketersediaan kedelai mengalami defisit yakni situasi dimana tingkat ketersediaan pangan kedelai lebih kecil dari total kebutuhan. Capaian ketersediaan kedelai tahun 2021 sebesar 13,62 persen tidak mencapai target sebesar 26,22 persen. Faktor penghambat pencapaian target disebabkan karena Sulawesi Selatan bukan merupakan daerah sentra produksi kedelai. Selain itu walaupun areal luas tanam diperluas akan tetapi banyak pertanaman puso akibat banjir. Sebab lain akibat rendahnya produksi kedelai menyebabkan harga kedelai naik, dalam prespektif ketahanan pangan terkendala dalam akses ketersediaan dan akses distribusi. Tahun 2022 jumlah ketersediaan pangan tidak mencapai target yang dipengaruhi oleh jumlah produksi pertanian dan jumlah penduduk yang menurun, namun meskipun demikian jumlah ketersediaan pangan Sulawesi Selatan melebihi jumlah kebutuhan konsumsi. Berdasarkan neraca pangan tahun 2022, neraca beras sebanyak 759.916 ton, neraca jagung sebanyak 662.137 ton dan jumlah produksi kedelai sebanyak 4.006 ton (untuk pangan kedelai tidak dilakukan perhitungan neraca karena tidak masuk kategori pangan pokok strategis).

Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein melebihi angka kecukupan gizi (AKG) berdasarkan standar nasional sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kapita/hari bila dikonsumsi. Tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan yaitu 2.150 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi bersumber dari beras dan jagung pada tahun 2022 mencapai 3.593 kkal/kapita/hari mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,07 persen. Tingkat ketersediaan protein pada tahun 2022 sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan yaitu 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein bersumber dari telur, susu, daging sapi, daging ayam dan ikan dengan capaian 171,65 gram/kapita/hari pada tahun 2022 mengalami penurunan -15,44 persen dari tahun 2021.

Grafik II. 83.
Sebaran Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pada tahun 2020 jumlah daerah rawan pangan sebanyak 22 kecamatan dan tertangani hanya 7,49 persen. Tidak mencapai target jumlah rawan pangan bertambah 5 kecamatan/daerah. Jumlah daerah rawan pangan pada tahun 2021 teridentifikasi melalui peta FSVA naik sebanyak 27 daerah/kecamatan dan penanganan daerah rawan pangan hanya 25,64 persen. Terdapat Bantuan Pertanian Keluarga pada 20 Kelompok tani untuk mengintervensi 27 daerah rawan pangan berdasarkan peta kerentanan dan ketahanan pangan tahun 2021. Dukungan Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan untuk mengetahui titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan seimbang dan daerah rawan pangan. Bantuan yang diserahkan ke masyarakat (20 Kelompok Tani) di tahun 2021 dalam hal penanganan kerawanan pangan melalui program pertanian keluarga (Family Farming) dan penguatan daerah yang dekat dengan daerah rawan pangan. Daerah rawan pangan mengalami peningkatan dari 22 daerah rawan pangan di tahun 2020 menjadi 27 daerah rawan pangan di tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa penanganan daerah rawan pangan belum maksimal. Tahun 2022 telah dilaksanakan sinkronisasi dengan kabupaten/kota dalam penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA yang diperoleh 3 kecamatan kategori rentan rawan pangan (Prioritas 2) dan 13 kategori Agak Rentan Rawan Pangan (Prioritas 3). Mengalami penurunan dari tahun 2021 jumlah daerah rawan pangan pada tahun 2022 sebesar 15 lokasi yang tersebar di Kabupaten Jeneponto (5 lokasi), Pinrang (4 lokasi), Luwu Utara (2 lokasi), dan Kabupaten Luwu, Maros, Sinjai, dan Toraja Utara masing-masing sejumlah 1 lokasi rawan pangan.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan Kesehatan manusia. Dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kima dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan dibidang mutu keamanan pangan. Dukungan Stakeholder terkait dalam hal ini kelompok Wanita Tani, Balai POM dan Pelaku Usaha merespon baik kegiatan pengambilan

dan pengujian sampel. Pada tahun 2022 dari 30 sampel yang diuji semuanya lolos uji pestisida dan formalin. Telah diterbitkan 1 Sertifikat Prima 3 dan 47 Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.77.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	%	14,93	15,19	14,98	14,58	29,15
Ketersediaan Beras	%	388,24	363,76	332,21	363,8	367,91
Ketersediaan Jagung	%	44,33	47,88	53,27	61,83	55,04
Ketersediaan Kedelai	%	22,55	24,96	13,66	13,62	18,23
Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/ kapita/ hari	3.572	3.879	3.168	3.484,4	3.593
Ketersediaan Protein Perkapita	gr/ kapita/ hari	103,75	139,92	86,16	94,78	171,65
Jumlah Daerah Rawan Pangan	%	14	16	22	27	15
Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	5,21	16,29	7,49	25,64	74,07
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100
Skor Pola Pangan Harapan	%	82,60	83,40	83,7	80,40	81,38

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.4. Pertanian

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan persiapan menjadi kewenangan Gubernur yaitu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan. Pengadan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi sejumlah 8 kegiatan pengadaan tanah antara lain proyek prioritas provinsi dan proyek strategis Nasional yang permohonannya diajukan pada akhir tahun 2021 tetapi dilakukan perpanjangan dan penetapan lokasinya pada tahun 2022. Adapun kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud antara lain :

1. Pembangunan Jalan Bypass Mamminasata di Kabupaten Maros seluas ± 15,21 Ha;
2. Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare (Segmen E) untuk Kabupaten Maros dan Kota Makassar seluas ± 83,94 Ha;
3. Pembangunan Runway Bandara Bua di Kabupaten Luwu seluas ± 18 Ha;
4. Pembangunan Akses Jalan Bandara Bua-Toraja Utara di Kabupaten Luwu seluas ± 8,37 Ha;
5. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Baliase di Luwu Utara seluas ± 30,15 Ha;
6. Pembangunan Genangan Tanggul Hulu Bendung D.I Gilireng di Kabupaten Wajo seluas ± 67,43 Ha;
7. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar seluas ± 307,27 Ha;
8. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Gowa seluas ± 47 Ha.

Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2022 terdapat 6 pengaduan, dan presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 100 persen. Kegiatan Penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota serta kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi yang dilakukan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Melakukan Koordinasi terkait tentang Permohonan Persetujuan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa di Kabupaten Wajo.
2. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah di Kab Bone.
3. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Sinjai.
4. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Bulukumba.
5. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
6. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
7. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kosolidasi Tanah Kewenangan Provinsi di Kabupaten Takalar.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pertanahan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.78.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	140	83,3	100	100
Persentase sengketa tanah negara kewenangan	%	60	100	83,33	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
provinsi yang difasilitasi						
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Dokumen RPPLH memuat tentang latar belakang, kondisi wilayah dan lingkungan hidup, permasalahan dan isi pokok lingkungan hidup, serta arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan untuk 30 tahun mendatang. Pada tahun 2018 DPLH Prov.Sulsel telah menyusun dokumen RPPLH Sulawesi Selatan untuk 2017-2047, sehingga target tersedianya dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai pada tahun 2017. Skenario RPPLH Prov.Sulsel adalah untuk Periode I (tahun 2017-2026), Periode II (tahun 2027-2036), dan Periode III (tahun 2037-2047). Dengan adanya tahapan verifikasi dokumen RPPLH maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan penyusunan peraturan daerah tentang RPPLH. Tahun 2022 direncanakan untuk menyusun naskah akademik Ranperda RPPLH, di tahun 2023 penyelesaian penyusunan RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Peraturan Daerah. Tahapan pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2022 sebesar 60 persen dimana pada tahapan ini dilakukan pra verifikasi di KLHK terhadap Draft Dokumen RPPLH yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Surat Edaran MenLHK No. 5 Tahun 2016.

Berdasarkan pembagian urusan Pokja Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merupakan koordinator inventarisasi aksi mitigasi khusus sektor limbah. Beberapa kegiatan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah yang dilakukan inventarisasi antara lain TPS 3R, TPST, Bank Sampah, Pengomposan serta didukung dengan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2022 sebesar 7,85 persen yang diperoleh dari sejumlah kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK yaitu kegiatan TPS3R sebesar 667,88 Ton CO2 Eq, TPST sebesar 5.271,15 Ton CO2 Eq, Rumah Kompos sebesar 1.120,37 Ton CO2 Eq, Bank sampah sebesar 486,47 Ton CO2 Eq, ProKlim sebesar 251,77 Ton CO2 Eq serta sektor informail (pengepul) sebesar 6.3290 Ton CO2 Eq. Total jumlah penurunan Emisi GRK pada tahun 2021 sebesar 14.126,72 Ton CO2 Eq.

Tabel II.79.
Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No	Kegiatan	Jumlah Penurunan Emisi (Ton CO ₂ Eq)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	TPS3R	0,155	325,07	3,77	53,38	667,88
2	TPST	0,303	2,85	1,78	765,8	5.271,15

No	Kegiatan	Jumlah Penurunan Emisi (Ton CO ₂ Eq)				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Rumah Kompos	0	0,133	0,778	309,67	1.120,37
4	Bank Sampah	127,99	0,342	1.328,67	200,28	486,47
5	ProKlim	0	0	0	3.895,29	251,77
6	Aplikasi Aksara	117,63	163,92	778,29	1.911	0
7	Sektor Informal (Pengepul)					6.329,08
Total					7.135,42	14.126,72

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian persentase tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi) pada tahun 2022 sebesar 92,85 persen atau sebanyak 320 jenis tanaman koleksi yang berada di kebun Raya Pucak dari target 350 jenis hingga tahun 2023.

Target sampah perkotaan yang tertangani sebesar 73 persen sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 55,48 persen yang berasal dari jumlah sampah yang ditangani sebesar 765.570 ton/tahun dibagi dengan timbulan sampah sebesar 1.380.553,36 ton. Kapasitas infrastruktur layanan persampahan serta sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah di kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.80.
Kapasitas dan Pengoperasian TPA Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas (Ton/Hari)	Sistem Pengoperasian
1	Kepulauan Selayar	10	Controll Landfill (Over)
2	Bulukumba	30	Sanitary Landfill (Over)
3	Bantaeng	21	Sanitary Landfill
4	Jeneponto	27	Controll Landfill
5	Takalar	9	Sanitary Landfill
6	Gowa	238	Open Dumping
7	Sinjai	19	Controll Landfill (Over)
8	Maros	49	Controll Landfill
9	Pangkajene dan Kepulauan	30	Controll Landfill
10	Barru	10	Controll Landfill (Over)
11	Bone	57	Controll Landfill (Over)
12	Soppeng	25	Controll Landfill (Over)
13	Wajo	59	Sanitary Landfill
14	Sidenreng Rappang	57	Sanitary Landfill (Over)
15	Pinrang	36	Sanitary Landfill
16	Enrekang	45	Controll Landfill
17	Luwu	51	Controll Landfill
18	Tana Toraja	16	Open Dumping
19	Luwu Utara	14	Controll Landfill (Over)
20	Luwu Timur	9	Controll Landfill

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas (Ton/Hari)	Sistem Pengoperasian
21	Toraja Utara	11	Controll Landfill
22	Makassar	603	Open Dumping
23	Parepare	57	Controll Landfill (Over)
24	Palopo	72	Controll Landfill

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Target cakupan limbah yang dikelola pada tahun 2022 sebesar 4.000.000 ton. Adapun limbah yang dihasilkan sebesar 5.002.706,88 ton (termasuk FABA dan Slug nikel) sedangkan belum dikelola lanjut atau bersisa sebesar 68.075,35 ton. Target ketaatan pemrakarsa usaha terhadap izin lingkungan dan Izin PPLH tahun 2022 sebanyak 25 persen dimana jumlah pemrakarsa yang taat sebanyak 16 usaha dan target pengawasan usaha sebanyak 65 usaha, sedangkan realisasi pemrakarsa usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH sebanyak 21 usaha dan pengawasan usaha/kegiatan dan 71 usaha/kegiatan yang diawasi terdiri dari 65 pengawasan langsung dan 6 pengawasn tidak langsung.

Target persentase pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH sebanyak 73,61 pada tahun 2022 yang terdiri dari 53 MHA yang dibina sedangkan total MHA yang dibina sampai dengan tahun 2023 sebanyak 72 MHA dan realisasi sebanyak 53 MHA yang dibina. Target Cakupan lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH sebanyak 154 instansi lembaga dan organisasi, yang dilakukan penyuluhan sebanyak 134 instansi lembaga dan organisasi pada tahun 2022. Target cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan pada tahun 2022 sebanyak 30 rekomendasi dan penanganan pengaduan yang tertangani pada tahun 2022 sebanyak 30 rekomendasi. Pada tahun 2022 jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan sebesar 111 penghargaan dari pelaksanaan kegiatan adiwiyata, kalpataru, adipura, proklim dan proper.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.81.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	20	60
Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	3,4	3,88	7,85
Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	85,71	92,85

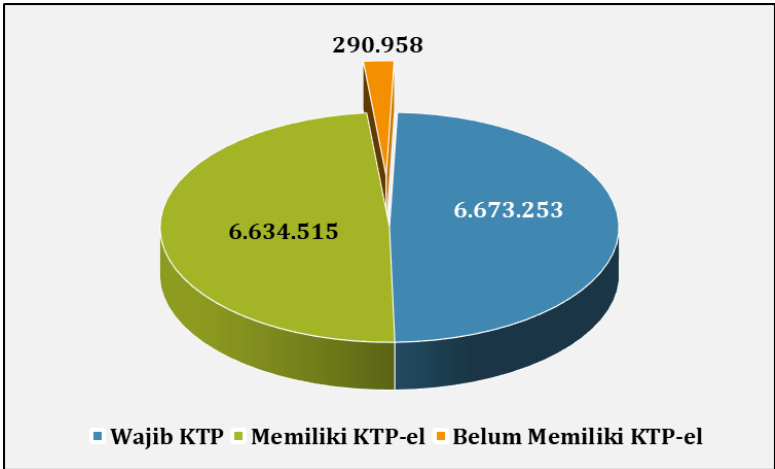
Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
(KeHaTi)						
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	66,91	73,33	72,83	82,32	54,48
Cakupan limbah yang dikelola	%	0	57	69	16,79	98,64
Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	12	40	60	20	29,6
Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	Belum dilakukan pengukuran	13,8	27,7	29,16	73,61
Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	97,4	0	0	64,29	87
Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang diberikan	Penghargaan	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	111
Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.6. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas resmi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagai bukti diri bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah senantiasa memberi dukungan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el serta mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 6.673.253 jiwa dari total 9.300.745 jiwa penduduk. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 6.634.515 jiwa atau sebesar 99,42 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 3,1 persen. Sehingga jumlah penduduk wajib KTP di Sulawesi Selatan yang belum memiliki KTP-el sejumlah 290.958 jiwa. Pencapaian ini didukung melalui sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait kepemilikan KTP-el yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

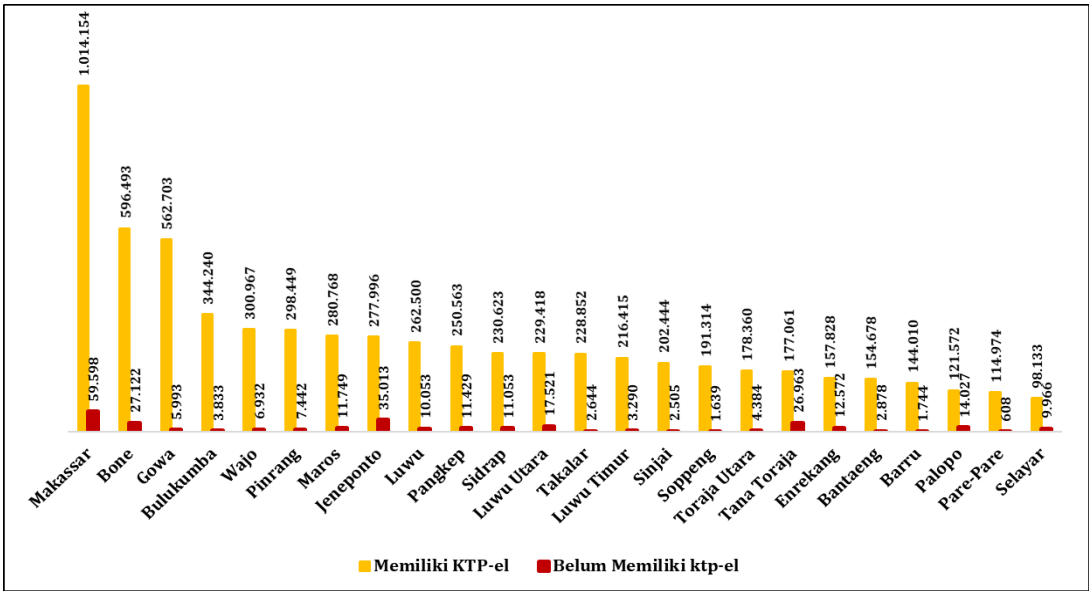
Diagram II.7.
Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

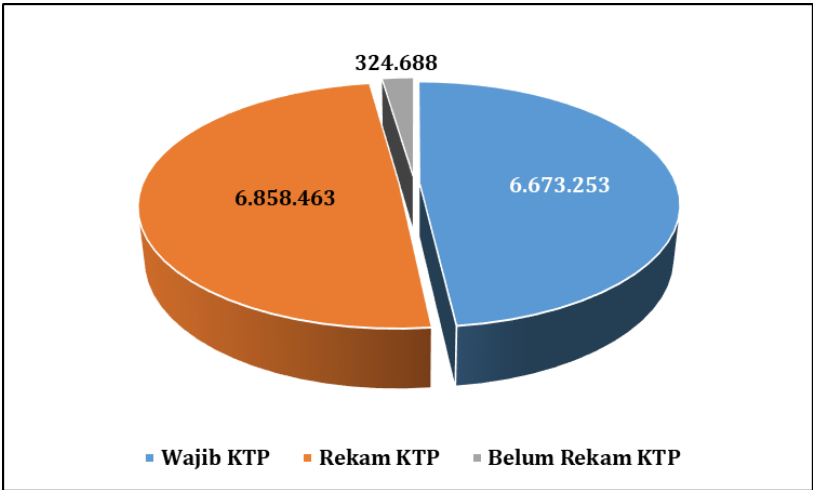
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan Identitas Wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagaimana telah dijelaskan pada Nomor 1 (satu) diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai Instansi yang menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan di daerah wajib memberikan pelayanan tersebut. Capaian tertinggi penduduk yang memiliki KTP-el di Kota Pare-Pare dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 114.974 jiwa, sedangkan yang belum memiliki KTP-el sebesar 608 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 17.061 jiwa sedangkan yang belum memiliki KTP-el sebesar 26.963 jiwa. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 84.
Penduduk Ber-KTP Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Diagram II.8
Penerbitan KTP-el
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

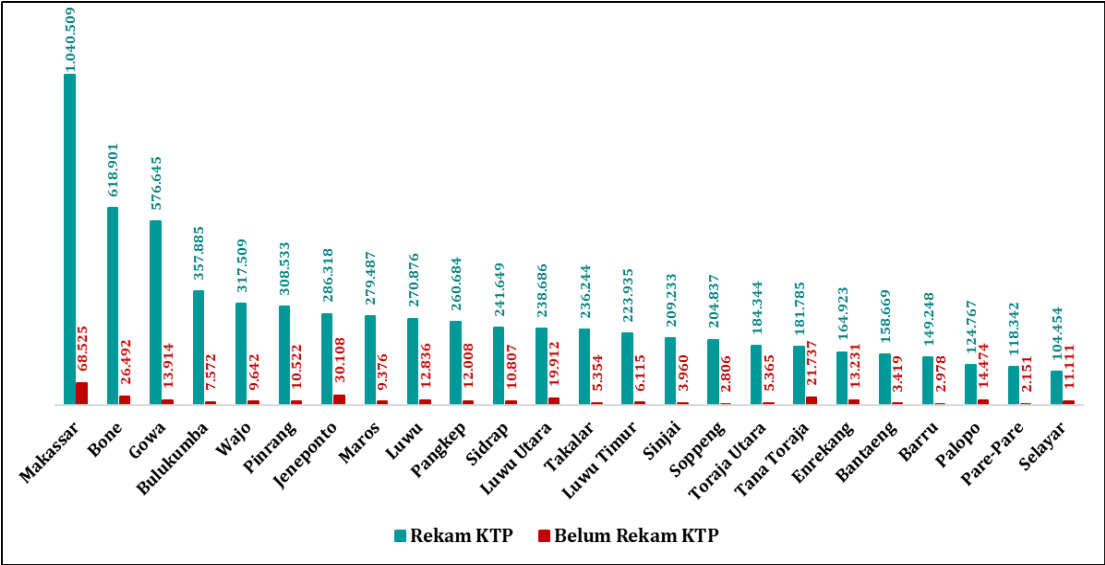


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Perekaman KTP-el merupakan kegiatan perekaman Sidik Jari, Scan Retina Mata, Tanda Tangan serta Data Pribadi yang dilakukan oleh Penduduk Wajib KTP-el ataupun belum menjadi wajib KTP-el. Perekaman ini dimaksudkan untuk mencegah KTP-el ganda atau KTP-el yang dipalsukan sehingga menciptakan keakuratan data yang nantinya akan mendukung program pembangunan pemerintah. Data Demographic yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar dalam menetapkan hasil Perekaman KTP-el setiap bulannya. Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6.673.253 jiwa yang ditargetkan dari total jumlah penduduk 9.300.745 jiwa dan yang telah telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 6.858.463 atau 102,78 persen mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen dari capaian tahun sebelumnya.

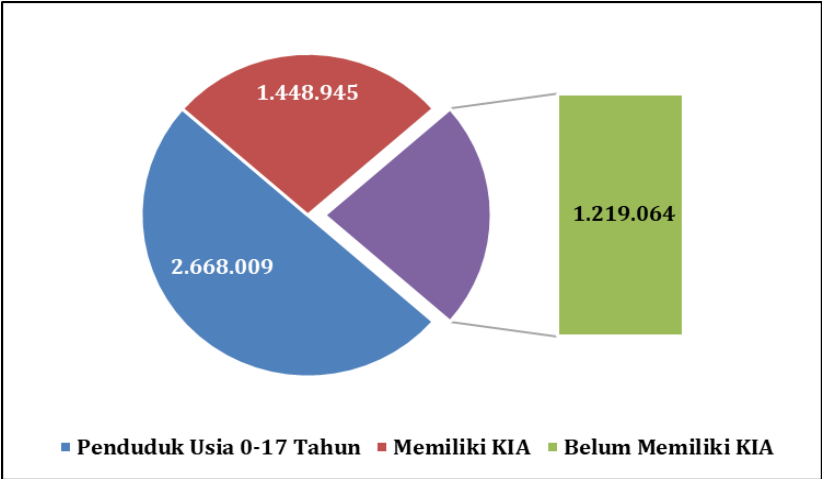
Capaian tertinggi penduduk yang melakukan rekam KTP-el di Kabupaten Soppeng dengan jumlah penduduk yang telah melakukan rekam KTP-el sejumlah 204.837 jiwa, sedangkan yang belum melakukan rekam KTP-el sebesar 2.806 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kota Palopo dengan jumlah penduduk yang telah melakukan rekam KTP-el sejumlah 124.767 jiwa sedangkan yang belum melakukan rekam KTP-el sebesar 14.747 jiwa.

Grafik II. 85.
Penerbitan KTP-el Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Diagram II.9.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

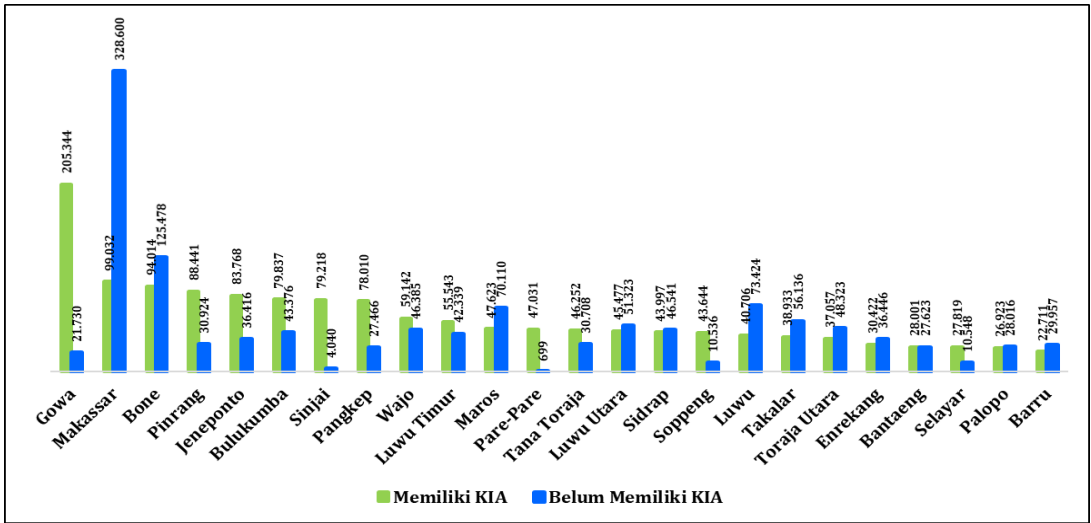


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan Kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk anak berusia kurang dari 17 Tahun dan atau belum menikah. Pada dasarnya fungsi KIA ini sama dengan KTP-el dan KIA terbagi 2 (dua) yaitu KIA untuk anak 0-5 tahun dan KIA untuk anak 5-17 Tahun kurang 1 hari, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Berdasarkan Permendagri tersebut kegunaan dari KIA antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pendataan warga negara sebagai perlindungan dan pelayanan publik dan sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya terhadap anak-anak. Pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebanyak 1.448.945 jiwa telah memiliki KIA dari 2.668.009 jiwa penduduk usia 0-17 Tahun dengan persentase kepemilikan KIA sebesar 54,29 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 35,25 persen.

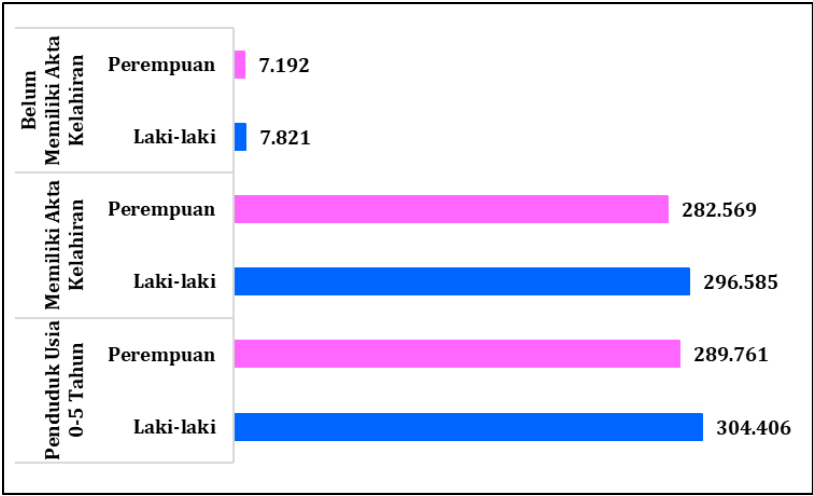
Capaian kepemilikan kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2022 tertinggi di Kota Pare-Pare sebesar 78,87 persen dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA sejumlah 47.031 jiwa dan yang belum memiliki KIA sejumlah 699 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Takalar sebesar 24,74 persen dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA sejumlah 38.933 jiwa dan yang belum memiliki KIA sejumlah 56.136 jiwa.

Grafik II. 86.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Grafik II. 87.
Bayi Berakta Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

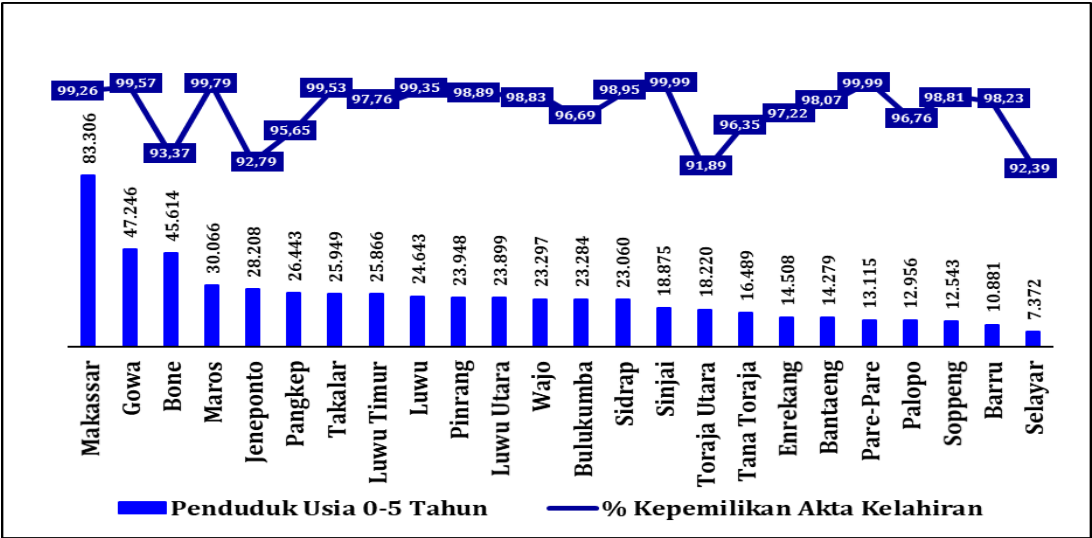


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran

dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir.

Grafik II. 88.
Bayi Ber Akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



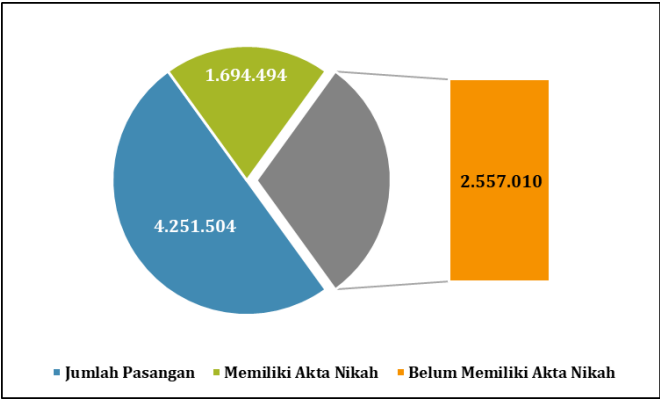
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Bayi berakte kelahiran adalah penduduk yang berusia 0-5 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2022 jumlah bayi (penduduk 0-5 Tahun) di Sulawesi Selatan berjumlah 594.167 jiwa dan yang telah memiliki akte kelahiran sejumlah 579.154 jiwa atau 97,47 persen sehingga bayi yang belum memiliki akte kelahiran sejumlah 15.013 jiwa. Capaian tertinggi kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-5 tahun di Kabupaten Sinjai dan Pare-Pare sebesar 99,99 persen. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Toraja Utara sebesar 91,89 persen dengan jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran sejumlah 16.759 jiwa dari total 18.220 jiwa penduduk usia 0-5 tahun. Sehingga masih terdapat 1.461 jiwa penduduk usia 0-5 tahun yang belum memiliki akte kelahiran.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/akte perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya

terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK). Pada tahun 2022 ini jumlah penduduk atau pasangan telah menikah sebanyak 4.251.504 jiwa dan pasangan nikah yang beragama diluar agama Islam yang memiliki buku nikah dan atau nikah siri sebanyak 1.694.494 jiwa dengan persentase sebesar 39,86 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

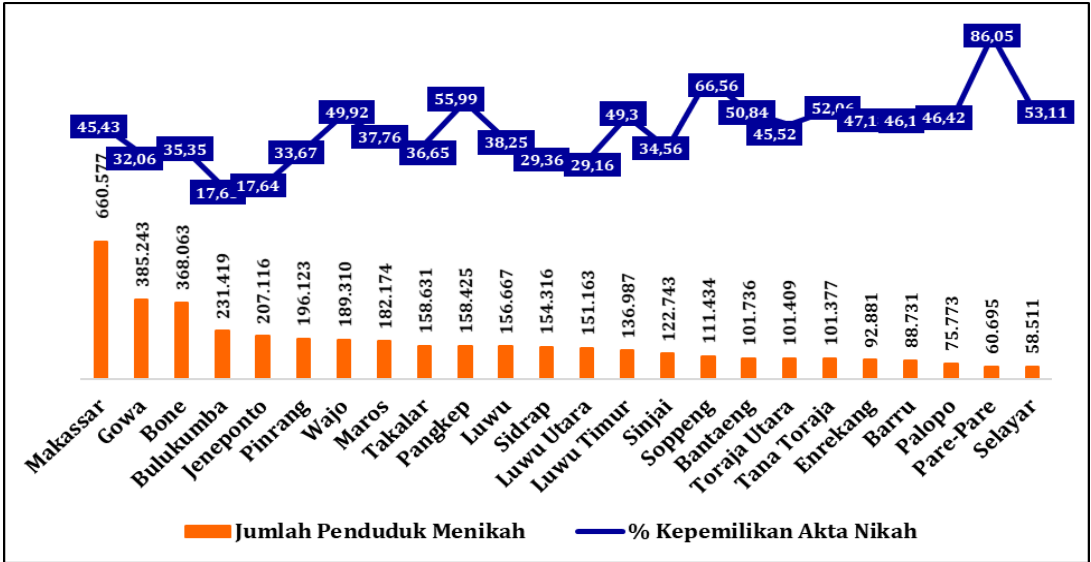
Diagram II.10.
Pasangan Ber Akte Nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian tertinggi pasangan yang memiliki akta nikah di Kota Pare-Pare sebesar 86,05 persen dengan jumlah 52.228 jiwa dari total 60.695 jiwa yang telah menikah. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Bulukumba sebesar 17,63 persen dengan jumlah 40.790 jiwa dari total 231.419 jiwa yang telah menikah. Sehingga masih terdapat 190.629 jiwa yang belum memiliki akta nikah di Kabupaten Bulukumba. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 89.
Pasangan Ber Akte Nikah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

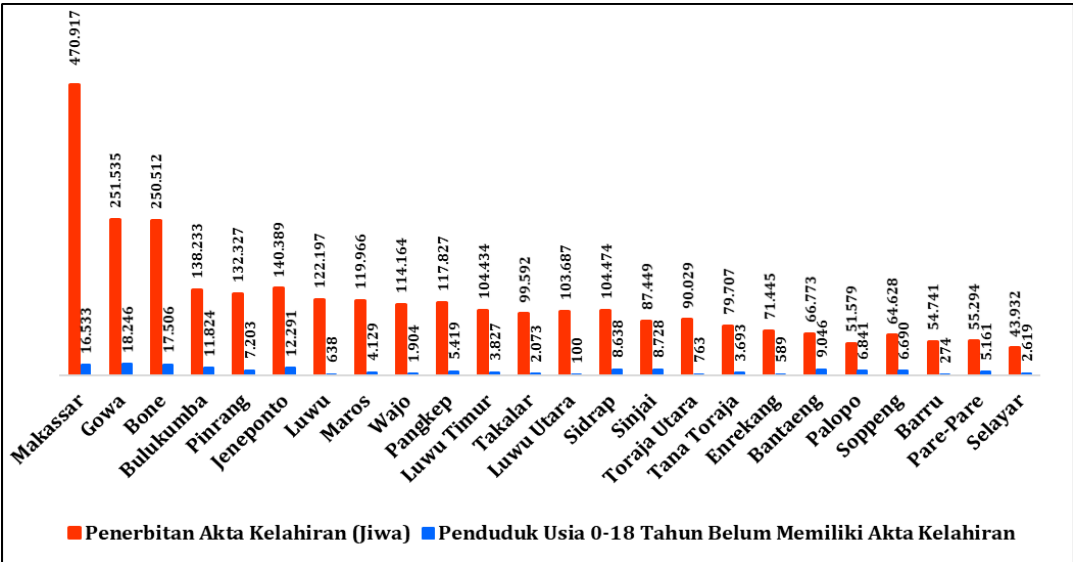


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan

sipil. Terkait dengan penerbitan akta kelahiran ini merupakan seluruh penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran. Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untuk menentukan persentase penerbitan akta kelahiran. Capaian persentase penerbitan akta kelahiran tahun 2022 sebesar 104,39 persen.

Grafik II. 90.
Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

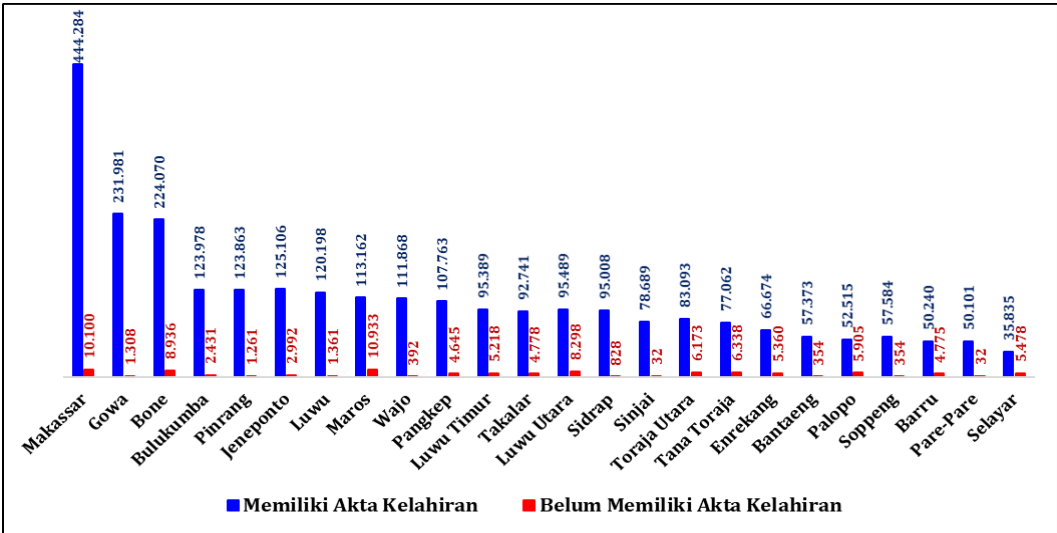


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan DKB Semester II tahun 2022 target jumlah penduduk yang berusia 0-18 tahun di Sulawesi Selatan berjumlah 2.812.348 jiwa dan yang telah diterbitkan akta kelahirannya mencapai 2.935.831 jiwa. Capaian tertinggi di Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang diterbitkan akta kelahirannya sejumlah 66.773 jiwa dari target 57.727 jiwa penduduk usia 0-18 tahun. Sedangkan capaian terendah di Kota Palopo sebesar 88,29 persen atau sejumlah 51.576 jiwa penduduk usia 0-18 tahun yang diterbitkan akta kelahirannya dari target 58.420 jiwa penduduk usia 0-18 tahun.

Capaian indikator persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran tahun 2022 mencapai 96,51 persen. Berdasarkan DKB Semester II tahun 2021 jumlah penduduk yang berusia 0-17 Tahun di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 2.812.348 jiwa dan yang telah memiliki akte kelahiran mencapai 2.714.066 jiwa dengan persentase sebesar 96,51 persen. Capaian tertinggi penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Sinjai dengan capaian 99,96 persen atau sejumlah 78.689 jiwa yang memiliki akta kelahiran daan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 32 jiwa. Sedangkan capaian terendah penduduk usia 0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran sejumlah 35.835 jiwa dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 5.478 jiwa. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

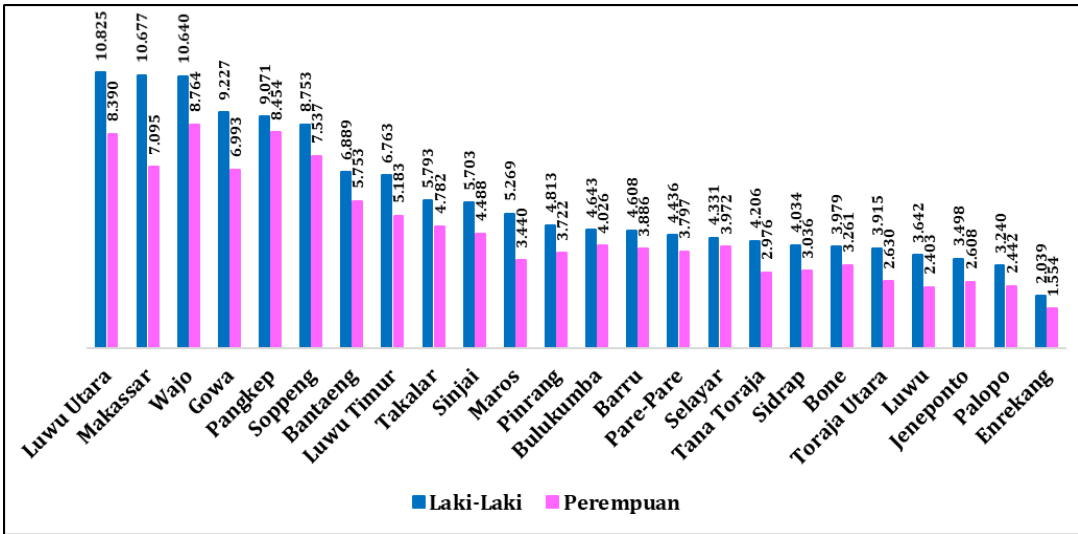
Grafik II. 91.
Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Akta Kematian merupakan Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan atas meninggalnya seseorang. Akta kematian memberikan memberikan manfaat bagi Ahli Waris diantaranya Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi, Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak, Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya dan persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan, Pensiun. Masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menganggap tidak pentingnya akta kematian sehingga untuk perhitungan persentase akta kematian ini yaitu jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang melaporkan kematian keluarganya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dikalikan 100 persen.

Grafik II. 92.
Akta Kematian yang Diterbitkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan laporan keluarga penduduk yang meninggal ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022 jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan sejumlah 252.186 dokumen dengan rincian jumlah laki-laki sebesar 140.994 dokumen dan jumlah perempuan sebesar 111.192 dokumen dengan jumlah akta kematian yang diterbitkan tertinggi di Kabupaten Wajo sebesar 19.404 dokumen dan yang terendah di Kabupaten Enrekang sejumlah 3.593 dokumen.

Pemanfaatan data kependudukan adalah pemanfaatan data dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui system informasi administrasi kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh menteri dalam negeri. Dalam impelementasi pemberian hak akses, menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan akses kedalam basis data melalui Data Warehouse (DWH) yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan melalui jaringan komunikasi data. Dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan telah diatur terkait tatacara dan kewenangan pemberian hak akses data kependudukan yang mana kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas atau Lembaga Pengguna skala provinsi atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pusat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan.

Tabel II.82.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

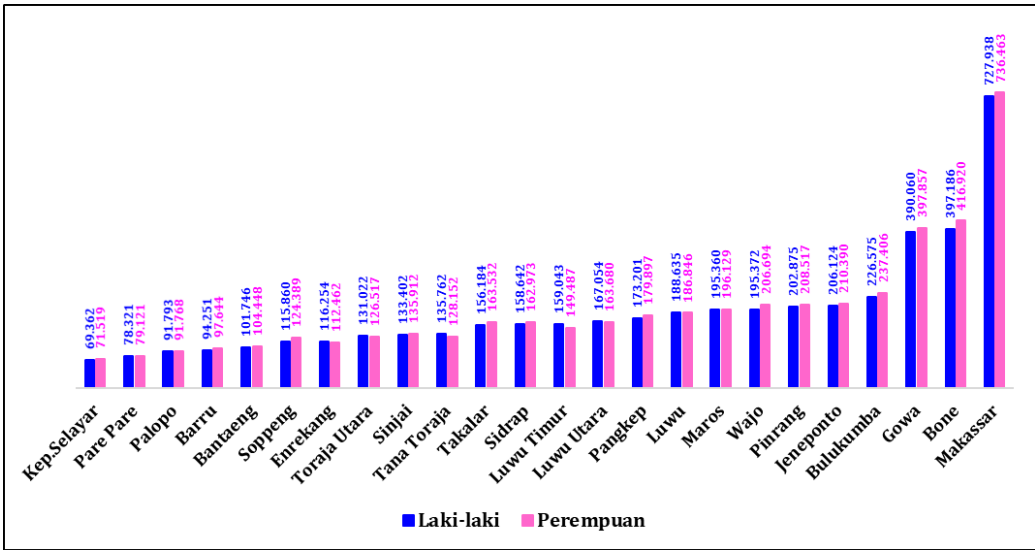
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bantaeng	200.457	201.115	201.688	201.960	206.194
2	Barru	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Bone	869.301	809.441	812.719	813.211	814.106
4	Bulukumba	437.209	439.292	441.010	448.218	463.981
5	Enrekang	236.312	226.776	227.825	228.087	228.716
6	Gowa	755.235	759.872	763.387	768.868	787.917
7	Jeneponto	412.570	413.769	415.174	415.462	416.514
8	Kepulauan Selayar	138.420	139.470	140.077	140.322	140.881
9	Luwu	378.987	370.675	372.609	372.876	375.481
10	Luwu Timur	299.975	300.374	302.039	304.938	308.530
11	Luwu Utara	368.801	327.994	329.590	329.934	330.734
12	Maros	383.921	386.408	388.330	388.738	391.489
13	Pangkajene Kepulauan	362.364	350.208	351.877	352.229	353.098
14	Pinrang	401.858	405.671	407.236	408.109	411.392
15	Sidenreng Rappang	316.951	319.285	320.537	320.761	321.615
16	Sinjai	259.385	261.220	263.141	266.479	269.314
17	Soppeng	236.156	237.115	239.391	237.875	240.249
18	Takalar	290.450	293.732	301.765	311.949	319.716
19	Tana Toraja	285.687	287.245	288.202	270.597	263.914
20	Toraja Utara	245.490	247.157	252.200	255.140	257.539
21	Wajo	372.512	374.888	378.024	392.437	402.066
22	Makassar	1.659.777	1.480.480	1.487.256	1.463.089	1.464.401
23	Palopo	187.236	181.949	182.827	183.056	183.561
24	Pare-Pare	147.322	148.634	151.763	154.524	157.442

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Sulawesi Selatan	9.426.885	9.145.143	9.206.059	9.218.736	9.300.745

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan pada tahun 2021 dengan jumlah 70 responden diperoleh nilai IKM sebesar 83,37 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan kategori BAIK.

Grafik II. 93.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Profil Kependudukan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No.65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, merupakan suatu upaya pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil dari pengelolaan informasi administrasi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Kependudukan diterbitkan berdasarkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah ditunggalkan dan dibersihkan oleh kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui penyajian profil kependudukan pemerintah berharap informasi terkait data kependudukan dapat diakses dan digunakan oleh semua pihak khususnya untuk mendukung perencanaan dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik di provinsi Sulawesi Selatan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.83.
Capaian Kineja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	87	94	94	96,43	99,42
Persentase penerbitan KTP	%	87	94	94	96,43	99,42
Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	92,32	97,90	99,80	102,18	102,78
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	16,47	40,14	54,29
Persentase Bayi ber akte kelahiran	%	87	92	94	96,89	97,47
Persentase Pasangan ber akte nikah	%	14	29	32	39,52	39,86
Persentase penerbitan akta kelahiran	%	38	43	46	49,52	104,39
Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	Belum dilakukan pengukuran	84,51	89,27	93,99	96,51
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum dilakukan pengukuran	43,35	46,54	49,52	51,02
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100	100	100	100
Persentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian persentase cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2021 sebesar 98,89 persen atau 2.230 desa dari 2.255 jumlah total desa. Faktor pendorong pencapaian target karena adanya dukungan dan sinergitas pemerintah baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten. Ketersediaan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja aparat desa dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2022 dilaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

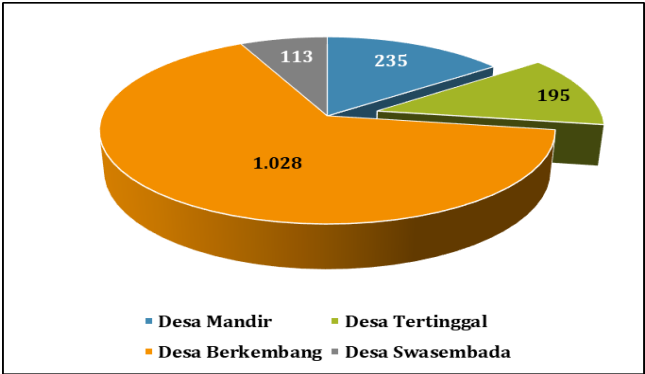
Capaian persentase desa yang menjalin Kerjasama untuk tahun 2021 melampaui target dengan capaian 0,62 persen atau 14 kerjasama desa dan 47 kawasan perdesaan. Pada tahun 2022 melalui program peningkatan kerjasama Desa persentase desa yang menjalin kerjasama mengalami peningkatan dengan jumlah 98 Kerjasama Desa dan 50 Kawasan Perdesaan atau 4,3 persen.

Capaian persentase BUM Desa yang difasilitasi tahun 2021 sebesar 5,90 persen atau 90 BUMDes yang difasilitasi dari total 1.524 BUMDes. Tahun 2022 sejumlah 48 BUMDes yang difasilitasi atau 3,14 persen dengan jumlah BUMDes

yang difasilitasi tertinggi di Kabupaten Bone sejumlah 4 BUMDes. Tahun 2021 capaian persentase desa yang difasilitasi sebesar 34,1 persen atau 769 desa yang difasilitasi dari 2.255 total jumlah desa. Pada tahun 2022 sejumlah 1.135 aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya melalui bimtek pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan dan *capacity building* pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa. Capaian persentase desa yang difasilitasi mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 47,5 persen dengan capaian 50,33 persen. Capaian persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya dalam hal ini adalah Kelompok Binaan LPM pada tahun 2021 sebesar 1,51 persen atau 46 kelompok dari 3,038 kelompok binaan LPM. Fasilitasi kelembagaan masyarakat dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) dan lembaga adat dengan capaian tahun 2022 sejumlah 44 Kelompok Binaan atau dengan capaian 1,44 persen.

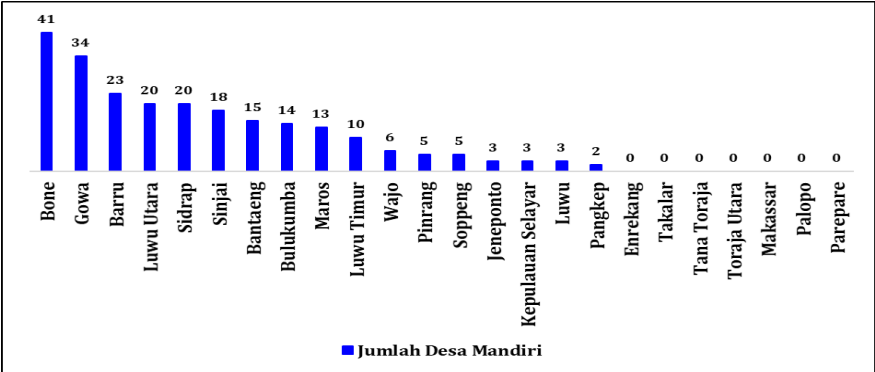
Capaian persentase peningkatan status desa mandiri untuk tahun 2021 sebesar 4,96 persen atau 112 desa mandiri dari total 2.255 jumlah desa. Sedangkan tahun 2022 jumlah desa mandiri mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 123 desa dengan capaian 235 desa mandiri. Capaian status desa mandiri tertinggi di Kabupaten Bone dengan peningkatan jumlah desa mandiri sebesar 23 desa.

Diagram II.11.
Jumlah Desa Berdasarkan Status Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

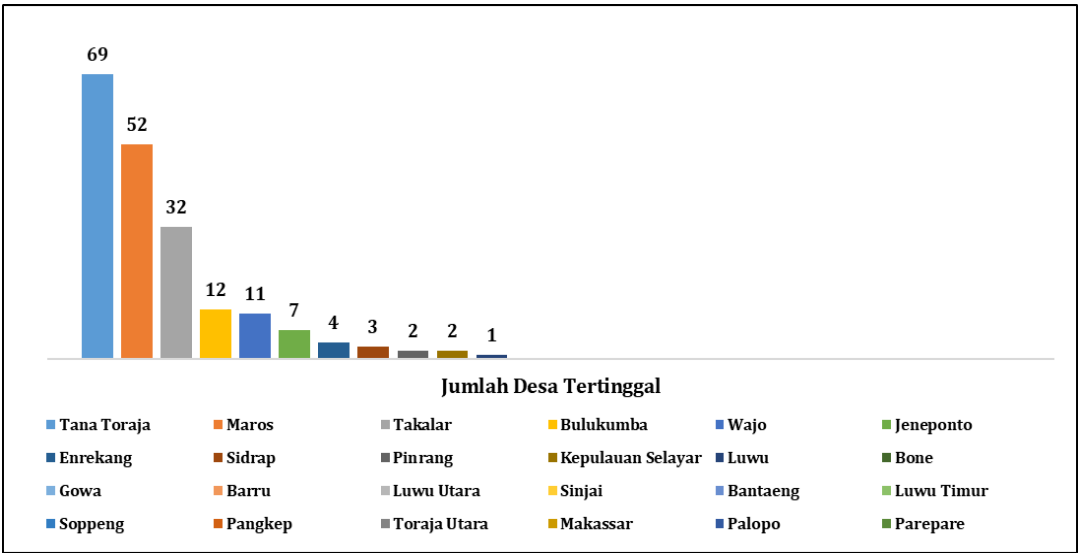
Grafik II. 94.
Jumlah Desa Status “Desa Mandiri” Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Capaian target persentase pengentasan desa tertinggal pada tahun 2021 melampaui target dengan capaian 11,88 persen dimana target pada tahun 2021 sejumlah 450 desa tertinggal dari 2.255 desa sementara jumlah desa tertinggal pada tahun 2021 sejumlah 268 desa. Pada tahun 2022 dilaksanakan program penataan desa dalam rangka pengentasan desa tertinggal, dimana jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 73 desa dari tahun 2021 dengan jumlah desa tertinggal sejumlah 195 desa. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

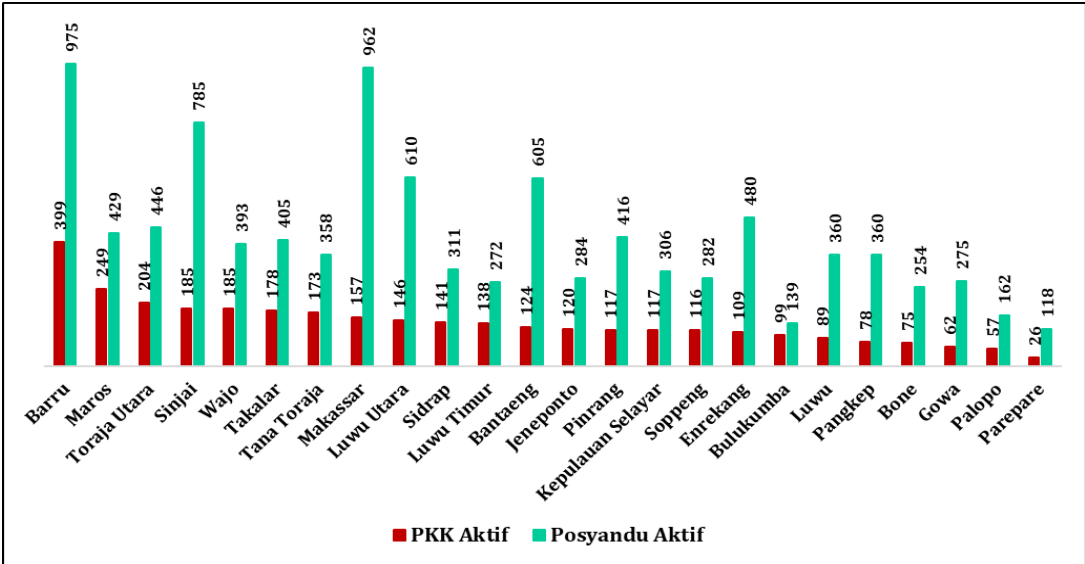
Grafik II. 95.
Jumlah Desa Status “Desa Tertinggal” Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Sejumlah 3.344 PKK merupakan PKK aktif hingga tahun 2022 serta jumlah posyandu aktif sebesar 10.007 dari total 10.310 unit posyandu atau dengan capaian 97,06 persen. Keaktifan posyandu didukung dengan alokasi pendanaan dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Grafik II. 96.
Jumlah PKK dan Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.84.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	4,08	17,38	17,38	98,89	99,42
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	4,96	5,45
Persentase pengentasan desa tertinggal	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	11,88	48,75
Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	0,62	4,3
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu Aktif	%	99,89	99,89	99,89	97,06	97,06
Persentase BUM Desa yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	5,9	3,14
Persentase Desa yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	34,1	50,33
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	1,51	1,44

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

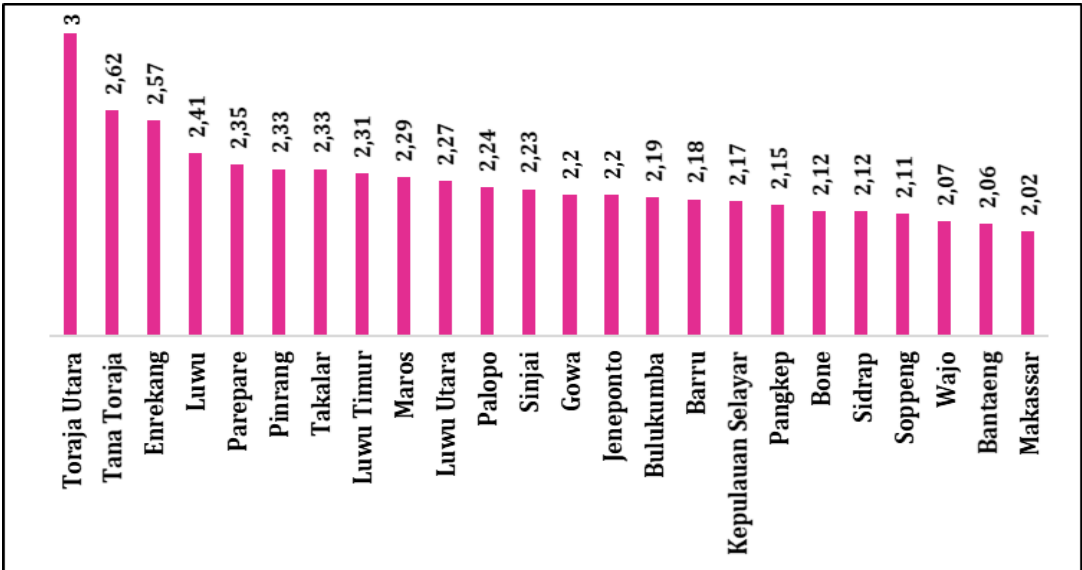
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari lima daerah penyangga nasional untuk pencapaian target TFR pada tahun 2020. Untuk pencapaian TFR tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,17 poin dengan capaian 2,26 namun belum mencapai target TFR Nasional tahun 2022 sebesar 2,21. Untuk menurunkan TFR Sulawesi Selatan, maka Dinas PPPA Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk lebih optimal melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas. Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk menyusun GDPK dalam rangka sinkronisasi kebijakan kependudukan di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penurunan TFR sesuai target nasional.

Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause. Kegiatan pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi telah dilaksanakan di piloting kampung KB Desa/Kelurahan yang telah disepakati oleh Kepala Daerah

masing-masing kabupaten/kota. Pembinaan dilakukan kepada Kepala Desa beserta perwakilan aparatnya, penyuluh KB, petugas lapangan KB, kader kespro yang berasal dari bidan desa, kader PKK, kader tribina BKB, BKR, BKL dan UPPKS. Pada tahun 2022 pembinaan promosi dan konseling kespro dilaksanakan di 4 kabupaten/kota yaitu: a) Kampung KB Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang; b) Kampung KB Paggae Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Tmur, Kabupaten Bone; c) Kampung KB Desa Kaloling, Kecamatan Gantarengkeke, Kabupaten Bantaeng; d) Kampung KB Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Grafik II. 97.
Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks IBangga di Sulawesi Selatan diterapkan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 53,92 persen. Capaian IBangga tahun 2022 sebesar 55,6 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.85.
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	Capaian		
		2020	2021	2022
Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per wanita	2,78	2,43	2,26
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	25,6	34,16	28,6
Indeks Pembangunan	Indeks (Skala	48,13	53,92	55,6

Indikator	Satuan	Capaian		
		2020	2021	2022
Keluarga (IBangga)	0-100)			
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persen	50,71	52,26	55,76
Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	18,9	20	18,1

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Hasil Fasilitasi RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), unit peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan mengundang Pembina/Pengelola/ Kader/Calon Fasilitator Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS kabupaten/kota percontohan dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Gowa. Kegiatan lainnya yaitu Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK, dengan sasaran pembina/pengelola/kader pendamping keluarga dalam penyiapan pengasuhan 1000 HPK kabupaten/kota dengan jumlah peserta 24 orang dari Kabupaten Bantaeng, Bone, Pinrang, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.86.
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	20,83	20,83
Persentase PUS peserta KB Aktif	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	71,86	70,02	61,23
Persentase kab/kota yang meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	48,13	53,92	89,05

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

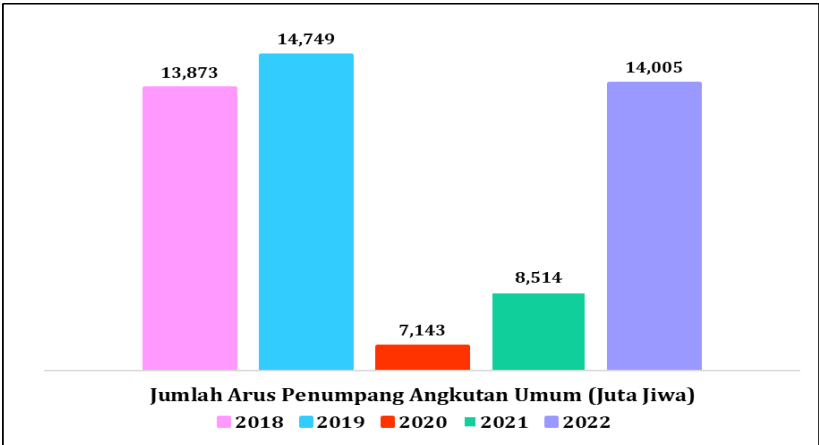
2.3.2.9. Perhubungan

Program Buy The Service (BTS) Teman Bus yang merupakan program *pull strategy* pemerintah Pusat sejak akhir tahun 2021 untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum, memberikan kenyamanan

bertransportasi serta memperluas jaringan ke berbagai tujuan di wilayah Mamminasata. Program ini berupa pembelian layanan operator swasta oleh Kementerian Perhubungan agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum untuk berbagai tujuan. Program ini mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pengguna transportasi perkotaan. Capaian persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian 72 persen saat program BTS ini dikenalkan.

Capaian persentase layanan angkutan darat tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 97 persen. Jumlah angkutan umum darat (termasuk penyeberangan) tidak mampu menampung jumlah penumpang, khususnya pada musim mudik seperti saat hari raya. Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan pertumbuhan arus penumpang tertinggi pada tahun 2022 selama priode 2018 hingga 2020 dengan capaian sebesar 14 juta jiwa. Peningkatan ini dikarenakan terlayannya 17 trayek AKDP yang menghubungkan wilayah di Sulawesi Selatan, semakin membaiknya kondisi pandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat setelah dilonggarkannya persyaratan perjalanan dengan menggunakan angkutan darat serta perbaikan layanan angkutan umum terutama angkutan perkotaan. Arus penumpang diproyeksikan akan terus meningkat mengingat semakin terkendalinya kondisi pandemi, membaiknya perekonomian, tingginya mobilitas masyarakat dan upaya pemerintah untuk memperbaiki layanan pengguna jasa perhubungan.

Grafik II. 98.
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

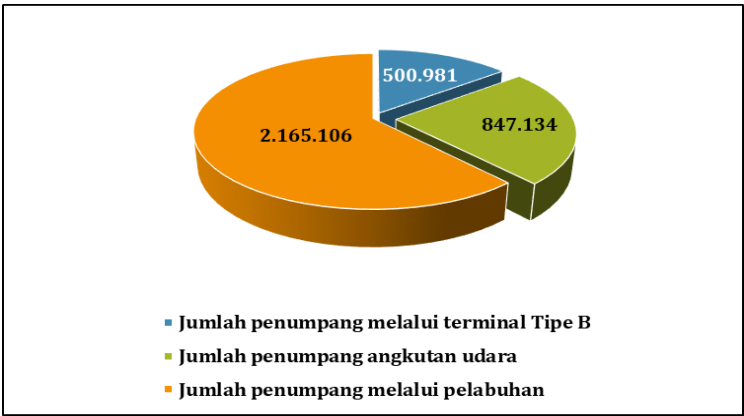


Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Peningkatan arus penumpang angkutan darat mengalami berbagai kendala diantaranya kurangnya pengawasan terhadap angkutan umum berplat hitam, merebaknya terminal liar dan penurunan fungsi terminal angkutan darat. Fungsi terminal sebagaimana disebutkan dalam Permenhub No 132 Tahun 2015 bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran parkir, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket) serta

fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi atau kendaraan penumpang. Namun demikian fasilitas penunjang terminal tersebut belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun dengan kondisi tersebut jumlah penumpang melalui terminal Tipe B pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,3 persen dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 500.981 orang.

Diagram II.12.
Jumlah Penumpang Angkutan Laut, Udara, dan Darat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemeliharaan prasarana keselamatan jalan secara berkala adalah hal yang sangat penting untuk memastikan prasarana tersebut berfungsi secara optimal. Berdasarkan peraturan menteri perhubungan No 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas pasal 68 (2) menyebutkan bahwa umur teknis rambu lalu lintas paling lama 5 tahun, namun umur teknis dapat berkurang karena beberapa faktor seperti kotor, miring, rusak, atau tertutup obyek lain. Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 3,07 persen. Cakupan fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik tersebut mendukung penurunan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 sejumlah 2.550 kejadian kecelakaan. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sejumlah 6.762 kejadian. Jumlah pengadaan rambu dan fasilitas keselamatan lainnya pada tahun 2022 terdiri dari Deliniator/Patok Tikungan Pipa Plastik sejumlah 295 buah di Kabupaten Bone, Marka Jalan sepanjang 4.950 meter dan Rambu-rambu lalu lintas darat di kawasan Mamminasata. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada 45 ruas jalan provinsi yang merupakan implementasi atas PHJD (Program Hibah Jalan Daerah) melalui kegiatan survei lalu lintas adalah untuk mendapatkan jumlah lalu lintas harian yang mewakili jumlah lalu lintas tahunan rata-rata atau *Average Annual Daily Traffic* (AADT) untuk memetakan kepadatan lalu lintas di lokasi tersebut. Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi tahun 2018 hingga 2022 tidak mengalami perubahan sejumlah 15 ruas.

Kategori terminal yang tertuang dalam PM 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal angkutan jalan adalah Terminal tipe A, Terminal tipe B dan Terminal Tipe C. Terminal Tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Jumlah Terminal tipe B yang

terkelola belum sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan no 1755/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sulawesi Selatan; yang menetapkan 16 lokasi terminal di seluruh Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan terkendalanya penyerahan aset terminal Tipe B dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi. Terdapat 7 lokasi Terminal Tipe B yang telah diserahterimakan, sejumlah 4 unit diantaranya telah terkelola yakni Terminal Cappabungaya Kabupaten Gowa, Terminal Sasayya Kabupaten Bantaeng, Terminal Paletteang Kabupaten Pinrang dan Terminal Lawawoi Kabupaten Sidrap. Agar terminal dapat terus melaksanakan fungsinya secara optimal pada tahun 2022 dilaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal meliputi terminal Cappabungaya di Kabupaten Gowa, terminal Lawowoi di Kabupaten Sidrap, dan terminal Sasayya di Kabupaten Bantaeng.

Meskipun sempat mengalami penurunan saat pemberlakuan pembatasan mobilitas akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, namun jumlah arus penumpang melalui pelabuhan menunjukkan peningkatan di tahun 2022, bahkan melampaui arus penumpang di tahun 2017 dan 2018. Sementara itu pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dan penyeberangan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terus dioptimalkan. Terdapat 2 pelabuhan penyeberangan yang dikelola dan 9 (sembilan) pelabuhan pengumpan regional yang telah diserahkan Personil, Pembiayaan, sarana Prasarana dan Dokumen (P3D) di 2023 dan sementara berproses penandatanganan BASTnya. Kesebelas (11) pelabuhan inilah yang menjadi pelabuhan strategis di Sulawesi Selatan. Dari 11 pelabuhan strategis tersebut pada tahun 2018-2020, 10 persen di antaranya telah dikelola yaitu Pelabuhan penyeberangan Bira dan pada tahun 2021-2022 meningkat 18 persen dengan dikelolanya Pelabuhan Pattumbukan. Pada tahun 2022 dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional dilaksanakan kegiatan pembangunan ruang tunggu pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Selayar, kajian teknis alur pelayaran Bira di Kabupaten Bulukumba, dan kajian teknis alur pelayaran Pattumbukang di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyelesaian Standar Pelayanan Minimal kepelabuhanan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang penyelenggaraan pelabuhan Pengumpan. Capaian persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan 100 persen. Faktor pendorong pencapaian target terkait sarana dan prasarana perhubungan yang bersifat teknis SOP pelaksanaan pengadaan dan persyaratan teknisnya telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan serta diturunkan dalam peraturan jenderal terkait.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perhubungan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.87.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	19	10	11,5	41	72
Persentase Layanan Angkutan Darat	%	80	87	90	94	97
Jumlah penumpang melalui terminal Type B per tahun	Orang	1.001.151	829.122	580.872	499.277	500.981
Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	5,33	5,16	5,03	3,05	3,07
Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Ruas	12	15	15	15	15
Jumlah Terminal Bis terkelola (Terminal type B)	Terminal	2	4	5	7	7
Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Orang	1.768.413	1.686.838	658.933	1.355.919	2.165.106
Jumlah pelabuhan strategis provinsi (pelabuhan pengumpan regional dan penyeberangan)	Lokasi	11	11	11	11	11
Persentase pelabuhan yang beroperasi (pengumpan regional)	%	10	10	10	18	18
Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

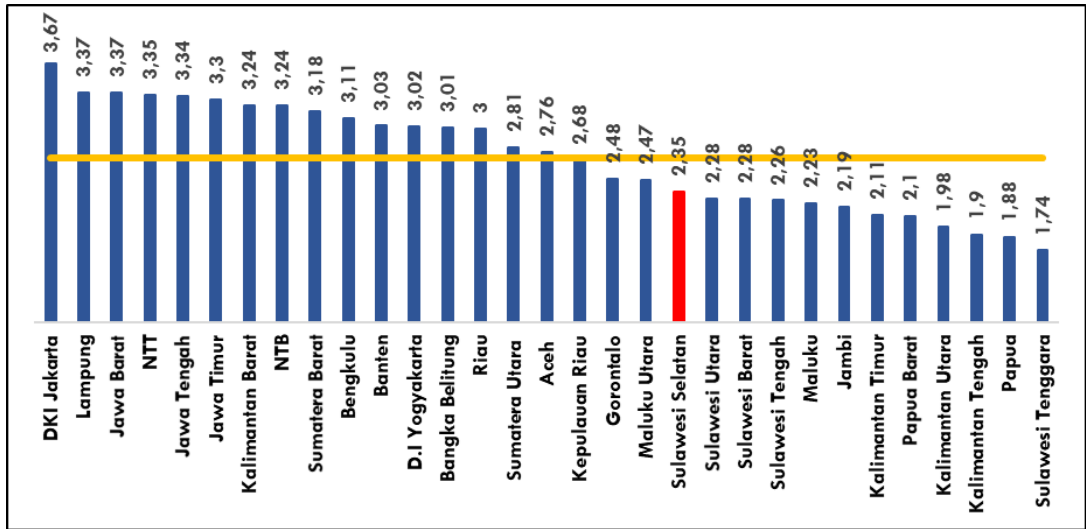
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelaksanaan PPID setiap badan publik, maka PPID utama melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan informasi public PPID pada OPD lingkup pemerintah provinsi dengan tujuan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada PPID pelaksana terkait urgensi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPID melalui kegiatan pembinaan cluster tahun 2021 yaitu dari sejumlah 53 perangkat daerah yang wajib melakukan pengelolaan pelaksanaan PPID untuk memberi pelayanan informasi kepada pemohon informasi, sejumlah 28 persen yang telah memiliki sarana secara umum dan 57 persen secara administrasi dimana 17 perangkat daerah memiliki ruangan PPID serta 30 perangkat daerah memiliki SK PPID. Pada tahun 2022 jumlah OPD yang melapor ke PPID sejumlah 55 OPD mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan tingkat pelaporan ke PPID sebesar 65 persen. Jumlah sengketa informasi yang diselesaikan pada tahun 2022 sebesar 24 sengketa. Sedangkan jumlah layanan informasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

yang terdiri dari Konten sejumlah 766, Berita (Media Cetak dan Online) sejumlah 875, Advetorial sejumlah 266.

Pada Tahun 2021 sebanyak 86 aduan dan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada OPD terkait dan dimonitoring secara berkala. Jumlah aspirasi terdiri dari jumlah aduan masyarakat pada aplikasi baruga aduan masyarkat dan aplikasi lapor spam yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Rendahnya jumlah aspirasi atau terkait pengaduan masyarakat pada SP4N LAPOR! disebabkan adanya aplikasi serupa fungsinya yang dikelola oleh pihak Kab/Kota bahkan OPD baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan masih rendahnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Pada tahun 2022 penggunaan Baruga dihentikan dan dialihkan ke SP4N LAPOR! berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat. Layanan Pengaduan Masyarakat difokuskan kepada satu jenis kanal saja yaitu SP4N LAPOR!. Sejumlah 64 laporan yang masuk ke SP4N LAPOR!, dari 64 laporan sebanyak 59 laporan berhasil ditindaklanjuti.

Grafik II. 99.
Perbandingan Nilai Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Selatan dengan
Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022



Sumber : Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023

Capaian indikator Kinerja Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 sebesar 2,05 atau kategori Cukup. Nilai SPBE dengan target sebelumnya tidak terpenuhi disebabkan oleh: a) Bertambahnya indikator penilaian SPBE sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan RB No 59 Tahun 2020; b) Provinsi Sulsel masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE; c) Provinsi Sulsel masih belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE; d) Provinsi Sulsel masih belum memiliki tata kelola yang mengatur terkait pada pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra dan penggunaan system penghubung layanan dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan. Tahun 2022 capaian Indeks SPBE mencapai 2,35 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Meskipun demikian peningkatan nilai Indeks SPBE Sulawesi Selatan masih dalam kategori Cukup sedangkan kategori nilai Indeks SPBE beberapa Provinsi di Indonesia sudah mencapai kategori Baik dan Sangat Baik.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE, dimana: 1) Arsitektur SPBE Provinsi Sulawesi Selatan rampung pada Bulan Desember 2022, sedangkan penilaian indeks SPBE pada Bulan Mei/Juni 2022; 2) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang SPBE terbit pada Bulan Desember 2022 sedangkan penilaian Indeks SPBE pada Bulan Mei/Juni 2022; 3) Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko terbit pada Bulan Juli 2022 sedangkan penilaian Indeks SPBE pada Bulan Mei/Juni 2022; 4) Peraturan Gubernur SMKI sampai saat ini masih dalam bentuk draft.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan komunikasi dan informatika tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.88.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	50	60	70	80	90
Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	%	100	100	100	100	100
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	Belum dilakukan pengukuran	2,66	3,08	2,05	2,35

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov.Sulsel, Tahun 2023

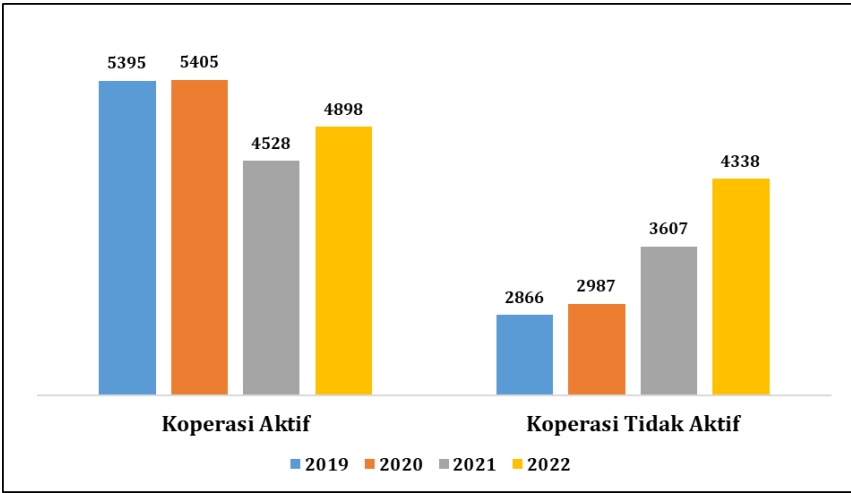
2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Untuk melindungi masyarakat pelaku usaha pada akses permodalan salah satunya adalah mendorong dan memfasilitasi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi di Sulawesi Selatan untuk lebih akuntable dengan cara fasilitasi KSP/USP Koperasi tersebut dalam legalitas usaha simpan pinjam. Merupakan kewajiban seluruh KSP/USP Koperasi memiliki izin usaha simpan pinjam tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam di berikan kepada Koperasi yang bergerak pada sektor simpan pinjam, hingga tahun 2022 terdapat 12 persen Koperasi dan UKM yang memiliki izin usaha simpan pinjam.

Hingga tahun 2022 jumlah koperasi aktif sebesar 4.898 unit mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sedangkan jumlah koperasi tidak aktif sebesar 4.338 unit juga mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sejumlah 20 persen koperasi aktif primer provinsi diberikan infomasi/sosialisasi terkait peraturan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terupdate informasi dan

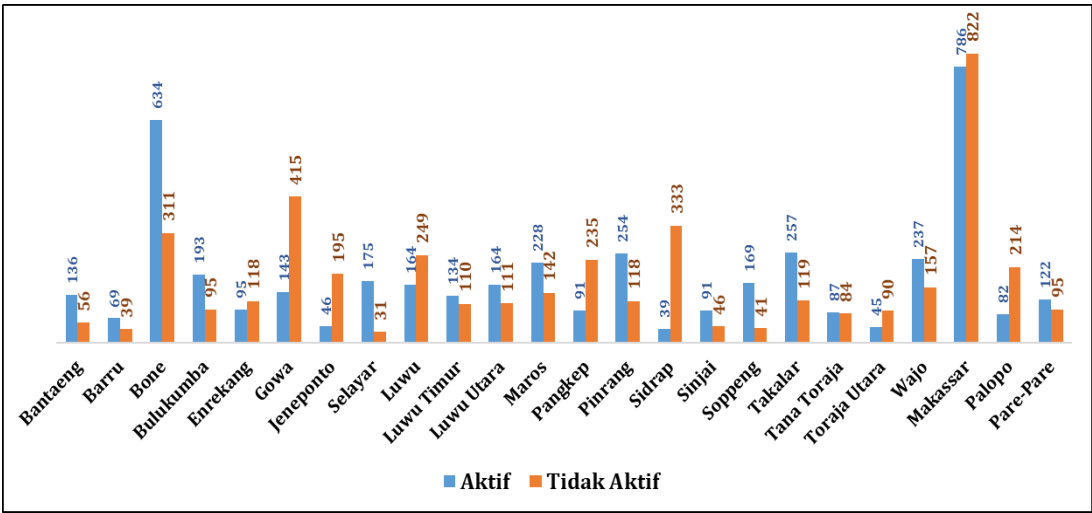
peraturan yang berlaku saat ini. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 100.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2023

Grafik II. 101.
Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

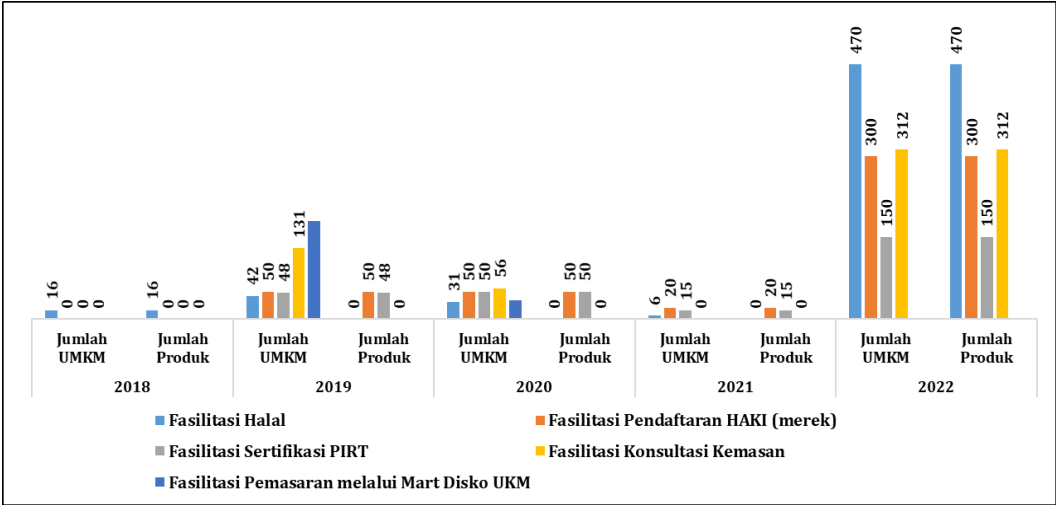


Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Sertifikat penilaian kesehatan koperasi menjadi syarat wajib pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas dilakukan minimal setahun sekali. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi setiap tahunnya dilakukan bersamaan dengan pengawasan dan pemeriksaan koperasi namun penilaian kesehatan koperasi hanya dilakukan kepada koperasi yang telah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Tahun 2022 dilakukan penilaian pada koperasi/KSP dengan ber kriteria sehat, dalam hal ini dilanjutkan dengan pemberian sertifikat koperasi ber kriteria sehat dan cukup sehat hal ini juga merupakan catatan dari tingkat keaktifan pengurus dan pembina dalam melakukan pemantauan pada kelembagaan koperasi dengan capaian persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT sebesar 20 persen atau sejumlah 244 unit KSP/USP Koperasi dengan kriteria sehat. Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan

perkoperasian bagi pengurus dan manajer koperasi, dan juga pada koperasi baru sehingga koperasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Grafik II. 102.
Jumlah UMKM yang Difasilitasi Perizinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi pemberdayaan usaha, permodalan dan sertifikasi SKKNI diberikan sehingga dapat meningkatkan kompetensi koperasi dan pengurus Koperasi. Tahun 2022 sejumlah 105.072 usaha kecil yang diberikan pelatihan dan pendidikan hal ini sesuai dengan kewenangan para pelaku usaha kecil. Sejumlah 15.411 unit usaha yang diberikan pendampingan kelembagaan usaha, UKM terstadarisasi sertifikasi usaha, dan usaha yang bermitra diberikan pada koperasi dengan kriteria usaha kecil.

Cakupan promosi produk UMKM dalam dukungan pemasaran dan promosi untuk terlibat dapat pameran promosi produk UMKM unggulan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3 persen pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Jumlah promosi produk UMKM sebesar 77.052 unit pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 38.570 unit.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.89.
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	5	9	10	39	12
Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor	%	5	9	10	36	10

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cabang Pembantu dan Kantor Kas						
Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	15	20	20	30	20
Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhan nya terhadap peraturan perundang undangan	%	5	20	20	20	20
Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	15	20	15	35	20
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	15	20	20	20	20
Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	4	7	7	31	20
Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	4	7	5	30	10
Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	1	2	4	15	10
Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha	%	4	7	5	30	11
Cakupan promosi produk UMKM	%	0,1	0,3	0,2	1,7	3

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

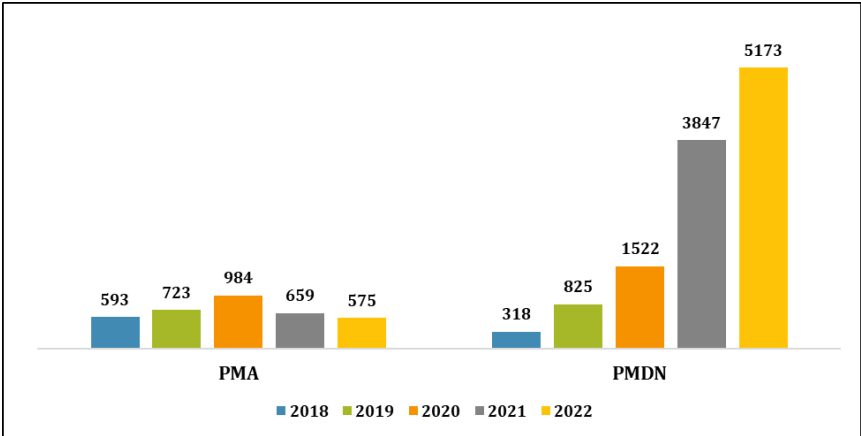
2.3.2.12. Penanaman Modal dan Investasi

Pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yakni pada tahun 2019 sebesar 40 persen, naik pada tahun berikutnya sebesar 60 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 75 persen. Rendahnya potensi investasi yang dimanfaatkan oleh calon investor pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena belum tersedianya data dan informasi yang memadai dan masih banyaknya data potensi daerah yang belum diperbaharui. Adapun kenaikan pemanfaatan potensi investasi pada tahun 2021 merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarluaskan potensi dan peluang investasi daerah serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha daerah untuk membangun kemitraan dengan investor besar. Tahun 2022 pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor mencapai 60 persen akibat adanya penyempurnaan dari pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan investasi yang lebih baik.

Capaian realisasi investasi sektor PMA yang diraih pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana tren peningkatan mulai tahun

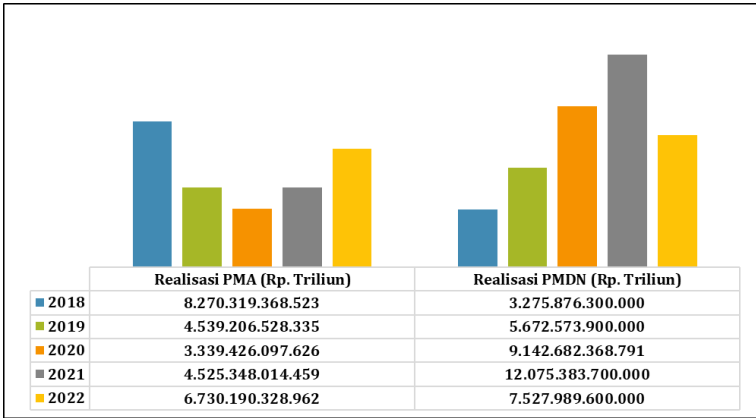
2020 hingga 2022 dengan capaian Rp. 6,73 triliun pada tahun 2022. Jumlah realisasi PMDN berdasarkan rilis dari Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 Capaian realisasi investasi sektor PMDN mengalami tren peningkatan mulai tahun 2018 hingga 2021 dengan rata-rata peningkatan sebesar 55,47 persen. Tahun 2022 jumlah realisasi PMDN mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -37,6 persen dengan capaian 7,53 triliun.

Grafik II. 103.
Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

Grafik II. 104.
Realisasi PMA dan PMDN
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

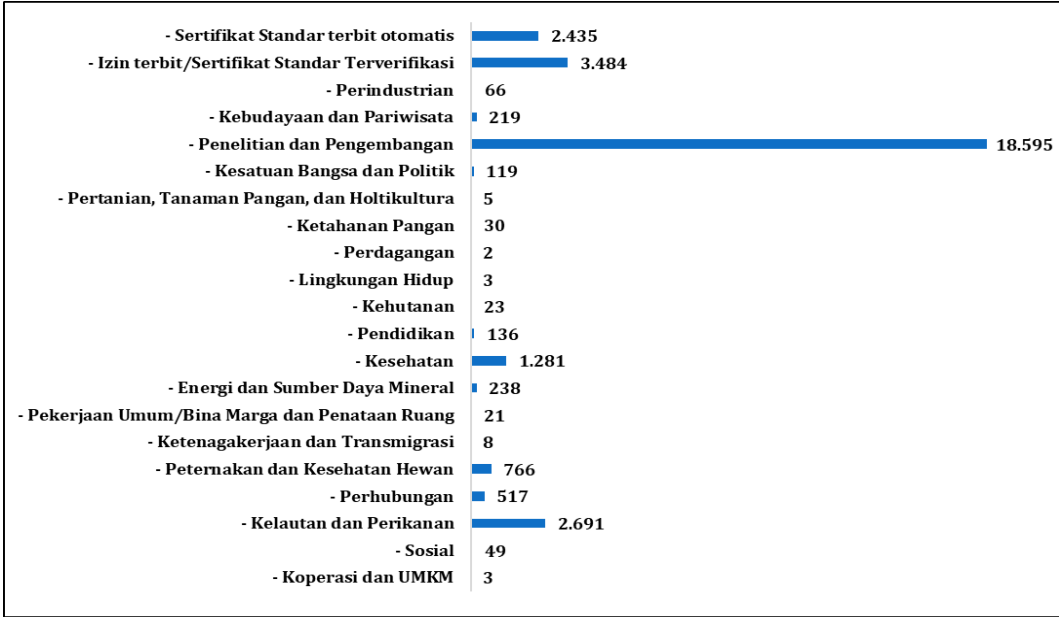


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

Capaian ketepatan waktu penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2022 persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP belum mencapai target dengan capaian 80 persen. Beberapa dokumen yang penyelesaiannya belum tepat waktu diakibatkan oleh pertimbangan teknis yang kadang terlambat dikeluarkan oleh OPD teknis, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi waktu penyelesaian dokumen perizinan. Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 139.428 izin. Pada tahun 2022 jumlah izin yang diterbitkan sebesar 30.691 izin. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk

institusi pelayanan perizinan tahun 2022 sebesar 82,81 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -0,94 persen.

Grafik II. 105.
Jumlah Perizinan yang Diterbitkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah kurang lebih sebesar 15.700 perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan tersebut persentase ketaatan perusahaan PMA dan PMDN pada peraturan penanaman modal pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan mencapai 55 persen atau 2.001 perusahaan pada tahun 2022. Masih rendahnya ketaatan perusahaan dalam hal ini mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diakibatkan oleh pemberlakuan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana salah satunya adalah perubahan pada pelaporan sistem manual menjadi pelaporan online. Hal ini belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha.

Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan mencapai 85 persen pada tahun 2022. Pencapaian ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data dan informasi pendukung penanaman modal serta meningkatnya koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten dan kota serta pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan penanaman modal dan investasi tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.90.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal dan
Investasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	%	Belum dilakukan pengukuran	40	60	75	85
Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	8,3	4,54	3,39	4,52	6,73
Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	3,27	5,67	9,14	12,07	7,52
Persentase Ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	%	Belum dilakukan pengukuran	76	78	78	80
Persentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	%	Belum dilakukan pengukuran	40	45	50	55
Persentase Ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	Belum dilakukan pengukuran	65	70	80	85

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

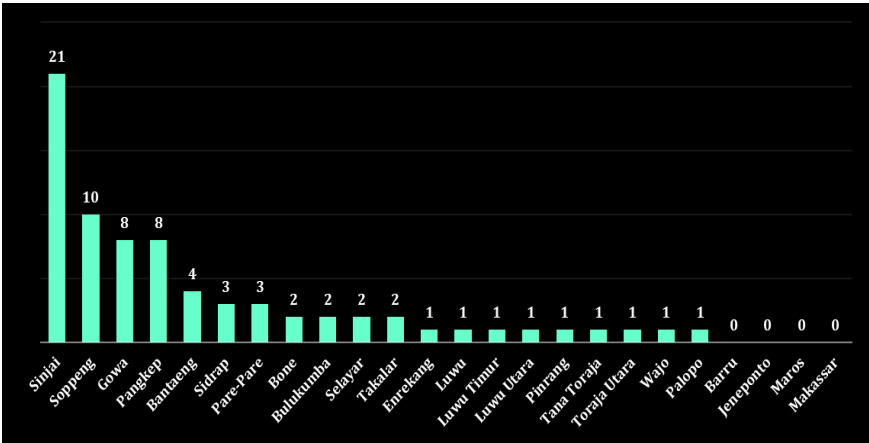
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri didukung oleh kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan capaian 0,24 persen pada tahun 2022 dimana jumlah pemuda yang berwirausaha sebanyak 5.531 orang dari sejumlah 2.284.971 pemuda di Sulawesi Selatan.

Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat ditentukan pada pembinaan pemuda saat ini. Jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial tahun 2022 sebesar 96.726 orang. Pembinaan pemuda dilakukan dengan melibatkan pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam pembangunan. Capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial didukung melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat provinsi dimana capaian tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2022 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial sebesar 3,81 persen mengalami penurunan dari tahun 2021 karena kurangnya kegiatan kepemudaan yang diinisiasi oleh organisasi pemuda secara mandiri. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Pembinaan organisasi

pramuka di Sulawesi Selatan dilakukan melalui program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Organisasi gerakan Pramuka telah terbentuk dan aktif mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Capaian indikator organisasi pramuka yang aktif sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100 persen. Jumlah organisasi pramuka aktif tahun 2022 sejumlah 25 organisasi.

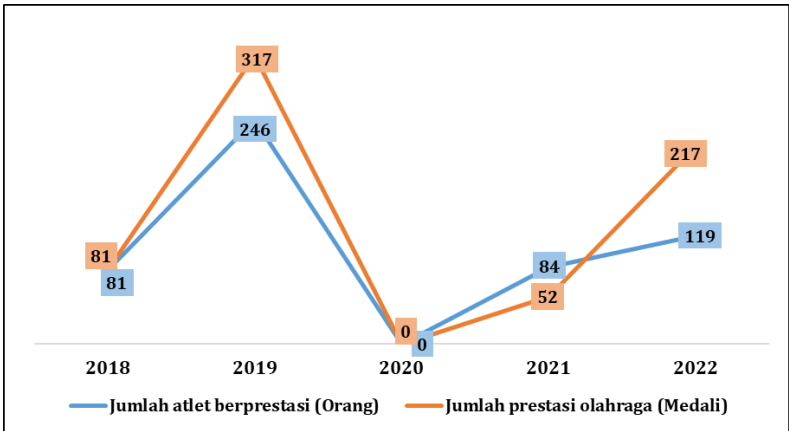
Grafik II. 106.
Jumlah Gedung Olahraga Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Ketersediaan sarana prasarana olahraga sangat penting untuk menunjang peningkatan prestasi olahraga. Penyusunan Detail Enggenering Design (DED) stadion Mattoangin dengan kapasitas 40 ribu penonton telah diselesaikan pada tahun 2021 dan diikuti dengan penyelesaian Additional Desain Kapasitas 20 ribu penonton pada tahun 2022.

Grafik II. 107.
Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pembinaan cabang olah raga prestasi pada tahun 2019 hingga 2021 menjadi bagian dari binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sebelumnya dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Perolehan medali pada tahun 2018

sebanyak 81 medali, tahun 2019 memperoleh 317 medali, perolehan ini mengalami peningkatan yang signifikan karena kegiatan Pra PON menjadi bagian dari tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kualitas pelatih dan intensitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Namun persentase peningkatan prestasi olahraga mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan tidak adanya penyelenggaraan event olahraga, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan perolehan 52 medali. Pada tahun 2022 peningkatan prestasi olahraga kembali mengalami peningkatan dengan capaian 3,17 persen atau sejumlah 217 medali diperoleh pada tahun 2022.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.91.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,07	0,16	0,21	0,21	0,24
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	1,06	1,09	2,33	4,23	3,81
Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	%	4,1	2,9	-1	-0,84	3,17
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	0	10	15	30	30
Persentase organisasi pramuka aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.14. Statistik

Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan capaian sebesar 80 persen pada tahun 2022 berdasarkan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dari total kebutuhan data. Masih ada sebagian OPD yang belum memahami cara menyusun data statistik sektoral sesuai prinsip SDI.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan statistik tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.92.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	30	35	40	50	80

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov.Sulsel, Tahun 2023

2.3.2.15. Persandian

Persentase komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian merupakan jumlah pengguna tanda tangan elektronik dari jumlah pengguna layanan jaring komunikasi sandi. Pada tahun 2022 sebanyak 32 perangkat daerah dari 46 Perangkat Daerah atau sebesar 69,57 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan didukung oleh meningkatnya kebutuhan terhadap layanan persandian yang terdiri dari layanan jaring komunikasi sandi dan pemanfaatan tanda tangan elektronik melalui aplikasi persuratan. Selain itu didukung dengan berjalannya sistem layanan keamanan informasi dan dukungan peningkatan peralatan dan kompetensi SDM pengelola keamanan siber dan SPBE serta pelatihan CSIRT. Selain itu di tahun 2022 juga bidang telah melakukan assesment terhadap sistem informasi milik pemerintah melalui kegiatan Vulnerability Assesement dan Penilaian Indeks Keamanan Informasi. Adapun kendala yang dihadapi karena masih minimnya jumlah SDM yang berkompeten dan masih minimnya peralatan dan tools/sistem yang mendukung operasional sistem monitoring keamanan jaringan dan aplikasi serta masih belum diterbitkannya regulasi terkait sistem manajemen keamanan informasi lingkup pemerintah provinsi.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan persandian tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.93.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	%	25	30	35	50	69,57

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov.Sulsel, Tahun 2023

2.3.2.16. Kebudayaan

Pada tahun 2021 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari 12 Karya Budaya yang diusulkan sejumlah 11 Karya Budaya dari 6 Kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tahun 2022 jumlah karya budaya hanya terdapat 2 karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari 7 karya budaya yang ditargetkan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda

(WBTB). Belum tercapainya target yang ditetapkan disebabkan oleh banyaknya usulan karya budaya oleh pemerintah kabupaten/kota yang dinilai belum memenuhi syarat dalam penetapan WBTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Capaian persentase lembaga sejarah yang difasilitasi pada tahun 2022 sebesar 3,89 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 serta mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa lembaga di kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah terkait dengan perlindungan sejarah/adat.

Tahun 2021 capaian indikator persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dari target 5 Cagar Budaya yang ditargetkan untuk dilestarikan mencapai 6 Cagar budaya yang dilestarikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung melalui kegiatan Pembuatan Galeri Museum La Pawawoi Karaeng Sigeri Kabupaten Bone dan Perbaikan Ringan Rumah Adat Saoraja Bilokka Kabupaten Sidrap, Perbaikan Rumah Adat Bugis, Perbaikan Rumah Adat Mandar, Pemeliharaan Museum Karaeng Pattingalloang, dan Pemeliharaan Baruga Benteng Somba Opu. Tahun 2022 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dilestarikan dari 8 cagar budaya yang ditargetkan untuk dilakukan pelestarian. Hal ini disebabkan masih banyaknya cagar budaya di kabupaten/kota yang belum ditetapkan atau menjadi cagar budaya skala/peringkat provinsi, walaupun telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 10 kali, dimana pada tahun sebelumnya tidak ada penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah lembaga sanggar kesenian pada tahun 2022 belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 468 lembaga. Capaian persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan pada tahun 2022 sebesar 7,5 persen melalui pelibatan beberapa sanggar seni pada beberapa kegiatan-kegiatan seni budaya sebagai bentuk pembinaan sanggar kesenian.

Tahun 2021 capaian indikator persentase kunjungan ke museum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke sekolah-sekolah (SD dan SMP) melalui kegiatan Museum Masuk Sekolah/Belajar Bersama di Museum, selain itu beberapa kegiatan pameran yang menarik minat masyarakat berkunjung ke museum. Tahun 2022 sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan akibat adanya pelonggaran penerbangan dalam negeri dan obyek-obyek wisata dibuka kembali serta pencabutan status PPKM, juga mempengaruhi jumlah kunjungan di museum provinsi.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kebudayaan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.94.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

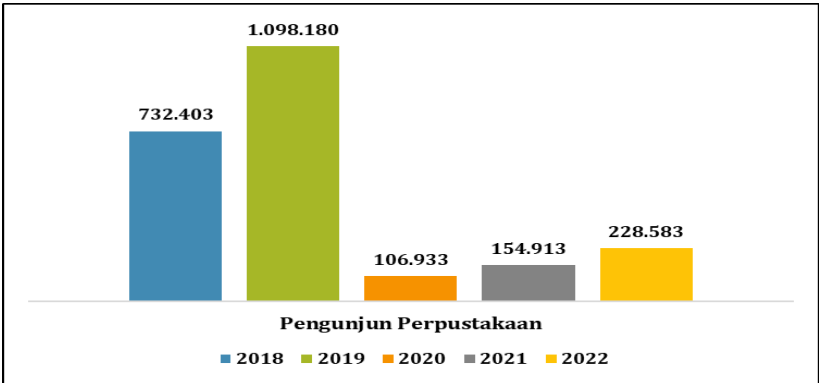
Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	1,9	0,34
Persentase Sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	7,5
Persentase Lembaga sejarah yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	2,2	3,89
Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	0,57	0,29
Persentase Kunjungan ke museum	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	615,99

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.17. Perpustakaan

Capaian Jumlah pengunjung Perpustakaan baik elektronik dan konvensional pada tahun 2021 sejumlah 154.913 yang merupakan pengunjung dengan jenis kelamin Perempuan dan Laki-laki sesuai dengan Rekap data statistik triwulan pada Unit Pelayanan terpadu Perpustakaan Umum di 4 Gedung layanan Perpustakaan yang ada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah ini merupakan perhitungan data dari layanan perpustakaan umum dan juga layanan perpustakaan elektronik yang menjadi solusi pemenuhan kebutuhan pemustaka yang terbatas oleh kebijakan pemerintahan dalam masa pandemi covid-19. Tahun 2022. Capaian indikator program pembinaan perpustakaan yaitu jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 dengan jumlah pengunjung pada tahun 2022 mencapai 228.583 orang. Sejumlah 1.325.445 orang pemustaka yang ada pada layanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan dan perpustakaan daerah serta sejumlah 228.583 orang pemustaka layanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan.

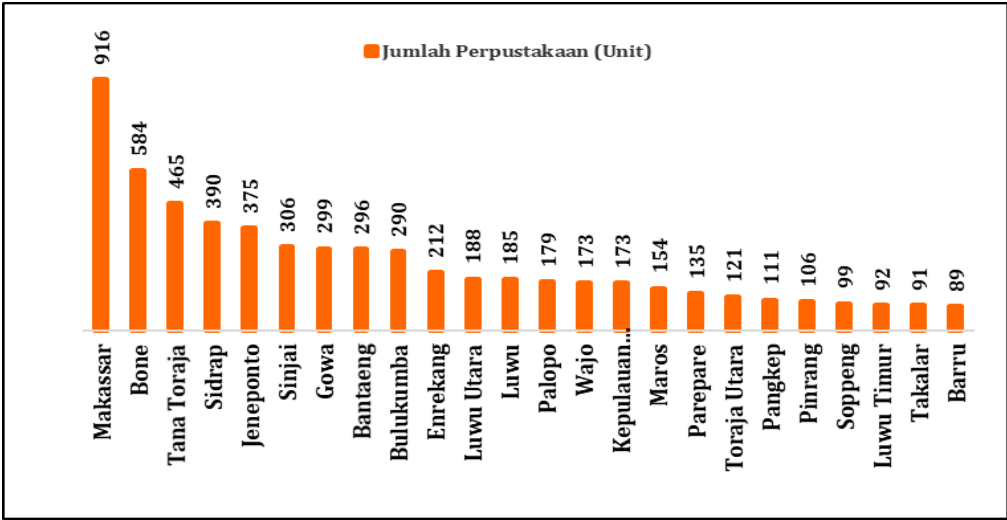
Grafik II. 108.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa jenis layanan perpustakaan, antara lain layanan perpustakaan umum, layanan perpustakaan Abd. Rasyid Dg Lurang, layanan perpustakaan ibu dan anak, serta layanan PP-IPTEK. Pemustaka yang datang berkunjung tidak hanya langsung ke perpustakaan tetapi dapat juga mengunjungi layanan website maupun Instagram. Rasio perpustakaan walaupun naik dibanding tahun lalu, akan tetapi belum rasional bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Diperlukan pengembangan perpustakaan di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota. Serta peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan. Jumlah perpustakaan pada tahun 2022 yang tersebar di kabupaten/kota mencapai 6.029 unit mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 2.324 unit. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 109.
Jumlah Perpustakaan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian persentase Naskah Kuno yang dilestarikan tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan, dimana capaian tahun 2021 jumlah naskah kuno dapat dilestarikan sebanyak 1.213 lembar atau sebesar 80,86 persen dari target keseluruhan adalah 1.500 lembar. Faktor pendorong pencapaian target karena banyaknya permintaan dari masyarakat dan minat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menginginkan pelestarian naskah kuno. Pada

tahun 2022 capaian persentase naskah kuno yang dilestarikan sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan naskah kuno yang dilestarikan hanya 1 jenis, yaitu naskah lontaraq dengan jumlah judul sebanyak 4.049 naskah.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perpustakaan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.95.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	732.403	1.098.180	106.933	154.913	228.583
Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	54,33	42,33	30,1	80,86	100

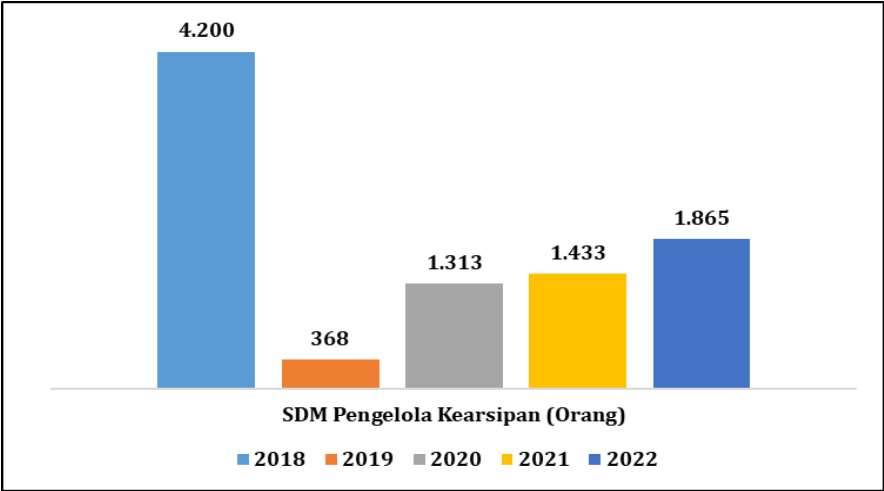
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.18. Kearsipan

Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2021 adalah sebesar 33,30 persen atau 25 perangkat daerah, melampaui target yang ditetapkan sebesar 18,87 persen. Hal ini disebabkan oleh aktifnya dan respons positif dari Lembaga Kearsipan Daerah yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan arsip secara baku di masing-masing instansi pemerintah untuk kemudahan dalam menelusuri arsip sebagai alat bukti dalam administrasi pemerintah dan juga sebagai identitas bangsa. Keaktifan para arsiparis dalam melaksanakan pembinaan pada instansi pemerintah dan juga swasta dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis. Pembinaan ini dilakukan sebagai langkah tertib arsip pada instansi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang di tuangkan dalam Perka ANRi, dan juga merupakan indikator penilaian Reformasi Birokrasi bagi instansi pemerintah.

Pada tahun 2022 melalui program pengelolaan arsip capaian perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 79,49 persen. Instrumen yang dinilai dalam mengelola arsip secara baku cukup banyak, salah satu diantaranya yaitu pemusnahan arsip. Perangkat daerah yang telah melaksanakan pemusnahan arsip bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 31 perangkat daerah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 25 perangkat daerah. Untuk nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B keatas pada Pemda diraih oleh 3 lembaga kearsipan daerah, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Bone dan Luwu Timur. Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori Baik (77,59).

Grafik II. 110.
Peningkatan SDM Pengelola Arsip
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kearsipan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.96.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	65	56	29,54	64,1	79,49

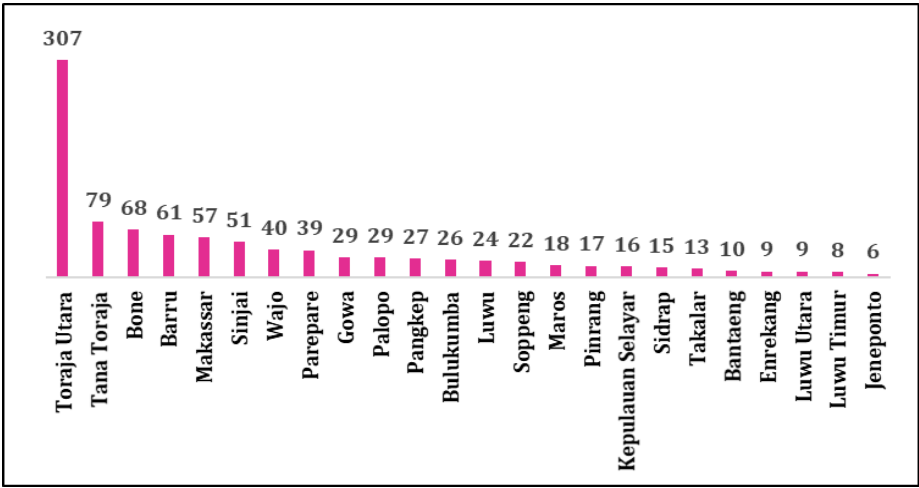
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

Pada tahun 2022 capaian persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 0,62 persen. Masih terdapat beberapa destinasi pariwisata yang membutuhkan bantuan pengembangan namun belum memiliki dokumen perencanaan yang lengkap, seperti RIPPAR Kabupaten/Kota.

Grafik II. 111.
Jumlah Destinasi Wisata Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

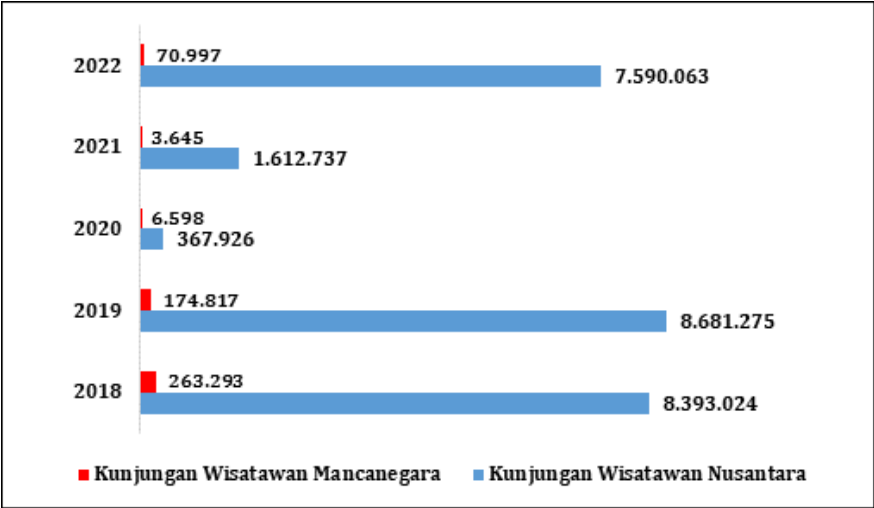


Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Beberapa destinasi khususnya destinasi wisata alam masih belum jelas dasar kepemilikannya, mengingat pembagunan/pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten/Kota yang bukan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Hibah. Jumlah destinasi wisata pada tahun 2022 sejumlah 980 destinasi mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 926 destinasi.

Kawasan wisata halal menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai capaian pada urusan layanan pilihan untuk pariwisata. Wisata halal merupakan konsep yang relatif baru yang merupakan adopsi dari negara-negara non organisasi Konferensi Islam (OKI) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan Muslim Dunia. Capaian tahun 2021 menunjukkan nilai yang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 12,5 persen atau 3 Kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota yang terdapat di Sulawesi Selatan, namun capaian yang diperoleh pada tahun 2021 baru pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Hal ini dipengaruhi oleh persyaratan yang ditetapkan untuk wisata halal berupa hotel, tempat ibadah sajian dalam restoran belum sepenuhnya disesuaikan dengan konsep wisata halal yang ditetapkan, disamping itu sosialisasi terhadap kawasan wisata halal baru dilaksanakan pada 2 kabupaten tersebut. Pada tahun 2022 capaian persentase kabupaten/kota yang memiliki kawasan wisata halal sebesar 12,5 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penerapan konsep wisata halal/ramah muslim dapat terlaksana dengan baik melalui Sosialisasi serta Fasilitasi, hal ini dapat tercapai dikarenakan adanya koordinasi dengan pihak kab./kota serta para pelaku industri pariwisata, khususnya yang bergelut di urusan wisata halal/ramah muslim.

Grafik II. 112.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kunjungan wisatawan nusantara atau wisatawan domestik di Sulawesi Selatan tahun 2021 mulai mengalami perbaikan seiring dengan usaha pemulihan ekonomi pada masa pandemic covid-19, kebijakan kelonggaran dalam pembatasan aktivitas mendorong masyarakat lokal untuk melakukan kunjungan pada obyek-obyek wisata lokal yang mulai dilakukan pembenahan kembali. Kunjungan wisatawan mancanegara masuk ke Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021, kondisi ini tidak terlepas dari pandemic covid-19, yang memberlakukan kebijakan pembatasan dan larangan masuk ke Indonesia. Kondisi ini juga berdampak terhadap tidak tercapainya target yang ditetapkan yaitu jumlah kunjungan wisata sebanyak 87.500 kunjungan pada tahun 2021. Adanya pelonggaran penerbangan dalam negeri, sehingga membuka peluang untuk wisatawan domestik berkunjung ke destinasi-destinasi wisata, khususnya di Sulawesi Selatan. Tahun 2022 tercatat jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 7.590.063 kunjungan dari target sebanyak 2.067.550 kunjungan. Terbatasnya orang untuk melakukan perjalanan juga menjadi salah satu persoalan sulitnya tercapai kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan terutama wisatawan mancanegara, karena beberapa negara masih membatasi keluar masuk warganya sehingga menjadikan target kunjungan wisatawan mancanegara hanya dapat dicapai sebanyak 70.997 kunjungan atau 75,73 persen dari target 93.750 kunjungan. Tahun 2022 rata-rata lama kunjungan wisata sejumlah 3 hari mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 1 hari. Selain itu peningkatan dari tahun sebelumnya juga terjadi pada peningkatan PAD pariwisata dimana pada tahun 2022 mencapai 299.770.000 rupiah serta peningkatan kontribusi PDRB sektor Pariwisata tahun 2022 sebesar 11,86 persen dari tahun 2021 dengan capaian 1,32 persen.

Terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia yang terdiri dari pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, music, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan dan aplikasi. Dari ke 17 sub sektor tersebut, 3 sub sektor yang dikembangkan di Provinsi

Sulawesi Selatan, melalui kegiatan workshop desain produk ekonomi kreatif (Sub sektor desain produk), workshop fotografi ekonomi kreatif (sub sektor fotografi) dan workshop pengembangan ekonomi kreatif untuk sub sektor fashion. Tahun 2021 capaian persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sebesar 17,64 persen mengalami peningkatan dari tahun 2020. Tahun 2022 peningkatan kualitas SDM sub sektor ekonomi kreatif yang sedang berkembang saat ini di masyarakat adalah sub sektor fotografi, kriya dan desain produk. Ketiga sub sektor ekonomi kreatif ini memiliki komunitas yang cukup banyak, sehingga fokus pengembangan SDM dan Supporting di tahun 2022 diarahkan pada tiga sub sektor dimaksud.

Kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM sektor Pariwisata bagi sejumlah 154 orang SDM Pariwisata pada tahun 2021. Adapun untuk Tahun 2022 jumlah SDM sektor pariwisata yang dilatih sejumlah 165 orang, melalui beberapa kegiatan antara lain : (1) Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Selam) sebanyak 70 Orang; (2) Pelatihan Pengelola Usaha Homestay & Pondok Wisata sebanyak 70 orang; dan (3) Pembinaan Pokdarwis dan Usaha Jasa Pariwisata sebanyak 25 Orang. Peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan SDM di sektor ekonomi kreatif mengalami peningkatan jumlah SDM yang dilatih pada tahun 2021 yaitu sebanyak 78 orang. Tahun 2022 jumlah SDM ekonomi kreatif yang dilatih sebanyak 150 orang melalui 3 (tiga) kali pelaksanaan kegiatan, yaitu (1) Workshop Fotografi 50 Orang; (2) Workshop Kriya sebanyak 50 orang; dan (3) Workshop Desain Produk sebanyak 50 Orang. Hal ini dikarenakan peluang ekonomi yang dihasilkan melalui usaha ekonomi kreatif semakin meningkatkan minat masyarakat (khususnya masyarakat milenial) untuk berkecimpung dalam sektor ekonomi kreatif.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pariwisata tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.97.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0,3	0,2	0,4	0,2	0,62
Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	%	0	4,2	8,3	8,3	12,5
Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	%	134	114	4,21	77,16	367,1
Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara)	%	131	58,27	4,52	4,17	75,73
Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	13	19	13	17,64	18,75
Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	1,22	1,08	0	1,45	1,55
Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang	%	12	15	11	12	14,92

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
mendapatkan pelatihan						

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.1 Pertanian

Pengembangan tanaman Talas Satoimo dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan karena tanaman ini memiliki kandungan kolagen dan antioksidan tinggi dan merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan. Produksi talas satoimo tahun 2021 sejumlah 6.104 ton mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 7.214 ton disebabkan oleh perubahan iklim yang berakibat banjir pada beberapa wilayah yang menjadi lokasi penanaman komoditas ini seperti Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Bone dan Soppeng, sementara itu jenis komoditas ini tidak dapat terkena banjir selama musim tanam 5 bulan. Pada tahun 2022 pengembangan talas satoimo tidak di laksanakan karena tidak ada proposal/permintaan dari petani. Pengembangan Jeruk Keprok Selayar sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan luas areal penanaman. Pada tahun 2022 luas areal pengembangan jeruk kopyor sebesar 130,02 Ha mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan ini didukung oleh pengembangan kawasan dan pengembangan jeruk selayar berbasis pekarangan yang dilakukan melalui pengadaan dan perakitan bibit jeruk selayar.

Tabel II.98.
Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

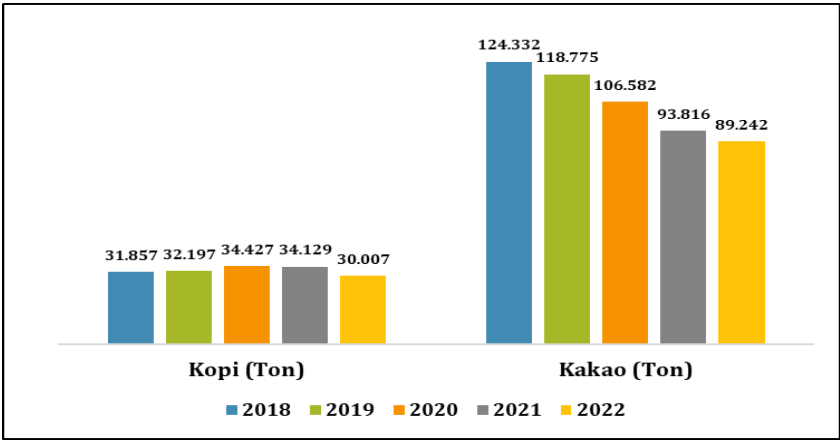
Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB*	%	22,54	21,35	21,72	22,55	22,1
Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	7,16	6,34	6,50	6,33	5,91
Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,12	1,11	1,13	1,13	1,11
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	4,26	3,88	3,94	4,07	4,05
NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	%	102,25	100,54	100,66	94,17	91,34
NTP Sub Sektor Hortikultura	%	106,14	113,85	107,97	105,02	125,36
NTP Sub Sektor Perkebunan Rakyat	%	95,64	95,62	99,25	107,09	120,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Tahun 2022 produktivitas tanaman padi dan jagung mengalami peningkatan dari tahun 2021 sedangkan produktivitas tanaman kopi dan kakao mengalami penurunan dari tahun 2021. Capaian untuk tanaman padi didorong

oleh bantuan benih bersertifikat, pupuk yang tepat, peningkatan SDM petani dan penyuluh, penanganan serangan hama dan penyakit serta pola taman yang baik. Untuk komoditas jagung, capaian yang melampaui target dipengaruhi oleh penggunaan benih jagung yang bersertifikat, pemakaian pupuk yang tepat dan berimbang, penanganan serangan hama dan penyakit serta peningkatan SDM dan penyuluh pertanian.

Grafik II. 113.
Produksi Tanaman Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Produksi tanaman kopi tahun 2018 hingga 2020 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami tren penurunan, sedangkan produksi tanaman kakao tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan. Produksi tanaman kopi terbesar di Kabupaten Enrekang dengan jumlah produksi sebesar 8.463 ton pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -13,1 persen dari tahun 2021, sedangkan produksi tanaman kakao terbesar di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah produksi sebesar 29.232 ton pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,3 persen dari tahun 2021.

Capaian peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian tahun 2020 cukup tinggi yaitu 10.401 unit mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 18.384 unit. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya bantuan alat-alat pertanian baik dari sumber pendanaan APBD maupun dari APBN. Demikian halnya pada tahun 2022 meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 jumlah permintaan untuk pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian oleh kelompok tani berupa Hand Traktor, Combine Harvester, Cultivator, Handsprayer, Traktor Roda 4, Mesin Pompa Air 4 Inch dengan jumlah bantuan alsintan yang didistribusikan sebesar 14.111 unit.

Peningkatan ketersediaan pupuk tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren peningkatan, hal ini menjawab kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan petani dalam aktivitas pertaniannya. Tahun 2022 besaran jumlah bantuan pupuk yang disalurkan berdasarkan permintaan bantuan yang diajukan oleh kelompok tani dalam rangka upaya peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan jumlah 277.446 kg pupuk organik padat, 99.992 liter pupuk organik/hayati cair.

Nilai hilirisasi produk tanaman pangan pada tahun 2022 sebesar 147.321.223.500 rupiah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -62,5 persen dimana penurunan produksi dan nilai produk tanaman pangan dan hortikultura berpengaruh terhadap penurunan nilai hilirisasi produk tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan nilai hilirisasi produk tanaman perkebunan pada tahun 2022 sebesar 7.408.901.000 rupiah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 20,6 persen. Peningkatan produksi dan nilai produk tanaman perkebunan berpengaruh terhadap peningkatan nilai hilirisasi produk perkebunan. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian melalui program pembangunan jaringan irigasi tersier, pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani, dan pembangunan embung. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier sejumlah 122 paket pekerjaan, pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani sejumlah 451 paket pekerjaan, serta pembangunan embung sejumlah 78 paket pekerjaan, dan pembangunan sumur bor sejumlah 97 paket pekerjaan.

Rendahnya tingkat serangan OPT merupakan upaya bagaimana memaksimalkan fungsi dan peran POPT dalam mengantisipasi secara dini serangan-serangan OPT yang dihadapi. Serangan OPT dipicu oleh kurang tepatnya pengendalian OPT yang dilakukan petani secara swadaya. Dalam hal pengendalian OPT secara swadaya banyak ditemukan petani menggunakan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan, seperti jenis pestisida yang digunakan tidak tepat, pencampuran pestisida dengan berbagai jenis pencampur seperti deterjen, oli, dan lainnya yang justru akan memicu terjadinya resistensi.

Capaian penggunaan bibit padi padi bersertifikat menggambarkan seberapa besar penggunaan bibit bersertifikat yang sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan produksi dan dipengaruhi oleh program mandiri benih dimana program ini diharapkan dapat merangsang petani untuk menggunakan benih padi bersertifikat disetiap jadwal pertamanannya. Tahun 2022 capaian persentase penggunaan benih padi bersertifikat sebesar 68 persen mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan capaian 76,49 persen. Rasio ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama petani penyuluh/KEP relatif sama selama 5 tahun terakhir, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan jumlah penyuluh dan kelompok tani yang dibina, hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 orang penyuluh membina 2 kelompok tani.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pertanian tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.99.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton)	Ton	0	0	7.214	6.104	0
Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	345,43	550,88	568,63	630,99	130,02

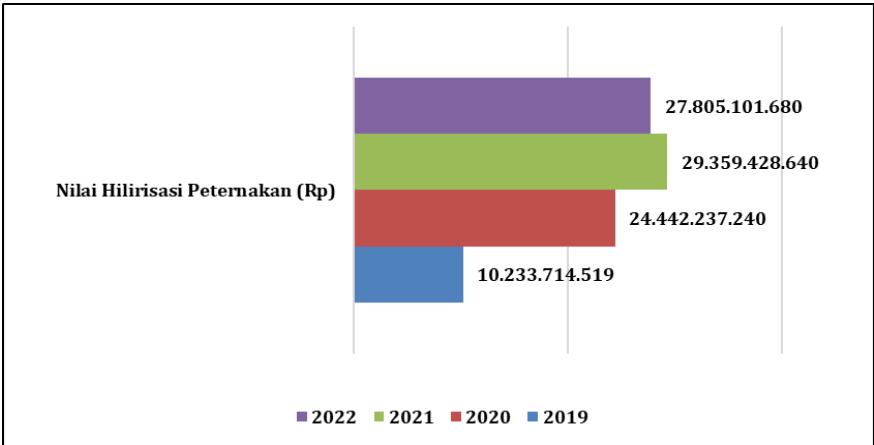
Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktifitas Padi	Kw/Ha	50,12	50,03	48,23	49,46	51,27
Produktifitas Jagung	Kw/Ha	55,89	56,49	54,04	55,31	56,83
Produtifitas Kopi	Kg/Ha	669	612	628	647	563,88
Produktifitas Kakao	Kg/Ha	807	792	776	814	725
Cakupan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	198	713	10.401	18.462	14.111
Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	132,63	256,34	381,30	775,23	22.658
Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp	0	0	0	392.483.722	147.321.223.500
Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp (000)	9.231.917	9.176.092	6.766.032	6.144.952	7.408.901
Persentase Penurunan Serangan OPT (%)	%	1,11	1,11	1,79	2	2
Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	%	75	63	0	76,49	68
Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP	Rasio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2023

2.3.3.2. **Peternakan**

Nilai hilirasi produksi peternakan tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2022 menurunnya capaian produksi peternakan menyebabkan nilai hilirisasi produksi peternakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Faktor perkembangan ekonomi yang melambat berdampak pada turunnya daya beli dan rendahnya perkembangan usaha hotel, restoran dan kantin. Nilai hilirisasi produksi peternakan tahun 2019 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 114.
Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

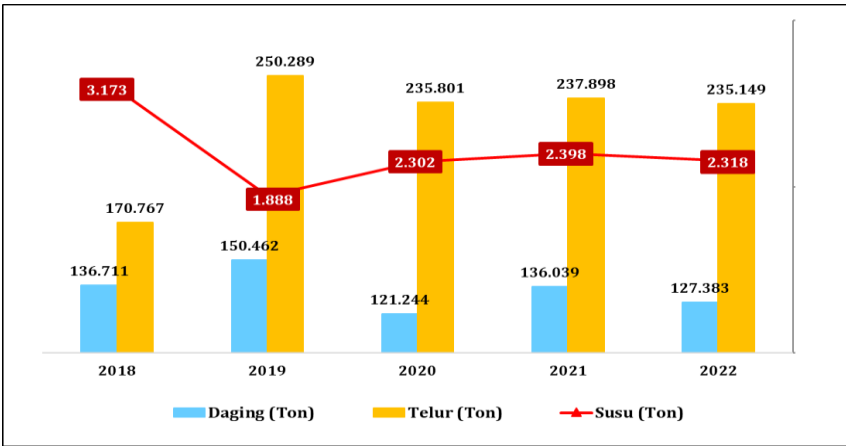


Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Tahun 2018 hingga 2022 capaian produksi peternakan (daging, telur, susu) mengalami tren berfluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun 2021. Salah satu faktor penyebabnya

adalah belum maksimalnya operasional hotel, restoran dan kantin yang berdampak pada hambatan distribusi daging ke konsumen yang hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Produksi daging asal unggas terutama daging ayam broiler merupakan komoditi paling berperan dalam penurunan jumlah produksi. Jumlah produksi daging tertinggi di Kabupaten Maros sebesar 33,4 ton dan Kota Makassar sebesar 33,2 ton. Jumlah produksi telur tertinggi di Kabupaten Sidrap dengan jumlah produksi sebesar 56,8 ton dan Kabupaten Pinrang sebesar 33,6 ton. Sedangkan produksi susu hanya terdapat di 4 kabupaten saja dimana yang tertinggi di Kabupaten Enrekang sebesar 2,12 ton. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

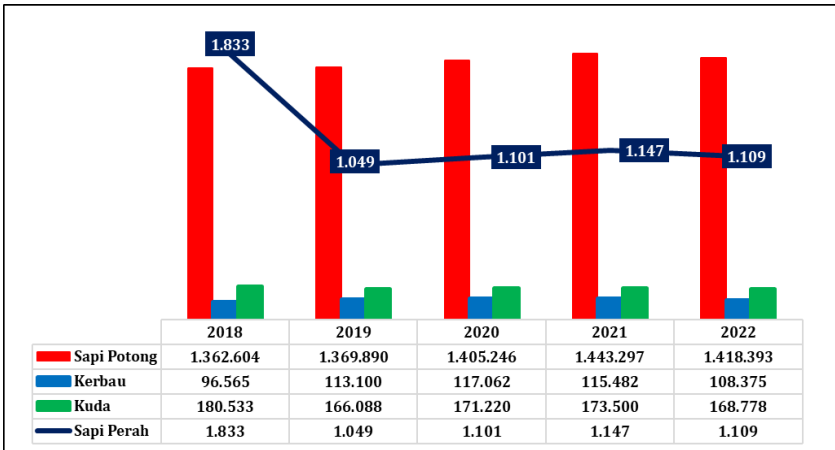
Grafik II. 115.
Produksi Hasil Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak besar, pada tahun 2021 dilaksanakan pendistribusian sapi bali betina sejumlah 221 ekor yang didistribusikan untuk kelompok ternak di Kabupaten Bone, Takalar, Enrekang, Wajo, Sidrap, dan Barru. Tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pendistribusian ternak besar.

Grafik II. 116.
Populasi Ternak Besar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

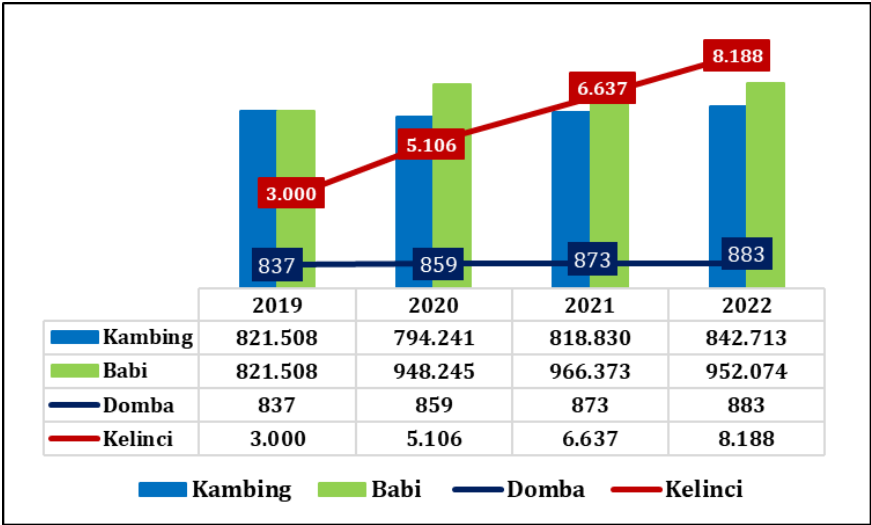


Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak kecil, pada tahun 2021 dilaksanakan pendistribusian ternak kecil pada kelompok ternak yang meliputi: 1) Kambing Jantan sejumlah 43 ekor di Kabupaten Enrekang,

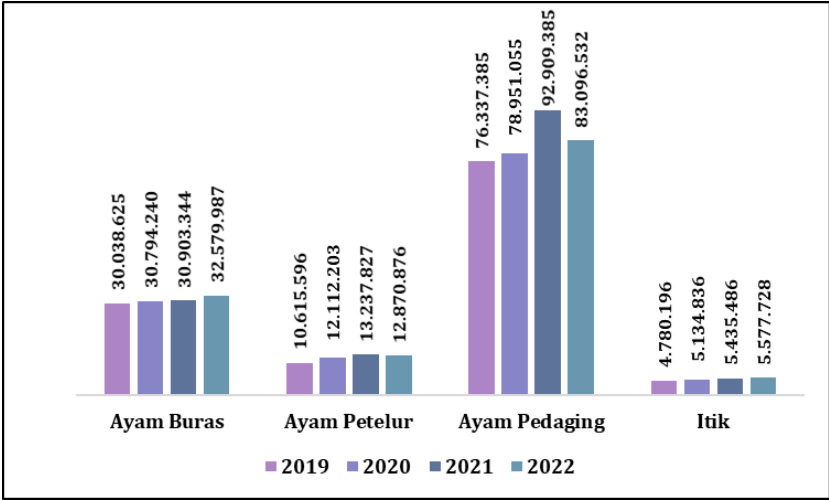
Bone, Sidrap, dan Jeneponto; 2) Kambing Betina sejumlah 285 ekor di Kabupaten Gowa, Enrekang, Bone, Sidrap, dan Jeneponto; 3) Babi Betina sejumlah 75 ekor di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Pada tahun 2022 tidak ada pendistribusian ternak kecil untuk kelompok ternak karena keterbatasan alokasi anggaran.

Grafik II. 117.
Populasi Ternak Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Grafik II. 118.
Populasi Ternak Unggas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Dalam rangka peningkatan populasi ternak unggas, pada tahun 2021 dilaksanakan pendistribusian ternak unggas untuk kelompok ternak unggas yang meliputi: 1) Ayam Lokal sejumlah 1.875 ekor di Kabupaten Takalar, Maros, Gowa, dan Pangkep; 2) Itik sejumlah 10.683 ekor di Kabupaten Takalar, Maros, Gowa, Sinjai, Jeneponto, Bone, Sidrap, dan Pangkep; 3) Ayam Petelur sejumlah 5.600 ekor di Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Jeneponto. sedangkan pada tahun 2022 pengembangan populasi ternak unggas sejumlah 7.625 ekor bagi kelompok ternak yang tersebar di Kabupaten Bone, Pangkep, Sidrap, Takalar, dan gowa yang terdiri dari ternak itik dan ayam petelur. Selain itu untuk mendukung penyediaan infrastruktur peternakan unggas pada tahun

2022 telah dilaksanakan pembangunan kandang closed house pada Kabupaten Bone sejumlah 2 unit dan Kabupaten Wajo sejumlah 1 unit serta pengembangan kawasan peternakan Pucak di Kabupaten Maros dalam rangka penyediaan prasarana peternakan.

Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis yang ditangani di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan capaian 12.341 kasus. Hal ini ditunjang oleh kesiapan sumberdaya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas obat hewan, vaksin dan vitamin serta materi pendukung lainnya. Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah bentuk ancaman dalam pengembangan komoditas peternakan sehingga selalu menjadi prioritas utama dalam penanganan kesehatan hewan. Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) tahun 2022 menunjukkan terjadi penurunan kasus dengan capaian 1.331 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pemeliharaan di tingkat peternak sudah menerapkan konsep biosekuriti dan higiene sanitasi dimana dilakukan pembatasan lalu lintas keluar masuk kandang untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih meluas.

Capaian pada indikator unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan persentase yang belum mencapai target pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya dukungan kebijakan daerah dan system pengawasan yang dapat mendorong pencapaian target terhadap usaha unit obat hewan yang beroperasi. Capaian tahun 2022 masih sama dengan capaian ditahun sebelumnya, penyebabnya yaitu masih rendahnya dukungan kebijakan daerah dan sistem pengawasan yang dapat mendorong pengawasan yang dimaksud. Usaha distribusi atau layanan obat hewan tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan jumlah yang besar, sehingga diperlukan suatu sistem yang lebih mudah dalam pelaksanaannya. Sistem tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sistem perizinan lainnya.

Rasio ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani/ternak adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dalam suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah kelompok tani/ternak yang harus dilayani oleh penyuluh tersebut. Rasio ini dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi apakah terdapat cukup banyak penyuluh pertanian yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian di suatu daerah. dari perolehan data pada tahun 2022, dapat diinterpretasikan bahwa 1 penyuluh untuk 14 kelompok tani/ternak. Hal ini masih dianggap ideal mengingat kondisi wilayah bisa sangat bervariasi di setiap daerah. Semakin luas wilayah yang harus dilayani oleh penyuluh pertanian, maka semakin banyak pula jumlah penyuluh yang dibutuhkan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan peternakan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.100.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Daging	Ton	136.711	150.462	121.244	136.039	127.383
Produksi Telur	Ton	170.767	250.289	235.801	237.898	235.149
Produksi Susu	Ton	3.173	1.888	2.302	2.398	2.318
Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	Rp	0	10.233.714.519	24.442.237.240	29.359.248.640	27.805.101.680
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Kasus	9.403	5.961	31.376	12.341	1.331
Persentase Unit Usaha yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	0	0	0	21	21
Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak	Rasio	1:4	1:3	1:6	1:10	1:14

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

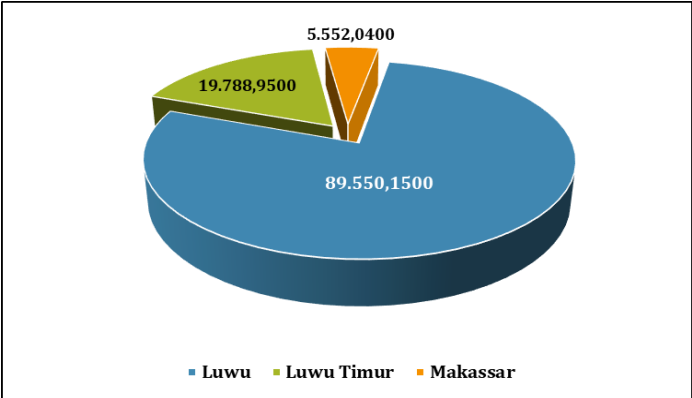
2.3.3.3. Kehutanan

Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan dengan capaian 71,14 persen luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022 baik yang ada di dalam dan diluar kawasan sejumlah 13.003,2 Ha sehingga luas lahan kritis yang direhabilitasi menjadi 277.042,97 Ha dari luas total lahan kritis sebesar 389.426,8 Ha.

Tahun 2018 hingga 2020 persentase luas kerusakan hutan mengalami tren menurun, meskipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan namun persentase kerusakan hutan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,03 persen. Hal ini didukung oleh upaya pengamanan dan perlindungan hutan berupa patroli dan penyuluhan berupa sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dimana kerusakan hutan yang terjadi pada tahun 2021 seluas 1.431,99 Ha menurun menjadi 580,79 Ha dari total 1.780.029 Ha luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya. Hal ini didorong oleh kegiatan rehabilitasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas penebangan liar yang sering terjadi pada kawasan hutan. Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara pada tahun 2022 sebesar 724 Ha melalui pembuatan dan pemeliharaan tanaman hutan rakyat dan pembuatan dan pemeliharaan tanaman mangrove.

Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan pada tahun 2022 sebesar 111.444,19 Ton mengalami penurunan produksi dari tahun 2021 yang disebabkan berkurangnya potensi bahan baku serta daya beli masyarakat yang semakin berkurang dimana sebagian masyarakat yang beralih ke penggunaan baja ringan. Produksi hasil hutan kayu olahan berasal dari kelompok komoditi kayu gergajian, kayu lapis dan veener, dengan nilai produksi tersebsar berasal dari kayu lapis.

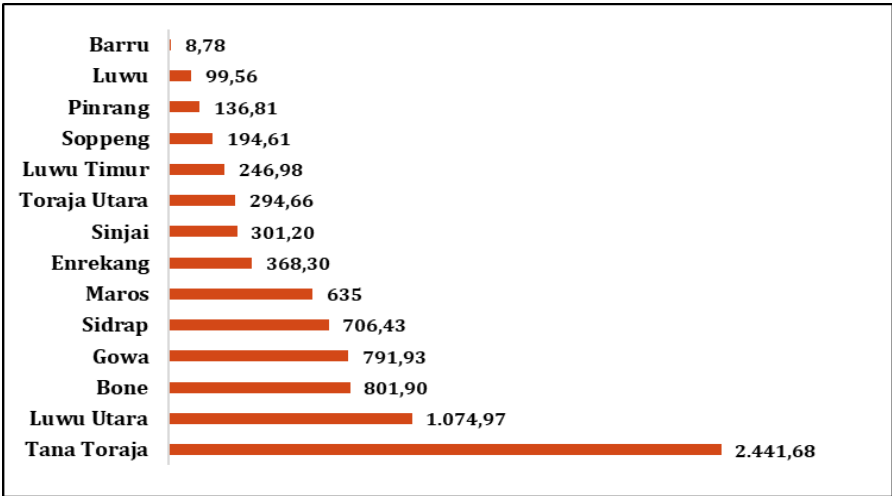
Diagram II.13.
Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan (m³)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada tahun 2022 sebesar 8.102,81 Ton mengalami peningkatan produksi dari tahun 2021 yang didukung dengan adanya penambahan jumlah izin pemungutan HHBK yang berdampak langsung dengan jumlah produksi di industri-industri yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung jumlah penerimaan dari sektor kehutanan pada tahun 2022 mencapai Rp.91.654.000,-. Produksi hasil hutan bukan kayu diperoleh dari produksi kelompok rotan, kelompok getah dan kelompok resin. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 119.
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata tahun 2022 sejumlah 2 jenis dimana tidak adanya perubahan atau penambahan jenis yang diukur sesuai target indikator tahun ini yaitu satu jenis tumbuhan/Flora dan satu jenis hewan/Fauna.

Capaian persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 dengan capaian 26,8 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang

diberikan akses legal meningkat dalam pengelolaan hutan pada tahun 2022. Jumlah pemegang izin perhutanan sosial pada tahun 2022 sebesar 505 kelompok sedangkan jumlah usulan pemegang izin perhutanan sosial sebesar 1.884. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: a) Adanya pembinaan yang dilaksanakan secara intensif terkait hak dan kewajiban pemegang persetujuan dari UPT KPH baik oleh pendamping KPS maupun penyuluh kehutanan pada areal pemegang persetujuan perhutanan sosial; b) Sosialisasi pengelolaan perhutanan sosial sesuai permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 kepada pemegang persetujuan baik yang dilaksanakan oleh BPSKL Sulawesi maupun Dinas Kehutanan melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial; c) Kemampuan pemegang izin dalam mengakses teknologi informasi yang makin berkembang terkait Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Pada tahun 2022 untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial dilaksanakan kegiatan pembangunan rumah pemeliharaan ulat sutera sejumlah 5 unit, pengadaan bibit aren, jahe, dan kopi serta penyediaan sarana dan prasarana alat ekonomi produktif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) disebutkan bahwa terdapat 7 DAS Lintas Provinsi. 27 DAS Lintas Kabupaten, dan 507 DAS Kabupaten. Jumlah DAS yang direhabilitasi dari tahun 2019 hingga 2022 tidak mengalami perubahan DAS yang direhabilitasi yang terletak di lokasi DAS yang telah ditentukan yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang sedangkan DAS lainnya tetap dipertahankan kondisinya.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kehutanan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.101.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	217.998,77	238.506,77	251.016,77	264.039,77	277.042,97
Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	448.471	427.963	415.453	402.430	389.426,8
Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	48,61	55,73	60,42	65,61	71,14
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	310.783,90	362.264,23	12.440	1.431,99	580,79
Luas Kawasan Hutan	Ha	2.145.031	2.078.486	1.780.029	1.780.029	1.780.029
Persentase Kerusakan Hutan pertahun	%	14,49	17,43	0,7	0,08	0,03
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ton	0	632.869,29	3.920,13	2.688,57	8.102,81
Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	m ³	0	215.731,05	20.801,62	137.931,37	111.444,19
Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Jenis	Belum dipetakan	2	2		

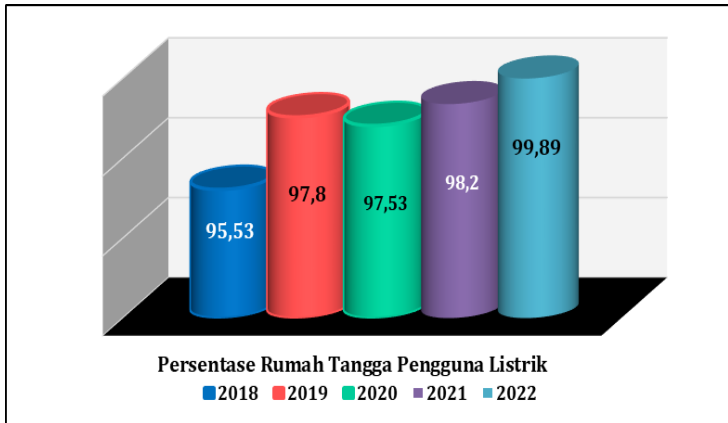
Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	%	Belum dilakukan pengukuran	12,19	15,80	24,04	26,8
Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS	0	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan, dimana capaian tahun 2021 sebesar 98,2 persen.

Grafik II. 120.
Rumah Tangga Pengguna Listrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

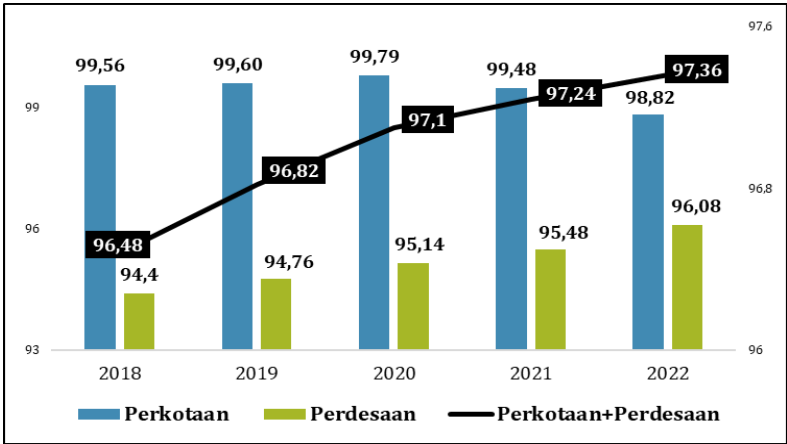


Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2023

Tahun 2022 jumlah rumah tangga yang telah menikmati layanan listrik sejumlah 4.940 KK atau persentase rumah tangga yang berlistrik telah mencapai 99,89 persen yang bersumber dari Listrik PLN dan Non PLN) sedangkan rumah tangga yang belum terlayani penerangan merupakan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang berada di kepulauan dan pegunungan serta rumah tangga yang tidak mampu selain wilayah 3T meskipun terdapat jaringan PLN.

Capaian persentase rumah tangga pengguna listrik PLN di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan untuk wilayah perdesaan sejak tahun 2018 hingga 2022. Sedangkan untuk wilayah perkotaan persentase rumah tangga pengguna listrik PLN tahun 2018 hingga 2020 mdngalami peningkatan namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan dengan capaian 98,82 persen pada tahun 2022. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

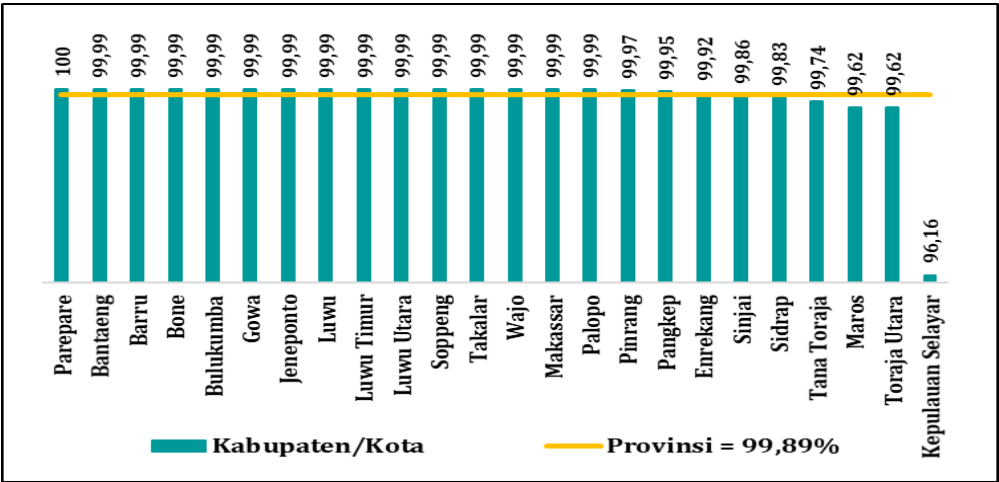
Grafik II. 121.
Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

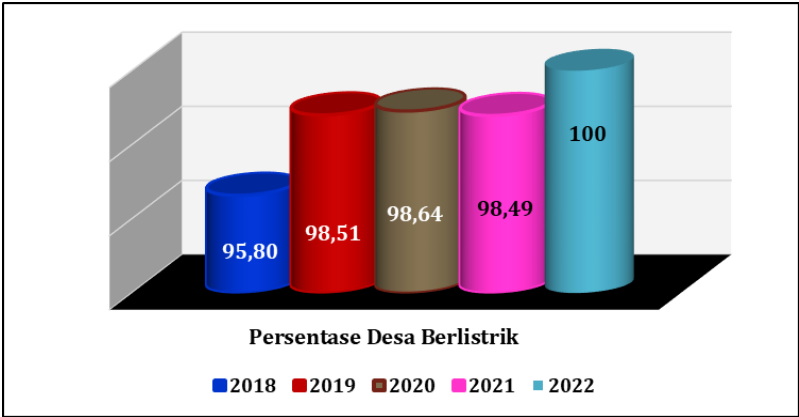
Rumah tangga pengguna listrik tahun 2022 tertinggi di Kota Pare-Pare yang telah mencapai 100 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 96,16 persen.

Grafik II. 122.
Rumah Tangga Pengguna Listrik Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2023

Grafik II. 123.
Persentase Desa Berlistrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2023

Persentase desa berlistrik di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan selama kurun waktu 5 tahun meskipun belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terdapat desa yang berada di wilayah kepulauan dan desa terpencil yang belum terjangkau listrik sebesar 1,51 persen. Tahun 2022 persentase desa berlistrik mencapai 100 persen yang berarti bahwa sejumlah 2.255 desa di Sulawesi Selatan telah terakses listrik baik yang bersumber dari listrik PLN maupun Non PLN.

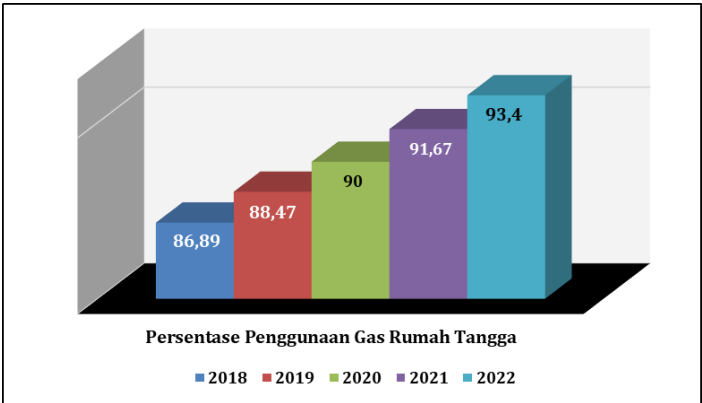
Dalam rangka konsevasi energi untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional dan bijaksana untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penggunaan energi secara efisien dan merata serta kelestarian sumber-sumber energi di Sulawesi Selatan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: a) Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga sejumlah 15 unit yang tersebar di Kabupaten Bone, Jeneponto dan Sidrap; b) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sejumlah 5 unit di Kabupaten Barru dan 13 unit di Kabupaten Pangkep; c) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya di Pulau Samalona Kota Makassar; d) Pembangunan PLTS Rooftop Offgrid 3 kWp di Kabupaten Bone; e) Pengadaan Genset di Kabupaten Pangkep; f) Pengadaan PLTS Hybrid sejumlah 2 unit di Kabupaten Jeneponto; dan g) Pengadaan Genset 300 kVA di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar.

Capaian Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) tahun 2021 menunjukkan nilai 320 Ha, capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 100.000 Ha, kondisi ini disebabkan oleh kewenangan provinsi untuk sector minerba telah dialihkan ke pemerintah pusat sehingga dinas ESDM Provinsi hanya melakukan fungsi penyiapan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan layanan perizinan air tanah dengan metode pemberian rekomendasi teknis pengusahaan air tanah yang didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian teknis sebagai pertimbangan dalam proses penerbitan izin usaha pengusahaan air tanah. Semakin banyaknya pelaku usaha melakukan perizinan usaha air tanah sehingga konservasi air tanah demi lingkungan dapat tercapai. Disamping itu pendataan cakupan air tanah berwawasan konservasi sehingga cekungan air tanah menjadi acuan pembuatan tata ruang yang baik. Tahun 2022 luas wilayah izin usaha pertambangan (komoditas batuan, non logam, non logam jenis tertentu) sebesar 130.000 Ha. Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020 dengan adanya penambahan pelaku usaha pertambangan yang berizin sehingga bertambah luasan. Namun pada tahun 2021 hingga 2022 capaian 0 persen disebabkan karena kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat. Tahun 2019 hingga 2022 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 379.181.399.147 rupiah.

Capaian penggunaan gas rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2021 belum mencapai target yang

diharapkan, kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat 10 persen masyarakat pedesaan dan daerah terpencil masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah serta penyediaan gas elpiji 3 kg yang belum mencapai daerah terpencil. Pada tahun 2022 jumlah pengguna gas rumah tangga telah mencapai 93,4 persen baik gas elpiji maupun biogas. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan masyarakat telah beralih dari bahan bakar minyak tanah dan kayu bakar ke gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangga, ditunjang dengan makin meratanya jangkauan distribusi elpiji bersubsidi 3 kg hingga ke pelosok-pelosok desa.

Grafik II. 124.
Rumah Tangga Pengguna Gas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.102.
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,53	97,8	97,53	98,2	99,89
Persentase Desa Berlistrik	(%)	95,8	98,51	98,64	98,49	100
Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi	(%)	94	98,18	235	100	100
Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	130	0	0	320	130.000
Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	3.473,87	3.979,06	5.535,08	0	0
Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	86,89	88,47	90	91,67	93,4

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.5. Perdagangan

Capaian rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) tahun 2021 menunjukkan nilai 0 yang berarti bahwa tidak terdapat izin usaha perdagangan minuman keras yang dikeluarkan untuk diperdagangkan secara bebas. Tahun 2022 jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan sejumlah 1 rekomendasi (PT. Sulawesi Sumber Segar) dari 2 rekomendasi yang ditargetkan. Surat keterangan asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) merupakan sertifikat asal barang yang menyatakan asal dari barang yang diekspor. Tahun 2022 jumlah rekomendasi penerbitan SKA sebesar 5.013 dokumen dari target 4.800 dokumen. Capaian ini didukung oleh makin banyaknya pengusaha/eksportir yang memanfaatkan preferensi tarif yaitu fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional serta meningkatnya ekspor komoditi di Sulawesi Selatan.

Sarana distribusi perdagangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah tersedia di Sulawesi Selatan. Sarana perdagangan tersebut adalah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditas dan sarana lainnya seperti terminal. Olehnya itu capaian untuk persentase ketersediaan sarana distribusi perdagangan adalah 100 persen dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dimana capaian tahun 2022 didukung oleh termemanfaatkannya/tersewakan 3 sarana dan prasarana pusat distribusi regional oleh para pengusaha dan UKM yaitu pasar tradisional Jompi'e Pare-Pare, PDR Gudang Kima, dan Ballroom CCC yang mana ketiga sarana tersebut merupakan sumber PAD.

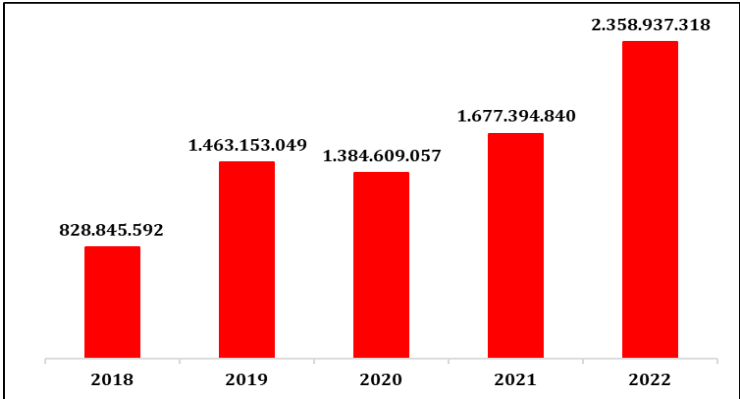
Tahun 2018 hingga 2022 capaian persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya mencapai 100 persen. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: a) Telah dilaksanakan pemantauan harga terhadap 22 komoditi/bahan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran; b) Telah dilaksanakan pasar murah menyambut hari besar keagamaan di 5 kabupaten yaitu Jeneponto, Bone, Palopo, dan Toraja, dan telah mendistribusikan 1300 paket di masing-masing kabupaten dengan harga per paket sebesar Rp. 50.000,-.

Capaian persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen mengalami tren peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 yang mencapai 88 persen pada tahun 2022. Jumlah barang beredar yang sesuai dengan ketentuan sebesar 26.400 unit dari yang di targetkan sebesar 30.000 unit. Capaian persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar perdagangan retail pada tahun 2022 sebesar 50 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh karena produk UMKM yang memiliki standar untuk memasuki pasar retail hanya sejumlah 46 pelaku usaha.

Nilai Ekspor Perdagangan tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 2.358.937.318 US \$, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 1.584.085.320 US \$ yang dipengaruhi oleh meningkatnya nilai ekspor khususnya dari sektor tambang Nikel sebesar

1.625.353.632 US \$ dengan volume 304.471,48 Ton yang diekspor ke negara China, India, Jepang, dan Korea. Nilai ekspor sub sektor pertanian sejumlah 10 jenis dan sub sektor perikanan sejumlah 17 jenis sebesar 432.567.010,2 US \$ dengan volume ekspor 161.072,09 Ton. Sedangkan nilai ekspor sektor industri sejumlah 39 jenis sebesar 300.915.510,89 US \$ dengan volume ekspor 279.852.656,13 Ton.

Grafik II. 125.
Nilai Ekspor Perdagangan (US \$)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perdagangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.103.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	20	0	20	0	50
Persentase Penerbitan SKA	%	100	100	100	116,4	104,44
Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	100	100	100
Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100	100	100	100	100
Nilai Ekspor Perdagangan	US \$	828.845.592	1.463.153.049	1.384.609.057	1.677.394.840	2.358.937.318
Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	%	100	64,53	35,22	75	88
Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	%	75	75	87,5	100	50

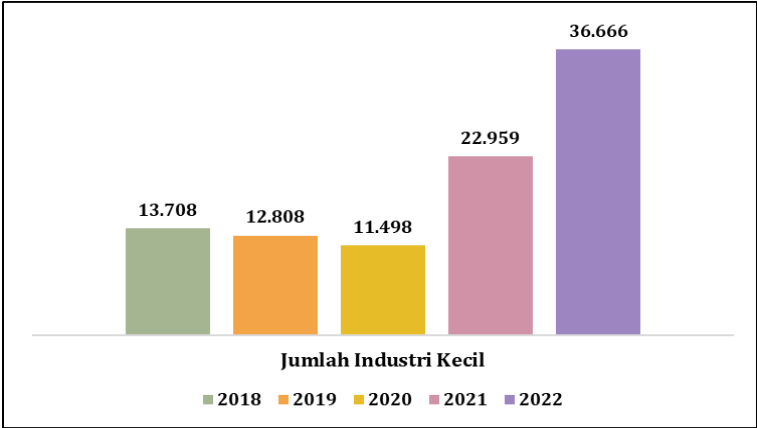
Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.6. Perindustrian

Capaian persentase pertumbuhan jumlah industri tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari -11,21 persen pada tahun 2020

menjadi 49,52 persen pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan karena perkembangan industri baru mulai bertumbuh seiring usaha pemulihan ekonomi.

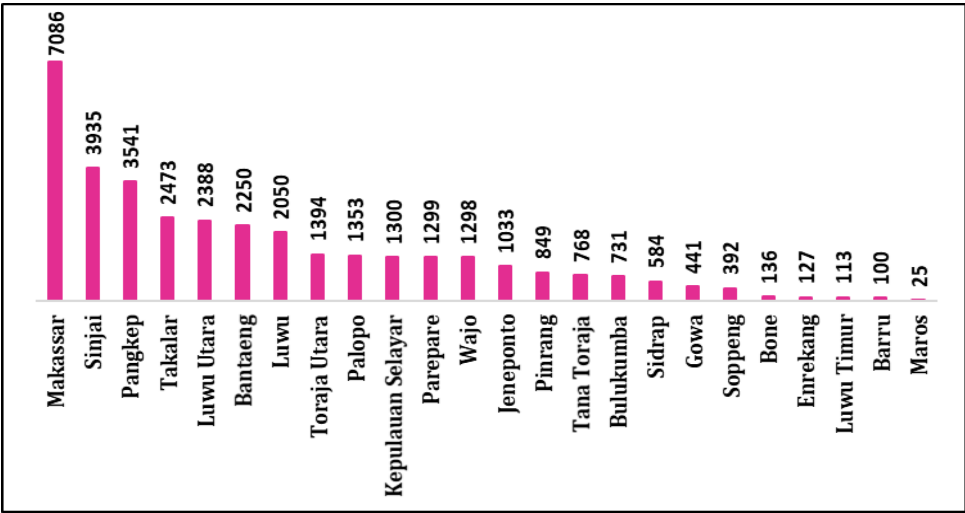
Grafik II. 126.
Perkembangan Jumlah Industri Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2022 capaian persentase pertumbuhan industri sebesar 35 persen dari sejumlah 23.143 unit industri pada tahun 2021 menjadi 35.850 unit industri pada tahun 2022. Pertumbuhan ini didukung oleh maraknya kemunculan start up baru di kalangan generasi muda pasca pandemi dimana lebih banyak memanfaatkan media sosial sebagai media untuk berjualan produk secara online. Hingga tahun 2022 jumlah industri besar sejumlah 75 unit, industri menengah sejumlah 109 unit, dan industri kecil sejumlah 36.666 unit.

Grafik II. 127.
Jumlah Industri Kecil Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2020 hingga 2022 persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 2,1 persen. Hal ini disebabkan banyaknya para pelaku industri utamanya industri kecil yang berlomba-lomba untuk menstandarisasi produknya dengan tujuan untuk menambah peminat dan untuk mengakses pasar yang lebih luas.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Tahun 2019 hingga 2022 capaian persentase peningkatan pengelolaan SIINAS mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 2,2 persen. Peningkatan ini didukung oleh mulai tumbuhnya kesadaran para pelaku industri memanfaatkan pendataan industri untuk membantu mereka untuk mendapatkan fasilitasi dari pihak manapun melalui pendataan SIINAS, namun masih diperlukan usaha-usaha pengelolaan terhadap sistem informasi tersebut agar dapat berfungsi lebih optimal.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perindustrian tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.104.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	3,18	-6,92	-11,21	49,52	35,44
Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	8	6	1,4	1,78	2,1
Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	0	1	1,4	1,97	2,2

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.7. Transmigrasi

Pada tahun 2022 penempatan transmigrasi sebesar 111 KK yang terdiri dari TPA 60 KK dan TPS 51 KK. Penempatan transmigrasi yaitu: a) UPT Bekkae SP.2 Kabupaten Wajo sebanyak 19 KK TPS; b) UPT Mahalona SP.1 SKPC Kabupaten Luwu Timur sebanyak 50 KK TPA yang terdiri dari Provinsi Lampung sebanyak 10 KK, Provinsi Banten sebanyak 15 KK, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10 KK dan Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 15 KK; c) TPS sebanyak 42 KK UPT Mahalona SP.1 SKPC Kabupaten Luwu Timur. Terlaksananya kegiatan Bimtek Ketransmigrasian di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dan terbitnya draft naskah perjanjian kerja sama antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Capaian persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri sebesar 100 persen melalui kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi Lokasi Transmigrasi di Kimtrans Mahalona SP.1 Kabupaten Luwu Timur, Kimtrans Mahalona SP.1 SKP C Kabupaten Luwu Timur, dan Kimtrans Lantang Tallang Kabupaten Luwu Utara. Capaian persentase ketersediaan data sarana dan prasarana sebesar 100 persen melalui tersedianya Data dan informasi luas lahan permukiman transmigrasi, dan jumlah lokasi transmigrasi.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan transmigrasi tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.105.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penempatan transmigrasi	%	100	100	0	100	100
Persentase Transmigrasi yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	%	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan data sarana dan prasarana transmigrasi	%	100	100	100	100	100
Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2023

2.3.3.8. Kelautan dan Perikanan

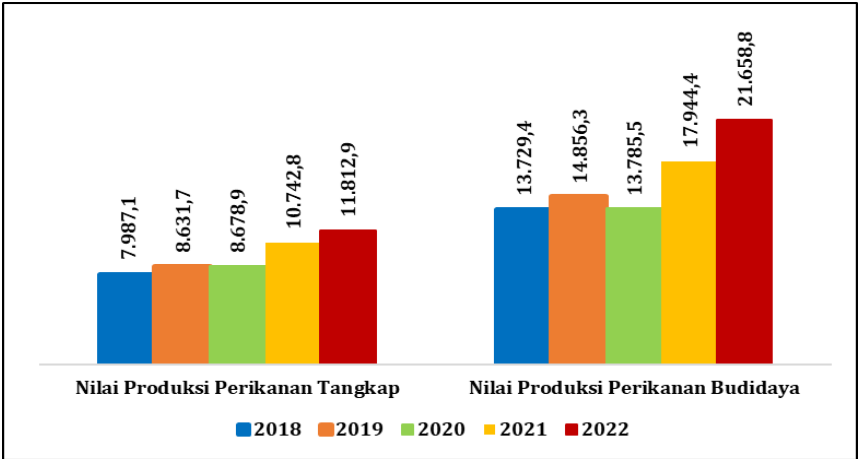
Produksi garam rakyat tahun 2018 hingga 2020 mengalami tren fluktuasi dimana capaian tertinggi produksi garam rakyat pada tahun 2019 kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 yang disebabkan karena tingginya curah hujan yang menghambat proses produksi serta bencana banjir yang terjadi pada sentra produksi garam di Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Jeneponto. Dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan pengadaan sarana ionisasi garam bagi kelompok usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, dan Takalar, serta pengadaan dan sarana prasarana inovasi usaha garam bagi kelompok usaha di Kabupaten Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan Selayar. Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadaan sarana prasarana usaha garam kapasitas 100 ton yang berumber dari DAK di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan.

Capaian persentase pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai dengan standar operasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh usaha perbaikan sarana pelabuhan perikanan yang terus dilaksanakan baik melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN. Nilai produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan ditahun 2021 seiring dengan peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2021. Kondisi ini didorong oleh kontribusi dari komoditi budidaya bandeng dan rumput laut yang cukup baik. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan tahun 2022 mencapai 49,49 persen, meskipun demikian belum mencapai target disebabkan terkendala pada persyaratan administrasi proposal, ketidak sesuaian lokasi yang diusulkan dengan yang dipersyaratkan, kontruksi tambatan perahu yang diusulkan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Upaya yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan pihak penyuluh untuk pendampingan dan pembinaan kelompok dan verifikasi awal pemenuhan syarat penerima bantuan.

Luas kawasan konservasi yang dikelola Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2019 hingga 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 67,29 persen. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas: 1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi Pulau Lanjukang di sebagian perairan sekitar Pulau Lanjukang di Kota Makassar, Pulau Sembilan di sebagian perairan sekitar Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai, Pulau Tanakeke di sebagian perairan sekitar Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar, Pulau Panikiang di sebagian perairan sekitar Pulau Panikiang di Kabupaten Barru, Liukang Tangaya di sebagian perairan sekitar Kecamatan Liukang Tangaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pulau Kakabia di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 2) Kawasan konservasi perairan yang meliputi Teluk Bone di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, Bilongka di Kabupaten Luwu, Liukang Tuppabiring di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanalili di Kabupaten Luwu Utara, dan kawasan konservasi perairan daerah Malili di Kabupaten Luwu Timur. Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2022 mencapai 100,19 persen dimana terdapat perubahan data baseline awal yang kemudian disesuaikan dengan luas kawasan konservasi perairan daerah yang telah ditetapkan baik melalui SK Pencadangan KKPD oleh gubernur dan Penetapan KKPD oleh Menteri KKP RI.

Tahun 2019 hingga 2022 capaian persentase pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 68,42 persen yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional PPI, penetapan kelembagaan dan petugas kesyahbandaran untuk mengoptimalkan pelayanan di pelabuhan. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan tahun 2022 antara lain tempat pemasaran ikan di PPI Lonrae Kabupaten Bone, pelelangan ikan di TPI Sumpangbinangae Kabupaten Barru, pembangunan jalan kompleks di PPI Lonrae Kabupaten Bone, tempat pemasaran ikan di PPI Beba Kabupaten Takalar, dan pekerjaan jaringan dan instalasi listrik di PPI Beba Kabupaten Takalar.

Grafik II. 128.
Nilai Produksi Perikanan (Milyar Rupiah)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

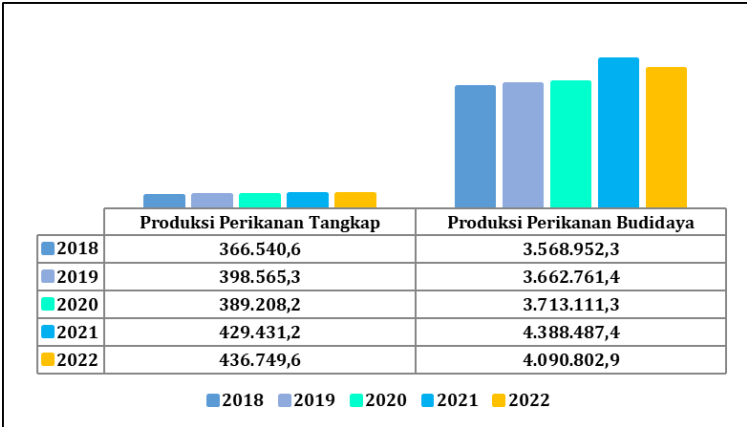


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Nilai produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 seiring dengan peningkatan nilai hasil tangkapan nelayan. Selain didukung oleh meningkatnya penyediaan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap serta modernisasi alat tangkap bagi nelayan, peningkatan nilai produksi perikanan tangkap merupakan dampak dari peningkatan produksi perikanan tangkap khususnya komoditi Tuna, Cakalang, Tongkol. Tahun 2022 penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap melalui penyediaan kapal perikanan tangkap Kapal > 5 GT untuk kelompok nelayan di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Bulukumba, Luwu, Takalar, serta pengadaan alat tangkap dan mesin untuk kelompok nelayan di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Nilai produksi perikanan budidaya mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022 dimana tahun 2022 merupakan nilai produksi perikanan budidaya tertinggi pada periode tersebut yang mencapai 21.658,79 milyar rupiah. Nilai produksi perikanan budidaya yang terus meningkat merupakan dampak dari peningkatan nilai produksi budidaya rumput laut.

Grafik II. 129.
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



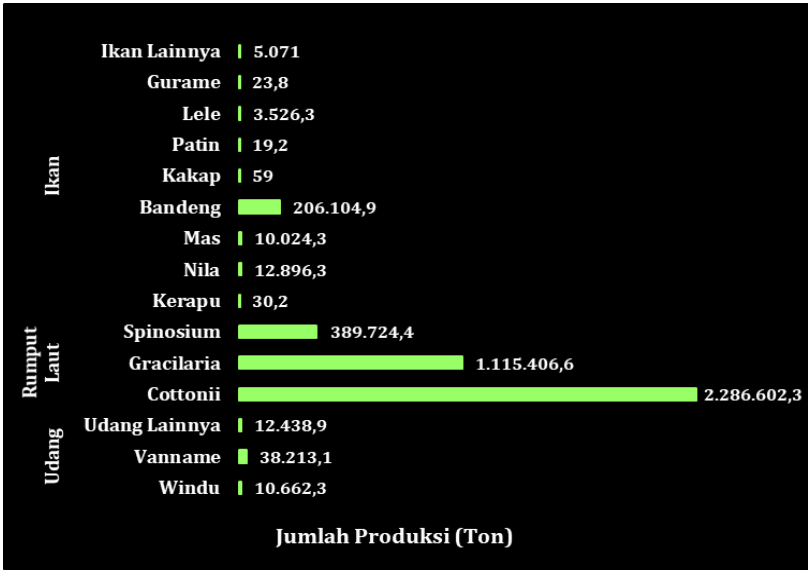
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tahun 2019 hingga 2022 produksi perikanan tangkap mengalami tren peningkatan dengan jumlah produksi sebesar 436.749,6 ton pada tahun 2022. Beberapa hal yang diperkirakan berdampak pada peningkatan hasil tangkapan adalah meningkatnya pelayanan dipelabuhan sehingga jumlah kapal yang berlabuh di PPI meningkat dan kegiatan tersebut dapat tercatat dengan baik, bantuan sarana penangkapan ikan kepada 64 kelompok berupa kapal, mesin, alat tangkap (jaring, pancing, purse seine, gill net, perangkat kepiting, alat tangkap pancing rawai) dan alat bantu tangkap (fish finder, rumpon) yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kota Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Maros, Takalar, Luwu Utara, Bantaeng, Luwu, Bulukumba, Bone, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, dan Jeneponto.

Tahun 2018 hingga 2021 produksi perikanan budidaya mengalami tren peningkatan sebagai dampak dari aktivitas budidaya perikanan baik budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya ikan air tawar yang berkembang dengan baik dan didukung oleh usaha mengembalikan kejayaan udang windu yang

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang mendorong peningkatan hasil budidaya khususnya udang. Penyediaan sarana percontohan budidaya udang windu di Kota Makassar, Kabupaten Bone, Barru, Bulukumba, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Takalar, Wajo, Gowa, dan Sinjai.

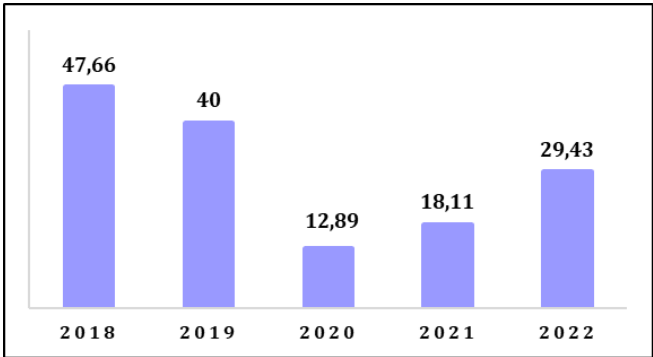
Grafik II. 130.
Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Untuk mendukung peningkatan produksi budidaya rumput laut, udang dan bandeng dilaksanakan pembinaan kelompok pembudidaya berupa bantuan sarana prasarana rumput laut di Kabupaten Pangkep, Luwu, Luwu Timur, Sinjai, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Luwu Utara, Sinjai, dan Kota Palopo serta bantuan sarana prasarana udang windu di Kabupaten Bone, Barru, Bulukumba, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Takalar, Wajo, Gowa, Sinjai, dan Kota Makassar pada tahun 2022. Namun demikian pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sebesar 297.684,5 ton dari tahun 2021.

Grafik II. 131.
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

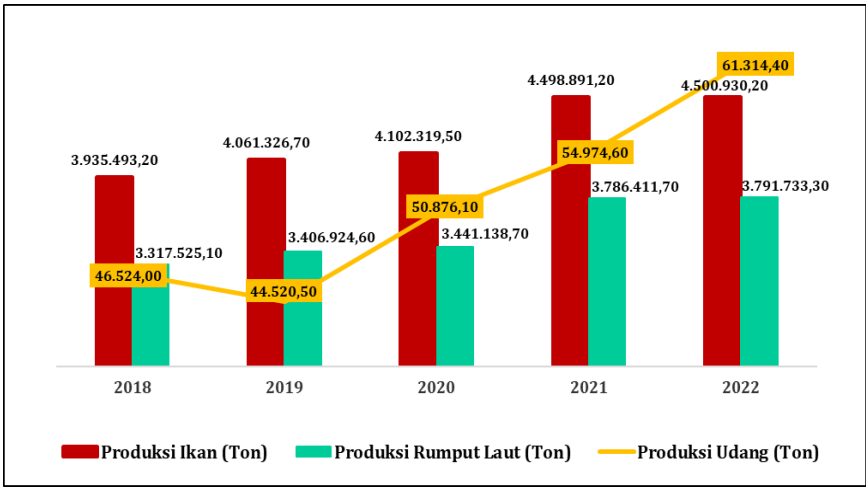


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan, namun capaian tertinggi persentase produksi kelompok nelayan pada tahun 2018 mencapai 47,66 persen. Pengaruh

perubahan cuaca ekstrim yang menghambat aktivitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan yang sering terjadi menyebabkan terjadinya penurunan produksi kelompok nelayan. Capaian tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa produksi perikanan dari kelompok nelayan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan produksi perikanan yang berasal bukan dari kelompok nelayan seperti perusahaan penangkapan yang diusahakan oleh pihak swasta, serta produksi ikan yang berasal dari kegiatan budidaya perikanan. Jumlah produksi ikan kontribusi kelompok nelayan tahun 2022 mencapai 128.535,41 ton dari total jumlah produksi ikan di daerah sebesar 436.749,6 ton. Produksi ikan, rumput laut dan udang kelompok nelayan tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan.

Grafik II. 132.
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

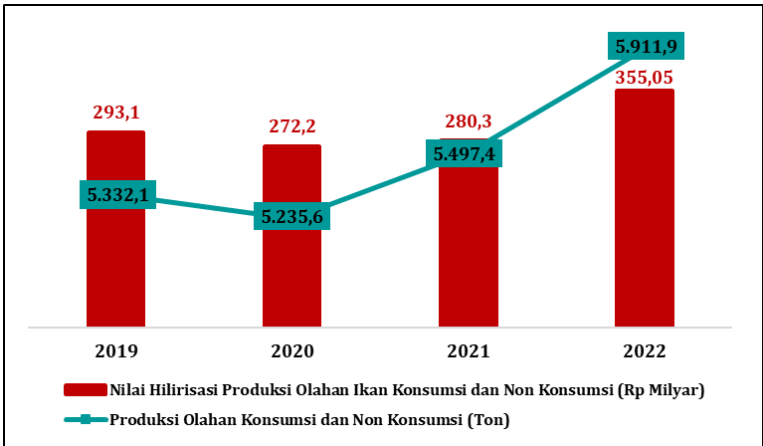
Persentase ketersediaan benur berkualitas mengalami penurunan pada dua tahun terakhir yang dipengaruhi oleh kondisi perubahan iklim yang cukup ekstrim sehingga mempengaruhi pertumbuhan kualitas benur pada lokasi-lokasi pembenihan yang ada. Selain itu penurunan ketersediaan benur berkualitas dipengaruhi oleh sarana produksi (kolam perbenihan) sedang direhabilitasi, sering terjadi gagal panen akibat serangan penyakit dan fluktuasi suhu yang tidak stabil. Upaya yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan sarana prasarana produksi, meningkatkan kualitas benur dan membuat jaminan bebas virus melalui hasil Uji PCR, monitoring kualitas air secara periodik agar perubahan suhu dapat lebih cepat tertangani dan dikendalikan.

Cakupan bina kelompok nelayan tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana capaian tahun 2022 merupakan capaian tertinggi pada periode tersebut yaitu 29,43 persen. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah persyaratan teknis bantuan tidak dapat dipenuhi oleh kelompok yang diusulkan. Selain itu keterbatasan anggaran karena untuk mendukung program prioritas lainnya seperti penyediaan sarana prasarana pelabuhan sehingga pengalokasian anggaran tidak sepenuhnya terpenuhi untuk pembinaan kelompok nelayan. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pemenuhan persyaratan kelompok adalah koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan

penyuluhan untuk usulan kelompok nelayan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengalami peningkatan disebabkan bertambahnya jenis komponen pelaku usaha yang diperiksa dan bertambahnya pelaku usaha yang diperiksa dengan tingkat kepatuhan yang meningkat. Kendala yang dihadapi adalah dari hasil patroli mayoritas kapal yang diperiksa tidak patuh terkait dokumen/izin kapal. Upaya yang dilakukan adalah membuka gerai perizinan di Pelabuhan dan CDK untuk memudahkan nelayan untuk mengakses pengurusan dokumen kapal/perizinan kapal yang dibutuhkan.

Grafik II. 133.
Nilai Hilirisasi dan Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Capaian nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, meskipun nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh proses pemulihan ekonomi yang baru mulai pasca pandemic covid 19 ditahun 2021 termasuk halnya disektor perikanan. Tahun 2022 nilai hilirisasi produksi olahan yang terus meningkat dampak dari peningkatan produksi olahan. Selain itu pada tahun 2022 terjadi lonjakan harga produk olahan rajungan.

Capaian produk olahan konsumsi dan non konsumsi dari sektor perikanan menunjukkan capaian telah mengalami peningkatan setelah sebelumnya ditahun 2020 sedikit menurun dibanding capaian tahun 2019 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Hal ini didorong oleh meningkatnya produksi kelompok pengolah hasil perikanan dan pembinaan yang dilakukan untuk mendorong keterampilan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan dengan menghasilkan olahan berupa keupuk ikan, abon ikan, hasil olahan rumput laut dan lain sebagainya, termasuk hasil olahan non konsumsi seperti kerajinan tangan dari kulit kerang yang mulai dikembangkan khususnya pada obyek-obyek wisata laut. Tahun 2022 produksi olahan konsumsi dan non konsumsi terus meningkat didukung jumlah UPI di Sulawesi Selatan sebanyak 1.353 UPI.

Capaian bina mutu produk perikanan menunjukkan capaian yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Saat ini tidak ada

penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan sertifikat kesehatan (health certificate) dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan ke UPT BKIPM KKP berdasarkan UU 23 tahun 2014, terdapat peralatan pengujian rusak. Upaya yang akan dilakukan berupa koordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan akan diusulkan alokasi anggaran untuk perbaikan peralatan pengujian.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.106.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produksi garam rakyat	Ton	86.712	140.338,87	45.310,5	1.155,2	3.282,93
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan	%	0	6,52	8,70	28,28	49,49
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan	Klp	50	55	21	60	86
Jumlah Kelompok nelayan	Klp	311	314	314	314	314
Cakupan Bina kelompok nelayan	%	16,08	17,52	6,69	18,47	27,39
Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	173.412	174.620	50.174,24	77.770,07	128.535,41
Jumlah Produksi ikan di daerah	Ton	366.541	436.551	389.208.20	429.431,20	436.749.6
Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	47,66	40	12,89	18,11	29,43
Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	%	0	67,28	67,29	67,29	100,19
Nilai produksi perikanan tangkap	Rp Milyar	7.987,1	8.631,7	8.678,9	10.742,8	11.812,9
Produksi perikanan tangkap	Ton	366.540,6	398.565,3	389.208,2	429.431,2	436.749,6
Persentase Pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana sesuai standar operasional	%	0	15,79	47,37	63,16	68,42
Nilai Produksi perikanan budidaya	Rp Milyar	13.729,4	14.856,3	13.785,5	17.944,4	21.658,79
Produksi perikanan budidaya	Ton	3.568.952,3	3.662.761,4	3.713.111,3	4.388.487,4	4.090.802,9
Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	Belum diukur	90	100,65	96,9	78,51
Persentase Kepatuhan pelaku usaha kp terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	Belum diukur	50,13	63,07	69,18	95,15
Nilai Hilirisasi produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp Milyar	Belum diukur	293,1	272,2	280,3	355,05

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	0	5.332,1	5.235,6	5.497,4	5.911,6
Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	%	-	20,11	40	53,77	69,05

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Program prioritas RPJMD Perubahan 2018-2023 sejumlah 63 program yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah. Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah tahun 2019 hingga 2022 mencapai 100 persen. Pada tahun 2022 Biro Organisasi telah memfasilitasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terbit produk hukum dan rancangan produk hukum terkait penataan kelembagaan perangkat daerah, antara lain :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- e. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Unit Pengelola Islamic Centre Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Unit Pengelola Centre Point Of Indonesia Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Unit Layanan Brigade Siaga Bencana Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. Dokumen Keterangan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- j. Tersusunnya daftar usul Penyesuaian Jabatan Fungsional hasil penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- k. Tersusunnya proposal urgensi Rencana Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Urusan pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi melalui kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah, dan fasilitasi kerjasama daerah tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen dimana sejumlah urusan pemerintahan, yaitu:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal dan Investasi, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.
- c. Urusan Pilihan: Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi, Kelautan dan Perikanan.

Segmen batas yang terselesaikan sejak tahun 2019 hingga 2021 yang menjadi urusan Biro Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel II.107.
Segmen Batas yang Terselesaikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

No	Segmen	Pengesahan
1	Kab.Maros – Kota Makassar	Permendagri 40 Tahun 2019
2	Kota Makassar – Kab.Takalar	Permendagri 41 Tahun 2019
3	Kab.Gowa – Kab.Maros	Permendagri 42 Tahun 2019
4	Kab.Jeneponto – Kab.Takalar	Permendagri 77 Tahun 2019
5	Kota Pare-Pare – Kab.Sidrap	Permendagri 42 Tahun 2020
6	Kab.Pinrang – Kab. Sidrap	Permendagri 43 Tahun 2020
7	Kab.Enrekang – Kab. Sidrap	Permendagri 44 Tahun 2020
8	Kab.Wajo – Kab. Luwu	Permendagri 14 Tahun 2021
9	Kab.Bone – Kab. Sinjai	Permendagri 15 Tahun 2021

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Prov.Sulsel, Tahun 2023

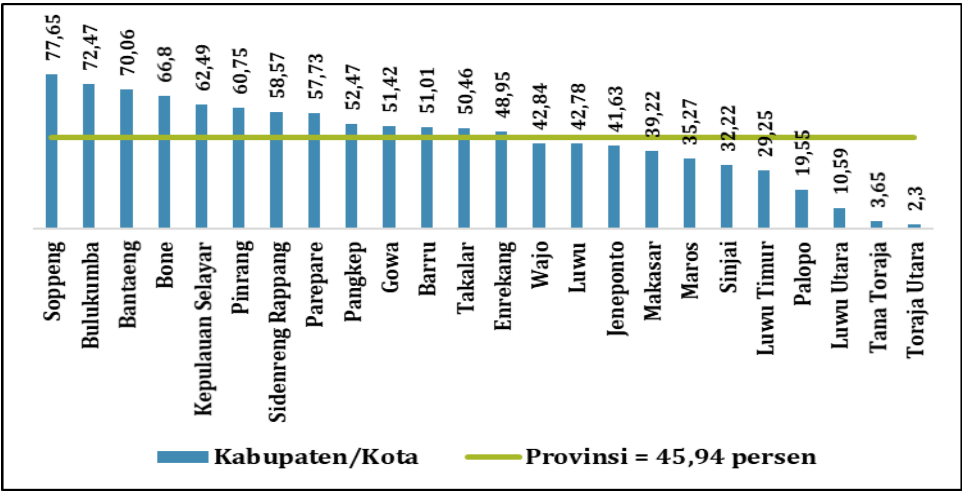
Tahun 2022 tidak ada segmen batas yang terselesaikan dimana sejumlah 21 segmen masih dalam tahapan Penetapan Permendagri serta sejumlah 16 segmen batas tahapan penyusunan Draft Permendagri, sehingga masih membutuhkan fasilitasi rapat pembahasan dengan tim PBD Pusat, PBD Provinsi, dan PBD Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020 persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan mencapai 90,59 persen, namun pada tahun 2021 hanya mencapai 80 persen. Hal tersebut disebabkan karena terdapat rumusan kebijakan yang masih dalam proses yaitu pemberian diskon penerbangan

untuk ruter penerbangan Balikpapan-Tana Toraja. Faktor Pendukung peningkatan persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan adalah pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dapat dimaksimalkan. Tahun 2019 dan 2020 bantuan hibah yang diberikan hanya untuk sarana keagamaan, masing-masing sejumlah 130 bantuan hibah sarana keagamaan pada tahun 2019 dan sejumlah 24 bantuan hibah sarana keagamaan pada tahun 2020. Tahun 2021 bantuan hibah sebesar Rp. 8.545.000.000,- diberikan kepada sejumlah 32 lembaga keagamaan, Rp. 31.397.000.000,- diberikan kepada sejumlah 287 sarana keagamaan, serta Rp. 5.750.000.000,- diberikan kepada 12 lembaga pendidikan. Tahun 2022 dihasilkan 8 dokumen rumusan kebijakan dari 9 dokumen yang ditargetkan atau dengan capaian 88,89 persen. Sedangkan bantuan hibah sebesar Rp. 13.135.000.000,- diberikan kepada 34 lembaga keagamaan, Rp. 20.860.000.000,- diberikan kepada sejumlah 231 sarana keagamaan, serta Rp. 3.250.000.000,- diberikan kepada sejumlah 5 lembaga pendidikan pada tahun 2022.

Tahun 2018 hingga 2022 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Qur'an mengalami tren peningkatan. Namun pada tahun 2020 seiring dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia mengakibatkan pergerakan masyarakat yang dibatasi termasuk dunia Pendidikan sehingga mengalami penurunan -4,17 persen dari tahun 2019 yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 setelah pemerintah mulai melonggarkan pergerakan masyarakat. Faktor Pendukung Peningkatan Persentase usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al Quran, antara lain: a) Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan calon siswa tingkat SMP untuk menyetorkan sertifikat mengaji; b) Peningkatan sarana prasarana rumah ibadah (masjid) melalui bantuan hibah.

Grafik II. 134.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Melek Aksara Al-Qur'an
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pada tahun 2022 penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran mencapai 45,94 persen dimana penduduk perempuan usia 15 tahun ketas yang melek aksara Al-Quran sebesar 46,69 persen lebih tinggi daripada penduduk laki-laki usia 15 tahun ketas yang melek aksara Al-

Quran sebesar 45,14 persen. Angka penduduk usia 15 tahun ketas yang meleak aksara Al-Qur'an pada tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan capaian 77,65 persen serta yang terendah di Kabupaten Toraja Utara sebesar 2,3 persen dan Tana Toraja sebesar 3,65 persen karena mayoritas penduduk di kabupaten tersebut non muslim.

Kejahatan kesusilaan di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana berdasarkan data statistik kriminal, diperoleh jumlah kasus kejahatan kesusilaan pada tahun 2018 sebesar 316 kasus, kemudian meningkat menjadi 371 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebagaimana data yang dirilis BPS melalui Statistik Politik dan Keamanan Sulawesi Selatan akumulasi kejahatan pemerkosaan dan kesusilaan sebanyak 305 kasus. Tahun 2021 jumlah kasus jahatan terhadap kesusilaan mengalami penurunan sebanyak 208 kasus kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sejumlah 302 kasus kejahatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kesusilaan yang ada ditengah-tengah masyarakat tentu merupakan hal yang positif, meskipun dari hal tersebut ikut mempengaruhi peningkatan kasus kesusilaan yang dilaporkan, namun secara tidak langsung dapat mempengaruhi penurunan kasus kedepannya, karena dengan adanya laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penangkapan pelaku untuk selanjutnya diproses secara hukum.

Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada penataan peraturan perundang-undangan dicapai melalui upaya pemenuhan dokumen pendukung untuk penilaian reformasi birokrasi pada penataan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a) Menginventarisasi dan mengidentifikasi Perda tahun 2018-2020; b) Inventarisasi 22 Pergub yang telah dicabut; c) Identifikasi Perda yang tidak harmonis sejumlah 10 Perda; d) Tindak lanjut hasil identifikasi Perda yang tidak harmonis; e) Menyusun Analisis Kebutuhan Perda tahun 2023; dan f) Menyusun Daftar Perda dan Pergub tahun 2022. Berdasarkan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Nomor B/741/RB.06/2022 Tanggal 6 Desember 2022, Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, maka dapat diketahui untuk komponen penilaian Pengungkit terdapat peningkatan kualitas hasil antara pada tahun 2022 meskipun tidak tercantum nilai penataan peraturan perundang-undangan pada dokumen hasil penilaian, namun nilai dari reformasi hukum yang dikeluarkan oleh kemenkumham diperoleh nilai sangat memuaskan, sehingga nilai untuk penataan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target RPJMD untuk tahun 2022 dengan nilai 4 pada penataan peraturan perundang-undangan.

Capaian indikator persentase perkara hukum yang difasilitasi pada tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen melalui pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM. Jumlah Perkara yang ditangani Biro Hukum pada tahun 2022 sejumlah 21 perkara yang terdiri atas 4 perkara PTUN dan 17 Perkara Perdata. seluruh perkara telah ditangani oleh Biro Hukum diantaranya: a) Perkara perdata yang sementara proses PK tergugat sejumlah 3 perkara; b) Perkara Perdata Sementara proses Kasasi penggugat sejumlah 1 perkara; c) Perkara Perdata sementara proses banding tergugat sejumlah 4 perkara; dan d) Perkara

perdata sementara proses Pengadilan Negeri Makassar sejumlah 3 perkara. Sedangkan sejumlah 9 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,32 persen capaian indikator rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan dicapai melalui penguatan ketersediaan pasokan di kabupaten/kota dengan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan pangan strategisnya. Bupati/Walikota dan Anggota TPID senantiasa memantau harga pangan agar stabilitas pangan kabupaten/kota terkendali. Untuk menjaga stabilitas pangan strategis maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat melaksanakan operasi pasar dan pasar murah yang bekerjasama dengan Bulog, distributor dan agen dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada Hari Besar Keagamaan. Perlunya pengawasan dilaksanakan oleh TPID Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satgas Pangan, sehingga tidak terjadi penimbunan komoditas pangan yang dapat menyebabkan inflasi. Mendorong digitalisasi Sistem Informasi Harga Pangan yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Bersama dengan FORKOPIMDA melakukan pengawasan terhadap penyaluran, Ketersediaan, Stabilitas Harga dan Ketersediaan BBM dan gas Elpigi 3 kg baik di Sulawesi Selatan. Bupati/Walikota bekerjasama dengan ulama/pemuka agama agar masyarakat tidak melakukan konsumsi yang berlebihan selama Natal dan Tahun Baru. Bupati/Walikota melakukan MOU dengan Bulog terkait penjualan beras bagi ASN agar dapat mendorong penyerapan gabah di kabupaten/kota.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah yang menjadi tonggak capaian lima tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan target pembangunan. Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah sebesar 98 persen selama 3 tahun terakhir melalui pelaksanaan program Ranperda Perubahan Penyertaan Modal Pemda, Ranperda Perubahan Bentuk Perusda Agribisnis ke Perseroda, Ranperda Pendirian PI, Pergub tentang Optimalisasi Manajemen RS dengan sistem BLUD. Tersedianya dokumen pendukung kebijakan Bidang Perekonomian, dokumen pendukung kebijakan Bidang Pelayanan Dasar, dokumen pendukung kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar, meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah, meningkatnya capaian kinerja Program Perangkat Daerah, serta terpenuhinya Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (temuan bahan material).

Capaian target persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah pada tahun 2021 sebesar 99,94 persen belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor penghambat pencapaian target antara lain kurangnya ketelitian admin SiRUP dalam melakukan penginputan kegiatan yang akan dilelang/dipihakketigakan. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya capaian persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pada tahun 2022 mencapai 100 persen dimana pengadaan berdasarkan RUP yang diusulkan masing-masing OPD sudah berproses melalui UKPBJ sehingga capaianpengadaan barang/jasa mencapai target yang ditetapkan. Jumlah paket pengadaan di SIRUP sebesar 12.133 paket yang terdiri

dari 243 paket proses tender/seleksi, 9.033 paket pengadaan langsung, 94 paket penunjukan langsung, 2.685 paket ePurchasing, dan 78 paket dikecualikan.

Tahun 2021 capaian persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa belum mencapai target dengan capaian 99 persen disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya: a) masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian masalah, b) prasarana dan sarana yang belum memadai, c) keterbatasan petugas pelayanan. Mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa sebesar 98,66 persen. Dalam penilaian survey kepuasan pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa tahun 2022 dimana persentase survey kepuasan layanan mencapai nilai rata-rata 98,66 persen diperoleh pada pengisian survey layanan. Berdasarkan nilai yang dicapai, maka dalam hal pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai persentase kepuasan layanan yaitu adanya penambahan pengguna layanan sedangkan sarana dan prasara kurang memadai. Tahun 2022 capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan nilai 72,40 dengan kategori BAIK, mengalami peningkatan nilai indeks dari tahun 2021 dengan nilai 71,55 dengan kategori BAIK.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan sekretariat daerah tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.108.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100	100
Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100
Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	90,59	80	88,89
Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran	%	36,36	36,67	35,14	39,22	45,94
Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan	%	316 kasus	17 (371 kasus)	20 (305 kasus)	34,17 (208 kasus)	4,43 (302 kasus)
Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	Angka	2,29	2,4	2,4	3,9	4
Persentase Perkara Hukum	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
yang difasilitasi						
Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	60	65	70	75	79,32
Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	%	97	97	98	98	98
Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99,94	100
Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99	98,66

Sumber: OPD Lingkup Sekretariat Daerah, Tahun 2023

2.3.4.2. Sekretariat Dewan

Waktu pembahasan setiap RNAPERDA dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga dalam proses pembahasannya yang cukup lama sehingga persentase PROLEGDA yang terealisasi belum mencapai target pada tahun 2021 atau sebesar 73,33 persen. Ketidaksiapan OPD pemrakarsa Ranperda dalam menyiapkan dokumen Naskah Akademik dan Draft Ranperda sebagai kelengkapan dalam pengajuan Ranperda serta Ranperda yang diajukan tidak tepat sehingga pada tahun 2022 persentase PROLEGDA yang terealisasi mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 2,23 persen atau dengan capaian sebesar 73,33 persen.

Seluruh program kerja DPRD terintegrasi dengan RPJMD 2018-2023 dan RKPD sehingga capaian target kinerja tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen.

Salah satu tugas DPRD adalah pembahasan rancangan PERDA sebelum ditetapkan diantaranya KUA PPAS dan APBD. Capaian kinerja persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya tahun 2018 hingga tahun 2020 mencapai 100 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian 75 persen. Jumlah Ranperda yang terproses pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) berjumlah 18 Ranperda dengan rincian sejumlah 11 Ranperda telah selesai dibahas, sejumlah 2 Ranperda masih dalam tahapan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah 5 Ranperda dalam tahap konsultasi di Kemendagri sehingga capaian persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya pada tahun 2022 mencapai 100 persen.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan sekretariat dewan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.109.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Dewan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PROLEGDA yang terealisasi	%	3,33	81,25	37,5	75	73,33
Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100
Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	%	100	100	100	75	100

Sumber : Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.3. Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terdapat 223 (dua ratus dua puluh tiga) Program dan berdasarkan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 terdapat 223 program.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 terdapat 223 program dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8) terdapat 222 program.

Tahun 2022 persentase peningkatan capaian kinerja program seluruh perangkat daerah sebesar 0,5 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pencapaian target didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan serta koordinasi antara TAPD dan Perangkat Daerah yang dilakukan secara rutin.

Kesesuaian Program Perangkat Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada tahun 2022 telah mencapai target tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung dimana terjalinnya koordinasi yang baik antara OPD mitra pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mulai dari tahap Penyusunan sampai Monitoring dan Evaluasi.

Kesesuaian Program Perangkat Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA pada tahun 2022 telah mencapai target tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung dimana terjalinnya koordinasi yang baik antara OPD mitra pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA mulai dari tahap Penyusunan sampai Monitoring dan Evaluasi.

Kesesuaian Program Perangkat Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada tahun 2022 telah mencapai target tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung

dimana terjalinnya koordinasi yang baik antara OPD mitra pelaksana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mulai dari tahap Penyusunan sampai Monitoring dan Evaluasi.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan perencanaan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.110.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perencanaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD	%	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan capaian kinerja program	%	-8,62	5,54	-8,49	3,68	0,5
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang PPM	%	100	100	100	100	80
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA	%	100	100	100	100	90
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	99	90

Sumber : BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.4. Keuangan

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Persetujuan bersama Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni disetujui bersama pada tanggal 30 November 2022. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan, kordinasi dan sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Ranperda APBD dapat disetujui bersama tepat waktu yakni 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota. Berdasarkan capaian tahun 2022 ini terlihat bahwa 24 kabupaten/kota telah menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD tepat waktu hal ini di dorong dengan komitmen yang tinggi dari kabupaten/kota untuk dapat menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan capaian tahun 2022 sejumlah 24 kabupaten/kota telah menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban APBD tepat waktu hal ini di dorong dengan komitmen yang tinggi dari kabupaten/kota untuk dapat menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan data realisasi belanja daerah tahun 2022 hingga Desember dari alokasi belanja daerah sebesar Rp. 9.561.417.164.808,00, telah terealisasi sebesar Rp. 8.957.991.587.570,32 atau capaian sebesar 93,69 persen. Dari capaian tersebut terlihat bahwa Persentase Serapan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik dan di harapkan mampu mencapai target setelah Realisasi Belanja APBD Audited, Kemampuan daerah untuk menyerap belanja sesuai target sangat di tentukan oleh pencapaian target pendapatan. Realisasi Belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang signifikan hingga awal Desember pada akhir tahun anggaran 2022. Persentase serapan belanja daerah tahun anggaran 2022 akan terus naik dengan pengimputan realisasi pada tiap-tiap OPD perangkat Daerah terkhusus pada pengimputan realisasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan baik di Lembaga Pendidikan maupun Bantuan Operasional Sekolah sehingga Persentase serapan belanja daerah dapat mencapai target 95 persen. Pencapaian realisasi anggaran ini tidak lepas dari komitmen pimpinan terkait kinerja pendapatan dan percepatan serapan anggaran disetiap OPD yang terkait dengan prioritas dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan capaian tahun 2022 Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat waktu . Hal ini dapat di capai dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat disampaikan tepat waktu yakni 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Manajemen Aset daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan area intervensi yang mengelola dan menentukan rentang dan tingkat aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis dan target kinerja pengelolaan barang milik daerah yang ingin dicapai. Dilihat dari data manajemen aset daerah badan keuangan dan aset daerah pada area intervensi yang terbagi dari beberapa indikator antara lain data base aset, pengelolaan aset, sertifikasi aset dan penertiban aset yang mencapai 91,53 persen yang telah mencapai target yang telah di tentukan. Pencapaian ini tidak lepas dari proses pengelolaan, inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah serta peran dari tiap-tiap perangkat daerah yang aktif dalam mendukung kegiatan rekonsiliasi aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait dengan bidang tanah yang bersertifikat, Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan permohonan penerbitan Sertifikat tanah kepada 24 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, progres persertifikatan tanah pemerintah provinsi Sulawesi selatan berjumlah 916 bidang tanah dengan rincian 742 bidang tanah yang telah bersertifikat dan 174 bidang tanah yang belum bersertifikat. Persentase Tanah Pememerintah Provinsi yang Telah bersertifikat yang di targetkan dalam dokumen perencanaan telah mencapai target dengan capaian 81,04 % Dari capaian kinerja yang telah dihasilkan. Ada beberapa faktor yang mendorong pencapaian tersebut antara lain dukungan dari Korsupgah KPK melalui Rencana Aksi Program Penertiban Aset Daerah, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) atas penanganan hukum secara litigasi/non litigasi terhadap penyelesaian aset bermasalah serta Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang Pertanahan yang memperlancar proses inventarisasi dan pengamanan dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh BKAD dan pengelola barang di seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel juga turut andil dalam membantu menghimpun dan menertibkan administrasi pengelolaan barang dan aset daerah yang dimiliki dengan memanfaatkan sistem informasi. Meskipun demikian masih ada juga beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam pengelolaan aset ini yakni terkait masih adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan

tersebut, demikian juga beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertifikatkan selain atas nama Pemerintah Provinsi.

Capaian untuk indikator opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan capaian yang sesuai target yang diharapkan yaitu WTP setelah sebelumnya mendapat opini WDP pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material serta lancer dalam melakukan pengendalian intern yang memadai. Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.111.
Opini BPK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

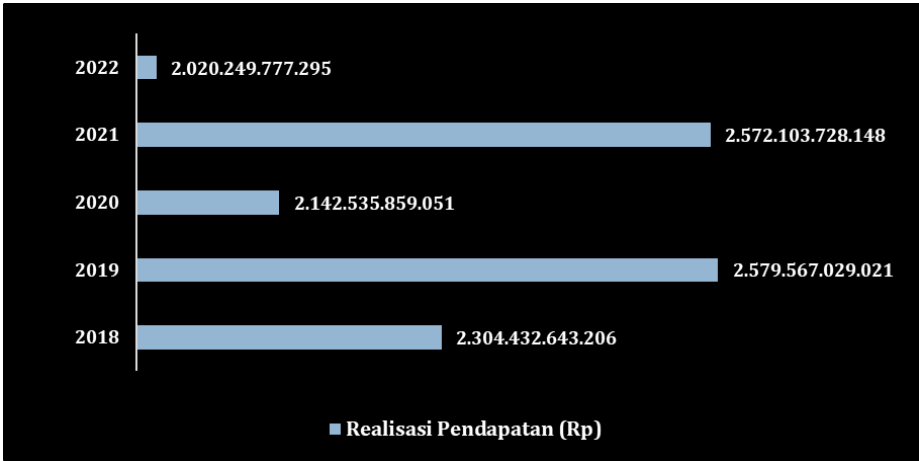
Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	%	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI, 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian Pendapatan Daerah dibandingkan dengan komponen pendapatan transfer dan komponen lain lain Pendapatan Daerah yang sah, hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. AD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setelah merebaknya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan PAD pada tahun 2020, pengelolaan PAD pada tahun 2021 berhasil meningkat kembali sebagai dampak titik balik mulai pulihnya perekonomian negara dan daerah. Hal ini tergambar dari persentase peningkatan PAD tahun 2021 dari target sebesar 5 persen, dapat dicapai sebesar 14,88 persen. Realisasi penerimaan PAD tahun 2021 juga telah melampaui realisasi PAD pada masa sebelum pandemi di 2019. Capaian persentase peningkatan PAD tersebut ditunjang oleh pertumbuhan pembayaran pajak yang merupakan hasil upaya digitalisasi pembayaran pajak secara non tunai diantaranya melalui QRIS yang sejalan dengan kebutuhan wajib pajak di masa pandemi. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah juga ditunjang kenaikan harga nikel serta membaiknya mobilitas masyarakat yang berdampak pada naiknya konsumsi BBM. Selain pajak daerah, pertumbuhan PAD yang tinggi pada tahun 2021 juga didukung meningkatnya penerimaan sektor Lain-Lain PAD yang Sah berupa pembayaran klaim pada unit-unit Rumah Sakit Daerah yang berstatus BLUD serta hasil upaya optimalisasi melalui pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi PAD melalui mekanisme sewa Barang Milik Daerah. Tahun 2022 persentase PAD terhadap Pendapatan mengalami peningkatan sebesar 21,16 persen dari tahun 2021 atau dengan capaian sebesar 54,1 persen. Secara Umum Capaian

Pendapatan yang dikelola masing masing UPT Pendapatan telah mencapai target sesuai yang diharapkan dengan capaian 97,47 persen pada periode Desember tahun 2022 dengan total realisasi pendapatan pada UPT pendapatan kabupaten/kota sebesar Rp. 2.020.249.777.298,-.

Grafik II. 135.
Realisasi Pendapatan pada UPT Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 3,11 poin dari capaian tahun 2020. Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terdapat 4 komponen penyusun pendataan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat komponen tersebut, factor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah komponen pajak daerah yang mengalami peningkatan 14,88 persen dan komponen retribusi daerah dengan peningkatan sebesar 14,39 persen.

Tabel II.112.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	42,67	43,23	41,54	44,65	54,1

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp. 4,86 Trilyun atau sebesar 94,38 persen dari target sebesar Rp. 5,15 Trilyun. Meski tidak mencapai 100 persen, namun dibandingkan tahun 2021 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp. 457,63 Trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,83 persen. Pajak Daerah berkontribusi sebesar 88,5 persen atas peningkatan PAD tahun 2022 dengan peningkatan terbesar bersumber dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kegiatan Masyarakat berupa angka, yang ditetapkan dengan

skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Untuk mendapatkan nilai IKM, yakni dengan membagi antara total dari nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, lalu hasilnya dikalikan nilai penimbang. Nilai IKM atas pelayanan pajak kendaraan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022 dengan capaian 79,98 persen pada tahun 2022.

Tabel II.113.
IKM Pelayanan Pajak Kendaraan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
IKM Pelayanan Pajak Kendaraan	%	Belum disurvey	77,1	76,63	79,26	79,98

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu di bidang pendapatan PAD tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen disebabkan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja telah dianalisis, disusun dan disahkan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan laporan dapat direviu oleh atasan dan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan keuangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.114.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Keuangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD untuk dievaluasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Serapan Belanja Daerah	%	96,37	95,58	88,87	94,5	93,69
Persentase Penyampaian Ranperda	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu						
Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	91,53	91,53
Persentase Tanah Pemprov yang sudah bersertifikat	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	56,22	81,62
Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100	100	100	100	100
Persentasi Peningkatan PAD	%	7,33	4,82	-6	14,06	9,58

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.5. **Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**

Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren fluktuatif dimana capaian tahun 2022 sebesar 63 persen belum mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pemenuhan Kebutuhan ASN dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui jalur CASN yaitu CPNS dan PPPK baik PPPK jabatan fungsional guru maupun PPPK jabatan fungsional lainnya. Pada tahun 2021, telah dibuka sekitar 349 formasi jalur CPNS, 63 Formasi jalur PPPK Jabatan Fungsional dan 8.350 formasi untuk jalur PPPK Jabatan Fungsional Guru. Tahun 2022 telah dibuka sekitar 10.463 Formasi jalur PPPK, 49 Formasi jalur PPPK Jabatan Teknis, 10,385 formasi untuk jalur PPPK Jabatan Fungsional Guru dan 29 formasi untuk jalur PPPK tenaga kesehatan. Penetapan formasi ini berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja, Jumlah ASN yang akan pensiun, Anjab dan ABK, serta prioritas pembangunan/potensi daerah. Adanya komitmen pimpinan dan staf, budaya organisasi serta peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengadaan CPNS maupun PPPK dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Persentase ASN yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional Berbasis Talenta Tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 90 persen meningkat sebesar 7,45 persen dari tahun 2021 melalui pelaksanaan Assestment terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Madya, Muda dan Pertama. Persentase ASN yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional Berbasis Talenta tahun 2021 sebesar 83,76 persen meningkat sebesar 1,76 poin dari tahun 2020 sebesar 82 persen melalui pelaksanaan Assestment terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Madya, Muda Dan Pertama. Pelaksanaan Assement ini dilaksanakan terhadap Pejabat Administrator,

Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang potensial dalam Pengisian Talent Pool dan Talent management telah di laksanakan sejak tahun 2020 guna mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Dimana ASN sebagai tokoh utama dalam menjalankan tugas pemerintahan wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pada tahun yang akan datang.

Dengan berlakunya Permenpan No.8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS diperlukan dukungan perangkat daerah untuk menyelesaikan penilaian pada masing-masing indikator penilaian yang terdapat pada aplikasi e-kinerja. Persentase ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik tahun 2021 sebesar 90,38 persen meningkat sebesar 0,38 poin dari tahun 2020 sebesar 90 persen disebabkan realisasi capaian kinerja pegawai secara kualitatif tercapai dan di tahun 2021 jumlah ASN mengalami Penurunan hal ini disebabkan adanya ASN yang sudah memasuki Usia Pensiun. Pada Tahun 2020 Jumlah ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik sebanyak 8.801 Orang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 8.852 Orang. Persentase ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan selama 3 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,86 persen dengan capaian sebesar 93 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini didukung oleh realisasi capaian kinerja pegawai secara kualitatif tercapai dan pada tahun 2022 jumlah ASN mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik sejumlah 8.852 Orang dan pada tahun 2022 sejumlah 9.728 Orang.

Mengalami peningkatan 1,12 poin dari tahun 2020 capaian target SDM aparatur yang lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural mencapai 100 persen pada tahun 2021. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur diperlukan penyusunan regulasi terkait norma standar prosedur dan kriteria pengembangan SDM. Jumlah Pejabat Struktural 1.575 orang, jumlah ASN Provinsi Sulawesi Selatan 22.975 orang, jumlah peserta yang telah mengikuti Diklat 262 orang. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2021 sebesar 0,17 persen. Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 yang mencapai 100 persen pada tahun 2022. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh terbentuknya model maupun metode baru terkait dengan pengembangan kompetensi ASN (Corporate University) serta mengimplementasikan sistem diklat satu pintu dimana BPSDM merupakan sebagai leading sektor dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.115.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	%	Belum diukur	57	56	63	63
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta	%	Belum diukur	80	82	83,76	90
Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	Belum diukur	88	90	90,83	93
Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	%	87,3	89,58	98,88	100	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian target indikator implementasi rencana kelitbangan disebabkan oleh kesesuaian program kelitbangan yang direncanakan pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 dengan program kelitbangan yang diturunkan ke RKPD Perubahan Tahun 2022. Sejumlah 17 kegiatan kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun 2022. Pengalokasian anggaran pada Bidang Penelitian dan Pengembangan didominasi oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan dalam pembangunan di Sulawesi Selatan serta kebutuhan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sejumlah 18 inovasi perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan yang terkirim ke Kementrian Dalam Negeri dibagi dengan 43 inovasi yang diusulkan dalam rangka pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Jumlah inovasi baik yang terkirim maupun yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan antusias dalam menghasilkan inovasi serta didukung oleh keseriusan Bappelitbangda mewujudkan pemerintah daerah yang inovatif melalui Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah dan Bimbingan Teknis/Coaching Penginputan IID. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada 6 OPD terinovatif pada Lomba Inovasi Tingkat OPD Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Bappelitbangda.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan penelitian dan pengembangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.116.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	%	11,32	11,32	5,67	11,32	11,32

Sumber: BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.7. Pengawasan

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 76,29 persen melampaui jumlah target tahun 2022 sebesar 75.4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komitmen inspektorat dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan regulasi dan peran komitmen pimpinan. Penyelesaian Tindaklanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP dilakukan dengan menyusun kegiatan monitoring ataupun koordinasi tindaklanjut sebagai upaya koordinasi intensif pengelolaan tindaklanjut dengan seluruh perangkat kerja.

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota mengalami tren fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022 dengan capaian sebesar 69,55 persen mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dari tahun 2021 yang mencapai 70,04 persen serta belum mencapai target yang ditetapkan. Belum tercapainya target persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Umum dan teknis kabupaten/kota disebabkan beberapa LHP atas Pemeriksaan Reguler kabupaten/kota terbit diakhir tahun sehingga belum dapat tertindaklanjuti sampai dengan tanggal 31 Desember.

Capaian persentase OPD yang Nilai SAKIPnya meningkat tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen. Inspektorat melakukan penilaian SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah. Hasil evaluasi capaian nilai SAKIP merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam memenuhi ketersediaan dokumen dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Selain itu, adanya pendampingan yang dilakukan intens dari Biro Organisasi, BAPPELITBANGDA dan Inspektorat. Faktor adanya dukungan dan kontribusi dari Inspektorat yang melakukan pendampingan dan pengawasan SAKIP OPD setiap triwulan.

Peran penting komitmen pimpinan dalam melaksanakan kebijakan terkait pengawasan menjadi salah faktor terlaksanannya tugas-tugas dibidang pengawasan. Kebijakan Pengawasan Pemerintah telah disusun menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah dan telah disahkan oleh kepala daerah menjadi peraturan gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh inspektur menyusun tim Pengawasan Prioritas Daerah. Kebijakan Pengawasan Pemerintah telah disusun menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan yang diakomodir menjadi

kebijakan pengawasan daerah dan telah disahkan oleh kepala daerah menjadi peraturan gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh inspektur menyusun tim Pengawasan Prioritas Daerah.

Pada tahun 2021 jumlah pengaduan yang berasal dari beberapa perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 21 pengaduan dan sampai akhir Desember 2021 telah ditindaklanjuti 100 persen dalam bentuk 21 laporan hasil pemeriksaan. Pengaduan ini dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi yang secara umum dalam bentuk pemeriksaan terhadap indisipliner, penyalahgunaan wewenang jabatan, pelanggaran kode etik dan gratifikasi kepada perangkat daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengoptimalkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Consulting dan sosialisasi yang intens. Tahun 2022 Inspektorat Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti seluruh Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap OPD baik secara langsung ataupun dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Go Clean yang memudahkan masyarakat memantau hasil laporan pengaduan masyarakat.

Presentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 sejumlah 8 pengaduan yang telah ditindaklanjuti 100 persen yang keluarannya dalam bentuk 8 laporan hasil pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pada tahun 2021 meliputi indisipliner, perceraian, pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengoptimalkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Consulting dan sosialisasi yang intens. Tahun 2022 Inspektorat Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti seluruh Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti baik secara langsung ataupun dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Go Clean yang memudahkan masyarakat memantau hasil laporan pengaduan masyarakat.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan pengawasan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.117.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengawasan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	67,92	67,92	64,56	73,93	76,29
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	64,13	68,83	68,1	70,04	69,55
Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.8. **Pengelolaan Penghubung**

Pada tahun 2021 capaian persentase pelayanan tamu daerah belum mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya: a) Belum optimalnya pembangunan gedung Kantor, Mess dan Anjungan TMII di Jakarta, b) Keterbatasan unit mobil dinas dan jumlah kamar, c) Adanya pandemi covid-19, d) Belum optimalnya kualitas dan Kompetensi ASN maupun tenaga magang. Tahun 2022 persentase pelayanan tamu daerah mencapai 83 persen berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kuisisioner terhadap tamu Badan Penghubung Daerah.

Kurangnya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata daerah, belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait, masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi, dukungan stakeholder dalam Kebudayaan daerah belum optimal, TMII tutup selama masa PPKM, pandemic covid-19, serta masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penghambat pencapaian target kinerja persentase peningkatan promosi dan kerjasama daerah pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 tidak ada capaian peningkatan promosi dan kerjasama daerah disebabkan tidak adanya penanggungjawab dari kegiatan dimaksud.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan penghubung tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.118.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengelolaan Penghubung
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pelayanan tamu daerah	%	77	50	13	20	83
Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	%	100	50	0	0	0

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.8. Pemerintahan Umum

Capaian persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara tahun 2021 mencapai 75 persen melalui pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Jumlah peserta gerakan bela negara sejumlah 500 orang. Tahun 2022 persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 100 persen.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2021 dengan capaian 99,73 persen. Sejumlah 100 orang mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Faktor penghambat pencapaian target diantaranya kualitas DPT Pemilu, mobilisasi masyarakat untuk golongan putih atau tidak memilih serta antusiasme masyarakat yang menurun pada hari pemilu. Tahun 2022 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan peningkatan capaian adalah karena masifnya pendidikan politik baik yang dilakukan oleh parpol dan lembaga-lembaga pemerintah.

Peran aktif dari tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB serta dukungan dari seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan mendorong pencapaian target kinerja hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat kabupaten/kota mendorong pencapaian target kinerja 100 persen penurunan penyalahgunaan narkoba. Dukungan terkait kebijakan penyalahgunaan narkoba melalui penetapan PERDA tentang Penyalahgunaan Narkotika diperlukan untuk mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja program.

Dukungan dari tokoh-tokoh agama khususnya yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah menjadi faktor pendorong capaian target kinerja persentase wilayah Sulsel berpotensi konflik agama yang ditangani mencapai 100 persen hingga tahun 2022. Tahun 2021 capaian kinerja penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat melampaui target kinerja dengan jumlah kasus tahun 2020 sebesar 80 kasus menurun menjadi 21 kasus pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong diantaranya; a) Optimalisasi peran forum kewaspadaan dini daerah maupun forum kewaspadaan dini masyarakat dalam deteksi dini potensi konflik yang ada, b) Meningkatnya sinergitas forum-forum yang ada di masyarakat seperti FOKDM, FKUB, FPK dan forum keagamaan lainnya, c) Meningkatnya sosialisasi konflik di masyarakat. Kinerja FKUB dan instansi terkait sangat baik dalam mengatasi perselisihan-perselisihan antara maupun intra umat beragama sehingga tidak membesar menjadi konflik.

Kinerja instansi terkait yang tergabung dalam FORKOPIMDA, FKDD dan Forum lainnya sangat baik dalam meredam permasalahan-permasalahan kecil sehingga tidak membesar menjadi konflik sehingga capaian penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat mengalami peningkatan dan mencapai 100 persen pada tahun 2022.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan pemerintahan umum tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.119.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	75	100
Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99,73	115,29
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100
Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100
Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100
Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	73,75	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks layanan infrastruktur tahun 2021 menunjukkan capaian sebesar 79,44, kondisi ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 79,5 persen. Kondisi ini disebabkan karena indikator kemantapan jalan dan konektivitas jalan provinsi yang merupakan indikator pembangun dari indeks layanan infrastruktur yang tidak mencapai target. Tidak tercapainya target pada indikator kemantapan jalan dipengaruhi oleh laju kerusakan jalan yang lebih tinggi dibanding pembangunan dan pemeliharaan yang dilakukan, tingginya laju kerusakan jalan disebabkan oleh beberapa factor diantaranya bencana banjir dan beban jalan yang tidak sesuai dengan kemampuan jalan. Tahun 2022 capaian indeks layanan infrastruktur sebesar 80,39 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,19 persen. Tahun 2022 terdapat penambahan komponen penghitung indeks layanan infrastruktur yaitu indikator persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebagai indikator infrastruktur layanan dasar. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.120.
Indeks Layanan Infrastruktur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kemantapan Jalan	%	14,74	15,38	15,65	17,50	14,39
Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Regional	%	20	20	20	20	20
Rasio Jaringan Irigasi	%	3,17	3,29	3,38	4,45	3,38
Persentase RT dengan akses air minum layak	%	Belum menjadi komponen penghitung				13,79
Persentase RT dengan akses sanitasi layak	%	Belum menjadi komponen penghitung				13,84
Rasio Elektrifikasi Desa	%	19,2	19,7	19,64	19,65	14,98
Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	73,38	75,95	78,07	79,44	80,39

Sumber : BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tabel II.121.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	720.29	785.35	698,85	783,31	778,97
Panjang jalan Keseluruhan	Km	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35
Mantap	Km	1.184,44	1.236,15	1.328,58	1.406,74	1.445,63
	%	58,95	61,52	66,12	70,01	71,95
Tidak Mantap	Km	824,91	773,2	670,81	602,62	563,72
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	35,85	39,84	34,78	38,98	38,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tahun 2023

2.4.2 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,55 persen. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja serta peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Data selebgkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.122.
Produktifitas Total Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja (Jiwa)	3.988.029	4.030.400	4.275.807	4.412.782	4.559.375
PDRB ADHK (Rp.Milyar)	309.156,19	330.506,38	328.154,57	343.402,51	360.874,18
Produktifitas Total Daerah (Rp.1000/Angkatan Kerja)	77.521,05	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2023

Tabel II.123.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	Orang	3.988.029	4.030.400	4.276.437	4.412.782	4.559.375
Bekerja	Orang	3.774.924	3.830.096	4.006.620	4.160.433	4.353.650
Pengangguran	Orang	213.105	200.304	269.817	252.349	205.725
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.340.550	2.376.885	2.468.484	2.404.818	2.330.024
Penduduk Usia Kerja	Orang	6.328.579	6.407.285	6.744.921	6.817.600	6.889.399
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,01	62,9	63,40	64,73	66,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Capaian Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Peningkatan jumlah rumah tangga mempengaruhi peningkatan jumlah pengeluaran rumah tangga makanan dan bukan makanan dalam sebulan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.124.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Rumah Tangga	Rp	1.016.244	1.022.418	1.057.864	1.104.097	1.142.611
Jumlah Rumah Tangga	Ruta	2.014.073	2.032.175	2.074.699	2.094.308	2.113.231
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp/Ruta	0,504	0,503	0,509	0,527	0,541

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2.4.4 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan menunjukkan persentase capaian yang berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022, dengan rata-rata persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita sebesar 51,37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non pangan sedikit lebih besar dibanding dengan pengeluaran konsumsi pangan. Pengeluaran terbesar dari Dari 6 komponen pengeluaran konsumsi non pangan berapa pada biaya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.125.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Kelompok Komoditas Non Pangan	Rp.	520.779	534.484	541.681	570.615	576.388
Total Pengeluaran	Rp.	1.016.244	1.022.418	1.057.864	1.104.097	1.142.611
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	%	51,25	52,27	51,21	51,68	50,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2.4.5 Nilai Tukar Petani

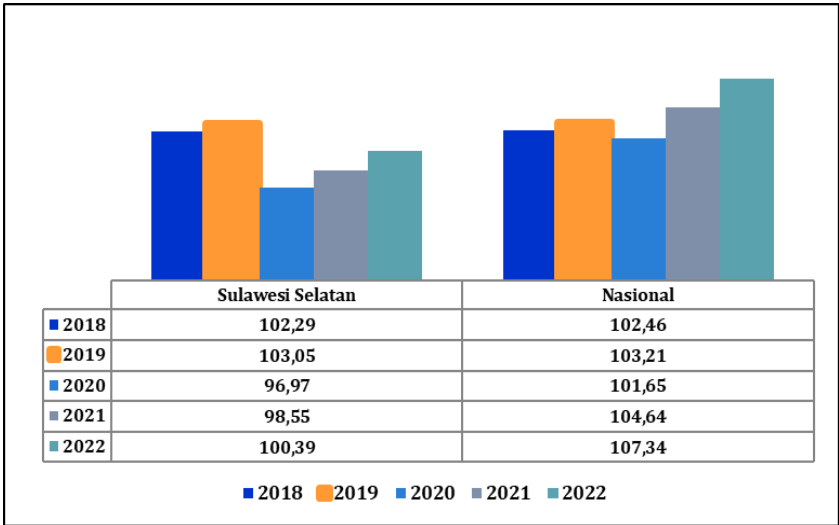
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai tukar petani ini merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Nilai tukar juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemic covid 19, namun pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan meskipun nilai tukar petani sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan. Secara keseluruhan nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 masih dibawah rata-rata nilai tukar petani nasional.

Tabel II.126.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Petani Sulawesi Selatan	Ribu Rp	102,29	103,05	96,97	98,55	100,39
Nilai Tukar Petani Nasional	Ribu Rp.	102,46	103,21	101,65	104,64	107,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 136.
Perbandingan NTP Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tabel II.127.
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Sub Sektor	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanaman Pangan	99,45	95,31	95,96	94,16	91,77
Hortikultura	106,99	104,48	106,28	105,03	117,87
Tanaman Perkebunan	96,16	94,26	95,90	107,11	117,56
Peternakan	109,97	99,66	100,38	101,41	104,46
Perikanan	104,16	105,61	97,54	104,19	109,70
Perikanan Tangkap	107,63	107,16	99,64	107,43	109,27
Perikanan Budidaya	103,08	106,33	96,06	101,90	110,00

Sumber : Statistik NTP Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2.4.6 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Capaian persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Namun pada tahun 2022 persentase desa berstatus swasembada mengalami penurunan sebesar -

19,9 persen atau dengan capaian 113 desa swasembada dari sejumlah 3.051 total desa. Desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun capaian yang diperoleh telah mengalami peningkatan namun persentasenya masih sangat kecil jika dibanding jumlah keseluruhan desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini disebabkan karena pada umumnya desa berstatus swasembada baru dikemuka pada beberapa desa yang merupakan ibukota kecamatan. Data selengkapnya pada atbel berikut.

Tabel II.128.
Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa	Desa	3.049	3.051	3.051	3.051	3.051
Jumlah Desa Swasembada	Desa	81	81	100	141	113
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	2,66	2,65	3,28	4,62	3,7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2023

2.4.7 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Nilai Ekspor Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,86 persen. Dari 16 komoditas ekspor Sulawesi Selatan, jenis komoditas yang memberikan kontribusi peningkatan nilai ekpor terbesar adalah komoditas Nikel dengan nilai 1.179,45 US\$. Sedangkan nilai Impor Sulawesi Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 76,57 persen. Jenis komodita Impor yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Bahan Bakar Mineral sebesar 1.021 persen dari tahun 2021. Capaian rasio ekspor dan impor terhadap PDRB pada tahun 2022 mencapai 154,28 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.129.
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Ekspor	Juta US\$	1.455	1.557	1.474	1.866	2.559
Nilai Impor	Juta US\$	1.184	1.154	800	653	1.153
Net Eksport	Juta US\$	271	403	674	1.213	1.406
Nilai PDRB di konversi, Milyar Rp.	Juta US\$	32,39	35,64	34,56	38,09	24,06*

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
ke Juta US\$						
Rasio Ekspor + Import Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	Angka	81,48	76,07	65,80	68,13	154,28

**Asumsi = 1 US\$ = Rp.15.000,-
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023*

2.4.8. Rasio Ketergantungan

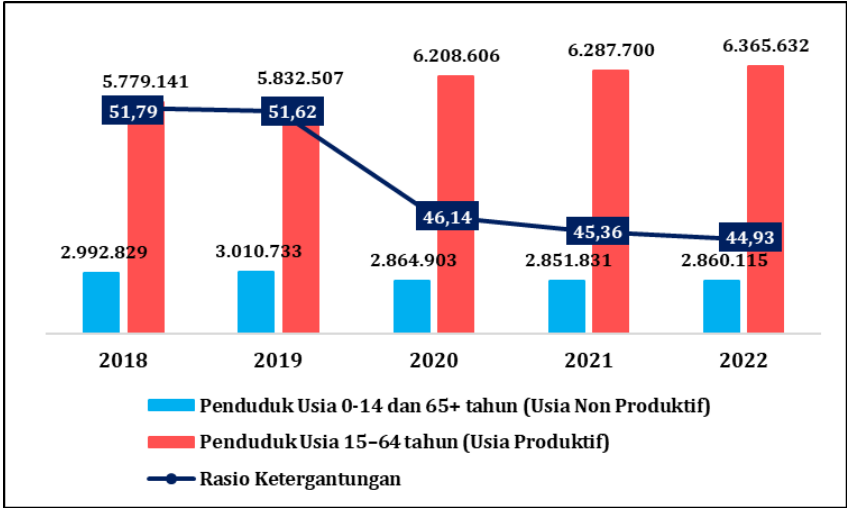
Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator yang dapat berfungsi sebagai indikator demografi maupun indkator ekonomi. Sebagai indikator demografi, rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui beban ketergantungan penduduk yang belum atau tidak produktif terhadap penduduk usia produktif disuatu wilayah. Sedangkan sebagai indikator ekonomi, rasio ketergantungan untuk mengetahui suatu daerah dapat digolongkan dalam kategori maju atau masih tahap berkembang.

Tabel II.130.
Rasio Ketergantungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2022

Indikator	Capaian					
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia 0 – 14 thn	Jiwa	2.454.795	2.457.016	2.213.433	2.226.095	2.208.567
Penduduk Usia 65+ thn	Jiwa	538.034	553.717	651.470	625.736	651.548
Jumlah penduduk Usia 0-14 dan 65+ thn	Jiwa	2.992.829	3.010.733	2.864.903	2.851.831	2.860.155
Penduduk Usia 15 – 64 thn (Usia Produktif)	Jiwa	5.779.141	5.832.507	6.208.606	6.287.700	6.365.632
Rasio Ketergantungan	Per 100 penduduk produktif	51,79	51,62	46,14	45,36	44,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik II. 137.
Rasio Ketergantungan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Provinsi Sulawesi Selatan sedang memasuki bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022. Demikian pula beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif menggambarkan tren penurunan dari tahun ke tahun.

2.4.9. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu. Data angka kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 10.951 kasus atau 41 persen dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Bantaeng sebesar 127 kasus atau 0,5 persen dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022. Capaian penyelesaian tindak pidana pada tahun 2022 sebesar 61,18 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,94 persen.

Tabel II.131.
Angka Kriminalitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kriminalitas	Kasus	12.100	16.730	15.158	15.210	26.684

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 6 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator tujuan dan sasaran terdapat pada uraian aspek kesejahteraan masyarakat (subBab 2.2) dan aspek daya saing daerah (subBab 2.4).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka ditetapkan sejumlah 63 Program Prioritas untuk mendukung pencapaian IKU Gubernur Sulawesi Selatan.

Berikut matriks pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2019-2022 berdasarkan target RPJMD Provinsi Sulawesi 2018-2023 yang ditetapkan. Uraian narasi atau penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator program prioritas terdapat pada uraian aspek pelayanan umum (sub Bab 2.3).

Tabel II.132.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ Angka	B	B (60,07)	B (61,18)	B (66,16)	A (81-90)	81,68
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (65,06)	B (63,02)	B (65,01)	B (68,08)	A (>89-90)	76,49
Sasaran 2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	B (4,00)	B (4,02)	A- (4,10)	A- (4,34)	A (4,51-5,0)	96,23
Tujuan 2	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson	Angka	0,639	0,620	0,568	0,567	0,607	107,05
Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	75,95	78,07	79,44	80,39	83,40	96,39
Tujuan 3	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. Juta	57,18	55,68	59,65	65,59	65,98	99,41
		Tingkat Kemiskinan	Persen	8,69	8,99	8,53	8,66	7,45	87,07

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran 4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,62	6,31	5,72	4,51	5,69	126,16
Sasaran 5	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Angka	0,389	0,382	0,377	0,365	0,380	104,11
Tujuan 4	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	IPM	Angka	71,66	71,93	72,24	72,82	73,05	99,68
Sasaran 6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	64,64	65,29	65,76	66,34	67,05	98,94
Sasaran 7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	77,58	77,80	77,94	78,41	77,86	100,71
Sasaran 8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76,01	76,32	74,76	76,37	77,23	98,89
Sasaran 9	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	11.387	15.158	15.210	26.684	24.438	91,58

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 5	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,92	-0,70	4,65	5,09	5,04-6,52	100,99
Sasaran 10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Rp/Ang k. Kerja	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92	77.349,12	102,33
Tujuan 6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH	Poin	75,12	71,75	73,23	74,17	72,84	101,82
Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO2Eq	0,89	0,96	1,13	1,36	1,347	100,96

2.5.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2018-2022 atau capaian indikator kinerja daerah (IKD) sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.133.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2022

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,04	6,91	-0,71	4,64	5,09
2	Laju Inflasi	%	3,5	2,35	2,04	2,4	5,77
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Triliun Rp	52,64	57,18	55,68	59,66	65,59
4	Indeks Gini	Angka	0,388	0,391	0,382	0,377	0,365
5	Indeks Wiliamson	Indeks	0,622	0,639	0,620	0,568	0,567
6	Tingkat Kemiskinan	%	8,87	8,56	8,99	8,53	8,66
	• Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	779,64	759,58	776,84	784,98	782,32
	• Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	1,68	1,63	1,65	1,40	1,50
	• Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	91,13	91,44	91,01	91,47	91,34
7	Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,12	1,11	1,13	1,13	1,11
8	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	7,16	6,34	6,5	6,35	5,91
9	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	4,26	3,88	3,94	4,07	4,05
10	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1,15	1,17	1,19	1,18	1,21
11	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,06	0,06	0,07	0,06	0,05
12	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	4,8	4,62	4,67	4,75	5,1
13	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	8,4	8,44	8,53	9,41	9,43
14	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,38	14,8	14,48	14,58	14,64
15	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	12,87	13,17	12,76	12,49	12,9
16	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	6,79	7,35	7,35	8,91	9,31
17	Pertumbuhan PDRB Industri	%	0,94	9,92	-4,57	3,02	9,86

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
	• Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,08	70,43	70,57	70,66	70,97
	• Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,02	8,26	8,38	8,46	8,63
	• Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,34	13,36	13,45	13,52	13,53
	• Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.814	11.118	11.079	11.184	11.430
2	Indeks Pendidikan	Angka	63,79	64,64	65,29	65,76	66,34
3	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas	Tahun	91,81	92,45	92,56	92,49	93,31
4	Indeks Kesehatan	Angka	77,05	77,58	77,80	77,94	78,41
5	Prevalensi Balita Stunting	%	35,6	30,6	Tidak ada Survey	27,4	27,2
6	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	%	63,02	62,9	63,4	64,73	66,18
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51
	• Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	213.105	200.304	269.817	252.349	205.725
8	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	94,66	95,03	93,69	94,28	95,49
9	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	36,5	36,9	36,9	37,32	39,81
	SENI, BUDAYA, DAN OLAHRAGA						
1	Jumlah lembaga sanggar kesenian per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	452	471	468	468	468
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	1	1	1	1	1
3	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	25	26	74	74	74
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
	Pendidikan						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	81,74	86,09	86,44	87,07	86,49
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	60,03	60,14	60,32	60,35	60,44
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun	%	70,18	70,85	70,89	71,21	70,81
4	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	1,00	0,71	1,35	1,02	3,62
5	Angka Kelulusan (AL)	%	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99
6	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,15	97,2	92,07	93,82	95,34
7	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Angka	1:15	1:14	1:13	1:13	1:13
8	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	91,38	92,54	93,58	94,16	94,54
9	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	98,63	98,69	98,84	94,83	99,16
Kesehatan							
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	1.037	919	791	844	1.117
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	1.124	991	843	892	1.176
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	799	714	623	681	954
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	5,76	5,69	5	5	8
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	6,26	6,2	5	6	8
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	6,21	5,86	4	4	7
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	92	94	86	129	119
8	Rasio Posyandu peratuan Balita	Angka per 1000 balita	12,8	11,95	12,64	16,6	14,42
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Angka per 1000 Penduduk	1,1	1,2	1,2	1,7	1,9

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	16	17	18	23	22
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	43	41	43	60	60
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	80,7	82	81,9	99,76	93,86
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	91,99	90,97	92,44	95,04	94,8
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95,27	96,15	73,82	83,51	94,3
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	99,6	91,8
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	103,8	98,50	63,3	102,9	99,6
17	NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	3,02	2,32	0,9	1,72	2,9
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	60,37	70,8	71,59	69,43	78,29
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	49	61	45	49	59,6
20	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	208	214	160	169	228
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	8	8	6	7,8	9,8
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	49	61	50	61	71
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	87	88	89	87	87
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
25	Penderita Diare yang ditangani	Orang	167.946	145.457	28.228	5.168	87.402
26	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0,15	0,11	0,09	0,11	0,19
27	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,013	0,019	0,02	0,026	0,26
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	96,40	89,96	88,63	98,4	98,57

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	89,32	87,96	86,58	88,65	88,15
31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	90,09	90,35	91,91	91,33	91,1
32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	58,32	62,87	59,08	60,23	58,56
33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	71,64	69,71	65,52	75,25	83,75
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	91,00	83,43	91,10	93,4	87,4
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100
36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
37	CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam	%	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	35,85	39,84	34,78	38,98	40
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0,00345	0,00345	0,00341	0,00319	0,00319
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	84,41	89,77	93,79	93,98	97,36
4	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	%	69,16	62,13	72,5	76	77,86
5	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	15,83	12,08	12,65	13,03	52,31
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	88,11	89,38	90,84	91,18	91,96
7	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman	%	Belum diukur	Belum diukur	44,39	46,22	46,39
8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan	%	Belum diukur	35,6	25,53	23,15	25,15
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	%	84,44	87,8	88,96	91,57	92,24
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman	%	Belum diukur	4,7	4,74	3,97	12,92
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	65	70	75	80	86
12	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/jiwa	2,58	2,53	2,53	2,16	2,23
13	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	25	25	25	21,87	25
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,195	0,200	0,219	0,216	0,217
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,049	0,048	0,139	0,139	0,139
Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000 penduduk	34,94	42,13	42,27	47,69	39,4
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	94,00	100	100	100	99,59
3	Persentase Penegakan PERDA	%	80,00	89,00	100	100	99,67
Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	70,48	57,11	77	88,22	95,95
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	70,48	57,02	77,3	90,71	94,6
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	88,29	87,98
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	0	0
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	0	0	0
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	1,33	20,01	15,63	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1,33	2,10	13,94	17,3	48,8
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
Tenaga Kerja							
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	63,02	62,9	63,40	64,73	66,18

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	94,65	95,03	93,69	94,21	95,49
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	2,94	1,72	2,23	0	1,24
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	61,7	33,33	57,33	60,98	30,6
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	3,19	4,36	3,29	5,6	9,49
6	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	59,99	30	48,73
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	35,34	52,89	29,34	16,35	47,55
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	6,92	5,38	13,50	12,35	60
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	70,00	0	100	90
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	98,75	80	81,25	85
12	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,65	95,03	93,69	94,28	95,49
13	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ketas	%	43,32	45,81	45,14	46,61	46,35
14	Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	36,52	36,85	21,18	37,32	39,81
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	51,25	53,10	48,16	54,38	54,8
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	17,86	25,88	25,88	26,88	25,88
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71	69	74	72	74
4	Rasio KDRT	%	-	0,019	0,0065	0,07*	0,07*
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,05	0,09	0,06	0,07*	0,07*
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,23	50,32	48,16	49	50
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	27	21	35	22	23
9	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	100,25	101,32	99,58	100,18	104*
10	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	%	102,64	100,79	97,24	102,03	106,72
11	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat	%	108,97	106,11	102,46	97,03	112,2*

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
12	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	103,30	105,20	99,58	121,83	108,2*
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	100,28	100,60	100,38	97,13	100,9*
Pangan							
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	388,24	363,76	332,21	363,8	367,91
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	44,33	47,88	53,27	61,83	55,04
3	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	22,55	24,96	13,66	13,62	18,23
4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	3.572	3.879	3.168	3.484,4	3.593
5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	103,75	112,67	86,16	94,78	171,65
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,6	83,4	80,4	80,1	83,1
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	77,55	78,69	81,81	80,92	81,83
9	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	5,21	16,29	7,49	25,64	74,07
Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	83	92	57	88	33
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	67	43	67	50	66,67
3	Penyelesaian izin lokasi pertanahan	%	62	100	49	42	121
Lingkungan Hidup							
1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Indeks Kualitas Air	%	57,7	81,47	54,00	56,82	57,79
7	Indeks Kualitas Udara	%	88,67	88,69	88,73	89,13	90,35
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	60,41	61,14	63,56	55,4	55,46
9	Indeks Kualitas Air Laut	%	Belum diukur	Belum diukur	70,22	84,82	85,59
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,83	75,12	71,74	73,23	74,17

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
11	Laporan Inventarisasi GRK	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	4.365.759	2.914.632	3.500.000	589.007,56	4.934.631
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	66	62,86	18,46	18,46	29,6
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	10	17	12	16	18
17	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	66,91	73,33	72,83	51,12	54,48
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	0,87	0,94	0,94	0,96	0,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	0,87	0,92	0,94	0,95	0,97
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,14	0,29	0,32	0,36	0,39
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	-	94,39	94,00	95,43	99,42
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	-	43,00	46,00	47,79	96,51
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	4,08	17,38	17,83	98,89	99,42
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	23	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	43	43	45	95	96
4	Persentase LPM Berprestasi	%	24,33	24,33	24,33	0	0
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Posyandu aktif	%	99,89	99,89	99,89	99,91	97,06

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,02	1,05	2,51	1,04	1,04*
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,44	2,45	2,45	2,29	2,22
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak/keluarga	3	3	3	3	3
4	Rasio Akseptor KB	%	62,91	63,05	71,07	71,07	71,7*
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	66,5	71,74	71,86	71,66	61,2
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	-	31	29,07	27,4	27,4
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0	46,99	35	22	22*
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,9	13,7	13,05	20	26,1
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	15,3	24,26	24,24	23,1	13
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	14,2	17,32	17,24	18,4*	18,45*
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	85,93	84,91	78,75	74,5*	72,5*
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	72,3	72,31	70,54	70,21*	70*
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	50,30	72,33	71,49	70,8*	70*
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	23	23	23	23*	23*
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	17,00	17,00	18,00	78,5	78,5*
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,10	100,30	100,41	98,64*	98,64*
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	72,86	74,39	76,07	76,98*	75,98*
18	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,08	0,04	0,02	0,04*	0,04*
19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	71,01	71,01*	65,4
20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	75	75	44,21	75	75*

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	1,5	1,5	0,13	1,5	1,5*
Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Jiwa	13,873	14,749	7,143	8,514	14,005
2	Rasio ijin trayek		0,45	0,38	1,99	0,26	0,2
3	Persentase layanan angkutan darat	%	80	87	90	94	97
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS	Unit	89	89	89	127	127
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/Kendaraan	0,07	0,08	0,09	0,1	0,108
6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	11.234.294	10.771.413	11.067.590	11.531.427	12.702.231
Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	63,85	65,07	85,30	87,17	87,52
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	43,91	43,98	49,59	59,69	94,24
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	29,38	22,87	21,93	31,44	13,48
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	%	65,83	65,31	64,22	55,66	50
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,51	99,52	99,40	99,71	99,71
Penanaman Modal dan Investasi							
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun rupiah	11,55	10,21	12,54	16,6	14,25
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	911	1,548	2.506	4.506	5.748
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ proyek	18	8	3	3,69	2,26
4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	1,3	2,4	6,1	1,2	1,6
Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	9,61	9,46	8,17	8,17	8,73
2	Persentase wirausaha muda	%	19,80	18,30	13,80	17,24	31,3
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	30	96	64	64	100
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	36,52	22,38	24,57	24,68	28,16

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	2,65	8,42	6,70	9,07	9,34
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	81	246	0	84	119
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	81	317	0	52	217
Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persandian							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	9	7	5	0	10
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	2	2	2	1	3
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	21	5	3	11	2
Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	732.403	1.098.180	106.933	154.913	1.325.445
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Laki-Laki	Orang	325.430	487.600	52.037	69.376	669.359
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perempuan	Orang	406.973	610.580	54.896	85.537	656.086
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	581.201	582.490	10.028.442	9.256.186	10.348.732
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	0,428	0,428	0,035	0,035	0,23
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	390.672	394.251	66.408	45.256	45.910
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3.250	3.500	2.350	4.032	31.098
6	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	65	56	40	33,3	79,49
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	4.200	368	1.313	1.433	1.865
PELAYANAN URUSAN PILIHAN							
Pariwisata							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	kunjungan	8.393.024	8.681.275	367.926	1.612.737	7.590.063
2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	263.293	174.817	6.598	3.654	70.997
3	Lama kunjungan Wisata	Hari	5	5	2	1	3
4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	375.900.000	401.800.000	60.200.000	66.500.000	299.770.000
Pertanian							
1	Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,12	1,11	1,13	1,13	1,11
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	7,16	6,34	6,50	6,33	5,91
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	4,26	3,88	3,94	4,07	4,05
4	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1,16	1,18	1,21	1,23	1,25
5	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton	136.711	150.462	121.244	136.039	127.383
6	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton	170.767	250.289	235.801	237.898	235.149
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Susu)	Ton	3.173	1.888	2.302	2.398	2.318
Kehutanan							
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	48,61	55,73	60,42	65,61	71,14
2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	14,49	17,43	0,7	0,08	0,03
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	76,45	75,67	75,67	75,67	75,67
Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,53	97,8	97,53	98,2	99,89
2	Rasio ketersediaan daya listrik	%	97,00	98,00	90,00	101	99,41
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	11,33	15,57	16,6	0	34,79
Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$1000	828.845.592	1.463.153.049	1.384.609.057	1.677.394.840	2.358.937.318
2	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	0,74	0,89	0,98	1,08	Tidak diukur
Perindustrian							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	1.156	1.189	1.062	1.635	2.103
Transmigrasi							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase transmigran umum	%	100	100	0	100	100
Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan	%	79,4	81,1	101,34	110,98	99,70
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	16,23	17,52	10,51	19,11	27,39
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah	Kelompok	50	55	21	60	86
	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	311	314	314	314	314
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	47,66	40	12,89	18,11	29,43
	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	173.412	174.620	50.174,24	77.770,07	128.535,41
	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	366.541	436,55	389.208,2	429.431,2	436.749,6
4	Nilai Tukar Nelayan	%	107,8	107,6	99,65	107,43	109,29
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	48,92	58,69	52,33	57,74	58,27
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Angka	1,01	1,56	1,57	1,57	2,33
7	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	366.540,6	398.565,3	389.208,2	429.431,2	436.749,6
8	Konsumsi Ikan	%	120,2	120,52	119,09	114,45	110,85
Penunjang Urusan							
Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	99	97
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	96	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	80,00	100	100	100	100
Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	42,67	43,23	41,54	44,65	54,1
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,99	0,58	0,64	3,61	2,29
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	35,6	42,19	41,69	38,92	31,08
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	8,54	9,01	13,11	10,63	10,1
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	25,75 : 74,25	28,96 : 71,04	32,19 : 67,81	0 (PMDN 77/2020)	0 (PMDN 77/2020)
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	13,93	17,49	14,47	16,19	20,37
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun	15	15	15	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,03
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,9	0,6	0,6	0,17	0,48
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	60	59	56	56	56
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	8.546	8.536	7.907	13.781	12.906
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	16.670	16.243	16.030	16.160	16.147
Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	42	46	46	50	94,44
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	50	50	50	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	25	50	0	50	41,86
Pengawasan							
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%	67,92	67,92	64,56	73,93	76,29
2	Persentase penyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis	%	64,13	68,83	68,1	70,04	69,55
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	13	18	18	21	18
Sekretariat Dewan							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan.Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
ASPEK DAYA SAING							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp.Juta/Ruta	0,504	0,503	0,509	0,527	0,541
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	51,25	52,27	51,21	51,68	50,44
3	Nilai Tukar Petani	Ribu Rupiah	102,29	103,05	96,97	98,55	100,39
4	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	%	2,66	2,65	3,28	4,62	3,7
5	Produktivitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	77.532,6	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	81,48	76,07	65,8	68,13	154,28
7	Rasio Ketergantungan	Angka	51,79	51,62	46,14	45,36	44,93
8	Angka Kriminalitas	Angka	12.100	16.730	15.158	15.210	26.684

Sumber: BPS dan OPD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.5.3 Capaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan diukur dari ketercapaian indikator pada 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.134.
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			Target 2023
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
Pendidikan					
Pendidikan Menengah					
Persentase Warga Negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	76,62	80,55	83,68	100
Pendidikan Khusus					
Persentase Warga Negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	81	80,84	82,73	100
Kesehatan					
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					
Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					
Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum					
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota					
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota					
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pegolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Perumahan Rakyat					
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi					
Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Provinsi					

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			Target 2023
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi peyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	30	100
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi					
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100	100	100	100	100
Sosial					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti					
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100	35,12	7,4	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti					
Persentase Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	100	3,88	15,22	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti					
Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjutan usai di dalam panti	100	100	100	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti					
Persentase Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100	100	100	100	100
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					
Persentase Warga Negara Korban Bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	15,63	100	100	100

Sumber: OPD Pengelola SPM Prov. Sulsel, Tahun 2023
Untuk Urusan Pekerjaan Umum: *) Belum ada layanan SPAM/IPLT Regional
*) SPAM Mamminasata Belum Selesai

**2.5.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020 hingga 2022 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.135.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
	PENDIDIKAN										
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	76,62	80,55	83,68	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	Sekolah	498	496	495
						2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	0	8.205	0
						3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	0	13.823	0
						4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	189.543	219.616	224.726
						5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	93.043	129.616	129.596
						6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	4.768	2.336	5.496
						7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada	Orang	4.299	5.783	4.974

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)				
						8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	14.676	15.215	15.814
						9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	9.751	10.015	10.114
						10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	5.292	5.292	4.221
						11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	4.050	1.380	2.989
						12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	3.336	3.511	3.503
						13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	2.124	2.221	2.241
						14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	7.487	8.531	8.333
						15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	4.315	5.232	4.864
						16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1),	Orang	413	456	369

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				
						17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	264	285	227
						18)	Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	16	67	66
						19)	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	28	73	72
						20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	1.089	404	2.790
						21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	728	208	1.696
2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam	%	80,06	80,84	82,73	1)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sekolah	51	74	69
						2)	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima	Orang	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	Pendidikan Khusus						perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				
						3)	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	1.829	4.414	6.009
						4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	726	861	660
						5)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	1.118	1.284	1.148
						6)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	60	76	651
						7)	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	236	4.540	267
						8)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	949	1.131	551
						9)	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	61	61	44
						10)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	85	61	88
							KESEHATAN				

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0,20	1,69	18,34	1)	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	RS	6	6	6
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100	41,80	80	2)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	RS	32	30	24
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	3)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	4	4
						4)	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pos	80	58	65
						5)	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	800	580	650
						6)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	90	90	98
						7)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Jenis	Edukasi PHBS = 80 Edukasi Covid 19 = 70	Edukasi PHBS = 2 Edukasi Covid 19 = 58	2 jenis edukasi, masing-masing 65 kali
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada	%	100	100	100	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis Logistik (Obat, Alat Kesehatan)	55	31 jenis Obat, 34 jenis Alkes	21 jenis Alkes, 14 jenis obat-obatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	situasi KLB Provinsi					2)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	Orang	22	22	22
						3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	Kali	1	1	1
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		0	0	Bukan Kewenangan	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	-	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	m	-	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai	%	Bukan Kewenangan	Bukan Kewenangan	Bukan Kewenangan	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi					2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60,06	60,33	72,84	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	55,62	77,16	47,86
						2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	58,07	76,01	43,59
						3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	100 (Surat Keterangan)	0 Layanan pelayanan air minum curah intas kab/kota blm dilaksanakan dan dianggarkan pd thn 2024.	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan	Ada

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota				Pelaksanaan thn 2022 merupakan penyusunan DED yang dilaksanakan oleh Balai Besar sungai Sulawesi Selatan sedangkan pembangunan fisik baru dilaksanakan 2023 hingga 2024 sehingga baru dpt dilaksanakan di 2024 (Kebutuhan pemenuhan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di sulsul yaitu : 1. SPAM AJATAPARENG :411 jenis dan 2. SPAM MAMMINASATA : 80 Sambungan Rumah)	3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	Lembaga	0	Surat Keterangan	1
						4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Kerjasama	1	1	1
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	%	0	100 (Surat Keterangan)	100 (Layanan pelayanan air minum cirah intas kab/kota blm dilaksanakan dan dianggarkan pd thn 2024. Pelaksanaan thn 2022 merupakan penyusunan DED yang dilaksanakan oleh Balai Besar sungai Sulawesi Selatan sedangkan pembangunan fisik baru	1)	Jumlah SPALD Regional	Unit	0	0	0
						2)	Total kapasitas SPALD Regional	m3	0	0	0
						3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	m3	0	0	0
						4)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Unit	17	14	14
						5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah	Lembaga	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
					dilaksanakan 2023 hingga 2024 sehingga baru dpt dilaksanakan di 2024 (Kebutuhan pemenuhan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di sulsel yaitu : 1. SPAM AJATAPARENG :411 jenis dan 2. SPAM MAMMINASATA : 80 Sambungan Rumah)						
6	Rasio kemantapan jalan	%	66,62	70,01	71,95	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Km	2009,35	2009,35	2009,35
						2)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						3)	Panjang jalan yang dibangun	Km	75,93	72,95	9,44
						4)	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	487	100,4	0
						5)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Km	9,79	3,43	0
						6)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Meter	315	190	0
						7)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Km	16,43	83,87	25,33
						8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Meter	0	0	0
						9)	Panjang jalan yang dipelihara	Km	1.927,18	1871,31	1534,62
						10)	Panjang jembatan yang dipelihara	Meter	80	80	433
7	Rasio tenaga kerja konstruksi		N/A	2,74	2,19	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di	Kali	0	3	4

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli						wilayah provinsi				
						2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Orang	100	9.140	200
						3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Orang	98	250	200
						4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak
						8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
						13)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
	PERUMAHAN RAKYAT										
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	503.986	28.573	120.863
						2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	22.817	12.795	581
						3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	KK / Jiwa	34.130 / 85.690	28.708	581
						4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	272	9.757	44
						5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana	Unit	6	1.199	0

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							aksi				
						6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	73	1.284	0
						7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	100	677	0
						8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jiwa	1.200	719	1.179
						9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ha	3.559.067	41,60	0
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	30 (Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak relokasi)	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	285	411	0
						2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	22.466	671	0
						3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	285	1.375	0
						4)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	22.466	354	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	6,46	18,03	25,39	1)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh ≥ 10-15 Ha	Ha	1.183,79	1.183,79	1.183,79
						2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	318	125	372
						3)	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	Unit	76,53	213,46	300,52
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	100	35,46	1)	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Kawasan	166	28	44
						2)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengemban g	257	128	20
						3)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Pengemban g	227	302	207
						4)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Pengemban g	47	88	20
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	1)	Jumlah pelanggaran dan Pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Pengaduan	14.190	3.241	3.722
						2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	46.151	43.973	36.353
						3)	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Unit	464	464	345
						4)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	4	6	8
						5)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	4	5	5
						6)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	SOP	6	6	6
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	28,57	40,00	53,33						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	1)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Dokumen RPB	1	3	2
						2)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Dokumen	1	Tidak Ada	1
						3)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	Dokumen	1	Tidak Ada	1
4	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	1)	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	3	1	1
						2)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Kegiatan		Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	Ada (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monev SPM Kab/Kota Tahun 2022)
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	1 (satu) Dokumen Kaji Cepat Bencana Provinsi	1 (satu) Dokumen Kaji Cepat Bencana Provinsi
						2)	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Tim Reaksi Cepat 13 Kabupaten)	Ada (SK Tim Reaksi Cepat BPBD Prov. Sulsel Tahun 2022)
						3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
						4)	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (4.466 Paket)	Ada (9.000 Paket/53.217

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
											Barang)
	SOSIAL										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	35,12	100	100	1)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	131	Surat Keterangan	263
						2)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	131	Surat Keterangan	263
						3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Panti	5	Surat Keterangan	14
						4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jalur alat Ramp Reglet alat cetak huruf Tongkat	20 7 6	Ada 4 (Kaki palsu bawah lutut, Alat bantu dengar, Kursi Roda, Tongkat)	39
						5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	LKS	5	Surat Keterangan	5
						6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	17	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						7)	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ksehatan) yang disediakan di dalam panti	Jenis		Surat Keterangan	Surat Keterangan
						8)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	Orang	5	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						9)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	Paket	3	Surat Keterangan	3
						10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup	Paket	3	Surat	1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti			Keterangan	
						11)	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Tenaga Pengajar Tenaga Honorer Pengurus Panti	64 28 8	Surat Keterangan	7
						12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	131	Surat Keterangan	Tidak Ada
						13)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	131	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						14)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	131	Surat Keterangan	263
						15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	131	Surat Keterangan	Tidak Ada
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	3,88	100	100	1)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	250	170	6.985
						2)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	250	170	6.985
						3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Panti	10	2 Asrama di UPT PPSBK Nirannuang Bulukumba; 6	16

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										Asrama di UPT PPSBR Makkareso Maros; 2 Ruang Kamar di UPT PPRSA Inang Matutu	
						4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	5	7	710
						5)	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Jenis	48	15	24
						6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	8	12 perawat diluar panti dan 2 perawat dalam panti	4
						7)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Stetoskop Alat Pnegukur Suhu	1 1	7 Alkes	9
						8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	2	12 dokter diluar panti, 1 dokter dalam panti, dan 1 tenaga Psikolog	5
						9)	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	46	34	46
						10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di	Paket	4	9	5

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							dalam panti				
						11)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	6	7
						12)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	Orang	250	170	78
						13)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	250	170	6.985
						14)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	250	170	183
						15)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	250	170	284
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	1)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanaan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	2178	75	75
						2)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	2178	75	75
						3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Asrama	10	9 asrama yang ada di panti; 2 Intensive care Ruang (Isolasi)	9 asrama yang ada di panti Sda 2 Intensive care (Ruang Isolasi)
						4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	5	10 Kursi Roda, 5 Walker dan 8	12 alat bantu (kursi Roda, Kursi Roda

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										Tripod	Reclining, Tongkat 3 kaki/Tripod, Tongkat 4 kaki/walker, Kloset Portable, Kaca mata dan Tongkat Kruk Lengan)
						5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jenis	8	7	14
						6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	3	2	1
						7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	4	3
						8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	2	10 Dokter di luar panti	4 Dokter di dalam panti
						9)	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	13	18	17
						10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	5	2
						11)	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	2.178	36	7
						12)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	Orang	2.178	75	75

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						13)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2.178	75	10
						14)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	1	16
						15)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	Orang	11	13	12
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	0	100	1)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	819	Surat Keterangan	1.222
						2)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	819	Surat Keterangan	1.222
						3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Asrama	7	Surat Keterangan	8
						4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	0	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Paket	7	Surat Keterangan	3
						6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	5	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	Surat Keterangan	3
						8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	1	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						9)	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di	Orang	7	Surat Keterangan	8

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							dalam panti				
						10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	3	Surat Keterangan	1
						11)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	819	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	Orang	819	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	819	Surat Keterangan	1
						14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Orang	0	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Orang	0	Surat Keterangan	Surat Keterangan
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	15,63	100	100	1)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Orang	5.979	9.494 (6.790 jiwa korban bencana alam; 2.704 jiwa korban bencana sosial)	26.921
						2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	93	4.054 (2.704 Korban bencana Sosial yang	2.917 (2324 Korban bencana Sosial yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										menerima Paket sandang; 1.350 korban bencana Alam yang menerima paket sandang)	menerima Paket sandang 593 korban bencana Alam yang menerima paket sandang)
						3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Titik	23	48	101
						4)	Jumlah paket permakanaan khusus bagi kelompok rentan	Paket	2.161	952	670
						5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	5.979	215 (40 org anak di Kab.Luwu Utara; 30 org remaja dan dewasa di Kab.Wajo; 35 org dewasa di Kab.Luwu; 45 org anak dan 35 org dewasa di Kab.Majene Sulbar)	19 Jiwa 6 KK korban bencana yang menerima kunjungan ke Desa Pallameang Kec.Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang
						6)	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	60	1.360 tenaga Tagana dan 36 tenaga Pelopor Perdamaian	982 tenaga Tagana dan 56 tenaga Pelopor Perdamaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR											

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	TENAGA KERJA										
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	95,83	91,67	66,67	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Dokumen	1	1	1
						2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	89.06	101,10	94,1
						3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Perusahaan	0	2	3
						4)	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Kab/Kota	0	22	24
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,003	0,048	1,26	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	%	0	20	9,09
						2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	51,85	86,89	56,42
						3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		2,42	59,21	104,72
						4)	Persentase penganggur yang dilatih	%	0,12	30,12	0,4
						5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	%	92,5	86,55	60,42
						6)	Persentase penyerapan lulusan	%	10,81	63,82	71,43
						7)	Persentase LPK yang terakreditasi	%	7,34	27,81	34,43
						8)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		0	-	17,86
						9)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		0	-	1
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		0,821619328	0,825394857	Rp.82.540.089	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0,074	-	0,41
						2)	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan	%	45,13	-	-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas				
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	60,47	47,07	93,33	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	29,89	100	0,16
						2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	%	148,25	0,56	0,64
						3)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	Orang	0	43.927	43.616
						4)	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	%	6,22	7,33	39,6
						5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	133,07	30,30	98,32
						6)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	%	0,27	3,27	28,27
						7)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2,23	0,21	1,49
						8)	Jumlah mogok kerja		5	3	30
						9)	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	3	1	0
						10)	Jumlah perselisihan kepentingan	Perselisihan	26	4	23
						11)	Jumlah perselisihan hak	Perselisihan	93	6	54
						12)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Perselisihan	0	-	0
						13)	Jumlah perselisihan PHK	Perselisihan	331	33	292

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						14)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	1.845	153	1.035
						15)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Perselisihan	196	4	112
						16)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	LKS	4	3	4
						17)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Rp	3.165.876	3.165.876	3.165.876
						18)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	%	62,67	41,86	30,6
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	3,30	5,60	79,77	1)	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	Rekomendasi	0	4	0
						2)	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	SPP AKL	0	2	2
						3)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	Orang	0	5.191	31.650
						4)	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	Lowongan	8.617	18.284	13.594
						5)	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	Orang	-	19	52
						6)	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Orang	11	11	15
						7)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	LPTKS	70	6	3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi				
						8)	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	LPPRT	0	-	1
						9)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	Penempatan	20.870	17.424	1.375
						10)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	Orang	-	-	99,53
						11)	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	%	-	20	61,54
						12)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	Pos	100	100	33,33
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	160,15	100	63,38	1)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Perusahaan	606	-	606
						2)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	Perusahaan	9.085	-	9.125
						3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	Perusahaan	8.076	-	8.742
						4)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	Perusahaan	14.133	10.518	14.133
						5)	Jumlah perusahaan yang menerapkan	Perusahaan	13.123	-	13.123

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							norma kerja perempuan				
						6)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	Perusahaan	6..567	12.113	6.281
						7)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan		-	2	14
						8)	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	Perusahaan	5.373	7.334	15.133
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	22,05	41,89	36,64	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Lembaga	53	52	50
						2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	Program/ Kegiatan	105/ 228	51	88/137
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	3,10	6,41	2,74	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	2	1	1
						2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	3	3	3
						3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100
						4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	14	10	20
						5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Lembaga	32	Tidak Ada	Tidak Ada

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	%	34,51	31,79	25,83	1)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Program		4	3
						2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Lembaga	1	16	16
						3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%		100	100
						4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	0	9	20
						5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Lembaga	14	Tidak Ada	Tidak Ada
	PANGAN										
1	Persentase Cadangan Pangan	%	15,19	411,04	102,61	1)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Gudang	18 LPM	25 LPM	Tidak Ada
						2)	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		Ada	Ada	Ada
							Ketersediaan Pangan Utama	%	338		374,04
							Rata2 Jumlah ketersediaan Pangan Utama		299.418.43 2.000		
							Jumlah Penduduk				8.956.181
							Jumlah produksi padi Tahun 2020 adalah 4.678.413 ton gkg dan konversi padi				5.090.637, 23

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							menjadi beras = 64,02%				
						3)	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Ton	4.607,07	140	140
							Cadangan Beras Total Provinsi Sulsel Tahun 2020 = 0,5% x 8.851.240 Jiwa x 104,1 kg/Kap/tahun/1000				
							Cadangan Beras Total Provinsi = 20% x 4.607,07 Ton	Ton	921,41		
							Jadi Persentase Cadangan Pangan dengan Rumus / Perhitungan adalah = 140 Ton/921,41 Ton x 100%	%	15,19		
						4)	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal		0	0	0
						5)	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kegiatan	9	6	8
						6)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen
						7)	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen
						8)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tertangani	20 Klp
						9)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak ada pengajuan permintaan cadangan pangan	Tidak ada pengajuan permintaan cadangan pangan
						10)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	PERTANAHAN										
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	99,60	100	100	1)	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	%	83,33	100	100
2)						Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	83,33	100	100	
3)						SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	%	96,00	100	100	
4)						Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	%	83,33	100	100	
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	94,5	73,63	50,39						
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	%	100	93,76	100						
	LINGKUNGAN HIDUP										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	71,74	73,23	74,14	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap:				
							Indeks Kualitas Air (IKA)		54,00	56,82	57,79
							Indeks Kualitas Udara (IKU)		88,73	89,13	90,35
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		63,56	55,40	55,46
							Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		70,22	84,82	85,59
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	%	70,73	80	61,97	1)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	%	100	100	100
						2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang	%	78,57	185,71	171,42

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	Daerah Provinsi						diterbitkan oleh pemerintah provinsi				
						3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	%	19,40	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	4,48	27,78	72,22
						5)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	%	100	100	100
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	%	100	100	100
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	12,82	15,38	55,56	2)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	%	100	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	47,41	36,27	35,45	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	147	3	2
							Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	13	7	5
							Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	3.378	2	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	274	25	58
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	100	17,58	31,09	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	375	65	205
						2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	36	33	48
						3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Desa	31.181	90	18
						4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	184	33	303
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,13	2,29	2,29	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Dokumen	2	1	1
						2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		21,9	21,5	21,5
						3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		40	27,4	27,4
						4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	69	
						5)	Jumlah stakeholders/pemangku	%	20	50	40

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK				
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%		71,66	56,62	1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100	92,42	70,27
						2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0,18	18,41	12,91
						3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	28,5	24,93	9,53
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,86	14,26	26,13	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Kabupaten/ Kota	12	10	12
						2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	68,34	68,34	135,12
	PERHUBUNGAN										
1	Rasio konektivitas provinsi		70,50	0,69	0,69	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	%	31,25	43,75	43,75
						2)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	%	100	100	100
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi		0,45	0,45	0,46	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan provinsi	%	5,5	3,25	1,95
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,83	97,44	100	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,82	97,4	100
						2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	97,82	97,4	100
						3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	55,56	35,48	24,11	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100	240	112
						2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	84,78	84,78	97
						3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-	%	33	51,2	97

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							undangan				
						4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	37	97,67	100
						5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	1,78	5,81	2,96
						6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	83,11	86,88	100
						7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	8,03	50,00	44,33
						8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	32,60	30,7	94,87
						9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	32,60	30,7	94,87
						10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	21,73	61,5	97,44
						11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	8,03	40,15	44,33
						12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	26,08	66,6	97
						13)	Persentase ASN pengelola TIK yang	%	61,53	15,56	66,67

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo				
						14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	70,78	79,97	90,94	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	%	89,75	83,26	51
						2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	31,21	51,97	51,49
						3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1	Meningkatnya Koprasi yang berkualitas	%	7,59	28,69	22,73	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	21,88	20	6
						2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	%		46,71	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				
						3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	7,31	100	0,73
						4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	26,83	100	100
						5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	17,24	1,1	0,05
						6)	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	2,23	4,96	0,08
						7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	3,45	1,10	0
						8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat	%	16,2	0,09	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				
						9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	24,48	0,042	0
						10)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	40	0,043	0
						11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	40	0,05	0
						12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	40	0,01	0
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	20,43	7,62	45	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	%	28,59	15,08	0,14
						2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput	%	10,84	48,21	0,65

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							ke dalam sistem online data system (ODS)				
						3)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	%	0,35	6,71	45
						4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,19	39,97	0,54
						5)	Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	3,07	59,98	1,22
						6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	15,91	11,55	0,75
						7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	3,97	56,05	0,46
	PENANAMAN MODAL										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	22,81	32,37	-14,11	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Belum Tersedia	Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi	Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
						2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Belum Tersedia	Belum tersedia (Surat Keterangan)	Belum ada Standar Operasional Prosedur yang dibuat terkait pemberian fasilitasi/ insentif penananam modal

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Belum Tersedia	Belum tersedia (Surat Keterangan)	Belum dilaksanakan evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2021, baru sampai pada tahap pelaksanaan Sosialisasi Perda
						4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kegiatan	1	10	7
						5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	1	0	0
						6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	4	8	1
						7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		104	15	33
						8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		24.376	40.165	30.691 (10.162 Perizinan; 20.529 Non Perizinan)
						9)	Laporan realisasi penanaman modal		12,5 T	16,6 T	14,2 T
						10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			99	0
						11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		144	30	460
						12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Data dan Informasi	3	6	3

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,09	0,21	0,24	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Pemuda	4.748	345	5.531
						2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Pemuda	0	5	5
						3)	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Pemuda	110	4.445	6.511
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,34	4,07	3,71	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Pengelola	53.422	96.726	87.119
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	52	108	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Pelatih	1.151	1.226	1.248
						2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Atlit	340	4.046	4.268
						3)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	0	15	46
						4)	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Pemuda	0	200	255
						5)	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	0	25	25
	STATISTIK PROVINSI										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik	%	100	100	100	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						2)	Jumlah survey statistik sektoral yang	Survei	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						dilakukan				
						3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		0	3	3
						4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Survei	0	0	0
						5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		0	0	8
						6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	%	0	33,3	41
						7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	%	100	33,3	41
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100						
PERSANDIAN PROVINSI											
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	19,07	24,65	32,71	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	25	33	50
						2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	8,16	80	83,33
						3)	Persentase system elektronik/asset	%	0	20,69	34,48

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah				
						4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	100	100	100
	KEBUDAYAAN										
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	33,36	33,33	16,67	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	2	11	2
						2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Obyek	3	11	2
						3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	2	11	2
						4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		55	176	1
						5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar Budaya	6	3	18
						6)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan	Cagar Budaya	2	7	3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							pemugaran)				
						7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Cagar Budaya	0	0	0
						8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Cagar Budaya	2	7	2
						9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	6	3	3
						10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Koleksi Museum	300	250	536
							Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Pengunjung	9.204	25.803	101.638
						11)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum		0		32
						12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			1.162	536
						13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	7	1	7
						14)	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Tim	5	7	7
						15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Ahli CB	33	6	7
						16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	SDM	3	31	25
						17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	SDM	3	3	1
						18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan	Sarpras	3	5	7

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							permuseuman				
						19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	7	14	9
PERPUSTAKAAN PROVINSI											
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			6,31	67,21	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	112,82	100,41	111,8
						2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	1,2	69,95	14,31
						3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,1	0,04	0,33
						4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	8,08	36,03	49,69
						5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		2.987	50.931	529.671
						6)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	Judul / Exp	488 / 763	17.144 judul dan 17.726 exp	17.560 exp
						7)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	Judul	4497	45.256	5.497
						8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	Perpustakaan	35	45	45
						9)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	Terbitan	1121	1.661	1.265
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		11,93	13,28	78,49	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Judul / Rol	4.049 / 82	4.049 judul dan 82 rol	4.049 judul dan 82 rol
						2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Naskah	1	6	6

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Judul / Exp	186 / 345	186 judul dan 346 exp	186 judul dan 346 exp
KEARSIPAN PROVINSI											
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			73.995	46,05	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,63	95,98	16,72
						2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	88,61	100	24,47
						3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	68,57	45,00	0,595
						4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN+G15 melalui JIKN	%	4,17	0	0,004
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			100	100	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Berkas	490	23	23
						2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Kabupaten	2	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	OPD	2	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Khazanah	1	2	4
						5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		870	856	1
						6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga	Izin	64	122	493

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK				
URUSAN PILIHAN											
KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	4.051.291,9	4.817.918,6	4.532.552,5	1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	WPP	4	713	713
						2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	SIUP	352	407	444
						3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	%	50,00	45,45	68,4
						4)	Jumlah izin/pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Izin	3.291	SIPI (10 - 30 GT) = 2.190 Unit Kapal SIKPI = 180 Unit Kapal BPKP (>5 - 10 GT) = 450 Unit Kapal	SIUP = 44 unit kapal 10-30 GT; BPKP = 552 unit kapal >5-10 GT
						5)	Jumlah kapal yang+G12 terdaftar	Unit Kapal	3.291	3.227	1.020
						6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Izin Usaha	23	17	26
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang	%	1,48	63,87	94,01	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	11,87	0,01	6,13

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	berlaku					2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	%	28,57	28,57	71,42
						3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Unit	359	357	403
						4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Izin Usaha	23	17	5
						5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Izin Usaha	186	145	9
						6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		31	19	9
						7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	POKMAS WAS	45	54	75
						8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Izin Usaha	186	145	3

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	PARIWISATA										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-96,23	-44,76	176,41	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Kawasan	1	2 (Kawasan geopark Maros_pangkep dan Kawasan Benteng Somba Opu)	1
						2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		5	1. Pembangunan toilet, 2. Pembuatan papan informasi 3. Pembuatan papan penunjuk arah 4. Musholla 5. Pusat Informasi 6. Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	11
						3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Rp	285.159,84	427.990.700	1.087.000.000
						4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata		179	113 Hotel dan Restoran	Rp.6.767.064.864.781
						5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi		77	81	52
						6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	3,08	1,13	1,5

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							mancanegara				
						7)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Hari	1,54	1,6	1,5
						8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Wisman	6.598	3.645	14.310
						9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Wisnus	367.926	1.612.737	7.487.899
						10)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Promosi	1	15	0
						11)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Event	0	0	0
						12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Travel	1	98	39
						13)	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	%	4,02	11,54	17
						14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%		100	100
						15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi		7	2
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%		338,33	60,44						
3	Tingkat hunian akomodasi	%		27,94	26,62						
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%		1,18	1,38						
PERTANIAN											

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	3,42	529,57	523,97	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Paket	420	19.253	14.763
						2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Pohon	665.515	496.199	729.294
						3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Dokumen	474	865	607
						4)	Prasarana pertanian yang digunakan		438,99	100	100
						5)	Pengendalian penganggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Ha	17.932	22.215	18.970
						6)	Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana	Ha	45.028	61.037	33.334
						7)	Penerbitan izin usaha pertanian	Izin Usaha	213	289	241
						8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	%	0	100	100
						9)	Persentase sarana pertanian yang digunakanPersentase fasilitasi penganggulangan bencana	%	71,51	70,01	91,41
						10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	%	100	100	100
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	3,84	-66,61	-89,21						
KEHUTANAN											
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	15,80	24,04	26,8	1)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	%	0	100	67
						2)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	%	100	100	67
						3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	12.510	13.023	12.163,2
						4)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan	%	0,0002	0,04	0,00314

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							hutan produksi				
						5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	%	0,69	0,08	0,0265
						6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	%	55	55	71,71
						7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
						8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						9)	Pemulihan ekosistem pada Tahura		Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						10)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura		Tidak Ada	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						11)	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	%	47,88	57,33	64,5
						12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	%		Surat Keterangan	98,35
						13)	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	%	58,33	Surat Keterangan	Surat Keterangan
						14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	KTH	400	428	505
						15)	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
						16)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor			1	1
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0,70	0,08	0,03						

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	29,43	65,61	71,14						
Energi dan Sumber Daya Mineral											
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100	100	1,05	1)	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)
						2)	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peta Potensi Air Tanah)	Ada (Peta Potensi Air Tanah)
						3)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)
						4)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan	Ada (Peraturan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							dalam area provinsi			Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)	Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)
						5)	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Nilai perolehan Air Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan)	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Nilai perolehan Air Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan)
						6)	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039)	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039)
						7)	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara)	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara)
						8)	Perda/Pergub terkait IUJP	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)	Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
						9)	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Ada/ Tidak Ada	Ada	Tidak Ada dikarenakan terhitung sejak 10 Desember 2020, seluruh kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat secara utuh sampai dengan diterbitkannya Rancangan Peraturan Presiden terkait pendelegasian	Ada (Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
										kewenangan	
						10)	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas Bumi belum di optimalkan di Sulsel	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas Bumi belum di optimalkan di Sulsel
						11)	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas Bumi belum di optimalkan di Sulsel	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas Bumi belum di optimalkan di Sulsel
						12)	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada yang melakukan permintaan perizinan (Bukan Kewenangan Provinsi)	Tidak Ada yang melakukan permintaan perizinan
						13)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Pergub berkaitan tersebut masih sesuai Permen	Tidak ada Pergub berkaitan tersebut masih sesuai permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
						14)	Penerbitan izin operasi yang fasilitas	Ada/	Ada	Ada	Rekomendasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							instalasinya dalam daerah provinsi	Tidak Ada		(Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan)	Penilaian Kesesuaian untuk IUPTLS sebanyak 12 rekomendasi
						15)	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listtik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Tidak Ada dikarenakan sudah menjadi kewenangan pusat	Tidak ada masih berdasarkan PerPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 42 ayat 4 yang merubah Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
						16)	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada yang bermohon	Tidak ada karena berdasarkan PerPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 42 yang merubah Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lampiran 1 sektor ESDM, hal tersebut masuk dalam kewenangan Menteri
						17)	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk	Izin	8	Ada (Data Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan di	Rekomendasi Penilaian Kesesuaian untuk IUJPTL sebanyak 48

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah			Wilayah Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021)	rekomendasi
						18)	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Ruta	56	Ada dengan pembangunan LTSHE 2 Lokasi Tahun 2021	Total RT berlistrik sebanyak 179 RT
2	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	98,18	98,49	98,8	1)	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Ada/Tidak Ada		Tidak Ada yang melakukan perizinan tersebut	Tidak Ada yang melakukan perizinan tersebut
	PERDAGANGAN										
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas		-5,37	21,15	40,63	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas <u>promosi dagang</u>	%	12	16,67	50
						2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas <u>pengembangan produk</u>	%	0	13,33	13,33
						3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	%		6,2	9,16
						4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	%		44,4	18,18
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	81,69	64,04	100	1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Pengaduan	71	64	41
						2)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi			0	0
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan	%	80,60	49,34	258,6	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau			7	6
						2)	Indeks Kinerja BPSMB			8	8

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	berlaku										
4	Tertib Usaha	%		100	100	1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	%		0	0
						2)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	%		0	0
						3)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	%		0	100
						4)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual minum di tempat	%		0	0
						5)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%		100	100
5	Persentasi kinerja realisasi pupuk	%	30,00	78,52	93,3	1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	%			0,00017253
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	24,01	59,15	88	1)	Jumlah barang beredar yang diawasi		20.410	30.000	30.000
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%			24,95	1)	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi	%		100	100
							Tersedianya bangunan pusat distribusi				
							Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
							Beroperasinya pusat industri				
							Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani				
						2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%		1. Beras : 1,43%, 2. Gula pasir : 2,13%, 3. Minyak Goreng : 28,06% 4. Tepung terigu : 9,46% 5. Daging sapi : 3,42% 6. Daging ayam : 10,12% 7. Telur : 2,11% 8. Cabe rawit : 126,19% 9. Susu kental manis : 0%	1. Beras : 6,72 % 2. Gula Pasir : 7,91% 3. Minyak Goreng : 34,65% 4. Tepung Terigu : 17,45% 5. Daging Sapi : 6,56% 6. Daging Ayam : 12,7% 7. Telur : 19,63% 8. Cabe Rawit : 104,9% 9. Susu Kental Manis : 14,07 %
						3)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	%		100	100
	PERINDUSTRIAN										
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi Tahun 2019 berjumlah: 76 Tahun 2020 berjumlah: 75	%	-0,013	0	-48	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah				Tersedianya Data Jumlah industri besar tahun 2021 dan tahun 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%		75	110,33 (Hanya 2 yang ditetapkan dalam RPIP dan RIPIN)	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda = 100%	%	100	100	75
	Pertumbuhan Sektor Industri = 10,81%				78,63						
	Kontribusi Industri NonMigas terhadap PDRB: 16,41%				154,27						
	Nilai Ekspor Produk Industri (Juta USD): 1.756,29				0,06						
	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Org) : 33.000				56,06						
	Nilai Investasi (Rp. Milyar) : 1.265,88				48,81						
	Penanaman Modal-PMA (USD Juta) : 38,95 - PMDN (Rp. Milyar) : 759,53				2,57						
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	50	100	100	1)	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	%	100	Diterbitkannya Izin Usaha Industri Besar (IUI) = 1. PT. Cahaya Dinamika Persada. Dan 2. PT. Teguh Wira Pratama	Izin Usaha Industri Besar (IUI) = 1. PT. Tirta Fresindo

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
											Jaya 2. PT. Nutrindo Bogarasa 3. PT. Ocean Champ Seafood 4. PT. Semen Tonasa 5. PT. Karunia Abadi
						2)	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan				
						3)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi				
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		100	0 (Sudah ada izin yang dikeluarkan namun belum dilakukan pemantauan dan pengawasan				Surat keterangan berupa pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala dinas		Diterbitkannya Izin Perluasan Usaha Industri Besar (IPUI) = PT. Karunia

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
					terhadap industri terkait)						Abadi
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		100	0 (Bahwa izin bukan kewenangan secara langsung (Rekomendasi) tetapi pengawasan terkait izin tersebut menjadi kewenangannya)	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		Surat keterangan berupa pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas		Surat keterangan berupa pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125 (Tersedia)	Tersedia		1)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota				Data industri semester I berdasarkan klasifikasi yang terdaftar di SIINas
	Keterkaitan informasi industri tersedianya industri dengan batas waktu 0-6 bulan				50						Data 24 kab/kota berdasarkan informasi produksi, kapasitas produksi dan bahan penolong
	Kelengkapan informarsi industri meliputi: Informasi produksi dan kapasitas				20						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
	produksi, informasi bahan baku dan bahan penolong										
	Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri				70						
TRANSMIGRASI											
						1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	0	0	0
						2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Permukiman	3	2	6
						3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Satuan Permukiman	8	4	5
FUNGSI PENUNJANG URUSAN											
PERENCANAAN DAN KEUANGAN											
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	9,14	10,05	10,37						
2	Rasio PAD	%	1,18	0,91	54,11						
3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	%	46,95	52,21	58,34						
4	Opini Laporan Keuangan		WDP	WTP	WTP						
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 3	Level 3	Level 3						
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 2	Level 2	Level 2						
PENGADAAN											

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama	%	0	100	1,2						
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	53,67	6,03	4,18						
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	83,39	44,47	27,19						
4	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dab Koperasi pada pelaksanaan Barang dan Jasa	%			8,15						
KEPEGAWAIAN											
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	2,58	73,59	75,43						
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,28	20,91	28,5						
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,28	100	100						
MANAJEMEN KEUANGAN											

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian			No	IKK Output	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022				2020	2021	2022
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93,05	83,83	1,66						
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	86,52	96,51	2,79						
3	Assets Management		Ada	Ada	Ada						
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	0,76	3,24	2,59						
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK											
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	33,55	92,02	95,3						
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	21,82	24,85	17,09						

2.5.5 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan provinsi. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2020 hingga 2022 dari 17 tujuan sejumlah 206 indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.136.
Capaian Kinerja Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN					
	TARGET 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	8,99	8,53	8,66
	TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas kesehatan	%	86,48	92,97	100
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	77,99	47,12	49,43
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial	%	35,12	7,40	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	Jiwa	313.357	365.669	364.414
	TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro					
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	BPS	%	92,72	94,35 (BPS=95,44)	94,32

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	terakhirnya di fasilitas kesehatan					
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12- 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40 terbawah)	Dinas Kesehatan	%	-	98,3	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Kesehatan	%	73,69	73,41 (BPS = 59,66)	73,01
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	BPS	%	90,84	91,18	91,96
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	BPS	%	88,96	91,57	92,24
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40 terbawah)	BPS	%	5,82	3,51	3,82
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	BPS	%	60,32	60,35	60,44
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	89,27	93,99	96,51
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40 terbawah)	BPS	%	N/A	99,41	97,36
	TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana					
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang				Meninggal: 27, Terdampak: 21.470	Meninggal: 32, Terdampak: 2.312

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal : 78 Terdampak : 70.85	27	32
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	4	6
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	76	46
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	21.470	2.312
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	24	24	23
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial	%	100 (1.414 jiwa)	100	100 (26.921 jiwa)
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial	%	100 (1.414 jiwa)	100	100 (26.921 jiwa)
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	154,87	154,87	150,07
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	620 Milyar	119 Milyar	89 Milyar
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1
	TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN					
	TARGET 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	BPS	%	10,14	7,93	10,79
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight)	Dinas Kesehatan (SSGI)	%	23	19	21,7

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	pada anak balita					
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	4,33	4,02	3,78
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	8,12*	10,7*	
TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan (SSGI)	%	30,59	27,4	27,2
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinas Kesehatan	%	Tidak Ada Survey	Tidak Ada Survey	Tidak Ada Survey
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan (SSGI)	%	NA	6,2	8,3
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	%	13,4	9,94	8,5
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	%	67,8	74,60	72,2
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	84,9**	80	83,1
	Konsumsi ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	65,5	65,5	69,5

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERAH					
	TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup					
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	%	97,65	95,04	94,08
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	86	129	119
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	92,72	94,35	94,32
	TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	5	6	8
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	4	4	7
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	5	5	8
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	73,82	91,67	100
	TARGET 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya					
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1.000 Penduduk	0,103	0,116	0,19
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan	%	0,02	0,028	0,26
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000	Dinas Kesehatan	Per 100.000 penduduk	160	162	228

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	penduduk		(Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS)			
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kabupaten	21	21	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Dinas Kesehatan	%	N/A	100	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Dinas Kesehatan	Filariasis : Orang	N/A	51.114	
			Kusta : Orang	696		
3.3.5.(a)	Jumlah Provinsi / Kab / Kota dengan eliminasi Kusta	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	17	18	
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Dinas Kesehatan	%	N/A	0	
	TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Dinas Kesehatan	%	3,41	4,1	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	3,50	9,06	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan		2,76	2,33	
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	22	24	
	TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membayakan					
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	N/A		

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional					
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Kesehatan	%	73,69	73,41	73,01
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Dinas Kesehatan	%	19,02	21,11	23,14
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DP3A Dalduk	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	29	27,4	29,5
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3A Dalduk		2,44	2,29	2,22
	TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS	%	5,66	4,22	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan	Jiwa	795	8.484	920
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	86,48	92,97	97,03
	TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	24,89	21,11	13,98 (15-24 th)
	TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua					
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	90	90	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil					
3.c.1*	Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tenaga Kesehatan/100.000 penduduk	43	60	60
	Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas					
	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	%	88,49	88,09	76,15
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	86,44	87,07	86,49
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	BPS	Tahun	8,38	8,46	8,63
	TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas					
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	86,44	87,07	86,49
	TARGET 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan					
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	Remaja (15-24)	88,78	94,1	94,81
			Dewasa (15-59)	60,5	67,29	73,16
	TARGET 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	BPS	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki	100,97	96,84	99,03

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	(2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		di SMA/SMK/MA/ sederajat ()			
	TARGET 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	92,56	92,49	93,31
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	BPS	(umur 15-24 tahun)	99,93	99,78	99,8
	TARGET 4.5 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil					
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	%		54,15	49,77
			%			
			%	SMA = 51,02		
			%	SMK = 44,25		
			%	SLB = 55,53		
	Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER					
	TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun					
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DP3A Dalduk	Kebijakan	4	8	7
	TARGET 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya					
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional)	DP3A Dalduk	%	0,042	0,033	0,03

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir					
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	DP3A Dalduk	%	0,086	0,092	0,011
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	DP3A Dalduk	%	100	100	100
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3A Dalduk	%	0,042	0,033	0,03
	TARGET 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan					
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	DP3A Dalduk	18 tahun	11,25	9,25	9,33
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	DP3A Dalduk	%	20	21,5	21,05
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DP3A Dalduk	Kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	29,07	27,40	29,5
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	86,44	87,07	86,49
	TARGET 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan	DP3A Dalduk	%	25,88	25,88	25,88

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	pemerintah daerah					
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	BPS	%	26,42	32,14	37,65
	TARGET 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.					
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DP3A Dalduk	%	46,88	42,25	26,1
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	%	85,3	87,17	87,52
	Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK					
	TARGET 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	%	90,84	91,18	91,96
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	m3/detik	9,00	8,83	11,509
6.1.1.(C)	Proporsi populasi (rumah tangga) yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	BPS	%	44,39	46,22	46,39
	TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi (rumah tangga) yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun	BPS	%	88,71	89,08	87,22

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	dan air					
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	%	88,96	91,57	92,24
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa / Kelurahan	3.047	3.047	3.047
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa / Kelurahan	2.676	2.863	3.012
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	Kab/ Kota	24	24	16
	TARGET 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global					
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kab/ Kota	15	15	16
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0		
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0		
	TARGET 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.					
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang	Dinas Kehutanan	RPDAST	0	2	4

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	Wilayah (RTRW).					
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	jaringan informasi	4	24	16
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas Kehutanan	Ha	90.425,79	175.507,49	196.743,33
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	wilayah sungai	4	15	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	lembaga	5	5	5
	TARGET 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau					
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Dinas Kehutanan	Ha	12.510	13.023	12.678,2
6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas kehutanan	DAS	4	2	2
	TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU					
	TARGET 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern					
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	98,43	98,72	99,89
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	KWh	743,58		848,93
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	90	91,67	93,38

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TARGET 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global					
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	20,74	22	27,5
	TARGET 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.					
7.3.1*	Intensitas energi primer	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	SBM (setara barrel minyak)	-	-	-
	TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI					
	TARGET 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK)	BPS		- 3,28	3,66	4,11
8.1.1.(a)	PDRB per kapita (ADHB)	BPS	Juta Rupiah	55,67	59,65	65,59
	PDRB per kapita (ADHK)	BPS	Juta Rupiah	36,25	37,57	35,11
	TARGET 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	%	43,18	46,27	35,17
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS	%	35,78	36,76	36,43
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	%	91,73	33,24	35,96
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	29	30,96	39,22
	TARGET 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya					
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah/Jam)	BPS	%	19.172	19.217	36.450

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	6,31	5,72	4,51
8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	9,96	7,42	6,23
	TARGET 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	25,48	23,78	22,61
	TARGET 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal					
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	%	2,82	1,18	1,32
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	Jiwa	6.598	3.645	70.977
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	Jiwa	367.926	1.612.737	7.590.063
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Tenaga kerja dan Tansmigrasi	%	3,73	Tidak ada survey	Tidak ada survey
	TARGET 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua					
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	30	30,41	35,76
	TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR					
	TARGET 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua					
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Dinas Perhubungan	Km	-	42,7	116

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	2
	TARGET 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas Perindustrian	%	13,06	12,47	13,42
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perindustrian		-4,42	-0,27	9,86
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	8,16	16,35	15,45
	TARGET 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.					
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas Perindustrian	%	9,11	8,91	Data Tidak Tersedia
	TARGET 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.					
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (sektor limbah)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	3,4	3,88	7,85
	TARGET 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan					
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	73,39	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	85,3	87,17	87,52
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,	%	49,59	59,69	94,24

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
		dan Persandian				
	TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN					
	TARGET 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	Indeks	0,382	0,377	0,365
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	8,99	8,53	8,66
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan (jumlah desa tertinggal)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten (Desa)	981	326	195
	TARGET 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut					
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	68,4		
	TARGET 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.					
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	%	77,99	47,12	49,43
	TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN					
	TARGET 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh					
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	%	64,24	69,11	69,9
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	kawasan perkotaan	-	-	-
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota sedang & Kota baru	-	-	-

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TARGET 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.					
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan		11,5	12,7	30,8
	TARGET 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Seding	7	7	Data Tidak Tersedia
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota	1	1	Data Tidak Tersedia
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappelitbangda	Institusi/ Kota	-	-	21
	TARGET 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.					
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Pusaka	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan					
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	78	27	32
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal = 78	Meninggal = 27	Meninggal : 32

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
				Terdampak = 70.854	Terdampak = 21.470	Terdampak : 2.312
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	4	6
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	76	46
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	21.470	2.312
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	157,55	154,87	150,07
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kab/Kota	-	8	Data Tidak Tersedia
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem	-	5	Data Tidak Tersedia
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	620 Milyar	119 Milyar	89 Milyar
	TARGET 11.6 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030					
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	30	82,32	54,48
	TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB					
	TARGET 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka					

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.					
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton	3.500.000	589007,56	5.557.493.578
	TARGET 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali					
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton/ Hari	19,97	31,82	174.375
	TUJUAN 13 :PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM					
	TARGET 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal = 78	Meninggal = 27	Meninggal : 32
				Terdampak = 70.854	Tercampak = 21.470	Terdampak : 2.312
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	27	32
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	4	6
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	76	46
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	21.470	2.312
	TARGET 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional					

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Bappelitbangda	Dokumen	-	1	1
	TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN					
	TARGET 14. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.					
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	87,48	63,87	94,01
	TARGET 14. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar					
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan	Regulasi/ Kebijakan	1	-	-
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kab/ Kota	19	19	19
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nelayan	NA	660	0
	TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN					
	TARGET 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.					
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan	%	56,64	0	Data Tidak Tersedia
	TARGET 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Dinas Kehutanan	Ha	100	Data Tidak Tersedia	55,46
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas Kehutanan	Ha	12.000	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan	KPH	16	16	24
	TARGET 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Kehutanan	%	0,27	0,73	0,71
	TARGET 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.					
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1
	TUJUAN 16 : PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh					
	TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS	Kasus	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
		POLDA	Kasus	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak					
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DP3A Dalduk	%	0,082	0,091	0,011
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP3A Dalduk	%	0,053	0,038	0,02

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3A Dalduk	%	51,31	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat					
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah		-	98,44	99,62
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	WDP	WTP	Belum Rilis
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	4,01 (A-)	4,10 (A-)	4,34 (A-)
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	63,02 (B)	65,61 (B)	66,16 (B)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Pembangunan Sekretariat Daerah	%	83,39	28,33	28,33
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	60,07 (B)	B (60,07)	B (66,16)
	TARGET 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan					
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS	%			Data Tidak Tersedia
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%			Data Tidak Tersedia

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	%			Data Tidak Tersedia
	TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1.(a)	Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40 bawah yang memiliki akta kelahiran	BPS	%	87,87	89	90,33
	TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN					
	TARGET 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	%	0,67	0,82	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Badan Pendapatan Daerah		0,56	0,71	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan Pendapatan Daerah	%	43,98	45,57	
	TARGET 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global					
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	73,39	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi					
17.8.1*	Proporsi individu (rumah tangga) yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	49,59	59,69	94,24
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau	Dinas Komunikasi,	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Informatika, Statistik, dan Persandian				
	TARGET 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	98,63	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	93,51	98,72	Data Tidak Tersedia
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	%	11	75	Data Tidak Tersedia
	TARGET 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang					
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Jiwa	100.933	109.937	Data Tidak Tersedia
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	92,69	96,3	Data Tidak Tersedia

2.6. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

1. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah di tahun 2022 atau tahun ke empat pencapaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2018-2023, secara umum pencapaiannya menggambarkan pencapaian yang cukup signifikan, ini dapat dijelaskan Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dari 223 total indikator terdapat 24 indikator dengan interpretasi **melampaui** dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 304 indikator dengan interpretasi **sesuai** dengan target, sedangkan 120 indikator lainnya dengan interpretasi **belum mencapai** target yang telah ditetapkan. Tentunya dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut pemerintah daerah banyak mengalami dinamika dalam pencapaian kinerja tersebut.

2. Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

A. Bidang Urusan Pendidikan

Untuk mengembangkan kebijakan terhadap pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyeimbangkan hard skill dan soft skill sehingga mencapai mutu yang berkualitas sesuai tuntutan standar nasional pendidikan, keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas-luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat.

Sedemikian pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun martabat bangsa, maka pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai ke tingkat tinggi. Perhatian tersebut ditujukan dengan cara menyediakan alokasi anggaran berarti serta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan yang lebih penting lagi adalah melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang yang ada.

Penyelenggaraan pembangunan bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta pengelolaan sarana prasarana Pendidikan. Dinas Pendidikan adalah satu bentuk organisasi pelayanan di bidang administrasi pendidikan khususnya terkait dengan upaya pengelolaan lembaga pendidikan sebagai rujukan yang mendukung upaya lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pelayanan pemerintah Dinas Pendidikan akan semakin giat untuk mendapat pandangan dan penilaian positif dari masyarakat. Selain itu, masyarakat menuntut lembaga negara harus dapat memberikan layanan yang One Stop Services, artinya seluruh kebutuhan pelayanan pendidikan dan pelayanan terkait siswa, guru

dan tenaga kependidikan harus dapat dilayani oleh Dinas Pendidikan secara efektif dan efisien.

Sebagai gambaran permasalahan dan solusi yang dilakukan pada aspek bidang urusan pendidikan yakni:

- **Permasalahan**

1. Pemerataan Guru belum Sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya Pendidikan Menengah terutama sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil. Adanya Pandemi Covid 19.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik itu di sekolah Pendidikan menengah maupun Pendidikan khusus.
3. Berdasarkan Standar Kualifikasi tenaga pendidik formal di Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus terdapat masih banyaknya guru yang belum bersertifikat (Sertifikasi Guru).
4. Standar Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional.
5. Informasi tentang pendidikan kurang diketahui masyarakat disebabkan tidak ada Sistem Informasi administrasi berbasis IT.
6. Perubahan anggaran/revocusing sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal.

- **Tindak lanjut/solusi**

1. Melalui Pemerataan dengan perpindahan dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru atau penambahan tenaga pendidik melalui penerimaan CPNS dan penerimaan melalui jalur P3K.
2. Optimalisasi penggunaan Dana, baik yang bersumber APBD maupun yang bersumber dari APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
3. Memberikan semacam pelatihan atau kursus untuk menghadapi ujian sertifikasi guru.
4. Melakukan Optimalisasi kegiatan PKG dan PKB.
5. Pengadaan system informasi administrasi berbasis IT agar informasi tentang pendidikan muda dan cepat tersebar ke masyarakat melalui website
6. Usulan anggaran tidak ada pengurangan.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi, Indikator yang harus dicapai dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah pelayanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon

seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan yang meliputi:

- Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan
- Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan
- Mendapatkan layanan gizi darurat
- Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat
- Mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial
- Mendapatkan Penyuluhan Kesehatan

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut:

- KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi yang meluas ke kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/ kota di satu provinsi berpotensi meluas ke kabupaten/kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- Pemerintah daerah kabupaten/ kota terdampak KLB tidak/ kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditanda tangani oleh kepala daerah kabupaten/ kota terdampak.

Sebagai gambaran permasalahan dan solusi yang dilakukan pada bidang urusan Kesehatan yakni:

- **Permasalahan**

1. Kurangnya dukungan Anggaran dalam kegiatan Pra dan Pasca krisis dan bencana.
2. Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan krisis kesehatan dan bencana.
3. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana (logistic) bencana/krisis Kesehatan.
4. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.
5. Permasalahan teknis pada pengisian laporan SPM dalam aplikasi e-SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual di lapangan.

- **Tindak Lanjut / Solusi**

1. Perlunya ditingkatkan anggaran dalam kegiatan pra dan pasca krisis dan bencana.
2. Perlu diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan data dalam penerapan SPM di daerah.
3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian penerapan SPM yang menghadirkan Kementerian Kesehatan RI serta Biro Pemerintahan Setda Prov. Sulsel dan OPD pengampu agar dapat melihat kendala serta membantu memberikan solusi terkait indikator mutu layanan yang bermasalah.
4. Perlu diadakan bimbingan teknis atau petunjuk teknis terkait indikator- indikator mutu layanan yang terdapat pada Peraturan Kementerian Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.
5. Perlu diadakan pengadaan logistic terkait pra krisis dan pasca bencana Pertemuan koordinasi pelaporan data krisis bencana.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas.

Sebagai gambaran permasalahan dan solusi yang dilakukan pada bidang urusan Pekerjaan Umum yakni:

- **Permasalahan**

1. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
2. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
4. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
5. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
6. Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan.
7. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

Solusi

- a. Menyamakan persepsi terhadap implementasi SPM.
- b. Melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen rkpd, sebagai acuan

dalam penyusunan APBD yang dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA).

- c. Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan sekretariat daerah.

d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:

- a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Bencana,
- b). Fasilitasi Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

- Permasalahan

- 1. Tantangan yang dihadapi adalah minimnya pengalokasian anggaran terhadap SPM dan kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi kejadiannya.
- 2. Tidak tersedianya pencandangan lahan untuk lokasi relokasi atau permukiman kembali bagi para korban bencana yang memungkinkan dan aman terhadap terjadinya bencana lagi untuk membantu mereka kembali mendapatkan kualitas hidup seperti sebelum terjadinya bencana atau bahkan mungkin biasa lebih baik.
- 3. Seringkali permohonan penanganan rumah akibat bencana dari Kab/Kota bersifat segera sehingga tidak tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA).

e. Tindak lanjut/Solusi

- a. Mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya diantaranya dana CSR, DAK dan Bantuan Keuangan.
- b. Fasilitasi penyediaan lahan melalui mekanisme:
 - 1) Penggunaan tanah negara.
 - 2) Konsolidasi oleh Pemilik tanah
 - 3) Kerjasama asset BMD/BMN
- c. Penanganan SPM sepanjang tahun 2020 hingga 2022 melalui mekanisme bantuan keuangan seperti di Kabupaten Kepulauan Selayar senilai Rp. 8.000.000.000,- di akhir tahun 2021 dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Maros senilai Rp. 732.500.000,-

f. Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kemudian dirubah menjadi permendagri 59 Tahun 2021. Dengan penajaman pelayanan pada trantibun yakni Jenis Pelayanan Dasar terkait Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS) adalah Pelayanan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum Provinsi.

- **Permasalahan**

1. Kurang Optimalnya kegiatan Pada Triwulan I TA. 2022 karena terkendala Biaya Operasional Kegiatan;
2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan awal tahun dilaksanakan di bulan Maret;
3. Belum optimalnya Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/ Instansi terkait;
4. Belum terintegrasinya Program kerja antar daerah dengan instansi terkait, sehingga penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum belum maksima.

- **Solusi**

1. Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal penggunaan anggaran dan menghindari adanya penambahan volume pekerjaan dalam APBD Perubahan;
2. Melaksanakan Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/Instansi terkait melalui Program kerja.;
3. Menjalin koordinasi yang baik dan salin bersinergi antar daerah, instansi terkait jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang kondusif.

g. Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dalam 5 (lima) indikator pelayanan dasar yang akan dicapai secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan provinsi Sulawesi Selatan memiliki korelasi yang sangat jelas dengan 5 (lima) indikator SPM daerah provinsi yang akan dicapai secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018, yang meliputi:

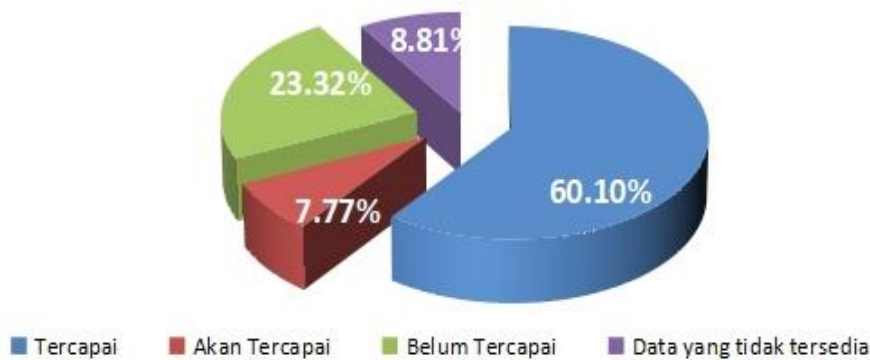
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi

- **Permasalahan**

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial pada Tahun 2022 yang ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, hal yang dapat disimpulkan secara umum bahwa dilihat dari aspek kuantitas capaian target sangat memuaskan, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator mutu layanan yang masih perlu dipenuhi agar kualitas pelayanan sosial melampaui standar pelayanan minimal.

- Sulitnya berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penerapan SPM. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021. Masih terdapat refocusing anggaran pada Tahun 2022 sehingga daerah mengalami keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua indikator mutu layanan dasar dapat terpenuhi. Permasalahan teknis pada pengisian laporan SPM dalam aplikasi e-SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual di lapangan. Tindak lanjut/Solusi
 1. Bantuan sandang dan pangan dari kementerian sosial, bantuan lain dari pihak luar atau CSR juga disalurkan ke beberapa panti untuk memenuhi kebutuhan dasar PPKS yang berada di dalam panti tersebut.
 2. Perlu diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan data dasar dalam penerapan SPM di daerah.
 3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian penerapan SPM yang menghadirkan Kementerian Sosial RI serta Biro Pemerintahan Setda Prov. Sulsel agar dapat melihat kendala serta membantu memberikan solusi terkait indikator mutu layanan yang bermasalah.
 4. Perlu diadakan bimbingan teknis atau petunjuk teknis terkait indikator-indikator mutu layanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota..
- 3. Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan. Provinsi Sulawesi Selatan menentukan target sebanyak 193 Indikator yang termuat didalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 dengan Evaluasi Capaian Berdasarkan Target RAD SDGS Tahun 2021 yaitu 116 Indikator (60.1%) telah tercapai target, 45 Indikator (21.32%) belum tercapai target, 15 Indikator (7.77%) capaian yang membaik, dan 17 Indikator (8.81%) yang datanya tidak tersedia. Terjadi peningkatan indikator yang tercapai sebesar 4 Indikator (3,1%) dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai 112 Indikator (57%). Hal ini menunjukkan kondisi pencapaian pada indikator TPB/SDGs pada tahun 2021 walaupun tidak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020 masih dapat memberikan trend positif pada pencapaian indikator. Beberapa kebijakan yang mendukung sebagai respon atas penyebaran COVID-19 seperti Pelaksanaan Mobile vaccinator yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Selain itu, beberapa dukungan data dari BPS yang tidak dapat dipenuhi karena tidak melakukan survei akibat COVID-19 pada tahun 2020 dapat disediakan pada tahun 2021.

Grafik II. 138.
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



Sumber: Bappelitbangda Prov.sulsel (2021)

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 82 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak 54 indikator telah mencapai target. Sebanyak 9 indikator tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 26 indikator (13,5%). Dalah satu capaian pada pilar pembangunan sosial ialah tujuan 2 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tercatat membaik dari 23% (E-PPGBM,2020) menurun hingga mencapai angka 19% (SSGBI, 2021).

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 47 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 29 indikator (15,0%) telah mencapai target. Sebanyak 2 indikator (1,0%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 15 indikator (7,8%).

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan mencakup sebanyak 48 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 28 indikator (14,5%) telah mencapai target. Sebanyak 15 indikator (10,4%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 1 indikator (11,9%). Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 1 tujuan mencakup sebanyak 15 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 3 indikator (1,6%) telah mencapai target. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 5 indikator (2,6%).

Tabel II.137.
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Berdasarkan 4 Pilar Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Pilar	Jumlah Indikator	Tercapai	%	Belum Tercapai	%	Akan Tercapai	%	Data Tidak Tersedia	%
Pilar sosial	83	50	25.9%	26	13.5 %	1	0.5%	6	3.1%
Pilar Ekonomi	47	29	15.0%	15	7.8%	2	1.0%	1	0.5%
Pilar Lingkungan	48	28	14.5%	15	7.8%	1	0.5%	4	2.1%
Pilar Kelembagaan	15	3	1.6%	5	2.6%	0	0.0%	7	3.6%
	193	110		61		4		18	

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel (Data diolah), 2021

Ada beberapa permasalahan pada capaian indikator di tahun 2021. Pada Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas mengalami permasalahan akibat tidak adanya lembaga/panti pemerintah (UPTD)/Pusat Pelayanan Sosial yang khusus menangani Penyandang Disabilitas di bawah naungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ada hanyalah Lembaga swasta dan swadaya masyarakat dimana lembaga tersebut tidak bersifat terikat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hanya sebagai mitra kerja. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak bisa membuat program khusus ataupun melaksanakan program kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas khususnya pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu Adanya regulasi/aturan yang membatasi pemberian bantuan kepada PPKS, dimana Pemerintah Provinsi hanya boleh memberikan bantuan kepada PPKS yang berada di dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial .

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita juga belum tercapai. Penyebab Belum Tercapainya target Stunting yaitu pada Intervensi Sensitif Belum terintegrasinya Penanganan Stunting dengan Penanggulangan Kemiskinan, Perbaikan Lingkungan/Sarana air bersih dan untuk Intervensi Spesifik Terdapat Beberapa cakupan Indikator yang belum mencapai target seperti Cakupan Remaja Puteri yang mendapat TTD (48%), Jumlah balita yang datang ke Posyandu (D/S) 71%, Masih tingginya angka BBLR (4%) penanggulangan underweight di Kab/ Kota Lainnya Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pola pengasuhan anak, pola pemberian makanan bayi dan anak, higiene sanitasi lingkungan, pemanfaatan layanan kesehatan. Upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting, membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Dalam mencapai keterpaduan/integrasi tersebut, diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor antara tingkat pemerintah pusat, pemerintah povinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Untuk menjamin terlaksananya keterpaduan tersebut, maka pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda kemudian merumuskan Delapan Program Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi yang wajib diterapkan oleh semua kabupaten/kota lokus. Salah satu program yang mendukung Penurunan Angka Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan ialah Program Gammara'na (Gerakan Masyarakat Mencegah Dan Memberantas Stunting). Program ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan Stunting Melalui Pendampingan Keluarga Khususnya Sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Untuk penajaman penjelasan Tujuan 3 Terkait Kesehatan dan, indikator jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk tidak dapat tercapai pada tahun 2021 akibat Sosialisasi BPJS Kesehatan kepada masyarakat belum optimal. Padat tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Masih banyak siswa pendidikan menengah yang berusia lebih atau kurang dari 16-18 Tahun, antara lain disebabkan karena masuk sekolah dasar sebelum waktunya, Tinggal kelas, penyebab lainnya yaitu siswa putus sekolah Target tercapai namun pada dasarnya angka APM masih rendah

Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) pada Tujuan 5 juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Yang menjadi factor utama terhambatnya indikator ini ialah masih cukup tingginya pernikahan Anak (Usia Dini) di 16 Kab/Kota di Sulawesi Selatan. Salah satu rencana tindak lanjut dalam menyikapi permasalahan ini ialah dengan melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Agama terkait Konseling Pranika tentang tidak boleh melakukan pernikahan di usia dini.

Untuk Pencapaian Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja yang didominasi tingkat pendidikan SMP kebawah sebesar 60,16 %, adanya PHK terhadap pekerja formal tidak adanya kesesuaian ketrampilan antara pencari kerja dan kualifikasi yang diperlukan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal, dan pada akhirnya mereka hanya terserap ke pekerjaan informal mempengaruhi pencapaian indikator Persentase tenaga kerja formal

2.7 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2022

1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2022.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;

- 2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- 3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel II.138.
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD Tahun 2022

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Dinas Pendidikan	6	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	2
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
3	UPT Transfusi Darah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
4	UPT Pelatihan Kesehatan	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	4	1	1	1	1	1	1	1	3	0	0	3
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	2
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	3	3	3	2	3	3	2	2	0	0	1	1
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
14	Satuan Polisi Pamong Praja	3	4	4	4	4	4	4	4	-1	0	0	-1
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
16	Dinas Sosial	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
19	Dinas Ketahanan Pangan	5	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
23	Dinas Perhubungan	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	10	9	9	9	9	9	9	9	1	0	0	1
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	2
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	1
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
33	Dinas Kehutanan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
35	Dinas Perdagangan	7	6	6	6	6	6	6	6	1	0	0	1
36	Dinas Perindustrian	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
39	Biro Hukum	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
40	Biro Organisasi	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

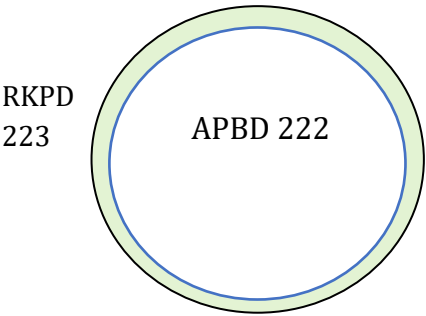
No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
41	Biro Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
42	Biro Administrasi Pimpinan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
45	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
48	Badan Pendapatan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
49	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
51	Badan Penghubung Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
	Jumlah	238	223	223	222	223	223	222	222	15	0	1	16

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

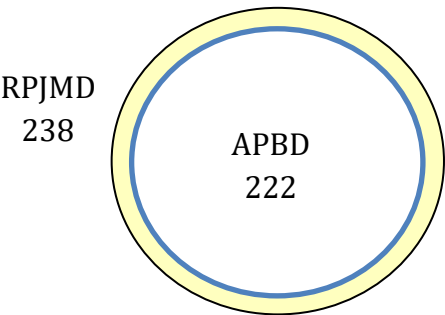
- 1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
 - a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 238 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2022 juga berjumlah 223 program (jumlah pada kolom 4).
 - b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 15 program diantara kedua dokumen tersebut dokumen RKPD.
 - c. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara RPJMD dan RKPD sudah **konsisten**, karena semua program yang tertuang dalam RKPD merupakan Penjabaran dari RPJMD.
- 2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
 - a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 223 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 223 program (jumlah pada kolom 5).
 - b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD sudah **konsisten**.
- 3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
 - a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 223 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 222 program (jumlah pada kolom 6). Untuk kesesuaian program yang sama antara RKPD dan APBD sejumlah 223 program namun, dari sejumlah program dalam RKPD dan APBD tersebut secara total jumlah terdapat selisih 1 yang tidak sama antara jumlah APBD dan RPKD (jumlah pada kolom 13).
 - b. Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah program yang ada di RKPD namun tidak terdapat dalam APBD.

Konsistensi program antara RKPD dan APBD tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



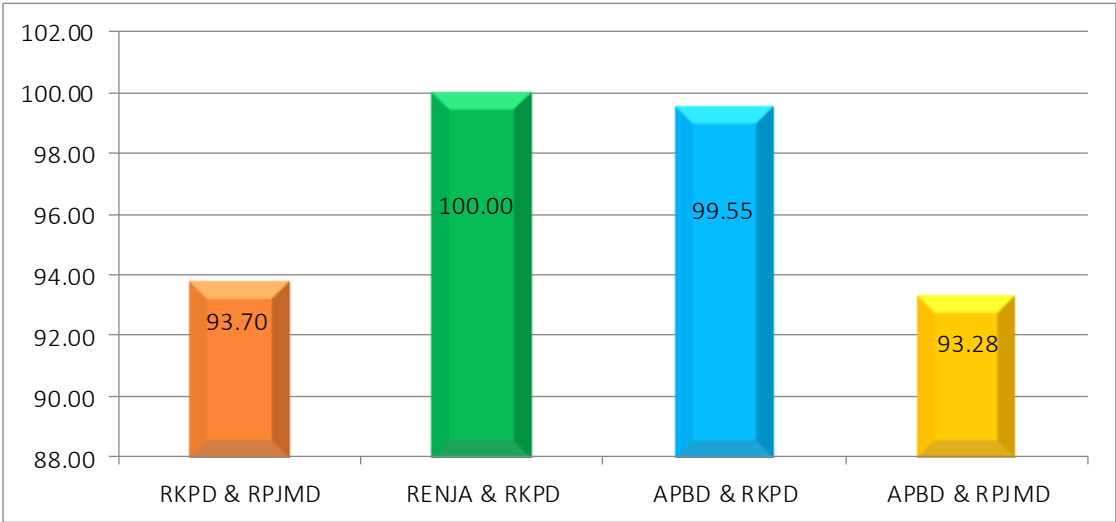
- 4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
 - a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 238 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 222 program (kolom 10). Dengan demikian terdapat 16 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 14).
 - b. Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

Konsistensi program antara RJPMD dan APBD tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Konsistensi antardokumen dalam penjabaran program RPJMD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik II. 139.
Konsistensi Program Antar dokumen Tahun 2022



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penjabaran jumlah program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 93.70%, Renja OPD Kedalam RKPD sudah konsisten. Namun demikian, dalam penjabaran program RKPD ke dalam APBD hanya sebesar 93,28% Persen hal ini disebabkan terdapat selisih lebih 1 program sedangkan Penjabaran RPJMD kedalam APBD juga hanya pada posisi 93,28 persen, perbedaan tersebut karena terdapat beberapa program tidak mendapatkan alokasi Anggaran yang disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II.139.
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD Tahun 2022

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	11	11	11	11	11	11	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	17	17	17	17	17	17	0	0	0
3	UPT Transfusi Darah	7	7	7	7	7	7	0	0	0
4	UPT Pelatihan Kesehatan	10	10	10	10	10	10	0	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	1	1	1	1	1	1	0	0	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	11	11	11	11	11	11	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	7	7	6	7	6	6	0	1	1
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	4	4	4	4	4	4	0	0	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	4	4	4	4	4	0	0	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	3	3	3	3	3	0	0	0
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	5	5	4	5	4	4	0	1	1
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25	25	25	25	25	25	0	0	0
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17	17	17	17	17	17	0	0	0
14	Satuan Polisi Pamong Praja	16	16	16	16	16	16	0	0	0
15	Badan Penanggulangan	10	10	10	10	10	10	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Bencana Daerah									
16	Dinas Sosial	18	18	18	18	18	18	0	0	0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19	19	19	19	19	19	0	0	0
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23	23	23	23	23	23	0	0	0
19	Dinas Ketahanan Pangan	12	12	12	12	12	12	0	0	0
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	16	16	16	16	16	16	0	0	0
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	17	17	17	17	17	0	0	0
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	10	10	10	10	10	0	0	0
23	Dinas Perhubungan	20	20	20	20	20	20	0	0	0
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	11	9	11	9	9	9	2	2	0
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18	17	18	17	17	17	1	1	0
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	13	13	13	13	0	0	0
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16	16	16	16	16	16	0	0	0

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	20	20	20	20	20	20	0	0	0
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16	16	16	16	16	16	0	0	0
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	32	31	32	31	31	31	1	1	0
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15	15	13	15	13	13	0	2	2
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	11	10	11	10	10	10	1	1	0
33	Dinas Kehutanan	19	19	19	19	19	19	0	0	0
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20	19	20	19	19	19	1	1	0
35	Dinas Perdagangan	13	13	13	13	13	13	0	0	0
36	Dinas Perindustrian	9	9	9	9	9	9	0	0	0
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8	8	8	8	8	8	0	0	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	10	10	10	10	10	10	0	0	0
39	Biro Hukum	8	8	7	8	7	7	0	1	1
40	Biro Organisasi	10	10	9	10	9	9	0	1	1
41	Biro Umum	10	10	10	10	10	10	0	0	0
42	Biro Administrasi Pimpinan	8	8	8	8	8	8	0	0	0
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9	9	9	9	9	9	0	0	0
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	7	7	7	7	7	7	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
45	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	17	17	17	17	17	17	0	0	0
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18	18	18	18	18	18	0	0	0
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14	14	14	14	14	14	0	0	0
48	Badan Pendapatan Daerah	12	12	12	12	12	12	0	0	0
49	Badan Kepegawaian Daerah	12	12	12	12	12	12	0	0	0
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	9	9	9	9	9	0	0	0
51	Badan Penghubung Daerah	6	6	6	6	6	6	0	0	0
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	12	12	12	12	12	12	0	0	0
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	13	13	13	13	13	0	0	0
	Jumlah	679	673	673	673	667	667	6	12	6

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
 - a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 679 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 673 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen terdapat selisi sebanyak 6 kegiatan (Jumlah pada kolom 9). Namun dok renja perangkat daerah tetap konsisten dalam penggunaan kegiatan sesuai dengan dok perencanaan jumlah kegiatan pada kedua dokumen tersebut adalah 673 kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD terdapat selisih 6 kegiatan (Kolom 9) .
 - c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 99.11%.
2. RKPD dan APBD.
 - a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 679 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 673 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 667 (jumlah pada kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 12 (jumlah pada kolom 10).
 - b. Dari 12 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD demikian pula sebaliknya.
 - c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99.11%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2022 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja Perangkat daerah, RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II.140.
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	79	79	79	79	79	79	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	59	59	59	59	59	59	0	0	0
3	UPT Transfusi Darah	18	18	18	18	18	18	0	0	0
4	UPT Pelatihan Kesehatan	18	18	18	18	18	18	0	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	1	1	1	1	1	1	0	0	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	17	17	17	17	17	17	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	10	10	10	10	10	10	0	0	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	5	5	5	5	5	0	0	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	5	5	5	5	5	0	0	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	3	3	3	3	3	0	0	0
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	5	5	5	5	5	5	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	87	87	89	87	87	87	0	2	2
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	56	56	56	56	56	56	0	0	0
14	Satuan Polisi Pamong Praja	46	46	46	46	46	46	0	0	0
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	32	32	32	32	32	0	0	0
16	Dinas Sosial	55	55	55	55	55	55	0	0	0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33	33	33	33	33	33	0	0	0
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	43	43	43	43	43	43	0	0	0
19	Dinas Ketahanan Pangan	38	38	38	38	38	38	0	0	0
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	31	31	31	31	31	31	0	0	0
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44	44	44	44	44	44	0	0	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	33	34	33	33	33	0	1	1
23	Dinas Perhubungan	38	38	38	38	38	38	0	0	0
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	29	29	31	29	29	29	0	2	2
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30	30	32	30	30	30	0	2	2
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36	36	36	36	36	36	0	0	0
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56	56	58	56	56	56	0	2	2
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	47	47	48	47	47	47	0	1	1
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36	36	36	36	36	36	0	0	0
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	97	97	101	97	97	97	0	4	4
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	32	32	33	32	32	32	0	1	1
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	17	17	29	17	17	17	0	12	12

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Dinas Kehutanan	69	69	69	69	69	69	0	0	0
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	45	45	45	45	45	45	0	0	0
35	Dinas Perdagangan	29	29	29	29	29	29	0	0	0
36	Dinas Perindustrian	28	28	28	28	28	28	0	0	0
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20	20	20	20	20	20	0	0	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	27	27	28	27	27	27	0	1	1
39	Biro Hukum	15	15	16	15	15	15	0	1	1
40	Biro Organisasi	23	23	24	23	23	23	0	1	1
41	Biro Umum	43	43	44	43	43	43	0	1	1
42	Biro Administrasi Pimpinan	21	21	21	21	21	21	0	0	0
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	12	12	13	12	12	12	0	1	1
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	17	17	18	17	17	17	0	1	1
45	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	72	72	72	72	72	72	0	0	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	64	64	64	64	64	64	0	0	0
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	60	60	60	60	60	60	0	0	0
48	Badan Pendapatan Daerah	78	78	78	78	78	78	0	0	0
49	Badan Kepegawaian Daerah	79	79	79	79	79	79	0	0	0
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34	34	35	34	34	34	0	1	1
51	Badan Penghubung Daerah	14	14	17	14	14	14	0	3	3
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	47	47	47	47	47	47	0	0	0
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51	51	53	51	51	51	0	2	2
	Jumlah	1984	1984	2023	1984	1984	1984	0	39	39

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
 - a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1984 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 1984 (jumlah pada kolom 4). Jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 1984 (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 9).
 - b. Untuk jumlah sub kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
 - c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100 %.
2. RKPD dan APBD.
 - a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1984 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 2023 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1984 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 39 (jumlah pada kolom 10).
 - b. Dari 39 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan pada RKPD yang tidak dianggarkan namun dalam APBD mendapatkan alokasi Anggaran.
 - c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 101.96%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan alokasi anggaran dalam pelaksanaan sub kegiatan.
3. Renja-PD dan APBD
 - a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1984 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 2023 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1984 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 39 (jumlah pada kolom 10).
 - b. Dari 39 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan pada RKPD yang tidak dianggarkan namun dalam APBD mendapatkan alokasi Anggaran.
 - c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 101.96%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan alokasi anggaran dalam pelaksanaan sub kegiatan.

B. Konsistensi Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.141.
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No. Ur ut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2022							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
1	Dinas Pendidikan	3,025,072,969,147.82	3,020,183,969,147.00	99.84	3,020,183,969,147.00	100.00	2,876,197,559,854.00	95.08	(4,889,000,001)	(143,986,409,293.00)	6%	(148,875,409,293.82)	10%
2	Dinas Kesehatan	145,547,950,483.07	147,143,100,483.00	101.10	147,143,100,483.00	100.00	221,030,909,677.00	151.86	1,595,150,000	73,887,809,194.00	-3%	75,482,959,193.93	-5%
3	UPT Transfusi Darah	14,923,032,504.00	15,043,032,504.00	100.80	15,043,032,504.00	100.00	9,775,751,582.00	65.51	120,000,000	(5,267,280,922.00)	0%	(5,147,280,922.00)	0%
4	UPT Pelatihan Kesehatan	1,421,936,370.00	1,421,936,370.00	100.00	1,421,936,370.00	100.00	1,816,631,958.00	127.76	-	394,695,588.00	0%	394,695,588.00	0%
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	22,022,785,028.18	11,000,000,000.00	49.95	11,000,000,000.00	100.00	14,678,357,782.00	66.65	(11,022,785,028)	3,678,357,782.00	0%	(7,344,427,246.18)	1%
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	169,049,416,067.91	169,049,416,067.91	100.00	169,049,416,067.91	100.00	209,595,738,659.00	123.98	-	40,546,322,591.09	-2%	40,546,322,591.09	-3%
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	115,502,299,357.76	115,502,299,358.00	100.00	115,502,299,358.00	100.00	110,007,534,065.00	95.24	0	(5,494,765,293.00)	0%	(5,494,765,292.76)	0%
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	171,200,624,647.00	171,200,624,647.00	100.00	171,200,624,647.00	100.00	193,928,862,602.00	113.28	-	22,728,237,955.00	-1%	22,728,237,955.00	-2%
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	40,976,578,083.22	40,476,578,083.22	98.78	40,476,578,083.22	100.00	36,405,044,543.00	88.84	(500,000,000)	(4,071,533,540.22)	0%	(4,571,533,540.22)	0%
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	45,290,125,492.23	41,374,967,819.80	91.36	41,374,967,819.80	100.00	31,461,737,413.00	69.47	(3,915,157,672)	(9,913,230,406.80)	0%	(13,828,388,079.23)	1%
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	56,339,791,279.00	56,139,791,279.00	99.65	56,139,791,279.00	100.00	75,009,618,175.00	133.14	(200,000,000)	18,869,826,896.00	-1%	18,669,826,896.00	-1%
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	688,048,299,855.34	685,648,211,322.00	99.65	685,648,211,322.00	100.00	734,923,173,358.00	106.81	(2,400,088,533)	49,274,962,036.00	-2%	46,874,873,502.66	-3%
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	45,095,706,583.40	45,095,706,583.00	100.00	45,095,706,583.00	100.00	61,799,239,457.00	137.04	(0)	16,703,532,874.00	-1%	16,703,532,873.60	-1%
14	Satuan Polisi Pamong Praja	42,331,859,987.00	42,331,859,987.00	100.00	42,331,859,987.00	100.00	44,653,050,060.00	105.48	-	2,321,190,073.00	0%	2,321,190,073.00	0%
15	Badan Penanggulangan	59,466,213,554.00	59,466,213,554.00	100.00	59,466,213,554.00	100.00	15,686,569,195.00	26.38	-	(43,779,644,359.00)	2%	(43,779,644,359.00)	3%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Ur ut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2022							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
	Bencana Daerah												
16	Dinas Sosial	75,816,855,577.46	75,816,855,576.00	100.00	75,816,855,576.00	100.00	56,241,827,121.00	74.18	(1)	(19,575,028,455.00)	1%	(19,575,028,456.46)	1%
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34,147,548,553.00	32,519,010,241.00	95.23	32,519,010,241.00	100.00	33,370,601,313.00	97.72	(1,628,538,312)	851,591,072.00	0%	(776,947,240.00)	0%
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16,192,397,596.12	15,818,397,596.00	97.69	15,818,397,596.00	100.00	15,436,225,282.00	95.33	(374,000,000)	(382,172,314.00)	0%	(756,172,314.12)	0%
19	Dinas Ketahanan Pangan	39,910,386,725.00	38,445,386,725.35	96.33	38,445,386,725.35	100.00	28,591,482,215.00	71.64	(1,465,000,000)	(9,853,904,510.35)	0%	(11,318,904,510.00)	1%
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	33,743,535,604.43	33,743,535,604.00	100.00	33,743,535,604.00	100.00	24,759,696,734.00	73.38	(0)	(8,983,838,870.00)	0%	(8,983,838,870.43)	1%
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14,630,341,593.26	14,630,341,593.26	100.00	14,630,341,593.26	100.00	12,594,062,044.00	86.08	-	(2,036,279,549.26)	0%	(2,036,279,549.26)	0%
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	134,283,000.00	18,213,881,658.00	13,563.80	18,213,881,658.00	100.00	19,331,236,803.00	14,395.89	18,079,598,658	1,117,355,145.00	0%	19,196,953,803.00	-1%
23	Dinas Perhubungan	92,172,471,971.00	92,172,471,971.00	100.00	92,172,471,971.00	100.00	38,333,439,502.00	41.59	-	(53,839,032,469.00)	2%	(53,839,032,469.00)	4%
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	35,206,670,617.75	35,206,670,618.00	100.00	35,206,670,618.00	100.00	39,885,042,668.00	113.29	0	4,678,372,050.00	0%	4,678,372,050.25	0%
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	37,864,904,224.00	37,864,904,224.00	100.00	37,864,904,224.00	100.00	24,477,724,067.00	64.64	-	(13,387,180,157.00)	1%	(13,387,180,157.00)	1%
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21,095,901,611.49	21,095,901,611.00	100.00	21,095,901,611.00	100.00	18,045,590,760.00	85.54	(0)	(3,050,310,851.00)	0%	(3,050,310,851.49)	0%
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39,490,171,930.00	840,949,075,472.00	2,129.51	840,949,075,472.00	100.00	72,935,501,938.00	184.69	801,458,903,542	(768,013,573,534.00)	33%	33,445,330,008.00	-2%
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	81,348,800,712.05	80,948,800,712.00	99.51	80,948,800,712.00	100.00	39,924,460,904.00	49.08	(400,000,000)	(41,024,339,808.00)	2%	(41,424,339,808.05)	3%
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,966,648,891.00	72,909,072,471.00	102.74	72,909,072,471.00	100.00	56,223,690,005.00	79.23	1,942,423,580	(16,685,382,466.00)	1%	(14,742,958,886.00)	1%
30	Dinas Kelautan dan	95,278,677,896.00	224,009,015,541.80	235.11	224,009,015,541.80	100.00	79,288,024,805.00	83.22	128,730,337,646	(144,720,990,736.80)	6%	(15,990,653,091.00)	1%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Ur ut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2022							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
	Perikanan												
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	87,534,800,073.00	83,226,101,139.00	95.08	83,226,101,139.00	100.00	33,675,036,573.00	38.47	(4,308,698,934)	(49,551,064,566.00)	2%	(53,859,763,500.00)	4%
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	517,127,181,508.00	517,127,181,508.50	100.00	517,127,181,508.50	100.00	549,973,992,326.00	106.35	1	32,846,810,817.50	-1%	32,846,810,818.00	-2%
33	Dinas Kehutanan	155,452,686,542.00	155,158,807,742.46	99.81	155,158,807,742.46	100.00	169,545,307,135.00	109.07	(293,878,800)	14,386,499,392.54	-1%	14,092,620,593.00	-1%
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38,094,867,032.80	38,176,100,032.00	100.21	38,176,100,032.00	100.00	23,789,097,506.00	62.45	81,232,999	(14,387,002,526.00)	1%	(14,305,769,526.80)	1%
35	Dinas Perdagangan	20,274,364,641.00	20,154,430,741.00	99.41	20,154,430,741.00	100.00	16,366,857,597.00	80.73	(119,933,900)	(3,787,573,144.00)	0%	(3,907,507,044.00)	0%
36	Dinas Perindustrian	39,295,776,329.05	39,295,776,329.05	100.00	39,295,776,329.05	100.00	25,138,094,738.00	63.97	-	(14,157,681,591.05)	1%	(14,157,681,591.05)	1%
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3,296,570,210.38	3,296,570,210.00	100.00	3,296,570,210.00	100.00	3,599,131,919.00	109.18	(0)	302,561,709.00	0%	302,561,708.62	0%
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	1,228,107,161,415.00	1,227,761,311,415.00	99.97	1,227,761,311,415.00	100.00	46,364,147,632.00	3.78	(345,850,000)	(1,181,397,163,783.00)	51%	(1,181,743,013,783.00)	83%
39	Biro Hukum	21,872,944,771.75	21,872,944,771.75	100.00	21,872,944,771.75	100.00	3,004,293,511.00	13.74	-	(18,868,651,260.75)	1%	(18,868,651,260.75)	1%
40	Biro Organisasi	8,803,327,597.55	8,803,327,598.00	100.00	8,803,327,598.00	100.00	4,727,459,320.00	53.70	0	(4,075,868,278.00)	0%	(4,075,868,277.55)	0%
41	Biro Umum	195,236,664,703.00	195,236,664,703.00	100.00	195,236,664,703.00	100.00	179,143,268,063.00	91.76	-	(16,093,396,640.00)	1%	(16,093,396,640.00)	1%
42	Biro Administrasi Pimpinan	8,673,928,744.80	8,673,928,744.00	100.00	8,673,928,744.00	100.00	7,046,512,260.00	81.24	(1)	(1,627,416,484.00)	0%	(1,627,416,484.80)	0%
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	6,428,651,074.00	6,988,651,074.00	108.71	6,988,651,074.00	100.00	2,683,014,346.00	41.74	560,000,000	(4,305,636,728.00)	0%	(3,745,636,728.00)	0%
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	4,209,928,257.89	4,209,928,258.35	100.00	4,209,928,258.35	100.00	4,663,710,404.00	110.78	0	453,782,145.65	0%	453,782,146.11	0%
45	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	386,060,543,387.19	386,060,543,387.00	100.00	386,060,543,387.00	100.00	327,364,188,227.00	84.80	(0)	(58,696,355,160.00)	3%	(58,696,355,160.19)	4%
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	74,590,865,397.87	74,590,865,397.47	100.00	74,590,865,397.47	100.00	62,878,889,896.00	84.30	(0)	(11,711,975,501.47)	1%	(11,711,975,501.87)	1%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Ur ut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2022							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		Renja-PD		APBD						
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(9) = (6) - (4)		(10) = (6) - (3)	
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,511,578,594,981.00	2,511,578,594,981.71	100.00	2,511,578,594,981.71	100.00	2,545,667,362,110.00	101.36	1	34,088,767,128.29	-1%	34,088,767,129.00	-2%
48	Badan Pendapatan Daerah	174,059,470,588.95	174,059,470,588.00	100.00	174,059,470,588.00	100.00	174,494,298,503.00	100.25	(1)	434,827,915.00	0%	434,827,914.05	0%
49	Badan Kepegawaian Daerah	29,614,182,939.28	29,614,182,939.28	100.00	29,614,182,939.28	100.00	28,193,413,396.00	95.20	-	(1,420,769,543.28)	0%	(1,420,769,543.28)	0%
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38,602,875,641.74	38,602,875,642.00	100.00	38,602,875,642.00	100.00	30,891,049,883.00	80.02	0	(7,711,825,759.00)	0%	(7,711,825,758.74)	1%
51	Badan Penghubung Daerah	20,686,480,129.00	19,950,004,129.00	96.44	19,950,004,129.00	100.00	14,138,878,256.00	68.35	(736,476,000)	(5,811,125,873.00)	0%	(6,547,601,873.00)	0%
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	60,750,278,678.00	52,683,518,230.00	86.72	52,683,518,230.00	100.00	46,024,757,458.00	75.76	(8,066,760,448)	(6,658,760,772.00)	0%	(14,725,521,220.00)	1%
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25,089,030,540.69	25,089,030,541.70	100.00	25,089,030,541.70	100.00	65,636,019,208.00	261.61	1	40,546,988,666.30	-2%	40,546,988,667.31	-3%
JUMLAH		10,985,730,360,126.40	11,897,631,838,921.60	108.30	11,897,631,838,921.60	100.00	9,561,417,164,808.00	87.03	911,901,478,795.18	(2,336,214,674,113.61)	100%	(1,424,313,195,318.43)	100%

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2023

RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1. RKPD terhadap RPJMD

Terdapat perbedaan pagu antara RKPD dengan RPJMD perbedaan Jumlah pagu indikatif RKPD lebih besar 8.30% daripada pagu indikatif di RPJMD yakni sebesar Rp. 911.901.478.795,- (Sembilan Ratus Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

2. APBD terhadap RKPD

- a. Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RKPD persentase selisih 2.96%. dengan jumlah selisih sebesar Rp. 2.336.214.674.113,- (Dua Trilyun Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus tujuh Peluh Empat Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
- b. Tidak ada perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan anggaran yang sama antara RKPD dan APBD, sejumlah 19 (Sembilan Belas) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu indikatif RKPD, dan sisanya sejumlah 34 (Tiga Puluh Enam) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD yang lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD.
- c. Persentase pengurangan pagu indikatif RKPD yang paling besar adalah pada Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu sebesar 51% sejumlah Rp 1.181.397.163.783,- (Satu Trilyun Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- d. Penambahan pagu dalam APBD yang paling besar adalah pada Dinas Kesehatan yaitu sebesar 3% sejumlah Rp 73.887.809.194,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

3. APBD terhadap RPJMD

- a. Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RPJMD secara persentase hanya 87.03%, dengan Jumlah selisih sebesar Rp. 1.424.313.195.318,- (Satu Trilyun Empat ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).

- b. Tidak ada perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan anggaran yang sama antara RPJMD dan APBD, sejumlah 12 (Dua Belas) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu indikatif RPJMD, dan sisanya sejumlah 41 (Empat Puluh Satu) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD yang lebih kecil dibanding pagu indikatif RPJMD.
- e. Persentase pengurangan pagu indikatif RKPD yang paling besar adalah pada Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu sebesar 83% sejumlah Rp 1.181.743.013.783,- (Satu trilyun Seratus Delapan Puluh Satu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Belas Ribu Tujuh ratus delapan Puluh Tiga Rupiah).
- f. Penambahan pagu dalam APBD yang paling besar adalah pada Dinas Kesehatan yaitu sebesar 10% sejumlah Rp 148.875.409.293,- (Setarus Empat puluh delapan Milyar Dwlapan ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus delapn Puluh Tiga Rupiah).

C. Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021

Terkait penggambaran Pelaksanaan Capaian Kinerja pada subkegiatan pada pelaksanaan RKPD tahun 2022 terdapat 1984 Subkegiatan dengan jumlah indikator sebanyak 3297 dengan rata-rata capaian kinerja outcome 86.48% dengan interpretasi Tinggi (T) dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 70.36% dengan interpretasi rendah (S) untuk penggambaran pencapaian kinerja subkegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel II.142.
Capaian SubKegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	79	144	134	10	0	11.32	41.19	R	R
2	Dinas Kesehatan	59	350	297	53	0	19.69	12.50	R	R
3	UPT Transfusi Darah	18	18	12	6	0	52.61	96.82	R	T
4	UPT Pelatihan Kesehatan	18	18	1	17	0	95.06	98.73	T	T
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	1	3	3	0	0	24.05	13.02	R	R
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	17	18	0	18	0	100.00	88.37	T	T
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	10	11	0	11	0	100.00	89.72	T	T
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	5	2	3	0	96.53	87.61	T	T
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	5	1	4	0	96.96	101.81	T	ST
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	3	2	1	0	98.57	95.69	T	T
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	5	5	1	3	1	97.86	91.78	T	T
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	87	237	63	171	3	83.88	24.22	T	R
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	56	67	0	66	1	100.13	76.23	ST	T
14	Satuan Polisi Pamong Praja	46	51	29	22	0	62.09	77.26	R	T

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	35	0	35	0	100.00	90.32	T	T
16	Dinas Sosial	55	84	2	82	0	98.31	58.71	T	R
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33	38	1	36	1	97.42	82.22	T	T
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	43	59	7	50	2	91.80	67.01	T	R
19	Dinas Ketahanan Pangan	38	38	1	37	0	97.47	95.63	T	T
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	31	32	4	25	3	98.24	80.10	T	T
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44	63	10	52	1	86.39	66.04	T	R
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	57	10	47	0	87.22	41.37	T	R
23	Dinas Perhubungan	38	39	8	31	0	92.31	90.41	T	T
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	29	33	0	28	5	100.63	83.30	ST	T
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30	32	2	30	0	93.75	83.96	T	T
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36	53	3	50	0	95.60	64.10	T	R
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56	134	25	108	1	83.33	40.52	T	R
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	47	53	21	32	0	74.58	83.35	R	T

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36	36	0	36	0	100.00	97.47	T	T
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	97	144	34	108	2	80.65	44.10	T	R
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	32	105	47	57	1	59.35	26.32	R	R
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	17	79	58	20	1	33.89	18.94	R	R
33	Dinas Kehutanan	69	103	27	72	4	81.65	61.87	T	R
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	45	43	8	35	0	96.25	89.90	T	T
35	Dinas Perdagangan	29	33	8	24	1	86.14	85.07	T	T
36	Dinas Perindustrian	28	35	0	35	0	100.00	69.89	T	R
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20	25	1	24	0	99.50	76.18	T	T
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	27	40	8	32	0	95.04	65.76	T	R
39	Biro Hukum	15	21	0	21	0	100.00	70.32	T	R
40	Biro Organisasi	23	33	2	31	0	96.06	69.08	T	R
41	Biro Umum	43	44	17	26	1	66.44	89.84	R	T
42	Biro Administrasi Pimpinan	21	23	0	23	0	100.00	88.11	T	T
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	12	13	0	13	0	100.00	96.39	T	T
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	17	30	0	30	0	100.00	55.32	T	R
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	72	72	4	68	0	98.19	76.55	T	T

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	64	81	5	74	2	93.91	69.45	T	R
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	60	156	0	155	1	100.03	32.60	ST	R
48	Badan Pendapatan Daerah	78	230	1	229	0	99.57	28.36	T	R
49	Badan Kepegawaian Daerah	79	92	13	74	5	92.64	80.45	T	T
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34	44	11	32	1	88.38	70.42	T	R
51	Badan Penghubung Daerah	14	17	4	13	0	81.74	80.08	T	T
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	47	48	2	45	1	99.60	88.57	T	T
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51	65	1	64	0	98.46	76.07	T	T
	Jumlah	1984	3297	890	2369	38	86.48	70.36	T	R

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja subkegiatan dengan jumlah sukegiatan sebanyak 1984 menunjukkan pencapaian kinerja subKegiatan yang mendapat predikat tinggi (T), dengan interpretasi pencapaian yakni: terdapat 890 indikator Subkegiatan yang belum tercapai atau secara persentase mencapai 26.99%, untuk indikator subKegiatan dengan interpretasi sesuai sebanyak 2369 atau 71.85% dan ada 38 capaian insikaor subKegiatan yang melampaui atau sebesar 1.15%.

Capaian outcome program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.143.
Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2022

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	12	41.19	11	1	0
2	Dinas Kesehatan	14	12.50	10	3	1
3	UPT Transfusi Darah	4	96.82	4	0	0
4	UPT Pelatihan Kesehatan	6	98.73	0	6	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	13.02	3	0	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	5	88.37	0	5	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	5	89.72	1	4	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	4	87.61	1	3	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	101.81	0	4	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	95.69	0	2	1
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	5	91.78	1	4	0
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17	24.22	14	3	0
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13	76.23	0	11	2
14	Satuan Polisi Pamong Praja	6	77.26	0	6	0
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	90.32	6	0	0
16	Dinas Sosial	15	58.71	1	14	0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	82.22	3	11	3
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	67.01	1	12	0
19	Dinas Ketahanan Pangan	10	95.63	4	5	1
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	13	80.10	3	9	1
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	66.04	0	15	0
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	41.37	2	10	0
23	Dinas Perhubungan	13	90.41	5	8	0
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	8	83.30	1	7	0
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	83.96	0	14	0
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	64.10	0	8	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6	40.52	1	5	0
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	14	83.35	6	7	1
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	97.47	0	6	0
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	18	44.10	6	7	5
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	26.32	4	5	0
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16	18.94	8	6	2
33	Dinas Kehutanan	10	61.87	4	6	0
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9	89.90	0	7	2
35	Dinas Perdagangan	9	85.07	0	9	0
36	Dinas Perindustrian	6	69.89	0	6	0
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4	76.18	1	3	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	6	65.76	4	2	0
39	Biro Hukum	5	70.32	0	5	0
40	Biro Organisasi	4	69.08	0	4	0
41	Biro Umum	3	89.84	0	3	0
42	Biro Administrasi Pimpinan	3	88.11	0	3	0
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	5	96.39	1	4	0
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6	55.32	1	5	0
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	76.55	2	4	0
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9	69.45	0	8	1
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10	32.60	3	6	1
48	Badan Pendapatan Daerah	5	28.36	0	5	0
49	Badan Kepegawaian Daerah	6	80.45	1	5	0
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	70.42	3	1	0
51	Badan Penghubung Daerah	5	80.08	2	3	0
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	9	88.57	2	5	2
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	76.07	0	9	0
	Jumlah	448	70.36	120	304	24

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

- 1. Terdapat 448 indikator kinerja outcome dalam RKPD Tahun 2022.
- 2. Rata-rata capaian kinerja anggaran seluruh program pembangunan daerah tersebut adalah 70.36%.
- 3. Sejumlah 120 outcome belum mencapai target dari yang ditetapkan, sementara 304 outcome mencapai target 100%, dan 24 outcome melampaui target yang ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan realisasi program dan kegiatan RKPD berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD sebahagian besqar masih banyak dipengaruhi dari dampak penanganan Covid-19 serta adanya beberapa kendala teknis lainnya antara lain:
 - 1) Tidak dianggarkan dalam APBD.
 - 2) Tidak diperoleh data yang valid dan terferifikasi dari perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab program/kegiatan.
 - 3) Tidak dilaksanakan karena perubahan peraturan perundangan dan/ atau kewenangan yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan.
 - 4) Permasalahan teknis lainnya seperti, lelang yang terlambat, cuaca, dan lain-lain.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
 - 1) Dianggarkan dalam APBD.
 - 2) Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - 3) Anggaran yang tersedia mencukup untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.
- c. Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN.
 - 2) Dukungan stakeholders terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
 - 3) Penetapan target lebih rendah dari anggaran yang tersedia.
 - 4) Adanya rescheduling pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
 - 1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
 - 2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
 - 3) Pengelolaan data yang baik.

D. Review Capaian Kinerja RPJMD

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.144.
Review Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter													
	Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif												
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/Angka	B	BB (71 – 80)								
	Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/Angka	B	BB (>70-80)								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	Persentasi	5%	100 %	5,435,028,632.0	100	2,560,421,339.0	100.0	47.1	ST	SR	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	Persentasi	57%	60 %	5,980,746,888.0	59	8,658,394,690.0	98.3	144.8	ST	ST	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Persentasi	88%	91 %		91		100.0		ST		Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	Persentase	80%	85 %		85		100.0		ST		Badan Kepegawaian Daerah
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	Persentasi	100%	100 %	4,794,694,160.0	100	2,930,513,826.0	100.0	61.1	ST	R	Biro Organisasi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentasi	97%	69.59 %	12,256,108,048.0	70.04	8,681,931,480.0	100.6	70.8	ST	S	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		% Penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	97%	70.2 %		73.93		105.3		ST		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
		% OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat (Prioritas)	Persentase		100.00%				- .0		SR		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD (Prioritas)	Persentasi	100%	100 %	14,167,391,351.2	100	10,210,502,119.0	100.0	72.1	ST	S	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase peningkatan capaian kinerja program (Prioritas)	Persentasi	0	0.5 %	-	3.68		736.0		ST		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	indeks	60%	3 %	3,799,568,236.0	2.05	4,307,971,818.0	68.3	113.4	S	ST	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
7	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	Nilai	Nilai 2.40	3 Nilai	20,289,253,332.0	3	1,382,401,310.0	100.0	6.8	ST	SR	Biro Hukum
		Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	Persentasi	100	100 %		100		100.0		ST		Biro Hukum
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	Persentasi	11.81% dari 1.524 BUMDES	11.81%	901,936,800.0	5.9	690,750,000.0	50.0	76.6	SR	T	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa yang diFasilitasi	Persentasi	2.255 DESA	15.03%		34.1		226.9		ST		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks	B	B (3,51 – 4)								
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	Persentasi	0	3 %	11,269,424,704.0	11.32	4,166,289,653.0	377.3	37.0	ST	SR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Persentasi	80%	80 %	16,245,134,500.0	80	18,097,178,598.0	100.0	111.4	ST	ST	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
		Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	Persentasi	100%	100 %		100		100.0		ST		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persentase		80 %	1,324,672,696.0	78	1,197,761,320.0	97.5	90.4	ST	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel 98.49												
	Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson	Indeks	0.639	0.601								
	Sasaran 3: Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76.06	79.5		79,44						
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase	58	72.3 %	238,283,321,152.0	70.01	644,681,224,184.0	96.8	270.6	ST	ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	Persentase	20.48%	71.79 %		77.12		107.4		ST		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	Orang		1028000	45,945,652,580.0	1355919	45,612,328,874.0	131.9	99.3	ST	ST	Dinas Perhubungan
		Persentase pelabuhan yang beroperasi	Persentase		11 %		10		90.9		T		Dinas Perhubungan
14	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase	97%	98.25 %	15,474,852,036.0	98.2	800,274,396.0	99.9	5.2	ST	SR	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	Persentase		99 %		98.49		99.5		ST		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA (SPM/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Prioritas)	Persentase	59.33%	60.06 %	131,990,261,967.0	76	170,480,792,689.0	126.5	129.2	ST	ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	Persentase	89.77	91 %	3,521,804,832.0	94.14	8,132,490,608.0	103.5	230.9	ST	ST	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	Persentase	2.84	100 %		100		100.0		ST		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	Persentase	17.10	60 %		195.9		326.5		ST		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	Persentase	74%	82.47 %	160,619,100.0	100	102,723,200.0	121.3	64.0	ST	R	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota (SPM)	Persentase	100	100 %		100		100.0		ST		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif												
	Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita	Juta Rp.	56,98	59,23								
		Angka Kemiskinan	%	8.69	8.70		8,53						
	Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.62	7.20		3						
18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	Persentase	20	0.5 %	6,983,932,500.0	0.2	3,295,822,717.0	40.0	47.2	SR	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
		Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	Persentase	30	12.5 %		8.3		66.4		S		Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
19	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) (Prioritas)	Peningkatan Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	58.27	100 %	24,114,794,000.0	4.17	4,786,215,300.0	4.2	19.8	SR	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
		Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) (Prioritas)	Persentase	116	100 %		77.16		77.2		T		Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	0	11 Kawasan	89,841,340,549.0	9	28,276,454,655.0	81.8	31.5	T	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Persentase	4.36%	3.91 %	692,176,310.0	5.6	467,357,672.0	143.2	67.5	ST	S	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	Persentase	59.78%	58.78 %		61.58		104.8		ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Persentase	98.75%	72.92 %	2,623,431,000.0	73	1,963,428,600.0	100.1	74.8	ST	S	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	Persentase	70%	75 %		81.25		108.3		ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA	Rp. triliun	4.54	3.5 Rp. Triliun	1,447,034,000.0	4.52	1,012,537,980.0	129.1	70.0	ST	S	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Realisasi PMDN	Rp. triliun	5.67	4.5 Rp. Triliun		12.08		268.4		ST		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Persentase	6.04%	22.02 %	3,966,559,500.0	22.02	3,472,298,144.0	100.0	87.5	ST	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	9.46%	10.56 %		10.56		100.0		ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
25	Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Nilai	0.391	0.382		0,377						
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	Persentase	39.88	13.69 %	8,413,514,632.0	18.03	6,722,951,185.0	131.7	79.9	ST	T	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO UMKM	Cakupan UMKM yang diberdayakan	Persentase	10	10 %	5,191,925,000.0	10	1,881,451,600.0	100.0	36.2	ST	SR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	Persentase	10	10 %	2,540,860,490.0	7	1,167,530,210.0	70.0	46.0	S	SR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)		10 Produk	3 %		3		100.0		ST		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	Persentase	14.90	15.65 %	20,620,155,000.0	20.12	31,121,072,752.0	128.6	150.9	ST	ST	Dinas Kehutanan
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	Persentase	0%	100 %	47,735,000.0	100	47,155,000.0	100.0	98.8	ST	ST	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase ketersediaan data sarana dan prasarana	Persentase	0%	100 %		100		100.0		ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	Persentase	100%	3.5 Jiwa	10,019,193,024.0	0	2,475,871,319.0	- .0	24.7	SR	SR	Dinas Sosial
		Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	Persentase		100 %		100		100.0		ST		Dinas Sosial
31	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Daging	Ton	138164039 Kg	167936762 Kg	253,186,814,872.0	119502264.8	225,171,141,092.7	71.2	88.9	S	T	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Telur	Ton	162594471 Kg	195474499 Kg		251210205		128.5		ST		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Susu	Ton	3240432 Kg	2035655 Kg		2400388		117.9		ST		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah produksi Talas Satoimo	Ton	5.432,55	7000 Ton		0		- .0		SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktifitas Padi	Kw/Ha	48,23 Kw/Ha	48.95 Kw/Ha		49.46		101.0		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	0	100 Ha		78		78.0		T		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Produktifitas Kakao	Kg/Ha	634 Kg/Ha	634 Kg/Ha		776		122.4		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktifitas Jagung	Kw/Ha	53,27 Kw/Ha	54.1 Kw/Ha		55.31		102.2		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Cakupan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	377 Unit	250 Unit		0		- .0		SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produtifitas Kopi	Kg/Ha	588 Kg/Ha	588 Kg/Ha		647		110.0		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	266,50 Ton	298.65 Ton		0		- .0		SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	Persentase	1.41 % dari 3038 Kelompok Binaan LPM	1.51 %	3,179,352,637.0	1.51	2,824,551,140.0	100.0	88.8	ST	T	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase PKK aktif	Persentase	97.71 % dari Total 3.344 PKK	100 %		100		100.0		ST		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Posyandu aktif	Persentase	99.89% dari 10.988 Posyandu	99.89 %		99.91		100.0		ST		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	Persentase	10	10 %	614,535,000.0	8	328,968,000.0	80.0	53.5	T	R	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter												

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71.66	72.20		72.24						
	Sasaran 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	64.64	66.29	65.76							
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SPM Prioritas)	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	Persentase	74,23%	100 %	1,027,685,287,047.0	100	896,845,682,705.0	100.0	87.3	ST	T	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	Persentase	50.05 %	60.25 %		60.25		100.0		ST		Dinas Pendidikan
		Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	Persentase	90 %	91.25 %		91.25		100.0		ST		Dinas Pendidikan
		Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	Persentase	80%	100 %		100		100.0		ST		Dinas Pendidikan
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Prioritas)	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama (Prioritas)	Persentase		54.25 %	894,323,500.0	0		- .0	- .0	SR	SR	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	Persentase		0 %		0		- .0		SR		Dinas Pendidikan
	Sasaran 7: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai	77.58	77.76	77.94							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Persentase	317%	100	37,297,729,900.0	100	43,685,835,537.0	100.0	117.1	ST	ST	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Peningkatan Prestasi olahraga	Persentase	291.4	100 %		100		100.0		ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	23 %	6,545,556,170.0	0	1,081,421,380.0	- .0	16.5	SR	SR	Dinas Kesehatan
		Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	Persentase		0 %				- .0		SR		UPT Transfusi Darah
		Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	Persentase	100	1 %		1		100.0		ST		UPT Pelatihan Kesehatan
		Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	Persentase	100	1 %		1		100.0		ST		UPT Pelatihan Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	Persentase		100 %				- .0		SR		UPT RSK Gigi dan Mulut
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentase	90%	100 %		100		100.0		ST		Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase		0 %				100.0		ST		Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
		Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah memperoleh pendidikan kompetensi teknis	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
		Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	Persentase	0%	54.9 %		0		- .0		SR		Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentase	0	33 %		100		303.0		ST		Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM/Prioritas)	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	Unit	17% (1 Unit)	33 %	224,672,174,717.0	0	146,366,162,525.3	- .0	65.1	SR	R	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100 %	100 %	-	100		100.0		ST		Dinas Kesehatan
		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	Persentase	85%	87 %	-	70		80.5		T		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	11%	12 %	-	12.1		100.8		ST		Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100%	100 %	-	100		100.0		ST		Dinas Kesehatan
		Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	5.5%	6.5 %	-	8.97		138.0		ST		Dinas Kesehatan
		Rasio Kebutuhan Transfusi Darah Terhadap Ketersediaan Stok Darah	Persentase	78.5	80 %	12,647,853,865.0	65		81.3		T		UPT Transfusi Darah
		Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	Persentase	100	1 %	1,144,891,427.0	1		100.0		ST		UPT Pelatihan Kesehatan
		Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	Persentase		100 %	1,144,891,427.0	1		1.0		SR		UPT RSK Gigi dan Mulut
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS	Persentasi	90%	85 %	32,970,500,000.0	85		100.0		ST		Rumah Sakit Umum Daerah Labuang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dalam Kondisi Baik											Baji
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase		80 %	32,970,500,000.0	85		106.3		ST		Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	100 %	100 %	26,178,244,000.0	85		85.0		T		Rumah Sakit Khusus Daerah
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase	100%	100 %	8,733,570,656.0	100		100.0		ST		Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	0%	80 %	32,970,500,000.0	85		106.3		ST		Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	Persentase	0	65.76 %	7,780,909,000.0	65.76		100.0		ST		Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
	Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	76.01	75.21								
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% Kab/Kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	Persentase	0,52%	66 %	70	1,105,844,200.0	106.1	145.4	ST	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		% Lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi	Persentase	10%	20 %	20		100.0		ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% Kab/Kota yang menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	Persentase	21%	25 %	154,010,300.0	25	148,721,300.0	100.0	96.6	ST	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Sasaran 9: Meningkatkan aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	Kasus	25.121 (2018)	24.709								
41	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)	Persentase	100%	100 %	3,446,506,550.0	100	3,446,506,550.0	100.0	100.0	ST	ST	Satuan Polisi Pamong Praja
42	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Persentase/Dokumen	1.75%	9 Dokumen	1,225,538,715,412.0	8	1,280,668,729,328.0	88.9	104.5	T	ST	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara AlQuran (Prioritas)	Persentase	10%	35.25 %		39.22		111.3		ST		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	Persentase	10%	10 %		43.93		439.3		ST		Biro Kesejahteraan Rakyat
43	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	Persentase	20% (N/A)	20 %	274,996,630.0	15	88,268,130.0	75.0	32.1	S	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	Persentase	0% (pengguna)	0 %	1,224,235,400.0	58	1,427,380,821.0	100.0	116.6	ST	ST	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan												

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan 5: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.92	4,10 – 5,55		4,65						
	Sasaran 10: Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Rp / Angkatan Kerja	82.027.871	76,913,143		77,819,958						
45	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persentase	5,00%	5 %	9,695,681,849.0	4.5	1,572,510,168.0	90.0	16.2	T	SR	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	Persentase	70,00%	78.79 %		0		- .0		SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
46	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	Persentasi	30,18%	57.89 %	27,009,431,500.0	63.16	16,790,520,331.0	109.1	62.2	ST	R	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp. Miliar	Rp. 6.525.95 M	8852.48 Rp. M		12668.91		143.1		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan tangkap	Ton	398.565,2 Ton	396992.3 Ton		416076.4		104.8		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase		23.89 %		18.47		77.3		T		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Persentase		25.61 %		18.11		70.7		S		Dinas Kelautan dan Perikanan
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. Miliar	Rp. 9.594.52 M	14474.73 Rp. M	15,530,000,000.0	15445.37	10,021,521,740.0	106.7	64.5	ST	R	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan budidaya	Ton	3.662.761,4 ton	3898767.4 Ton		3850102.4		98.8		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase ketersediaan benur berkualitas	Persentase		100 %		96.99		97.0		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
48	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	Persentasi	55.73	57.91 %	4,771,522,850.0	65.61	7,217,555,618.0	113.3	151.3	ST	ST	Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi hasil	M3	132100	92336.62 M3		134211.35		145.4		ST		Dinas Kehutanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		hutan kayu olahan											
		Persentase Kerusakan Hutan pertahun	Persentase	17.43	17.59 %		0.08		0.5		SR		Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	4.042 Ton	283 Ton		18423.14		6,509.9		ST		Dinas Kehutanan
49	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Peternakan	Rp	9412084000 Rp	29493840000 Rp	269,894,544,475.0	22329810160	162,526,653,970.3	75.7	60.2	S	R	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp.	369485250000 Rp	0 Rp		392,483,722,916		100.0		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp.	3578350000 Rp	0 Rp		6144952080		100.0		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
50	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	166.373.20 Ton	5329 Ton	2,390,927,923.0	5497.4	1,662,551,848.0	103.2	69.5	ST	S	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	Persentase		60 %		53.78		89.6		T		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. Miliar	Rp. 293,120 Milyar	304.96 Milyar		280.33		91.9		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
51	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri	Persentase	6%	5 %	12,191,374,570.0		5,566,351,831.5	- .0	45.7	SR	SR	Dinas Perindustrian
52	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	\$ US	57950717 \$ US	1466745670 \$ US	279,005,000.0	1466745670	217,888,900.0	100.0	78.1	ST	T	Dinas Perdagangan
	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	64.76	72.25		73,23						
	Sasaran 11: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK	Juta Ton CO2Eq	0.86	1.07		1,13						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Persentase	100%	100 %	46,705,929,600.0	0	7,914,905,932.0	- .0	16.9	SR	SR	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase tanggap darurat bencana yg tertangani (Prioritas)	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Aparat kesiapsiagaan bencana yg terlatih	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	rasio	0.5	0.8	1,773,375,800.0	0.8	12,335,853,137.0	100.0	695.6	ST	ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
55	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAS	Jumlah DAS yang direhabilitasi	Das	2	2 DAS	2,425,940,000.0	2	2,303,436,937.0	100.0	95.0	ST	ST	Dinas Kehutanan
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	Persentase	3,41 %	3.95 Ton penurunan emisi Co2 eq	2,195,449,654.0	2.51	1,402,366,028.0	63.5	63.9	R	R	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
57	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B	Cakupan limbah yang dikelola	Persentase	74%	97.05 %	10,722,500,145.0	16.29	4,652,310,213.0	16.8	43.4	SR	SR	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
58	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	Persentase	97%	92 %	898,336,000.0	91.67	2,693,011,070.0	99.6	299.8	ST	ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
59	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	Ton	140.338,9 ton	46500 Ton	13,400,000,000.0	755.04	13,980,139,905.0	1.6	104.3	SR	ST	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	Persentase	4,35%	50.17 %		28.28		56.4		R		Dinas Kelautan dan Perikanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022				%K	%Rp	K	Rp	
					Target	Rp	Capaian	Rp					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Persentase		67.29 %		67.29		100.0		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
60	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase		87.48 %	11,139,152,608.0	63.87	12,434,342,380.0	73.0	111.6	S	ST	Dinas Kelautan dan Perikanan
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase	51	54 %	3,490,597,210.0	12.7	4,547,082,799.0	23.5	130.3	SR	ST	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persentase	15	22 %		43		195.5		ST		Dinas Perhubungan
		Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Jumlah		0 Ruas		45		100.0		ST		Dinas Perhubungan
		Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	Persentase		0 %		3.05		100.0		ST		Dinas Perhubungan
		Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang		0 Orang		499277		100.0		ST		Dinas Perhubungan
		Jumlah Terminal Bis terkelola	Terminal		0 Terminal		7		100.0		ST		Dinas Perhubungan
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	Persentase	46%	72 %	673,265,512.0	82.32	214,901,010.0	114.3	31.9	ST	SR	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bagaimana capaian kinerja Outcome Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan tahun 2022 sesuai dengan pelaksanaan program prioritas daerah sebagai penjabaran visi misi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah prov. Sulsel Tahun 2018-2023..

2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Adapun komposisi program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.145.
Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

No	Nama OPD	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			Deviasi RKPD dan APBD (RKPD - APBD)		
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	6	17	245	4	11	77	-2	-6	-168
2	Dinas Kesehatan	5	18	60	5	17	60	0	-1	0
3	UPT Transfusi Darah	2	9	28	2	7	18	0	-2	-10
4	UPT Pelatihan Kesehatan	3	10	18	3	10	18	0	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	4	7	1	1	1	-2	-3	-6
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	3	15	32	3	10	17	0	-5	-15
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	7	12	3	7	11	0	0	-1
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	2	4	5	1	3	3	-1	-1	-2
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	6	7	2	4	5	-2	-2	-2
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	9	18	1	3	3	-2	-6	-15
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	3	5	12	3	5	7	0	0	-5
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	26	126	11	25	92	0	-1	-34
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4	16	51	4	16	50	0	0	-1
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	36	2	10	33	0	0	-3
15	Dinas Sosial	7	18	56	7	17	54	0	-1	-2
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	19	33	9	19	33	0	0	0
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	28	66	10	23	44	0	-5	-22

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

No	Nama OPD	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			Deviasi RKPD dan APBD (RKPD - APBD)		
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Dinas Ketahanan Pangan	5	16	73	4	12	38	-1	-4	-35
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	10	22	5	11	30	0	1	8
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	18	59	8	17	56	0	-1	-3
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	11	17	34	11	16	33	0	-1	-1
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	57	5	17	43	0	0	-14
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	5	10	36	4	9	35
24	Dinas Perhubungan	4	27	83	4	17	34	0	-10	-49
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	5	9	30	5	11	31	0	2	1
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	17	34	8	18	40	0	1	6
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	38	6	13	36	0	0	-2
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	17	52	4	16	59	0	-1	7
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	10	23	66	9	20	48	-1	-3	-18
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	19	43	4	14	38	0	-5	-5
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	32	97	6	32	110	0	0	13
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	23	60	5	13	34	-1	-10	-26
33	Dinas Kehutanan	5	20	93	5	19	71	0	-1	-22
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	18	43	5	17	42	0	-1	-1
35	Dinas Perdagangan	7	20	50	5	11	29	-2	-9	-21
36	Dinas Perindustrian	4	11	37	4	9	28	0	-2	-9

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No	Nama OPD	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			Deviasi RKPD dan APBD (RKPD - APBD)		
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	8	20	2	8	20	0	0	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	11	45	2	10	27	0	-1	-18
39	Biro Hukum	2	9	25	2	8	17	0	-1	-8
40	Biro Organisasi	2	10	35	2	10	27	0	0	-8
41	Biro Umum	1	10	44	1	10	42	0	0	-2
42	Biro Administrasi Pimpinan	1	8	22	1	8	21	0	0	-1
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	12	28	3	9	13	0	-3	-15
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2	9	27	2	7	18	0	-2	-9
45	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2	18	101	2	17	71	0	-1	-30
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	18	70	4	18	63	0	0	-7
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	64	3	14	61	0	-1	-3
48	Badan Pendapatan Daerah	3	12	83	3	12	80	0	0	-3
49	Badan Kepegawaian Daerah	2	12	100	2	12	79	0	0	-21
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	9	37	2	9	34	0	0	-3
51	Badan Penghubung Daerah	2	7	16	2	6	17	0	-1	1
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	3	12	52	3	12	50	0	0	-2
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	59	6	13	54	0	0	-5
Jumlah		231	742	2,612	221	664	2,056	-10	-78	-556

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2022

Dokumen RKPD mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD hasil proses teknokratis. Selain itu, dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pereangkat Daerah (Renja SKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan untuk menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. RKPD merupakan landasan penyusunan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara) untuk menyusun RAPBD, dan merupakan pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

RKPD menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RAPBD yang dibuat oleh Kepala Daerah, DPRD dan SKPD sendiri dalam pembuatan kebijakan umum terkait rancangan anggaran di daerah. RKPD menjadi literatur utama dalam pembuatan anggaran dikarenakan di dalam dokumennya sudah memuat rencana kinerja selama satu tahun dari seluruh SKPD di level pemerintah daerah. RKPD membantu memberikan sumber informasi mengenai perkembangan capaian program yang sudah dilakukan oleh SKPD, mengetahui besaran serapan dana yang dikeluarkan oleh SKPD, mengetahui kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah dalam pembuatan skala prioritas kerja SKPD dan mengetahui setiap persoalan-persoalan yang sifatnya publiknes dan segera membutuhkan respon langsung dari pemerintah daerah. Pelaksanaan RKPD dalam kurung waktu sampai dengan April 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.146.
Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	REALISASI BULAN S/D BULAN MARET				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN INI
		PAGU	REALISASI	(%) KEU	(%) FISIK	
1	Badan Pendapatan Daerah	199,064,653,687.0	47,252,452,704.0	23.74	25.56	151,812,200,983.0
2	Sekretariat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah	308,289,490,916.0	56,296,632,234.0	18.26	18.26	251,992,858,682.0
3	Dinas Kehutanan	124,724,512,114.0	17,138,404,209.0	13.74	10.11	107,586,107,905.0
4	Badan Kepegawaian Daerah	27,263,342,913.0	3,700,813,292.0	13.57	15.70	23,562,529,621.0
5	Dinas Perhubungan	40,513,448,144.0	5,431,842,532.0	13.41	14.11	35,081,605,612.0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	50,628,379,966.0	6,716,828,636.0	13.27	13.55	43,911,551,330.0
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30,247,292,172.0	3,938,402,965.0	13.02	8.77	26,308,889,207.0
8	Biro Umum	157,368,479,285.0	20,225,786,204.0	12.85	12.85	137,142,693,081.0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,420,478,351,279.0	308,781,247,892.75	12.76	14.13	2,111,697,103,386.25
10	Dinas Sosial	50,879,864,709.0	6,280,339,061.0	12.34	12.34	44,599,525,648.0
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	38,550,308,271.0	4,609,475,203.0	11.96	12.83	33,940,833,068.0
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17,302,305,689.0	2,060,382,898.0	11.91	6.25	15,241,922,791.0
13	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	106,258,808,539.0	12,366,624,212.0	11.64	19.37	93,892,184,327.0
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	59,047,162,186.0	6,770,118,803.0	11.47	20.90	52,277,043,383.0
15	Biro Administrasi Pimpinan	9,361,027,561.0	1,072,254,796.0	11.45	11.45	8,288,772,765.0
16	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	57,163,791,316.0	6,519,449,025.0	11.40	13.49	50,644,342,291.0
17	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	65,470,257,314.0	7,244,841,896.0	11.07	6.59	58,225,415,418.0
18	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	24,681,116,201.0	2,715,986,360.0	11.0	11.44	21,965,129,841.0
19	UPT Transfusi Darah	11,659,211,880.0	1,277,192,910.0	10.95	17.88	10,382,018,970.0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	REALISASI BULAN S/D BULAN MARET				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN INI
		PAGU	REALISASI	(%) KEU	(%) FISIK	
20	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	32,503,557,985.0	3,553,214,590.0	10.93	11.45	28,950,343,395.0
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11,640,024,246.0	1,251,699,743.0	10.75	12.36	10,388,324,503.0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49,239,181,164.0	5,191,097,725.0	10.54	14.29	44,048,083,439.0
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18,629,405,137.0	1,960,805,493.0	10.53	13.77	16,668,599,644.0
24	Badan Penghubung Daerah	19,541,658,596.0	2,056,898,196.0	10.53	10.53	17,484,760,400.0
25	Dinas Pendidikan	2,991,524,524,379.0	312,140,272,071.0	10.43	19.89	2,679,384,252,308.0
26	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	35,626,538,848.0	3,702,106,812.0	10.39	10.39	31,924,432,036.0
27	Rumah Sakit Khusus Daerah	91,416,684,431.0	9,355,173,725.0	10.23	5.26	82,061,510,706.0
28	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	167,032,411,722.0	16,998,587,504.0	10.18	13.08	150,033,824,218.0
29	Biro Hukum	7,037,670,676.0	714,502,408.0	10.15	10.94	6,323,168,268.0
30	Dinas Ketahanan Pangan	27,219,487,847.0	2,727,571,041.0	10.02	11.32	24,491,916,806.0
31	Dinas Perdagangan	21,980,686,232.0	2,136,470,239.0	9.72	14.96	19,844,215,993.0
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	28,102,598,706.0	2,628,321,212.0	9.35	10.52	25,474,277,494.0
33	Biro Organisasi	6,364,377,861.0	571,807,770.0	8.98	8.98	5,792,570,091.0
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23,466,935,012.0	2,089,790,291.0	8.91	8.97	21,377,144,721.0
35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29,383,082,645.0	2,355,094,438.0	8.02	15.0	27,027,988,207.0
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27,113,785,647.0	2,113,896,847.0	7.80	8.87	24,999,888,800.0
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	42,592,427,984.0	3,218,042,893.0	7.56	8.02	39,374,385,091.0

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	REALISASI BULAN S/D BULAN MARET				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN INI
		PAGU	REALISASI	(%) KEU	(%) FISIK	
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	5,651,070,880.0	423,678,429.0	7.50	7.50	5,227,392,451.0
39	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	6,103,433,959.0	436,588,494.0	7.15	7.15	5,666,845,465.0
40	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4,677,161,272.0	328,608,102.0	7.03	5.59	4,348,553,170.0
41	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah	6,710,001,521.0	466,356,955.0	6.95	6.95	6,243,644,566.0
42	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	46,717,555,366.0	3,147,801,947.0	6.74	6.74	43,569,753,419.0
43	Dinas Perindustrian	38,400,362,484.0	2,399,111,615.0	6.25	5.95	36,001,250,869.0
44	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	51,364,143,160.0	2,957,137,930.0	5.76	5.10	48,407,005,230.0
45	Dinas Kelautan dan Perikanan	99,520,388,596.0	4,910,129,021.0	4.93	3.31	94,610,259,575.0
46	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	62,507,223,405.0	3,055,522,502.0	4.89	16.29	59,451,700,903.0
47	Dinas Kesehatan	267,002,953,488.0	10,992,834,520.0	4.12	12.04	256,010,118,968.0
48	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	121,916,416,131.0	3,388,614,702.0	2.78	3.56	118,527,801,429.0
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53,606,119,214.0	1,333,434,807.0	2.49	15.55	52,272,684,407.0
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1,120,029,616,861.0	27,357,268,127.0	2.44	0.64	1,092,672,348,734.0
51	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	580,897,823,420.0	13,874,263,129.0	2.39	1.97	567,023,560,291.0
52	UPT RSK Gigi dan Mulut	12,209,335,280.0	126,683,416.0	1.04	1.04	12,082,651,864.0
53	Biro Kesejahteraan Rakyat	88,901,626,911.0	750,111,943.0	0.84	7.57	88,151,514,968.0
		9,995,582,075,208.0	971,112,574,469.75	9.72	10.96	9,024,469,500,738.25

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa total anggaran pelaksanaan APBD Rp. 9,99 triliun lebih, dan hingga Maret 2023 realisasi keuangan baru mencapai Rp. 8971.11 milyar lebih atau 97.72% dan realiasi fisik baru mencapai 10.96%. Rendahnya capaian kinerja kegiatan oleh karena beberapa kegiatan/sub kegiatan masih dalam penyelesaian administrasi untuk proses tender dan proses pencairan. Diharapkan pada tahun 2022 seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan akan dapat tercapai sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

2.8. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan analisis terhadap faktor yang penyebabnya terjadinya perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai perencanaan dibuat dengan target yang direncanakan (*gap expectation*). Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan pembangunan yang dirumuskan menjadi dasar dalam penetapan strategis, arah kebijakan dan program-program pembangunan lebih lanjut dalam pendukung target pencapaian pembangunan ditahun 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah dan pelaksanaan RKPD ditahun sebelumnya, maka pada sub bab ini merumuskan permasalahan Pembangunan Daerah kedalam 2 kelompok permasalahan yaitu permasalahan terkait prioritas dan sasaran pembangunan yang merupakan permasalahan dalam level makro dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terbagi atas 4 yaitu (1). Urusan Pemerintahan Wajib Layanan Dasar; (2). Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar; (3). Urusan Pemerintahan pilihan dan (4). Urusan Penunjang Pemerintahan.

2.8.1. Permasalahan Terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.8.1.1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks reformasi birokrasi yang digunakan sebagai indikator dalam memotret penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian 66,16 dengan kategori baik, sehingga masih perlu dioptimalkan, untuk dapat mencapai akuntabilitas yang sangat baik perlu dilakukan optimalisasi dalam mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik juga menunjukkan capaian indeks SPBE berdasarkan keputusan MENPANRB nomor 108 tahun 2023 yang masih dalam kategori cukup (2,35), nilai ini memposisikan Provinsi Sulawesi Selatan pada urutan ke 21 di Indonesia, dan untuk regional Sulawesi indeks yang diperoleh masih berada di bawah Provinsi Gorontalo. Olehnya itu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan penerapannya.

2.8.1.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Belum Optimal

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, seperti yang tertuang dalam Perpres No. 29 Tahun 2014. Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 berada dalam kategori baik dengan nilai 68,08 yang berada pada kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik pada 1 unit kerja khususnya pada unit kerja utama dan masih perlu ada perbaikan sedikit pada unit kerja tersebut serta komitmen dalam manajemen kinerja. Selain itu capaian tersebut juga menunjukkan bahwa pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon II setiap unit kerja. Olehnya optimalisasi dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Sulawesi selatan perlu dilakukan khususnya pada unit kerja utama yang menangani : (1). Perencanaan pembangunan daerah; (2). Pengawasan internal; (3). Pendidikan; (4). Kesehatan; (5). pekerjaan umum dan penataan ruang; (6). Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (7). Ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat; (8). Sosial; (9). Pertanian; (10). Kelautan dan Perikanan; (11). Perindustrian; (12). Pariwisata; (13). Perdagangan.

2.8.1.3. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Belum Optimal

Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diberikan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Indeks Pelayanan Publik provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang tertuang dalam Kepmen-PANRB Nomor 1035 tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memperoleh nilai indeks 4,44 berada pada kategori A- dan untuk pelayanan sistem manunggal satu atap samsat provinsi memperoleh nilai 4,24 berada pada kategori A-. Perolehan nilai ini masih perlu dioptimalkan sebab Sulawesi Selatan masih berada pada peringkat 13 untuk pelayanan DPMPTSP dan peringkat 15 untuk pelayanan samsat. Dalam upaya optimalisasi tersebut, terdapat 6 aspek yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pelayanan publik, yaitu : (1). Kebijakan pelayanan dengan penyediaan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat; (2). Profesionalisme SDM; (3). Sarana Prasarana; (4). Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang mudah diakses; (5). Tersedia media konsultasi dan pengaduan; (6). Inovasi pelayanan.

2.8.1.4. Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah Belum Optimal

Indeks layanan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 80,39. Jika ditinjau dari komponen pembangun indeks layanan infrastruktur maka jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2022 baru mencapai 71,95 persen dari keseluruhan panjang jalan 2.009,35 km. Kondisi ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 74,24 persen. Dengan demikian diperlukan adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat serta rusak ringan agar dapat meningkatkan kualitasnya menjadi baik dan sedang, sehingga dalam menunjang mobilitas masyarakat antar daerah/wilayah. Disamping itu akses pada beberapa daerah terpencil juga masih perlu mendapat perhatian yang optimal seperti pada wilayah-wilayah yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Pinrang. Komponen pembangun indeks layanan infrastruktur lainnya yang juga belum optimal karena belum mencapai 100 persen pelayanan yaitu akses terhadap sanitasi layak dan akses masyarakat terhadap air minum layak.

2.8.1.5. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Indeks Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat diukur dengan Rasio Gini Sulawesi Selatan masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini Sulawesi Selatan hingga tahun 2022 adalah 0,365 meskipun kondisi ini lebih baik dari capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,377. Tergolong tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada data tahun 2022, yang menunjukkan bahwa terdapat 22 Provinsi lainnya di Indonesia yang indeks giniya lebih rendah atau lebih baik dari Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian indeks gini untuk regional Sulawesi juga menunjukkan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara memperoleh capaian tingkat pemerataan pendapatan masyarakat yang lebih baik dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan, maka tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan Provinsi Sulawesi selatan lebih tinggi di banding wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan yang terpusat pada kegiatan ekonomi yang padat modal dan tidak melibatkan sebagian besar pelaku ekonomi serta lebih beragamnya jenis pekerjaan pada masyarakat perkotaan dibanding perdesaan.

2.8.1.6. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 4,51%, nilai tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan 4 provinsi lainnya di Wilayah Sulawesi, yaitu Sulawesi Tengah dengan sebesar 3,00 %, Sulawesi Tenggara sebesar 3,36 %, Sulawesi Barat sebesar 2,34 % dan Gorontalo sebesar 2,58 %. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan ketersediaan pendidikan vokasional

belum mampu menciptakan *link and macth* antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri. Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan mempunyai pola distribusi yang hampir sama dari tahun ke tahun. Penganggur dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,96 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 3,19 persen. Hal ini menggambarkan kondisi pasar kerja Sulawesi Selatan saat ini sebagian besar diisi oleh mereka dengan pendidikan rendah. Selain itu, ketersediaan kesempatan kerja dari pengelolaan kegiatan dan sektor ekonomi yang masih berorientasi padat modal dari pada padat karya dan adanya kondisi ekonomi nasional dan daerah yang baru mulai bertumbuh pasca covid 19.

2.8.1.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi masih dibawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pasca covid 19 telah menunjukkan peningkatan dari 4,64 ditahun 2021 menjadi 5,09 ditahun 2022. Meskipun demikian capaian tersebut masih dibawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi menurut sektor lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian mengingat data pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut masih berada dibawah 5 persen pada lapangan usaha serikut : (1). Real estate; (2). Jasa pendidikan, pertanian kehutanan dan perikanan; (3). Konstruksi; (4). Jasa Keuangan dan Asuransi; (6). Pertambangan dan galian.

Capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di tahun sebelumnya pernah mencapai nilai pertumbuhan 7,04 persen tahun 2018 dan 6,91 ditahun 2019 serta berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pembangunan Sulawesi selatan harus didorong untuk dapat dsama dengan pertumbuhan ekonomi sebelum covid 19 dan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

2.8.1.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih Lebih Rendah dibanding Capaian Nasional

Perkembangan IPM Sulawesi Selatan selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan. Data tahun 2022 menunjukkan nilai IPM Sulawesi Selatan sebesar 72,82, meskipun demikian capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional yang besarnya 72,91. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, capaian IPM Sulawesi Selatan berada pada urutan 12 dari 34 Provinsi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masih terdapat 11 provinsi lainnya yang capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih baik dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Wilayah Sulawesi, terdapat 2 provinsi yang memperoleh capaian IPM pada tahun 2022 lebih baik dari Sulawesi Selatan, yaitu Provinsi Sulawesi Utara sebesar 73,81 dan Sulawesi Tengah sebesar 79,28.

Dalam upaya meningkatkan nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan, maka yang harus menjadi perhatian adalah capaian terhadap komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli (PPP). Penyebab dari rendahnya IPM Sulawesi Selatan

adalah rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 adalah 8,63 tahun , dengan kata lain bahwa lamanya bersekolah hanya sampai kelas VIII (kelas 2 SMP). Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan yaitu masih rendahnya pemeratan akses layanan Pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni masyarakat provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan indikator untuk indeks pendidikan lainnya yaitu harapan lama sekolah (HLS) menunjukkan capaian 13, 53 yang telah lebih tinggi dari capaian nasional, fokus perbaikan untuk indeks pendidikan adalah pada capaian rata-rata lama sekolah yang masih berada dibawah dari 20 provinsi lainnya di Indonesia dengan rata-rata lama sekolah dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 11,31 tahun yang berarti bahwa rata-rata lama sekolah pada daerah tersebut telah mencapai hingga kelas XI (kelas 2 SMA).

Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka harapan hidup (AHH) Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 70,97 tahun, juga lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Nasional 71,85 tahun. Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan yang masih rendah menunjukkan kinerja pembangunan sektor kesehatan yang masih perlu dioptimalkan, salah satu penyebabnya adalah Angka kematian bayi masih mengalami peningkatan di tahun 2022, Prevelensi balita stunting belum menunjukkan penurunan yang significant, prevelensi balita gizi buruk (wasting) di provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi dibanding 17 provinsi lainnya di Indonesia, prevelensi balita gizi kurang (underweight) masih tergolong tinggi dibanding 23 provinsi lainnya di Indonesia, menurunnya Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan menurunnya persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan.

Adapun tingkat daya beli masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yang diukur dengan pengeluaran perkapita adalah Rp.11,43 jt yang masih tergolong rendah sebab masih berada dibawah dari 11 provinsi lainnya di Indonesia, dengan nilai pengeluaran perkapita tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.18,93 jt. Meskipun demikian angka pengeluaran perkapita masyarakat Sulawesi selatan tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Indonesia yaitu Rp.11,47 Jt. Daya beli masyarakat yang disetarakan dengan pengeluaran perkapita sangat tergantung pada tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat

2.8.1.9. Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan gender (IDG) menunjukkan angka 93,14 di tahun 2022, meskipun capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2021, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibanding capaian yang pernah diperoleh pada tahun 2018. Kesenjangan pembangunan laki-laki dan perempuan terlihat dari nilai indeks pembangunan laki-laki sebesar 76,72 dan indeks pembangunan perempuan yang lebih rendah dengan nilai 71,46. Masih terdapatnya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan menyebabkan IPG Sulawesi Selatan belum optimal atau masih

berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2018 hingga 2022.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketimpangan tersebut terjadi disebabkan oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Tercatat di tahun 2022 pengeluaran perkapita disesuaikan laki-laki telah mencapai 16,65 juta rupiah/org/tahun sedangkan perempuan baru sebesar 10,13 juta rupiah/org/tahun. Kondisi ini terkait fakta bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang memang lebih sedikit di banding laki-laki. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja. Hingga tahun 2021 TPAK Sulawesi Selatan masih di dominasi oleh laki-laki dengan kisaran 80 persen, sementara perempuan masih dalam kisaran 20 persen.

2.8.1.10. Menurunnya Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi selatan tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 74,17, nilai ini juga lebih baik dari capaian nasional ditahun 2022 yaitu 72,42. Meskipun demikian perlu dicermati capaian dari masing-masing komponen penyusun indeks kualitas lingkungan hidup yaitu : (1). Indeks kualitas air sebesar 57,79; (2). Indeks kualitas udara sebesar 90,35; (3). Indeks kualitas tutupan lahan sebesar 55,46 dan (4). Indeks kualiatas air laut sebesar 85,59.

Berdasarkan capaian 4 komponen penyusun indeks kualiatas lingkungan hidup, maka indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan perlu mendapat perhatian sebab indeks ini memperoleh capaian yang rendah. Pengawasan terhadap limbah industri maupun rumah tangga yang bermuara ke badan air serta penggunaan pestisida di daerah pertanian tentu harus dikendalikan. Disamping itu langkah-langkah pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran harus wajib melalukan pengelolaan limbahnya pada IPAL sebelum disalurkan ke tempat pembuangan akhir. Adapun pada komponen indeks kualitas tutupan lahan yang juga menunjukkan capaian yang rendah, mayoritas terjadi karena lahannya berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering dan campuran, atau kebun campur. Indeks kualitas tutupan lahan ini menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan, termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial. Olehnya itu usaha pengendalian terhadap alih fungsi lahan dan ketaatan pelaksanaan pembanguna terhadap dokumen RTRW perlu dioptimalkan.

2.8.2. Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.8.2.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Permasalahan yang dirumuskan pada urusan pemerintah wajib pelayanan dasar dirumuskan berdasarkan ketercapaian indikator kinerja masing-masing urusan. Dari 6 urusan tersebut, terdapat 1 urusan yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menunjukkan capaian kinerja yang baik ditahun 2022, sehingga hanya perlu dioptimalkan dan tidak terdapat permasalahan yang mendasar pada pencapaian kinerja urusan tersebut. Adapun 5 urusan yang masih terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerjanya urusannya adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

- a. Partisipasi sekolah anak usia 16 – 18 tahun yang merupakan standar pelayanan minimal belum mencapai target 100%;
- b. Partisipasi warga negara usia 4 – 18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus yang merupakan standar pelayanan minimal belum mencapai target 100%;
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menurun ditahun 2022;
- d. Angka partisipasi murni sekolah menengah masih dibawah rata-rata nasional;
- e. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16 – 18 tahun serta 19 – 24 tahun mengalami penurunan ditahun 2022;
- f. Meningkatnya Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) ditahun 2022;
- g. Meningkatnya anak yang tidak bersekolah lagi/putus sekolah ditahun 2022.
- h. Meningkatnya persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat;
- i. Masih kurangnya jenjang pendidikan bagi SMP Luar Biasa dibanding kebutuhan anak usia sekolah penyandang disabilitas pada usia tersebut;

2. Kesehatan

- a. Angka kematian bayi masih mengalami peningkatan di tahun 2022;
- b. Prevelensi balita stunting belum menunjukkan penurunan yang signifikan;
- c. Prevelensi balita gizi buruk (*wasting*) di provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi dibanding 17 provinsi lainnya di Indonesia;
- d. Prevelensi balita gizi kurang (*underweight*) masih tergolong tinggi dibanding 23 provinsi lainnya di Indonesia;
- e. Menurunnya Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
- f. Menurunnya persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Ruas jalan kewenangan provinsi dalam kondisi mantap belum mencapai target yang ditetapkan;
- b. Ruas jalan kewenangan provinsi dalam kondisi baik baru mencapai 38,76 persen ;
- c. Masih rendahnya akses air minum layak melalui jaringan perpipaan yang baru mencapai 25,15 persen pada tahun 2022;

- d. Masih rendahnya rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Masih rendahnya persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi yang baru mencapai 25,39 persen;
- b. Masih rendahnya rumah dengan sanitasi aman;

5. Sosial

- a. Masih rendahnya persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapat jaminan sosial

2.8.2.2. Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

Permasalahan yang dirumuskan pada urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar dirumuskan berdasarkan ketercapaian indikator kinerja masing-masing urusan. Terdapat 18 urusan yang 3 antara urusan tersebut menunjukkan hasil yang baik ditahun 2022 yaitu statistik, persandian dan kearsipan, sehingga hanya perlu dioptimalkan dan tidak terdapat permasalahan yang mendasar pada pencapaian kinerja urusan tersebut. Adapun 15 urusan lainnya yang masih terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja urusannya adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Kerja

- a. Belum optimalnya penyelesaian Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro sebagai dasar dalam pembangunan ketenagakerjaan pada masing-masing Kabupaten/Kota;
- b. Belum optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan oleh perusahaan perusahaan;
- c. Masih rendahnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaa;
- d. Masih rendahnya Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek dalam mendukung keselamatan dan perlindungan kerja;
- e. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih kurang dari 50%

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Menurunnya persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi
- b. Menurunnya persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG;
- c. Menurunnya Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi;

3. Pangan

- a. Belum optimalnya cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun;

4. Pertanian

- a. Belum optimalnya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara tepat waktu

5. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan;
- b. Masih rendahnya Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya pencatatan administrasi penduduk khususnya dalam kepemilikan akte nikah yang menunjukkan 18 kabupaten kota yang presentasenya masih dibawah 50 persen ditahun 2022;
- b. Belum optimalnya pencatatan administrasi penduduk khususnya dalam kepemilikan kartu identitas anak yang menunjukkan 45% dari 24 kabupaten/kota kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang jumlah anak tanpa kartu identitas anak lebih besar dari yang telah memiliki kartu identitas anak.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih rendahnya persentase desa mandiri, bahkan 7 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki satu pun desa mandiri di tahun 2022;
- b. Masih rendahnya Badan Usaha Milik (BUM) Desa yang difasilitasi;
- c. Masih rendahnya persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB, yang menunjukkan dengan belum adanya peningkatan dari tahun sebelumnya;
- b. Menurunnya persentase pasangan usia subur peserta KB aktif;

9. Perhubungan

- a. Masih rendahnya Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik
- b. Meningkatnya capaian persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan tahun 2019 hingga 2022 belum diikuti dengan ketersediaan sarana penunjang yang cukup berupa halte pada koridor layanan di Kawasan mamminasata.
- c. Peningkatan arus penumpang angkutan darat belum diikuti dengan penyediaan fasilitas terminal yang memberikan kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda transfortasi ke moda transfortasi lainnya yang mengakibatkan merebaknya terminal liar dan penurunan fungsi terminal angkutan darat.
- d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada pelabuhan pengumpan regional yang baru diserahkan pada pemerintah provinsi Sulawesi selatan di tahun 2023;

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

11. Koperasi Usaha kecil dan Menengah

- a. Peningkatan jumlah koperasi tidak aktif, akibat terbatasnya pemahaman pengelola koperasi terkait tata kelola koperasi sesuai peraturan terbaru;
- b. Rendahnya Persentase koperasi dengan kriteria sehat;
- c. Menurunnya persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
- d. Persentase Koperasi yang memiliki Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan tidak mengalami peningkatan sejak tahun

2019 hingga 2022;

- e. Menurunnya persentase pengurus koperasi aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang berpengaruh terhadap kualitas SDM pengurus koperasi;
- f. Menurunnya persentase UMKM yang diberdayakan dan terfasilitasi dalam pengembangan usaha

12. Penanaman Modal

- a. Penurunan jumlah investor penanaman modal asing dari tahun 2020 hingga tahun 2022;
- b. Penurunan Jumlah Realisasi PMDN dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang disebabkan oleh akibat belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan tenaga kerja, teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil;

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Menurunnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial, akibat kurangnya kegiatan kepemudaan yang diinisiasi oleh organisasi pemuda secara mandiri, sehingga memerlukan pembinaan dalam mendorong penciptaan pemuda yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa;

14. Kebudayaan

- a. Menurunnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi akibat usulan karya budaya oleh pemerintah kabupaten/kota yang dinilai belum memenuhi syarat dalam penetapan WBTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sehingga perlu pembinaan dan sosialisasi terkait kriteria dalam penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
- b. Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.

15. Perpustakaan

- a. Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2019 ke tahun 2022, memerlukan peningkatan pelayanan dari segi koleksi buku, sarana dan prasarana serta layanan PP-IPTEK.

2.8.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Permasalahan urusan pemerintahan pilihan terbagi atas delapan urusan yang rumusan permasalahannya didasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah diukur pada tahun sebelumnya. Adapun permasalahan pada masing-masing urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pariwisata

- a. Masih rendahnya persentase kawasan wisata halal di Provinsi Sulawesi Selatan;

- b. Kunjungan wisatawan manca negara masih rendah dibanding capaian yang pernah diperoleh di tahun 2019;
- c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing dengan persentase jumlah yang terlatih masih rendah yaitu 1,55 persen;

2. Pertanian

- a. Terjadinya penurunan kontribusi sector pertanian khususnya perkebunan terhadap PDRB tahun 2022;
- b. Terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian khususnya Tanaman Pangan) terhadap PDRB;
- c. Terjadinya penurunan Kontribusi sektor pertanian khususnya Tanaman Hortikultura terhadap PDRB tahun 2022;
- d. Terjadi penurunan kontribusi sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB
- e. Terjadi penurunan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan;
- f. Menurunnya penggunaan benih padi bersertifikasi pada tahun 2022 yang berpengaruh terhadap kualitas tanaman padi;
- g. Menurunnya produktivitas tanaman perkebunan berupa kopi dan kakao;
- h. Terjadi penurunan produksi hasil ternak berupa daging, susu dan telur;
- i. Terjadi penurunan populasi ternak besar berupa sapi perah, sapi potang, kuda dan kerbau;

3. Kehutanan

- a. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi hutan;
- b. Menurunnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB;
- c. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- d. Luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan;

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Persentase Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (*good mining practice*) masih cukup tinggi;
- b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah;
- c. Masih terdapat daerah di pulau terpencil, terisolir dan terdepan yang belum teraliri listrik;

5. Perdagangan

- a. Menurunnya jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail;
- b. Belum optimalnya pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang baru menunjukkan capaian 50% di tahun 2022;
- c. Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru mengalami penurunan;

6. Perindustrian

- a. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama masih rendah;
- b. Menurunnya Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri;
- c. Industri rumah tangga belum berkembang secara optimal terlihat dari kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB Sektor Industri baru mencapai 9,31%;

7. Transmigrasi

- a. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar pada kawasan transmigrasi;

8. Kelautan dan Perikanan

- a. Masih rendahnya Produksi perikanan kelompok nelayan yang baru mencapai 29,43 persen;
- b. Menurunnya persentase ketersediaan benur berkualitas;
- c. Menurunnya produksi perikanan budidaya

2.8.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Permasalahan yang dirumuskan pada urusan penunjang pemerintahan berdasarkan ketercapaian indikator kinerja masing-masing urusan. Terdapat 6 urusan yang 1 antara urusan tersebut menunjukkan hasil yang baik ditahun 2022 yaitu urusan pada sekretariat dewan, sehingga hanya perlu dioptimalkan dan tidak terdapat permasalahan yang mendasar pada pencapaian kinerja urusan tersebut. Adapun 5 urusan lainnya yang masih terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja urusannya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan

- a. Masih rendahnya persentase peningkatan capaian kinerja program;
- b. Belum optimalnya kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah;

2. Keuangan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah;
- b. Belum optimalnya manajemen pengelolaan aset dengan masih terdapatnya aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Belum optimalnya persentase serapan belanja daerah;
- d. Belum seluruhnya aset taah milik Pemerintah Provinsi telah bersertifikat;

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

- a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;
- b. Kebutuhan ASN belum terpenuhi secara optimal;
- c. Masih terdapat ASN yang belum berkinerja baik dan sangat baik.

4. Penelitian dan pengembangan

- a. Masih rendahnya persentase perangkat daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah;
- b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

5. Pengawasan

- a. Belum optimalnya Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota,
- c. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD;
- d. Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori “Infrastructure” atau di “Level 2” dari lima tingkatan (level).

2.9. ISU STRATEGIS

2.9.1. Isu Strategis Global

2.9.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global terkait SDG's dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. selanjutnya Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Mengingat bahwa RAD Tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan telah berakhir di tahun 2023 maka perlu disusun kembali Rencana Aksi tahun 2024 hingga 2030 yang merupakan tahun akhir target pelaksanaan SDG's.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan penyempurnaan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang ditargetkan hingga tahun 2030, penyempurnaan tersebut karena:

- 1. SDGs lebih **komprehensif**, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk **negara maju dan berkembang**.
- 2. **Memperluas sumber pendanaan**, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.

3. Menekankan pada **hak asasi manusia** agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
4. **Inklusif**, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan (No one left behind).
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: **pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.**
6. MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (Zero Goals).
7. SDGs tidak hanya memuat **Tujuan** tapi juga **Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation).**

Sebagai penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), maka SDG's melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Upaya pencapaian target TPB/SDGs dilakukan dengan menjadikan target SDG's sebagai prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.9.1.2. Konflik Rusia dan Ukraina

Situasi geopolitik dan geo-ekonomi dunia telah mengalami perubahan yang mendalam setelah Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022. Konfrontasi yang terjadi hingga saat ini belum ada tanda-tanda mereda, konflik di Ukraina telah menyebabkan dampak jangka panjang terhadap masa depan hubungan internasional. konflik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat dan menyita perhatian banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Puncak konflik tersebut ditandai dengan adanya operasi militer khusus di wilayah Ukraina yang diperintahkan oleh Presiden Rusia. Dengan adanya konflik antara dua negara ini dapat menyebabkan kerugian dan dampak negatif bagi negara lain dalam berbagai bidang baik perekonomian dan perdagangan.

Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan menurunnya ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan berbahan dasar gandum. Impor terbesar Indonesia dari Rusia yaitu ingot besi baja (bahan baku baja) sebesar 486 ribu ton dengan nilai USD326 juta sepanjang tahun 2021. Impor itu menjadi yang terbesar dan berikutnya adalah pupuk buatan sebesar 974,32 ribu ton dengan nilai USD326,03 juta. Walaupun pada tahun 2021 neraca perdagangan Rusia – Indonesia meningkat, namun di tahun 2023antisipasi terhadap ketidakstabilan perekonomian global perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya pada bidang pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan. Dampak lainnya adalah risiko perlambatan ekonomi global akibat lonjakan inflasi. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut akan direspons dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi

tersebut mencuat dan menjadi ancaman perekonomian global di tahun 2023 dan akan berefek setidaknya hingga 2 tahun berikutnya.

2.9.1.3. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Konferensi ke-27 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP27) di Kota Sharm El-Sheikh, Mesir mengesahkan kesepakatan bersejarah tentang pembentukan dana kompensasi kerugian dan kerusakan untuk negara-negara yang rentan akibat perubahan iklim. Dana kompensasi ini akan meliputi biaya atas kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap negara-negara miskin untuk membangun perumahan, jalan-jalan, dan jembatan yang dirusak, dan dukungan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, hujan lebat, dan banjir yang serius. Kesepakatan bersejarah ini dianggap sebagai kemenangan terbesar negara-negara berkembang setelah lebih dari 30 tahun negosiasi.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan.

2.9.1.4. Krisis Energi Global

Lonjakan Harga impor energi secara global, dengan harga batu bara lima kali lebih tinggi dan harga gas bakar 10 kali lebih tinggi menempatkan dunia di depan dalam bahaya yang sulit diduga. Krisis energi global menunjukkan kecenderungan yang tak terelakkan untuk cepat beralih ke penggunaan sumber energi hijau dan energi terbarukan. Krisis energi global yang terjadi dengan konsekuensi sebagian besar kawasan di dunia menghadapi kekurangan pasokan sementara harga migas, dan listrik naik tajam. Ada banyak faktor yang menyebabkan krisis ini seperti perubahan iklim, pertumbuhan panas dalam beberapa tahun sebelumnya dikaitkan dengan konsekuensi dari konflik Rusia-Ukraina.

Bahaya perang ini luar biasa. Ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Eropa mungkin dapat melalui krisis energi di musim dingin ini. Namun krisis energi, terutama minyak dan gas, berpotensi memburuk selama beberapa tahun ke depan jika perang berlarut-larut. Oleh karena itu harga batu bara diprediksi masih tetap tinggi. Faktor lainnya yang akan mendorong konsumsi batu bara adalah fenomena cuaca ekstrim yang diprediksi akan mewarnai tahun 2023 seperti yang terjadi pada 2022. Cuaca ekstrim dengan gelombang panas saat ini akan mempengaruhi produksi listrik dari sumber energi terbarukan, dan dapat mendorong konsumsi listrik.

2.9.1.5. Transformasi Digital

Saat ini mulai memasuki Era Industri 5.0, di mana pengalaman konsumen menjadi fokus utama yang hendak dicapai. Kustomisasi yang tinggi juga menjadi salah satu karakteristiknya. Selain itu, Era 5.0 menuntut untuk pasokan yang responsif dan terdistribusi, pengalaman interaktif produk, serta kembalinya sistem ke tenaga kerja. Perbedaan mendasar antara Industri 4.0 dan industri 5.0 adalah pada era industri 4.0 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi difokuskan pada aspek melakukan pekerjaan secara otomatis. Teknologi digital pada era ini dapat dikatakan menjadi pesaing bahkan pengganti tenaga kerja manusia. Bisnis UMKM dan startup juga mulai memanfaatkan robotika dalam bentuk *cobot* (*collaborative robots*) dan perangkat IoT yang terhubung satu sama lain secara konsisten agar menghasilkan data dalam jumlah besar tentang proses kerja dan alur produksi. Sedangkan, karakteristik industri 5.0 lebih mementingkan peran manusia sebagai pusat peradaban dan menekankan pada perluasan prospek kerja yang didorong dengan teknologi canggih, seperti AI (*Artificial Intelligence*), IoT (*Internet of Things*), dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada industri 5.0, teknologi bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk menghubungkan manusia dengan teknologi dan menjadi pendukung pekerjaan manusia.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif, adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500

pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (ERP sistem).

2.9.2. Isu Strategis Nasional

2.9.2.1. Standar Pelayanan Minimal

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan. dengan dilaksanakannya peraturan ini maka akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pelayanan pendidikan menengah;
- b. Pelayanan pendidikan khusus;
- c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
- g. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang

- terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- i. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
 - j. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - k. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - l. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - m. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - n. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

2.9.2.2. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industri.. Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia berdasarkan statistic tahun 2022 adalah 192,3 juta jiwa sedangkan usia belum produktif dan tidak produktif adalah 84,79 juta jiwa, sehingga rasio ketergantungan adalah 44,1 yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 44 orang. Apabila dependency ratio tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula. jika rasio ketergantungan di suatu negara besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Selain itu, negara yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi negara maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju. Karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

Bonus demografi memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Tak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang justru dapat menjadi ancaman bagi negara. Dampak positif dari bonus demografi adalah ketersediaan tenaga kerja, membantu perkembangan ekonomi sebuah negara karena semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja, dan Pertumbuhan sektor pemerintah yang lain. Namun demikian momen bonus demografi ini tidak hanya akan menghadirkan keuntungan bagi sebuah negara. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, maka fenomena ini akan membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah yang diantaranya adalah meningkatnya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang, Peningkatan jumlah angka lansia yang drastis dan mendominasi masyarakat suatu negara merupakan yang dinamakan *aging population*.

Penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah 6.365.632 jiwa, sedangkan usia tidak produktif sebanyak 2.860.115 jiwa, sehingga tingkat ketergantungan pada tahun 2022 adalah 44,93 yang menunjukkan angka sedikit lebih tinggi dari tingkat ketergantungan nasional. Untuk mengantisipasi bonus demografi yang terjadi pemerintah perlu sebagai fasilitator utama perlu melakukan langkah-langkah dalam menyediakan segala sarana dan prasarana dengan cukup. Misalkan dari segi kesehatan, untuk menjaga seorang individu agar tetap bertahan hidup hingga dan selama masa produktifnya maka perlu alat kesehatan yang memadai. Dari segi pendidikan, pemerintah juga bisa menyediakan sekolah atau sarana prasarana lain yang cukup untuk membentuk sumber daya manusia bersaing.

2.9.2.3. Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pada tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, serta Pilkada Serentak. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam salah satu pemerintah provinsi yang habis masa jabatan gubernur pada Tahun 2023 termasuk di dalamnya 8 (delapan) kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa tantangan besar yang dihadapi dalam masa sebelum dan sesudah pemilu dan pilkada.

Tantangan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tersebut yang perlu mendapat perhatian secara khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah:

1. Penganggaran pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada langsung memerlukan pendanaan yang tidak sedikit untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat berlangsung dengan baik, aman dan damai dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan daerah harus diperhitungkan biaya-biaya pelaksanaan yang perlu dikeluarkan pada tahun pelaksanaan;
2. Jaminan distribusi perlengkapan pemungutan suara. Terdapat beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memerlukan perhatian khusus dalam distribusi perlengkapan pemungutan suara yaitu pada daerah yang jauh dari jangkauan seperti daerah pegunungan dan daerah kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan pelibatan unsur-unsur pendukung dalam distribusi perlengkapan pemungutan suara sehingga dapat terdistribusi sesuai waktu yang ditentukan;
3. Tantangan selanjutnya adalah netralitas ASN. Tak dapat dipungkiri bahwa ASN memainkan peran sebagai pribadi dan juga Aparat Sipil Negara. Sebagai pribadi memiliki hak untuk menentukan pilihan namun sebagai aparat sipil negara diwajibkan mengedepankan netralitas. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah bagaimana peran aparat sipil negara lebih dikedepankan dari peran pribadi untuk menjamin tidak adanya keberpihakan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
4. Friksi yang terjadi antar golongan dan pemilih tentu tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari bentuk pemilu dan pilkada langsung. Oleh

karena itu tantangan selanjutnya pasca pemilu dan pilkada serentak adalah masa pendinginan suasana;

5. Stabilitas politik perlu dijamin sehingga benturan yang terjadi dapat diminimalisir dan ditangani dengan baik. Mengingat pelaksanaan pemilu dan pilkada yang begitu kompleks, maka dibutuhkan kolaborasi antar stakeholders utamanya pemerintah daerah beserta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan pilkada dilaksanakan dengan baik sehingga stabilitas politik pasca pemilu dan pilkada dapat terkontrol dengan baik.

Tantangan tersebut perlu dipersiapkan dengan baik mulai dari segi pendanaan hingga kesiapan segenap stakeholder dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tersebut.

2.9.3. Isu Strategis Daerah

2.9.3.1. Penguatan Peran Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Produktivitas pertanian Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Kondisi pada tahun 2022 menunjukkan Luas panen padi sebesar 1,04 juta hektare, mengalami peningkatan sebanyak 57 ribu hektare atau 5,78 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 985 ribu ha, adapun produksi padi pada 2022 sebesar 5,34 juta ton Gabah Kering Giling, mengalami kenaikan sebesar 250 ribu ton Gabah Kering Giling atau 4,92 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang produksinya sebesar 5,09 juta ton GKG. Capaiannya ini menguatkan peran Sulawesi Selatan sebagai salah satu pengangga pangan nasional. Saat ini Sulawesi selatan telah menyuplai 25 persen cadangan Bulog di Indonesia.

Olehnya itu tantangan pembangunan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pertanian ditahun mendatang adalah perbaikan infrastruktur irigasi mengingat masih terdapat lahan sawah yang tidak beririgasi yang memiliki peluang sangat besar dalam meningkatkan produksi pangan di Sulawesi Selatan. Disamping itu penyediaan sarana dan prasana pertanian serta menyiapkan kemampuan petani dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana khususnya bencana banjir maupun kekeringan yang berpotensi terhadap terjadinya gagal panen yang dirasakan oleh petani.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut diatas adalah Program Mandiri Benih yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendapatkan varitas lokal yang berkualitas dalam usaha memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Sinergitas pembangunan dari berbagai sektor seperti pertanian, infrastruktur, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah serta perbankan perlu ditingkatkan dalam mendukung peran tersebut.

2.9.3.2. Memantapkan Peran Sebagai hub dan Pintu Gerbang Perdagangan Internasional di Kawasan Timur

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan

pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan dan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia.

Pelabuhan Makassar yang telah ditetapkan sebagai jalur pelayaran langsung dari luar negeri (*direct call*) mulai tahun 2014 didukung oleh Kapasitas terpasang peralatan bongkar muat terminal peti kemas di Pelabuhan Makassar dinilai telah siap melayani kapal kargo berukuran besar dari operator pelayaran asing. Pelayaran langsung juga berdampak positif untuk menekan ongkos logistic, khususnya pengiriman barang untuk perdagangan luar negeri di Indonesia Timur. Pelabuhan Makassar terus dikembangkan yang bertujuan untuk memperlancar dan meningkatkan efisiensi arus logistik, menstimulasi kegiatan ekspor-impor di kawasan timur serta menggefesiensikan biaya ekspor yang selama ini dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dalam Program Tol Laut, kehadiran pelabuhan Makassar tidak hanya didorong untuk memperkuat mobilitas barang keluar negeri tapi juga menyinergikan 12 provinsi di wilayah timur Indonesia dan menghubungkan 34 provinsi. Tol laut diperuntukkan agar distribusi barang terjadwal dan terjangkau. Pembangunan Makassar New Port menjadi momentum dalam upaya menguatkan peran Sulawesi selatan sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur Indonesia.

**2.9.3.3. Transformasi Perekonomian Wilayah Berbasis Hilirisasi
Komoditas Unggulan Wilayah.**

Sumberdaya alam yang terkandung di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendorong daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

1. Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
2. Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.
3. Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
4. Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (*debottlenecking*).
5. Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2.9.3.4. Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Pemerataan akses kesehatan kepada masyarakat merupakan syarat pokok pelayanan kesehatan yang tidak hanya mendekatkan akses tapi juga kualitas layanan kesehatan pada masyarakat. Layan berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*sustainable*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan. serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Rumah sakit regional telah dibangun pada masa RPJMD 2018-2023 agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi menjadi pusat rujukan utama dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya hal yang juga perlu diperhatikan adalah ketersediaan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat yang berada di daerah terpencil yang perlu ditingkatkan dalam mendukung SDM yang memadai dalam memberikan

pelayanan kesehatan.

2.9.3.5. Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Kegiatan Perekonomian

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan produksi padi yang cukup tinggi, sehingga menjadi penyangga pangan khususnya di kawasan timur Indonesia. Selain itu infrastruktur terkait sumberdaya air memiliki arti penting sebab sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Indeks layanan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan belum tercapainya kondisi mantap jalan sesuai yang ditargetkan, sehingga memerlukan penanganan terhadap jalan yang rusak berat dan rusak ringan agar dapat berubah kondisinya menjadi baik maupun sedang, dalam menunjang mobilitas masyarakat maupun barang antar daerah/wilayah. Disamping itu infrastruktur irigasi yang diharapkan dapat menunjang produktifitas pertanian masih perlu dioptimalkan mengingat masih terdapat sawah tadah hujan di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas lahan sawah beririgasi.

2.10. Inovasi Daerah

Pengembangan dan penerapan suatu inovasi dapat menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif atau daya saing daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan inovasi daerah dalam berbagai sektor terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan senantiasa memperhatikan dan penekanan pada tujuan dan arah pembangunan daerah maupun penguatan potensi dan kearifan lokal yang ada.

Berikut ini sejumlah bentuk inovasi daerah yang telah diinisiasi, diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

Tabel II.147.
Daftar Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
1	GESIT -19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan)	GESIT-19 diharapkan mampu mewujudkan suatu langkah strategis dan kreatif dalam memberikan solusi pelayanan di bidang perizinan yang cepat, murah, dan terjangkau kepada pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan. Adapun tujuan dari GESIT-19 adalah : 1. Mendekatkan pelayanan perizinan pada pusat kegiatan usaha perikanan; 2. Mempercepat pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan; 3. Mengedukasi pelaku usaha untuk taat pada peraturan; 4. Menghilangkan jasa percaloan serta memangkas birokrasi dalam pengurusan izin perikanan; 5. Mewujudkan proses perizinan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel. Dengan hadirnya GESIT-19 sebagai implementasi dalam mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi dan bersih melayani serta sebagai bentuk sinergitas dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
2	Sapi Bali Unggul dan Lestari Dari Sulawesi Selatan (SI BALUNG LESTARI)	Inspirasi “Si Balung Lestari” merupakan inovasi perkawinan silang antara induk sapi Bali dengan Banteng Cross Sapi Jaliteng = Jawa Bali Banteng). Banteng Cross merupakan turunan Banteng, yang dikoleksi spermanya oleh Balai Inseminasi Buatan Singosari, Jawa Timur. Perkawinan silang dengan metode Inseminasi Buatan. Inovasi “Si Balung Lestari”, yaitu Persilangan Induk Sapi Bali dengan Banteng Cross (Sapi Jaliteng = Jawa Bali Banteng) dengan tujuan memperbaiki performa dan genetik sapi Bali sehingga meningkatkan minat peternak untuk memelihara sapi Bali sebagai plasma nutfah agar tetap lestari dan tidak punah.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Mobile Banking Dan Atm Bank Pembangunan Daerah Sulselbar (APPAKAMMA)	Aplikasi ini merupakan sistem pembayaran pajak secara non tunai (cashless) melalui mobile banking dan ATM Bank Sulselbar, memiliki tujuan: Peningkatan penerimaan PAD yang bersumber pada pajak kendaraan bermotor, diversifikasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat wajib pajak, mengurangi potensi kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang.	Badan Pendapatan Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
4	Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa (SIBUMDESA)	SIBUMDESA merupakan sistem informasi yang berbasis Website sehingga mudah diupdate dan menyajikan data Badan Usaha Milik (BUM) Desa sesuai dengan kondisi terkini. Sistem ini dirancang untuk memudahkan melakukan pendataan terhadap perkembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa yang ada di Kabupaten, sebagai user di Kabupaten sehingga informasi terkait tingkat perkembangan BUM Desa yang ada di Kabupaten dapat tersaji dengan cepat dan akurat.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK)	Kemajuan teknologi khususnya penggunaan Handphone yang sangat pesat tentunya sangat membantu dalam mendukung aktivitas/pekerjaan. Aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) yang dibuat merupakan inovasi dalam memperoleh data dan informasi kemiskinan yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Smart Office Provinsi Sulawesi Selatan	Smart Office Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
7	Klinik Tumbuh Kembang Anak (KUMBANG ANDALAN)	Klinik Tumbuh Kembang Anak (Klinik Andalan) yaitu berupa wadah konsultasi dan bimbingan kepada masyarakat khususnya pada anak batita dan balita yang sedang dalam	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		proses pertumbuhan. Adanya Klinik ini berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan anak pra sekolah, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak balita dan anak pra sekolah. Pelayanan yang akan dilakukan yaitu berupa pelayanan jasa konseling pentingnya pemeriksaan tumbuh kembang dan persetujuan tindakan, penimbangan berat badan anak, pengukuran tinggi badan anak, pengukuran LK,LD dan LILA anak, pengukuran tumbuh kembang anak usia 3-72 bulan dengan menggunakan tes KPSP, tes IQ minat dan bakat, deteksi dini keterlambatan perkembangan pada anak, terapi mengatasi kesulitan belajar pada anak, terapi psikologi kestabilan emosi (EQ), deteksi dini terapi autism.	Penduduk dan KB

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
8	Klinik Kesehatan Reproduksi Remaja (KESTURI REMAJA)	Klinik kesehatan reproduksi remaja (KESTURI REMAJA) dimaksudkan untuk membimbing remaja mengatasi konflik seksualnya. Kesturi Remaja dapat memberikan bekal pengetahuan kepada remaja mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi, proses perkembangan janin, dan berbagai permasalahan reproduksi seperti kehamilan, PMS, HIV/AIDS, KTD dan dampaknya, serta pengembangan perilaku reproduksi sehat untuk menyiapkan diri melaksanakan fungsi reproduksi yang sehat (fisik, mental, ekonomi dan spiritual).	Dinas Kesehatan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
9	Sistem Informasi Logistik (SIMLOG) Sulsel	Simlog Sulsel merupakan inovasi dalam bidang sosial melalui aplikasi online berbasis website yang berfungsi koordinasi untuk memantau penyaluran bantuan bencana ke daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya fungsi Controlling untuk mengatur alur distribusi bantuan (Supply Treasury Logistic) terkait ketersediaan stock bantuan dan traffic serta timing bantuan yang masuk dan keluar dari Dinsos Pemprov Sulsel. Web Aplikasi ini sebagai media controlling penyaluran bantuan korban bencana sosial yang terjadi di Sulawesi Selatan, dan juga media untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Aplikasi penyediaan data dan informasi sosial kemasyarakatan dan bencana alam melalui teknologi informasi berbasis website yang dapat diakses secara online.	Dinas Perdagangan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
10	Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam Sistem Informasi Publik	Salah satu pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE berupa tanda tangan digital/elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTE digunakan untuk melakukan legislasi file digital oleh pejabat publik lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diprioritaskan kepada pimpinan daerah dan Pejabat Eselon I dan II untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan secara transparan, efisien dan efektif. Tujuan inovasi daerah mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengamanan informasi digital milik pemerintah guna peningkatan mutu pelayanan publik.	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
11	Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SIBANG SDM)	Sibang SDM merupakan aplikasi tentang sistem informasi sumber daya manusia aparatur, berisi informasi pendaftaran peserta diklat secara online, bahan ajar peserta, jadwal kegiatan, wadah monitoring dan evaluasi terhadap widyaswara serta informasi tentang sarana dan prasarana. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
12	Sistem Pemandirian dan Pembinaan Pada Pasien ODGJ (SIRI NA PACCE) melalui Rehabilitasi Psikososial	Inovasi ini menyediakan sarana dan pra-sarana serta pelatihan keterampilan secara kontinu kepada penderita ODGJ yang memenuhi kriteria. Manfaat yang diperoleh : peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya mendukung pemulihan penderita ODGJ melalui rehabilitasi psikososial dengan mengikutsertakan penderita ODGJ pada kegiatan di masyarakat dan keluarga, penderita ODGJ dapat berfungsi sebagai warga masyarakat yang berguna melalui penyesuaian diri dalam hubungan perseorangan dan sosial secara memuaskan , penderita ODGJ mempunyai keterampilan yang bisa digunakan sebagai sumber pendapatan, mengurangi beban keluarga dengan penderita ODGJ, peningkatan kualitas hidup penderita ODGJ, penderita ODGJ rawat inap maupun rawat jalan dapat berperan sebagai manusia normal, berswasembada dan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang mandiri dan berguna, pendapatan RS meningkat. Hasil Inovasi berupa upaya rehabilitatif ODGJ yang meliputi : rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial; dan rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan humanis dan budaya lokal.	Dinas Kesehatan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
13	Inovasi Sejuta Ikan (E-Sertifikasi Mutu Produk Perikanan)	Aplikasi E-Sertifikasi Mutu Produk Perikanan yang dilengkapi dengan fitur Chat Customer Service yang dapat membantu Client dalam menggunakan Aplikasi ini. Fitur ini terintegrasi dengan Aplikasi Facebook dan Telegram Mobile. Inovasi ini bertujuan agar dalam pelayanan pengujian mutu hasil perikanan tidak terjadi kesalahan administratif baik oleh BPMPP ataupun oleh Pemohon sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
14	PASAR TANI : Protokol Kesehatan Berbasis Teknologi Non Tunai di Pasar Modern di Sulawesi Selatan	Pasar tani berkonsep modern ini berfungsi sebagai stabilizer agar harga dapat terjaga, dan berjalan normal. Selain itu konsep ini memberikan kemudahan pembeli mendapatkan 11 komoditas bahan pangan pokok dengan harga terjangkau dan berkualitas terutama selama masa pandemik Covid-19 dan New Normal yang akan diterapkan di Indonesia. Tujuan dari Inovasi Protokol Kesehatan Berbasis Non tunai di Pasar Modern ini adalah : 1. Mewujudkan Tataan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Desease 2019 dengan menerapkan standar pelayanan yang menjamin higienitas terhadap kebutuhan pokok masyarakat dengan tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai yang notabenenya adalah media penyebaran berbagai macam bakteri atau virus. 2. Memberikan rasa aman kepada konsumen dan produsen yang mengunjungi pasar Modern dengan menerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi sistem tranksaksi non tunai.	Dinas Ketahanan Pangan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
15	Penyelenggaraan Transportasi Online di Masa New Normal	Grab Protect adalah pelayanan transportasi online mobil penumpang dengan menggunakan pembatas kabin dari bahan plastik mika tembus pandang untuk meminimalkan kontak langsung antara pengemudi dan penumpang, selain itu pengemudi diwajibkan menggunakan masker, sarung tangan dan melakukan disinfeksi pada kendaraan serta menyediakan hand sanitizer untuk penumpang. Untuk menjamin kepastian pemenuhan protokol kesehatan tersebut bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara berkala. Output berupa Grab Protect dan Pengawasan Protokol Kesehatan pada Pengemudi dan Kendaraan.	Dinas Perhubungan
16	NEw Normal Innovation Sistem Informasi Layanan Izin penelitian oNline CAmpus (NENI SI LINCA)	NENI SI LINCA ini menggunakan peralatan software-hardware dan berkolaborasi dengan pihak Perguruan Tinggi selaku validator dari dokumen yang diunggah oleh Mahasiswa. Sehingga Mahasiswa tidak perlu lagi datang ke DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk bermohon izin, melainkan melalui sistem informasi online yang produk pelayanannya bisa diunduh di rumah. Outputnya berupa Aplikasi/sistem NENI SI LINCA dalam pengurusan izin penelitian bagi mahasiswa di Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
17	WISATA COVID-19	Program Wisata Covid-19 merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sejumlah hotel untuk menerapkan isolasi mandiri. Hotel di Makassar yang telah bergabung dengan program Wisata Covid-19 ini akan menjadi tempat karantina untuk orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG), dan pasien positif Covid-19. Program Wisata Covid-19, difokuskan pada orang tanpa gejala (OTG) positif dan orang dalam pemantauan (ODP) yang pernah kontak dengan pasien positif. Mereka akan diinapkan di hotel dengan program khusus, misalnya: berjemur, berolahraga, dan ceramah agama. Inovasi ini selain diterapkan pada masa pandemi Covid-19 juga dapat diterapkan pada masa New Normal, dimana protokol kesehatan yang diberlakukan pada program ini sangat ketat sehingga wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan akan merasa aman jika ingin menginap di hotel.	Dinas Kesehatan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
18	Protokol Kesehatan Berbasis Teknologi Non Tunai di Pasar Tradisional di Sulawesi Selatan (BARUGA PASAR)	Berdasarkan standard protokol kesehatan dari Kemenkes yang ditindaklanjuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan anjuran New Normal terutama dari sisi higienitas dan jaga jarak di lingkungan pasar tradisional dengan penerapan sistem non tunai. Konsep ini mulai diterapkan menjelang pelaksanaan PSBB di Makassar. Proses transaksi non tunai dan order online melalui aplikasi Malltronik dan Gojek mendapat respon yang luar biasa dari pedagang dan masyarakat. Baruga pasar ini masih berlanjut hingga sekarang dan diharapkan dapat terus berkembang pada masa New Normal.	Dinas Perdagangan
19	PALLAWANA (PEMBATAS) : Inovasi Pelayanan Restoran/ Rumah Makan Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan	Konsep Pallawana menjadi salah satu bentuk inovasi yang dapat digunakan dalam tatanan normal baru, pengunjung tetap bisa menikmati Pallubasa yang nikmat dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan memperhatikan estetika. Tujuan inovasi “PALLAWANA” adalah : 1. Mewujudkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Desease 2019 dengan menerapkan standard pelayanan yang menjamin higienitas pada restoran/rumah makan 2. Memberikan rasa aman kepada konsumen yang mengunjungi restoran/rumah makan dengan berbasis kearifan lokal sebagai salah satu opsi jaga jarak	Dinas Perdagangan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
20	SULSEL DALAM GENGAMAN (Sulawesi Selatan in Our Hand” atau “South Sulawesi in Our Hand”) : New Normal Inovasi berbasis aplikasi dan barcode di destinasi wisata	Inovasi ini dirancang sebagai bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan mengimplementasikan standar proto-kol kesehatan dari Kementerian Kesehatan terkait dampak pandemi Covid-19 yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata menginterpretasikan anjuran New Normal terutama dari segi higienitas dan jaga jarak (social/ physical distancing) dengan penggunaan aplikasi dan barcode. Output berupa Penggunaan aplikasi dan barcode Sulawesi Selatan in Our Hand dalam mempermudah informasi bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Berdasarkan standard protokol kesehatan dari Kemenkes yang ditindaklanjuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan anjuran New Normal terutama dari sisi higienitas dan jaga jarak di lingkungan pasar tradisional dengan penerapan sistem non tunai. Konsep ini mulai diterapkan menjelang pelaksanaan PSBB di Makassar. Proses transaksi non tunai dan order online melalui aplikasi Malltronik dan Gojek mendapat respon yang luar biasa dari pedagang dan masyarakat. Baruga pasar ini masih berlanjut hingga sekarang dan diharapkan dapat terus berkembang pada masa New Normal.	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
21	Aplikasi E-ASPIRASI DPRD PROV. SULSEL	Sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD Prov. Sulsel dalam memberikan layanan dan respon secara cepat terhadap aspirasi yang masuk, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasinya tanpa harus ke kantor DPRD Prov. Sulsel terutama yang dari daerah, anggota DPRD Prov. Sulsel dapat dengan mudah menerima dan menjawab setiap aspirasi yang masuk dimanapun dan kapanpun selama ada internet.	Sekretariat DPRD
22	Sistem Informasi Kehutanan	Inovasi melakukan perubahan sistem informasi dari manual ke digital dengan tujuan untuk menyediakan data series dan informasi yang berkelanjutan. Inovasi bermanfaat untuk memudahkan memperoleh data dan informasi kehutanan. Outputnya berupa tampilan data digital dalam website.	Dinas Kehutanan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
23	Strategi Pengembangan Sistem Manajemen Surveilans Terpadu (SIMEDIS TRENDI)	Aplikasi Simedis Trendi dirancang sebagai media data dan informasi di bidang kesehatan yang dapat digunakan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, namun juga dimanfaatkan masyarakat luas. Pengguna website dapat mengakses dan mengunduh langsung publikasi data dan informasi, peraturan perundangan bidang kesehatan, dan perangkat lunak yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi kesehatan disajikan dalam bentuk produk publikasi dan ke depannya website akan juga menampilkan produk-produk informasi berupa grafik yang interaktif di Rumah Sakit Haji Makassar.	Dinas kesehatan
Tahun 2021			
NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
1	Sistem Informasi Gender dan Anak Online (SIGA ONLINE)	Sistem Informasi Gender dan Anak berbasis website dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi semua pihak dalam memperoleh data gender yang terpilah menurut jenis kelamin atau menurut kelompok umur, serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan pembangunan yang responsif gender dan anak. Inovasi ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan ketersediaan data terpilah gender dan anak di OPD provinsi. 2. Meningkatkan ketersediaan informasi yang dapat digunakan para pihak dalam implementasi kegiatan yang responsif gender dan anak. 3. Membuka akses data dan informasi tentang gender dan anak kepada para pihak yang membutuhkan. 4. Memudahkan akses bagi masyarakat memberikan masukan dan saran dalam pembangunan responsif gender dan anak. 5. Mempermudah OPD dalam menyusun Anggaran Responsif Gender dalam menentukan data pembuka wawasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
2	Gerei Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan (GESIT-19)	GESIT-19 diharapkan mampu mewujudkan suatu langkah strategis dan kreatif dalam memberikan solusi pelayanan di bidang perizinan yang cepat, murah, dan terjangkau kepada pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Adapun tujuan dari GESIT-19 adalah : 1. Mendekatkan pelayanan perizinan pada pusat kegiatan usaha perikanan; 2. Mempercepat pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan; 3. Mengedukasi pelaku usaha untuk taat pada peraturan; 4. Menghilangkan jasa percaloan serta memangkas birokrasi dalam pengurusan izin perikanan; 5. Mewujudkan proses perizinan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
3	Kajian Kolaborasi dalam Mewujudkan Kebijakan berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan	Kajian kolaborasi ini diharapkan menjadi salah satu jalan untuk pembaharuan informasi dan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan terkini serta menjadi acuan sebagai upaya menata peta jalan pengembangan Sutra Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2038. Kajian Kolaborasi dalam mewujudkan Kebijakan berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan bermanfaat untuk penguatan kelembagaan petani yang kini masih lemah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Kokon. Kajian Kolaborasi dalam mewujudkan kebijakan berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan ini juga bermanfaat untuk mengatasi rendahnya kualitas data sebagai acuan menyusun program sehingga memperbaiki metodologis dan manajerial Data Base. Kemudian inovasi ini juga bermanfaat mengatasi kesenjangan antara fakta lapangan dan Tata Kelola Sutra karena adanya pelatihan sensitivitas gender dan inklusi sosial (termasuk prinsip Free, Prior, Informed Consent [FPIC]), yang terinternaliasi dalam mandat institusi para pihak.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
4	Strategi Pengembangan Manajemen Sistem Surveilans Terpadu Di RSUD Haji Makassar (SIMEDIS TRENDI)	Aplikasi Simedis Trendi dirancang sebagai media data dan informasi di bidang kesehatan yang dapat digunakan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, namun juga dimanfaatkan masyarakat luas. Pengguna website dapat mengakses dan mengunduh langsung publikasi data dan informasi, peraturan perundangan bidang kesehatan, dan perangkat lunak yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi kesehatan disajikan dalam bentuk produk publikasi dan ke depannya website akan juga menampilkan produk-produk informasi berupa grafik yang interaktif di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
5	Gerakan Mencerdaskan Anak Bangsa dari Desa (GeMAs De)	Inovasi Gerakan Mencerdaskan Anak Bangsa Dari Desa (GeMAs De) hadir untuk memecahkan masalah terkait rendahnya minat baca masyarakat terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor masih kurangnya jumlah perpustakaan termasuk perpustakaan desa, masih minimnya jumlah koleksi bahan bacaan dan akses internet, serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia tenaga pengelola perpustakaan. Inovasi GeMAs De hadir dengan strategi memberikan bantuan stimulant berupa buku, rak buku dan komputer kepada perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan lorong, perpustakaan komunitas dan taman baca masyarakat .	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
6	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Forum Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dibentuknya forum LLAJ adalah sebagai wadah untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalulintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi,serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.	Dinas Perhubungan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
7	Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (e-TLHP)	e-TLHP merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk automisasi, dokumentasi dan efisiensi kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Aplikasi TLHP dirancang bangun dengan metode pembangunan aplikasi berbasis website yang memudahkan inputter untuk memasukkan data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara online antara aparat pengawas fungsional dengan auditee. Dalam aplikasi dimaksud, pihak inputter dapat memasukkan narasi tindak lanjut, dokumen/data dukung, dan tanggapan dari pihak audit terhadap hasil tindak lanjut. Aplikasi e-TLHP berjalan dengan basis sebuah website maka aplikasi mudah untuk diakses tanpa perlu instalasi di platform yang digunakan.	Inspektorat Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
8	Sistem Analisis Data dan Laporan Bencana (Si-ANDALAN)	Si-ANDALAN adalah media informasi mengenai potensi bencana alam di wilayah Sulawesi Selatan serta analisa mengenai terjadinya gejala alam tertentu. Mencari lokasi berdasarkan karakteristik yang diinginkan dengan koneksi internet, mengakses informasi berdasarkan potensi terjadinya gempa, longsor, puting beliung dan sebagainya. Pengaplikasian Si-ANDALAN ini memiliki sisi inovasi yakni penyajian analisis data dan fitur Lapor kejadian bencana. Pada penyajian analisis data memuat data informasi bencana beberapa tahun terakhir, kemudian klasifikasi jenis bencana yang sering terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kecenderungan serta persentase kejadian bencana dan dokumen kebencanaan lainnya seperti Peta Rawan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Kontinjensi (RENKON).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
9	Sistem Informasi Pertiwi Berbasis Komputerisasi dan Telekomunikasi Universal (SIPAKATAU)	RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Prov. Sulsel membuat sebuah aplikasi smartphone berbasis android yaitu Pertiwi SIPAKATAU (Sistem Informasi Pertiwi Bebasis Komputerisasi dan Telekomunikasi Universal) yang akan menjadi solusi sekaligus peningkatan fasilitas di tempat- tempat layanan kesehatan dengan menjadikan Smartphone dan penunjang teknologi lainnya untuk mengatur sistem antrian. Fasilitas yang dimaksud yaitu dalam pengambilan nomor antrian. Seiring dengan kemajuan teknologi terutama dalam bidang komputerisasi, maka diperlukan suatu teknologi untuk memudahkan pasien dalam melakukan antrian. Pada inovasi ini dirancang sebuah aplikasi antrian secara online yaitu pasien yang melakukan antrian menggunakan aplikasi berbasis Android. Hasil keluaran dari aplikasi sistem antrian ini adalah membuat proses antrian yang dapat dilakukan secara online melalui smartphone android serta disediakan juga fitur notifikasi sehingga ketika nomor antrian yang terdekat dipanggil maka pasien mendapatkan reminder berupa notifikasi pada android.	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
10	Sistem Informasi Logistik (SIMLOG) SULSEL	Aplikasi Simlog (Sistem Informasi Logistik) merupakan inovasi dalam bidang logistik bantuan sosial melalui aplikasi online berbasis website yang berfungsi untuk memantau penyaluran bantuan bencana ke daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya fungsi Controlling untuk mengatur alur distribusi bantuan (Supply Treasury Logistic) terkait ketersediaan stok bantuan dan traffic serta timing bantuan yang masuk dan keluar dari Dinsos Pemprov Sulsel ke 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.	Dinas Sosial

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
11	Layanan Pendampingan Pasien TB (LAPAS TB)	RSUD Labuang Baji Makassar melakukan Inovasi untuk memberdayakan mantan pasien sebagai pendamping dengan membentuk Lapas TB (Layanan Pendampingan Pasien TB). Inovasi ini mereplikasi dari RSUD Dr Soetomo Surabaya dan RSUP Persahabatan Jakarta yang dimodifikasi dengan melibatkan mantan pasien (yang sudah sembuh) sebagai fasilitator Lapas TB, selain pelibatan mereka RSUD Labuang Baji bekerjasama dengan organisasi sosial lainnya dalam hal ini TB Care Aisyiah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian TB. Bahkan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 02 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, HIV. Adapun tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan kepatuhan pasien berobat secara rutin dan berkesinambungan di RSUD Labuang Baji.	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
12	Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahraga (SIPOR)	Aplikasi sistem informasi Pemuda dan Olahraga ini merupakan suatu aplikasi yang mempermudah user dalam mengelola data kepemudaan dan olahraga yang ada pada perangkat daerahnya. Kini dengan adanya aplikasi sistem informasi kepemudaan dan olahraga, data primer yang dihasilkan oleh Dispora Kab/Kota, kemudian dikumpulkan oleh operator pengelola data melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian diinput pada sistem aplikasi https://sipor.sulselprov.go.id/ Sebelum bertugas para operator mendapatkan pelatihan bimbingan teknis dari Dispora Sulsel, langkah ini lebih efektif dan efisien, memangkas biaya perjalanan dan juga waktu pengumpulan data.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
13	E-SIPAKATAU (Sistem Pelayanan Kalibrasi, Sertifikasi dan Pengujian Mutu)	Terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh UPTD BPSMB, dalam melaksanakan proses sertifikasi produk adalah dibuatnya suatu sistem yang berbasis elektronik yang dinamakan e-Sipakatau (Sistem Pelayanan Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi Mutu). Inovasi ini memberikan beberapa kemudahan diantaranya sebagai berikut : - Tersedianya data perusahaan/pengguna jasa UPTD BSPM - Tersedianya aplikasi pelayanan sertifikasi berbasis web dan mobile APP - Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan aplikasi kepada pengguna jasa/perusahaan. - Termanfaatkannya aplikasi oleh pengguna jasa/perusahaan - Terciptanya alur pelayanan secara cepat dan tepat melalui aplikasi e- sipakatau	Dinas Perdagangan Provinsi

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
14	Sapi Bali Unggul dan Lestari dari Sulawesi Selatan (SI BALUNG LESTARI)	Inovasi Si Balung Lestari dari SulSel (Sapi Bali Unggul dan Lestari dari Sulawesi Selatan) bertujuan untuk mempertahankan eksistensi Sapi Bali di Sulawesi Selatan melalui kawin silang Induk sapi Bali dengan straw Sapi Bantengcross. Sapi Banteng cross merupakan turunan banteng dengan sapi Bali Jawa Timur, spermanya dikoleksi oleh Balai Inseminasi Buatan Singosari Provinsi Jawa Timur. Inovasi Si Balung Lestari dari SulSel (Sapi Bali Unggul dan Lestari dari Sulawesi Selatan) dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran terhadap Performa Sapi Bali yang semakin kerdil sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat peternak untuk memelihara sapi bali dan cenderung beralih kepada sapi sapi eksotik seperti Brahman, Limousin dan Simental. Apabila kondisi ini terus berlanjut akan menyebabkan populasi sapi bali di Sulawesi Selatan berkurang bahkan akan mengalami kepunahan.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
15	Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SIBANG SDM)	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan telah merancang model pembelajaran e-learning. Manajemen pembelajaran e-learning dengan menggunakan Learning Management System (LMS) pada kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Learning Management System mampu memungkinkan untuk merencanakan pelatihan dan membuat laporan dengan mudah, cepat, dan lebih praktis dibandingkan sistem pembelajaran konvensional. Untuk korporasi, sistem seperti ini digunakan untuk memonev staf, dan menyimpan catatan penilaian dan pelatihan. Learning Management System memudahkan dan membantu pembelajaran berjalan dengan lancar. LMS yang baik juga akan memiliki sistem pelaporan sehingga dapat mengakses informasi yang sulit dikumpulkan sendiri.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
16	Bantu Pasien Jiwa Di Sekitar Kita (BAJITTA)	SIRI' NA PACCE (Sistem pemandiRlan dan pembiNAan PAda paSIEN ODGJ) melalui Rehabilitasi Psikososial. Istilah SIRI' NA PACCE adalah nilai-nilai dalam budaya Makassar, yang dalam hal ini juga memberikan arti bahwa RSKD Dadi memberikan pelayanan yang tulus bagi penderita ODGJ untuk meningkatkan harga diri mereka di masyarakat. Dirancang untuk terwujudnya rehabilitasi psikososial melalui pelayanan terapi okupasi bagi penderita ODGJ yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan, dan terselenggaranya pelayanan yang paripurna bagi penderita ODGJ yang dirawat di RSKD Prov. Sulawesi Selatan.	Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
17	Young Entrepreneur School SULSEL (YESS)	YESS Sulsel adalah pendidikan non formal yang fokus pada pengembangan jiwa entrepreneurship, menciptakan calon pengusaha-pengusaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi orang lain (Job Creator). Konsep pembelajaran YESS dikemas dalam sebuah program pelatihan rutin oleh para mentor, trainer dan coach bisnis ditunjang dengan pendampingan secara instensif. Program YESS Sulsel berdurasi 3 bulan dan dibagi menjadi 3 tahap : 1. Calon Entrepreneur : berisi materi entrepreneur mindset, simulasi dan praktik memulai usaha (8 kali pertemuan). 2. Entrepreneur Pemula : berisi materi, simulasi dan praktik mengelola usaha (8 Kali pertemuan) Entrepreneur Siap Naik Kelas : berisi materi, simulasi dan praktik mengembangkan usaha/siap naik kelas (8 Kali pertemuan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	NENI SI LINCA (New Normal Innovation Sistem informasu Penelitian Online Campus)	Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan : NENI SI LINCA (New Nor mal Innovation Sistem Informasi Penelitian Online Campus) dirancang untuk memproses izin penelitian mahasiswa dan peneliti lainnya secara online. Inovasi ini memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui komputer, laptop ataupun handphone, sistem ini lincah seperti namanya karena dapat menerbitkan izin penelitian kapanpun dan dimanapun	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		dengan waktu kurang dari 5 menit. NENI SI LINCA hadir dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efisien dan efektif. Inovasi ini dirancang untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan. Inovasi ini juga selaras dengan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter. Eksistensi NENI SI LINCA menyederhanakan sistem pelayanan perizinan, seperti penyederhanaan regulasi, SOP yang simpel, dan transparan. NENI SI LINCA merupakan inovasi asli dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan pertama kali dikembangkan sebagai inovasi yang terintegrasi dengan 148 perguruan tinggi (PTN, PTS, dan PTAI) dan kelompok masyarakat peneliti lainnya di Sulawesi Selatan. Inovasi ini dapat juga dikatakan yang pertama di Indonesia. Kolaborasi tersebut menghasilkan 5 Kesepakatan Bersama dan 94 Perjanjian Kerjasama terkait penelitian dan pengembangan. Hasil Inovasi Evaluasi : NENI SI LINCA dilakukan dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pengguna layanan Izin Peneilitian. Nilai SKM Tahun 2020 bernilai 80,78 dengan kategori Baik.	

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		Hasil dari evaluasi tersebut berdampak sangat baik: Bagi mahasiswa, izin peneiitian bukan lagi menjadi hambatan dalam peneiitian karena diperoleh dengan mudah, murah, cepat dan efisien Bagi masyarakat, tidak lagi khawatir akan tertular covid-19 dan munculnya cluster baru Bagi Pemerintahan, inovasi ini sangat efektif menekan biaya operasional khususnya pada penggunaan ATK yang selama ini banyak dibutuhkan pada layanan konvensional.	
19	GESIT 19 (Gerai Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan)	Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada sektor perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangan penerbitannya pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kendala khususnya bagi pelaku usaha pada sektor perikanan dan kelautan yang harus menempuh jarak yang jauh ke ibukota provinsi untuk mengurus perizinan dan non perizinan tentunya sangat tidak efektif dan effesien baik secara finansial dan waktu. Dengan hadirnya inovasi Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan) ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sinjai pada 19 Desember 2018 sebagai perwujudan membangun kolaborasi dan kemitraan dalam mendekatkan pelayanan pada kawasan perikanan kabupaten sinjai sebagai pilot project dan pada tahun 2020 dilakukan replikasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		kebijakan pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebagai pengembangan gerai secara terintegrasi dengan sektor ESDM dan peternakan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama. Dengan hadirnya Gesit-19 sebagai implementasi dalam mewujudkan pemerintah yang ramah investasi dan bersih melayani dan juga sebagai bentuk sinergitas dan kemitraan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menjawab tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.	
20	Pensil Bagi Ayah (Pengembangan Sinergitas Layanan Perlindungan Khusus bagi Anak Yang Berhadapan Hukum)	Sinergitas Layanan bagi Anak yang Berhadapan Hukum, merupakan suatu gerakan yang diperuntukkan kepada Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Masalah terbesar yang dihadapi Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah ketika keluar sebagian besar masyarakat tidak menerima di lingkungannya, sehingga tidak jarang anak yang telah dibebaskan kembali lagi ke perbuatannya semula, karena tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Disamping hal tersebut diatas mereka sudah tidak melanjutkan pendidikan, bahkan tidak jarang dari mereka tidak mempunyai akte	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		kelahiran. Sehingga Dinas P3A Dadluk melaksanakan program perlindungan khusus anak dimana ada 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus (UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 59). Di samping hal tersebut diatas, Pengembangan Sinergitas Layanan Bagi Anak Berhadapan Hukum (PENSIL BAGI AYAH) ini dikembangkan mengingat semua anak adalah anak kita, generasi Penerus bangsa yang mempunyai hak yang sama dengan anak pada umumnya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak anak yaitu : 1. Non Diskriminasi 2. Kepentingan Terbaik Anak 3. Hak Hidup, tumbuh dan berkembang 4. Partisipasi Anak	
21	Klinik Terpadu Desa “JUARA” (Jejaring Usaha Untuk Sejahtera)	Kegiatan utama berbasis desa yang mencakup : 1. Klinik berbasis terpadu 2. Klinik Pemuda 3. Klinik Literasi 4. Klinik Parenting Klinik Terpadu Desa “Juara” bertujuan untuk : 1. Membantu mengatasi permasalahan bisnis di desa (perorangan/bumdes/koperasi) melalui pelayanan, pendampingan dan intermediasi 2. Meningkatkan semangat kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		desa 3. Meningkatkan taraf pengetahuan masyarakat melalui literasi dasar (literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan). 4. Meningkatkan kualitas ibu rumah tangga dan perempuan dalam parenting atau ilmu pengasuhan anak sebagai upaya menyiapkan guru yang hebat dalam rumah tangga	
22	KEDAI SAMSAT	Berbagai upaya dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan menuntut kebutuhan Dana Pembangunan yang terus bertambah setiap tahun. Untuk itu, upaya Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan. Pendapatan Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Untuk itu salah satu upaya untuk melakukan terobosan inovasi pelayanan publik, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yaitu “SAMSAT CARE” dalam Wilayah Samsat Makassar dengan modifikasi dari	UPT Samsat Makassar Wilayah I, BAPENDA Sulsel

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		pelayanan publik yang telah ada.	
23	Model Pengembangan Kompetensi berbasis Program strategis melalui Learning Advisor Menuju ASN CorpU Prov. Sulsel.	Tidak ada uraian di website Inovasi OPD – KC JIPP SULSEL (sulselprov.go.id)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Knowledge Management Repository Inovasi Pelayanan Publik JIPP Sulsel	Tidak ada uraian di website Inovasi OPD – KC JIPP SULSEL (sulselprov.go.id)	Biro Organisasi

Sumber: Profil Inovasi Daerah berdasarkan INdeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2020, 2021

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi ekonomi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang positif sebesar 5,09 % (c to c) pada tahun 2022, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2021 sebelumnya yang mencapai 4,64 % (c to c). Namun demikian dengan makin meredanya pandemi Covid-19, dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara, telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (KIL), kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, peningkatan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis dana lainnya.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,23 – 6,71 persen; Tingkat Kemiskinan 8,31 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,24 persen; Gini Rasio 0,361; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 70,70 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2024, diarahkan pada ***“Peningkatan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Inklusif”***, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (tata kelola), Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (infrastruktur), Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (pengembangan wilayah dan hilirisasi), Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (Sosial Ekonomi), Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (Lingkungan Hidup), Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

3.1.1 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relative stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2023. Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2024, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjot. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2024. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif diwilayah Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor –sebagai komoditas nir nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Sulawesi selatan terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan

meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Sulawesi selatan menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industry maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industry berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemic menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat renewable lebih muda untuk dapat sustainable dan environmental friendly serta dapat mendukung kampanye global green economy,

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2023 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 antara lain; komoditas ekspor Sulawesi Selatan tidak terdampak perang dagang Amerika dan Tiongkok, peningkatan konsumsi rumah tangga, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber, perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa. Sementara itu, tantangan terakhir yaitu pandemi seperti Covid-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan. Selain keempat tantangan besar tersebut, perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi higher for longer,”

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021,

Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Suasana geopolitik yang berubah
2. Terjadinya perang Rusia-Ukraina
3. Pesatnya perkembangan teknologi digital
4. Perubahan iklim
5. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda
6. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto
7. Tuntutan ekonomi keuangan hijau
8. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antar provinsi maupun antar subsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan *learning loss* dan *earnings penalty*. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN 2020– 2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekali pun terdapat *base effect*). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan *stunting* juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif, Pertumbuhan ekspor barang disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diperkirakan meningkat; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2024, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 5,31 % (C to C) . Kemudian pada tahun 2023 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,3 –5,9 % sedangkan tahun 2024 sebesar 5,3 –5,7 %.

Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat Upper-Middle Income Countries. Sehingga kedepan pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitas investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem Online Single Submission terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.

Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin Bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.

Pemerintahpun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2024, meski tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Daerah

Ekonomi Sulsel diperkirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diperkirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2023 diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diperkirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2022.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2023 diperkirakan kembali ke rentang sasaran $3,0 \pm 1,0\%$ (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diperkirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2023.

3.1.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang pertumbuhan ekonominya masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2024 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23– 6,71 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30-5,70 persen.

Sementara untuk ditahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,04 – 6,52 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,9 persen.

Grafik III.1.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional,
Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024



Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

Jika dilihat Dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,10 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,64 persen; konstruksi sebesar 14,00 persen dan industri pengolahan sebesar 12,90 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,64 persen.

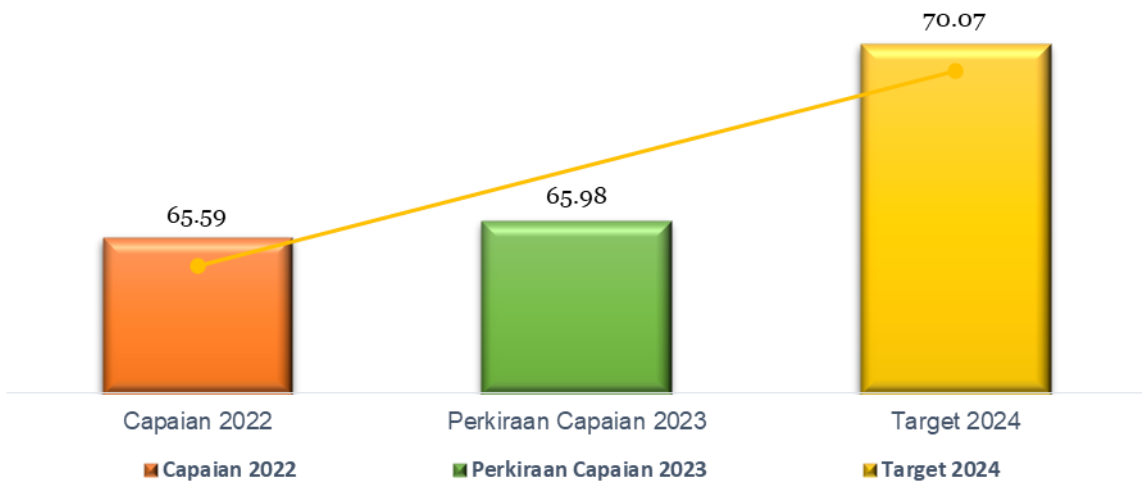
Tabel III. 1
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,71	6,38	2,29	21,72	22,55	22,10
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,54	-0,59	0,32	4,67	4,75	5,10
C.	Industri Pengolahan	-4,57	3,02	9,86	12,76	12,49	12,90
D.	Pengadaan Listrik, Gas	2,59	10,87	14,69	0,06	0,07	0,07
E.	Pengadaan Air	6,61	4,07	6,48	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	1,56	4,14	1,59	14,37	14,41	14,00
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,07	6,50	6,55	14,48	14,58	14,64
H.	Transportasi dan Pergudangan	-21,46	5,21	22,33	3,07	3,08	3,99
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-13,68	2,96	17,74	1,25	1,20	1,32
J.	Informasi dan Komunikasi	10,84	6,39	5,25	5,62	5,56	5,35
K.	Jasa Keuangan	2,43	1,14	1,15	3,75	3,63	3,58
L.	Real Estate	3,79	2,58	3,86	3,81	3,62	3,49
M, N.	Jasa Perusahaan	-10,05	6,23	14,16	0,43	0,43	0,46
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	-0,04	2,92	1,99	4,71	4,53	4,19
P.	Jasa Pendidikan	5,73	3,67	2,83	5,60	5,36	5,06
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,06	7,77	8,64	2,31	2,35	2,32
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	-12,02	7,56	9,56	1,29	1,30	1,33
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-0,71	4,64	5,09	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Sedangkan untuk PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 65,59 juta. Dan pada tahun 2023 ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 65,98 juta, kemudian untuk tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 70,07 juta.

Grafik III.2.
PDRB Perkapita Sulawesi Selatan,
Capaian 2022, Perkiraan 2023 dan Target 2024



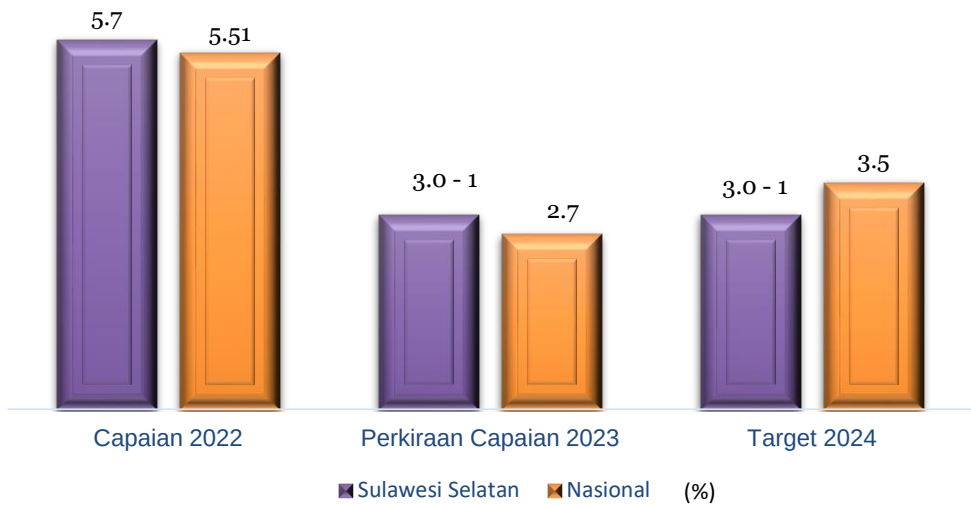
Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

3.1.1.4.2 Inflasi

Inflasi gabungan 5 Kota IHK di Sulawesi Selatan yang sempat tercatat sebesar 2,40% (yoy) di 2021, terus meningkat dan mencapai level tertingginya di 5,77% (yoy) pada tahun 2022. Tren kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas akibat peningkatan tensi geopolitik dunia dan ketidakpastian iklim yang terjadi secara global. Menyikapi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi berbagai program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Inflasi utamanya disumbang oleh kelompok transportasi, khususnya pada komoditas bensin dan angkutan udara, sebagai dampak dari kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan mobilitas yang meningkat pada momen Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama pada komoditas telur ayam ras, beras, dan rokok kretek filter. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2023 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2024 sebesar 3,0-1,0 persen.

Grafik III.3.
Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024



Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

3.1.1.4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 37,43 persen poin pada Tahun 2021 atau setara dengan 1,56 juta orang.

Melihat dari kondisi saat ini, , Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2022 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,16-6,95 persen atau masih lebih tinggi jika dibandingkan dari capaian tahun 2021 yang mencapai 5,72 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 6,49 persen. Sementara untuk tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah sulawesi selatan sebesar 5,69 persen atau lebih tinggi dari target Nasional yaitu 5,3-6,00 persen.

Grafik III.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024



Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

3.1.1.4.4 Kemiskinan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2022 berjumlah 777,44 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 7,54 ribu orang dibanding tahun 2021 yang berjumlah 784,98 ribu orang . Penduduk miskin di daerah perkotaan secara tahunan mengalami peningkatan, peningkatan ini terjadi sebab adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang mengakibatkan beberapa usaha tutup dan berujung sumber pendapatan masyarakat yang semakin menurun.

Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 di prediksi akan mencapai 7,45 persen. Namun pada tahun 2024, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang belum pulih secara merata serta makin meningkatnya jumlah penduduk miskin dan perkotaan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,31 persen atau diatas target Nasional yaitu 6.5-7.5 persen.

Grafik III.5.
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024



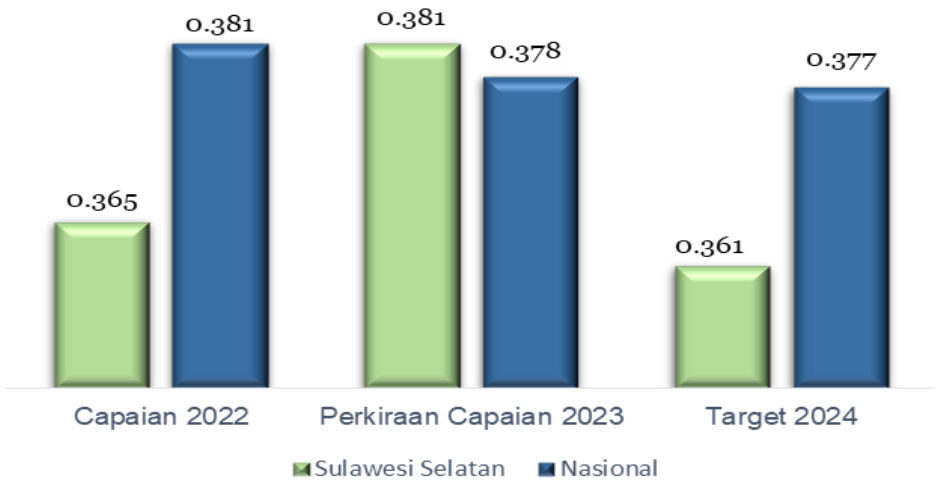
Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

3.1.1.4.5 Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2022 mencapai sebesar 0,365, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2024, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,361, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,374–0,377 atau diatas angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan penurunannya dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024. Fluktuasi Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Grafik III.6.
Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional
Capaian 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024



Sumber : BPS, RKPD 2023 dan Rancangan RKP 2024 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2024 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna

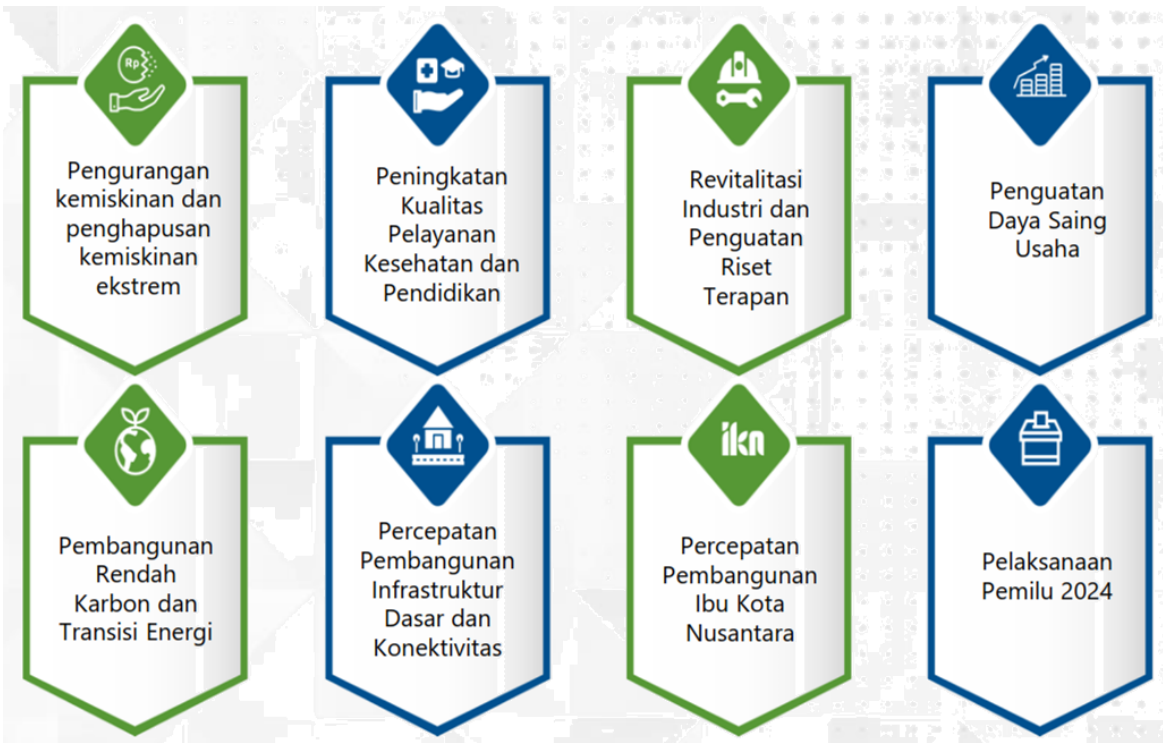
menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Gambar III.1.
Kerangka Pikir dan Tema RKP Tahun 2024



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Gambar III.2.
Arah Kebijakan RKP Tahun 2024

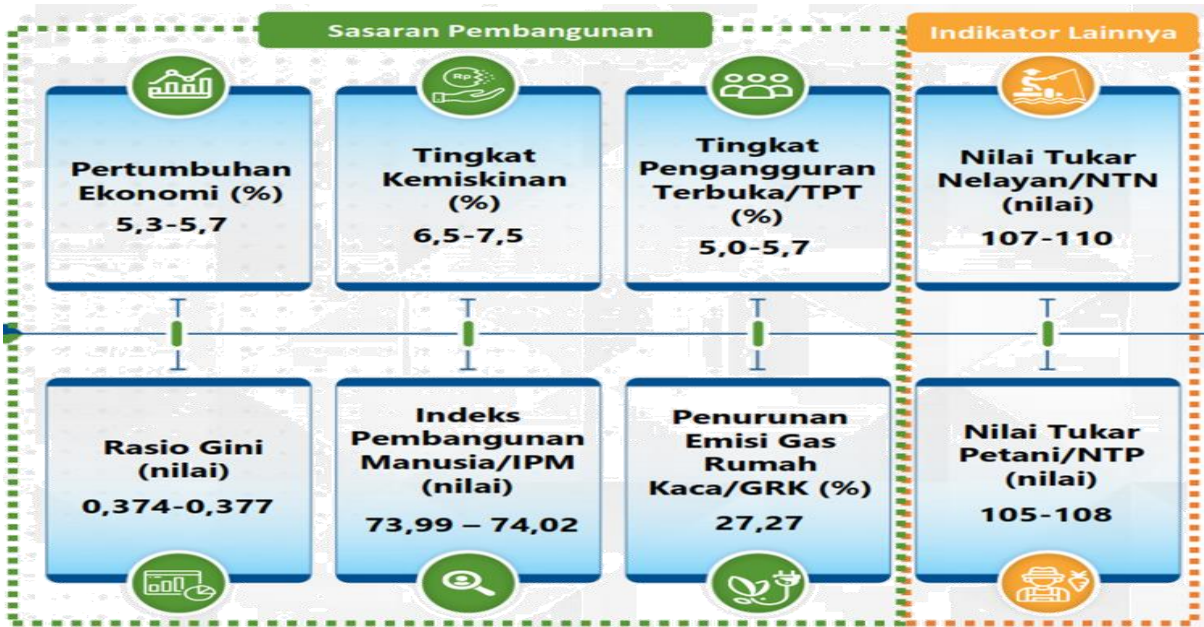


Sumber : Rancangan awal RKP tahun 2024

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional, yaitu sebagai berikut :

Gambar III.3.

Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber: Rancangan awal RKP tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2024, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
5. Menurunkan kemiskinan;
6. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
8. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
11. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam

RPD 2024-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2024, rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum serentak dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Agenda negara berskala nasional tersebut akan memberikan warna tersendiri dalam perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini tentunya terdapat perubahan fundamental dalam pola pemungutan Pendapatan Daerah yang juga akan berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Daerah.

Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) maka peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah juga diusulkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan maupun perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Baru berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD akan lebih diarahkan kepada ;

1. Pemungutan Pajak Alat Berat dan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat;
2. Penghapusan BBNKB II dan Pajak Atas Kendaraan Listrik;
3. Penghapusan Ret. Terminal, Ret. Izin Usaha Kapal Perikanan, Ret. Izin Trayek dan Ret. Pelayanan Pendidikan;

4. MoU dan Perjanjian Kerja Sama penagihan tunggakan PKB dan BBNKB dengan Pemda Kab/Kota se-Sulsel dalam penerapan Opsen PKB dan BBNKB Tahun 2025;
5. Persiapan pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023; dan
6. Penyaluran Bagi Hasil paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya.

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat kebijakan pendapatan daerah dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2024 arah kebijakan pendapatan daerah akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah dalam bentuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah seperti ;

- a. Pemenuhan target realisasi Pajak dan Retribusi sebesar 90% Non-tunai (Kepgub No.835/III/Tahun 2022 tentang Peta Jalan Implementasi ETPD Prov. Sulsel 2022-2025);
- b. Penempatan Kasir Bank RKUD di seluruh Kasir PAD;
- c. Peningkatan kerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Digital pada semua OPD Pengelola PAD (e-commerce, e-wallet/tapcash);
- d. Penyedia Plank-elektronik untuk pengelolaan Ret. Pelayanan Kepelabuhan, tempat rekreasi dan Olahraga, serta pengelolaan tempat khusus parkir; dan
- e. Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis elektronik.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

- a. Penguatan Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik Kab/Kota se-Sulsel;
- b. Peningkatan Efektivitas Kerjasama Bapenda dengan Reskrim Polda Sulsel dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah; dan
- c. Peningkatan kegiatan Penertiban/pemeriksaan PKB secara door to door dan di jalan raya bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulsel dan Jasaraharja.

Kerjasama antar instansi terkait juga terus dilakukan bersama Bank Indonesia dengan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), melakukan kerjasama dengan Kanwil Pajak dan Kanwil Bea Cukai, host to host dengan Kantor perizinan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam membeli kendaraan baru sesuai alamat domisili di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penerimaan Pajak Daerah.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) akan tetap di koordinasikan bersama seluruh stakeholder dalam

upaya pendataan terhadap penjualan antara Wajib Pungut (WAPU) dan pengguna BBM.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui optimalisasi peningkatan SDM (Diklat PPNS, Juru Sita dan diklat perhitungan nilai asset. Dengan didukung peninjauan regulasi dan peninjauan tarif retribusi. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan diusahakan untuk menambah porsi saham kepemilikan sehingga dapat meningkatkan deviden ke Pemerintah Provinsi, dan selanjutnya pada kelompok lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi kebijakan untuk mendorong penggunaan jasa giro pada kas daerah dengan tujuan mencapai efisiensi, pengurangan risiko, peningkatan transparansi, dan optimalisasi pengelolaan keuangan. Penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terkait kebijakan ini, termasuk mempertimbangkan kebijakan perbankan, kerjasama dengan lembaga keuangan, dan kebutuhan infrastruktur pendukung seperti perangkat lunak keuangan yang memadai. Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dalam meningkatkan efektivitas BLUD dalam rangka peningkatan PAD dan kemandirian pembiayaan BLUD seperti Rumah Sakit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diklat dan Pelabuhan. kebijakan optimalisasi pendapatan akan ditujukan pada keberlangsungan upaya pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi menjadi PAD baru.

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap memperhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah sesuai dengan penetapan Undang-undang HKPD di Tahun 2024 sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer. Adapun untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh berkurangnya penyaluran anggaran dari negara donor dan lembaga donor, namun demikian optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat tetap mendukung pembangunan daerah.

3.2.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2021-2024

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2021-2022, target APBD Pokok Tahun 2023 serta proyeksi pendapatan tahun 2024 dan 2025 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

Uraian	Realisasi		Target 2023	Tahun Rencana 2024 *)	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2025 **)
	2021	2022			
Pendapatan Asli Daerah	4.469.113.381.188,42	5.075.689.254.356,00	5,801,319,086,208.00	6,137,107,642,086.00	6,854,927,042,262.27
Pajak Daerah	3.846.736.206.985,26	4.408.955.704.325,00	4,974,162,369,090.00	5,392,761,494,090.00	5,972,285,445,307.08
Retribusi Daerah	38.393.202.133,68	42.907.998.400,00	49,131,817,751.00	48,409,105,600.00	55.353.734.091,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	115.551.932.611.00	135.785.593.949,00	159,362,075,963.00	137,963,752,246.00	168.760.544.726,28
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	468.432.039.458,48	488.039.957.682,00	618,662,823,404.00	557,973,290,150.00	658,527,318,137.19
Pendapatan Transfer	5.426.146.349.398,00	4.134.714.575.000,00	4,322,253,099,000.00	4,322,109,630,000.00	4.494.667.435.720,80
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	342.218.564.517,00	274.247.055.000,00	259,896,213,000.00	259,896,213,000.00	270.396.020.005,20
Dana Alokasi Umum	2.339.135.873.000,00	2.340.040.525.000,00	2,525,244,049,000.00	2,525,244,049,000.00	2.627.263.908.579,60
Dana Alokasi Khusus	2.718.050.528.881,00	1.520.426.995.000,00	1,482,541,340,000.00	1,482,397,871,000.00	1.542.436.010.136,00
Dana Insentif Daerah	-	-	54,571,497,000.00	54.571.497.000,00	54.571.497.000,00
Lain - lain Pendapatan yang Sah	114.143.744.972,00	144.554.199.861,00	9,509,890,000.0	7,421,640,000.00	7.920.532.002,93
Hibah	114.143.744.972,00	144.554.199.861,00	9,509,890,000.00	7,421,640,000.00	7.920.532.002,93
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	
Jumlah	10.009.403.475.558,42	9.354.958.029.217,00	10,133,082,075,208.00	10.466.638.912.086,00	11,357,515,009,986.00

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2023
*) Proyeksi Tahun 2024
**) Proyeksi RPD Tahun 2025

Selama kurun waktu tahun 2021-2025, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp10,46 triliun, atau terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 5,4 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.10,13 triliun lebih. Peningkatan terjadi pada komponen Pendapatan Transfer disebabkan penyaluran Dana BOSKabupaten/Kota tidak lagi melalui APBD Provinsi melainkan langsung ke APBD Kabupaten/Kota. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama kurun waktu 2021-2025 dapat diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata-rata sebesar 50,57%, pendapatan transfer sebesar 48,40% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,03%. Adapun besaran kontribusi masing-masing sumber pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel III. 3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023*)	2024*)	2025**)
I	Pendapatan Asli Daerah	41,54	44,66	54,25	55,53	57,43
A	Pajak daerah	35,90	85,05	84,78	85,88	85,72
B	Retribusi daerah	0,39	0,85	1,06	0,84	0,82
C	Hasil pengel. Kekada yg	1,23	2,58	2,76	2,64	2,57
D	Lain - lain PAD yang sah	4,02	10,51	11,40	10,64	10,89
II	Pendapatan Transfer	57,66	54,19	44,40	43,55	41,65
A	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	2,91	6,31	5,73	5,70	5,51
	- Bagi Hasil Pajak	74,97	78,78	80,12	0	0
	- Bagi Hasil SDA	91,26	21,22	19,88	0	0
B	Dana Alokasi Umum	25,09	43,13	57,14	56,80	56,89
C	Dana Alokasi Khusus	29,61	50,11	37,13	36,91	37,00
D	Dana Insentif Daerah	100	0,45	0	0,59	0,60
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,80	1,15	1,35	0,92	0,92
A	Hibah	0,80	100	100	100	100
B	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2023
*) Proyeksi Tahun 2024 dalam RPD Prov. SulselTahun 2024-2026
**) Proyeksi Tahun 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut

terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenklatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk tahun 2024 Pemerintah Sulawesi Selatan merencanakan memberikan subsidi penerbangan kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan yang sangat drastis beberapa waktu belakangan ini akibat dampak pandemic covid 19.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban anggaran untuk keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4 Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2023 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;

- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021- 2025
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

NO	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	PROYEKSI 2024 *)	PROYEKSI 2025 **)
1	BELANJA DAERAH	10.747.487.403.131	9,406,862,731,245	9,995,582,075,208	10,316,638,912,086	11,192,515,009,986.00
1.1	BELANJA OPERASI	7.380.766.399.205	5,659,091,736,128	5,951,050,828,076	6.286.781.616.470	5,705,310,456,651.80
1.1.1	Belanja Pegawai	3.215.721.446.282	3,114,232,139,368	3,242,569,954,051	3.362.873.474.946	3.362.873.474.946
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.496.138.742.834	2,235,536,073,905	2,383,376,553,331	2.124.468.940.724	1,942,947,978,804.20
1.1.3	Belanja Bunga	15.279.131.388	2,481,726,343	-	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	10,000,000,000	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
1.1.5	Belanja Hibah	1.554.279.504.080	303,751,796,512	312,474,320,694	776.989.200.800	90,737,868,800.00
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.731.000.000	6,240,225,000.	2,630,000,000	2.450.000.000	4,280,000,000.00
1.2	BELANJA MODAL	1.624.168.814.930	1,627,018,355,261	1,689,637,708,972	1.838.230.183.859	2,579,569,436,205.20
1.2.1	Belanja Modal	1.624.168.814.930	1,627,018,355,261	1,689,637,708,972	1.838.230.183.859	2,579,569,436,205.20
1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	143.734.933.112	50,000,000,000	61,297,248,214	32.000.000.000	40,000,000,000.00
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	143.734.933.112	50,000,000,000	61,297,248,214	32.000.000.000	40,000,000,000.00
1.4	BELANJA TRANSFER	1.696.433.830.505	2,070,752,639,856	2,293,596,289,946	2.159.627.111.757	2,867,635,117,129.00
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.434.928.871.615	1,625,075,631,356	1,775,932,742,946	2.129.627.111.757	2,600,171,570,129.00
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	261.504.958.890	445,677,008,500	517,663,547,000	30.000.000.000	267,463,547,000.00

Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

*) Proyeksi Tahun 2024

**) Proyeksi RPD Tahun 2025

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp. 10,316,638,912,086** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 6.286.781.616.470** Belanja Modal sebesar **Rp. 1.838.230.183.859** Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 32.000.000.000** serta Belanja Transfer sebesar **Rp. 2.159.627.111.757** Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal perhitungan pendapatan dan belanja diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2021-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

- 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2024, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

- 1. Pembayaran pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang menjadi kewajiban untuk pembayaran cicilan pokoknya setiap tahun.
- 2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT.Bank Sulselbar setiap tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan untuk tahun 2024 penyertaan modal tersebut direncanakan.
- 3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan ditahun 2024 penyertaan modal kepada BUMD (Perseroda) direncanakan, .

Selengkapnya realisasi, target dan proyeksi pembiayaan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 5
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021– 2025

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi APBD 2021	Target Realisasi APBD 2022	Target APBD 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
1.	Penerimaan Pembiayaan	388.592.185.153	219,428,919,963		-	-
1.1.	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	388.592.185.153	219,428,919,963		-	-
1.2.	Pencairan dana cadangan	-	-		-	-
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-		-	-
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	-
1.7.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	-
1.8.	Penerimaan Pengembalian Investasi Perusda	-	-		-	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	22.700.000.000	167,524,217,935	137,500,000,000.00	150,000,000,000.00	165,000,000,000.00
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.2.	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	0,00		2,500,000,000.00	15,000,000,000.00	30,000,000,000.00
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	22.700.000.000	-	-	-	-
2.4.	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	167,524,217,935	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
	Jumlah Pembiayaan Netto	365.892.185.153	51,904,702,028	(137,500,000,000.00)	(150,000,000,000.00)	(165,000,000,000.00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-		-	-

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2023

3.2.5 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.2.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selain bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

3.2.5.2 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas gubernur serta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berkesinambungan dan berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Tabel III. 6
Mitra Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Mendukung Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
1.	Japan International Cooperation	Regional Development Policy Advisor for Sulawesi Region (JICA	1) Mendukung Penguatan Kapasitas Manajemen Pembangunan Daerah di

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
	Agency (JICA)	RDPA)	Wilayah Sulawesi 2) Mengidentifikasi isu & program pembangunan daerah yang menjadi prioritas. 3) Memfasilitasi inisiatif dan kolaborasi berdasarkan hasil pengidentifikasian isu & program pembangunan daerah. 4) Memfasilitasi skema JICA untuk menunjang penguatan kapasitas pembangunan daerah.
2.	USAID ERAT	memperkuat efektifitas Pemerintah Daerah melalui peningkatan mutu pelaksanaan kebijakan dan penyediaan pelayanan di daerah.	1) Penguatan fungsi binwas provinsi ke kab/kota terkait SPM, perencanaan dan penganggaran dalam isu Perkawinan Anak, Stunting, IPM Pendidikan (pra sekolah dan wajib belajar 12 tahun) 2) Pemanfaatan data dan produksi pengetahuan untuk peningkatan kinerja layanan public 3) Pemanfaatan data SP4N LAPOR untuk pencegahan korupsi dan pemantauan pelayanan public 4) Penguatan akses informasi melalui PPID dan partisipasi publik di tingkat provinsi 5) Penguatan peran swasta dalam link and match pendidikan vokasi dan industri " 6) peningkatan kualitas belanja dan tata kelola keuangan daerah
3.	UNICEF	Pendidikan	1) Penanganan Anak Tidak Sekolah berbasis Aksi Kolaborasi bertujuan untuk memastikan anak usia sekolah 7 – 18 tahun bersekolah dan dapat menyelesaikan Wajib Belajar 12 tahun. 2) Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif 3) Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa 4) Penguatan Ketrampilan Abad 21 (Kecakapan Hidup) - pengembangan kompetensi

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			yang dibutuhkan pada abad ke 21 yaitu pengembangan kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berfikir kritis, pemecahan masalah, negosiasi dan ketrampilan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan 5) Pendidikan dalam keadaan darurat (Satuan Pendidikan Aman Bencana)
		Perlindungan Anak	1) Penguatan untuk Kebijakan Perlindungan Anak 2) Optimalisasi Peran Anak dan Remaja 3) Perilaku Positif dan Norma Sosial 4) Penguatan Layanan Perlindungan Anak 5) Perlindungan Anak dalam situasi Darurat
		Kesehatan	1) Memperkuat layanan Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, melalui penguatan AMPSR 2) Memperkuat layanan kesehatan anak a) Penguatan layanan Manegement Terpadu Balita Sakit (MTBS) untuk Bayi -Balita b) Memperkuat layanan Imunisasi pada anak Bayi - Balita c) Memperkuat layanan Tuberkolosis (TB) pada anak sekolah 3) Memperkuat layanan kesehatan essensial pada kondisi darurat, melalui kesiap-siagaan Kab/Kota untuk menghadapi kondisi darurat. (Persiapan Rencana Kontigensi)
		Nutrisi	1) Memperkuat program gizi anak dan pencegahan stunting 2) Memperkuat program pencegahan dan tatalaksanan wasting 3) Memperkuat program gizin

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			remaja dan gizi ibu
4.	USAID MOMENTUM Private Healthcare Delivery (USAID MPHD)	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi dengan Meningkatkan cakupan dan pemerataan kualitas pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir milik swasta.	1) Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Fasyankes Swasta (Primer dan Rujukan) di wilayah intervensi: Meningkatkan ketersediaan dan kesiapan fasyankes swasta untuk pemberian layanan KIA berkualitas, dan Penguatan system rujukan efektif dan efisien dengan pemanfaatan platform SISRUITE MATNEO dan adanya perjanjian kerjasama kabupaten kota terkait system rujukan. 2) Meningkatnya kualitas layanan KIB yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan primer dan rujukan dengan jenis kegiatan Pendampingan rumah sakit (RS) swasta untuk meningkatkan mutu layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Meningkatkan kepatuhan fasyankes swasta terhadap standar mutu klinis, mendorong budaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dan pada pelaksanaan program kesehatan, Memberdayakan pasien, keluarga dan masyarakat 3) Menguatnya kebijakan, komitmen pemerintah dan peran pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan untuk keterlibatan sektor swasta. Melalui Tim Kelompok Kerja Penurunan AKI AKB (Tim POKJA)
5.	FHI360 Program USAID- MADANI	Memperkuat kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/ORMAS) untuk berkontribusi positif/konstruktif dalam pembangunan di daerah dan lahirnya toleransi/nilai-nilai	1) Peningkatan/Penguatan Kapasitas, Legitimasi dan Keberlanjutan fasilitasi potensi pemuda dalm pembangunan, melalui Technical Assistensi (TA) dari Servis Provider (SP) dan Provincial Support Program

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
		inklusif di tengah masyarakat.	(PSP). 2) Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dengan Pemerintah Lokal (Pemda). 3) Bantuan teknis dan hibah dana langsung kepada OMS/ORMAS Lokal. 4) Pembentukan Forum Aksi Bersama (Forum Belajar) yang berbasis Multistakeholders di tingkat Kabupaten/Kota.
6.	USAID IUWASH Tangguh	Proyek lima tahun untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman, serta perilaku higiene (WASH) di daerah perkotaan yang rentan dan memperkuat layanan WASH dan pengelolaan sumber daya air (PSDA) yang berketahanan iklim. Bermitra dengan Pemerintah Indonesia, USAID IUWASH Tangguh mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan akses air dan sanitasi untuk semua (Tujuan 6) dan menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman , tangguh, dan berkelanjutan (Tujuan 11).	1) Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Sektor WASH dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA); 2) Peningkatan Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Aman, Berketahanan Iklim, dan Inklusif Masyarakat Miskin; 3) Peningkatan PSDA untuk Mendukung Layanan Air Minum yang Tangguh; dan 4) Peningkatan Adopsi Perilaku dan Peningkatan Partisipasi dan Peran Kepemimpinan Perempuan yang Berkontribusi pada Peningkatan WASH dan PSDA.
7.	Australia - Indonesia Centre (DFAT)	The Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR)	1) Transportasi, Logistik dan Rantai Pasok: Bagaimana kereta api, jalur laut, dan jalanan terhubung melalui sistem transportasi antar moda (<i>intermodal transport</i>). Bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari proses logistik dan rantai pasok yang handal, mengarah

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			pada peningkatan konektivitas antar pelabuhan, kota, dan pedesaan. 2) Komoditas (Rumput Laut): Eksplorasi ekonomi pangan dan integrasinya dengan sistem transportasi, logistik dan rantai pasok. Bagaimana menciptakan pergerakan barang yang cepat, handal, dan efisien dari ladang pertanian ke Pelabuhan 3) Kalangan Muda: Menautkan kesehatan dan kesejahteraan (<i>health and wellbeing</i>) kalangan muda dengan pemberdayaan ekonomi, keterampilan, dan pelatihan. 4) GEDSI (Jender, Kesetaraan, Disabilitas dan Inklusi Sosial) – isu lintas sektor dalam berbagai fokus riset PAIR
8.	ICRAF - World Agroforestry (CANADA)	Perencanaan pembangunan, Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim, Gender	1) Penguatan tatakelola penggunaan lahan dan penyusunan kebijakan mitigasi dan adaptasi PI 2) Peningkatan kapasitas Pemda untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berbasis lahan secara cerdas iklim 3) Peningkatan kebijakan peraturan dan kelembagaan mitigasi dan adaptasi PI 4) Peningkatan Kapasitas Petani dalam mengakses lahan dan mengelolanya dengan baik
9.	Save the Children Indonesia (Multi Donor)	Perlindungan Anak dan Pekerja, Kesehatan, Mata Pencaharian Keluarga	
10.	AIHSP (Australia Indonesia Health Security Partnership)	Peningkatan Ketahanan Kesehatan secara komprehensif melalui Pendekatan ‘One Health’	Sistim Pemerintah Indonesia yang lebih kuat untuk mencegah , mendeteksi dan merespon kesehatan masyarakat serta darurat kesehatan hewan. Yang berfokus pada Isu Kesehatan Manusia, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Lingkungan.
11.	International Organization for Migration (IOM)	Humanitarian	

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
12.	Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) Multi Donor	Pengelolaan Pengetahuan (Program inti Yayasan BaKTI) Program INKLUSI – BaKTI (Didanai oleh DFAT Australia) Kerjasama UNICEF BaKTI – Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak (SAFE4C) dan Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Berbasis Online (OCSEA) Kerjasama UNICEF BaKTI – WASH (Air, Sanitasi dan Kebersihan)	Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial Perlindungan Anak Mendukung Layanan WASH yang Dikelola dengan Aman dan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan
13.	Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM)	Penguatan Tata Kelola Lanskap dan SDA Berkelanjutan; Perhutanan Sosial; Adaptasi Perubahan Iklim; Inklusi Sosial	1) Peningkatan kapasitas masyarakat desa 2) Pendampingan kelompok masyarakat untuk peningkatan ekonomi melalui pengembangan usaha lokal 3) Peningkatan akses kelola lahan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui skema-skema Perhutanan Sosial 4) Meningkatkan aksi kolaboratif bersama multistakeholder (POKJA PPS Provinsi, POKJA PPS Kabupaten, POKJA PRKD) 5) Mendorong inklusi dan akuntabilitas sosial di desa 6) Membangun sistem komunitas cerdas iklim di lanskap DAS
14.	Institut of Community Justice (ICJ) Makassar	Advokasi, pemberdayaan masy dan layanan bantuan hukum	
15.	Yayasan Lestari Mulia	Lingkungan dan Kesehatan	Memperkuat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat
16.	Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk	Disabilitas dan Inklusi Sosial	Pelayanan Publik yang ramah untuk semua

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
	Kesetaraan (Yayasan PerDIK).		
17.	Yayasan Lestari Mulia	Lingkungan dan Kesehatan	
18.	YASMIB Sulawesi	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	1) Mendorong Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif pada Pemerintah Daerah dan Desa 2) Mendorong Kebijakan layanan public yang responsive gender dan inklusif. 3) Pencegahan Perkawinan Anak, Stunting dan Anak Tidak Sekolah 4) Penguatan Keterbukaan Inforansi Publik 5) Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa
19	Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan	Anggaran & Lingkungan	1) Perencanaan dan penganggaran pembangunan lingkungan yang responsive gender 2) Transfer anggaran provinsi berbasis ekologi
20	PKBI SULAWESI SELATAN	Kesehatan, Keluarga berencana dan Inklusi Sosial	
21	Yayasan Hadji Kalla	Tematik : Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan dan Lingkungan Berbasis wilayah : Pemberdayaan Desa	1) Beasiswa level perguruan tinggi 2) Peningkatan kapasitas manajemen PAUD dan SD 3) Tanggap darurat bencana 4) Bantuan sembako dhuafa 5) Pelatihan kader pelatih senam jantung sehat 6) Penghijauan kota 7) Integrasi energi terbarukan dan ekonomi peternak sapi 8) Pemberdayaan ekonomi-sosial-lingkungan desa tertinggal
22.	Forum Komunitas Hijau	Sosial lingkungan hidup	
23.	PW MUSLIMAT NU	Pemanfaatan TIK dalam pengembangan Dakwah Washatiyah	
24.	Lembaga Studi	Penelitian, pelatihan, Pemberdayaan	

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
	Kebijakan Publik	masyarakat pada bidang Tata kelola Pemerintahan, Kebijakan Publik, politik dan gender	
25.	KOALISI PEREMPUAN INDONESIA WAILAYAH SULSEL	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	
26.	Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel	Demokrasi,, Kepemiluan, Politik, Hukum dan HAM, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, Inklusi, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Toleransi dan keberagaman, dll	
27.	Yayasan Ruang kerja Ukhuwah	Sosial, Pendidikan, Kemanusiaan dan Lingkungan	

Sumber : Diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023

3.2.5.3 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan

prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.2.5.4 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Rencana pembangunan Tahun 2024 merupakan rencana tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026. Dengan demikian prioritas dan sasaran pembangunan yang merupakan dasar utama untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk tahun 2024 amat menentukan capaian kinerja akhir RPD. Demikian juga menentukan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan target kinerja dan besaran anggaran. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan

Tahun 2024, mengacu kepada permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota.

Pada bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target RPD Tahun 2024-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, capaian target pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal- eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan Awal RKP 2024.
2. Penyelesaian terhadap permasalahan pembangunan. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun rencana kerja yang merupakan penjabaran prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2024.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai yang akan dihasilkan setiap tahunnya dalam periode setiap tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2005- 2025. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-1 (satu) dari proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2024 menjadi landasan RKPD Tahun 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV.1.

Tabel IV. 1
Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran			Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
				2022	2024	2025	2026	
Tujuan 1	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel		1	Indeks Reformasi Birokrasi	66,16 (B)	67,31 (B)	68,76 (B)	70,21 (BB)
	Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	68,08 (B)	68,52 (B)	69,27 (B)	70,03 (BB)
	Sasaran 2	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	4,10 (A-)	A- (4,01 – 4,50)	A-(4,01 – 4,50)	A (4,51 – 5,00)
Tujuan 2	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata		4	Indeks Williamson	0,687	0,670	0,662	0,653
	Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	80,39	81,97	82,34	82,73
Tujuan 3	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata		6	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	62,43	70,7	74,55	78,4
			7	Gini Rasio	0,365	0,361	0,356	0,352
	Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,51	4,24	4,03	3,83
	Sasaran 5	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	9	Pertumbuhan ekonomi	5,09	5,23-6,71	5,67-6,82	5,71-6,91
	Sasaran 6	Menurunnya Angka kemiskinan	10	Angka Kemiskinan	8,63	8,31	8,20	8,09
	Sasaran 7	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	11	IPM	72,82	73,99	74,49	74,98
	Sasaran 8	Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,85 (2021)	93,65	93,78	93,90

Tujuan/Sasaran			Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran		Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
					2022	2024	2025	2026	
Tujuan 4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana		13	IKLH	72,63	73,57	73,62	73,72	73,72
	Sasaran 9	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	14	Potensi Penurunan emisi GRK	1.360.000	1.823.583	2.075.597	2.356.390	2.356.390

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang merupakan target awal RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam RPD 2024-2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.

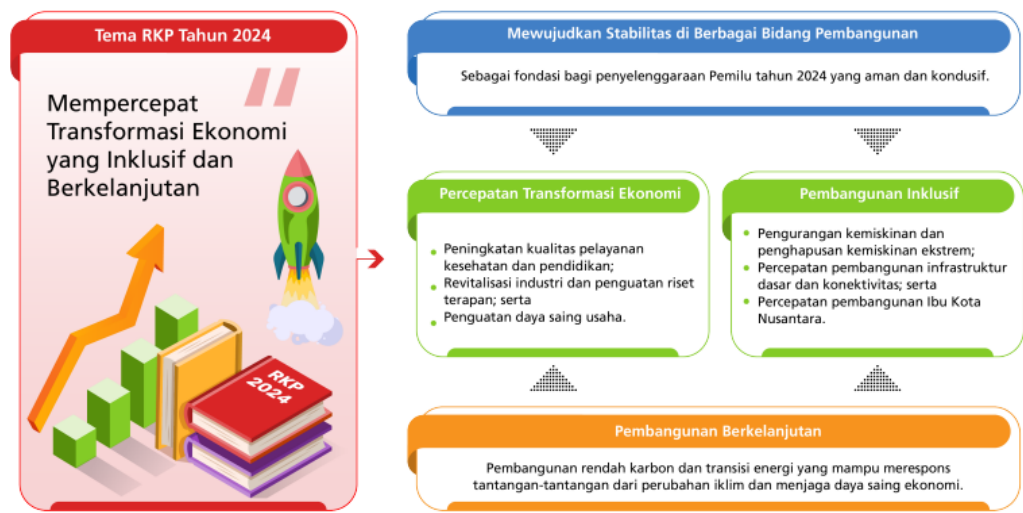
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

4.2.1.1. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Tema Pembangunan

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2024 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut

Gambar IV. 1.
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

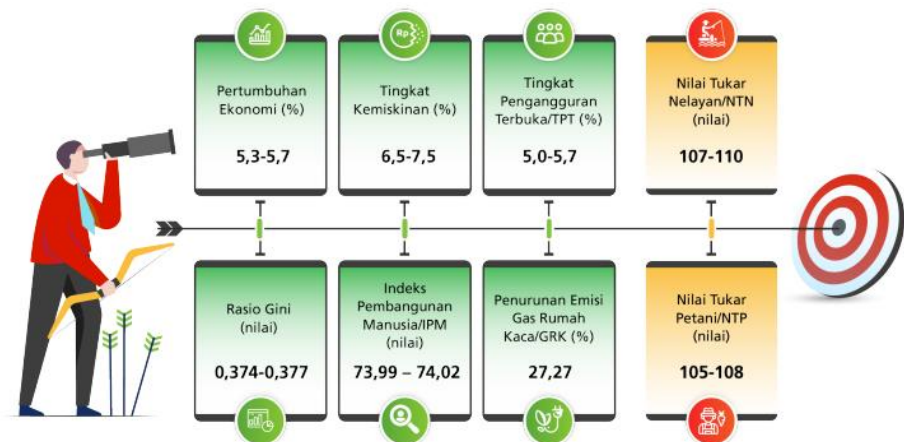
Sasaran

Pembangunan Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar IV. 2.
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

Gambar IV. 3.
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ▶ Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial ▶ Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial ▶ Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan ▶ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan ▶ Peningkatan kualitas konsumsi pangan	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi ▶ Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir). ▶ Konservasi lahan produktif ▶ Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan ▶ Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ▶ Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan ▶ Reformasi sistem perlindungan sosial ▶ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta ▶ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas ▶ Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda ▶ Meningkatkan produktivitas dan daya saing	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas ▶ Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh ▶ Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat air. ▶ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah. ▶ Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi ▶ Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Pebatasan)
Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan ▶ Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok ▶ Menyediakan iklim yang Kondusif dalam Penyusunan Riset Nasional	Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ▶ Membangun gedung pemerintahan dan hunian ▶ Membangun infrastruktur utama
Penguatan Daya Saing Usaha ▶ Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi ▶ Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi ▶ Mewujudkan Investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif ▶ Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi ▶ Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan	Pelaksanaan Pemilu 2024 ▶ Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal ▶ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan ▶ Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ▶ Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri

4.2.1.2. Prioritas Nasional

Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini. Setiap penggambaran PN mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan sasaran capaian PN, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan PN dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP).

Gambar IV. 4.
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Penyusunan kebijakan dan target pada masing-masing PN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global, risiko resesi, dan penurunan rantai pasok melalui spesifikasi dalam strategi dan kegiatan-kegiatan terkait, dan didukung oleh kerangka implementasi. Pada subbab ini dijabarkan strategi dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dimanifestasikan menjadi kegiatan-kegiatan prioritas terkait untuk tiap PN. Kerangka implementasi meliputi kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta alokasi pendanaan turut mendukung pelaksanaan PN, yang difokuskan pada program-program prioritas pembangunan.

Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. *Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau.*

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

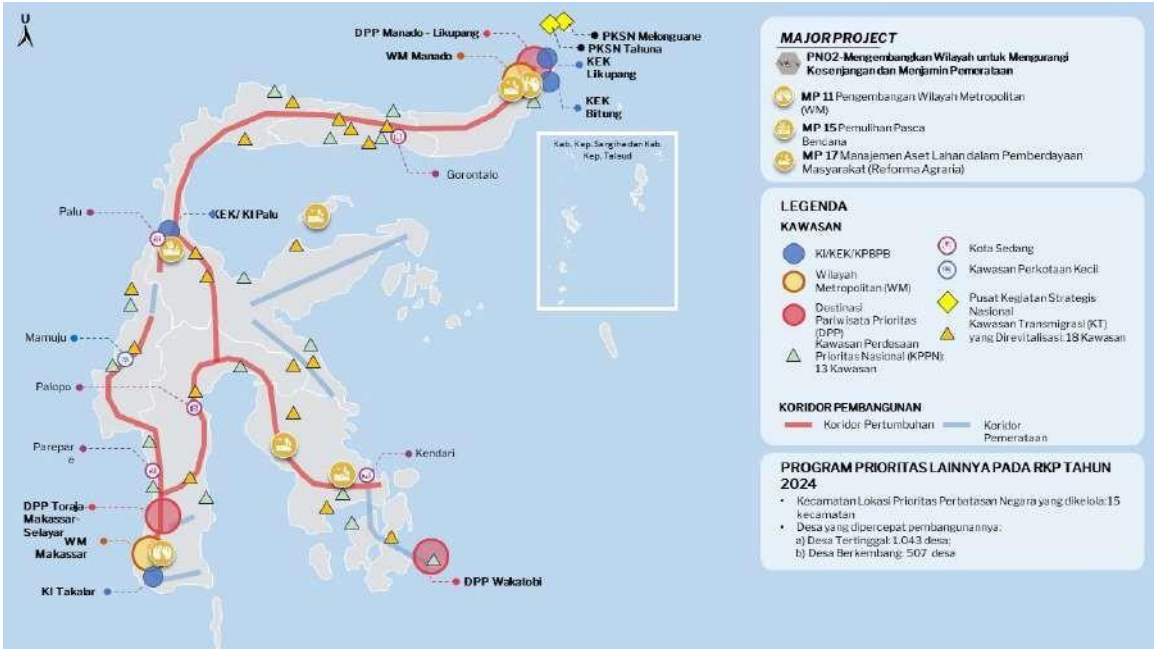
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkansinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8 Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK/KI Palu di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang di Provinsi Sulawesi Utara; KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar- Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas lada, cengkeh, pala, kopi, kakao, kelapa, garam, tebu, dan perikanan budi daya. Perikanan budi daya dikembangkan dengan mengadakan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, benih ikan air tawar, ikan air payau, kepiting, udang, ikan air laut, serta sarana produksi usaha dan pembenihan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan WM Makassar dan WM Manado; lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.043 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri, serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya seperti pada Tabel 4.8; (b) 2 PKSN yaitu PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; (c) pembangunan di 16 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yaitu KPPN Minahasa Utara, KPPN Morowali, KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN Gorontalo Utara, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Mamuju, KPPN Barru, KPPN Pinrang, KPPN Bone, KPPN Luwu Timur, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, dan KPPN Muna; (d) revitalisasi 18 kawasan transmigrasi meliputi 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi

- Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi; (c) penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah; (e) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, dan peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar IV. 5.
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu ***Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA)
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTRUKTUR) →
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI)
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI)
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (LINGKUNGAN HIDUP).

Tabel IV. 2
Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2022	Target 2024	Hasil Pembahasan Rakortek
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	66,16 (B)	67,31 (B)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	68,08 (B)	68,52 (B)	
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	4,10 (A-)	A- (4,01 – 4,50)	
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson	Angka	0,687	0,67	
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	80,39	81,97	
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah	Rp/- Angkatan Kerja	79.149.920,77	84.248.042,86	
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,5-6,90	5,5-6,90
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	62,43	70,7	
			9	Gini Rasio	%	0,365	0,362-0,363	0.362-0.363

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2022	Target 2024	Hasil Pembahasan Rakortek
	dan merata							
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,51	4,24	3,59-4,30
		Menurunya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan	Angka	8,63	6,7 -7,7	6,7 -7,7
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM	Angka	72,82	73,99-74,02	74,02
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,85 (2021)	93,65	
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH	poin	72,63	73,57	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	Juta Ton CO ₂ Eq	1.360.000	1.823.583	

Prioritas Pembangunan Tahun 2024 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2024, sebagai mana tabel IV.3 sebagai berikut:

Tabel IV. 3
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
1	Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi
				Optimalnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
2	Belum optimalnya upaya peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson
				Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Hilirisasi komoditas unggulan berbasis sumber daya alam belum optimal	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Produktifitas Total Daerah
				Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi
4	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Angka kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran
					Gini Rasio
				Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka
				Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
				Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	IPM
				Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Kualitas Lingkungan Hidup belum optimal	Belum Optimalnya Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (7)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH
				Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

Prioritas Pembangunan 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan/Sasaran dan arah kebijakan RPD 2024-2026 sebagai mana pada tabel IV.4 yang menggambarkan arah kebijakan RPD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel IV. 4
Keterkaitan RPD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk
Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi
4	Peningkatan Kesejahteraan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB
				9	Gini Rasio

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
	Masyarakat yang berkualitas dan merata				
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran terbuka
		Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM
		Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)

4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

4.2.3.1. Strategi Pembangunan Tahun 2024

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan tertuang dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 202. Strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;

Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Sulsel Bersih Melayani). Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama yang perlu diupayakan untuk meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:

1. **Manajemen Perubahan;** Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2. **Penataan Peraturan Perundang-Undangan;** Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan
3. **Penataan dan Penguatan Organisasi;** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
4. **Penataan Tata Laksana;** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja
5. **Penataan Sumber Daya Manusia;** Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan
6. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja;** Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
7. **Penguatan Pengawasan;** Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas.

Strategi peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terwujud pada Nilai SAKIP Provinsi yaitu Nilai A dengan rentang nilai 81 sampai dengan 90 dan berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terwujud pada Nilai Indeks Pelayanan Publik yaitu Nilai A dengan nilai 4,51 – 5,0. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur;
- b. Peningkatan persentase berkinerja baik dan sangat baik;
- c. Penataan dan penguatan kelembagaan;
- d. Peningkatan Nilai SAKIP OPD;
- e. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah;
- f. Peningkatan upaya penataan peraturan perundang-undangan;
- g. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- h. Implementasi e-governmentt.

Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dilakukan guna meningkatkannya antara lain:

- a. Pengembangan inovasi daerah.
- b. Pengelolaan informasi publik.
- c. Penataan organisasi.

2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;

Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat inter-konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan indeks layanan infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai

melalui upaya:

- a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
- b. Membangun konektivitas antar wilayah dengan mengoptimalkan peningkatan peran pelabuhan, khususnya pelabuhan pengumpan regional;
- c. Mengoptimalkan aksesibilitas pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan melakukan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan;
- d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;
- e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan;
- f. Pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas, khususnya akses air minum dan akses sanitasi aman dan layak serta jalan lingkungan pada kawasan permukiman khususnya pada daerah rawan air, serta wilayah pesisir, dan kepulauan; dan
- g. Pembangunan system penyediaan air minum regional.

3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan. RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.

Berdasarkan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopo dan sekitarnya. Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja dan Kawasan Takabonerate yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
- b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman.

4. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah. Hal ini dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas.

Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:

- a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara

- b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan.
- c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang.
- d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing yang menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.
- f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan konten creator dan influencer.
- g. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini fokus pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi
- h. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.

5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;

Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;

6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;

Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sektor jasa dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:

- a. Peningkatan akses layanan Pendidikan menengah yang merata. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Sulawesi Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era glocal, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun.
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi melalui
- d. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.
 - a. Penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk

mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik ; meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas ; dan memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

- e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industri;
- f. Meningkatkan sarana prasarana SMK untuk mendukung *link and match* antara sekolah vokasi dengan dunia industri.
- g. Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui upaya penambahan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar mengajar.

7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;

Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana prasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olahraga dan prestasi.

Kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan yang masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum

optimalnya pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada rumah sakit di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:

- a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
- b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
- d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.
- e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat hidup sehat;

8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;

Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi yang akan dilaksanakan melalui strategi:

Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada:

- a. Penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk di ranah daring;
- b. Optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak;
- c. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
- d. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan
- f. Penciptaan lingkungan ramah anak

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada:

- a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah, dan

- desa melalui perbaikan tata kelola;
- b. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi;
 - c. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah;
 - d. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan;
 - e. Penguatan tata kelola layanan melalui peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standarisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),

Meningkatkan layanan disabilitas difokuskan pada:

- a. Penguatan layanan terhadap penyandang disabilitas ;
- b. Peningkatan sarana prasarana kebutuhan disabilitas;
- c. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan; dan
- e. Penciptaan lingkungan ramah disabilitas

9. Penguatan Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional

Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan melalui:

- a. Meningkatkan Pemahaman nilai keagamaan dan budaya lokal, pencegahan konflik berbasis masyarakat. Untuk memperkuat landasan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin religius, toleran, juga dilakukan upaya peningkatan peran tokoh agama dan guru agama serta Lembaga keagamaan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun hubungan yang harmonis menuju kehidupan yang saling menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

- b. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
- c. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;

1) Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam,

Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat. Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diharapkan tumbuh secara inklusif, efektif mengurangi angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industri sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah tinggi menciptakan kesempatan kerja.

Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran visi/misi gubernur melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai

nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging lokal guna mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, maka pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah sentra peternakan dengan sistem pemeliharaan semi intensif sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui program peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

Peningkatan produksi perikanan sebagai sumberdaya kelautan dan jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap kelompok nelayan guna meningkatkan jumlah produksi dan nilai kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan. Melalui program pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya guna meningkatkan produksi dan program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan antara lain : rumput laut, karaginan, gurita, udang vanamae, tuna.

Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggulan di Indonesia yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat penelitian dan pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra benih kakao di Indonesia.

Disamping itu peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok dan *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; Percepatan pembangunan infrastruktur, amenities dan atraksi di destinasi Pariwisata dengan dukungan investasi, *event*, dan *meeting, incentive, conference and exhibition*; (g) *scaling-up start-up* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan dan investasi; (h) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus berkelanjutan yakni (a) peningkatan investasi utamanya di kawasan industri, serta yang berorientasi ekspor dan hijau; (b) perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan di pariwisata dan ekonomi kreatif; serta (c) fasilitasi kemudahan investasi hijau

Pengembangan ekonomi maritim dengan mengedepankan

keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, nonhayati, dan jasa-jasa lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan sesuai dengan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi komoditas unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan jasa maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan pesisir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir;
- c. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

Secara ringkas strategi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 5
Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik	Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tata Laksana; 5. Penataan Sumber Daya Manusia; 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7. Penguatan Pengawasan;. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Untuk meningkatka pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah: a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur. b. Penataan dan penguatan kelembagaan. c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah. d. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. e. Implementasi e-government.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain: a. Pengembangan inovasi daerah. b. Pengelolaan informasi publik. c. Penataan organisasi
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya: a. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan; b. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta. c. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut; d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian; e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan. f. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya.
3	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	1. Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan. 2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan strategi pada fokus inklusif meliputi (1) memelihara dan meningkatkan keberadaan tutupan hutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat pada DAS kritis serta perhutanan sosial; (2) menyelamatkan DAS dalam rangka mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata; (3) meningkatkan layanan dan efisiensi kinerja irigasi melalui pengembangan, pengelolaan, dan modernisasi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi; dan (4) menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi secara partisipatif dan melibatkan petani melalui pembinaan teknis keirigasian, pemberian bantuan sosial peralatan pemeliharaan, atau

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			skema program padat karya. Selain itu, peningkatan kuantitas/ketahanan air juga diarahkan pada fokus berkelanjutan melalui berbagai strategi antara lain (1) melindungi dan mempertahankan luas minimal kawasan berfungsi lindung dan pengelolaan hutan berkelanjutan; (2) memelihara daerah tangkapan air dan ekosistemnya; (3) akselerasi penyelesaian pembangunan waduk multiguna dan pemanfaatannya; (4) penyediaan air baku untuk menunjang kebutuhan kegiatan perekonomian; serta (5) memperkuat tata kelola, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya air terpadu dari hulu ke hilir
4	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah	a. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan melalui strategi (1) akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi dan harmonisasi kebijakan hulu hilir; (2) peningkatan tenaga kerja berkompetensi tinggi; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, termasuk pengembangan bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan; (4) pengembangan industri dan infrastruktur halal, (5) percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi; (6) penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar, dan desa wisata; (7) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital; (8) penguatan industri kreatif berbasis konten; (9) penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan kemandirian industri dalam

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			negeri; (10) penyempurnaan integrasi sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah; (11) peningkatan investasi teknologi informasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular; dan (12) penegakan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan perlindungan pekerja. b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil dengan pusat pertumbuhan; c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman. Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;
		Menurunkan kemiskinan	mengentaskan kemiskinan, dengan fokus pada penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, melalui (a) peningkatan keberantaraan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan; (b) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial; dan (c) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19, dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan. Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui perencanaan dan pemberdayaan kolaboratif di tingkat desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan dan Registrasi Sosial-Ekonomi
		Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	(1) akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi dan harmonisasi kebijakan hulu hilir; (2) peningkatan tenaga kerja berkompotensi tinggi; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, (4) pengembangan industri dan infrastruktur halal, (5) percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi; (6) penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar, dan desa wisata; (7) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur,; (8) penguatan industri kreatif berbasis konten; (9) penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan kemandirian industri dalam negeri; (10) dukungan penyempurnaan integrasi sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah; (11) peningkatan investasi teknologi informasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular; dan (12) penegakan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			pelindungan pekerja
		Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;	meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan fokus antara lain: 1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan (i) penerapan kurikulum, model pembelajaran, sumber belajar, pengembangan inovasi pembelajaran dan praktik belajar-mengajar yang merujuk pada paradigma pembelajaran abad ke-21 untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi/higher order thinking skills (HOTS); (ii) peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk peran pendidik dalam penilaian pembelajaran; (iii) pemanfaatan penilaian hasil belajar sebagai basis perbaikan proses pembelajaran di masa mendatang; (iv) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; (v) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran; (vi) penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter; (vii) peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan; (viii) kesentosaan siswa (student well-being); serta (ix) kesehatan mental dalam pendidikan; 2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan (i) meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (ii) perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; (iii) penyaluran

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			bantuan pendidikan bagi anak keluarga rentan dan berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi; (iv) penguatan upaya pencegahan kasus anak putus sekolah termasuk strategi pendataan, upaya penjangkauan dan pendampingan, dan sinkronisasi lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); 3. kolaborasi lintas sektor untuk penguatan layanan satu tahun prasekolah dengan (i) penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) serta (ii) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini; dan (d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan (i) percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); (ii) peningkatan kualifikasi guru dan dosen; (iii) penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan; (iv) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja; dan (v) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; 4. penguatan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan, mencakup (i) peningkatan kualitas program-program pada peta mutu pendidikan sebagai basis perbaikan dan/atau peningkatan mutu layanan pendidikan hingga pada satuan pendidikan; (ii) penguatan dan akselerasi kapasitas dan mutu akreditasi satuan pendidikan dan program studi; (iii) penguatan Standar Nasional Pendidikan; (iv) penguatan budaya mutu dan kualitas kepemimpinan di sekolah, serta (v) penguatan unit penjaminan mutu di daerah dan satuan pendidikan;

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus antara lain: 5. peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, melalui (i) penguatan pelayanan kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal terencana dan terstandar dengan peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); (ii) afirmasi Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) untuk penjangkauan ibu dan anak berisiko; (iii) pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pra nikah, masa hamil, pasca melahirkan, dan lansia; (iv) KB pasca persalinan; dan (v) peningkatan kapasitas kader; 6. percepatan penurunan stunting dan wasting melalui (i) peningkatan intervensi spesifik melalui pendampingan kepada setiap ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan peningkatan akses pangan yang aman dan bergizi; serta (ii) peningkatan cakupan intervensi sensitif melalui peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman, peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita melalui pemenuhan alat terstandar dan pelatihan tenaga kesehatan dan kader, serta integrasi data sasaran dan penguatan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). 7. pengendalian penyakit menular dan tidak menular terutama pada HIV/AIDS, tuberculosis (TB), Malaria, Kusta, dan Schistosomiasis, melalui (i) peningkatan penemuan kasus aktif secara massal dengan peningkatan peran masyarakat dan kemampuan tenaga kesehatan terlatih; (ii) pemberian pengobatan untuk pencegahan; (iii)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			pemenuhan pemberian obat sampai tuntas, (iv) dukungan sarana penanggulangan penyakit; (v) perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan pengembangan sistem registrasi dan pengingat nasional; (vi) peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular; (vii) penguatan konseling upaya berhenti merokok; serta (viii) pelaksanaan surveilans penyakit terintegrasi dan real time; 8. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan percepatan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik FKTP pemerintah maupun swasta serta akreditasi Rumah Sakit, melalui (i) optimalisasi dukungan penggunaan dana alokasi khusus untuk akreditasi FKTP; (ii) peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam akreditasi fasilitas kesehatan; (iii) peningkatan kapasitas tata kelola dan tenaga kesehatan di puskesmas untuk penyiapan akreditasi; dan (iv) pendampingan pada FKTP terutama pada FKTP dengan pemenuhan sarana prasarana yang kurang; 9. pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar terutama di puskesmas, di antaranya melalui (i) peningkatan kualitas dan kapasitas produksi tenaga kesehatan, (ii) pemberian bantuan biaya pendidikan dengan skema wajib penempatan, dan (iii) afirmasi pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan kepulauan; serta 10. pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional melalui (i) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (ii) pengembangan jejaring RS Layanan Unggulan di setiap provinsi; (iii) peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat setara BSL-2 dan laboratorium pengujian obat dan makanan; (iv) penguatan ketahanan kesehatan; (v) digitalisasi pelayanan kesehatan; (vi) penguatan pengawasan obat dan makanan; serta (vii)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		Penguatan Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional	Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan
		Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada: f. Penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; g. Optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak; h. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif; i. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum; j. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan k. Penciptaan lingkungan ramah anak Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada:

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			f. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah, dan desa melalui perbaikan tata kelola; g. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi; h. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah; i. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan; j. Penguatan tata kelola layanan melalui peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
		Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam	Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
5	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi. Pilar pembangunan lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Teresterial Berkelanjutan

4.2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD. Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RKPD terhadap prioritas pembangunan tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel IV.6. berikut.

Tabel IV. 6
Arah Kebijakan RKPD Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Peningkatan sistem manajemen organisasi pemerintahan dan manajemen SDM Aparatur
		Peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintah daerah
		Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
		Peningkatan penyediaan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah
		Peningkatan nilai investasi melalui promosi potensi daera
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Penguatan Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional
		Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan tingkat dasar dan menengat serta akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
		Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, anak dan disabilitas peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
		Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggarana keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari
		Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan
		Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan,serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,

Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 menjadi acuan secara operasional yang dilaksanakan oleh para perangkat daerah. Secara lengkap penjelasan tersebut sebagaimana dilihat pada tabel IV.7 berikut

Tabel IV. 7
Penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Peningkatan sistem manajemen organisasi pemerintahan dan manajemen SDM Aparatur	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, melalui peningkatan manajemen talenta. Pertama, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi. Kedua, pengelolaan database persediaan dan kebutuhan talenta yang diwujudkan dalam bentuk talent pool. Ketiga, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karier dan prestasi talenta.. Selanjutnya, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik dalam akuisisi talenta, pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.
		Peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintah daerah	Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran adalah (1) untuk peningkatan kinerja diperlukan soliditas internal, membangun komitmen yang kuat mulai dari pimpinan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
			sampai dengan staf pelaksana di seluruh perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan reward dan punishment . Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi, dan penyediaan sarana prasarana inovasi
		Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas evaluasi secara berkala
		Peningkatan penyediaan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi	Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebaran praktik inovasi terbaik, dan hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup kabupaten/kota di Sulawesi selatan. Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk: (a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; (b) inovasi pelayanan publik; dan/atau (c) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. • Pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan innovation-driven development. • Membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. • Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
			organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi, dan penyediaan sarana prasarana inovasi.
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)	• Peningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah yang terdiri dari peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan peningkatan ketersediaan ketersediaan pelabuhan pengumpan regional dan peningkatan layanan irigasi. • Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan dengan cara meningkatkan elektrifikasi desa, jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah	Menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan infrastruktur layanan dasar di daerah sulit serta kemudahan akses kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas
			Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi: diarahkan pada (1) formalisasi bentuk usaha mikro; (2) peningkatan nilai tambah produk; (3) peningkatan kapasitas pelaku usaha; (4) peningkatan partisipasi UMKM (5) kemudahan akses pembiayaan; (6) perluasan akses pasar dan kemitraan usaha; (7) pengembangan wirausaha tematik; (8) integrasi program Daerah dalam pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi; dan (9) penguatan regulasi serta ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi
		Peningkatan nilai	meningkatkan kemudahan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
		investasi melalui promosi potensi daerah	pelayanan perizinan investasi, memperluas kerja sama dalam upaya peningkatan daya saing antardaerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah dan kerja sama , pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat- daerah
			Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan melalui strategi (1) akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi dan harmonisasi kebijakan hulu hilir; (2) peningkatan tenaga kerja berkompetensi tinggi; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, (4) pengembangan industri dan infrastruktur halal, (5) Peningkatan sarana prasarana Destinasi Pariwisata dengan dukungan investasi dan regulasi; (6) penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar;; (7) penguatan industri kreatif berbasis konten; (8) penyempurnaan integrasi sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah; (9) peningkatan investasi teknologi informasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular;
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Penguatan kapasitas usaha kelompok IKM	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
			wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
		Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan tingkat dasar dan menengat serta akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi	(a) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah, peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesehatan mental dalam pendidikan; (b) Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan, dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (c) Kolaborasi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (d) Peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru , penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pemenuhan sarana-

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
		penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar	prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana parasarana kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat dalam peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan.
		Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, anak dan disabilitas peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat melalui peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan, anak dan disabilitas serta regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, perlindungan dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. Pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga, pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas serta penurunan total fertility rate. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas. Menurunkan angka total fertility rate
		Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi,

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
			kewarganegaraan, dan politik
		Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari	Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggara keagamaan melalui penguatan kordinasi dan sinkronisasi pembangunan dengan semua stakeholder pembangunan serta pemberian bantuan keuangan pembangunan sektor keagamaan
		Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan	Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja. Fokus pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan	Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah (1) Meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
			permukiman, air minum, dan sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan pembiayaan pembangunan dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur; (2) Memperluas akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, (3) Melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh serta pengembangan DAK Terintegrasi; (4) Menyediakan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan layanan sistem terpusat dan setempat, termasuk pengembangan layanan lumpur tinja dan perluasan sambungan rumah; (5) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan; (6) Meningkatkan pengelolaan persampahan perkotaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang didukung implementasi teknologi; (7) Meningkatkan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku, pemanfaatan kapasitas SPAM terpasang, penurunan tingkat air tidak berekening (non-revenue water), peningkatan dan pembangunan SPAM, baik skala kabupaten/kota maupun lintas wilayah (SPAM Regional), dan pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum, serta pengelolaan aset dari SPAM terbangun; (8) Memperkuat mekanisme pembinaan berjenjang untuk pemerintah daerah dan fungsi kelembagaan regulator air minum

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
			guna meningkatkan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi; dan (9) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang terlindungi secara swadaya
		Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dapat dicapai di antaranya melalui (1) memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk perikehidupan, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi; (2) meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; (3) memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; serta (4) meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.D20+D42
		Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan,serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,	peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi. Seiring meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, kebijakan pembangunan rendah karbon bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan dengan lima strategi utama, yaitu (1) pembangunan energi berkelanjutan yang menekankan pengembangan energi baru terbarukan dan energi efisiensi; (2) pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan serta pertanian berkelanjutan; (3) pengembangan industri hijau; (4) penanganan limbah dan penerapan ekonomi

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Penjelasan
			sirkular.

4.3. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2024, maka diperlukan keselarasan dan konsistensi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 baik pada kebijakan dalam dokumen RPD maupun kebijakan pembangunan nasional yang merupakan acuan dan pedoman terhadap pembangunan daerah. Sinkronisasi diwujudkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

4.3.1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPD

RKPD sebagai perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPD yang menggambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, Keselarasan ini dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut:

Tabel IV. 8
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPD untuk Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah		6	Produktifitas Total Daerah
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB
				9	Gini Rasio
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran terbuka

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
		Menurunya angka kemiskinan	Menurunya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM
		Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)

Untuk mendukung sasaran tersebut maka beberapa proyek strategis sulsel yaitu sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel IV. 9
Kegiatan Prioritas Pembangunan tahun 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Pengadaan dan pembangunan PSU Air Siap Minum (ARSINUM)		
						Tanakeke, Takalar	1
						Sinjai	1
						Selayar	1
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pembebasan lahan runway Bandara Bua	Luwu	1 paket
2	DINAS SDA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
			Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
				Rehabilitasi Bendung Irigasi			
					Rehabilitasi Bendung DI. Taccipi	Kab. Pinrang	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Bendung DI. Taccipi	Kab. Pinrang	1 paket
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
					Rehabilitasi DI. Kalamisui	Kab. Sinjai	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Kalamisu	Kab. Sinjai	1 paket
					Rehabilitasi DI. Latenreng	Kab. Soppeng	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Latenreng	Kab. Soppeng	1 paket
					Rehabilitasi DI. Salobunne	Kab. Soppeng	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Salobunne	Kab. Soppeng	1 paket

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Rehabilitasi DI. Salomekko	Kab. Bone	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Salomekko	Kab. Bone	1 paket
					Rehabilitasi DI. Cambajawaya	Kab. Maros	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Cambajawaya	Kab. Maros	1 paket
					Rehabilitasi DI. Leang Lonrong	Kab. Pangkep	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Leang Lonrong	Kab. Pangkep	1 paket
					Rehabilitasi DI. Bengo	Kab. Bone	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Bengo	Kab. Bone	1 paket
					Rehabilitasi DI. Balombong	Kab. Toraja Utara	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Balombong	Kab. Toraja Utara	1 paket
					Rehabilitasi DI. Padaelo	Kab. Pangkep	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Padaelo	Kab. Pangkep	1 paket
					Rehabilitasi DI. Leworeng	Kab. Soppeng	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Leworeng	Kab. Soppeng	1 paket
					Rehabilitasi DI.	Kab. Sidrap	1 paket

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Alakarajae		
					Supervisi Rehabilitasi DI. Alakarajae	Kab. Sidrap	1 paket
					Rehabilitasi DI. Kalosi	Kab. Pinrang	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi DI. Kalosi	Kab. Pinrang	1 paket
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
					Peningkatan DI. Waru - Waru	Kab. Bone	1 paket
					Supervisi Peningkatan DI. Waru - Waru	Kab. Bone	1 paket
					Peningkatan DI. Lanca	Kab. Bone	1 paket
					Supervisi Peningkatan DI. Lanca	Kab. Bone	1 paket
					Peningkatan DI. Bungadidi	Kab. Luwu Utara	1 paket
					Supervisi Peningkatan DI. Bungadidi	Kab. Luwu Utara	1 paket
					Peningkatan DI. Kuri-kuri Kasambi	Kab. Luwu Utara	1 paket
					Supervisi Peningkatan DI. Kuri-kuri Kasambi	Kab. Luwu Utara	1 paket
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan			

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
				Rawa			
					Review Desain DI. Salobunne	Kab. Soppeng	1 paket
					Review Desain D.I Selli Coppbulu	Kab. Bone	1 paket
					Review Desain D.I Leang Lonrong	Kab. Bone	1 paket
					Review Desain D.I Lanca	Kab. Bone	1 paket
					Review Desain DI. Leworeng	Kab. Soppeng	1 paket
					Perencanaan Teknis DI Salomekko	Kab. Bone	1 paket
					Perencanaan Teknis D.I Bengo	Kab. Bone	1 paket
					Perencanaan Teknis D.I Balombong	Kab. Toraja Utara	1 paket
					Perencanaan Teknis DI. Alakarajae	Kab. Sidrap	1 paket
					Perencanaan Teknis DI. Kalosi	Kab. Pinrang	1 paket
					Perencanaan Teknis D.I Latenreng	Kab. Soppeng	1 paket
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas				
				Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Pembangunan JDU SPAM Regional Mamminasata	Kab. Gowa	1 paket
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/	Supervisi Pembangunan JDU SPAM Regional		1 paket

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
		MINUM	Kabupaten/Kota	Perluasan/Perbaikan SPAM	Mamminasata		
					Pembebasan Lahan SPAM Regional Ajatappareng	Kab. Enrekang	1 paket
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah				
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Rest Area Tahap IV	Kab. Jeneponto	1 paket
					Supervisi Pembangunan Rest Area Tahap IV	Kab. Jeneponto	1 paket
					Pembangunan Pagar Kantor Gubernur Tahap II	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Pembangunan Pagar Kantor Gubernur Tahap II	Kota Makassar	1 paket
					Rehabilitasi Gedung dan Taman Wisma Negara	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Gedung dan Taman Wisma Negara	Kota Makassar	1 paket
					Pembangunan Kawasan Farmfield GOR Sudiang Tahap II	Kota Makassar	1 paket

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Supervisi Pembangunan Kawasan Farmfield GOR Sudiang Tahap II	Kota Makassar	1 paket
					Pembangunan Kawasan Pusat Kuliner Bantimurung	Kab. Maros	1 paket
					Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Kuliner Bantimurung	Kab. Maros	1 paket
					Pembangunan RTH Taman andalan Kawasan Center Point of Indonesia di (Lanjutan)	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Pembangunan RTH Taman andalan Kawasan Center Point of Indonesia di (Lanjutan)	Kota Makassar	1 paket
					Penataan Lansekap Kantor Gubernur (Lanjutan)	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Penataan Lansekap Kantor Gubernur (Lanjutan)	Kota Makassar	1 paket
					Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Eks Pacuan Kuda	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Penataan Ruang Terbuka Hijau	Kota Makassar	1 paket

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					(RTH) Eks Pacuan Kuda		
					Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maccini Sombala Kota Makassar	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maccini Sombala	Kota Makassar	1 paket
					Pembangunan Gedung Kantor Samsat Tahap II	Kab. Selayar	1 paket
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kab. Selayar Tahap II	Kab. Selayar	1 paket
					Pembangunan Lapangan Tembak dan Gudang Logistik	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Pembangunan Lapangan Tembak dan Gudang Logistik	Kota Makassar	1 paket
					Rehabilitasi Gedung Dharmawanita di Kota Makassar	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Gedung Dharmawanita di Kota Makassar	Kota Makassar	1 paket
					Rehabilitasi Masjid 99 Kubah Kota Makassar	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Masjid 99 Kubah Kota	Kota Makassar	1 paket

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Makassar		
					Rehabilitasi Gedung CCC di Kota Makassar	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Gedung CCC di Kota Makassar	Kota Makassar	1 paket
					Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Makassar	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Makassar	1 paket
					Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Makassar	1 paket
					Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA Wilayah Sungai Jeneberang	Kab. Gowa	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA Wilayah Sungai Jeneberang	Kab. Gowa	1 paket
					Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA	Kota Makassar	1 paket

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Wilayah Sungai Jeneberang		
					Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas UPT PSDA Wilayah Sungai Sadang	Kab. Pinrang	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas UPT PSDA Wilayah Sungai Sadang	Kab. Pinrang	1 paket
					Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas UPT PSDA Wilayah Sungai Sadang	Kota Makassar	1 paket
					Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA Wilayah Sungai Walanae - Cenranae	Kab. Wajo	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA Wilayah Sungai Walanae - Cenranae	Kab. Wajo	1 paket
					Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA Wilayah Sungai Walanae - Cenranae	Kab. Wajo	1 paket

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA Wilayah Sungai Pompengan - Laron	Kota Palopo	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA Wilayah Sungai Pompengan - Laron	Kota Palopo	1 paket
					Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor UPT PSDA Wilayah Sungai Pompengan - Laron	Kota Palopo	1 paket
					Rehabilitasi Mess dan Rumah Dinas UPT PSDA Wilayah Sungai Pompengan - Laron	Kota Palopo	1 paket
					Supervisi Rehabilitasi Mess dan Rumah Dinas UPT PSDA Wilayah Sungai Pompengan - Laron	Kota Palopo	1 paket
					Perencanaan Teknis Rehabilitasi Mess dan Rumah Dinas UPT PSDA Wilayah Sungai Pompengan - Laron	Kota Palopo	1 paket
		PROGRAM					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024							
NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
		PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	1. Pengerukan Sungai	?	?
					2. Pengerukan Drainase	?	?
					3. Pintu air sungai dan pompa	?	?
					4. Pembuatan 200Ha Kolam Regulasi mks, kolam Regulasi daerah banjir	?	?
3	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan			
					Rekonstruksi jalan Pekkae - Bts. Kab. Soppeng	Barru	4
					Pengawasan Teknis		
					Bts. Kab. Barru - Takalala	Soppeng	3
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Teknis		
					Takalala - Cabenge - Salaonro	Soppeng	3
					Pengawasan Teknis		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Salaonro - Bts. Kab. Wajo	Soppeng	3
					Pengawasan Teknis		
					Impa Impa - Anabanua	Wajo	2
					Pengawasan Teknis		
					Solo - Peneki - Kulampu	Wajo	2
					Pengawasan Teknis		
					Pelebaran Jalan Bakunge- Solo-Sampie	Bone	4
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Ujung Lamuru - Palattae	Bone	2
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Palattae - Bojo	Bone	2
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Takkalasi - Bainange - Bts. Soppeng	Barru	1
					Pengawasan Teknis		
					Rehabilitasi jalan Bts. Kab. Pangkep - Tondong Bua - Bts. Kab. Barru	Bone	3
					Pengawasan Teknis		
					Penanganan Bahu Jalan Bts. Kab. Barru (Samaenre) - Parigi	Bone	26

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Bts. Barru - Lompotiang - Lawo	Soppeng	3
					Pengawasan Teknis		
					Pangkep (Male'leng) - Tondongkura - Bts. Kab. Bone	Pangkep	1
					Pengawasan Teknis		
					Pembangunan Jalan Ruas Ussu-Nuha-Bts. Sulteng	Luwu Timur	4
					Pengawasan Teknis		
					Pelebaran Jalan Rantepao - Pangala - Baruppu - Bts. Prov. Sulbar	Toraja Utara	2
					Pengawasan Teknis		
					Pelebaran Jalan Rantepao - Sa'dan - Bts. Kab. Luwu	Toraja Utara	2
					Pengawasan Teknis		
					Pelebaran Jalan Passobo - Matangli - Masuppu	Tana Toraja	1
					Pengawasan Teknis		
					Pembangunan Jalan Tuppu - Pao -	Pinrang	1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Pamulungan - Bts. Kab. Tana Toraja		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Bts. Kab. Enrekang - Anabannae - Dongi - Tanrutedong	Sidrap	2
					Pengawasan Teknis		
					Bts. Kab. Bone - Bacuapie - Balangbaru	Barru	10
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Jalan Aroepala	Kota Makassar	4
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Jalan H.M. Yasin Limpo	Gowa	2
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Tanakaraeng - Sapaya - Bts. Kab. Jeneponto	Gowa	2
					Pengawasan Teknis		
					Rehabilitasi Jalan Sungguminasa - Malino	Gowa	2
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi jalan Burung Burung - Bili Bili	Gowa	2
					Pengawasan Teknis		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Bts. Kab. Gowa (Boro) - Rumbia - Jeneponto	Jeneponto	2
					Pengawasan Teknis		
					Pelebaran Jalan Botolempangan - Batubelerang - Bts. Kab. Bulukumba	Sinjai	3
					Pengawasan Teknis		
					Rekonstruksi Jalan Bts. Kab. Bulukumba (Lolisang) - Sanjai - Sinjai	Sinjai	2
					Pengawasan Teknis		
					Pembangunan Jalan Tanabau - Ngapaloka - Patumbukang	Selayar	5
					Pengawasan Teknis		
				Pembangunan Jembatan			
					Pembangunan Jembatan Lemolengko	Luwu Timur	30
					Pengawasan Teknis		
					Pembangunan Jembatan Marandang	Tana Toraja	40
					Pengawasan Teknis		
					Pembangunan Jembatan Kakea	Luwu Utara	30
					Pengawasan Teknis		

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
					Pembangunan Jembatan Malake	Wajo	60
					Pengawasan Teknis		
					Pembangunan Jembatan Balampangi	Sinjai	15
					Pengawasan Teknis		
					Pembangunan Jembatan Aparang	Sinjai	15
					Pengawasan Teknis		
				Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan ruas Tanabau-Ngapaloka-Patumbukang	Selayar	54
					Pengawasan Teknis		
					Rehabilitasi Jembatan		20
					Pengawasan Teknis		
4	DINAS PERHUBUNGAN						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Trans Andalan (Integrasi Moda Perkotaan)	24 kabupaten /Kota	24 Kab/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024							
NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Saran Dan Prasarana Gedung, Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Asrama	Yogyakarta, Bandung, Bogor, Semarang	8 Unit
	UPT RSUD LA MAPPAPENNING	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RS Regional Bone	Bone	1 Paket
	Dinas Pendidikan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smart School	24 Kab/Kota	1 Tahun
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Smart School	24 Kab/Kota	1 Tahun
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Smart School	24 Kab/Kota	1 Tahun
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smart School	Makassar	1 Tahun

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
		DAERAH PROVINSI	Daerah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smart School	Makassar	1 Tahun
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Smart School	Makassar	1 Tahun
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Smart School	Makassar	1 Tahun
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Smart School	Makassar	1 Tahun
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	1. SPPD Kepala Desa (Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa)	Sulsel	21 Kabupaten
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	2. Penanganan Kemiskinan	Sulsel	21 Kabupaten
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan Lembaga	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2. Penanganan Kemiskinan	sulsel	21 Kabupaten

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
		LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3. Program Khusus Padat Karya Pedesaan	Sulsel	3 Unit

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
			Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Hibah badan promosi pariwisata	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Hibah geopark	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mandalaria	Kab. Bulukumba	1 Paket
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Embung Pallae	Kab. Bone	1 Paket
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Wisata Ollon	Kab. Tana Toraja	1 Paket
		Program Peningkatan	Pengelolaan	Pengembangan Destinasi	Farmfield	Kota Makassar	1 Paket

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
		Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata Provinsi	Pariwisata Provinsi		(GOR Sudiang)	
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				Limbah BLUD B3		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Alat Tangkap	Sulawesi Selatan	200 Unit
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Farmfield	GOR Sudiang	1 Paket
		Program Perencanaan dan Pembangunan	Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana	koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta	Fasilitasi Bantuan Kemasan	24 Kab/Kota Prov, Sulawesi Selatan	10.000 Kemasan

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
		Industri	pembangunan industri provinsi	masyarakat			
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Pengelolaan Sutra di Kab Wajo	Kab. Wajo	10 Ton
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Pengelolaan Sutra di Kab Soppeng	Kab. Soppeng	10 Ton
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Kawasan Industri Kab. Bone	Bakunge, Kab. Bone	1 Dokumen
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Farm Field Garden	GOR Sudiang Makassar	1 Paket
6	DINAS TANAMAN	Program penyediaan	Pengawasan Mutu,	Pengawasan Mutu,	Mandiri Benih		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024							
NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
	PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	dan pengembangan prasarana pertanian	Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Mandiri Benih Jagung		
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Farm Field (GOR Sudiang)		
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura			
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan			
7	DINAS KOPERASI DAN UMKM	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Jabatan	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.	Rest Area Sidrap - Jenepono	Jenepono dan Sidrap	2 Unit (12 Bulan)

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Jabatan	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.	Pengembangan UMKM	Bandara Hasanuddin	1 Unit (1 tahun)
7	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan		Penambangan Batu Gamping		
8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Closed House	Gowa & Bone	2 unit
		Program Penyediaan dan Pengembangan	Peningkatan Ketersediaan dan	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem	Farmfield	GOR Sudiang	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024							
NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROYEK PRIORITAS	LOKASI	VOLUME
		Prasarana Pertanian	Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
9	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Perda penyertaan modal BUMD (PT. SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA), PT. SULSEL ANDALAN ENERGI (PERSERODA), PERUSDA AGRIBISNIS.	Sulawesi Selatan	3 Perda
					KDEKS		

4.3.2 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 - 2026 dan mendukung prioritas nasional tahun 2024 yang merupakan tahun akhir dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dijabarkan pada Tabel IV.10 berikut:

Tabel IV. 10
Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
1.	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
2.	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN 5
3.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PN 1
4.	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN 4
5.	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6

Mengacu pada tema, fokus, sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun 2024, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP Tahun 2024 dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian RPJMN 2020-2024, tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan di tahun 2024. Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi target-target pembangunan. Sehubungan dengan

hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional tahun 2024 dapat dilihat sebagai mana pada Tabel IV.11 berikut:

Tabel IV. 11
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
1.	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Perbaikan tata Kelola dan Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi			
		Optimalnya kualitas pelayanan publik	Indeks layanan publik			
2.	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Meningkatnya Penyediaan Infrasutruktur Layanan Dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur			Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %); peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
3.	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya daya dukung dan Kualitas Sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi Pembvangunan ekonomi yang berkelanjutan	(a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Meningkatnya perumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan timur Indonesia (KTI)	PDRB KTI
4.	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Meningkatnya perumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan timur Indonesia (KTI)	PDRB KTI
			Rasio Gini			Persentase Penduduk Miskin KTI
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Meningkatnya perumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan timur Indonesia (KTI)	Persentase Penduduk Miskin KTI
		Menurunannya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Meningkatnya perumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan timur Indonesia (KTI)	Persentase penduduk miskin KTI (%)
		Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif	IPM	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan Berkualitas	(a) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (b) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (c) harapan lama sekolah;

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
		Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatnya kualitas anak, perempuan	(a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
5.	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	IKLH	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)	Meningkatnya capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	(a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

Dengan demikian terlihat bahwa sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024. Adapun sebagai dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Nasional tahun 2024, maka provinsi Sulawesi Selatan menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagaimana pada Tabel IV.12 sebagai berikut:

Tabel IV. 12
Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Terbarukan (EBT)	1 Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			2 Peningkatan pasokan bahan bakar nabati		
			3 Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi		
			4 Peningkatan pemenuhan energi domestik		
			5 Pengembangan industri pendukung EBT		
		2 Peningkatan Kualitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Perumbuhan Ekonomi	1 Pemantapan kawasan berfungsi lindungi (kumulatif)	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			2 Pengelolaan hutan berkelanjutan		
			3 Penyediaan air untuk pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
			4 Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas		
			5 Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau		
			6 Pengembangan waduk multi guna		
		3 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	1 Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			2 Peningkatan ketersediaan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah	
1	2	3		4		5	6	
					pasokan dan harga kebutuhan pokok	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
				3	Peningkatan produktifitas kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Penyuluhan Pertanian; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
				4	Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Program Penyuluhan Pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				5	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Program Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan		Dinas Ketahanan Pangan
		4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	1	Peningkatan pengelolaan Wilayah Penyelolaan Perikanan (WPP) dan Tata Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta pengelolaan ruang laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				2	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil		
				3	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing		
				4	Peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya			
				5	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi	1	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				2	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
				3	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
				4	Peningkatan penciptaan <i>Start-Up</i> dan peluang usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
				5	Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Program Pengembangan UMKM	
		6	Peningkatatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil dan Insdustrialisasi	1	Peningkatan industri pengelolaan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar jawa		
				3	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk pariwisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
				4	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				5	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				6	Pengembangan industri halal	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	1	Peningkatan diversifikasi nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor		
				3	Pengelolaan impor		
				4	Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				5	Peningkatan partisipasi dalam jaringan produk global	Program Pengembangan Ekspor	
				6	Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif	Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
				7	Peningkatan efektifitas <i>Preferential Trader Agreement</i> (PTA)/ <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	1	Peningkatan pendalaman sektor keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				2	Otimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3	Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				4	Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				5	Reformasi fiskal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				6	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	5	Pengembangan Wilayah Sulawesi	1	Pengembangan kawasan strategis	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas SDA, Cipta karya dan Tata Ruang
				2	Pengembangan sektor unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan
				3	Pengembangan kawasan perkotaan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas SDA, Cipta karya dan Tata Ruang
				4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				5	Kelembagaan dan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1	Percepatan cakupan administarsi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Integritas sistem administrasi kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				3	Pendampingan dan layanan terpadu	Program Pendaftaran Penduduk	
				4	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1	Sistem jaminan sosial nasional	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				2	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Program Rehabilitasi Sosial	
				3	Perlindungan sosial adatif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				4	Kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
		3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan Keluarga Berencana KB	Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				3	Peningkatan pengendalian penyakit		
				4	Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				5	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
				2	Afirmasi askes dan percepatan wajib belajar 12 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	
				3	Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				4	Penjamin mutu kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	5	Peningkatan tata kelola pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
				1	Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
				3	Kualitas pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		6	Pengentasan Kemiskinan	1	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera KS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Keperantaraan usaha dan dampak sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				3	Reforma agraria	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				4	Perhutanan sosial	Program Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		7	Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing	1	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				2	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas		
				3	Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				4	Prestasi olah raga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalias Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter	1 Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja gotong royong, dan budi pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2 Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif		
			3 Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahana, kualitas dan peran keluarga dalam masyarakat dalam pembentukan karekter		
			4 Penguatan pusat-pusat perubahan revolusi mental		
			5 Pembangunan dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan pancasila		
			6 Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme		
		2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	1 Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
			2 Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat		
			3 Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat budaya yang inklusif		
			4 Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
				perkembangan peradaban dunia		
				5 Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan		
		3	Memperkuat Modernisasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	1 Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam prespektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan dikalangan umat beragama	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
				2 Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama		
				3 Penyelarasan relasi agama dan budaya		
				4 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan		
				5 Pengembagngan ekonomi dan sumber daya keagammaan		
		4	Peningkatab Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreatifitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	1 Peningkatan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2 Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan
				3 Pengembangan budaya IPTEK, inovasi, kreativitas dan daya cipta	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				4 Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan; Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Program Pengembangan Perumahan;	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
	Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Program Kawasan Permukiman	Pertanahan
				3	Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				4	Keselamatan dan keamanan transportasi	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
				5	Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				6	Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		2.	Infrastruktur Ekonomi	1	Konektivitas jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
				2	Konektivitas kereta api	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
				3	Konektivitas laut	Program Pengelolaan Pelayaran	
				5	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		3	Infrastruktur Perkotaan	1	Transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				2	Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				3	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah	
1	2	3		4		5	6	
		4	Energi Ketenaga Listrikan	1	Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
				2	Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan			
				3	Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik			
		5	Transformasi Digital	1	Penuntasan infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
				2	Pemanfaatan infrastruktur TIK			
				3	Fasilitas pendukung transformasi digital			
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				2	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
				3	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
				4	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup			
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1	Penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				2	Peningkatan ketahanan iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3	Pembangunan Rendah Karbon	1	Pembangunan energi berkelanjutan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				2	Pemulihan lahan berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				3	Pengelolaan limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				4	Pengembangan industri hijau	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				5	Rendah karbon pesisir dan laut	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Konsolidasi Demokrasi	1	Penguatan kapasitas lembaga demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2	Penguatan kesetaraan dan kebebasan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3	Peningkatan kualitas komunikasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1	Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		3	Penegakan Hukum Nasional	1	Penataan regulasi	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
				2	Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata		
				3	Penguatan sistem anti korupsi		
				4	Peningkatan akses terhadap keadilan		
		4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1	Penguatan inplementasi manajemen ASN berbasis sistem merit	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Transformasi pelayanan publik	Program Penataan Organisasi	Biro Kesejahteraan Rakyat
				3	Penataan kelembagaan dan proses bisnis		
				4	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja pembangunan		
		5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1	Penguatan keamanan dalam negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				3	Penguatan keamanan dan ketahanan siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Pokok - pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menjabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan tahun pertama perencanaan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD. Pokok-pokok Pikiran DPRD telah di integrasikan ke dalam aplikasi e-planning yang terintegrasi pula pada dokumen penyusunan RKPD dan e-budgeting di dalam penyusunan anggaran (SIPD Kemendagri). Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 4.174 usulan dan yang telah di intergrasikan ke dalam dokumen perencanaan sebanyak 2.489 usulan berdasarkan pada hasil telaahan dari tim penyusun RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing Anggota DPRD untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan RKPD tahun 2024. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan
- ✓ Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
- ✓ Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- ✓ Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian
- ✓ Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman melalui pembangunan

- prasarana dan utilitas umum
- ✓ Perlindungan jaminan sosial masyarakat
 - ✓ Peningkatan sarana prasarana kepariwisataan
 - ✓ Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
 - ✓ Peningkatan akhlak melalui pembangunan sarana prasana tempat ibadah
 - ✓ Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kinerja pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2022 menunjukkan trend perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19. Hal ini terindikasi dari meningkatnya kinerja capaian indikator makro tahun 2022 dibandingkan dengan capaian indikator makro tahun 2021. Ekonomi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 tetap tumbuh kuat dan tercatat sebesar 5,09 persen, walaupun lajunya melambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,31 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang meningkat dibandingkan tahun 2021, didorong beberapa lapangan usaha antara lain pada lapangan usaha industry pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Peningkatan kinerja industry pengolahan di Sulawesi Selatan salah satunya didorong oleh meningkatnya utilisasi kapasitas manufaktur terpasang yang dinonaktifkan ketika pandemi. Sedangkan peningkatan kinerja perdagangan, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum seiring dengan relaksasi pembatasan aktivitas yang bahkan diikuti dengan penghapusan PPKM (perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) pada akhir Desember 2022.

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yang diindikasikan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 193.217 orang dari Agustus 2021. Dibandingkan Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,01 persen poin; pengangkutan dan pergudangan meningkat sebesar 0,63 persen poin dan penyediaan jasa lainnya meningkat sebesar 0,44 persen poin. Sedangkan berdasarkan penyerapan tenaga kerja, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap tenaga kerja sebesar 8,53 persen, perdagangan besar dan eceran yang menyerap tenaga kerja sebesar 17,92 persen dan industry pengolahan yang menyerap tenaga kerja sebesar 8,19 persen. Peningkatan ini menjadikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan menurun sebesar 1,21 persen poin menjadi 4,51 persen pada Agustus 2022.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini ratio menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,12 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,377 dan juga menurun sebesar 0,012 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang juga sebesar 0,377. Selain itu berdasarkan daerah tempat tinggal juga menunjukkan adanya penurunan ketimpangan di Sulawesi Selatan. Gini Ratio di daerah perkotaan Sulawesi Selatan pada September 2022 sebesar 0,378 menurun sebesar 0,010 poin dibandingkan Maret 2022 dan juga mengalami penurunan sebesar 0,008 poin dibandingkan September 2021. Sedangkan di daerah perdesaan Sulawesi Selatan, Gini Ratio pada September 2022 sebesar 0,324 menurun sebesar 0,012 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022

dan menurun sebesar 0,011 poin dibandingkan dengan kondisi September 2021.

Memperhatikan kinerja pembangunan dan mengacu pada strategi pengembangan wilayah Sulawesi yaitu percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah Sulawesi, pemerataan intrawilayah, dan penguatan ketahanan bencana, maka sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada Tahun 2024 difokuskan pada (1) percepatan laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan sector unggulan; (2) penurunan tingkat kemiskinan melalui percepatan pemenuhan SPM; serta (3) peningkatan lapangan kerja yang berkualitas.

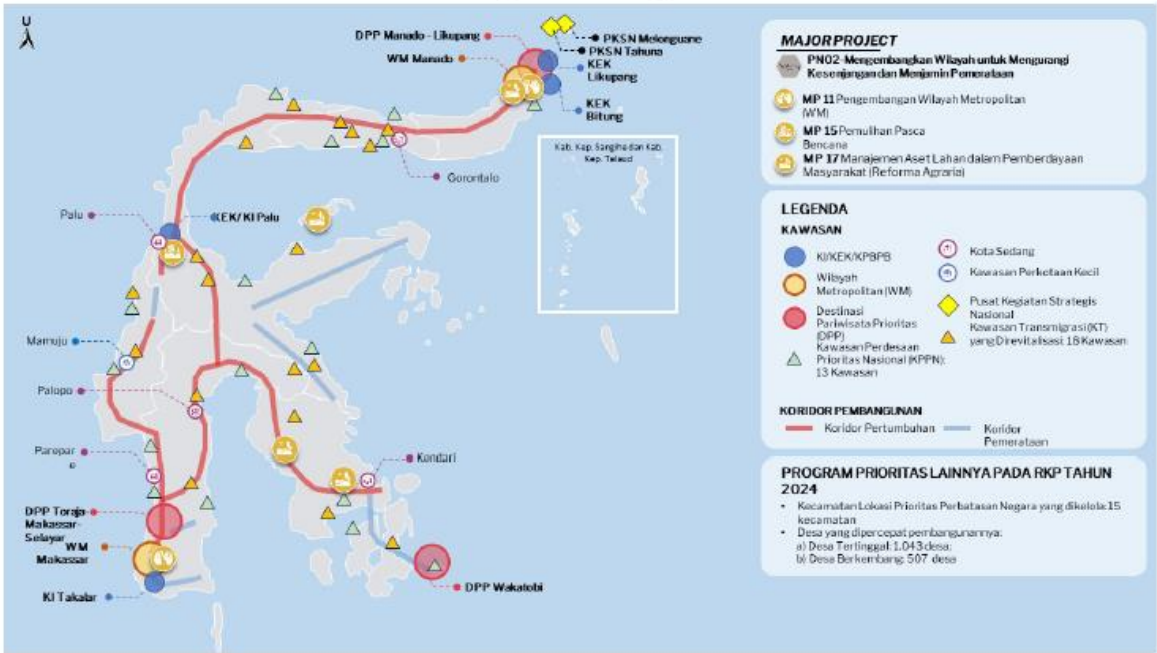
Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tema pembangunan Tahun 2024 yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, maka kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Provinsi Terkemuka di Indonesia dengan Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan dengan mengoptimalkan perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah sebagaimana tema pembangunan Tahun 2024 yang diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yaitu Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif.

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari wilayah Pulau Sulawesi tahun 2024 diarahkan untuk 1) mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi melalui diversifikasi kegiatan ekonomi; 2) mendorong perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional; 3) memantapkan perannya sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan Timur; 4) menguatkan mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana; dan 5) mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah tetap dilaksanakan berdasarkan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang.

Pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan nilai tambah di Sulawesi Selatan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan komoditas pertanian dan perkebunan serta hasil perikanan budidaya dengan 3 (tiga) strategi sebagai berikut, yaitu: **Pertama**, Percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah Sulawesi melalui perkuatan pusat-pusat pertumbuhan dengan mempercepat realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan KI Takalar dan destinasi pariwisata pengembangan Toraja-Makassar-Selayar dan peningkatan pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata untuk mendukung pengembangan sector industry dan pariwisata; **Kedua**, Pemerataan Intrawilayah Sulawesi melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang perumahan rakyat, social dan pekerjaan umum percepatan kemudahan berusaha, dan penguatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota serta peningkatan pengembangan produk unggulan di kawasan perdesaan yang diprioritaskan pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Barru, KPPN Pinrang, KPPN

Bone, KPPN Luwu Timur dan kawasan transmigrasi yang difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi Gilireng di Kabupaten Wajo, kawasan transmigrasi Masamba di kabupaten Luwu Utara, dan kawasan transmigrasi Mahalona di kabupaten Luwu Timur; dan **Ketiga**, Penguatan Ketahanan Bencana wilayah Sulawesi melalui pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi pada lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi dan peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah dan pemutakhiran data kebencanaan.

Gambar V. 1
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi Tahun 2024



Sumber: Rancangan Awal RPD Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas,2023

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2024, mengamanatkan sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi berupa 1) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi; 2) menurunnya tingkat kemiskinan; dan 3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dengan target kontribusi pengembangan wilayah di sajikan dalam Tabel V.1. Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2024.

Tabel V. 1
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2024

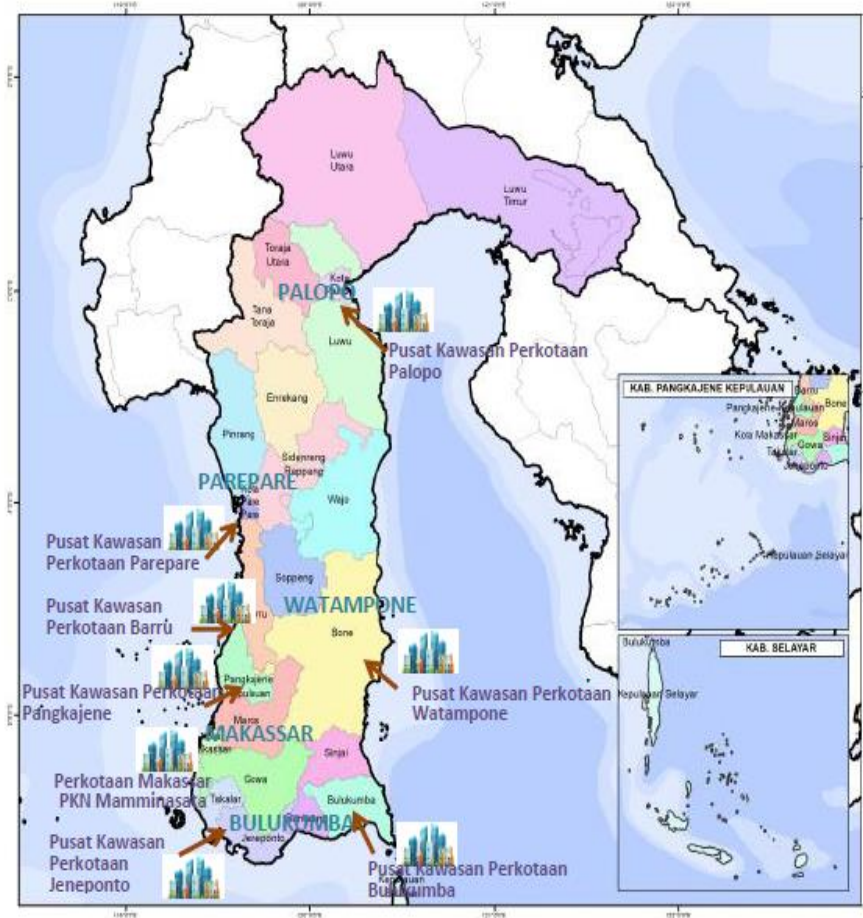
Indikator	Target Tahun 2024					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 – 6,00	13,7 – 15,30	6,30 – 6,90	6,00 – 6,80	4,90 – 5,80	3,70 – 4,50
Tingkat Kemiskinan (%)	5,00 – 5,50	10,00 – 10,30	6,30 – 6,70	9,50 – 9,80	13,70 – 14,00	8,50 – 8,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,98 – 5,68	2,61 – 3,33	3,59 – 4,30	2,47 – 3,19	2,04 – 2,76	1,05 – 1,78

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2024

Memperhatikan capaian pembangunan kabupaten/kota dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan, maka strategi pembangunan wilayah dijabarkan dalam 5 (lima) wilayah pengembangan berbasis kawasan andalan

sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, dan Kawasan Palopo dan sekitarnya sebagaimana peta berikut :

Gambar V. 2
Wilayah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: PP 13 Tahun 2017 Tentang RTRWN, diolah Bappelitbangda, 2023

5.1. Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah dalam pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, khususnya pusat produksi pertanian, dan perikanan di kabupaten Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo dan Soppeng; pusat pengolahan sumber daya alam di kabupaten Pangkajene Kepulauan; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan di kabupaten Barru dan Kota Parepare; pusat pengembangan jasa pariwisata di Kota Makassar dan kabupaten Maros; dan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kota Palopo dan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang meliputi Kabupaten Toraja,

Toraja Utara, Bone, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai.

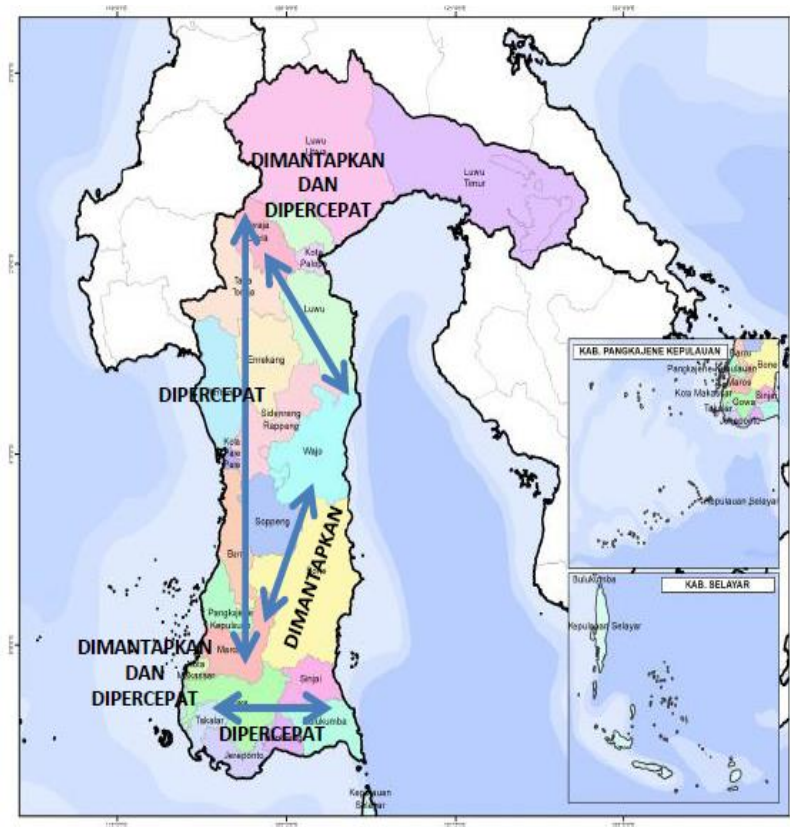
Secara umum arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata – Kawasan Bulukumba, dikembangkan untuk memantapkan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan mempercepat pembangunan di Kawasan Bulukumba dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Sulawesi Selatan dengan beberapa program strategis nasional diantaranya: Pembangunan Kawasan Industri Takalar, pembangunan KA Makassar-Parepare; Pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu Makassar New Port; pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin; pembangunan SPAM Regional Mamminasata; pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan; pembangunan waduk multiguna Jenelata serta modernisasi DI Pamukkulu; dan reformasi system kesehatan serta percepatan penurunan kematian ibu dan stunting;
2. Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba – Kawasan Watampone, dikembangkan untuk mempercepat peningkatan kesejajaran ekonomi pada kawasan Selatan dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat guna memantapkan pembangunan kawasan yang merupakan kawasan andalan Bulukumba-Watampone dengan pengembangan kawasan Industri Bantaeng yang merupakan kawasan industri prioritas nasional dan pengembangan kawasan industri Jeneponto; pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional; pembangunan simpul transportasi antar moda dan peningkatan jaringan jalan; pengembangan bandar udara Arung Palakka; peningkatan akses air minum perpipaan; pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan irigasi; reformasi system kesehatan serta percepatan penurunan kematian ibu dan stunting;
3. Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, dikembangkan untuk untuk mempercepat peningkatan kesejajaran ekonomi pada kawasan Utara dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat guna mendukung percepatan pembangunan kawasan yang merupakan kawasan Strategis Nasional Parepare dengan pengembangan kawasan Industri Parepare; pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional; pembangunan jaringan kereta api Makassar-Parepare; pembangunan simpul transportasi antar moda dan peningkatan jaringan jalan arteri dan kolektor; pembangunan pembangkit listrik; pembangunan SPAM Regional; akselerasi pengembangan energy terbarukan dan konservasi energy di kabupaten Pinrang; peningkatan akses air minum

perpipaan; peningkatan kapasitas bendungan dan jaringan irigasi; dan reformasi system kesehatan serta percepatan penurunan kematian ibu dan stunting;

4. Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare dengan Kawasan Palopo, dikembangkan untuk mempercepat peningkatan kesejajaran ekonomi pada kawasan Utara dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat guna memantapkan pembangunan kawasan Palopo yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan mempercepat pembangunan Kawasan Strategis Toraja dengan pengembangan kawasan Industri Sorowako; pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional; pembangunan simpul transportasi antar moda dan peningkatan jaringan jalan; pengembangan bandar udara Buntu Kunik; pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan irigasi; reformasi system kesehatan serta percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dan
5. Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo dengan Kawasan Watampone, dikembangkan dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejajaran ekonomi pada kawasan Watampone dengan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional; peningkatan kemantapan jaringan jalan; reformasi system kesehatan serta percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.

Gambar V. 3
Arah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2023

Sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam, meningkatnya aksesibilitas infrastruktur termasuk aksesibilitas pelayanan dasar, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sasaran pembangunan wilayah Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan yang dilakukan dengan **pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial** yang mengacu pada kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Rancangan RKP Tahun 2024 dan kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

5.1.1. Pembangunan Kawasan Makassar dan sekitarnya

Pembangunan kawasan Makassar dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan peran Kawasan Makassar yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam. Pembangunan kawasan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan kontribusi rata-rata 49.63 persen pertahun, yang didominasi oleh lapangan usaha perdagangan dan jasa dengan kontribusi

sebesar 17,51 persen, lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 17,17 persen dan lapangan usaha industry pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,23 persen yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, sebagaimana peran kawasan Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa regional di Kawasan Timur Indonesia yang memacu tumbuhnya investasi rata-rata sebesar 7,15 persen per tahun atau rata rata investasi sebesar Rp. 97,36 triliun (atas dasar harga berlaku). Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Makassar dan sekitarnya dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan sebagaimana table berikut:

Tabel V. 2
Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Makassar dan sekitarnya Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
Makassar	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65-6,20	5,40
	Tingkat Kemiskinan	%	4,14	4,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	14,22	11,82
	Gini Ratio	Nilai	0,384	0,395
	IPM	Nilai	82,45	83,12
Gowa	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,78 – 6,38	4,59
	Tingkat Kemiskinan	%	6,84	7,36
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,28	3,26
	Gini Ratio	Nilai	0,331	0,364
	IPM	Nilai	71,02	70,99
Maros	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,45-5,93	9,13
	Tingkat Kemiskinan	%	8,85	9,43
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,12	5,04
	Gini Ratio	Nilai	0,353	0,362
	IPM	Nilai	70,59	71,00
Takalar	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,81-6,41	4,64
	Tingkat Kemiskinan	%	7,82	8,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,06	2,63
	Gini Ratio	Nilai	0,346	0,375
	IPM	Nilai	68,14	68,31
Pangkajene Kepulauan	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48-5,98	4,93
	Tingkat Kemiskinan	%	12,68	13,92
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,05	5,23
	Gini Ratio	Nilai	0,331	0,334
	IPM	Nilai	69,53	69,79

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2023

5.1.2. Pembangunan Kawasan Bulukumba dan sekitarnya

Sebagai upaya mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan, maka kebijakan pengembangan kawasan Bulukumba yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan khususnya perikanan tangkap dan peningkatan akses kelola kawasan hutan dengan skema perhutanan social, serta optimalisasi fungsi dan peningkatan produktifitas Kawasan Industri Bantaeng sebagai kawasan industry prioritas nasional. Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan.

Seiring dengan penetapan KI Bantaeng sebagai kawasan industry prioritas nasional, maka kontribusi kabupaten Banteng terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan Bulukumba juga semakin meningkat menjadi sebesar 17,96 persen pada Tahun 2022. Selain itu kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 merupakan kabupaten dengan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 15,45 persen. Hal tersebut memacu peningkatan kontribusi Kawasan Bulukumba pada terhadap perekonomian Sulawesi Selatan sebesar 10,30 persen pada Tahun 2022. Pencapaian target pembangunan kawasan Bulukumba tergambar pada beberapa indicator pembangunan sebagai berikut:

Tabel V. 3
Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten pada Kawasan
Bulukumba dan sekitarnya Tahun 2022

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
Bulukumba	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,09 – 4,12	3,81
	Tingkat Kemiskinan	%	6,62	7,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,33	1,26
	Gini Ratio	Nilai	0,356	0,361
	IPM	Nilai	70,11	70,34
Jeneponto	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48-5,97	3,81
	Tingkat Kemiskinan	%	13,17	13,73
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,24	2,21
	Gini Ratio	Nilai	0,335	0,338
	IPM	Nilai	64,90	65,13
Sinjai	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,28-5,71	4,87
	Tingkat Kemiskinan	%	8,43	8,80
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,58	1,80
	Gini Ratio	Nilai	0,357	0,357
	IPM	Nilai	68,55	68,33
Bantaeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,74-6,32	15,45
	Tingkat Kemiskinan	%	8,16	9,07
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,16	2,72
	Gini Ratio	Nilai	0,330	0,320
	IPM	Nilai	69,56	69,69

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
Kepulauan Selayar	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,61-6,14	3,67
	Tingkat Kemiskinan	%	11,34	12,24
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38	1,49
	Gini Ratio	Nilai	0,343	0,350
	IPM	Nilai	68,19	68,35

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2023

5.1.3. Pembangunan Kawasan Watampone dan sekitarnya

Pengembangan kawasan pembangunan Watampone diprioritaskan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah untuk memacu pemulihan ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha mikro dan kecil, pemenuhan standar pelayanan minimal, utamanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Kawasan Watampone secara rata-rata berkontribusi sebesar 13,59 persen per tahun terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Kawasan Watampone memberikan kontribusi cukup besar terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,33 persen mengingat peran kawasan Watampone sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Watampone, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

Tabel V. 4
Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten pada Kawasan Watampone dan sekitarnya Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
Bone	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47-5,95	5,23
	Tingkat Kemiskinan	%	9,64	10,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,12	2,27
	Gini Ratio	Nilai	0,388	0,376
	IPM	Nilai	66,86	67,01
Wajo	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,24-5,65	2,38
	Tingkat Kemiskinan	%	6,84	6,57
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,22	2,54
	Gini Ratio	Nilai	0,341	0,375
	IPM	Nilai	69,64	70,26
Soppeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,19-6,92	6,18
	Tingkat Kemiskinan	%	6,70	7,49

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,31	3,40
	Gini Ratio	Nilai	0,387	0,386
	IPM	Nilai	69,41	69,70

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2023.

5.1.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan sekitarnya

Pengembangan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional, yang dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan peran kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan konektivitas serta infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diprioritaskan pada pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan.

Pembangunan kawasan Parepare selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berkontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Selatan sebesar 16,25 persen dengan dominasi lapangan usaha terbesar adalah pertanian dengan kontribusi sebesar 29,68 persen, industri pengolahan sebesar 21,64 persen dan konstruksi dengan kontribusi sebesar 10,88 persen. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Parepare, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

Tabel V. 5
Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Parepare dan sekitarnya Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
Parepare	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65-6,20	5,93
	Tingkat Kemiskinan	%	4,74	5,41
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,96	5,60
	Gini Ratio	Nilai	0,358	0,379
	IPM	Nilai	78,37	78,54
Sidenreng Rappang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,39-5,86	4,86
	Tingkat Kemiskinan	%	4,83	5,11
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,76	3,56
	Gini Ratio	Nilai	0,335	0,354
	IPM	Nilai	71,73	72,06
Barru	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,43-5,91	5,11
	Tingkat Kemiskinan	%	7,45	8,40
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,23	5,32
	Gini Ratio	Nilai	0,343	0,366
	IPM	Nilai	71,79	71,53
Pinrang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,57-6,06	4,52

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
	Tingkat Kemiskinan	%	7,99	8,79
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,09	2,79
	Gini Ratio	Nilai	0,360	0,363
	IPM	Nilai	71,72	71,97
Enrekang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,55-6,06	3,71
	Tingkat Kemiskinan	%	11,38	12,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38	0,58
	Gini Ratio	Nilai	0,352	0,346
	IPM	Nilai	73,27	72,91

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2023.

5.1.5. Pembangunan Kawasan Palopo dan sekitarnya

Pembangunan Kawasan Palopo diprioritaskan pemulihan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui penguatan peran Kawasan Palopo sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan Kawasan Strategis Nasional Toraja yang juga sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pembangunan kawasan Palopo dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan UMKM, penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Peran kawasan Palopo terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencapai rata-rata 15,22 persen pertahun. Kontribusi tertinggi disumbang oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 44,03 persen, kemudian lapangan usaha pertanian sebesar 22,34 persen dan pengadaan listrik dan gas dengan kontribusi sebesar 16,93 persen. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan Palopo, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel V. 6
Target dan Capaian Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo dan sekitarnya Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
Palopo	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,72-6,30	5,83
	Tingkat Kemiskinan	%	7,28	7,78
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,11	8,20
	Gini Ratio	Nilai	0,340	0,371
	IPM	Nilai	78,45	78,91
Luwu	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,38-5,84	5,69
	Tingkat Kemiskinan	%	11,40	12,49
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,82	3,85
	Gini Ratio	Nilai	0,380	0,364
	IPM	Nilai	71,05	71,36

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2022	Capaian 2022
Luwu Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,98-6,44	4,54
	Tingkat Kemiskinan	%	12,79	13,22
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,94	2,81
	Gini Ratio	Nilai	0,330	0,349
	IPM	Nilai	69,98	70,51
Luwu Timur	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,49-3,33	1,99
	Tingkat Kemiskinan	%	5,93	6,81
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,35	4,48
	Gini Ratio	Nilai	0,389	0,394
	IPM	Nilai	73,94	73,92
Tana Toraja	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05-6,73	5,12
	Tingkat Kemiskinan	%	12,44	12,18
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,54	2,32
	Gini Ratio	Nilai	0,334	0,355
	IPM	Nilai	69,63	69,88
Toraja Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,54-6,06	5,27
	Tingkat Kemiskinan	%	10,72	11,65
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,09	1,99
	Gini Ratio	Nilai	0,369	0,356
	IPM	Nilai	69,79	70,36

Sumber: PRPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2023.

5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan pariwisata, lumbung pangan nasional dengan mengarahkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis pada komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang didukung oleh pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terjangkau dan berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 melalui pendekatan pembangunan wilayah berbasis pembangunan kawasan pembangunan yang didasarkan pada arahan kebijakan pembangunan nasional dengan megacu pada rencana tata ruang baik rencana tata ruang wilayah nasional maupun rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2024 bertujuan untuk mendukung proses transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi komoditas unggulan wilayah, pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pelayanan dasar, penguatan pusat pertumbuhan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan aksesibilitas, peningkatan konektivitas dan pemerataan jangkauan infrastruktur wilayah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup lingkungan hidup yang

berkelanjutan dan berketahanan bencana serta mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Dalam upaya mengarahkan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan yang mengacu pada rencana tata ruang dan dijabarkan ke dalam lima kawasan pembangunan yaitu Kawasan Makassar, Kawasan Bulukumba, Kawasan Watampone, Kawasan Parepare, dan Kawasan Palopo.

5.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kawasan Makassar dan sekitarnya Tahun 2024

Pengembangan kawasan Makassar dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat peran Kawasan Makassar sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan kontributor utama PDRB Sulawesi Selatan. Strategi pengembangan Kawasan Makassar dilakukan dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan perkotaan yang diiringi dengan upaya mendorong pengembangan komoditas unggulan dan pengembangan kawasan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah yang didukung oleh peningkatan jangkauan dan kualitas serta pemerataan infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur sumber daya air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air baku guna mendukung peningkatan produktivitas komoditas sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan air minum, peningkatan kualitas transportasi public dan peningkatan kemandirian jalan.

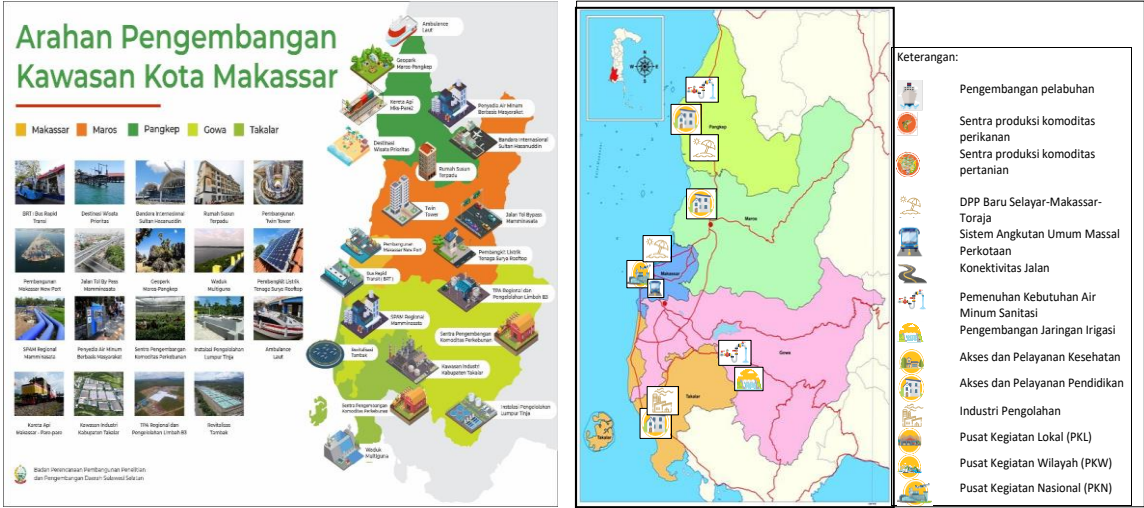
Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif melalui reformasi system kesehatan nasional dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting serta peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kawasan Makassar, khususnya di kabupaten Pangkep, Kepulauan dan kabupaten Maros yang persentase penduduk miskinnya di atas rata rata provinsi.

Kawasan Makassar merupakan bagian dari wilayah Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar yang merupakan Kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang meliputi TN Bantimurung Bulusaraung, KPPN Makassar, dan Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan. Untuk itu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, maka dilakukan strategi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan promosi wisata dan peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata. Sebagai upaya menurunkan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dilakukan pengembangan kapasitas usaha ekonomi melalui penguatan

kapasitas kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Strategi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana merupakan salah satu prioritas pembangunan yang capaiannya terwujud pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), untuk itu pencapaiannya pada Kawasan Makassar yang merupakan target utama penurunan emisi GRK mengingat Kawasan Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasta akan dilakukan melalui arah kebijakan penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon dan penyediaan infrastruktur persampahan regional. Selain itu Kawasan Makassar merupakan salah satu kawasan rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya banjir, cuaca ekstrim, dan bahaya gelombang tinggi dan abrasi dengan kelas bahaya tinggi.

Gambar V. 4
Arah Pengembangan Kawasan Makassar dan sekitarnya, Tahun 2024



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023.

5.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Bulukumba dan sekitarnya Tahun 2024

Pengembangan kawasan Bulukumba dilakukan melalui pendekatan pemerataan dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seiring dengan ditetapkanya KPPN Selayar dan KSPN Takabonerate sebagai bagian dari daerah Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Baru. Untuk itu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, maka dilakukan strategi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan promosi wisata dan peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata, khususnya di kabupaten Kepulauan Selayar dan kabupaten Bulukumba yang diiringi dengan pengembangan kapasitas usaha ekonomi melalui penguatan kapasitas kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas.

Selain strategi peningkatan pertumbuhan perkonomian daerah, dalam mewujudkan pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

merata maka strategi pengembangan kawasan Bulukumba dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja yang dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan peningkatan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, khususnya peningkatan kapasitas Kawasan Industri Bantaeng yang merupakan kawasan industry prioritas nasional.

Kawasan Bulukumba merupakan salah kawasan yang akan diprioritaskan penanganannya pada Tahun 2024 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang yang kompetitif dan inklusif mengingat capaian IPM kabupaten Tahun 2022 di Kawasan Bulukumba di bawah rata rata capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan melalui penurunan angka kemiskinan dengan memperhatikan capaian persentase kemiskinan kabupaten Tahun 2022 di Kawasan Bulukumba di atas rata rata capaian persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata diprioritaskan pada pemenuhan akses dan layanan dasar, khususnya pemenuhan kebutuhan air minum dan penyelenggaraan jalan berupa peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic guna meningkatkan konektivitas antara Kawasan Bulukumba sebagai pusat produksi komoditas pertanian dan perikanan dengan pusat distribusi.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan peningkatan IKLH melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sedangkan pembangunan yang berketahanan bencana diprioritaskan pada Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bulukumba yang merupakan kabupaten dengan potensi rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya cuaca ekstrim dan potensi bahaya tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi.

Gambar V. 5
Arah Pengembangan Kawasan Bulukumba Tahun dan sekitarnya 2024



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Watampone dan sekitarnya Tahun 2024

Pengembangan kawasan Watampone dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pemulihan pertumbuhan ekonomi, yang didasarkan pada peran dan fungsi kawasan Watampone sebagai pusat perdagangan dan jasa regional sekaligus sebagai pusat pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan lumbung pangan nasional. Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kawasan Watampone dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan produktivitas sector tanaman pangan, kelautan dan perikanan serta pengembangan pengembangan sector pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja sector unggulan daerah .

Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif di kawasan Watampone merupakan salah satu prioritas pembangunan Sulawesi Selatan dengan memperhatikan capaian IPM di kawasan Watampone Tahun 2022 yang lebih rendah daripada rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Watampone akan dicapai melalui strategi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat mengingat capaian komponen IPM yaitu Usia harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah kabupaten di Kawasan Watampone lebih rendah daripada capaian rata-rata provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di kawasan Watampone yang merupakan pusat produksi komoditas pertanian dan perikanan, maka akan dilakukan strategi peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah guna mendukung konektivitas antara pusat produksi dengan pusat distribusi melalui peningkatan kualitas dan kemandirian jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic dan peningkatan kualitas infrastruktur pada pelabuhan pengumpan regional serta dukungan peningkatan kapasitas bandar udara yang menunjang konektivitas regional Pulau Sulawesi antara Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan peningkatan IKLH melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengarusutamakan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada Kabupaten Bone, kabupaten Soppeng dan kabupaten Wajo yang merupakan kabupaten dengan potensi rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya cuaca ekstrim dan bahaya banjir dengan kelas bahaya tinggi dan potensi bahaya tanah longsor dengan kelas bahaya sedang - tinggi .

Gambar V. 6
Arah Pengembangan Kawasan Watampone Tahun dan sekitarnya 2024



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Parepare dan sekitarnya Tahun 2024

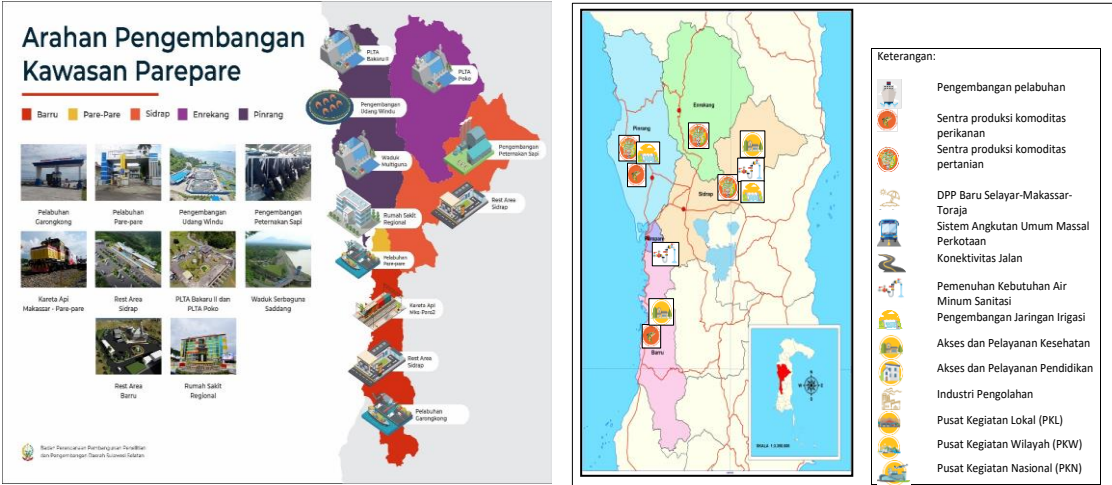
Pengembangan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dan pengembangan ekonomi maritim dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan.

Selain upaya tersebut, perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dilakukan di Kawasan Parepare dengan meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif sebagai upaya mendukung peningkatan ekspor melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pengolahan sumber daya alam yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan, khususnya di kabupaten Pinrang dan kabupaten Enrekang yang angka kemiskinannya lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan rata rata provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di kabupaten Barru, kabupaten Pinrang dan Sidenreng Rappang yang capaian IPM Tahun 2022 lebih rendah daripada capaian IPM rata rata Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada komponen UHH, Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah.

Dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata dilakukan penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat yang terintegrasi melalui pengembangan jalan lintas Pulau Sulawesi, pembangunan jalur KA Makassar Parepare dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional serta pemenuhan dan peningkatan akses air minum. Sedangkan peningkatan

kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana dilakukan melalui pemeliharaan kualitas lingkungan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada kabupaten dan kota dengan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, gelombang ekstrim dan abrasi kelas bahaya tinggi khususnya kota Parepare, kabupaten Barru dan kabupaten Pinrang dan potensi bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi di seluruh Kawasan Parepare.

Gambar V. 7
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kawasan Parepare dan sekitarnya Tahun 2024



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.2.5. Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Palopo dan sekitarnya Tahun 2024

Pengembangan kawasan Palopo dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat peran Kawasan Palopo sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Sulawesi Selatan setelah Kawasan Makassar.

Strategi pengembangan Kawasan Palopo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dilakukan dengan strategi hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dan pengembangan maritime melalui pengembangan industry pengolahan dan industry jasa hasil perkebunan, peternakan dan perikanan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas. Selain itu pengembangan Kawasan Palopo sebagai Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan melalui strategi penguatan pusat-pusat pertumbuhan, dengan arah kebijakan pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata dan pengembangan dan penguatan kewirausahaan, khususnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka pengurangan beban

pengeluaran beban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di kabupaten Toraja Utara, kabupaten Tana Toraja, kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Utara yang persentase angka kemiskinan Tahun 2022 lebih tinggi daripada persentase angka kemiskinan rata rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan besarnya kontribusi kabupaten Luwu Timur terhadap perekonomian wilayah kawasan Palopo, maka strategi lain dalam pengembangan kawasan Palopo adalah mengoptimalkan kontribusi industry pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dan regional Sulawesi Selatan melalui peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif di Kawasan Palopo dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berupa reformasi system kesehatan nasional dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dan pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya di kabupaten Tana Toraja, kabupaten Toraja Utara, kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Luwu yang capaian IPM Tahun 2022 lebih rendah daripada capaian IPM rata rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kawasan Palopo diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jaringan sumber daya air guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, peningkatan kemantapan jalan provinsi dan peningkatan kualitas sarana pelabuhan pengumpan regional serta dukungan peningkatan kapasitas bandar udara dalam upaya meningkatkan konektivitas antara Kawasan Palopo sebagai pusat produksi dengan kawasan lainnya yang merupakan pusat distribusi serta pemenuhan akses air minum.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana dilakukan melalui pemeliharaan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada kabupaten dan kota dengan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim dan potensi bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi di seluruh Kawasan Palopo.

Gambar V. 8
Arah Pengembangan Kawasan Palopo dan sekitarnya, Tahun 2024



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.3. Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata yang diiringi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana serta mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Sulawesi Selatan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif serta penurunan angka kemiskinan dengan mengarusutamakan peningkatan kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indicator pembangunan sebagaimana tabel berikut.

Tabel V. 7
Indikator Makro Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Satuan	RPD Tahun 2024	RPJMN Tahun 2024	Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,23 – 6,71	8,40	6,3 – 6,9
Tingkat Kemiskinan (Sept.)	%	8,31	5,68	6,7 – 7,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,24	4,20	3,59 – 4,3
Rasio Gini	Nilai	0,361	-	0,361 -0,363
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,02	-	74,02
IKLH	Nilai	73,57	-	74,24
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,01 – 4,50 (A-)	-	-

Sumber: Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, dan Berita Acara Kesepakatan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.3.1. Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar dan sekitarnya

Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan wisata berbasis kepulauan dan geopark serta potensi komoditas pertanian dan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, pengembangan wisata bahari yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Optimalisasi peran Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pusat pelayanan jasa dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja investasi dan meningkatkan kembali *share* ekspor Sulawesi Selatan.

Walaupun nilai IPM kabupaten di Kawasan Makassar menunjukkan peningkatan, namun perlu untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indeks pendidikan di kabupaten Pangkepene Kepulauan, kabupaten Takalar dan kabupaten Maros dan dan Indeks Kesehatan di kabupaten Takalar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Pangkajene Kepulauan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Selain itu, Kawasan Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata, yang merupakan target utama penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui peningkatan penggunaan system angkutan massal perkotaan. Sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada penanganan bencana hidrometeorologi berupa bahaya banjir, cuaca ekstrim, dan bahaya gelombang tinggi dan abrasi dengan kelas bahaya tinggi.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Makassar tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pada kawasan perkotaan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 8
Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota pada Kawasan Pembangunan Makassar Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2024
Makassar	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65
	Tingkat Kemiskinan	%	4,07
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,41
	Gini Ratio	Nilai	0,383
	IPM	Nilai	84,07
Gowa	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,67
	Tingkat Kemiskinan	%	6,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,13
	Gini Ratio	Nilai	0,353
	IPM	Nilai	72,26
Maros	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,10

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2024
	Tingkat Kemiskinan	%	8,18
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,90
	Gini Ratio	Nilai	0,351
	IPM	Nilai	72,23
Takalar	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70
	Tingkat Kemiskinan	%	7,47
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49
	Gini Ratio	Nilai	0,364
	IPM	Nilai	69,51
Pangkep	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,79
	Tingkat Kemiskinan	%	12,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,10
	Gini Ratio	Nilai	0,324
	IPM	Nilai	71,03

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.3.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Bulukumba dan sekitarnya

Pembangunan kawasan Bulukumba diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan wisata berbasis kepulauan, pengembangan potensi komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, pengembangan wisata bahari dan peningkatan konektivitas yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah.

Pembangunan Kawasan Bulukumba pada Tahun 2024 akan diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang yang kompetitif dan inklusif mengingat capaian IPM kabupaten Tahun 2022 di Kawasan Bulukumba di bawah rata rata capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan melalui penurunan angka kemiskinan dengan memperhatikan capaian persentase kemiskinan kabupaten Tahun 2022 di Kawasan Bulukumba di atas rata rata capaian persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pembagunan berketahanan bencana diprioritaskan pada Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bulukumba yang merupakan kabupaten dengan potensi rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya cuaca ekstrim dan potensi bahaya tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Bulukumba tahun 2024 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 9
Sasaran Pembangunan Kabupaten Kawasan Pembangunan Bulukumba
Tahun 2024

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024
Bulukumba	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15
	Tingkat Kemiskinan	%	6,77
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,55
	Gini Ratio	Nilai	0,350
	IPM	Nilai	71,69
Jeneponto	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66
	Tingkat Kemiskinan	%	12,63
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,72
	Gini Ratio	Nilai	0,328
	IPM	Nilai	66,34
Sinjai	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,61
	Tingkat Kemiskinan	%	8,18
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,21
	Gini Ratio	Nilai	0,346
	IPM	Nilai	69,58
Bantaeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	8,84
	Tingkat Kemiskinan	%	8,40
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,34
	Gini Ratio	Nilai	0,310
	IPM	Nilai	70,97
Kepulauan Selayar	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,19
	Tingkat Kemiskinan	%	11,03
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,83
	Gini Ratio	Nilai	0,339
	IPM	Nilai	69,44

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.3.3. Sasaran Pembangunan Kawasan Watampone dan sekitarnya

Pembangunan kawasan Watampone diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan lumbung pangan nasional dengan mengembangkan potensi komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, dan peningkatan konektivitas yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Sedangkan pembangunan berketahanan bencana

diprioritaskan pada Kabupaten Bone, kabupaten Soppeng dan kabupaten Wajo yang merupakan kabupaten dengan potensi rawan bencana hidrometeorologi berupa bahaya cuaca ekstrim dan bahaya banjir dengan kelas bahaya tinggi dan potensi bahaya tanah longsor dengan kelas bahaya sedang – tinggi.

Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif di kawasan Watampone merupakan salah satu prioritas pembangunan Sulawesi Selatan dengan memperhatikan capaian IPM di kawasan Watampone Tahun 2022 yang lebih rendah daripada rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Watampone akan dicapai melalui strategi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat mengingat capaian komponen IPM yaitu Usia harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah kabupaten di Kawasan Watampone lebih rendah daripada capaian rata-rata provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Watampone Tahun 2024 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerjadengan target sebagai berikut.

Tabel V. 10
Sasaran Pembangunan Kabupaten Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2024

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024
Bone	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,99
	Tingkat Kemiskinan	%	9,90
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,20
	Gini Ratio	Nilai	0,365
	IPM	Nilai	68,31
Wajo	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,76
	Tingkat Kemiskinan	%	6,04
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,47
	Gini Ratio	Nilai	0,364
	IPM	Nilai	71,54
Soppeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,15
	Tingkat Kemiskinan	%	7,26
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,28
	Gini Ratio	Nilai	0,374
	IPM	Nilai	70,79

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.3.4. Sasaran Pembangunan Kawasan Parepare dan sekitarnya

Pembangunan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai lumbung pangan, oprimalisasi fungsi Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat dan peningkatan kemantapan jalan provinsi. sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada kabupaten dan kota dengan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, gelombang ekstrim dan abrasi kelas bahaya tinggi khususnya kota Parepare, kabupaten Barru dan kabupaten Pinrang dan potensi bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi di seluruh Kawasan Parepare.

Perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dilakukan di Kawasan Parepare diprioritaskan pada kualitas dan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif sebagai upaya mendukung peningkatan ekspor melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pengolahan sumber daya alam yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan, khususnya di kabupaten Pinrang dan kabupaten Enrekang yang angka kemiskinannya lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan rata rata provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di kabupaten Barru, kabupaten Pinrang dan Sidenreng Rappang yang capaian IPM Tahun 2022 lebih rendah daripada capaian IPM rata rata Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada komponen UHH, Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Parepare tahun 2024 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerjadengan target sebagai berikut.

Tabel V. 11
Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Kota Kawasan
Pembangunan Parepare Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024
Parepare	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05
	Tingkat Kemiskinan	%	4,95
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,43
	Gini Ratio	Nilai	0,368
	IPM	Nilai	79,94
Sidenreng Rappang	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,76
	Tingkat Kemiskinan	%	4,52
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,47

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024
	Gini Ratio	Nilai	0,343
	IPM	Nilai	72,25
Barru	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33
	Tingkat Kemiskinan	%	7,74
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,25
	Gini Ratio	Nilai	0,355
	IPM	Nilai	72,39
Pinrang	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60
	Tingkat Kemiskinan	%	8,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,65
	Gini Ratio	Nilai	0,352
	IPM	Nilai	72,57
Enrekang	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90
	Tingkat Kemiskinan	%	11,32
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,47
	Gini Ratio	Nilai	0,336
	IPM	Nilai	74,21

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

5.3.5 Kawasan Pembangunan Palopo dan sekitarnya

Pembangunan kawasan pembangunan Palopo dilakukan melalui pendekatan penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah dalam rangka pengurangan beban pengeluaran beban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di kabupaten Toraja Utara, kabupaten Tana Toraja, kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Utara yang persentase angka kemiskinan Tahun 2022 lebih tinggi daripada persentase angka kemiskinan rata rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif di Kawasan Palopo dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berupa reformasi system kesehatan nasional dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dan pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya di kabupaten Tana Toraja, kabupaten Toraja Utara, kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Luwu yang capaian IPM Tahun 2022 lebih rendah daripada capaian IPM rata rata Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada pada kabupaten dan kota dengan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim dan potensi bencana tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi di seluruh Kawasan Palopo.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Palopo tahun 2024 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerjadengan target sebagai berikut.

Tabel V. 12
Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Kota Kawasan Pembangunan Palopo Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024
Palopo	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65
	Tingkat Kemiskinan	%	7,17
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,87
	Gini Ratio	Nilai	0,360
	IPM	Nilai	79,94
Luwu	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,09
	Tingkat Kemiskinan	%	11,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75
	Gini Ratio	Nilai	0,353
	IPM	Nilai	72,68
Luwu Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94
	Tingkat Kemiskinan	%	12,12
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73
	Gini Ratio	Nilai	0,338
	IPM	Nilai	71,52
Luwu Timur	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,86
	Tingkat Kemiskinan	%	6,08
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,26
	Gini Ratio	Nilai	0,382
	IPM	Nilai	74,87
Tana Toraja	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,59
	Tingkat Kemiskinan	%	11,19
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,26
	Gini Ratio	Nilai	0,344
	IPM	Nilai	71,13
Toraja Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,32
	Tingkat Kemiskinan	%	10,38
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,95
	Gini Ratio	Nilai	0,345
	IPM	Nilai	71,57

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2023

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan, dimana merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah dapat digambarkan bahwa pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp. 10.466.638.912.086,-** yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 6.137.107.642.086,- dan pendapatan transfer sebesar **Rp. 4.322.109.630.000,-** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 7.421.640.000** Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2024, dengan jumlah belanja daerah sebesar **Rp. 10.316.638.912.086,-** dan pembiayaan sebesar **Rp. 150.000.000.000,-**

Belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Struktur Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel VI.1.

Rincian Kerangka Pendanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024

NO.	URAIAN	TARGET	PROYEKSI
		TA. 2024	TA. 2025
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	10,466,638,912,086	11.357.515.009.986
4,1	Pendapatan Asli Daerah	6,137,107,642,086	6.854.927.042.262
4.1.1	Pajak Daerah	5,392,761,494,090	5.710.843.480.425
4.1.2	Retribusi Daerah	48.409.105.600	55.353.734.092
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	137.963.752.246	168.760.544.726
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	557,973,290,150	919.969.283.019

NO.	URAIAN	TARGET	PROYEKSI
		TA. 2024	TA. 2025
1	2	3	4
4,2	Pendapatan Transfer	4.322.109.630.000	4.494.667.435.721
4.2.1	Dana Perimbangan	4.267.538.133.000	4.440.095.938.721
4.2.1.1	Dana Transfer Umum	2.785.140.262.000	2.897.659.928.585
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	259.896.213.000	270.396.020.005
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	2.525.244.049.000	2.627.263.908.580
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	1.482.397.871.000	1.542.436.010.136
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	314.693.468.000	1.542.436.010.136
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	1.167.704.403.000	-
4.2.2	Dana Insentif Daerah	54.571.497.000	54.571.497.000
4,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	7.421.640.000	7.920.532.003
4.3.1	Hibah	7.421.640.000	7.920.532.003
5	BELANJA DAERAH	10.316.638.912.086	11.357.515.009.986
5.1.	Belanja Operasi	6.286.781.616.470	5.705.310.456.652
5.1.01	Belanja Pegawai	3.362.873.474.946	3.647.344.609.048
5.1.02	Belanja Barang & Jasa	2.124.468.940.724	1.942.947.978.804
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	20.000.000.000	20.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	776.989.200.800	90.737.868.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.450.000.000	4.280.000.000
5.2.	Belanja Modal	1.838.230.183.859	2.579.569.436.205
5.2.01	Belanja Modal	1.838.230.183.859	2.579.569.436.205
5.3.	Belanja Tidak Terduga	32.000.000.000	40.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.000.000.000	40.000.000.000
5.4.	Belanja Transfer	2.159.627.111.757	2.867.635.117.129
5.4.01	Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes	2.129.627.111.757	2.600.171.570.129
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes	30.000.000.000	267.463.547.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000.000	165.000.000.000
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	135.000.000.000	135.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	30.000.000.000

Sumber : BKAD dan Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2024-2026

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 5(Lima) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif dengan 2 sasaran dan dijabarkan dalam 9 (Sembilan program prioritas, prioritas kedua Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata dengan 1(satu) sasaran dijabarkan ke dalam 8 (Delapan) Program, Prioritas pembangunan ke 3 Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah

dengan 1 (satu) Sasaran yang dijabarkan kedalam 9 (Sembilan) Program; Priritas Pembangunan ke 4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata dengan 4 (Empat) sasaran yang dijabarkan kedalam 15 (lima belas) program, dan untuk prioritas pembangunan ke 5 (Lima) Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2024 adalah sebanyak 5 (Lima) prioritas pembangunan dengan 9 (sembilan) sasaran, dan 50 (Lima Puluh) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel VI.2. berikut.

Tabel VI.2.
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
I							51.433.415.721,00	69.612.625.600,35	
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	50%	3.659.521.967,00	10.216.343.257,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	50%			
					Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100%			
					Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	6 Sertifikat			
			2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	65	5.518.938.200,00	4.259.158.848,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
					Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	85			
					Persentase ASN	93			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					berkinerja baik dan sangat baik				
			3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	100%	3.604.445.846,00	4.638.872.313,00	Biro Organisasi
			4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD	100 %	5.981.772.438,00	5.962.408.574,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					% Konsistensi Program RKPD terhadap APBD	100 %			
					Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah	91%			
			5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	81%	19.751.106.000,00	21.659.135.903,35	INSPEKTORAT
					Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten / Kota	74%			
					Persentase OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat	100%			
			6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi	50%	3.574.000.000,00	5.597.775.790,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				INFORMATIKA	Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi				PERSANDIAN
					Persentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Jaringan Internet Intra Pemerintah Sulawesi Selatan	44%			
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	40	5.438.631.270,00	9.734.021.917,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	92%	1.120.000.000,00	1.652.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.	30 %	2.785.000.000,00	5.892.908.998,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi	13 %			
II							865.302.620.361,55	947.013.975.433,56	
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	76%	596.100.311.479,00	659.647.214.566,88	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	6046 Ha	134.116.183.943,55	94.567.414.185,94	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
					Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	100%			
			12	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	1.779.975	3.830.000.000,00	4.820.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah pelabuhan Pengumpan yang beroperasi	100%			
			13	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISRIKAN	Persentase Rumah Tangga berListrik	100	2.466.052.372,00	957.597.059,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	100	102.565.000.000,00	179.461.691.699,74	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
					Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi	100%			
			15	PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Air Limbah Domestik Regional Lintas kab/Kota (SPM)	95	150.000.000,00	105.236.362,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
					Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah	100%			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					Domestik kewenangan provinsi				
			16	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	4,46 %	3.045.477.093,00	1.334.821.560,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			17	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak dan aman di kawasan permukiman	26,67%	21.363.021.857,00	3.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					Persentase kawasan permukiman yang terbangun drainase	25,71%			
					Persentase kawasan permukiman yang terbangun jalan lingkungan	16,67%			
			18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (SPM)	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni(SPM)	100%	1.666.573.617,00	2.670.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni(SPM)	100%			
III									

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
							239.939.226.460,00	317.039.425.208,00	
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	19	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	11933560000	27.305.000.000,00	32.619.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah produksi perikanan tangkap	442.959,60			
					Cakupan Bina Kelompok Nelayan	29%			
					Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	30.62%			
					Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	84,21			
			20	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	#####	7.653.000.000,00	11.345.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Produksi perikanan budidaya	4.331.299,7			
					Persentase ketersediaan benur berkualitas	85%			
			21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2	181.459.324.600,00	235.948.255.908,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase Peningkatan	2			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					Produksi Hortikultura				
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	2			
					Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	56.290.226.087			
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	1,16	10.646.083.382,00	9.380.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	2,12			
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	2,73			
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah	2,23			
			22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	391.940.000,00	1.630.400.000,00	2.815.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Produksi olahan ikan	6.150,43			
					Persentase pengujian mutu produk perikanan	100			
			23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	7,0%	4.446.672.433,00	15.650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			24	PROGRAM	Nilai Ekspor Perdagangan	1.881.893.365			DINAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				PENGEMBANGAN EKSPORT			540.000.000,00	2.540.000.000,00	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			25	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	0,7	3.575.321.888,00	2.031.513.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
					Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata Ramah Muslim (Muslim Friendly)	12,5			
			26	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	10	2.683.424.157,00	4.710.056.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	3			
IV							1.328.014.884.874,00	1.439.294.354.936,00	
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	27	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)		745.753.240,00	684.828.564,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase daya serap tenaga kerja				
			28	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,50	5.045.501.655,00	4.577.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	4,50			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			29	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	85,00%	5.803.435.124,00	3.870.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	100,00%			
			30	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	10	6.871.800.000,00	4.025.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Menurunya angka kemiskinan	31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	100%	2.330.969.099,00	3.078.896.524,00	DINAS SOSIAL
			32	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH	1,75	334.504.400,00	2.657.920.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			33	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap	0,0076	60.241.468.610,00	73.608.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				PERTANIAN	luasan lahan pertanian				
					Nilai Produksi Hasil Ternak (Juta)	10.248.954	586.189.700,00	3.230.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			34	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	100%	1.457.984.600,00	2.032.841.721,00	DINAS SOSIAL
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%			
			35	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL(SPM)	Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti	100%	3.051.582.500,00	4.447.398.525,00	Dinas Sosial
					Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			
					Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100%			
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	89,25	922.174.613.347,00	905.917.479.735,00	DINAS PENDIDIKAN
					Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	95,38			
					Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	100			
					Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	100			
					Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam	100			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					pendidikan Khusus (SPM)				
			37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	% Pemenuhan SDM Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85%	1.722.485.000,00	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang / Bulan)	189	5.529.059.304,00	5.529.059.304,00	RSUD HAJI
					Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi (%)	5	50.000.000,00	50.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
					Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	70	400.000.000,00	400.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
					Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan(%)	100	250.000.000,00	250.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
					Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi (%)	100	245.248.314,00	700.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	% Rumah Sakit yang Terakreditasi	85%	120.548.707.961,00	112.386.029.935,00	DINAS KESEHATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%			
				Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%			
				% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	95%			
				% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	90%			
				Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)	75%			
				Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	97%			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	10/100.000 Penduduk			
					% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular	90%			
					Persentase Pemenuhan Permintaan Kebutuhan Darah Pada Fasilitas Kesehatan (%)	80	10.630.000.000,00	5.930.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
					Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	85	7.710.132.460,00	7.710.132.460,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
					Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)	100	2.449.335.280,00	2.449.335.280,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
					Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)	100	19.942.162.200,00	17.362.677.219,00	RSUD LABUANG BAJI
					Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)	100	1.367.872.471,00	1.367.872.471,00	RSUD HAJI
					Cakupan pemenuhan	100			RS KHUSUS DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)		700.000.000,00	400.000.000,00	DADI
					Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)	100	2.119.929.584,00	7.550.000.000,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
					Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)	100	200.000.000,00	20.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
					Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik(%)	65.76	400.000.000,00	5.786.908.815,00	RSUD SAYANG RAKYAT
					Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)	65	39.381.421.837,00	35.150.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			39	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi olah raga	0,4	104.091.930.788,00	225.322.881.983,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	45			
		Meningkatnya	40	PROGRAM	Persentase Pemenuhan	65%			DINAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan		PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi		665.000.000,00	880.000.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Persentase ARG di Tingkat Provinsi	40%			
					Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	35,5%			
			41	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	87,5%	472.705.000,00	645.000.000,00	
			42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	54,16%	495.092.400,00	575.092.400,00	
V							36.291.362.957,00	41.646.494.028,00	
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan	43	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	21,15	6.927.847.280,00	5.292.514.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)		Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		mitigasi perubahan iklim							
					Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	11,91			
					Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	0,029			
					Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	3,57			
			44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	100	209.083.600,00	1.800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
					Persentase Petani Yang Menerapkan Teknologi	50	2.000.000.000,00	5.800.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatnya Kapasitasnya	10			
			45	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Energi (Ton CO2 eq)	1,3	1.527.104.753,00	1.679.815.228,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			46	PROGRAM	Penurunan emisi GRK	334728.000			DINAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	sektor transportasi (Ton)		8.724.000.000,00	6.550.000.000,00	PERHUBUNGAN
					Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (%)	5.000			
					Jumlah penumpang melalui terminal (Orang)	628.431			
					Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan (%)	33.780			
			47	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	8.116.593,22	9.735.000.000,00	8.756.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah produksi garam rakyat	5.000,00			
					Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	56,89			
			48	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi emisi GRK dari sektor limbah	15257,36	703.619.800,00	2.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	55	127.000.000,00	800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			50	PROGRAM	Persentase Korban	100			SATUAN POLISI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator Program	Target 2024		Perkiraan Anggaran	Perangkat Daerah	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Tahun 2025		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				PENANGGULANGAN BENCANA	Bencana yang tertangani (%)		325.347.524,00	835.000.000,00	PAMONG PRAJA
					Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100	6.012.360.000,00	7.182.414.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	100			
					Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	100			
TOTAL							2.520.981.510.373,55	2.814.606.875.205,91	

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

6.3. Rencana Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Perumusan Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota.

Perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal,serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian Tujuan dan Sasaran pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang disertai dengan indikator dan terget kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

TABEL VI.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		GRAND TOTAL					10,466,638,912,086.00							11,050,400,735,024.80	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5,019,470,825,710.00							5,376,895,904,837.82	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					3,008,323,654,756.00							3,229,622,342,015.00	
		DINAS PENDIDIKAN					3,008,323,654,756.00							3,229,622,342,015.00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2,062,030,812,601.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			2,260,462,522,632.00	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Realisasi Kegiatan Persentase ASN Perangkat Daerah Persentase Penurunan Temuan			100 100 100									
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.156.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)					0		
	1.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.451.040.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00	3.00	10.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.00			
			FGD SPM Bidang Pendidikan (Kegiatan)			1	324.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Data Pendidikan (Perjadin) (Kegiatan)			1	400.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Rakor Cabang Dinas Pendidikan Wil. I XII (Kegiatan)			1	403.040.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Rakor Forum Perangkat Daerah (Kegiatan)			1	324.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	1.01.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					981.280.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.01.01.1.01.000 3		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1.00		DINAS PENDIDIKAN	
			Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS pada Stuan Pendidikan SMA/SMK dan SLB (Kegiatan)			1	807.280.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
			Workshop Penyusunan Dokumen RKA (Kegiatan)			1	174.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					174.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		300.000.000,00		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	1.00	1.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1.00			
			Workshop Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (Kegiatan)			1	174.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.01.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					174.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1.00			
			Workshop Penyusunan Dokumen DPA (Kegiatan)			1	174.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					174.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		300.000.000,00		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	1.00	1.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1.00			
			Workshop Penyusunan Dokumen Perubahan DPA (Kegiatan)			1	174.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.01.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1.00	1.00	2.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.01.1.01.000 7		Penyusunan Laporan Capaian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Bulanan/Triwulan/Semister (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.101.680.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	5.00	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.00	1.00	1.00	(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
			Penyusunan LPPD, LKPJ, Renstra, LAKIP, Renja (Kegiatan)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Rakor Kepala Sekolah (Kegiatan)			1	408.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Rakor Pendidikan Keluarga (Kegiatan)			1	104.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
Uang Lembur (Tahun)			1	389.680.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan						
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.036.178.860.631,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	0	2.228.212.522.632,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			10	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.01.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.036.178.860.631,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	17000.00	2.227.462.522.632,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14000.00	15000.00	16000.00	(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)			1	2.036.178.860.631,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.01.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		500.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.01.1.02.000 4		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12.00	12.00	12.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	12.00		
			Kertas Gaji (Tahun)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					-	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	12.00	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12.00	12.00	12.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
		Fotocopy Dokumen (Tahun)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	1.01.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	4.00	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan			4.00	4.00	4.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Uang Lembur (Tahun)			1	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					10.483.902.953,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		18.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			10	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	0			
	1.01.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	12.00	12.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	12.00	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.01.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) (Tahun)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
							3.388.275.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	12.00	12.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik , Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	12.00		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Tahun)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tahun)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran (Tahun)			1	5.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik			
			Belanja Modal Alat Pendingin (Tahun)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik			
			Belanja Modal Mebel (Tahun)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik			
			Belanja Modal Peralatan Cetak (Tahun)			1	5.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik			
			Notebook (Tahun)			1	86.775.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik			
			Pembelian AC Standing Floor (Unit)			4		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pengadaan Laptop (Unit)			300	3.000.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik			
			Printer (Tahun)			1	91.500.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN lingkup Disdik			
1.01.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup Disdik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.01.01.1.06.000 8		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12.00	12.00	12.00		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik	12.00			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.094.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup Disdik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu Dinas	12			
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tahun)			1	544.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu Dinas				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tahun)			1	550.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu Dinas				
	1.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.295.627.953,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tamu Dinas		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik	12			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Tahun)			1	1.295.627.953,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik				
	1.01.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						4.606.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup Disdik		15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	10	10		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik	10			
			Belanja Sewa Layanan Zoom Meeting (Tahun)			1	3.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik				
			Belanja Sewa Layanan Zoom Meeting (Tahun)			1	3.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik				
			Pengadaan Server Pendidikan (Paket)			1	4.000.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pengembangan Aplikasi Bursa Guru (Paket)</i>			1	100.000.000,00	<i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
			<i>Pengembangan Aplikasi Data Center (Paket)</i>			1	100.000.000,00	<i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
			<i>Pengembangan Aplikasi Smart School (Paket)</i>			1	100.000.000,00	<i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
			<i>Pengembangan Aplikasi TPP (Paket)</i>			1	100.000.000,00	<i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
			<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Simpeg (Paket)</i>			1	100.000.000,00	<i>(Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
			<i>Pengembangan Website Disdik (Paket)</i>			1	100.000.000,00	<i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)</i>			10	2.054.034.581,00	<i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Enrekang, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup Disdik <i>ASN lingkup Disdik</i>	0	2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> <i>Belanja Sewa Kendaraan Operasional Dinas (Tahun)</i>	10	10	10	454.034.581,00	<i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i>	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup Disdik <i>ASN lingkup Disdik</i>	10	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)</i> <i>Pengadaan Mebel Cabang Dinas (Paket)</i>	15	15	15	100.000.000,00	<i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)</i>	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup Disdik <i>ASN lingkup Disdik</i>	15	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	 												

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					6.341.214.744,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup DIsdik		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 orang, 20 orang, 24 orang, 6 orang, ASN lingkup DIsdik	12		
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Tahun)			1	8.640.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Tahun)			1	10.800.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Tahun)			1	237.236.400,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tahun)			1	622.273.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Belanja Jasa Tenaga Ahli Smart School (Tahun)			1	1.348.800.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 orang			
			Belanja Jasa Tenaga Disabilitas (Tahun)			1	75.981.024,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Tahun)			1	622.273.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Tahun)			1	622.273.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Belanja Jasa Tenaga Supir (Tahun)			1	75.981.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Belanja Jasa Tenaga Terampil Smart School (Tahun)			1	632.400.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Tahun)			1	162.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Honor Guru Smart School Non ASN (Tahun)			1	379.905.120,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Jasa Kebersihan SMKN AFIRMASI Bone (Tahun)			1	812.434.800,00	(Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 orang			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jasa Pengamanan SMKN AFIRMASI Bone (Tahun) Jasa Tenaga Kesehatan SMKN AFIRMASI Bone (Tahun) Jasa Tukang Cuci SMKN AFIRMASI Bone (Tahun)			1 1 1	406.217.400,00 180.000.000,00 144.000.000,00	(Bone, SULAWESI SELATAN) (Bone, SULAWESI SELATAN) (Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 orang 6 orang 6 orang			
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					935.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Mengkendek, KAB. TANA TORAJA)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	6 orang		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)			6 orang	0			
	1.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					200.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	6 orang		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	29		(Disdik Sulawesi Selatan, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik	29		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Tahun)			1	150.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Tahun)			1	50.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
	1.01.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup Disdik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	29	29		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik	29		
	1.01.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (Tahun)			1	100.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	50		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik	50		
			Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor AC (Tahun)			1	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disdik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					425.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup DIsdik		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	6		(Disdik Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik	6		
			Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi (Tahun)			1	25.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
			Rehab Gedung Guru (Tahun)			1	200.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik			
		Rehab Gedung Kantor Dinas Pendidikan (Tahun)			1	200.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup DIsdik				
	1.01.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN lingkup DIsdik		-	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana pengembangan sarana dan prasarana (Paket)	0	0			(Kecamatan Mengkendek, KAB. TANA TORAJA)	DANA UMUM			-			
						1	200.000.000,00		DANA UMUM			-			
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					922,174,613,347.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			905,917,479,735.00	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Jumlah Warga Negara			100,00			DANA UMUM			-			
			Persentase jumlah warga negara			100,00			DANA UMUM			-			
			Persentase siswa SMA/SMK yang			89.250			DANA UMUM			-			
			Persentase SMA/SMK yang bebas			95.380			DANA UMUM			-			
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					575.710.880.051,00	[Pinrang , SULAWESI SELATAN), (ENREKANG , SULAWESI SELATAN), (Sinjai , SULAWESI SELATAN), (Tana Toraja , SULAWESI SELATAN), (Jeneponto, SULAWESI SELATAN), (SMAN 7 Makassar Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, SULAWESI SELATAN), (Jl.Laupe Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, SULAWESI SELATAN), (Luwu Timur, SULAWESI SELATAN), (Luwu			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-		570.311.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.01.000 1		Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)			100		Timur, SULAWESI SELATAN), (Enrekang, SULAWESI (Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				-	100		
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	3	3	3	4.000.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	3	15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan USB SMAN 23 Makassar (Paket)			1	3.000.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan, Siswa			
			Pembangunan USB SMAN 26 Pangkep (Paket)			1	1.000.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN) (Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa Satuan Pendidikan			
	1.01.02.1.01.000 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2.300.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN), (Sidrap , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (BONE , SULAWESI SELATAN), (Maros , SULAWESI SELATAN), (Pangkep , SULAWESI SELATAN), (Bulukumba , SULAWESI SELATAN), (Sinjai , SULAWESI SELATAN), (Luwu , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan		4.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan, siswa, Siswa, Siswa	10		
			Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAIT ANDALAN BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(BONE , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 10 Sidrap (Ruang)			1	300.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa			
			Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 11 Bulukumba (Ruang)			1	300.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 11 Gowa (Ruang)			1	300.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.01.02.1.01.001 0	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 14 Luwu (Ruang) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 5 Maros (Paket) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 8 Pangkep (Ruang) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 8 Sinjai (Ruang)	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 14 Luwu (Ruang)			1	300.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa				
			Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 5 Maros (Paket)			1	300.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa				
			Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 8 Pangkep (Ruang)			1	300.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa				
			Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMAN 8 Sinjai (Ruang)			1	300.000.000,00	(Sinjai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan				
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						920.800.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN), (Gowa , SULAWESI SELATAN), (Bantaeng , SULAWESI SELATAN), (Takalar , SULAWESI SELATAN), (Maros , SULAWESI SELATAN), (Wajo , SULAWESI SELATAN), (Pangkep , SULAWESI SELATAN), (Bulukumba , SULAWESI SELATAN), (Sinjai , SULAWESI SELATAN), (Luwu Utara , SULAWESI SELATAN), (Luwu , SULAWESI SELATAN), (Sidrap Sulawesi Selatan)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan		4.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	21	21	21	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21						
			Pembangunan ruang UKS SMAN 10 LUWU (Ruang)			1	(Luwu , SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pembangunan ruang UKS SMAN 10 WAJO (Ruang)			1	(Wajo , SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pembangunan ruang UKS SMAN 12 WAJO (Ruang)			1	(Wajo , SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pembangunan ruang UKS SMAN 14 BULUKUMBA (Ruang)			1	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pembangunan ruang UKS SMAN 16 GOWA (Ruang)			1	(Gowa , SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pembangunan ruang UKS SMAN 25 BONE (Ruang)			1	(Bone , SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan ruang UKS SMAN 2 SINJAI (Ruang)			1	57.550.000,00	(Sinjai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 4 BULUKUMBA (Ruang)			1	57.550.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 5 BANTAENG (Ruang)			1	57.550.000,00	(Bantaeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 6 TANA TORAJA (Ruang)			1	57.550.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 7 LUWU TIMUR (Ruang)			1	57.550.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 8 PANGKEP (Ruang)			1	57.550.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 8 TAKALAR (Ruang)			1	57.550.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 9 LUWU UTARA (Ruang)			1	57.550.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 9 MAROS (Ruang)			1	57.550.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan ruang UKS SMAN 9 SIDRAP (Ruang)			1	57.550.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
1.01.02.1.01.001 1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						1.110.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN), (Tana Toraja , SULAWESI SELATAN), (Pangkep , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		6.024.941.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	DANA UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa, SMAN 10 TANA TORAJA			10			
		Pembangunan ruang perpustakaan SMAN 10 TANA TORAJA (Ruang)			1	370.000.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN)	DANA UMUM	SMAN 10 TANA TORAJA						
		Pembangunan ruang perpustakaan SMAN 16 LUWU UTARA (Ruang)			1	370.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa						
		Pembangunan ruang perpustakaan SMAN 18 PANGKEP (Ruang)			1	370.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.1.01.001 2	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)					6.000.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN), (Gowa , SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN), (Sidrap , SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Maros , SULAWESI SELATAN), (Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa	1.773.824.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
				10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa, Siswa	10				
			Pembangunan Ruang Serba Guna SMAN 10 MAROS (Ruang)			1	750.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa					
			Pembangunan Ruang Serba Guna SMAN 2 MAKASSAR (Ruang)			1	1.500.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Siswa					
			Pembangunan Ruang Serba Guna SMAN 3 BONE (Ruang)			1	750.000.000,00	(Bone , KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa					
			Pembangunan Ruang Serba Guna SMAN 3 SIDRAP (Ruang)			1	750.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa					
			Pembangunan Ruang Serba Guna SMAN 4 GOWA (Ruang)			1	750.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa					
			Pembangunan Ruang Serba Guna SMAN 4 LUWU TIMUR (Ruang)			1	750.000.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa					
			Pembangunan Ruang Serba Guna SMAN 6 LUWU (Ruang)			1	750.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa					
			1.01.02.1.01.001 3	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)					1.500.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
	2	2				2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa	2				
Pembangunan Asrama Sekolah SMAN 12 Pangkep (Ruang)						1	750.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.1.01.001 4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Asrama Sekolah SMAN 13 Pangkep (Ruang)				1	750.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25	25	25		3.950.000.000,00	(Takalar , SULAWESI (Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya	04.Peningkatan Kesejahteraan	siswa	25	15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan Mushollah SMAN 10 TAKALAR (Paket)			1	100.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 11 LUWU TIMUR (Paket)			1	100.000.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa`			
		Pembangunan Mushollah SMAN 12 ENREKANG (Paket)			1	100.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 15 BULUKUMBA (Paket)			1	100.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 16 BULUKUMBA (Paket)			1	100.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 17 BULUKUMBA (Paket)			1	100.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 17 LUWU (Paket)			1	100.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 19 BULUKUMBA (Paket)			1	100.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 19 LUWU UTARA (Paket)			1	100.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 19 Pangkep (Paket)			1	200.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 21 GOWA (Paket)			1	100.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 22 GOWA (Paket)			1	100.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 23 BONE (Paket)			1	100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 25 BONE (Paket)			1	100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 27 BONE (Paket)			1	100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 5 PANGKEP (Paket)			1	100.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 6 PANGKEP (Paket)			1	100.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
		Pembangunan Mushollah SMAN 6 SELAYAR (Paket)			1	100.000.000,00	(Selayar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
										NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.01.02.1.01.001 5			Pembangunan Mushollah SMAN 9 JENEPONTO (Paket)			1	100.000.000,00	(Jeneponto , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan Mushollah SMAN 9 SIDRAP (Paket)			1	100.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan ruang Bimbingan Konseling SMAN 11 Bulukumba (Ruang)			1	300.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan ruang Bimbingan Konseling SMAN 12 ENREKANG (Ruang)			1	300.000.000,00	(ENREKANG , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan ruang Bimbingan Konseling SMAN 9 LUWU (Ruang)			1	300.000.000,00	(LUWU , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan Toilet SMAN 15 MAKASSAR (Paket)			1	150.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan Toilet SMAN 18 LUWU (Paket)			1	150.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan Toilet SMAN 26 BONE (Paket)			1	150.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan Toilet SMAN 5 BARRU (Paket)			1	150.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan Toilet SMAN 6 Bantaeng (Paket)			1	200.000.000,00	(Bantaeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan Toilet SMAN 6 SOPPENG (Paket)			1	150.000.000,00	(Soppeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Pembangunan Fasilitas Parkir							100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN), (Jeneponto, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)		4	4	4		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa	4		
				Pembangunan Fasilitas Parkir SMAN 14 BONE (Paket)				1	100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
	1.01.02.1.01.001 6	Pembangunan Kantin Sekolah						700.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		407.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		4	4	4		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	4				
			Pembangunan Kantin SMAN 13 Makassar (Paket)				1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.1.01.001 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Kantin SMAN 3 BONE (Paket)				1	100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		pengembangan sarana dan prasarana kantin (Paket)				1	200.000.000,00	(SMAN 17 Jl. Sunu No.11, Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		pengembangan sarana dan prasarana kantin (Paket)				1	200.000.000,00	(SMAN 2 MAKASSAR Jl. Baji Gau No.17, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
							3.800.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN), (Bantaeng , SULAWESI SELATAN), (Luwu Timur, SULAWESI SELATAN), (Barru , SULAWESI SELATAN), (Pangkep , SULAWESI SELATAN), (Luwu , SULAWESI SELATAN), (Toraja Utara, SULAWESI SELATAN), (Pangkep, SULAWESI SELATAN), (Parepare , SULAWESI SELATAN), (Sidrap , SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN), (Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa	4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25	25	25			(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	25		
		Rehab RKB SMAN 1 BANTAENG (Ruang)				2	400.000.000,00	(Bantaeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		Rehab RKB SMAN 1 BARRU (Ruang)				2	400.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		Rehab RKB SMAN 1 PANGKEP (Ruang)				1	200.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		Rehab RKB SMAN 2 PANGKEP (Ruang)				1	200.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		Rehab RKB SMAN 3 BONE (Ruang)				2	400.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		Rehab RKB SMAN 4 LUWU TIMUR (Ruang)				2	400.000.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.01.02.1.01.002 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehab RKB SMAN 5 MAKASSAR (Ruang)			1	200.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehab RKB SMAN 6 MAKASSAR (Ruang)			1	200.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehab RKB SMAN 7 GOWA (Ruang)			2	400.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehab RKB SMAN 7 MAKASSAR (Ruang)			1	200.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehab RKB SMAN 9 BULUKUMBA (Ruang)			2	400.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehab RKB SMAN 9 LUWU (Ruang)			2	400.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
	1.01.02.1.01.002 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						1.000.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN), (Barru, SULAWESI SELATAN), (Barru , SULAWESI SELATAN), (LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN), (Pinrang , SULAWESI SELATAN), (Pangkep , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25	25	25		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	25			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMAN 2 BARRU (Ruang)			1	200.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMAN 2 PANGKEP (Ruang)			1	200.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMAN 3 ENREKANG (Ruang)			1	200.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMAN 3 LUWU UTARA (Ruang)			1	200.000.000,00	(LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMAN 4 BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.01.02.1.01.002 3		Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25	25	25		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	25			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika SMAN 29 BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(Bone ,SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						200.000.000,00	(Bone ,SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20	20	20		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa			20			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia SMAN 2 BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(Bone ,SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa						
	1.01.02.1.01.002 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						200.000.000,00	(Parepare ,SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25	25	25		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa			25			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer SMA NEGERI 1 PAREPARE (Ruang)			1	200.000.000,00	(Parepare ,SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa						
	1.01.02.1.01.002 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						200.000.000,00	(Bone ,SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25	25	25		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa			25			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa SMAN 17 BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(Bone ,SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa						
	1.01.02.1.01.002 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						50.000.000,00	(Bone ,SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	25	25		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa			25			
			Rehabilitasi ruang UKS SMAN 4 BONE (Ruang)			1	50.000.000,00	(Bone ,SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.01.002 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					200.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	10		
			Rehabilitasi ruang perpustakaan SMAN 9 GOWA (Ruang)			1	200.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
	1.01.02.1.01.002 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula					200.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN), (Barru, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	10		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SMAN 1 BARRU (Ruang)			1	200.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
	1.01.02.1.01.003 6	Pengadaan Mebel Sekolah					14.940.000.000,00	(Luwu, SULAWESI SELATAN), (Parepare, SULAWESI SELATAN), (Wajo, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Barru, SULAWESI SELATAN), (24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	22	22	22		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	22		
			Mebel Ruang Kepala Sekolah 10 SMA (Paket)			1	700.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Mebel Ruang Laboratorium Bahasa 5 SMA (Paket)			1	450.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Mebel Ruang Laboratorium Biologi 21 SMA (Paket)			1	1.890.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Mebel Ruang Laboratorium Fisika 20 SMA (Paket)			1	1.800.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RILAU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RILAU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RIAJA, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>pengembangan sarana dan prasarana (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(Pengadaan Mobiler Sekolah SMAN 4 Soppeng (Volume 100 Unit) Anggaran Rp 300.000.000, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			<i>pengembangan sarana dan prasarana (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMAN 21 Makassar kel. Taalanrea Kec. Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			<i>pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMAN 3 GOWA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			<i>pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMAN 11 JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			<i>pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMAN 7 JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			<i>Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMAN 20 MAKASSAR Jl. Bonto Biraeng, Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			<i>Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 6 Luwu Utara, Kec. Malangke, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			<i>Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(Bontomanai, Kec. Rumbia, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			<i>Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMAN 16 MAKASSAR Jl. Amanagappa No.8, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 MAKASSAR Jl. Baji Gau No.17, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Kota Benteng- Tongketongke Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Bontosinde No. 5 Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Palajau, Kec. Arungkeke, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Campagaya, Bontoramba, Kec. Bontoramba, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl.Kemiri No.04 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. M. Basir No. 3 Bontosunggu, Empoang, Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Langkura, Kec. Turatea, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Bontorannu, Bangkala, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl. PAHLAWAN TOLO, Tolo, Kec. Kelara, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl. Poros Takalar - Jeneponto, Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl. Abd Jalil Sikki, Panaikang, Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl. Poros Loka, Bonto Tallasa, Kec. Ulu Ere, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl. Daud Dg. Lili No. 17 tanetea, Bontotangnga, Kec. Tamalatea, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(kec herlang, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(SMA Negeri 9 Luwu Utara, Kec. Mappadeceng, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Ulugalung, Kec. Eremerasa, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	500.000.000,00	(Toraja Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Dallemambua, Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl Elang No.52, Pallantikang, Kec. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jln. Poros Baruia-Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Poros Bantaeng-Bulukumba, Tanetea, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl. St. Hasanuddin No.8, Bonto Atu, Kec. Bissappu, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(SMA N 2 Rantepao, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl. Pelajar No.1 Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jl. TA. Gani No.23, Bonto Atu, Kec. Bissappu, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Dusun Bonto Bulaeng Desa Batang, KecamatanTaka Bonerate, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.01.003 8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					200.000.000,00	(Barru, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	25	25	25		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	25		
			Pengadaan Tempat Tidur SMAN 6 Barru (Paket)			1	200.000.000,00	(Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
	1.01.02.1.01.003 9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					1.000.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		1.125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50	50	50		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	50		
			Pengadaan Tas (Paket)			1	1.000.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
	1.01.02.1.01.004 0	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah					30.290.000.000,00	(Gowa, SULAWESI SELATAN), (Parepare, SULAWESI SELATAN), (Takalar, SULAWESI SELATAN), (24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN), (Bone, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		7.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (Unit)	40	40	40		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah, siswa	40		
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. M. Basir No. 3 Bontosunggu, Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA di wilayah Kabupaten Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa/Kel. Romanglompoa, Kec. Bontomarannu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 3 SOPPENG, Lalabata riaja, kec donri- donri, kab soppeng, sulawesi selatan, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan Rumbia, Desa Rumba, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 Maros, Lingkungan Bontoa, Kelurahan Bontoa, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			2	140.000.000,00	(Kel. Bonto Atu, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Labuangbaji Mattoangin, Langkura, Kec. Turatea, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Pelajar No. 1 Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	250.000.000,00	(Semua SMA di Wilayah Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(SMAN 5 WAJO. jl. kemakmuran, ongkoe, kec, belawa, kab wajo, sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Desa/Kel Parigi, Kec. Tinggi Moncong, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(SMAN 2 SOPPENG jl.H.A. mahmud no 69, cangadi, appanang, kec liliraja, kab soppeng, sulawesi selatan, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(SMAN 5 Maros, Dusun Abbekae, Desa Damai, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan, Bontorannu, Kec. Bangkala, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Dusun Bontobulaeng Desa Batang Kecamatan Takabonerate, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	2.000.000.000,00	(Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa/Kel Cikoro, Kec. Tompobulu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 1 SOPPENG jl.samudra,botto,kec, Lalabata, sulawesi selatan, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 WAJO, jl, parepare no 3, mattirowalie, kec. maniang pajo, kab wajo sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pahlawan, Tolo, Kec. Kelara, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	1.500.000.000,00	(10 Kecamatan kabupaten Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Pendidikan No. 50 Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 8 Mandai Maros, Desa Tenrigangkae, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln.R.A Kartini No. 17 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 SOPPENG jl.neneurang no 178,bila, kec. Lalabata, kab soppeng, sulawesi selatan, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Campagaya, Bontoramba, Kec. Bontoramba, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa/Kel. Kalebajeng, Kec. Bajeng, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 WAJO . bulete, kec.pitumpanua, kab wajo, sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 7 Mallawa Maros, Lingkungan Topoing, Kelurahan Sabila, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Malino, Kec Tinggi Moncong, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 14 Maros, Desa Moncongloe Bulu, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RIAJA, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 3 Pangkep Jl. A. Mappe, Kel./Desa. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Camba-Camba, Kec. Batang, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. TA. Gani No.23, Bonto Atu, Kec. Bissappu, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 3 WAJO, Jl, rusa no 1, mattirotappareng, kec, tempe, sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba Opu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl Kota Benteng-Tongketongke, Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 13 Maros, Dusun Puncak, Desa Pucak, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 Maros, Lingkungan Pakalu, Kelurahan Kalabbirang, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl Poros Takalar - Jeneponto, Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. BONTOSINDE NO. 5 Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 WAJO , jl, poros sengkang-palopo, no.km 25, limpomajang kec, majauleng kab, wajo, sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	1.000.000.000,00	(Kab. Pangkep Kab Maros. kab Barru. kab Bone Kota pare-pare, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba Opu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. MALUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Abd Jalil Sikki, Panaikang, Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Kemiri No. 4 Benteng Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Poros Loka, Bonto Tallasa, Kec. Ulu Ere, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 WAJO , jl. poros sengkang-palopo, no.km 25, limpomajang kec, majauleng kab, wajo, sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 3 Maros, Kelurahan Maccini Baji, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pahlawan Poros Pullauweng, Mamampang, Kec. Ere Merasa, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 12 Maros, Desa Limampoccoe, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Daud Dg. Lili No. 17 tanetee, Bontotangnga, Kec. Tamalatea, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan No.50, Panaikang, Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Poros Barua-Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Elang No.52, Pallantikang, Kec. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 Maros, Lingkungan Mario, Kelurahan Mario Pulana, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Tamallayang, Kec. Bontonompo, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Poros Bantaeng-Bulukumba, Tanetea, Nipa-Nipa, Kec. Pa'jukukang, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA di Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 11 Maros, Lingkungan Masembo, Kelurahan Baju Bodoa, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 10 WAJO , Jl, poros cabenge-sengkang, wage, sabbang paru, kab wajo sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 1 WAJO jl, lamungkace toaddamang, paddupa, kab wajo, sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. St. Hasanuddin No.8, Bonto Atu, Kec. Bissappu, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 1 Maros, Lingkungan Kassi Polong, Kelurahan Alliritengae, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 10 Pangkep Jl. A. Mappe No. 1, Kel/Desa Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 9 WAJO , Jl, poros sengkang-bone no 229, kelurahan pammana, kec, pammana kab wajo, sulawesi selatan, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 8 jl.malaka raya, lapajung, kec lalabata, kab soppeng, sulawesi selatan, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 10 Maros, Dusun Garantiga, Desa Simbang, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa/Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	1.000.000.000,00	(SMAN 5 SINJAI, SMAN 1 SINJAI, SMKN 1 dan SMKN 2, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SAMN 7 SOPPENG jl.poros sengkang, ujung, kec, lilirilau, kab soppeng, sulawesi selatan, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Bontomanai, Kec. Rumbia, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa/Kel. Romangpolong, Kec. Somba Opu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 5 Makassar Kel. Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 SOPPENG, jl.malaka raya no 41, lapajung, kec. Lalabata, kab. soppeng, sulawesi selatan, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Tonro Kassi Barat, Kec. Tamalatea, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Belopa Utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 9 Maros, Desa Pa&bentengan, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Jln. Poros Bandara H. Aroeppala KM.5 Matalalang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Bulusibatang, Kec. Bontoramba, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Desa/Kel. Mangalli, Kec. Pallangga, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(SMAN 5 SOPPENG, jl, tonronge, tettikengraae, kec, marioiwawo, kab soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan Smart Controlling (Paket) pengembangan sarana dan prasarana (Paket) pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket) Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Palajau, Kec. Arungkeke, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Desa/Kel. Sapaya, Kec. Bungaya, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
						1	200.000.000,00	(Pengadaan Mobiler Sekolah SMAN 5 Soppeng (Volume 100 Unit) Anggaran Rp 300.000.000, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Bulusibatang, Kec. Bontoramba, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Camba-Camba, Kec. Batang, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Tonro Kassi Barat, Kec. Tamalatea, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Jln. pendidikan No. 50 Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
										NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1.01.02.1.01.004 1		Peremajaan mebel sekolah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu standar nasional pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan No.50, Panaikang, Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						22.200.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN), (Bone, SULAWESI SELATAN), (Soppeng, SULAWESI SELATAN), (Luwu Timur, SULAWESI SELATAN), (Gowa, SULAWESI SELATAN), (Pangkep, SULAWESI SELATAN), (Palopo, SULAWESI SELATAN), (Jeneponto, SULAWESI SELATAN), (24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN), (Barru, SULAWESI SELATAN), (Luwu Utara, SULAWESI SELATAN), (Enrekang, SULAWESI SELATAN), (Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		12.285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	44	44	44			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa	44			
			Pengadaan Peralatan Smart Board Kab. Pangkep (Paket)			1	600.000.000,00	(Pangkep, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa				
			Pengadaan Peralatan Smart School SMAN 1 Luwu Tlmur (Paket)			1	200.000.000,00	(Luwu Tlmur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa				
			Pengadaan Peralatan Smart School SMAN 2 Luwu Timur (Paket)			1	200.000.000,00	(Luwu Tlmur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa				
			Pengadaan Peralatan Smart School SMAN 3 Palopo (Paket)			1	200.000.000,00	(Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa				
		Pengadaan Smart Board (Paket)			1	21.000.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa					
		1.01.02.1.01.004 5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						800.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.01.02.1.01.004 9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		50	50	50		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	50			
		Monitoring dan evaluasi pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik miskin (Kegiatan)				1	200.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik miskin (Orang)			2.500	500.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa					
		Rakor validasi data peserta didik miskin (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa					
								1.100.000.000,00	(100.000.000 , SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN), (Maros, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		3	3	3		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	3			
		Festival Literasi (Hardiknas) (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Festival Pelajar (Hardiknas) (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Gebyar ATS (Hari Jadi Sulsel) (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Kirab Pelajar (Hari Jadi Sulsel) (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Pelaksanaan Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) Tk. Provinsi (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Pelaksanaan seleksi Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) Tk. Provinsi (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) Tk. Provinsi (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
		Pelaksanaan seleksi OSN Tk. Provinsi (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(100.000.000 , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
Pemantapan Peserta OSN untuk Tk. Nasional (Kegiatan)				1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.01.005 0		Tes urine (Kegiatan)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Asesmen dan Evaluasi Guru Smart School (Kegiatan)	50	50	50		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik	50		
						1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
	1.01.02.1.01.005 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					14.500.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		3.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	50	50	50		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa, tenaga pendidik	50		
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(24 kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(Kabupaten Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(kABUPATEN MAROS, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(KABUPATEN MAROS, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(KABUPATEN MAROS, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(Kabupaten Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba kompetensi keahlian siswa beserta pengembangan talenta- talenta di tingkat provinsi (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA SMK SEDERAJAT SEKABUPATEN MAROS, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl Abdul Djalal Dg Leo no. 2 Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl Andi Mallombasang No.40c, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(JL. POROS MALINO KM. 40 PARANG KEL. LANNA. KEC. PARANGLOE. Kode Pos. : 92173, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl Pendidikan, Limbung Gowa, Kalebajeng, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)</i>			1	200.000.000,00	<i>(Jl. Matahari No. 04, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, KAB. GOWA)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			<i>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)</i>			1	200.000.000,00	<i>(Jl. Basullu dg Lawa desa moncongkomba kec.polsel kab. Takalar, KAB. TAKALAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			<i>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)</i>			1	200.000.000,00	<i>(Jl.Hj.Manila Dg. Pati Kelurahan Malewang Kecamatan Polombangkeng Utara, KAB. TAKALAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			<i>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)</i>			1	200.000.000,00	<i>(Komplek BTN Saumata Indah, Jl. Mustafa Dg. Bunga, Romangpolong, Makassar, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			<i>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)</i>			1	200.000.000,00	<i>(Jl. Balai Desa Bontokassi, KAB. TAKALAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			<i>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)</i>			1	200.000.000,00	<i>(Jl. Andi Mangerangi, KAB. GOWA)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			<i>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)</i>			1	200.000.000,00	<i>(Jl. POROS ONGKOA CIKOANG, KAB. TAKALAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. POROS ONGKOA DESA CIKOANG, KEC. MANGARABOMBANG , KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Tanakaraeng, kec.Manuju, Kab.Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. H. Agus Salim, Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Jenemadinging, Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan Bontolanra no.22, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl.Bontonompo , Kel. Tamallayang, Kec. Bontonompo, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. H. Agus Salim, Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl.POROS LIMBUNG- GALESONG DESA GENTUNGAN KECAMATAN BAJENG BARAT, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Abdullah Dg. Ngalle Lr. 2 Tala& Sompu, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Malolo Desa Ko&mara Kec. Polongbangkeng Utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jalan Likukang Balang, Balang, Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(POROS CIKORO, KEL. CIKORO, KEC. TOMPOBULU, KAB. GOWA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. MANGKA DG BOMBONG NO. 31 SUNGGUMINASA, Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jalan Baso Dg Ngawing, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Salewatan No. 07 Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Poros Malino Km.08 Kelurahan Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Mesjid Raya No.46 Bonto-bontoa, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(JL. POROS MAKASSAR-MALINO KM. 62 KEC. TINGGIMONCONG KAB. GOWA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(JLN,H ABD WAHAB DG NGERANG, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Dandedandere Desa Maccinibaji Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kab. Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl Abdul Djalal Dg Leo no.2 Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(JL. SIRAJUDDIN RANI NO. 39 A BONTO-BONTOA, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Poros Sapaya-Malakaji Km. 69 Paranglompoo Kec. Bontolempangan Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(BORONG BILALANG DESA JULUBORI KEC. PALLANGGA KAB. GOWA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl.Hj.Manila Dg Pati Kelurahan Malewang Kecamatan Polombangkeng Utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Karaeng Pado Kel. Tamaona, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(JL POROS MALINO KM 2 BATANGKALUKU, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(JALAN SIDDIK NO. 1 DESA GALESONG BARU KECAMATAN GALESONG, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Bontotangnga No.50, Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl.PENDIDIKAN SIRONJONG, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl.Ranggong Dg.Romo kec.pattallassang Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Mannyioi, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Poros Pattallassang, Desa Timduseng. Kec. Pattallassang, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Poros Pabrik Gula Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Pulau Satangnga, Desa Mattirobaji, Kec. Kep. Tanakeke, Kab. Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(BORONG BILALANG DESA JULUBORI KEC. PALLANGGA KAB. GOWA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan, Malino, Kec. Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl.TIKOLLA DG LEO, NO.40 TAKALAR, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. MALINO NO 48 SUNGGUMINASA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jalan Pendidikan Tamasaju Kecamatan Galeaong utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Komplek BTN Saumata Indah, Jl. Mustafa Dg. Bunga, Romangpolong, Makassar, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Ranggong Dg. Roma, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl Ranggong DG Romo& Kel pappa kec Pattallassang kab. Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan, Kelurahan Lauwa Kecamatan Biringbulu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(JALAN PENDIDIKAN KEL. LAUWA KEC. BIRINGBULU, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Balai Desa Bontokassi, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.01.02.1.01.005 2			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jalan Pendidikan Desa Tamasaju Kecamatan Galesong utara Kab. Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik				
			Workshop/bimtek Skolastik bagi Guru (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Workshop Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) (Kegiatan)			1	200.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Workshop Pengembangan dan Pendalaman Kurikulum Merdeka di Smart School (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Workshop penyusunan soal skolastik (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		586	586	586	500.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
				Bimtek literasi dan numerasi bagi sekolah (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	586		
				Pemusnahan Blanko Ijazah (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
				Pendistribusian Blanko Ijazah (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
				Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
				Sosialisasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PDP) (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
				Verifikasi dan Validasi Usulan Izin Sekolah (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		586	586	586	352.430.080.051,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa
Belanja Barang dan Jasa BOS (Tahun)			1				217.629.323.430,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	586			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh SatdikmenSwasta (Tahun)			1	75.307.685.262,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Tahun)			1	25.497.030.582,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS (Tahun)			1	33.996.040.777,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
	1.01.02.1.01.005 4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		445.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah	12	12	12		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik	12			
			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dana BOS (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik				
	1.01.02.1.01.005 7	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	50	50	50		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	50			
			Workshop Operator Smart School bagi SMA (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
1.01.02.1.01.006 8	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						47.400.000.000,00	(Luwu, SULAWESI SELATAN), (Bantaeng, SULAWESI SELATAN), (Luwu Timur, SULAWESI SELATAN), (Wajo, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Pinrang, SULAWESI SELATAN), (Bulukumba, SULAWESI SELATAN), (Luwu Timur, SULAWESI SELATAN), (Soppeng, SULAWESI SELATAN), (Sidrap, SULAWESI SELATAN), (Gowa, SULAWESI SELATAN), (Jeneponto, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	25	25	25		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan, sekolah, siswa, Ssatuan Pendidikan	25		
			Pematangan Lahan SMAN 23 Makassar (Paket)			1	2.000.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ssatuan Pendidikan			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 14 MAKASSAR Jl. Baji Minasa No.9, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 7 Makassar Kel. Sudiang Kecamatan Biringkanaya, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 3 MAKASSAR Jl. Baji Areng No.18, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 22 Makassar Kel. Sudiang raya Kec. Biribgkanaya, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMUN Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 22 Jl. Pajjaiyang Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 20 MAKASSAR Jl. Bonto Biraeng, Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 5 Makassar KEL. Tello Baru Kec. Panakkukang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 10 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 10 Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	250.000.000,00	(Pemerliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah / Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Belajar SMAN 2 Soppeng (Volume 4 Ruang) Anggaran Rp 1.000.000.000 , KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	250.000.000,00	(SMAN 21 Makassar Kel, Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 9 Jl. Karunrung Raya No.2, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 17 MAKASSAR Jl. Sunu No.11, Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 13 Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 21 Makassar Kel. Panakkukang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 MAKASSAR Jl. Baji Gau No.17, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 MAKASSAR Jl. Baji Gau No.17, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 14 Jl. Baji Minasa No.9, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 13 Makassar Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 21 Makassar Kelurahan Tamalanrea Kecaatan Tamalanrea Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Balle Kec. Kahu, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	250.000.000,00	(SMAN 12 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 20 MAKASSAR Jl. Bonto Biraeng, Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 8 MAKASSAR Jl. Andi Mangerangi 2 Lorong 3 No.24, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	250.000.000,00	(SMAN 12 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 16 MAKASSAR Jl. Amanagappa No.8, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 MAKASSAR Jl. Baji Gau No.17, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 9 MAKASSAR Jl. Karunrung Raya No.2, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 9 MAKASSAR Jl. Karunrung Raya No.2, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 MAKASSAR Jl. Baji Gau No.17, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	250.000.000,00	(Coppeng-Coppeng Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA LERANG, KECAMATAN LANRISANG, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 14 MAKASSAR Jl. Baji Minasa No.9, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 20 MAKASSAR Jl. Bonto Biraeng, Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 3 MAKASSAR Jl. Baji Areng No.18, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 17 MAKASSAR Jl. Sunu No.11, Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	250.000.000,00	(SMAN 22 Makassar Jl. Pajjaiyang Kel. Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(JLLaupe Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 MAKASSAR Jl. Cakalang No.3, Totaka, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec. LALABATA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(desa kadundung kecamatan latimojong, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 17 MAKASSAR Jl. Sunu No.11, Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 6 Makassar Jl. Ir. Sutami No. 4, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 20 MAKASSAR Jl. Bonto Biraeng, Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 5 Makassar kel. tello baru kec. panakkukang kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 9 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(l. Kota Benteng-Tongketongke, Harapan, Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kahu-Kahu, Kec. Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 12 Bulukumba, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 16 MAKASSAR Jl. Amanagappa No.8, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 9 MAKASSAR Jl. Karunrung Raya No.2, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Bontosinde NO. 5 Kelurahan Bantangmata Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 7 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Pangi Kec. Bajo, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 20 MAKASSAR Jl. Bonto Biraeng, Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 12 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(sman 1 enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	600.000.000,00	(Man Tana Toraja Kecamatan Makale (1 Paket), SMAN 2 Tana Toraja Kecamatan Makale (1 Paket), MA Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan (1 Paket), SMAN 3 Tana Toraja Kecamatan Mengkendek (1 Unit), SMAN 8 Tana Toraja Kecamatan Saluputti (1 Unit), KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 5 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JL.PENDIDIKAN NO. 50 UJUNG JAMPEA KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 8 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 7 Makassar Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Batang, Kec. Taka Bonerate, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 Jl. Baji Gau No.17, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	250.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JL. PENDIDIKAN NO. 50, Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMUN 3 Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU KAB. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	1.000.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 17 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMUN 2 Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 6 Luwu Utara, Kec. Malangke, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Musholla Sekolah SMA 12 Luwu Utara, Kec. Tanalili, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RILAU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 13 Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KAB. BANTAENG, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep., KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 8 JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KAB. BANTAENG, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 7 Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK Negeri 9 Luwu, Kec. Walenrang Utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 9 Luwu Kel. Bosso Kec. Walenrang Utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KAB. BANTAENG, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 5 LUWU TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel Tonrokassi Kec Tamalatea Kab Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. POROS MAKASSAR JENEPONTO KM. 60, Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 6 Luwu Utara, Kec. Malangke, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 21 Makassar Jl. Tamalanrea Raya No. 1A, Kel. Talamanrea, Kec. Tamalanrea, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 12 Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Padang sappa kecamatan Ponrang Kabupaten luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 22 GOWA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 14 Luwu Desa Bonelema Kec. Bajo Barat, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA SALU BUA KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 5 Luwu Timur Kec. Wasuponda, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(kelurahan tampumia radda kecamatan belopa, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KABUPATEN WAJO, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Lentu Kec Bontoramba Kab jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 11 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RIAJA, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 5, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 10 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Abd. Jalil Sikki No.82 Romanga Kel. Balang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 3 Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA JENEPONTO, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Timbuseng Kec. Pattallassang, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 5 JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK 2 Gowa Jl. Masjid Raya Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(kec. ujung loe desa balleanging, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Lemb. Polopadang, Kec. Kapalapitu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RILAU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	800.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 LUWU TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Abd. Jalil Sikki No.82 Romanga Kel. Balang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. PENDIDIKAN NO. 50, Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Barru, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMUN 4 Jeneponto, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 4 Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 1 Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	600.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA 9 Gowa komp. perumahan restika kel. Tetabatu kecamatan Pallangg, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 4 Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 1 Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Bulusibatang Kec Bontoramba Kab Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK Negeri 3 Luwu Utara, Kec. Sukamaju, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(jl daud dg lili kel bonttotangga kec tamalatea kab jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK N 2 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	250.000.000,00	(SMAN 14 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	250.000.000,00	(SMA Al-Muttaqien, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(sman 2 enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JL. M. BASIR NO. 3 BONTOSUNGGU KELURAHAN EMPOANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 20 GOWA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 4 Luwu Timur, Kec. Tomoni, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 Toraja Utara Kecamatan Kesu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	250.000.000,00	(SMAN 9 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 LUWU UTARA, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA 14 JENEPONTO DESA RUMBIA KEC RUMBIA KAB JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Coppeng-Coppeng Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KAB. BANTAENG, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 13 Luwu Timur, Kec. Towuti, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Smkn 6 jeneponto. jalan lasinrang dg, sese no. 14 pokobulo, desa bangkalaloe kec. bontoramba kab. jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 3 ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMUN 20 Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RIAJA, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 3 Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	1.000.000.000,00	(Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 16 MAKASSAR JL. AMANAGAPPA 8, KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 2 MAKASSAR Jl. Pancasila No.15, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 17 MAKASSAR JL. SUNU NO. 11, KELURAHAN SUANGGA, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, kondisi rusak sedang/berat (Paket)			1	750.000.000,00	(Alla (6 Ruang), Cendana (6 Ruang), Enrekang (6 Ruang), KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, kondist rusak sedang/berat (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 17 MAKASSAR Jl. Sunu No.11, Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, kondist rusak sedang/berat (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 14 MAKASSAR Jl Baji Minasa No.9, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
										NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, kondisi rusak sedang/berat (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 2 MAKASSAR Jl. Baji Gau No.17, Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, kondisi rusak sedang/berat (Paket)			1	250.000.000,00	(Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, kondisi rusak sedang/berat (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 16 MAKASSAR Jl. Amanagappa No.8, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, kondisi rusak sedang/berat (Paket)			1	250.000.000,00	(SMAN 9 Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, kondisi rusak sedang/berat (Paket)			1	250.000.000,00	(pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	1.000.000.000,00	(Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Rehab Halaman (Paving Blok) SMAN 12 Jeneponto (Paket)			1	200.000.000,00	(Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa						
			Rehabilitasi ruang Bimbingan Konseling SMAN 11 BONE (Ruang)			1	100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan						
			Rehabilitasi ruang Bimbingan Konseling SMAN 6 BONE (Ruang)			1	100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan						
			1.01.02.1.01.006 9	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah						200.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Satuan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	10			
Rehabilitasi Asrama SMAN 6 BARRU (Ruang)					1	200.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan							
1.01.02.1.01.007 0	Pembangunan Ruang Laboratorium						29.750.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI		Meningkatkan Sumber Daya	04.Peningkatan Kesejahteraan	Satuan Pendidikan		-	DINAS PENDIDIKAN			
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			satuan pendidikan, sekolah						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAIT ANDALAN BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(BONE , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 10 Sinjai (Ruang)			1	450.000.000,00	(Sinjai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 11 Bone (Ruang)			1	450.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 11 Gowa (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 11 Wajo (Ruang)			1	450.000.000,00	(Wajo , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 12 Gowa (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 13 Tana Toraja (Ruang)			1	450.000.000,00	(Toraja , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 14 Luwu (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 14 Wajo (Ruang)			1	450.000.000,00	(Wajo , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 15 Gowa (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 18 Gowa (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 18 Luwu (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 18 Pangkep (Ruang)			1	450.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 19 Gowa (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 19 Luwu Utara (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 1 Sidrap (Ruang)			1	450.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 20 Pangkep (Ruang)			1	450.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 23 Bone (Ruang)			1	450.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Biologi SMAN 4 Selayar (Ruang)			1	450.000.000,00	(Selayar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAIT ANDALAN BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 10 ENREKANG (Ruang)			1	450.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 10 TORAJA UTARA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Toraja Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 11 LUWU UTARA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 11 TANA TORAJA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 13 TANA TORAJA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 14 LUWU (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 14 SINJAI (Ruang)			1	450.000.000,00	(Sinjai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 15 GOWA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 16 BULUKUMBA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 16 LUWU (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 17 GOWA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 17 LUWU UTARA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 17 PANGKEP (Ruang)			1	450.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 19 BONE (Paket)			1	450.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 19 BULUKUMBA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Lab Fisika SMAN 7 ENREKANG (Ruang)			1	450.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembanguan Ruang Lab Fisika SMAN 8 LUWU UTARA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMAN 10 ENREKANG (Ruang)			1	200.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMAN 2 LUWU UTARA (Ruang)			1	200.000.000,00	(LUWU UTARA , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMAN 8 BULUKUMBA (Ruang)			1	200.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAIT ANDALAN BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 10 LUWU TIMUR (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 10 LUWU UTARA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 10 SIDRAP (Ruang)			1	450.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 11 ENREKANG (Ruang)			1	450.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 11 LUWU UTARA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 11 WAJO (Ruang)			1	450.000.000,00	(Wajo , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 12 PANGKEP (Ruang)			1	450.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 13 LUWU (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 13 TAKALAR (Ruang)			1	450.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 14 GOWA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			satuan pendidikan			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 14 MAROS (Ruang)			1	450.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 15 LUWU (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 17 LUWU UTARA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 20 BONE (Ruang)			1	450.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 21 GOWA (Ruang)			1	450.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 23 BONE (Ruang)			1	450.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAIT ANDALAN BONE (Ruang)			1	200.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 10 TORAJA UTARA (Ruang)			1	300.000.000,00	(TORAJA UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 12 WAJO (Ruang)			1	300.000.000,00	(Wajo , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 13 MAROS (Ruang)			1	300.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 14 BULUKUMBA (Ruang)			1	300.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 15 GOWA (Ruang)			1	300.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 17 LUWU UTARA (Ruang)			1	300.000.000,00	(LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 19 GOWA (Ruang)			1	300.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 19 LUWU UTARA (Ruang)			1	300.000.000,00	(LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 20 PANGKEP (Ruang)			1	300.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 2 SELAYAR (Ruang)			1	300.000.000,00	(Selayar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
										NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.01.02.1.01.007 1			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 3 ENREKANG (Ruang)			1	300.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 3 TORAJA UTARA (Ruang)			1	300.000.000,00	(TORAJA UTARA , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 4 BONE (Ruang)			1	300.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 5 LUWU UTARA (Ruang)			1	300.000.000,00	(LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 6 TANA TORAJA (Ruang)			1	300.000.000,00	(TANA TORAJA , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			satuan pendidikan						
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 7 MAROS (Ruang)			1	300.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 8 PANGKEP (Ruang)			1	300.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 8 SOPPENG (Ruang)			1	300.000.000,00	(Soppeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labororium							400.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Bantaeng , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				satuan pendidikan			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labororium Biologi SMAN 1 BANTAENG (Ruang)					1	200.000.000,00	(Bantaeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				satuan pendidikan						
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labororium Biologi SMAN 1 BARRU (Ruang)					1	200.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				satuan pendidikan						
1.01.02.1.01.007 2	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	25	25	25	20.000.000.000,00	(Enrekang , SULAWESI (Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya	04.Peningkatan Kesejahteraan	satuan pendidikan	25	5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
		Pembangunan RKB SMAIT Andalan Bone (Ruang)			2	600.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				sekolah, siswa						
		Pembangunan RKB SMAN 10 Bone (Ruang)			2	600.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				sekolah						
												sekolah						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan RKB SMAN 10 Gowa (Ruang)			1	300.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 10 Jeneponto (Ruang)			1	300.000.000,00	(Jeneponto , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 10 Makassar (Ruang)			2	600.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 10 Maros (Ruang)			2	600.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 11 Gowa (Ruang)			1	300.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 12 Bone (Ruang)			2	600.000.000,00	(Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 12 Maros (Ruang)			2	600.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 12 Toraja Utara (Ruang)			1	300.000.000,00	(Toraja Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 13 Bone (Ruang)			2	600.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 13 Gowa (Ruang)			3	900.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 13 Luwu (Ruang)			1	300.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 13 Sinjai (Ruang)			1	300.000.000,00	(Sinjai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 13 Takalar (Ruang)			1	300.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 14 Bone (Ruang)			1	300.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 14 Luwu Timur (Ruang)			1	300.000.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 14 Pangkep (Ruang)			2	600.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 15 Bone (Ruang)			2	600.000.000,00	(Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 18 Gowa (Ruang)			1	300.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 18 Makassar (Ruang)			2	600.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 19 Makassar (Ruang)			1	300.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 19 Pangkep (Ruang)			2	600.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan RKB SMAN 1 Makassar (Ruang)			3	900.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 20 Bone (Ruang)			2	600.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 20 Gowa (Ruang)			1	300.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 21 Gowa (Ruang)			2	600.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 22 Gowa (Ruang)			2	500.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pembangunan RKB SMAN 2 Takalar (Ruang)			2	600.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 3 Luwu (Ruang)			1	300.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 3 Selayar (Ruang)			1	300.000.000,00	(Selayar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 3 Sidrap (Ruang)			1	300.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 3 Takalar (Ruang)			2	600.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 4 Bone (Ruang)			1	300.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 5 Pangkep (Ruang)			2	600.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 6 Bone (Ruang)			1	300.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 6 Maros (Ruang)			1	300.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 6 Maros (Ruang)			1	300.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 6 Takalar (Ruang)			1	300.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 7 Jeneponto (Ruang)			1	300.000.000,00	(Jeneponto , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 7 Pangkep (Ruang)			2	600.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 7 Pinrang (Ruang)			2	600.000.000,00	(Pinrang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 9 Maros (Ruang)			1	300.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan RKB SMAN 9 Pangkep (Ruang)			1	300.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.01.007 6	Penataan Ruang/Sudut Baca					20.000.000,00	(Pinrang , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sekolah							
			Pembangunan Ruang/Sudut Baca SMAN 3 PINRANG (Ruang)	1	20.000.000,00	(Pinrang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sekolah							
	1.01.02.1.01.007 7	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir					100.000.000,00	(Bantaeng , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	10	10	10	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekolah			10			
			Rehabilitasi Fasilitas Parkir SMAN 1 BANTAENG (Paket)	1	100.000.000,00	(Bantaeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekolah							
	1.01.02.1.01.007 8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					12.950.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Sekolah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1	1	1	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa, Siswa, tenaga pendidik			1			
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional (Kegiatan)	1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tenaga pendidik							
			Pendampingan dan Pembinaan ABPS dan ATS (Pelita Peduli dan tangani) (Kegiatan)	1	350.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Siswa							
			Pendampingan Super Intensif dalam rangka peningkatan kapasitas potensi skolastik (Kegiatan)	5	1.000.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa							
			Penguatan karakter peserta didik (Kegiatan)	1	11.000.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Siswa							
			Workshps Penyusunan Bahan Ajar/Paparan Smart School (Kegiatan)	1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tenaga pendidik							
	Workshps Penyusunan Modul Smart School (Kegiatan)	1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tenaga pendidik									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Workshop Penyusunan Bank Soal Latihan Skolastik (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					308.214.293.027,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Bantaeng, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	tenaga pendidik		285.097.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Tamatan SMK yang bekerja 1 tahun Setelah tamat (%)			49					tenaga pendidik	49			
	1.01.02.1.02.000 1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)					1.000.000.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	tenaga pendidik		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.00	2.00	2.00		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sekolah	2.00				
	1.01.02.1.02.000 4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Pembangunan USB SMKN 3 Luwu Timur (Paket)			1	1.000.000.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	10	10	10	5.950.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN), (Wajo , SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		13.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Pembanguan Ruang Praktek SMKN 2 Barru (Ruang)			1	1.000.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sekolah, siswa	10				
			Pembanguan Ruang Praktek SMKN 8 Wajo (Ruang)			1	1.000.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sekolah					
			Pembanguan Ruang Praktek SMKN 9 Bone (Ruang)			1	1.000.000.000,00	(Wajo , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sekolah					
			Pengadaan Ruang Praktik Siswa Penunjang Pembelajaran Siswa sesuai kebutuhan industri (Paket)			1	200.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	siswa					
							(Jl Lingkar Timur Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			5	1.500.000.000,00	(SMK Nusa Prima (Sangalla Selatan), SMA Advent Mebali (Gandangbatu Sillanan), SMK Andika (Mengkendek), SMAN 113 Tana Toraja (Simbuang), SMA Kristen Miallo (Mappak), KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 6 Pinrang Kec. Batulappa, Kel. Kassa, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 10 MAKASSAR Jl. Bonto Manai No.14, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 8 MAKASSAR Jl. Monginsidi No.17, Maricaya Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	250.000.000,00	(Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 6 MAKASSAR Jl. Andi Djemma No.132, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 4 MAKASSAR Jl. Bandang No.140, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium						2.500.000.000,00	(Jeneponto , SULAWESI SELATAN), (Luwu Utara , SULAWESI SELATAN), (Tana Toraja , SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.02.000 6	Pembangunan Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	10		
			Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 2 Luwu Utara (Ruang)			1	500.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 3 Bone (Ruang)			1	500.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 3 Jeneponto (Ruang)			1	500.000.000,00	(Jeneponto , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 3 Luwu Utara (Ruang)			1	500.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 4 Tana Toraja (Ruang)			1	500.000.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.02.000 7	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)				100.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
				10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	10		
						1	100.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)				2.400.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN), (Tana Toraja , SULAWESI SELATAN), (Luwu Timur , SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			2	2	2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah, siswa	2			
					1	400.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
					1	400.000.000,00	(Luwu Timur , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
					1	400.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
					1	400.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.1.02.001 0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Perpustakaan SMKN 4 Tana Toraja (Ruang)			1	400.000.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				sekolah			
		Pembangunan Perpustakaan SMKN 9 Bone (Ruang)			1	400.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				siswa			
								(Luwu, SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN), (Bantaeng, SULAWESI SELATAN), (Tana Toraja, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Barru, SULAWESI SELATAN), (Pinrang, SULAWESI SELATAN), (luwu, SULAWESI SELATAN), (Sinjai, SULAWESI SELATAN), (Gowa, SULAWESI SELATAN), (Jeneponto, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa	1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	2	2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	2			
		Pembangunan Pagar SMKN 2 Gowa (Paket)			1	200.000.000,00	(Gowa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pembangunan Pagar SMKN 3 Makassar (Paket)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pembangunan Pagar SMKN 7 Jeneponto (Paket)			1	200.000.000,00	(Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pengadaan Ruang Praktik Siswa Penunjang Pembelajaran Siswa sesuai kebutuhan industri (Paket)			1	250.000.000,00	(Jl. M. ALI GASSING, TAMARUNANG, Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pengadaan Ruang Praktik Siswa Penunjang Pembelajaran Siswa sesuai kebutuhan industri (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Tanggakang Lama, Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 4 MAKASSAR Jl. Bandang No.140, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 2 MAKASSAR Jl. Pancasila No.15, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 10 Jl. Bonto Manai No.14, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 8 MAKASSAR Jl. Monginsidi No.17, Maricaya Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK Negeri 9 Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	250.000.000,00	(Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah Lahan Parkir Kendaraan Bermotor / SMKN 3 Cangadi / Liliriaja, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK Negeri 9 Makassar Jl. Salodong Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 4 MAKASSAR Jl. Bandang No.140, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 8 MAKASSAR Jl. Monginsidi No.17, Maricaya Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 2 MAKASSAR Jl. Pancasila No.15, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 6 MAKASSAR Jl. Andi Djemma No.132, Banta- Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 10 MAKASSAR Jl. Bonto Manai No.14, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	250.000.000,00	(SMK PERADABAN MAROS, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec.Pulau Sembilan, Kab.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel.Balangnipa, Kec.Sinjai Utara kAb.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK N 8 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 10 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. MALUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK N 6 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Pongko Kec. Walenrang, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. MALUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK N 5 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Parigi Kec. Tinggimoncong, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BALUSU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pahlawan No.31 Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Buttu Batu Kec, Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	250.000.000,00	(SMK N 3 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEL. SONGKA KEC. WARA SELATAN, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BALUSU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel/Desa. Kassa - Kec. Batulappa - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA SALULINO KEC. WALENRANG UTARA, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RILAU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Malino, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA TANARIGELLA KEC. BUA, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 2 MAKASSAR Jl. Pancasila No.15, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(PUJANANTING, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 10 MAKASSAR Jl. Bonto Manai No.14, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 10 MAKASSAR Jl. Bonto Manai No.14, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 8 MAKASSAR Jl. Monginsidi No.17, Maricaya Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JL.POROS LAYOA, Layoa, Kec. Gantarang Keke, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 8 MAKASSAR Jl. Monginsidi No.17, Maricaya Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JL.LANTO DG.PASEWANG, Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Buntu Barana kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri 4 Kec. Tomoni, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 6 MAKASSAR Jl. Andi Djemma No.132, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK N 3 GOWA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Lingkar Timur Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Buntu Kunyi kecamatan Suli Kabupaten Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(JL.LANTO DG.PASEWANG, Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK Negeri 2 Luwu Kel. Tampumia Radda Kec. Belopa, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK Negeri 9 Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 6 MAKASSAR Jl. Andi Djemma No.132, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	250.000.000,00	(SMK N 10 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 4 MAKASSAR Jl. Bandang No.140, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa lebani kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK 8 JENEPONTO Jl. H.M ISHAK ISKANDAR KEC BINAMU KAB JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 4 MAKASSAR Jl. Bandang No.140, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Negeri Khusus Keberbakatan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Pajjaiang Komp GOR Sudiang, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 2 MAKASSAR Jl. Pancasila No.15, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK Negeri 1 Luwu Desa Lebani Kec. Belopan Utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			1.01.02.1.02.001 1			Pembangunan Fasilitas Parkir									
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				sekolah	10		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.02.001 6		Pembangunan Fasilitas Parkir SMKN 4 Makassar (Paket)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					600.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	5	5	5	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	5			
			Rehab Ruang Kepala Sekolah SMKN 4 Takalar (Ruang)			1	200.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		sekolah				
			Rehab Ruang Kepala Sekolah SMKN 6 Pinrang (Ruang)			1	200.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		sekolah				
	Rehab Ruang Kepala Sekolah SMKN 6 Takalar (Ruang)			1	200.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		sekolah						
	1.01.02.1.02.002 8	Pengadaan Mebel Sekolah					5.574.459.200,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN), (Barru, SULAWESI SELATAN), (Parepare, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	15	15	15	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	15			
			Pengadaan Mebel (Paket)			1	5.574.459.200,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		sekolah				
	1.01.02.1.02.003 2	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah					100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (Maros, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (Unit)	1	2	3	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	3			
			Pengadaan Komputer SMKN 4 Makassar (Paket)			1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		siswa				
	1.01.02.1.02.003 3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					53.862.231.612,00	(Gowa, SULAWESI SELATAN), (Palopo, SULAWESI SELATAN), (Barru, SULAWESI SELATAN), (Bone, SULAWESI SELATAN), (24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN), (24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3	3	3		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah, siswa, Siswa, tenaga pendidik	3		
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. PRAMUKA NO. 3 LIMBUNG, Kalebajeng, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. SIRAJUDDIN RANI NO. 39 A, Bonto Bontoo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. SULTAN HASANUDDIN NO.24, Pandang Pandang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. MESJID RAYA NO. 46 SUNGGUMINASA, Bonto Bontoo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. PUJANANTING, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket) Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BALUSU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 23 Kelurahan Benteng Selatan kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Jl. Poros Loka, Bonto Marannu, Kec. Uluere, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Jln. Pahlawan No. 5 Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Nipa-Nipa, Kec. Pa'jukukang, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(KEC. PUJANANTING, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Jln Tatta Tjora No.3, Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
						1	200.000.000,00	(Nipa-Nipa, Kec. Pajukukang, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 13 Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Elang No.7, Pallantikang, Kec. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Drs. Anas Ahmad No. 2 Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln. Pahlawan No. 31 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 4 Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA PARE-PARE, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Arungkeke Pallantikang, Kec. Arungkeke, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK di Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 3 Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(JL. LASINRANG DAENG SESE NO. 14 POKOBULO, Bangkalaloe, Kec. Bontoramba, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RILAU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. MALUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Bulujaya, Kec. Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(JL. TANATOA, DESA KALIMPORO, KEC. BANGKALA, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEL. BALANDAI KEC. BARA KOTA PALOPO, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RILAU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(kecamatan herlang, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Tongke-Tongke Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 2 Maros, Dusun Bantimurung, Desa Jenetaesa, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 1 Maros, Jl. Pasar Ikan, Lingkungan Bonto Kapetta II, Kelurahan Allepolea, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Tani Raya No.1, Desa Lembang Matene, Kecamatan Pasilambena, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Dampang Kel. Gantarangkeke, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Untia Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK Negeri 3 Parepare Jl. Karaeng Burane No. 16, Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMKN 5 MARE, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. M. ALI GASSING, TAMARUNANG, Pabiringa, Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan, Bontomanai, Kec. Rumbia, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN TEMPE, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Balang Toa, Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BALUSU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA 1 Luwu Utara, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. BARRU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(smk 4 makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(KABUPATEN JENEPONTO, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan serta pendukung program smart school (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 6 Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan peralatan praktik utama (Paket)			1	29.262.231.612,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(SMK N 1 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. PUJANANTING, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana musholla, toilet, kantin dan pagar (Paket)			1	200.000.000,00	(KEC. TANETE RILAU, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(KABUPATEN WAJO, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Tani Raya No.1, Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Drs. Anas Ahmad No. 2 Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	1.000.000.000,00	(10 Kecamatan kabupaten Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA / SMK Negeri dan Swasta di Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln Pahlawan NO. 31 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln Tatta Tjora No.3, Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Jln Pahlawan NO. 5 Desa Kembang Ragi, Kecamatan Pasimasunggu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 23 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Tongke-Tongke Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
			SMK (Pendidikan Vokasi) Kolaborasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (Paket)			1	9.800.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa				
	1.01.02.1.02.003 7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa	100	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	100	100	100	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
			Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOS SMK (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
				Monitoring dan Evaluasi Manajemen PIP SMK (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
	1.01.02.1.02.004 1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						450.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	tenaga pendidik		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.1.02.004 2			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	433	433	433		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	433		
			02SN SMK Tingkat Nasional (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			02SN SMK Tingkat Provinsi (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Festival Pelajar SMK (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			FLS2N SMK Tingkat Nasional (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			FLS2N SMK Tingkat Provinsi (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional (LKSNI) (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Pelatihan Otomotif (SMK) (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Workshop Kewirausahaan bagi siswa SMK (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						150.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	150	150	150		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				tenaga pendidik	150		
		Monitoring Pelaksanaan Kurikulum Merdeka (SMK) (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				tenaga pendidik			
		Pelatihan Dapodik (SMK) (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				tenaga pendidik			
		Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (SMK) (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				tenaga pendidik			
1.01.02.1.02.004 3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	tenaga pendidik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	500	500	500		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				tenaga pendidik	500		
		Workshop Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				tenaga pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.02.004 5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					250.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	tenaga pendidik	433	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	433	433	433	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Monitoring Akselarasi pendataan Daftar Nominasi Tetap (DNT) SMK (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Pemusnahan Blanko Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Pengembangan Pendidikan Vokasi (SMK) (Kegiatan) Verifikasi dan Monitoring izin operasional / pembukaan kompetensi keahlian (SMK) (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	1.01.02.1.02.004 6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan					210.920.254.415,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah	433	228.977.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	433	433	433	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Belanja Barang dan Jasa BOS (Tahun)			1	96.734.182.059,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh SatdikmenSwasta (Tahun)			1	86.833.515.100,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS (Tahun)			1	11.722.524.538,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS (Tahun)			1	15.630.032.718,00	(24 Kab/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.02.006 2	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					300.000.000,00	(Luwu, SULAWESI SELATAN), (Jeneponto, SULAWESI SELATAN), (Palopo, SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN), (Barru, SULAWESI SELATAN), (Luwu Utara, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2	4	4		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	4		
			Rehab Drainase SMKN 4 Jeneponto (Paket)			1	200.000.000,00	(Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Rehab Pagar SMKN 2 Makassar (Paket)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.02.006 3	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik					200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Rehabilitasi RPS Bengkel Elektronika Industri SMKN 9 Makassar (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.02.006 4	Pembangunan Ruang Kelas Baru					7.000.000.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN), (Bone , SULAWESI SELATAN), (Sidrap , SULAWESI SELATAN), (Takalar , SULAWESI SELATAN), (Jeneponto , SULAWESI SELATAN), (Bulukumba , SULAWESI SELATAN), (Luwu Utara , SULAWESI SELATAN), (Sinjai , SULAWESI SELATAN), (Luwu , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	30	30	30		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	30		
			Pembangunan RKB 2 SMKN Luwu (Ruang)			2	500.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
										NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Pembangunan RKB 2 SMKN Luwu Utara (Ruang)			2	500.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 10 Bulukumba (Ruang)			2	500.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 10 Tana Toraja (Ruang)			2	500.000.000,00	(Tana Toraja , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 11 Luwu (Ruang)			2	500.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 1 Sinjai (Ruang)			2	500.000.000,00	(Sinjai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 4 Luwu Utara (Ruang)			2	500.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 4 Luwu Utara (Ruang)			2	500.000.000,00	(Luwu Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 6 Bone (Ruang)			2	500.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 6 Luwu (Ruang)			2	500.000.000,00	(Luwu , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 6 Sidrap (Ruang)			2	500.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 6 Takalar (Ruang)			2	500.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 9 Bone (Ruang)			2	500.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			Pembangunan RKB SMKN 9 Jeneponto (Ruang)			2	500.000.000,00	(Jeneponto , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
			1.01.02.1.02.006 6	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula						200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	2	2	2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	2			
					Rehab Aula SMKN 2 Makassar (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
1.01.02.1.02.006 9	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						200.000.000,00	(Gowa, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		2.280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	10						
		Rehab Ruang Kelas SMKN 5 Makassar (Ruang)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.02.007 0	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir					100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	2	2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	2		
			Rehab Fasilitas Parkir SMKN 1 Makassar (Paket)			1	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.02.007 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik					1.307.347.800,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	300	300	300		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah, siswa, Siswa, tenaga pendidik	300		
			Makan Minum Peserta Didik SMK Afirmasi (Tahun)			1	857.347.800,00	(Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa			
			Monitoring Pelaksanaan Asessment Nasional Berbasis Komputer (SMK) (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Monitoring Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran (SMK) (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pendampingan dan Pembinaan ABPS dan ATS (Pelita Peduli dan tangani) (Kegiatan)			1	350.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa			
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus					38.249.440.269,00	(Takalar, SULAWESI SELATAN), (Selayar, SULAWESI SELATAN), (Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan	Siswa		50.509.254.735,00
Persentase warga negara usia 4 Åå,~åå 18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada						84						Siswa	84		
1.01.02.1.03.000 1		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					1.500.000.000,00	(Toraja Utara , SULAWESI SELATAN), (Luwu Utara, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Siswa		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2	2	2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	2		
			Pembangunan SLBN 1 Luwu Utara (Paket)			1	500.000.000,00	(Luwu Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
		Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	1.000.000.000,00	(Desa harapan kecamatan malili, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.1.03.000 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						4.000.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2	2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah, Sekolah, tenaga pendidik	2			
		Bimtek Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah berdasarkan iklan keamanan dan iklim kebhinekaan dan iklim Sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik				
		Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl Pendidikan, Limbung Gowa, Kalebajeng, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik				
		Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. BASO DG.NGAWING NO.127, Mangalili, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik				
		Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik				
		Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(24 Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			<i>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SLBN 1 Bantaeng (Ruang Tata Usaha) (Ruang)</i>			1	100.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			<i>Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah			
			<i>Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(Jl. Pendidikan Rumbia, Desa Ramba, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			<i>Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMKN 6 JENEPONTO JL. LASINRANG DAENG SESE NO. 14 POKOBULO, Bangkalaloe, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			<i>Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMA N 2 Jeneponto. kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			<i>pengembangan sarana dan prasarana (Paket)</i>			1	250.000.000,00	(SMAN 5 takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			<i>pengembangan sarana dan prasarana (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SMKN 2 Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			<i>pengembangan sarana dan prasarana (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(SLBN 1 MAKASSAR Jl. Dg. Tata Raya Lr. SLB Pembina No.mor 2, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			<i>pengembangan sarana dan prasarana (Paket)</i>			1	250.000.000,00	(Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SLBN 1 MAKASSAR Jl. Dg. Tata Raya Lr. SLB Pembina No.mor 2, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(SLBN 1 MAKASSAR Jl. Dg. Tata Raya Lr. SLB Pembina No.mor 2, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			pengembangan sarana dan prasarana (Paket)			1	200.000.000,00	(Jl. Laupe Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Peremajaan mebel sekolah (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN ROTTO, KELURAHAN PADANG SAPPA, KECAMATAN PONRANG, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.03.000 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					150.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	1		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	1		
			Pembangunan Ruang UKS SLBN 2 Makassar (Ruang)			1	150.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.03.000 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					250.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	1		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	1		
			Pembangunan Perpustakaan SLBN 1 Bantaeng (Ruang)			1	250.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.03.000 8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					100.000.000,00	(Soppeng, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.01.02.1.03.001 0		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	5	5		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	5			
			Pembangunan Pagar SLBN 1 Soppeng (Paket)			1	100.000.000,00	(Soppeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pembangunan Kantin Sekolah				200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	5	5		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	5			
		Pembangunan Kantin SLBN 1 Makassar (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
	1.01.02.1.03.003 5	Pengadaan Mebel Sekolah						4.323.814.735,00	(Selayar, SULAWESI SELATAN), (Makassae, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Bantaeng, SULAWESI SELATAN), (Wajo, SULAWESI SELATAN), (Bone, SULAWESI SELATAN), (Pinrang, SULAWESI SELATAN), (Bulukumba, SULAWESI SELATAN), (Sidrap, SULAWESI SELATAN), (Sinjai, SULAWESI SELATAN), (Gowa, SULAWESI SELATAN), (Palopo, SIII AWESI		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	5	5	5		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	5			
			Pengadaan Meubelair Aula SLBN 2 Makassar (Paket)			1	94.814.735,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Bantaeng (Paket)					1	288.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Barru (Paket)			1	192.000.000,00	(Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						
	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Bone (Paket)			1	192.000.000,00	(Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Bulukumba (Paket)			1	192.000.000,00	(Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Gowa (Paket)			1	192.000.000,00	(Gowa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Jeneponto (Paket)			1	192.000.000,00	(Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Makassar (Paket)			1	192.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Maros (Paket)			1	192.000.000,00	(Maros, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Palopo (Paket)			1	192.000.000,00	(Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Pangkep (Paket)			1	192.000.000,00	(Pangkep, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Parepare (Paket)			1	192.000.000,00	(Parepare, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Pinrang (Paket)			1	192.000.000,00	(Pinrang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Selayar (Paket)			1	192.000.000,00	(Selayar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Sidrap (Paket)			1	192.000.000,00	(Sidrap, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Sinjai (Paket)			1	192.000.000,00	(Sinjai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Takalar (Paket)			1	192.000.000,00	(Takalar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Tana Toraja (Paket)			1	192.000.000,00	(Tana Toraja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 1 Wajo (Paket)			1	192.000.000,00	(Wajo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 2 Jeneponto (Paket)			1	192.000.000,00	(Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.01.02.1.03.004 0	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 2 Makassar (Paket)				1	192.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SLBN 2 Takalar (Paket)				1	192.000.000,00	(Takalar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pengadaan Meubelair Ruang Kepala Sekolah SLBN 1 Bantaeng (Paket)				1	33.500.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pengadaan Meubelair Ruang Tata Usaha SLBN 1 Bantaeng (Paket)				1	30.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
		Pengadaan Meubelair Ruang UKS SLBN 2 Makassar (Paket)				1	37.500.000,00	(Makassaer, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah				
									(Selayar, SULAWESI SELATAN), (Wajo, SULAWESI SELATAN), (Bantaeng, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Bone, SULAWESI SELATAN), (Pinrang, SULAWESI SELATAN), (Bulukumba, SULAWESI SELATAN), (Soppeng, SULAWESI SELATAN), (Sinjai, SULAWESI SELATAN), (Gowa, SULAWESI SELATAN), (Palopo, SULAWESI SELATAN), (Pangkep, SULAWESI SELATAN), (Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5	5	5								sekolah	5		
		Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Bantaeng (Paket)					1	80.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
		Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Barru (Paket)					1	80.000.000,00	(Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
		Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Barru (Paket)					1	80.000.000,00	(Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
		Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Bone (Paket)					1	80.000.000,00	(Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
		Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Bulukumba (Paket)					1	80.000.000,00	(Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Gowa (Paket)			1	80.000.000,00	(Gowa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Jeneponto (Paket)			1	80.000.000,00	(Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Makassar (Paket)			1	80.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Maros (Paket)			1	80.000.000,00	(Maros, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Palopo (Paket)			1	80.000.000,00	(Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Pangkep (Paket)			1	80.000.000,00	(Pangkep, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Parepare (Paket)			1	80.000.000,00	(Parepare, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Pinrang (Paket)			1	80.000.000,00	(Pinrang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Selayar (Paket)			1	80.000.000,00	(Selayar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Sidrap (Paket)			1	80.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Sinjai (Paket)			1	80.000.000,00	(Sinjai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Soppeng (Paket)			1	80.000.000,00	(Soppeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Takalar (Paket)			1	80.000.000,00	(Takalar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Toraja Utara (Paket)			1	80.000.000,00	(Toraja Utara , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 1 Wajo (Paket)			1	80.000.000,00	(Wajo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 2 Jeneponto (Paket)			1	80.000.000,00	(Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 2 Makassar (Paket)			1	80.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan Praktik SLBN 2 Takalar (Paket)			1	80.000.000,00	(Takalar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.03.004 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					1.512.000.000,00	(Bantaeng , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Barru , SULAWESI SELATAN), (Maros , SULAWESI SELATAN), (Jeneponto , SULAWESI SELATAN), (Takalar , SULAWESI SELATAN), (Pinrang , SULAWESI SELATAN), (Soppeng , SULAWESI SELATAN), (Pangkep , SULAWESI SELATAN), (Sinjai , SULAWESI SELATAN), (Toraja Utara , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	10	10	10		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	10		
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Bantaeng (Paket)			1	72.000.000,00	(Bantaeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Barru (Paket)			1	72.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Barru (Paket)			1	72.000.000,00	(Barru , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Bone (Paket)			1	72.000.000,00	(Bone , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Bulukumba (Paket)			1	72.000.000,00	(Bulukumba , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Gowa (Paket)			1	72.000.000,00	(Gowa , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Jeneponto (Paket)			1	72.000.000,00	(Jeneponto , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Makassar (Paket)			1	72.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Maros (Paket)			1	72.000.000,00	(Maros , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Pangkep (Paket)			1	72.000.000,00	(Pangkep , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Parepare (Paket)			1	72.000.000,00	(Parepare , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Pinrang (Paket)			1	72.000.000,00	(Pinrang , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
										NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.01.02.1.03.004 8			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Selayar (Paket)			1	72.000.000,00	(Selayar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Sidrap (Paket)			1	72.000.000,00	(Sidrap , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Sinjai (Paket)			1	72.000.000,00	(Sinjai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Soppeng (Paket)			1	72.000.000,00	(Soppeng , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Takalar (Paket)			1	72.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 1 Toraja Utara (Paket)			1	72.000.000,00	(Toraja Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 2 Jeneponto (Paket)			1	72.000.000,00	(Jeneponto , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 2 Makassar (Paket)			1	72.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
			Pengadaan Peralatan TIK SLBN 2 Takalar (Paket)			1	72.000.000,00	(Takalar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah					
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							300.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		10	10	10			(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa	10		
			Festival Pelajar Pendidikan Khusus Tingkat Provinsi (Kegiatan)				1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Lomba Sekolah Sehat SLB (Kegiatan)				1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Pembinaan FLS2N Tingkat Provinsi (Kegiatan)				1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Pembinaan O2SN Tingkat Provinsi (Kegiatan)				1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Seleksi Lomba FLS2N Tingkat Provinsi (Kegiatan)				1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
			Seleksi Lomba O2SN Tingkat Provinsi (Kegiatan)				1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			siswa				
1.01.02.1.03.004 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus							200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	siswa		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus		10	10	10			(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik	10			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.03.005 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	<i>Pelatihan operator dapodik (Kegiatan)</i>			1	200.000.000,00	<i>(Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan</i>				250.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	tenaga pendidik		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
				<i>Worshop Guru Kunjung Pendidikan Inklusi (Kegiatan)</i>	10	10	10	<i>(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Guru	10		
							1	250.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Guru		
	1.01.02.1.03.005 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					250.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Guru		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	10	10	10		<i>(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah, tenaga pendidik</i>	10		
			<i>Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fisik dan Peralatan (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah</i>			
			<i>Monitoring Kelembagaan Pendidikan Khusus (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah</i>			
			<i>Monitoring Pendataan Satuan Pendidikan Khusus (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah</i>			
			<i>Workshop Dapodik Pendidikan Khusus (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>tenaga pendidik</i>			
			<i>Workshop Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Khusus (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah</i>			
	1.01.02.1.03.005 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus					17.823.625.534,00	<i>(24 Kab/kota, SULAWESI SELATAN), (24 Kab/kota , SULAWESI SELATAN)</i>		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		28.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)</i>	86	86	86		<i>(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah</i>	86		
			<i>Belanja Barang dan Jasa BOS (Tahun)</i>			1	6.063.953.762,00	<i>(24 Kab/kota , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah</i>			
			<i>Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus (Tahun)</i>			1	10.147.734.696,00	<i>(24 Kab/kota , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah</i>			
			<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS (Tahun)</i>			1	690.830.176,00	<i>(24 Kab/kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>sekolah</i>			
		<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Tahun)</i>			1	921.106.900,00	<i>(24 Kab/kota , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>sekolah</i>						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.03.005 6	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Sosialisasi Program dan fitur-fitur smart school (Kegiatan)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
	1.01.02.1.03.006 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					200.000.000,00	(Barru, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	tenaga pendidik		1.989.254.735,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	68	68	68		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	68		
			Rehab Pagar SLBN 1 Barru (Paket)			1	200.000.000,00	(Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.03.007 0	Pembangunan Ruang Kelas Baru					2.960.000.000,00	(Luwu, SULAWESI SELATAN), (Soppeng, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Bantaeng, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	2	2	2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah, Sekolah, tenaga pendidik	2		
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan magang, workshop, training kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna peningkatan kompetensi pendukung pembelajaran (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			tenaga pendidik			
			Penambahan Ruang Kelas SLB Al Imam Luwu (Ruang)			1	160.000.000,00	(Luwu, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penambahan Ruang Kelas SLB Asadiyah Cabenge (Ruang)			1	160.000.000,00	(Soppeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penambahan Ruang Kelas SLB Harapan (Ruang)			1	160.000.000,00	(kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Penambahan Ruang Kelas SLB Hati Mulia (Ruang)			1	160.000.000,00	(kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										NASIONAL	DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Penambahan Ruang Kelas SLB Miftahul Jannah Luwu (Ruang)			1	160.000.000,00	(Luwu, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Penambahan Ruang Kelas SLBN 1 Bantaeng (Ruang)			1	320.000.000,00	(Bantaeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Penambahan Ruang Kelas SLBN 2 Makassar (Ruang)			1	320.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Penambahan Ruang Kelas SLB Rama (Ruang)			1	160.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Penambahan Ruang Kelas SLB Syahrrial Al Muadzir (Ruang)			1	160.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Pengadaan peralatan pembelajaran siswa untuk pengelolaan satuan pendidikan (Paket)			1	200.000.000,00	(SMA Wahyu 1 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	250.000.000,00	(Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	250.000.000,00	(Belopa utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Penyediaan Layanan Pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung (Paket)			1	300.000.000,00	(Sanggalangi', Baruppu', KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1.01.02.1.03.007 1			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	Monitoring Pelaksanaan ANBK Pendidikan Khusus (Kegiatan)	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru SLB (Kegiatan)							10	10	10	100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.03.007 9	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah					1.690.000.000,00	(Soppeng, SULAWESI SELATAN), (Enrekang, SULAWESI SELATAN), (Wajo, SULAWESI SELATAN), (Maros, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	3	3	3		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	3		
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Menengah Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKO) (Ruang)			4	520.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Rehabilitasi Ruang Kelas SLBN 1 Enrekang (Ruang)			4	520.000.000,00	(Enrekang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
			Rehabilitasi Ruang Kelas SLBN 1 Makassar (Ruang)			4	520.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
	1.01.02.1.03.008 0	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Ruang Kelas SLBN 1 Wajo (Ruang)			1	130.000.000,00	(Wajo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			DINAS PENDIDIKAN
							200.000.000,00	(Parepare, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2	2	2		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah	2		
			Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SLBN 1 Parepare (Ruang)			1	200.000.000,00	(Parepare, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah			
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1,500,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan			74.610 85.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekolah sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					800.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (SMAN 13 Makassar Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Perangkat Kurikulum Muatan lokal pada satuan pendidikan menengah yang dievaluasi dan			95	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)		sekolah	95					
	1.01.03.1.01.000 2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah					100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik	1			
			Workshop Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Agama (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga Pendidik			
			Workshop Penyusunan Silabus Muatan Lokal Agama (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga Pendidik			
	1.01.03.1.01.000 4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					700.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	100	100	100	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik	100			
			Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Sekolah yg belum menerapkan Kurikulum Merdeka (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga Pendidik			
			Bimtek/Workshop Penyusunan Kurikulum Menengah (Paket)			1	200.000.000,00	(SMAN 13 Makassar Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga Pendidik			
			Bimtek/Workshop Penyusunan Kurikulum Menengah (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga Pendidik			
			Implementasi Kurikulum Merdeka (Kegiatan)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga Pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Agama (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					700.000.000,00	(24 kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			<i>Persentase Perangkat Kurikulum Muatan lokal pada satuan pendidikan khusus yang dievaluasi dan</i>			95	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Pendidik	95				
	1.01.03.1.02.000 2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus					100.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun (Dokumen)</i>	1	1	1	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1					
			<i>Monitoring Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Pendidikan Khusus (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Pendidik				
			<i>Penyusunan Silabus Kurikulum Bahasa Daerah (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Pendidik				
	1.01.03.1.02.000 4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya</i>	1	1	1	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1					
	1.01.03.1.02.000 6	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	<i>Bimtek/Workshop Penyusunan Kurikulum Pendidikan Khusus (Paket)</i>			1	200.000.000,00	(24 kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			<i>Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun (Dokumen)</i>	1	1	1	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik	1	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
			<i>Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Pendidikan Khusus (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Pendidik				
			<i>Workshop Modifikasi Kurikulum Pendidikan Khusus (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Pendidik				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Workshop Penanganan Ketunaan Pendidikan Khusus (Kegiatan) Workshop Pendidikan Inklusif (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa			
						1	250.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Guru			
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					22,068,228,808.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			62,592,339,648.00	DINAS PENDIDIKAN
			Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Persentase Guru SMA yang bersertifikat Persentase Guru SMK yang bersertifikat			1 : 13 53.390 47.410			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Guru Guru Guru			
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					22.068.228.808,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Guru		62.592.339.648,00	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan khusus yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik			70		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Guru	70		
	1.01.04.1.01.000 1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus					21.868.228.808,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Guru		62.492.339.648,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	16	16	16		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Guru, Tenaga Pendidik	16		
			Assessment Guru (Kegiatan)			1	500.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Guru			
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Guru Non ASN (Tahun)			1	15.867.952.008,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			Manajemen Pendataan PTK Non PNS (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			Menyusun Daftar Keadaan/Kebutuhan Guru di Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Guru Non ASN (Tahun)			1	1.300.276.800,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			Pembayaran Jam Mengajar dan Bertugas bagi PTK di Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN (Tahun)			1	1.000.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.01.04.1.01.000 2		Pendistribusian Tenaga Pendidik di Daerah Remote Area (3T) (Tahun)			1	3.000.000.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus					200.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	1	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik	1		
			Pendampingan Persiapan Guru untuk mengikuti seleksi PPG dan Pembuatan Bahan Pendampingan Persiapan Guru untuk mengikuti seleksi PPG (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			Sinkronisasi data PTK pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
5.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					550.000.000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			300.000.000.00	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra			46.450			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					550.000.000,00	(Sekolah Menengah Atas, SULAWESI SELATAN), (Makassar , SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Bahasa dan Sastra Daerah Provinsi yang didata (%)			30		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)		Tenaga Pendidik	30				
	1.01.06.1.01.000 3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi					550.000.000,00	(Makassar , SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Pendidik		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	70	70	70		(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik	70		
			Bimtek/Workshop Penerbitan Karya Sastra (Paket)			1	200.000.000,00	(Sekolah Menengah Atas, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			Bimtek/Workshop Penerbitan Karya Sastra (Paket)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Festival Karya Sastra (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			<i>Monitoring Progres Capaian Karya Sastra (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
			<i>Workshop Penyusunan Karya Sastra (Kegiatan)</i>			1	50.000.000,00	<i>(Makassar , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					805,071,457,409.00							825,828,602,544.00	
	1.02	DINAS KESEHATAN					198,269,211,493.00							191,974,849,377.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					74,797,435,232.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			77,528,819,442.00	DINAS KESEHATAN
			1.02.01.1 Rata-rata Nilai SKP ASN 1.02.01.2 Nilai Rata-Rata Capaian 1.02.01.3 Persentase Temuan LHP			92.000 98.000 85.000									
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					520.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			12		(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)					13		
	1.02.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					250.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)						300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	2		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seksi/ Subbag Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, RSUD Kabupaten/ Kota, UPT Dinas Kesehatah Prov. Sulsel, UPT Vertikal, Lintas Sektor Lintas Program	3		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	250.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seksi/ Subag Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, RSUD Kabupaten/ Kota, UPT Dinas Kesehatah Prov. Sulsel, UPT Vertikal, Lintas Sektor Lintas Program			
						80.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Seksi/ Subag Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, RSUD Kabupaten/ Kota, UPT Dinas Kesehatah Prov. Sulsel, UPT Vertikal, Lintas Sektor Lintas Program		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	80.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					10.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.01.000 4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					15.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., KOTA MAKASSAR)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	15.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					15.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., KOTA MAKASSAR)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	15.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., KOTA MAKASSAR)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	6	6	6		<i>(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan</i>	6		
			<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>			6	150.000.000,00	<i>(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan</i>			
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.641.438.848,00	(Kecamatan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		67.859.010.058,00	DINAS KESEHATAN
			<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)</i>			12		<i>(Dinas Kesehatan Provinsi Sulsawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan</i>	12		
	1.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					64.499.438.848,00	(Kecamatan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		67.687.010.058,00	DINAS KESEHATAN
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)</i>	527	532	616		<i>(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, UPT Transfusi Darah, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut</i>	704		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.02.000 2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			616	64.499.438.848,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, UPT Transfusi Darah, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					8.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, UPT Transfusi Darah, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	25		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	25		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			25	8.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	125		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	125		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			125	50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				2.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				1	2	6		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	6				
						6	2.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan					
	1.02.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					30.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1				
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			1	30.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan					
	1.02.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.02.000 8		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	19	84		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	84		DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)			84	50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	2.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					75.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR), (Kantor BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		120.750.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			3.684		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	3.784		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	5.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					60.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0.00	0.00	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Kab. Sidrap, Kab. Barru, Kota Pare-pare, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu, Kab. Bone, Kab. Bulukumba, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pengelola Barang dan Aset Kabupaten/ Kota	1		
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	60.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Kab. Sidrap, Kab. Barru, Kota Pare-pare, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu, Kab. Bone, Kab. Bulukumba, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pengelola Barang dan Aset Kabupaten/ Kota			
	1.02.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.000.000,00	(Kantor BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pengelola Barang dan Aset Kabupaten/ Kota		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.03.000 6		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0.00	0.00	1		(Kantor BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Barang dan Aset BKAD Prov. Sulsel	1		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	5.000.000,00	(Kantor BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Barang dan Aset BKAD Prov. Sulsel			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			Pengelola Barang dan Aset BKAD Prov. Sulsel		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	5.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.866.559.384,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		1.927.059.384,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			5		(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	5		
	1.02.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					140.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		200.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.05.000 3		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00	259		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	259		
			Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			259	140.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1.716.559.384,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		1.716.559.384,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	26	26	26		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	26		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			26	1.716.559.384,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					10.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					993.037.000,00	(Jakarta, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN) (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		557.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)		1			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1						
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)		500			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	520						
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					90.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR) (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN) (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	35	15	15		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15						
			Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel (Paket)			15		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					325.937.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	36	20		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	20		
			Langganan Zoom Meeting (Tahun)			1	3.997.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pengadaan CCTV (Jenis)			1	8.240.000,00	(Dinas Kesehatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			20	80.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			Peralatan Podcast (Set)			1	233.700.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)			1	50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30	7	7		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	7		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)			7	12.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					475.100.000,00	(Jakarta, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Luar Wilayah Prov. Sulsel, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06.001 0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Dalam dan Luar Daerah (Laporan)			1	475.100.000,00	(Luar Wilayah Prov. Sulsel, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					40.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		1.00	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan					
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			1	40.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.07.000 5		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			54		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	54		
		Pengadaan Mebel					50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	3	3		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	3			
			Pengadaan Mebel (Paket)			3	50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.02.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	2		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	2			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			2	50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.000.000,00	(Kecamatan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehata Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			13		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		13			
	1.02.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					700.000.000,00	(Dinas Kesehatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		720.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	12				
			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	700.000.000,00	(Dinas Kesehatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan					
	1.02.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000,00	(Dinas Kesehata Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			1	10.000.000,00	(Dinas Kesehata Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.891.400.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	64	5.605.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			64	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan						
	1.02.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					460.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	34	315.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	34	34	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			34	460.000.000,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.09.000 5	Pemeliharaan Mebel					20.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	15		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	15		
			Pemeliharaan Mebel (Unit)			15	20.000.000,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					111.400.000,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	2		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	2		
			Pemeliharaan Coldroom, Coldchain, Frezeer Vaksin Serta Genset Gudang Vaksin (Unit)			4	71.400.000,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			2	40.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5.200.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	1		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Tahap I (Unit)			1	200.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
		Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Tahap I (Unit)			1	5.000.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.02.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	2		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	2		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			2	50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2		(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	2		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			2	50.000.000,00	(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					120,548,707,961.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			112,386,029,935.00	DINAS KESEHATAN
			1.02.02.1 Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6) (%)			75%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			1.02.02.2 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) (%)			97%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			1.02.02.3 % Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi (%)			95%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			1.02.02.4 % Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi (%)			90%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			1.02.02.5 % Rumah Sakit yang Terakreditasi (%)			85%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			1.02.02.6 % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan			100%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			1.02.02.7 % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (SPM) (%)			100%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			1.02.02.8 Angka Kematian Akibat Penyakit Menular (per 100.000 penduduk)			10/100.000 Penduduk			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.02.02.9 Cakupan Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular (%)			90%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk	% Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (%) Rasio jumlah TT (Tempat Tidur) terhadap jumlah penduduk (%) % Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga (%) % Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bergerak (%)			100	18.226.758.299,00	(Seluruh RSUD Sulsel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	100	11.388.021.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan) Pelayanan Kesehatan Bergerak Daerah Terpencil /Sangat Terpencil SULSEL PADAIDI (Layanan)	1.00	0.00	1.00	500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
								(Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1.00		
						1	500.000.000,00	(Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.01.002 5	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					680.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		780.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel	1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.01.002 7		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	680.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel			
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						17.046.758.299,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN) (Dinas				Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel		10.058.021.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	25	3	4		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balita, Fasilitas Layanan Kesehatan, Masyarakat, Ibu Hamil, Pasien IMS, Warga Binaan Permasyarakatat an, Populasi Kunci (LSL, Waria, WTS, Pengguna Jarum Suntik), Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Warga Binaan Permasyarakatat an, Populasi Kunci (LSL, Waria, WTS, Pengguna Jarum Suntik), Masyarakat, Fasilitas Pelayanan	4		
			Logistik VAR (Vaksin Anti Rabies) (Paket)			1	500.115.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orang yang telah digigit anjing			
			Obat obatan Buffer Stock Provinsi (Paket)			1	300.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitas Layanan Kesehatan, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Obat-obatan untuk Intervensi Stunting (Paket)			1	4.089.035.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balita			
			Pengadaan Obat (Dak Non Fisik) (Paket)			1	9.958.021.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel			
			Pengadaan Rapid Diagnostic Test (RDT) Malaria (Paket)			1	150.000.000,00	(Kabupaten Toraja Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Suspek Malaria			
			Pengadaan Rapid HIV (Paket)			1	733.837.299,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Warga Binaan Perkesmas an, Populasi Kunci (LSL, Waria, WTS, Pengguna Jarum Suntik)			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pengadaan Rapid RDT HBsAg (HEPATITIS) (Paket)</i>			1	850.000.000,00	<i>(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Ibu Hamil, Pasien IMS, Warga Binaan Perumahan an, Populasi Kunci (LSL, Waria, WTS, Pengguna Jarum Suntik)</i>			
			<i>Pengadaan Rapid Tes Salmonella Tifoid (Paket)</i>			1	465.750.000,00	<i>(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Masyarakat yang sudah diperiksa dianggap klinis</i>			
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	<i>% Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan</i>			100	101.661.275.662,00	(SULAWESI SELATAN). (Dinas			04.Peningkatan Kesejahteraan	Masyarakat yang sudah		100.095.008.935,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.000 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					291.675.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat yang sudah diperiksa dianggap klinis		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	91015	91015	95565		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Terdampak Bencana Besar, Pengelola Program Krisis Kesehatan	100116		
			Monitoring dan Evaluasi Program Krisis Kesehatan Berbasis Resiko (Dokumen)			1	80.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program Krisis Kesehatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.000 2		Perjalananan Dinas dalam rangka Penanggulangan Bencana/ Krisis Kesehatan (Dokumen)			1	211.675.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Terdampak Bencana Besar			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						363.960.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Terdampak Bencana Besar	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3826.00	3826.00	4017.00		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat, Populasi penderita dan kontak erat	4208.00		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dak Non Fisik) (Laporan)			1	300.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.000 3		Verifikasi Sinyal/ Pelacakan Kontak penyakit Berpotensi Wabah Dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Hewan berbisa, NTDS Dan Penyakit Menular Lainnya (Laporan)			1	63.960.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Populasi penderita dan kontak erat			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak					3.630.482.800,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Makassar, KOTA (Kota Makassar, Kota Palopo, Kota			Populasi penderita dan kontak erat		2.872.641.000,00	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	1	1		(Makassar, KOTA (Kota Makassar, Kota Palopo, Kota	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK,			Bidan, Pengelola KIA	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Monitoring dan Evaluasi AMPSR bagi tenaga Kesehatan di Tingkat Provinsi (Dokumen)			1	157.925.200,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim AMPSR Provinsi dan kab/kota, Dokter, Bidan, Pengelola KIA dan gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota dan Staf Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selata			
			Orientasi Kalakarya MTBS Bagi Tenaga Kesehatan di Tingkat Provinsi (Dokumen)			1	147.590.400,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala seksi kesga dan gizi dan pengelola program anak Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota dan Staf Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			Orientasi pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi penyandang disabilitas bagi petugas kesehatan di fasyankes (Dokumen)			1	135.915.200,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan dan Pengelola Disabilitas di 24 kab/kot			
			Orientasi Skrinning Hypothiroid Kongenital Bagi Tenaga Kesehatan di RS / Puskesmas / Klinik / TPBM yang melayani persalinan di Tingkat Provinsi (Dokumen)			1	161.072.800,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bidan Puskesmas dan perugas laboratorium RS terpilih, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota dan Staf Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelatihan PONED bagi Tenaga Kesehatan di Tingkat Provinsi (Dokumen) Pendampingan Kematian AKI dan AKB (Kemiskinan Ekstrim) (Dokumen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	190.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bidan, Pengelola KIA dan gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota dan Staf Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
						1	100.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RS di 24 kab/Kota			
						1	2.422.641.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola rogram Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Keluarga di Tingkat Provinsi (Dokumen) Pertemuan Lintas Sektor dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Se- Sulsel dalam rangka Penanganan Disabilitas (Dokumen) Rapat Koordinasi LP LS tentang Pelayanan Kesehatan Keluarga di Tingkat Provinsi (Dokumen)			1	211.193.200,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola KIA dan gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota Lintas Sektor dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas dan Staf Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Pengelola KIA dan gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota, Lintas Sektor dan Lintas Program, dan Staf Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (ONLINE)			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.000 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut					693.579.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., KOTA MAKASSAR)				Pengelola KIA dan gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota, Lintas Sektor dan Lintas Program, dan Staf Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (ONLINE)		988.179.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola rogram Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat, Pengelola Kespro dan KB dinas kesehatan kab/kota	1		
			Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Lanjut Usia di Tingkat Provinsi (Dokumen)			1	5.400.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Kespro dan KB dinas kesehatan kab/kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.000 6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansia (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	688.179.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola rogram Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					6.434.724.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Makassar KOTA				Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola rogram Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	5.214.259.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1000 HPK dan LPLS Terkait Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola rogram Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat, Pengelola Gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota, Lintas Sektor	1.00		
			Pelacakan, Investigasi dan Konseling Gizi Bagi Kemiskinan Ekstrem dan Penyandang Disabilitas TK.Kab/Kota (Dokumen)			1	150.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas Gizi Puskesmas dan Penanggungjaw ab Program Kesga dan Gizi Provinsi dan Kab/Kota, OPD Terkait serta masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelaksanaan Pendampingan Gizi Desa Dalam Aksi Stop Stunting (Dokumen)			1	5.910.965.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1000 HPK dan LPLS Terkait Kesehatan			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	214.259.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola rogram Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat			
			Pertemuan Pemutakhiran Data e-PPPGMB Tk Provinsi (Dokumen)			1	140.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota, Lintas Sektor dan Lintas Program			
			Pertemuan Penguatan Program Gizi Kia di Tk.Provinsi (Dokumen)			1	19.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota, Lintas Sektor dan Lintas Program			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.000 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					762.594.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN). (Kecamatan Kajang, KAB. BULUKUMBA), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan				Pengelola Gizi, Kepala seksi kesga dan gizi Dinas Kesehatan di 24 Kab/Kota, Lintas Sektor dan Lintas Program		850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	1	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	ASN dan Non ASN Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Kelompok Pekerja Informal, Penyandang Disabilitas, Petugas Puskesmas, Puskesmas, DTPK dan Masyarakat, Usia Produktif dan anak sekolah			
			Orientasi K3 Fasyankes (Dokumen)			1	10.600.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas Puskesmas			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembinaan dan Pengawasan POS Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Untuk Masyarakat Menengah Ke Bawah (Dokumen)			1	80.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Pekerja Informal			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	550.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Usia Produktif dan anak sekolah			
			Pengukuran Kebugaran Penyandang Disabilitas (Dokumen)			1	9.994.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Disabilitas			
			Peningkatan layanan kesehatan kerja dan olahraga di Daerah Terpencil (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Puskesmas, DTPK dan Masyarakat			
			Senam Kebugaran Jasmani Bagi Pegawai Dinas Kesehatan (Dokumen)			1	12.000.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN Dinas Kesehatan Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.000 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					611.770.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Desa Turunganberu, KAB. BULUKUMBA), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan				ASN dan Non ASN Dinas Kesehatan Prov. Sulsel		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anggota Forum KKS dan Pokja KKS, Masyarakat Desa, Masyarakat Desa / Kelurahan, OPD SMA Lingkup Pemerintah Prov Sulsel di Kab/ Kota, Pedagang/Penj ual, Pengelola Pasar dan Masyarakat sekitar Pasar, penderita /kelompok masyarakat rentan, Tim Pembina dan Forum KKS	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Implementasi Phast (Particypatori hygine and Sanitation Transformation) Pasar Sehat di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional. (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pedagang/Penjual, Pengelola Pasar dan Masyarakat sekitar Pasar			
			Pelaksanaan Pemicuan 5 Pilar STBM di daerah miskin ekstrem dan lokus stunting (Dokumen)			1	150.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Desa / Kelurahan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemantauan kasus penyakit (sanitasi lingkungan) (Dokumen)			1	80.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. TanaToraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			penderita /kelompok masyarakat rentan			
			Pembinaan dan Verifikasi Kabupaten Kota Sehat Tingkat Prov Sulsel (Dokumen)			1	91.970.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Pembina dan Forum KKS			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penilaian Kesehatan Lingkungan Perkantoran dan Sekolah (Dokumen)			1	80.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD SMA Lingkup Pemerintah Prov Sulsel di Kab/ Kota			
			Peningkatan layanan kesehatan lingkungan (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kabupaten Bulukumba Desa Turunganberu, SULAWESI SELATAN) (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Desa			
			Pertemuan Peningkatan Kapasitas Forum / Pokja Kabupaten Kota Sehat (Dokumen)			1	9.800.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anggota Forum KKS dan Pokja KKS			
		1.02.02.1.02.001 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						2.140.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Anggota Forum KKS dan Pokja KKS	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Kabupaten/ Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Kabupaten/Kota, Puskesmas, UTD/UTDRS/PMI, PMI	1		
			Bantuan PMI (Dokumen)			1	2.000.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMI			
			Pembinaan pemanfaatan Toga dan Akupresur bagi kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional (Dokumen)			1	80.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Kabupaten/ Kota			
			Pertemuan Koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota/UTDRS/UTD PMI dalam rangka meningkatkan Kerjasama program Quickwins Pelayanan Darah (Dokumen)			1	60.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Kabupaten/Kota, Puskesmas, UTD/UTDRS/PMI			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.001 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					2.473.635.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kota Palopo, Kota				Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Kabupaten/Kota, Puskesmas, UTD/UTDRS/PMI		1.049.455.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit	1	1	1			DAK Non Fisik-BOKKB-BOK,			Anak Kelas 1 dan 2 Sekolah	1		
			Bimbingan Teknik Terpadu Program P2PTM Prioritas (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Seksi P2PTM dan Keswa Kab/Kota, Pengelola PTM Kab/Kota dan Puskesmas			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bimbingan teknis Supervisi Program diare di Kab/Kota (Dokumen)			1	32.640.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program Diare Kab/Kota			
			Deteksi Dini Hepatitis B Pada Anak Usia Remaja (Dokumen)			1	150.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Usia Remaja (Siswa SMU)			
			Deteksi Dini Hepatitis B pada ASN Pemprov beresiko (Dokumen)			1	97.290.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Dokumen)			1	150.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Deteksi Dini PTM pada 10 Desa Lokus (Dokumen) Evaluasi Skrining ILTB dan Pemberian TPT (Dokumen) Fasilitasi Assessment dengan CFR Dengue Tinggi (Dokumen) Kegiatan Pemberdayaan Orang yang pernah mengalami Kusta (OYPMK) dalam rangka Penemuan Kasus Kusta Secara DiniKegiatan Pemberdayaan Orang yang pernah mengalami Kusta (OYPMK) dalam rangka Penemuan Kasus Kusta Secara Dini (Dokumen) Mentoring Klinis Program HIV AIDS dan IMS (Dokumen)			1	300.000.000,00	(Kabupaten selayar, Kabupaten bulukumba, Kabupaten bantaeng, Kabupaten takalar, Kabupaten wajo, Kabupaten sidrap, Kabupaten enrekang, Kabupaten luwu utara, Kota Makassar, Kota palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat yang ada di daerah terpencil sebanyak 2200			
						1	87.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pasien TB			
						1	40.850.000,00	(10 Kabupaten/ Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program ISPA Kab/Kota/Pusk esmas, Dokter Poli dan Pengelola MTBS			
						1	19.160.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penderita Kusta			
						1	12.300.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Warga Binaan Permayarakat an, Populasi Kunci (LSL, Waria, WTS, Pengguna Jarum Suntik)			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Monitoring dan Evaluasi Penyakit Filariasis dan Cacingan Lainnya di Kab/Kota (Dokumen) On The Job Cluster bagi Pengelola Program Kusta (Dokumen) Orientasi SIHA 2.1 di Kabupaten Kota (Dokumen) Pemeriksaan HCV RNA Suspek Penderita Hepatitis C (Dokumen) Pemeriksaan Kecacingan pada anak Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidayah (Dokumen) Pemetaan Populasi Kunci di Kabupaten Kota (Dokumen)			1	7.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program Filariasis dan Cacingan Kab/Kota dan Pengelola Program Filariasis dan Cacingan Puskesmas			
						1	30.840.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program Kusta			
						1	200.000.000,00	(Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Layanan di 5 Kabupaten/ Kota			
						1	7.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Suspek Penderita Hepatitis C			
						1	150.000.000,00	(Kabupaten Pangkep, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar/Madrasa h Ibtidayah			
						1	2.150.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			LSL (Laki Sama Laki), Waria, WTS (Wanita Tuna Susila dan Pengguna Jarum Suntik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dak Non Fisik) (Dokumen)</i>			1	549.455.000,00	<i>(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)</i>	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			<i>Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Masyarakat</i>			
			<i>Peningkatan Kapasitas Pengelola Program pengendalian penyakit Zoonosis dengan pendekatan One Health (Dokumen)</i>			1	4.300.000,00	<i>(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Pengelola Program Zoonosis Kab/Kota, Surveilans Kab/Kota, Pengelola Program Promkes Kab/Kota, dan Dinas Pernakanan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota.</i>			
			<i>Perayaan Pekan Imunisasi Dunia (PID) (Dokumen)</i>			1	80.000.000,00	<i>(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Puskesmas yang Berprestasi</i>			
			<i>Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Surveilans PD3I cakupan imunisasi (Dokumen)</i>			1	100.000.000,00	<i>(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Petugas Imunisasi dan Surveilans Kabupaten/ Kota</i>			
			<i>Pertemuan Validasi Data Program P2PTM bagi Pengelola Program Kab/Kota (Dokumen)</i>			1	17.400.000,00	<i>(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Pengelola Program P2PTM di 24 Kab/Kota</i>			
			<i>Skrining Infeksi Laten TB pada Pegawai Pemprov Sulsel (Dokumen)</i>			1	99.375.000,00	<i>(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Kontak erat keluarga pegawai Pemprov. Sulsel yang TB dan Ketugas Kesehatan</i>			
			<i>Skrining TB dan Edukasi pada siswa Sekolah (Dokumen)</i>			1	139.175.000,00	<i>(Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Siswa Sekolah Menengah Atas</i>			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sosialisasi Pengendalian Hepatitis C (Dokumen)			1	41.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Usia Remaja			
			Sosialisasi tentang bahaya penyakit menular (Dokumen)			1	80.000.000,00	(Kabupaten Bulukumba Kecamatan Bontobahari, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Workshop Rehabilitasi Besumber Daya Masyarakat (RBM) Gangguan Fungsional Bagi Pengelola Program Kab/Kota dan Lintas Sektor Terkait (Dokumen)			1	25.700.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program Gangguan Gangguan Indera dan Fungsional Dinas kesehatan Kab/kota dan Puskesmas, Kader Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, organisasi disabilitas			
1.02.02.1.02.001 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						274.460.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program Gangguan Gangguan Indera dan Fungsional Dinas kesehatan Kab/kota dan Puskesmas, Kader Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, organisasi disabilitas		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jamaah Haji di Asrama Haji Sudiang, Masyarakat , Pengelola Program Haji Kab./Kota, Petugas Haji Embarkasi/Deb arkasi, Tanaga Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Haji	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemantauan embarkasi debarkasi faktor resiko dan pelayanan kesehatan jemaah haji (Dokumen)			1	23.400.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jamaah Haji di Asrama Haji Sudiang			
			Pembinaan Pengelola Program Kesehatan Haji di Kab/Kota (Dokumen)			1	20.400.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program Haji Kab./Kota			
			Rapat Koordinasi Embarkasi/Debarkasi (Dokumen)			1	2.660.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas Haji Embarkasi/Deb arkasi			
			Sosialisasi Haji Sehat (Dokumen)			1	140.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Workshop Pemeriksaan Kesehatan Haji (Dokumen)			1	88.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tanaga Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Haji			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.001 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					200.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Tanaga Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Haji		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			Pengelola Program Dinkes Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Masyarakat	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.001 4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	200.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Pengelola Program Dinkes Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Masyarakat			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA					1.100.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., KOTA MAKASSAR)			Pengelola Program Dinkes Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	3446	130	130		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaa n NAPZA di Sekolah, Pemeriksaan Narkoba Pra Nikah pada Masyarakat	130		
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Sekolah (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaa n NAPZA di Sekolah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.001 6		Pelaksanaan Program SULSEL BERSINAR GENCARKAN (Dokumen)			1	1.000.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeriksaan Narkoba Pra Nikah pada Masyarakat			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					81.616.945.162,00	(Kecamatan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pemeriksaan Narkoba Pra Nikah pada Masyarakat		81.800.170.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BKAD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Masyarakat miskin yang ditanggung Pemerintah, Pengelola Data, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.001 7		Kontribusi Jaminan Kesehatan untuk PBI (Dokumen)			1	81.522.615.162,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat miskin yang ditanggung Pemerintah			
			PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN GRATIS INTEGRASI KE JKN (Dokumen)			1	53.690.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BKAD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota			
			PERTEMUAN REKONSILIASI DATA KEPESERTAAN PBI-JK DAN PBPU APBD (Dokumen)			1	40.640.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Data, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS			
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan						123.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Pengelola Data, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat, Laboratorium Rujukan	1		
			Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat			
			Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/ Penyakit Infeksi emerging Ke Laboratorium Rujukan (Dokumen)			1	23.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laboratorium Rujukan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.001 8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota					300.231.600,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Laboratorium Rujukan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola SPM Provinsi dan Pengelola SPM Kabupaten/ Kota	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.001 9		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten / Kota (Dokumen)			1	300.231.600,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola SPM Provinsi dan Pengelola SPM Kabupaten/ Kota			
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan					318.989.100,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan				Pengelola SPM Provinsi dan Pengelola SPM Kabupaten/ Kota		690.304.935,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat, Masyarakat dan Penyandang Disabilitas, Masyarakat Di Daerah Terpencil dan sangat terpencil, Pengelola Aspak Puskesmas di Kabupaten/ Kota, Pengelola	1		
			Monitoring dan Evaluasi Aspak Puskesmas (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Aspak Puskesmas di Kabupaten/ Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembinaan Pelayanan Kesehatan (Dak Non Fisik) (Dokumen) Perawatan Kesehatan Masyarakat Pada Sasaran Keluarga Resiko Tinggi (Dokumen) PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS DATA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALKES (ASPAK) RUMAH SAKIT (Dokumen) Pertemuan Koordinasi Pengelola Program Gigi Mulut Tingkat Provinsi SULSEL, Koordinasi Pengelola Perkesmas Tingkat Provinsi SULSEL (daring), Evaluasi Pelaksanaan BLUD (daring) (Dokumen)			1	200.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat			
						1	49.759.100,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Penyandang Disabilitas			
						1	13.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola ASPAK RS Pemerintah se Sulsel			
						1	5.730.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Di Daerah Terpencil dan sangat terpencil			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.002 0	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas					52.730.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Di Daerah Terpencil dan sangat terpencil		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Puskesmas yang akan di Registrasi	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.002 1		Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)			1	52.730.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Puskesmas yang akan di Registrasi			
		Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	1	1	37.800.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Puskesmas yang akan di Registrasi	1	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Pendampingan investigasi KIPI (Dokumen)		1	37.800.000,00	(Desa/ Kelurahan dugaan KIPI, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Kesehatan Provinsi					
	1.02.02.1.02.002 3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	19	0.00	3	184.700.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Bappeda Bagian Organisasi Setda Pemda Kabupaten/ Kota, Penanggung Jawab PSC 119 dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab/Kota Penanggung Jawab PSC 119 dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab/Kota	2	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			EVALUASI IMPLEMENTASI PUBLIC SAFETY CENTRE (PSC) 119 (Dokumen)			1	34.700.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.003 0		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Dokumen)			1	150.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Bappeda Bagian Organisasi Setda Pemda Kabupaten/ Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					50.000.000,00					Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Bappeda Bagian Organisasi Setda Pemda Kabupaten/ Kota		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1826423	1826423	1826423		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1826423		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga)			1.826.423	50.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					203.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat		203.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			% Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi			100	(SULAWESI SELATAN)		Masyarakat	100					
		1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					203.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		203.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Masyarakat Melek IT.	1.00		
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)			1	203.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Masyarakat Melek IT.			
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					457.674.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea., KOTA MAKASSAR)		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata		Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Masyarakat Melek IT. Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Masyarakat Melek IT.	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			% RS Kelas B yang mendapatkan bimtek terkait izin berusaha berbasis resiko (%)			100		(SULAWESI SELATAN)					100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.04.000 1		% Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang teregistrasi menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) & 10 kali (%)			50		(SULAWESI SELATAN)				Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Masyarakat Melek IT. Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Masyarakat Melek IT.	70		
			% RS melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) (%)			40		(SULAWESI SELATAN)				75			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					13.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Masyarakat Melek IT.		150.000.000,00	
		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	31	31	100		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Direktur RS se-Sulsel dan Dinas Kesehatan Kab/Kota	123			
		PERTEMUAN KOORDINASI PERIJINAN FKRTL (Dokumen)			1	13.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Direktur RS se-Sulsel dan Dinas Kesehatan Kab/Kota				
	1.02.02.1.04.000 2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit					401.874.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR)				Direktur RS se-Sulsel dan Dinas Kesehatan Kab/Kota		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	31	31	60		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim BPRS, Sekretariat BPRS Provinsi Sulsel dan RS Kab/Kota, Tim Pengelola SISROUTE dan Manajemen RSUD Lokus	70		
			DUKUNGAN DAN PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT (BPRS) PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dokumen)			1	351.874.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim BPRS, Sekretariat BPRS Provinsi Sulsel dan RS Kab/Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.04.000 3		MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN SISRUTE DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN RUJUKAN DI KAB./KOTA (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. TanaToraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Pengelola SISRUTE dan Manajemen RSUD Lokus			
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					42.300.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Tim Pengelola SISRUTE dan Manajemen RSUD Lokus		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	31	31	100		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Direktur RS se- Sulsel dan BPJS, Komite Mutu/Tim Mutu RS, Koordinator SISRUTE dan Rekam Medik RS se- Sulsel	123		
			EVALUASI IMPLEMENTASI KELAS RAWAT INAP STANDAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (KRIS JKN) DI RS TK. PROVINSI SULAWESI SELATAN (Dokumen)			1	14.400.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Direktur RS se- Sulsel dan BPJS			
			PERTEMUAN EVALUASI PELAPORAN INDIKATOR NASIONAL MUTU (INM) DAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) DI RS (Dokumen)			1	14.400.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Komite Mutu/Tim Mutu RS			
			SOSIALISASI UPDATE APLIKASI DAN EVALUASI PELAPORAN SIRS SERTA EVALUASI IMPLEMENTASI REKAM MEDIK ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT (Dokumen)			1	13.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinator SISRUTE dan Rekam Medik RS se- Sulsel			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1,722,485,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			700,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.02.03.1 % Pemenuhan SDMK Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)			85%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinator SISROUTE dan Rekam Medik RS se- Sulsel			
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					123.696.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kesehatan, KOTA PALOPO)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Koordinator SISROUTE dan Rekam Medik RS se- Sulsel		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			% Puskesmas dengan Dokter (%)			99	(SULAWESI SELATAN)			Koordinator SISROUTE dan Rekam Medik RS se- Sulsel	99				
			% Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan (%)			82	(SULAWESI SELATAN)			Koordinator SISROUTE dan Rekam Medik RS se- Sulsel	84				
			% RSUD Kabupaten/Kota dengan Dokter Spesialis 4 Dasar dan 3 Penunjang (%)			74	(SULAWESI SELATAN)			Koordinator SISROUTE dan Rekam Medik RS se- Sulsel	76				
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan					123.696.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Makassar, KOTA MAKASSAR)				Koordinator SISROUTE dan Rekam Medik RS se- Sulsel		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)			28885	28885	28885	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tenaga Kesehatan Kabupaten/ Kota	30261				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi dan Desk Penyusunan Formasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Laporan) PEMUTAKHIRAN DATA TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA (Laporan)			1	30.932.000,00	(Jakarta, Luar Wilayah) (Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tenaga Kesehatan Kabupaten/ Kota			
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.598.789.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (SII AWFISI			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kesehatan Kabupaten/ Kota		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Tenaga SDM yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pelatihan Terakreditasi (Orang)			750		(SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kesehatan Kabupaten/ Kota	780		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.1.02.000 1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan					413.985.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea, KOTA MAKASSAR), (Makassar, KOTA MAKASSAR), (UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Tenaga Kesehatan Kabupaten/ Kota		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	564.00	564.00	592.00		(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Fungsional Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan	620.00		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Laporan)			1	200.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Laporan)			1	100.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan			
			Rapat Koordinasi Tenaga Kesehatan Tingkat Nasional (Laporan)			1	15.466.000,00	(Jakarta, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan			
			Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan Pemprov. Sulawesi Selatan (Laporan)			1	98.519.000,00	(Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fungsional Kesehatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.1.02.000 2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					1.184.804.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Fungsional Kesehatan		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5	5	5		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kader Kesehatan, Pengelola Alkes Kab/Kota, Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan 24 kab/kota	5		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Edukasi Gerakan Masyarakat Terhadap Penggunaan Alkes dan PKRT yang Benar (Dokumen)			1	259.120.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan			
			Pembekalan Produksi Alkes dan PKRT Kelas 1 sesuai CPPKRTB dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Dokumen)			1	222.152.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan			
			Pembekalan SDM dalam pengawasan Produk Alkes, Alkes DIV, PKRT, Toko Alkes (Dokumen)			1	3.600.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Alkes Kab/Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penilaian Kader Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Dokumen)			1	180.385.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kader Kesehatan			
			Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Dokumen)			1	422.313.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan 24 kab/kota			
			Pertemuan Pembekalan SDM dalam rangka Pengawasan Pelaporan Obat dan vaksin (Dokumen)			1	97.234.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan			
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					179,383,300.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			250,000,000.00	DINAS KESEHATAN
			1.02.04.1 % Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan			100%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan			
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					179.383.300,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN). (SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kesehatan		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			% Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang			83		(SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kesehatan	85		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.04.1.01.000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						179.383.300,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kesehatan		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	189.00	189.00	189.00		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Tenaga Kesehatan,Tenaga Kefarmasian, Produksi Alkes dan PKRT	189.00			
		Jejaring obat dan pangan Provinsi/Kab/Kota (Pertemuan) (Paket)			1	81.863.300,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Tenaga Kesehatan,Tenaga Kefarmasian				
		Pelatihan Sertifikasi PJT dalam Penerapan Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) (Laporan)			1	81.320.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Produksi Alkes dan PKRT				
		Pembekalan Perizinan Produksi Alkes dan PKRT melalui OSS RBA (Laporan)				1	16.200.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Produksi Alkes dan PKRT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1,021,200,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,110,000,000.00	DINAS KESEHATAN
			1.02.05.1 % Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS (%)			50%			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Produksi Alkes dan PKRT			
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					250.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (10 Kecamatan, KAB. TAKALAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Produksi Alkes dan PKRT	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			% Capaian Pelaksanaan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,			100		(SULAWESI SELATAN)			Produksi Alkes dan PKRT	100			
	1.02.05.1.01.000 1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						250.000.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare- pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Produksi Alkes dan PKRT	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen) PENGGERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MELALUI KAMPANYE (Dokumen) Sosialisasi Saka Bakti Husada bagi anggota Pramuka dengan melibatkan Penyandang Disabilitas (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			LP, LS , Ormas Terkait Germas, Pembina Pramuka dan anggota Pramuka Penyandang Disabilitas LP, LS , Ormas Terkait Germas Pembina Pramuka dan anggota Pramuka Penyandang Disabilitas	1		
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					508.360.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Kab. Tana Toraja (22 PKM), KAB. TANA TORAJA), (Dinas Kesehatan, KOTA PALOPO)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pembina Pramuka dan anggota Pramuka Penyandang Disabilitas		627.160.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.1.02.000 1		% Capaian Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah ProvinsiÃ A (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Pembina Pramuka dan anggota Pramuka Penyandang Disabilitas	100		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					508.360.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)			Pembina Pramuka dan anggota Pramuka Penyandang Disabilitas		627.160.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Umum, Tenaga Edukator, LP, LS, Ormas, Ornop, Dunia Usaha, Masyarakat Umum	1		
			PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Dokumen)			1	71.200.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			LP, LS, Ormas, Ornop, Dunia Usaha, Masyarakat Umum			
			PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI PAMERAN (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			LP, LS, Ormas, Ornop, Dunia Usaha, Masyarakat Umum			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	337.160.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Umum, Tenaga Edukator			
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi					262.840.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN), (Dinas Kesehatan, KOTA PALOPO)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Umum, Tenaga Edukator		332.840.000,00	DINAS KESEHATAN
			% Capaian Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Umum, Tenaga Edukator	100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.1.03.000 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM					262.840.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)				Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Umum, Tenaga Edukator		332.840.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Dinkes Kab/Kota, Tim Pokjanal Posyandu	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dak Non Fisik) (Dokumen)			1	262.840.000,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Enrekang, Kab. Toraja, Kab. Toraja Utara., SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Dinkes Kab/Kota, Tim Pokjanal Posyandu			
	1.02	UPT TRANSFUSI DARAH					12,156,943,333.00							7,184,943,333.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1,476,943,333.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			1,204,943,333.00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat			100.000 100.000 80									
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					40.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			40.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, SULAWESI SELATAN)					1		
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, SULAWESI SELATAN)					1		
	1.02.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					20.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			20.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
		Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00	1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT Transfusi Darah	1		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			1	20.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT Transfusi Darah			
	1.02.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					20.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai UPT Transfusi Darah		20.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	100		(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	100		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			100	20.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					371.000.000,00	(Dalam Provinsi Sulawesi Selatan dan Luar Provinsi (Untuk koordinasi/ konsultasi bersama kementerian dan lembaga tingkat pusat lainnya), SULAWESI SELATAN), (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat		369.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat	1			
			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			Masyarakat	1			
	1.02.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat		6.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0.00	0.00	1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah	1		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			1	8.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah			
	1.02.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					23.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor UPT Transfusi Darah		23.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah	1		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK dan kelengkapan kantor lainnya) (Paket)			1	23.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah			
	1.02.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					180.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor UPT Transfusi Darah		180.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06.000 8		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	1	1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah	1		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Labeling Kantong Darah, Hasil Pengujian Laboratorium, dan cetak lainnya) (Paket)			1	180.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor UPT Transfusi Darah	1	10.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0.00	1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor UPT Transfusi Darah					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Jamuan Tamu) (Orang)			100	10.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor UPT Transfusi Darah							
		1.02.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00	(Dalam Provinsi Sulawesi Selatan dan Luar Provinsi (Untuk koordinasi/ konsultasi bersama kementerian dan lembaga tingkat pusat lainnya), SULAWESI SELATAN)			Kantor UPT Transfusi Darah	1	150.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00			1	1		(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai UPT Transfusi Darah						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Rapat/ Koordinasi/ Konsultasi/ Bimtek, Makan dan Minum Rapat, Jasa Narasumber dan sejenisnya) (Tahun)			1	150.000.000,00	(Dalam Provinsi Sulawesi Selatan dan Luar Provinsi (Untuk koordinasi/ konsultasi bersama kementerian dan lembaga tingkat pusat lainnya), SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai UPT Transfusi Darah					
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					270.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pegawai UPT Transfusi Darah	1	-	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)				Pegawai UPT Transfusi Darah			
	1.02.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					240.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			Pegawai UPT Transfusi Darah	1	-	UPT TRANSFUSI DARAH	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00	0.00	1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor UPT Transfusi Darah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.02.01.1.07.000 6		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			1	240.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	3	30.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR) (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah Kantor UPT Transfusi Darah	3	-	UPT TRANSFUSI DARAH
		Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Operasional dan Manajemen UPT (Unit)			3	30.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah				
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					591.943.333,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor UPT Transfusi Darah		591.943.333,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)		Kantor UPT Transfusi Darah		1			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)		Kantor UPT Transfusi Darah		1			
	1.02.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					191.943.333,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR) (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah	12	191.943.333,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12				Kantor UPT Transfusi Darah					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)			12	191.943.333,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah			
	1.02.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					400.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR) (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah Kantor UPT Transfusi Darah	12	400.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12				Kantor UPT Transfusi Darah					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)			12	400.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah			
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					204.000.000,00	(Kantor UPT TRansfusi Darah, KOTA MAKASSAR), (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor UPT Transfusi Darah		204.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)		Kantor UPT Transfusi Darah		1				
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)		Kantor UPT Transfusi Darah		1				
1.02.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					34.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)				Kantor UPT Transfusi Darah		34.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.01.000 4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, SULAWESI SELATAN) (Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Peralatan dan Mesin Kantor	1		UPT TRANSFUSI DARAH
						1			Peralatan dan Mesin Kantor	1					
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Penambahan Partisi Ruangan dan/ Bangunan Lainnya) (Unit)	0.00	0.00	1	150.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR) (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Mesin Kantor Kantor UPT Transfusi Darah	1	150.000.000,00		
					1	150.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah				
	1.02.02.1.01.000 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Unit)	2.00	0.00	1.00	190.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR) (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah Kantor UPT Transfusi Darah	1.00	190.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
					1	190.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah				
	1.02.02.1.01.001 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1000	1000	3	60.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR) (Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah Kantor UPT Transfusi Darah	2	60.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (Unit)			3	60.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah			
	1.02.02.1.01.002 7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	3	3	4	5.700.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR) (Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah Masyarakat Pendoron Darah	4	1.000.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Pengadaan Bahan Kimia Reagen, Kantong Darah, Makanan dan Minuman Pendoron dan alat/bahan penunjang medik lainnya (Paket)			4	4.700.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendoron Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Bontoala, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendoron Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Tamalate, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendoron Darah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Ujung pandang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Bontoala, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Mariso, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Tamalate, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Mariso, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Wajo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Rappocini, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Wajo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Mamajang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Tallo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Mamajang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Ujung Pandang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Ujung Tanah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Rappocini, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Tallo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			
			Peningkatan Pelayanan Donor Darah (Orang)			200	50.000.000,00	(Kecamatan Ujung Tanah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah			1	230.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pendonor Darah	2	230.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1.02.02.1.02.000 9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0	1	1	180.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pendonor Darah	1	180.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
							180.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat			
							180.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat			
	1.02.02.1.02.001 9	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0.00	0.00	1	50.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1	50.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
							50.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kesehatan			
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			1	100.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)				Tenaga Kesehatan	1	100.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1.02.02.1.03.000 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Paket)	1	1	1	100.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Tenaga Kesehatan	1	100.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
							100.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)				Kantor UPT Transfusi Darah			
							100.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)				Kantor UPT Transfusi Darah			
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Operasional Fasilitas Kesehatan			1	4.200.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kantor UPT Transfusi Darah	1	4.200.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1.02.02.1.04.000 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Unit)	1	1	1	4.200.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor UPT Transfusi Darah					
							4.200.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)		Kantor UPT Transfusi Darah					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					50,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			50,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi			5.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor UPT Transfusi Darah			
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					50.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)				Kantor UPT Transfusi Darah		50.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan			1		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)				Kantor UPT Transfusi Darah	1		
							50.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)				Kantor UPT Transfusi Darah		50.000.000,00	UPT TRANSFUSI DARAH
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	0.00	0.00	10		(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan / Penunjang Pada UPT Transfusi Darah	10		
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Orang)			10	50.000.000,00	(Kantor UPT Transfusi Darah, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan / Penunjang Pada UPT Transfusi Darah			
	1.02	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH					12,110,001,540.00							11,815,001,540.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					3,999,869,080.00							3,704,869,080.00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat			2.000									
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					138.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)						138.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			5.000		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)					5		
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)						50.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.01.000 4		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	4		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa	4		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			4	50.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					80.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa		80.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa	3		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			3	80.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa			
		1.02.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					5.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa		5.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.01.000 6		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa	3		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			3	5.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa		3.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa	4		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			4	3.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa			
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					110.280.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa		110.280.800,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12.000		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa	12		
							10.280.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)			Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah UPT LabKesDa		10.280.800,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bagian Keuangan UPT LabKesDa	2				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			2	10.280.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bagian Keuangan UPT LabKesDa					
	1.02.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Bagian Keuangan UPT LabKesDa		100.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bagian Keuangan UPT LabKesDa	12			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)			12	100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Keuangan UPT LabKesDa			
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					159.730.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Bagian Keuangan UPT LabKesDa		159.730.800,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dokumen)			12		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Bagian Keuangan UPT LabKesDa	12		
	1.02.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					9.730.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Bagian Keuangan UPT LabKesDa		9.730.800,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah	3		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			3	9.730.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah			
	1.02.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					150.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah		150.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah	12		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			12	150.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah			
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					223.230.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah		223.230.800,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			6		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah	7			
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			6		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah	7			
	1.02.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					115.500.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah		115.500.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.05.000 3		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00	150		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel)l. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT LabKesDa	150		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			150	115.500.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT LabKesDa			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					7.730.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Pegawai UPT LabKesDa		7.730.800,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel)l. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Administrasi Kepegawaian dan Tenaga UPT LabKesDa	12		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			12	7.730.800,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Administrasi Kepegawaian dan Tenaga UPT LabKesDa				
	1.02.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)					Tenaga Administrasi Kepegawaian dan Tenaga UPT LabKesDa		100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	20		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT LabKesDa	20		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			20	100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT LabKesDa			
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					719.820.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Pegawai UPT LabKesDa		719.820.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Laporan)			12		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pegawai UPT LabKesDa	12			
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			100		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pegawai UPT LabKesDa	150			
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						45.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Pegawai UPT LabKesDa		45.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06.000 2		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor	5		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			5	45.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					200.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Administrasi dan Operasional Kantor		200.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor	3		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			3	200.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor			
		1.02.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Administrasi dan Operasional Kantor		100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06.000 5		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor	3		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)			3	100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					124.820.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Administrasi dan Operasional Kantor		124.820.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor	3		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			3	124.820.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor			
		1.02.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Administrasi dan Operasional Kantor		100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06.000 9		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	3	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor	3		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			3	100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi dan Operasional Kantor			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Administrasi dan Operasional Kantor		150.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT LabKesDa	12		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)			12	150.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT LabKesDa			
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Pegawai UPT LabKesDa		150.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.07.000 6		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			25.000		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai UPT LabKesDa	30		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					150.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Pegawai UPT LabKesDa		150.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	1.00	5.00		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel)Jl. wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah	5.00		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			5	150.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah			
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.003.806.680,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah		2.003.806.680,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			12		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					503.806.680,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah		503.806.680,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	2.00	12.00		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. wijaya Kusuma Raya No. 2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana, Prasarana Umum Perangkat Daerah dan Oprasional Kantor	12.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	503.806.680,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana, Prasarana Umum Perangkat Daerah dan Oprasional Kantor			
	1.02.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.500.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana, Prasarana Umum Perangkat Daerah dan Oprasional Kantor		1.500.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Non ASN UPT LabKesDa	12.00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	1.500.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Non ASN UPT LabKesDa			
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					495.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Non ASN UPT LabKesDa		200.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.02.01.1.09.000 1		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Jenis)			3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Non ASN UPT LabKesDa	5			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					250.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Non ASN UPT LabKesDa		-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas / Operasional Kantor			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				7	250.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas / Operasional Kantor		
	1.02.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Kendaraan Dinas / Operasional Kantor		-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				3	45.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah
	1.02.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah		200.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	1.00	3.00		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah	3.00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			3	200.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					7,710,132,460.00							7,710,132,460.00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program (%)			85.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					5.564.932.460,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah		5.564.932.460,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi (jenis)			4		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah	4		
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.364.932.460,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah		1.364.932.460,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.01.001 0		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	3	3	10		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel)l. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah	10		
			Rehabilitasi Gedung Pelayanan LABKESDA (Unit)			10	1.364.932.460,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah			
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					1.100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah		1.100.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5.00	5.00	15		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel)l. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah	20		
			Pengadaan Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Spesialistik, BHP dan Logistik Kesehatan (Unit)			15	1.100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah			
		1.02.02.1.01.001 7	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah		100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.01.002 7		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	10	10	50		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah	60		
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (Unit)			50	100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah			
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					3.000.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah		3.000.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	3	3	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3		
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Paket)			3	3.000.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.895.200.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.895.200.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.000 7	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Jenis)				3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3		
							100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)			Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	4	4	4		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel)Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga UPT LabKesda dan Masyarakat Umum	4			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)			4	100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga UPT LabKesda dan Masyarakat Umum				
	1.02.02.1.02.001 9	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan					1.795.200.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga UPT LabKesda dan Masyarakat Umum		1.795.200.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	12	12	12		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSel)Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)			12	1.795.200.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kesehatan			
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					250.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kesehatan		250.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Terlaksananya penertiban Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi (Jenis)			2		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Kesehatan	2			
	1.02.02.1.04.000 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					250.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kesehatan		250.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)	3	3	3		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana UPT LabKesDa	3		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Unit)			3	250.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana UPT LabKesDa			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					400,000,000.00							400,000,000.00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi (%)			70.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana UPT LabKesDa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana UPT LabKesDa		100.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Orang)			30		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Sarana dan Prasarana UPT LabKesDa	40			
			Jumlah PNS Pemprov SulSel yang telah bersertifikat kompetensi (Orang)			30		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Sarana dan Prasarana UPT LabKesDa	40			
	1.02.03.1.01.000 1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan					100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana UPT LabKesDa		100.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	10	010	30		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Fasyankes UPT LabKesDa	30		
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Orang)			30	100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Fasyankes UPT LabKesDa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Fasyankes UPT LabKesDa		300.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Orang)			30		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah ProvSulSel Jl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Fasyankes UPT LabKesDa	40			
	1.02.03.1.02.000 1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan					200.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Fasyankes UPT LabKesDa		200.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	20	20	50		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pegawai UPT LabKesDa	50			
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Orang)			50	200.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pegawai UPT LabKesDa				
	1.02.03.1.02.000 2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)				Pegawai UPT LabKesDa		100.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	4	4	4		(UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah Prov.SulSelJl. Wijaya Kusuma Raya No.2 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT LabKesDa	4		
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)			4	100.000.000,00	(UPT LABKESDA PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Wijaya Kusuma Kusuma Raya No.2 Makassar 90222, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT LabKesDa			
	1.02	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT					10,799,335,280.00							10,799,335,280.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8,100,000,000.00							8,100,000,000.00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
			Persentase peningkatan			100.000									
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					8.100.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)						8.100.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD			100.000		(-, SULAWESI SELATAN)					100		
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					8.100.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)						8.100.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1		
			Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat (BLUD)			1	8.100.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					2,449,335,280.00							2,449,335,280.00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
			Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.250.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)				-		1.250.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
			Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan Sarana, Prasarana dan			100.000		(-, SULAWESI SELATAN)				-	100		
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					1.250.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)				-		1.250.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	1	1	1		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Pemenuhan Sarana Prasaranan Rumah Sakit dalam Kondisi Baik (Jenis)			5	1.250.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-				
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.199.335.280,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)				-		1.199.335.280,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT	
	1.02.02.1.02.002 2		Persentase ketersediaan layanan rujukan untuk UKP dan UKM Tingkat			100.000		(-, SULAWESI SELATAN)				-	100			
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit						1.199.335.280,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)				-		1.199.335.280,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	12	12			(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	12		
			Cakupan Ketersediaan Layanan Rujukan untuk UKP dan UKM Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)			12	1.199.335.280,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-				
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					250.000.000.00							250.000.000.00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT	
			Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-				
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					250.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)				-		250.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT	
	1.02.03.1.02.000 1		Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			100.000		(-, SULAWESI SELATAN)				-	100			
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						250.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)				-		250.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi	20	20	20			(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	20		
			Tersedianya SDM yang Trampil dan Berkualitas (Orang)			20	250.000.000,00	(UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-				
	1.02	RSUD LABUANG BAJI					166,579,706,279.00							174,584,742,010.00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					146,392,295,765.00							156,522,064,791.00	RSUD LABUANG BAJI	
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Persentase Peningkatan			100.000 100.000 100.000 12.500										
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					274.750.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)						352.500.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)					6			
	1.02.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)						180.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.01.000 2		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	2.00	2.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instalasi terkait	2.00		
			Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah (Dokumen)			2	150.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instalasi terkait			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				50.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				RSUD. Labuang Baji dan Instalasi terkait		70.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait	1.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)			1	50.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait				
		1.02.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				60.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait		80.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			1.00	1.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait	1.00		
	1.02.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)			1	60.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait			
						2.800.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait		6.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
	1.02.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait	1.00		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	2.800.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait			
	1.02.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.950.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait		6.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD			1.00	1.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait	1.00			
1.02.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)			1	2.950.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4.00	4.00	4.00	5.500.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait	4.00	6.500.000,00	RSUD LABUANG BAJI	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.01.000 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD (Laporan)			4	5.500.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.500.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait		4.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.00	6.00	6.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait	6.00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			6	3.500.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait			
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.481.365.382,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait		77.479.564.791,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait	0		
	1.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					70.429.165.382,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				RSUD. Labuang Baji dan Instansi terkait		77.410.564.791,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0.00	0.00	600.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Rumah Sakit	605.00		
			Gaji dan Tunjangan Pegawai (Orang / Bulan)			600	70.429.165.382,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Rumah Sakit			
	1.02.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					17.200.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit		19.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Rumah Sakit	1.00		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			1	17.200.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Rumah Sakit			
	1.02.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					4.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Administrasi Rumah Sakit		4.500.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Rumah Sakit	1.00		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			1	4.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Rumah Sakit			
	1.02.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					4.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit		5.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	0.00	0.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait	1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.02.000 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	4.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait			
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0.00	0.00	1.00	5.500.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait	1.00	6.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			1	5.500.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait			
	1.02.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	0.00	0.00	3.00	17.500.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait	3.00	29.500.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			3	17.500.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait			
	1.02.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	4.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait	1.00	5.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	4.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait			
		1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)					Rumah Sakit dan Instansi terkait		35.000.000,00
Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)						2	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Rumah Sakit dan Instansi terkait	2			
1.02.01.1.03.000 6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)					Rumah Sakit dan Instansi terkait		35.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0.00	0.00	4.00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait	4.00			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			4	25.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait			
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)					Rumah Sakit dan Instansi terkait		155.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			4	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Rumah Sakit dan Instansi terkait	0			
	1.02.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)					Rumah Sakit dan Instansi terkait		5.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.02.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0.00	0.00	4.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait	4.00		RSUD LABUANG BAJI	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			4	5.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	2.00	20.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Sakit dan Instansi terkait	3.00	150.000.000,00		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			2	20.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jumlah Laporan				
	1.02.01.1.06.000 9	Administrasi Umum Perangkat Daerah					223.050.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Jumlah Laporan		350.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			30		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)			Jumlah Laporan	0				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					223.050.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Jumlah Laporan		350.000.000,00		RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0.00	30.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jumlah Pegawai	35.00			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			30	223.050.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jumlah Pegawai				
	1.02.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.327.130.383,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Jumlah Pegawai		5.250.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			12		(KOTA MAKASSAR)			Jumlah Pegawai	0				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.327.130.383,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Jumlah Pegawai		5.250.000.000,00		RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0.00	0.00	12.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai RS Non ASN	12.00			
			Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	4.327.130.383,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai RS Non ASN				
	1.02.01.1.10.000 1	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.036.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai RS Non ASN		72.900.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
			Jumlah Orang Yang Dilayani melalui BLUD			45000		(KOTA MAKASSAR)			Pegawai RS Non ASN	0				
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					71.036.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai RS Non ASN		72.900.000.000,00		RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0.00	0.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Pendapatan dari BLUD			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	1.00			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Unit Kerja)			1	71.036.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Pendapatan dari BLUD			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					19,942,162,200.00							17,362,677,219.00	RSUD LABUANG BAJI
			Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)			100.000			Pendapatan dari BLUD			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					18.842.162.200,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat		16.262.677.219,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)			4		(KOTA MAKASSAR)			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	0			
	1.02.02.1.01.000 2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					500.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat		750.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0.00	0.00	1.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	1.00		
			Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)			1	500.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat			
	1.02.02.1.01.001 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					17.400.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat		14.212.677.219,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	10.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	10.00		
			Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas LayananKesehatan (Unit)			10	17.400.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat			
	1.02.02.1.01.001 3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					123.513.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat		300.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan	0.00	0.00	5.00		(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	5.00		
			Pemenuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (Unit)			5	123.513.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat			
	1.02.02.1.01.002 7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0.00	0.00	50.00	818.649.200,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat		1.000.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
							(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	60.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Pemenuhan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Paket)			50	818.649.200,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat				
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)			1	100.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	1	100.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	100.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	1.00	100.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)			1	100.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat				
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)			1	500.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)					Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	0	500.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	500.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	1.00	500.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)			1	500.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat			
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan (%)			100	500.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	100	500.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan	0.00	0.00	1.00	250.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	1.00	250.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.04.000 3		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Unit)			1	250.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Rumah Sakit dan Instansi terkait			
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	1.00	250.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Rumah Sakit dan Instansi terkait	1.00	250.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
							Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Unit)	250.000.000,00							
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					245,248,314.00							700,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
			Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi (%)			100			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat			
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan (Orang)				45.248.314,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat		100.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
					10	(KOTA MAKASSAR)			Pegawai Rumah Sakit dan Masyarakat	10					
	1.02.03.1.01.000 1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	10.00	45.248.314,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Rumah Sakit	20.00	100.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Orang)			10	45.248.314,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Rumah Sakit			
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (RSUD Labuang Baji, KOTA MAKASSAR), (RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)				Pegawai Rumah Sakit		600.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI
			Jumlah Pegawai Rumah Sakit yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)			60	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)			Pegawai Rumah Sakit	60				
	1.02.03.1.02.000 1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0.00	0.00	60.00	200.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Rumah Sakit	0.00	600.000.000,00	RSUD LABUANG BAJI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Orang)			60	200.000.000,00	(RSUD. LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Rumah Sakit			
	1.02	RSUD HAJI					107,203,696,099.00							107,106,327,616.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100,306,764,324.00							100,209,395,841.00	RSUD HAJI
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Persentase Peningkatan			81 1 1 100									
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.286.943.689,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)						53.286.943.689,00	RSUD HAJI
			Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu (%)			100		(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)				100			
	1.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					53.286.943.689,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)						53.286.943.689,00	RSUD HAJI
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	484.00	484.00	484.00		(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROV SULAWESI SELATAN, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN RSUD HAJI	484.00		
			GAJI ASN (Orang / Bulan)			484	30.401.616.164,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN RSUD HAJI			
			TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (Orang / Bulan)			484	22.885.327.525,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN RSUD HAJI			
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					97.368.483,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)					ASN RSUD HAJI		-	RSUD HAJI
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (Unit)			1		(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROV SULSEL, KOTA MAKASSAR)				ASN RSUD HAJI	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan SEWA KENDARAAN DINAS (Unit)	0	0		97.368.483,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				ASN RSUD HAJI		-	RSUD HAJI
									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN STRUKTURAL RSUD HAJI			
						1	97.368.483,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN STRUKTURAL RSUD HAJI			
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD (%)			100	46.922.452.152,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				ASN STRUKTURAL RSUD HAJI		46.922.452.152,00	RSUD HAJI
	1.02.01.1.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Tahun)	43451124129.00	49740593635.00	1.00	46.922.452.152,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				ASN STRUKTURAL RSUD HAJI		46.922.452.152,00	RSUD HAJI
								(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROV SULSEL, KOTA MAKASSAR)	Pendapatan dari BLUD			ASN DAN MASYARAKAT(P ASIEN)	1.00		
						1	46.922.452.152,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	Pendapatan dari BLUD			ASN DAN MASYARAKAT(P ASIEN)			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,367,872,471.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			1,367,872,471.00	RSUD HAJI
			Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik			100			Pendapatan dari BLUD			ASN DAN MASYARAKAT(PASIEN)			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.367.872.471,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN), (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN DAN MASYARAKAT(PASIEN)		1.367.872.471,00	RSUD HAJI
			Persentase Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana (%)			100	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROV SULSEL, KOTA MAKASSAR)			ASN DAN MASYARAKAT(P ASIEN)	100				
	1.02.02.1.01.000 1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya					700.000.000,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				ASN DAN MASYARAKAT(PASIEN)		700.000.000,00	RSUD HAJI
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	0	1	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PEGAWAI RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT	2			
			Belanja Modal Bangunan Kesehatan IGD PONEK(DBH- CHT) (Unit)			1	700.000.000,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PEGAWAI RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT			
	1.02.02.1.01.001 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					667.872.471,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				PEGAWAI RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT		667.872.471,00	RSUD HAJI
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	667872471.00	667872471.00	1.00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROV SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PEGAWAI RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT, STUNTING DAN PENGARUSUTA MAAN GENDER(MASY ARAKAT)	1.00			
			BELANJA RUTIN LAINNYA (Paket)			1	300.000.000,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PEGAWAI RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PROGRAM PRIORITAS (Tahun)			1	367.872.471,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			STUNTING DAN PENGARUSUTA MAAN GENDER(MASY ARAKAT)			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					5,529,059,304.00							5,529,059,304.00	RSUD HAJI
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang / Bulan)			189			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			STUNTING DAN PENGARUSUTA MAAN GENDER(MASY ARAKAT)			
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					5.529.059.304,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				STUNTING DAN PENGARUSUTA MAAN GENDER(MASY ARAKAT)		5.529.059.304,00	RSUD HAJI
			Persentase Tenaga Kesehatan NON ASN Yang Berkinerja Baik (%)			100		(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROV SULSEL, KOTA MAKASSAR)				STUNTING DAN PENGARUSUTA MAAN GENDER(MASY ARAKAT)	100		
	1.02.03.1.02.000 1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan					5.529.059.304,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				STUNTING DAN PENGARUSUTA MAAN GENDER(MASY ARAKAT)		5.529.059.304,00	RSUD HAJI
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	189.00	189.00	184.00		(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROV SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NON ASN, STAF NON ASN RUMAH SAKIT	184.00		
			GAJI NON ASN (Orang / Bulan)			184	5.137.200.000,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			STAF NON ASN RUMAH SAKIT			
			IURAN JAMKESMAS NON ASN (Orang / Bulan)			184	362.180.904,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NON ASN			
			IURAN JKK JKM NON ASN (Orang / Bulan)			184	29.678.400,00	(RSUD HAJI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NON ASN			
	1.02	RS KHUSUS DAERAH DADI					97,411,361,336.00							100,169,719,376.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					96,711,361,336.00							99,769,719,376.00	RS KHUSUS DAERAH DADI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Persentase Peningkatan			93.620 93.660 100.000 13.000									
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.816.467.256,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)						47.211.283.857,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
	1.02.01.1.02.0001		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12.000		(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)				12			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0.00	0.00	430	49.816.467.256,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Seluruh Pegawai ASN di Rumah Sakit	430	47.211.283.857,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				430	49.816.467.256,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Seluruh Pegawai ASN di Rumah Sakit			
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.894.894.080,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)						2.558.435.519,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
	1.02.01.1.08.0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			12.000		(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)				12			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0.00	0.00	12		(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Seluruh Non ASN APBD	12	2.558.435.519,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
			Gaji Non ASN (Laporan)				12	1.894.894.080,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Seluruh Non ASN APBD			
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					45.000.000.000,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)						50.000.000.000,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
	1.02.01.1.10.0001		Jumlah Orang Yang Dilayani Melalui BLUD (Orang)			19966.000		(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)				19966			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			0.00	0.00	1		(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	Pendapatan dari BLUD		Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit	1	50.000.000.000,00	RS KHUSUS DAERAH DADI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Operasional Rumah Sakit (Unit Kerja)			1	45.000.000.000,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	Pendapatan dari BLUD			Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					700,000,000.00							400,000,000.00	RS KHUSUS DAERAH DADI
			Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)			100.000			Pendapatan dari BLUD			Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					700.000.000,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)				Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit		400.000.000,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
			Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSKD Dadi (%)			100.000						Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit			
	1.02.02.1.01.000 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					400.000.000,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)				Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit		200.000.000,00	RS KHUSUS DAERAH DADI
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	0.00	0.00	2		(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Pengguna Layanan di Rumah Sakit	1		
			Rehab dan Pemeliharaan Bangunan Kesehatan (Unit)			2	400.000.000,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Pengguna Layanan di Rumah Sakit			
	1.02.02.1.01.001 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					300.000.000,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)					Seluruh Pengguna Layanan di Rumah Sakit		200.000.000,00
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	2		(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Pengguna Layanan di Rumah Sakit	2		
			Pengadaan Alat Kesehatan (Unit)			2	300.000.000,00	(RS. Khusus Daerah Dadi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Pengguna Layanan di Rumah Sakit			
	1.02	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI					36,017,891,491.00							50,528,176,521.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					33,897,961,907.00							42,978,176,521.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Persentase Peningkatan			100 100 100 20									
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.647.961.907,00	(KOTA MAKASSAR)						30.478.176.521,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Jumlah Laporan Administrasi			12		(KOTA MAKASSAR)					12		
	1.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					21.647.961.907,00	(KOTA MAKASSAR)				Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	235.00	30.478.176.521,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	205	210	225.00		(KOTA MAKASSAR)	DANA UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan) Pembayaran TPP (Orang / Bulan)			210 210	13.409.230.172,00 8.238.731.735,00	(RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR) (RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR)	DANA UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					12.250.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	10.000	12.500.000.000,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Jumlah Pasien Yang Dilayani (Orang)			9.500		(KOTA MAKASSAR)			Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi				
	1.02.01.1.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					12.250.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	1.00	12.500.000.000,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00	1.00	1.00		(KOTA MAKASSAR)	Pendapatan dari BLUD		Pegawai dan Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi				
			Belanja BLUD (Tahun)			1	12.250.000.000,00	(RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR)	Pendapatan dari BLUD			Pegawai dan Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					2,119,929,584.00							7,550,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)			100			Pendapatan dari BLUD			Pegawai dan Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					580.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pegawai dan Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	51	5.500.000.000,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Diadakan (Unit)			51		(KOTA MAKASSAR)			Pegawai dan Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi				
	1.02.02.1.01.001 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					200.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pegawai dan Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	51.00	5.000.000.000,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	20	22	51.00		(KOTA MAKASSAR)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi				
			Belanja Alat Kesehatan (Unit)			51	200.000.000,00	(RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
	1.02.02.1.01.001 6	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit					380.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pasien RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	50.00	500.000.000,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
		Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	20		(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pasien Rumah Sakit RSKD Ibu dan Anak Pertiwi				
			Pengadaan Alat Rumah Tangga dan Mebeuler (Unit)			20	380.000.000,00	(RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pasien Rumah Sakit RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.539.929.584,00	(KOTA MAKASSAR)				Pasien Rumah Sakit RSKD Ibu dan Anak Pertiwi		2.050.000.000,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.02.002 2		Jumlah Pasien Yang Dilayani (Orang)			9.500		(KOTA MAKASSAR)				Pasien Rumah Sakit RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	10.000		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit					1.539.929.584,00	(KOTA MAKASSAR)				Pasien Rumah Sakit RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	10000	2.050.000.000,00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	6000	8700	9500.00		(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
			Belanja Jasa Non ASN dan Outsorching (Tahun)			1	1.215.600.000,00	(RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
			Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN (Tahun)			1	93.312.984,00	(RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
			Iuran JKK, JKM, Non ASN (Tahun)			1	7.646.400,00	(RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi			
Sewa Kendaraan (Tahun)			1	223.370.200,00	(RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai RSKD Ibu dan Anak Pertiwi						
	1.02	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH					31,505,001,939.00							33,907,985,194.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31,305,001,939.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			33,887,985,194.00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Persentase Peningkatan			92.000 98.000 100.000									
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.215.517.323,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)						18.031.866.329,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12.000		(UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH, Jl. Gunung Merapi No.75 Makassar, SULAWESI SELATAN)				12			
	1.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.215.517.323,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)						18.031.866.329,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	129.00	131.00	160.00		(UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH, Jl. Gunung Merapi No.75 Makassar, SULAWESI SELATAN)	DANA UMUM			ASN Perangkat Daerah	165.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			160	16.215.517.323,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)	DANA UMUM			ASN Perangkat Daerah			
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.589.484.616,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Perangkat Daerah		2.106.118.865,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			12.000		(UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH, Jl. Gunung Merapi No.75 Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Perangkat Daerah	12			
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.589.484.616,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Perangkat Daerah		2.106.118.865,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH, Jl. Gunung Merapi No.75 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Non ASN	12.00			
			Jasa Non ASN dan Iuran JKN, JKK, dan JKM non ASN (Laporan)			12	1.589.484.616,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Non ASN				
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					13.500.000.000,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Non ASN		13.750.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH		
		Jumlah Orang yang Dilayani melalui BLUD (Orang)			8334.000		(UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH, Jl. Gunung Merapi No.75 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Non ASN	8634				
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					13.500.000.000,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Non ASN		13.750.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00	1.00	1.00		(UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH, Jl. Gunung Merapi No.75 Makassar, SULAWESI SELATAN)	Pendapatan dari BLUD			Penerima Layanan Kesehatan Rumah Sakit	1.00		
			Belanja Barang, Jasa dan Modal BLUD (Unit Kerja)			1	13.500.000.000,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)	Pendapatan dari BLUD			Penerima Layanan Kesehatan Rumah Sakit			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					200,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			20,000,000.00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
			Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)			76.000			Pendapatan dari BLUD			Penerima Layanan Kesehatan Rumah Sakit			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Penerima Layanan Kesehatan Rumah Sakit		20.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
			Jumlah Fasilitas Pelayanan,Sarana ,Prasarana dan Alat Kesehatan yang diadakan (Unit)			4.000		(UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH, Jl. Gunung Merapi No.75 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Penerima Layanan Kesehatan Rumah Sakit	4		
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					200.000.000,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Penerima Layanan Kesehatan Rumah Sakit		20.000.000,00	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	30	0	2		(UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH, Jl. Gunung Merapi No.75 Makassar, SULAWESI SELATAN)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	2		
			Belanja Alat Kesehatan (Unit)			3	200.000.000,00	(UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Jl. Gunung Merapi No.75, Makassar, SULAWESI SELATAN)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Penerima Layanan Kesehatan di Rumah Sakit			
	1.02	RSUD SAYANG RAKYAT					57,085,203,136.00							64,288,518,287.00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					56,685,203,136.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			58,501,609,472.00	RSUD SAYANG RAKYAT
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Persentase Peningkatan			80.000 80.000 100.000 -39.000									
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.166.983.405,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			37.097.106.428,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12		(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)					12		
	1.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					37.166.983.405,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)						37.097.106.428,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	245.00	260.00	264.00		(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	270.00		
			GAJI DAN TUNJANGAN ASN (Orang / Bulan)			264	17.969.686.217,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit			
			Tambahan TPP (Orang / Bulan)			264	914.157.009,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit			
			TPP (Orang / Bulan)			264	18.283.140.179,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit			
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.961.869.731,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Seluruh ASN di Rumah Sakit		4.276.003.044,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12		(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)				Seluruh ASN di Rumah Sakit	12		
	1.02.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					650.000.000,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)				Seluruh ASN di Rumah Sakit		930.073.460,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit	12.00		
			Belanja Rutin Lainnya (Belanja Listrik) (Laporan)			12	650.000.000,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit			
	1.02.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.311.869.731,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)				Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit		3.345.929.584,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Sayang Rakyat, Seluruh Non ASN APBD	12.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Belanja Jasa Non ASN dan Outsourcing (Bulan)</i> <i>Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN (Bulan)</i> <i>Iuran JKK JKM Non ASN (Bulan)</i> <i>Sewa Kendaraan (Unit)</i>			12 12	2.838.600.000,00 180.299.664,00	<i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Non ASN APBD Seluruh Non ASN APBD			
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					15.556.350.000,00	<i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i>			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	RSUD Sayang Rakyat		17.128.500.000,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			<i>Persentase peningkatan pendapatan BLUD (%)</i>			-0.1		<i>(RSUD SAYANG RAKYAT, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>RSUD Sayang Rakyat</i>	0.09		
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					15.556.350.000,00	<i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i>				RSUD Sayang Rakyat		17.128.500.000,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)</i> <i>Belanja Operasional Rumah Sakit (Unit Kerja)</i>	1.00	1.00	1.00		<i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i> <i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i>	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD			<i>Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit</i> <i>Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit</i>	1.00		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					400,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			5,786,908,815.00	RSUD SAYANG RAKYAT
			<i>Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)</i>			65.760			Pendapatan dari BLUD			<i>Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit</i>			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					400.000.000,00	<i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i>			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit		5.786.908.815,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			<i>Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSUD Sayang Rakyat (%)</i>			65.760		<i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit</i>	75		
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					400.000.000,00	<i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i>				Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit		5.786.908.815,00	RSUD SAYANG RAKYAT
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)</i>	8.00	5.00	4.00		<i>(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)</i>	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			<i>Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit</i>	6.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			CTH / Pengadaan Alat Kesehatan (Unit)			4	400.000.000,00	(RSUD Sayang Rakyat, SULAWESI SELATAN)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Seluruh Pegawai dan Pengguna Layanan di Rumah Sakit			
	1.02	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE					75,933,105,483.00							73,469,004,010.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					36,551,683,646.00							38,319,004,010.00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Persentase Peningkatan			92 98 100 15									
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					320.238.100,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)							
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			6		(UPT RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE)			6				
	1.02.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					204.901.000,00							214.901.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0.00	0.00	3.00		(Kab. Bone dan Kota Makassar, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.00				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3	204.901.000,00	(Dalam dan Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	1.02.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					22.067.500,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait		32.067.500,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.00				
			Penyusunan Dokumen RKA (Dokumen)			1	22.067.500,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	1.02.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					25.450.700,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait		35.450.700,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.00				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.02.01.1.01.000 4		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (Dokumen)			1	25.450.700,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					23.377.800,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait	1	33.377.800,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait				
			Koordinasi dan Penyusunan DPA (Dokumen)			1	23.377.800,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait				
	1.02.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					22.650.300,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait	1	32.650.300,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait				
	1.02.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.790.800,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait	2	31.790.800,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	0.00	2		(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait				
			Evaluasi Kinerja (Laporan)			2	21.790.800,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait				
		1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.092.572.786,00	(Kab. Bone, Prov. Sulsel dan Luar Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Kab. Bone, dalam Prov. Sulsel dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN), (KAB. BONE), (Kab. Bone, dalam Prov. Sulsel dan Luar Prov. Sulsel, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait		1.230.971.900,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.02.000 1		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12		(UPT RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait	0		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					361.600.886,00	(KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait	100	500.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0.00	0.00	100		(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning RSUD Regional La Mappapenning			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)			70	361.600.886,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	1.02.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					265.257.000,00	(Kab. Bone, dalam Prov. Sulsel dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)				RSUD Regional La Mappapenning	5	265.257.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	5		(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan instansi yang terkait			
			Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			5	265.257.000,00	(Kab. Bone, dalam Prov. Sulsel dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan instansi yang terkait			
		1.02.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					234.607.300,00	(Kab. Bone, Prov. Sulsel dan Luar Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				RSUD Regional La Mappapenning dan instansi yang terkait	5	234.607.300,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			0.00	0.00	5		(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)					5	234.607.300,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait			
	1.02.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					231.107.600,00	(Kab. Bone, dalam Prov. Sulsel dan Luar Prov. Sulsel, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait	3	231.107.600,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	0.00	0.00	3		(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)					3	231.107.600,00	(Kab. Bone dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.086.271.050,00	(luar dan dalam Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait <i>RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait</i>	0	550.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			4		(UPT RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE)							
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					636.271.050,00	(bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi yang terkait <i>RSUD Regional La Mappapenning</i>	0.00	-	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00			(RSUD Regional La Mappapenning, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			1	636.271.050,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning			
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					450.000.000,00	(luar dan dalam Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				RSUD Regional La Mappapenning <i>RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi terkait</i>	90	550.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		0.00	0.00	80	(Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
		Pendidikatan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Manajemen RS (Orang)			80	450.000.000,00	(Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi terkait				
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.232.794.010,00	(Luar dan Dalam Prov. Sulsel, KAB. BONE), (bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi terkait <i>RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi terkait</i>	0	3.232.794.010,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			30		(UPT RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE)							
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.170.682.010,00	(bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning dan Instansi terkait <i>RSUD Regional La Mappapenning</i>	1.00	2.170.682.010,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1.00		(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			5	2.170.682.010,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning			
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.062.112.000,00	(Luar dan Dalam Prov. Sulsel, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning		1.062.112.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	0.00	30		(Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning	30		
						30	1.062.112.000,00	(Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning			
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.819.807.700,00	(Luar dan Dalam Prov. Sulsel, KAB. BONE), (kab. bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning		20.925.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			12		(UPT RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning	0		
	1.02.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.215.000.000,00	(kab. bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning		1.225.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0.00	0.00	12.00		(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning	12.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	1.215.000.000,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning			
	1.02.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					19.604.807.700,00	(Luar dan Dalam Prov. Sulsel, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning		19.700.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	12		(RSUD Regional La Mappapenning Bone 19.604.807.700, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regiona La Mappapenning	12		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	19.604.807.700,00	(RSUD Regiona La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regiona La Mappapenning			
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					10.000.000.000,00	(RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE), (bone, KAB. BONE)				RSUD Regiona La Mappapenning		12.000.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah Orang Yang Dilayani melalui BLUD (Orang)			2000		(Jumlah Orang Yang Dilayani melalui BLUD, KAB. BONE)				RSUD Regiona La Mappapenning	0		
	1.02.01.1.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					10.000.000.000,00	(RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE), (bone, KAB. BONE)				RSUD Regiona La Mappapenning		12.000.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0.00	0.00	1		(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	Pendapatan dari BLUD			RSUD Regional La Mappapenning	1		
			BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)			1	5.000.000.000,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	Pendapatan dari BLUD			RSUD Regional La Mappapenning			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Unit Kerja)</i>			1	5.000.000.000,00	<i>(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)</i>	<i>Pendapatan dari BLUD</i>			<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					39,381,421,837.00							35,150,000,000.00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			<i>Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)</i>			65			<i>Pendapatan dari BLUD</i>			<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					39.381.421.837,00	<i>(RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE), (RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE), (kab. bone, KAB. BONE), (bone, KAB. BONE)</i>				<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>		35.150.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang diadakan (Unit)</i>			16		<i>(RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE, KAB. BONE)</i>				<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>	16		
	1.02.02.1.01.000 1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya					12.859.010.129,00	<i>(RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE), (RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING, KAB. BONE)</i>				<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>		13.000.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
			<i>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)</i>	0.00	0.00	1.00		<i>(RSUD Regional La Mappapenning Bone 12.859.010.129, KAB. BONE)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan dari BLUD</i>			<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>	1		
			<i>Jasa Pelayanan Kesehatan (Bulan)</i>			12	1.800.000.000,00	<i>(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)</i>	<i>Pendapatan dari BLUD</i>			<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>			
			<i>Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan RS Regional Kelas C Kab. Bone (Paket)</i>			1	304.010.129,00	<i>(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>			
			<i>Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Regional Kelas C Kab. Bone (Paket)</i>			1	5.500.000.000,00	<i>(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>			
			<i>Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Regional Kelas C Kab. Bone Tahap II (Paket)</i>			1	1.600.000.000,00	<i>(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>			
			<i>Pembangunan Rumah Dinas (Paket)</i>			1	1.155.000.000,00	<i>(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>RSUD Regional La Mappapenning</i>			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.1.01.001 0		Pembangunan Rumah Susun Pejabat Struktural RSUD Regional La Mappapenning (Paket)			1	2.500.000.000,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning			
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					14.300.000.000,00	(kab. bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning		7.150.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0.00	0.00	200			(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning	100		
	1.02.02.1.01.001 3	Pengadaan Alat Kesehatan (Unit)				200	14.300.000.000,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning			
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					200.000.000,00	(bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning		1.000.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
		Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	0.00	0.00	5.00			(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning	10.00		
	1.02.02.1.01.002 7	Pengadaan dan Pemeliharaan alat Kesehatan/kalibrasi (Unit)				5	200.000.000,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning			
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					12.022.411.708,00	(kab. bone, KAB. BONE)				RSUD Regional La Mappapenning		14.000.000.000,00	RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	0.00	0.00	1		(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning	1			
		Pengadaan Obat dan BMHP (Paket)				1	12.022.411.708,00	(RSUD Regional La Mappapenning Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RSUD Regional La Mappapenning			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1,048,343,293,393.00							1,168,765,153,092.82	
		DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI					666,367,040,244.00							723,691,126,745.82	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi					68,308,142,565.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			62,687,280,284.39	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.304.194.900,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN), (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif		1.807.587.392,16	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			14	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Jalan AP. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)				14				
	1.03.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					470.454.600,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif		385.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	2.00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	2			
			Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	470.454.600,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					91.433.200,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		308.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	9	9	9	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	9			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Pelaksanaan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>			9	91.433.200,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>			
							24.525.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN), (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)</i>			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>	82.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	1.00	1.00		<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD</i>	1.00		
			<i>Pelaksanaan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>			1	24.525.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD</i>			
	1.03.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					12.706.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD</i>		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1	1	1.00		<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Pelaksanaan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>			1	12.706.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>			
						27.530.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)</i>			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1	1	1.00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>	1			
			<i>Pelaksanaan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>			1	27.530.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>			
	1.03.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				430.553.100,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>		346.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	36	36	36	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>	36			
			<i>Pelaksanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>			36	430.553.100,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>			
	1.03.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					246.993.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>		575.587.392,16	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4	4.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	4		
			Pelaksanaan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			4	246.993.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.357.326.126,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN), (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		32.120.092.892,23	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			20		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	20		
	1.03.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					26.843.431.526,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN), (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		31.779.092.892,23	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	554	560	265.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	265		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.02.000 3		Pelaksanaan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			265	26.843.431.526,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					87.244.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		16.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Pelaksanaan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			1	87.244.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					7.440.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		11.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Pelaksanaan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			1	7.440.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					41.206.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		11.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.02.000 7		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	41.206.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					373.154.600,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		286.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	108	108	108		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	108		
	1.03.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaksanaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)			108	373.154.600,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
							4.850.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		16.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	4	4.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	4		
			Pelaksanaan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			4	4.850.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					421.307.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		442.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)			3		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	3		
	1.03.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					13.418.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		90.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Pelaksanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	13.418.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					328.079.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		308.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	9	9	9		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	8		
			Pelaksanaan Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			9	328.079.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					79.810.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1	44.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	79.810.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					351.232.600,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	164866000 0	44.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)			1648660000		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.04.000 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					332.863.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1	11.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)			1	332.863.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.04.000 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					18.368.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	36	33.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	36	36	36		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			36	18.368.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					307.311.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	3	715.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			3		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					200.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1250	605.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	1250	1250.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			1.250	200.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					57.050.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Pelaksanaan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	57.050.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.261.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		55.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	0.00	10.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	10		
			Pelaksanaan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			10	50.261.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					13.764.691.876,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		7.839.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			226		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	226		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					67.717.350,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		121.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	99	9	28		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	28		
			Pelaksanaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			28	67.717.350,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.408.328.166,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		550.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	13	50		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	50		
			Pelaksanaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			50	1.408.328.166,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					370.982.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		93.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	86	28	70		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	70		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Pelaksanaan Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>			70	370.982.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>			DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>					88.800.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)</i>			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>	100	110.000.000,00	
				100	100	100.00		<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>					
				<i>Pelaksanaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>			100	88.800.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>				
	1.03.01.1.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material					10.250.000.000,00				<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>	3	6.300.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)</i>	0.00	0.00	3.00		<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>					
			<i>Pelaksanaan Penyediaan Bahan Material (Paket)</i>			3	10.250.000.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>					
	1.03.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					154.064.360,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)</i>			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan</i>		60.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.06.000 9		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10	12	12.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	12		
			Pelaksanaan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			12	154.064.360,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.124.800.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		550.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	12		
			Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	1.124.800.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
		1.03.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					300.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		55.000.000,00
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1			1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1			
Pelaksanaan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)					1	300.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.159.960.259,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		3.800.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			42.000		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	42		
	1.03.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					412.740.259,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		825.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0.00	1	2.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	2		
			Pelaksanaan Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			2	412.740.259,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.07.000 3	Pengadaan Alat Besar					4.647.220.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		2.750.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0.00	1	1.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Binaa Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Pelaksanaan Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)			1	4.647.220.000,00	(Dinas Binaa Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Binaa Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.100.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Binaa Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	6	225.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.00	3.00	6		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			6	1.100.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.590.642.344,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	12	13.726.350.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			12		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.354.161.276,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	108	2.010.250.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	108	108	108		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			108	2.354.161.276,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	12	49.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			12	100.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					8.136.481.068,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	108	11.666.600.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	283	108	108		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			108	8.136.481.068,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.051.475.660,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	293	2.192.750.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			293		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					258.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		690.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0.00	26	26.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	26		
			Pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			26	258.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.09.000 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					3.200.080.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		842.750.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	34	34	34.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	34		
			Pelaksanaan Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)			34	3.200.080.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.999.281.620,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		50.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	16	19.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	19		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.09.000 9		Pelaksanaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			19	2.999.281.620,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.594.114.040,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		610.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	3.00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	3				
			Pelaksanaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			3	1.594.114.040,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan				
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					596,100,311,479.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			659,647,214,566.88	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)			76.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					596.100.311.479,00	(KAB. KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI)			02.Peningkatan Pembangunan	Dinas Bina Marga dan Bina		659.647.214.566,88	DINAS BINA MARGA DAN BINA
			Panjang Penanganan Ruas Jalan Provinsi (Km)			24.42	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	15.89				
			Jumlah Penanganan Jembatan Pada Ruas Jalan Provinsi (Lokasi)			12	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	12				
			Persentase Ketersediaan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (%)			100	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	100				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.10.1.01.002 4	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi					31.788.228.400,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		18.900.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	50	48	1527.01		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	1547.11		
			Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Km)			1.527,01	31.788.228.400,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.10.1.01.002 5	Rehabilitasi Jembatan					2.016.420.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN), (Jembatan Bulu Cenrana Kabupaten Sidenreng Rappang, KAB. SIDENRENG RAPPANG)				Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		2.050.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	0.00	50	2.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	2		
			Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan (Jembatan)			2	2.016.420.000,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.10.1.01.002 6	Pemeliharaan Rutin Jembatan					1.845.820.414,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		5.100.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	482.00	482.00	482.00		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	482.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.10.1.01.002 8	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan (Jembatan)			482	1.845.820.414,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
							1.069.797.100,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	2	30	1527,01		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	1547.11		
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Km)			1.527,01	1.069.797.100,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.10.1.01.003 0	Rehabilitasi Jalan					36.981.525.909,00	(Kab. gowa, SULAWESI SELATAN), (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN), (Kab. Gowa, SULAWESI SELATAN), (KAB. TORAJA UTARA, SULAWESI SELATAN), (KAB. BANTAENG , SULAWESI SELATAN), (KAB. KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		100.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	13	50	39,85		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	50		
			Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan (Km)			39,85	36.981.525.909,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.10.1.01.003 1	Rekonstruksi Jalan					350.980.632.060,00	(KOTA PALOPO, SULAWESI				Masyarakat Provinsi		205.877.214.566,88	DINAS BINA MARGA DAN BINA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.10.1.01.003 2	Pembangunan Jembatan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	25.33	60	45.70		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	40		
			Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan (Km)			45,7	350.980.632.060,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
							51.296.479.400,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		10.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	125	100	7.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	3		
	1.03.10.1.01.003 3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pelaksanaan Pembangunan Jembatan (Jembatan)			7	51.296.479.400,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
							25.309.027.396,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		43.200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1927.18	1927.18	1927.18		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	1927.18		
	1.03.10.1.01.004 0	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)			1.927,18	25.309.027.396,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	0.00	0.00	7.00		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	16		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.10.1.01.004 1		Pelaksanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar (Km)			7	42.250.000.000,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					6.195.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		1.700.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	31	6	33.00		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	8		
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dokumen)			33	6.195.000.000,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.10.1.01.004 2	Pembangunan Jalan					45.115.900.800,00	(KAB. BARRU , SULAWESI SELATAN), (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN), (KAB. PINRANG , SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		189.300.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	12.49	25.00	10.00		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	40.00		
			Pelaksanaan Pembangunan Jalan (Km)			10	45.115.900.800,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.10.1.01.004 3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					1.101.480.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		2.520.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.10.1.01.004 4		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	7	14	3454.19		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	3474.29		
			Pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Km)			3.454,19	1.101.480.000,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
		Pengelolaan Leger Jalan					150.000.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Pelaksanaan Pengelolaan Leger Jalan (Dokumen)			1	150.000.000,00	(Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
3.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1,958,586,200.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			1,356,631,894.55	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (Rasio)			91.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					1.155.006.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		706.631.894,55	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.11.1.01.001 1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah Provinsi (Kali)			3.000		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	3		DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
							858.431.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan		412.189.618,83		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	200	200	200.00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	200			
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Orang)			200	858.431.800,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat			
	1.03.11.1.01.001 3	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli					296.575.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat		294.442.275,72	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	1			
			Pelaksanaan Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Dokumen)			1	296.575.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					214.378.400,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Penyelenggaraan pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi (Kali)			2		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	2		
			Jumlah Penyelenggaraan pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi (Kali)			2		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	2		
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI					214.378.400,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	50	50	50.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	50		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI (Orang)			50	214.378.400,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat			
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					589.201.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat		450.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.11.1.03.000 4		Jumlah laporan penyedia jasa konstruksi berkinerja baik (Laporan)			1		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	1		DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah laporan penyedia jasa konstruksi berkinerja baik (Laporan)			1		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	1		
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					475.751.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat		414.073.200,00		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	2	2	38.00		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	40		
			Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Paket)			38	475.751.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat			
1.03.11.1.03.000 5	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						107.600.000,00	(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, SULAWESI SELATAN)				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat		19.450.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
		Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	2	2	38		(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat	40			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.03.11.1.03.000 7	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	<i>Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Bangunan dan Lingkungan)</i>			38	107.600.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat</i>				
						5.850.000,00						<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat</i>		16.476.800,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)</i>	2.00	2.00	25.00			<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat</i>	25.00		
			<i>Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Badan Usaha)</i>			25	5.850.000,00	<i>(Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat</i>				
	1.03	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG					381,976,253,149.00							445,074,026,347.00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					71,758,441,672.45				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			91,379,292,003.32	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000										
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.520.000.000,00	(Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN), (Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			3.379.174.784,32	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			9		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)				9				
	1.03.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						500.000.000,00	(Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)					770.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.01.000 2		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	3		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA,CK TR	3		
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3	500.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA,CK TR			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					380.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas SDA,CK TR		380.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR	1.00		
			Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	380.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					150.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas SDA, CK TR		165.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)		1	1	1		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR	1			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				1	150.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR				
	1.03.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas SDA, CK TR		110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR	1		
			Penyusunan Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas SDA, CK TR		110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR	1		
			Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR			
	1.03.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					440.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas SDA, CK TR		693.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR	4		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			4	440.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas SDA, CK TR			
	1.03.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					850.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas SDA, CK TR		1.151.174.784,32	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	3		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	3		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daer (Dokumen)			3	850.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.457.761.631,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		44.889.501.631,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			20.000						Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					43.479.501.631,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	270.00	44.479.501.631,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	554.00	554.00	270.00		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			270	43.479.501.631,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					224.100.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1	40.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			1	224.100.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					22.700.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1	-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			1	22.700.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					56.340.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.00	40.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.02.000 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	56.340.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					669.520.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	12.00	300.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	12.00	12.00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aporatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)			12	669.520.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
	1.03.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					5.600.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1	30.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)					1	5.600.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					615.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN), (Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		1.264.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)			3.000				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang					
	1.03.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		180.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.03.000 3		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		616.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	1		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
	1.03.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)			4	50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
							340.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		330.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
	1.03.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPDPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	340.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
							75.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		88.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1		(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	75.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1	50.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang					
	1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					106.924.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	251.260.00 0	42.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)			251.260.000	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)		Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
	1.03.01.1.04.000 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1	22.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	1	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang					
	1.03.01.1.04.000 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					56.924.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	12	20.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	12	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			12	56.924.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		300.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			3.000					Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang				
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					75.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		50.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	75.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		50.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		50.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					75.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	5	50.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	5		(Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			5	75.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	50	100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0.00	0.00	50		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			50	50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.829.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		1.670.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			226.000						Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					22.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	20	100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22	1	20		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			26	22.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					800.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		500.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	13	50	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	50			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			50	800.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					22.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	69	34	60	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	60			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)			60	22.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					75.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		200.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100.00	100.00	50.00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	50			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)			50	75.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					110.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10.00	12	12	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	12			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.06.000 9		Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	110.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					700.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		500.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	12		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	700.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50.000.000,00					Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		50.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.946.491.689,45	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		16.047.773.198,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.07.000 1		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			65.000						Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					750.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0.00		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			1	750.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		750.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	0	30		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	30		
			Pengadaan Mebel (Paket)			30	100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.086.491.689,45	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		15.297.773.198,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.00	0.00	30.00		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	30.00		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			30	1.086.491.689,45	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.07.000 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					10.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1.00		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0.00		
			Pengadaan Aset Tak Berwujud (Unit)			1	10.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16.563.264.352,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		22.846.842.390,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			12.000					Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang				
	1.03.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.148.264.352,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		948.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	12		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)			12	1.148.264.352,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					775.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		3.099.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	12.00		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			12	775.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					14.640.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		18.799.842.390,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	12.00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	14.640.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.420.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		940.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			51.000						Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					700.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		500.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	246	20	20		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			20	700.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					300.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		440.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	10		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			10	300.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.09.000 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					600.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0.00	-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0.00	0.00	2		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Masyarakat						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (Unit)			2	600.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Masyarakat					
	1.03.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Masyarakat	0.00	-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	1.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang					
	1.03.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					10.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0.00	-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaPemeliharaan Aset Tak Berwujud (Unit)			1	10.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang					
	1.03.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.610.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		-

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	2		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0.00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			2	1.610.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					134,116,183,943.55				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			94,567,414,185.94	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi (Ha)			6046.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Cakupan pembinaan pengelolaan SDA (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.300.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN), (Tersebar di Kabupaten, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		7.889.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Lokasi Sungai/ Embung yang ditangani (Lokasi)			4.000						Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Persentase ketersediaan perencanaan teknis pengelolaan SDA (%)			100.000						Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
			Jumlah pembinaan pengelolaan di wilayah sungai (Wilayah)			4.000						Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.02.1.01.002 6	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir					600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		1.584.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.02.1.01.007 5		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	0	0	20		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air	20		
			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir (Unit)			20	600.000.000,00	(Tersebar di Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi					150.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Pengguna Air		100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	0.00	0.00	4.00		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air	4.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Lembaga)			4	150.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air					
		1.03.02.1.01.007 8	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				1.000.000.000,00				Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air		-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi					1.00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat				
	Rehabilitasi Embung (Unit)			1	1.000.000.000,00	(Kab. Pinrang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat						
		1.03.02.1.01.007 9	Normalisasi/Restorasi Sungai				1.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			0.4	0	1		(, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	2			
Normalisasi/Restorasi Sungai (Km)					1	1.000.000.000,00	(, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat					
1.03.02.1.01.008 7	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		75.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0	0	1		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	1			
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat				
1.03.02.1.01.009 0	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi					400.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat		440.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.02.1.01.010 3		Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	0.00	0.00	4.00		(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	4.00		
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Lembaga)			4	400.000.000,00	(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi					600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		1.540.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0.00	0.00	4.00		(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	4.00		
	1.03.02.1.01.011 7	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (Dokumen)			4	600.000.000,00	(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
							100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air	1		
	1.03.02.1.01.012 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air			
							350.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)			Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air		2.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultasi dan Konstruksi	1		
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada					129.816.183.943,55	(KAB. LUWU , SULAWESI			02.Peningkatan Pembangunan	Pemerintah dan Masyarakat Jasa		86.678.414.185,94

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Luas lahan irigasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Ha)			354.085						Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultasi dan Konstruksi			
			Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jaringan Irigasi (%)			100.000						Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultasi dan Konstruksi			
			Jumlah pembinaan pengelolaan daerah jaringan irigasi (DI (Daerah Irigasi))			38.000						Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultasi dan Konstruksi			
1.03.02.1.02.000 8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						49.386.183.943,55	(KAB. BULUKUMBA , SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (KAB. SINJAI , SULAWESI SELATAN), (KAB. LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN), (KAB. SOPPENG , SULAWESI SELATAN), (KAB. BARRU , SULAWESI SELATAN), (KAB. LUWU DAN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN), (KAB. PINRANG , SULAWESI SELATAN), (Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Salohunne KAR			Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultasi dan Konstruksi		25.360.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	8	1.6	22		(Tersebar di Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Pengguna Air , Masyarakat Petani Pengguna Air, Masyarakat Petani Pengguna Air, Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Jasa Konsultansi dan Konstruksi	10.14		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	2025 PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peningkatan Daerah Irigasi. Selli Coppobulu Kab. Bone (DAK) (Km)			3	7.500.000.000,00	(Kab. Bone, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Masyarakat Petani Pengguna Air			
			Peningkatan DI. Cilellang Kab. Wajo (DAK) (Km)			6	15.000.000.000,00	(Kabupaten Wajo, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Masyarakat Petani Pengguna Air			
			Peningkatan DI. Kuri-kuri Kasambi Kab. Luwu Utara (Km)			1,6	4.000.000.000,00	(Kab. Luwu Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Pengguna Air			
			Peningkatan DI. Lanca Kab. Bone (Km)			2,2	5.500.000.000,00	(Kab. Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Pengguna Air			
			Peningkatan DI. Waru - Waru Kab. Bone (Km)			12	5.000.000.000,00	(Kab. Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Pengguna Air			
			Peningkatan Kondisi Jaringan Daerah Irigasi Bungadidi Kab. Luwu Utara (Km)			1,8	4.566.841.851,00	(KAB. LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Pengguna Air			
			Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi DI Tubu Ampak Kab. Luwu (Km)			1,6	4.000.000.000,00	(KAB. LUWU DAN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Pengguna Air			
			Supervisi Peningkatan DI. Cilellang Kab. Wajo (DAK) (Dokumen)			1	940.000.000,00	(Kab. Wajo, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konsultansi dan Konstruksi			
			Supervisi Peningkatan DI. Kuri-kuri Kasambi Kab. Luwu Utara (Dokumen)			1	450.000.000,00	(Kab. Luwu Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konsultansi dan Konstruksi			
			Supervisi Peningkatan DI. Lanca Kab. Bone (Dokumen)			1	420.000.000,00	(Kab. Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konsultansi dan Konstruksi			
			Supervisi Peningkatan DI. Selli Coppobulu Kab. Bone (Dokumen)			1	570.000.000,00	(Kab. Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Pengguna Air			
			Supervisi Peningkatan DI Tubu Ampak Kab. Luwu (Dokumen)			1	450.000.000,00	(Kab. Luwu dan Kab. Luwu Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultasi dan Konstruksi			
			Supervisi Peningkatan DI. Waru - Waru Kab. Bone (Dokumen)			1	619.342.092,55	(Kab. Bone, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultasi dan Konstruksi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.02.1.02.000 9		Supervisi Peningkatan Kondisi Jaringan Daerah Irigasi Bungadidi (Dokumen)			1	370.000.000,00	(Kab. Luwu Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi			
		Peningkatan Bendung Irigasi					1.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi	1	1.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	0	0	1		(., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Pengguna Air					
			Peningkatan Bendung Irigasi (Bendung)			1	1.000.000.000,00	(., SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Pengguna Air					
	1.03.02.1.02.001 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					50.310.000.000,00	(Kab. Soppeng, SULAWESI SELATAN), (KAB. LUWU , SULAWESI SELATAN), (KAB. WAJO, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (KAB. LUWU TIMUR , SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pengguna Air	14.46	36.164.375.672,66	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	4.96	7	25.40		(Tersebar di Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Petani Pengguna Air, Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi					
			Rehabilitasi DI. Aparang I Kab. Sinjai (DAK) (Km)			2	5.000.000.000,00	(Kab. Sinjai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Petani Pengguna Air					
			Rehabilitasi DI. Balombong Kab. Toraja Utara (Km)			2	5.000.000.000,00	(Kab. Toraja Utara, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Petani Pengguna Air					
			Rehabilitasi DI. Bengo Kab. Bone (Km)			0,4	1.000.000.000,00	(Kab. Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Petani Pengguna Air					
			Rehabilitasi DI. Bongki - Bongki Kab. Bulukumba (DAK) (Km)			7,2		(Kab. Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Petani Pengguna Air					
			Rehabilitasi DI. Cambajawaya Kab. Maros (Km)			1,2	3.000.000.000,00	(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Petani Pengguna Air					
			Rehabilitasi DI. Kalamisui Kab. Sinjai (Km)			3	7.500.000.000,00	(Kab. Sinjai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Petani Pengguna Air					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Rehabilitasi DI. Latenreng Kab. Soppeng (Km) Rehabilitasi DI. Leang Lonrong Kab. Pangkep (Km) Rehabilitasi DI Leworeng Kab. Soppeng (Km) Rehabilitasi DI. Padaelo Kab. Pangkep (Km) Rehabilitasi DI. Salobunne Kab. Soppeng (Km) Rehabilitasi DI. Salomekko Kab. Bone (Km) Supervisi Rehabilitasi DI. Aparang I Kab. Sinjai (Dokumen) Supervisi Rehabilitasi DI. Balombong Kab. Toraja Utara (Dokumen) Supervisi Rehabilitasi DI. Bongki - Bongki Kab. Bulukumba (DAK) (Dokumen) Supervisi Rehabilitasi DI. Cambajawaya (Dokumen) Supervisi Rehabilitasi DI. Kalamisu Kab. Sinjai (Dokumen) Supervisi Rehabilitasi DI. Latenreng (Dokumen)			1 0,6 1,6 1,8 1,2 2 1 1 1 1 1	2.500.000.000,00 1.500.000.000,00 4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 570.000.000,00 410.000.000,00 1.360.000.000,00 330.000.000,00 570.000.000,00 330.000.000,00	(Kab. Sinjai, SULAWESI SELATAN) (Kab. Pangkep, SULAWESI SELATAN) (Kab. Soppeng, SULAWESI SELATAN) (Kab. Pangkep, SULAWESI SELATAN) (Kab. Soppeng, SULAWESI SELATAN) (Kab. Bone, SULAWESI SELATAN) (Kab. Sinjai, SULAWESI SELATAN) (Kab. Toraja Utara, SULAWESI SELATAN) (Kab. Bulukumba, SULAWESI SELATAN) (Kab. Maros, SULAWESI SELATAN) (Kab. Sinjai, SULAWESI SELATAN) (Kab. Soppeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Pengguna Air Masyarakat Petani Pengguna Air Masyarakat Petani Pengguna Air Masyarakat Petani Pengguna Air Masyarakat Petani Pengguna Air Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultansi dan Konstruksi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Supervisi Rehabilitasi DI. Leang Lonrong Kab. Pangkep (Dokumen)			1	210.000.000,00	(Kab. Pangkep, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultasi dan Konstruksi			
			Supervisi Rehabilitasi DI. Leworeng Kab. Soppeng (Dokumen)			1	450.000.000,00	(Kabupaten Soppeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultasi dan Konstruksi			
			Supervisi Rehabilitasi DI. Padaelo Kab. Pangkep (Dokumen)			1	370.000.000,00	(Kab. Pangkep, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultasi dan Konstruksi			
			Supervisi Rehabilitasi DI. Salobunne Kab. Soppeng (Dokumen)			1	3.300.000.000,00	(Kab. Soppeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultasi dan Konstruksi			
			Supervisi Rehabilitasi DI. Salomekko Kab. Bone (Dokumen)			1	410.000.000,00	(Kab. Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultasi dan Konstruksi			
	1.03.02.1.02.001 5	Rehabilitasi Bendung Irigasi					10.570.000.000,00	(KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masayarakat Pengguna Jasa Konssultasi dan Konstruksi		5.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	0	0	2		(Kab. Pangkep, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air	1		
			Rehab. Bendung D.I Leang Londrong KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN (Bendung)			1	4.000.000.000,00	(Kabupaten Pangkajene Kepulauan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air			
			Rehabilitasi Bendung Irigasi (Bendung)			1	6.570.000.000,00	(Kabupaten Pinrang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air			
	1.03.02.1.02.001 7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak					10.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pengguna Air		5.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (KM)	0	0	10		(Kabupaten Luwu Timur dan Pangkajene Kepulauan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air	10		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.02.1.02.002 1		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak (Km)			10	10.000.000.000,00	(Kabupaten Luwu timur dan Pangkajene Kepulauan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air			
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					4.000.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten (4 UPT Wilayah Sungai), SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pengguna Air		6.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	633	633	633		(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air	633		
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Km)			633	4.000.000.000,00	(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air			
	1.03.02.1.02.002 2	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi					1.200.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pengguna Air		2.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Bendung)	57	57	57		(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air	57		
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi (Bendung)			57	1.200.000.000,00	(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pengguna Air			
	1.03.02.1.02.002 4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak					1.200.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten , SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pengguna Air		2.400.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	0	20		(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Air	20		
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (Km)			20	1.200.000.000,00	(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Petani Air			
1.03.02.1.02.003 0	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi						300.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Petani Air		110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	0	0	2		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	2			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.02.1.02.003 2		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi (Lembaga)			2	300.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					1.300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		3.234.038.513,28	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	60.00	5.00	10.00			(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi dan Konstruksi	10.00		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dokumen)			10	1.300.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi dan Konstruksi				
	1.03.02.1.02.003 4	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi dan Konstruksi		110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi (Lembaga)			1	50.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.02.1.02.003 7	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi				500.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		300.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya (DI)	2	2	38		(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air	38		
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi (DI (Daerah Irigasi))			38	500.000.000,00	(Tersebar di 4 (empat) UPT Wilayah Sungai , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air			
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					102,565,000,000.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			179,461,691,699.74	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (%) Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi (%)			100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air			
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					102.565.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Tersebar di Kabupaten /Kota , SULAWESI SELATAN), (Tersebar di Kabupaten/Kota ,SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air		179.461.691.699,74	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM (%))			100.000					Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air				
			Persentase ketersediaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (%)			100.000					Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air				
			Jumlah pembinaan pengelolaan SPAM Kab./Kota (kabupaten/kota)			24.000					Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air				
	1.03.03.1.01.001 4	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota					100.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat Pengguna Air		100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	0	24		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	24		
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)			24	100.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
	1.03.03.1.01.001 7	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					102.390.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat		179.261.691.699,74	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	0.00	0.00	1000.00		(Kawasan Mamminasata, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	1000.00		
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (Liter/Detik)			1.000	102.390.000.000,00	(Kawasan Mamminasata, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
1.03.03.1.01.002 1		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					75.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten /Kota , SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	0	0	24	75.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Tersebar di Kabupaten /Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	24		
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					225,000,000.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			300,000,000.00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Cakupan Pembinaan layanan TPA kewenangan provinsi (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah pembinaan pengelolaan Sampah Kab./Kota (kabupaten/kota)			24.000	225.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		300.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Kabupaten/Kota) Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	0	0	24	75.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN) (24 Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat Pemerintah dan Masyarakat	24	100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	0	0	24	75.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN) (Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	24	100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan					75.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)</i>	0	0	1		<i>(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	1		
			<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan (Lembaga)</i>			1	75.000.000,00	<i>(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>			
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					150,000,000.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			105,236,362.00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			<i>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM) (%)</i>			95.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>			
			<i>Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik kewenangan provinsi (%)</i>			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>			
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					150.000.000,00	<i>(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)</i>			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	<i>Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>		105.236.362,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			<i>Jumlah pembinaan pengelolaan air limbah domestik Kab./Kota (kabupaten/kota)</i>			24.000						<i>Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>			
	1.03.05.1.01.001 0	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota					75.000.000,00	<i>(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>		50.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	0	0	24		<i>(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Pemerintah dan Masyarakat</i>	24		
			<i>Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)</i>			24	75.000.000,00	<i>(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Pemerintah dan Masyarakat</i>			
	1.03.05.1.01.001 7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					75.000.000,00	<i>(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Pemerintah dan Masyarakat</i>		55.236.362,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			<i>Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)</i>	0	0	1		<i>(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat</i>	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)			1	75.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					100,000,000.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			100,000,000.00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Cakupan Pembinaan layanan drainase kewenangan provinsi (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Pembinaan Pengelolaan Drainase Kab./Kota (kabupaten/kota)			24.000						Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
	1.03.06.1.01.000 9	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	1		(, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	1		
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Sistem Drainase Perkotaan)			1	100.000.000,00	(, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					62,790,000,000.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			58,378,424,781.00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Persentase Bangunan Pamerintah Yang difasilitasi (%)			90.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					62.790.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat		58.378.424.781,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah lokasi bangunan gedung difasilitasi (Lokasi)			10.000						Pemerintah dan Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Bangunan Gedung dan Rumah Negara (%)			100.000						Pemerintah dan Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.08.1.01.001 3	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara					200.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat		300.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola (Rumah Negara)	5	5	12		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur ASN dan Pensiunan	12		
			Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara (Rumah Negara)			12	200.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur ASN dan Pensiunan			
	1.03.08.1.01.001 5	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara					100.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, , SULAWESI SELATAN)				Aparatur ASN dan Pensiunan		200.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Teraftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara)	0	0	10		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	10		
			Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara (Bangunan Gedung Negara)			10	100.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
	1.03.08.1.01.001 6	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					800.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	0.00	0.00	1.00		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	0.00		
			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Bangunan Gedung)			1	800.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
	1.03.08.1.01.001 8	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota					100.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	0.00	0.00	24.00		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	24.00		
			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)			24	100.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
	1.03.08.1.01.001 9	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					61.090.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat		47.778.424.781,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	8	10	8		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	8		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.08.1.01.002 0		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)			8	61.090.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0.00	0.00	1.00	500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	3	10.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Bangunan Gedung)			1	500.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					6,950,000,000.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			18,759,852,962.00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Persentase fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi (%)			81.200			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.950.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		18.759.852.962,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)			10.000					Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				
			Persentase ketersediaan perencanaan teknis penataan lingkungan (%)			100.000						Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	1.03.09.1.01.000 8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					5.200.000.000,00					Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		10.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem	0.00	0.00	1.00		(Yogyakarta, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.03.09.1.01.000 9		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)			1	5.200.000.000,00	(Yogyakarta, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat				
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pemerintah dan Masyarakat		7.494.852.962,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG		
		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0.00	0.00	5		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi dan Konstruksi	5				
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			5	1.000.000.000,00	(Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi dan Konstruksi					
	1.03.09.1.01.001 0	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					450.000.000,00				Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi dan Konstruksi		550.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG		
		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan	0.00	0.00	1		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi	1				
		Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Dokumen)			1	450.000.000,00	(Yogyakarta, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi					
	1.03.09.1.01.001 1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan						150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konsultansi		550.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)	0	0	1		(Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, dan Kab./Kota	1				
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)				1	150.000.000,00	(Tersebar di Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, dan Kab./Kota						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.09.1.01.001 2	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (kabupaten/kota) Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	0	0	24	150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Tersebar di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, dan Kab./Kota Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	24	165.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3,321,627,533.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			2,022,114,353.00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Rasio Ketaatan Pemanfaatan Ruang (%)			91,35			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang disusun/ditetapkan (Dokumen)			2.000	521.627.533,00	(SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		1.248.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.01.000 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	2.00	2.00	1.00	171.627.533,00	(SULAWESI SELATAN) (Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	1.00	823.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.01.000 5	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi) Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang (Publikasi)	0	0	1	150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat Pemerintah dan Masyarakat	1	-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.12.1.01.000 9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat	75	425.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	0	0	75	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat					
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang (Orang)			75	200.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat				
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					1.150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		435.472.466,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah fasilitasi perencanaan tata ruang (kabupaten/kota)			24.000				Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat					
	1.03.12.1.02.000 6	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota					250.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	1	100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	0.00	1	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang					
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)			1	250.000.000,00	(250.000.000,00, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang				
	1.03.12.1.02.000 8	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1	85.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota (Laporan)	0.00	0.00	1	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota					
			Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota (Laporan)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota				
	1.03.12.1.02.000 9	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota					300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Kabupaten/Kota		85.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.03.12.1.02.001 1	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari (Dokumen)	0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1			
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			1	300.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota (Berita Acara)	0.00	0.00	2.00		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kot a	200		85.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota (Berita Acara)			2	200.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kot a				
	1.03.12.1.02.001 2	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)					Pemerintah Kabupaten/Kot a		80.472.466,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kot a	1			
			Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kot a				
	1.03.12.1.03 6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					550.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pemerintah Kabupaten/Kot a		104.641.887,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah layanan informasi pemanfatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah			3.000					Pemerintah Kabupaten/Kot a					
	1.03.12.1.03.000 6	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Kabupaten/Kot a		104.641.887,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)	0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.12.1.03.000 7		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)			1	300.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					250.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat		-	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1		
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Dokumen)			1	250.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					1.100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		234.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah wilayah yang dikendalikan pemanfaatannya (kabupaten/kota)			5.000					Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang				
	1.03.12.1.04.000 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang					500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		128.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	5.00	5.00	3		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat	3		
			Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)			3	500.000.000,00	(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat			
	1.03.12.1.04.001 4	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKĀ					600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat		106.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)			0	0	1		(Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKÅ (Dokumen)			1	600.000.000,00	(24 Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang			
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					43,898,923,058.00							28,518,630,866.00	
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					43,898,923,058.00							28,518,630,866.00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi					17,623,850,491.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			20,678,809,306.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000									
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					396.251.468,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			1.240.653.590,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)			100.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)					100		
	1.04.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					160.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			813.442.740,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.01.000 2		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			2	160.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1.00		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					51.251.468,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.01.000 4		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	51.251.468,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
				Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		
	1.04.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	2	2		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	2		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			2	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		132.953.150,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	5	5		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	5		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			5	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.724.602.810,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		11.569.126.289,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)			100.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	100		
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.539.328.010,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		11.094.824.009,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	97	97	97		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	97		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Pembayaran Gaji ASN) (Rp Juta/Orang/Bulan)			12	11.539.328.010,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					25.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	25.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					27.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		84.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	27.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					43.274.800,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		219.102.280,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	43.274.800,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					15.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			1	15.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					15.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	3		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	3		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			3	15.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					135.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		203.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Laporan)			4.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	4		
	1.04.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.04.01.1.03.000 2		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			2	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					25.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Laporan)			1.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
	1.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					25.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	0.00	0	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			1	25.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					295.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		936.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			1.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1				
	1.04.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					110.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1.00	1.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1.00				
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Paket)			1	110.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel					
	1.04.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		148.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.05.000 5		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	35.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1			
		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel				
	1.04.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		247.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60	120.00	120.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	120.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.05.001 0		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Orang)			120	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0.00	0	100		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	100		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Orang)			100	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					560.052.500,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		685.057.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)			1.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Paket)			1	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Paket)			1	10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					100.052.500,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		110.057.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			1	100.052.500,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					400.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	0	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			1	400.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					280.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		1.020.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)			1.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1			
	1.04.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0.00	0	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1			
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			1	10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel				
	1.04.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0.00	0	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.07.000 5		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian yang akuntabel (Unit)			1	10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
		Pengadaan Mebel					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1.00	1.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1.00		
				Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian yang akuntabel (Paket)			1	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		
	1.04.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					150.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	20		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	20		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.07.000 8		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			20	150.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
		Pengadaan Aset Tak Berwujud					10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0.00	0	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			1	10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0	2		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			1	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.861.986.576,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		2.969.494.929,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			1.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					475.083.532,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		522.591.885,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Laporan)			1	475.083.532,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.386.903.044,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		2.446.903.044,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	0	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Pembayaran Gaji Non ASN) (Rp Juta/Orang/Bulan)			12	2.386.903.044,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.345.957.137,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		2.027.476.748,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			1.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
	1.04.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						966.344.637,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		1.401.695.960,00
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			22	10.00	10.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	8.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.09.000 2		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			10	966.344.637,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						109.200.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		247.988.788,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8.00	15.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	22.00			
		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			15	109.200.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel				
	1.04.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.720.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		77.792.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	20		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	20		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.01.1.09.000 8		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			20	70.720.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0.00	0	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	1		
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			1	10.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					189.692.500,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2.00	2.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	2.00				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel (Unit)			2	189.692.500,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1,666,573,617.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,670,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (%)			100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel			
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					200.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		1.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi (Dokumen)			5.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel	5		
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.02.1.01.000 6		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Dokumen)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1		
		Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Dokumen)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder				
	1.04.02.1.01.000 9	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.02.1.01.001 0		Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Dokumen)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Dokumen)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
		1.04.02.1.01.001 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)</i>	1	1	1		<i>(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder</i>	1		
			<i>Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Dokumen)</i>			1	40.000.000,00	<i>(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder</i>			
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					274.725.200,00	<i>(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		970.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			<i>Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi (Orang)</i>			150.000		<i>(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)</i>				<i>Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder</i>	150		
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana					45.000.000,00	<i>(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)</i>	50	50.00	50.00		<i>(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder</i>	50.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.02.1.02.000 4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Orang)			50	45.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
							30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	49.00	45.00	30.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	30.00		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Orang)			30	30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	1.04.02.1.02.000 6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan					30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1	1.00	1.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.02.1.02.000 8	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Dokumen)			1	30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
							30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (orang)	25	10.00	10.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	10.00		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Orang)			10	30.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	1.04.02.1.02.000 9	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan					94.725.200,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	80	50.00	30.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	30.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.02.1.02.001 0		Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Orang)			30	94.725.200,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan					45.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	40	50.00	30.00			(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	30.00		
		Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Orang)			30	45.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					1.191.848.417,00	(10 titik pada 10 kecamatan di kabupaten maros, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN), (kabupaten maros, SULAWESI SELATAN), (Galesong Utara, KAB. TAKALAR), (Lorong Jalan Alternatif (Kawasan lingkungan masjid Nur Al Ikhlâs Haria) Lingk. Tompobalang Kel. Tompobalang Kec. Sombaopu, KAB. GOWA)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah rumah korban bencana yang tertangani (Unit Rumah)			10.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	10			
	1.04.02.1.03.000 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					1.191.848.417,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	0				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder, Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Unit Rumah)			10	391.848.417,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan di daerah Rawan Bencana (12 Kab/Kota) (Meter)			200	200.000.000,00	(Lorong Jalan Alternatif (Kawasan lingkungan masjid Nur Al Ikhlas Haria) Lingk. Tompobalang Kel. Tompobalang Kec. Sombaopu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan di daerah Rawan Bencana (12 Kab/Kota) (Meter)			250	200.000.000,00	(10 titik pada 10 kecamatan di kabupaten maros, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (7 Kab/Kota) (Unit)			5	100.000.000,00	(Pengembangan Perumahan / Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi / Ujung ,, Kecamatan Lilirilau , / 5 Unit / Estimasi Rp 100000000, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (7 Kab/Kota) (Unit)			5	100.000.000,00	(Desa Tuncung (3 Unit), Desa Pundi Lemo (2 Unit), KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (7 Kab/Kota) (Unit)			5	100.000.000,00	(Lemb. To'yasa Akung, Kec. Bangkelekila', KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Tindak lanjut Pembangunan PSU sesuai Perencanaan / DED yang telah selesai (Paket)			1	100.000.000,00	(kec baebunta,kec masamba,kec mappedeceng, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3,045,477,093.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,334,821,560.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi (%)			4.460			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					90.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat dan Stakeholder		1.334.821.560,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)			1.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)			Masyarakat dan Stakeholder	1			
	1.04.03.1.01.001 7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat dan Stakeholder		532.228.560,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Laporan)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	1.04.03.1.01.001 8	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		802.593.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	75	100.00	200.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	200.00		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Orang)			50	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10					2.955.477.093,00	(Dinas Perumahan, Kawasan			02.Peningkatan Pembangunan	Lingkup Dinas Perumahan,		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
			Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)			50.000		(Prioritas pelaksanaan untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kumuh sesuai dengan SK Kumuh yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, SULAWESI SELATAN)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	60		
	1.04.03.1.02.001 4	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					2.955.477.093,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	0	0				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder, Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Ha)			50	455.477.093,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter)			200	200.000.000,00	(KEL. PAJALELANG KEC. WARA, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter)			300	200.000.000,00	(kecamatan belopa, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter)			175	150.000.000,00	(Kecamatan Mangarabombang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter)			1.074	200.000.000,00	(Kel. Pajalesang Kec. Wara, Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang, Kel. Buntu datu Kec. Telluwanua, Kel. To.Bulung Kec. Bara, Kel. Boting Kec.Wara, Kel. Malatunrung Kec.Wara Timur, Kel. Lagaligo Kec. Wara, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter)			250	200.000.000,00	(Kecamatan Pattalassang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter)			200	200.000.000,00	(kecamatan maros baru, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Paket)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter)			150	200.000.000,00	(DESA SENG SELATAN KEC. BELOPA, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Paket)			1	200.000.000,00	(kecamatan belopa, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter)			500	300.000.000,00	(Kel. Tondon Mamullu, Kel. Ariang, Kel. Lamunan, Kel. Lapandan, Kel. Botang (Kec. Makale), KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Meter) Penyusunan Dokumen DED Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)			500	250.000.000,00	(Kawasan Marannu 2, Kel. Pacongang, Kec. Paletang. SK Kumuh No. 050/332/2020, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
						2	200.000.000,00	(Kawasan kumuh Desa Wonorejo dan Kawasan kumuh Desa Balantang, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					21,363,021,857.00				02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			3,450,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman Persentase jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman			26.670			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
						25.710			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
						16.670			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					21.363.021.857,00	01.Jangko Faropo Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (10 titik di 10 kecamatan kabupaten maros, SIII.AWFSI			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat dan Stakeholder		3.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Kawasan Permukiman Yang Terbangun PSU (Kawasan)			12.000		(Prioritas penanganan berdasarkan Detail Engineering Design yang telah ada, hasil forum perangkat daerah, hasil musrembang dan hasil pokok-pokok pikiran, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat dan Stakeholder	17		
	1.04.05.1.01.000 1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman					50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Masyarakat dan Stakeholder		2.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.05.1.01.000 2		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	19	5.00	10.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	10.00		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Dokumen)			10	50.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman					21.163.021.857,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Kep. Selayar, Takalar, Bone, Toraja Utara, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Soppeng, Bantaeng, Jeneponto, Wajo, Pangkep, Luwu, Enrekang, Maros, Sidrap dan Pinrang, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	-		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)	0	0				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder, Masyarakat dan Stakeholder, (Pekerjaan Sumur Bor)			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Lokasi)			43	1.588.021.857,00	(Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Kep. Selayar, Takalar, Bone, Toraja Utara, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Soppeng, Bantaeng, Jeneponto, Wajo, Pangkep, Luwu, Enrekang, Maros, Sidrap dan Pinrang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan (Meter)			200	200.000.000,00	(Desa Baringeng, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Kel/Desa. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			350	200.000.000,00	(kabupaten luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			200	150.000.000,00	(DUSUN LARA DESA BUNTU KAMIRI KEC. PONRANG, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			200	175.000.000,00	(Lembang Makuan Pare, Kec. Rantebua, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Kel/Desa. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Paket)			1	200.000.000,00	(desa raja kec. bua, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Kel/Desa. Tanra Tuo - Kec. Cempa - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Desa Tallang Bulawang Kec. Bajo, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			322	200.000.000,00	(Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Kel/Desa. Pekkabata - Kec. Duampanua - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(DUSUN OLANG DESA OLANG KEC. PONRANG SELATAN, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kabupaten/Kota (Meter)			300	150.000.000,00	(Kel/Desa. Benteng Sawitto, Kec. Paleteang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kabupaten/Kota (Meter)			175	200.000.000,00	(Desa Bontojai, Kec. Bissappu, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kabupaten/Kota (Meter)			300	200.000.000,00	(Kel/Desa. Mattombong - Kec. Mattiro Sompe - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan (Meter)			350	200.000.000,00	(DESA: JALAJJA, Kec. BURAU, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan (Meter)			300	200.000.000,00	(Komp. Mega Rezky Blok D1 Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Sumberdadi, Kec. Tanalili, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			150	200.000.000,00	(JL. PONGSIMPIN LORONG JAMBU KELURAHAN MUNGKAJANG KEC. MUNGKAJANG, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Jl. Kotipa I, II, III, IV RT 04 KODAM 3, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Kel. Palantikang, Kec. Palantikang, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			400	200.000.000,00	(Baru Doping, Kel. Doping, Kec. Penrang, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Jl. Kotipa XII, RT 03 KODAM 3, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Desa Balla Kec. Bajo, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Desa Panciro, Kec. Bajeng, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			400	200.000.000,00	(Jln., Manggarupi-Jln. S Dg Lurang Kel. Paccinongan Kec. Sombaopu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			400	200.000.000,00	(kelurahan Tondon Mamullu, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			350	200.000.000,00	(Jl. H. Ibrahim Lingkungan menge Kec. Belawa, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Kel. Romang Polong, Kec. Sombaopu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Lembang Bulian Massa'bu, Kel. Buntu Masakke, Kec. Sangalla, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			2.000	200.000.000,00	(Kec. Mandai, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Kel.Biringere, Kec.Sinjai Utara, Kab.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(DUSUN BATU TONGKONG DESA PADANG KALUA KEC BUA, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Jl. Kotipa VIII, RT. 03, Kodam 3, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Desa Lampoko, Kec. Barebbo, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	150.000.000,00	(Kec. Polongbangkeng Utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Kel. Balangnipa, Kec.Sinjai Utara, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Desa Kompang, Kec. Sinjai Tengah, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Desa Wele, Kec. Belawa, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Jl. Dg. Ramang, Komp. Bumi Sudiang Raya Blok G. 44, Kel. Laikang, Kec. Biringkanayya, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	150.000.000,00	(Jl.Perkebunan desa Mappedeceng Kec.Mappedeceng, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(DESA KURUSUMANGA KEC. BELOPA, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Desa Lerang, Kec. Lanrisang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Kel. Buakana, Kec. Rappocini, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			150	150.000.000,00	(RT 09 RW 02 KEL. PONJALAE KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Jl. Landak (Andi Djemma) Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			350	200.000.000,00	(BPP Lamuru, Kec. Lamuru , KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(To' Tombi Lembang Benteng Mamullu, Kec. Kapalapitu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			350	200.000.000,00	(KEL. BALO BALO KEC. BELOPA, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Dusun Salabu Desa Wewangriu Kec. Malili, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			150	150.000.000,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	150.000.000,00	(Dusun Lengkong Desa Arolipu Kec.Wotu, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			300	200.000.000,00	(Jl. Batua, Kel. Batua, Kec. Manggala, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(BPP Bengo, Kec. Bengo, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(BPP Ajangale, Kec. Ajangale, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(Jl. Bau Mangga 2, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)			200	200.000.000,00	(RW 01 RT 01 LRG DERMAWAN KEL. SALOBULO KEC. WARA UTARA, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Meter)	300	200.000.000,00	(BPP Awangpone, Kec. Awangpone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Stakeholder										
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)	150	200.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Stakeholder										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			150	150.000.000,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			150	125.000.000,00	(Kecamatan Galesong Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			250	200.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			200	200.000.000,00	(Kel/Desa. Kaballangan, Kec. Duampanua, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			200	200.000.000,00	(Kec.Suli, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			200	200.000.000,00	(JlPerintis Kemerdekaan VII Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			200	200.000.000,00	(Kel. Biring Romang Kec. Biringkanaya, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			337	200.000.000,00	(Kel. Salobulo Kec.Wara Utara, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			200	200.000.000,00	(Kel/Desa. Cempa, Kec. Cempa, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			200	200.000.000,00	(RT 01 RW 05 LR. 06 KEL. BENTENG KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota (Meter)			200	200.000.000,00	(DESA RAJA KEC. BUA KAB. LUWU, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan PSU Kawasan Permukiman Sanitasi (MCK Umum/ Mesjid, Persampahan) kabupaten / Kota (Unit)			1	100.000.000,00	(Kel/Desa. Benteng Paremba, Kec. Lembang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan PSU Kawasan Permukiman Sanitasi (MCK Umum/ Mesjid, Persampahan) kabupaten / Kota (Unit)			1	75.000.000,00	(DESA TALLANG BULAWANG KEC. BAJO KAB. LUWU, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan PSU Kawasan Permukiman Sanitasi (MCK Umum/ Mesjid, Persampahan) kabupaten / Kota (Unit)			1	150.000.000,00	(Kecamatan Galesong utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (Paket)			1	1.000.000.000,00	(Kecamatan Pasilambena, Bontoharu, dan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (KK)			60	150.000.000,00	(-, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Bira Kecamatan Bontobahari, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (Rumah Tangga)			65	200.000.000,00	(Dusun Kuari Desa Asuli Kec. Towuti, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (Rumah Tangga)			100	200.000.000,00	(Lembang Bau, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			(Pekerjaan Sumur Bor)			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (Lokasi)			1	1.000.000.000,00	(Pulau Sembilan, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (KK)			50	200.000.000,00	(Desa Nipa-Nipa, Kec. Pajukukang, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (KK)			110	200.000.000,00	(Desa Labuaja Kec. Kahu, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (KK)			55	200.000.000,00	(Desa Ulu Galung, Kec. Eremerasa, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum / Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota (Paket)			1	200.000.000,00	(Lembang Tapparan Utara, Kec. Rantetayo, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Stakeholder			
			85			200.000.000,00	(KEL. TUARA KEC. ENREKANG, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Stakeholder						
			60			200.000.000,00	(Desa Batu Lappa Kec. Patimpeng, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Stakeholder						
			1			1.000.000.000,00	(Pulau Tanakeke, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Stakeholder						
			75			200.000.000,00	(Desa Sohiring Kec. Sinjai Tengah, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Stakeholder						
			1			200.000.000,00	(Dusun Balombong Lembang Burasia, Lembang Bau, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Stakeholder						
			1.04.05.1.01.000 3			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman									
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.05.1.01.000 4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Laporan)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
						40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0.00	0	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1		
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Laporan)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	1.04.05.1.01.000 5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman					70.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Dokumen)			1	70.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
5.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					200,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			385,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)			7.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					200.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU (Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan)			15.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	15		
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah					200.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah (Laporan) Meningkatnya ketersediaan Hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (Laporan)	9	1	1		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1		
						1	200.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					63,289,164,273.00							68,276,614,555.00	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					46,746,845,362.00							49,586,132,838.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					43,069,941,362.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			43,559,274,461.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Temuan LHP Yang Persentase ASN berkinerja baik dan Nilai Rata-rata Capaian Indikator			100 100 100									
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					339.770.800,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)						542.770.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			11.		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)					11		
	1.05.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					127.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)						330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12.00	12.00	12.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12.00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			12	127.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
	1.05.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					15.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.01.000 3		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	1.00		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	15.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					63.343.100,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH		63.343.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	1.00		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	63.343.100,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
		1.05.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					15.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH		15.000.000,00
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			1.00	1.00	1.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	1.00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)					1	15.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
	1.05.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					30.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.01.000 6		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	30.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					43.290.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)			PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH	1.00	43.290.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			1	43.290.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH					
	1.05.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					46.137.700,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)			PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH	4.00	46.137.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.00	4.00	4.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH						
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)					4	46.137.700,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH						
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.179.916.884,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)			PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH	32	21.219.918.884,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			32.	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)		PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH						
	1.05.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					21.034.791.884,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)			PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH		21.034.791.884,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.02.000 4		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	148	148.00	150.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	150.00		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)			150	21.034.791.884,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					67.052.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH		77.052.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12.00	12.00	12.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	12.00		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			12	67.052.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
		1.05.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					21.107.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH		41.107.000,00
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1.00	1.00	1.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	1.00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					1	21.107.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
	1.05.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					10.516.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH		20.518.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	20.00	20.00	20.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	20.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.02.000 7		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			20	10.516.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					46.450.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)			PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH	18.00	46.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.00	18.00	18.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)			18	46.450.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH					
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					42.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH		42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			300.000				PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH					
			Presentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah (%)			100.000				PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH					
	1.05.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					20.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PENINGKATAN AKUNTABILITA S KINERJA PEMERINTAH DAERAH	2.00	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.00	2.00	2.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TERSUSUNNYA KEBUTUHAN BARANG OPD						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	20.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TERSUSUNNYA KEBUTUHAN BARANG OPD					
	1.05.01.1.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					22.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				TERSUSUNNYA KEBUTUHAN BARANG OPD		22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.00	3.00	3.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			INVENTARISASI BARANG	3.00		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			3	22.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			INVENTARISASI BARANG			
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					428.372.300,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				INVENTARISASI BARANG		428.372.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			350.000				INVENTARISASI BARANG					
	1.05.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					358.372.300,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				INVENTARISASI BARANG		358.372.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	255	148.00	148.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN SATPOLPP	148.00				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			148	358.372.300,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN SATPOLPP					
	1.05.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					70.000.000,00	(Satuan Polisi pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				ASN SATPOLPP		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	340	340	148.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TERTIB ADMINISTRASI	148.00				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			148	70.000.000,00	(Satuan Polisi pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TERTIB ADMINISTRASI					
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					657.369.901,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)				TERTIB ADMINISTRASI		772.801.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			250.000				TERTIB ADMINISTRASI						
		Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			120.000				TERTIB ADMINISTRASI						
	1.05.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					27.500.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				TERTIB ADMINISTRASI		27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	57	50.00	50.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50.00				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.06.000 2		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			50	27.500.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	50.00	100.00	27.250.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.00	27.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			100	27.250.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ALAT ALAT KANTOR			
	1.05.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11550	180.00	180.00	52.800.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ALAT ALAT KANTOR	180.00	52.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			180	52.800.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)								BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN				
	1.05.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					24.200.000,00	(Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)				BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN		24.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	12.00	12.00		(SATUAN PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12.00		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			12	24.200.000,00	(Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	1.05.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					37.250.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		37.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.00	12.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	37.250.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Kunjungan Tamu			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					469.818.901,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Facilitasi Kunjungan Tamu	160.00	475.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150.00	150.00	160.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			160	469.818.901,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	1.05.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.551.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.00	28.551.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5156	100	200.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			200	8.551.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD			
	1.05.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					10.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1.00	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaa an Sistem Pemerintah an Berbas is Elektr onik pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaa an Sistem Pemerintah an Berbas is Elektr onik pada SKPD			
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					699.033.749,00	(Satuan polisi pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)				Pelaksanaa an Sistem Pemerintah an Berbas is Elektr onik pada SKPD		769.033.749,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			9.000					Pelaksanaa an Sistem Pemerintah an Berbas is Elektr onik pada SKPD				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					399.033.749,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		399.033.749,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0.00	4.00	4.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.00		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			4	399.033.749,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
	1.05.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)				Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	2.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.00		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			2	100.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
	1.05.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					70.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)				Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	3.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Paket Mebel yang Disediakan	3.00		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			3	70.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Paket Mebel yang Disediakan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Paket Mebel yang Disediakan	1.00	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			1	30.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
	1.05.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00	(Satuan polisi pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10	10	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			1	100.000.000,00	(Satuan polisi pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.108.417.728,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		19.114.417.728,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			24.000				Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					
	1.05.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					29.598.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		35.598.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.08.000 4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			12	29.598.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					19.078.819.728,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		19.078.819.728,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			12	19.078.819.728,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					615.060.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		669.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			85.000						Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	1.05.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					354.960.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		354.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25.00	25.00	25.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.05.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			25	354.960.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				180.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
				9.00	9.00	9.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.00					
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			9	180.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	1.05.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	41.00	41.00	41.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50.00			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			41	70.100.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
								10.000.000,00	(satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	1.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			1	10.000.000,00	(satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3,071,762,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			4,845,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (%)			100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					2.031.452.000,00	(Satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3.655.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah (%)			100.000						Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.02.1.01.000 6	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					25.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0.00	5.00	5.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP DAN INSTANSI INSTANSI VERTICAL				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)			5	25.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	1.05.02.1.01.000 8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					35.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP DAN INSTANSI INSTANSI VERTICAL	10.00	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0.00	0.00	10.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peingkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)			10	35.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	1.05.02.1.01.001 3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat					250.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				Peingkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	200.00	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	0.00	150.00	150.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP				
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)			150	250.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	1.05.02.1.01.001 4	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi					94.652.476,00	(Satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP	16.00	270.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	15	15.00	16.00	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.02.1.01.001 5		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)			16	94.652.476,00	(Satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP			
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	0.00	0.00	2.00	50.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP	2.00	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)			2	50.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP DAN MASYARAKAT			
	1.05.02.1.01.001 6	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0.00	.00	30.00	30.000.000,00	(Satuan Polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP DAN MASYARAKAT	50.00	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)			30	30.000.000,00	(Satuan Polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			MASYARAKAT			
	1.05.02.1.01.001 7	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	277.00	277.00	277.00	656.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				MASYARAKAT	277.00	790.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (Kasus)			277	656.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP DAN MASYARAKAT			
	1.05.02.1.01.001 8	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia						424.875.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP DAN MASYARAKAT		450.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.02.1.01.001 9		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja (Orang)	200	200.00	240.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP	240.00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)			240	424.875.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP			
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada	42.00	42.00	45.00	465.924.524,00	(Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)			SATPOLPP		1.500.000.000,00		
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Kasus)			45	465.924.524,00	(Satuan Polisi Pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			MASYARAKAT	50.00	
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					890.310.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN), (satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				MASYARAKAT		980.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Presentase Tingkat Penyelesaian			100.000					MASYARAKAT				
	1.05.02.1.02.000 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					380.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				MASYARAKAT		380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penejakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	3.00	3.00	3.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	Pajak Rokok			sat polpp dan masyarakat	3.00		
	1.05.02.1.02.000 2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)			3	380.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	Pajak Rokok			sat polpp dan masyarakat			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	65.00	65.00	70.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	Pajak Rokok, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			sat polpp dan masyarakat	75.00	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.05.02.1.02.000 3		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)			70	220.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	Pajak Rokok, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			sat polpp dan masyarakat				
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25.00	25.00	25.00	290.310.000,00	(satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Rokok			sat polpp dan masyarakat	25.00	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (Laporan)			25	290.310.000,00	(satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Rokok			sat polpp dan masyarakat				
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					150.000.000,00	(Satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN), (Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				sat polpp dan masyarakat		210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			8.000						sat polpp dan masyarakat				
	1.05.02.1.03.000 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	2	25.00	25.00	100.000.000,00	(Satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sat polpp dan masyarakat	25.00	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda (Laporan)			25	100.000.000,00	(Satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sat.polpp				
	1.05.02.1.03.000 3	Pembentukan Sekretariat PPNS					10.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)					sat.polpp		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokuman)	0.00	0.00	1.00			(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PPNS	1.00		
			Surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS (Surat Keputusan)			1	10.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PPNS				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.02.1.03.000 5	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS					40.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PPNS		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	0.00	0.00	20.00		(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PPNS	20.00		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)			20	40.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PPNS			
3.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					325,347,524.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			835,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Korban Bencana yang tertangani			100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PPNS			
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					150.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PPNS		355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana			100		(SULAWESI SELATAN)				PPNS	100		
	1.05.03.1.01.000 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	0	80.00	80.00	150.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PROVINSI BERSAMA KABUPATEN KOTA	80.00	355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota (Orang)			80	150.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PROVINSI BERSAMA KABUPATEN KOTA			
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					120.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)				PROVINSI BERSAMA KABUPATEN KOTA		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)				PROVINSI BERSAMA KABUPATEN KOTA	100		
	1.05.03.1.02.001 6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di	50	100.00	100.00	120.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PROVINSI BERSAMA KABUPATEN KOTA	100.00	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)			100	120.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP			
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					55.347.524,00	(Satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP		130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.03.1.04.001 9		Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100		(SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP	100		
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat	2	2.00	2.00	55.347.524,00	(Satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP	2.00	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	2				55.347.524,00			
4.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					279,794,476.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			346,858,377.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)			38			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA			
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					139.655.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	SATPOLPP DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA	50	146.155.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (%)		50	(SULAWESI SELATAN)		SATPOLPP DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA							
	1.05.04.1.01.000 4	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,	0	12.00	12.00	20.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA	12.00	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)					12			
	1.05.04.1.01.000 9	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota						43.655.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOL DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA		49.655.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.04.1.01.002 3		Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	0	50	50.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP	50.00		
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)			50	43.655.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP			
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					76.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)			SATPOLPP		76.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	0.00	0.00	4			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP		4
						4	76.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SATPOLPP			
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					140.139.476,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP		200.703.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan,			85		(SULAWESI SELATAN)			SATPOLPP	90			
	1.05.04.1.02.000 2	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					70.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				SATPOLPP		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	0.00	0.00	24.00			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24.00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)			24	70.000.000,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.04.1.02.000 4	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					70.139.476,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)				Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraa n Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		90.703.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	0	24	24		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraa n Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)			24	70.139.476,00	(satuan polisi pamong praja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraa n Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					16,542,318,911.00							18,690,481,717.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10,529,958,911.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			11,508,066,917.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000									
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					556.620.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,			16.000									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	180.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	2	196.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan Dokumen Renja Perangkat daerah (Dokumen)			2	180.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyediaan dokumen RKA OPD (Dokumen)				62.610.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	1	66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				1	1	1						Aparatur, Non Aparatur			
					1	62.610.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur					
	1.05.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Penyediaan dokumen perubahan RKA OPD (Dokumen)				64.010.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	1	68.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				1	1	1						Aparatur, Non Aparatur			
					1	64.010.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur					
	1.05.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Penyediaan dokumen DPA OPD (Dokumen)				25.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	1	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				1	1	1						Aparatur, Non Aparatur			
					1	25.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur					
	1.05.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Penyediaan dokumen Perubahan DPA OPD (Dokumen)				25.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	1	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				1	1	1						Aparatur, Non Aparatur			
					1	25.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur					
	1.05.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	5	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				5	5	5						Aparatur, Non Aparatur			
				5	100.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur, Non Aparatur							
1.05.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Penyediaan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	6.00	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			6.00	6.00	6.00						Aparatur, Non Aparatur				
				6	100.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur						
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.215.643.987,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		5.881.707.993,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						12.000					Aparatur, Non Aparatur				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.05.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.090.643.987,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		5.731.707.993,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	40	40	40		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	43			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			40	5.090.643.987,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur				
	1.05.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					20.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)					Aparatur		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	1			
			Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Laporan)			1	20.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur				
	1.05.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)					Aparatur, Non Aparatur		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	15	15	15		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	15			
			Penyediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran OPD (Laporan)			15	100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur				
	1.05.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					5.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)					Aparatur, Non Aparatur		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	1	1		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	1				
Penyediaan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)					1	5.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur					
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					214.734.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		251.108.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.000						Aparatur, Non Aparatur				
	1.05.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					34.734.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	6		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	6			
			Penyediaan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			6	34.734.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur				
	1.05.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	180.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur Aparatur, Masyarakat	100	201.108.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)			100	180.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat			
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit) Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			1.000 600.000	1.091.710.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat		1.370.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			10.00 10	21.710.000,00 21.710.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat Aparatur, Non Aparatur	10.00	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				10.00	10.00	10.00		(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
				10		10	21.710.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
	1.05.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			10 10	200.000.000,00 200.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur Aparatur, Non Aparatur	10	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				10	10	10		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
				10		10	200.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
	1.05.01.1.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)			20 20	120.000.000,00 120.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur Aparatur, Non Aparatur	20	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				20	20	20		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
				20		20	120.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
	1.05.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) Fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)			12 12	100.000.000,00 100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	12	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			12	12	12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur				
			12		12	100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur				
1.05.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD (Laporan)			12 12	650.000.000,00 650.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat Aparatur, Non Aparatur	12	790.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			12	12	12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur				
			12		12	650.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				2.792.250.924,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur Aparatur, Non Aparatur		2.805.250.924,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	742.782.520,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)			Aparatur, Non Aparatur	12	750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	742.782.520,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur				
	1.05.01.1.08.000 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	2.049.468.404,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)			Aparatur, Non Aparatur	12	2.055.250.924,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	2.049.468.404,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur				
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah				659.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur Aparatur, Non Aparatur		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	15	15	400.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)			Aparatur, Non Aparatur	15	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			15	400.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur				
	1.05.01.1.09.000 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	10	29.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)			Aparatur, Non Aparatur	10	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			10	29.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur				
	1.05.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	230.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Aparatur, Non Aparatur	2	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			2	230.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur, Non Aparatur,					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					6,012,360,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			7,182,414,800.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih (%) Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani (%)			100.000 100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Aparatur, Non Aparatur, Aparatur, Non Aparatur,			
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					303.491.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Aparatur, Non Aparatur,		432.414.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.000 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang terlayani dalam pemberian informasi wilayah rawan			100.000						Aparatur, Non Aparatur, Aparatur, Non Aparatur,		432.414.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	100		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (Daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	100		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) (Orang)			100	303.491.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat			
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					1.611.379.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat		1.750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.001 4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana			100.000						Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Dokumen)	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	1		
						1	130.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
	1.05.03.1.02.001 5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana (Orang)	200	200	200		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	200	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						200	409.352.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
	1.05.03.1.02.001 6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.05.03.1.02.001 7		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	100	75	100		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	200		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					100	250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur					
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas Penyusunan Rencana Kontijensi (Dokumen)	1	1	1	335.777.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	1	380.000.000,00		
					1	335.777.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur					
	1.05.03.1.02.001 8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (Dokumen)	0	0	1	236.250.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	0	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					1	236.250.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur					
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat gladi Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang)	0.00	0.00	100.00	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	100.00	170.000.000,00		
					100	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat					
	1.05.03.1.02.002 1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana (Unit)	0	0	1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	2	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat					
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						2.317.672.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat		2.740.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat yang responsif			100.000											
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	12	12	12	502.107.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	12	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)			12	502.107.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Non Aparatur					
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1.815.565.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Aparatur dan Non Aparatur			2.190.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	48000	50000	50000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	55000		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)			50.000	1.815.565.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					1.779.818.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		2.260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah dokumen penataan sistem			5.000						Masyarakat			
	1.05.03.1.04.001 1	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi					960.318.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi (Laporan)	2	2	2		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Non Aparatur	2		
						2	960.318.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Non Aparatur			
	1.05.03.1.04.001 7	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					169.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur dan Non Aparatur		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur	1		
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (Dokumen)			1	169.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
	1.05.03.1.04.001 8	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah					350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Non Aparatur	1		
			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)			1	350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Non Aparatur			
	1.05.03.1.04.002 0	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota					300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur dan Non Aparatur		380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan	24.00	24.00	24.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, masyarakat	24.00		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (kabupaten/kota)			24	300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, masyarakat			
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					50,544,332,821.00							55,884,561,765.00	
		DINAS SOSIAL					50,544,332,821.00							55,884,561,765.00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					42,871,219,022.00							44,594,988,864.00	DINAS SOSIAL
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			85.000 97.200 100.000									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			19.000	477.631.258,00	(SULAWESI SELATAN) (Dinas Sosial Provinsi Selatan, SULAWESI SELATAN)					19	500.219.120,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	2	366.463.258,00	(SULAWESI SELATAN) (Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	2	352.582.626,00	DINAS SOSIAL
			Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)			2	366.463.258,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	10.478.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1	11.085.724,00	DINAS SOSIAL
			Penyusunan Dokumen RKA (Dokumen)			1	10.478.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	1	10.485.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1	11.093.130,00	DINAS SOSIAL
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (Dokumen)			1	10.485.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	5.882.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1	6.223.156,00	DINAS SOSIAL
			Penyusunan Dokumen DPA (Dokumen)			1	5.882.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	1	4.323.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1	4.573.734,00	DINAS SOSIAL
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA (Dokumen)			1	4.323.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.06.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Laporan)				30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	7	31.740.000,00	DINAS SOSIAL	
				0	0	7		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
						7	30.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.06.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	6	82.920.750,00	DINAS SOSIAL	
				5	6	6		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
						6	50.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)				36.363.061.608,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	30	35.952.383.759,00	DINAS SOSIAL	
					30.000		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan						
	1.06.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)				36.221.180.458,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	330	35.802.273.502,00	DINAS SOSIAL	
					330	330	330		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
						330	36.221.180.458,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.06.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				91.881.150,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	18	97.210.257,00	DINAS SOSIAL	
				18	18	18		(35.802.273.502, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
						18	91.881.150,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.06.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	12	52.900.000,00	DINAS SOSIAL	
				0	0.00	12		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Dokumen)			12	50.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					14.730.515,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			1.000		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1		
	1.06.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					14.730.515,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
		Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	1		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Pengadaan Pakaian Dinas (Paket)			1	14.730.515,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					862.112.800,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		1.112.809.614,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			61.000		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	61		
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			1000.000		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1000		
	1.06.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		10.580.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	10		
			Penyediaan Alat Listrik (Paket)			10	10.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					151.824.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		261.475.970,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	10		
		Pengadaan Sarana Kantor (Paket)			10	151.824.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
	1.06.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					23.440.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		24.799.520,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.01.1.06.000 5		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	31	31	31		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	31		
			Pengadaan Alat Kebersihan (Paket)			31	23.440.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		30.153.000,00	DINAS SOSIAL		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	10		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	10		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			10	28.500.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
			1.06.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		80.153.000,00	DINAS SOSIAL
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12			12	12		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	12		
			Penyediaan Makan dan Minum Jamuan Tamu (Laporan)			12	80.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
				1.06.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				568.348.800,00	(SULAWESI SELATAN)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		705.648.124,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	300			300		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota	300		
			Rapat Koordinasi Di Kab/Kota (Laporan)			300	568.348.800,00	(24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.845.744.317,00	(SULAWESI SELATAN)					24 Kab/Kota		5.741.320.790,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			24.000		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota	24		
	1.06.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				654.394.106,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota		692.348.964,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	12		
			Pembayaran Tagihan Air, Telepon dan Listrik (Laporan)			12	654.394.106,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
1.06.01.1.08.000 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.191.350.211,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		5.048.971.826,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	12		
			Pembayaran Jasa Tenaga Non PNS (Laporan)			12	3.191.350.211,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.307.938.524,00	(SULAWESI SELATAN)				Non ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		988.255.581,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			158.000		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Non ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	158		
	1.06.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1.022.788.524,00	(SULAWESI SELATAN)				Non ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		306.830.580,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	7		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas	7		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			7	1.022.788.524,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas				
	1.06.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					22.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kendaraan Dinas		23.276.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0.00	0.00	7		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas	7		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)			7	22.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas				
1.06.01.1.09.000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					33.150.000,00	(SULAWESI SELATAN)					Kendaraan Dinas Sarana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	110	35.072.700,00	DINAS SOSIAL
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	110	110	110		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				
			Pemeliharaan Alat Rumah Tangga (Unit)			110	33.150.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
1.06.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Sarana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	1	21.160.000,00	DINAS SOSIAL
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0.00	1		(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.01.1.09.000 9		Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Unit)			1	20.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	3	200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	3	575.466.301,00	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas (Unit)			3	200.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	30	10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	30	26.450.000,00	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Unit)			30	10.000.000,00	(Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1,457,984,600.00					04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata		2,032,841,721.00	DINAS SOSIAL	
			Persentase Dokumen izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					36.907.100,00	(SULAWESI SELATAN)				Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		144.535.602,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.02.1.01.000 1		Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)			70.000		(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	70		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					36.907.100,00	(SULAWESI SELATAN)				Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	70	144.535.602,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	70	0.00	70		(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga/perorangan penyelenggara UGB dan PUB			
			Sosialisasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang (Dokumen)			70	36.907.100,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga/perorangan penyelenggara UGB dan PUB			
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					1.421.077.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Lembaga/perorangan penyelenggara UGB dan PUB	100	1.888.306.119,00	DINAS SOSIAL
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan Kemampuan dari yang ditargetkan			100.000		(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Lembaga/perorangan penyelenggara UGB dan PUB				
	1.06.02.1.02.000 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi					1.068.800.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Lembaga/perorangan penyelenggara UGB dan PUB	200.00	1.276.663.623,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	300.00	0	200.00		(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pekerja Sosial Masyarakat, PKH dan Tagana			
			penguatan peran dan fungsi Pekerja Sosial Masyarakat, PKH dan Tagana (Orang)			200	1.068.800.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pekerja Sosial Masyarakat, PKH dan Tagana			
	1.06.02.1.02.000 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi					281.677.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Pekerja Sosial Masyarakat, PKH dan Tagana	100	326.704.581,00	DINAS SOSIAL
Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)			100	0.00	100		(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Keluarga Pahlawan Nasional, Veteran, Janda Perintis Kemerdekaan, Werdatama dan Masyarakat				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.02.1.02.000 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas melalui Peringatan Hari-Hari Besar (Keluarga)			100	281.677.500,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Keluarga Pahlawan Nasional, Veteran, Janda Perintis Kemerdekaan, Werdatama dan Masyarakat			
							70.600.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Keluarga Pahlawan Nasional, Veteran, Janda Perintis Kemerdekaan, Werdatama dan Masyarakat		284.937.915,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	0.00	200		(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PSKS Kelembagaan Masyarakat	200		
			Penguatan Peran dan Fungsi PSKS Kelembagaan Masyarakat (Lembaga)			200	70.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PSKS Kelembagaan Masyarakat			
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					213,658,000.00							307,198,764.00	DINAS SOSIAL
			Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PSKS Kelembagaan Masyarakat			
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					213.658.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PSKS Kelembagaan Masyarakat		307.198.764,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan kedaerah kabupaten/kota asal (Orang)			300.000		(Sulawesi Selatan dan Luar Wilayah Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PSKS Kelembagaan Masyarakat	300		
	1.06.03.1.01.000 1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					213.658.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PSKS Kelembagaan Masyarakat		307.198.764,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	174	300	300		(Sulawesi Selatan dan Luar Wilayah Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orang Terlantar	300		
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asa (Orang)			300	213.658.000,00	(Sulawesi Selatan dan Luar Wilayah Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orang Terlantar			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3,051,582,500.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			4,447,398,525.00	DINAS SOSIAL
			Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasaenya di Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi			100.000 100.000 100.000 100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orang Terlantar Orang Terlantar Orang Terlantar Orang Terlantar Orang Terlantar Orang Terlantar			
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					400.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Orang Terlantar		442.594.992,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam Panti (SPM)			115.000	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		Orang Terlantar	115					
	1.06.04.1.01.000 4	Penyediaan Alat Bantu					160.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Orang Terlantar		245.456.000,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20	45	45	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Disabilitas Terlantar	45				
		Pemberian Bantuan Sosial alat bantu (Orang)			45	160.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Disabilitas Terlantar					
	1.06.04.1.01.000 6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Penyandang Disabilitas Terlantar		12.094.792,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50	0.00	50	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Disabilitas Terlantar	50				
		Pemberian Bimbingan untuk Kelompok Disabilitas (Orang)			50	30.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Disabilitas Terlantar					
	1.06.04.1.01.000 8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Penyandang Disabilitas Terlantar		105.800.000,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang	0.00	0.00	20	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Disabilitas Terlantar	20				
		Fasilitasi Pembuatan NIK (Orang)			20	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Disabilitas Terlantar					
	1.06.04.1.01.001 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Penyandang Disabilitas Terlantar		79.244.200,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	0.00	0.00	2	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Disabilitas Terlantar	2				
		Rapat Koordinasi Pendataan Disabilitas (Dokumen)			2	200.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Disabilitas Terlantar					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					1.446.417.500,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)				Penyandang Disabilitas Terlantar		2.345.012.614,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam panti (SPM) (Orang)			425.000		(PPRSA Inang Matutu Makassar, PPSBK Nirannuang Bulukumba, PPSBR Makkareso Maros, PPRSA Seroja Bone, SULAWESI SELATAN)			Penyandang Disabilitas Terlantar	425				
	1.06.04.1.02.000 2	Penyediaan Makanan					1.068.337.500,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)				Penyandang Disabilitas Terlantar		1.653.320.730,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	425	425	425		(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti	425			
			Penyediaan Permakanan Panti (Orang)			425	1.068.337.500,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti				
	1.06.04.1.02.000 3	Penyediaan Sandang					40.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)				Anak terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti		76.083.954,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	425	425	425		(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti	425			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.1.02.000 4		Penyediaan Sandang Dalam Panti (Orang)			425	40.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti			
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					45.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti		65.570.608,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	425	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti	425					
			Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih dalam Panti (Orang)			425	45.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti					
	1.06.04.1.02.000 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti					40.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti		63.304.422,00	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	425	425	425	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti	425					
			Penyediaan Bahan Obat-obatan (Orang)			425	40.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.1.02.000 6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					78.080.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)				Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti		144.565.120,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	425	425	425		(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti	425		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Orang)			425	78.080.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti			
	1.06.04.1.02.000 7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari					80.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)				Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti		241.657.780,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	425	425	425		(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti	425		
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Orang)			425	80.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti			
	1.06.04.1.02.001 0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					95.000.000,00	(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)				Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti		100.510.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)</i>	425	425	425		<i>(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti	425		
			<i>Penelusuran Keluarga (Orang)</i>			425	95.000.000,00	<i>(UPT Inang Matutu Makassar, UPT Seroja Bone, UPT Makkareso Maros, UPT Nirannuang Bulukumba, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti			
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					771.655.000,00	(KOTA PARE PARE)				Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti		908.140.586,00	DINAS SOSIAL
			<i>Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam panti (SPM) (Orang)</i>			75.000		<i>(PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)</i>				Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti	75		
	1.06.04.1.03.000 1	Penyediaan Permakanan					574.875.000,00	(KOTA PARE PARE)				Anak Terlantar dan Anak Jalanan di dalam panti		608.217.750,00	DINAS SOSIAL
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>	75.00	75.00	75.00		<i>(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	75.00		
			<i>Penyediaan Permakanan Dalam Panti (Orang)</i>			75	574.875.000,00	<i>(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar			
	1.06.04.1.03.000 2	Penyediaan Sandang					12.600.000,00	(KOTA PARE PARE)				Lanjut Usia Terlantar		16.187.400,00	DINAS SOSIAL
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>	75	75	75		<i>(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	75		
			<i>Penyediaan Sandang dalam Panti (Orang)</i>			75	12.600.000,00	<i>(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar			
	1.06.04.1.03.000 3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses					10.000.000,00	(KOTA PARE PARE)				Lanjut Usia Terlantar		48.668.000,00	DINAS SOSIAL
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)</i>	0.00	0.00	75		<i>(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	75		
		<i>Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan (Orang)</i>			75	10.000.000,00	<i>(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar				
1.06.04.1.03.000 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						5.000.000,00	(KOTA PARE PARE)				Lanjut Usia Terlantar		31.933.023,00	DINAS SOSIAL
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>	75	75	75		<i>(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	75		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.1.03.000 6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Penyediaan Bahan Obat-Obatan (Orang)			75	5.000.000,00	(UPT Mapakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	75	75	75	12.000.000,00	(KOTA PARE PARE) (UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	75	33.856.000,00	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Orang)			75	12.000.000,00	(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar			
	1.06.04.1.03.000 7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	75	75	75	30.000.000,00	(KOTA PARE PARE) (UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	75	55.881.973,00	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Aktivitas hidup sehari-hari (Orang)			75	30.000.000,00	(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar			
	1.06.04.1.03.001 0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	75	75	75	47.180.000,00	(KOTA PARE PARE) (UPT Mappakasunggu Pare-Pare, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	75	49.916.440,00	DINAS SOSIAL
			Penelusuran keluarga (Orang)			75	47.180.000,00	(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar			
	1.06.04.1.03.001 2	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	12	12	12	80.000.000,00	(KOTA PARE PARE) (UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	12	63.480.000,00	DINAS SOSIAL
			Pemulasaran Lansia yang Meninggal (Orang)			12	80.000.000,00	(UPT Mappakasunggu Pare-Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar			
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam Pant (SPM)			60.000	113.360.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Lanjut Usia Terlantar	60	126.282.932,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60	0.00	60	27.760.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lanjut Usia Terlantar	60	29.370.080,00	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial (Orang)			60	27.760.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gelandangan dan Pengemis			
	1.06.04.1.04.001 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant					85.600.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Gelandangan dan Pengemis		96.912.852,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Gepeng (Dokumen)	0.00	0.00	2		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gelandangan dan Pengemis	2		
						2	85.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gelandangan dan Pengemis			
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					320.150.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Gelandangan dan Pengemis		625.367.401,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.000 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Tuna Sosial yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti (Orang)			100.000		(PPSKW Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)				Gelandangan dan Pengemis	100		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100	100	100		192.150.000,00	(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gelandangan dan Pengemis	100	405.478.500,00
		Penyediaan Permakanan Dalam Panti (Orang)			100	192.150.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila				
	1.06.04.1.05.000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100	100	100	20.800.000,00	(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila	100	15.741.982,00	DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang Dalam Panti (Orang)				100	20.800.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila				
	1.06.04.1.05.000 3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	0.00	0.00	100	10.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila	100	10.613.856,00	DINAS SOSIAL
	Penyediaan Bahan dan Alat Kebersihan (Orang)				100	10.000.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila				
	1.06.04.1.05.000 4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100	100	100	10.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila	100	16.437.617,00	DINAS SOSIAL
	Penyediaan Bahan Obat- Obatan (Orang)				100	10.000.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila				
	1.06.04.1.05.000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	100	100	100	25.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila	100	52.900.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.1.05.000 6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Orang)			100	25.000.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	100	100	100	30.000.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila	100	90.127.846,00	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari (Orang)			100	30.000.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila			
	1.06.04.1.05.001 0	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan	100	100	100	7.200.000,00	(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila	100	7.617.600,00	DINAS SOSIAL
			Pemulangan ke daerah asal (Orang)			100	7.200.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila			
	1.06.04.1.05.001 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA					25.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Wanita Tuna Susila		26.450.000,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	0.00	0.00	2		(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila	2		
			Rapat Koordinasi (Dokumen)			2	25.000.000,00	(UPT Mattirodeceng Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila			
	5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2,330,969,099.00					04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata		3,078,896,524.00	DINAS SOSIAL
			Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila			
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					117.600.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Wanita Tuna Susila		125.153.465,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.000 1		Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI sesuai kewenangan provinsi (Orang)			40.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Wanita Tuna Susila	40		
		Pengangkatan Anak antar WNI		Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	38	40.00	40.00	117.600.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wanita Tuna Susila LKSA, Dinas Sosial Kab/Kota, Lembaga Terkait Anak dan Anak Adopsi	40.00	125.153.465,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Anak Terlantar dan Sidang Tim PIPA (Orang)			40	117.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			LKSA, Dinas Sosial Kab/Kota, Lembaga Terkait Anak dan Anak Adopsi			
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					2.213.369.099,00	(24 Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN),				LKSA, Dinas Sosial Kab/Kota, Lembaga LKSA, Dinas Sosial Kab/Kota, Lembaga Terkait Anak dan Anak Adopsi		2.953.743.059,00	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) (%)			100.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				100			
	1.06.05.1.02.000 1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					720.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				LKSA, Dinas Sosial Kab/Kota, Lembaga Terkait Anak dan Anak Adopsi		1.004.600.200,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400.00	750	400.00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Eks Kusta	400.00			
			Bantuan Sosial yang diserahkan Ke Eks Kusta (Keluarga)			400	720.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Eks Kusta			
	1.06.05.1.02.000 2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota					193.369.099,00	(SULAWESI SELATAN)				Eks Kusta		729.070.974,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Keluarga)	400	300	400.00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Sosial KUBE dan Dinas Sosial Kab/Kota	400.00			
			Bimbingan Teknis Penerima KUBE (Keluarga)			400	193.369.099,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Sosial KUBE dan Dinas Sosial Kab/Kota			
	1.06.05.1.02.000 3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					1.300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penerima Bantuan Sosial KUBE dan Dinas Sosial Kab/Kota		1.220.071.885,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	36	70	110	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Sosial KUBE	110			
				Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Orang)			110	1.300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Sosial KUBE		
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					561,951,600.00							1,306,891,223.00	DINAS SOSIAL
			Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Sosial KUBE			
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					561.951.600,00	(SULAWESI SELATAN)				Penerima Bantuan Sosial KUBE		1.306.891.223,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.06.1.01.000 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial			3700.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Penerima Bantuan Sosial KUBE	3.700		
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Penyediaan Bantuan Logistik Makanan kepada Korban Bencana Alam dan Sosial (Orang)	26921	3000	3000	397.540.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Sosial KUBE	3000	834.000.000,00	DINAS SOSIAL
						3.000	397.540.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Korban Bencana Alam dan Sosial			
	1.06.06.1.01.000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Penyediaan Bantuan Logistik Sandang kepada Korban Bencana Alam dan Sosial (Orang)	2917	500	500	102.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Korban Bencana Alam dan Sosial	500	170.000.000,00	DINAS SOSIAL
						500	102.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Korban Bencana Alam dan Sosial			
	1.06.06.1.01.000 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	100	200	200	62.411.600,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Korban Bencana Alam dan Sosial	200	302.891.223,00	DINAS SOSIAL
						200	62.411.600,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pelopor Perdamaian, Tagana, Dinas Sosial Kab/Kota			
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					56,968,000.00							116,346,144.00	DINAS SOSIAL
			Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pelopor Perdamaian, Tagana, Dinas Sosial Kab/Kota			
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					56.968.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Tenaga Pelopor Perdamaian, Tagana, Dinas Sosial Kab/Kota	2	116.346.144,00	DINAS SOSIAL
			Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan (Makam)			2.000		(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)			Tenaga Pelopor Perdamaian, Tagana, Dinas Sosial Kab/Kota				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.07.1.01.000 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pemeliharaan TMP (Makam)	2	2	2	56.968.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Tenaga Pelopor Perdamaian, Tagana, Dinas Sosial Kab/Kota		116.346.144,00	DINAS SOSIAL
						2	56.968.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			TMP Provinsi	2		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					461,965,456,190.00							618,393,864,400.40	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					38,597,912,852.00							38,192,145,573.00	
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					38,597,912,852.00							38,192,145,573.00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					30,042,281,788.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			31,552,317,009.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000									
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan				445.166.100,00	(SULAWESI SELATAN)					100	495.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	2.00	2.00	307.522.200,00	(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	2.00	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	307.522.200,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi			
	2.07.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.00	1	1.00	17.479.500,00	(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	1.00	17.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	17.479.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan transmigrasi			
	2.07.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	1	1	14.978.200,00	(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan transmigrasi	1	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						1	14.978.200,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan tranmigrasi			
	2.07.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					17.497.200,00	(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan tranmigrasi		17.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.07.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	0.00	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	1		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
					1	17.497.200,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi					
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0.00	1	1	14.960.900,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	1	15.000.000,00			
					1	14.960.900,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi					
	2.07.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				40.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	17	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				17	17	17				(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
							17	40.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi			
	2.07.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				32.728.100,00	(SULAWESI SELATAN)					dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	11.00	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				6.00	11	11				(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
						11	32.728.100,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi				
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.316.406.060,00	(SULAWESI SELATAN)					dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	100.00	27.973.956.797,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi				
	2.07.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				27.150.111.860,00	(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	190	27.758.956.797,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				190	190	190				(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
						190	27.150.111.860,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi				
	2.07.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				9.999.100,00	(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	1.00	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				0.00	1	1.00				(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
							1	9.999.100,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	15.00	18	18.00 18	156.295.100,00 156.295.100,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	18.00	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Prilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN			100.000	109.999.900,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	100.00	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.00	190	1.00 190	109.999.900,00 109.999.900,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	1.00	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perkantoran (%)			100.000	293.065.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	100.00	405.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	2.00	2.00	2.00 2	53.415.000,00 53.415.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	2.00	55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.00	12	12.00 12	239.650.000,00 239.650.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	12.00	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah (%)			100.000	25.749.660,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	100.00	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	0.00	87.00	100.00 87	25.749.660,00 25.749.660,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi	100.00	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000	1.090.197.048,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi	100.00	1.153.360.212,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	1.00	12	12.00 12	618.840.000,00 618.840.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	12.00	650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	17.00	12.00	12.00 12	471.357.048,00 471.357.048,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi	12.00	503.360.212,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik			100.000	761.698.020,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi	100.00	1.175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1.00	17.00	17.00 17	715.648.020,00 715.648.020,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	17.00	1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00	53.00	53.00	46.050.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi	53.00	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			53	46.050.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi			
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					156,442,700.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			65,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyusun Perencanaan Tenaga Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Mikro			100.000 15.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi			
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					156.442.700,00	(SULAWESI SELATAN)				dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi	100.00 100.00	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota Persentase peningkatan pengetahuan SDM Kabupaten/Kota (%)			100.000 100.000		(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi				
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					141.442.700,00	(SULAWESI SELATAN)			dinas tenaga kerja dan trasnmigrasi			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	25		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas yang membidangi ketenagakerjaa n se Provinsi Sulawesi Selatan	25		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)			1	141.442.700,00	(Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas yang membidangi ketenagakerjaa n se Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						15.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Dinas yang membidangi ketenagakerjaa n se Provinsi Sulawesi Selatan		20.000.000,00
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro (Orang)	0.00	24	24		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan Perusahaan	24		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (Orang)			24	15.000.000,00	(Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan Perusahaan			
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					5,803,435,124.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			3,870,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan (%)</i> <i>Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri (%)</i>			85.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan Perusahaan Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan Perusahaan			
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					5.723.435.124,00	(SULAWESI SELATAN), (Benteng, Kabupaten)				Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan	100.00 100.00 100.00	3.725.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			<i>Persentase meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja/UKM/KUM/Disabilitas (%)</i>			100.000	(SULAWESI SELATAN)		Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan Perusahaan						
			<i>Persentase meningkatnya kompetensi instruktur (%)</i>			100.000	(SULAWESI SELATAN)		Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan Perusahaan						
			<i>Persentase pelayanan dan pembinaan UPTD Balai Pelatihan Kerja (%)</i>			100.000	(SULAWESI SELATAN)		Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan Perusahaan						
	2.07.03.1.01.000 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					5.585.603.924,00	(SULAWESI SELATAN)				Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dan Perusahaan	940	3.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)</i>	16	240	920	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<i>Tenaga kerja, pencari kerja, penganggur, kelompok usaha, perusahaan/um km, penyandang disabilitas</i>					
			<i>Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi (Orang)</i>			1.100	5.585.603.924,00	(Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<i>Tenaga kerja, pencari kerja, penganggur, kelompok usaha, perusahaan/um km, penyandang disabilitas</i>				
2.07.03.1.01.000 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					137.831.200,00	(SULAWESI SELATAN)				<i>Tenaga kerja, pencari kerja, penganggur, kelompok usaha, perusahaan/um km, penyandang disabilitas</i>	20	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana</i>	20	20	20	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<i>Instruktur, LPK dan UPT BPK</i>						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama denga Sektor swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sapras LPK (Lembaga)			20	137.831.200,00	(Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instruktur, LPK dan UPT BPK			
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase meningkatnya produktivitas UKM (%)			60.000	30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Instruktur, LPK dan UPT BPK	65	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0.00	3		30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Instruktur, LPK dan UPT BPK	6	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivas Kepada Perusahan Menengah (Perusahaan)			2	30.000.000,00	(Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga kerja dan Perusahaan/UM KM					
										Tenaga kerja dan Perusahaan/UM KM					
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja (%)			100.000	50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Benteng Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (Kec. Pattallassang, Kel. Kalabbirang, KAB. TAKALAR), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)				Tenaga kerja dan Perusahaan/UM KM	100.00	70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
									(SULAWESI SELATAN)			Tenaga kerja dan Perusahaan/UM KM			
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	5	10	5	50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga kerja dan perusahaan/um km	8	70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga kerja dan perusahaan/um km					
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					745,753,240.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			684,828,564.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)			9.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga kerja dan perusahaan/u mkm			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase daya serap tenaga kerja (%)			63.300			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga kerja dan perusahaan/u mkm			
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					105.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Tenaga kerja dan perusahaan/um km	100.00	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase pemenuhan pelayanan antar kerja (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)			Tenaga kerja dan perusahaan/um km				
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja					105.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Tenaga kerja dan perusahaan/um km	50	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD,	0.00	0.00	50	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga Kerja						
			Pelayanan Antar Kerja (Orang)			35.000	105.000.000,00	(Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dan luar Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja			
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					239.772.300,00	(SULAWESI SELATAN), (Benteng Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (Kec. Pattalassang, Kel. Kalabbirang, KAB. TAKALAR), (SUNGGUMINASA, KAB. GOWA), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Rantepao Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA), (Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Tenaga Kerja		139.815.064,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						100.000	(SULAWESI SELATAN)		Tenaga Kerja	100.00					
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					39.772.300,00	(SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kerja		39.815.064,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	24	500	500	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja dan pemberi kerja/perusaha an	500					
			Pelayanan dan Penyediaan IPK online (Orang)			500	39.772.300,00	(Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pencari kerja dan pemberi kerja/perusaha an			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.04.1.03.000 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) Job Fair (Paket)	0.00	500	1500	200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pencari kerja dan pemberi kerja/perusahaan Pencari kerja dan pemberi kerja/perusahaan Pencari kerja dan pemberi kerja/perusahaan	1500	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya kompetensi CPMI/PMI (%) Persentase meningkatnya pelayanan dan penanganan PMI Terpadu (%)			100.000	355.967.440,00	(SULAWESI SELATAN), (Benteng Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI), (Kabupaten Bone, KAB. BONE), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Rantepao Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA), (Kota Parepare, KOTA PARE PARE)			Pencari kerja dan pemberi kerja/perusahaan Pencari kerja dan pemberi kerja/perusahaan	100.00	425.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.1.04.000 3	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Penyediaan Layanan Terpadu CPMI (Orang)	0.00	100	100	355.967.440,00	(SULAWESI SELATAN)				Pencari kerja dan pemberi kerja/perusahaan CPMI dan PMI CPMI dan PMI	125	425.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja asing di Kabupaten/Kota			100.000	45.013.500,00	(SULAWESI SELATAN)				CPMI dan PMI CPMI dan PMI	100.00	45.013.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					45.013.500,00	(SULAWESI SELATAN)				CPMI dan PMI		45.013.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA Koordinasi dan Sinkronisasi pengesahaan RPTKA (Orang)	0.00	100	100		(SULAWESI SELATAN) (Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat TKA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja Asing (TKA) Tenaga Kerja Asing (TKA)	100		
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1,000,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,065,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang- Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek			63.400 50.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja Asing (TKA) Tenaga Kerja Asing (TKA)			
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					88.221.500,00	(SULAWESI SELATAN), (Benteng, Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (KECAMATAN PALLANGGGA, KAB. GOWA), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (kec masamba, KAB. LUWU UTARA), (Rantepao Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA), (Kota Parepare, KOTA PARE PARE), (Dinas Tenaga Kerja, KOTA PALOPO)				Tenaga Kerja Asing (TKA)		115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.000 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Tersedianya Data dan Informasi pelaksanaan Syarat-syarat Kerja di			100.000		(SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.00		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HI (Perusahaan)	1	1	25 1	10.000.000,00 10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja Asing (TKA) Perusahaan Perusahaan	30	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.000 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial (Perusahaan)	0.00	0.00	2 1	10.000.000,00 10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan Perusahaan Perusahaan	5	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.05.1.01.000 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Laporan)	25	1	1	68.221.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Perusahaan	1	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan yang dapat dicegah dan diselesaikan Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif			33.000 100.000	437.362.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Pekerja/Buruh dan Perusahaan	35 100.00	450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.000 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi (Perkara)	110	110	50 110	64.471.400,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pekerja/Buruh dan Perusahaan	50	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.000 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Provinsi (Lembaga)	27	3	3 3	372.891.100,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan	3	375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial Falisitasi dewan pengupahan dalam menetapkan UMP/UMK			100000.000 100.000	474.416.000,00	(SULAWESI SELATAN)				LKS Tripartit	125.000 100.00	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.000 1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)					420.178.200,00	(SULAWESI SELATAN)				LKS Tripartit		435.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.05.1.03.000 5		Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Surat Keputusan)	25	1	1 1	420.178.200,00	(SULAWESI SELATAN) (Kab./Kota Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan Perusahaan	1		
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					54.237.800,00	(SULAWESI SELATAN)			Perusahaan		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Teraftar dalam Program Jaminan Sosial	95000	95000	100000			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perusahaan	125000		
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)			95.000	54.237.800,00	(Kab./Kota Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perusahaan				
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					850,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			955,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit Meningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan			86.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan Perusahaan			
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					850.000.000,00	(SULAWESI SELATAN). (KECAMATAN BONTOMARANNU, KAB. GOWA), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)				Perusahaan		955.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan			15.000		(SULAWESI SELATAN)			Perusahaan	16			
			Persentase permasalahan hukum yang tertangani			100.000		(SULAWESI SELATAN)			Perusahaan	100.00			
			Persentase pelayanan K3 di perusahaan			100.000		(SULAWESI SELATAN)			Perusahaan	100.00			
	2.07.06.1.01.000 1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan					590.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Perusahaan		675.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di	500	900	900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perusahaan	900				
		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (Perusahaan)			900	590.000.000,00	(Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perusahaan					
	2.07.06.1.01.000 2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan					145.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Perusahaan		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	75	100	120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pekerja/Buruh dan Perusahaan	115				
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan (Kasus)			100	145.000.000,00	(Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pekerja/Buruh dan Perusahaan				
2.07.06.1.01.000 3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan					115.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Pekerja/Buruh dan Perusahaan		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	1	100	66		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pekerja/Buruh dan Perusahaan	74				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelayanan Keselematan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (Perusahaan)			100	115.000.000,00	(Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pekerja/Buruh dan Perusahaan			
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					15,314,703,489.00							17,599,088,458.00	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA					15,314,703,489.00							17,599,088,458.00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11,609,076,732.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			12,698,996,058.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			79 95 100									
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					442.000.000,00	(24 kab/kota, SULAWESI SELATAN), (Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)						655.496.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 100		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN) (Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)					100 100		
	2.08.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					135.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)						205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4	4		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah LingkupPPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	3			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)			4	135.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah LingkupPPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah LingkupPPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	1	8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Penyusunan Dokumen RKA (Dokumen)			1	8.500.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB			
	2.08.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB	1	8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (Dokumen)			1	8.500.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.500.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB	1.00	7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.00	1.00		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Penyusunan Dokumen DPA (Dokumen)			1	7.500.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.08.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					7.500.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB	1.00	7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1.00	1.00		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA (Dokumen)			1	7.500.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.08.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					175.000.000,00	(24 kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB	6.00	268.496.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	23	6.00		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.08.01.1.01.000 7		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)			6	175.000.000,00	(24 kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	0	1			(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	1		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1	100.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.744.998.814,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi		8.745.000.058,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	100		
	2.08.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.654.998.814,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi		8.650.000.058,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				ASN Lingkup DP3A Dalduk KB		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.08.01.1.02.000 7		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel	2			
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)			2	20.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						65.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel	12			
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (Laporan)			12	65.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel				
		2.08.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						5.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel		5.000.000,00
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1			1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	5.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel			
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan kinerja ASN (Nilai)			78.5		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel	79			
	2.08.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					25.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A DaldukKB Provinsi Sulsel		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB	1		
			Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Paket)			1	25.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB			
	2.08.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					5.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	3		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB	3		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			3	5.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					923.500.000,00	(24 kab/kota, SULAWESI SELATAN), (Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB		1.333.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)			90		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)			Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB	90			
	2.08.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.500.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB		8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	15	5		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ruangan Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas	5		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			5	8.500.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ruangan Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas			
	2.08.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					150.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Ruangan Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23	25	18		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas DP3A Dalduk KB	20		
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			18	150.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas DP3A Dalduk KB			
	2.08.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					45.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas DP3A Dalduk KB		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.1.06.000 8		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum dan kepegawaian Kepegawaian	2		
			Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)			2	45.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum dan kepegawaian Kepegawaian			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					75.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum dan kepegawaian Kepegawaian		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	1	4		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu dari Dalam Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan Non Pemerintahan,L embaga/Organi sasi Mitra, Unsur Pimpinan	4		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			4	75.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu dari Dalam Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan Non Pemerintahan,L embaga/Organi sasi Mitra, Unsur Pimpinan			
		2.08.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					545.000.000,00	(24 kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Tamu dari Dalam Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan Non Pemerintahan,L embaga/Organi sasi Mitra, Unsur Pimpinan		730.000.000,00
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75			2	5		(Semua Kab/Kota dan Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup DP3A Dalduk KB dan Rapat- rapat dalam Luar Provinsi	5			
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					5	545.000.000,00	(24 kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup DP3A Dalduk KB dan Rapat- rapat dalam Luar Provinsi				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					25.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				ASN Lingkup DP3A Dalduk KB dan Rapat-rapat dalam Luar Provinsi	100	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100	100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Penatausahaan Arsip Dinamis (Dokumen)			100	25.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.08.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					75.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Penatausahaan Arsip DP3A Dalduk KB	3	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	3	3		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			3	75.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					993.577.918,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Sistem Berbasis Elektronik pada SKPD DP3A Dalduk KB	90	1.060.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor (%)			85		(Makassar, SULAWESI SELATAN)							
	2.08.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					25.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Sistem Berbasis Elektronik pada SKPD DP3A Dalduk KB		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup DP3A Dalduk KB	2		
			Jasa Surat Menyurat (Laporan)			2	25.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup DP3A Dalduk KB			
						120.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup DP3A Dalduk KB		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	3		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA	3		
	2.08.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			3	120.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA			
						35.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	5		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas DP3A DALDUK KB	5		
			Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			5	35.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas DP3A DALDUK KB			
	2.08.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					813.577.918,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas DP3A DALDUK KB		865.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Non PNS Lingkup Dinas DP3A Dalduk KB	12		
			Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	813.577.918,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Non PNS Lingkup Dinas DP3A Dalduk KB			
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					475.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Tenaga Non PNS Lingkup Dinas DP3A Dalduk KB		825.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Non PNS Lingkup Dinas DP3A Dalduk KB	100		
	2.08.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					325.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Tenaga Non PNS Lingkup Dinas DP3A Dalduk KB		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Dalduk KB Prov. Sulsel	12		
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			12	325.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Dalduk KB Prov. Sulsel			
	2.08.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Dalduk KB Prov. Sulsel		375.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	4	4		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor DP3A Dalduk KB, UPT.PPA dan Puspaga Masagena Prov. Sulsel	4		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			4	150.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor DP3A Dalduk KB, UPT.PPA dan Puspaga Masagena Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					665,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			880,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi (%)</i>			65			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor DP3A Dalduk KB, UPT.PPA dan Puspaga Masagena Prov. Sulsel Kantor DP3A Dalduk KB, UPT.PPA dan Puspaga Masagena Prov. Sulsel Kantor DP3A Dalduk KB, UPT.PPA dan Puspaga Masagena Prov. Sulsel			
			<i>Persentase ARG di Tingkat Provinsi (%)</i>			40			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			<i>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi (%)</i>			35.5			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					315.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Kantor DP3A Dalduk KB, UPT.PPA dan Puspaga Masagena Prov. Sulsel		430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG (%)</i>			85.5		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Kantor DP3A Dalduk KB, UPT.PPA dan Puspaga Masagena Prov. Sulsel	86		
	2.08.02.1.01.000 5	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					45.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Kantor DP3A Dalduk KB, UPT.PPA dan Puspaga Masagena Prov. Sulsel		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)</i>	0	0	1		(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota	1		
			<i>Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG (Kebijakan)</i>			1	45.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.02.1.01.000 6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					95.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota	1	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi (Laporan)	1	1	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Focal Point PUG Perangkat Daerah Tk .Provinsi			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG (Laporan)			1	95.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Focal Point PUG Perangkat Daerah Tk .Provinsi			
	2.08.02.1.01.000 7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					175.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Focal Point PUG Perangkat Daerah Tk .Provinsi	48.00	235.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Dokumen)	50	50	48.00		(24 kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perencana/audi tor/calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Dokumen)			48	175.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perencana/audi tor/calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi					350.000.000,00	(Kecamatan Manggala, SULAWESI SELATAN), (Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (10 Kecamatan, KAB. TAKALAR), (Kecamatan Se - Kabupaten Gowa, KAB. GOWA), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan PPA, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Perencana/audi tor/calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial (%)					25.5	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)						
		2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi					350.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Perencana/audi tor/calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG		450.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0.00	0.00	48		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi, lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi, Politik,hukum, Perempuan kelompok rentan, kader partai politik, DP3A Kab/kota , LBH	48		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Lembaga)			48	350.000.000,00	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi, Politik,hukum, Perempuan kelompok rentan, kader partai politik, DP3A Kab/kota , LBH			
			Kapasitas Perempuan dibidang Politik dan Hukum relatif masih rendah (Orang)			100		(Kecamatan Manggala, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi			
			Kapasitas Perempuan dibidang Politik dan Hukum relatif masih rendah (Paket)			1		(-, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kapasitas Perempuan dibidang Politik dan Hukum relatif masih rendah (Orang) Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi (Orang) Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi (Orang) Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi (Orang) Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi (Paket) Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi (Paket) Sumbangan Pendapatan perempuan dalam pembangunan masih rendah (Paket)			70		(gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi			
						100		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						100		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						100		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						1		(-, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						1		(-, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						1		(-, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1,097,521,333.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,550,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi (%)</i>			54.16			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi</i>			
			<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani (%)</i>			95			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi</i>			
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					194.521.333,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN), (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KOTA PALOPO)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi		265.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan (%)</i>			13.5		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				<i>lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi</i>	14		
	2.08.03.1.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi					100.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi		155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.03.1.01.000 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gugus Tugas TPPO, Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan			
			Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/ TPPO (Gugus Tugas TPPO) 24 kab/Kota (Paket)			1		(-, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gugus Tugas TPPO			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					94.521.333,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Gugus Tugas TPPO		110.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Perangkat Daerah)	24	24	24		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kot a	24		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Perangkat Daerah)			24	94.521.333,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kot a			
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					748.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kot a		1.012.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase perempuan/anak korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi (%)			95.000		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kot a	95		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.03.1.02.000 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kota		657.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat (Orang)	60	60	48		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	48		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)			48	350.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat			
	2.08.03.1.02.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					398.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		355.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Layanan)	24	24	24		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	24		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Layanan)			24	398.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat			
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					155.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		273.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi (%)			37.75		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	38		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.03.1.03.000 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					75.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupat en/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2	2		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan	2		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Laporan)			2	75.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan			
	2.08.03.1.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					75.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan		128.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.03.1.03.000 3		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	72	110	48		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	48		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Orang)			48	75.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)			
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi					5.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik (Orang)	0	0	24		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	24		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi (Orang)			24	5.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik			
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					700,308,024.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			825,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga (%)			54.16			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik			
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					630.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik		745.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi Oleh Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga Tingkat Provinsi (Layanan)			24.000		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)			Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	24			
	2.08.04.1.01.000 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi					630.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik		745.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia (Dokumen) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak bagi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2	3		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	3		
						3	630.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia			
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					70.308.024,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI)				Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi (%)			45		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	45.5		
	2.08.04.1.02.000 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi					25.308.024,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.04.1.02.000 2		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	4	6	24		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	24		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Lembaga)			24	25.308.024,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi					25.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	0	0	48		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	48		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)			48	25.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.04.1.02.000 3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi					20.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi, Pengelola Puspaga Kab/Kota		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Puspaga Kab/Kota	1		
			Advokasi dan Peningkatan Kapasitas SDM PUSPAGA 24 Kab/Kota (Paket)			1		(-, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)			1	20.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					275,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			425,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate (%)			88			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					275.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		425.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.05.1.01.000 1		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi (%)			86		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	87		
		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi					175.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2	265.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1	2		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota a, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi)			
			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi (Dokumen)			2	175.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota a, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi)			
	2.08.05.1.01.000 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi					100.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota a, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi)		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (Dokumen)</i>	0	2	2		<i>(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kot a, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kot a,</i>	2		
			<i>Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (Dokumen)</i>			2	100.000.000,00	<i>(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					472,705,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			645,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (%)</i>			87.5			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Ko ta,</i>			
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					182.705.000,00	<i>(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Pelatihan Konvensi Hak Anak (Rp 28.000.000) Lokasi Kelurahan Lalabata Rilau , Lalabata, KAB. SOPPENG), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Kabupaten Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)</i>				<i>Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kot a,</i>		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha (%)</i>			84		<i>(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kot a,</i>	84.5		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.06.1.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					32.705.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kot a,	1	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi terkait KLA, Instansi terkait KLA Kab/Kota, Unsur Pembina dari Kabupaten/Kot a dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan				
			Advokasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) (Paket)			0,09	(-, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi terkait KLA Kab/Kota					
			Advokasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) (Paket)			1	(-, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi terkait KLA					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)			1	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unsur Pembina dari Kabupaten/Kot a dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan					
	2.08.06.1.01.000 3	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Unsur Pembina dari Kabupaten/Kot a dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan	24	205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi (perangkat daerah)	18	10	24		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota, Instansi terkait KLA Kab/Kota				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Advokasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) (Paket) Advokasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) (Paket) Advokasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) (Paket) Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (Perangkat Daerah)			1		(-, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait KLA Kab/Kota			
						1		(-, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait KLA Kab/Kota			
						1		(-, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait KLA Kab/Kota			
						24	150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota			
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					290.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota		385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak (%)			55		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	60		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.06.1.02.000 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					65.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	48	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	48		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unsur Pembina dari Kabupaten/Kot a dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan					
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota (Orang)			48	65.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unsur Pembina dari Kabupaten/Kot a dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan					
	2.08.06.1.02.000 5	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					75.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Unsur Pembina dari Kabupaten/Kot a dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan	2	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	2		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak					
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)			2	75.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak					
	2.08.06.1.02.000 6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak					150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak		195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)</i>	0	0	1		<i>(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>lembaga Pemerintah, Non Pemerintah penyedia layanan kualitas hidup anak</i>	1		
			<i>Pengembangan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)</i>			1	150.000.000,00	<i>(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>lembaga Pemerintah, Non Pemerintah penyedia layanan kualitas hidup anak</i>			
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					495,092,400.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			575,092,400.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi (%)</i>			54.16			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>lembaga Pemerintah, Non Pemerintah penyedia layanan kualitas hidup anak</i>			
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					185.000.000,00	<i>(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>lembaga Pemerintah, Non Pemerintah penyedia layanan kualitas hidup anak</i>		235.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			<i>Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak (%)</i>			17		<i>(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>lembaga Pemerintah, Non Pemerintah penyedia layanan kualitas hidup anak</i>	17.5		
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi					185.000.000,00	<i>(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>lembaga Pemerintah, Non Pemerintah penyedia layanan kualitas hidup anak</i>		235.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewengan Provinsi (Orang) Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiat an Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi (Orang)	40	40	24		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Kab/Kota terkait Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak OPD Kab/Kota terkait Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	24		
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					165.092.400,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				OPD Kab/Kota terkait Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		165.092.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)			90.5		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				OPD Kab/Kota terkait Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	91		
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					110.092.400,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				OPD Kab/Kota terkait Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		110.092.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	24		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga pemerintah, non pemerintah penyedia layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	24		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.07.1.02.000 6		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)			40	110.092.400,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga pemerintah, non pemerintah penyedia layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi					55.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga pemerintah, non pemerintah penyedia layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi (Orang)	40.00	24.00	24.00		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Penyedia Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	24.00		
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi (Orang)			40	55.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Penyedia Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Perlindungan Khusus			
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					145.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Penyedia Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Perlindungan Khusus		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.07.1.03.000 3		Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota (%)			38		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Penyedia Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	38.5		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					100.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Penyedia Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Perlindungan Khusus		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				
	2.08.07.1.03.000 4	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi					45.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi (Kegiatan)	0	0	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1		
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi (Kegiatan)					1	45.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					25,338,043,493.00							28,219,923,957.00	
		DINAS KETAHANAN PANGAN					25,338,043,493.00							28,219,923,957.00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18,971,589,827.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			23,243,163,957.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			100.000 0.700 100.000									
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					259.834.558,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			336.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			5.000		(-, SULAWESI SELATAN)					5		
	2.09.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					202.829.658,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			234.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	2	2.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN, Organisasi Perangkat Daerah, Stakeholder Ketahanan Pangan	2.00		
			Forum OPD (Dokumen)			1	123.659.658,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stakeholder Ketahanan Pangan			
			Koordinasi/Konsultasi/Men gikuti Pertemuan (Laporan)			3	77.020.000,00	(Dalam Kota/Dalam Provinsi/Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN			
			Penyusunan Renja (Dokumen)			1	2.150.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					1.825.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)			1	1.825.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
2.09.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.825.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.01.1.01.000 4		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	1.825.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					6.138.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah	1					
			Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	6.138.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
	2.09.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					6.138.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah	1					
			Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)			1	6.138.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
		2.09.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.769.900,00	(SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		25.000.000,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2	6	3.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Non ASN, Organisasi Perangkat Daerah	3					
	Koordinasi/Konsultasi/Men gikuti Pertemuan (Laporan)					1	5.850.000,00	(Dalam Kota/Dalam Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Non ASN					
	Penyusunan LKPJ (Laporan)					1	2.543.100,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
	Penyusunan LPPD (Laporan)					1	1.688.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
	Penyusunan SAKIP/LKJ (Laporan)					1	1.688.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
	2.09.01.1.01.000 7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					29.308.200,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1		1	2.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Non- ASN, Organisasi Perangkat Daerah	2					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Laporan) Penyusunan Laporan Evaluasi Renja (Laporan)			1	24.534.800,00	(Dalam Kota/Dalam Provinsi/Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non-ASN				
						4	4.773.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah				
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.345.009.735,00	(SULAWESI SELATAN), (Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		16.787.517.960,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12.000	(-, SULAWESI SELATAN)			Organisasi Perangkat Daerah	12					
	2.09.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.250.363.435,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		16.663.517.960,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	113	110	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	110					
			Gaji (Orang)			110	8.709.613.583,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN					
			TPP (Orang)			110	5.540.749.852,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN					
	2.09.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.578.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.00	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN dan Non-ASN	1					
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				1	1.578.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non-ASN			
	2.09.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5.588.400,00	(SULAWESI SELATAN)				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan Non-ASN		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1						
			Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			1	5.588.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.09.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					31.250.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		31.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non-ASN, Organisasi Perangkat Daerah	1			
			Koordinasi/Konsultasi/Mengikuti Pertemuan (Laporan)			2	30.100.000,00	(Dalam Kota/Dalam Provinsi/Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non-ASN				
			Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD (Dokumen)			1	1.150.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah				
	2.09.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.150.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		4.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	5	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah	1			
	2.09.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					28.205.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1			
			Koordinasi Penyiapan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				1	28.205.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					22.504.100,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Keuangan (Laporan)	12	12	12.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah	12			
2.09.01.1.02.000 8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2.370.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan (Dokumen)			1	2.370.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					36.462.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		38.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			20.000			(-, SULAWESI SELATAN)			Organisasi Perangkat Daerah	20		
	2.09.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					3.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0.00	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)			1	3.500.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					26.243.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		26.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0.00	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (Laporan)			1	26.243.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					3.719.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)					1	3.719.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah				
2.09.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					3.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0.00	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)			1	3.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					91.925.200,00	(SULAWESI SELATAN), (Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		151.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			3.000		(-, SULAWESI SELATAN)			Organisasi Perangkat Daerah	3			
	2.09.01.1.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					3.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN dan Non- ASN	1			
		Pengadaan Pinjer (Unit)			1	3.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non- ASN				
	2.09.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					37.740.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan Non- ASN		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (Paket)	0.00	2	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	1			
						1	37.740.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
	2.09.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					3.488.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN dan Non- ASN	1			
			Pendataan dan Pengolahan data Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	3.488.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non- ASN			
	2.09.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1.983.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan Non- ASN		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Organisasi Perangkat Daerah	1			
			Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1	1.983.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.09.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					5.153.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	1	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Kepegawaian (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN) (Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	2.09.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan Non-ASN	2	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Orang)	0.00	3	2		(-, SULAWESI SELATAN) (Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	2.09.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					15.280.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN	30	23.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian (Orang)	0.00	0.00	30.00		(-, SULAWESI SELATAN) (Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	2.09.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					15.280.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan Non-ASN	30.00	23.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Implementasi Peraturan Kepegawaian (Orang)	0.00	0.00	30.00		(-, SULAWESI SELATAN) (Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					284.218.400,00	(SULAWESI SELATAN), (Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan Non-ASN	4	517.320.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum			4.000		(-, SULAWESI SELATAN)							
2.09.01.1.06.000 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN dan Non-ASN	1	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor (Paket)			1	1.500.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	12	1.00	32.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	1	109.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Pengadaan Air Conditioner (Unit)			1	6.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
			Pengadaan Laptop dan Komputer PC (Unit)			1	20.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
			Pengadaan Printer (Unit)			1	6.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Peralatan Rumah Tangga Dinas (Paket)			1	1.500.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					19.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	7	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Belanja Cetak dan Publikasi (Paket)			6	17.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Suvenir Tamu (Buah)			5	2.500.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					18.440.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		19.880.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.01.1.06.000 9		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0.00	4	2.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media Massa dan Masyarakat, Media Massa dan Organisasi Perangkat Daerah	2		
			Berlangganan Media (Tahun)			1	1.440.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media Massa dan Organisasi Perangkat Daerah			
			Publikasi Media (Paket)			11	17.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media Massa dan Masyarakat			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					186.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Media Massa dan Masyarakat		303.440.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	50	4.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN, ASN/Non-ASN/OPD Mitra/Stakehol der Ketahanan Pangan	4		
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			2	150.000.000,00	(Dalam Kota/Dalam Provinsi/Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN			
	2.09.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rapat/Pertemuan/Koordinasi Dinas (Kali)			16	36.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN/Non-ASN/OPD Mitra/Stakehol der Ketahanan Pangan			
							2.315.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN/Non-ASN/OPD Mitra/Stakehol der Ketahanan Pangan		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
	2.09.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			1	2.315.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dukungan Sistem Pusat Informasi Data (Dokumen)			1	22.963.400,00	(Dalam Kota/Dalam Provinsi/Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					619.548.913,00	(SULAWESI SELATAN), (Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		1.403.571.909,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			2.000		(-, SULAWESI SELATAN)			Organisasi Perangkat Daerah	2			
	2.09.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					69.548.913,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		453.571.909,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0.00	0.00	2.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	2		
			Sewa Kendaraan Dinas (Bulan)			9	69.548.913,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (Unit)			1	30.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					50.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Pengadaan Meubel (Paket)			1	50.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.07.000 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Pengadaan Kajian/Aplikasi (Paket)			1	20.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	1	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pengadaan Gudang Arsip (Paket)			2	150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.09.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	1	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0.00	0.00	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pengadaan Ruangan PPID (Paket)			3	150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2.09.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	1	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0.00	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
		Pengadaan Tempat Ramah Anak (Paket)			3	150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.503.968.992,00	(SULAWESI SELATAN), (Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	6	2.949.558.888,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.000	(-, SULAWESI SELATAN)								
		2.09.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.241.800,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		20.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.09.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1			
			Persuratan (Laporan)			1	6.241.800,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	3	3.00	620.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	3	645.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Tagihan Air (Tahun)			1	84.020.470,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
				Tagihan Internet (Tahun)			1	50.400.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
				Tagihan Listrik (Tahun)			1	485.579.530,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0.00	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1			
			Pemeliharaan AC (Unit)			10	1.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah				
	2.09.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.876.227.192,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		2.274.558.888,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Tenaga OS dan Non ASN, Tenaga Sopir	1			
Iuran JKK, JKM Tenaga OS dan Non ASN (Bulan)					10	8.424.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga OS dan Non ASN					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Iuran JKS OS dan Non ASN (Bulan)</i>			10	102.802.440,00	<i>(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga OS dan Non ASN			
			<i>Jasa Tenaga Administrasi Non ASN (Bulan)</i>			10	1.054.120.302,00	<i>(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN			
			<i>Jasa Tenaga Keamanan (Bulan)</i>			10	372.365.950,00	<i>(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Keamanan			
			<i>Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)</i>			10	169.257.250,00	<i>(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kebersihan			
			<i>Tenaga Sopir (Bulan)</i>			10	169.257.250,00	<i>(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Sopir			
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					830.621.629,00	(SULAWESI SELATAN), (Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tenaga Sopir		1.059.095.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik			15.000	(-, Luar Wilayah)		Tenaga Sopir	15					
	2.09.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					162.979.229,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tenaga Sopir		315.929.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	9	14	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah	14					
			Bahab Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas (Tahun)			1	98.749.229,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (Unit)			15	25.600.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Tahun)			1	38.630.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
	2.09.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9.642.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		58.166.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.01.1.09.000 5		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Bahan Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional Dinas (Tahun)			1	5.702.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
			Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional Dinas (Unit)			1	300.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas (Unit)			1	3.640.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.09.000 5	Pemeliharaan Mebel					5.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	5.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	5		
			Pemeliharaan Meubel (Paket)			1	5.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					3.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	4.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	4		
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Paket)			1	3.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					300.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1.00		
			Renovasi Aula Pertemuan (Paket)			3	300.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	3	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.01.1.09.001 1		Renovasi Lantai Parkir (Paket)			1	150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	1	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0.00	1	1.00	(-. SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah						
			Rehab Toilet Dinas (Paket)			1	50.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
			Renovasi Ruangan Lobby Dinas (Paket)			2	150.000.000,00	(Jl. DR. Ratulangi No.47, Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					600,613,400.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			830,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Yang Aktif (%)			75.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi					600.613.400,00	(SULAWESI SELATAN), (maros, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Bangkala Barat Kecamatan Bangkala Kecamatan Tamalataea Kecamatan Bontoramba Kecamatan Turatea Kecamatan Kelara Kecamatan Rumbia Kecamatan Batang Kecamatan Tarowang Kecamatan Arungkeke, KAB. JENEPONTO), (Desa Popo Kec.Galesong Selatan, KAB. TAKALAR), (1. Kelurahan Pa'Bundukang Kecamatan Panotakiana		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah	4	830.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Diadakan (Unit)			4.00	(-. SULAWESI SELATAN)		Organisasi Perangkat Daerah						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.02.1.01.000 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					325.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah	2.00	325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	0.00	0.00	2.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Pembangunan Lantai Jemur (Paket)			1	75.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Pengadaan RMU (Unit)			1	250.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
	2.09.02.1.01.000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik					75.613.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gapoktan/Kelo mpok Tani	2	105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0.00	1	2.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan infratruktur logistik (Laporan)			1	25.613.400,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
			Peta Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.02.1.01.000 6	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah	2.00	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Renovasi Lumbung Pangan Masyarakat (Paket)			0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani				
						1	200.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					3,954,951,666.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,010,460,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Tingkat Ketersediaan Beras (%)			356.570			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Tingkat Ketersediaan Jagung (%)			54.610			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Tingkat Ketersediaan Kedelai (%)			17.740			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/Hari)			3543.560			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)			127.360			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Angka Kecukupan Energi (Kkal/Kapita/Hari)			2100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Angka Kecukupan Protein (Gram/Kapita/Hari)			57.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
			Persentase Cadangan Pangan (%)			0.014			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelo mpok Tani			
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Distribusi Pangan, Informasi Neraca dan Harga Pangan			3.000	2.348.455.666,00	(SULAWESI SELATAN), (kabupaten maros, (-, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang	Gapoktan/Kelo mpok Tani	3	951.060.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
												Gapoktan/Kelo mpok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.03.1.01.000 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					75.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Gapoktan/Kelo mpok Tani		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0.00	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1					
			Edukasi Optimalisasi Pangan Lokal (Laporan)			1	75.000.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat					
	2.09.03.1.01.000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					127.653.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat		-	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok Tani, Kelpmpok Tani, Organisasi Perangkat Daerah	1.00					
			Koordinasi Distribusi Pangan (Laporan)			1	27.653.400,00	(Dalam Kota/Dalam Provinsi/Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah					
			Penguatan Kompetensi Kelompok tani dalam Pendistribusian Pangan (Laporan)			1		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok Tani					
			Penguatan kompetensi kelompok tani dalam pendistribusian pangan (Paket)			3	100.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelpmpok Tani					
	2.09.03.1.01.000 6	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					1.600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kelpmpok Tani		-	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ dan Non- ASN, Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat	1					
			Bimbingan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Orang)			30	39.500.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Jasa Pendamping Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Orang / Bulan)			96	28.800.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Paket)			5	450.000.000,00	(-, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Paket)			10	900.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat			
			Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Paket)			1	90.000.000,00	(-, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat			
			Verifikasi/Monev/Mengikuti Pertemuan (Laporan)			1	91.700.000,00	(Dalam Kota/Dalam Provinsi/Luar Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN/ dan Non-ASN			
	2.09.03.1.01.000 7	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					75.000.000,00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN / dan Non-ASN	1	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Usaha Tani/UMKM					
			Penguatan Literasi UMKM Pangan Lokal (Paket)			1	75.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Usaha Tani/UMKM					
	2.09.03.1.01.000 8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					41.613.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Usaha Tani/UMKM	1	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Enumerator dan Kelompok Pangan Strategis					
			Pemantauan Harga Pangan (Dokumen)			1	41.613.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Enumerator dan Kelompok Pangan Strategis					
	2.09.03.1.01.000 9	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi					100.174.433,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Enumerator dan Kelompok Pangan Strategis	1.00	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat/UM KM/Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Tani/Kelompok Masyarakat/Mit ra Usaha Ketahanan Pangan					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.09.03.1.01.001 0	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Bazar Pangan Murah (Paket)			1	100.174.433,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat/UM KM/Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Tani/Kelompok Masyarakat/Mit ra Usaha Ketahanan Pangan				
							152.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat/UM KM/Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Tani/Kelompok Masyarakat/Mit ra Usaha Ketahanan Pangan		173.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Enumerator	1.00						
		Jasa Enumerator Neraca Pangan (Orang / Bulan)			504	152.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Enumerator						
	2.09.03.1.01.001 1	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi					100.174.433,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Enumerator		297.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0.00	3	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat/UM KM/Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Tani/Kelompok Masyarakat/Mit ra Usaha Ketahanan Pangan	1					
			Gelar Pangan (Paket)			1	100.174.433,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat/UM KM/Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Tani/Kelompok Masyarakat/Mit ra Usaha Ketahanan Pangan					
	2.09.03.1.01.001 2	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi						28.800.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat/UM KM/Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Tani/Kelompok Masyarakat/Mit ra Usaha Ketahanan Pangan		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.03.1.01.001 3		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Jasa Enumerator Harga Pangan (Orang / Bulan)	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Enumerator	1		DINAS KETAHANAN PANGAN
						48	28.800.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Enumerator			
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					48.040.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Enumerator		100.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	1.00			(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daersh/Masyar akat/Instansi Terkait	1	
			Penyediaan Informasi Neraca Pangan (Laporan)			1	48.040.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daersh/Masyar akat/Instansi Terkait			
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					338.970.200,00	(SULAWESI SELATAN), (Kec. Gantarang, Kec. Kajang, Kec. Rilau Ale, KAB. BULUKUMBA), (Kabupaten Jeneponto, KAB. JENEPONTO), (Lassang Barat (Polut), Maradekaya (Pattallassang), KAB. TAKALAR), (Desa Pallantikang Kec. Pattalassang, desa Romangloe Kec. Bontomarannu , KAB. GOWA), (Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR), (KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daersh/Masyar akat/Instansi Terkait		285.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Cadangan Pangan Provinsi (Ton)			140.000		(-, SULAWESI SELATAN)			Organisasi Perangkat Daersh/Masyar akat/Instansi Terkait	144			
	2.09.03.1.02.000 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					15.593.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daersh/Masyar akat/Instansi Terkait		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1		
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Laporan)			1	15.593.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.03.1.02.000 4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					15.593.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.09.03.1.02.000 5		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara (Ton)	140	140	140.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	144			
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah (Laporan)			1	15.593.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah				
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					215.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	140	140	140.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Organisasi Perangkat Daerah dan Pengelola Cadangan Pangan, Pengelola Cadangan Pangan Organisasi Perangkat Daerah dan Pengelola Cadangan Pangan	144		
	2.09.03.1.02.000 6	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Adopsi Inovasi/Teknologi Pengelolaan Cadangan Pangan (Paket)			1	115.500.000,00	(-, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Cadangan Pangan		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Peningkatan SDM pengelolaan cadangan pangan (Paket)			1	100.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Cadangan Pangan				
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.5		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pengelola Cadangan Pangan	0.50			
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)			0,5	20.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat				
	2.09.03.1.02.000 7	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					54.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	0.00	0.00	5.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	13		
			Pengadaan cadangan Pangan Provinsi (Ton)			5	54.500.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.09.03.1.02.000 8	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						17.783.400,00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)</i>	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah dan Pengelola Cadangan Pangan Organisasi Perangkat Daerah dan Pengelola Cadangan Pangan	1		
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Provinsi (Laporan)</i>			1	17.783.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat					16.613.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah dan Pengelola Cadangan Pangan Organisasi Perangkat Daerah dan Pengelola Cadangan Pangan		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<i>Jumlah Dokumen Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Dokumen)</i>			1.000		(-, SULAWESI SELATAN)					1		
	2.09.03.1.03.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal					16.613.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah dan Pengelola Cadangan Pangan ASN/Non- ASN/Harga Pangan Lokal ASN/Non- ASN/Harga Pangan Lokal	1	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i>	0.00	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			<i>Survei Harga Pangan Lokal (Laporan)</i>			1	16.613.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan					1.250.912.400,00	(SULAWESI SELATAN), (25 Desa			04.Peningkatan Kesejahteraan	ASN/Non- ASN/Harga ASN/Non- ASN/Harga Pangan Lokal	2	744.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<i>Data Angka Kecukupan Gizi (Data)</i>			2.000		(-, SULAWESI SELATAN)							
	2.09.03.1.04.000 1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1.035.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Gor Sudiang, KOTA MAKASSAR), (, Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN/Non- ASN/Harga Pangan Lokal		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<i>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)</i>	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangakat Daerah/Masyar ajat, Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Terkait/Masyak arat, Petugas MOI	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Farm Field Garden (Paket)			2	500.000.000,00	(Gor.Sudiang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Terkait/Masyak arat			
			Operasional MOI (Orang / Bulan)			240	360.000.000,00	(, Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas MOI			
			Pameran Luar Provinsi Sulawesi Selatan dan Sejenisnya (Paket)			1	125.000.000,00	(-, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masyar ajat			
			Pekan Raya atau Pameran Sulawesi Selatan (Paket)			1	50.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masyar ajat			
	2.09.03.1.04.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					82.132.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Masyar ajat		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Kampanye Pencegahan Stunting bagi ibu ibu dan remaja melalui Dapur B2SA (Paket)	0.00	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ibu dan Remaja	1		
						1	82.132.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ibu dan Remaja			
	2.09.03.1.04.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun					38.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Ibu dan Remaja		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masyar akat	1		
			Survei Konsumsi Mandiri (Laporan)			1	38.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masyar akat			
	2.09.03.1.04.000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi					95.780.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Masyar akat		194.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	0.00	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Enumerator, Organisasi Perangkat Daerah/Masyar akat/Enumerat or/Instansi Terkait	1.00		
			Jasa Enumerator Skor PPH (Orang / Bulan)			80	24.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Enumerator			
			Koordinasi dan Singkronisasi Skor PPH (Laporan)			1	71.780.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masyar akat/Enumerat or/Instansi Terkait			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					986,933,400.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,911,300,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)			6.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masya rakat/Enumer ator/Instansi Terkait			
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi					72.913.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Masyar akat/Enumerat or/Instansi Terkait	1	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi (Dokumen)			1.000	(-, SULAWESI SELATAN)								
	2.09.04.1.01.000 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota					72.913.400,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Masyar akat/Enumerat or/Instansi Terkait	1	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)								
			Penyusunan Peta PSVA (Dokumen)			1	72.913.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					914.020.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kec. Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Pasilambena, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (Kec. Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasilambena, Pasimasunggu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (KAB. BANTAENG), (KAB. JENEPONTO), (Kecamatan Bangkala Barat Kecamatan Bangkala Kecamatan Tamalataea Kecamatan Bontoramba Kecamatan Turatea Kecamatan Kelara Kecamatan Rumbia		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah	30.000	1.836.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Persentase Intervensi Bantuan pada Daerah Rentan Rawan Pangan (%)			30.000	(-, SULAWESI SELATAN)									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.04.1.02.000 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					14.020.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah	1	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait/Masyarakat				
			Koordinasi pengadaan dan penyaluran pangan yang ditargetkan (Laporan / Dokumen)			1	14.020.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait/Masyarakat			
	2.09.04.1.02.000 3	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi					800.000.000,00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait/Masyarakat	1	1.636.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN, Gapoktan/Kelompok Tani, Pendamping				
			Bimbingan Teknis Intervensi Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi (Orang)			10	12.900.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelompok Tani			
			Intervensi Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi (Paket)			1	190.000.000,00	(-, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelompok Tani			
			Intervensi Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi (Paket)			1	190.000.000,00	(-, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelompok Tani			
			intervensi Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi (Paket)			1	190.000.000,00	(-, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelompok Tani			
			Intervensi Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi (Paket)			1	190.000.000,00	(-, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gapoktan/Kelompok Tani			
Jasa Pendamping Intervensi Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi (Orang / Bulan)					24	7.200.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pendamping				
Verifikasi dan Monev (Laporan)			1	19.900.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN						
2.09.04.1.02.000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi					50.600.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN dan Non ASN		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.04.1.02.000 5		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait	1		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)			1	50.600.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait			
		Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi					49.400.000,00				04.Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait	1	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi/Inst ansi dan Lembaga Terkait			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)			1	49.400.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi/Inst ansi dan Lembaga Terkait			
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					823,955,200.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			225,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi/Inst tansi dan Lembaga Terkait			
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah					823.955.200,00	(SULAWESI SELATAN),			04.Peningkatan Kesejahteraan	Organisasi/Inst ansi dan	2	225.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar (Dokumen)			2.000		(-, SULAWESI SELATAN)			Organisasi/Inst ansi dan Lembaga Terkait				
	2.09.05.1.01.000 6	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan					195.618.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi/Inst ansi dan Lembaga Terkait	1.00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	1	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Bimbingan HCCP (Paket)					1	100.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Sertifikasi Mutu dan Keamanan PSAT (Dokumen)			1	95.618.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masyar akat/Pelaku Usaha			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.05.1.01.000 7	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					40.858.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha	3	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	3	4	3		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Registrasi Keamanan PSAT (Dokumen)			1	40.858.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.09.05.1.01.000 8	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					59.858.400,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha	1	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	0.00	1	1.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Rekomendasi keamanan PSAT (Dokumen)			1	59.858.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2.09.05.1.01.000 9	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					319.270.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait, Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait/Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha?Instansi dan Lembaga Terkait Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait	2.00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	4	3	2.00		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
		Pendampingan dan Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan (Laporan)			1	33.860.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peningkatan kompetensi pengawasan keamanan dan mutu pangan (Paket)			3	100.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha?Instansi dan Lembaga Terkait			
			Peningkatan SDM Keamanan Pangan (Paket)			2	115.500.000,00	(-, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Masyarakat/Pelaku Usaha?Instansi dan Lembaga Terkait			
			Penyebarluasan Informasi keamanan Pangan (Dokumen)			1	50.610.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Sosialisasi kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (Laporan)			1	19.300.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait/Masyarakat			
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					25.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait/Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0.00	0.00	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Organisasi Perangkat Daerah	1		
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Pengadaan Sarana dan Prasaranan UPT (Paket)				1	25.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah			
						183.350.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Organisasi Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	1.00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait, Pedagang/Pelaku Usaha Pangan	1			
		Hari Keamanan Pangan Nasional (Laporan / Dokumen)			3	70.000.000,00	(-, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Organisasi Perangkat Daerah			
			Koordinasi tim jejaring keamanan pangan (Laporan)			1	63.240.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengawasan Post Market (Dokumen)			1	50.110.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pedagang/Pela ku Usaha Pangan			
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					15,200,000,000.00							1,696,233,990.00	
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					15,200,000,000.00							1,696,233,990.00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					15,040,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			461,103,090.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					15.040.000.000,00	(Bandara Bua, Desa Puty, Kec. Bua, KAB. LUWU)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		461.103.090,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi (Lokasi)			3.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	5		
	2.10.03.1.01.000 1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					15.040.000.000,00	(Bandara Bua, Desa Puty, Kec. Bua, KAB. LUWU)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		461.103.090,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	7	3.00	3.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	5.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peningkatan Layanan Dan Tata Kelola Pertanahan (Dokumen)			3	15.040.000.000,00	(Bandara Bua, Desa Puty, Kec. Bua, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					80,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			596,100,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					80.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		596.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah (Kasus)			5.000		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)				Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	6		
	2.10.04.1.01.000 1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.10.04.1.01.000 2		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	7.00	5.00	5.00		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	6.00		
			Peningkatan Layanan Dan Tata Kelola Pertanahan (Dokumen)			5	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		346.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Berita Acara)	7	5	5		(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	6		
			Peningkatan Layanan Dan Tata Kelola Pertanahan (Berita Acara)			5	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					80,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			639,030,900.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 Kab/Kota (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					80.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		639.030.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (Dokumen)			1.000	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1				
	2.10.10.1.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		379.030.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	1	1	1	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.10.10.1.01.000 2		Peningkatan Layanan Dan Tata Kelola Pertanahan (Laporan)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi					40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder		260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi (Dokumen)	5	1.00	1.00			(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder	1.00		
		Peningkatan Layanan Dan Tata Kelola Pertanahan (Dokumen)			1	40.000.000,00	(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. SulSel, Masyarakat dan Stakeholder				
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7,049,080,884.00							14,036,317,909.00	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					7,049,080,884.00							14,036,317,909.00	
1.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					307,517,300.00							100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase pemenuhan dokumen			66.670									
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					49.998.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)						100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH (%)			60.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				80			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.02.1.01.000 2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi					49.998.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)						100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	1.00	3.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN	1.00		
			Penyediaan kertas dan cover, alat tulis kantor, bahan komputer, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, jasa narasumber/ pakar tenaga ahli, dan perjalanan dinas pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi (Dokumen)			3	49.998.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN			
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					257.518.500,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, ASN		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan (%)			100.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah, ASN	0			
	2.11.02.1.02.000 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					257.518.500,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, ASN		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	0	1	1		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN	0		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, jasa narasumber/ pakar tenaga ahli dan perjalanan dinas pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD (Dokumen)			1	257.518.500,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN			
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					703,619,800.00				05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			2,950,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Potensi emisi GRK dari sektor limbah (TonCO2e)			15257.36			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN			
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					703.619.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (KEC. TALLUNGILIPU, KAB. TORAJA UTARA), (UPT. Laboratorium LH Jl. Urip Sumoharja (Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan) Makassar, KOTA MAKASSAR), (Dinas Lingkungan Hidup, KOTA PALOPO)				Instansi Pemerintah, ASN		2.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.03.1.01.000 1			Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH (kabupaten/kota)			24.000		(Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Bulukumba, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kota Parepare, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, ASN	24		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					175.004.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, ASN		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	28.00	29	3.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN	3.00			
		Penyediaan alat tulis kantor, bahan-bahan lainnya, makanan dan minuman rapat, cetak dan penggandaan, dan perjalanan dinas koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah,air dan udara dan air laut (Dokumen)			3	175.004.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN				
2.11.03.1.01.000 2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					58.930.000,00	(Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (KEC. TALLUNGILIPU, KAB. TORAJA UTARA), (Dinas Lingkungan Hidup, KOTA PALOPO)				Instansi Pemerintah, ASN		1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.03.1.01.001 5		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	24.00	24	3.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	3.00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Penyediaan kertas, cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas pengumpulan data penyusunan laporan penurunan potensi gas rumah kaca (Dokumen)			3	58.930.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi					469.685.000,00	(UPT. Laboratorium LH Jl. Urip Sumoharja (Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan) Makassar, KOTA MAKASSAR)			Instansi Pemerintah		1.500.000.000,00		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1153.00	1100	1200.00		(UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Jl. Urip Sumoharjo Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1300.00		
			Pemenuhan logistik, bahan kimia, penyediaan alat laboratorium, pemeliharaan alat, Jasa Audit/surveillance ISO dan Perjalanan Dinas pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup (Dokumen)			300	469.685.000,00	(UPT. Laboratorium LH Jl. Urip Sumoharja Kota Makassar (Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan), KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				567,964,884.00							300,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)			88.24			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					567.964.884,00	(UPT Kebun Raya Pucak Kab. Maros, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Maros, SULAWESI SELATAN), (maros, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola (Jenis)			375.000		(Desa Tompo Bulu Kec. Tompo Bulu, KAB. GOWA)			Instansi Pemerintah	400			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.04.1.01.000 3	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi (Ha) Pengembangan/Rehabilitasi Gedung kantor UPT kebun raya Pucak demi kelancaran pelayanan pengelolaan kebun raya pucak (Ha) Penyediaan bahan kimia, bahan/bibit tanaman, bahan bakar dan pelumas, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, tagihan listrik, biaya perjalanan dinas, suku cadang alat pertanian, alat pengolahan tanah dan tanaman, pengadaan papan bicara, dan pengadaan alat kantor kebun raya Pucak (Ha)	1	1	27.00	567.964.884,00	(UPT Kebun Raya Pucak Kab. Maros, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Maros, SULAWESI SELATAN), (maros, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						27	352.994.884,00	(Desa Tompo Bulu Kec. Tompo Bulu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	27.00		
						27	214.970.000,00	(UPT Kebun Raya Pucak Desa Tompo Bulu Kec. Tompo Bulu Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					4,700,000,000.00							7,756,317,909.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase limbah yang dikelola (%)			98.65			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					4.700.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (UPT Pengelolaan Limbah B3 Jl. Urip Sumoharjo Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	7.756.317.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.05.1.01.000 1		Jumlah limbah B3 yang dikelola berdasarkan neraca LB3 (Ton)			2200000.000		(dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, UPT. Pengelolaan Limbah B3 Jl. Urip Sumoharjo Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	2.300.000		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3	1	3	100.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik (Dokumen)			3	100.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi Pemerintah	3			
	2.11.05.1.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	328.00	500	250.00	4.600.000.000,00	(UPT Pengelolaan Limbah B3 Jl. Urip Sumoharjo Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		7.656.317.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
								(UPT. Pengelolaan Limbah B3 Jl. Urip Sumoharjo Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi Pemerintah	250.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan bahan bakar dan pelumas, isi tabung pemadam kebakaran, alat tulis kantor, kertas dan cover, cetak dan penggandaan, bahan komputer, alat listrik, bahan penyelamatan, alat/bahan kantor lainnya, jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan, pemnayaran listrik, internet, paket pengiriman, asuransi barang milik daerah, pemeliharaan alat besar darat, pemeliharaan alat kantor dan alat rumah rumah tangga, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, pengadaan kendaraan operasional, alat laboratorium, alat bengkel tak bermesin lainnya dan pengadaan bangunan gedung kantor (Dokumen)			250	4.600.000.000,00	(UPT Pengelolaan Limbah B3 Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar (Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan), SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					215,002,700.00							750,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase tingkat ketaatan pemarkaksa Usaha Terhadap Izin			40			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					215.002.700,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Usaha/Kegiatan)			60.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	65		
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					50.002.700,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	7	7	10		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	10		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.06.1.01.000 6		Penyediaan kertas dan cover, alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH (Dokumen)			10	50.002.700,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					165.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	71	65	150			(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	160		
		Penyediaan kertas dan cover, alat tulis kantor, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah provinsi (Badan Usaha)			50	165.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
6.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					69,937,600.00							150,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal			33.33			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					69.937.600,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan (Masyarakat Hukum Adat)			5		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	10			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.07.1.01.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait Penyediaan makanan dan minuman rapat dan honor pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sosialisasi portal data Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait masyarakat adat, serta perjalanan dinas (Dokumen)				69.937.600,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				1	1	5		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	10		
						3	69.937.600,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					106,403,800.00							250,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan			73.4			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					106.403.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH (Lembaga)			1.104		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	1.304			
	2.11.08.1.01.000 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					106.403.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	1	24		(Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi Pemerintah	24			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas Kalpataru (Dokumen)			10	106.403.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					74,154,800.00							340,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup			88.23			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi					74.154.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kab. Luwu, KAB. LUWU)				Instansi Pemerintah		340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi (Penghargaan)			150		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	160			
	2.11.09.1.01.000 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					74.154.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kab. Luwu, KAB. LUWU)				Instansi Pemerintah		340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	111	138	150		(Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi Pemerintah	160			
			Penyediaan makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas pemberian penghargaan lingkungan hidup (Entitas)			37	74.154.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi Pemerintah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					177,480,000.00							640,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang			100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					177.480.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		640.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah rekomendasi tindakanlanjut kasus/ perkara LH yang ditangani (Rekomendasi)			30		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	32			
	2.11.10.1.01.000 3	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi					100.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	12.00	14.00	15.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	16.00		
			Penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan (Perkara)			5	100.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.10.1.01.000 7	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi					77.480.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	12	20	15		(Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	160.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi (Pengaduan)			38	77.480.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					127,000,000.00				05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			800,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani			55			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					127.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional (%)			30		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	40			
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					127.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)	3.00	14	3.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi Pemerintah	1.00			
			Penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPS/TPST Regional (Dokumen)			1	127.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11,595,310,332.00							12,191,554,042.00	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11,595,310,332.00							12,191,554,042.00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10,295,310,332.00							10,707,524,290.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat			100.000									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			96.750 100.000									
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					350.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)						358.261.544,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			14.000	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)				14				
	2.12.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					138.780.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)						139.780.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	3	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan 24 Kab/Kota	3			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3	138.780.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan 24 Kab/Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					10.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan 24 Kab/Kota		9.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					12.500.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)			1	12.500.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					10.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.01.000 5		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel	1.00		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					12.500.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	12.500.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						18.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel		27.681.544,00
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2	2		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel	2				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.01.000 7		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			2	18.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						148.220.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel		157.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	5.00	5.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan 24 Kab/Kota	5.00		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			5	148.220.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan 24 Kab/Kota			
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.209.505.788,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan 24 Kab/Kota		7.979.719.746,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan 24 Kab/Kota	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.079.505.788,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan 24 Kab/Kota		7.874.219.746,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	55.00	65.00	55.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	55.00		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			55	8.079.505.788,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	20.00	12.00	20.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	20.00		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			20	20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					5.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.00	6.00	2.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	2.00		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			2	5.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	19.00	18.00	14.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	14.00			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			14	100.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					5.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	2		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			2	5.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	3	63.216.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			3.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel				
	2.12.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	3	26.079.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2	3		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			3	20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		37.137.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1.00		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					185.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		201.580.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			4.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	4		
	2.12.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					45.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		71.580.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	54	1.00	3.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel	3.00		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			3	45.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					30.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 26, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	30.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					30.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 26, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa (Dokumen)			1	30.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Prov. Sulsel		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	350	0.00	50		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga (Orang)			50	80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					438.370.000,00	(24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		522.463.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			5.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5		
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		27.334.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	10		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	10		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			10	20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.06.000 3		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	10		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			10	80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		16.789.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0.00	10	8		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	8		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			8	10.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
		2.12.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					8.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		16.580.000,00
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8			3	2		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	2			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.06.000 6		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			2	8.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					2.500.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		4.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			1	2.500.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					68.870.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		102.360.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			1	68.870.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					224.000.000,00	(24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	24	1		(24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			1	224.000.000,00	(24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
						20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		
	2.12.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1	20.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulsel	1		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			1	5.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulsel		280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			13.000	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulsel	13					
	2.12.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					40.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulsel		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			1	40.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel				
	2.12.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulsel	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			1	40.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulsel			
							10.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulsel		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			10	10.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					565.804.544,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		749.067.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			2.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	3		
	2.12.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		120.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			1	50.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					515.804.544,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		629.067.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	21	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka (Laporan)			1	515.804.544,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					416.630.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		553.216.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			26.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	26		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					155.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		233.447.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	9	8		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	8		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			8	155.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					33.630.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			1	33.630.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					200.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.1.09.001 0		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	2	2		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	2		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			2	200.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					28.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		34.769.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	10		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	10		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			10	28.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					465,000,000.00							319,514,876.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk (%)			99.450			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
			Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)			99.450			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
			Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)			50.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel			
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					70.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah dokumen pelayanan yang mendapatkan pendaftaran peduduk (Dokumen)			3.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	3			
	2.12.02.1.01.000 3	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi					35.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi (Dokumen)	0.00	1	1.00		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi (Dokumen)			1	35.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.02.1.01.000 5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk					35.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)			1	35.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan					300.000.000,00	(24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Laporan)			2.000	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)		Dinas Dukcapil Kab/Kota	2					
	2.12.02.1.02.000 1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk					300.000.000,00	(24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota	1	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0.00	1	1	(24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Dukcapil Kab/Kota						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)			1	300.000.000,00	(24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan					95.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		69.514.876,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Laporan)			2.000	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)		Dinas Dukcapil Kab/Kota	2					
		2.12.02.1.03.000 2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk					95.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		69.514.876,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0.00	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilProvinsi Sulawesi Selatan Jalan UripSumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)			1	95.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					235,000,000.00							320,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran (%) Persentase Pasangan ber-Akta Nikah yang dilaporkan (%) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan Akta Kelahiran Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%) Persentase Penerbitan Akta Cerai yang dilaporkan (%) Persentase Penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan (%)			97.600 39.900 96.600 96.600 51.100 100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota Dinas Dukcapil Kab/Kota Dinas Dukcapil Kab/Kota Dinas Dukcapil Kab/Kota Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi					169.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.03.1.02.000 1		Jumlah Laporan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Laporan)			3.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota	3		
		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil					44.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0.00	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)			1	44.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.03.1.02.000 2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil					95.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0.00	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Laporan)			1	95.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.03.1.02.000 5	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					30.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Laporan)	0.00	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Laporan)			1	30.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					66.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Laporan)			2.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota	2		
	2.12.03.1.03.000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil					66.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0.00	0.00	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)			1	66.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					520,000,000.00							644,514,876.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					200.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		255.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kependudukan skala Provinsi (Dokumen)			1.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
	2.12.04.1.01.000 2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota					200.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		255.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dokumen)			1	200.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					160.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		179.514.876,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Kab/Kota/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen)			2.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	2			
	2.12.04.1.02.000 2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		84.514.876,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Laporan)	0.00	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Laporan)			1	80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.04.1.02.000 5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	4	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (Laporan)			1	80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					160.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 224 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)			2.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.04.1.03.000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 224 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0.00	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 24 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)			1	80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 224 Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.12.04.1.03.000 2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan					80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang)	50	60	60		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 dan 224 Kab/Kota, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	60		
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang)			60	80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					80,000,000.00							200,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase Penyajian Profil Kependudukan Skala Provinsi (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Dukcapil Kab/Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan					80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi (Dokumen)			1.000		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)			Dinas Dukcapil Kab/Kota	1			
	2.12.05.1.01.000 1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi					80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)				Dinas Dukcapil Kab/Kota		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)	3	1	1		(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD/Lembaga/ Dinas Dukcapil Kab/Kota	1		
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)			1	80.000.000,00	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD/Lembaga/ Dinas Dukcapil Kab/Kota			
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					23,390,496,705.00							24,089,185,142.40	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					23,390,496,705.00							24,089,185,142.40	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14,079,504,653.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			18,319,074,998.12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase Temuan LHP Yang Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja			100 99 100									
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			16.000	770.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN). (Makassar, KOTA MAKASSAR) (Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)					16	688.502.932,15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					200.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Dinas PMD	2.00	180.745.577,10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	2.00	2.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah (Dokumen)			2	200.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.13.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					40.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Dinas PMD	1	66.445.757,55	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD			
					1	40.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD	1	44.941.934,68	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD			
					1	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD	1	46.244.897,10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD			
					1	50.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					30.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD	1	37.124.765,72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA Perubahan (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD			
				1	30.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD					
2.13.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					100.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD	4	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Laporan)	4	4	4.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
				4	100.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD					
2.13.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					300.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Dinas PMD	6	193.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			6	300.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.641.818.410,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		14.478.794.529,47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.000	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)			Dinas PMD	12				
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.616.318.410,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		14.116.380.824,23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	84	84.00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas PMD	85				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			84	11.616.318.410,00	(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas PMD				
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					15.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				ASN Dinas PMD		88.366.014,91	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	24	24.00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	24				
		Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			24	15.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		61.332.529,80	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan (Laporan)	2	2	2.00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	2				
					2	5.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					2.500.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		87.506.386,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	2	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	2				
					1	2.500.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					3.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		125.208.774,53	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan , Triwulanan, dan Semesteran (Laporan)	12	12	14.00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	14				
					14	3.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		41.965.734,90	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah				54.000	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)			Dinas PMD	54					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.13.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		41.965.734,90	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	12			
			Penatausahaan BMD (Laporan)			12	2.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					11.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		144.971.486,40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			12.000		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD	12			
	2.13.01.1.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					2.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	1.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	1			
			Sarana Prasarana disiplin Pegawai (Unit)			1	2.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					2.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)					Dinas PMD		84.898.816,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	1			
			Pengadaan Pakaian Dlnas (Paket)			1	2.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					2.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)					Dinas PMD		10.072.670,40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	5	5	5.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	5			
			Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			5	2.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)					Dinas PMD		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	0.00	2	2		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	2			
			Diklat Pegawai (Orang)			8	5.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					134.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR), (Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		347.217.251,21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum			60		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD	75			
	2.13.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		7.565.678,10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	6	6		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	7			
			Komponen Instalasi Listrik (Paket)			6	2.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		24.237.720,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	2		
			Penggadaan dan Barang Cetakan (Paket)			2	2.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD			
	2.13.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		56.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	12		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	20.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD			
	2.13.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		206.322.020,11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	12.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	12		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	100.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD			
	2.13.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		53.091.833,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	2.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	2		
			Penatausahaan Arsip Dinamis (Dokumen)			2	10.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD			
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					10.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		47.119.410,75	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			14		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD	6		
	2.13.01.1.07.000 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					10.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		47.119.410,75	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0.00	7	1.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	8		
			Pengadaan Peralatan kerja (Unit)			1	10.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD			
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.225.686.243,00	(Dinas PMD Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Makassar, KOTA MAKASSAR), (Dinas PMD Provinsi Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		1.959.238.175,24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			36.000		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD	36		
	2.13.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					15.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		25.793.461,59	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.13.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12.00		(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	12		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jasa Surat Menyurat (Laporan)			12	15.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan Jasa rutin Kantor (Laporan)	12	12	12.00	300.000.000,00	(Dinas PMD Provinsi Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		380.611.176,70		
						12	300.000.000,00	(Dinas PMD Provinsi Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	12			
	2.13.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Sewa Kendaraan Dinas (Unit)	1	3	3	278.195.667,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Dinas PMD		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						3	278.195.667,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Eselon III	3			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang / Bulan)	12	12	12.00	632.490.576,00	(Dinas PMD Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Eselon III		1.547.833.536,95	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						41	632.490.576,00	(Dinas PMD Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN dan Outsourcing	12			
		2.13.01.1.09 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah			56.000	285.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR), (Makassar, KOTA MAKASSAR)				Non ASN dan Outsourcing	56	611.265.478,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
									(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)				Non ASN dan Outsourcing			
2.13.01.1.09.000 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pajak Kendaraan (Unit)	20	20	20.00	200.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN dan Outsourcing	20	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						20	200.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas				
2.13.01.1.09.000 7		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20	20	20.00	5.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas		11.597.478,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Unit)			20	5.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset Kantor	20			
2.13.01.1.09.000 8		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	2	2.00	30.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Aset Kantor		49.668.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Aplikasi)			2	30.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD	2			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)	1	1	1.00 1	50.000.000,00 50.000.000,00	(Dinas PMD, KOTA MAKASSAR) (Dinas PMD, KOTA MAKASSAR) (Dinas PMD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD	1	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA					2,200,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			284,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			7.280 13,23			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD Dinas PMD			
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataannya				2.200.000.000,00	(Bulukumba, Soppeng, Sinjai, (SulseI, SULAWESI SELATAN)				Dinas PMD Dinas PMD	180	284.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.02.1.01.000 3	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa Fasilitasi Penataan Desa (Dokumen)	1	1	1.00 1	100.000.000,00 100.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR) (SulseI, SULAWESI SELATAN) (Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PMD Aparat Pemerintah Desa Aparat Pemerintah Desa	2	184.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.000 4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Unit) Bantuan Pembangunan Gedung Serbaguna (Unit) Fasilitasi Layanan Masyarakat melalui Aplikasi (Aplikasi) Fasilitasi Pengembangan Desa Andalan (Desa)	0.00	0.00	4.00 1 1 4	2.100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 1.400.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Bulukumba, Soppeng, Sinjai, Bone, Pangkep, Maros, Barru, dan Wajo, SULAWESI SELATAN), (Desa Lompo Bulu, KAB. WAJO), (Lembang Sapan Kua Kua, KAB. TORAJA UTARA) (Desa Lompo Bulu, KAB. WAJO) (Lembang Sapan Kua Kua, KAB. TORAJA UTARA) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparat Pemerintah Desa Desa, Masyarakat Desa, Pemerintah Desa Masyarakat Desa Pemerintah Desa	2.00	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa)			8	400.000.000,00	(Bulukumba, Soppeng, Sinjai, Bone, Pangkep, Maros, Barru, dan Wajo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa			
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					350.000.000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			702.000.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase Desa yang Menjalini Kerjasama			1.320			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa			
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa / Desa dengan Pihak Ketiga				350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI (Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Desa Desa	60	702.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.03.1.01.000 1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	5	150.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa Desa	10	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						50	150.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa			
	2.13.03.1.01.000 2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam membangun Kerjasama Desa (Orang)	5	5	5	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa Pemerintah Desa	10	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						25	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Desa			
	2.13.03.1.01.000 3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5	5	5	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Desa Desa	10	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						3	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.900.000.000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,055,031,719.47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang			17,21			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa			
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan				3.900.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Dinas (Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Desa Desa	1.000	2.055.031.719,47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
	2.13.04.1.01.000 3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	2	2	1.00	50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa Desa	3	169.031.719,47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.04.1.01.000 8		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Orang)			25	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa			
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					1.100.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)			Desa		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Lomba Desa dan Kelurahan (Desa/Kelurahan)	0.00	3	3	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Desa dan kelurahan	4					
	2.13.04.1.01.000 9	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan					100.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			Desa dan kelurahan		234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Fasilitasi penyusunan Profil Desa (Orang)	2	2	2	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Desa	4					
					25	100.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Desa						
	2.13.04.1.01.001 0	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa					1.550.000.000,00	(Dinas PMD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Makassar, KOTA MAKASSAR)			Aparat Desa		234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	30	30	60	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Desa, APBDESI	120					
			Hibah Umum (Organisasi)			1	500.000.000,00	(Dinas PMD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Peningkatan Kapasitas Aparat Desa (Orang)			25	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Desa					
	2.13.04.1.01.001 1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Kabupaten)			21	1.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparat Desa			
								150.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			Aparat Desa		234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Orang)	30	30	30	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggota BPD	60				
2.13.04.1.01.001 2	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis						700.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Desa Gattareng (Bone), Desa Tamarupa (Pangkep), Desa Bellu (Bone), Desa Bulu Tanah (Bone), dan Desa di Kec. Gilireng (Wajo), SULAWESI SELATAN), (Desa Pangkajoeang, KAB. WAJO)			Anggota BPD		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
															Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.13.04.1.01.001 5		Fasilitasi Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan (Desa)			1	50.000.000,00	(Desa Pangkajoaang, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa				
			Fasilitasi Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan (Desa)			5	250.000.000,00	(Desa Gattareng (Bone), Desa Tamarupa (Pangkep), Desa Bellu (Bone), Desa Bulu Tanah (Bone), dan Desa di Kec. Gilireng (Wajo), SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa				
			Penanganan Kemiskinan (Kabupaten)			21	400.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa				
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					200.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)			Desa		117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan	0	2	2		(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola BUMDes	2				
		Fasilitasi Pengembangan BUMDes (Orang)			50	200.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola BUMDes					
	2.13.04.1.01.001 6	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa					50.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)					Pengelola BUMDes		117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	2	2		(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	2			
			Fasilitasi Penegasan Batas Desa (Desa)			2	50.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa				
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2,860,992,052.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,729,078,424.81	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan Persentase PKK aktif (%) Persentase Posyandu aktif (%) Persentase Bumdes yang Memberikan Kontribusi Persentase Posyantek Aktif (%)			1.610 100.000 100.000 0.400 1.860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa Desa Desa Desa Desa					
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan					2.860.992.052,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Takalar (Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Desa Desa		2.729.078.424,81	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	
			Jumlah Hasil Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga			14.000						20				
	2.13.05.1.01.000 1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat					50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Desa		117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	1	1		(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Masyarakat Desa	1			
			Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa (Orang)			25	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Masyarakat Desa				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.05.1.01.000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					150.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Lembaga Masyarakat Desa		184.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	10	10	10	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus Lembaga Masyarakat Desa	15			
			Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa (Orang)			50	150.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus Lembaga Masyarakat Desa			
	2.13.05.1.01.000 4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					1.300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengurus Lembaga Masyarakat Desa		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga	0.00	0.00	3	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Tangga Miskin	2.00			
			Padat Karya Perdesaan (Unit)			3	1.300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah Tangga Miskin			
	2.13.05.1.01.000 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					400.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulsel, SULAWESI SELATAN), (KOTA MAKASSAR)				Rumah Tangga Miskin		301.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	3	3	3	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bumdes, Pengelola BUMDes	3			
			Bantuan Modal Usaha BUMDes (Bumdes)			1	50.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bumdes			
			Penanganan Kemiskinan (Kabupaten)			21	300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola BUMDes			
	2.13.05.1.01.000 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					250.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Pengelola BUMDes		234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	2	2	2	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penggiat TTG	3			
			Fasilitasi pemanfaatan TTG perdesaan (Orang)			50	250.000.000,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penggiat TTG			
	2.13.05.1.01.000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					80.966.395,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Penggiat TTG		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0.00	0.00	1	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	1			
			Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong (Orang)			21	80.966.395,00	(Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.05.1.01.000 8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa					300.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)				Desa		234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Penguatan SDM Kelembagaan Masyarakat Desa (Orang)	2	2	2		(Sulsei, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPM	4		
					50	300.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPM				
	2.13.05.1.01.000 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					330.025.657,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				KPM		1.159.078.424,81	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	6	6	6		(Sulsei, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anggota PKK	8		
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK (kabupaten/kota)		24	330.025.657,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anggota PKK				
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1,035,000,000.00							1,370,000,000.00	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA					1,035,000,000.00							1,370,000,000.00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					250,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			215,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB (%)			25.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					100.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Enrekang, KAB. ENREKANG)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (%)			17		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)			Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	17.5			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.02.1.01.000 3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK					-	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0	1			(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/Kota dan Desa, Instansi terkait penyusunan GDPK	0		
			Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)			1		(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/Kota dan Desa			
	2.14.02.1.01.001 7	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Advokasi dan sosialisasi penyusunan GDPK 5 Pilar Kota/Kabupaten (Paket)			10		(-, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait penyusunan GDPK			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1	0	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	1	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah dokumen pengendalian penduduk yg tersedia di tk provinsi (Dokumen)			1.000	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)		Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	1					
	2.14.02.1.02.001 0	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	0	1	1	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Instansi terkait Kab/Kota	1					
						1	150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait Kab/Kota			
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					185,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			85,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase PUS peserta KB Aktif (%)			65.35			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait Kab/Kota			
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					185.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Instansi terkait Kab/Kota		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengendalian			17.25	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)		Instansi terkait Kab/Kota	26					
	2.14.03.1.01.000 6	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal					85.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Instansi terkait Kab/Kota		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.03.1.01.001 2	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan	1	0	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Terkait Kab/Kota	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kespro (Laporan)			1	85.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Terkait Kab/Kota			
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	0	1	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Terkait Kab/Kota	0			
			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Terkait Kab/Kota			
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					600,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,070,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga			25.5			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Terkait Kab/Kota			
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					450.000.000,00	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, KOTA PALOPO)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Instansi Terkait Kab/Kota		785.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah (%)			17.5		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)			Instansi Terkait Kab/Kota	18			
	2.14.04.1.01.000 3	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					100.000.000,00	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Instansi Terkait Kab/Kota		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.04.1.01.001 7		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitator 1000 HPK, Instansi Terkait Kab/Kota, sekretariat percepatan penurunan stunting	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Kurangnya Fasilitator 1000 HPK shg dukungan pada penurunan stunting (Paket)			1		(-, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitator 1000 HPK			
			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)			1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Terkait Kab/Kota			
			Rendahnya dukungan operasional Tim Koordinasi sekretariat percepatan penurunan stunting (Paket)			1		(-, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			sekretariat percepatan penurunan stunting			
		Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK					350.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				sekretariat percepatan penurunan stunting	1	705.000.000,00	
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (Dokumen)	1	1	1		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembina/Penge lola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota
			Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (Dokumen)			1	350.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembina/Penge lola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota			
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pembina/Penge lola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota		285.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.04.1.02.000 3		Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS (%)			25.5		(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)				Pembina/Penge lola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota	26		
		Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga					150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Pembina/Penge lola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan	0	0	1	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait Kab/Kota	1			
			Sosialisasi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Laporan)			1	150.000.000,00	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait Kab/Kota			
	2.14.04.1.02.000 8	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga					-	(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Instansi terkait Kab/Kota		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	0	0	1	(Semua Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengeolaan Program Keluarga Melalui Bina Keluarga (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)			1		(Semua kab/kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					49,932,963,038.00							55,602,063,038.00		
		DINAS PERHUBUNGAN					49,932,963,038.00							55,602,063,038.00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					37,228,963,038.00							43,882,063,038.00	DINAS PERHUBUNGAN	
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			95.000 95.000 100.000										
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					750.000.000,00	(KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)						795.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			8.000		(Dinas Perhubungan Prov.Sulsel .Jl Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN)				8				
	2.15.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					400.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)					400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan Pemerintahan	4				
		pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			4	400.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan Pemerintahan						
	2.15.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					85.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)					Penyelenggaraan Pemerintahan		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	850000000.00	200000000.00	1		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN	2.00				
			pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	85.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN	1	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15000000	15000000	1		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Laporan)			1	20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.15.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					20.000.000,00	(KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN	1	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	15000000	15000000	1		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.15.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					15.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN	1	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	15.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.15.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					135.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN	1	145.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	1	1		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			1	135.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.15.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN STEKHOLDER TERKAIT APARATUR SIPIL NEGARA DAN STEKHOLDER TERKAIT	5	85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			5	75.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.192.963.038,00	(SULAWESI SELATAN)				APARATUR SIPIL NEGARA DAN STEKHOLDER TERKAIT		29.212.063.038,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			2.000						APARATUR SIPIL NEGARA DAN STEKHOLDER TERKAIT			
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					24.092.963.038,00	(SULAWESI SELATAN)				APARATUR SIPIL NEGARA DAN STEKHOLDER TERKAIT		29.092.063.038,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	220	220	220		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	220		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Jiwa)			220	24.092.963.038,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3	3		(Dinas Perhubungan Prov.Sulsel .Jl Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			APARATUR SIPIL NEGARA DAN STEKHOLDER TERKAIT	3		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)			3	50.000.000,00	(Dinas Perhubungan Prov.Sulsel .Jl Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			APARATUR SIPIL NEGARA DAN STEKHOLDER TERKAIT			
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				APARATUR SIPIL NEGARA DAN STEKHOLDER TERKAIT		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	6	6		(Dinas Perhubungan Prov.Sulsel .Jl Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN	6		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)			6	50.000.000,00	(Dinas Perhubungan Prov.Sulsel .Jl Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN			
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN	1	-	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah laporan Administrasi Barang Milik daerah (Laporan / Dokumen)			1	(SULAWESI SELATAN)		PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN						
	2.15.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN		-	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD (Laporan / Dokumen)			1	(Sulaweasi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara					
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.000									
	2.15.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Aparatur Sipil Negara	1	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	(Dinas Perhubungan Prov.Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN					
			Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian (Laporan / Dokumen)			1	50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN				
	2.15.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN	20	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	20	(Dinas Perhubungan prov.sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN					
			pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			20	100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.010.000.000,00	(Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN), (Kantor Dinas Perhubungan Prov.Sulsel, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN		1.260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			3.000						APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN			
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					50.000.000,00	(Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN)				APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENYELENGGARA PEMERINTAHAN	1			
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			1	50.000.000,00	(Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENYELENGGARA PEMERINTAHAN			
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					70.000.000,00	(Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGARA PEMERINTAHAN		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	(KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV SULSEL, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			8	70.000.000,00	(Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					50.000.000,00	(Kantor Dinas Perhubungan Prov.Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Peralatan dan Perlengkapan Kantor		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		(KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV SULSEL, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Cetak dan Penggandaan	1		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			1	50.000.000,00	(Kantor Dinas Perhubungan Prov.Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Cetak dan Penggandaan			
	2.15.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					810.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Barang Cetak dan Penggandaan		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN	1		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD (Laporan)			1	810.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN			
	2.15.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	2		(KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV SULSEL, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Arsip Dinamis pada SKPD	2		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			2	30.000.000,00	(KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV SULSEL, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Arsip Dinamis pada SKPD			
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)					Arsip Dinamis pada SKPD		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			26.000		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				Arsip Dinamis pada SKPD	26			
	2.15.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Arsip Dinamis pada SKPD		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	6		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Mesin	6		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			6	55.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Mesin				
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.087.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)					Peralatan dan Mesin		7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			,						Peralatan dan Mesin				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan Mesin Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			1	600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)							
	2.15.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	6.487.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN, NON APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN, NON APARATUR SIPIL NEGARA	1	7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			1	6.487.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.784.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN, NON APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN, NON APARATUR SIPIL NEGARA		5.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			68.000									
	2.15.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					811.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN, NON APARATUR SIPIL NEGARA Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35	900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	35	35	35		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			35	811.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.09.000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					1.973.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	2		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aset Hibah dan Aset Tetap lainnya					
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Unit)			2	1.973.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aset Hibah dan Aset Tetap lainnya					
	2.15.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Aset Hibah dan Aset Tetap lainnya	5	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	5		(DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			5	1.000.000.000,00	(DINAS PERHUBUNGAN PROV SULSEL, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					8,724,000,000.00							6,550,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
			Penurunan emisi GRK sektor transportasi (Ton)			334728.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (%)			5.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah penumpang melalui terminal (Orang)			628.431			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan (%)			33.780			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					1.200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Sinjai, KAB. SINJAI), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Maccini Baji Kecamatan Labakkang, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kabupaten Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Rencana Induk LLAJ yang ditetapkan (Dokumen)			1.000					Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	2.15.02.1.01.000 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					1.200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan				
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Laporan / Dokumen)			1	1.200.000.000,00	(Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan				
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.800.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (jalan lintas provinsi Tondong tallasa Pangkep ke kab bone, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)				Penyediaan Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan		-	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Perlengkapan Jalan provinsi (Jenis)			12.000					Penyediaan Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan				
	2.15.02.1.02.000 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.800.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penyediaan Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan		-	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kapasitas Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi Peningkatan Kapasitas Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi				
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Jenis)			11	1.800.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					1.050.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (KAB. BANTAENG), (Kabupaten Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)				Peningkatan Kapasitas Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Terminal Tipe B yang Terkelola dan Terpelihara (Unit)			5.000		(SULAWESI SELATAN)			Peningkatan Kapasitas Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi	2			
	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B					300.000.000,00	(KAB. BANTAENG)				Peningkatan Kapasitas Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B		-	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B			
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Laporan / Dokumen)			1	300.000.000,00	(KAB.BANTAENG, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Operasional Terminal Penumpang Tipe B	3	650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B					450.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B			
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	3	3	3		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Operasional Terminal Penumpang Tipe B			
			Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B (Laporan)			3	450.000.000,00	(KAB.BANTAENG,KOTA PAREPARE,KOTA PALOPO, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Operasional Terminal Penumpang Tipe B			
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)					300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Operasional Terminal Penumpang Tipe B		-	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
			Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)			3	300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kec.Benteng, Bontoharu,				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.1.05.000 1		Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)			1		(SULAWESI SELATAN)				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1		
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	1	1	1	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	1			
	2.15.02.1.05.000 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)			1	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat			
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	1	1	1	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggara Pemerintahan,P elaku Usaha,Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Umum	2	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
			Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)			1	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggara Pemerintahan,P elaku Usaha,Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Umum			
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					125.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penyelenggara Pemerintahan,P elaku Usaha,Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Umum		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen ANDALALIN (Dokumen)			12.000					Penyelenggara Pemerintahan,P elaku Usaha,Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Umum				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.1.06.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1	1	1 1	125.000.000,00 125.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggara Pemerintahan,P elaku Usaha,Penyanda ng Disabilitas dan Masyarakat Umum Penilaian Hasil Andalalin Penilaian Hasil Andalalin	 1	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil audit yang dihasilkan			1.000	200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penilaian Hasil Andalalin Penilaian Hasil Andalalin		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.000 5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1	1	1 1	200.000.000,00 200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penilaian Hasil Andalalin Perusahaan Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum	 1	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang yang tersedia			3000.000	3.322.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perusahaan Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum		4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.000 3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	24	24	24 1	3.322.000.000,00 3.322.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan Angkutan Umum PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN,PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN,PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT	 24	4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					400.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN,PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.1.09.000 1		Jumlah Dokumen TataRan Transportasi Perkotaan (Dokumen)			1.000		(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHA N,PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT	1		
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PENYELENGGA RA PEMERINTAHA N,PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT	1	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	1		(Kawasan Aglomerasi Sulawesi Selatan (Mamminasata), SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
	2.15.02.1.09.000 2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Laporan)			1	150.000.000,00	(Kawasan Aglomerasi (Mamminasata), SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	1	1		(Mamminasata, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
			Penyelenggaraan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)			1	250.000.000,00	(Kab.Maros,Gowa,Ta kalar dan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
	2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PenyelenggaraA ngkutan Perkotaan ,Masyarakat Perkotaan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Tatrawil Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota			1.000					PenyelenggaraA ngkutan Perkotaan ,Masyarakat Perkotaan				
	2.15.02.1.12.000 2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				PenyelenggaraA ngkutan Perkotaan ,Masyarakat Perkotaan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)</i>	1	1	1		<i>(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Pelaku Usaha Angkutan Perkotaan, Peny elenggara Pemerinyahan dan Masyarakat</i>	1		
			<i>Penyelenggaraan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi (Laporan)</i>			1	100.000.000,00	<i>(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Pelaku Usaha Angkutan Perkotaan, Peny elenggara Pemerinyahan dan Masyarakat</i>			
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					227.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				<i>Pelaku Usaha Angkutan Perkotaan, Peny elenggara Pemerinyahan dan Masyarakat</i>		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			<i>Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)</i>			1.000						<i>Pelaku Usaha Angkutan Perkotaan, Peny elenggara Pemerinyahan dan Masyarakat</i>			
	2.15.02.1.13.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					227.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				<i>Pelaku Usaha Angkutan Perkotaan, Peny elenggara Pemerinyahan dan Masyarakat</i>		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)</i>	1	1	1		<i>(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>	1		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)</i>			1	227.000.000,00	<i>(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					3,830,000,000.00							4,820,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
			<i>Jumlah pelabuhan Pengumpan yang beroperasi (%)</i>			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (jiwa)</i>			1779975.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi					145.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		245.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			<i>Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha (Dokumen)</i>			228.000					<i>Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>				
	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					145.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1.00	245.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			<i>Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan</i>	1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<i>Pelaku Usaha,Masyarakat at dan Penyelenggara Pemerintahan</i>				
			<i>penyelenggaraan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan)</i>			1	145.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Pelaku Usaha,Masyarakat at dan Penyelenggara Pemerintahan</i>			
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					85.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pelaku Usaha,Masyarakat at dan Penyelenggara Pemerintahan		125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Lintas Penyeberangan untuk Kapal yang melayani penyeberangan Lintas Pelabuhan Antardaerah dalam Provinsi</i>			1.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			<i>Pelaku Usaha,Masyarakat at dan Penyelenggara Pemerintahan</i>	1			
	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					85.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pelaku Usaha,Masyarakat at dan Penyelenggara Pemerintahan		125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1		
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Laporan)			1	85.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.03.1.06.000 2		Jumlah Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Dokumen)			1.000						Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kot a dalam Daerah Provinsi			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kot a dalam Daerah Provinsi		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Laporan)	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Laporan)			1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (Dokumen)			1.000						Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.03.1.08.000 3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1			
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (Laporan)			1	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					3.450.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Maccini Baji Kecamatan Labakkang, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)				Penyelenggara Pemerintahan,S tekholder Terkait,BUMDd an BUMN		3.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan yang dibangun dan beroperasi (Unit)			11.000		(Kab.Bone,Barru,Tak alar,Bulukumba,Selayar,Luwu Timur,Bantaeng,Pangkajene kepulauan dan Bulukumba, SULAWESI SELATAN)				11			
	2.15.03.1.09.000 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional					2.700.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Penyelenggara Pemerintahan,S tekholder Terkait,BUMDd an BUMN		3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	11	11	11		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelabuhan Pengumpan Regional	11		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.03.1.09.000 4		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Unit)			11	2.700.000.000,00	(Kab.Bone,Barru,Pan gakajene Kepulauan,Takalar,B antaeng,Wajo,Buluk umba dan Selayar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelabuhan Pengumpan Regional			
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					750.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pelabuhan Pengumpan Regional Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Sulawesi Selatan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Sulawesi Selatan		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Laporan)	1	1	1		(Kab.Bone.Takalar,B ulukumba,Selayar dan Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		
			Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Laporan)			1	750.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					150,000,000.00							350,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Rencana Perkeretaapian Provinsi (Dokumen)			1.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Sulawesi Selatan			
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Sulawesi Selatan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Sulawesi Selatan		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Penetapan Jaringan pelayanan Perkeretaapian (Dokumen)			1.000		(SULAWESI SELATAN)					1		
	2.15.05.1.06.000 2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Sulawesi Selatan		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi (Dokumen)</i>	1	1	1		<i>(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Masyarakat ,Penyelenggara Pemerintahan ,Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Perhubungan (Dirjen Perkeretaapian)</i>	1		
			<i>Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi (Dokumen)</i>			1	150.000.000,00	<i>(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Masyarakat ,Penyelenggara Pemerintahan ,Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Perhubungan (Dirjen Perkeretaapian)</i>			
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					26,374,910,913.00							35,450,025,713.00	
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					26,374,910,913.00							35,450,025,713.00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17,362,279,643.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			20,118,228,006.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang</i>			100 98.5 100									
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)						380.235.867,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>			1		<i>(SULAWESI SELATAN)</i>					1		
	2.16.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)						245.235.867,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	4.00	4.00	4		<i>(SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</i>	4.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.16.01.1.01.000 6		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			4	150.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0.00	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	12			
	2.16.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			12	25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	4	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	4	60.000.000,00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			4	25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan				
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.810.978.137,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		11.652.415.453,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			1		(SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	1		
							11.610.978.137,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		11.363.226.761,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	81	84	84		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	84		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)			12	11.610.978.137,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					175.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		275.979.257,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	4		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			4	175.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		13.209.435,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0.00	0.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	2.00		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			2	25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			1814		(SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	1819		
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					20.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi	1.00		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	20.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi			
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					30.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.00</i>		<i>(SULAWESI SELATAN)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</i>	<i>1.00</i>		
			<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>			<i>1</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</i>			
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					255.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		369.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)</i>			<i>2</i>	<i>(SULAWESI SELATAN)</i>		<i>Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</i>	<i>2</i>					
	2.16.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					5.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</i>	<i>0.00</i>	<i>3.00</i>	<i>1.00</i>	<i>(SULAWESI SELATAN)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>1.00</i>						
			<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)</i>			<i>1</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>						
	2.16.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		109.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.1.05.000 9		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	1.00		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					225.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	150.00	2.00	84.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	12.00		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			84	225.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.825.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		4.276.436.354,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			100		(SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	103		
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			400		(SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	450		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					35.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		37.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	4.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	3.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			4	35.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					150.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.00	3.00	10.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	3.00		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			10	150.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	5.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	2.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.1.06.000 8		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)			5	50.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					60.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		2.026.968.177,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	0,00	4,00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	4,00		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			4	60.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.500.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Tamu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		2.026.968.177,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4,00	4,00	4,00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	4,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			4	1.500.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	0.00	0.00	84.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	100.00		
			<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>			84	30.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					285.463.778,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		238.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)</i>			5		(SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	5		
	2.16.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					185.463.778,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		177.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)</i>	0.00	0.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	2.00		
			<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)</i>			2	185.463.778,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		61.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	3.00		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			3	100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.278.137.728,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		2.379.563.332,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			2		(SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	2		
	2.16.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					200.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0.00	0.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	12.00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			12	200.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.078.137.728,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		2.349.563.332,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	0.00	0.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	12.00		
			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)</i>			12	2.078.137.728,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					657.700.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		805.977.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)</i>			42		(SULAWESI SELATAN)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	76			
	2.16.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					319.940.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		746.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	21.00	22.00	26.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	16.00		
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)</i>			26	319.940.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					200.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Kendaraan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		59.977.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	1.00		
			Pokir Dewan : Ir. M. Arfandy Idris, Fraksi Partai Golongan Karya, Komisi A Bidang Pemerintahan. Renovasi Ruang Kerja Bidang Aplikasi dan Informatika. (Unit)			1	200.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					137.760.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	25.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	1.00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			25	137.760.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					5,438,631,270.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			9,734,021,917.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik (Nilai)			40			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					5.438.631.270,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		9.734.021.917,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Jenis Layanan Informasi Publik (Layanan)			7		(SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	7		
	2.16.02.1.01.000 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		544.021.917,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	1.00	4.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan	4.00		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan			
	2.16.02.1.01.000 3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah					50.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat Sulawesi Selatan		260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah	4.00	4.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan	4.00		
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan			
	2.16.02.1.01.000 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					80.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat Sulawesi Selatan		1.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0.00	4.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan	6.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.02.1.01.000 5		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)			1	80.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan			
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik					1.720.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat Sulawesi Selatan		1.720.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	0.00	4.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Sulawesi Selatan	3.00			
	2.16.02.1.01.000 6	Pelayanan Informasi Publik					2.100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat Sulawesi Selatan		520.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	0.00	4.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Hibah		Masyarakat Sulawesi Selatan dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3.00			
			Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)			2	2.100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Hibah		Masyarakat Sulawesi Selatan dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
	2.16.02.1.01.000 7	Layanan Hubungan Media					560.631.270,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat Sulawesi Selatan dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		2.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	0.00	4.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Sulawesi Selatan	2.00			
			Layanan Hubungan Media (Layanan)			2	560.631.270,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Sulawesi Selatan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.02.1.01.001 1	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah					728.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat Sulawesi Selatan	4.00	1.690.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)	0.00	4.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota				
			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)			2	728.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota				
	2.16.02.1.01.001 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota	2.00	900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi	0.00	0.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Sulawesi Selatan				
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas (Dokumen)			2	100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Sulawesi Selatan				
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3,574,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			5,597,775,790.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi Persentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Jaringan Internet Intra Pemerintah Pemerintah Sulawesi			50 44			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan Masyarakat Sulawesi Selatan			
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					3.005.502.700,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN), (KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat Sulawesi Selatan Masyarakat Sulawesi Selatan	1	4.508.228.050,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Domain dan Subdomain di Pemerintah Provinsi Sulawesi			1.000		(SULAWESI SELATAN)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.03.1.01.000 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					3.005.502.700,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat Sulawesi Selatan		4.508.228.050,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	2.00	2.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2.00		
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)			1	3.005.502.700,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					568.497.300,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		1.089.547.740,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Aplikasi Yang Memanfaatkan Sub Domain sulselprov.go.id (Aplikasi)			78.000		(SULAWESI SELATAN)				OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	79		
	2.16.03.1.02.000 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					18.369.600,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		11.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	203.00	76.00	78.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	79.00		
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (Unit)			78	18.369.600,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.16.03.1.02.001 0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					18.626.700,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		813.394.340,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0.00	4.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	2.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.03.1.02.001 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)			1	18.626.700,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
						531.501.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	264.553.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)	4.00	2.00	2.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.00		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (Dokumen)			2	531.501.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					27,569,798,409.00							33,992,960,163.00	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					27,569,798,409.00							33,992,960,163.00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14,840,823,252.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			22,260,403,863.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP yang Rata - rata Nilai SKP Perangkat			98.000 100.000 100.000									
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					208.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)						502.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Perencanaan,			100.000									
	2.17.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					18.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)						300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.1.01.000 4		Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)			1	18.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.00	18.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1.00	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Penyusunan DPA SKP (Dokumen)			1	18.000.000,00	(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	1	16.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1	22.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)			1	16.000.000,00	(Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan
	2.17.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					156.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan	3.00	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.00	3.00	3.00		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			3	156.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan
		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.381.465.025,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR), (Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan		14.583.443.695,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan tepat (%)			100.000						Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	95	87	77	10.371.965.025,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan	90	14.547.443.695,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
								(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan			
								(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				ASN Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	4.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan	1	17.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
								(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selata			
							Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)			
	2.17.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	4	5.500.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selata	4	18.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
								(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan			
								(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						11.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan		26.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.1.03.000 5		Persentase Penyelesaian Dokumen Barang Milik Daerah Tepat Waktu (%)			100.000						Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.500.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan	2	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan					
		Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			2	5.500.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan				
	2.17.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.500.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1	16.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan					
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	5.500.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					5.500.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		15.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada OPD (%)			100.000				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan					
2.17.01.1.04.000 7		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					5.500.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1.00	15.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1.00	1.00	1		(Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan					
			Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			1	5.500.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					61.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR), (Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		205.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Nilai rata rata Kinerja ASN OPD (Angka)			100.000					Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan				
	2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					5.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	2		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	2		
			Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			2	5.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					46.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			1	46.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	3	5		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	7		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			5	10.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					858.280.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				ASN Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		1.472.960.168,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (%)			100.000						ASN Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					290.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				ASN Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			1	290.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					42.200.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		580.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			1	42.200.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					28.080.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.1.06.000 8		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			12	28.080.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					80.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	12	85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	80.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					418.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	12	705.460.168,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					12	418.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan				
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					358.020.595,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR), (Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan		295.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan PD (%)			100.000					Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan				
		2.17.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					258.020.595,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan		120.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.1.07.000 7		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	3		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	6		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			3	258.020.595,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya					100.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5	10		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	15		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			10	100.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.624.557.632,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		4.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan PD (%)			100.000					Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan				
	2.17.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.152.200.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		1.600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	1.00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			1	1.152.200.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.472.357.632,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		2.400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71 Org Non ASN dan Outsorching Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	12		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			12	1.472.357.632,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71 Org Non ASN dan Outsorching Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					333.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR), (Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				71 Org Non ASN dan Outsorching Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		1.160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%)			100.000						71 Org Non ASN dan Outsorching Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					43.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				71 Org Non ASN dan Outsorching Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	5		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan	5		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			5	43.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan			
	2.17.01.1.09.000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					140.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan		860.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10.00	10.00	5		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan	36.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			5	140.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	3	150.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan	3	180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			3	150.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan					
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					230,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			460,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin Simpan Pinjam (%)			12.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan			
			Persentase Koperasi yang Mendapatkan Ijin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas (%)			10.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan		232.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Koperasi yang Terferifikasi Ijin Simpan Pinjam (Koperasi)			24.000		Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan							
	2.17.02.1.01.000 2	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan		232.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				100.00	100.00				45			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)			45	85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koperasi - Pengurus /Pengelola Koperasi			
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Terfasilitasi Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas (Koperasi)			24.000	145.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Koperasi - Pengurus /Pengelola Koperasi		228.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
							(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			Koperasi - Pengurus /Pengelola Koperasi	50				
	2.17.02.1.02.000 3	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	50	50	105	145.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Koperasi - Pengurus /Pengelola Koperasi		228.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)			45	85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola / Pengurus Koperasi, Pengurus /Pengelola Koperasi	300		
			Jumlah Perizinan berusaha Terintegrasi SCR Elektronik (Izin/persetujuan)			60	60.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus /Pengelola Koperasi			
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				155,000,000.00					04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			420,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa (%) Persentase koperasi yang meningkat kepatuhannya terhadap peraturan perundangan undangan			20.000 20.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus /Pengelola Koperasi Pengurus /Pengelola Koperasi			
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					155.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus /Pengelola Koperasi		420.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.03.1.01.000 3	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa (Koperasi)			50.000						Pengurus /Pengelola Koperasi			
						155.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus /Pengelola Koperasi		420.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	50	50	70		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus / Pengelola atau Pengawas Koperasi, Pengurus /Pengelola / Pengawas Koperasi	300		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)			30	70.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus / Pengelola atau Pengawas Koperasi			
			Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (Unit Usaha)			40	85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus /Pengelola / Pengawas Koperasi			
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					170,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			450,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT (%) Prosentase Penyelesaian Tindakanjnut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi (%)			20.000 20.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus /Pengelola / Pengawas Koperasi Pengurus /Pengelola / Pengawas Koperasi			
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					170.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR), (Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus /Pengelola / Pengawas Koperasi		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Koperasi yang Dinilai Kesehatannya (Koperasi)			120.000						Pengurus /Pengelola / Pengawas Koperasi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.04.1.01.000 3	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					170.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR), (Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus /Pengelola / Pengawas Koperasi		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	60.00	60.00	140.00		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Koperasi	110.00		
		Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan (Unit Usaha)			140	170.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Koperasi			
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					2,448,751,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,035,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan			20.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Koperasi			
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2.448.751.000,00	(15 kecamatan, KAB. LUWU UTARA), (Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA), (Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR), (Kota Parepare, KOTA PARE PARE)				Koperasi		1.035.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Pengelola			250.000							Koperasi			
	2.17.05.1.01.000 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					2.448.751.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Koperasi		1.035.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	250.00	250.00	252.00		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-PK2UMK				Pengurus/Peng awas/Pengelola Koperasi	150.00		
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)			252	2.448.751.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-PK2UMK				Pengurus/Peng awas/Pengelola Koperasi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					170,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			632,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Koperasi yang terfasilitasi Peremberdayaan (%)			20.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-PK2UMK			Pengurus/Pen gawas/Pengel ola Koperasi			
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					170.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus/Peng awas/Pengelola Koperasi		632.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya (Unit)			100.000					Pengurus/Peng awas/Pengelola Koperasi				
	2.17.06.1.01.000 2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus/Peng awas/Pengelola Koperasi		282.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	50	50	40		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus/Peng elola/ Pengawas Koperasi	75		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)			40	85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus/Peng elola/ Pengawas Koperasi			
	2.17.06.1.01.000 9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus/Peng elola/ Pengawas Koperasi		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)			50	50	40		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus/Peng elola / Pengawas Koperasi	75			
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)			40	85.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus/Peng elola / Pengawas Koperasi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					6,871,800,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			4,025,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Cakupan UMKM yang diberdayakan (%)			10.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus/Pen gelola / Pengawas Koperasi			
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					6.871.800.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus/Peng elola / Pengawas Koperasi		4.025.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Wirusaha Baru yang terfasitasi dan Pemberdayaan Peningkatan Usaha (Orang)			11475.000					Pengurus/Peng elola / Pengawas Koperasi				
	2.17.07.1.01.000 1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan					6.135.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pengurus/Peng elola / Pengawas Koperasi		3.375.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan	10000.00	1000.00	1000.00		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Insentif Daerah			Pelaku UMKM	800		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)			1.000	6.135.000.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Insentif Daerah			Pelaku UMKM			
	2.17.07.1.01.000 2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan					736.800.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)					Pelaku UMKM		650.000.000,00
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	50	50	180		(Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-PK2UMK			Pelaku UMK, Pengelola PLUT KUMKM	200			
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)			180	736.800.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-PK2UMK			Pelaku UMK, Pengelola PLUT KUMKM				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2,683,424,157.00				03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah			4,710,056,300.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha (%) Cakupan Promosi Produk UMKM (Prioritas) (%)			10.000 3.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-PK2UMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-PK2UMK			Pelaku UMK, Pengelola PLUT KUMKM Pelaku UMK, Pengelola PLUT KUMKM			
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang melakukan Inkubasi usaha pada usaha mikro (Orang) Jumlah Usaha Kecil yang melakukan Ekspor (Orang)			150000.000 15.000	2.683.424.157,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR)				Pelaku UMK, Pengelola PLUT KUMKM Pelaku UMK, Pengelola PLUT KUMKM Pelaku UMK, Pengelola PLUT KUMKM		4.710.056.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.000 1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	1000 	1000 	1000 1.000	2.373.624.157,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR) (Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Insentif Daerah 			Pelaku UMK, Pengelola PLUT KUMKM Pelaku Usaha dan Wirausaha Baru Pelaku Usaha dan Wirausaha Baru	1500 	4.310.056.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.000 2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang) Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	100.00 	275.00 	260 260	309.800.000,00 309.800.000,00	(Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Prov.SulSel, KOTA MAKASSAR) (Dinas Koperasi UKM Prov. Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-PK2UMK DAK Non Fisik-PK2UMK			Pelaku Usaha dan Wirausaha Baru Pelaku UMKM dan W/rausaha Pelaku UMKM dan W/rausaha	350.00 	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					22,567,175,805.00							26,641,769,153.00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP					22,567,175,805.00							26,641,769,153.00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18,902,175,805.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			21,945,769,153.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			8300 100 100										
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					418.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			498.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9 9	(Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)				9 9					
	2.18.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					206.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			230.720.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Perencanaan Program dan Kegiatan (Dokumen)	2	2	2.00 2	(Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah,Mas yarakat dan Pelaku Usaha Pemerintah,Mas yarakat dan Pelaku Usaha	2.00					
	2.18.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					20.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			22.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perencanaan Program dan Kegiatan (Dokumen)	1	1	1.00 1	(Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah,Mas yarakat dan Pelaku Usaha Pemerintah dan Masyarakat Pemerintah dan Masyarakat	1.00					
	2.18.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					25.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			33.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Perencanaan Program dan Kegiatan (Dokumen)	1	1	1.00 1	(Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah dan Masyarakat Pemerintah dan Masyarakat Pemerintah dan Masyarakat	1.00					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					27.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat		43.680.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	1.00			
			Perencanaan Program dan Kegiatan (Dokumen)			1	27.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
	2.18.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					20.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat		33.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Perencanaan Program dan Kegiatan (Dokumen)	1	1	1.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	1.00			
						1	20.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
	2.18.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					25.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat		28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan (Laporan)	2	2	7.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	7.00			
						7	25.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
	2.18.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					95.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat		106.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	6.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat	6.00			
			Perencanaan Program dan Kegiatan (Laporan)			6	95.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.925.994.579,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat		15.261.088.248,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat	12				
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat	12				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.725.994.579,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat	87.00	15.037.088.248,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	85.00	85.00	86.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	DANA UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN DPMPPTSP Prov.Sulsel						
			Gaji Pegawai (Orang / Bulan)			86	12.725.994.579,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	DANA UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPPTSP Prov.Sulsel			
	2.18.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN DPMPPTSP Prov.Sulsel	1.00	224.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			1	1	1.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah dan Masyarakat							
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan PD (Dokumen)					1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah dan Masyarakat						
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat	1423	22.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			1423	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Pemerintah dan Masyarakat						
			Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			1423	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Pemerintah dan Masyarakat						
	2.18.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					6.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat	1.00	11.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPMPPTSP						
			Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)			1	6.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPPTSP			
	2.18.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	DPMPPTSP	1.00	11.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPMPPTSP						
			Pelaporan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (Laporan)			1	5.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPPTSP			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					164.750.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	DPMPTSP		223.720.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			DPMPTSP	1			
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			DPMPTSP	1			
	2.18.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					39.750.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	DPMPTSP		44.520.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85.00	85.00	86.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP	87.00		
			Pakaian Dinas Pegawai (Paket)			86	39.750.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP			
	2.18.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN DPMPTSP		67.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP	1.00		
			Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP			
	2.18.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN DPMPTSP		56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP	1.00		
			Monitoring dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP			
	2.18.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					25.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN DPMPTSP		56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	2.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP	2.00		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Orang)			2	25.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.586.573.275,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN DPMPTSP		2.721.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			17		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN DPMPTSP	17			
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			17		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN DPMPTSP	17			
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			40		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN DPMPTSP	40			
		Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			40		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN DPMPTSP	40				
	2.18.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					40.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN DPMPTSP		56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	15.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPTSP	15.00		
			Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor (Paket)			15	40.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPTSP			
	2.18.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.716.573.275,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	DPMPTSP		1.770.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	17.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPTSP	18.00		
			Paket Penyediaan Perlengkapan Kantor (Paket)			17	1.716.573.275,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPTSP			
	2.18.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	DPMPTSP		56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	7.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPTSP	7.00		
			Cetak dan Penggandaan (Paket)			7	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPTSP			
	2.18.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					80.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	DPMPTSP		89.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15	7	8.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu Kantor	8.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.06.000 9		Fasilitasi Tamu Kantor (Laporan)			8	80.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu Kantor			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					700.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tamu Kantor		750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00	3.00	3.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		DPMPTSP		3.00			
			Kegiatan Rapat Koordinas dan dan Konsultasi SKPD (Laporan)			3	700.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPTSP			
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	DPMPTSP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			1	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			DPMPTSP		1			
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			1	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			DPMPTSP		1			
	2.18.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					90.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	DPMPTSP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00	0.00	1.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN DPMPTSP		1.00			
			Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)			1	90.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPTSP			
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.365.857.951,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN DPMPTSP		2.649.760.905,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN DPMPTSP		12			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN DPMPTSP		12			
	2.18.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					684.987.024,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN DPMPTSP		767.185.467,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah dan Masyarakat		12.00			
			Pembayaran Jasa Internet, Air, Listrik dan Telepon (Laporan)			12	684.987.024,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Gaji Non ASN, Tunjangan Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN (Laporan)	30	30	12.00	1.680.870.927,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat	12.00	1.882.575.438,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			1423		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah, Pegawai Non ASN	1423	468.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)					1423	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Pemerintah, Pegawai Non ASN	1423						
	2.18.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	15	15.00	110.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah, Pegawai Non ASN	15.00	123.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Jasa Service dan Suku Cadang (Unit)			15	110.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Pemerintah dan Masyarakat					
	2.18.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	6.00	80.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat	6.00	89.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Pemeliharaan Mesin dan Peralatan kantor (Unit)			6	80.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Pemerintah dan Masyarakat					
	2.18.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1.00	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat	1.00	56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan (Unit)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Pemerintah dan Masyarakat					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan (Unit)	20	22	20.00	100.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemerintah dan Masyarakat	20.00	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
						20	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
								(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					720,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			914,400,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor			87			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah dan Masyarakat			
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi Persentase Investor Yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang menjadi			100	440.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	100	358.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
						100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat	100		
						100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah dan Masyarakat	100		
	2.18.02.1.01.000 1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah dan Masyarakat	1.00	280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
						1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.02.1.01.000 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	240.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	1.00	78.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
								(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelayanan Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah (Dokumen)			1	240.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase wilayah Sulawesi Selatan yang telah disusun kedalam Peta Potensi Investasi Provinsi (%) Persentase Wilayah Sulawesi Selatan Yang Telah Disusun Kedalam Peta Potensi Investasi Provinsi (%)				280.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		556.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
						100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		100			
						100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)		Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		100			
	2.18.02.1.02.000 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen) Perencanaan Penyusunan Perda Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)				30.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				20	25	1.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	1.00		
						1	30.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.02.1.02.000 3	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) Pemutakhiran data potensi investasi (daerah)				50.000.000,00					Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				0.00	0.00	2		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	2		
						2	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.02.1.02.000 5	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen) Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)				200.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				0.00	0.00	2.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	2.00		
						2	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					775,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			800,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun) (Rp)			6,8			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
			Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun) (Rp)			7,75			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
			Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun) (Rp)			7.750			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					775.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Persentase Calon Investor yang masuk (%)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	100		
			Persentase Calon Investor Yang Masuk (%)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	100		
	2.18.03.1.01.000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi					525.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	2	2	4.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	4.00		
			Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)			4	525.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.03.1.01.000 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi					250.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	1.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	1.00		
Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)					1	250.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1,120,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,652,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)			92 92			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.120.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		1.652.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Cakupan ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan Provinsi yang diterbitkan (%)			100	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	100				
			Cakupan Ketersediaan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan			100	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	100				
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					320.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		470.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	100	120.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	120.00			
			Pelayanan Konsultasi untuk Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)			120	320.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					450.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	26000	27000	28000.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	28000.00			
			Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)			28.000	450.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.04.1.02.000 8	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	26000.00	27000.00	28000.00	350.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	28000.00	481.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					1,000,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,161,600,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal (%)			57			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
			Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal (%)			57			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.000.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	100	1.161.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM (%)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
			Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (%)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.05.1.01.000 4	Pengawasan Penanaman Modal					350.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	30.00	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku	0.00	0.00	30.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
			Pengawasan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)			30	350.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.05.1.01.000 5	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					330.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		369.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.05.1.01.000 6		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0.00	0.00	900.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	900.00		
			Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)			900	330.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					320.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		392.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha (Pelaku Usaha)	0.00	0.00	300.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	300.00		
						300	320.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					50,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			168,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal (%) Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal (%)			87 87			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		168.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha (%)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	100			
			Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha (%)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	100			
	2.18.06.1.01.000 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		168.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	1	1	1.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Data dan Informasi Perizinan (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha			
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					131,807,655,471.00							253,002,533,583.00	
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					131,807,655,471.00							253,002,533,583.00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi					21,912,223,028.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			22,102,651,600.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000									
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					690.651.600,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR), (Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)						712.651.600,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Dokumen Perencanaan,			12.000									
	2.19.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					397.651.600,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)						397.651.600,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan dan forum perangkat daerah	7		
			Dokumen perencanaan dan pelaksanaan forum perangkat daerah (Dokumen)			7	397.651.600,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan dan forum perangkat daerah			
	2.19.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					90.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)						90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan dan forum perangkat daerah RKA Dispora Sulsel	1		
			Dokumen RKA OPD (Dokumen)			1	90.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RKA Dispora Sulsel			
	2.19.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					83.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				RKA Dispora Sulsel		95.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.1.01.000 4		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	1.00	1.00		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perubahan RKA Dispora Sulsel	1.00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Dokumen perubahan RKA OPD (Dokumen)			1	83.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perubahan RKA Dispora Sulsel			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	20.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Dokumen perubahan RKA Dispora Sulsel		25.000.000,00		
			Dokumen DPA OPD (Dokumen)			1	20.000.000,00	(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen DPA OPD	1		
	2.19.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	01	1	1	20.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Dokumen DPA OPD		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Dokumen Perubahan DPA OPD (Dokumen)			1	20.000.000,00	(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perubahan DPA OPD	1		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-					(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Dokumen DPA OPD				
			Dokumen Perubahan DPA OPD (Dokumen)					(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perubahan DPA OPD			
	2.19.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12	12	12	40.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Perubahan DPA OPD		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Laporan capaian kinerja (Laporan)			12	40.000.000,00	(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan capaian kinerja bulanan	12		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar					(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Perubahan DPA OPD				
			Laporan capaian kinerja (Laporan)					(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan capaian kinerja bulanan			
	2.19.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	7	40.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Laporan capaian kinerja bulanan		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Laporan Evaluasi kinerja (Laporan)			7	40.000.000,00	(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan evaluasi kinerja	7		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)					(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Laporan capaian kinerja bulanan				
			Laporan Evaluasi kinerja (Laporan)					(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan evaluasi kinerja			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.582.327.032,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Laporan evaluasi kinerja		14.205.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)				48.000					Laporan evaluasi kinerja				
	2.19.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					13.394.327.032,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Laporan evaluasi kinerja		14.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	115	117	117		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dispora Sulsel	117		
			Gaji dan TPP ASN Dispora (Orang)			117	13.394.327.032,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dispora Sulsel			
	2.19.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					55.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				ASN Dispora Sulsel		60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan Dispora Sulsel	12		
			Laporan keuangan (Dokumen)			12	55.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan Dispora Sulsel			
	2.19.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					35.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Laporan keuangan Dispora Sulsel		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	12		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan akrual Dispora Sulsel	12		
			Laporan keuangan akrual (Dokumen)			12	35.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan akrual Dispora Sulsel			
	2.19.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					23.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Laporan akrual Dispora Sulsel		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	1		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan akhir tahun	1		
			Laporan keuangan akhir tahun (Laporan)			1	23.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan akhir tahun			
2.19.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						24.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Laporan keuangan akhir tahun		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.1.02.000 7		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4	4		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	4		
			Bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Dokumen)			4	24.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					43.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan		45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran	18		
		Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran (Laporan)			18	43.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran				
		2.19.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				8.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	1	1		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1		
				Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (Dokumen)			1	8.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				32.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)					Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah barang milik daerah yang dikelola perangkat daerah (Unit)			10.000					Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran				
	2.19.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)					Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Dokumen RKBMD Dispora Sulsel	4	15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	4		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.1.03.000 3		Dokumen RKBMD Dispora Sulsel (Dokumen)			4	15.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen RKBMD Dispora Sulsel			
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dokumen RKBMD Dispora Sulsel		-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Berita acara hasil penilaian barang milik daerah		
	2.19.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita acara hasil penilaian barang milik daerah (Laporan)			1	5.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Berita acara hasil penilaian barang milik daerah			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	1	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah (Laporan)			1	5.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah			
	2.19.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					7.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	6			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penatausahaan barang milik daerah	6		
			Penatausahaan barang milik daerah (Laporan)			6	7.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penatausahaan barang milik daerah			
	2.19.01.1.03.000 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					-	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Penatausahaan barang milik daerah		-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen hasil pemetaan barang milik daerah			
			Dokumen hasil pemetaan barang milik daerah (Dokumen)			1			(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen hasil pemetaan barang milik daerah		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					400.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dokumen hasil pemetaan barang milik daerah		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah (%)			100.000						Dokumen hasil pemetaan barang milik daerah			
	2.19.01.1.04.000 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					400.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Dokumen hasil pemetaan barang milik daerah		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan PAD Dispora Sulsel	12		
			Laporan PAD Dispora (Laporan)			12	400.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan PAD Dispora Sulsel			
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					581.912.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (KOTA MAKASSAR)				Laporan PAD Dispora Sulsel		810.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30.000						Laporan PAD Dispora Sulsel			
	2.19.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					333.912.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Laporan PAD Dispora Sulsel		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	117	156	156		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dispora Sulsel	156		
			Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Paket)			156	333.912.000,00	(Kantor Dispora Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dispora Sulsel			
	2.19.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi					13.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Aparatur Dispora Sulsel		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	12		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi kepegawaian Dispora	12		
		Dokumen administrasi kepegawaian (Dokumen)			12	13.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi kepegawaian Dispora				
2.19.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						10.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Administrasi kepegawaian Dispora		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	12	12			(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen sistem informasi kepegawaian	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.1.05.000 5		Dokumen sistem informasi kepegawaian (Dokumen)			12	10.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen sistem informasi kepegawaian			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					25.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Dokumen sistem informasi kepegawaian		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	4	4	4		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	Aparatur Dispora Sulsel				
			Dokumen sistem informasi kepegawaian (Dokumen)			4	25.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Dispora Sulsel				
	2.19.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Aparatur Dispora Sulsel		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Diklat pegawai Dispora Sulsel (Orang)	115	117	117		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		117	Aparatur Dispora Sulsel				
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.230.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (KOTA MAKASSAR)			Aparatur Dispora Sulsel		1.490.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum			6.000				Aparatur Dispora Sulsel					
	2.19.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Aparatur Dispora Sulsel		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	12	12		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	Kantor Dispora Sulsel				
	2.19.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Paket)		12		15.000.000,00								
					200.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Kantor Dispora Sulsel		200.000.000,00				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	5		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Kantor Dispora Sulsel				
			Perlengkapan dan peralatan kantor (Paket)			5	200.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor Dispora Sulsel				
	2.19.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					35.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Kantor Dispora Sulsel		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.1.06.000 5		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	10	10		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel	10		
			Peralatan rumah tangga kantor (Paket)			10	35.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Kantor Dispora Sulsel		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Dispora Sulsel	12				
	2.19.01.1.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material				100.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Dispora Sulsel	12				
						15.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Kantor Dispora Sulsel		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	12	12		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Dispora Sulsel	12				
	2.19.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	12	12		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Dispora Sulsel	12				
						15.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	12	12		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Dispora Sulsel	12				
2.19.01.1.06.000 9	Fasilitasi Kunjungan Tamu				250.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Kantor Dispora Sulsel		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	12.00	12.00		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tamu Dispora Sulsel	12.00					
					250.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tamu Dispora Sulsel							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	12.00	12.00		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tamu Dispora Sulsel	12.00					
2.19.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000,00					Tamu Dispora Sulsel		750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12		(Dalam dan luar daerah, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12					
					600.000.000,00					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12		(Dalam dan luar daerah, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12					
2.19.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00					Tamu Dispora Sulsel		750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12		(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12					
					15.000.000,00					Tamu Dispora Sulsel		750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12		(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					175.100.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (KOTA MAKASSAR)				Arsip Dispora Sulsel		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			5.000						Arsip Dispora Sulsel				
	2.19.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Arsip Dispora Sulsel		-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Kendaraan operasional (Unit)			1	40.000.000,00	(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan operasional Kendaraan operasional				
	2.19.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					100.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Kendaraan operasional		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	2	2		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel	2			
			Mebel kantor (Paket)			2	100.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel				
	2.19.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)					Kantor Dispora Sulsel		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	0	1	1	35.000.000,00	(-, KOTA MAKASSAR) (Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan mesin Peralatan dan mesin	1			
	2.19.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)					Peralatan dan mesin		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Sarpras pendukung gedung kantor (Unit)	2	2	2	2	100.000,00	(-, KOTA MAKASSAR) (Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel Kantor Dispora Sulsel	2			
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.056.036.266,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Kantor Dispora Sulsel		2.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			24.000						Kantor Dispora Sulsel				
	2.19.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					620.004.018,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Kantor Dispora Sulsel		700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	12	12		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa komukasi, listrik dan air	12			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.19.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa komukasi, listrik dan air (Laporan)			12	620.004.018,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa komukasi, listrik dan air				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	1.436.032.248,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa komukasi, listrik dan air	12	1.600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jasa sopir, kebersihan, dan tenaga administrasi (Laporan)			12	1.436.032.248,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa sopir, kebersihan, dan tenaga administrasi				
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.164.196.130,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Kantor Dispora Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Jalan Pampang Makassar, KOTA MAKASSAR)				Jasa sopir, kebersihan, dan tenaga administrasi		1.550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			15.000					Jasa sopir, kebersihan, dan tenaga administrasi					
	2.19.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					668.292.130,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa sopir, kebersihan, dan tenaga administrasi	4	600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Pemeliharaan dan pembayaran pajak serta sewa kendaraan jabatan (Unit)	4	4	4	668.292.130,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan jabatan				
	2.19.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					215.904.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan jabatan	6	300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	6		(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan operasional Dispora				
	2.19.01.1.09.000 5	Pemeliharaan Mebel						215.904.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan operasional Dispora			
			Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan operasional (Unit)			6										
							50.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Kendaraan operasional Dispora		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	2	2		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel	2		
			Pemeliharaan mebel (Unit)			2	50.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1200	20	20	80.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel	22	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)			20	80.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan dan mesin kantor			
	2.19.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Peralatan dan mesin kantor		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2	2	2		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Web site dan aplikasi kantor	2		
			Web site dan aplikasi kantor (Unit)			2	50.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Web site dan aplikasi kantor			
		2.19.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.000.000.000,00	(Jalan Pampang Makassar, KOTA MAKASSAR)				Web site dan aplikasi kantor		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	7	7		(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora	2		
	2.19.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor (Unit)			7	2.000.000.000,00	(Jalan Pampang Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	3	3	100.000.000,00	(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dispora Sulsel	3	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (perbaikan jaringan air bersih) (Unit)			3	100.000.000,00	(Kantor Dispora Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor Dispora Sulsel		
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					5,045,501,655.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			4,577,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)			0.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor Dispora Sulsel			
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial			4.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor Dispora Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					4.327.200.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				kantor Dispora Sulsel		4.577.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)				1.184						kantor Dispora Sulsel	1.200			
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						1.315.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				kantor Dispora Sulsel		1.315.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Pemuda kader provinsi dan kab/kota (Orang)	500	750	750				(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda (L/P)	750		
						750	1.315.000.000,00	(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda (L/P)				
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi						200.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pemuda (L/P)		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan gedung dan wisma pemuda (Unit)	2	16	16				(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung dan wisma pemuda Sudiang	16		
							16	200.000.000,00	(Gedung dan wisma pemuda Sudiang, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung dan wisma pemuda Sudiang			
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						85.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Gedung dan wisma pemuda Sudiang		85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	5	11	11				(Kantor Dispora Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda berprestasi (L/P)	11		
		Penghargaan pemuda berprestasi (Orang)				11	85.000.000,00	(Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda berprestasi (L/P)				
2.19.02.1.01.0011		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemuda berprestasi (L/P)		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	0	1	1				(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pokja Layanan Kepemudaan	1		
		RAD layanan kepemudaan (Dokumen)			1		100.000.000,00	(Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pokja Layanan Kepemudaan				
2.19.02.1.01.0012		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi					1.225.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pokja Layanan Kepemudaan		1.225.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan	100	100	100		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda (L/P)	100			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.02.1.01.001 3		Pengembangan kepemimpinan pemuda (Orang)			500	1.225.000.000,00	(Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda (L/P)			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam	300	210	210	77.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Pemuda (L/P)		77.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Pemuda pelopor provinsi dan kab/kota (Orang)		210	77.000.000,00	(Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda	250				
	2.19.02.1.01.001 4	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi (Orang)	0	100	100	200.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemuda		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda (Orang)		100	100	200.000,00	(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda	100		
					100	200.000,00	(Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda				
	2.19.02.1.01.001 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	350	500	500	1.325.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemuda		1.325.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Even Olahraga Cabor (Kegiatan)			0		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pemuda, Pemuda, wiramuda, Wirausaha muda (L/P)	500		
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Paket)			0		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(KECAMATAN KEP. SANGKARRANG, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(KOTA PALOPO, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Paket)			0		(KOTA PALOPO, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Paket)			100		(KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Paket)			0		(KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Paket)			0		(KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Paket)			0		(KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Paket)			0		(KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Paket)			0		(KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(Kec.Wara Kota Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(Kelurahan Buntusu dan Kelurahan Manggala Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(Kel.Biringere, Kec.Sinjai Utara,, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (Kegiatan)			0		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(KECAMATAN MARISO, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Paket)			0		(-, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Paket)			0		(-, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Paket)			0		(-, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(KECAMATAN BONTOALA, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Paket)			0		(-, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Paket)			0		(-, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Paket)			0		(-, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(KECAMATAN WAJO, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			100		(KECAMATAN UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			100	1.325.000.000,00	(KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(Kecamatan Wara Kota palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(KECAMATAN KEP. SANGKARRANG, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(Lembang To&Pao, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Kegiatan)			0		(KECAMATAN MAMAJANG, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
			Pelatihan Kewirausahaan (Paket)			1		(-, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pemuda			
			Pengembangan kewirausahaan pemuda (Orang)			500		(Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wirausaha muda (L/P)			
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Paket)			0		(-, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wiramuda			
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					718.301.655,00	(SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (KAB. BANTAENG), (Kabupaten Sinjai, KAB. SINJAI), (Dispora Kabupaten Sinjai, KAB. SINJAI), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang dan Manggala, KOTA MAKASSAR), (Kota makassar sulawesi				wiramuda			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah organisasi kepemudaan yang									wiramuda			
		2.19.02.1.02.000 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian								400.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)
												Organisasi/Lem baga pemuda			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.02.1.02.000 4		Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan, Dialog Kepemudaan (Orang)			500	400.000.000,00	(Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi/Lem baga pemuda			
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi					318.301.655,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi/Lem baga pemuda		-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi Hibah organisasi kepemudaan (Organisasi)			1	318.301.655,00	(Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi/lem baga kepemudaan Organisasi/lem baga kepemudaan				
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					104,091,930,788.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			225,322,881,983.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Peningkatan Prestasi olahraga (%) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga (%)			0.400 45.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi/le mbaga kepemudaan Organisasi/le mbaga kepemudaan			
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					62.892.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Sinjai, KAB. SINJAI), (Stadion Mattoangin, GOR Sudiang, KOTA MAKASSAR), (KOTA MAKASSAR)				Organisasi/lem baga kepemudaan		150.072.881.983,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah atlet pelajar potensial (Orang)			367.000						Organisasi/lem baga kepemudaan			
	2.19.03.1.01.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha					850.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi/lem baga kepemudaan		850.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh	3	3	3		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet PPLP, P2OTB, dan SKO Sulsel	3		
			Pusat pembinaan dan pelatihan olahraga dan sekolah olahraga (Unit)			3	850.000.000,00	(Kabupaten kota di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet PPLP, P2OTB, dan SKO Sulsel			
	2.19.03.1.01.000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus					812.000.000,00					Atlet PPLP, P2OTB, dan SKO Sulsel		812.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan	5	8	8		(Dalam dan luar daerah, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet PPLP, P2OTB, dan SKO Sulsel	8			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.03.1.01.000 4		Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Dokumen)			8	812.000.000,00	(Dalam dan luar daerah, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet PPLP, P2OTB, dan SKO Sulsel			
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi					61.230.000.000,00	(Stadion Mattoangin, GOR Sudiang, KOTA MAKASSAR)			Atlet PPLP, P2OTB, dan SKO Sulsel		148.410.881.983,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	6.00	6.00	6.00		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana olahraga	6.00			
		Penyediaan sarana dan prasarana olahraga (Unit)			6	61.230.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana olahraga				
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					10.449.600.000,00	(SULAWESI SELATAN),				Sarana dan prasarana		17.600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah even olahraga (Event)			32.000					Sarana dan prasarana olahraga				
	2.19.03.1.02.000 4	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga					1.000.000.000,00					Sarana dan prasarana olahraga		10.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan	500.00	1500.00	1500.00		(Dalam dan luar daerah, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet	1500.00		
			Keikutsertaan pada even PON, PEPARNAS, Pra Popnas, Festival Olahraga Tradisional (FORTRADNAS), dan Festival Olahraga Rekreasi. (Orang)			1.500	1.000.000.000,00	(Dalam dan luar daerah, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet			
	2.19.03.1.02.000 5	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Atlet		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	1	1	1		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet paralimpik	1		
			Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Kegiatan)			1	200.000.000,00	(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet paralimpik			
2.19.03.1.02.000 6	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi					9.249.600.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Atlet paralimpik		7.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara (Kegiatan)	25	25	25		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Event olahraga unggulan daerah	25			
			(1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. (2) Festival Olahraga Tradisional Daerah. (3) Festival Olahraga Rekreasi Daerah, dan (4) Kejuaraan olahraga unggulan daerah. (Kegiatan)			25	9.249.600.000,00	(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Event olahraga unggulan daerah			
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					11.250.330.788,00	(SULAWESI SELATAN)				Event olahraga unggulan daerah		37.650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.03.1.03.000 1		Persentase pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi (%)			100.000						Event olahraga unggulan daerah			
		Seleksi Atlet Daerah					100.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Event olahraga unggulan daerah		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	0	500	500		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet potensial	500		
			Seleksi atlet dan pelatih daerah (Orang)			500	100.000,00	(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet potensial			
	2.19.03.1.03.000 6	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga					1.190.886.406,00	(SULAWESI SELATAN)				Atlet potensial		17.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	30	150	150		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet berprestasi	150		
			Pemberian penghargaan olahraga bagi atlet dan pelatih berprestasi / berjasa memajukan olahraga (Orang)			150	1.190.886.406,00	(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet berprestasi			
	2.19.03.1.03.000 7	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					9.344.382,00	(SULAWESI SELATAN)				Atlet berprestasi		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan	2	2	2		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelatih, wasit dan guru olahraga	2		
			Pelatihan tenaga keolahragaan dan sport science (Pelatda)			2	9.344.382,00	(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelatih, wasit dan guru olahraga			
	2.19.03.1.03.000 8	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pelatih, wasit dan guru olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen)			0	1	1		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Data Keolahragaan	1			
		Pemutakhiran data keolahragaan (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Data Keolahragaan				
2.19.03.1.03.000 9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi						10.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Data Keolahragaan		20.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200	300	300		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet dan pelatih olahraga	350			
		Pembinaan dan Pemusatan latihan atlet daerah (Orang)			300	10.000.000.000,00	(Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet dan pelatih olahraga				
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan organisasi olahraga (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)				Atlet dan pelatih olahraga		20.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
												Atlet dan pelatih olahraga			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.03.1.04.000 3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Hibah organisasi olahraga (Dokumen)	1	3	3	19.500.000.000,00 19.500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN) (Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet dan pelatih olahraga Organisasi keolahragaan Organisasi keolahragaan	3	20.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					758,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,000,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase organisasi pramuka aktif (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi keolahragaan			
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					758.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi keolahragaan Organisasi keolahragaan		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.000 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Persentase pembinaan organisasi kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi) Hibah Pramuka (Organisasi)		1	1	500.000.000,00 500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN) (Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi keolahragaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Gerakan Pramuka	1	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.000 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Pengembangan kapasitas SDM oraganisasi keoramukaan (Orang)	1	1	1 100	58.000.000,00 58.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN) (Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Pengurus Kwarda/Kwarc ab Pengurus Kwarda/Kwarc ab	1	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.000 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi (Laporan) Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan (Laporan)	0	1	1 1	200.000.000,00 200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN) (Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengurus Kwarda/Kwarc ab Anggota Pramuka Anggota Pramuka	1	400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					567,872,471.00							1,726,518,903.00	
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					567,872,471.00							1,726,518,903.00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					567,872,471.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			1,726,518,903.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)			90			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota			
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					567.872.471,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota		1.726.518.903,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Tersedia (Data)			325.000					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota				
	2.20.02.1.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					167.872.471,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota		450.518.903,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	20.00	4.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	4.00		
			Pokir Dewan : Ir. M. Arfandy Idris, Fraksi Partai Golongan Karya, Komisi A Bidang Pemerintahan. Sosialisasi pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral (EPSS) bagi Produsen data. Usulan Pagu 67.872.471,00 serta Pelaksanaan Tupoksi : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Usulan Pagu 100.000.000,00 (Dokumen)			2	167.872.471,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.20.02.1.01.000 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		355.000.000,00
Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Orang)			16.00	15.00	17.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	17.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.20.02.1.01.000 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Orang)			17	100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)				95.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		195.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
				4.00	4.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	4.00			
				Membangun Metadata Statistik Sektoral (Dokumen)			2	95.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.20.02.1.01.000 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					90.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS (Orang)	0.00	53.00	52.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	52.00			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral (Orang)			52	90.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
	2.20.02.1.01.000 5	Pengembangan Infrastruktur						90.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Infrastruktur Statistik (Unit)	1.00	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aplikasi Satu Data	1.00			
			Pengembangan Infrastruktur (Unit)			1	90.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aplikasi Satu Data				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.20.02.1.01.000 6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah					25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Aplikasi Satu Data		126.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	0.00	4.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	4.00		
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah (Dokumen)			1	25.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					410,000,000.00							778,377,384.00	
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					410,000,000.00							778,377,384.00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					410,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			778,377,384.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Tingkat Kematangan Keamanan Siber (Nilai)			2,59			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					368.960.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN), (SMK Eran Batu, KAB. TORAJA UTARA)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan		637.377.384,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Area Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Kategori)			4		(SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	4		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.21.02.1.01.000 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi					14.360.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	1.00	43.877.384,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Dokumen)			1	14.360.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.21.02.1.01.000 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					17.060.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2.00	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)	0.00	4.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)			1	17.060.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.21.02.1.01.000 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					100.000.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	4.00	102.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Jasa Penyelenggaraan Event Literasi di Sekolah Menengah Umum (Paket)	2.00	4.00	4.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SMA / SMK Sederajat			
						1	100.000.000,00	(SMK Eran Batu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SMA / SMK Sederajat			
	2.21.02.1.01.000 4		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					237.540.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				SMA / SMK Sederajat		291.500.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	0.00	53.00	36.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	36.00		
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Perangkat Daerah)			36	237.540.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					41.040.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		141.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Jaring Komunikasi Sandi Pada Pemerintah Daerah Provinsi (Entitas)			3		(SULAWESI SELATAN)				OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3		
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi					41.040.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)				OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		141.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	0.00	53.00	36.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	36.00		
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Perangkat Daerah)			36	41.040.000,00	(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					29,055,351,937.00							31,228,214,912.00	
		DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN					29,055,351,937.00							31,228,214,912.00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					19,577,721,157.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			23,492,057,912.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000									
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					224.055.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)						318.376.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100		(SULAWESI SELATAN)					100		
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)						235.376.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.01.000 2		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	2.00	2.00		(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder	1		
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	150.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					8.190.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder	2.00	9.828.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.00	2.00	2.00		(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder			
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)			2	8.190.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder			
		2.22.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.210.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder	2.00	8.652.000,00
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			2.00	2.00	2.00		(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder			
	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)					2	7.210.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder			
	2.22.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.355.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder	3	3.690.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	4	3		(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.01.000 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			3	3.355.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					55.300.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder		60.830.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder	1.00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1	55.300.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder			
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.187.881.533,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder		14.540.732.912,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12		(SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder	12		
	2.22.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.065.433.533,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait dan Stakeholder		14.244.042.912,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	12.00	135.00	110.00		(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	110.00		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)			110	14.065.433.533,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas					18.618.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel		20.479.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
		ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	12.00		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			12	18.618.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					25.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	12.00	178.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12.00	12.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel					
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			12	25.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel					
	2.22.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					4.998.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	5.497.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait					
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	4.998.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait					
	2.22.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					55.310.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait	1.00	60.841.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait					
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			1	55.310.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait					
	2.22.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					12.023.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait	18.00	24.225.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran			18.00	18.00	18.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait						
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)					18	12.023.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					6.499.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait	1.00	7.148.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait			
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	6.499.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait			
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					72.678.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait	100	82.945.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			% Penyusunan dokumen Laporan BMD Tepat Waktu (%)			100		(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait				
	2.22.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Keuangan OPD lingkup Disbudpar dan OPD Terkait	2.00	7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait			
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	5.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait			
	2.22.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					62.678.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait	2.00	68.945.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	1.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait			
			Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			2	62.678.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait			
	2.22.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait	1.00		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	5.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait			
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					241.250.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait		590.127.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			1		(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait	1			
	2.22.01.1.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					41.250.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel, OPD terkait		45.375.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5	0	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait	3.00		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			3	41.250.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait			
	2.22.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait		217.376.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	131	135	110.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait	110.00		
			Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			110	100.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No.23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait			
	2.22.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait		217.376.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	0	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait	3.00		
Pendidikan dan Pelatihan (Orang)					3	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait	100,00	110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	0,00	80,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait				
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			80	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait			
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					595.835.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait	100	1.244.345.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (%)			100	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait					
	2.22.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.293.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel dan OPD terkait	1,00	22.322.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	14	1	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel				
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			1	20.293.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel				
	2.22.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1,00	643.928.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1,00	1,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel				
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					64.485.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1,00	70.933.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	2	1,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel				
		Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			1	64.485.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel				
2.22.01.1.06.000 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					18.820.000,00					ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel		20.702.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.06.000 8		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	2	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00		DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Cetakan dan Penggandaan (Paket)			1	18.820.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00	12.00	12.00	136.800.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Disbudpar Prov. Sulsel ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	12.00	150.480.000,00	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	136.800.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	55	48.00	305.437.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	48.00	335.980.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			48	305.437.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					300.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel		2.056.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
		Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100		(SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	100		
	2.22.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0.00	0.00	1.00	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	725.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00	0.00	1.00	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	575.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel		155.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.07.000 8		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00		DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0.00	1.00	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	71.500.000,00		
			Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0	1.00	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	265.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	3	1.00	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	265.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	3.352.711.624,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	100	3.785.391.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
								(SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	1.00	959.605.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	1.055.565.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			1	959.605.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.393.106.624,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel		2.729.826.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Non ASN dan Outsorsing lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00		
			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			1	2.393.106.624,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Non ASN dan Outsorsing lingkup Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					603.310.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Non ASN dan Outsorsing lingkup Disbudpar Prov. Sulsel		873.641.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			3	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Tenaga Non ASN dan Outsorsing lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	3				
	2.22.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					101.560.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Non ASN dan Outsorsing lingkup Disbudpar Prov. Sulsel		111.716.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.00	1.00	1.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00				
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			1	101.560.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel				
	2.22.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					351.750.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel		386.925.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	23.00	25.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4 Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	27.00				
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			25	351.750.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4 Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4 Lingkup Disbudpar Prov. Sulsel Sistem Informasi/Webs ite lingkup Disbudpar Prov. Sulsel Sistem Informasi/Webs ite lingkup Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.22.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Sistem Informasi/Webs ite lingkup Disbudpar Prov. Sulsel Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	265.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.22.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel	1.00	55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	45	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)			1	50.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2,162,500,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,382,332,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi (%)			0.800			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel			
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					662.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel		714.185.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.02.1.01.000 1		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah (Kegiatan)			1		(SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel	1		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					150.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Disbudpar Prov. Sulsel		176.585.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan (Objek)	0	10	5.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi Kab./Kota) dan Pelaku Sejarah Budayawan	7.00		
			Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan (Objek)			5	150.000.000,00	(Gedung MULO, Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi Kab./Kota) dan Pelaku Sejarah Budayawan			
	2.22.02.1.01.000 3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya					512.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi Kab./Kota) dan Pelaku Sejarah Budayawan		537.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	0.00	0.00	3.00		(SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pelaku Seni/Seniman	3.00		
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						(Kabupaten Maros, SULAWESI SELATAN), (maros, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA), (Benteng Somba Opu, KAB. GOWA), (Kota Palopo, KOTA PALOPO)				Pelaku Seni/Seniman		1.320.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat			3		(SULAWESI SELATAN)				Pelaku Seni/Seniman	3		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.22.02.1.02.000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					873.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pelaku Seni/Seniman	1.00	740.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2	2	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Seni/Seniman dan Pelaku Sejarah Budaya				
			Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)			1	873.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Seni/Seniman dan Pelaku Sejarah Budaya				
	2.22.02.1.02.000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					527.500.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pelaku Seni/Seniman dan Pelaku Sejarah Budaya	3.00	580.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	48	4	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Seni/Seniman dan Pelaku Sejarah dan Budaya				
			Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)			3	527.500.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Seni/Seniman dan Pelaku Sejarah dan Budaya				
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pelaku Seni/Seniman dan Pelaku Sejarah dan Budaya	2	347.597.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah (Kegiatan)			2		(SULAWESI SELATAN)				Pelaku Seni/Seniman dan Pelaku Sejarah dan Budaya				
	2.22.02.1.03.000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pelaku Seni/Seniman dan Pelaku Sejarah dan Budaya	1	155.097.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0.00	0.00	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Adat				
							1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Adat			
	2.22.02.1.03.000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat					50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)					Lembaga Adat	125.00	192.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina			0.00	0.00	100.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM/Pelaku Adat dan Lembaga Adat					
Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)					100	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM/Pelaku Adat dan Lembaga Adat					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					435,130,780.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			618,629,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan (%)			8.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM/Pelaku Adat dan Lembaga Adat			
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					435.130.780,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				SDM/Pelaku Adat dan Lembaga Adat		618.629.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2.22.03.1.01.000 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian (Kegiatan)			3.000						SDM/Pelaku Adat dan Lembaga Adat			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	10	937	130		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM/Pelaku Adat dan Lembaga Adat	150	462.629.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)			130	280.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM Kesenian/Pelak u Seni			
	2.22.03.1.01.000 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	0.00	25.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM Kesenian/Pelak u Seni	30.00	156.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)			25	155.130.780,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Sanggar Kesenian			
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					100,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			240,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi (%)			3.900			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Sanggar Kesenian			
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Sanggar Kesenian		240.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	2.22.04.1.01.000 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM Sejarah Lokal Provinsi yang mendapatkan pembinaan (Orang)			14.000						Pengelola Sanggar Kesenian			
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1	60	14		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Sanggar Kesenian	16	240.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)			14	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM dan Lembaga sejarah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					2,980,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			695,196,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)			0.290			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM dan Lembaga sejarah			
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					130.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (Salah satu destinasi geopark maros - pangkep, KOTA MAKASSAR)				SDM dan Lembaga sejarah		235.394.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan (Cagar Budaya)			3.000						SDM dan Lembaga sejarah			
	2.22.05.1.01.000 2	Penetapan Cagar Budaya					130.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				SDM dan Lembaga sejarah		235.394.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1	5.00	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cagar Budaya yang ditetapkan	4.00		
			Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Cagar Budaya)			3	130.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cagar Budaya yang ditetapkan			
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					2.850.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (kabupaten maros, SULAWESI SELATAN), (sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (gedung kesenian (harmony), KOTA MAKASSAR), (gedung kesninan (harmony), KOTA MAKASSAR), (Istana Datu Luwu, KOTA PALOPO)				Cagar Budaya yang ditetapkan		459.802.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah cagar budaya peringkat provinsi yang dikelola (Cagar Budaya)			3.000						Cagar Budaya yang ditetapkan			
	2.22.05.1.02.000 2	Pengembangan Cagar Budaya					2.750.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Cagar Budaya yang ditetapkan		308.259.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0.00	2.00	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pengelola cagar budaya, Pengelola cagar budaya, Pengelola Cagar Budaya	4.00		
			Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Cagar Budaya)			3	1.350.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Cagar Budaya			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Revitalisasi Cagar Budaya (Paket)			2	400.000.000,00	(-, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola cagar budaya			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.05.1.02.000 3		Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Revitalisasi Cagar Budaya (Paket)			1	200.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola cagar budaya			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Revitalisasi Cagar Budaya (Paket)			1	200.000.000,00	(kabupaten maros, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola cagar budaya			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian (Paket)			1	200.000.000,00	(gedung kesenian (harmony), KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola cagar budaya			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian (Paket)			1	200.000.000,00	(gedung kesenian (harmony), KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola cagar budaya			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian (Paket)			1	200.000.000,00	(gedung kesinian (harmony), KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pengelola cagar budaya			
		Pemanfaatan Cagar Budaya						100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				pengelola cagar budaya	1.00	151.543.000,00
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0.00	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Cagar Budaya						
Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)			1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Cagar Budaya						
6.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					3,800,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			3,800,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Presentase Peningkatan kunjungan ke Museum (%)			10.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Cagar Budaya			
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi					3.800.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Cagar Budaya	3	3.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Museum Provinsi yang dikelola (Museum)			3		(SULAWESI SELATAN)			Pengelola Cagar Budaya				
	2.22.06.1.01.000 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					1.004.838.728,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pengelola Cagar Budaya	500.00	1.004.838.728,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	9	350.00	500.00		(SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengelola Museum Provinsi				
		Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)			500	1.004.838.728,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengelola Museum Provinsi				
	2.22.06.1.01.000 3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum					2.158.250.772,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Museum Provinsi	5.00	2.158.250.772,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	17	7.00	5.00		(SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengunjung Museum					
			Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)			5	2.158.250.772,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengunjung Museum			
2.22.06.1.01.000 4		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					318.455.250,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengunjung Museum		318.455.250,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.06.1.01.000 5		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2	6.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengelola Museum Provinsi	2.00		DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)			2	318.455.250,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengelola Museum Provinsi			
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	0.00	0.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengelola Museum Provinsi	2.00	318.455.250,00	
			Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)			2	318.455.250,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengelola Museum Provinsi			
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					35,309,180,391.00							40,426,952,480.00	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					35,309,180,391.00							40,426,952,480.00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31,309,180,391.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			37,826,952,480.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP yang			80.000 100.000 100.000									
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					400.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			430.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu (Dokumen)			10		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				10			
	2.23.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					250.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)					250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	6		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	6		
			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi PD (Dokumen)			6	250.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-			
	2.23.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)					5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1.00	1.00	1.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			---	1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi PD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			---			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			---		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				1	1	1.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1				
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi PD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		---			
	2.23.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				---		7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1				
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi PD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		---			
	2.23.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				---		7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1				
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi PD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		----			
	2.23.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				----		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	6.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6				
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi PD (Laporan)			6	10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		---			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				---		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	6.00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		--	6				
			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi PD (Laporan)			6	100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		--				
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.795.814.158,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	--		29.865.084.361,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (Laporan)			27	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)		--	27					
	2.23.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					25.445.814.158,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			--		29.770.084.361,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14	14	180.00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	180					
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			180	25.445.814.158,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN					
	2.23.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					56.140.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				ASN		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12.00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	12					
			Administrasi Keuangan (Dokumen)			12	56.140.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD					
	2.23.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.23.01.1.02.000 5		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	12.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	12			
			Administrasi Keuangan (Dokumen)			12	100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					158.860.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		50.000.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0.00	1	1.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Opd	1			
			Administrasi Keuangan (Dokumen)			1	158.860.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Opd				
	2.23.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					5.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Opd		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0.00	0.00	2.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	2			
			Administrasi Keuangan (Dokumen)			2	5.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
	2.23.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					5.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1	0.00	1.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1			
			Administrasi keuangan (Laporan)			1	5.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
	2.23.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					25.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0.00	1	14.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	14			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Administrasi Keuangan (Dokumen)			14	25.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (Laporan / Dokumen)			6/2		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			OPD	6/2			
	2.23.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					18.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1.00		
			Adminstrasi barang milik daerah pada PD (Dokumen)			1	18.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0.00	0.00	2.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	2		
			Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (Laporan)			2	12.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					106.500.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)					100.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD	100			
2.23.01.1.05.000 1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					23.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.23.01.1.05.000 2		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0.00	0.00	5.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	5.00			
			Adminstrasi Kepagwaiaan Perangkat Daerah (Unit)			5	23.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					38.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		20.000.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00	180.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	180.00			
			Administrasi kepegawaiaan perangkat daerah (Paket)			180	38.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
		2.23.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan					7.500.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD			100.000.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan (Dokumen)			150	150	12.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	12			
	Adminstrasi Kepegawaiaan PD (Dokumen)					12	7.500.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
	2.23.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					8.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)					OPD		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0.00	0.00	4.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	4			
			Administrasi Kepegawaiaan PD (Dokumen)			4	8.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
	2.23.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					30.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)					OPD		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	0.00	10.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	10			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Administrasi Kepegawaian PD (Orang)			10	30.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.210.764.031,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD		1.487.379.031,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)			100.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			OPD	100			
	2.23.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					75.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	7.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	7		
			Adminstrasi Umum PD (Paket)			7	75.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					722.764.031,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		478.779.031,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	20.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	20		
			Adminstrasi Umum PD (Paket)			20	722.764.031,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					50.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	300	100	10.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	10		
			Adminstrasi Umum PD (Paket)			10	50.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		73.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	50	500	12.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	12		
			Administrasi Umum PD (Laporan)			12	100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					235.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		750.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	75	12.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	12		
			Administrasi Umum PD (Laporan)			12	235.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.000.000,00					OPD		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0.00	10	5.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Arsip	5		
			Dokumen Penata Usahaan (Dokumen)			5	20.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Arsip			
	2.23.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					8.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Pengguna Arsip		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1.00		
			Administrasi Umum PD (Dokumen)			1	8.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.01.1.07.000 5		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang Milik Daerah (%)			100.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD	100		
		Pengadaan Mebel					30.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1		
			Pengadaan Barang Milik Daerah (Paket)			1	30.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.233.012.202,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD		4.808.289.088,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			48.000	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			OPD		48			
	2.23.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.163.758.866,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		1.068.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	12.00			
			Penyediaan jasa penunjang (Laporan)			12	1.163.758.866,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	0	12.00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	12			
			Penyediaan Jasa Penunjang (Laporan)			12	30.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.039.253.336,00					OPD		3.737.789.088,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	1.00	12.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN	12.00		
			Gaji Non ASN (Laporan)			12	2.039.253.336,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN			
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					503.090.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Non ASN		1.074.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			24.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			Non ASN	24			
	2.23.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					38.630.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Non ASN		241.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15.00	15.00	6.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	6.00		
			Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)			6	38.630.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					279.960.000,00	(SULAWESI SELATAN)				OPD		108.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	8.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	8		
			Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dbayarkan pajak dan perizinannya (Unit)			8	279.960.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					170.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				OPD		665.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	5.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	5		
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)					5	170.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	0.00	0.00	5.00	14.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				OPD		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						5	14.500.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	5		
						5	14.500.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					3,400,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,200,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik			3000.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
			Persentase perpustakaan yang dikembangkan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD			
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					1.800.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Sulaesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	OPD		1.900.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah perpustakaan yang dibina (Perpustakaan)			100.000			(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			OPD	112		
			Persentase perpustakaan yang sesuai standar Nasional Perpustakaan (%)			100.000			(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			OPD	100		
			Persentase pemanfaatan layanan wahana Pusat Peraga IPTEK Daerah (%)			100.000			(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			OPD	100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.23.02.1.01.000 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi					450.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Sulaesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				OPD		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	0	20	20.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22			
			Mengembangkan dan Mewujudkan Perpustakaan (Perpustakaan)			20	450.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Sulaesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Kelompok Masyarakat			
	2.23.02.1.01.000 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					500.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Kelompok Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional	100	0.00	80.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90			
			Dengan di tingkatannya pelayanan perpustakaan untuk mencapai terwujudnya ekosistem digital perpustakaan (Perpustakaan)			80	500.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pemustaka			
	2.23.02.1.01.000 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000,00					Pemustaka		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1000	600	100.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100			
				Pengelolaan Perpustakaan (Orang)			100	100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pustakawan dan tenaga Pengelola Perpustakaan			
	2.23.02.1.01.000 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					250.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Pustakawan dan tenaga Pengelola Perpustakaan		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	150000	4	3.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3			
			Pengembangan Layanan Perpustakaan (Layanan)			3	250.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pemustaka			
2.23.02.1.01.000 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka					200.000.000,00						Pemustaka		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.02.1.01.001 5		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	100	100	200.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka	200		
			Pengelolaan Perpustakaan (Eksemplar)			2.000	200.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka			
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					300.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Pemustaka		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	150000	4	3.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka	3		
			Layanan perpustakaan Elektronik (Perpustakaan)			3	300.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka			
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					1.600.000.000,00	(Jl. Pampang Kaya No. 4 Kel. Pampang Kec. Panakkukang, SULAWESI SELATAN), (Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (24 kabupaten/kota, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, KAB. TAKALAR), (Kabupaten Bone, KAB. BONE), (KABUPATEN MAROS, KAB. MAROS), (KABUPATEN PANGKEP, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (KABUPATEN BARRU, KAR.		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemustaka		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase Pembudayaan Gemar Membaca (%)			100.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Pemustaka	100		
	2.23.02.1.02.000 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						100.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Pemustaka		150.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.02.1.02.000 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Orang)	0.00	0.00	6.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka	6		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Menigkatkan minat dan gemar meBaca di kalangan masyarakat (Orang)			6	100.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	100	1	50.00	1.500.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka	14		
			Menigkatkan minat dan gemar meBaca di kalangan masyarakat (Perpustakaan)			50	1.500.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka			
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					600,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			400,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase Naskah Kuno yang di Lestarikan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka			
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					400.000.000,00	(Dinas Peprustakaan dan kearsipan, SULAWESI SELATAN), (KABUPATEN MAROS, KAB. MAROS), (KABUPATEN PANGKEP, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (KABUPATEN BARRU, KAB. BARRU), (KOTA PARE PARE, KOTA PARE PARE)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemustaka		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Koleksi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (Karya)			30.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			Pemustaka	30			
	2.23.03.1.01.000 2	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					400.000.000,00	(Dinas Peprustakaan dan kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Pemustaka		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	0.00	0.00	10.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka	10.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah (Penerbit/produsen)</i>			10	400.000.000,00	<i>(Dinas Peprustakaan dan kearsipan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka			
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					200.000.000,00	(Dinas Peprustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (Kab. Luwu, KAB. LUWU), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Kecamatan Rantepao, KAB. TORAJA UTARA)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Pemustaka		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			<i>Jumlah Pelestarian Naskah Kuno (naskah)</i>			50.000	<i>(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)</i>			Pemustaka	50				
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				200.000.000,00	(Dinas Peprustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			Pemustaka		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		<i>Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan (Eksemplar)</i>	0.00	0.00	50.00	<i>(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemustaka	50					
		<i>Pelestarian Naskah Kuno (Eksemplar)</i>			50	200.000.000,00	<i>(Dinas Peprustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemustaka					
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					850,000,000.00							2,150,000,000.00	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					850,000,000.00							2,150,000,000.00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					550,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			1,450,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			<i>Persentase Perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah</i>			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka			
			<i>Persentase Pengelolaan Kearsipan Secara Baku Berbasis Teknologi</i>			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka			
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (54 OPD ditambah Lembaga Kearsipan Daerah , KAB. GOWA), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Kecamatan Rantepao, KAB. TORAJA UTARA), (Dinas Kearsipan, KOTA PALOPO)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemustaka		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.02.1.01.000 3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Persentase pengelolaan arsip dinamis			100.000						Pemustaka			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi (Laporan)	10.00	10.00	51.00	200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Pemustaka		350.000.000,00		
			Pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi (Laporan)			51	200.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD	59.00			
										OPD					
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase pengelolaan arsip statis (%)			100.000	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)		OPD		100				
	2.24.02.1.02.000 5	Akuisisi Arsip Statis				100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	100.00	100	37.00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguna Arsip		37.00				
			Pengelolaan Arsip Statis (Arsip)			37	100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguna Arsip				
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				250.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Binamu, KAB. JENEPONTO), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Kecamatan Rantepao, KAB. TORAJA UTARA), (KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR), (Dinas Kearsipan, KOTA PALOPO)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penguna Arsip		700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)			12.000	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)		Penguna Arsip		18				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.02.1.03.000 1		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mengelola arsip secara baku berbasis IT (Perangkat Daerah)			35.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Penguna Arsip	40		
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Penguna Arsip		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	100	100	12.00			(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengguna Arsip	18.00		
		Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi (Pengguna)			12	150.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengguna Arsip					
	2.24.02.1.03.000 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Pengguna Arsip		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	10.00	10.00	35.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Kearsipan	40.00			
Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)					35	100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Kearsipan					
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				250,000,000.00					01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			500,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase Dokumen Arsip Daerah yang Diamankan dan Dilestarikan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kearsipan			
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					50.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Kecamatan Rantepao, KAB. TORAJA UTARA)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tenaga Kearsipan		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase Volume Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (%)			100.000			(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)		Tenaga Kearsipan	100			
	2.24.03.1.01.000 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					50.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Tenaga Kearsipan		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0.00	0.00	3000.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	2500.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Pemusanaan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (Arsip)			3.000	50.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					150.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (Kec. Pattallassang, KAB. TAKALAR), (Sinjai utara, KAB. SINJAI), (Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, KAB. SIDENRENG RAPPANG)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana (%)			100.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			OPD	100				
	2.24.03.1.02.000 1	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana					50.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	0.00	0.00	2000.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	2000.00			
			Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana (Arsip)			2.000	50.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD				
	2.24.03.1.02.000 2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana					100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)					OPD		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	0.00	0.00	2000.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	2000.00			
Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana (Arsip)					2.000	100.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD					
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang					50.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN), (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	OPD		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.03.1.05.000 1		Persentase Pencarian Arsip Statis (%)			100.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				OPD	100		
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang					20.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			OPD		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	0.00	0.00	50.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan OPD/Kabupaten Kota	50.00		
			Pencarian arsip statis provinsi yang di nyatakan hilang (Arsip)			50	20.000.000,00	(Dinas perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan OPD/Kabupaten Kota			
	2.24.03.1.05.000 2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang					20.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat dan OPD/Kabupaten Kota		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	0.00	0.00	50.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, OPD/ Kabupaten Kota	50.00		
			Pencarian arsip statis provinsi yang di nyatakan hilang (Arsip)			50	20.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, OPD/ Kabupaten Kota			
	2.24.03.1.05.000 3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)					10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat, OPD/ Kabupaten Kota		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	0.00	0.00	10.00		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, OPD/kabupaten Kota	10.00		
			Pencarian arsip statis provinsi yang di nyatakan hilang (Arsip)			10	10.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, OPD/kabupaten Kota			
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				50,000,000.00					01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif		200,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase Pelayanan Kearsipan bagi Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, OPD/kabupate n Kota			
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi					50.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat, OPD/kabupaten Kota		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.04.1.01.000 2		Persentase Layanan Izin Penggunaan Arsip (%)			100.000		(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat, OPD/kabupaten Kota	100		
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					25.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat, OPD/kabupaten Kota		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	0.00	0.00	2500.00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengguna Arsip	2500.00					
		Pelayanan Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup (Arsip)			2.500	25.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengguna Arsip						
	2.24.04.1.01.000 3	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan				25.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)			Pengguna Arsip		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau	0.00	0.00	2.00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengguna Arsip	2.00					
			Pelayanan Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup (SOP)			2	25.000.000,00	(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengguna Arsip					
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				663,589,736,101.00								822,573,088,102.00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				85,428,381,190.00								98,518,991,713.00	
	3.25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				85,428,381,190.00								98,518,991,713.00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				35,285,721,190.00								39,076,891,713.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			99.550 95.000 100.000									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.026.268.500,00	(SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)							
	3.25.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			9.000		(SULAWESI SELATAN)					10		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	15	2	234.860.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	3	329.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Alat Tulis Kantor Pertemuan Forum OPD Dan Dukungan Kegiatan Perencanaan (Paket)				2	25.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Belanja Kertas dan Cover Pertemuan Forum OPD dan Dukungan Kegiatan Perencanaan (Paket)				2	2.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Cetak Dokumen Perencanaan (Dokumen)				2	5.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Fullboard Meeting Rapat Forum OPD (Orang)				80	72.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Jasa Narasumber dan Moderator Pertemuan Forum OPD (Jam)				14	10.200.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Makan Minum Rapat Perencanaan (Orang)				240	11.520.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Perjalanan Dinas Blasa Dalam Daerah (Orang)			30	68.640.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Perjalanan Dinas Blasa Luar Daerah (Konsultasi/Koordinasi/Me nghadiri Undangan/Kegiatan Kedinasan Liannya) (Orang)			5	40.000.000,00	(Jakarta atau Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		48.00	31.00	1.00	12.000.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1.00	13.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
								(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						1	4.195.500,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						20	2.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						20	2.805.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						5.000	1.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						1	1.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					16.500.000,00	(SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		16.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	30	30	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1		
			Alat Tulis Kantor Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2024 (Paket)			1	4.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Cetak dokumen RKA Perubahan Tahun 2024 (Eksemplar)			30	3.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan unit kerja daerah (Orang)			6	8.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.01.000 4		Transportasi lokal dalam rangka menghadiri undangan rapat.koordinasi (Orang)			10	1.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					15.708.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	16.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	30	30	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Alat Tulis Kantor Penyusunan DPA Pokok (Paket)			1	4.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Cetak Dokumen DPA dan DPA Parsial (Eksemplar)			50	8.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Kertas dan Cover Penyusunan DPA Pokok (Buah)			8	608.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	Transportasi Dalam rangka menghadiri undangan rapat (Orang)			10	2.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
	3.25.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					30.100.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	24.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30	30	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Alat Tulis Kantor Penyusunan DPA Perubahan OPD (Paket)			1	6.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
Cetak Dokumen DPA Perubahan (Eksemplar)					30	5.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
Kertas dan Cover Penyusunan DPA Perubahan (Buah)					13	1.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat/Konsultasi (Orang)					2	16.000.000,00	(Jakarta atau Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
Transportasi Lokal Dalam Rangka Menghadiri Undangan /Koordinasi Penyusuna DPA Perubahan (Orang)					10	1.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
3.25.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					292.100.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	30	30	11		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	11		
			Alat Tulis Kantor Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Laporan Tahunan, Laporan Statistik (Tahun)			1	15.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Cetak Laporan Klnerja OPD, Cetak Dokumen Laporan Tahunan, Cetak Laporan Statistk (Laporan / Dokumen)			50	13.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Jasa Tenaga Informasi dan Tehnologi (Program PODCAST Dinas KP) (Paket)			1	70.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Jasa Tenaga Lapang Petugas Data Dan Statistik (Orang)			24	31.200.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Jasa Tenaga Lapang Petugas Pendataan Pelaku Usaha KP (Orang)			33	42.900.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Kertas dan Cover Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Laporan Tahunan dan Lapora Statistik (Tahun)			1	7.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Makan Mlnum Rapat Monev Kinerja (Tahun)			1	29.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Dsalam Rangka Koordinasi /Validasi Data/ Klnerja (Orang)			20	60.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Perjalanan Dinas Blasa dalam Rangka Menghadiri Undangan /Koordinasi Di Pusat (Orang)			3	24.000.000,00	(Jakarta atau Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
3.25.01.1.01.000 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					425.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		613.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	30	5		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	5		
			Alat Tulis Kantor Evaluasi Klnerja (Tahun)			1	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Cetak Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Laporan) Kertas dan Cover Penyusunan Evaluasi Kinerja, Pengelolan Pendampingan DAK (Buah) Makan dan Minum Rapat evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Orang) Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka monev dan pengelolaan dana alokasi khusus (Orang) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Menghadiri Undangan / Koordinasi/Konsultasi/Peng elolaan Dana Alokasi Khusus (Orang) Transportasi Lokal Dalam Rangka Menghadiri Undangan /Koordinasi/Konsultasi/Pen gelolaan Dana Alokasi Khusus (Orang)			5	20.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						25	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						100	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						30	200.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						10	80.000.000,00	(Jakarta dan Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						30	5.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.111.487.851,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		27.188.064.086,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			45.000	(SULAWESI SELATAN)		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	45					
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					24.006.787.851,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		27.069.594.086,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	189	189	189	(SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		58.108.205,00, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	207				
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Tahun)			1	33.627.914,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		58.108.205,00				
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Tahun)			1	78.657.631,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Belanja Pembulatan Gaji PNS (Tahun)			1	1.973.470,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Tahun)			1	184.958.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Tahun)			1	379.245.500,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Tahun)			1	576.100.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Tahun)			1	992.039.620,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Tahun)			1	58.108.205,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Gaji Pokok PNS (Tahun)			1	11.238.370.565,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Tahun)			1	10.463.706.946,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12	5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Alat Tulis dan Cetak Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)			1	5.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.700.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12	2.970.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Alat Tulis Kantor, Supplies Computer dan Cetak LAporan Akuntansi (Paket)			1	2.700.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Alat Tulis Kantor, Supplies Computer dan Cetak Laporan (Paket)			1	3.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.25.01.1.02.000 6		Transportasi lokal dalam rangka menghadiri undangan/koordinasi/kedin asan lainnya (Orang)			10	1.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					27.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2	29.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Supplies Computer dan Cetak Laporan (Paket) Koordinasi Bahan Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan (Orang)			1	3.470.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
						10	23.530.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
	3.25.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					64.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)					Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	18	71.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18	18	18		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Supplies Computer dan Cetak Laporan (Paket) Koordinasi Laporan Keuangan Dengan Unit Kerja Di Daerah (Orang)			1	1.900.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Menghadiri Undangan /Koordinasi Laporan Keuangan (Orang)			15	37.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Transportasi lokal dalam rangka menghadiri undangan/koordinasi/kedin asan lainnya (Orang)			3	24.000.000,00	(Jakarta dan Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
						10	1.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
	3.25.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					500.000,00						Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	3.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	0.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
Alat Tulis Kantor dan Cetak Laporan Prognosis (Paket)					1	500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					49.600.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		127.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.03.000 1		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			53.000		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	53		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	2.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
	3.25.01.1.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Supplies Computer dan Cetak Laporan (Paket)			1	2.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
							40.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
	3.25.01.1.03.000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Aset Daerah (Dokumen)			1	40.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
							5.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
	3.25.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi dalam rangka penilaian aset (Orang)			2	5.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
							2.600.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
			Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Supplies Computer dan Cetak Laporan (Paket)			1	1.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Transportasi lokal dalam rangka menghadiri undangan/koordinasi/kedinasan lainnya (Orang)			4	1.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					29.980.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.04.000 1		Jumlah Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah (Rp)			1938413662.000		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	198687400 4		
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					29.980.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1		
			Makan Minum Rapat Perencanaan Pengelolaan PAD Dinas KP (Orang)			60	2.880.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Pengelolaan PAD Dinas KP (Orang)			24	27.100.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					116.530.000,00	(SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		162.633.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			5		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	7		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin				18.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.000 1	Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3	2	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2		
			Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Disiplin Pegawai (Unit)			1	18.000.000,00	(Dinas Kelautan dan Perikanan /UPT/CDK, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					4.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12	4.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Supplies Computer dan Cetak Laporan (Paket) Transportasi lokal dalam rangka menghadiri undangan/koordinasi/kedin asan lainnya (Orang)			1	3.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
					5	1.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
	3.25.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					5.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12	5.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Supplies Computer dan Cetak Laporan (Paket) Transportasi lokal dalam rangka menghadiri undangan/koordinasi/kedin asan lainnya (Orang)			1	4.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
					5	1.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
	3.25.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						44.530.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		48.983.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
										NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	3.25.01.1.05.001 0		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12		(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar,CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12				
			Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja ASN dan Non ASN (Dokumen)			12	44.530.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					45.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		54.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0.00	100.00	50.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	60.00				
			Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundangan Undangan / Regulasi (Orang)			50	45.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.453.455.000,00	(SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		1.768.015.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			100.000	(SULAWESI SELATAN)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	120				
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			2145.000	(SULAWESI SELATAN)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2574				
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					23.905.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		26.295.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	12		(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar,CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12		
			Belanja Alat Listrik (Paket)			12	23.905.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					645.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		774.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	30	30	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	30			
			Alat Tulis Kantor (Paket)			12	45.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP Di Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Bahan Komputer (Paket)			12	60.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Operasional Kantor (Paket)			12	540.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP Di Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					70.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	24	10	28		(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar,CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP di Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	32		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja bahan dan alat kebersihan kantor (Paket)			12	50.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Dinas (Unit)			12	20.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					65.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		89.320.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30	10	10		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	10		
			Cetak dan Penggandaan Bahan Kantor (Paket)			12	50.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Cetak Spanduk Simbolis Sterofoam (Buah)			100	15.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					117.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		140.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12			
			Makan dan Minum Jamuan Tamu (Orang)			2.145	117.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					530.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar , SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		628.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12		
			Makan dan Minum Rapat (Laporan)			12	105.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Perjalana Dinas Dsalam Daerah Dalam Rangka Menghadiri Undangan/Koordinasi/Kegi atan Kedinasan Lainnya (Orang)			189	265.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.06.001 0		Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat/Kedinasan Lainnya (Orang)			20	160.000.000,00	(Jakarta dan Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.550.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Supplies Computer dan Cetak Laporan (Paket)			1	2.550.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					351.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		395.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			9.000		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	11		
	3.25.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					41.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	17	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0.00	5	7		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Pengadaan Belanja Modal Alat Kantor (Paket)			2	20.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Pengadaan Belanja Modal Mebel (Paket)			5	21.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
	3.25.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Kegiatan Lapangan (Unit)			1	10.000.000,00	(Kantor Dinas KP di Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.07.000 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.25.01.1.07.000 9		Aplikasi pengelolaan Data Based pembinaan mutu produk (Paket)			1	200.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1		
			Pembangunan Gedung Kantor / Bangunan Perikanan Lainnya (Unit)			1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				4.803.467.661,00	(CDK Pangkajene Kepulauan Kab.				Organisasi Dinas Kelautan		5.402.829.127,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					163.000		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	163				
	3.25.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.043.072.017,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		825.433.483,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar,CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP Di Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12		
3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Belanja Internet/Telepon/Faxmille (Tahun)			1	120.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Tagihan Air (Tahun)			1	22.620.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Tagihan Listrik (Tahun)			1	900.452.017,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
							50.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	0	12		(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar,CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP Di Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12		
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			12	50.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
3.25.01.1.08.000 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.710.395.644,00	(CDK Pangkajene Kepulauan Kab.				Organisasi Dinas Kelautan		4.502.395.644,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	138	139	139		(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar,CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP Di Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	139		
			Belanja Iuran Jaminan / Asuransi (Orang)			139	237.608.664,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)			112	2.376.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Orang)			11	446.839.140,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, UPT Pelabuhan 2 Kab. Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Orang)			9	365.595.660,00	(CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Jasa Tenaga Supir (Orang)			7	284.352.180,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, UPT BPMPP Kota Makassar, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			36.000	3.343.932.178,00	(UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, (SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	42	2.765.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	17	1.902.332.178,00	(CDK Pangkajene Kepulauan Kab. (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar,CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Dinas KP Di Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	17	1.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Jabatan (Unit) Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Unit) Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kendaraan Dinas (Unit) Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Unit)			17	442.520.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						2	4.000.000,00	(CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Bosowasi Kab Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						2	20.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
						15	1.435.812.178,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					141.600.000,00	(UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	9	12				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	14		
	3.25.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional (Unit)			10	70.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Operasional Roda 4 (Unit)			5	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Roda 2 (Unit)			7	1.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Unit)			12	60.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
							50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2		
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi (Paket)			1	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.25.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.200.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	3	4		(SULAWESI SELATAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	5			
			Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Unit)			3	400.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Rehabilitasi Pagar BBU (DAK) (Paket)			1	400.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Rehabilitasi Mess Pegawai (DAK) (Paket)			1	400.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan						
	3.25.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)					Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	0	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	4			
			Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas Dan Sarana Komunikasi (Unit)			1	25.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
Pemeliharaan Jaringan Listrik (Unit)					1	25.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL					9,735,000,000.00				05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			8,756,750,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)			816593.220			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Jumlah produksi garam rakyat (Ton)			5000.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan (%)			56.890			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					6.722.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI			05.Pembangunan kualitas lingkungan	Organisasi Dinas Kelautan		5.597.850.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Jumlah Luas kawasan konservasi yang direhabilitasi (Ha)			61		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	70			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.02.1.01.000 1		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi			14		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	14		
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					452.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	39.00	971.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	0.00	0.00	37.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Perikanan, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan						
			Penyusunan Bahan Koordinasi dan Informasi kesesuaian kegiatan PKKPRL (Lokasi)			18	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Perikanan					
			Penyusunan Dokumen Materi Tehnis (Dokumen)			37	370.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
	Perjalanan Dinas Konsultasi Ke Pusat (Orang)			4	32.000.000,00	(Jakarta atau Luar Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan							
3.25.02.1.01.000 2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						800.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		1.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	569269.53	569269.53	247323.69		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Lainnya, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Lainnya, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Terkait Lainnya, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Lainnya	5966.43		
			Penyusunan rencana Pengelolaan KKKPD Liukang Tangaya dan kelembagaan pengelola (Paket)			1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Terkait Lainnya			
			Penyusunan rencana Pengelolaan KKKPD Liukang Tuppabiring dan Kelembagaan Pengelola (Paket)			1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Lainnya			
			Penyusunan RPZ Konservasi Maritim Pembuatan Phinisi di Bontobahari Bulukumba, Teluk Bone (Bone dan Sinjai) dan Pulau Kauna Kayuadi Kabupaten Selayar (Dokumen)			3	600.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholer Lainnya			
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					5.370.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholer Lainnya		2.826.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	75.9	73	61		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Lainnya, Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau, Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau , Wilayah Pesisir	70		
			Artificial Reef (Unit)			2	370.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau			
			Pantai Berseri (Lokasi)			7	350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir3. Stakeholder Lainnya			
			Penananaman Mangrove (Batang)			610.000	3.355.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wilayah Pesisir			
			Transplantasi Terumbu Karang (Paket)			7	1.295.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau			
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orang)	0.00	0.00	100		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Oragnisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau3. Stakeholder Lainnya	100		
			Sosialisasi Dan Edukasi Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat Pesisir (Orang)			100	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Oragnisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau3. Stakeholder Lainnya			
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					15.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			16.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.25.02.1.02.000 1		Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan (Rekomendasi)			41		(SULAWESI SELATAN)				1. Oragnisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau3. Stakeholder Lainnya	43			
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Oragnisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau3. Stakeholder Lainnya		10.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	0.00	0.00	37.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan/Pelaku Usaha	39.00				
		Rekomendasi dokumen pengeloaan ruang laut (Rekomendasi)			37	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan/Pelaku Usaha					
	3.25.02.1.02.000 2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					5.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)					1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan/Pelaku Usaha		5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	1	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan/Pelaku Usaha	4				
		Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Rekomendasi)			4	5.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan/Pelaku Usaha					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					2.998.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kec Bangkala Desa Palenggu, KAB. JENEPONTO), (Kecamatan Bangkala Kecamatan Arungkeke Kecamatan Tamalatea, KAB. JENEPONTO), (Takalar Lama, Kec. Mapsu; Desa Soreang, Kec. Mapsu; Desa Bontomanai, Kec. Marbo, KAB. TAKALAR), (Kabupaten Takalar, KAB. TAKALAR), (Desa Satanger Kecamatan Liukang Tangaya, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kecamatan Lahakkana			05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan/Pelaku Usaha		3.142.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil yang diberdayakan (Orang)			660.000		(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan/Pelaku Usaha	660		
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					2.598.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan/Pelaku Usaha		2.622.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	70	50	520		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan			Kelompok Usaha Garam Rakyat, Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	520		
			Pembangunan Tambatan Perahu (Unit) Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi, Pelaksanaan , Monitorng dan Pembinaan (Orang) Sarana Prasarana Garam Rakyat (Rumah Tunnel, Sarana Iodisasi Garam, Geomembran, Gudang Garam Mini) (Paket)			7	1.498.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau			
					50	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
						17	1.000.000.000,00	(Sullawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan			Kelompok Usaha Garam Rakyat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.25.02.1.03.000 2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	21.00	10.00	10.00	100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Garam Rakyat Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau	10.00	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Penguatan dan Pengembangan Kelompok (Kelompok)			10	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)								PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
			3.25.02.1.03.000 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu	25	20	10								300.000.000,00
	Pengembangan Akses Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Bagi Masyarakat Pesisir (Paket)					1	200.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	Pertemuan Mata Pencabarian Alternatif (MPA) (Kelompok)					10	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				27,305,000,000.00					04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata		32,619,100,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp) Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton) Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%) Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%) Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional			11933560000.00 0 442959.600 29.000 30.620 84.210		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau					
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			215.000	5.700.000.000,00	(SULAWESI SELATAN). (Kabupaten Maros dan Pangkep,				Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau	437	11.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah			99.000	(SULAWESI SELATAN)	Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau								
			3.25.03.1.01.000 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				400.000.000,00				(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.25.03.1.01.000 2		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	0.00	0.00	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Masyarakat Nelayan	1			
			Penyusunan Dokumen Ketersedian Stok Ikan di perairan sulawesi selatan dalam rangka penerapan penangkapan ikan yang terukur, Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan pemanfaatan SDI sampai dengan 12 mil , dan Dokumen PKS Perikanan Tangkap Di Laut (Dokumen)			2	400.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Masyarakat Nelayan				
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					830.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Masyarakat Nelayan		5.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	9.00	18.00	7		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Nelayan, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	20.00			
			Apartemen Ikan (Unit)			7	800.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Nelayan				
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi, Pelaksanaan, Monitoring (Orang)			10	30.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
		3.25.03.1.01.000 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					4.470.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		6.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	579.00	381.00	200.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan, Kelompok Usaha Bersama / Nelayan, Kelompok Usaha Bersama (Nelayan), Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	400		
				Alat Penangkapan Ikan (Unit)			50	2.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Mesin Kapal Perikanan (Unit) Pembinaan KUB (Pertemuan/Sosialisasi Kenelayanan) (Orang) Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (Rumpon, GPS, Fish Finder) (Unit) Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi , Pelaksanaan, Monitoring , Pembinaan (Orang)			30	750.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Bersama (Nelayan)			
						300	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Bersama / Nelayan			
						20	1.500.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan			
						11	70.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					889.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kelurahan Attangsalo Kecamatan Merioriawa, KAB. SOPPENG), (Kelurahan Batu- Batu Kecamatan Merioriawa, KAB. SOPPENG), (Kelurahan Kaca Kecamatan Merioriawa, KAB. SOPPENG), (Kelurahan Limpomajang Kecamatan Merioriawa, KAB. SOPPENG), (Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri, KAB. SOPPENG)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		1.760.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat			50		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	70		
			Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah (Kelompok)			6.000		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	10		
	3.25.03.1.02.000 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	0	0	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1		
			Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Danau Tempe (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.03.1.02.000 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					214.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	5	850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di PUD (Unit)	0.00	0.00	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Nelayan			
						1	214.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Nelayan			
	3.25.03.1.02.000 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					575.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kelompok Nelayan	70	800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Unit)	0.00	0.00	46		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan			
			Pembinaan KUB (Pertemuan/Sosialisasi Kenelayanan) (Orang)			150	75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan			
			Pengadaan Alat Tangkap (Unit)			46	500.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan			
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					39.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan	15	66.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Rekomendasi)			13.000		(SULAWESI SELATAN)			Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan				
	3.25.03.1.03.000 2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT					14.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kelompok Usaha Bersama / Masyarakat Nelayan	15	16.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	0.00	0.00	13		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Nelayan			
			Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan (Rekomendasi)			13	14.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Nelayan			
	3.25.03.1.03.000 3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT					25.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Nelayan	1	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dokumen)	0.00	0.00	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan			
			Cetak Bahan dan Validasi Data Perikanan Tangkap (Dokumen)			1	25.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan (Dokumen)			126.000		(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan	144		
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan (Dokumen)	125	0.00	125		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	143		
			Cetak Bahan persyaratan dan prosedur penerbitan TDKP (Dokumen)			125	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap			
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					20.612.000.000,00	(UPT Pelabuhan Wilayah 1 dan UPT Pelabuhan Wilayah 2, SULAWESI SELATAN), (Kec Galesong Utara Kabupaten Takalar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (KAB. BULUKUMBA), (KAB. MAROS)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap		19.608.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Pelabuhan)					6.000		(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	7			
Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola (Pelabuhan)					19.000		(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	19			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.03.1.06.000 1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan					223.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap		256.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	5	7	6		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Syahbandar Perikanan, 3. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	6		
			Koordinasi Pengelolaan SPDN Di Pelabuhan Perikanan (Lokasi)			27	30.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Dokumen)			6	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Pengelolaan manajemen kepelabuhanan perikanan (Orang)			10	18.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Temu Tehnis Kepelabuhanan / Kesyahbandaran Perikanan (Orang)			40	75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Syahbandar Perikanan, 3. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap			
	3.25.03.1.06.000 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan					20.254.000.000,00	(Kec Galesong Utara Kabupaten Takalar, SULAWESI SELATAN), (KAB. BULUKUMBA), (KAB. MAROS)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Syahbandar Perikanan, 3. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap		19.202.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	6.00	7.00	6.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan , Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, Oragnisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	7.00		
			Lanjutan Pembangunan Breakwater PPI Beba Tahap II (M3)			11.667	20.000.000.000,00	(Kec Galesong Utara Kabupaten Takalar, SULAWESI SELATAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Masyarakat Nelayan , Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan			
			Pembangunan Toilet Umum (MCK) PPI Bontobahari Maros (Paket)			1	40.000.000,00	(Sulawesi Selatan, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Oragnisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Rehab Gedung Kantor PPI Kajang (Unit)			1	214.000.000,00	(Kabupaten Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.03.1.06.000 3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						135.000.000,00	(UPT Pelabuhan Wilayah 1 dan UPT Pelabuhan Wilayah 2, SULAWESI SELATAN)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	17	19	19		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	19		
			Cetak Dokumen Kedatangan Kapal, Dokumen Persetujuan Berlayar, Dokumen Keberangkatan Kapal (Buah)			200	100.000.000,00	(UPT Pelabuhan Wilayah 1 dan UPT Pelabuhan Wilayah 2, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
Dukungan Layanan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan (Layanan)				19	35.000.000,00	(UPT Pelabuhan Wilayah 1 dan UPT Pelabuhan Wilayah 2, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.03.1.08.000 2		Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut Ikan dgn Ukuran Sampai dgn 10 GT di			4.000		(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	6		
		Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	6	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	2	0.00	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Nelayan			
						4	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Nelayan			
	3.25.03.1.09 3.25.03.1.09.000 2	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Nelayan	12	27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai			11.000		(SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Nelayan				
		Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Nelayan	12	27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0.00	0.00	11		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Nelayan				
						11	20.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Nelayan			
	3.25.03.1.10 3.25.03.1.10.000 2	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					25.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Nelayan	64	27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan			61.000		(SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Nelayan				
		Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT					25.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Nelayan	64	27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0.00	0.00	61		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan)				
			Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)			61	25.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan)			
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					7,653,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			11,345,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Nilai produksi perikanan budidaya (Rp)			21850160000.00 0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan)			
			Jumlah Produksi perikanan budidaya (Ton)			4331299.700			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan)			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)			85.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan)			
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)			101	50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan)	101	53.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.000 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pra Rekomendasi penerbitan ijin, Fasilitasi Pandawa dan usaha perikanan budidaya lainnya (Rekomendasi)	0.00	0.00	50	5.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan)	50	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						50	5.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pembudidaya			
	3.25.04.1.01.000 2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Rekomendasi penerbitan ijin, Fasilitasi Pandawa dan usaha perikanan budidaya lainnya (Rekomendasi)	0.00	0	50	10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pembudidaya	50	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						50	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pembudidaya			
	3.25.04.1.01.000 3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko Pembuatan buku Profil Usaha perikanan budidaya, leaflet dan info grafis media on line (Dokumen)	0.00	0.00	1	35.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pembudidaya	1	38.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						1	35.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)			10.000	20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12	22.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
								(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
		3.25.04.1.04.000 2	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		22.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi) Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)	0.00	0.00	10.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Usaha Pembudidaya Perikanan	12.00		
						10	20.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Usaha Pembudidaya Perikanan			
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)			301.000	2.658.000.000,00	(Kecamatan Pulau Sembilan, SULAWESI				Pelaku Usaha dan Pelaku Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Usaha Pembudidaya Perikanan	567	3.820.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah pembudidaya di kawasan konservasi dan laut yang dibina dan dipantau (Orang)			40.000		(SULAWESI SELATAN)			Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Usaha Pembudidaya Perikanan	50			
	3.25.04.1.05.000 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	25.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pembudidaya Perikanan	1	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pembuatan buku Profil perikanan budidaya, leaflet dan info grafis media on line (jasa pembuatan info grafis) (Paket)			1	25.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pembudidaya Perikanan			
			3.25.04.1.05.000 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	382.00	565.00	300.00	2.300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. Pembudidaya Perikanan	
								(Kabupaten Bantaeng, Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Takalar, Wajo, Kota Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Kelompok Pembudidaya Perikanan, Kelompok Pembudidaya, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.25.04.1.05.000 4		Kebun blbit rumput laut (Unit)			5	250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Kelompok Pembudidaya Perikanan				
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Pembinaan (Orang)			10	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan						
			Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut (Unit)			295	2.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok Pembudidaya						
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						200.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)				Kelompok Pembudidaya	1	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
				Pengadaan Blbitt, Pakan Operasional KJA di Laut (Paket)			1	200.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
	3.25.04.1.05.000 6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						93.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	284.00	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	284.00	284.00	284.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pembudidaya Perikanan					
				Pengujian Residu (Dokumen)			234	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pembudidaya Perikanan					
				Uji PCR benur (Peralatan alat uji/tes kit PCR dan separuh bahan kimia, perlengkapan lab) (Dokumen)			50	43.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya					
	3.25.04.1.05.000 7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						40.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	60	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jumlah Pembudidaya (Orang)				70	30	40		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Pembudidaya						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Temu Tehnis dan Koordinasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Orang)			40	40.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Pembudidaya			
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan			100	4.925.000.000,00	(BBI Sentral Lajoa Kabupaten Soppeng, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pembudidaya	100 19800000	7.450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah produksi nener / benur yang berkualitas			18700000.000		(SULAWESI SELATAN)		Masyarakat Pembudidaya					
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan di			127.000		(SULAWESI SELATAN)		Masyarakat Pembudidaya					
	3.25.04.1.06.000 1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.175.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Pembudidaya		3.550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	33	22		(Kabupaten Gowa, Luwu Utara, Enrekang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Bone, Maros, Kota Palopo dan UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Pembudidaya, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	37		
Dukungan Jasa Tenaga Pendamping Budidaya (Orang)					11	30.000.000,00	(Kabupaten Gowa, Luw Utara, Enrekang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja UTraa, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Bone, Maros , Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Dukungan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi, Pelaksanaan, Monitoring, Pembinaan (Orang)			10	80.000.000,00	(Kabupaten Gowa, Luwu Utara, Enrekang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Bone, Maros, Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.04.1.06.000 2			Mini Bioflock (Unit)			20	1.800.000.000,00	(Kabupaten Gowa, Luwu Utara, Enrekang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Bone, Maros, Kota Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Pembudidaya			
			Rehabilitasi Laboratorium Uji (Unit)			1	200.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
			Rehabilitasi Pagar (Paket)			1	65.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.750.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (BBI Sentral Lajoa Kabupaten Soppeng, SULAWESI SELATAN)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	115	3.900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	115	2	107		(SULAWESI SELATAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan		Masyarakat Pembudidaya, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Organisasi Dinas Kelautan dan PerikananMasy arakat Pembudidaya Perikanan					
		Farm Field Garden (Paket)			1	400.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Organisasi Dinas Kelautan dan PerikananMasy arakat Pembudidaya Perikanan					
		Pengadaan Induk , Bibit, Pakan, Obat Obatan Budidaya Ikan Air Tawar (Paket)			1	200.000.000,00	(BBI Sentral Lajoa Kabupaten Soppeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
		Pengadaan Pakan, Bibit , Obat Obatan Operasional Budidaya Udang (Paket)			3	800.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					
		Pengembangan Budidaya Berbasis Kawasan (Lokasi)			100	1.100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Pembudidaya					
		Penyediaan Benur dan Induk (DAK) (Paket)			1	100.000.000,00	(UPT PBAPL Bojo Kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan		Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi/Pelaksanaan/Monitoring/Distribusi Benih/Pembinaan (Orang)			40	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					3,819,260,000.00							3,905,750,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan			
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (Dokumen) Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) (Kelompok)			1.424 13.000	3.724.260.000,00	(Kota Makassar Kabupaten Maros, Kabuoaten Pangkep, kabupaten Barru, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Desa Darubiah Kecamatan Bontohahari. KAR.			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan		3.755.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen) Pengawasan Ruang Laut (Dokumen)	1	1	3 3	60.000.000,00 60.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Pelaku Usaha pengelolaan ruang laut 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Pelaku Usaha pengelolaan ruang laut	4	66.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.05.1.01.000 2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil					3.549.260.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Pelaku Usaha pengelolaan ruang laut		3.509.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	7.00	7.00	1400.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Laut, POKMASWAS Kelautan dan Perikanan, PPOKMASWAS Kelautan dan Perikanan	1400.00		
			Pemuda Cinta Bahari Anti Bom Bius Ikan (Lokasi)			7	350.000.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau			
			Pengadaan Perahu Pokmaswas (Unit)			6	1.284.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PPOKMASWAS Kelautan dan Perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.05.1.01.000 3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan perikanan tangkap (Dokumen)			905	1.555.260.000,00	(CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatappareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Laut			
			Perlengkapan Pokmaswas (Paket)			9	360.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan			POKMASWAS Kelautan dan Perikanan			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	1	12	45.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			POKMASWAS Kelautan dan Perikanan	12	80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya (Dokumen)			12	45.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2 Pelaku Usaha dan Pendukung Usaha pembudidaya				
	3.25.05.1.01.000 4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						70.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				11. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2 Pelaku Usaha dan Pendukung Usaha pembudidaya		100.000.000,00
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok)		14	7	13		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. POKMASWAS Kelautan dan Perikanan	13		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peningkatan Kapasitas POKMASWAS Aktif (Kelompok Masyarakat)			13	70.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. POKMASWAS Kelautan dan Perikanan			
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)									1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. POKMASWAS Kelautan dan Perikanan		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. POKMASWAS Kelautan dan Perikanan	26		
	3.25.05.1.02.000 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3.00	1.00	6.00	30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. POKMASWAS Kelautan dan Perikanan	6.00	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan di PUD		
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di PUD (Dokumen)			6	30.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan di PUD			
	3.25.05.1.02.000 2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1.00	1.00	6.00	30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan di PUD	6.00	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
								(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya Perikanan Darat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.05.1.02.000 3		Pengawasan usaha perikanan budidaya di darat (Dokumen)			6	30.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya Perikanan Darat			
		Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					35.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya Perikanan Darat		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	4	1	14			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Pelaku usaha pengolah hasil perikanan 2. Pelaku usaha pemasar hasil perikanan	14		
		Pengawasan usaha perikanan pengolah dan pemasar (Dokumen)			14	35.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Pelaku usaha pengolah hasil perikanan 2. Pelaku usaha pemasar hasil perikanan				
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1,630,400,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,815,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp)			391940000.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Pelaku usaha pengolah hasil perikanan 2. Pelaku usaha pemasar hasil perikanan			
			Produksi olahan ikan (Ton)			6150.430			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Pelaku usaha pengolah hasil perikanan 2. Pelaku usaha pemasar hasil perikanan			
			Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Pelaku usaha pengolah hasil perikanan 2. Pelaku usaha pemasar hasil perikanan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Pelaku usaha pengolah hasil perikanan 2. Pelaku usaha pemasar hasil perikanan		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan (Rekomendasi)			85.000		(SULAWESI SELATAN)			1. Pelaku usaha pengolah hasil perikanan 2. Pelaku usaha pemasar hasil perikanan	85			
	3.25.06.1.01.000 2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					25.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Pelaku usaha pengolah hasil perikanan 2. Pelaku usaha pemasar hasil perikanan		27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Rekomendasi SKP (Rekomendasi)	189.00	195.00	120.00		(SULAWESI SELATAN) (24 Kabupaten / Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UMKM Perikanan UMKM Perikanan	138.00		
	3.25.06.1.01.000 3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					25.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				UMKM Perikanan		27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Pembuatan profil perkembangan pengolahan dan pemasaran produk perikanan/data time series/leaflet (Dokumen)	0.00	0.00	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. UMKM Perikanan 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. UMKM Perikanan	1		
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.450.400.000,00	(UPT BPMPP Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Bantaeng, KAB. BANTAENG), (Kec Bacukiki Barat Kelurahan LumpuE dan Kelurahan Cappa Galung, KOTA PARE PARE)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. UMKM Perikanan		2.550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdaya saing (Unit Usaha)			120		(SULAWESI SELATAN)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. UMKM Perikanan	138			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.25.06.1.02.000 1		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Unit Usaha)			144		(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. UMKM Perikanan	144			
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2. UMKM Perikanan		550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	70	3	120		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Usaha Kelautan dan Perikanan, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha UMKM, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. UMKM KP, Daerah tinggi angka stunting, Kelompok Pengolah dan Kelompok Pemasar Hasil Perikanan, Masyarakat Nelayan /Pembudidayaan	120		
				Fasilitasi penyusunan SOP dan alur proses (Unit Usaha)			40	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. UMKM KP			
				GEMARIKAN (Paket)			1	80.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Daerah tinggi angka stunting			
				Keikutsertaan Dalam Pameran produk perikanan Untuk Mendorong investasi (Paket)			1	50.000.000,00	(Jakarta atau Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha UMKM			
				Pembinaan Cara Penanganan Mutu Hasil Perikanan Yang Baik (Unit Usaha)			40	20.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Nelayan /Pembudidaya /Pengolah /Pemasar Hasil Perikanan			
	Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran (Unit)			4	200.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Pengolah dan Kelompok Pemasar Hasil Perikanan						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.06.1.02.000 2			Penilaian sanitasi hygienis (Unit Usaha)			40	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Usaha Kelautan dan Perikanan			
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing					950.400.000,00	(SULAWESI SELATAN), (UPT BPMPP Makassar, SULAWESI SELATAN)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Usaha Kelautan dan Perikanan		2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (Unit Usaha)	100	130	144			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha UMKM, 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha UMKM KP, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	144		
		Akredittasi Laboratorium (Jenis)			2	200.000.000,00	(UPT BPMPP Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Konsultasi dan Koordinasi (Orang)			10	50.000.000,00	(Jakarta dan Provinsi Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Pembinaan Jaminan Mutu Produk (Unit Usaha)			24	74.400.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha UMKM KP				
		Pembinaan UMKM Perikanan SNI (Unit)			10	126.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha UMKM				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan Alat Laboratorium dan Kalibrasi Alat (Paket) Penyediaan Bahan Uji dan Pengujian Sampel Produk Perikanan (Sampel)			2 1.000	150.000.000,00 350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP			
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan (Laporan)				130.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Ujung ; Bacukiki Barat- 4.016270711725394 , 119.6224477420088 3; - 4.027758452000273 , 119.6361321673800 1, KOTA PARE PARE)				1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP		210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen) Koordinasi Distribusi Ikan mendukung stunting (Paket) Sistem Resi Gudang dalam rangka pengambilan sampel (Paket)	0.00	1	1 1	30.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	0.00	0.00	1	100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan/UMKM KP	1	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pameran distribusi produk perikanan (Paket)			1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan/UMKM KP			
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10,485,321,888.00							5,042,908,000.00	
	3.26	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN					10,485,321,888.00							5,042,908,000.00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					3,575,321,888.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,031,513,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata Ramah Muslim (Muslim Friendly)			0.700 12.500			DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			Pengelola Museum Provinsi Pengelola Museum Provinsi			
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola (Objek Wisata)			2	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Museum Provinsi Pengelola Museum Provinsi	2	286.485.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	0.00	0.00	2 1	50.000.000,00 50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola Museum Provinsi Daya Tarik Pariwisata Daya Tarik Pariwisata	2	286.485.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					3.375.321.888,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (gedung kesenian, SULAWESI SELATAN), (monumen mandala, SULAWESI SELATAN), (benteng somba opu, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kawasan wisata Bira, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kec.Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA), (kecamatan marusu, KAB. MAROS), (kecamatan bontoa, KAB. MAROS), (kecamatan mallawa, KAB. MAROS), (Desa Wisata Tompo Bulu Kecamatan Tondone (SULAWESI SELATAN)				Daya Tarik Pariwisata		1.395.864.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola			3				Daya Tarik Pariwisata	3					
	3.26.02.1.03.000 1	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi						50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Daya Tarik Pariwisata	1.00	75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan (Lokasi)	0.00	0.00	3.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab./kota							
		Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan (Lokasi)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab./kota							
	3.26.02.1.03.000 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi						50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab./kota	1.00	165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Provinsi dan Kab./kota							
			Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Provinsi dan Kab./kota						
	3.26.02.1.03.000 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						3.175.321.888,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Provinsi dan Kab./kota	9	959.478.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan	0	0	7	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Daerah (Kab./kota)							
Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)					3	2.050.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Daerah (Kab./kota)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Paket)			1	225.321.888,00	(Ilembang palipu kec. mengkendek kab. tana toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Daerah (Kab./kota)				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata di Kab./Kota (Paket)			1	200.000.000,00	(kecamatan bontoa, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Daerah (Kab./kota)				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata di Kab./Kota (Paket)			1	300.000.000,00	(Desa Karang- Karangan Kec. Bua, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Daerah (Kab./kota)				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata di Kab./Kota (Paket)			1	200.000.000,00	(kecamatan marusu, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Daerah (Kab./kota)				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata di Kab./Kota (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Daerah (Kab./kota)				
3.26.02.1.03.000 7		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi	1	2.00	2	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Daerah (Kab./kota)	2	196.386.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
		Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi	1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelola Destinasi Pariwisata									
		Pariwisata Provinsi (Lokasi)														
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)			2	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengelola Destinasi Pariwisata	2	349.164.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
							(SULAWESI SELATAN)					Pengelola Destinasi Pariwisata				
	3.26.02.1.04.000 8	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	0	0	2.00	75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pengelola Destinasi Pariwisata	1.00	173.691.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi (Unit Usaha)	2	75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Sektor Pariwisata								
	3.26.02.1.04.001 3		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	0	0	1.00	75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pelaku Usaha Sektor Pariwisata	1.00	175.473.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (Laporan)				1	75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Sektor Pariwisata								

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					4,340,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,242,049,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
			Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) (%) Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) (%)			100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Pelaku Usaha Sektor Pariwisata				
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Kali) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Kali)			7.875.000 102.500	4.340.000.000,00	(Kabupaten Maros, SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)				Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Pelaku Usaha Sektor Pariwisata	8.275.000 107.500	1.242.049.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	6.00	4.00	8.00 8	3.370.000.000,00 3.370.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Wisatawan dalam dan luar negeri Wisatawan dalam dan luar negeri	9.00	656.603.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan) Pendukung Event Dalam dan Luar Daerah (Paket) Pendukung Event Dalam dan Luar Daerah (Paket) Pendukung Event Dalam dan Luar Daerah (Paket) Pendukung Event Dalam dan Luar Daerah (Paket)	7	5	7.00 7 1 1 1 1	970.000.000,00 170.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Dalam dan Luar Negeri, Luar Wilayah) (kota belopa, KAB. LUWU) (Makassar, KOTA MAKASSAR) (makassar, KOTA MAKASSAR) (makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wisatawan dalam dan luar negeri Wisatawan dalam dan luar daerah Wisatawan dalam dan luar daerah Wisatawan dalam dan luar daerah Wisatawan dalam dan luar daerah	8.00	585.446.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
	3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				150,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			500,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
				Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)			18.750			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wisatawan dalam dan luar daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi pengembangan ekonomi kreatif (kabupaten/kota)			1	75.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Wisatawan dalam dan luar daerah Wisatawan dalam dan luar daerah	1	350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar	0	0	1.00	75.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wisatawan dalam dan luar daerah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	1.00	350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Laporan)			1	75.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif			
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi (kabupaten/kota)			1	75.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	1	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	0	0	1.00	75.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pelaku Ekonomi Kreatif	1.00	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)			1	75.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Ekonomi Kreatif			
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					2,420,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1,269,346,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Persentase SDM Sektor Pariwisata yang mendapatkan pelatihan (%) Presentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan			2.220 16.300			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Ekonomi Kreatif Pelaku Ekonomi Kreatif			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					1.620.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (Desa Rumbia, Desa Kassi, Desa Loka, Desa Bontoujung, Desa Kapita, Desa Bululoe, Desa Garassikang, Desa Bontosunggu, Desa Kareloe, Desa Bontorappo, Desa Kayuloe Barat, KAB. JENEPONTO), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI), (Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (Kabupaten Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)				Pelaku Ekonomi Kreatif		1.049.346.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5		(SULAWESI SELATAN)			Pelaku Ekonomi Kreatif	5			
	3.26.05.1.01.001 4	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata					400.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pelaku Ekonomi Kreatif	220.00	360.632.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	0	0	200.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat sekitar destinasi pariwisata/pen gelola desa wisata/kelompo k sadar wisata				
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Orang)			200	400.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat sekitar destinasi pariwisata/pen gelola desa wisata/kelompo k sadar wisata				
	3.26.05.1.01.001 6	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI					545.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat sekitar destinasi pariwisata/pen gelola desa wisata/kelompo k sadar wisata	350	533.114.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	0	0	300		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Sektor Kepariwisataan				
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI (Orang)			300	545.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Sektor Kepariwisataan				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.05.1.01.001 7	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Orang)	4	217	96	675.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM Sektor Kepariwisataaan SDM ekonomi kreatif	96	155.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			2	800.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (kecamatan somba opu, KAB. GOWA), (desa tamarunang kecamatan somba opu, KAB. GOWA), (DESA PITUSUNGGU, KEC. MA&RANG, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (DESA PACCEKKE, KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU, KAB. BARRU), (Pembangunan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi (SULAWESI SELATAN)			SDM ekonomi kreatif	2	220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	
	3.26.05.1.02.000 1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	4	400	165	800.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM ekonomi kreatif	175	220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					367,254,410,195.00							485,453,547,606.00	
	3.27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					334,477,255,720.00							440,158,247,508.00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					87,176,462,510.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			119,201,116,600.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			109.000 100.000 100.000									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11	1.233.853.644,00	(SULAWESI SELATAN)					11	4.091.116.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.00	3.00	3.00	350.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Petugas	3.00	1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)			3	350.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Petugas					
	3.27.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	2	2.00	238.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Petugas	2.00	75.810.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			2	238.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	petugas					
	3.27.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	2.00	9.700.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas	2.00	29.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					2	9.700.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Petugas						
	3.27.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	2.00	2.00	39.700.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Petugas	2.00	50.456.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					2	39.700.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Petugas						
	3.27.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	2.00	9.700.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas	2.00	35.050.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					2	9.700.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	petugas						
	3.27.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7.00	7.00	7.00		525.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		2.000.000.000,00
								(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas	7.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.01.000 7		Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD (Laporan)			7	525.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					61.253.644,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		900.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	0.00	4.00			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	4.00		
			Dokumen evaluasi kinerja SKPD (Dokumen)			4	61.253.644,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					73.842.258.560,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		96.310.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			14.000	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			petugas	14				
	3.27.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					73.495.258.560,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		95.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	700	700	700	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	700				
			gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)			700	73.495.258.560,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			
	3.27.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					213.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	1	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	1				
			Laporan keuangan akhir tahun SKPD (Laporan)			1	213.500.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			
	3.27.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					113.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	12	12.00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	12				
			Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD (Laporan)			12	113.500.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			
	3.27.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		210.000.000,00
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	1	1	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	1					
			dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (Dokumen)			1	20.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.020.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		3.100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Pelayanan Administrasi Aparatur (%)			100.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			petugas	100			
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					625.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		1.550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	1			
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)			1	625.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	1	1.550.000.000,00		
			Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi (Laporan)			1	395.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.114.350.306,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		12.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			petugas	2			
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.669.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		2.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	1.00	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	1			
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Laporan)			1	1.669.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		petugas	1	10.000.000.000,00		
			laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Laporan)			1	7.445.350.306,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas			
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.966.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas		3.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			petugas	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)				666.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas	48.00	1.600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				48.00	48.00	48.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	petugas					
						48	666.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	petugas					
	3.27.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)				1.300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas	5	1.600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				5	5	5.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	petugas					
						5	1.300.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	petugas					
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					181,459,324,600.00				03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah			235,948,255,908.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan			2.000 2.000 2.000 56.290.226.087		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas petugas petugas petugas				
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					95.500.000.000,00	((KECAMATAN MAROS BARU , KAB. MAROS), SULAWESI SELATAN), SULAWESI SELATAN), (DUSUN WONOSARI, DESA KAMANRE, KECAMATAN KAMANRE, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN), (DUSUN ROTTO, KELURAHAN PADANG SAPPa, KECAMATAN PONRANG, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN), (DESA BAU-BAU, KECAMATAN PITUMPANUA, SULAWESI SELATAN), (Se			03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	petugas		131.120.259.908,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.27.02.1.01.000 1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Luas Bantuan Pupuk (Ha)			127.250		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				petugas	133.61		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Bantuan Alsintan (Unit)			20.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				petugas	25000			
			Luas Bantuan Benih Hortikultura (Ha)			310.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				petugas	325500			
			Jumlah Bantuan Benih Perkebunan (Ha)			6.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				petugas	6000			
								95.500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				petugas			131.120.259.908,00
		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	0.00	0.00	2.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kelompok tani, Kelompok Tani, Petugas dan Kelompok Tani	2.00				
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Lembang Batu sura, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Umpungeng, Kec. Lalabata, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA BARING, KECAMATAN SEGERI, KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(kab, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Kec. LALABATA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Barang, Kec.Liliriaja, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					
		- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Paccerakang, Kecamatan Ponrang Selatan , Kabupaten Luwu, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Bulo-bulo, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Bontosunggu, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kabupaten, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Patane, Lembang Kole sawangan, Kec. Malimbong Balepe&, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Batu Lohe, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Lembang Sasak, Kec. Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA PUNRANGA, KECAMATA MA&RANG, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			14	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Dende, Kec. Denpina, Kabupaten Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kabupaten, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kabupaten, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN MAKKOWONG 2, DESA PATILA, KECAMATAN TANA LILI, KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng Palioi, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1.500	200.000.000,00	(kab, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA MANDALLE, KECAMATAN MANDALLE, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Labessi, Kec. Marioriwawo, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN BATUPAPA, DESA BUNGAPATI, KECAMATAN TANALILI, KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kec.Bua, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Kalabbirang, Kec. Turikale, Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Lembang Buntudatu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Dampang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(KELURAHAN SEGERI, KECAMATAN SEGERI, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			23	200.000.000,00	(desa dataran kec. bontoramba kab. jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Belopa Utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1	200.000.000,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Dannuang, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Orogading, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Tritiro, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN MANDIRI, DESA RANTEMARIO, KECAMATAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(Kab, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN MATAALLO, DESA PANCAKARSA, KECAMATAN MANGKUTANA, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(Desa Sukaraya Kec. Bone Bone, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Baru kec.Sinjai Tengah, Kab.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Batang, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Bila, Kec. Lalabata, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Buhung Bundang, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel.Macanre, Kec.Lilirilau, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Patallasang, Kec.Sinjai Timur, Kab.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Kaca, Kab.Marioriawa, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN KAPIPE, DESA BUNGAPATI, KECAMATAN TANALILI, KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Lamanda, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Tellulimpoe, Kec. Marioriwawa, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			100	200.000.000,00	(Se Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kabupaten, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Caramming, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Dusun Durian, Lembang Randanbatu, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Barang, Kec.Liliraja, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Kebo, Kec.Lilirilau, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Belopa, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN WONOSARI, DESA KAMANRE, KECAMATAN KAMANRE, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(DESA SAKKOLI, KEC SAJOANGING, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			10.000	200.000.000,00	(Desa/Kel Datara, Kec. Tompobulu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Palangiseng, Kec.Lilirilau, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Tamaona, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA PACCERAKANG, KECAMATAN PONRANG SELATAN, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN SURYA SAKTI, DESA KALPATARU, KECAMTAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			4	200.000.000,00	(Kabupaten, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(KELURAHAN BONTOMATENE, KECAMATAN SEGERI, KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			41	200.000.000,00	(Desa Bulogading, Kec. Bontonompo, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Tamalanrea, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Ekatiro, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			2.400	200.000.000,00	(semua wilayah pertanian, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(KAB. JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Bonto Salama, kec.sinjai barat, Kab.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DUSUN ROTTO, KELURAHAN PADANG SAPPA, KECAMATAN PONRANG, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(Kabupaten, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(DESA PARENRENG, KECAMATAN SEGERI, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(Kab, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Tumakke, Kel. Talion, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Lembang To&Pao, Kec.Rembon, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			2.780	200.000.000,00	(kab, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Labae, Kec. Citta, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Terasa Kec.Sinjai Barat, Kab.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Bijawang, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			25	200.000.000,00	(kab, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Umpungeng, Kec.Lalabata, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1.000	200.000.000,00	(KABUPATEN WAJO, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			200	200.000.000,00	(kabupaten maros, pangkep, barru, parepare, sidrap pinrang, sinjai bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			6.300	200.000.000,00	(kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(Poktan dan Gapoktan yang tersebar di kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu dan Palopo, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Pagalloang, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Kindang, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Bonto Marannu, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Barombong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			3	200.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			1.000	200.000.000,00	(Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Selatan, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kabupaten, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Batu Nilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Ha)			100	200.000.000,00	(Desa Dwitiro, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Kel. Balocci, Kec. Balocci, Kab. Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan Pupuk untuk luasan 1 Ha @ Rp. 720.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Desa Singa, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bimtek pengelolaan pupuk 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(kabupaten maros, kabupaten pangkep, kabupaten barru,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bimtek pengelolaan pupuk 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	200.000.000,00	(Biringkanaya Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- bimtek pengelolan alsintan @ 150.000.000,-/paket (Paket)			1	200.000.000,00	(Kabupaten Takalar dan Gowa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- bimtek pengelolan alsintan @ 150.000.000,-/paket (Paket)			1	200.000.000,00	(luwu timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			3	200.000.000,00	(Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab. enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Ceppaga Kecamatan Takkalalla, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			4	200.000.000,00	(Desa/Kel. Tadang Palie - Kec. Cempa - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(KELURAHAN TOBARAKKA, KECAMATAN PITUMPANUA, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA TUJU KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Bungoro Kab Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Pammanu, Kec,Belopa Utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			3	200.000.000,00	((Kecamatan Lau, KAB. MAROS), SULAWESI SELATAN), SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Lamarua Kecamatan Takkalalla, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Galesong Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kel bontoramba kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Tampumia Radda, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Dusun Iacikong Desa Gattareng Kab Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			7	200.000.000,00	(Desa. Balang Baru Kec. Tarowang Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Mangarabombang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kecamatan turikale, maros baru, mandai, marusu, lau bontoa, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Galesong, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kecamatan Labakkang, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. LALABATA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			5	200.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kelompok tani di desa Lumbewe Kec. Burau, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Marioriawa, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kelompok Tani Bulu Raya Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(bangkala, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kecamatan Pangkajene, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Watu Kecamatan Barebbo, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Combine harvester @ 600.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kelurahan kalosi kecamatan alla, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			2	200.000.000,00	(Desa Cammilo Kec. Kahu, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Tampak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kec. Saluputti, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			5	200.000.000,00	(kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(RT. Sadipe, Dusun Durian, Lembang Randanbatu, Kec. Makale Selatan. Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Lembang Buntudatu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Barombong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Bonto Rata, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Patane, Lembang Kole sawangan, Kec. Malimbong Balepe& Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Bungin KEC.Bungin, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Cultivator @ 26.000.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			20.000	200.000.000,00	(enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			3.000	200.000.000,00	(KECAMATAN ARUNGKEKE KAB. JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			4.500	200.000.000,00	(DESA TRENGGE TIMUR, KECAMATAN WOTU, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA CENDANA HITAM TIMUR, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			50	200.000.000,00	(Kecamatan Pattalassang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA KORONCIA, KECAMATAN MANGKUTANA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			125	200.000.000,00	(KAB. PANGKEP, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kelompok tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA CENDANA TIMUR, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA BANTILANG, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA LANGKEA RAYA, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA TEROMU, KECAMATAN MANGKUTANA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			24	200.000.000,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA RANTEMARIO, KECAMATAN TOMONI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA WAWONDULU, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA KASITURU, KECAMATAN MANGKUTANA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA SOROWAKO, KECAMATAN NUHA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA SUMBER MAKMUR, KECAMATAN KALENA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			112	200.000.000,00	(Kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA ALAM BUANA, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA BARUGA, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA KORONCIA, KECAMATAN MANGKUTANA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA MATANO, KECAMATAN NUHA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA MARGO MULYO, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA KAWATA, KECAMATAN WASUPONDA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA PEKKALOA, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA MEKARSARI, KECAMATAN KALENA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA MALEKU, KECAMATAN MANGKUTANA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA PATENCKO, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA PONGKERU, KECAMATAN MALILI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			1.000	200.000.000,00	(Desa Lebani Kec. Belopa Utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			1.600	200.000.000,00	(DESA BAU-BAU, KECAMATAN PITUMPANUA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA TADULAKO, KECAMATAN TOMONI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA MARGOLEMBO, KECAMATAN MANGKUTANA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Kelompok)			8	200.000.000,00	(kab, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA ASULI, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			130	200.000.000,00	(kab, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA WASUPONDA, KECAMATAN WASUPONDA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA LANGKEA RAYA, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DEA LEDU LEDU, KECAMATAN WASUPONDA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA MANTADULU, KECAMATAN ANGKONA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA CENDANA HITAM TIMUR, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA PURWOSARI, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA PANCA KARSA, KECAMATAN MANGKUTANA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA TIMAMPU, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA TAMPINNA, KECAMATAN ANGKONA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA TARABBI, KECAMATAN MALILI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA KORONCIA, KECAMATAN MANGKUTANA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA PURWOSARI, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(Desa Batu Putih Kec. Burau, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA ALAM BUANA, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			2.500	200.000.000,00	(18 Kecamatan se kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA NONBLOK, KECAMATAN KALENA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			20	200.000.000,00	(Kab Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA KERTO. KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			168	200.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(Lembang Batu Sura&, Kec. Rembon, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA PARUMPANAI, KECAMATAN WASUPONDA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA MANUNG GAL, KECAMATAN TOMONI TIMUR, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA TIMAMPU, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA KAWATA, KECAMATAN WASUPONDA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA TABARANO, KECAMATAN WASUPONDA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA SOLO, KECAMATAN ANGKONA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA ASULI, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA MANGGALA, KECAMATAN MANGKUTANA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA WANASARI, KECAMATAN ANGKONA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			1	200.000.000,00	(KAB. MAROS, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA SUMBER AGUNG, KECAMATAN KALENA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			50	200.000.000,00	(Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA LIOKA, KECAMATAN TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA BALEKEMBANG, KECAMATAN MANGKUTANA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- handsprayer @ 900.000,- /unit (Unit)			25	200.000.000,00	(DESA SUMBER MAKMUR, KECAMATAN KALENA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			3	200.000.000,00	(KECAMATAN TELLULIMPOE, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Maccope, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			5	200.000.000,00	(kab, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			4	200.000.000,00	(Lembang Baruppu Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Tuju, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Pallengu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			10	200.000.000,00	(dusun bungung tompo desa tanjungnga kec. turatea turatea kab. jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Dusun Amung, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kab. Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA COPPO TOMPONG, KECAMATAN MANDALLE, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			2	200.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			3	200.000.000,00	(Kecamatan Galesong Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Patane, Lembang Kole sawangan, Kec. Malimbong Balepe& Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Soro Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			5	200.000.000,00	(Desa Langi, Kec. Bontocani, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			18	200.000.000,00	(18 kecamatan sekabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Bungin Kec. Bungin, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA COPPO TOMPONG, KECAMATAN SEGERI, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(KAB. WAJO, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Lembang Maroson, Kec. Rembon, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			7	200.000.000,00	(Kelompok Tani Mamminasae 3 Desa Kalibong Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			13	200.000.000,00	(Desa Tarowang Kec. Galesong Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			3	200.000.000,00	(Kecamatan Pattalassang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			2	200.000.000,00	(Desa, Kading Kec. Awampone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA COPPO TOMPONG, KECAMATAN MANDALLE, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Parenreng, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Tampak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kec. Saluputti, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			3	200.000.000,00	(Desa Hasanah Kec. Mappedeceng, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Taulo Kecamatan Alla, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Lembang Batu sura, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			2	200.000.000,00	(Kecamatan mappakasunggu, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Lembang Sasak, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			25	200.000.000,00	(kab, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(RT. To& Arra, Dusun Durian, Lembang Randanbatu Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			6	200.000.000,00	(Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kel. Tukamasea, Kec. Bantimurung, Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			20	200.000.000,00	(Kabupaten Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Dende, Kecamatan denpina, Kabupaten Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Lacinde Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Lembang Tapparan Utara, Kec. Rantetayo, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA COPPO TOMPONG, KECAMATAN MANDALLE, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Takku, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			7	200.000.000,00	(Kel/Desa. Salo - Kec. Watang Sawitto - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			2	200.000.000,00	(Kecamatan Sanrobone, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			50	200.000.000,00	(Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Lalabata Riaja Kecamatan Donri- Donri Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENGG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Lapie, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA BODDIE, KECAMATAN MANDALLE, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Padangloa, Desa Parenreng, kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			2	200.000.000,00	(kecamatan Mangarabombang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Taulan Kec. Bungin, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Soro Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Lembang To&pao, Kec. Rembon, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			10	200.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene & Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kecamatan tompobulu, kecamatan bantimurung, kecamatan mandai, kecamatan marusu, kecamatan bontoa kecamatan lau, kecamatan tanralili, kecamatan camba, kecamatan cenrana, kecamatan mallawa, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			23	200.000.000,00	(KABUPATEN WAJO, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Panritae, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			3	200.000.000,00	(Kecamatan Polongbangkeng Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Handtraktor @ 35.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			- Orientasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan petani pupuk 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket) - orientasi pengelolaan alsintan @ 200.000.000/paket (Paket) - orientasi pengelolaan alsintan @ 200.000.000/paket (Paket) pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (Laporan) - Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit) - Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit) - Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit) - Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit) - Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit) - Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit) - Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit) - Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(kabupaten maros, kota makassar,, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						4	200.000.000,00	(lingkungan tolo toa 2 kel. tolo timur kec. kelara kab. jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						1	200.000.000,00	(kabupaten maros, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						2	12.300.000.000,00	(Kabupaten, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas dan Kelompok Tani				
						4	200.000.000,00	(DUSUN WONOSARI, DESA KAMANRE, KECAMTAN KAMANRE, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						10	200.000.000,00	(seluruh wilayah kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						3	200.000.000,00	(Kabupaten Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						5	200.000.000,00	(kab pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						1	200.000.000,00	(Kel. Tukamasea, Kec. Bantimurung, Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						1	200.000.000,00	(desa sampulungan kecamatan galesong utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						1	200.000.000,00	(Kel/Desa. Tadokkong - Kec. Lembang - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						1	200.000.000,00	(kabupaten maros, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						1	200.000.000,00	(Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
						1	200.000.000,00	(Desa Sengka Kec. Bontonompo Selatan, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kel. Manakku, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Pompa air @ 36.000.000/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kel/Desa. Bittoeng - Kec. Duampanua - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa sumabu, Kec.Bajo, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			2	200.000.000,00	((((KECAMATAN MAROS BARU , KAB. MAROS), SULAWESI SELATAN), SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Goarie Kecamatan Merioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			5	200.000.000,00	(Kel. bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Desa Mario, Kecamatan Mare, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			1	200.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			10	200.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Traktor Roda 4 @ 410.000.000,-/unit (Unit)			4	200.000.000,00	(Desa Tombang Kec.Walenrang, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.27.02.1.02.000 1		Jumlah Sertifikat Penangkar Benih/Bibit (Sertifikat)			230.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Kelompok Tani	242			
			Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)			1391		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Kelompok Tani	1461			
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih					800.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kelompok Tani		2.139.420.000,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	500	500	500		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas, klp	525			
			Sertifikat benih (Sertifikat)			500	800.000.000,00	(kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas, klp				
	3.27.02.1.02.000 5	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan					85.159.324.600,00	(SULAWESI SELATAN)				Petugas, klp		102.688.576.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar	0	0	12		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani, Petugas dan klp	12			
			Bantuan Benih (Paket)			11	690.000.000,00	(KECAMATAN KEP. SANGKARRANG, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Tampak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kec. Saluputti, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kel.Balakia, Kec.Sinjai Barat, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Kg)			2.000	690.000.000,00	(Desa Bonto Baru, Kec. Pasimassungu Timur, Kab. Kep Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			11	690.000.000,00	(KECAMATAN KEP. SANGKARRANG, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			11	690.000.000,00	(KECAMATAN KEP. SANGKARRANG, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Desa Saotengah,Kec.Sinjai Tengah, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. Biringbulu dan Tompobulu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Desa Bulo-Bulo, Kec.Bulukumpa, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Kg)			2.000	690.000.000,00	(Desa Bonto Jati, Kec. Pasimassungu Timur, Kab. Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Tumakke, Kel. Talion, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			11	690.000.000,00	(KECAMATAN KEP. SANGKARRANG, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LALABATA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan Benih (Paket)			11	690.000.000,00	(KECAMATAN KEP. SANGKARRANG, KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(KELURAHAN SOMPE, KECAMATAN SABBANGPARU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(maros, sinjai, luwu, luwu utara, bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Desa Bongki Lengkese, Kec.Sinjai Timur, Kab.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kec. sinjai tengah, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Lembang Randanbatu, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kel/Desa. Sipatuo - Kec. Patampanua - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Desa Bongki Lengkese, Kec.Sinjai Timur, Kab.Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kecamatan Mangarabombang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Bibit)			20.000.000	690.000.000,00	(Kec. Bungaya, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kecamatan bontonompo kelurahan tamanyeleng, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Pohon)			3.000	690.000.000,00	(kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Tampak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kec Saluputti, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			3	690.000.000,00	(kab, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kecamatan Pattalassang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kecamatan Polongbangkeng Utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			2	690.000.000,00	(kab, KAB. BANTAENG) (Kel/Desa. Ulusaddang - Kec. Lembang - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(KOTA MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kecamatan Rantebua, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kecamatan Sanrobone, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Lembang Randanbatu, Kec.Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Pohon)			10.000	690.000.000,00	(Kec. Tobolo Pao, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			2	690.000.000,00	(kab, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LALABATA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(Kec. LALABATA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			Bantuan benih/bibit (Paket)			1	690.000.000,00	(kab, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan saran pasca panen perkebunan @ 100.000.000,-/paket (Paket)			1	690.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- Bantuan saran pasca panen tanaman pangan @ 100.000.000,-/paket (Paket)			1	690.000.000,00	(RT. To& Arra, Dusun Durian, Lembang Randanbatu, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- bimtek pengelolaan hasil produk hortikultura @ Rp. 150.000.000,-/paket (Paket)			1	690.000.000,00	(Takalar dan Gowa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- bimtek pengelolaan hasil produk hortikultura @ Rp. 150.000.000,-/paket (Paket)			2	690.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
			- bimtek pengelolaan hasil produk tanaman pangan @ Rp. 150.000.000,-/paket (Paket)			1	690.000.000,00	(Kecamatan Latimojong, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Bimtek pengembangan komoditi buah dan florikultura @ Rp. 150.000.000,-/paket (Paket) - Bimtek pengembangan komoditi sayuran dan tanaman obat @ Rp. 150.000.000,- /paket (Paket) - Bimtek pengembangan komoditi tanaman serealial @ Rp. 150.000.000,- /paket (Paket) - Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Penangkar tanaman perkebunan @ Rp. 150.000.000,-/paket (Paket) - Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Penangkar tanaman perkebunan @ Rp. 150.000.000,-/paket (Paket) - Bimtek peningkatan kapasitas petugas dan petani dalam sertifikasi dan pengawasan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura @ Rp. 200.000.000,-/paket (Paket) - orientasi dalam rangka pengolahan hasil produk hortikultura @ Rp. 150.000.000,-/paket (Paket) - orientasi dalam rangka pengolahan hasil produk hortikultura @ Rp. 150.000.000,-/paket (Paket) pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura, tanaman pangan,dan perkebunan (Laporan) - Penyediaan Sarana dan Perakitan Bibit Hortikultura @ Rp. 200.000.000,-/paket (Paket) - Penyediaan Sarana dan Perakitan Bibit Hortikultura @ Rp. 200.000.000,-/paket (Paket)			1	690.000.000,00	(DESA BUNGAEJAYA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						1	690.000.000,00	(Kabupaten takalar dan Gowa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						1	690.000.000,00	(Makassar dan Sekitarnya, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						1	690.000.000,00	(kab, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						1	690.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						1	690.000.000,00	(Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						1	690.000.000,00	(Tampak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kec. Saluputti, Kab Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						1	690.000.000,00	(Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						12	9.259.324.600,00	(kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas dan klp			
						1	690.000.000,00	(desa parippung kec. barebbo kab. bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
						1	690.000.000,00	(Lembang Pata&padang Kec. Sanggalangi, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					60,241,468,610.00				03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah			73,608,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Rasio Luas Areal Pertanian Yang Terdampak Pembangunan			0.008			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani			
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian					60.241.468.610,00	(DUSUN KAPIPE, DESA BUNGAPATI, KECAMATAN TANA LILI, KABUPATEN LUWUW UTARA, SULAWESI SELATAN), (DESA PACCERAKANG, KECAMATAN PONRANG SELATAN, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN), (DUSUN MATAALLO, DESA PANCARKARSA, KECAMATAN MANGKUATANA, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN), (DUSUN WONOSARI, DESA KAMANRE, KECAMATAN KAMANRE, KABUPATEN LUWU. (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Kelompok Tani		73.608.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.1.01.000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Luas Areal yang Terdampak Pembangunan Prasarana Pertanian (Ha)			5000.000						Kelompok Tani	5.250		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	21.023.227.610,00	(SULAWESI SELATAN)				Kelompok Tani		41.208.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			- Bimtek Pengelolaan jalan tani 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT	1.00		
			pengelolaan jalan usaha tani (Dokumen)			1	2.338.834.120,00	(Buntu Paniki, Lembang Sapan Kua- kua Kec. Buntao, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Kolai Kec. Malua, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
								(Desa Mattoanging Kec. Kahu, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(desa mattenreng tellue kec.sinjai tengah, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Mebali, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Paroto Kecamatan Lilirilau, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Sanrego, Kec. Kahu, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Jl. Langsung kampung Tarantang Kel. Tubajeng Kec. Bajeng, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Anrihua, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(kecamatan turikale, maros baru, lau, bontoa, mandai, marusu, tanralili, mancongloe, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(kecamatan suli barat, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kecamatan Mangarabombang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Lembang Tapparan Utara, Kec. Rantetayo. Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			38	236.511.310,00	(Desa Mendatte, Kec. Anggeraja. Kab Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			4	236.511.310,00	(-, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(DESA RANTE MARIO KECAMATAN MALUA, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Baring, Kec. Segeri, Kab. Pangkep., KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			6	236.511.310,00	(kecamatan baroko, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kecamatan Galesong Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Tompo Bulu, Kec. Libureng, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kecamatan Polongbangkeng selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			8	236.511.310,00	(KELURAHAN MANARANG, KECAMATAN MATTIRO BULU, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Congko Kecamatan Marioriwawo, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Parangbugisi Kel. Buluttana Kec. Tinggimoncong, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kel. Boriappaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep., KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Pattiro, Kec. Dua Boccoe, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(kecamatan Bajeng barat, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			10	236.511.310,00	(Kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kel. Bentengnge, Kec. Watang sawitto, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(kel. padakkalawa, kec. mattirobulu, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(DESA PANDUNG BATU KECAMATAN BARAKA, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Macanang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(DUSUN MANDIRI, DESA RANTEMARIO, KECAMATAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Pangli Selatan, Kecamatan Sesean, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Ponre Ponre, Kec. Libureng, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			12	236.511.310,00	(Kel/Desa. Cipo Takari - Kec. Panca Rijang - Kab. Sidenreng Rappang, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Lembang Palipu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(kecamatan Sanrobone, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			11	236.511.310,00	(desa tellulimpoe kec. marioriawa, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kel. Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros., KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Baruppu Selatan, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Angka)			1	236.511.310,00	(Desa Padakkalawa Kec. Mattirobulu, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Mattirowalie, Kec. Libureng, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kecamatan Wotu, Desa Madani, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(kecamatan Bontonompo, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Lamoncong, Kec. Bontocani, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Tangke Bajeng. Kecamatan Bajeng. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(DESA PACCERAKANG, KECAMATAN PONRANG SELATAN, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(DUSUN SURYA SAKTI, DESA KALPATARU, KECAMATAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kecamatan Pallangga, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(desa saohiring kec sinjai tengah, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(desa pattongko kec. sinjai tengah, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Bungin kecamatan Bungin, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(desa galesong timur kecamatan galesong kabupaten takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Kalimporo kecamatan Bangkala, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Bune, Kec. Libureng, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Erecinnong, Kec. Bontocani, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Leppangang, Kec. Patampanua, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(kecamatan Mangarabombang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kel. Kalabbirang, Kec. Minasate&ne, Kab. Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.27.03.1.01.000 4			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(desa maradekaya kecamatan bajeng kabupaten gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT				
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT				
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(DESA BUNTU KARYA, KECAMATAN PONRANG SELATAN, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT				
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Kecamatan Galesong, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT				
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	236.511.310,00	(Desa Lappabosse, Kec. Kajuara, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani							31.100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				KT		22.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1.00	1.00	1.00		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab, KT	1.00				
		- Bimtek Pengelolaan irigasi 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT					
		koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan rigasi di tingkat usaha tani (Dokumen)			1	3.268.135.632,00	(Kab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT					
		- Orientasi pengelolaan irigasi 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(kel. bontoa kec. binamu kab, jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT					
		- Orientasi pengelolaan irigasi 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			3	158.135.593,00	(Desa, Mappesangka kec. Ponre, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT					
		- Orientasi pengelolaan irigasi 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(desa kaluku kec. batang kab, jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT					
		- Orientasi pengelolaan irigasi 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Bonto manai kec bangkala kab.jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT					
		- Orientasi pengelolaan irigasi 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			10	158.135.593,00	(Desa, Sappewalie Kec. Ulaweng, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket) - Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)</												

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Beraingin Kecamatan Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			2	158.135.593,00	(KAB, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kel. Buntu Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Dusun Kuari Desa Asuli Kec. Towuti, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Pata&padang Kecamatan Sanggalangi, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Polongbangkeng Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DUSUN LAMACCONGI, DESA ARAJANG, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(1 paket di kecamatan bantimurung, 1 paket di kecamatan lau, 1 paket di kecamatan mandai, 1 paket di kecamatan tompobulu, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Karangan, Lembang Pata&padang, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Randan Batu, Lembang Pata&padang, Kecamatan Sanggalangi Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Issong Kalua& Kec. Buntao, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DESA PALLANTIKANG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Polongbangkeng Utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DUSUN LAMACCONGI DESA ARAJANG, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DESA LALLISENG, KECAMATAN KEERA, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Tallung Penanian, Kecamatan Sanggalangi, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Mattirowalie Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kel/Desa. Batu Mila - Kec. Maiwa - Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(desa saohiring kec. sinjai tengah, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kabupaten Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(kecamatan mangarabombang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			5	158.135.593,00	(Desa PATTIRO Kec.Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Issong Kalua& Kec. Buntao, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			6	158.135.593,00	(desa kassi kec. rumbia kab. jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			2	158.135.593,00	(tontonan. kecamatan anggeraja, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Buntu Labo& Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Leatung Matallo, Kec. Sanggalla& Utara Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Leatung Matallo, kecamatan Sangalla Utara, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Galesong Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Labawang Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan embung pertanian 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			3	158.135.593,00	(Desa, Matammpa Bulu Kec. Lamuru, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Patane, Lembang Kole sawangan, Kec. Malimbong Balepe&, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kec. LALABATA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DUSUN WONOSARI, DESA KAMANRE, KECAMATAN KAMANRE, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Buareng, Kec. Kajuara, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DESA PACCERAKANG, KECAMATAN PONRANG SELATAN, KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			12	158.135.593,00	(DESA TOMPOBULU KECAMATAN RUMBIA KAB. JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Raja Mawellang Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DUSUN BA&KA DESA PUNDILEMO, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			2	158.135.593,00	(Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DUSUN MATAALLO, DESA PANCAKARSA, KECAMATAN MANGKUATANA, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Matajang, Kec. Kahu, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Dusun Durian, Lembang Randanbatu, Kec. Makale SelataN, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			6	158.135.593,00	(kecamatan enrekang. kab enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Tabbaja Kec.kamanre, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DESA MALIMPUNG, KECAMATAN PATAMPANUA, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Baruppu Benteng Batu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Bau, Kec. Bituang, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Buntu Datu, Kec. Mengkendek, Kab.Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			5	158.135.593,00	(DESA LOKA KECAMATAN RUMBIA KAB. JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Pondingao, kecamatan Masanda, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa MAttirowalie Kec. Bontocani, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Bontosunggu Kel. Je&nebatu Kec. Bungaya, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan irigasi perpipaan 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Banri Manurung Kecamatan Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			5	158.135.593,00	(Desa BANRIMANURUNG Kec.Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Biangkeke, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Sanreseng Ade Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Turatea Kec Tamalate Kab Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa BALUMBUNGAN Kec.Bontoramba, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kabupaten Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Beroangin kEcamatan Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Marioritengnga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DESA PASELLORENG, KECAMATAN GILIRENG, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Borong Tala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Benteng Gantarang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DESA PALLANTIKANG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(desa balumbungan Kec bontoramba kab jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Kassi Kec Rumbia Kab Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kel Pabiringa Kec Binamu Kab Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Watu Kecamatan Barebbo, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Bontoraja, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(KECAMATAN SINJAI SELATAN, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(kecamatan turikale, kecamatan mandai, kecamatan marusu, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Watu Kecamatan Barebbo, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Maccini baji kec Batang kab Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(KAB, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(KELURAHAN EMPOANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Pallantikang Kec. Bangkala, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Jennetallasa kecamatan Bangkala, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			2	158.135.593,00	(kelurahan balang beru kec. binamu kab. jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Bontoparang Kec. Mangarabombang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan empoang selatan kec binamu kab jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Marioritengnga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Salomeeko, Keceamatan Patimpeng , Kecamatan Kahu, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(KELURAHAN PANAIKANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Parigi Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan Monro- Monro Kec Binamu Kab jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare - Pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Pembangunan Sumur Bor 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa palajau kecamatan arung keke, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			9	158.135.593,00	(Desa PATTIRO Kec.Bangkala Barat, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DUSUN BATUPAPA, DESA BUNGAPATI, KECAMATAN TANA LILI, KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kab, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(DUSUN MINNA, DESA BUNGAPATI, KECAMATAN TANA LILI, KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Tumbang Datu, Kecamatan Sangalla, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng, KAB. SOPPENGG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Benteng Mamullu, Kecamatan Kapala Pitu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Bonto Manai, Kel. Labakkang, Kab. Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Makkuan Pare, Kecamatan Rantebua, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro Kab Pangkajene Dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Mai&ting Kecamatan Rindingallo, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Baruppu Utara, Kecamatan Baruppu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(kab pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Perintisan/pembangunan Jalan Tani 1 Paket @ Rp. 200.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Lembang Tumbang Datu, Kecamatan Sangalla Utara, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Biru, Kec. Kahu, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Padakkalawa Kec. Mattirobulu, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Langi, Kec. Bontocani, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng, KAB. SOPPENGG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(kecamatan bantimurung, kecamatan mandai, kecamatan marusu, kecamatan turikale, kecamatan simbang, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENGG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Galesong Utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(LINGKUNGAN BORONG UNTIA KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			3	158.135.593,00	(Desa salajangki Kec. Bontonompo Selatan, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Galesong, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Pattalassang, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Lanrisang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			2	158.135.593,00	(KAB, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(desa bontosunggu kecamatan bajeng kabupaten gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Tumakke, Kel. Talion, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Kalosi Kec. Towuti, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Sanrobone, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			30	158.135.593,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(LINGKUNGAN ALLUKA KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Lanosi Kec. Burau, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Umar, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Sukaraya Kec. Bone Bone, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			7	158.135.593,00	(Kel/Desa. Kaballangan - Kec. Duampanua - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Baringeng, Kec. Libureng, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Mappakasunggu, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(kecamatan bua, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kecamatan Galesong Selatan, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Padaelo Kec. Mattiرو Bulu, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Kalatiri Kec. Burau, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kel. Manarang, Kec. Mattiرو bulu, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa Salebba, Kec. Ponre, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kelurahan Appanang Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
			- Rehab jaringan irigasi tersier 1 Paket @ Rp. 150.000.000,- (Paket)			1	158.135.593,00	(Desa BULUSUKA Kec.Bontoramba, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			
3.27.03.1.01.001 0		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Gedung UPTD pertanian serta sarana pendukung yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (Unit)	5	5	5	8.118.241.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT	5	10.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					3,600,000,000.00				03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah			5,600,875,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Luas Serangan OPT Yang Tertangani Terhadap Luas			80.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KT			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					3.600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Uluere, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Gantarangkeke, KAB. BANTAENG), (JENEPONTO, KAB. JENEPONTO), (Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa, KAB. GOWA), (kelurahan Buluttana Kecamatan Tinggimoncon, KAB. GOWA), (Kec. Pallangga, Kab. Gowa, KAB. GOWA), (KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Pinrang, KAB. PINRANG)			KT		5.600.875.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Luas Serangan OPT Hortikultura yang tertangani (Ha)			322.300		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			KT	338.415			
			Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang tertangani (Ha)			25.233		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			KT	26.495			
			Luas Serangan OPT Perkebunan yang tertangani (Ha)			114.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			KT	119.700			
	3.27.05.1.01.000 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					2.600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				KT		3.550.875.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	154000	40.00	40.00		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Klp, Petugas, Petugas dan petani, Petugas petani, Petugas, petani, Petugas/petani	42.00		
			- Bimtek peningkatan kapasitas petugas dan petani dalam Pengendalian OPT perkebunan @ Rp. 200.000.000,-/paket (Paket)			2		(Kab/provinsi, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas petani			
			- Bimtek peningkatan kapasitas petugas dan petani dalam Pengendalian OPT perkebunan @ Rp. 200.000.000,-/paket (Paket)			1		(Kab, provinsi, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas dan petani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.05.1.01.000 2		- Bimtek peningkatan kapasitas petugas dan petani dalam Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura @ Rp. 200.000.000,-/paket (Paket)			1	150.000.000,00	(Kab/Prov, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas/petani			
			1			150.000.000,00	(Kab, provinsi, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Petugas, petani						
			40			1.700.000.000,00	(Sulsei, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Petugas						
			3			150.000.000,00	(Kec. Pallangga, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Klp						
			3			150.000.000,00	(Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Klp						
		- Bimtek peningkatan kapasitas petugas dan petani dalam Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura @ Rp. 200.000.000,-/paket (Paket)													
		luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ha)													
		- Pengadaan Bahan / alat pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura @ 200.000.000,-/Paket (Paket)													
- Pengadaan Bahan / alat pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura @ 200.000.000,-/Paket (Unit)															
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani					1.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Klp	5.00	2.050.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			0	0	5.00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Petugas							
					5	1.000.000.000,00	(sulsei, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Petugas						
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2,000,000,000.00				03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah			5,800,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Petani Yang Menerapkan Teknologi			50.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas			
			Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya			20.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas			
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					1.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Petugas		1.700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Penyuluh Pertanian Yang			150.000					Petugas				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.07.1.01.000 4	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					1.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Petugas		1.700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0	0	200		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas	200		
			peningkatan kapasitas penyuluh (Orang)			200	1.000.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas			
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					1.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (KECAMATAN TEMPE, KAB. WAJO), (KECAMATAN GILIRENG, KAB. WAJO), (Desa/Kel. Tonyamang - Kec. Patampanua - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG), (Kota Parepare, KOTA PARE PARE)				Petugas	4.100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani Yang diBina/di			10.000						Petugas			
	3.27.07.1.02.000 1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Petugas		2.100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	0	0	2		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Klp, petugas, Petugas, petugas/klp, Petugas, klp	2		
			- bimtek peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian @150.000.000,- /paket (Paket)			1	50.000.000,00	(sulsel, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas, klp			
			- bimtek peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian @150.000.000,- /paket (Paket)			13	50.000.000,00	(sulsel, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Klp, petugas			
			Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)			2	350.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas			
	3.27.07.1.02.000 2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Penyebaran informasi dan teknologi pertanian (Paket)			1	50.000.000,00	(sulsel, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petugas/klp			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	0	0	10		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas	10		
			Kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (Kelompok)			10	500.000.000,00	(sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas			
	3.27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					32,777,154,475.00							45,295,300,098.00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					19,324,170,793.00							27,940,300,098.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Rata - Rata Nilai SKP ASN Nilai Rata - Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			109.000 95.000 100.000									
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					350.000.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan , SULAWESI SELATAN), (Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)						1.300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			7				
	3.27.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25.361.300,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan , SULAWESI SELATAN)						130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	5.00	5.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	3.00			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			5	25.361.300,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah					
	3.27.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					8.558.500,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)						13.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	1.00	1.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	1.00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	8.558.500,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah					
	3.27.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					11.883.200,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)						19.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1.00	1.00	1.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	1.00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)			1	11.883.200,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah					
	3.27.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					15.115.900,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)						26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	1			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	15.115.900,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	1	17.045.600,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1	32.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				17.045.600,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
					(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
	3.27.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	6	12	168.903.300,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12	455.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				168.903.300,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
					(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
	3.27.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	48	4	4	103.132.200,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	4	624.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				103.132.200,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
					(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			7	14.581.704.444,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	7	19.560.022.866,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				(Makassar, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah										
	3.27.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	130	130	132	14.331.704.444,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	132	19.100.022.866,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				14.331.704.444,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
					(Makassar, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
	3.27.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2142	12	12	114.866.200,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				114.866.200,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									
					(Makassar, SULAWESI SELATAN)	Perangkat Daerah									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					24.147.300,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	12.00	80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	13	12.00	12.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			12	24.147.300,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.27.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					17.700.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	2.00	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	2.00	2.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			2	17.700.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.27.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					61.567.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	2	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	2	2		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			2	61.567.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.27.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					31.719.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	36	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	36	36	36		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			36	31.719.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.000.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	6	1.059.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			6		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah			
	3.27.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	1.00	19.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	3.00	1.00	1.00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
						1	10.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	11	455.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	19	11	11		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			2	20.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
	3.27.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					30.000.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	12	65.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	297	12	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	30.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
	3.27.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	12	520.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	12	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.521.981.976,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	3	5.120.777.232,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Perangkat Daerah				
	3.27.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					771.000.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	12	941.040.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	470072594	12	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	771.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
	3.27.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.750.981.976,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	12	4.179.737.232,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	107	12	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	2.750.981.976,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah				
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.484.373,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			5		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	5		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	10	10	594.753.273,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)			Perangkat Daerah	10	130.000.000,00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			10	594.753.273,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah				
	3.27.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29582260	20	20	100.000.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)			Perangkat Daerah	20	220.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan (Unit)			20	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah				
					3.27.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	6	15.731.100,00				(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			1				15.731.100,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah				
	2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					10,646,083,382.00							9,380,000,000.00
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi			1.160			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging			2.120			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur			2.730			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah			2.230			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta	Jumlah Ketersediaan Mutu Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan			3	9.310.445.682,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI (Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	3	4.140.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.02.1.04.000 4	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					9.310.445.682,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		4.140.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	6265.00	5.00	3.00		(Kabupaten, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok ternak	3.00		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan TanamanPakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)			5	9.310.445.682,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok ternak			
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi					1.260.604.400,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Bangkala Barat Kecamatan Bangkala Kecamatan Tamalataea Kecamatan Bontoramba Kecamatan Turatea Kecamatan Kelara Kecamatan Rumbia Kecamatan Batang Kecamatan Tarowang Kecamatan Arungkeke, KAB. JENEPONTO), (Kabupaten Bone, KAB. BONE), (Dinas Peternakan Dan Perikanan, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (Kecamatan Sinna				Kelompok ternak	4.850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah Akseptor (Ekor)			115000		(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)				Kelompok ternak	125000		
			Jumlah Kelahiran (Ekor)			69000		(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)				Kelompok ternak	75000		
			Jumlah Penyediaan Straw (Dosis)			149500		(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)				Kelompok ternak	162500		
			Jumlah Penyediaan Bull Eksotik (Ekor)			5		(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)				Kelompok ternak	5		
			Jumlah Ternak Yang Dipelihara Pada UPT PT HPT (Ekor)			186		(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)				Kelompok ternak	196		
			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak (Ton)			470		(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)				Kelompok ternak	500		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.02.1.05.000 4	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (UPT PIB PS DAN UPT PT HPT) (Laporan)	10.00	15.00	2.00	1.260.604.400,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN) (Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok ternak UPT PIB PS dan UPT PT HPT) UPT PIB PS dan UPT PT HPT)	2.00	4.850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Pengawasan Obat Hewan Di Tingkat Distributor Yang Diawasi Peredarannya			1	75.033.300,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN) (Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)				UPT PIB PS dan UPT PT HPT) UPT PIB PS dan UPT PT HPT)	1	390.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06.000 1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (BIDANG KESWAN DAN VETERINER) (Laporan)	3.00	3.00	3.00	75.033.300,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN) (Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT PIB PS dan UPT PT HPT) Masyarakat Masyarakat	3.00	390.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					586,189,700.00							3,230,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Nilai Produksi Hasil Ternak (Juta Rupiah)			10,248,954			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian					586.189.700,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Bangkala Barat Kecamatan Bangkala Kecamatan Tamalataea Kecamatan Bontoramba Kecamatan Turatea Kecamatan Kelara Kecamatan Rumbia Kecamatan Batang Kecamatan Tarowang Kecamatan Arungkeke, KAB. JENEPONTO), (Semua kecamatan, KAB. TAKALAR), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI), (Kabupaten Bone, KAB. BONE), (Desa Tondong Kura Kec. Tondong			Masyarakat		3.230.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.03.1.01.000 9		Jumlah Laporan Penyediaan Prasarana Pertanian (Laporan)			3		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat	3		
			Jumlah Sarana dan Prasarana UPT PMPP Yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat	1			
			Jumlah Sarana dan Prasarana UPT PIB PS Yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi			1		(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat	1			
			Jumlah Sarana dan Prasarana UPT PT HPT Yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi			1		(Kab. Maros, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat	1			
			Jumlah Sarana dan Prasarana UPT BK3H Yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat	1			
	3.27.03.1.01.000 9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					85.499.900,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		260.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.00	3.00	2.00		(Kabupaten, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Peternakan dan kesehatan hewan dan masyarakat	2.00		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)			2	85.499.900,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Peternakan dan kesehatan hewan dan masyarakat			
	3.27.03.1.01.001 3	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian					500.689.800,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Peternakan dan kesehatan hewan dan masyarakat		2.970.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0.00	6.00	2.00		(Kabupaten, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kawasan peternakan	2.00		
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)			2	500.689.800,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Kawasan peternakan			
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					2,011,627,000.00							2,945,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular			10 %			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kawasan peternakan			
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.318.877.600,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN), (KAB MAROS, PANGKEP, BARRU, BONE DAN KOTA PAREPARE, SULAWESI SELATAN)				Kawasan peternakan		2.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Dosis Vaksin dan Obat - Obatan dan Vitamin (PHMS) (Dosis)			260		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)			Kawasan peternakan	267.800			
	3.27.04.1.01.000 7	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.318.877.600,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Kawasan peternakan		2.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	3.00	4.00	24.00		(Kabupaten Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peternak	24.00		
						4	1.318.877.600,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peternak			
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Pemasukan Hewan Yang Diawasi Peredarannya (Ekor) Jumlah Pengeluaran Hewan Yang Diawasi Peredarannya (Ekor) Jumlah Pengawasan Pemasukan Produk Hewan Yang Diawasi Peredarannya Jumlah Pengawasan Pemasukan Produk Hewan Yang Diawasi Peredarannya Jumlah Pengeluaran Produk Hewan Yang Diawasi Peredarannya (Kg) Jumlah Pengawasan Pengeluaran Produk Hewan Yang Diawasi Peredarannya Jumlah Pengawasan Pengeluaran Produk Hewan Yang Diawasi Peredarannya			1735900 13120900 10980600 19500000 2100000 17890000 23000	183.114.400,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)				Peternak Peternak Peternak Peternak Peternak Peternak Peternak	500.000.000,00 1867800 13890900 11129000 19900600 2257000 18560900 24000		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN) (Laporan)	1196.00	12.00	12.00	183.114.400,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peternak Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayangannya ke provinsi lain	12.00	500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						12	183.114.400,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayangannya ke provinsi lain			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					509.635.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN), (UPT PMPP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR), (UPT PMPP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KOTA MAKASSAR)				Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain		195.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Unit Usaha Yang Dilakukan Sertifikasi (Laporan)			1		(Kabupaten/kota, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain	1			
			Jumlah Sampel Penyakit Hewan Yang Diuji (Sampel)			3700		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain	3750			
			Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan Yang Diterbitkan (Dokumen)			1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain	1			
			Jumlah Pelayanan Di Klinik Hewan (Ekor)			425		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain	450			
			Jumlah Pengambilan Sampel Pangan Hewani (Sampel)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain	125			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.27.04.1.03.000 2	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Sampel Pangan Hewani (Sampel)			980		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain	990			
			Jumlah Pengambilan Sampel Pakan dan Bahan Pakan (Sampel)			90		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain	110				
			Jumlah Pengujian Sampel Pakan dan Bahan Pakan (Sampel)			470		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan ternak dan hewan kesayanganya ke provinsi lain	480				
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan)	0.00	2.00	1.00		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan produk hewannya ke provinsi lain	1.00		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
				Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan (Laporan)			2	64.987.900,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan produk hewannya ke provinsi lain			
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				444.647.100,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat yang ingin mengeluarkan dan memasukkan produk hewannya ke provinsi lain	-		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPT PMPP dan UPT BK3H) (Dokumen)			2	444.647.100,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT PMPP dan UPT BK3H UPT PMPP dan UPT BK3H			
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					209,083,600.00							1,800,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Persentase Kelompok Tani / Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan			100 %			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT PMPP dan UPT BK3H			
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					209.083.600,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Bangkala Barat Kecamatan Bangkala Kecamatan Tamalataea Kecamatan Bontoramba Kecamatan Turatea Kecamatan Kelara Kecamatan Rumbia Kecamatan Batang Kecamatan Tarowang Kecamatan Arungkeke, KAB. JENEPONTO), (Semua kecamatan, KAB. TAKALAR), (Desa Pencong, Kec. Biringbulu, KAB. GOWA), (8 Kecamatan, KAB. SINIAI)				UPT PMPP dan UPT BK3H		1.800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.000 1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (Laporan)			2						UPT PMPP dan UPT BK3H	2		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	2.00	6.00	6.00	159.094.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				UPT PMPP dan UPT BK3H		1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)			6	159.094.000,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok ternak	6.00		
								(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok ternak			
	3.27.07.1.02.000 2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani					49.989.600,00	(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)				Kelompok ternak		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	17	30	30		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyuluh dan kelompok ternak	40		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (Kelompok)</i>			6	49.989.600,00	<i>(Dinas peternakan dan kesehatan hewan, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Penyuluh dan kelompok ternak</i>			
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					133,904,707,950.00							144,416,083,881.00	
	3.28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					133,904,707,950.00							144,416,083,881.00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					126,430,056,270.00							136,115,649,881.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			<i>Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti</i>			95 95 95			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah</i>			
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					850.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		975.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>			25		<i>(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>				<i>Instansi Pemerintah</i>	3		
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					370.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	2.00	2.00		<i>(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Instansi Pemerintah</i>	3.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.28.01.1.01.000 2		Pemenuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, narasumber/moderator/pe mbawa acara dan perjalanan dinas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)			2	370.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					100.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1			(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
	Pemenuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan perjalanan dinas koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				1	100.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah					
	3.28.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					25.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1			(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
			Pemenuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan perjalanan dinas koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	25.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
	3.28.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					25.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.01.000 5		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Pemenuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan perjalanan dinas koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			1	25.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					25.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
			Pemenuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan perjalanan dinas koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	25.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		3	15		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	16				
Pemenuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan perjalanan dinas koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)				15	25.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					280.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	4.00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	4.00			
			Pemenuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, narasumber/moderator/pe mbawa acara dan panitia, dan perjalanan dinas evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)			4	280.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					106.624.839.259,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		119.745.279.279,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			15	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	15				
	3.28.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					106.250.113.259,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		119.366.279.279,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	810.00	821.00	897.00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00			
			Penyediaan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulsel (Orang / Bulan)			897	106.250.113.259,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					63.500.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	1	24		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	24		
			Penyediaan belanja lembur koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Dokumen)			24	63.500.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					64.160.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
			Penyediaan bahan cetakan dan perjalanan dinas koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Laporan)			1	64.160.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					150.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	3	1		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
			Penyediaan perjalanan dinas pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan (Laporan)			1	150.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, dan perjalanan dinas penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran (Laporan)	18	14	12	97.066.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah	12	95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah (Laporan)			6	259.691.100,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah	6	210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Penyediaan kertas dan bahan komputer penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (Dokumen)	0	4	4.00	2.207.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah	4.00	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					180.150.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	20.00	6.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	10.00		
			Penyediaan jasa sertifikasi tanah dan perjalanan dinas koordinasi dan penilaian barang milik daerah (Dokumen)			6	180.150.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					67.490.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	2		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	2		
			Penyediaan biaya perjalanan dinas koorfinasi dan penilaian barang milik daerah (Laporan)			2	67.490.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4.495.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	2		
			Penyediaan kertas, bahan komputer dan bahan cetak buku kartu inventaris barang (Laporan)			2	4.495.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.348.700,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	16	4		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	4		
			Penyediaan kertas, alat tulis kantor, bahan komputer dan penggandaan laporan penatausahaan aset tetap (Laporan)			4	5.348.700,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					114.030.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			5		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	5		
	3.28.01.1.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					24.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	2		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	2		
			Penyediaan alat attendance face recognition (Unit)			2	24.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					90.030.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1.00		
			Penyediaan biaya perjalanan dinas monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)			1	90.030.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.673.280.700,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar,				Instansi Pemerintah		1.878.843.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)			7		(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	7		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					47.969.500,00	(UPT KPH Jeneberang Kab. Gowa, KAB. GOWA), (UPT. KPH. Jeneberang Jl. Poros Malino Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu, KAB. GOWA), (UPT KPH Walanae Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG), (UPT KPH Saddang I Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (UPT. KPH. Saddang I Jl. Pontiku No. 155 Makale, KAB. TANA TORAJA), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)			Instansi Pemerintah		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22.00	26	1.00	(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Instansi Pemerintah, Intansi Pemerintah	2.00					
			Penyediaan alat-alat listrik dan penambahan daya listrik kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Paket)			1	41.519.500,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Intansi Pemerintah					
			Penyediaan alat-alat listrik kantor UPT KPH Jeneberang (Paket)			1	2.550.000,00	(UPT KPH Jeneberang Jl. Poros Malino Sungguminasa Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Instansi Pemerintah					
			Penyediaan alat-alat listrik kantor UPT KPH Saddang I (Paket)			1	3.900.000,00	(UPT KPH Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Instansi Pemerintah					
	3.28.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					851.688.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan				Instansi Pemerintah		613.843.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	26.00	1.00		(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instalasi Pemerintah, Instansi pemerintah, Instansi Pemerintah	3.00		
			Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Paket)			1	17.816.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Operasional KPH (Paket)			1	520.158.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi pemerintah			
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor UPT KPH Awota berupa printer, AC dan tandon air (Paket)			1	22.000.000,00	(UPT KPH Awota Jl Beringin No. 5 B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor Dinas berupa komputer PC, laptop dan printer (Paket)			1	39.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor Dinas berupa mesin TIK, Scanner, AC dan Harddisk eksternal (Paket)			1	35.900.000,00	(Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT BSPTH berupa komputer PC dan printer (Paket)			1	22.000.000,00	(UPT BSPTH Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Angkona berupa laptop (Unit)			1	25.000.000,00	(UPT. KPH. Angkona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Bila berupa laptop, printer dan baterai drone (Paket)			1	25.500.000,00	(UPT KPH Bila Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Kab. Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Bulusaraung berupa laptop dan printer (Paket)			1	13.500.000,00	(UPT. KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Cenrana berupa LCD Proyektor (Paket)			1	18.920.000,00	(UPT. KPH. Cenrana Jl. Kawerang No. 19 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instalasi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Jeneberang berupa LCD Proyektor, GPS, Komputer PC dan printer (Paket)			1	26.010.000,00	(UPT KPH Jeneberang Jl. Poros Malino Sungguminasa Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Kelara berupa laptop (Paket)			1	8.080.000,00	(UPT KPH. Kelara Jl. Pelita No. 19 Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Saddang I berupa printer (Paket)			1	5.156.000,00	(UPT. KPH. Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Sawitto berupa AC (Paket)			1	16.000.000,00	(UPT KPH Sawitto Jl. Lasinrang No. 110 Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Tangka berupa komputer PC dan printer (Paket)			1	21.988.800,00	(UPT KPH Tangka Jl. H. A. Latief Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan peralatan kantor UPT KPH Ulubila berupa komputer PC dan printer (Paket)			1	34.660.000,00	(UPT KPH Ulubila Jl. Ahmad Yani No. 1, Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
							733.848.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	26.00	3.00		(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah	3.00		
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Paket)			1	277.403.500,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT BSPTH (Paket)			1	8.889.900,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Ajatappareng (Paket)			1	25.060.000,00	(UPT KPH Ajatappareng Jl. Sultan Hasanuddin No. 95 Kab. Barru, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Angkona (Paket)			1	9.707.600,00	(UPT. KPH. Angkona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Awota (Paket)			1	17.835.400,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Baliase (Paket)			1	25.320.000,00	(UPT. KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Bila (Paket)			1	7.962.400,00	(UPT KPH Bila Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Kab. Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Bulusaraung (Paket)			1	34.210.000,00	(UPT KPH Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Cenrana (Paket)			1	12.483.600,00	(UPT KPH Cenrana Jl. Kawerang No. 19 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Jeneberang (Paket)			1	33.399.000,00	(UPT KPH Jeneberang Jl. Poros Malino Sungguminasa Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Kalaena (Paket)			1	31.858.200,00	(KPH. Kalaena Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Bungapati Kec Tana Lili Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Kambuno (Paket)			1	25.306.000,00	(UPT KPH Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Kelara (Paket)			1	35.908.000,00	(UPT KPH Kelara Jl. Pelita No. 19 Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Bialo (Paket)			1	7.810.000,00	(UPT KPH Bialo Jl. Elang No. 9 Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Lamasari (Paket)			1	31.853.500,00	(UPT KPH Lamasari Jl. Opu Tosappaile No. 458 Kota Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Larona (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Latimojong (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Mata Allo (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Rongkong (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Saddang I (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Saddang II (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Sawitto (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Selayar (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Tangka (Paket)			1	10.070.000,00	(UPT KPH Larona Jl. Elang No. 4 Desa Langkea Raya Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
						1	18.265.200,00	(UPT. KPH. Latimojong Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
						1	3.969.500,00	(UPT KPH Mata Allo Jl. Pancaitana Bungawalie No. 11 Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
						1	29.467.600,00	(UPT. KPH. Rongkong Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
						1	4.950.600,00	(UPT KPH Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
						1	6.455.200,00	(UPT KPH Saddang II Jl. Budi Utomo No. 25 Rantepao Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
						1	3.355.800,00	(UPT KPH Sawitto Jl. Lasinrang No. 110 Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
						1	8.763.600,00	(UPT KPH Selayar Jl. Poros Bandara H. Aroeppala No. 85 Kec. Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
						1	17.088.800,00	(UPT KPH Tangka Jl. H. A. Latief Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.28.01.1.06.000 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Ulubila (Paket) Penyediaan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan makan minum rapat UPT KPH Walanae (Paket)			1	19.300.000,00	(UPT KPH Ulubila Jl. Ahmad Yani No. 1 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
					1	27.155.000,00	(UPT KPH Walanae Jl. Kayangan Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)					263.082.500,00	(UPT KPH Selayar Kab. Kepulauan				Instansi Pemerintah		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	
				20.00	26.00	5.00			(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	5.00		
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Paket)			1	106.650.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT BSPTH (Paket)			1	702.400,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Angkona (Paket)			1	8.800.000,00	(UPT. KPH. Angkona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Awota (Paket)			1	7.980.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah							
		Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Baliase (Paket)			1	2.400.000,00	(UPT. KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Bialo (Paket)			1	17.800.000,00	(UPT KPH Bialo Jl. Elang No. 9 Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Bila (Paket)			1	2.600.000,00	(UPT KPH Bila Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Kab. Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Bulusaraung (Paket)			1	9.000.000,00	(UPT. KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Jeneberang (Paket)			1	13.200.000,00	(UPT KPH Jeneberang Jl. Poros Malino Sungguminasa Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Kalaena (Paket)			1	6.800.000,00	(KPH. Kalaena Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Bungapati Kec Tana Lili Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Kambuno (Paket)			1	2.400.000,00	(UPT KPH Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Lamasi (Paket)			1	6.780.100,00	(UPT. KPH. Lamasi Jl. Opu Tosappaille No. 458 Kota Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Larona (Paket)			1	12.000.000,00	(UPT KPH Larona Jl. Elang No. 4 Desa Langkea Raya Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Rongkong (Paket)			1	13.200.000,00	(UPT. KPH. Rongkong Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Saddang I (Paket)			1	500.000,00	(UPT KPH Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Saddang II (Paket)			1	9.760.000,00	(UPT KPH Saddang II Jl. Budi Utomo No. 25 Rantepao Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.06.000 8		Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Selayar (Paket)			1	14.000.000,00	(UPT KPH Selayar Jl. Poros bandara H. Aroeppala No. 85 Kec. Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Tangka (Paket)			1	13.200.000,00	(UPT KPH Tangka Jl. H. A. Latief kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan cetak dan penggandaan UPT KPH Ulubila (Paket)			1	15.310.000,00	(UPT KPH Ulubila Jl. Ahmad Yani No. 1 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					57.495.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15.00	12.00	12.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	12.00		
			Penyediaan makan minum jamuan tamu kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Laporan)			12	57.495.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
3.28.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan						1.706.582.100,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan				Instansi Pemerintah		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	150.00	180.00		(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah	90.00			
		Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Laporan)			100	437.917.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT BSPTH (Laporan)			2	23.544.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Ajatappareng (Laporan)			12	51.300.000,00	(UPT KPH Ajatappareng Jl. Sultan Hasanuddin No. 95 Kab. Barru, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Angkona (Laporan)			12	40.000.000,00	(UPT. KPH. Angkona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Awota (Laporan)			12	31.240.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Baliase (Laporan)			12	46.510.000,00	(UPT. KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Bialo (Laporan)			12	50.653.000,00	(UPT KPH Bialo Jl. Elang No. 9 Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Bila (Laporan)			12	45.140.000,00	(UPT KPH Bila Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Kab. Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Bulusaraung (Laporan)			12	50.550.000,00	(UPT. KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Cenrana (Laporan)			12	35.000.000,00	(UPT. KPH. Cenrana Jl. Kawerang No. 19 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Jeneberang (Laporan)			12	47.227.800,00	(UPT KPH Jeneberang Jl. Poros Malino Sungguminasa Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Kalaena (Laporan)			12	75.640.000,00	(KPH. Kalaena Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Bungapati Kec Tana Lili Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Kambuno (Laporan)			12	62.000.000,00	(UPT KPH Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Kelara (Laporan)			12	53.000.000,00	(UPT KPH Kelara Jl. Pelita No. 19 Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Lamasi (Laporan)			12	75.640.000,00	(UPT. KPH. Lamasi Jl. Opu Tosappaile No. 458 Kota Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Larona (Laporan)			12	50.664.600,00	(UPT KPH Larona Jl. Elang No. 4 Desa Langkea Raya Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Latimojong (Laporan)			12	37.800.000,00	(UPT. KPH. Latimojong Jl. HOS Cokroaminoto No. 012 Kel. Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Mata Allo (Laporan)			12	34.035.300,00	(UPT KPH Mata Allo Jl. Pancaitana Bungawalie No. 11 Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Rongkong (Laporan)			12	46.200.000,00	(UPT. KPH. Rongkong Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Saddang I (Laporan)			12	67.370.000,00	(UPT KPH Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Saddang II (Laporan)			24	102.360.000,00	(UPT KPH Saddang II Jl. Budi Utomo No. 25 Rantepao Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Sawitto (Laporan)			12	32.790.000,00	(UPT KPH Sawitto Jl. Lasinrang No. 110 Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.28.01.1.06.001 0		Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Selayar (Laporan)			12	74.700.000,00	(UPT KPH Selayar Jl. Poros Bandara H. Aroeppala No. 85 Kec. Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Tangka (Laporan)			12	63.480.000,00	(UPT KPH Tangka Jl. H. A. Latief Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Ulubila (Laporan)			12	43.720.000,00	(UPT KPH Ulubila Jl. Ahmad Yani No. 1 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
			Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi UPT KPH Walanae (Laporan)			8	28.100.000,00	(UPT KPH Walanae Jl. Kayangan Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						12.614.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	50	14	2		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	5			
			Penyediaan alat tulis kantor penatausahaan arsip dinamis SKPD (Dokumen)			2	12.614.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					131.830.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (UPT KPH Awota Kab. Wajo, KAB. WAJO), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			6		(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	20		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0.00	0 .00	2.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (UPT KPH Awota Kab. Wajo, KAB. WAJO), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR),			Instansi Pemerintah, Instansi	2.00	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Penyediaan kursi kerja staf untuk operasional KPH (Paket)			1	32.330.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, ASN			
			Penyediaan lemari arsip UPT KPH Ulubila (Paket)			1	5.000.000,00	(UPT KPH Ulubila Jl. Ahmad Yani No. 1, Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan lemari piring UPT KPH Awota (Paket)			1	1.000.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemeritah			
			Penyediaan meja kerja staf, kursi kerja staf, sofa tamu, kursi rapat, lemari arsip dan rak arsip (Paket)			1	93.500.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					10.074.942.504,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan				Instansi Pemerintah		11.283.127.102,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.08.000 1		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)			4		(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	4		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.500.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	4		
			Penyediaan materai (Laporan)			4	5.500.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.00	1.00	12.00	881.882.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan (Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah Instansi pemerintah, Instansi Pemerintah, Intansi Pemerintah	12.00	551.623.655,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Laporan)			1	464.784.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT BSPTH (Laporan)			1	11.400.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Ajatappareng (Laporan)			1	39.000.000,00	(UPT KPH Ajatappareng Jl. Sultan Hasanuddin No. 95 Kab. Barru, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT. KPH Angkona (Laporan)			1	14.388.000,00	(UPT. KPH. Angkona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Baliase (Laporan)			1	13.750.000,00	(UPT. KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Bialo (Laporan)			1	15.000.000,00	(UPT KPH Bialo Jl. Elang No. 9 Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Bila (Laporan)			1	17.400.000,00	(UPT KPH Bila Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Kab. Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Bulusaraung (Laporan)			1	9.000.000,00	(UPT. KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Cenrana (Laporan)			1	33.600.000,00	(UPT. KPH. Cenrana Jl. Kawerang No. 19 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Jeneberang (Laporan)			1	20.160.000,00	(UPT KPH Jeneberang Jl. Poros Malino Sungguminasa Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Kalaena (Laporan)			1	15.000.000,00	(KPH. Kalaena Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Bungapati Kec Tana Lili Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Kambuno (Laporan)			1	4.800.000,00	(UPT KPH Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Kelara (Laporan)			1	15.300.000,00	(UPT KPH Kelara Jl Pelita No. 19 Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH KPH Awota (Laporan)			1	16.800.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Lamasi (Laporan)			1	12.000.000,00	(UPT. KPH. Lamasi Jl. Opu Tosappaille BNo. 458 Kota Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Larona (Laporan)			1	17.400.000,00	(UPT KPH Larona Jl. Elang No. 4 Desa Langkea Raya Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Latimojong (Laporan)			1	7.320.000,00	(UPT. KPH. Latimojong Jl. HOS Cokroaminoto No. 012 Kel. Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Mata Allo (Laporan)			1	14.400.000,00	(UPT KPH Mata Allo Jl. Pancaitana Bungawalie No. 11 Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Rongkong (Laporan)			1	8.820.000,00	(UPT. KPH. Rongkong Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Intansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Saddang I (Laporan)			1	12.600.000,00	(UPT KPH Saddang I Jl. Pontiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Saddang II (Laporan)			1	24.000.000,00	(UPT KPH Saddang II Jl. Budi Utomo No. 25 Rantepao Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Sawitto (Laporan)			1	10.159.000,00	(UPT KPH Sawitto Jl. Lasinrang No. 110 Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Selayar (Laporan)			1	15.801.000,00	(UPT KPH Selayar Jl. Poros Bandara H. Aroeppala No. 85 Kec. Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Tangka (Laporan)			1	10.800.000,00	(UPT KPH Tangka Jl. H. A. Latief Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Ulubila (Laporan)			1	17.400.000,00	(UPT KPH Ulubila Jl. Ahmad Yani No. 1 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan pembayaran listrik, air dan internet UPT KPH Walanae (Laporan)			1	40.800.000,00	(UPT KPH Walanae Jl. Kayangan Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	371	1	12		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN dan Outsourcing	12	10.726.503.447,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Penyediaan pembayaran gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian non ASN dan Outsourcing (Laporan)			12	9.187.560.504,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN dan Outsourcing			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.701.442.707,00	(MAKASSAR, SULAWESI SELATAN), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (UPT KPH Selayar Kab. Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (UPT KPH Kelara Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO), (UPT. KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23, KAB. MAROS), (UPT KPH Ajatappareng Kab. Barru, KAB. BARRU), (UPT KPH Walanae Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG), (UPT KPH Awota Kab. Wajo, KAB. WAJO)				Non ASN dan Outsourcing		1.698.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara (Laporan)			6		(Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)			Non ASN dan Outsourcing	8			
	3.28.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					3.768.246.707,00	(MAKASSAR, SULAWESI SELATAN), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Non ASN dan Outsourcing		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	31	31		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi Pemerintah	31			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.09.000 2		Penyediaan bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan/ operasional eselon III (Unit)			31	121.176.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan bahan bakar minyak, suku cadang, pembayaran pajak, bea dan perizinan, serta pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (Unit)			1	76.480.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan sewa kendaraan dinas jabatan dan operasional (Unit)			23	3.570.590.707,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					543.621.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN), (UPT KPH Selayar Kab. Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (UPT. KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23, KAB. MAROS), (UPT KPH Ajatappareng Kab. Barru, KAB. BARRU), (UPT KPH Walanae Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG), (UPT KPH Awota Kab. Wajo, KAB. WAJO), (UPT KPH Sawitto Kab. Pinrang, KAB. PINRANG), (UPT KPH Mata Allo Kab. Enrekang KAB. ENREKANG)				Instansi Pemerintah	840.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	76	421	165.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	499.00		
			Penyediaan bahan bakar minyak, suku cadang, pembayaran pajak, bea dan perizinan, dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan (Unit)			290	334.074.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Ajatappareng (Unit)			1	25.000.000,00	(UPT KPH Ajatappareng Jl. Sultan Hasanuddin No. 95 Kab. Barru, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Angkona (Unit)			1	20.000.000,00	(UPT. KPH. Angkona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Awota (Unit)			1	25.000.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Bulusaraung (Unit)			1	17.000.000,00	(UPT. KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Mata Allo (Unit)			1	10.000.000,00	(UPT KPH Mata Allo Jl. Pancaitana Bungawalie No. 11 Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Rongkong (Unit)			1	26.385.000,00	(UPT. KPH. Rongkong Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Saddang I (Unit)			1	32.630.000,00	(UPT KPH Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Sawitto (Unit)			1	10.000.000,00	(UPT KPH Sawitto Jl. Lasinrang No. 110 Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Selayar (Unit)			1	17.624.000,00	(UPT KPH Selayar Jl. Poros Bandara H. Aroeppala No. 85 Kec. Bontoharu Kab. Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan UPT KPH Walanae (Unit)			1	25.908.000,00	(UPT KPH Walanae Jl. Kayangan Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					65.275.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		38.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	85	30		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	30		
			Pemeliharaan AC, Komputer PC dan Printer (Unit)			90	60.900.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Penyediaan suku cadang mesin potong rumput UPT BSPTH (Unit)			5	4.375.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
							20.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		20.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	1		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
		Penyediaan jasa pemeliharaan jaringan internet (Unit)			1	20.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					249.300.000,00	(UPT KPH Kelara Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO), (UPT KPH Walanae Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG), (UPT KPH Bila Kab. Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (UPT KPH Sawitto Kab. Pinrang, KAB. PINRANG), (UPT KPH Mata Allo Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG), (UPT KPH Saddang I Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)				Instansi Pemerintah		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	6	8	(Kota Makassar, Kab. Tana Toraja, Kab. Enrekang, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Jeneponto dan Kab. Soppeng, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	4			
			Pembayaran retribusi sampah, asuransi bangunan gedung kantor dan pajak bumi dan bangunan (PBB) kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Unit)			1	58.800.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor UPT KPH. Bila (Unit)			1	30.000.000,00	(UPT KPH Bila Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Kab. Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor UPT KPH. Kelara (Unit)			1	40.000.000,00	(UPT KPH. Kelara Jl. Pelita No. 19 Kel. Empoang Kec. BinamuKab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor UPT KPH. Mata Allo (Unit)			1	50.000.000,00	(UPT KPH. Mata Allo Jl. Pancaitana Bungawalie No. 11 Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor UPT KPH. Saddang I (Unit)			1	8.500.000,00	(UPT KPH. Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor UPT KPH. Sawitto (Unit)			1	37.000.000,00	(UPT KPH. Sawitto Jl. Lasinrang No. 110 Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor UPT KPH. Walanae (Unit)			1	25.000.000,00	(UPT KPH. Walanae Jl. Kayangan Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0.00	10.00	55.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	4	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor berupa perbaikan toilet dan perbaikan pintu ruangan umpeg (Unit)			3	55.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					6,927,847,280.00				05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			5,292,514,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar			21 11.91 0.03 3.57			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah			
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					62.413.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran (%)			0.002		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	0.01		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.03.1.01.000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan					62.413.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi (Dokumen)	250	1000	1		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
			Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan (Dokumen)			1	62.413.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					122.775.000,00	(UPT KPH Awota Kab. Wajo, KAB. WAJO), (UPT KPH Sawitto Kab. Pinrang, KAB. PINRANG), (UPT KPH Mata Allo Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG), (UPT. KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta, KAB. LUWU UTARA), (UPT KPH Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)				Instansi Pemerintah		58.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan (%)			100.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	100			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.03.1.02.000 1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						122.775.000,00	(UPT KPH Awota Kab. Wajo, KAB. WAJO), (UPT KPH Sawitto Kab. Pinrang, KAB. PINRANG), (UPT KPH Mata Allo Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG), (UPT KPH Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA), (UPT. KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta, KAB. LUWU UTARA)				Instansi Pemerintah		58.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0.00	24	24.00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	24			
			Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPH)Pd KPH Awota (Dokumen)			1	2.550.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5 B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPH)Pd KPH. Baliase (Dokumen)			1	23.625.000,00	(UPT. KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPH)Pd KPH Kambuno (Dokumen)			1	33.500.000,00	(UPT KPH Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPH)Pd KPH Mata Allo (Dokumen)			1	30.000.000,00	(UPT KPH Mata Allo Jl. Pancaitana Bungawalie No. 11, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPH)Pd KPH Sawitto (Dokumen)			1	33.100.000,00	(UPT KPH Sawitto Jl. Lasinrang No. 110, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						99.180.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		30.029.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.03.1.03.000 2		Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (M3)			43000.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	43000		
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Ton)			4000.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	4000		
		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung					99.180.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		30.029.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	0	0	1		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
			Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung (Dokumen)			1	99.180.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					4.435.235.880,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan				Instansi Pemerintah		3.173.615.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
		Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman (Ha)			167.000		(Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Bulukumba, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	241			
	3.28.03.1.04.000 1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					50.000.000,00					Instansi Pemerintah		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.03.1.04.000 2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	1.00	1.00	1.00			(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1.00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
		Penyediaan kertas, cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas pengumpulan data dan informasi penyusunan RTnRL (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	485	450.00	76.00	3.405.265.880,00	(Kabupaten Maros, SULAWESI (Kab. Bantaeng, Kab. Barru, Kab. Bone, Kab. Enrekang, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Maros, Kab. Pinrang, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Soppeng, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Wajo, Kota Palopo, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Tani, Instansi Pemerintah, Kelompok Tani	155.00	2.150.950.000,00		
		Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Ajatappareng (Ha)			10	122.450.000,00	(UPT KPH. Ajatappareng Jl. Sultan Hasanuddin No. 95 Kab. Barru, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani				
		Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Angkona (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Angkona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani				
		Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Awota (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Awota Jl. Beringin No. 5 B Kab. Wajo, KAB. WAJO)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani				
		Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Baliase (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani				
		Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Bialo (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Bialo Jl. Elang No. 9 Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Bila (Ha)			10	122.450.000,00	(UPT KPH. Bila Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Sidrap/ Desa Telumae Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Bulusaraung (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Bulusaraung (Ha)			10	122.450.000,00	(UPT KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros/ Kab. Maros dan Kab. Pangkep, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Cenrana (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Cenrana Jl. Kawerang No. 19 Watampone Kab. Bone, KAB. BONE)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Jeneberang (Ha)			10	122.450.000,00	(UPT KPH. Jeneberang Jl. Poros Malino Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa/ Desa Timbuseng Kec. Pattalassang Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Jeneberang (Ha)			10	122.450.000,00	(UPT KPH. Jeneberang Jl. Poros Malino Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Kalaena (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Kalaena Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Bungapati Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara/ Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Kambuno (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Kelara (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Kelara Jl. Pelita No. 19 Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto/ Kab. Takalar, KAB. TAKALAR)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Kelara (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Kelara Jl. Pelita No. 19 Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Lamasi (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Lamasi Jl. Opu Tosapaile No. 458 Kota Palopo, KOTA PALOPO)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Larona (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Larona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, KAB. LUWU TIMUR)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Latimojong (Ha)			5	56.825.000,00	(UPT KPH. Latimojong Jl. HOSokroaminoto No. 012A Kel. Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Latimojong (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Latimojong Jl. HOS. Cokroaminoto No. 12 A Kel. Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu, KAB. LUWU)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Mata Allo (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Mata Allo Jl. Pancaitana Bungawalie No. 11 Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Rongkong (Ha)			5	61.225.000,00	(UPH KPH. Rongkong Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Saddang I (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Saddang II (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Saddang II Jl. Budi Utomo No. 25 Rantepao Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Selayar (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Selayar Jl. Poros Bandara H. Aroeppala No. 85 Kec. Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Tangka (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Tangka Jl. H.A. Latief Kel Biringare Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, KAB. SINJAI)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Ulubila (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Ulubila Jl. Ahmad Yani No. 1 Kab. Bone, KAB. BONE)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat UPT KPH. Walanae (Ha)			5	61.225.000,00	(UPT KPH. Walanae Jl. Kayangan Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng, KAB. SOPPENG)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Awota (Ha)			20	45.100.000,00	(Desa Arajang Kec. Gilireng Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Awota (Ha)			30	67.650.000,00	(Desa Abbanuange Kec. Maniangpajo Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Awota (Ha)			10	22.550.000,00	(Desa Waetuwo Kec. Tana Sitolo Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Baliase (Ha)			25	56.375.000,00	(Desa Sassa Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Bialo (Ha)			10	22.550.000,00	(Desa Tanuntung Kec. Hero Lange Lange Kab. Bulukumba, KAB. BULUKUMBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Bulusaraung (Ha)			10	22.550.000,00	(Desa Atang Salo Kec. Marang Kab. Pangkajene Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Cenrana (Ha)			30	67.650.000,00	(Desa Bonto Masunggu Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Lamasi (Ha)			100	225.500.000,00	(Desa Walenrang Kec. Walenrang Kab. Luwu, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Rongkong (Ha)			100	225.500.000,00	(Desa Tulak Tallu dan Desa Parara Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Rongkong (Ha)			25	56.375.000,00	(Desa Pengkendekan Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Sawitto (Ha)			50	112.750.000,00	(Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II UPT KPH. Ulubila (Ha)			40	90.200.000,00	(Desa Langi dan Desa Kahu Kec. Bontocani Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun I UPT KPH. Jeneberanh (Ha)			28	97.580.000,00	(UPT KPH. Jeneberang Jl. Poros Malino, Sungguminasa Kab. Gowa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani			
			Penyediaan bahan bangunan dan konstruksi, bahan bibit tanaman, upah kerja dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pembuatan bibit produktif (Laporan)			1	98.052.880,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Tani			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembuatan/ pemeliharaan tanaman hutan rakyat UPT. KPH Awota (Laporan)			1	3.400.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5 B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Tani			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembuatan/ pemeliharaan tanaman hutan rakyat UPT KPH. Bialo (Laporan)			1	26.945.000,00	(UPT KPH. Bialo Jl. Elang No. 9 Kab. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Tani			
			Penyediaan Bibit Tanaman Produktif UPT KPH. Saddang I (Batang)			1.200	42.000.000,00	(UPT KPH. Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.03.1.04.000 4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL (Dokumen)			24	167.738.000,00	(Kab. Bantaeng, Kab. Gowa, Kab. Sidrap, Kab. Barru, Kab. Maros, Kab. Takalar, Kab. Selayar, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja, Kab. Jeneponto, Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Pangkep, Kab. Enrekang, Kab. Toraja Utara, Kab. Palopo, SULAWESI SELATAN)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Instansi Pemerintah			
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	4	60.00	200.00	(Kab. Bantaeng, Kab. Barru, Kab. Bone, Kab. Enrekang, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Maros, Kab. Pinrang, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Soppeng, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Wajo, Kota Palopo, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Tani	10.00	113.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
															Pemeliharaan Tanaman Hutan rakyat Tahun II Kawasan Hutan Mapongka UPT KPH. Saddang I (Ha)
	3.28.03.1.04.000 8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						83.950.000,00					Instansi Pemerintah, Kelompok Tani		5.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.03.1.04.000 9		Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	13	1	1.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1.00		
			Penyediaan bahan komputer, cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas pemantauan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan indeks tutupan lahan (Laporan)			1	83.950.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
		Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan						445.020.000,00	(Kabupaten Kepulauan Selayar, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Maros, SULAWESI SELATAN), (KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (Kecamatan Bangkala Kecamatan Binamu Kecamatan Tarowang, KAB. JENEPONTO), (Desa Maccinbaji, Desa Mattirobaji, Desa Rewataya Kec. Kepulauan Tanakeke, Kec. Mangarabombang dan Kec. Mappakasunggu, KAB. TAKALAR), (kecamatan bontoa, kecamatan lau, kecamatan maros				Instansi Pemerintah		854.015.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	20.00	20.00	50.00		(Kab. Bantaeng, Kab. Barru, Kab. Bone, Kab. Enrekang, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Maros, Kab. Pinrang, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Soppeng, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Wajo, Kota Palopo, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani	24.00		
			Rehabilitasi Tanaman Mangrove (Ha)			5	111.255.000,00	(kecamatan bontoa, kecamatan lau, kecamatan maros baru, kecamatan marusu, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani			
			Rehabilitasi Tanaman Mangrove (Ha)			10	222.510.000,00	(UPT KPH Selayar Jl. Poros Bandara H. Aroeppala No. 85 Kec. Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani			
			Rehabilitasi Tanaman Mangrove (Ha)			5	111.255.000,00	(UPT KPH Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23 Kab. Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani			
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					1.835.724.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji				Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani		1.615.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.03.1.05.000 2		Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan (Ha)			1780029		(Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Bulukumba, Kab. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kota Parepare, Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani	1780029		
		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan					1.788.994.400,00	(UPT. KPH. Selayar Jl. Poros Bandara H. Aroeppala No. 85				Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani		1.152.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (Ha)	549	1780029.00	1780029.00		(Kab. Bantaeng, Kab. Barru, Kab. Bone, Kab. Enrekang, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Maros, Kab. Pinrang, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Soppeng, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Wajo, Kota Palopo, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto, Kota Makassar, Kota Parepare, Kab. Takalar, Kab. Bulukumba, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	1780029.0 0		
			Operasi gabungan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan (Ha)			1.780.029	68.085.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Ajatappareng (Ha)			69.214	59.640.000,00	(UPT. KPH Ajatappareng Jl. Sultan Hasanuddin No. 95, KAB. BARRU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Angkona (Ha)			121.262	82.104.400,00	(UPT. KPH. Angkona Jl. Ir. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH Awota (Ha)			16.001	39.944.600,00	(UPT. KPH Awota Jl. Beringin No. 5B Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Baliase (Ha)			212.827	88.395.000,00	(UPT. KPH. Baliase Jl. Trans Sulawesi Desa Baebunta Kec. Baebunta, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Bialo (Ha)			11.687	81.792.000,00	(UPT. KPH. Bialo Jl. Elang No. 9, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Bila (Ha)			73.207	71.397.600,00	(UPT. KPH. Bila Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Bulusaraung (Ha)			33.096	66.740.000,00	(UPT. KPH. Bulusaraung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 23, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Cenrana (Ha)			57.011	99.996.400,00	(UPT. KPH. Cenrana Jl. Karaeng No. 19 Watampone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Jeneberang (Ha)			49.394	57.453.200,00	(UPT. KPH. Jeneberang Jl. Poros Malino, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Kalaena (Ha)			173.562	70.701.800,00	(KPH. Kalaena Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Bungapati Kec Tana Lili, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Kambuno (Ha)			88.795	71.994.000,00	(UPT. KPH. Kambuno Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Kelara (Ha)			9.481	47.712.000,00	(UPT. KPH. Kelara Jl. Pelita No. 19 Kel. Empoang Kec. Binamu, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Lamasi (Ha)			32.391	73.726.400,00	(UPT. KPH. Lamasi Jl. Opu Tosappaille No. 458 Kota Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH Larona (Ha)			127.874	109.865.400,00	(UPT KPH. Larona Jl. Elang No. 4 Desa Langkea Raya Kec. Towuti, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Latimojong (Ha)			73.156	79.789.800,00	(UPT. KPH. Latimjong Jl. HOS. Cokroaminoto No. 012 A Kel. Bajo Kec. Bajo, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Mata Allo (Ha)			74.786	57.595.200,00	(UPT. KPH Mata Allo Jl. Pancaitana Bungawalie No. 11 Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Rongkong (Ha)			131.142	75.927.400,00	(UPT. KPH. Rongkong Jl. Lorong Asrama Brimob Kec. Baebunta, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH Saddang I (Ha)			103.951	22.393.400,00	(UPT. KPH. Saddang I Jl. Pongtiku No. 155 Makale, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Saddang II (Ha)			50.826	57.424.800,00	(UPT KPH. Saddang II Jl. Budi Utomo No. 25 Rantepao, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Sawitto (Ha)			71.970	57.595.200,00	(UPT KPH. Sawitto Jl. Lasinrang No. 110, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Selayar (Ha)			18.573	69.111.400,00	(UPT. KPH. Selayar Jl. Poros Bandara H. Aroeppala No. 85 Kec. Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Tangka (Ha)			16.470	73.442.400,00	(UPT. KPH. Tangka Jl. H.A Latief Kel. Biringare Kec. Sinjai Utara, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Ulubila (Ha)			64.625	64.610.000,00	(UPT. KPH. Ulubila Jl. Ahmad Yani No. 1 Watampone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan BBM untuk Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan KPH. Walanae (Ha)			38.685	53.037.000,00	(UPT KPH Walanae Jl. Kayangan Kel. Lemba Kec. Lalabata, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
			Pemenuhan biaya perjalanan dinas pencegahan dan pemberantasan kerusakan kawasan hutan (Ha)			1.780.029	60.520.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Penyediaan papan bicara perlindungan dan pengamanan kawasan hutan UPT. KPH Awota (Unit)			8	28.000.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5 B Kel. Bulu Pabbulu Kec. tempe, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
	3.28.03.1.05.000 3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan					4.250.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5 B Kab. Wajo, KAB. WAJO), (UPT KPH Awota Kab. Wajo, KAB. WAJO)				Instansi pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	2	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan (Operasi)	0	0	2		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Masyarakat					
			Penyediaan biaya pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan UPT KPH Awota (Operasi)			1	4.250.000,00	(UPT KPH Awota Jl. Beringin No. 5 B Kab. Wajo, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Masyarakat					
	3.28.03.1.05.000 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						42.480.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Jl. Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Masyarakat		313.310.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	6	6	24		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Masyarakat	24		
			Pemenuhan biaya perjalanan dinas monitoring, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan penanggulangan kebakaran hutan (Laporan)			24	42.480.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Jl Baji Minasa No. 14 Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Masyarakat			
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					112.625.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Masyarakat		147.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olah (M3)			40000.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Masyarakat	40000		
	3.28.03.1.07.000 2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					112.625.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, ASN, Kelompok Masyarakat		147.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	30.00	1.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1.00		
			Penyediaan biaya perjalanan dinas pembinaan, monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan (Dokumen)			4	112.625.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan					259.894.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		242.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase Benih/ Bibit yang Tersertifikasi (%)			70.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah	70		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.03.1.09.000 1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pegedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar					40.000.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		37.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pegedaran Benih, Pengadaan dan Pegedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pegedaran Benih dan Bibit	5	14	3		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	5		
			Penyediaan biaya perjalanan dinas penertiban perizinan berusaha dan badan usaha (Unit Usaha)			5	40.000.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
	3.28.03.1.09.000 2	Sertifikasi Sumber Benih					40.000.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat		52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (Sertifikat)	3	7	3		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	7		
			Penyediaan biaya perjalanan dinas sertifikasi sumber benih (Sertifikat)			5	40.000.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat			
3.28.03.1.09.000 4	Sertifikasi Mutu Bibit					40.000.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat		52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan (Sertifikat)	10	7	3		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	7			
		Penyediaan biaya perjalanan dinas sertifikasi mutu bibit (Sertifikat)			5	40.000.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat				
3.28.03.1.09.000 6	Pembangunan Sumber Benih					139.894.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Luas Sumber Benih yang Dibangun (Ha)	0	5	2		(Kab. Pinrang dan Kab. Jeneponto, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat	1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan sumber benih unggul UPT BSPTH (Ha) Penyediaan biaya perjalanan dinas identifikasi calon sumber benih (Ha) Penyediaan biaya perjalanan dinas monitoring dan evaluasi sumber benih UPT BSPTH (Ha)			2	79.998.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat			
						2	29.948.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat			
						2	29.948.000,00	(UPT BSPTH Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat			
3.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					55,050,000.00							150,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk			1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat			
						1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat			
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					55.050.000,00					Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES (Laporan)			1.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat	1		
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES					55.050.000,00					Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Laporan)	1	1	1.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1		
			Penyediaan kertas, cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas pengumpulan data dan informasi satwa dan tumbuhan liar non appendix CITES yang terancam punah (Laporan)			1	55.050.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					334,504,400.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			2,657,920,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan,			1.75			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah				
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					334.504.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		2.657.920.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Jumlah KTH Pemuda Menjadi KTH Madya (Kelompok)			24.000	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	24					
			Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi (Kelompok)			4.000	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah	20					
	3.28.05.1.01.000 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan					65.160.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah		166.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas (Orang)	115	200.00	243.00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		instansi Pemerintah dan Penyuluh Kehutanan	243.00					
			Penyediaan makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan (Orang)			243	65.160.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		instansi Pemerintah dan Penyuluh Kehutanan					
	3.28.05.1.01.000 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan					221.974.800,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				instansi Pemerintah dan Penyuluh Kehutanan		2.291.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	72	169.00	33.00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani, Instansi Pemerintah dan Keompok Tani	49.00					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.05.1.01.000 3		Penyediaan alat dan bahan usaha pengembangan wanatani untuk KTH, alat tulis kantor, perjalanan dinas sekolah lapang pengembangan usaha wanatani dan monev peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya (Kelompok Tani)			2	113.252.200,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah dan Keompok Tani			
			Penyediaan alat ekonomi produktif sederhana dan perjalanan dinas fasilitasi KTH Madya (Kelompok Tani)			1	44.287.200,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani			
			Penyediaan biaya perjalanan dinas penilaian kelas kemampuan KTH pemula ke madya (Kelompok Tani)			24	64.435.400,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani			
		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial					47.369.200,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)			Instansi Pemerintah dan Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Ha)	0	2000.00	2000.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Penyuluh dan Kelompok Masyarakat	2000.00		
			Penyediaan akomodasi dan konsumsi dan perjalanan dinas penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial (Ha)			2.000	47.369.200,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Penyuluh dan Kelompok Masyarakat			
5.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					157,250,000.00							200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif (%)			20.83			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah, Penyuluh dan Kelompok Masyarakat			
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					157.250.000,00					Instansi Pemerintah, Penyuluh dan Kelompok Masyarakat		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.06.1.01.000 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota (%)			21.000		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)				Instansi Pemerintah, Penyuluh dan Kelompok Masyarakat	25		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan (Dokumen)	0	1.00	4.00	97.400.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	4.00	125.000.000,00	
			Penyediaan kertas, cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas pengumpulan data dan informasi wilayah DAS Jeneberang, Saddang, Mata Allo dan Tangka (Dokumen)			4	97.400.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				59.850.000,00					Instansi Pemerintah		75.000.000,00	
	3.28.06.1.01.000 5	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Lembaga)	4.00	4	1.00		(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah	1.00			
			Penyediaan kertas, cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas pemantauan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan indeks tutupan lahan (Lembaga)			1	59.850.000,00	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl Bajiminasa No. 14 Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi Pemerintah			
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					28,404,836,144.00							30,132,101,228.00	
	3.29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					28,404,836,144.00							30,132,101,228.00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,480,513,519.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			25,448,488,471.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 0.200									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					466.698.400,00	(makassar, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)				13	14	596.038.080,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu			100.000	(Makassar, SULAWESI SELATAN)		100						
	3.29.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					208.719.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas energi dan sumber daya mineralprovinsi Sulawesi Selatan Dinas energi dan sumber daya mineralprovinsi Sulawesi Selatan	2.00	286.463.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	2.00	2.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)			2	208.719.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	3.29.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					139.478.100,00	(makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas energi dan sumber daya mineralprovinsi Sulawesi Selatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi selatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi selatan	1.00	167.373.720,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan RKA-SKPD (Dokumen)			1	139.478.100,00	(makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	3.29.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					15.799.200,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi selatan Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Selatan	1.00	18.959.040,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)					1	15.799.200,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					86.559.800,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Selatan	2.00	103.871.760,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.00	2.00	2.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
			Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD (Dokumen)			1	86.559.800,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					16.141.800,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	2.00	19.370.160,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.00	2.00	2.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)			2	16.141.800,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.157.868.329,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	100	18.235.014.217,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase pemenuhan administrasi keuangan (%)			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.887.266.629,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	120.00	17.910.292.177,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	120.00	120.00	120.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan			
			Gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)			120	15.887.266.629,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					100.579.600,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan		120.695.520,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	500	500	500		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	550		
			Penatahusahaan dan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)			500	100.579.600,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					136.908.900,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan		164.290.680,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Dokumen)			1	136.908.900,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.620.400,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan		9.144.480,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	1		
			Koordinasi dan penyusunan laporan leuangan akhir tahun SKPD (Laporan)			1	7.620.400,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					8.870.200,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan		10.644.240,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.02.000 7		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan,Inspekt orat Provinsi sulawesi selatan	1		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan (Dokumen)			1	8.870.200,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan,Inspekt orat Provinsi sulawesi selatan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					16.622.600,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan,Inspekt orat Provinsi sulawesi selatan		19.947.120,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Su,ber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan,BPKAD,I nspektorat,Bap pelitbangda	12		
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD (Laporan)			12	16.622.600,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Su,ber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan,BPKAD,I nspektorat,Bap pelitbangda			
	3.29.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					645.041.300,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Su,ber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan,BPKAD,I nspektorat,Bap pelitbangda		709.545.430,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase keterpenuhan administrasi pendapatan kewenangan perangkat daerah (%)			100.000		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Su,ber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan,BPKAD,I nspektorat,Bap pelitbangda	100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.04.000 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah (Laporan)	12	12	12	645.041.300,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Su,ber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan,BPKAD,I nspektorat,Bap pelitbangda Pegawai Dinas ESDM, pihak ketiga pengusaha minerba dan air tanah Pegawai Dinas ESDM, pihak ketiga pengusaha minerba dan air tanah	12	709.545.430,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)			100.000	72.718.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Dinas ESDM, pihak ketiga pengusaha minerba dan air tanah Pegawai Dinas ESDM, pihak ketiga pengusaha minerba dan air tanah	100	87.261.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Orang)	0.00	5	10	72.718.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Dinas ESDM, pihak ketiga pengusaha minerba dan air tanah ASN Dinas Energi dan Suber Daya Minreal Provinsi Sulawesi Selatan ASN Dinas Energi dan Suber Daya Minreal Provinsi Sulawesi Selatan	13	87.261.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.237.079.990,00	(Makasassar, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Energi dan Suber Daya Minreal Provinsi Sulawesi Selatan		2.475.344.414,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.06.000 1		Persentase pemenuhan administrasi umum (%)			100.000		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Energi dan Suber Daya Minreal Provinsi Sulawesi Selatan	100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.022.250,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas Energi dan Suber Daya Minreal Provinsi Sulawesi Selatan		12.026.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	3		
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (Paket)			3	10.022.250,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					291.371.630,00	(Makasassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan		320.508.793,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	18		(Maros,Gowa,Buluku mba,Bone,Pare-pare,Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Minreal Provinsi Sulawesi Selatan	18		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)			18	291.371.630,00	(Makasassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Minreal Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					111.515.600,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Minreal Provinsi Sulawesi Selatan		122.667.160,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	22		(Makassar,Maros,Go wa,Bulukumba,Bone, Pare-pare,Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	22		
			Penyediaan peralatan rumah tangga (Paket)			22	111.515.600,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					151.884.700,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	20	167.073.170,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	20	20		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Paket)			20	151.884.700,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					135.542.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	12	162.650.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Esdm dan Tamu Dinas ESDM			
			Fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)			12	135.542.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Esdm dan Tamu Dinas ESDM			
	3.29.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.536.743.810,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Esdm dan Tamu Dinas ESDM	200	1.690.418.191,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	200	200		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)			200	1.536.743.810,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					690.851.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	100	829.021.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase pemenuhan barang milik daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah (%)			100.000		(Makassar, Maros, Go wa, Bulukumba, Bone, Pare-pare, Palopo, SULAWESI SELATAN)			Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan				
	3.29.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					690.851.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan		829.021.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	5	10		(Makassar,Maras,Go wa,Bulukumba,Bone, Pare-pare,Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM dan Cabang Dinas ESDM	15		
			Pengadaan peraltan dan mesin lainnya (Unit)			10	690.851.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM dan Cabang Dinas ESDM			
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.611.506.700,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas ESDM dan Cabang Dinas ESDM		1.809.763.770,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)			100.000		(Makassar,Maros,Go wa,Bulukumba,Bone, Pare-pare,palopo, SULAWESI SELATAN)				Dinas ESDM dan Cabang Dinas ESDM	100		
	3.29.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					371.064.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas ESDM dan Cabang Dinas ESDM		445.276.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	3		
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (Laporan)			3	371.064.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.240.442.700,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan		1.364.486.970,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Makassar,Maros,Go wa,Bulukumba,Bone, Pare-pare,Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas ESDM Provinsi Sulawesi selatan	12		
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Laporan)			12	1.240.442.700,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas ESDM Provinsi Sulawesi selatan			
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					598.749.800,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas ESDM Provinsi Sulawesi selatan		706.499.760,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase pemeliharaan barang milikdaerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah (%)			100.000		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas ESDM Provinsi Sulawesi selatan	100		
	3.29.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					257.253.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Dinas ESDM Provinsi Sulawesi selatan		296.703.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.09.000 2		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	14		(Makssar,Maros,Gow a,Bulukumba,Bone,P are-pare,Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan	14		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)			14	257.253.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					55.586.800,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan		66.704.160,00		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	14		(Makssar,Maros,Gow a,Bulukumba,Bone,P are-pare,Palopo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas	14		
	3.29.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Kendaraan Dinas		240.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor / gedung Dinas ESDM	1		
	3.29.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit)			1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor / gedung Dinas ESDM			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor/gedung ESDM Provinsi Sulawesi Selatan	1	103.092.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit)			1	85.910.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor/gedung ESDM Provinsi Sulawesi Selatan			
			2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					299,999,400.00				05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	
			Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah (%)			85.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor/gedun g ESDM Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah (%)			85			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor/gedung ESDM Provinsi Sulawesi Selatan			
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					199.999.700,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Kantor/gedung ESDM Provinsi Sulawesi Selatan		232.499.640,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada Wilayah Cekungan Air Tanah (%)			30.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Kantor/gedung ESDM Provinsi Sulawesi Selatan	35		
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					124.999.700,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Kantor/gedung ESDM Provinsi Sulawesi Selatan		149.999.640,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	1		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM,Pengusaha pengelolaan Air tanah	1		
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah (Dokumen)			1	124.999.700,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM,Pengusaha pengelolaan Air tanah			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1	1	1		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Pengelola air tanah	1	82.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah (Laporan)			1	75.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas ESDM,Pengusaha pengelolaan Air tanah			
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					99.999.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Pengelola air tanah		109.999.670,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase pengguna air tanah (%)			100.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Pengelola air tanah	100		
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah					99.999.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Pengelola air tanah		109.999.670,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM dan Pengusaha Pengelola Air tanah	1.00		
			Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah (Dokumen)			1	99.999.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM dan Pengusaha Pengelola Air tanah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					1,631,166,100.00				05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			1,703,701,160.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik (%) Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sulawesi Selatan yang terkelola dengan baik (%)			10.000 10			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM dan Pengusaha Pengelola Air tanah Dinas ESDM dan Pengusaha Pengelola Air tanah			
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					253.464.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas ESDM dan Pengusaha Pengelola Air tanah		304.157.640,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah lokasi peta WIUP yang bersesuaian tata ruang (RT/RW) (kabupaten/kota)			24		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas ESDM dan Pengusaha Pengelola Air tanah	24		
	3.29.03.1.01.000 2	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					253.464.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas ESDM dan Pengusaha Pengelola Air tanah		304.157.640,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Pertambangan	1		
			Penentuan dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil (Dokumen)			1	253.464.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Pertambangan			
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					977.523.100,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Pertambangan		1.076.275.410,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah lokasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan			24		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Pertambangan	24		
	3.29.03.1.03.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat					74.465.500,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Pertambangan		81.912.050,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM dan pengusaha Bidang Pertambangan	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.03.000 3		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)			1	74.465.500,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas ESDM dan pengusaha Bidang Pertambangan			
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					529.882.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Dinas ESDM dan pengusaha Bidang Pertambangan		582.870.640,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam	1	1	1		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Bidang Pertambangan	1		
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)			1	529.882.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Bidang Pertambangan			
	3.29.03.1.03.000 4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					330.370.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Bidang Pertambangan		363.407.550,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam	1	1	1		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Bidang Pertambangan	1		
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan)			1	330.370.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Bidang Pertambangan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.03.000 5	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					42.804.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Bidang Pertambangan		48.085.170,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang	1	1	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1			
			Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)			1	42.804.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha bidang pertambangan			
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat					149.102.900,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha bidang pertambangan		47.085.170,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			jumlah izin usaha pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam,batu bara,mineral bukan			24	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha bidang pertambangan	24			
	3.29.03.1.04.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat					149.102.900,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha bidang pertambangan		47.085.170,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan	1	1	1	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1				
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)			1	149.102.900,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Tambang Rakyat,Pemerin tah Pusat			
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					43.142.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Tambang Rakyat,Pemerin tah Pusat		47.456.970,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah usaha jasa pertambangan yang diawasi (kabupaten/kota)			24	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			24					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.06.000 3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan.)	1	1	1	43.142.700,00 43.142.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Tambang Rakyat,Pemerintah Pusat Pengusaha Jasa Pertambangan Pengusaha Jasa Pertambangan	1	47.456.970,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07 3.29.03.1.07.000 1	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	pengawasan pelaksanaan harga patokan harga patokan mineral bukan logam Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dokumen)		1	1	207.932.700,00 207.932.700,00 207.932.700,00	(Sulawesi selatan ,SULAWESI SELATAN) (Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi selatan ,SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Jasa Pertambangan Pengusaha Jasa Pertambangan Pengusaha Jasa Pertambangan Pengusaha Bidang Pertambangan Pengusaha Bidang Pertambangan	1 1	228.725.970,00 228.725.970,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					1,527,104,753.00				05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			1,679,815,228.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Energi (Ton CO2 eq) (%) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi (Ton CO2 eq) (%)			1.300 1,3			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Bidang Pertambangan Pengusaha Bidang Pertambangan			
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha niaga biofuel (%)			10.000		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Bidang Pertambangan Pengusaha Bidang Pertambangan	15	252.996.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.03.000 3	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun					229.997.000,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Bidang Pertambangan		252.996.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain	1	1	1		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Biofuel	1		
			Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun (Laporan)			1	229.997.000,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Biofuel			
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					1.297.107.753,00	(Sidrap,sinjai,palopo, soppeng,bone,selaya r,pinrang,wajo, SULAWESI SELATAN), (kAB SELAYAR UNTUK DAERAH TERLUAR,DAN TERPENCIL BELUM BERKEMBANG, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)			05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengusaha Biofuel		1.426.818.528,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah gedung / ruangan publik yang melakukan konservasi energi (Bangunan Gedung)			4.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Biofuel	4		
	3.29.05.1.09.000 2	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi					1.297.107.753,00	(Sidrap,sinjai,palopo, soppeng,bone,selaya r,pinrang,wajo, SULAWESI SELATAN), (selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR), (kAB SELAYAR UNTUK DAERAH TERLUAR,DAN TERPENCIL BELUM BERKEMBANG, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)				Pengusaha Biofuel		1.426.818.528,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Jumlah hasil kegiatan konservasi energi (Unit)	0	0.00	20		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Masyarkat Miskin, Masyrakat miskin dan daerah terpencil	25			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bantuan LTSHE (Set) Pelaksanaan konservasi energi (Set) Sosialisasi konservasi energi (Paket)			30	200.000.000,00	(KAB SELAYAR UNTUK DAERAH TERLUAR,DAN TERPENCIL BELUM BERKEMBANG, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarkat Miskin			
						130	1.047.107.753,00	(Sidrap,sinjai,palopo, soppeng,bone,selayar ,pinrang,wajo, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyrakat miskin dan daerah terpencil			
						1	50.000.000,00	(selayar, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					2,466,052,372.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata, 05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			957,597,059.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Persentase Rumah Tangga berListrik Persentase rumah tangga berlistrik (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
						100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					397.763.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		477.316.080,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah legalitas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diawasi			20.000		(Sulawesi selaan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat	25		
	3.29.06.1.02.000 3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					397.763.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		477.316.080,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas	1	1	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Ketenagalistrik an	1		
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)			1	397.763.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Ketenagalistrik an			
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					239.525.900,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Ketenagalistrika n		263.478.490,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Dokumen data izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas			1.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Ketenagalistrik an	1		
	3.29.06.1.05.000 2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					204.056.300,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Ketenagalistrika n		224.461.930,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.06.1.05.000 3		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	15	15	20		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Bidang Ketenagalistrikan	25		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Rekomendasi)			20	204.056.300,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Bidang Ketenagalistrikan			
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					35.469.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha Bidang Ketenagalistrikan		39.016.560,00	
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang	1	1	1		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha ketenalistrikan	1		
	3.29.06.1.06.000 2	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu					1.631.669.900,00	(luwu,luwu timur,luwu uatara,enrekang,sidrap,pinrang,soppeng,tana toraja, SULAWESI SELATAN), (Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)				Pengusaha ketenalistrikan		-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Miskin, Masyarakat tidak mampu Masyarakat tidak mampu			
			BPBL (Set)			77	184.800.000,00	(Kab. Enrekang, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Miskin			
	3.29.06.1.06.000 3	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu					539	1.446.869.900,00	(luwu,Bantaeng,luwu uatara,sidrap,pinrang,soppeng,tana toraja, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)						(Sulawesis selatan, SULAWESI SELATAN)					58.628.460,00	
								53.298.600,00	(Sulawesis selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat Miskin		
	3.29.06.1.06.000 3	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,	Jumlah sarana tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu ,belum berkembang,serta daerah terpencil			20.000	1.828.763.072,00	(luwu,luwu timur,luwu (Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengusaha ketenalistrikan	25	216.802.489,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
												Pengusaha ketenalistrikan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.06.1.06.000 4		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak	1	1	1		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Ketenagalistrikan	1		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Laporan)			1	53.298.600,00	(Sulawesis selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Ketenagalistrikan			
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan	1	1	1	79.206.072,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengusaha Ketenagalistrika n		87.126.679,00	
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)			1	79.206.072,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Miskin	1		
3.29.06.1.06.000 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah				64.588.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)					Masyarakat Miskin		71.047.350,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			1	1	1	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarkat Miskin	1				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)			1	64.588.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarkat Miskin			
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					6,821,996,000.00							9,180,000,000.00	
	3.30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					6,821,996,000.00							9,180,000,000.00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					540,000,000.00							740,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Surat/Rekomendasi			95.000									
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Semua Kecamatan, KAB. TAKALAR)						250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor (Dokumen)			1.000	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			2					
	3.30.02.1.01.000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Semua Kecamatan, KAB. TAKALAR)					250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Penerbitan SIUP-MB (Dokumen) Sosialisasi Surat Ijin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP MB) (Dokumen)	0	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	1		
						1	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
						10		(-, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar					150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		238.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah pengawasan Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya			3.000						PELAKU USAHA			
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya					150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		238.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	0	1	12		(Laporan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	12		
			Pengendalian Usaha Perdagangan (Laporan)			3	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					240.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		252.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)			4800.000						PELAKU USAHA			
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					240.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		252.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	5013	4800	4800		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	4800		
			Penerbitan SKA (Dokumen)			4.800	240.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					270.000.000.00							570.000.000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan			75.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					270.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		570.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang termanfaatkan			100.000						PELAKU USAHA			
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi					90.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3	3	2		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	2		
			Pusat Distribusi Provinsi (Unit)			2	90.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.03.1.01.000 2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi					90.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0	1	12	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	12			
			Pembinaan Pusat Distribusi Regional (Laporan)			12	90.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.03.1.01.000 3	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas					90.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	0	0	5	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	5			
			Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Orang)			5	90.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					3,141,996,000.00							2,000,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang			95.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					51.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah peserta rapat kordinasi HBKN (Orang)			65.000					PELAKU USAHA				
	3.30.04.1.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor					51.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat	0	1	1	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KELOMPOK MASYARAKAT	1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (Laporan)			1	51.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KELOMPOK MASYARAKAT			
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					3.050.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (12 kecamatan, KAB. LUWU UTARA)				KELOMPOK MASYARAKAT		1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali			22.000					KELOMPOK MASYARAKAT				
	3.30.04.1.02.000 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota					50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (12 kecamatan, KAB. LUWU UTARA)				KELOMPOK MASYARAKAT		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	0	12	12	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	12			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.04.1.02.000 2		Pemantauan Harga Barang Pokok dan Barang Penting di 24 Kab/Kota (Laporan)			1		(-, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok (Laporan)			12	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					3.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya	5	4	4		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	4		
			Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok (Laporan)			4	3.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					40.996.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kec. Bontonompo dan Kec. Pallangga, KAB. GOWA), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kec. Anggeraja, Kec. Alla, Kec. Enrekang, KAB. ENREKANG)				PELAKU USAHA		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan			2.000					PELAKU USAHA				
	3.30.04.1.03.000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida					40.996.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kec. Bontonompo dan Kec. Pallangga, KAB. GOWA), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kec. Anggeraja, Kec. Alla, Kec. Enrekang, KAB. ENREKANG)				PELAKU USAHA		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0	1	1		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	1		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi (Laporan)			1	40.996.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			Pengawasan Pupuk Bersubsidi di 24 Kab/Kota (Laporan)			1		(-, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengawasan Pupuk Bersubsidi di 24 Kab/Kota (Laporan) Pengawasan Pupuk Bersubsidi di 24 Kab/Kota (Laporan)			1		(-, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
						2		(-, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					540,000,000.00							2,540,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Nilai Ekspor Perdagangan (US\$)			1881893365			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					540.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Galesong, KAB. TAKALAR), (Kel. Sungguminasa Kec, Somba Opu dan Kel. Malino Kec. Tinggimoncong, KAB. GOWA), (Kabupaten Enrekang, KAB. ENREKANG)				PELAKU USAHA	2.540.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan			5				PELAKU USAHA					
	3.30.05.1.01.000 1	Pameran Dagang Internasional/Nasional					100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten Enrekang, KAB. ENREKANG)				PELAKU USAHA	508.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	2	10	3		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5				
			Pameran Dagang Internasional/Nasional (Pelaku Usaha)			3	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PELAKU USAHA				
			Penyelenggaraan Promosi Dagang (Pelaku Usaha)			1		(-, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PELAKU USAHA				
	3.30.05.1.01.000 2	Pameran Dagang Lokal					100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA	508.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	96	10	3		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5				
			Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)			3	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PELAKU USAHA				
	3.30.05.1.01.000 3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA	508.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0	10.00	2.00		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PELAKU USAHA	6.00						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.05.1.01.000 4		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)			2	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
		Peningkatan Citra Produk Ekspor					240.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Galesong, KAB. TAKALAR), (Kel. Sungguminasa Kec, Somba Opu dan Kel. Malino Kec. Tinggimoncong, KAB. GOWA)				PELAKU USAHA		1.016.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	0	10	10		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	10		
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Umggulan di 24 Kab/Kota (Produk)			2		(-, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Umggulan di 24 Kab/Kota (Produk)			1		(-, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			Peningkatan Citra Produk Ekspor (Produk)			10	240.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					2,060,000,000.00							2,560,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kec. Enrekang, KAB. ENREKANG), (Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA), (2 kecamatan, KOTA MAKASSAR)				PELAKU USAHA		330.007.077,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah pengaduan konsumen yang ditindakanlanjuti			30					PELAKU USAHA				
	3.30.06.1.01.000 1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen					100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kec. Enrekang, KAB. ENREKANG), (Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA), (2 kecamatan, KOTA MAKASSAR)				PELAKU USAHA		180.007.077,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	0	2	2		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSK	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.30.06.1.01.000 3	Kelompok masyarakat sekota makassar, masih kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat yang berperan sebagai konsumen dalam segmen perdagangan tentang perlindungan terhadap konsumen (BPSK) Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan (BPSK) Sosialisasi Perlindungan Konsumen di 24 Kab/Kota (BPSK) Sosialisasi Perlindungan Konsumen di 24 Kab/Kota (BPSK)				1	100.000.000,00	(2 kecamatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSK				
						2		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSK				
						1		(-, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSK				
						1		(-, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSK				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen (Pengaduan)	0	0	30	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPSK	30	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
						30	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		BPSK						
	3.30.06.1.02 4	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rata Rata Sertifikat yang diterbitkan			2011	1.560.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				BPSK		1.669.992.923,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
												BPSK				
	3.30.06.1.02.000 5	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat) Pengembangan Layanan Kalibrasi (Sertifikat)	3276	3600	3000	160.006.740,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSK	3000	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						3.000		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA				
	3.30.06.1.02.000 6	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan) Pengembangan Layanan Pengujian (Laporan)	1744	2150	2200	399.993.260,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	2250	419.992.923,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						2.200		(Makassar, SULAWESI SELATAN)				PELAKU USAHA				
	3.30.06.1.02.000 7	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi					1.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)					PELAKU USAHA		1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan Pengembangan Layanan Sertifikasi (Sertifikat)	6	33	30		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA	30		
						30	1.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Semua Kecamatan, KAB. TAKALAR), (Kec. Pattalassang, KAB. TAKALAR), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kecamatan Anggeraja, KAB. ENREKANG), (Kecamatan Enrekang, KAB. ENREKANG), (Belopa, KAB. LUWU), (Kec. Rantepao, KAB. TORAJA UTARA), (Dinas Perdagangan, KOTA PALOPO)				PELAKU USAHA	560.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Jumlah Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan				12						
	3.30.06.1.03.000 3	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kec. Pattalassang, KAB. TAKALAR), (Semua Kecamatan, KAB. TAKALAR), (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kecamatan Anggeraja, KAB. ENREKANG), (Kecamatan Enrekang, KAB. ENREKANG), (Belopa, KAB. LUWU), (Kec. Rantepao, KAB. TORAJA UTARA), (Dinas Perdagangan, KOTA PALOPO)				PELAKU USAHA	560.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	60		1	12	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Peningkatan kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar (Laporan)</i>			12	300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Barang Berbahaya (Paket)</i>			1		(-, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Barang Berbahaya (Laporan)</i>			1		(-, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Barang Berbahaya (Paket)</i>			1		(-, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Produk K3L Bagi Pelaku Usaha (Paket)</i>			1		(-, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Produk K3L Bagi Pelaku Usaha (Paket)</i>			1		(-, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Produk SNI Wajib Bagi Pelaku Usaha (Paket)</i>			1		(-, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Produk SNI Wajib Bagi Pelaku Usaha (Paket)</i>			1		(-, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Produk SNI Wajib Bagi Pelaku Usaha (Paket)</i>			1		(-, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Produk SNI Wajib Bagi Pelaku Usaha (Paket)</i>			10		(-, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Produk SNI Wajib Bagi Pelaku Usaha (Paket)</i>			2		(-, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
			<i>Sosialisasi Produk SNI Wajib Bagi Pelaku Usaha (Paket)</i>			1		(-, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					270,000,000.00							770,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			<i>Persentase produk UMKM dalam negeri yang termanfaatkan</i>			80.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PELAKU USAHA			
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					135.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kel. Bontoramba Kec. Somba Opu dan kel Bontomanai Kec. Bontomarannu, KAB. GOWA), (Makassar, KAB. ENREKANG)				PELAKU USAHA		385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			<i>Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri</i>			100.000						PELAKU USAHA			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.07.1.01.000 2	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang	0	100	50	135.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kel. Bontoramba Kec. Somba Opu dan kel Bontomanai Kec. Bontomarannu, KAB. GOWA), (Makassar, KAB. ENREKANG)				PELAKU USAHA	75	385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri Bagi Pelaku UMKM (UMKM)				1		(-, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UMKM, UMKM, Pelaku Usaha			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri Bagi Pelaku UMKM (UMKM)				2		(-, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UMKM			
		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri (UMKM)				50	135.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UMKM, Pelaku Usaha			
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri			100.000	135.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				UMKM, Pelaku Usaha		385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.000 2	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang	0	100	50	135.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				UMKM, Pelaku Usaha	50	385.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (UMKM)				50	135.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UMKM, Pelaku Usaha			
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					30,990,082,734.00							49,476,955,674.00	
	3.31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					30,990,082,734.00							49,476,955,674.00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					25,543,410,301.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			31,726,955,674.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah			90.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UMKM, Pelaku Usaha			
			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindakkanjuti			0.300			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UMKM, Pelaku Usaha			
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program			97.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UMKM, Pelaku Usaha			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					585.000.000,00	(SulawesiSelatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				UMKM,Pelaku Usaha		981.807.450,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan			100.000					UMKM,Pelaku Usaha				
	3.31.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				UMKM,Pelaku Usaha		542.935.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	3.31.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					15.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		48.085.390,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	1.00	1.00		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1.00		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	15.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					15.000.000,00	(SulawesiSelatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		50.624.040,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	1	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)			1	15.000.000,00	(SulawesiSelatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					15.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		49.789.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	15.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					15.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		49.579.020,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)			1	15.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	12	155.794.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				12	12	12		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
						12	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	4	85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				4	4	4		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
						4	75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu				19.089.248.210,00	(Sulawesi SelataN, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi SSelaatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	22.204.666.354,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							100.000					Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				18.739.248.410,00	(Sulawesi SelataN, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	21.418.166.564,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				63	57	124		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
						124	18.739.248.410,00	(Sulawesi SelataN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
	3.31.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				28	28	31		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
						31	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
	3.31.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
19				19	19		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.01.1.02.000 5		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			19	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		82.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1			
	3.31.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
							10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.000 7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	2		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	2		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			2	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				45.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		47.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.000 8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2	2	2		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	2		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			2	45.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				44.999.800,00	(Sulawesi SSealaatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		47.249.790,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	1			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	44.999.800,00	(Sulawesi SSealaatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH				
		3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					60.000.000,00					PERANGKAT DAERAH		60.341.593,00
Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat daerah berdasarkan					100.000					PERANGKAT DAERAH					
3.31.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						60.000.000,00					PERANGKAT DAERAH		60.341.593,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80	80	80		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	80		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			80	60.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					935.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		1.829.693.703,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (%)			100	(Makassar, SULAWESI SELATAN)			Perangkat Daerah	110				
	3.31.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					35.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		64.598.803,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	1			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			1	35.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
	3.31.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000,00					PERANGKAT DAERAH		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	5			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			5	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		99.277.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	5	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	5			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			5	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
	3.31.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					200.000.000,00					PERANGKAT DAERAH		44.999.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1			
Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)					1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
3.31.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					500.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		1.515.818.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			1	500.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.604.162.091,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		4.621.196.574,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			PERANGKAT DAERAH	110			
	3.31.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			12	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
	3.31.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		1.455.126.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	12			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	1.300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
3.31.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.254.162.091,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		2.966.070.324,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	12				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	2.254.162.091,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH				
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.270.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		2.029.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100		(Makassar, SULAWESI SELATAN)			PERANGKAT DAERAH	110			
	3.31.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					700.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH		1.120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			20	20	20	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH	20				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			20	700.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				70.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PERANGKAT DAERAH	14.00	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				14.00	14.00	14.00		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
						14	70.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
	3.31.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Unit)				100.000.000,00					PERANGKAT DAERAH	1	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				3	3	1.00		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
						1	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				200.000.000,00					Perangkat Daerah	1	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				1	1	1.00		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
						1	200.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	3.31.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				200.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	5	389.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				5	5	5		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
						2	200.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					4,446,672,433.00							15,650,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase pertumbuhan jumlah industri			7			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PERANGKAT DAERAH			
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					4.446.672.433,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (KAB. KEPULAUAN				PERANGKAT DAERAH		15.650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Peningkatan Industri yang dibina dan dikembangkan			5						PERANGKAT DAERAH			
	3.31.02.1.01.000 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	PERANGKAT DAERAH		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.31.02.1.01.000 3		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,	6.00	0.00	3		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM	3		DINAS PERINDUSTRIAN DAN
			Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, penyebaran dan Pervilayahan (Dokumen)			3	250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
						696.672.433,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI)		03.Peningkatan produktivitas dan	IKM		3.650.000.000,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	3	3		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM	3		
3.31.02.1.01.000 4		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)			3	696.672.433,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			DINAS PERINDUSTRIAN DAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1	1	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM	1	6.950.000.000,00	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)			1	2.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
			masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan industri yang memadai (Paket)			1		(-, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
			masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan industri yang memadai (Paket)			0,21		(-, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
			masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan industri yang memadai (Paket)			6		(-, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
			masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan industri yang memadai (Paket)			0,3		(-, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
			masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan industri yang memadai (Paket)			1		(-, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
			masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan industri yang memadai (Paket)			1		(-, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
			masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan industri yang memadai (Paket)			1		(-, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan industri yang memadai (Paket)			1		(-, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM				
			4			(-, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKM							
			1			(-, KAB. SOPPENG)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKM							
			0,05			(-, KAB. SOPPENG)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKM							
			1			(-, KAB. SINJAI)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKM							
			145			(-, KAB. WAJO)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKM							
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							1.500.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI), (Kec. Bungoro dan Kec. Labakkang, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Kecamatan Pammana, KAB. WAJO), (Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (Bantuan Kemasan Full Colour Produk 15 IKM ,15 kecamatan, KAB. LUWU UTARA), (Kec. Rantepao, KAB. TORAJA UTARA)			IKM		5.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	4	4	4		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKM	4						
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)			4	1.500.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKM							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			masih kurangnya pelayanan terkait industri logam, alat mesin pertanian, tekstil, makanan, minuman dan kemasan (Paket) masih kurangnya pelayanan terkait industri logam, alat mesin pertanian, tekstil, makanan, minuman dan kemasan (Paket) masih kurangnya pelayanan terkait industri logam, alat mesin pertanian, tekstil, makanan, minuman dan kemasan (Paket) masih kurangnya pelayanan terkait industri logam, alat mesin pertanian, tekstil, makanan, minuman dan kemasan (Paket) masih kurangnya pelayanan terkait industri logam, alat mesin pertanian, tekstil, makanan, minuman dan kemasan (Paket) masih kurangnya pelayanan terkait industri logam, alat mesin pertanian, tekstil, makanan, minuman dan kemasan (Paket)			1		(-, KAB. SINJAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
						50		(-, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
						1		(-, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
						1		(-, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
						1		(-, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
						1		(-, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					750,000,000.00							1,700,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri			3.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					750.000.000,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kec. Parigi, Kec. Tompobulu, Kec. Pallanga, Kec. Bontonompo, Kec. Somba Opu, Kec. Barombong, Kec. Bajeng, Kec. Tonggimoncong, KAB. GOWA), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI), (Kecamatan Pangkajene, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (Kab. Pinrang, KAB. PINRANG), (Fasilitasi Sertifikat Halal SNI 12 IKM di				IKM		1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Industri yang			12.000			IKM						
	3.31.03.1.01.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi					50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (bengkel industri kecamatan malili desa pasi-pasi kab. luwu timur, KAB. LUWU TIMUR)				IKM		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan	9	9	9		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	UKM	9				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi (Dokumen)			9	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	UKM					
			masih kurangnya sumber daya manusia industri yang terampil dan mandiri (Paket)			2	(-, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	UKM						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.03.1.01.000 4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	300	600	200	700.000.000,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (Kec. Parigi, Kec. Tompobulu, Kec. Pallanga, Kec. Bontonompo, Kec. Somba Opu, Kec. Barombong, Kec. Bajeng, Kec. Tonggimoncong, KAB. GOWA), (Sinjai Utara, KAB. SINJAI), (Kecamatan Pangkajene, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN), (Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, KAB. SIDENRENG RAPPANG), (Kab. Pinrang, KAB. PINRANG), (Fasilitasi Sertifikat Halal, SNI 12 IKM di Kabupaten Enrekang KAR (Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UKM		1.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Fasilitasi Vertical pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian (Dokumen)				200	700.000.000,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					250,000,000.00							400,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS			4.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				IKM		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Persentase Peningkatan Penyediaan			4.000						IKM			
	3.31.04.1.01.000 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				IKM		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	4	4	4		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM	4		
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)				4	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			IKM			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.04.1.01.000 2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)				50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				IKM		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				4	4	4		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4				
						4	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		IKM				
	3.31.04.1.01.000 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)				50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				IKM		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				4	4	4		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4				
						4	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		IKM				
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					300,000,000.00							352,500,000.00	
	3.32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					300,000,000.00							352,500,000.00	
1.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					54,120,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			85,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pekerja/Buruh dan Perusahaan			
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					54.120.000,00	(Kawasan Transmigrasi, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN), (Kec.kep. Tanakeke, Desa maccini baji, KAB. TAKALAR), (Desa Matajang, KAB. ENREKANG)				Pekerja/Buruh dan Perusahaan		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Tersedianya Data dan Informasi calon areal pengembangan kawasan transmigrasi			100.000		(SULAWESI SELATAN)		Pekerja/Buruh dan Perusahaan	100.00				
	3.32.02.1.01.000 2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan					20.000.000,00	(Kawasan Transmigrasi, SULAWESI SELATAN)				Pekerja/Buruh dan Perusahaan		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	0.00	0.00	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.32.02.1.01.000 3		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan)			1	20.000.000,00	(Kawasan Transmigrasi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi			
		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi					34.120.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi	1000	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	0.00	1058	1000		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi			
			Penyediaan Tanah untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Hektar)			1.058	34.120.000,00	(Kawasan Transmigrasi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi			
2.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					145,880,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			180,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase penempatan transmigrasi (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi			
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					145.880.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kec.kep. Tanakeke, Desa maccini baji, KAB. TAKALAR), (KAB. TAKALAR), (Desa Matajang, KAB. ENREKANG), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (UPT Bantimurung kec bone bone dan UPT Lantang Tallang,UPT Maipi,UPT Pongkase kec masamba, KAB. LUWU UTARA), (Kecamatan Awan Rantekarua, KAB. TORAJA UTARA)				Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (KSAD, Kelayakan Lokasi, Verifikasi dan Penyuluhan Calon TPS, dan Monitoring dan Evaluasi) (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)				Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi	100.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.32.03.1.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					45.880.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi	2	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	1	2	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Daerah Pengirim Transmigrasi, Pemerintah Daerah Penerima Transmigrasi, Calon Transmigran Pemerintah Daerah Pengirim Transmigrasi, Pemerintah Daerah Penerima Transmigrasi, Calon Transmigran			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)			2	45.880.000,00	(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	3.32.03.1.01.000 3	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi					20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Daerah Pengirim Transmigrasi, Pemerintah Daerah Penerima Transmigrasi, Calon Transmigran	25	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	0.00	40	25		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi			
			Pelaksanaan Penataan Penduduk setempat sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi (Kepala Keluarga)			40	20.000.000,00	(Kawasan Transmigrasi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi			
	3.32.03.1.01.000 5	Penyuluhan Transmigrasi					60.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi	40	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	40	140	40		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Calon Transmigran			
			Penyuluhan Transmigrasi (Kepala Keluarga)			140	60.000.000,00	(Kawasan Transmigrasi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Calon Transmigran			
	3.32.03.1.01.001 8	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi					20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Calon Transmigran	4	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan	0.00	0	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi (Lokasi)			1	20.000.000,00	(Lokasi/Kawasan Transmigrasi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran			
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100,000,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			87,500,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase transmigran yang dilatih dapat lebih mandiri			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran			
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Kec.kep. Tanakeke, Desa maccini baji, KAB. TAKALAR), (86 Desa di 9 Kecamatan, KAB. TAKALAR), (Semua kecamatan, KAB. TAKALAR), (Semua Kecamatan, KAB. TAKALAR), (Desa Borisallo dan Desa Bellabori Kec. Parangloe, KAB. GOWA), (Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA), (kec. towuti, KAB. LUWU TIMUR), (Kecamatan Awan Rantekarua, KAB. TORAJA UTARA)				Transmigran		87.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.000	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Persentase SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan			100.000		(SULAWESI SELATAN)				Transmigran	100.00		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	0.00	160	75		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran	75		
			Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman (Kepala Keluarga)			160	100.000.000,00	(Lokasi/kawasan transmigrasi, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Transmigran			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					552,984,708,474.00							565,003,392,056.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					244,957,481,539.00							239,201,551,504.00	
	4.01	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					4,127,582,192.00							5,227,582,192.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1,777,582,192.00							2,927,582,192.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			87.000 100.000 100.000									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			10	130.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)					10	250.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					80.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	10	150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	10	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			10	80.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			2	50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12	100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12	(SULAWESI SELATAN)								
	4.01.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12	100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12	12	12	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)			12	50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		327.582.192,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			3	(SULAWESI SELATAN)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3				
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		87.582.192,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	5	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			5	50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		120.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	150	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	200			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			150	50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		120.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	150	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	200			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			150	50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					567.582.192,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1.150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan (Laporan)					70	(SULAWESI SELATAN)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	76					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	10	11		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			11	100.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					57.582.192,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			2	57.582.192,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					360.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		870.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50	55		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	60		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			55	360.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		80.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	2		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			2	50.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.08.000 4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)			7		(SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					450.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	6	7		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			7	450.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		650.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Laporan)			24		(SULAWESI SELATAN)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	25			
	4.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					100.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			1	100.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
	4.01.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					180.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		250.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	6		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			6	180.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					70.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	15	16		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	17		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			16	70.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					80.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bangunan Gedung)			1	80.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					2,350,000,000.00							2,300,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Cakupan Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang Difasilitasi, Dimonitoring dan dievaluasi (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					700.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		850.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (Dokumen)			11		(SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12		
	4.01.03.1.01.000 1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan					250.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		300.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	3.00	3.00	3.00		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	3.00		
			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)			3	250.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.03.1.01.000 2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum					200.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel		250.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	2	2	2		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	2		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)			2	200.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel			
	4.01.03.1.01.000 3	Fasilitasi Penataan Wilayah					250.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel		300.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	4	5	6		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota Prov. Sulsel	7		
			Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)			6	250.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota Prov. Sulsel			
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.350.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota Prov. Sulsel		1.125.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah			88		(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota Prov. Sulsel	92		
	4.01.03.1.02.000 1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD					900.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota Prov. Sulsel		650.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	33	36	40		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	44		
			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)			40	900.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel			
	4.01.03.1.02.000 2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan					150.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel		175.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)			24	24	24		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	24			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.03.1.02.000 3		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan (Dokumen)			24	150.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel			
		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan					300.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel		300.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	24	24	24		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	24		
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)			24	300.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel			
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah					300.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel		325.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah MoU dan PKS yang difasilitasi (Dokumen)			36		(SULAWESI SELATAN)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	39			
	4.01.03.1.03.000 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah					120.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	40	45	50		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	60		
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah (Dokumen)			50	120.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel			
	4.01.03.1.03.000 2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta					100.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	5	5	5		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	10		
			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta (Dokumen)			5	100.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel			
	4.01.03.1.03.000 3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					80.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel		125.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	25	25	30		(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel	35		
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)			30	80.000.000,00	(Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah 24 Kab/Kota Prov. Sulsel			
	4.01	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					85,100,160,797.00							68,542,862,678.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2,010,470,423.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			2,895,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			99.200 95.500 100.000									
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					180.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)						320.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan			100.000		(SULAWESI SELATAN)				100			
	4.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara pada Biro Kesejahteraan Rakyat	2		
			Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	50.000.000,00	(Makassar dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
	4.01.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	2		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)			2	50.000.000,00	(Makassar dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
	4.01.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	2	2	2		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.01.000 4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)			2	50.000.000,00	(Makassar dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	1			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat				
	4.01.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1	1		(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	1			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat				
	4.01.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	5		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	5			
				Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			5	10.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					75.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	100			
	4.01.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	32	32	12		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	12			
			Fasilitasi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			12	30.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	5	10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	0	5	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
			Fasilitasi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			5	10.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat					
	4.01.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					15.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	1	15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	1	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
			Fasilitasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			1	15.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat					
	4.01.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	18	10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	18	18	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			18	10.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat					
	4.01.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	1	10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	1	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
			Fasilitasi Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat					
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	100	35.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (%)			100.000	(SULAWESI SELATAN)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					25.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	2	25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	2	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
			Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			2	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
	4.01.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	2	10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	2	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
			Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			2	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	100	120.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN			100.000	(SULAWESI SELATAN)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
	4.01.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	45	10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50	50	44	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
			Fasilitasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			44	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
	4.01.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	5	50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	20	5	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			5	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat						
	4.01.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					10.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.01.01.1.05.001 1		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	15		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	15		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Fasilitasi ASN Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			15	10.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					30.000.000,00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		50.000.000,00		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	15		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	15			
	4.01.01.1.06.000 1	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				340.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (KOTA MAKASSAR)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		510.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100.000		(SULAWESI SELATAN)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	100				
		4.01.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5	1	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	1			
		4.01.01.1.06.000 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)		1	10.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	0	4	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	4	30.000.000,00		
		4.01.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fasilitasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		4	30.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat				
											01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		10.000.000,00		
4.01.01.1.06.000 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	4		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	4		
			Fasilitasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)			4	10.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2		(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	2	35.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Jenis)			2	35.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
	4.01.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					40.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Pemprov Sulsel dan Masyarakat	12		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	40.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Pemprov Sulsel dan Masyarakat					
	4.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000,00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN Pemprov Sulsel dan Masyarakat		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	75	30		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	40		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			30	200.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat					
	4.01.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					15.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	12		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)			12	15.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat					
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					280.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		280.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000		(SULAWESI SELATAN)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	1		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	1		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			1	30.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
	4.01.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					50.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	3		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	3		
			Fasilitasi Pengadaan Mebel (Paket)			3	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
	4.01.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	3		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	3		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			5	100.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
	4.01.01.1.07.000 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					50.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		-	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	1		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	0		
			Pengadaan Aset Tak Berwujud (Paket)			1	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
	4.01.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat		125.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	4		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	6		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			4	50.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					820.470.423,00	(SULAWESI SELATAN), (KOTA MAKASSAR)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		1.280.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.08.000 1		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000		(SULAWESI SELATAN)				ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					15.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	12	15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			12	15.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat						
	4.01.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					41.966.423,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	12	50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	41.966.423,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat			
	4.01.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	12.00	245.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	12.00	12.00		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			12	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
	4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					663.504.000,00	(KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	12	970.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	663.504.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Non ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		275.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.09.000 1		Persentase Barang Milik Yang Dipelihara (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)				Non ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					175.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Non ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	9	9		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	9			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			9	175.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat				
	4.01.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	21	10		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat	10			
			Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			10	25.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat				
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				83,089,690,374.00					01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata, 05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			65,647,862,678.00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Dimanfaatkan (%) Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (%)			99.200 46.300			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					52.144.690.374,00	(SULAWESI SELATAN), (24 Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN), (Dusun Batupalangka Desa Tambolongan Kecamatan Rontosokunu			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		54.647.862.678,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.01.04.1.01.000 1		Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Pembinaan Mental dan Spritual yang dimanfaatkan			100.000		Bontomatene, SULAWESI SELATAN), (Kampung Nipa-Nipa Kelurahan Manggala Kecamatan Manassala (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			akuntabel dan inovatif	Rakyat	100			
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						2.110.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (Makassar dan Kab.Bone, SULAWESI SELATAN), (KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat		5.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	3	4	4		(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat, Masyarakat, Petugas Rumah Ibadah Pemprov Sulsel	4		
				Fasilitasi Pelaksanaan Kajian Rutin (Bulan)			12	70.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
				Fasilitasi Pelaksanaan Sulsel Mengaji (Kegiatan)			1	220.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual (Kegiatan)			1	70.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat			
				Fasilitasi Petugas Haji Daerah (Orang)			10	1.000.000.000,00	(Arab Saudi, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
				Gaji Petugas Rumah Ibadah Pemprov (Imam, Muadsin, Marbot) (Lokasi)			4	750.000.000,00	(Makassar dan Kab.Bone, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas Rumah Ibadah Pemprov Sulsel			
		4.01.04.1.01.000 2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual					50.034.690.374,00	(SULAWESI SELATAN), (KAB. TAKALAR), (KOTA MAKASSAR), (Gedung Pemerintah, KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Petugas Rumah Ibadah Pemprov Sulsel		49.647.862.678,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)			200	400	200		(Kab Kota se Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat, ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat, masyarakat, Tim Kafilah dan Pendamping Kontingen Sulawesi Selatan		250			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi Keikutsertaan Kontingen Sulawesi Selatan pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional (Kegiatan)			1	2.900.000.000,00	(Kalimantan Timur, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Kafilah dan Pendamping Kontingen Sulawesi Selatan			
			Fasilitasi Lomba-Lomba Tahfids dan Hadits (Kegiatan)			1	240.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Fasilitasi Pelaksanaan Karantina Tahfids (Orang)			100	720.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi (Kegiatan)			1	3.100.000.000,00	(Kab. Takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat			
			Fasilitasi Pemberian Bantuan Hibah Keagamaan (Jenis)			3	13.834.690.374,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Spritual (Kegiatan)			1	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat			
			Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Keagamaan (Tahun)			1	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	900.000.000,00	(kecamatan turikale, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			20	1.500.000.000,00	(sidrap, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Jalan Darul Maâ€™arif Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Mesjid Nurul Jihad, Blok C Jl. Mamuju 13, RT.02/RW.01, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Paket)			5		(Kec. Pattallassang, KAB. TAKALAR)							
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(pare-pare, KOTA PARE PARE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	500.000.000,00	(24 Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kabupaten Maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	900.000.000,00	(takalar, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Paket)			3		(Sinjai Utara, KAB. SINJAI)							
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Paket)			6		(Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang; Baznas Takalar Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang; Pesantren Ahlul Jannah Desa Paddinging, Kec. Sanrobone; Pesantren Tahfidz Ar Rayyun Desa Bontomanai, Kec. Marbo; Pesantren Assalam Timbuseng, Kec. Polut; Pesantren Babussalam Kalukuang, Kec. Galut., KAB. TAKALAR)							
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Paket)			3		(Sekretariat Daerah, KOTA PALOPO)							
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	900.000.000,00	(malino, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	900.000.000,00	(maros, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Mesjid Al Ikhlas Al Islami Blok A, Bumi Sudiang Permai, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Kelembagaan Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Mesjid Nurul Mu&minin Jl. Tamalabba, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Pndok Pesantren Desa Murante Kec.Suli, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(KEL. ULUALE KEC. WATANGPULU, KAB. SIDENRENG RAPPANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DESA LAWUWO KEC. BURAU, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DESA MANTADULU KEC. ANGKONA, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Wahyu Babussalam Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DESA TIMAMPU KEC. TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa salajangki Kec. Bontonompo Selatan, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Dusun Kombong Bura Desa Patongloan Kecamatan Baroko, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(kelurahan Baruppu Selatan, kecamatan Baruppu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN TURIKALE, KELURAHAN RAYA, LINK. PACELLE, KABUPATEN MAROS, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN MARUSU, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kompleks Aditarina Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Kalaroi Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(dea marumpa, kecamatan marusu, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lemb. Benteng Ka&do, Kec. Kapalapitu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Lembang Buntudatu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	30.000.000,00	(Kel/Desa. Kassa - Kec. Batulappa - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Pengga Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kampung Polassi Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Desa Benteng Alla Kecamatan Baroko, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Bumi Sudiang Raya Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Gereja Toraja Jemaat Rektang, Kelurahan Tampo Kecamatan Mengkendek, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Buntu Datu kecamatan bara Kota Palopo, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lemb. Sereale, Kec. Tikala, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	30.000.000,00	(Kel/Desa. Bungi - Kec. Duampanua - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Mesjid Amar Ma&ruf BTN Asal Mula, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(desa bonto matene kecamatan mandai, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kec.Belopa, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kec. GANRA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Mesjid Nurul Falah Desa Harapan Kec.Malili, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN MANDAI, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Dusun Bonto. Kappong, Kel. Tukamasea, Kec. Bantimurung, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN MALLAWA, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(desa toddopuli kecamatan bua, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(DESA SUMILLIN KEC. MASAMBA, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(lembang marinding kec. mengkendek kab. tana toraja. KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Jl. Dg Ramang Kel. Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Pondok Asri III Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Taring Kec. Biringbulu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kec. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DESA PASELLORENG, KECAMATAN GILIRENG, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(To&limbong, Lemb. Polopadang, Kec. Kapalapitu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Jl. Merpati Baru, Pallantikang, Kec. Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Pandang Desa Bontobulaeng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Pallatikang kecamatan Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Mesjid Ni&matullah BTN Tirasa Pratama Sudiang, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN LAU, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(kelurahan bajo kecamatan bajo, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(MASJID NURUL YAKIN DUSUN MARAWATU DESA TALLANG BULAWANG KEC. BAJO, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN CENRANA, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Tonjo Desa Kayu Bauk Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Desa Samulang Kec. Bajo, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kec. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Paket)			9		(Sinjai Utara, KAB. SINJAI)							
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Bontoramba Kec. somba Opu, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	500.000.000,00	(jalan andi tonro, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(kelurahan tampumia radda kecamatan belopa, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lembang Baruppu Benteng Batu, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Cacaleppeng Yawa Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kampung Nipa-Nipa Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DESA SUKAMAJU KEC. SUKAMAJU, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun tanabau Desa Bontotangga Kecamatan Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(kelurahan tengah kec. mengkendek kab. tana toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DUSUN TOPITU, KELURAHAN BENTENG, KECAMATAN PITUMPANUA, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Paket)			4		(Masjid Agung Takalar, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang; Masjid Nurul Jihad, Kel. Palleko, Kec. Polombangkeng Utara; Masjid Syekh Yusuf, Jarannika Desa Banggae, Kec. Marbo; Masjid Nurul Badar, Kel. Salaka Kec. Pattallassang., KAB. TAKALAR)							
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kec. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN BONTOA, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN CAMBA, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(kelurahan balo-balo kecamatan belopa, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Sa&dan Malimbong, Kecamatan Sa&dan, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kompleks. Keuangan Panaikang Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, KAB. LUWU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Kampung Parang, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan sungguminasa, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lengkong, Lemb. Pangkung Batu, Kec. Buntupepasan, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Bontolempangan Kecamatan Buki, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kec. LILIRILAU, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Tangnga-Tangnga Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Desa bawalipu, dusun Saluborro, kec. Wotu luwu timur., KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN SIMBANG, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(To&Nanna&, Lemb. Mai&ting, Kec. Rindingallo, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Bira Kecaatan Tamalanrea, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(desa borimasunggu kec. maros baru, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lembang Benteng Ka&do, Kec. Kapalapitu, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kec. LALABATA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	150.000.000,00	(MESJID KELURAHAN GILIRENG, KECAMATAN GILIRENG, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DESA LEWENG, KECAMATAN TAKKALALLA, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Barembeng Kec. Pattallassang, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN TANRALILI, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(perumahan bentenge desa bonto matene kecamatan mandai, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Paket)			5		(Kec. Pattallassang, KAB. TAKALAR)							
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DESA TIMAMPU, KEC. TOWUTI, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Lemba Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Kaburu kecamatan Bontomanai, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kampung Munte Desa Tambolongan Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Pangli Selatan, Kecamatan Sesean, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(kelurahan padangiring kec. rantetayo kab. tana toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Desa Rawamangun Kec. Sukamaju Selatan, KAB. LUWU UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Paket)			1		(Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)							
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	300.000.000,00	(Bantaeng, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Jalan Poros Bittuang - Masanda, Lemb. Patongloan, Kec. Bittuang, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kel. Mentitotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Antang Kecamatan Biringkanaya, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Lembang Sasak, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Bontobarakka Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(kelurahan hasanuddin kec. mandai, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN BANTIMURUNG, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kampung RAMA Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Tenro Desa Bontolempangan Kecamatan Buki, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			15	800.000.000,00	(Pangkep, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN MONCONGLOE, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	50.000.000,00	(DESA LAMARUA, KECAMATAN TAKKALALLA, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Desa Bone Pute, Kec. Burau, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Suburu Desa Bontotangga Kecamatan Bontoharu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Ratte Sarambu, Lemb. Balla, Kec. Bittuang, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Iembang banga kec. rembon. kab. tana toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Masjid Nurul Huda Desa Pallawa Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone, KAB. BONE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kec. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Salajangki, KAB. GOWA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Batupalangka Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(kecamatan turikale, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(desa Sumillan, kecamatan alla, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Parangia Desa Tanete Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Polassi Timur Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lembang Salu, Kecamatan Sopai, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Masjid Miftahussa Desa Mandiri, Kec. Tomoni, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN MAROS BARU, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Lemb. Lo&ko& Uru, Kec. Rindingallo, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(desa bonto matene kec. marusu, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	30.000.000,00	(Kel/Desa. Teppo - Kec. Patampanua - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(kelurahan lamunan kec. makale kab. tana toraja, KAB. TANA TORAJA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Jalan Batua Raya IX Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN TOMPOBULU, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(kecamatan galesong utara, KAB. TAKALAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Lappe Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Barat Onto Desa Maharayya Kecamatan Bontomatene, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	200.000.000,00	(kel. rantepao kec. rantepao kab. toraja utara, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Paket)			10		(Sekretariat Daerah, KOTA PALOPO)							
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(desa pabbentengan kecamatan marusu, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere, KAB. BANTAENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kalaulu, Lemb. Rinding Batu, Kec. Kesu&, KAB. TORAJA UTARA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	50.000.000,00	(KELURAHAN ATAKKAE, KECAMATAN TEMPE, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kec. CITTA, KAB. SOPPENG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	30.000.000,00	(Kel/Desa. Benteng Paremba - Kec. Lembang - Kab. Pinrang, KAB. PINRANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual (Lembaga)			1	100.000.000,00	(Dusun Letta Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					10.710.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (24 Kabupaten kota, (SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan	Masyarakat		10.400.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Pelayanan Dasar yang			100.000		(SULAWESI SELATAN)			Masyarakat	100			
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					10.070.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Masyarakat		10.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	1		(Kab Kota di Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait, Masyarakat	1		
			Fasilitasi Pemberian Bantuan Hibah Pendidikan (Jenis)			2	3.500.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Kegiatan)			1	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	500.000.000,00	(24 Kabupaten kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. MEKAR KEL. BINTURU KEC. WARA SELATAN, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. DR. RATULANGI KEL. TOBULUNG KEC. BARA, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. TUPAI I KEL. BALANDAI KEC. BARA, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	1.000.000.000,00	(PALOPO, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	200.000.000,00	(KECAMATAN BARARKA, KAB. ENREKANG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. PEMUDA PERUM. CITRA GRAHA BLOK A.2 NO. 03 KEL. TAKKALALA KEC. WARA SELATAN, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. ANDI PASO KEL. SENDANA KEC. SENDANA, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. DR. RATULANGI KEL. MAROANGIN KEC. TELLUWANUA, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. TRIBINA KEL. MALATUNRUNNG KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. ANDI NYIWIN KEL. PONJALAE KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	1.000.000.000,00	(MAKASSAR, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. PEMUDA PERUM. CITRA GRAHA BLOK A2. NO. 03 KEL. TAKKALALA KEC. WARA SELATAN, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Paket)			3		(Sekretariat Daerah, KOTA PALOPO)							
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. DR. RATULANGI KM. 8 KEL. BUNTU DATU KEC. BARA, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	500.000.000,00	(KABUPATEN MAROS, KAB. MAROS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Paket)			1		(10 Kecamatan kabupaten Takalar, KAB. TAKALAR)							
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(KABUPATEN WAJO, KAB. WAJO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Yayasan pendidikan DDI Galesong Baru, Jln. Yos Sudarso II Lrg. 154 A/17 Kota Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. LASAKTIA RAJA KM. 3 KEL. LEBANG KEC. WARA BARAT, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. MUNGKAJANG LORONG RANTE NO. 5 KEL. MUNGKAJANG, KEC. MUNGKAJANG, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	200.000.000,00	(Jl Pendidikan Rumbia, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, KAB. JENEPONTO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. ANDI KATI, KEL. SALUTELLUE KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Paket)			1	50.000.000,00	(JL. BENTENG RAYA LORONG TRIBINA KEL. BENTENG KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Paket)			1	50.000.000,00	(JL. BENTENG RAYA KEL. BENTENG KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	1.000.000.000,00	(Jl Jenral Sudirman Km. 03, Binturu, Kec. Wara Selatan, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. H. HASAN NO. 17 KEL. PONJALAE KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. PONGSIMPIN KEL. MUNGKAJANG KEC. MUNGKAJANG, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. DR RATULANGI NO. 115 KEL. SALOBULO KEC. WARA UTARA, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Paket)			5		(Sinjai Utara, KAB. SINJAI)							
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. BENTENG RAYA KEL. BENTENG KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	500.000.000,00	(STIMIK Profesional Makassar Jl. A.P. Pettarani No. 27 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JALAN PONGSIMPIN KELURAHAN MUNGKAJANG, KECAMATAN MUNGKAJANG KOTA PALOPO, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. ANDI BINTANG KEL. MURANTE KEC. MUNGKAJANG, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. ANDI ACHMAD KM. 09 KEL. LATUPPA KEC. MUNGKAJANG KOTA PALOPO, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	200.000.000,00	(SMK Muhammadiyah Desa Laro Kec.Burau, KAB. LUWU TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
			Pemberian Bantuan Hibah Lembaga Pendidikan (Lembaga)			1	50.000.000,00	(JL. DANAU TONDANO II KEL. BENTENG KEC. WARA TIMUR, KOTA PALOPO)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
4.01.04.1.02.000 2		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	1	1	70.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Masyarakat	1	200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
								(Kab Kota di Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.01.04.1.02.000 3		Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Kegiatan)			1	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait				
		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					570.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (KOTA MAKASSAR)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait	1	200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	1	1	1			(Kab Kota di Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait, KPA Prov. Sulsel				
		Fasilitasi Pemberian Bantuan Hibah kepada KPAP Sulawesi Selatan (Lembaga)			1	500.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPA Prov. Sulsel					
			Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Kegiatan)			1	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait				
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					20.235.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait	100	600.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait					
	4.01.04.1.03.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata					95.000.000,00	(SULAWESI SELATAN), (KOTA MAKASSAR)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait	1	200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	1	1	1			(Kab Kota di Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						ASN Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait, ASN Lingkup Kantor Gubernur Sulsel
			Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,Kebudayaan, dan Pariwisata (Kegiatan)			1	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.04.1.03.000 2		Fasilitasi Senam Lingkup Kantor Gubernur (Bulan)			12	25.000.000,00	(Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Kantor Gubernur Sulsel			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					70.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN Lingkup Kantor Gubernur Sulsel		200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1	1	1		(Kab Kota di Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait	1			
		Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kegiatan)			1	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait				
	4.01.04.1.03.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan					20.070.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait		200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	1	1	1		(Kab Kota di Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Insentif Daerah			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait, Masyarakat	1			
		Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Kegiatan)			1	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Stake Holder Terkait				
		Subsidi Transportasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Keberlangsungan Konektivitas Transportasi Udara Di Wilayah Sulawesi Selatan (Biaya Subsidi Dan Biaya Angkut BBM) (Kegiatan)			1	20.000.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Insentif Daerah			Masyarakat				
	4.01	BIRO HUKUM					5,434,158,763.00							6,847,382,192.00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1,854,088,245.00							2,429,214,792.00	BIRO HUKUM	
			%Realisasi Kegiatan Perangkat			100.000										
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (%)			100.000	72.850.600,00	(SULAWESI SELATAN)					100	76.850.600,00	BIRO HUKUM	
	4.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0.00	2.00	2.00	37.316.600,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN	2.00	39.316.600,00	BIRO HUKUM	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)			2	37.316.600,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN					
	4.01.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	2.00	1.00	18.742.000,00	(SULAWESI SELATAN)			ASN	1.00	18.742.000,00	BIRO HUKUM		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)			1	18.742.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN					
	4.01.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0.00	1.00	1.00	16.792.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	1.00	18.792.000,00	BIRO HUKUM		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	16.792.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN					
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.132.900,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		15.629.836,00	BIRO HUKUM
				Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun (Dokumen)			2.000		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)			ASN	2			
		4.01.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.00	2.00	2.00	13.132.900,00	(SULAWESI SELATAN)			ASN	2.00	15.629.836,00	BIRO HUKUM	
			Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (Dokumen)			2	13.132.900,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah Rata-rata nilai perilaku pegawai (%)			98.000	197.669.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		422.269.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				ASN	98		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	9.00	6.00	165.869.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	6.00	265.869.000,00	BIRO HUKUM		
			jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)			6	165.869.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN					
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0.00	80.00	60.00	31.800.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		156.400.000,00	BIRO HUKUM	
		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)			60	31.800.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	60.00					
									ASN						
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (%)			100.000	474.315.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		490.260.300,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						(SULAWESI SELATAN)				ASN		31.625.300,00	BIRO HUKUM
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.00	2.00	6.00	24.180.300,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	6.00				
			jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)			6	24.180.300,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN					
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	70.00	1.00	1.00	14.400.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1.00	18.000.000,00	BIRO HUKUM		
			jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)			1	14.400.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN					
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50.00	50.00	50.00	431.885.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	50.00	431.885.000,00	BIRO HUKUM			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)			50	431.885.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.00	4.00	4.00	3.849.700,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	4.00	8.750.000,00	BIRO HUKUM
			jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)			4	3.849.700,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit sarana dan prasarana jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				62.048.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)				ASN		295.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					62.048.000,00				ASN		295.000.000,00	BIRO HUKUM	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	55.00	65.00	14.00		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	14.00	
			jumlah unit sarana dan prasarana jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)			14	62.048.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100.000	774.122.745,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		800.932.056,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					774.122.745,00	(SULAWESI SELATAN)			ASN		800.932.056,00	BIRO HUKUM	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.00	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1.00	
			jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)			1	774.122.745,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)			100.000	259.950.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		328.273.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.000 1										ASN				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					232.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		294.548.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.09.001 0		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.00	9.00	6.00		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	6.00		BIRO HUKUM
			jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)			6	232.500.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25.00	34.00	35.00	27.450.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	35.00	33.725.000,00	
			jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)			35	27.450.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					3,580,070,518.00							4,418,167,400.00	BIRO HUKUM
			Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi Tersfasilitasinya dan Terevaluasinya Produk Hukum			100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN ASN			
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan produk hukum daerah yang difasilitasi dalam rangka pengharmonisasian produk hukum daerah			100.000	1.097.829.478,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN	100	1.475.392.400,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.000 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan					515.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		617.750.500,00	BIRO HUKUM
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	100.00	40.00	40.00		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	40.00		
			jumlah produk hukum pengaturan yang disusun (Dokumen)			40	515.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
	4.01.05.1.01.000 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan					100.000.378,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		166.441.900,00	BIRO HUKUM
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	100.00	1200.00	800.00		(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	800.00		
			jumlah keputusan gubernur yang ditetapkan (Dokumen)			800	100.000.378,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
	4.01.05.1.01.000 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya (Dokumen)	100.00	20.00	40.00	57.829.100,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN	40.00	115.500.000,00	BIRO HUKUM
							(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.05.1.01.000 4		jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya (Dokumen)			40	57.829.100,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN			
		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota					425.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		575.700.000,00	BIRO HUKUM
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	100.00	500.00	500.00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	500.00				
			jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi (Dokumen)			500	425.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN				
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum					2.482.241.040,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		2.942.775.000,00	BIRO HUKUM
			Persentase Masalah Hukum Yang Ditangani dan Diselesaikan (%)			100.000	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)			ASN	100				
	4.01.05.1.02.000 1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum					1.591.980.840,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		1.950.000.000,00	BIRO HUKUM
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.00	15.00	14.00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	14.00				
			jumlah masalah hukum litigasi yang ditangani (Kasus)			14	1.591.980.840,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN				
	4.01.05.1.02.000 2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM					890.260.200,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN		992.775.000,00	BIRO HUKUM
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	100.00	20.00	15.00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	15.00				
			jumlah masalah hukum non litigasi dan HAM yang ditangani (Kasus)			15	890.260.200,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN				
	4.01	BIRO ORGANISASI				6,161,738,884.00							7,872,615,437.00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2,557,293,038.00							3,233,743,124.00	BIRO ORGANISASI	
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			83.000 98.000 0.200									
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					524.663.038,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)						975.800.000,00	BIRO ORGANISASI
			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)			100.000	(BIRO ORGANISASI, SULAWESI SELATAN)			100					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					400.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	2	800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Tahun)			1	400.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Pemenuhan Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Tahun)			1	15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1.00	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Pemenuhan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Tahun)			1	15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					15.000.000,00					BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.01.000 5		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.00		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulsel	1		
			Pemenuhan Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA (Dokumen)			1	15.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulsel			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulsel		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1		
	4.01.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemenuhan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Tahun)			1	15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
							29.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulsel		35.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1		
			Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tahun)			1	29.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
	4.01.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.663.038,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulsel		40.800.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.00	4.00	4.00		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	4.00		
			Pemenuhan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tahun)			1	35.663.038,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			

No	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	100	50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)			100.000	(-, SULAWESI SELATAN)								
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					35.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	12	50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	12	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pemenuhan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Tahun)			1	35.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	100	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)			100.000	(-, SULAWESI SELATAN)								
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	2.00	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.00	2.00	2.00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pemenuhan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Tahun)			1	15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					35.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	100	50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)			100.000	(-, SULAWESI SELATAN)								

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					35.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL		50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1		
			Pemenuhan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Tahun)			1	35.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					809.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL		755.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)			100.000		(-, SULAWESI SELATAN)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	100		
	4.01.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1		
			Pemenuhan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Tahun)			1	20.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
	4.01.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					200.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	2		
			Pemenuhan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Tahun)			1	200.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			

No	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	5	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	5		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
			Pemenuhan Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Tahun)			1	15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
	4.01.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
			Pemenuhan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Tahun)			1	15.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
	4.01.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					120.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1	130.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
			Pemenuhan Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Tahun)			1	120.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
	4.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					439.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1	400.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			
			Pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tahun)			1	439.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					763.200.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	100	964.053.124,00	BIRO ORGANISASI
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100.000	(-, SULAWESI SELATAN)								
	4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					763.200.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1	964.053.124,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tahun)			1	763.200.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					375.430.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	100	413.890.000,00	BIRO ORGANISASI
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100.000	(-, SULAWESI SELATAN)								
	4.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					180.430.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	6	313.890.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	6	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pemenuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Tahun)			1	180.430.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
4.01.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						195.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL		100.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	1			
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Tahun)			1	195.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL				
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					3,604,445,846.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			4,638,872,313.00	BIRO ORGANISASI	
			Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL				
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1.355.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL		1.739.577.177,00	BIRO ORGANISASI	
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan			100.000			(-, SULAWESI SELATAN)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	100			
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan (%)			100.000			(-, SULAWESI SELATAN)			BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL	100			
	4.01.02.1.01.000 1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi					577.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL		672.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	1.00	1.00			(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi	1.00			
			Pemenuhan dokumen hasil penataan kelembagaan Provinsi (Tahun)			1	577.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi					
	4.01.02.1.01.000 2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota							(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Provinsi		490.577.177,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.02.1.01.000 3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Kab/Kota se Sulawesi Selatan	1.00		
			Pemenuhan dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan Kab/Kota (Tahun)			1	343.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Kab/Kota se Sulawesi Selatan			
								435.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)			Perangkat Daerah Kab/Kota se Sulawesi Selatan		577.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan	1.00		
			Pemenuhan dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan (Tahun)			1	435.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan			
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					2.249.445.846,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan		2.899.295.136,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (%)			100.000	(-, SULAWESI SELATAN)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan	100				
	4.01.02.1.02.000 1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					840.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan		800.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan	1		
			Pemenuhan dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi (Tahun)			1	840.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan			
	4.01.02.1.02.000 2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						519.452.046,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan		639.577.177,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.02.1.02.000 3		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan	1		
			Pemenuhan dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja (Tahun)			1	519.452.046,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan			
		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja					200.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan		300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan	1		
			Pemenuhan laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja (Tahun)			1	200.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan			
		4.01.02.1.02.000 4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan					289.993.800,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan		408.000.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)			1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan	1		
	Pemenuhan dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan (Tahun)					1	289.993.800,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan			
	4.01.02.1.02.000 5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik					400.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan		751.717.959,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	1	1	1		(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik (Tahun)			1	400.000.000,00	(BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULSEL, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan			
	4.01	BIRO UMUM					136,019,246,825.00							137,039,246,825.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					136,019,246,825.00							137,039,246,825.00	BIRO UMUM
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			93.000 93.000 90.000									
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					275.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)						335.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)					12		
	4.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)						160.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	4		
			Perencanaan SKPD (Dokumen)			4	150.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			
	4.01.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					125.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		175.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	350	350	400		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	410		
			Perencanaan SKPD (Dokumen)			400	125.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					65.800.596.368,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		66.040.596.368,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			2024.000						Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			1982		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1982		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					64.540.596.368,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		64.540.596.368,00	BIRO UMUM
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	411	411	423		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah	448		
			Gaji dan Tunjangan ASN beserta TPP (Bulan)			12	64.540.596.368,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					120.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah		150.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	225	225	250		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah	265		
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)			250	120.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah		550.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	8	8		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah	8		
			Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan (Dokumen)			8	500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					400.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah		450.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	28.00	28.00	28.00		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah	28.00		
			Akuntansi Keuangan SKPD (Dokumen)			28	400.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					100.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah		150.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.02.000 6		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8	8	8		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah	8		
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Dokumen)			8	100.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah			
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					100.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah		135.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	8	8	8		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah	8		
			Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			8	100.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					40.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah		65.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	13	13	13		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah	13		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyusunan Laporan Prognosis (Dokumen)			13	40.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah		1.250.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah (Dokumen)			12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah	12			
	4.01.01.1.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1.200.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan lainnya lingkup Sekretariat Daerah		1.200.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1778	1778	1778		(Biro umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1778		
			Pengamanan Barang Milik Daerah (Dokumen)			1.778	1.200.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		50.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12		(biro umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	12		
			penatausahaan barang milik SKPD (Laporan)			12	50.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.700.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		1.700.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		500.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00	528.00		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	0.00		
			Pengadaan Pakaian Dlnas (Paket)			528	500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			
	4.01.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					600.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		600.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	0.00	12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	0.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendataan dan Pengolahan Data Pegawai (Dokumen)			12	600.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			
							600.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		600.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	0.00	150		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	0.00		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Orang)			150	600.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.600.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		20.670.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.01.01.1.06.000 1		Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Kantor (Laporan)			12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	12			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						900.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		900.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (Paket)			12	900.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah					
	4.01.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						650.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				Indeks Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		650.000.000,00	BIRO UMUM
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			17	17	17		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya Di lingkup Sekretariat Daerah	17				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.01.01.1.06.000 3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			17	650.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya Di lingkup Sekretariat Daerah				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Pelayanan Lainnya Di lingkup Sekretariat Daerah		2.500.000.000,00	BIRO UMUM	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		21	21	21			(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	21		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)			21	2.500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah					
	4.01.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				450.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		500.000.000,00	BIRO UMUM		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12			(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12		
			Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan (Paket)			12	450.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					13.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	1988	13.000.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1766	1814	1976		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			1.976	13.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	785	3.000.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	743	722	780		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
			Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			780	3.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					100.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	18	120.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	18	18	18		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penatausahaan Arsip Dinamis (Dokumen)			18.000	100.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.709.240.233,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		4.709.240.233,00	BIRO UMUM
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			21		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	21		
	4.01.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					959.240.233,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		959.240.233,00	BIRO UMUM
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	6	6		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	6		
			Sewa Kendaraan (Bulan)			12	959.240.233,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		3.500.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	2		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekerjaan Flsik Bangunan (Bangunan Gedung)			2	3.500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
							250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		250.000.000,00	BIRO UMUM	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	1		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	1		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Bangunan Gedung)			1	250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.421.308.984,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		22.421.308.984,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12		
	4.01.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					165.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		165.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12006	11766	12785		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12785		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			12.785	165.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
							9.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		9.000.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	9.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		250.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12		
			Penyediaan Jasa Pelayananan Kantor (Laporan)			12	250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					13.006.308.984,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		13.006.308.984,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12		
			Belanja Jasa Non ASN dan Outsourcing (Laporan)			12	13.006.308.984,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.750.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		3.880.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			78		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	78		
	4.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		1.000.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	5		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	5		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dlnas Jabatan (Unit)			5	1.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		2.000.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.09.000 6		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	8		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	8		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan/Operasional (Unit)			8	2.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		250.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	4		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	4		
			Pemeliharaan Peralatan Mesin (Unit)			4	250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		280.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	6		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	6		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			6	250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		350.000.000,00	BIRO UMUM
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	4			(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	4		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			4	250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah				
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					8.113.101.240,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		8.133.101.240,00	BIRO UMUM
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)			32			(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	32		
	4.01.01.1.11.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					145.949.644,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		145.949.644,00	BIRO UMUM
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2.00	2.00	2.00			(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah	2.00		
		Gaji dan Tunjangan KDH-WKDH (Orang / Bulan)			2	145.949.644,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.11.000 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah		250.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	26	26	26		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	26		
			Penyediaan Pakaian Dinas KDH-WKDH (Paket)			26	250.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.11.000 3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					100.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		120.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	2		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	2		
			Medical Check Up KDH-WKDH (Orang)			4	100.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.11.000 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					7.617.151.596,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		7.617.151.596,00	BIRO UMUM
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	2		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Biaya Operasional KDH dan WKDH (Orang / Bulan)			2	7.617.151.596,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					5.900.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah		6.400.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Paket)			1080		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah	1080		
	4.01.01.1.12.000 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					2.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah		2.000.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	120	120	120		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	120		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Paket)			120	2.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.12.000 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					900.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah		900.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	120	120	120		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	120		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Paket)			120	900.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.12.000 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					3.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	120	3.500.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	120	120	120		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Paket)			120	3.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan					1.500.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	360	1.500.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Keprotokolan Yang Terlaksana (Dokumen)			360		(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.14.000 1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					1.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12	1.000.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	12	12	12		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Kali)			254	1.000.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.14.000 2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					300.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12	300.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	12	12	12		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
			Fasiltasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)			12	300.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah			
	4.01.01.1.14.000 3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan					200.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)				indeks Layanan Umum dan Layanan Lainnya Lingkup Sekretariat Daerah	12	200.000.000,00	BIRO UMUM
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12	12	12		(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-			
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)			12	200.000.000,00	(Biro Umum, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-			
	4.01	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					3,842,035,315.00							7,403,435,635.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1,503,927,115.00							3,000,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000									
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					148.404.000,00	(SULAWESI SELATAN)						416.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan,			8.000									
	4.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)						116.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.00	4.00	4.00		(OPD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD	4.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.01.000 6		Penyusunan Dokuman Perencanaan OPD (Dokumen)			4	30.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					118.404.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD	4.00	300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.00	4.00	4.00		(OPD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			4	118.404.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					74.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD		200.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			2.000						Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
	4.01.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					74.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD	2.00	200.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.00	2.00	2.00		(OPD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			2	74.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					152.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD		354.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.06.000 1		Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			2.000						Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD	1.00	4.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	1.00	1.00		(OPD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			1	2.500.000,00	(Kantor Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
	4.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.00	350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(OPD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			1	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					565.305.375,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD		800.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			4.000						Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
	4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						565.305.375,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD		800.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(OPD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Non ASN dan Outsourcing Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD	12.00		
			Belanja Jasa Non ASN (Orang)			11	247.378.260,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
			Belanja Rutin Lainnya (Laporan)			1	57.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN dan Outsourcing Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
			Iuran Jamkes, JKK, JKM Non ASN dan Outsourcing (Orang)			12	20.534.112,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Sewa Kendaraan (Laporan)			1	240.393.003,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					563.717.740,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		1.230.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			13.000									
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					345.717.740,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		500.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.09.000 6		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10.00	10.00	10.00		(OPD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Outsourcing Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD Outsourcing Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	10.00		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Belanja Bahan Bakar, Pembayaran Pajak, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Laporan)			3	305.096.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Belanja Jasa Outsourcing (Orang)			1	40.621.740,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					218.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Outsourcing Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD		730.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.00	3.00	3.00		(OPD, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3.00		
			Belanja Modal (Laporan)			1	218.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1,918,108,200.00							2,353,435,635.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD			
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					670.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD		1.410.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			persentase rekomendasi pengelolaan kebijakan perekonomian (%)			100.000									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.06.1.01.000 1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					460.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan OPD	2.00	470.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	2.00	2.00	2.00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat						
			Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) (Laporan)			1	250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat					
			Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (Laporan)			1	105.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat					
		Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) (Laporan)			1	105.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat						
	4.01.06.1.01.000 2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro					210.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat	2.00	940.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	2.00	2.00	2.00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Masyarakat/UM KM						
			Fasilitasi dan Pengembangan UMKM E- Kraft (Laporan)			2	105.000.000,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat/UM KM					
Sarana Perekonomian (Laporan)					1	105.000.000,00	(Kabutaen/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat						
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					498.108.200,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		470.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			persentase rekomendasi kebijakan			100.000				Masyarakat					
	4.01.06.1.02.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					498.108.200,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat	2.00	470.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	2.00	2.00	2.00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat						
			DBH CHT (Laporan)			1	393.108.200,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat					
			Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Laporan)			1	105.000.000,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat					
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					750.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		473.435.635,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Persentase rekomendasi kebijakan			100.000				Masyarakat					
	4.01.06.1.03.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					750.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		473.435.635,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha BUMD dan BLUD (Laporan)	2.00	2.00	2.00		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	2.00		
						2	750.000.000,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					420.000.000.00							2.050.000.000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Persentase capaian program prioritas pembangunan daerah			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					315.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		1.537.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Realisasi pelaksanaan pembangunan			100.000					Masyarakat				
	4.01.08.1.01.000 1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					105.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		512.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4	4	4		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat dan OPD	4			
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)			4	105.000.000,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat dan OPD					
	4.01.08.1.01.000 2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					105.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat dan OPD		512.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4	4	4		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat dan OPD	4			
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)			4	105.000.000,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat dan OPD					
	4.01.08.1.01.000 3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah					105.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat dan OPD		512.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4	4	4		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat dan OPD	4			
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)			4	105.000.000,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat dan OPD				
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					105.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat dan OPD		512.500.000,00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber dana APBD						100.000				Masyarakat dan OPD					
4.01.08.1.02.000 2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					105.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat dan OPD		512.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	4		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)				4			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)</i>			4	105.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)							
	4.01	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					4,272,558,763.00							6,268,426,545.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1,991,078,763.00							2,916,932,425.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			<i>Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang</i>			100.000 100.000 100.000									
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						88.874.500,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>			4		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				4			
	4.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					60.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						88.874.500,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	4	4	4.00		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa	4.00		
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)</i>			4	60.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa			
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					332.828.779,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa		480.963.199,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			<i>Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)</i>			3		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa	3		
	4.01.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa		8.814.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	5	2	3		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa	3		
			<i>Penyediaan Alat/Komponen Listrik (Paket)</i>			3	6.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa			
	4.01.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					17.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa		24.973.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	7	25	8		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa	8		
			<i>Penyediaan Peralatan Kantor (Paket)</i>			8	17.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa			
4.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					309.828.779,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa		447.176.199,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.00	4.00	4.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D, Kab/Kota dan Lainnya	4.00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)			4	309.828.779,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D, Kab/Kota dan Lainnya			
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					110.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				K/L/D, Kab/Kota dan Lainnya		161.590.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			8		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				K/L/D, Kab/Kota dan Lainnya	8		
	4.01.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					110.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				K/L/D, Kab/Kota dan Lainnya		161.590.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	30	1		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biuro Pengadaan Barang/Jasa	1		
			Pengadaan Mebel (Paket)			1	110.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biuro Pengadaan Barang/Jasa			
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					932.149.984,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biuro Pengadaan Barang/Jasa		1.369.328.326,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			8		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biuro Pengadaan Barang/Jasa	8		
	4.01.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					23.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biuro Pengadaan Barang/Jasa		33.787.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1170	4	4		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biuro Pengadaan Barang/Jasa	4		
			Persuratan (Laporan)			4	23.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biuro Pengadaan Barang/Jasa			
	4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					909.149.984,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biuro Pengadaan Barang/Jasa		1.335.541.326,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	4	4		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biuro Pengadaan Barang/Jasa	4		
			Pembayaran Gaji dan Iuran Asuransi Non ASN (Laporan)			4	909.149.984,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biuro Pengadaan Barang/Jasa			
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					555.600.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biuro Pengadaan Barang/Jasa		816.176.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.01.01.1.09.000 2		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			3		(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa	3			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					243.200.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa		357.260.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	15			(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa	15		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)			15	243.200.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa				
	4.01.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa		80.795.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	30	30			(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa	30		
			Pemeliharaan Peralatan Kantor (Unit)			30	55.000.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa				
	4.01.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					257.400.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa		378.120.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1			(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa	1		
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)			1	257.400.000,00	(Biro Pengadaan Barang/Jasa, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa				
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2,281,480,000.00							3,351,494,120.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		
			Persentase kesesuaian pengadaan barang/jasa dengan rencana (%) Persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang/jasa (%)			100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa				
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					670.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa	12	984.230.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)			12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Biro Pengadaan Barang/Jasa					
	4.01.07.1.01.000 1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa					50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Biro Pengadaan Barang/Jasa	4.00	73.450.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) Pengelolaan Strategi PBJ (Laporan)	2.00	4.00	4.00	4	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN) (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.07.1.01.000 2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					570.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota	4.00	837.330.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	208	4.00	4.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota			
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)			4	570.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota			
	4.01.07.1.01.000 3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa					50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota	4.00	73.450.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12.00	4.00	4.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota			
			Monev. Pengadaan Barang/Jasa (Laporan)			4	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota			
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					832.880.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota	12	1.223.500.720,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)			12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota			
	4.01.07.1.02.000 1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik					465.280.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota	4.00	683.496.320,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.00	4.00	4.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/d/Lainnya dan Kab/Kota			
			Pengelolaan SPSE (Laporan)			4	465.280.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/d/Lainnya dan Kab/Kota			
	4.01.07.1.02.000 2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					317.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/d/Lainnya dan Kab/Kota	4.00	466.554.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	4.00	4.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota			
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (Laporan)			4	317.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota			
	4.01.07.1.02.000 3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota	4.00	73.450.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12.00	4.00	4.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota			
Pengelolaan Informasi PBJ (Laporan)					4	50.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota				
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					778.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota	5	1.143.763.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)			5		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota				
4.01.07.1.03.000 1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	168.00	40.00	120.00	300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota	120.00	440.700.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Sumber Daya Manusia PBj (Orang)			120	300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Personil UKPBJ				
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.00	4.00	4.00	191.800.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Personil UKPBJ	4.00	281.754.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
								Pembinaan Kelambagaan (Dokumen)	4	191.800.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	4.01.07.1.03.000 3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Bimtek/Workshop dan Pendampingan Advokasi (Dokumen)	0	4.00	4.00	286.800.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota	4.00	421.309.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
							4	286.800.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						K/L/D/Lainnya dan Kab/Kota
		4.02	SEKRETARIAT DPRD					308,027,226,935.00							325,801,840,552.00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD					308,027,226,935.00							325,801,840,552.00		
			Prosentase Realisasi Kegiatan Prosentase ASN Perangkat Daerah Prosentase Penurunan Temuan			100.000 100.000 100.000										
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.266.752.207,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			1.378.797.339,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			9.000	(SULAWESI SELATAN)					3				
	4.02.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					109.049.284,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			115.592.241,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	3	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3	109.049.284,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	4.02.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					296.635.156,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		314.433.265,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.01.000 3		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	296.635.156,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					284.450.515,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		301.517.546,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		
	4.02.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					214.051.247,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		226.894.322,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	214.051.247,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			4.02.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					103.138.085,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1			1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				1	103.138.085,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
		4.02.01.1.01.000 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					56.625.351,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.01.000 7		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	6		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			6	56.625.351,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					202.802.569,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		251.010.723,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	6		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			6	202.802.569,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.195.358.130,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.047.079.618,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			12.000						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	4.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.154.877.561,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.884.170.215,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	113	113	120		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			120	12.154.877.561,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	4.02.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					87.246.400,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		92.481.184,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.02.000 3		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			4	87.246.400,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					387.111.857,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		410.338.568,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	4			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	
	4.02.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					433.062.612,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		459.046.369,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	4			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang terlaksana	4	
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang terlaksana (Dokumen)			4	433.062.612,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang terlaksana			
			4.02.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					317.846.900,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang terlaksana	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4			4	4			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.02.000 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			4	317.846.900,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					323.316.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	342.714.960,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	5	5		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			5	323.316.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.02.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					411.790.200,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	18	436.497.612,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)			18	411.790.200,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.02.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					80.106.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	84.912.996,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5	5	5		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			5	80.106.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					194.388.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		206.051.810,00	SEKRETARIAT DPRD
			Terkelolanya Barang Milik Daerah oleh Perangkat Daerah (Laporan)			12.000									
	4.02.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					100.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		106.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	100.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.02.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					94.388.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100.051.810,00	SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			12	94.388.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					543.683.440,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatab, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		576.304.446,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumkah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)			12.000									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					187.695.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		198.956.700,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			2	187.695.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
	4.02.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					129.340.440,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatab, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		137.100.866,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			12	129.340.440,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
	4.02.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					124.400.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		131.864.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	40		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			40	124.400.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
	4.02.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					102.248.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		108.382.880,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	8	8		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			8	102.248.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.611.894.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatab, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		4.888.608.170,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Laporan)			12.000					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				
	4.02.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					150.003.200,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatab, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		159.003.392,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	2		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			2	150.003.200,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor			
	4.02.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					300.880.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatab, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		318.932.800,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25	25		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			25	300.880.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatab, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	4.02.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					409.800.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		434.388.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.02.01.1.06.000 4		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	10		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)			10	409.800.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					510.263.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		540.879.310,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)			3	510.263.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		4.02.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					649.870.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		688.862.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		3	3	3		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	3				
	4.02.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan (Paket)			3	649.870.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	12	2.166.436.480,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.000 9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				12	2.043.808.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)													
4.02.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						547.269.800,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan		2.166.436.480,00	SEKRETARIAT DPRD	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12	580.105.988,00	SEKRETARIAT DPRD		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	547.269.800,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.585.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan , SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.740.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			5.000						Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	4.02.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					875.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		927.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			1	875.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	4.02.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		53.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			1	50.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	4.02.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					500.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	5		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Mebel	5		
			Pengadaan Mebel (Paket)			5	500.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Mebel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					660.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengadaan Mebel	1	699.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			1	660.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	4.02.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					500.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan , SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			1	500.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.444.520.002,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		13.191.191.203,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			12.000					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.822.546.076,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24	2.991.898.841,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	24		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			24	2.822.546.076,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	4.02.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					9.621.973.926,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96	10.199.292.362,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96	96	96		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			96	9.621.973.926,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.874.654.300,00	(Sekretraiat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		11.527.133.558,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			73.000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	4.02.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1.328.947.089,00	(Sekretraiat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22	1.408.683.914,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22	22		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.09.000 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			22	1.328.947.089,00	(Sekretraiat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					993.108.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13	1.052.695.116,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	13		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			25	993.108.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	4.02.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					150.056.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	159.059.360,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			4	150.056.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					100.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	106.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2	2	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Unit)			2	100.000.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			
	4.02.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					6.187.274.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10	6.558.510.970,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	10		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			10	6.187.274.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	4.02.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.115.268.111,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10	2.242.184.198,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			10	2.115.268.111,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					72.484.667.794,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		76.833.747.862,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.15.000 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Orang)			85.000						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
							69.143.095.794,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		73.291.681.542,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan)	85	85	85		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD	85		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Orang / Bulan)			85	69.143.095.794,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD			
	4.02.01.1.15.000 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					2.702.372.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD		2.864.514.320,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7	7		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	7		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (Paket)			7	2.702.372.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
	4.02.01.1.15.000 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					639.200.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		677.552.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	85	85	85		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	85		
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (Orang)			85	639.200.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD					8.184.201.099,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		8.675.253.165,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Layanan Administrasi DPRD (Laporan)			12.000					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				
	4.02.01.1.16.000 2	Fasilitasi Fraksi DPRD					223.147.669,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		236.536.529,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.1.16.000 3		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Fraksi DPRD	12		
			Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)			12	223.147.669,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Fraksi DPRD			
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					114.700.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Fasilitasi Fraksi DPRD		121.582.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12		
	4.02.01.1.16.000 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)			12	114.700.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	5	5	5		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	5	8.317.134.636,00	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Paket)			5	7.846.353.430,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					180,642,106,963.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			190,737,573,381.00	SEKRETARIAT DPRD
			ProsentaseProlegda yang terealisasi (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			
			Prosentase Jumlah Program Kerja DPRD yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			
			Jumlah Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya (Dokumen)			15.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					11.642.546.535,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN). (Sekretraiat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		12.341.099.327,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan (Dokumen)			12.000					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				
	4.02.02.1.01.000 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					621.206.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		658.478.996,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)			12	621.206.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
	4.02.02.1.01.000 2	Pembahasan Rancangan Perda					7.513.819.735,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		7.964.648.919,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan Rancangan Perda	12		
			Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)			12	7.513.819.735,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan Rancangan Perda			
	4.02.02.1.01.000 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan					1.364.814.600,00	(Sekretraiat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pembahasan Rancangan Perda		1.446.703.476,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraa n Kajian Perundang- Undangan	12		
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)			12	1.364.814.600,00	(Sekretraiat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraa n Kajian Perundang- Undangan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.02.1.01.000 4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik					1.360.353.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyelenggaraa n Kajian Perundang-Undangan	6	1.441.974.816,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	6	6	6	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik						
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik (Dokumen)			6	1.360.353.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			
	4.02.02.1.01.000 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD					782.352.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1	829.293.120,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Tata Tertib DPRD						
			Penyusunan Tata Tertib DPRD (Dokumen)			1	782.352.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Tata Tertib DPRD			
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					11.154.363.000,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyusunan Tata Tertib DPRD		11.823.624.780,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran (Dokumen)			3.000			Penyusunan Tata Tertib DPRD						
	4.02.02.1.02.000 1	Pembahasan KUA dan PPAS					743.976.400,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Penyusunan Tata Tertib DPRD	1	788.614.984,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	1	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembahasan KUA dan PPAS						
			Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)			1	743.976.400,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan KUA dan PPAS			
	4.02.02.1.02.000 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					745.259.300,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pembahasan KUA dan PPAS	1	789.974.858,00	SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)			1	1	1	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.02.1.02.000 3	Pembahasan APBD	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)			1	745.259.300,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	1	2.596.260.600,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	2.752.036.236,00	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan APBD (Dokumen)			1	2.596.260.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan APBD			
	4.02.02.1.02.000 4	Pembahasan Perubahan APBD					2.606.675.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pembahasan APBD		2.763.076.136,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan perubahan APBD	1		
			Pembahasan perubahan APBD (Perda/Perkada)			1	2.606.675.600,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan perubahan APBD			
	4.02.02.1.02.000 5	Pembahasan Laporan Semester					2.112.621.700,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pembahasan perubahan APBD		2.239.379.002,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	2	2		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan laporan semester	2		
			Pembahasan laporan semester (Dokumen)			2	2.112.621.700,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan laporan semester			
	4.02.02.1.02.000 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					2.349.569.400,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pembahasan laporan semester		2.490.543.564,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan pertanggungja waban APBD	1		
			Pembahasan pertanggungjawaban APBD (Dokumen)			1	2.349.569.400,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan pertanggungja waban APBD			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					41.490.320.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Prov.Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Prov SulSel, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pembahasan pertanggungjawaban APBD		43.979.739.730,00	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Laporan Pengawasan Kegiatan Komisi-komisi (Laporan)			5.000					Pembahasan pertanggungjawaban APBD					
	4.02.02.1.03.000 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					1.745.127.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pembahasan pertanggungjawaban APBD		1.849.835.150,00	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4	4	4			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)			4	1.745.127.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				
	4.02.02.1.03.000 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					1.369.375.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		1.451.538.030,00	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)			4	1.369.375.500,00	(Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				
	4.02.02.1.03.000 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					1.369.051.500,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		1.451.194.590,00	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4	4	4			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.02.1.03.000 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)			4	1.369.051.500,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	4	1.326.805.500,00	(Sekretariat DPRD Prov Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	1.406.413.830,00	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)			4	1.326.805.500,00	(Sekretariat DPRD Prov Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
	4.02.02.1.03.000 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					1.203.883.500,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		1.276.116.510,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	4	4	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)			4	1.203.883.500,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			
	4.02.02.1.03.000 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					1.613.272.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		1.710.068.320,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.02.02.1.03.000 7		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)			1	1.613.272.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				
		Pengawasan Penggunaan Anggaran					30.774.080.000,00	(Sekretariat DPRD Prov.Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	32.620.524.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4	4	4	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Penggunaan Anggaran					
			Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)			4	30.774.080.000,00	(Sekretariat DPRD Prov.Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Penggunaan Anggaran				
	4.02.02.1.03.000 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						2.088.725.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	2.214.048.500,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	1	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban Kepala Daerah					
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)			1	2.088.725.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban Kepala Daerah				
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					9.838.893.528,00	(Sekretariat DPRD prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Sekretraiat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		9.686.167.140,00	SEKRETARIAT DPRD	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (Dokumen)			4.000					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban Kepala Daerah				
4.02.02.1.04.000 1		Orientasi DPRD					701.000.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		-	SEKRETARIAT DPRD		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.02.1.04.000 2		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0.00	0.00	1.00		(SULAWESI SELATAN) (Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orientasi DPRD	0.00		
			Orientasi DPRD (Dokumen)			1	701.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orientasi DPRD			
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6	6	6.003.587.700,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orientasi DPRD		6.363.802.962,00	SEKRETARIAT DPRD
			Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)			6	6.003.587.700,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pendalaman Tugas DPRD	6		
	4.02.02.1.04.000 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				670.258.710,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)					Pendalaman Tugas DPRD		710.474.233,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	15	15	15		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15		
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)			15	670.258.710,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
	4.02.02.1.04.000 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				804.310.452,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		852.569.079,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	18	18	18		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	18		
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Orang)			18	804.310.452,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
	4.02.02.1.04.000 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				523.343.400,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		554.744.004,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60	60	60		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	60		
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)			60	523.343.400,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat			
4.02.02.1.04.000 7	Penyusunan Program Kerja DPRD				406.614.766,00	(Sekretraiat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)					Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat		431.011.652,00	SEKRETARIAT DPRD	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Program Kerja DPRD	1			
		Penyusunan Program Kerja DPRD (Dokumen)			1	406.614.766,00	(Sekretraiat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Program Kerja DPRD				
4.02.02.1.04.000 8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					729.778.500,00	(Sekretariat DPRD prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Penyusunan Program Kerja DPRD		773.565.210,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	60	60	60		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60			
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dokumen)			60	729.778.500,00	(Sekretariat DPRD prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Publikasi dan Dokumentasi Dewan				
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					82.326.340.000,00	(Sekretraiat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		87.265.920.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Laporan)			3.000						Publikasi dan Dokumentasi Dewan				
	4.02.02.1.05.000 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					784.780.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Publikasi dan Dokumentasi Dewan		831.866.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1			
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Dokumen)			1	784.780.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
	4.02.02.1.05.000 3	Pelaksanaan Reses					81.541.560.000,00	(Sekretraiat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		86.434.053.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	3		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pelaksanaan Reses	3		
			Pelaksanaan Reses (Dokumen)			3	81.541.560.000,00	(Sekretraiat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pelaksanaan Reses			
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					908.840.000,00	(Sekretariat DPRD prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pelaksanaan Reses		963.370.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			1.000						Pelaksanaan Reses				
	4.02.02.1.06.000 1	Penyusunan Kode Etik DPRD					172.000.000,00	(Sekretariat DPRD prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Pelaksanaan Reses		182.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Kode Etik DPRD	1			
			Penyusunan Kode Etik DPRD (Dokumen)			1	172.000.000,00	(Sekretariat DPRD prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Kode Etik DPRD				
	4.02.02.1.06.000 2	Pengawasan Kode Etik DPRD					736.840.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Penyusunan Kode Etik DPRD		781.050.400,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Kode Etik DPRD	1		
			Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)			1	736.840.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengawasan Kode Etik DPRD			
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah					11.529.130.800,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pengawasan Kode Etik DPRD		12.220.878.648,00	SEKRETARIAT DPRD
			Dokumen Kerjasama Daerah (Dokumen)			5.000						Pengawasan Kode Etik DPRD			
	4.02.02.1.07.000 1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					11.371.784.050,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Pengawasan Kode Etik DPRD		12.054.091.093,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	5	5	5		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	5		
			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah (Dokumen)			5	11.371.784.050,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah			
	4.02.02.1.07.000 2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					157.346.750,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Fasilitasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		166.787.555,00	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	12.00	12.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	12		
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (Dokumen)			12	157.346.750,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD					11.751.672.600,00	(Sekretraiat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN). (Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		12.456.772.956,00	SEKRETARIAT DPRD
			Laporan Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD, Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD (Laporan)			12.000						Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			
	4.02.02.1.08.000 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					5.964.477.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		6.322.345.620,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.02.02.1.08.000 2		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12			
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)			12	5.964.477.000,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	119.452.672,00	SEKRETARIAT DPRD	
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (Laporan)			1	112.691.200,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				
		4.02.02.1.08.000 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				2.475.547.300,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		2.624.080.138,00	SEKRETARIAT DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12		
	4.02.02.1.08.000 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)			12	2.475.547.300,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	12	12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	2.623.149.140,00		
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)			12	2.474.669.000,00	(Sekretraiat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				
		4.02.02.1.08.000 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				724.288.100,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		767.745.386,00	SEKRETARIAT DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	4	4	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4		
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)			4	724.288.100,00	(Sekretariat DPRD Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2,972,168,891,051.00							3,529,477,951,083.75		
	5.01	PERENCANAAN					50,903,044,263.00							59,716,797,128.00		
	5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					50,903,044,263.00							59,716,797,128.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					40,421,271,825.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			46,245,956,833.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			97 100 100									
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					680.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			915.866.048,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			14		(SULAWESI SELATAN)				14			
	5.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					120.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			213.596.216,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2.00		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	120.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					180.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		230.365.016,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	4	4.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	4.00		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			4	180.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					380.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		471.904.816,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	8.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	8.00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			8	380.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.989.648.493,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		32.002.754.674,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu (Laporan / Dokumen)			28		(SULAWESI SELATAN)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	28			
	5.01.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					29.389.648.493,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		31.054.548.356,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	184	194	190.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	200.00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			190	29.389.648.493,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					275.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		329.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	26	2400	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			12	275.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		289.206.318,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	0.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			2	100.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0.00	0.00	2	50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			2	50.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				175.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			205.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.1.02.000 7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0.00	12	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00			
					12	175.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel				
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah yang tersusun tepat waktu			28	139.411.900,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	28	318.836.111,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel				
	5.01.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2.00	2.00	21.177.800,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2.00	78.836.111,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	21.177.800,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0.00	0.00	6	20.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	6	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
								(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.1.03.000 6		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			6	20.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					98.234.100,00	(SULAWESI SELATAN)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3.00	3.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	3.00						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD (Laporan)			3	98.234.100,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel						
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					511.675.400,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		635.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang terlayani administrasi (Orang)			190	(SULAWESI SELATAN)	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	196						
	5.01.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					162.570.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	210	194.00	190.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	196.00					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya (Paket)			190	162.570.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel						
	5.01.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					127.330.500,00	(SULAWESI SELATAN)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	210	215.00	190.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	196.00					
		Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian (Dokumen)			190	127.330.500,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel						
	5.01.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					85.543.200,00	(SULAWESI SELATAN)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	184	100.00	190.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	196.00					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.1.05.001 1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			190	85.543.200,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					136.231.700,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360	215.00	190.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	196.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang- Undangan (Orang)			190	136.231.700,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.128.009.952,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		2.560.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan / Dokumen)			132		(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	142		
	5.01.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					142.705.800,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	12.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00		
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			12	142.705.800,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					597.238.467,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	12.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			12	597.238.467,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material					89.813.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0.00	1	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00		
			Penyediaan Bahan/Material (Paket)			12	89.813.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.1.06.000 8	Fasilitas Kunjungan Tamu					179.298.400,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
			Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			12	179.298.400,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.088.954.285,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	70.00	1.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	80.00	60.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD (Laporan)			60	1.088.954.285,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			12	30.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					670.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	4	1.310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			4		(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.07.000 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2.00	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0.00	1	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
			Pengadaan Aset Tak Berwujud (Unit)			2	100.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					570.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	10.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2.00		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			2	570.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.741.526.080,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		3.216.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24		(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	24		
	5.01.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					15.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		116.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	15.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.726.526.080,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		3.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.00	12.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	2.726.526.080,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel			
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.561.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		5.287.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)			68		(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	68		
	5.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					700.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	41.00	41.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	41.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.01.01.1.09.000 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			41	700.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				336.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12.00	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				8	13.00	12.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel					
						12	336.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel				
		5.01.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Unit)				75.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	3.00	187.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					2	1.00	3.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel				
						3	75.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel				
	5.01.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				1.600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2.00	3.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				2	2.00	2.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel					
						2	1.600.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel				
	5.01.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				850.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	10.00	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				20	10.00	10.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel					
					10	850.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					5,981,772,438.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			5,962,408,574.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD (%) Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap APBD (%) Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)			100 100 91			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bappelitbangda a Prov. Sulsel Kantor Bappelitbangda a Prov. Sulsel Kantor Bappelitbangda a Prov. Sulsel			
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					3.283.790.738,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		3.467.408.574,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Persentase Kesesuaian Dokumen Evaluasi Pembangunan daerah dengan Dokumen Perencanaan dan			100.000		(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	100		
	5.01.02.1.01.000 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					508.479.038,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00		
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (Dokumen)			1	508.479.038,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.02.1.01.000 6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi					2.775.311.700,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		3.117.408.574,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2	2.00	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	3.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (Dokumen)			3	2.775.311.700,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					648.771.700,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Persentase Ketersediaan data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan (%)			100.000		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		
	5.01.02.1.02.000 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					399.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2077	1046.00	1110.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1110.00		
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)			1.110	399.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.02.1.02.000 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					149.771.700,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0.00	0.00	200		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	200		
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Orang)			200	149.771.700,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.02.1.02.000 4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100.00	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0.00	0.00	100.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi (Buku)			100	100.000.000,00	(-. SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					1.749.210.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100	1.775.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Persentase Data yang dikelolah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (%)			100.000	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
	5.01.02.1.03.000 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi					250.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00	275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	14	2.00	2.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi (Laporan)			2	250.000.000,00	(-. SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.02.1.03.000 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					900.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.02.1.03.000 4		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	12	4.00	8.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	8.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)			8	900.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					599.210.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	25	48.00	72.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	72.00		
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			72	599.210.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Persentase Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		
	5.01.02.1.04.000 1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0.00	0.00	3		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	3		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)			3	300.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4,500,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			7,508,431,721.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N (%) Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM (%) Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang ekonomi dan SDA Tahun N (%) Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA (%) Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang Infrastruktur dan kewilayahan Tahun N Kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan (%)			100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
						100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
						100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
						100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
						100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					1.500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		2.502.810.574,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.03.1.01.000 1			Persentase Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan yang ditindak lanjuti PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		
			Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		250.281.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)			1	100.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
5.01.03.1.01.000 3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					190.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		250.281.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	5	5.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	5.00		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)			1	190.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.03.1.01.000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					200.000.000,00					Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00	425.477.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)			1	200.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.03.1.01.000 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					350.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00	450.505.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)			1	350.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.03.1.01.000 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					260.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	17.00	500.561.970,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	17	17.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)			17	260.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.03.1.01.000 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					400.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		625.704.604,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)			1	400.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		2.502.810.573,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		
			Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Perekonomian dan SDA (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		
	5.01.03.1.02.000 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP/MD dan RKPD)					100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		269.547.581,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/MD dan RKPD) (Dokumen)	3	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.01.03.1.02.000 3		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)			1	100.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	8.00	347.537.544,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	8	8.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel					
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)			8	150.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
	5.01.03.1.02.000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00	551.691.518,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4	7.00	1.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel					
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)			1	500.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
	5.01.03.1.02.000 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						175.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00	253.311.639,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	1.00	1.00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.03.1.02.000 7		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)			1	175.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					225.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		379.535.545,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	7	6.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	6.00		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)			6	225.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.03.1.02.000 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					350.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		701.186.746,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang SDA (Laporan)	5	7.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Laporan)			1	350.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.500.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		2.502.810.574,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.01.03.1.03.000 1		Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)			100		(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	100			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					237.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	382.137.914,00	3.00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	1.00	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)			3	237.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
		5.01.03.1.03.000 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					195.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	304.037.212,00	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)			3	4	5.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)					5	195.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel				
	5.01.03.1.03.000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					413.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	413.541.912,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.03.1.03.000 5		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	4.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)			1	413.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP/JP, RP/MD dan RKPD)					210.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		419.742.512,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JP, RP/MD dan RKPD) (Dokumen)	3	1.00	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	3.00		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP/JP, RP/MD dan RKPD) (Dokumen)			3	210.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
		5.01.03.1.03.000 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					195.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		401.984.312,00
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)			3	3	3.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	3.00		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)			3	195.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.01.03.1.03.000 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					250.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		581.366.712,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	3	3.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1.00		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)			1	250.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
	5.02	KEUANGAN					2,835,510,451,746.00							3,361,365,165,277.00	
	5.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					2,638,044,028,528.00							3,151,711,295,120.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					70,342,786,207.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			43,594,516,008.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang Rata Rata Nilai SKP ASN Perangkat			100 100 100									
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.966.688.721,00	(SULAWESI SELATAN)						2.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen			100.000								700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	15	434.086.400,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	15		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			15	434.086.400,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	4	355.623.921,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	4	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			4	355.623.921,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	100	4	61.662.700,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	4	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			4	61.662.700,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	100	49	1.115.315.700,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	49	1.050.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			49	1.115.315.700,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat			100.000	60.211.909.761,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah Perangkat Daerah		27.204.516.008,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	100.00	100.00	139	58.954.703.766,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	139.00	25.024.516.008,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			139	58.954.703.766,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	3077	259.154.200,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	3077	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			3.077	259.154.200,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	100	100	17	340.617.380,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	17	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			17	340.617.380,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100	100	11	129.462.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	11	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			11	129.462.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	100	100	25	527.972.415,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	25	980.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			25	527.972.415,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					206.233.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		380.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100.000						Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					206.233.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		380.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	100	13		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	13		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			13	206.233.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3.311.152.516,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000						Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					168.750.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100.00	100.00	225		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN	435.00		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			225	168.750.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN			
	5.02.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2.676.902.516,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN dan Non ASN		3.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	16		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN	16		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			16	2.676.902.516,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN			
	5.02.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					111.800.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN dan Non ASN		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100	100	50		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN	50		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan (Orang)			50	111.800.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN			
5.02.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						353.700.000,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN dan Non ASN		850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00	100.00	139		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN	60			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan (Orang)			139	353.700.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN				
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.240.855.300,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN dan Non ASN		2.130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor			100.000						ASN dan Non ASN				
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00	100.00	50		60.210.000,00	(SULAWESI SELATAN)			ASN dan Non ASN		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			50	60.210.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	50.00			
	5.02.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100.00	100.00	50	201.630.100,00	(SULAWESI SELATAN)	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	50.00	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			50	201.630.100,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	100	12	232.780.000,00	(SULAWESI SELATAN)	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	12	630.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	232.780.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					746.235.200,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	12	850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	12		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	746.235.200,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
		5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					559.787.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		1.380.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang			100.000						Perangkat Daerah			
5.02.01.1.07.001 0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					559.787.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		1.380.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100.00	100.00	50		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	50.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			50	559.787.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100.000	43.021.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	12	43.021.000,00	(SULAWESI SELATAN)	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	12	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			12	43.021.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah					
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			100.000	2.803.137.909,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		4.700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	100	44	1.336.354.809,00	(SULAWESI SELATAN)	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	44	2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			44	1.336.354.809,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah					
	5.02.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	1	1.197.966.100,00	(SULAWESI SELATAN)	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	1	1.800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			1	1.197.966.100,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah					
	5.02.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	323	268.817.000,00	(SULAWESI SELATAN)	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah	75	900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			323	268.817.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah					
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2,563,816,917,981.00							3,100,896,779,112.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Evaluasi Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tepat Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan			100 100 100 100 100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran				3.269.265.740,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah Perangkat Daerah		6.015.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.000 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	100	100	2	67.676.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	2	195.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)			2	67.676.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	100	100	2	48.240.500,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	2	130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)			2	48.240.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.01.000 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	100	53	306.490.500,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	53	450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)			53	306.490.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.01.000 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100.00	100.00	53.00	316.490.500,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	53.00	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi (Dokumen)			53	316.490.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.01.000 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	100	53	65.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	53	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)			53	65.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.01.000 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	100	53	65.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	53	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.02.02.1.01.000 7		Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverii-Basi (Dokumen)			53	65.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	100	4	1.596.826.240,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	4	3.050.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)			4	1.596.826.240,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.02.1.01.000 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	100	100	3	385.458.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	3	650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)			3	385.458.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.02.1.01.000 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	100	100	5	418.084.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	5	1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)			5	418.084.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Perencanaan Anggaran Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pertanggungjawaban			100.000 100.000	1.915.311.920,00	(SULAWESI SELATAN)					Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	3.300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	100	100	24	357.485.300,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			24

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.02.000 3		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Laporan)			24	357.485.300,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota					236.781.100,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan	100	100	24		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota	24		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)			24	236.781.100,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
	5.02.02.1.02.000 4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					499.990.880,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	100	100	74		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota	74		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)			74	499.990.880,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
	5.02.02.1.02.000 6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah					461.063.000,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)	100	100	2		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota	2		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)			2	461.063.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.02.001 0	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					179.995.440,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan	100	100	24		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota	24		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPelaks anaan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)			24	179.995.440,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
	5.02.02.1.02.001 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah					179.996.200,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian	100	100	361		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota	361		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen)			361	179.996.200,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					3.810.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota		5.640.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan			100.000						24 Kab/Kota				
	5.02.02.1.03.000 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					1.900.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota		2.510.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	100	100	10		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	10		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)			10	1.900.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.03.000 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					250.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100	100	721		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	721				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.03.000 5		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)			721	250.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					450.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	100	100	8		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	8		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)			8	450.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.03.000 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					380.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	100	100	13		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perabgkat Daerah	13		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)			13	380.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perabgkat Daerah			
	5.02.02.1.03.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					300.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perabgkat Daerah		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	100	100	28		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	28		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.03.000 9		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)			28	300.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					130.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	100	100	4		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	4			
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)			4	130.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.02.1.03.001 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					400.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	75		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	75			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)			75	400.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					3.039.956.280,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		4.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Capaian Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan			100.000						Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.04.000 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					299.987.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	100	100	131		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	131		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.04.000 4		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verii-Basi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)			131	299.987.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					589.990.940,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	100	100	1166		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1166			
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dokumen)			1.166	589.990.940,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.02.1.04.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi					1.199.996.300,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		1.700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	100	100	9		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	9			
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)			9	1.199.996.300,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.02.1.04.000 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					399.998.100,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	100	100	25		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	25			
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)			25	399.998.100,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah				
	5.02.02.1.04.001 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi					549.983.440,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah		850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	100	100	288		(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	288			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)			288	549.983.440,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan			100.000	2.551.782.384.041,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah Perangkat Daerah		3.081.341.779.112,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.000 4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	100.00	100.00	1	2.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah	1.00	2.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						4	2.000.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.05.000 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	100	100	4	248.155.272.285,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	4	267.463.547.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						4	248.155.272.285,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.05.000 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	100	100	4	32.000.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	4	40.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						4	32.000.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.02.1.05.001 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	100	100	4	2.269.627.111.756,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah 24 Kab/Kota	4	2.771.678.232.112,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					4	2.269.627.111.756,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota				
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3,884,324,340.00							7,220,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Perencanaan Kebutuhan BMD Ditetapkan Tepat Waktu			100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
			Capaian Penetapan Status Penggunaan BMD Sesuai Ketentuan			100			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
			Cakupan Barang Milik Daerah Yang Dimanfaatkan			55			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
			Persentase Tanah Pemerintah Provinsi Yang Telah Bersertifikat			65			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota			
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan			100.000	3.884.324.340,00	(SULAWESI SELATAN)				24 Kab/Kota 24 Kab/Kota		7.220.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.03.1.01.000 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	100.00	100.00	6.00	313.366.500,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Kab/Kota	6.00	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)			6	313.366.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.03.1.01.000 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	100	2	100.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2	120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar KebutuhanBarang Milik Daerah (Dokumen)			2	100.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.03.1.01.000 3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	100	100	5	53.430.700,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	5	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)			5	53.430.700,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.03.1.01.000 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	100	100	191	247.945.100,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	191	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)			191	247.945.100,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.03.1.01.000 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	100	100	55	753.357.820,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	55	1.350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)			55	753.357.820,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.03.1.01.000 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	100	100	5	938.738.280,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	5	2.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)			5	938.738.280,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.03.1.01.000 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	100	100	1	371.173.500,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1	800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.03.1.01.000 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)			1	371.173.500,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	3	360.965.140,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	3	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)			3	360.965.140,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02.03.1.01.001 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	100	100	59	745.347.300,00	(SULAWESI SELATAN) (Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Perangkat Daerah	59	1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						59	745.347.300,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah			
	5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH					197,466,423,218.00							209,653,870,157.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					182,976,124,688.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			188,787,268,476.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 100.000									
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					613.315.996,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)						932.178.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,			15.000									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3	183.194.172,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov.Sulsel	2	225.999.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Dokumen Renstra dan Renja (Dokumen)			3	183.194.172,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov.Sulsel			
	5.02.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	159.818.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov.Sulsel Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	1	214.609.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.01.000 3		Dokumen RKA OPD (Dokumen)			1	159.818.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					21.841.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		137.134.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	1		
		Dokumen RKA Perubahan OPD (Dokumen)			1	21.841.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
	5.02.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					43.211.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		144.015.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	1		
			Dokumen DPA OPD (Dokumen)			1	43.211.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					109.846.680,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		114.719.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	1		
			Dokumen Perubahan DPA OPD (Dokumen)			1	109.846.680,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					68.055.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		53.599.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	1	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	1		
			Laporan AKIP dan Dokumen e-Sakip (Laporan / Dokumen)			2	68.055.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					27.350.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		42.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	4		
Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)					4	27.350.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					149.652.845.415,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		160.862.062.684,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			13.000						Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					149.037.130.157,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	495.00	159.976.959.884,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	12.00	12.00	490.00		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
		Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)			1	149.037.130.157,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
	5.02.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					53.444.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	12.00	36.840.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00	12.00	12.00		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
		Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			12	53.444.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
	5.02.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					262.626.144,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				ASN Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	12	400.646.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
		Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			12	262.626.144,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
	5.02.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					47.750.398,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	12	91.386.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	12		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
		Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			12	47.750.398,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
5.02.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.256.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		31.668.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.02.01.1.02.000 6		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Keuangan Bapenda Prov. Sulsel	1		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan / Dokumen)			1	3.256.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Keuangan Bapenda Prov. Sulsel				
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12	12	12	105.917.572,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Keuangan Bapenda Prov. Sulsel Dokumen administrasi Bahan Pemeriksaan Bapenda Prov. Sulsel Dokumen administrasi Bahan Pemeriksaan Bapenda Prov. Sulsel	12	178.333.800,00		
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			12	105.917.572,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	5.02.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				139.665.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)					Dokumen administrasi Bahan Pemeriksaan Bapenda Prov. Sulsel Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	12	142.962.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	12	12		(Kota Makasaar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Dokumen)			12	139.665.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
		5.02.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.056.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)					Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	1	3.265.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	1	1		(kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)					1	3.056.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
		5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					188.298.500,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		347.258.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.02.01.1.03.000 1		Jumlah Lporan Administrasi Barang Milik Daerah pada BAPENDA (Laporan)			28.000						Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					12.719.500,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	2	12.719.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bapenda Prov. Sulsel						
	5.02.01.1.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						101.385.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel	1	152.999.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bapenda Prov. Sulsel dan UPT Pendapatan se Sulsel						
			Dokumen Pngamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	101.385.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bapenda Prov. Sulsel dan UPT Pendapatan se Sulsel						
	5.02.01.1.03.000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						6.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel dan UPT Pendapatan se Sulsel	1	6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	1	1	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	kantor Bapenda Prov. Sulsel						
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	6.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	kantor Bapenda Prov. Sulsel						
	5.02.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						5.052.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				kantor Bapenda Prov. Sulsel	25	5.052.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25	25	25		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bapenda Prov. Sulsel						
			Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan / Dokumen)			12	5.052.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bapenda Prov. Sulsel						
	5.02.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						52.642.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel	4	159.986.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	4		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bapenda Prov. Sulsel						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.03.000 6		Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)			4	52.642.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					6.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel		6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	4	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel	4			
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan / Dokumen)			2	6.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.03.000 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					4.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel		4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor Bapenda Prov. Sulsel	1			
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	4.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					248.486.144,00	(SULAWESI SELATAN)				kantor Bapenda Prov. Sulsel		785.364.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			14.000					kantor Bapenda Prov. Sulsel				
	5.02.01.1.04.000 2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					107.406.572,00	(SULAWESI SELATAN)				kantor Bapenda Prov. Sulsel		302.442.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	1	1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bapenda Prov. Sulsel	1			
			Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)			12	107.406.572,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.04.000 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					58.445.500,00	(SULAWESI SELATAN)				Bapenda Prov. Sulsel		117.826.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	1	1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bapenda Prov. Sulsel	1			
			Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)			1	58.445.500,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bapenda Prov. Sulsel			
5.02.01.1.04.000 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah					82.634.072,00	(SULAWESI SELATAN)				Bapenda Prov. Sulsel		365.094.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12	12	12	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bapenda Prov. Sulsel	12				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan / Dokumen)			12	82.634.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bapenda Prov. Sulsel				
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Laporan / Dokumen)			1.000	1.030.099.152,00	(SULAWESI SELATAN)				Bapenda Prov. Sulsel Bapenda Prov. Sulsel		1.029.557.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	11	11	11	281.007.288,00	(SULAWESI SELATAN)				Bapenda Prov. Sulsel ASN Bapenda Prov. Sulsel	11	241.956.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			11	281.007.288,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Bapenda Prov. Sulsel							
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	98.785.000,00	(SULAWESI SELATAN)			ASN Bapenda Prov. Sulsel					
	5.02.01.1.05.000 3		Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Laporan / Dokumen)			2	98.785.000,00	(kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bapenda Prov. Sulsel	1	207.728.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	610.806.864,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN Bapenda Prov. Sulsel ASN Bapenda Prov. Sulsel	1	250.978.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			12	610.806.864,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Bapenda Prov. Sulsel					
	5.02.01.1.05.000 9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	506	506	1	6.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)			ASN Bapenda Prov. Sulsel	33			
		Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			5	6.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Bapenda Prov. Sulsel							
	5.02.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	150	2	3.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)			ASN Bapenda Prov. Sulsel	5		6.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang)			5	3.000.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Bapenda Prov. Sulsel							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	36	30.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bapenda Prov. Sulsel ASN Bapenda Prov. Sulsel ASN Bapenda Prov. Sulsel	20	201.948.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Kantor			100.000	5.296.057.680,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN Bapenda Prov. Sulsel ASN Bapenda Prov. Sulsel		4.361.782.850,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	474	484	490 494	102.365.000,00 102.365.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel	484	107.712.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	300	400	589 150	22.350.000,00 22.350.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel	733	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) Bahan Logistik Kantor (Unit)	50	60	73 50	1.297.573.820,00 1.297.573.820,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel	74	336.424.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Barang Cetakan dan Penggandaan (Unit)	20	30	28 40	2.600.000.000,00 2.600.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel	31	2.682.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12 12	510.785.500,00 510.785.500,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Tamu Bapenda Prov. Sulsel Tamu Bapenda Prov. Sulsel	12	376.101.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					498.756.000,00					Tamu Bapenda Prov. Sulsel	12	575.503.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12.00		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bapenda Prov. Sulsel			
			penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	498.756.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					264.227.360,00	(SULAWESI SELATAN)				ASN Bapenda Prov. Sulsel	4	228.542.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	4	4		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
			Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			25	264.227.360,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					5.842.082.949,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel		4.018.522.186,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			800.000						Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					329.395.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel	12	221.220.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	20	36		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
			Mebel yang Disediakan (Unit)			10	329.395.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	30	63	2.157.433.949,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel	22	2.287.802.186,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			10	2.157.433.949,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	1	520.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel	6	1.297.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang (Unit)			2	520.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
			5.02.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	550	600	783		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			18	2.835.254.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel				
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.000	12.368.515.499,00	(SULAWESI SELATAN), (KAB. JENEPONTO)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel		10.121.181.224,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	4	110.000.000,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel	4	211.990.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.000 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	12	12	12	5.985.524.000,00	(KAB. JENEPONTO) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel	12	6.718.524.376,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			5.02.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor (Laporan)	4	4	4	2.850.394.651,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel	4	96.000.000,00
	5.02.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	4	4	4	3.422.596.848,00	(SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN) (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel	4	3.094.666.848,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			406.000	7.736.423.353,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kantor Bapenda Prov. Sulsel		6.329.361.632,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.000 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	155	155	155	701.278.000,00	(SULAWESI SELATAN) (SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel Kendaraan Dinas Bapenda Prov. Sulsel	71	1.114.030.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.09.000 2		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara (Unit)			155	701.278.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas Bapenda Prov. Sulsel			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155	155	155	599.578.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas Bapenda Prov. Sulsel	71	654.840.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	155	599.578.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas Bapenda Prov. Sulsel				
	5.02.01.1.09.000 5	Pemeliharaan Mebel				55.500.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kendaraan Dinas Bapenda Prov. Sulsel		495.085.720,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	50	50	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel	50			
			Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	55.500.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel					
	5.02.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				492.633.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel	120	55.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	120	120	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel				
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	492.633.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel					
	5.02.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				300.085.720,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel	5	422.370.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5	5	5	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel				
			Aset Tak Berwujud (Aplikasi)	5	300.085.720,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel					
	5.02.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.587.348.633,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel	26	3.587.535.912,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	26	26	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel				
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	25	5.587.348.633,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel					
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					804,109,644.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			969,376,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					454.004.672,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel		575.258.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			9.000					Kantor Bapenda Prov. Sulsel				
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					43.733.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel		81.244.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor bapenda Prov. Sulsel	1					
			Dokumen KUA dan PPA (Dokumen)	1		1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor bapenda Prov. Sulsel						
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					63.806.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor bapenda Prov. Sulsel		78.664.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bapenda Prov. Sulsel	1					
			Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)			1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor Bapenda Prov. Sulsel						
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD					7.021.700,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor Bapenda Prov. Sulsel		22.135.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RKA OPD prov. Sulsel	1					
			RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)			1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RKA OPD prov. Sulsel						
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					9.674.600,00	(SULAWESI SELATAN)				RKA OPD prov. Sulsel		24.788.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RKA Perubahan OPD Prov. Sulsel	1					
Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)					1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RKA Perubahan OPD Prov. Sulsel							
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD					12.332.000,00	(SULAWESI SELATAN)				RKA Perubahan OPD Prov. Sulsel		27.429.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPA OPD Prov. Sulsel	1						
		DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)			1	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPA OPD Prov. Sulsel							
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					11.847.000,00	(SULAWESI SELATAN)				DPA OPD Prov. Sulsel		24.720.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	1			(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPA Perubahan OPD Prov. Sulsel	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.01.000 7		Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)			1	11.847.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPA Perubahan OPD Prov. Sulsel			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					47.992.100,00	(SULAWESI SELATAN)			DPA Perubahan OPD Prov. Sulsel		66.073.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	1	1			(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Sulsel	1		
			Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)			1		47.992.100,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Sulsel			
	5.02.02.1.01.000 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					40.571.100,00	(SULAWESI SELATAN)			Pemerintah Prov. Sulsel		38.395.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	1	1	1			(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Susel	1		
			Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)			1		40.571.100,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Susel			
	5.02.02.1.01.001 0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					217.027.172,00	(SULAWESI SELATAN)			Pemerintah Prov. Sulsel		211.805.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	1	1			(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Sulsel	1		
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)					1		217.027.172,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Sulsel				
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					350.104.972,00	(SULAWESI SELATAN)			Pemerintah Prov. Sulsel		394.117.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
		Jumlah Laporan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan			14.000					Pemerintah Prov. Sulsel					
	5.02.02.1.04.000 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					318.477.972,00	(SULAWESI SELATAN)			Pemerintah Prov. Sulsel		338.386.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	12	12	12			(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Sulsel	12		
			Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)			1	318.477.972,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Sulsel				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.04.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	2	2	2	31.627.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Prov. Sulsel	2	55.731.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						2	31.627.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			
						2	31.627.000,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					13,686,188,886.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			19,897,225,681.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase Peningkatan PAD (%)			5.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah			12.000	13.686.188.886,00	(SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Prov. Sulsel		19.897.225.681,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.000 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	0.00	4	4	643.648.800,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel	4	757.418.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)			12	643.648.800,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel			
	5.02.04.1.01.000 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	0.00	12	12	80.896.500,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel	12	170.355.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)			4	80.896.500,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel			
	5.02.04.1.01.000 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					68.818.400,00	(SULAWESI SELATAN)				Kantor badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel		90.833.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.04.1.01.000 4			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0.00	1	1		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan	1		
			Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)			12	68.818.400,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					7.801.006.120,00	(SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Sulawesi Selatan		867.120.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	750	750	750		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor UPT Bapenda se Sulsel	750		
5.02.04.1.01.000 5			Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)			25	7.801.006.120,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor UPT Bapenda se Sulsel			
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				899.554.000,00	(SULAWESI SELATAN)			kantor UPT Bapenda se Sulsel		361.960.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100	100	100		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat wajib pajak Sulsel		100	
			Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)			12	899.554.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat wajib pajak Sulsel			
5.02.04.1.01.000 6		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					595.280.288,00	(SULAWESI SELATAN)			Masyarakat wajib pajak Sulsel		359.576.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	4	4	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bapenda Prov. Sulsel	4		
			Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)			12	595.280.288,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bapenda Prov. Sulsel			
		5.02.04.1.01.000 7		Penetapan Wajib Pajak Daerah					500.812.000,00	(SULAWESI SELATAN)			Bapenda Prov. Sulsel		138.117.900,00
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	0				100	100		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masayarakat Wajib Pajak Sulsel	100		
	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)					12	500.812.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masayarakat Wajib Pajak Sulsel			
5.02.04.1.01.000 8				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					156.858.072,00	(SULAWESI SELATAN)			Masayarakat Wajib Pajak Sulsel		319.557.900,00
		Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12		12	12		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Wajib Pajak Sulsel	12		
			Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Laporan)			12	156.858.072,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Wajib Pajak Sulsel			
		5.02.04.1.01.000 9		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					332.754.572,00	(SULAWESI SELATAN)			Masyarakat Wajib Pajak Sulsel		100.660.800,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	5.02.04.1.01.001 0		Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	4	4		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel	4			
			Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen)			4	332.754.572,00	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel				
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen)	0.00	100	100	2.291.492.600,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Bapenda Prov. Sulsel masyarakat wajib apak sulsel	100	1.140.891.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				12	2.291.492.600,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat wajib apak sulsel						
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat) Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen)				139.073.072,00	(SULAWESI SELATAN)				masyarakat wajib apak sulsel Masyarakat wajib pajak sulsel	2	889.145.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				2	2	2	139.073.072,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat wajib pajak sulsel				
	5.02.04.1.01.001 2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan) Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	4	4	4	151.670.362,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat wajib pajak sulsel Aparat Bapenda Prov. Sulsel	4	2.500.943.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				12	151.670.362,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparat Bapenda Prov. Sulsel						
	5.02.04.1.01.001 3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4	4	4	24.324.100,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparat Bapenda Prov. Sulsel Aparat Bapenda Prov. Sulsel	4	12.200.643.981,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				12	24.324.100,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparat Bapenda Prov. Sulsel						
		5.03	KEPEGAWAIAN					28,456,252,177.00							30,927,757,357.99	
		5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					28,456,252,177.00							30,927,757,357.99	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,937,313,977.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			26,668,598,509.99	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			96.000 100.000 100.000										
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					198.753.800,00	(KOTA MAKASSAR)						213.514.820,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.03.01.1.01.000 1		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			30		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)					30			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					27.737.000,00	(KOTA MAKASSAR)					Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2.00	16.845.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	2.00	2.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	27.737.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar,, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
	5.03.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					16.845.500,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00	19.372.325,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
			Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)			1	16.845.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumiharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
		5.03.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					8.585.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00	9.872.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)			1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)					1	8.585.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
	5.03.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					13.916.500,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		16.003.975,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.01.000 5		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			1	13.916.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					10.247.500,00	(KOTA MAKASSAR)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		11.784.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD (Dokumen)			1	10.247.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
	5.03.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					11.145.000,00	(KOTA MAKASSAR)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		12.816.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12.00		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			12	11.145.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					110.277.300,00	(KOTA MAKASSAR)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		126.818.895,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat (Laporan)			12	110.277.300,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.726.464.068,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	54	22.244.127.319,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			54.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
	5.03.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.599.228.192,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	135.00	22.097.806.062,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	135.00	140.00	130.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			130	18.599.228.192,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
	5.03.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					23.532.076,00	(KOTA MAKASSAR)				ASN Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12	27.061.887,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			12	23.532.076,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
	5.03.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					24.160.300,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12	27.784.345,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			12	12	12		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.03.01.1.02.000 4		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			12	24.160.300,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					3.150.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4.00	3.622.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.00	4.00	4.00			(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			4	3.150.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel					
	5.03.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.940.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00	9.131.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1.00			(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)			1	7.940.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
	5.03.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					8.453.500,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00	9.721.525,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.00	1.00	1.00			(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			1	8.453.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
5.03.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						60.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		69.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12.00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)			12	60.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					34.661.100,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		77.625.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (Unit)			2847.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2847			
	5.03.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					8.028.100,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		17.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.00	2.00	2.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2.00		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2	8.028.100,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		5.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	1.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
5.03.01.1.03.000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					2.400.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		5.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.03.000 4		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	1	2		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2		
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)			2	2.400.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					3.500.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		8.625.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.00	1.00	3.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	3.00		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			3	3.500.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		5.03.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		11.500.000,00
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			2	2	2		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2		
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					2	10.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					9.733.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		28.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.00	2.00	5.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	5.00		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan)			5	9.733.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.430.387.040,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		1.612.519.688,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			8.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	8			
	5.03.01.1.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		20.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.00	2	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			1	1.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					2.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		28.175.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.00	7	7.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	7.00		
			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia (Paket)			7	2.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1.294.447.040,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		1.318.694.688,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	1.294.447.040,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					5.146.700,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		11.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.05.000 5		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1	5.146.700,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					17.193.300,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		28.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	1	2		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2		
	5.03.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			2	17.193.300,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
							-	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		32.775.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.00	18.00	3.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	3.00		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			3		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					85.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		97.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	550.00	600.00	150.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	160.00		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			150	85.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					25.600.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		74.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	450	130		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	140		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan (Orang)			130	25.600.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.491.414.395,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		1.350.336.313,99	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			265.000		(Badan Kepegaiwan Daerah Prov.Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	259		
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			500.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov.Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makaasar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	550		
	5.03.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					46.963.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		69.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	110.00	115.00	115		(Badan Kepegawain Daerah Prov.Sulsel Jl.Urip Sumoharjo No.269 Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	117		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			115	46.963.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					462.676.495,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		28.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50	110	50		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	51		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.06.000 3		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			50	462.676.495,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	50.00	55	55.00	15.812.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	56.00	40.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Paket)			55	15.812.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30	30	30	248.582.200,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	35	287.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)			30	248.582.200,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	110	15	-	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	20	1.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)			15		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1	2	305.872.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2	368.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.06.000 9		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			2	305.872.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					350.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	275	480.361.313,99	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	210	220	250		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			250	350.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					31.508.200,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	135	40.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	137	140	130		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			130	31.508.200,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					30.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12	34.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	12		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD (Dokumen)			12	30.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					508.906.174,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	36	396.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			31.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1	34.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			1	30.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					899.974,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12.00	86.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	25.00	30.00	10.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
			Tersedianya Mebel (Paket)			10	899.974,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					413.006.200,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	15.00	103.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	55.00	60.00	12.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			12	413.006.200,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.07.000 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					45.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2.00	57.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1.00	1.00	2.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
			Tersedianya Aset Tak Berwujud (Unit)			2	45.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00	57.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	1.00	1.00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel						
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			1	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel						
	5.03.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	5.00	57.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	15.00	5.00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel						
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			5	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel						
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.057.400,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4	101.550.369,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			4.000	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)		Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel						
	5.03.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					31.157.400,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1100.00	46.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10541.00	11000.00	1000.00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			1.000	31.157.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel						
	5.03.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3.900.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		4.950.369,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12.00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	3.900.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.00	2.00	2.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2.00	23.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			2	1.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12.00	27.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	1.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					509.670.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		672.175.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			112.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	114		
	5.03.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					274.070.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		345.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40.00	40.00	27.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	27.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.09.000 5	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			27	274.070.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	28.00	22.425.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.00	50.00	26.00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel (Unit)			26	1.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					58.600.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	55.00	74.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55.00	60.00	55.00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			55	58.600.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					75.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2.00	57.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1.00	4.00	2.00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Unit)			2	75.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
5.03.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2.00	115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00	10.00	2.00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.09.001 0		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			2	100.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00	57.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	10.00	1.00			(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			1	1.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5,518,938,200.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			4,259,158,848.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN (%) Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta (%) Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik (%)			65.000 85.000 93.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					2.762.909.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		664.153.175,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Pengangkatan ASN sesuai dengan Rencana kebutuhan yang transparan (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100		
			Persentase Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100		
			Persentase Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.1.01.000 1		Cakupan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Kepegawaian (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100		
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen)				40.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen)			1	40.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.01.000 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				4.505.500,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)			2	4.505.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.01.000 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1.00	3	1.00	1.350.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)					Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		208.952.585,00
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK serta terlaksananya dana hibah kegiatan IPDN (Dokumen)					1	1.350.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00			
5.03.02.1.01.000 4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						25.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		35.167.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel)Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.1.01.000 5		<i>Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)</i>			1	25.000.000,00	<i>(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel</i>			
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN					24.721.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		28.429.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)</i>	1.00	1.00	1.00		<i>(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel</i>	1.00		
			<i>Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)</i>			1	24.721.000,00	<i>(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel</i>			
	5.03.02.1.01.000 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					44.300.100,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		50.945.115,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)</i>	1.00	3	1.00		<i>(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel</i>	1.00		
			<i>Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)</i>			1	44.300.100,00	<i>(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel</i>			
	5.03.02.1.01.000 7	Evaluasi Pemberhentian ASN					28.910.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		33.246.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Laporan)</i>	1.00	1.00	1.00		<i>(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel</i>	1.00		
			<i>Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN (Laporan)</i>			1	28.910.000,00	<i>(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel</i>			
	5.03.02.1.01.000 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						1.100.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		209.118.990,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.1.01.000 9		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN dan terlaksananya dana hibah kegiatan PWRI (Lembaga)			1	1.100.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	36.100.900,00	(Kota MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00	41.516.035,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)			1	36.100.900,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.01.001 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				7.171.500,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		8.247.225,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1	7.171.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		5.03.02.1.01.001 1	Pengelolaan Data Kepegawaian				67.966.500,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		9.161.475,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)			1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
	Terkelolanya Data Kepegawaian (Dokumen)					1	67.966.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.01.001 2		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				34.234.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		39.369.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)			1	34.234.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN					1.200.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		1.351.383.658,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang obyektif dan tepat waktu (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100		
	5.03.02.1.02.000 1	Pengelolaan Mutasi ASN					269.278.400,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		298.182.005,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (Dokumen)	4.00	4.00	4.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4.00		
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (Dokumen)			4	269.278.400,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.02.000 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					475.357.900,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		546.661.038,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Laporan)	2.00	2.00	2.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2.00		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Laporan)			2	475.357.900,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.02.000 3	Pengelolaan Promosi ASN					455.363.700,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		506.540.615,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)			1	455.363.700,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN					950.522.400,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		1.380.600.760,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Pengembangan Kompetensi ASN (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	100		
	5.03.02.1.03.000 1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					140.000.200,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		161.000.230,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	60.00	100.00	60.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	80.00		
			Meningkatnya kapasitas ASN (Orang)			60	140.000.200,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel			
	5.03.02.1.03.000 2	Pengelolaan Assessment Center					310.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				ASN Lingkup Pemprov. Sulsel		529.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel (Dokumen)			1	310.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
5.03.02.1.03.000 3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN					20.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		41.435.765,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02.1.03.000 4			Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)			1	20.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel			
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					75.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel		99.438.315,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	1.00			
5.03.02.1.03.000 5		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					35.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				ASN Lingkup Pemprov. Sulsel		56.656.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00			
			Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)			1	35.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
5.03.02.1.03.000 6		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN					27.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		36.353.685,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (Orang)	100.00	200.00	100.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. SulselJl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	100.00			
			Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN (Orang)			100	27.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup Pemprov. Sulsel				
5.03.02.1.03.000 7		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN					26.561.000,00	(KOTA MAKASSAR)				ASN Lingkup Pemprov. Sulsel		30.545.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.1.03.000 8		Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)			1	26.561.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional					90.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	300.00	110.499.130,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional (Orang)	300.00	550.00	300.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
			Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional (Orang)			300	90.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
	5.03.02.1.03.000 9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional					45.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel	1.00	69.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
			Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (Dokumen)			1	45.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
		5.03.02.1.03.001 0	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN					27.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel	100.00	39.100.000,00
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Orang)			100.00	100.00	100.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
	Terfasilitasinya Sertifikasi Fungsional ASN (Orang)					100	27.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
5.03.02.1.03.001 2	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						30.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)				Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel		44.458.310,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.1.03.001 3		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel	1.00		
			Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Laporan)			1	30.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					84.961.200,00	(KOTA MAKASSAR)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel		112.190.665,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (Orang)	120.00	120.00	120.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel	130.00		
	5.03.02.1.03.001 4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional (Orang)			120	84.961.200,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
							40.000.000,00	(KOTA MAKASSAR)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel		50.922.575,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Dokumen)	4.00	4.00	4.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel	4.00		
			Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Dokumen)			4	40.000.000,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel			
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					605.506.300,00	(KOTA MAKASSAR)				Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel		863.021.255,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Evaluasi Kinerja Pegawai Berbasis TI (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel	100		
			Persentase Pemberian Penghargaan Pegawai (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel	100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.1.04.000 1		Persentase Pelayanan Pembinaan ASN yang terselesaikan (%)			100.000		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)				Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel	100		
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					117.155.500,00	(KOTA MAKASSAR)				Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov. Sulsel		138.636.525,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)			1	117.155.500,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.04.000 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					87.499.700,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		118.971.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh PD Lingkup Pemprov	1.00		
			Tertersusunnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)			1	87.499.700,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh PD Lingkup Pemprov			
	5.03.02.1.04.000 3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					55.611.800,00	(KOTA MAKASSAR)				Seluruh PD Lingkup Pemprov		64.974.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	1.00	1.00	1.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1.00		
			Tertersusunnya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)			1	55.611.800,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel			
	5.03.02.1.04.000 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					47.596.100,00	(KOTA MAKASSAR)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel		82.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)			100.00	30.00	10.00		(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	10.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.1.04.000 5		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN (Orang)			10	47.596.100,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel			
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	1000.00	300.00	1000.00	64.087.100,00	(KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	1000.00	87.565.715,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN (Orang)			1.000	64.087.100,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel			
	5.03.02.1.04.000 6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	58.786.800,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	1.00	60.176.970,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)			1	58.786.800,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel			
	5.03.02.1.04.000 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	50	50	50	96.594.100,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	48	105.196.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Disiplin ASN (Orang)			50	96.594.100,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel			
	5.03.02.1.04.000 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	24.00	23.00	24.00	44.007.700,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	25.00	89.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.03.02.1.04.000 9		Tertaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)			24	44.007.700,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel				
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					17.951.700,00	(KOTA MAKASSAR)				ASN Lingkup Pemprov. Sulsel		55.199.655,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	20.00	27.00	20.00			(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	20.00		
	5.03.02.1.04.001 0	Evaluasi Disiplin ASN					20	17.951.700,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1.00	1.00	1.00			(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemprov. Sulsel	1.00	59.799.885,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Tertaksananya Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)			1	16.215.800,00	(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel				
		5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					35,275,715,355.00							49,533,693,092.00	
	5.04	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA					35,275,715,355.00							49,533,693,092.00		
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31,616,193,388.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			39,317,349,835.00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			100.000 100.000 0.010										
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					912.342.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1.854.513.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			23.000		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				28				
	5.04.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					773.465.880,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			1.160.198.820,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.01.1.01.000 2		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	4		
			Pemenuhan Dokumen Perencanaan (Dokumen)			4	773.465.880,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					18.240.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		117.360.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	1		
	5.04.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pemenuhan Dokumen Perencanaan RKA Pokok (Dokumen)			1	18.240.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	1	117.360.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pemenuhan Dokumen RKA Perubahan (Dokumen)			1	18.240.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					18.240.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		117.360.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	1		
			Pemenuhan Dokumen DPA Pokok (Dokumen)			1	18.240.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					18.240.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		117.360.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.01.1.01.000 7		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	1		
			Pemenuhan Dokumen DPA Perubahan (Dokumen)			1	18.240.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					65.916.120,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		224.874.180,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10.00	15.00	15		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	25.00		
			Pemenuhan Laporan Evaluasi Kinerja (Dokumen)			15	65.916.120,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.816.865.288,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		26.572.477.181,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			56.000		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	56		
	5.04.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					24.326.671.888,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		25.475.387.081,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	134	140	140		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	145		
			Pemenuhan Pembayaran Gaji ASN (Orang / Bulan)			140	24.326.671.888,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					364.951.680,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		547.427.520,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.01.1.02.000 4		Pemenuhan Dokumen Penatausahaan (Dokumen)			12	364.951.680,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					30.168.840,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	12	121.753.260,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	12	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
			Pemenuhan Dokumen Akuntansi (Dokumen)			12	30.168.840,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					30.252.240,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	2	121.878.360,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
			Pemenuhan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)			2	30.252.240,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					30.096.480,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	2	121.644.720,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	2	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
			Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			2	30.096.480,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					23.727.600,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	4	112.091.400,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran			4	4	4	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pemenuhan Laporan Triwulan (Laporan)			4	23.727.600,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				10.996.560,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	2	72.294.840,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				2	2	2	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
				Pemenuhan Dokumen Analisis Prognosis (Dokumen)			2	10.996.560,00			(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					225.957.600,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		712.723.680,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			12	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	16				
	5.04.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					225.957.600,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		712.723.680,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	12				
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		2.495.272.694,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)			50.000	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	55				
			Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)			60.000	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	65				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					46.785.120,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	15	412.177.680,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15	15		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
			Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik (Paket)			15	46.785.120,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					581.603.458,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	24	512.405.186,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	24	24		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
			Pemenuhan Komponen Peralatan Kantor (Paket)			24	581.603.458,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					59.265.000,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	5	358.677.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	5		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
			Pemenuhan Barang Cetakan (Paket)			5	59.265.000,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					212.523.660,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	12	544.542.588,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
			Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	212.523.660,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					350.816.800,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	12	667.470.240,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
			Pemenuhan Laporan Konsultasi (Laporan)			12	350.816.800,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					380.000.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	44	774.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)			31		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
	5.04.01.1.07.000 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					100.000.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	1	324.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
			Pemenuhan Pengadaan Aset Tak Berwujud (Unit)			1	100.000.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
	5.04.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					280.000.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	35	450.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	25	30		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
				Pemenuhan Pengadaan Saran dan Prasarana (Unit)			30	280.000.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
		5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.675.088.642,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		4.618.860.804,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			24.000		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	24		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	12	1.855.188.702,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Pemenuhan Pembayaran Listrik (Laporan)			12	1.024.150.960,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	5.04.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				1.650.937.682,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	12	2.763.672.102,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
				12	12	12		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
				Pemenuhan Layanan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			12	1.650.937.682,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			54.000	1.354.945.820,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	59	2.289.502.476,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
								(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan				
	5.04.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	15	355.493.800,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	15	823.488.840,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Pemenuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)			15	355.493.800,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					142.352.020,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		508.233.636,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	4		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	4		
			Pemenuhan Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Unit)			4	142.352.020,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					50.000.000,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		225.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	1		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	1		
			Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak berwujud (Unit)			1	50.000.000,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					610.000.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		378.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	2		
			Pemenuhan Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)			2	610.000.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					197.100.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		354.780.000,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	25	30		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	35		
			Pemenuhan Pemeliharaan Saran dan Prasarana (Unit)			30	197.100.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3,659,521,967.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			10,216,343,257.00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			<i>Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan</i>			50.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
			<i>Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (%)</i>			50.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
			<i>Jumlah Akreditasi Program Pelatihan (Sertifikat)</i>			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
						6.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis					975.352.744,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		2.580.288.181,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			<i>Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,</i>			250	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan	300				
	5.04.02.1.01.000 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					898.196.184,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN Lingkup BPSDM ProvinSi Sulawesi Selatan		2.113.189.981,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)</i>	250	250	250	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	3450				
			<i>Pemenuhan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi (Orang)</i>			250	898.196.184,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN ProvinSi Sulawesi Selatan				
	5.04.02.1.01.000 4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					77.156.560,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan		467.098.200,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi</i>	1	1	1	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemenuhan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen)			1	77.156.560,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat Pemprov SulSel yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dan Fungsional (Orang)			450	2.684.169.223,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)			04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan		7.636.055.076,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah PNS Pemprov SulSel yang telah bersertifikat kompetensi (Orang)			15		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	500		
								(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	30		
	5.04.02.1.02.000 3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota					62.731.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan		220.915.800,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	15	15	15		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	15		
			Pemenuhan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Orang)			15	62.731.000,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.02.1.02.000 4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar					112.881.666,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan		549.696.396,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	12	12	12		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	12		
			Pemenuhan Laporan Pengelolaan Kelembagaan (Dokumen)			12	112.881.666,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN ProvinSi Sulawesi Selatan			
	5.04.02.1.02.000 5	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga					226.304.584,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan		913.599.540,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	12	12	12		(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	12		
			Pemenuhan Dokumen pelaksaasn kerjasama antar lembaga (Dokumen)			12	226.304.584,00	(BPSDM Prov. SulSel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN ProvinSi Sulawesi Selatan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.02.1.02.000 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					2.051.442.373,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	580.00	5.224.062.220,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	350.00	400.00	450.00	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
			Pemenuhan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi pejabat Daerah (Orang)			450	2.051.442.373,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan					
	5.04.02.1.02.000 8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					230.809.600,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan	1	727.781.120,00	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan	1	1	1	(BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan						
			Pemenuhan dokumen hasil pembinaan , pengordinasian (Dokumen)			1	230.809.600,00	(BPSDM Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN ProvinSi Sulawesi Selatan					
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2,785,000,000.00							5,892,908,998.00	
	5.05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2,785,000,000.00							5,892,908,998.00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2,785,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			5,892,908,998.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah (%)			30			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			
			Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi (%)			13			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					550.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		1.604.620.056,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Laporan)			3		(SULAWESI SELATAN)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2			
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	1	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	0.00		
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)			1	200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.01.000 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majel is Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Keme nterian/Lembag a yang terkait dan Stakeholder		735.909.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1	2.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.00					
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)			1	150.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majel is Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Keme nterian/Lembag a yang terkait dan Stakeholder			
	5.05.02.1.01.001 4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majel is Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Keme nterian/Lembag a yang terkait dan Stakeholder		868.711.056,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)</i>	1	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Le mbaga yang terkait dan Stakeholder</i>	1.00		
			<i>Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)</i>			1	200.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<i>Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Le mbaga yang terkait dan Stakeholder</i>			
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					550.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				<i>Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Le mbaga yang terkait dan Stakeholder</i>		590.434.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			<i>Jumlah Penelitian dan Pengaembangan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan (Dokumen)</i>			3		(SULAWESI SELATAN)				<i>Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Le mbaga yang terkait dan Stakeholder</i>	2		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.02.000 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lem- baga yang terkait dan Stakeholder		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kem- enterian/Lembag- a yang terkait dan Stakeholder	0.00		
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (Dokumen)			1	200.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kem- enterian/Lembag- a yang terkait dan Stakeholder			
	5.05.02.1.02.000 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kem- enterian/Lembag- a yang terkait dan Stakeholder		295.217.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.02.000 6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5	0.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majel is Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Keme nterian/Lembag a yang terkait dan Stakeholder	1.00		
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)			1	150.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majel is Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Keme nterian/Lembag a yang terkait dan Stakeholder			
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					200.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majel is Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Keme nterian/Lembag a yang terkait dan Stakeholder		295.217.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majel is Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Keme nterian/Lembag a yang terkait dan Stakeholder	1.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)			1	200.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder			
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					900.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder		1.763.040.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Penelitian dan Pengaembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Dokumen)			5		(SULAWESI SELATAN)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	7			
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						230.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder		-

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.03.000 4		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	0.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	0.00		
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)			1	230.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder			
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					210.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder		693.547.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	3	2.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	2.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.03.000 5		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)			2	210.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder			
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					230.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder		774.276.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	0.00	2.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	2.00		
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)			2	230.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.03.000 7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					230.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majel is Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Keme nterian/Lembag a yang terkait dan Stakeholder		295.217.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	3	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.00					
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)			1	230.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi					785.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Le mbaga yang terkait dan Stakeholder		1.934.814.062,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.04.000 1		Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi (OPD)			14		(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Le mbaga yang terkait dan Stakeholder	14		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					450.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Le mbaga yang terkait dan Stakeholder		740.816.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1.00		
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)			1	450.000.000,00	(-. SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.04.000 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					50.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder		281.854.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	3	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.00					
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)			1	50.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	5.05.02.1.04.000 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					160.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder		321.581.176,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.04.000 4		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	3	3.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1.00		
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)			1	160.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder				
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					80.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder		269.680.986,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5	1.00	1.00		(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.04.000 5		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)			1	80.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder			
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					45.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder		320.881.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1.00	1.00			(SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1.00		
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)			1	45.000.000,00	(-, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov.Sulsel, Kab./Kota,Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, PTN/PTS,Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder				
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG					19,238,427,510.00							22,041,629,230.76	
	5.07	BADAN PENGHUBUNG					19,238,427,510.00							22,041,629,230.76	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13,559,077,930.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			15,075,780,668.00	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Temuan LHP Yang Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat			55.000 93.000 100.000									
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					340.000.000,00							521.818.182,00	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)			100.000		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)				521.818.18 2			
	5.07.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000,00							75.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah	2		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakatua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					50.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		75.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1	50.000.000,00	(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1	75.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
			Pembayaran Sub-Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya.", Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					50.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		75.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1			
			Pembayaran Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakatua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya." , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah				
		5.07.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					50.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		75.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah	1		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakatua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah				
5.07.01.1.01.000 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					50.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		75.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.01.000 7		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah	1		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		65.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaÃ, Penghubung Daerah	4		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			4	40.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaÃ, Penghubung Daerah			
		5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.078.680.014,00					BadaÃ, Penghubung Daerah		9.224.134.559,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.02.000 1		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)			100.000		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)				BadaA., Penghubung Daerah	922413456 0		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.993.680.014,00					BadaA., Penghubung Daerah		9.030.043.651,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	54	54	58		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BadaA., Penghubung Daerah	60		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)			54	8.993.680.014,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					20.000.000,00						BadaA., Penghubung Daerah		56.363.636,00
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1.00		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.02.000 7		Pembayaran Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	20.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0.00	0.00	12.00	50.000.000,00	(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	12	86.363.636,00	BADAN PENGHUBUNG
			Pembayaran Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)			12	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan- Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta.- Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali- Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					15.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		51.363.636,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0.00	0.00	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)			1	15.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		167.171.716,00	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah (%)			100.000	(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)			BadaA., Penghubung Daerah	167171717				
	5.07.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					15.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		45.303.030,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		BadaA., Penghubung Daerah	1				
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		BadaA., Penghubung Daerah					
5.07.01.1.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		36.363.636,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	2		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	2	40.202.020,00	BADAN PENGHUBUNG
			Pembayaran Sub-Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)			2	20.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
5.07.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0.00	12		15.000.000,00	(Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah Badan Penghubung Daerah	12	45.303.030,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			12	15.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		101.565.656,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah (%)			80		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)			Badan Penghubung Daerah	101565656			
	5.07.01.1.04.000 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah					10.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		53.181.818,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0.00	0.00	12.00		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah	12		
			Pembayaran sub-Kegiatan Pengelolaan Data Retribusi Daerah (Laporan)			12	10.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan- Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta.- Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali.- Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.04.000 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					10.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		48.383.838,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	0.00	0.00	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			1	10.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakatua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					290.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		471.818.180,00	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)			85.000		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)			BadaA., Penghubung Daerah	471818182			
	5.07.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					100.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		145.454.545,00	BADAN PENGHUBUNG
		Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00	82		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah	82		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.05.000 3		Pembayaran Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			82	100.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					20.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		65.454.545,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	0.00	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah	12		
	5.07.01.1.05.000 5		Pembayaran Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			12	20.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					20.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		65.454.545,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0.00	0.00	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA, Penghubung Daerah	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.05.000 9		Pembayaran Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			12	20.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					150.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		195.454.545,00	BADAN PENGHUBUNG
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	0.00	34	(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	44				
			Pembayaran Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			34	150.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					899.704.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		1.081.522.180,00	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Jumlah Tamu Yang difasilitasi (%)			100.000	(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)				BadaA., Penghubung Daerah	1081522182			
	5.07.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					130.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		166.363.636,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaĀ, Penghubung Daerah	6		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			6	130.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaĀ, Penghubung Daerah			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	6	6		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaĀ, Penghubung Daerah	6	221.543.636,00	BADAN PENGHUBUNG
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)			6	185.180.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaĀ, Penghubung Daerah			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.321.100,00					BadaĀ, Penghubung Daerah		96.684.736,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.06.000 8		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	6		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	6		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			6	60.321.100,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					366.842.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		403.205.636,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	3	3		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah	3		
	5.07.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Sub-Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			3	366.842.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah		193.724.536,00	BADAN PENGHUBUNG
							157.360.900,00					Badan Penghubung Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	3		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah	3		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			3	157.360.900,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.100.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		1.318.181.818,00	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (%)			85.000		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)				Badan Penghubung Daerah	131818181 8		
	5.07.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					200.000.000,00					Badan Penghubung Daerah		244.155.844,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.07.000 2		Pembayaran Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			1	200.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					200.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		244.155.844,00	BADAN PENGHUBUNG
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1			
		Pembayaran Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			1	200.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah				
	5.07.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					100.000.000,00						BadaA., Penghubung Daerah		125.974.026,00
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.07.000 6		Pembayaran Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel (Paket)			1	100.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		125.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakataua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		
	5.07.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembayaran Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			1	100.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakataua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1	425.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.07.001 0		Pembayaran Sub-Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			1	400.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		75.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakaktua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1			
		Pembayaran Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah				
	5.07.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		75.974.026,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakaktua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				BadaA., Penghubung Daerah	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembayaran Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.020.693.916,00					BadaA., Penghubung Daerah		1.202.512.099,00	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100.000	(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)			BadaA., Penghubung Daerah	1202512098				
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					20.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		80.606.061,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		BadaA., Penghubung Daerah	1				
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			1	20.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					950.693.916,00					BadaA., Penghubung Daerah		1.011.299.977,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	12		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik (Laporan)			12	950.693.916,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				50.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		110.606.061,00	BADAN PENGHUBUNG	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		
			Pembayaran sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)			1	50.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan- Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta.- Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali- Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					620.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		775.844.156,00	BADAN PENGHUBUNG	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.07.01.1.09.000 1		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)			100.000		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)				BadaA., Penghubung Daerah	775844156			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					100.000.000,00						BadaA., Penghubung Daerah		125.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	5		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Derah	5			
	5.07.01.1.09.000 2		Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			5	100.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Derah				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					200.000.000,00					BadaA., Penghubung Derah		225.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	31	31		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	31			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.09.000 3		Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			31	200.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					20.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		45.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1			
		Pembayaran Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (Unit)			1	20.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah				
	5.07.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		125.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	43	43	43		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	43			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.01.1.09.001 0		Pembayaran Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			43	100.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		125.974.026,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	5		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	5		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			5	100.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		125.974.026,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pembayaran Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			1	100.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan					90.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		211.212.122,00	BADAN PENGHUBUNG
			Kegiatan Keprotokolan yang Terfasilitasi (%)			90.000		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)			BadaA., Penghubung Daerah	211212121			
	5.07.01.1.14.000 1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					80.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		140.606.061,00	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	0.00	0.00	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	12		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)			12	80.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.01.1.14.000 3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan					10.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		70.606.061,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	0.00	0.00	1		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	1		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)			1	10.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakatua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					5,679,349,580.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			6,965,848,562.76	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (%)			86.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					5.679.349.580,00					BadaA., Penghubung Daerah		6.965.848.562,76	BADAN PENGHUBUNG
			Persentase Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (%)			100.000		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. - Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng - Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban - Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)				BadaA., Penghubung Daerah	6.965.848.562.77		
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat					5.044.349.580,00					BadaA., Penghubung Daerah		6.129.535.431,22	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.02.1.01.000 2		Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	12	12	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	12		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat (Laporan)			12	5.044.349.580,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				155.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		266.161.616,00	BADAN PENGHUBUNG	
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	0	0	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	12			
		Pembayaran Sub-Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)			12	155.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah				
	5.07.02.1.01.000 3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						150.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		176.515.151,91

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.07.02.1.01.000 4	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	0	0	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	12		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)			12	150.000.000,00	("Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya." , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah			
							180.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		242.121.212,12	BADAN PENGHUBUNG
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	0	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah	12		
	Pembayaran Sub-Kegiatan Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)			12	180.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakaktua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA., Penghubung Daerah					
	5.07.02.1.01.000 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan						150.000.000,00					BadaA., Penghubung Daerah		151.515.151,51
		Pelayanan Penghubung													

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	0	0.00	12		(BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.- Jakarta, Jl. Yusuf adiwinata no.46, Menteng- Bali, Jl. Kakatua no.17, tuban- Surabaya, Jl. Kinibalu no.23, Petemon, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA,, Penghubung Daerah	12		
			Pembayaran Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)			12	150.000.000,00	(Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan - Jl. Yusuf Adiwinata No. 46, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta. - Jl. Kakatua No.17, Badung, Bali. - Jl. Kinibalu No. 23, Surabaya., Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BadaA,, Penghubung Daerah			
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					65,959,041,811.00							77,137,255,195.85	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH					65,959,041,811.00							77,137,255,195.85	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH					65,959,041,811.00							77,137,255,195.85	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					41,588,926,811.00							49,353,356,827.58	INSPEKTORAT
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			98.46 98.46									
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					820.000.000,00	(Kab/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR), (Pemerintah Prov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)						1.112.280.500,58	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	6.01.01.1.01.000 1		Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)					100			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)							212.876.650,83	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0.00	2.00		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel, Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya, Perangkat Daerah Pemprov Sulsel, Perangkat Daerah Prov. Sulsel	2.00			
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			31	15.261.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
			Jasa Lembur (Jam)			243	7.857.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel				
			Koordinasi Konsultasi Dokumen Perencanaan pada Kementerian/Instansi terkait lainnya (Orang)			10	78.382.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya				
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)			200	12.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Prov. Sulsel				
			Transport Dalam Kota (Hari)			150	36.500.000,00	(Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov Sulsel				
	6.01.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					25.000.000,00	(Kab/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov Sulsel		26.609.581,35	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.01.000 3		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel	1		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			55	9.567.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			147	4.753.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Koordinasi/Konsultasi/Forum Perangkat Daerah (Orang)			4	10.680.000,00	(Kab/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					20.000.000,00	(Inspektorat Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel		21.287.665,08	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	1		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			51	8.747.000,00	(Inspektorat Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			147	4.753.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Transport Dalam Kota (Hari)			50	6.500.000,00	(Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					150.000.000,00	(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR), (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel		212.876.650,83	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Lingkup Kab/Kota Prov. Sulsel, Lingkup Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya, Perangkat Daerah Prov. Sulsel	1		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			51	3.203.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			216	6.984.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Koordinasi/Konsultasi/Foru m Perangkat Daerah (Orang)			9	24.030.000,00	(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Kab/Kota Prov. Sulsel			
			Koordinasi Konsultasi Penyusunan DPA-SKPD pada Kementerian/Instansi terkait lainnya (Orang)			10	79.378.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya			
			Makanan dan Minuman Rapat Finalisasi Penyusunan DPA (Paket)			15	16.905.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Prov. Sulsel			
			Transport Dalam Kota (Hari)			150	19.500.000,00	(Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					150.000.000,00	(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Prov. Sulsel		212.876.650,83	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kementerian/Lembaga/Instansi Terkait Lainnya, Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Lingkup Kab/Kota Prov. Sulsel, Pemprov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	1		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			51	3.203.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			216	6.984.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Koordinasi/Konsultasi/Forum Perangkat Daerah (Orang)			9	24.030.000,00	(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Kab/Kota Prov. Sulsel			
			Koordinasi Konsultasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD pada Kementerian/Instansi terkait lainnya (Orang)			10	79.378.000,00	(Kementerian/Lembaga/Instansi Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Lembaga/Instansi Terkait Lainnya			
			Makanan dan Minuman Rapat Finalisasi Penyusunan DPA (Paket)			15	16.905.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemprov. Sulsel			
Transport Dalam Kota (Hari)			150	19.500.000,00	(Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					150.000.000,00	(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel		212.876.650,83	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	0.00	4		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel, Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya, Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	4		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			35	12.055.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			216	6.984.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Koordinasi/Konsultasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja di Kab/Kota (Orang)			12	32.040.000,00	(Kab/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel			
			Koordinasi Konsultasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD pada Kementerian/Instansi terkait lainnya (Orang)			9	72.221.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya			
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)			100	7.200.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
Transport Dalam Kota (Hari)			150	19.500.000,00	(Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						175.000.000,00	(Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemerintah Prov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel		212.876.650,83	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel, Kementerian/Lembaga/Instansi Terkait Lainnya, Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Lingkup Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	1		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			19.390	8.006.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel			
			Koordinasi/Konsultasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kab/Kota (Orang)			15	40.050.000,00	(Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel			
			Koordinasi Konsultasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kementerian/Instansi terkait lainnya (Orang)			12	93.744.000,00	(Kementerian/Lembaga/Instansi Terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Lembaga/Instansi Terkait Lainnya			
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)			100	7.200.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Transport Dalam Kota (Hari)			200	26.000.000,00	(Pemerintah Prov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Lingkup Prov. Sulsel			
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32.529.466.651,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Lingkup Prov. Sulsel		35.751.210.035,13	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.02.000 1		Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)			100.000		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Perangkat Daerah Lingkup Prov. Sulsel	100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					32.152.234.651,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Lingkup Prov. Sulsel	1920	35.349.690.611,39	INSPEKTORAT
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1595	525	1860	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel						
			Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)			14	14.002.443.349,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel					
		Tambahan Penghasilan ASN (Bulan)			12	18.149.791.302,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel						
	6.01.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					89.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel	12	94.730.109,62	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	3	12	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel, Inspektorat Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel						
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			50.950	22.880.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Prov. Sulsel					
			Jasa Lembur (Jam)			252	7.620.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel					
			Transport Dalam Kota (Hari)			450	58.500.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel					
6.01.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					127.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel		135.176.673,28	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	3	12			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Inspektorat Prov. Sulsel, Inspektorat Prov. Sulsel, Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya, Lingkup Pemprov. Sulsel	12			
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			95.255	38.852.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel				
			Jasa Lembur (Jam)			195	6.019.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Inspektorat Prov. Sulsel				
			Koordinasi Konsultasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan pada Kementerian/Instansi terkait lainnya (Orang)			9	69.129.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya				
			Transport Dalam Kota (Hari)			100	13.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Pemprov. Sulsel				
		6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					100.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Lingkup Pemprov. Sulsel		106.438.325,42	INSPEKTORAT
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel, Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Pemerintah Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Prov. Sulsel	1		
				Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			74.670	30.518.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
				Jasa Lembur (Jam)			210	6.482.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel			
				Makanan dan Minuman Rapat (Orang)			500	24.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Prov. Sulsel			
				Transport Dalam Kota (Hari)			300	39.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					42.982.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Prov. Sulsel		45.749.321,03	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	3	12		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel, Inspektorat Prov. Sulsel, Pemerintah Prov. Sulsel	12		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			20.000	10.500.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			210	6.482.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sulsel			
			Transport Dalam Kota (Hari)			200	26.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					18.250.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Prov. Sulsel		19.424.994,39	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Pemerintah Prov. Sulsel	1		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			10.000	5.250.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Transport Dalam Kota (Hari)			100	13.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					81.190.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Prov. Sulsel		212.876.650,84	INSPEKTORAT
			Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu			100.000		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Prov. Sulsel	100		
		6.01.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					44.695.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Prov. Sulsel		106.438.325,42

No	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.03.000 6		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Inspektorat Prov. Sulsel, Pemerintah Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	1		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			30.000	22.125.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			75	2.370.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel			
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)			100	7.200.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Transport Dalam Kota (Hari)			100	13.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					36.495.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Prov. Sulsel		106.438.325,42	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	15	0.00	12		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Pemerintah Prov. Sulsel	12		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			10.000	8.125.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			75	2.370.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Transport Dalam Kota (Hari)			200	26.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.526.865.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , SULAWESI SELATAN), (Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR), (Instansi Penyelenggara Diklat , KOTA MAKASSAR), (Di Gedung Pemerintah Di Luar Kantor OPD yang Bersangkutan, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Prov. Sulsel		3.221.744.418,61	INSPEKTORAT	
			Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN			88		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pemerintah Prov. Sulsel	88				
			Rata-rata nilai capaian kinerja bulanan pegawai (%)			100.000		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			Pemerintah Prov. Sulsel	100				
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					530.145.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)					Pemerintah Prov. Sulsel		564.277.460,28	INSPEKTORAT
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0.00	163		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel, Non ASN Inspektorat Prov. Sulsel	178			
			Pengadaan Pakaian Batik Tradisional (Orang)			155	85.250.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel				
			Pengadaan Pakaian Olahraga (Orang)			155	127.875.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel				
			Pengadaan PDH ASN (Keki dan Hitam Putih) (Orang)			155	238.700.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel				
			Pengadaan PDH Non ASN (Orang)			27	17.820.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Non ASN Inspektorat Prov. Sulsel				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.01.1.05.000 3			Pengadaan PDL (Satgas UPP Saber Pungli) (Orang)			50	22.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel			
			Pengadaan PDU (Orang)			1	2.200.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel			
			Pengadaan PSH Eselon II dan III (Orang)			7	12.100.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel			
			Pengadaan PSL Eselon II dan III (Orang)			7	24.200.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Prov. Sulsel			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						99.600.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				ASN Inspektorat Prov. Sulsel	12	106.012.572,11	INSPEKTORAT
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3	12		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat, Inspektorat Prov. Sulsel, Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya, Pemerintah Prov. Sulsel				
		Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			15.255	8.127.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel				
		Jasa Lembur (Jam)			90	2.844.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Inspektorat				
		Koordinasi Konsultasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada Kementerian/Instansi terkait lainnya (Orang)			9	69.129.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya				
		Transport Dalam Kota (Hari)			150	19.500.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel				

No	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					397.120.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Prov. Sulsel		422.687.877,89	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	153	44	155		(Kabupaten / Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kab/Kota Lingkup Sulsel, Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	165		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			44.980	18.242.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Jasa Lembur (Jam)			150	4.740.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Koordinasi Konsultasi Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Kementerian/Instansi terkait lainnya (Orang)			10	77.858.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Terkait Lainnya			
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)			150	10.800.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di Kab/Kota (Orang)			24	272.480.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab/Kota Lingkup Sulsel			
Transport Dalam Kota (Hari)			100	13.000.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					1.500.000.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , SULAWESI SELATAN), (Di Gedung Pemerintah Di Luar Kantor OPD yang Bersangkutan, KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Instansi Penyelenggara Diklat , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel		2.128.766.508,33	INSPEKTORAT
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	96	10	100		(Kabupaten / Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	105		
			Akomodasi Peserta Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			518	259.000.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			15.375	6.550.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Diklat/Bimtek/Workshop/F GD (Orang)			60	413.980.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Diklat Fungsional Pengawasan, Sertifikasi dan Diklat Teknis Lainnya serta Uji Kompetensinya (Orang)			60	474.750.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Diklat Kepemimpinan (Orang)			2	60.560.000,00	(Instansi Penyelenggara Diklat , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Honorarium Narasumber dan Jasa Tenaga Ahli Pada Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) (Kegiatan)			10	65.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pelatihan Outbond ASN (Kegiatan)			1	200.000.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kota (Orang)			84	20.160.000,00	(Di Gedung Pemerintah Di Luar Kantor OPD yang Bersangkutan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.730.772.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		2.473.416.192,57	INSPEKTORAT
			Cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah (%)			100	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	100				
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		15.965.748,81	INSPEKTORAT
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	0	8	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel	8			
			Penyediaan Alat Listrik (Jenis)			8	15.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Prov. Sulsel		15.965.748,81	INSPEKTORAT
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	0.00	9	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel	10			
			Penyediaan ATK (Jenis)			17	15.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Prov. Sulsel		53.219.162,71	INSPEKTORAT
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	19	0.00	7	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	8			
			Peralatan Rumah Tangga (Jenis)			18	50.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					201.900.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		214.898.979,02	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	6.01.01.1.06.000 5		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	23	0.00	24		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	24			
			Penyediaan Logistik Kegiatan Kantor (Jenis)			8	201.900.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					74.929.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	2	192.227.615,70	INSPEKTORAT	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5015	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
	6.01.01.1.06.000 6	Perundang-Undangan	Penyediaan Barang Cetakan Kegiatan Kantor (Jenis)			16	74.929.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
							10.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	1	53.219.162,71	INSPEKTORAT	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0.00	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
			Penyediaan Buku Peraturan Perundang-undangan (Eksemplar)			40	10.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
	6.01.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					250.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)					Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	1	463.432.468,86	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
	6.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Bulan)			12	250.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
							913.943.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		1.264.487.305,95	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	3	20		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kabupaten/Kot a Lingkup Pemprov. Sulsel, Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya, Lembaga Vertikal/Lemba ga lainnya/Tenaga Ahli, Perangkat Daerah Pemprov Sulsel	25			
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			7.359	2.944.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
			Jasa Narasumber (Kegiatan)			5	65.500.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Vertikal/Lemba ga lainnya/Tenaga Ahli				
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)			200	158.400.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Kab/Kota (Kali)			15	228.483.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kot a Lingkup Pemprov. Sulsel				
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada Kementerian/Lembaga dan Instansi Pusat Terkait Lainnya (Kali)			12	398.616.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya				
			Transport Dalam Kota (Hari)			200	60.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov Sulsel				
		6.01.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					200.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov Sulsel		200.000.000,00	INSPEKTORAT
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	12		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	12		
				Jasa Konsultasi SPBE (Paket)			1	50.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan Sistem Informasi (Paket)			1	150.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.054.672.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel		3.450.624.071,67	INSPEKTORAT
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)			100	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	100				
	6.01.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel		2.128.766.508,33	INSPEKTORAT
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00	0.00	2	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	3				
			Pengadaan Kendaraan Listrik Roda Dua (Unit)			2	40.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel					166.399.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		174.771.730,33	INSPEKTORAT
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	32	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	33				
			Pengadaan Mebel (Jenis)			8	166.399.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					848.273.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		1.147.085.833,01	INSPEKTORAT
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	57	0.00	57	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	58				
			Pengadaan Alat Pendingin Kantor (Unit)			12	79.500.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
			Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) (Unit)			5	162.633.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
			Pengadaan Alat Ukur untuk Kegiatan Pengawasan (Unit)			1	36.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengadaan Peralatan Personal Computer (Unit) Pengadaan Personal Computer (Unit)			26	95.140.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
						35	475.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.093.889.160,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		2.194.334.817,86	INSPEKTORAT
			Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor (%)			100		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	100		
	6.01.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.400.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		29.802.733,12	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2236	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	1		
			Bahan untuk Kegiatan Surat Menyurat Kantor (Jenis)			3	8.400.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					584.887.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		567.316.274,47	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	1		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			12	4.300.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pembayaran Internet (Bulan)			12	66.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pembayaran Tagiah Air (Bulan)			12	44.487.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pembayaran Tagihan Listrik (Bulan)			12	440.100.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pembayaran Tagihan Telepon (Bulan)			12	30.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.500.602.160,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	12	1.597.215.810,27	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	96	12		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Non ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Outsourcing Inspektorat Daerah Prov. Sulsel Non ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					
			Jasa Asuransi Tenaga Non ASN (Orang / Bulan)			27	50.034.348,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					
			Jasa Pengangkutan Sampah (Set)			100	10.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					
			Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) (Orang / Bulan)			14	568.704.360,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Outsourcing Inspektorat Daerah Prov. Sulsel Non ASN Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					
			Jasa Tenaga Non ASN (Orang / Bulan)			13	372.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					
			Sewa Kendaraan Dinas Bermotor (Unit)			4	499.863.452,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					752.072.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	100	936.870.140,32	INSPEKTORAT
			Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara			100		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)		Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					
	6.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					128.306.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	10	101.116.409,15	INSPEKTORAT
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	0.00	10		(Kota Makasar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					
			Belanja BBM (Bulan)			12	83.676.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.09.000 2		Pembayaran Pajak STNK (Unit)			1	6.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Unit)			1	38.630.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					342.336.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		372.534.138,96	INSPEKTORAT
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	0.00	5		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	10		
			Belanja BBM (Bulan)			12	263.586.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pembayaran Pajak STNK (Unit)			5	9.050.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)			5	69.700.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel					
	6.01.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					80.430.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		89.621.070,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	0.00	10		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	10		
			Belanja BBM (Liter)			60	795.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pemeliharaan Alat Kantor (Jenis)			10	79.635.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					51.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		54.283.545,96	INSPEKTORAT
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	1		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	1		
				Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Governace Clinic (Paket)			1	51.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0.00	1	150.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	1	319.314.976,25	INSPEKTORAT
			Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Tahun)			1	150.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					19,751,106,000.00							21,659,135,903.35	INSPEKTORAT
			Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP			81.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten / Kota			74.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Persentase OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat (%)			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					15.570.725.000,00	(Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sulsel dan SMA/SMK/SLB di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		17.172.716.847,34	INSPEKTORAT
			Cakupan perangkat daerah yang diawasi kinerjanya (%)			100						Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	100		
			Cakupan perangkat daerah yang diawasi laporan keuangannya (%)			100.000						Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.02.1.01.000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					3.071.016.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Daerah Prov. Sulsel		3.400.887.570,97	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	0.00	8	92		(Kabupaten/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel, Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota Prov Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov Sulsel	92		
			Audit Kinerja Program Prioritas Kepala Daerah di Kab/Kota (Lokasi)			40	1.574.576.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota Prov Sulsel			
			Audit Kinerja Program Proiritas Kepala Daerah/Kinerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)			40	1.270.800.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov Sulsel			
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			132	19.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel			
			Evaluasi Penyelenggaraan SPIP (Perangkat Daerah)			52	206.640.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov Sulsel			
	6.01.02.1.01.000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					6.868.289.000,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN), (Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sulsel dan SMA/SMK/SLB di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Pemprov Sulsel		7.454.790.234,12	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	52	15	92		(Kabupaten/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah Pemprov Sulsel di Jakarta, Surabaya dan Bali, Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sulsel dan SMA/SMK/SLB di Sulawesi Selatan, Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Perangkat Daerah di Kab/Kota Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	92		
			Audit/Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)			51	1.832.100.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Audit/Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah - Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel (Lokasi)			3	141.490.000,00	(Badan Penghubung Daerah Pemprov Sulsel di Jakarta, Surabaya dan Bali , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah Pemprov Sulsel di Jakarta, Surabaya dan Bali			
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			76	11.400.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Pemeriksaan/Audit Dana BOS di Kab/Kota (kabupaten/kota)			24	3.012.219.000,00	(Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sulsel dan SMA/SMK/SLB di Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sulsel dan SMA/SMK/SLB di Sulawesi Selatan			
			Pemeriksaan Serentak Kas Opname (Perangkat Daerah)			53	153.700.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Uji Petik Audit/Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah di Kab/Kota (Lokasi)			47	1.717.380.000,00	(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah di Kab/Kota Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.02.1.01.000 3	Reviu Laporan Kinerja						764.005.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah di Kab/Kota Prov. Sulsel		813.194.128,10	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	123	2	135		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemprov. Sulsel, Badan Penghubung Daerah Pemprov Sulsel di Jakarta, Bappelitbangda Pemprov. Sulsel, Bappelitbangda Prov. Sulsel, Biro Pemerintahan Prov. Sulsel, BKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov. Sulsel, Inspektorat Daerah Pemprov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	135			
		Bahan Cetak dan Penggandaan (Lembar)			17.250	6.900.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Pemprov. Sulsel				
		Evaluasi SAKIP OPD Pemprov (Perangkat Daerah)			37	115.480.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel				
		Reviu KUA-PPAS Pokok dan Perubahan (Kali)			2	24.140.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemprov. Sulsel				
		Reviu LKJ Pemprov (Kali)			1	10.070.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel				
Reviu LPPD Pemprov (Kali)			2	22.620.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan Prov. Sulsel						
Reviu P3DN Pemprov (Kali)			4	41.800.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Reviu Laporan Keuangan	Reviu Penyerapan Anggaran dan PB] Pemprov (Kali)			4	41.800.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov. Sulsel				
			Reviu Renja OPD - Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel (Kali)			2	68.828.000,00	(Badan Penghubung Daerah Pemprov Sulsel di Jakarta , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah Pemprov Sulsel di Jakarta				
			Reviu Renja OPD Pemprov Sulsel Pokok dan Perubahan (Kali)			2	81.920.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel				
			Reviu Renstra OPD - Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel (Kali)			1	45.077.000,00	(Badan Penghubung Daerah Pemprov Sulsel di Jakarta , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Pemprov. Sulsel				
			Reviu Renstra OPD Pemprov (Perangkat Daerah)			37	115.480.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel				
			Reviu RKA-SKPD Pokok dan Perubahan (Kali)			2	153.680.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel				
			Reviu RKPD Pokok dan Perubahan (Kali)			2	24.140.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Prov. Sulsel				
			Reviu RPD (Kali)			1	12.070.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bappelitbangda Pemprov. Sulsel				
		6.01.02.1.01.000 4	Reviu Laporan Keuangan						663.300.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)			Bappelitbangda Pemprov. Sulsel		706.005.412,49	INSPEKTORAT
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	52	15	56	(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemprov. Sulsel, Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kabupaten / Kota Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			8	2.930.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
			Pendampingan BPK Dalam Kota (Kali)			4	127.200.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel				
			Pendampingan BPK di Kabupaten/Kota (Kali)			8	134.030.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten / Kota Prov. Sulsel				
			Reviu Laporan Keuangan OPD (Kali)			2	323.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel				
			Reviu Laporan Keuangan Pemprov (Kali)			1	76.140.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemprov. Sulsel				
	6.01.02.1.01.000 5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota						3.108.277.000,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemprov. Sulsel		3.308.397.988,10	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	24	0.00	56		(Kabupaten/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kabupaten/Kot a Prov.sulsel, Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel, Kepala Daerah/Kement erian/Lembaga Terkait/Tenaga Ahli, Pemerintah Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel	60			
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			51	13.775.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel				
			Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (kabupaten/kota)			24	280.030.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kot a Prov.sulsel				
			Honor Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah EPPD Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Bulan)			12	72.000.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Daerah/Kement erian/Lembaga Terkait/Tenaga Ahli				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.02.1.01.000 6		Koordinasi/Supervisi Pengendalian Pengawasan pada Kab/Kota (kabupaten/kota)			23	291.743.400,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel			
			Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (Kabupaten)			12	471.175.200,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel			
			Pemeriksaan Reguler/Pamjab Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)			24	1.979.553.400,00	(Kab/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel			
		Kerjasama Pengawasan Internal					99.347.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel		105.743.283,15	INSPEKTORAT
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	0.00	2		(Luar Provinsi Sulawesi Selatan, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Provinsi Lain/Instansi terkait Lainnya, Inspektorat Prov. Sulsel	2		
	6.01.02.1.01.000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			5	3.559.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Prov. Sulsel			
			Pelaksanaan Studi Komparasi Apip/Telaahan Sejawat antar Provinsi (Kali)			2	95.788.000,00	(Inspektorat Provinsi Lain/Instansi terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Provinsi Lain/Instansi terkait Lainnya			
								(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Inspektorat Provinsi Lain/Instansi terkait Lainnya		1.383.698.230,41	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	168	30	86		(Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel di Jakarta, Cabang Dinas Pendidikan/SM A dan SMK Kabupaten/Kota Prov. Sulsel, Inspektorat Daerah Pemprov. Sulsel, Kabupaten/Kota Pemprov. Sulsel, Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya, Kepala Perangkat Daerah/Tenaga Ahli/Lembaga Lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota	87		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			117	7.801.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Itjen (Kali)			1	56.335.000,00	(Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya			
			Honorarium Tim Sekretariat TLHP APIP Lingkup Pemprov Sulsel (Bulan)			12	9.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Perangkat Daerah/Tenaga Ahli/Lembaga Lainnya			
			Monev/Koordinasi/Konsultasi TLHP pada OPD/Kementerian /Lembaga Terkait (Kali)			1	56.335.000,00	(Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya			
			Monev Tindak Lanjut Kantor Penghubung Prov. Sulsel (Kali)			1	56.335.000,00	(Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel di Jakarta , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel di Jakarta			
			Monev TLHP APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)			23	257.320.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kota Prov. Sulsel			
			Monitoring dan Evaluasi TLHP Dana BOS (kabupaten/kota)			23	299.400.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas Pendidikan/SM A dan SMK Kabupaten/Kota Prov. Sulsel			
			Monitoring/Koordinasi TLHP BPK/APIP/Itjen pada Perangkat Daerah terkait (Hari)			279	36.270.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Rapat Pemutakhiran Regional Tingkat Pusat (Kali)</i>			1	56.335.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya			
			<i>Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OPD (Kegiatan)</i>			1	112.900.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			<i>Rapat TLHP APIP Pemerintah di Kabupaten/Kota (Kali)</i>			1	48.460.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kot a Pemprov. Sulsel			
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					4.180.381.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (OPD Pemprov dan Instansi Terkait Lainnya , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Kabupaten/Kot a Pemprov. Sulsel		4.486.419.056,01	INSPEKTORAT
			<i>Cakupan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (%)</i>			100		(Kabupaten/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Kabupaten/Kot a Pemprov. Sulsel	100		
	6.01.02.1.02.000 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					215.340.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Kabupaten/Kot a Pemprov. Sulsel		266.095.813,54	INSPEKTORAT
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)</i>	10	2	24		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel, Tenaga Ahli/Lembaga Lainnya/Perangk at Daerah	27		
			<i>Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)</i>			8	3.980.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.02.1.02.000 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Evaluasi penyelesaian kerugian Negara/Daerah (Kali)			24	189.360.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Honorarium Tim Sekretariat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Bulan)			12	9.000.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Ahli/Lembaga Lainnya/Perangk at Daerah			
			Transportasi, Koordinasi/Konsultasi pada Perangkat Daerah terkait (Hari)			100	13.000.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)						3.965.041.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (OPD Pemprov dan Instansi Terkait Lainnya , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel		4.220.323.242,47	INSPEKTORAT
													Badan Penghubung Prov. Sulsel di DKI Jakarta / Surabaya / Bali / Provinsi Lainnya, Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kabupaten/Kot a Pemprov Sulsel, Pemerintah Prov.Sulsel, Perangkat Daerah Pemerintah Prov.Sulsel, Perangkat Daerah Pempov dan Instansi Terkait Lainnya, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel, Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel	165	
			Audit/Evaluasi Tematik dengan Tujuan Tertentu (Lokasi)			8	109.200.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			175	12.375.000,00	(Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Evaluasi Pelayanan Publik (Lokasi)			6	15.210.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemerintah Prov.Sulsel			
			Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran responsive gender (kabupaten/kota)			24	99.000.000,00	(Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Prov. Sulsel			
			PDTT Pada Badan Penghubung Prov. Sulsel di DKI Jakarta / Surabaya / Bali / Provinsi Lainnya (Kali)			2	230.806.000,00	(Bahubda Prov. Sulsel dan Instansi Terkait Lainnya, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Penghubung Prov. Sulsel di DKI Jakarta / Surabaya / Bali / Provinsi Lainnya			
			Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu di Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)			23	1.101.800.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kot a Pemprov Sulsel			
			Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu OPD Pempov dan Instansi Terkait Lainnya (Kali)			85	1.153.450.000,00	(OPD Pemprov dan Instansi Terkait Lainnya , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pempov dan Instansi Terkait Lainnya			
			Reviu dengan Tujuan Tertentu (Perangkat Daerah)			52	1.243.200.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov.Sulsel			
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4,619,009,000.00							6,124,762,464.92	INSPEKTORAT
			Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah			100.000 100.000 100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov.Sulsel Pemerintah Prov.Sulsel Pemerintah Prov.Sulsel			
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					1.214.726.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR), (Di Gedung Pemerintah Di Luar Kantor OPD yang Bersangkutan , KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Prov.Sulsel		1.436.917.393,12	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.03.1.01.000 1		kebijakan pengawasan pemerintah provinsi yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan pemerintah			100.000		(Kab/kota, SULAWESI SELATAN)				Pemerintah Prov.Sulsel	100		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						1.014.726.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR), (Di Gedung Pemerintah Di Luar Kantor OPD yang Bersangkutan , KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR)			Pemerintah Prov.Sulsel		1.224.040.742,29	INSPEKTORAT
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	1	3		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kementerian/Le mbaga Lainnya, Kementerian/Le mbaga/Provinsi lain, Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel, Perangkat Daerah/Kement erian/Lembaga Lainnya, Perangkat Daerah/Lemba ga Lainnya	3		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			50	2.894.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Fasilitasi pembinaan Kabupaten/Kota terkait teknis di bidang pengawasan Umum di Kab/Kota (kabupaten/kota)			23	385.500.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel			
			Gelar Pengawasan Daerah (Kegiatan)			1	174.555.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah/Kement erian/Lembaga Lainnya			
		Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga/Pro vinsi lain (Kali)			2	47.134.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Provinsi lain				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.03.1.01.000 2		Rapat Koordinasi Pegawasan Daerah (Kegiatan)			1	256.069.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah/Kement erian/Lembaga Lainnya			
			Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Kegiatan)			1	67.676.000,00	(Di Gedung Pemerintah Di Luar Kantor OPD yang Bersangkutan , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah/Lemba ga Lainnya			
			Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Kali)			2	80.898.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga Lainnya			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					200.000.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Kementerian/Le mbaga Lainnya		212.876.650,83	INSPEKTORAT
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	48	8	48		(Kabupaten/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel Inspektorat Daerah Prov. Sulsel	48		
			Bahan Cetak dan Penggunaan (Eksemplar) Survey Pendahuluan Pengawasan Umum Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)			140	4.790.000,00	(Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel			
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi					3.404.283.000,00	(OPD Pemprov di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN), (Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Kabupaten/Kota, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung (Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel		4.687.845.071,80	INSPEKTORAT
			Cakupan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah (%)			100					Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel	100			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.03.1.02.000 1		Cakupan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah kabupaten/kota (%)			100		(Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)				Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel	100		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					250.000.000,00	(OPD Pemprov di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel		266.095.813,54	INSPEKTORAT
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	20	6	25		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Pemerintah Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Prov. Sulsel	30		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			9.150	3.660.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
	Fasilitasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah pada dinas terkait (Perangkat Daerah)			52	100.700.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Prov. Sulsel					
	Fasilitasi Pendampingan dan asisten urusan pemerintahan daerah pada UPT atau dinas terkait pada Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)			23	145.640.000,00	(OPD Pemprov di Kabupaten/Kota, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel					
	6.01.03.1.02.000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan					300.620.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)				Pemerintah Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel		319.974.893,87	INSPEKTORAT
		Penilaian Reformasi Birokrasi							(Perangkat Daerah Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kab/Kota Prov. Sulsel, Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya, Pemerintah Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Prov. Sulsel	53	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			5	1.976.600,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Honorarium Tim Penilai Internal dan Sekretariat PMPRB Lingkup Pemprov Sulsel (Bulan)			12	9.000.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Prov. Sulsel			
			Koordinasi/konsultasi Pelaksanaan PMPRB pada kementerian/lembaga terkait (Kali)			1	23.043.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya			
			Pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi di Kab/Kota (kabupaten/kota)			9	132.110.400,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab/Kota Prov. Sulsel			
			Penilaian Mandiri reformasi birokrasi OPD Pemprov (Perangkat Daerah)			52	134.490.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Prov. Sulsel			
	6.01.03.1.02.000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					2.613.063.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR), (Kabupaten/Kota, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah Prov. Sulsel		3.845.683.753,44	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	8	4	10		(Kabupaten/Kota Prov. Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov.Sulsel, Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, Kabupaten/Kota Prov. Sulsel, Kapolda Sulsel/Kejati Sulsel/Lembaga Lainnya, Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya, Kementerian/Le mbaga/Provinsi lain Satgas UPP Saber Pungli, Kepala Daerah/Lemba ga Vertikal/Instansi Lainnya, Kepala Daerah/Unsur	10		
			Bahan Cetak dan Penggunaan Operasionalisasi Saber Pungli (Jenis)			3	22.723.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov.Sulsel			
			Bahan Cetak dan Penggunaan Penanganan laporan gratifikasi/benturan kepentingan (Eksemplar)			15	2.259.000,00	(Inspektorat Daerah Prov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Bahan Cetak dan Penggunaan Verifikasi laporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi/koordinasi APIP dan APH (Eksemplar)			15	775.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Bahan Cetak dan Penggunaan Verifikasi LHKPN/LHKSN (Eksemplar)			15	495.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov.Sulsel			
			Honorarium Satgas Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Bulan)			12	18.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Daerah/Unsur APH			
			Honorarium Satgas UPP Saber Pungli Porv. Sulsel (Bulan)			12	169.200.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Lainnya/Perang kat Daerah Tenaga			
			Honorarium Tim dan Sekretariat Penanganan Pengaduan Masyarakat (Bulan)			12	9.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ahli/Lembaga Lainnya/Perang kat Daerah			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Honorarium Tim Pendampingan Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah (Bulan)			12	183.600.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Daerah/Lemba ga Vertikal/Instans i Lainnya			
			Jasa Iklan/Reklame/Media Cetak Operasionalisasi Saber Pungli (Jenis)			4	48.500.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Kampanye/sosialisasi/kegia tan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi (Kegiatan)			1	50.000.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga/Pro vinsi lain Penanganan Laporan Gratifikasi (Kali)			1	31.248.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya			
			Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga/Pro vinsi lain Penanganan WBS (Kali)			1	23.043.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya			
			Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga/Pro vinsi lain Satgas UPP Saber Pungli (Kali)			2	62.496.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Provinsi lain Satgas UPP Saber Pungli			
			Koordinasi dan Konsultasi Renaksi Korsupgah dan Koordinasi APIP APH (Kali)			2	47.134.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kementerian/Le mbaga/Instansi Pusat Terkait Lainnya			
			Makanan dan Minuman Rapat Operasionalisasi Saber Pungli (Orang)			50	3.600.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Makanan dan Minuman Rapat Penanganan laporan gratifikasi/benturan kepentingan (Orang)			50	3.600.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Makanan dan Minuman Rapat Verifikasi laporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Orang)			100	7.200.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Makanan dan Minuman Rapat Verifikasi LHKPN/LHKSN (Orang)			100	7.200.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Monev Tindak Lanjut Penanganan Laporan Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS (Kali)			1	10.460.000,00	(Kabupaten/Kota, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kot a Prov. Sulsel			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Anti Korupsi di Kab/Kota (Lokasi)			5	56.060.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Lainnya			
			Monitoring dan Pencegahan Satgas UPP Saber Pungli di Kab/Kota (Lokasi)			8	244.480.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel			
			Monitoring dan Verifikasi LHKPN/LHKS di Kab/Kota (kabupaten/kota)			23	216.650.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel			
			Monitoring Satgas UPP Saber Pungli Perangkat Daerah Pemprov (Lokasi)			16	100.320.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov Sulsel			
			Pembinaan/Sosialisasi Kegiatan Anti Korupsi di Kab/Kota (Lokasi)			9	75.420.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Lainnya			
			Penanganan laporan gratifikasi dan benturan kepentingan (Lokasi)			15	94.050.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/Walikota (Lokasi)			15	346.700.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten/Kota Prov. Sulsel			
			Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah (Lokasi)			15	313.500.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Pemprov. Sulsel			
			Pengadaan Plakat untuk Operasionalisasi Saber Pungli (Buah)			10	4.000.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unsur APH			
			Rapat Koodinasi Satgas Saber Pungli (Kegiatan)			1	214.250.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kapolda Sulsel/Kejati Sulsel/Lembaga Lainnya			
			Rapat Koordinasi APIP APH (Kegiatan)			1	65.750.000,00	(Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah/Lemba ga Lainnya			
			Verifikasi laporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi/koordinasi APIP dan APH (Lokasi)			9	106.110.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kota Prov. Sulsel			
			Verifikasi laporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi/koordinasi APIP dan APH (Lokasi)			12	75.240.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah/Lemba ga Lainnya			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.03.1.02.000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					240.600.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN), (Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR), (Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)				Perangkat Daerah/Lembag a Lainnya		256.090.610,95	INSPEKTORAT
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	2	0.00	2		(Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, kementerian/le mbaga terkait, Kepala Daerah/Lemba ga Lainnya, Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel, Perangkat Daerah Prov. Sulsel	2		
			Bahan Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)			13	3.747.000,00	(Inspektorat Daerah Prov. Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah Prov. Sulsel			
			Honorarium Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Pemprov Sulsel (Bulan)			12	36.000.000,00	(Pemprov Sulsel , KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Daerah/Lemba ga Lainnya			
			Koordinasi/konsultasi penegakan integritas pada kementerian/lembaga terkait (Kali)			1	23.043.000,00	(Kementerian/Lemb aga/Instansi Pusat Terkait Lainnya , Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kementerian/le mbaga terkait			
			Monitoring Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas di Kab/Kota (Lokasi)			10	106.200.000,00	(Kabupaten/Kota , SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kab/Kota Prov. Sulsel			
			Monitoring Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas OPD (Perangkat Daerah)			11	71.610.000,00	(Pemprov Sulsel, KOTA MAKASSAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Prov. Sulsel			
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					730,500,252,749.00							60,919,279,349.00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					730,500,252,749.00							60,919,279,349.00	
	8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					730,500,252,749.00							60,919,279,349.00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10,181,051,949.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			10,662,431,349.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Nilai Rata-rata Capaian Indikator Persentase Temuan LHP Yang			85.000 100.000 100.000									
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					196.419.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (provinsi sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (wilayah kota makassar, SULAWESI SELATAN)						238.076.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.000	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)			24					
	8.01.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					141.538.900,00	(provinsi sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (wilayah kota makassar, SULAWESI SELATAN)						177.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	2	2.00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat, pegawai kesbangpol, Pegawai Kesbangpol	2.00			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	13.680.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	12.885.500,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
										NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	1.573.200,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Tahun)			1	1.100.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	1.276.200,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol					
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tahun)			1	25.000.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat					
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Tahun)			1	7.800.000,00	(wilayah kota makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kegiatan) perjalanan dinas dalam daerah (Tahun)			1	5.600.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat					
			perjalanan dinas dalam daerah (Tahun)			1	10.760.000,00	(provinsi sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol					
			perjalanan dinas luar daerah (Tahun)			1	61.864.000,00	(luar wilayah provinsi sulawesi selatan, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol					
		8.01.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1.369.600,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		1.462.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	1	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	336.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	1.033.600,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol				

No	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					9.246.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		10.574.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1.00	1	1.00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	1.00			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	7.500.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Tahun)			1	1.100.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	646.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
	8.01.01.1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					5.901.500,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		6.302.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00	1	1	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	1.00			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	850.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	3.750.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	655.500,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	646.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.01.1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.095.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		4.373.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1.00	1	1.00		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	1.00		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	345.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	3.750.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
	8.01.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.345.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		5.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	0.00	0	13.00		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bakesbangpol, Pegawai Kesbangpol	13.00		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	345.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	3.000.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bakesbangpol			
	8.01.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.923.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Bakesbangpol		33.025.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	0	5		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat, Pegawai Kesbangpol	5.00		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	323.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tahun)			1	25.000.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kegiatan)			1	5.600.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.381.634.348,00	(Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (dalam kota makassar, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				masyarakat		7.001.541.349,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)			85.000	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)			masyarakat	87				
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.245.488.675,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				masyarakat		6.823.109.349,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	0	50	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol, Pegawai Kesbangpol	52			
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Tahun)			1	250.000.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Gaji Pokok PNS (Tahun)			1	2.801.878.980,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Tahun)			1	5.785.663,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Iuran Jaminan Kematian PNS (Tahun)			1	17.357.352,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Tahun)			1	116.647.356,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Pembulatan Gaji PNS (Tahun)			1	40.936,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Tahun)			1	1.808.707.378,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS (Tahun)			1	200.612.832,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Tahun)			1	294.774.080,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Tunjangan Beras PNS (Tahun)			1	155.855.082,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Tunjangan Fungsional Umum PNS (Tahun)			1	94.762.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Tunjangan Jabatan PNS (Tahun)			1	221.507.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Tunjangan Keluarga PNS (Tahun)			1	263.765.883,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	8.01.01.1.02.000 3		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Tahun)			1	13.794.133,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						23.136.573,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		32.068.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	6		(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	6			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	4.564.073,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	1.500.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	11.470.500,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Tahun)			1	550.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	5.052.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol						
	8.01.01.1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						64.294.800,00	(dalam kota makassar, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		11.674.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	12		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	12			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	1.220.100,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
										NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	8.01.01.1.02.000 5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	326.700,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol					
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Tahun)			1	1.300.000,00	(dalam kota makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol					
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tahun)			1	61.448.000,00	(Luar Wilayah Sulawesi Selatan, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		1	1	2	2.323.500,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		4.104.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	450.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	2			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	1.220.100,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	653.400,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
		8.01.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0.00	0.00	1	1.996.800,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		2.131.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	450.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	1		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)						1	1.220.100,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)						1	326.700,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
	8.01.01.1.02.000 7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						43.017.300,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol	

No	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	8.01.01.1.02.000 8		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	12	12		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol, Pegawai Kesbangpol	12			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	750.000,00	(Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	3.660.300,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	3.267.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Lembur (Tahun)			1	35.340.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.376.700,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		11.359.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0.00	0.00	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	1			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	1.050.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	326.700,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol						
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					52.003.500,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		54.839.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola Oleh Perangkat Daerah (Barang)			4.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol	4			
	8.01.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					31.170.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		33.289.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol, Pegawai Kesbangpol	1			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	600.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.01.1.03.000 5			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	13.110.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	1	21.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Tahun)			1	11.000.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	6.460.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					20.833.500,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	1		(sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	11.143.500,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	9.690.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
8.01.01.1.05.000 2	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					118.413.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol	123.259.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)			195.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol			195
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						90.050.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)					pegawai kesbangpol	92.969.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	58	58	58		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol, Pegawai Kesbangpol	58			
		Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) (Setel)			2	3.850.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai kesbangpol				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.01.1.05.000 3		Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) (Setel)			1	2.200.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			pakaian dinas harian (PDH) (Setel)			60	54.000.000,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			pakaian training (Setel)			60	30.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi					26.668.600,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		28.481.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	12		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	12		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	10.625.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	10.488.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	5.555.600,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
		8.01.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1.694.800,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		1.809.000,00
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12.00	12	12		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	12		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)					1	1.048.800,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	646.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol		
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.269.691.655,00	(sulawesi selatan dan luar sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		999.898.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket (Paket)			26.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol	26		
			jumlah dokumen (Dokumen)			43.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol	43		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.01.1.06.000 1		Jumlah Laporan (Laporan)			41.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol	41		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					23.300.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		43.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0.00	0.00	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	1		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Tahun)			1	23.300.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
	8.01.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					125.390.300,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		133.916.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	2		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol, Pegawai Kesbangpol	2		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	1.425.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	109.950.300,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	1.515.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Buah)			25	12.500.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			8.01.01.1.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material					19.801.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0.00			0.00	10		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	0.00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Tahun)					1	19.801.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
	8.01.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					230.833.200,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		246.529.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0.00	0.00	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat	1		
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tahun)			1	230.833.200,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					867.623.555,00	(sulawesi selatan dan luar sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				masyarakat		551.457.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0.00	40		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat, pegawai kesbangpol	40		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tahun)			1	120.816.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tahun)			1	746.807.555,00	(sulawesi selatan dan luar sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
	8.01.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2.743.600,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		2.929.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	12		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun)			1	2.097.600,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	646.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					233.000.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		186.182.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Unit (Unit)			42.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol	42		
Jumlah Paket (Paket)					10.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol	10			
8.01.01.1.07.000 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					233.000.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		186.182.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	30		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	30		
			Belanja Modal (Unit)			20	233.000.000,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.287.976.946,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	pegawai kesbangpol		1.194.232.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			224.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)			pegawai kesbangpol	224			
	8.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.287.976.946,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	pegawai kesbangpol		1.194.232.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	12		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			forkopimda, masyarakat, pegawai kesbangpol	12		
			Belanja Jasa Non ASN dan Outsourcing (Bulan)			12	451.865.220,00	(Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			belanja publikasi (Kali)			3	50.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Tahun)			1	278.195.667,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			iuran jamkes non asn (Bulan)			12	22.142.064,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Iuran JKK JKM Non ASN (Bulan)			12	1.814.400,00	(SULAWESI SELATAN, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			sewa helikopter (Tahun)			1	483.959.595,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			forkopimda			
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					641.913.100,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				forkopimda		864.404.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)			69.000		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				forkopimda	69		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.01.1.09.000 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Tahun) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Tahun) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Tahun)				426.090.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				forkopimda		639.246.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				0.00	0.00	26		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol	26			
						1	314.090.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol				
						1	20.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol				
						1	92.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
8.01.01.1.09.000 5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tahun) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Tahun)				8.323.100,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		8.888.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				0.00	0.00	20		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol	20			
						1	1.966.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol				
						1	1.356.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol				
						1	5.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
8.01.01.1.09.000 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Tahun) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Tahun)				60.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		58.740.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				10	10	20		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol	20			
						1	30.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol				
						1	30.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol				
8.01.01.1.09.000 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				147.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		157.530.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				0.00	0.00	1		(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol	1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Tahun)			1	147.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1,500,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			8,047,036,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila			80.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.500.000.000,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN), (Dalam Daerah Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Setalan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	pegawai kesbangpol		8.047.036.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan ideologi pancasila (%)			80.000	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		pegawai kesbangpol		80				
			Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan karakter bangsa (%)			80.000	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		pegawai kesbangpol		80				
	8.01.02.1.01.000 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					20.805.700,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol		215.703.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	0	0	12	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		masyarakat, pegawai kesbangpol		12				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	3.259.300,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)			1	7.500.000,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun)			1	1.850.400,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)			pegawai kesbangpol				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	8.01.02.1.01.000 2		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tahun)			1	8.196.000,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat				
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Tahun) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Orang) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Orang)					120.458.700,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			masyarakat		6.119.533.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00		0.00	2.00					(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.00			
				1	38.608.300,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol							
				1	1.850.400,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol							
				4	5.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol							
		300	75.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol									
	8.01.02.1.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						45.394.000,00					pegawai kesbangpol		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tahun)	0.00	0.00	100.00				(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol	100.00			
				1	45.394.000,00	(Luar Wilayah Sulawesi Selatan, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol							
	8.01.02.1.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							13.341.600,00	(Dalam Daerah Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			pegawai kesbangpol		86.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daera (Tahun)	0.00	0.00	12.00				(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol	12.00			
				1	13.341.600,00	(Dalam Daerah Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kesbangpol							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.02.1.01.000 8	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka					1.300.000.000,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN), (Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Dalam Daerah Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Setalan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	pegawai kesbangpol		1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)		0	0	24		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka, anggota paskibraka dan pelatih, masyarakat, pegawai kesbangpol, pegawai kesbangpol , pegawai kesbangpol dan anggota paskibraka dan pelatih	25		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Tahun)				1	2.244.700,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tahun)				1	6.540.000,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
		Belanja Bendera Merah Putih (Buah)				5	500.000,00	(Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka			
		Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (Buah)				88	1.760.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka			
		Belanja Jasa Tata Rias (Orang)				10	6.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka dan pelatih			
		Belanja Jasa Tenaga Ahli (Orang)				48	83.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Tahun) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tahun) Belanja Obat-Obatan-Obat (Tahun) Belanja Pakaian Olahraga (Tahun) Belanja Pakaian Paskibraka (Setel) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi (Orang) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Tahun) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tahun) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (Unit) Belanja Tali Bendera (Buah) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Tahun)			1	36.240.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol dan anggota paskibraka dan pelatih			
						1	535.220.000,00	(Sulawesi Setalan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
						1	2.004.500,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka dan pelatih			
						1	104.000.000,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka dan pelatih			
						385	176.225.000,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka dan pelatih			
						75	78.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka dan pelatih			
						1	31.003.400,00	(Dalam Daerah Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
						1	213.862.400,00	(Luar Wilayah Sulawesi Selatan, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol dan anggota paskibraka dan pelatih			
						2	10.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol dan anggota paskibraka dan pelatih			
						2	3.000.000,00	(Kantor Gubernur, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anggota paskibraka			
						1	9.800.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					585,639,200,800.00							7,922,757,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada			80.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					585.639.200.800,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				masyarakat		7.922.757.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan Politik kepada masyarakat (%)			75.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				masyarakat	80		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
										NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
8.01.03.1.01.000 1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					6.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				masyarakat		5.881.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	0	0	2	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	2						
			Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor ATK (Tahun)			1	1.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol						
			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan cetak (Tahun)			1	2.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol						
			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer (Tahun)			1	2.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol						
			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor kertas dan cover (Tahun)			1	1.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol						
			8.01.03.1.01.000 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					118.900.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol			111.251.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	0	0	2	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat, pegawai kesbangpol, pegawai kesbangpol	3				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Giat sosialisasi penyusunan Pelaporan bantuan keuangan parpol (Kali)			1	1.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Giat sosialisasi Pilkada Serentak (Kali)			1	1.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Giat Sosialisasi Pilkada serentak Tahun 2024 (Buah)			100	11.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor seminar kit Giat sosialisasi penyusunan Pelaporan bantuan keuangan parpol (Kali)			1	7.700.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Kali)			1	1.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak Giat sosialisasi penyusunan Pelaporan bantuan keuangan parpol (Kali)			1	1.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas cover (Kali)			1	1.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover Giat sosialisasi penyusunan Pelaporan bantuan keuangan parpol (Kali)			1	1.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
			Belanja Makanan Minum Rapat giat sosialisasi pilkada serentak (Kali)			1	32.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			belanja makan minum rapat giat sosialisasi penyusunan pelaporan bantuan keuangan parpol (Kali)			1	45.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kegiatan)			1	7.100.000,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Giat sosialisasi penyusunan Pelaporan bantuan keuangan parpol (Kali)			1	9.100.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				585.206.200.800,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				masyarakat			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kali) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak (Kali) Belanja Hibah Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan (Kali) Belanja hibah pilkada serentak tahun2024 (Kali) belanja makan minum rapat (Kali) Hibah Kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan (Kali) Hibah Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Kali) Hibah Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Selatan (Kali) Hibah Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan (Kali) Hibah Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan (Kali) Hibah Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai persatuan indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (Kali) Hibah Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Kali) Hibah Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (Kali)	0	0	100		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000, masyarakat, pegawai kesbangpol, stakeholder	100		
						1	1.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
						1	1.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
						1	515.457.600,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						1	580.000.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						10	4.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat			
						1	401.750.400,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						1	429.244.800,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						1	657.639.600,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						1	820.132.800,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						1	231.138.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						1	172.009.200,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						1	453.734.400,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			
						1	449.148.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8.01.03.1.01.000 4			Hibah Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem (Kali)			1	677.546.400,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder				
			Hibah Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (Kali)			1	381.399.600,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia verifikasi bantuan keuangan parpol (Kali)			1	10.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						139.600.000,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				10.000.000	6	30.255.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	0	0	6		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat, pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor giat rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 (Kali)			1	1.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor seminar kit giat rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 (Kali)			1	33.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak giat rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 (Kali)			1	1.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas cover giat rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 (Kali)			1	1.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	8.01.03.1.01.000 5		Belanja Makan minum Rapat giat rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 (Kali)			1	96.000.000,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia giat rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 (Kali)			1	7.100.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						168.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		65.177.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	0	0	3		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	3			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kali)			1	1.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak (Kali)			1	1.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Perjalanan Dinas luar dan dalam (Tahun)			1	165.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1,200,000,000.00							113,604,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					1.200.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (kantor gubernur sulsel, SULAWESI SELATAN), (kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		113.604.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dibidang pemberdayaan dan pengawasan			50.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			pegawai kesbangpol	50				
			Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan masyarakat dan Organisasi			50.000		(SULAWESI SELATAN)			pegawai kesbangpol	50				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.04.1.01.000 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Tahun) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Tahun) Belanja Kertas dan Cover (Tahun)				11.770.500,00	(kantor gubernur sulsel, SULAWESI SELATAN), (kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		34.651.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				0	0	4		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	4		
						1	8.795.500,00	(kantor gubernur sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
						1	1.200.000,00	(kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
			1	1.775.000,00	(kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol						
	8.01.04.1.01.000 3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Tahun) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan (Tahun) belanja hibah (Kali) Belanja Kertas dan Cover (Tahun) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tahun) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tahun) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tahun)				1.112.452.100,00	(kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		32.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				0	0	100		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Pegawai Kesbangpol, stackeholder	100		
						1	263.000,00	(kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
						1	3.440.100,00	(kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
						1	1.000.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stackeholder			
					1	1.075.000,00	(kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol				
		1	20.928.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat							
		1	42.768.000,00	(kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat							
		1	33.178.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.04.1.01.000 4		Honorarium Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Ormas (Kali)			3	10.800.000,00	(kantor gubernur sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					33.705.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		25.169.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tahun)	0	0	100			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	100	
						1	33.705.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
	8.01.04.1.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					42.072.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		21.184.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tahun)	0	0	1			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	1	
						1	42.072.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
				5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				2,150,000,000.00					
			persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol			
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					2.150.000.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		1.471.998.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya			2.000			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Pegawai Kesbangpol	2		
				Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan Organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan			2.000			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Pegawai Kesbangpol	2	
	8.01.05.1.01.000 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					8.508.800,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		61.990.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	0	0	3			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol	3	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	8.508.800,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kesbangpol		
	8.01.05.1.01.000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					2.054.383.600,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kesbangpol		1.320.145.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
										NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	0	0	100		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Mayarakat, Pegawai Kesbangpol, stakeholder	100				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Tahun)					1	775.000,00			(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kesbangpol
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Tahun)					1	6.598.800,00			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kesbangpol
			Belanja hibah kepada pemerintah (Kali)					1	900.000.000,00			(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	stakeholder
			Belanja Jasa Pembentukan Aplikasi digital peta narkoba (Kali)					1	50.000.000,00			(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat
			Belanja Kertas dan Cover (Tahun)					1	1.775.000,00			(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kesbangpol
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tahun)					1	1.601.200,00			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tahun)					1	18.000.000,00			(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mayarakat
			Belanja Pemberian Dana Hibah Kepada Organisasi Bentukan Pemerintah (Kali)					1	1.000.000.000,00			(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	stakeholder
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tahun)					1	24.283.600,00			(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kesbangpol
			Honorarium Kegiatan Tim Terpadu P4GNPN (Kali)					1	17.850.000,00			(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Kali)					1	3.500.000,00			(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat
			Kegiatan Jasa Tes Urine Bagi ASN Pemprov Sulsel (Tahun)					1	30.000.000,00			(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat
8.01.05.1.01.000 4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					63.544.000,00	(SULAWESI SELATAN)				Masyarakat		50.339.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	0	0	100	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kesbangpol	100							
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar daerah (Tahun)	1	63.544.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kesbangpol									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	8.01.05.1.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					23.563.600,00	(SULAWESI SELATAN)				Pegawai Kembangpol		39.524.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	0	0	3		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pegawai kembangpol	3				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam daerah (Tahun)	1	23.563.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pegawai kembangpol							
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					129,830,000,000.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			32,701,453,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim			100.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai kembangpol				
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					129.830.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (suawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pegawai kembangpol		32.701.453.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah kordinasi dan sinergi dengan forkopimda (Kali)			12.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Pegawai kembangpol	12				
			Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan tim bentukan pemerintah di bidang kewaspadaan nasional dan			6.000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			Pegawai kembangpol	6				
	8.01.06.1.01.000 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan					128.675.602.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN), (suawesi selatan, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pegawai kembangpol		28.973.287.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				0	0	6		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		masyarakat, pegawai kembangpol, stakeholder	6				
				Belanja Alat Tulis Kantor (Tahun)	1	8.198.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kembangpol						
				Belanja Alat Tulis Kantor (Tahun)	1	47.402.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kembangpol						
				Belanja Cetak (Tahun)	1	5.250.750,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kembangpol						
				Belanja Cetak (Tahun)	1	5.250.750,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pegawai kembangpol						
				belanja hibah pengamanan pilkada serentak 2024 (Kali)	1	100.000.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		stakeholder						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	8.01.06.1.01.000 2		Belanja Honorarium (Kali)			2	12.000.000,00	(suawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder				
			Belanja Honorarium (Kali)			1	6.600.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat				
			Hibah kepada pemerintah Pusat (Kali)			1	28.100.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder				
			Honorarium Kominda/FKDD (Tahun)			1	328.200.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			stakeholder				
			Makan Minum Rapat (Tahun)			1	151.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat				
			Makan Minum Rapat (Kali)			1	3.600.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat				
			Makan Minum Tamu (Tahun)			1	8.100.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat				
	8.01.06.1.01.000 4	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						22.089.350,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				masyarakat		1.124.578.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	0	0	2		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat, pegawai kesbangpol	2		
				Belanja Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	8.198.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
				belanja cetak (Tahun)			1	5.250.750,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol			
belanja makan minum rapat (Kali)						1	8.640.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat				
	8.01.06.1.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					151.119.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)				masyarakat		538.359.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
																Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tahun)
						1	151.119.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	8.01.06.1.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					300.600.950,00	(SULAWESI SELATAN)				pegawai kesbangpol		424.053.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	0	0	12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol	12			
			Belanja Cetak (Tahun)			1	2.971.750,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Tahun)			1	297.629.200,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai kesbangpol				
	8.01.06.1.01.000 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi					680.588.000,00	(SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	pegawai kesbangpol		1.641.176.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	0	0	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Forkopimda, pegawai kesbangpol, stakeholder	1		
			Belanja Alat Tulis Kantor (Tahun)			1	3.788.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				pegawai kesbangpol			
			Honorarium Narasumber Forkopimda (Tahun)			1	537.600.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Forkopimda			
			Makan Minum Rapat Pejabat Eselon I dan II (Tahun)			1	139.200.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				stakeholder			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

7.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan daerah. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan daerah dimaksud terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Kemiskinan
 - Tingkat kemiskinan
 - Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)
 - Indeks Kedalaman Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - Jumlah Penganggur (Ribuan orang)
4. Gini Ratio
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
 - Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - Angka Harapan Hidup (AHH)
 - Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)
6. PDRB Perkapita
 - ADHB
 - ADHK

Target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII.1.
Capaian dan Target Indikator Makro Tahun 2022 dan Target RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,5-6,90
2	Kemiskinan			
	• Tingkat Kemiskinan (September)	%	8,66	8,31
	• Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	782,32	754.4
	• Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka/ Nilai	1,50	1.527
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Agust)	%	4,51	4,24
	• Jumlah Penganggur	Ribu Orang	205.725	256.110
4	Indeks Gini	Angka/ Nilai	0,365	0,362-0,363
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	72,82	73,99-74,02
	• Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,97	71,17
	• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,63	8.90
	• Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,53	13.84
	• Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)	Ribu Rupiah/ Orang	11.430	11.940
6	PDRB Perkapita			
	• ADHB	Jt Rp.	65,59	70,7
	• ADHK	Jt Rp.	39,11	40,95

Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, merupakan target tahun pertama periode RPD 2024 - 2026.

Ekonomi Sulawesi Selatan secara kumulatif selama tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan Positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen diikuti Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 17,74 persen;

Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,69 persen; Jasa Perusahaan sebesar 14,16 persen. Sulawesi Selatan berkontribusi sebesar 3,16 persen terhadap perekonomian nasional tahun 2022, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 dan target tahun 2024 diperkirakan semakin meningkat seiring dengan upaya-upaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor lapangan usaha melalui : 1) perluasan jangkauan dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas secara lebih merata; 2) penciptaan lapangan dan perluasan akses kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan; 3) pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif; serta 4) perbaikan iklim investasi dan usaha.

Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -5,12 poin seiring dengan pemulihan ekonomi, namun pada tahun mengalami peningkatan sebesar 1,52 poin dari tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan meningkat, namun untuk tahun 2023 dan target tahun 2024 diharapkan terus mengalami penurunan, yang didukung dengan strategi peningkatan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan.

Dampak positif pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah menurunnya Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada Agustus 2022 sebesar 4,51 persen turun sebesar 1,21 poin dibandingkan TPT pada Agustus 2021 yang mencapai 5,72 persen. Pada tahun 2023 diprediksikan dapat turun hingga 4,38 persen, dan angka TPT pada tahun 2024 ditargetkan turun hingga 4,34 persen dengan strategi penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas, serta peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini Sulawesi Selatan hingga tahun 2022 adalah 0,365 membaik dari tahun 2021 sebesar 0,377. Dibandingkan dengan angka nasional, rasio gini Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan yang terus membaik dan secara relatif menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah dari ketimpangan nasional yang pada tahun 2022 masih berada di angka 0,381. Pada tahun 2023 diharapkan dapat menurun pada angka 0,363 dan terus mengalami perbaikan hingga Untuk mendukung target tersebut, perlu dilakukan sinergi kebijakan dan program pemerintah daerah yang mampu menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk, dan disisi lain mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan positif merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi Selatan yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 72,82, meningkat 0,58 poin (0,80 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,24). Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan

dimensi standar hidup layak. IPM Sulawesi Selatan pada tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 73.40 dan ditargetkan meningkat hingga 73,99 pada tahun 2024. Untuk mendukung target ini, peningkatan Indeks Pendidikan diupayakan melalui perluasan akses dan kualitas pendidikan menengah, khusus dan vokasi termasuk pendidikan inklusi terutama bagi masyarakat rentan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan. Untuk Indeks Kesehatan dapat diupayakan melalui peningkatan sarana/ prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang Inklusif, serta dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sebagai isu kesehatan nasional. Peningkatan Indeks Ekonomi diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, dan perluasan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion).

7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Indikator Kinerja Utama Sulawesi Selatan dibuat untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU bertujuan memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel VII.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama 2022, dan Penetapan Target Indikator
Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
1	Nilai SakipProvinsi	68,08 (B)	68,52 (B)
2	Indeks PelayananPublik	4,10 (A-)	A- (4,01 – 4,50)
3	Indeks LayananInfrastruktur	80,39	81,97
4	Tingkat Kemiskinan	8,63	6,7 -7,7
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,51	4,24
6	PertumbuhanEkonomi	5,09	5,5-6,90
7	IPM	72,82	73,99-74,02
8	Indeks Pembangunan Gender	93,14	93,65
9	Potensi PenurunanEmisi GRK	1,360.000	1,823,583

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikator ini berada pada level outcome. Yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran

pembangunan. Indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Perangkat Daerah. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah Nilai Sakip Provinsi pada kisaran angka 68,52 (B); Indeks pelayanan publik kisaran A- (4,01 – 4,50); Indeks Layanan Infrastruktur 81,97; Tingkat Kemiskinan 8,31; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,24; Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 5,23-6,71; Indeks Pembangunan Manusia pada angka 73,99; Indeks Pembangunan Gender menjadi 93,65, dan Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 1,823,583.

7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi.

Indikator kinerja daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyajian indikator indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung untuk mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VII.3.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	%	92,65	89,25	92,75	Dinas Pendidikan
2	Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	%	99,97	95,38	98,34	Dinas Pendidikan
3	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	83,68	100	100	Dinas Pendidikan
5	Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	82,73	100	100	Dinas Pendidikan
6	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	%	Na	100	100	Dinas Pendidikan
7	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	73,46	74,61	76,91	Dinas Pendidikan
8	Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	86,26	85	87	Dinas Pendidikan
9	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	%	01:13	01:13	01:13	Dinas Pendidikan
10	Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	52,69	53,39	54,79	Dinas Pendidikan
11	Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	46,85	47,41	48,53	Dinas Pendidikan
12	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	94,13	100	100	Dinas Pendidikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
13	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	45,3	46,45	48,75	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
14	% Rumah Sakit yang Terakreditasi	%	80	85	95	Dinas Kesehatan
15	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
	berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan					
	kesehatan (SPM)					
17	% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	%	94,3	95	97	Dinas Kesehatan
18	% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	%	82,42	90	91	Dinas Kesehatan
19	Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)	%	72,75	75	77	Dinas Kesehatan
20	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	%	96,32	97	99	Dinas Kesehatan
21	Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	Per 100.000/Penduduk	11/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan
22	% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular	%	70	90	95	Dinas Kesehatan
23	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Darah Pada Fasilitas Kesehatan	%	79	80	82	UPT Transfusi Darah
24	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	98	85	95	UPT Lab. Kesehatan Daerah

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
25	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	91,4	100	100	UPT RSK Gigi dan Mulut
26	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	Persen	90	100	100	RSUD Labuang Baji
27	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi Baik	%	90,98	100	100	RS Khusus Daerah
28	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	60	61	100	RSUD Haji Makassar
29	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	%	75	76	77	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
30	Cakupan pemenuhan Sarana	%	100	100	100	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
	dan Prasarana Rumah Sakit					
	Dalam Kondisi Baik					
31	Cakupan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	70	65.76	85	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
32	% Pemenuhan SDM Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	83,94	85	87	Dinas Kesehatan
33	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	100	20	60	UPT Transfusi Darah
34	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknisi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	98	90	90	UPT Lab. Kesehatan Daerah
35	Prosentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	%	99,05	100	100	UPT RSK Gigi dan Mulut

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
36	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	65	75	85	Labuang Baji
37	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	62,5	70	80	RSUD Haji Makassar
38	Persentase SDM Yang Mengikuti Pelatihan	%	NA	100	100	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
39	Prosentase tenaga kesehatan RSUD yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	89,19	33	20	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
40	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%	95	100	100	Dinas Kesehatan
41	% Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	%	40	50	60	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
42	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	Ha	3.638	6046	18629	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
43	Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	%	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
44	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (SPM)	%	92	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
47	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi	%	50	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
48	Cakupan Pembinaan layanan TPA kewenangan provinsi	%	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
49	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak (SPM)	%	92.2	95	97	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
50	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik kewenangan provinsi	%	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
51	Cakupan Pembinaan layanan drainase kewenangan provinsi	%	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
52	Persentase Bangunan Pamerintah Yang difasilitasi	%	85	90	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
53	Persentase fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi	%	77.7	81.2	83.6	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
54	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	71.95	76.00	78	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
55	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	90	91	93	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
56	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	%	86	91.35	94.05	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
URUSAN PEMERINTAHA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
57	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
58	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenanangan Provinsi	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
59	Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi	%	25,39	5,18	19,67	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
60	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman	%	100	25.71	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
						Dan Pertanahan
61	Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	%	92,35	16,67	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
62	Persentase Jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	%	na	25,71	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
63	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
64	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100	100	100	BPBD
65	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100	100	BPBD
66	Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100	100	BPBD
67	Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100	100	BPBD
68	% Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
69	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	%	100	100	100	Dinas Sosial
70	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan	%	100	100	100	Dinas Sosial

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
71	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100	Dinas Sosial
72	Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti	%	100	100	100	Dinas Sosial
73	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
74	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
75	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
76	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
77	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	%	100	100	100	Dinas Sosial
78	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)	%	100	100	100	Dinas Sosial
79	Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	%	100	100	100	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
80	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro	%	66.67	94.00	90.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
81	Prosentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	83.33	85.00	90.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
82	Prosentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
83	Prosentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	%	9.49	9.50	9.70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
84	Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	63.19	63.30	63.75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
85	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	63.38	63.40	64.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
86	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	%	49.43	50.00	54.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
87	Prosentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	62.59	86.00	88.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
88	Meningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	100	100.00	100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
89	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi	%	60	65	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
90	Persentase ARG di Tingkat Provinsi	%	37	38	39	
91	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	%	25	37,5	38.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
						Pengendalian Anak dan KB
92	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	37.50	54.16	62.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
93	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	%	90	95	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
94	Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	%	37.50	54.16	62.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
95	Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate	%	85	88	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
96	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	87,5	95,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
						Pengendalian Anak dan KB
97	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	37.50	54.16	62.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
98	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Yang Aktif	%	72	75	77	Dinas Ketahanan Pangan
99	Tingkat Ketersediaan Beras (%)	%	367.91	356.57	356.57	Dinas Ketahanan Pangan
100	Tingkat Ketersediaan Jagung (%)	%	55.04	54.61	54.61	Dinas Ketahanan Pangan
101	Tingkat Ketersediaan Kedelai (%)	%	18.23	17.74	17.74	
102	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	(kkal/kapita/hari)	3,593.00	3,543.56	3,543.56	
103	Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)	(gr/kapita/hari)	171.65	127.36	127.36	Dinas Ketahanan Pangan
104	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/tahun)	(kkal/orang/hari)	2 077,92	2,100.00	2,100.00	Dinas Ketahanan Pangan
105	Angka Kecukupan Protein (gr/kapita/tahun)	(gr/orang/hari)	64.18	57.00	57.00	Dinas Ketahanan Pangan
106	Persentase Cadangan Pangan	%	0.014	0.014	0.015	Dinas Ketahanan Pangan
107	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4.82	6.00	5.60	Dinas Ketahanan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
						Pangan
108	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	83.1	85.7	91.7	Dinas Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
109	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
110	Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
111	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
112	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	60	67	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
113	Potensi emisi GRK dari sektor limbah	Ton CO2 e	14135.36	15257.36	17697.36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
114	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	92,85	88,24	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
115	Persentase limbah yang dikelola	%	98,64	98,65	98,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
116	Rasio Tingkat ketaatan pamarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	29,6	40	41,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
117	Prosentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	73,61	33.33	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
118	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	87	73.4	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
119	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	65.29	88.23	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
120	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
121	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	%	54,48	55	58	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
122	Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	99.42	99.45	99.65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
123	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99.42	99.45	99.65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
124	Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	102.77	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
125	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	54.29	50	54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
126	Persentase Penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
127	Persentase Bayi ber-Akta Kalahiran	%	97.47	97.60	98	Dinas Kependudukan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
						dan Pencatatan Sipil
128	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah yang dilaporkan	%	39.86	39.90	40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
129	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan Akta Kelahiran	%	96.51	96.60	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
130	Persentase Penerbitan Akta Cerai yang dilaporkan	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
131	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	96.51	96.60	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
132	Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
133	Prosentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
134	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,45	13,23	15,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
135	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	48,75	7,28	4,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
136	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	4,3	1,32	3,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
137	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Di Fasilitasi	%	45,01	17,21	28,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
138	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Difasilitasi dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	1,44	1,61	1,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
139	Prosentase Posyandu Aktif;	%	99,91	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
140	Prosentase PKK Aktif	%	99	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
141	Persentase BUM Desa Yang Difasilitasi	%	3,14	2,64	5,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
142	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	25	25,5	30,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
143	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	64.94	65,35	65.37	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
144	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	25	25,5	26,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
145	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	30.8	33.78	36.76	Dinas Perhubungan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
146	Prosentase Layanan Angkutan Darat;	%	97	97	97	Dinas Perhubungan
147	Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B Pertahun	Jiwa	500,981	628,431	748,666.0064	Dinas Perhubungan
148	Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	60	63.65	67.254	Dinas Perhubungan
149	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan		0.108	0.31	0.348	Dinas Perhubungan
150	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Jiwa	1,418,985	1,779,975	2.120.531.184	Dinas Perhubungan
151	Jumlah pelabuhan Pengumpan yang beroperasi	Unit	11	11	11	Dinas Perhubungan
152	Jumlah Dokumen Rencana Perkeretaapian Provinsi	Dokumen	1	1	1	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
153	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	Nilai	-	40	50	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
154	Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi	%	44	50	60	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
155	Persentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Jaringan Internet Intra Pemerintah Pemerintah Sulawesi Selatan	%	41	44	47	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
156	Prosentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	12	12	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
157	Prosentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
158	Prosentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
159	Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhan nya terhadap peraturan perundang undangan	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
160	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
161	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
162	Prosentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
163	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
164	Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
165	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	%	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
166	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	3	3	3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
167	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	%	85	87	93	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
168	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	6.73	6.8	88	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
169	Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	7.52	7.75	99	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
170	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang	%	80	92	95	Dinas Penanaman

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Diterbitkan Sesuai SOP					Modal dan PTSP
171	Prosentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	55	57	60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
172	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	85	87	90	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
173	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,24	0,5	1,5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
174	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	3,81	4,5	5,5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
175	Peningkatan Prestasi olah raga	%	3,17	0,4	0,5	
176	Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	30	45	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
177	Persentasi organisasi pramuka aktif	%	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
178	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	80	90	100	Dinas Komunikasi dan Infomatika, Statistik dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
179	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Nilai	2.08	2.59	3.00	Dinas Komunikasi dan Infomatika, Statistik dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
180	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	0.34	1,28	2,88	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
181	Prosentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	%	7.69	7	8	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
182	Prosentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi.	%	3.89	4	5	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
183	Prosentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0.29	0.2	0.8	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
184	Prosentase Kunjungan ke musium	%	615.99	100	100	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
185	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	Orang	228,583	300	500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
186	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
187	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	79.49	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
188	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	Na	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
189	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip tepat waktu	%	Na	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
190	Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	569,269.53	816,593.22	847,122.40	Dinas Kelautan dan Perikanan
191	Jumlah produksi garam rakyat	Ton	3,387.78	5	6,9	Dinas Kelautan dan Perikanan
192	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	%	18	20	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
193	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp.	11.813.500.000	11,933,560,000	11,991,430,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
194	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	436,735.72	442,959.60	460,858.10	Dinas Kelautan dan Perikanan
195	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	27.39	29	31	Dinas Kelautan dan Perikanan
196	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	29.43	30.62	31.86	Dinas Kelautan dan Perikanan
197	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	68.42	84.21	100.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
198	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp.	21,712,560,000	21,850,160,000	22.530.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
199	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	4,095,934.66	4,331,299.7	4,506,248.3	Dinas Kelautan dan Perikanan
200	Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	78.51	85	95	Dinas Kelautan dan Perikanan
201	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	94.01	97.80	100.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
202	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	Rp.	355,500,000.0	391,940,000	432.110.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
203	Produksi olahan ikan	Ton	5,911.60	6,150.43	6,398.91	Dinas Kelautan dan Perikanan
204	Persentase pengujian mutu produk perikanan	%	69.05%	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
205	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0.62	0.62	0.62	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
206	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Kunjungan	7,590,063	7,875,000	8,875,000	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
207	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	70,997	102,5	115	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
208	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	18.75	18.75	18.75	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
209	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	1.55	2	3,7	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
210	Prosentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	14.92	10	20	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
211	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	3,53	2	2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
212	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-5,22	2	2	
213	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-6,9	2	2	
214	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan	Rp	154,730,214,500	56,290,226,087	168,904,454,649	Dinas Tanaman

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Perkebunan					Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
215	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%	-2.03	1.16	1.20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
216	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	%	-6.98	2.12	2.20	
217	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	%	0.54	2.73	2.90	
218	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah	%	-0.23	2.23	2.37	
219	Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap luasan lahan pertanian	Poin	0,0073	0,0076	0,0084	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
220	Nilai Produksi Hasil Ternak (Juta)	Rp	9,689,799	10,248,954	31,993,041	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
221	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	%	89.21	10	10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
222	Persentase luas serangan OPT yang tertangani terhadap luas serangan OPT (%)	%	Na	80	88.2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
223	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	Na	50	60	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
224	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	Na	20	20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
						dan Perkebunan
225	Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	%	Na	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAN BIDANG KEHUTANAN						
226	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	%	13.97	21.15	35.23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
227	Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	%	11.85	11,91	12.02	
228	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	%	0.030	0.029	0.027	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
229	Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	%	3.28	3.57	3.74	
230	Jumlah laporan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Laporan	1	1	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
231	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH	%	belum dilakukan pengukuran	1.75	2.81	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
232	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif	%	16.67	20.83	29.17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
233	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	%	80	85	92	Dinas ESDM
234	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	%	na	10	13	Dinas ESDM
235	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor	%	na	1,3	1,5	Dinas ESDM

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Energi (Ton CO2 eq)					
236	Persentase Rumah Tangga berListrik	%	98,89	100	100	Dinas ESDM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
237	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
238	Prosentase Penerbitan SKA	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
239	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
240	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
241	Nilai Ekspor Perdagangan	\$ US	2,358,936,319	1,967,433,973	2,601,931,428.63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
242	Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan sertifikasi mutu produk	%	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
243	Prosentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	%	na	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
244	Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	35%	7.5%	8.5%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
245	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	2,1	2,5	3.5%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
246	Prosentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	2,2	4	5%	Dinas Perindustrian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
						dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
247	Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
248	Prosentase penempatan transmigrasi	%	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
249	Prosentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	%	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
250	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	100	100	100	Biro Organisasi
251	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang Difasilitasi, Dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
252	% Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	%	88,89	99,2	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
253	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	%	45,94	46,3	45,5	
254	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dan dievaluasi	%	100	100	100	Biro Hukum
255	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	
256	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	%	85	100	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
257	Prosentase capaian program prioritas pembangunan daerah	%	87	100	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
258	Presentase Kesesuaian rencana dengan pengadaan barang/ jasa	%	100	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
259	Presentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang / jasa	%	98,66	100	100	
Sekretariat Dewan						
260	% Prolegda yang terealisasi	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
261	% Jumlah Program Kerja DPRD yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
262	Jumlah Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya	Ranperda	15	15	45	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						
263	% Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD	%	97	100	100	Bappelitbangda
264	% Konsistensi Program RKPD terhadap APBD	%	100	100	100	
265	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah	%	90,03	91	93	
266	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N	%	100	100	100	
267	Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM	%	100	100	100	
268	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan	%	100	100	100	

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang ekonomi dan SDA Tahun N					
269	Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA	%	100	100	100	
270	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang Infrastruktur dan kewilayahan Tahun N	%	100	100	100	
271	Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	100	
	KEUANGAN					
272	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
273	Evaluasi Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
274	Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
275	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tepat Waktu	%		100	100	BKAD

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
276	Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
277	Perencanaan Kebutuhan BMD Ditetapkan Tepat Waktu	%		100	100	BKAD
278	Capaian Penetapan Status Penggunaan BMD Sesuai Ketentuan	%		100	100	BKAD
279	Cakupan Barang Milik Daerah Yang Dimanfaatkan	%		100	100	BKAD
280	Persentase Tanah Pemerintah Provinsi Yang Telah Bersertifikat	%		100	100	BKAD
281	persentasi keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100	100	100	Bapenda
282	Persentasi Peningkatan PAD	%	100	100	100	Bapenda
KEPEGAWAIAN						
283	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	%	63	65	65.6	BKD
284	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	%	90	85	87	BKD
285	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	93	93	95	BKD
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
286	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50	50	50	BPSDM
287	Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50	50	50	BPSDM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
288	Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	%	100	100	100	BPSDM
289	Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	Jumlah	5 Sertifikat	6 Sertifikat	8 Sertifikat	BPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
290	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.	%	Belum dilakukan pengukuran	30	50	Bappelitbangda
291	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi	%	11,32	13	16	Bappelitbangda
PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
292	Presentase Pelayanan Badan Penghubung Daerah	%	65	86	86	Badan Penghubung Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
Inspektorat Daerah						
293	% Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	76,29	81%	83	Inspektorat Daerah
294	% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	69	74%	76	
295	% OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
296	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
297	Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
298	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Inspektorat Daerah

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
299	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa	%	20	80	80	Kesbangpol
300	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat	%	na	80	90	Kesbangpol
301	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas	%	na	100	100	Kesbangpol
302	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	na	100	100	Kesbangpol
303	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda	%	na	100	100	Kesbangpol
PENUNJANG URUSAN						
304	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	Nilai	99,92	100,42	101,43	Semua OPD
305	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	Nilai	75,42	86,96	91,47	
306	Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	%	72,29	79,32	87,05	
307	Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	-27,35	10,2	15,16	

7.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomer 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Pemerintah daerah telah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPD 2024-2026 dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), dan satuan harga. RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN. Sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VII.4.
Penetapan Target Indikator SPM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Permendagri No 59 Tahun 2021)

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Rencana Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
			Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDIDIKAN					
1.1	Pendidikan Menengah					
1	warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	80,55	83,68	100	100
2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
1.2	Pendidikan Khusus					
3	warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	80,84	82,73	100	100
4	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
2	KESEHATAN					
2.1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi					
5	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
2.2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi					
4	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Rencana Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
			Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7
3	PEKERJAAN UMUM					
3.1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota					
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota					
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
4	PERUMAHAN RAKYAT					
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi					
7	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi					
8	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi					
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100	100	100	100	100
6	SOSIAL					
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti					

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Rencana Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
			Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7
10	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100	35,12	7,4	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti					
11	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	100	3,88	15,22	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti					
12	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100	100	100	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti					
13	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100	100	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi					
14	Jumlah Warga Negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	15,63	100	100	100

Sumber : OPD Pengelola SPM Prov. Sulsel, Tahun 2022, diolah

7.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance.

Pilar pembangunan manusia SDGs dikelompokkan dalam beberapa sektor. Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan.

Dalam bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target tahun 2024 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) secara nasional belum ditetapkan, sehingga target provinsi untuk tahun 2024 juga belum dapat dirumuskan dalam dokumen RKPD 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana pinjaman dan hibah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan;
4. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun

fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah,

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini

kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

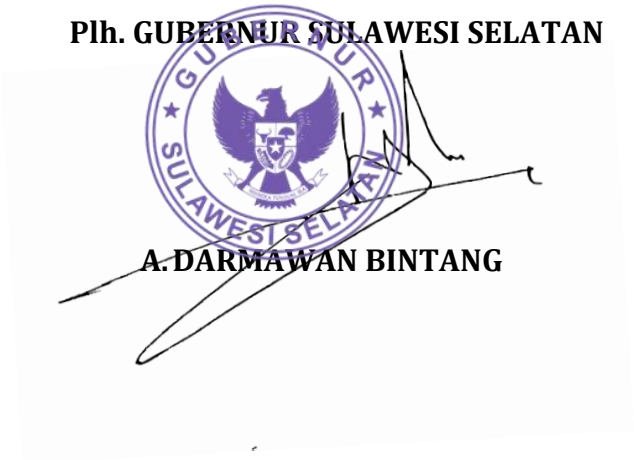
1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

8.2. Kesimpulan

1. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RPJMD Prov. Sulsel untuk Tahun 2024 yaitu : ***“pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter”*** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara

- sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Plh. GUBERNUR SULAWESI SELATAN





ꦱꦸꦭꦮꦺꦱꦶꦱꦺꦭꦠꦤ
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

